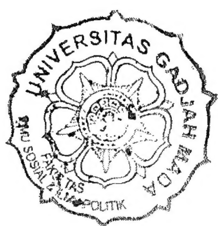
SEJARAH
INDONESIA MODERN
1200–2004



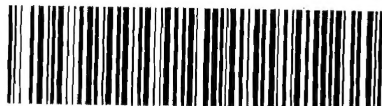


menghadirkan kajian-kajian terbaik tentang Indonesia
dalam berbagai aspeknya

SEJARAH INDONESIA MODERN 1200–2004



M. C. RICKLEFS



SERAMBI

Hanya Menerbitkan Buku

Diterjemahkan dari *A History of Modern Indonesia Since c. 1200 Third Edition*
karangan M.C. Ricklefs, terbitan Palgrave, cet. 1, 2001

Buku ini dipilih sebagai Buku Bermutu oleh Program Pustaka—
Yayasan Adikarya Ikapi melalui suatu proses seleksi penilaian kompetitif
dan selektif. Program Pustaka merupakan program bantuan penerbitan
buku-buku bermutu, hasil kerja sama antara Yayasan Adikarya Ikapi
dan The Ford Foundation, tetapi The Ford Foundation tidak terlibat
dalam proses seleksi naskah.

Penerjemah:
Satrio Wahono, Bakar Bilfagih, Hasan Huda,
Miftah Helmi, Joko Sutrisno, Has Manadi

Penyunting:
Husni Syawie dan M.C. Ricklefs

Pewajah Isi:
Galih Selo Seto dan Dinan Hasbudin AR

PT SERAMBI ILMU SEMESTA
Anggota IKAPI
Jln. Kemang Timur Raya No. 16, Jakarta 12730
www.serambi.co.id; info@serambi.co.id

Cetakan III: September 2007
Cetakan II: November 2005
Cetakan I: April 2005

ISBN: 979-16-0012-0

Dicetak oleh PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab percetakan

DEDIKASI:

Mengenang:
Para aktivis mahasiswa tahun 1998

Isi Buku

Daftar Ilustrasi

Daftar Peta

Prakata Edisi Pertama, 1981

INI ADALAH buku teks yang dirancang bagi mahasiswa yang serius ingin menyelidiki sejarah Indonesia sejak kedatangan Islam. Buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh orang-orang yang kajiannya terhambat oleh sejumlah besar karya pokok tentang Indonesia yang terlalu spesifik, banyaknya karya-karya ini yang ditulis dalam bahasa asing, dan sulitnya akses ke sebagian karya ini. Literatur yang ada juga kadang kala terlalu menekankan aspek kolonial atau, kalau tidak, keunikan Indonesia, dan tidak memberikan kronologi yang jelas yang akan mengarahkan para mahasiswa. Karena itu, buku ini bertujuan memberikan sebuah narasi yang mendasar, namun rinci, tentang sejarah Indonesia sejak tahun ± 1300, sebuah pengantar tentang isu-isu penting dari periode tersebut, dan sebuah panduan terhadap sumber-sumber sekunder yang paling penting yang diterbitkan (atau sumber-sumber primer di mana tidak ada sumber-sumber sekunder yang memadai). Jadi, tujuan saya adalah memfasilitasi para mahasiswa untuk melangkah maju ke tingkat kajian yang lebih tinggi. Kebutuhan akan sebuah buku semacam itu telah nyata selama beberapa waktu, tapi baru saat-saat inilah kajian tentang sejarah Indonesia dapat mencapai tingkat cakupan dan kecanggihan atas keseluruhan periode tersebut yang memadai bagi lahirnya buku teks semacam ini. Kesenjangan-kesenjangan penting tetap ada dalam pengetahuan kita, namun masalah-masalah utama telah diselidiki sekarang.

Sejarah tertulis Indonesia tidak bermula dari tahun dimulainya buku ini, melainkan sekitar seribu tahun sebelumnya. Prasasti-prasasti yang tertua dari kepulauan Indonesia terdapat pada tujuh buah yupa di Kutai, Kalimantan Timur, yang berdasarkan paleografi bertarikh tahun ± 400 Masehi. Rujukan-rujukan dalam

bahasa Cina juga terdapat dari masa yang sangat kuno. Sumber-sumber asli dalam negeri dan catatan-catatan berbahasa Cina telah memungkinkan para sarjana untuk merekonstruksi sebagian besar sejarah kerajaan-kerajaan pra-Islam di Indonesia, yang mencakup beberapa kerajaan besar zaman kuno. Satu yang terbesar dari kerajaan-kerajaan itu, Majapahit, dibahas secara singkat dalam Bab II semata-mata karena masa kerajaan ini tercakup dalam batasan kronologi buku ini. Kerajaan-kerajaan pra-Islam tersebut beragama Hindu-Budha dan mereka meninggalkan banyak khazanah literatur dan artistik yang, seperti akan dilihat dalam Bab V, terus berpengaruh hingga lama setelah kedatangan Islam. Tradisi-tradisi sosial, administrasi, dan politik dari negara-negara ini juga mempunyai pengaruh yang tetap. Bukti dan penafsiran dari periode awal ini masih mengandung banyak persoalan dan sangat membutuhkan kajian lebih lanjut. Karena alasan ini, saya memutuskan untuk melepaskannya dari cakupan buku ini. Beberapa karya penting tentang Majapahit didaftar dalam catatan dan acuan untuk Bab II. Tentang kerajaan-kerajaan pra-Islam lainnya, lihat Krom, *Hindoe-Javaansche geschiedenis*; Coedès, *Le ètats hindouisés* (terjemahan Inggrisnya berjudul *Indianized states of Southeast Asia*); Wolters, *Early Indonesian commerce*; dan esai van Naerssen dalam van Naerssen dan de Iongh, *Economic and administrative history of early Indonesia*. (Untuk rincian terbitan, pembaca harus merujuk ke bibliografi pada akhir buku ini.)

Dalam pandangan saya, periode sejak tahun ± 1300 telah menjadi sebuah unit sejarah yang padu, yang dalam buku ini disebut Sejarah Indonesia Modern. Tentu saja, ada sub-sub periode yang penting dalam sejarah Indonesia modern, seperti tercermin dalam pembagian buku ini ke dalam bagian-bagian dan bab-bab. Ada tiga unsur fundamental yang memberikan kesatuan historis terhadap periode ini. Yang pertama adalah unsur kebudayaan dan agama: islamisasi Indonesia yang dimulai tahun ± 1300 dan berlanjut hingga hari ini. Yang kedua adalah unsur topik: saling pengaruh antara orang Indonesia dan orang Barat yang dimulai tahun ± 1500 dan masih berlanjut. Yang ketiga adalah historiografi: sumber-sumber primer sepanjang periode ini ditulis hampir secara eksklusif dalam bahasa-bahasa Indonesia modern (Jawa, Melayu, dan seterusnya, bukannya Jawa Kuno atau Melayu Kuno) dan dalam bahasa-bahasa Eropa. Antara tahun ±

1300 sampai ± 1500, unsur-unsur ini muncul dan terus ada sejak saat itu.

Penulis setiap buku teks sejarah harus memutuskan apakah akan lebih mengistimewakan tema-tema penafsiran yang luas ataukah perkembangan peristiwa-peristiwa yang terinci dan terkadang membingungkan. Pengalaman saya menunjukkan, para mahasiswa merasa bahwa pembahasan intepretatif lebih mudah dipahami tetapi kurang bermanfaat dibanding narasi rinci. Saya sendiri pada prinsipnya lebih memilih narasi rinci, karena jika peristiwa pokoknya dikemukakan, pembaca akan lebih mudah menarik generalisasi mereka sendiri atau membantah generalisasi pihak lain. Karena itu, saya memastikan bahwa buku ini akan mengutamakan bukti sejarah yang terinci. Sama sekali tidak ada upaya di sini untuk membebankan sintesa baru apa pun terhadap sejarah Indonesia, meskipun tentu saja pandangan-pandangan saya ikut tersertakan di sepanjang buku ini.

Buku ini mengutamakan sejarah Jawa lebih besar daripada yang mungkin dianggap sepantasnya. Ada empat alasan untuk ini. Pertama, sejarah Jawa telah lebih banyak dikaji daripada sejarah pulau-pulau lain dan, karena itu, lebih dikenal. Kedua, penduduknya mewakili lebih dari separuh penduduk Indonesia. Ketiga, ia telah menjadi pusat dari kebanyakan sejarah politik, baik di masa kolonial maupun masa kemerdekaan, dan menyebarkan pengaruh terhadap wilayah lain yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh yang disebarkan oleh wilayah-wilayah lainnya, sehingga mengandung arti yang lebih penting bagi sejarah Indonesia secara keseluruhan. Keempat, atas wilayah inilah seluruh penelitian saya terpusat, dan unsur pribadi ini tentu saja memengaruhi buku ini. Penelitian lebih lanjut pasti akan memungkinkan untuk mengkaji wilayah luar Jawa secara lebih memadai di masa depan daripada kondisinya sekarang ini.

Semua ilmuwan hanya menguasai tidak lebih dari sebagian kecil sumber-sumber primer untuk topik yang dicakup dalam buku ini, yaitu hampir tujuh abad sejarah kepulauan yang paling luas di dunia. Jadi, banyak bagian dari isi buku ini merupakan uraian atau ringkasan dari karya-karya orang lain, yang daftarnya diberikan dalam bibliografi. Seperti buku teks lainnya, buku ini pun pada beberapa kesempatan mungkin hanya semata-mata mengulang, atau bahkan menambah, kesalahan buku lain. Untuk

meminimalkan persoalan ini, saya telah meminta komentar beberapa teman dan rekan kerja atas draf buku ini. Banyak sekali bagian dari buku ini telah dibaca oleh Prof. C.D. Cowan, Prof. C. Fasseur, Dr. H.J. de Graaf, dan Dr. A.J.S. Reid. Dr. J.S. Bastin, Dr. P.B.R. Carey, Prof. James J. Fox, Dr. E.U. Kratz, Prof. J.D. Legge, Dr. Ruth T. McVey, Dr. P. Voorhoeve, dan Prof. P.J. Zoetmulder, SJ juga telah memberi saran-saran yang berharga atas beberapa pasal buku ini. Saya sangat berhutang budi kepada semua tokoh ini. Tentu saja, kesalahan yang ada tetap merupakan tanggung jawab saya. Saya berhutang terima kasih khusus kepada para mahasiswa saya yang telah membaca mayoritas draf buku ini, membantu saya untuk menentukan apa saja yang diperlukan, dan membesarkan hati saya untuk percaya bahwa buku ini memang berharga. Banyak orang Indonesia telah memberiku informasi yang tak ternilai untuk bab-bab akhir buku ini, tapi kebanyakan meminta supaya nama-nama mereka tidak disebutkan di sini.

M.C. Ricklefs

Prakata Edisi Kedua, 1993

SATU DEKADE setelah edisi pertama buku teks ini terbit, kajian tentang sejarah Indonesia maju pesat. Karena itu, jelas perlu dipersiapkan edisi baru jika buku ini ingin tetap berguna buat mahasiswa.

Penelitian telah dilakukan dalam semua bidang dengan hasil-hasil yang mengesankan. Sejarah ekonomi secara umum, sejarah pulau-pulau luar Jawa (terutama Bali), Jawa abad XIX, Sumatera abad XIX, sejarah abad XX secara umum dan khususnya zaman Revolusi dan tahun-tahun sejak 1965, semuanya bisa didapati dalam buku-buku yang baru diterbitkan. Karya-karya utama sintesa dan penafsiran juga telah terbit, khususnya *Carrefour javanais* karangan Lombard, sebuah karya yang begitu luas cakupannya sehingga tidak dapat dikutip dalam satu bab khusus mana pun dari buku ini. Terbitan-terbitan ini telah membukakan topik-topik baru sekaligus memberikan pandangan baru atas subjek-subjek yang sudah dikaji sebelumnya.

Dalam merevisi buku ini, saya telah menambahkan bagian-bagian baru dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada pada edisi pertama. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan dan mahasiswa yang telah menunjukkan kesalahan-kesalahan itu kepada saya sehingga memungkinkan edisi kedua ini menjadi lebih baik. Tambahan dan perubahan telah dilakukan di sana-sini sepanjang buku ini. Lebih banyak pasal telah ditambahkan tentang Jawa abad XIX dan Depresi tahun 1930-an. Ada lagi dua bab baru tentang periode sejak 1965. Tak heran, bibliografi pun menjadi jauh lebih banyak.

Saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah membaca dan mengomentari draf edisi yang telah direvisi ini: Prof. Anne Booth, Dr. Ian Brown, Prof. C. Fasseur, Prof. R. William Liddle,

Prof. A.J.S. Reid, Dr. Henk Schulte Nordholt, Dr. Helius Sjamsuddin, dan Dr. Adrian Vickers. Tentu saja, tak satu pun dari mereka yang memikul tanggung jawab atas teks akhir buku ini.

M.C. Ricklefs

Prakata Edisi Ketiga, 2001

SEJARAH DAN penulisan sejarah Indonesia telah berkembang pesat sejak edisi kedua buku ini terbit. Maka, munculnya sebuah edisi baru lagi menjadi keharusan.

Dalam edisi ini, ada bab-bab yang sepenuhnya baru tentang Indonesia barat di abad XVII dan XVIII dan tentang kurun yang dramatis sejak 1975. Penemuan nisan Sultan Sulaiman bin Abdullah bin al-Basir di Lamreh, bertarikh 608 H/1211 M, mengharuskan judul buku ini diubah. Dengan penemuan tersebut, maka sekarang sejarah Indonesia periode sejak kedatangan Islam bukan lagi sejarah sejak tahun ± 1300, melainkan sejak ± 1200. Bibliografi edisi ini telah bertambah dengan banyak karya kesarjanaan baru yang bagus-bagus.

Ada sejumlah amandemen dan pasal baru yang muncul di sepanjang buku ini, yang mencerminkan pemahaman dan pengetahuan sejarah kami yang baru dan yang mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terlihat sejak edisi terakhir terbit. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah menunjukkan kesalahan-kesalahan itu kepada saya, dan saya juga berharap para pembaca edisi ketiga ini akan terus memberi masukan yang sama.

Dalam menulis edisi baru ini, saya, seperti biasa, telah meminta bantuan dan masukan dari sejumlah rekan. Terutama sekali saya berterima kasih kepada Prof. Barbara Andaya, Prof. Leonard Andaya, Prof. R.E. Elson, Prof. R. William Liddle, dan Mr. Blair King atas bantuan mereka. Bagaimanapun, segala kesalahan dan kekurangan tetap merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya. Pengolahan kata untuk edisi ini telah dilakukan oleh Jan Bretherton, orang yang keterampilan dan kesabaran yang biasa ditunjukkannya dalam melakukan tugas ini tidak ada bandingannya.

M.C. Ricklefs

Prakata untuk Terjemahan Indonesia Edisi Kedua

EDISI PERTAMA buku ini terbit dalam bahasa Inggris lebih dari 20 tahun yang lalu dan edisi pertama dalam bahasa Indonesia terbit 13 tahun yang lalu. Walaupun versi Inggris sudah beberapa kali di-*update* dengan edisi baru—edisi ketiga terbit tahun 2001—akan tetapi edisi baru dalam bahasa Indonesia baru bisa diterbitkan sekarang. Edisi ini berdasarkan edisi Inggeris yang ketiga, ditambah suatu bab terakhir yang baru. Saya banyak berterima kasih kepada Bapak Husni Syawie dari Penerbit Serambi yang mengundang saya untuk bekerja sama dalam mempersiapkan edisi baru ini.

Sejak edisi lama dalam bahasa Indonesia terbit pada tahun 1991, banyak sekali perubahan terjadi di Indonesia. Pada waktu itu, rezim Soeharto masih berkuasa dan tidak perlu heran bila suasana politik memengaruhi isi buku itu. Dalam versi bahasa Inggris, bab yang terakhir mengkritik korupsi dan penindasan Orde Baru. Akibatnya, buku Inggris itu tidak boleh dijual di Indonesia. Dalam edisi pertama bahasa Indonesia, saya tidak setuju untuk menulis suatu versi sejarah politik Orde Baru yang 'dibersihkan' sesuai dengan kemauan pemerintah. Saya membuang total bab yang terakhir dari versi Inggris itu dan menulis bab baru yang menyatakan, antara lain, "Bab ini hanya akan memberikan sedikit perhatian pada sejarah politik selama masa-masa semenjak tahun 1965. Kejadian-kejadian tersebut sangat sulit untuk dinilai dan peka untuk dibahas."

Sekarang, perubahan dalam Indonesia sangat menyeluruh. Perkembangan-perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan seba-

gainya pun boleh dibahas secara terang-terangan dalam edisi Indonesia ini. Saya tidak berani berharap bahwa semua pembaca akan setuju dengan interpretasi-interpretasi saya, akan tetapi saya sangat berharap bahwa semua pembaca akan melihat buku ini sebagai sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menolong untuk menjelaskan sejarah kepulauan dan negara Indonesia.

Bagi saya, edisi baru dalam bahasa Indonesia ini merupakan suatu cara untuk mengucapkan 'terima kasih' kepada Indonesia dan kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya, dan semua orang Indonesia lain yang selalu menerima saya dengan baik sejak 40 tahun yang lalu. Kehidupan saya sangat diperkaya oleh pengalaman di Indonesia. Dengan buku ini, saya ingin membalas kebaikan itu dengan suatu sumbangan yang, walaupun kecil, semoga bermanfaat.

M.C. Ricklefs

Melbourne, Australia
Oktober 2004

Abreviasi dan Akronim

AMS	Algemcene Middelbare Scholen, Sekolah Umum Tingkat Menengah
ASEAN	Association of South East Asian Nations, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
CSI	Central Sarekat Islam, Markas Besar Sarekat Islam
DPR(-GR)	Dewan Perwakilan Rakyat (-Gotong Royong)
f.	florin/gulden
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
GDP	gross domestic product, hasil kotor domestik
GNP	gross national product, hasil kotor nasional
H	tahun Hijrah
HIS	Hollandsch-Inlandsche School, Sekolah Belanda Pribumi
ICMI	Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia
IGGI	Inter-Govermental Group on Indonesia, Kelompok Antar-Pemerintah untuk Indonesia
IMF	International Monetary Fund, Dana Keuangan Internasional
LSM	lembaga swadaya masyarakat
ISDV	Indische Sociaal-Democratische Vereniging, Perserikatan Sosial Demokrat Hindia
J	tahun Jawa
KNIP	Komite Nasional Indonesia Pusat
l.	lahir
M	tahun Masehi
m.	memerintah
MIAI	Majelis Islam A'laa Indonesia
MPR(S)	Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara)

MULO	Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Pendidikan Rendah yang Lebih Diperpanjang
NU	Nahdatul Ulama/Nahdlatul Ulama
OPEC	Organization of Petroleum Exportris Countries, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak
OPM	Organisasi Papua Merdeka
OSVIA	Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren, Sekolah Latihan untuk Para Pejabat Pribumi
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
PDI	Partai Demokrasi Indonesia
PDI-P	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
PKI	Partai Komunis Indonesia
PNI	Partai Nasional Indonesia
PNI-Baru	Pendidikan Nasional Indonesia
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PRRI	Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
PSI	Partai Sosialis Indonesia
PSII	Partai Sarekat Islam Indonesia
RIS	Republik Indonesia Serikat
Rp.	Rupiah
S	tahun Saka
SI	Sarekat Islam
SOBSI	Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
STOVIA	School tot Opleiding van Inlandsche Artsen, Sekolah untuk Latihan Dokter-Dokter Pribumi
URSS Uni Republik- Republik Sovyet Sosialis	
VOC	Vereenigde Oost-Indische Compagnie, Perserikatan Maskapai Hindia Timur
w.	wafat

I

Lahirnya Zaman Modern

Bab 1 ....

Kedatangan Islam

PENYEBARAN ISLAM merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, tapi juga yang paling tidak jelas. Tampaknya, para pedagang muslim sudah ada di sebagian wilayah Indonesia selama beberapa abad sebelum Islam menjadi agama yang mapan dalam masyarakat-masyarakat lokal. Kapan, mengapa, dan bagaimana konversi penduduk Indonesia ini mulai terjadi telah diperdebatkan oleh beberapa ilmuwan. Tetapi, kesimpulan pasti tidak mungkin dicapai karena sumber-sumber yang ada tentang islamisasi sangat langka dan sering sangat tidak informatif. Secara umum, ada dua proses yang mungkin telah terjadi. Pertama, penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Proses kedua, orang-orang asing Asia (Arab, India, Cina, dll.) yang telah memeluk agama Islam tinggal secara tetap di suatu wilayah Indonesia, kawin dengan penduduk asli, dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu, atau suku lainnya. Kedua proses ini mungkin sering terjadi bersama-sama. Dan, apabila sedikit petunjuk yang masih ada tadi menunjukkan, misalnya, bahwa suatu dinasti muslim telah berkedudukan mapan di suatu wilayah, maka sering kali mustahil untuk mengetahui mana yang lebih berperan di antara kedua proses itu.

Dapat dipastikan bahwa Islam sudah ada di negara bahari Asia Tenggara sejak awal zaman Islam. Dari masa Khalifah Ketiga, 'Utsman (644–56), utusan-utusan muslim dari Tanah Arab mulai tiba di istana Cina. Setidaknya pada abad IX sudah ada ribuan pedagang muslim di Kanton. Kontak-kontak antara Cina dan dunia Islam itu terpelihara terutama lewat jalur laut melalui perairan Indonesia. Karena itu, tak aneh bila orang-orang Islam tampak memainkan peran penting dalam urusan-urusan negara-

perdagangan yang besar di Sumatera yang beragama Budha, Sriwijaya, yang didirikan pada pada akhir abad VII. Antara tahun 904 dan pertengahan abad XII, utusan-utusan dari Sriwijaya ke istana Cina memiliki nama Arab. Pada tahun 1282, raja Samudera di Sumatera bagian utara mengirim dua utusan bernama Arab ke Cina. Sayangnya, kehadiran muslim-muslim dari luar di kawasan Indonesia tidak menunjukkan bahwa negara-negara Islam lokal telah berdiri, tidak juga bahwa telah terjadi perpindahan agama dari penduduk lokal dalam tingkat yang cukup besar.

Bukti yang paling dapat dipercaya mengenai penyebaran Islam dalam suatu masyarakat lokal Indonesia adalah berupa prasasti-prasasti Islam (kebanyakan batu-batu nisan) dan sejumlah catatan para musafir. Batu nisan muslim tertua yang masih ada, yang tarikhnya terbaca jelas, ditemukan di Leran, Jawa Timur, dan bertarikh tahun 475 H (1082 M). Ini nisan seorang wanita, putri seseorang yang bernama Maimun. Akan tetapi, disangsikan apakah kuburan asal nisan itu benar-benar ada di Jawa, ataukah batu itu, karena beberapa alasan (misalnya sebagai pemberat pada sebuah kapal), dipindahkan ke Jawa beberapa waktu sepeninggal wanita itu. Mana pun yang benar, karena si almarhumah tampaknya seorang muslim non-Indonesia, maka batu ini tidak memberi kejelasan apa pun mengenai mapannya agama Islam di tengah-tengah penduduk Indonesia.

Petunjuk pertama tentang muslim Indonesia berkaitan dengan bagian utara Sumatera. Di permakaman Lamreh ditemukan nisan Sultan Sulaiman bin Abdullah bin al-Basir, yang wafat pada tahun 608 H/1211 M. Ini merupakan petunjuk pertama tentang keberadaan kerajaan Islam di wilayah Indonesia. Pada waktu musafir Venesia, Marco Polo, singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292, dia mengenal Perlak sebagai sebuah kota Islam, sedangkan dua tempat di dekatnya, yang disebutnya 'Basma(n)' dan 'Samara', bukanlah kota Islam. 'Basma(n)' dan 'Samara' sering diidentifikasi sebagai Pasai dan Samudra, tetapi pengidentifikasian ini mengandung persoalan. Mungkin 'Samara' bukanlah Samudra atau, jika keduanya sama, Polo telah keliru menyatakan kota ini sebagai bukan kota Islam, karena batu nisan penguasa pertama Samudra yang muslim, Sultan Malik as-Salih, telah ditemukan di sana, bertarikh tahun 696 H (1297 M). Batu-batu nisan lain yang bertarikh setelah itu menegaskan bahwa bagian dari Sumatera Utara ini terus berada di

bawah kekuasaan Islam. Musafir Maroko, Ibn Battuta, melewati Samudra dalam perjalanannya ke dan dari Cina pada tahun 1345 dan 1346, dan mendapati bahwa penguasanya adalah seorang pengikut mazhab-fikih Syafi'i. Hal ini menegaskan bahwa mazhab yang kelak mendominasi Indonesia itu sudah hadir sejak masa-masa sangat awal, walaupun ada kemungkinan bahwa ketiga mazhab Sunni lainnya (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) juga sudah ada pada masa-masa awal itu.

Dua buah batu nisan yang berasal dari akhir abad XIV dari Minye Tujoh di Sumatera Utara tampaknya membuktikan terus berlangsungnya peralihan budaya di sana. Kedua batu itu berbentuk sama, tetapi batu yang satu memuat prasasti dengan bahasa Arab, dan batu lainnya memuat prasasti dengan bahasa Melayu Kuno dan berhurufkan Sumatera Kuno, tetapi sama-sama bersifat Islam. Keduanya menunjukkan tahun meninggalnya seorang putri almarhum Sultan Malik as-Zahir. Walaupun bulan, tanggal, dan harinya sama, kedua batu nisan itu berbeda sepuluh tahun (781 H dan 791 H/1380 M dan 1389 M). Tampaknya ada kemungkinan terjadinya kekeliruan pada salah satu angka tahun itu; kedua prasasti itu tampaknya mengacu kepada wanita yang sama, yang berarti wanita itu diabadikan dengan dua prasasti yang menggunakan dua macam bahasa dan dua macam tulisan. Sesudah masa itu, semua dokumen dari Sumatera Utara ditulis dengan tulisan Arab.

Dari abad XIV masih dapat diperoleh bukti mengenai penyebaran agama Islam ke Brunai, Trengganu (di Malaysia timur-laut sekarang), dan Jawa Timur. Prasasti berbahasa Arab pada batu nisan dari Brunai memuji-muji seorang penguasa yang telah wafat yang disebut Sultan (Arab) ataupun Maharaja (Sansekerta) Brunai; sekalipun tak bertarikh, Chen berhujah bahwa nisan itu pasti dibuat di Quanzhou (Kwangchow), Cina Selatan, dan diimpor dari sana pada awal-awal abad XIV, yang pasti sebelum tahun 1366. Batu nisan lainnya mencatat dalam bahasa Cina kematian seorang Cina di Brunai pada tahun 1264 yang tampaknya seorang muslim. Batu Trengganu merupakan sebuah fragmen dari suatu maklumat hukum. Namun, tarikh pada bagian akhirnya kelihatan tidak lengkap, dan rentang tarikh yang mungkin bagi prasasti ini adalah antara tahun 1302 dan 1387 M. Batu itu tampaknya melambangkan masuknya hukum Islam ke

suatu daerah yang sebelumnya bukan daerah Islam, seperti terlihat pada lebih menonjolnya penggunaan kata-kata Sansekerta daripada kata-kata Arab, bahkan untuk menyebutkan kata sepenting 'Tuhan', yang pada satu tempat dinamakan *dewata mulia raya* dan bukannya *Allah*.

Serangkaian batu nisan yang sangat penting ditemukan di kuburan-kuburan di Jawa Timur, yaitu di Trawulan dan Tralaya, di dekat situs istana Majapahit yang Hindu-Budha (lihat bab 2). Batu-batu itu menunjukkan makam orang-orang Muslim, tapi dengan satu pengecualian, semua tarikhnya menggunakan tahun Saka India bukannya tahun Hijriah Islam dan menggunakan angka-angka Jawa Kuno bukannya angka-angka Arab. Tarikh Saka dipakai oleh istana-istana Jawa dari zaman Jawa Kuno hingga tahun 1633 M. Digunakannya tarikh ini dan angka-angka tahun Jawa Kuno pada batu-batu nisan itu menunjukkan bahwa makam-makam itu, hampir dapat dipastikan, merupakan tempat dimakamkannya orang-orang muslim Jawa, bukan muslim non-Jawa. Batu nisan pertama ditemukan di Trawulan yang bertarikh S 1290 (1368–69 M). Di Tralaya ada beberapa batu nisan yang tarikhnya berkisar antara S 1298 sampai S 1533 (1376–1611 M). Batu-batu ini memuat kutipan-kutipan dari Quran dan ungkapan-ungkapan saleh. Dari gaya hiasan pada beberapa batu nisan itu



Perkuburan di situs Trawulan, Jawa Timur

dan lokasinya yang dekat dengan situs ibu kota Majapahit, Damais menarik kesimpulan bahwa batu-batu itu mungkin untuk menandai kuburan para bangsawan Jawa, bahkan boleh jadi anggota-anggota keluarga raja.

Oleh karena itu, batu-batu Jawa Timur itu mengesankan bahwa beberapa elite Jawa memeluk Islam pada saat Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu-Budha itu sedang jaya-jayanya. Apalagi, batu-batu nisan itu merupakan bukti pertama yang masih ada tentang orang-orang Jawa yang beragama Islam. Tentu saja, karena bukti yang ada sangat sedikit, tidak dapat dikatakan secara pasti bahwa orang-orang yang dikubur itu adalah orang-orang Jawa yang pertama-tama memeluk Islam. Akan tetapi, batu-batu nisan Trawulan dan Tralaya membuat kita harus meragukan pendapat yang pernah dikemukakan oleh para ilmuwan bahwa agama Islam berasal dari daerah pesisir Jawa, dan pada mulanya merupakan suatu kekuatan agama dan politik yang menentang Majapahit.

Soal apakah para bangsawan Jawa di keraton Majapahit yang memeluk Islam lebih dahulu sebelum masyarakat pesisir ataukah sebaliknya, hal itu dipengaruhi oleh pandangan orang tentang relatif pentingnya peran para pedagang atau kaum sufi sebagai pembawa agama Islam; masalah ini akan di bicarakan di bawah ini. Tidak perlu disangsikan bahwa Majapahit, yang mempunyai hubungan politik dan perdagangan yang sangat luas di luar Jawa (lihat bab 2), telah berjumpa dengan para pedagang asing yang beragama Islam. Persoalannya adalah apakah para bangsawan itu terarik pada agama para pedagang. Para ulama yang beraliran mistik, yang mungkin mengaku memiliki kekuatan-kekuatan gaib, tampaknya lebih masuk akal sebagai pelaku-pelaku islamisasi di lingkungan istana Jawa yang sudah sejak lama terbiasa dengan spekulasi-spekulasi mistik Hindu dan Budha.

Kapan agama Islam mulai dianut oleh masyarakat-masyarakat pesisir utara Jawa masih belum jèlas. Dalam suatu pelayaran pada tahun 1413–5, seorang muslim Cina, Ma Huan, mengunjungi daerah pesisir Jawa. Ia melaporkan di dalam bukunya yang berjudul *Ying-yai Sheng-lan* ('Peninjauan Umum tentang Pantai-Pantai Samudra', diterbitkan pada tahun 1451) bahwa hanya ada tiga macam penduduk di Jawa: orang-orang muslim dari barat, orang Cina (beberapa di antaranya beragama Islam), dan orang Jawa yang menyembah berhala. Karena batu-batu nisan Trawulan dan

Tralaya menunjukkan adanya orang-orang Jawa yang beragama Islam di istana kira-kira lima puluh tahun sebelum masa itu, maka laporan Ma Huan mengesankan bahwa agama Islam memang sudah dianut oleh kalangan istana sebelum penduduk pesisir Jawa mulai beralih ke agama ini. Sebuah batu nisan muslim awal yang bertarikh 822 H (1419 M) ditemukan di Gresik, salah satu pelabuhan penting di Jawa Timur. Batu nisan ini terdapat di makam seorang yang bernama Malik Ibrahim, tetapi karena pria ini tampaknya bukan orang Jawa, maka batu nisan ini hanya menegaskan kehadiran orang muslim asing di Jawa, dan tidak menjelaskan lebih lanjut soal masuk Islamnya penduduk pesisir Jawa. Akan tetapi, tradisi-tradisi tokal, yang tidak memiliki bukti tertulis, menyebutkan bahwa Malik Ibrahim adalah salah seorang dari sembilan *wali* Islam yang pertama di Jawa *(wali sanga)*.

Sekitar awal abad XV, berdiri kota perdagangan Malaya yang besar, yaitu Malaka. Sejarahnya akan dibahas secara singkat dalam bab 2. Malaka merupakan pusat perdagangan yang paling penting di kepulauan bagian barat, dan oleh karenanya menjadi pusat bagi orang-orang muslim asing, dan tampaknya menjadi penopang penyebaran agama Islam. Batu-batu nisan yang ada dari Malaka dan tempat-tempat lainnya membuktikan penyebaran itu di Semenanjung Malaya. Batu nisan Sultan Malaka yang keenam, Mansyur Syah (w. 822 H/1477 M), telah ditemukan, sebagaimana juga batu nisan Sultan Pahang yang pertama, Muhammad Syah (w. 880 H/1475 M). Di Pengkalan Kempas di Negeri Sembilan ditemukan sebuah prasasti yang menunjukkan bahwa daerah itu sedang berada dalam masa peralihan menjadi daerah Islam pada tahun 1460-an. Prasasti itu terdiri atas dua bagian, yang satu ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Arab, dan bagian yang lainnya ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara India seperti yang digunakan pada prasasti Minye Tujoh. Batu itu menggunakan tarikh Saka India, dan agaknya menunjukkan kematian seorang pahlawan-lokal bernama Ahmat Majanu pada tahun 1385 S (1463–4 M).

Kembali ke Sumatera Utara, kuburan-kuburan dari akhir abad XV dan XVI membuktikan berdirinya negara-negara Islam selanjutnya di sana. Sultan Pedir yang pertama, Muzaffar Syah, dimakamkan pada tahun 902 H (1497 H), dan sultan yang kedua, Ma'ruf Syah, pada tahun 917 H (1511 M). Di ujung utara Sumatera Utara berdiri Kerajaan Aceh pada awal abad XVI; kerajaan

ini dengan cepat menjadi sebuah kerajaan Sumatera Utara yang paling kuat dan merupakan salah satu kerajaan terkuat di kawasan Malaya-Indonesia. Sultan pertama 'kekaisaran' Aceh ialah Ali Mughayat Syah, yang batu nisannya bertarikh 936 H (1530 M).

Di luar Jawa, Sumatera, Brunai, dan Semenanjung Malaya tidak terdapat satu pun bukti mengenai dianutnya agama Islam oleh orang-orang Indonesia sebelum abad XVI. Namun, cukup jelas bahwa Islam telah tersebar ke beberapa tempat yang lebih ke timur, karena di dekat Jolo (di kepulauan Sulu, Pilipina selatan) dulu terdapat sebuah batu nisan bertarikh 710 H (1310 M) yang merupakan tanda dari kubur seorang muslim yang tampaknya berkebangsaan asing tapi telah menjadi semacam penguasa daerah setempat. Banyak sumber legenda dari Mindanao dan Sulu, yaitu daerah-daerah Islam di Pilipina, yang mengungkapkan dibawanya agama Islam oleh orang-orang Arab dan Melayu dari kepulauan bagian barat. Ada kemungkinan bahwa orang-orang muslim Cina juga berperan dalam penyebaran agama Islam di kawasan itu.

Sebelum abad XVI, bukti yang tidak lengkap ini menunjukkan bahwa penyebaran agama Islam bermula di kepulauan bagian barat. Akan tetapi, tidak terlihat bahwa telah terjadi gelombang pengaruh Islam secara berkesinambungan dari satu daerah yang telah menerima agama baru itu ke daerah tetangga. Bukti itu hanya memberi beberapa gambaran singkat mengenai proses yang berlangsung, tetapi proses itu tampaknya rumit dan agak lamban. Pada awal abad XIII, agama Islam telah ada di Sumatera Utara; pada abad XIV di Malaya timur-laut, di Pilipina selatan, dan di kalangan beberapa bangsawan di Jawa Timur; dan pada abad XV di Malaka serta daerah-daerah lain di Semenanjung Malaya. Beberapa batu nisan atau catatan para musafir hanya memberikan petunjuk mengenai adanya orang-orang muslim pribumi di suatu daerah tertentu pada suatu waktu tertentu. Kenyataan bahwa tidak terdapat satu pun bukti mengenai islamisasi yang dapat ditemukan di tempat-tempat lainnya bukan berarti bahwa tidak ada orang-orang muslim di sana. Dan bukti yang dapat ditemukan pun tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih rumit, seperti berapa banyak penduduk Lamreh selain pihak penguasa yang beragama Islam pada tahun 1211 M, atau seberapa dalam agama Islam memengaruhi cara hidup atau pemikiran

religius orang-orang Indonesia yang pertama-tama masuk Islam. Seperti yang akan dilihat di dalam bab-bab berikutnya, islamisasi adalah suatu proses yang berlangsung terus hingga saat ini. Jangan dianggap bahwa begitu suatu daerah diketahui mempunyai seorang penguasa muslim maka proses islamisasi sudah selesai. Hal itu, sangat mungkin, lebih melambangkan awal daripada akhir islamisasi di kalangan rakyat.

Pada awal abad XVI, suatu sumber Eropa yang luar biasa membuka kemungkinan dilakukannya peninjauan secara umum mengenai agama Islam di Kepulauan Indonesia. Tomé Pires adalah seorang ahli obat-obatan dari Lisbon yang menghabiskan waktunya di Malaka dari tahun 1512 hingga 1515, segera setelah negeri itu ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Selama waktu itu, dia mengunjungi Jawa dan Sumatera, dan dengan sangat giat mengumpulkan informasi dari orang-orang lain mengenai seluruh daerah Malaya-Indonesia. Bukunya yang berjudul *Suma Oriental* menunjukkan dirinya sebagai pengamat yang tajam, yang deskripsi-deskripsinya jauh lebih hebat daripada deskripsi para penulis Portugis lainnya. Buku itu sarat dengan aneka materi lain yang tak ternilai, tetapi di dalam bab ini kita hanya akan memfokuskan perhatian pada apa yang diamati Pires dalam kaitannya dengan agama Islam. Tentu saja petunjuk yang diberikannya tidak dapat dianggap akurat seluruhnya. Akan tetapi, banyak sekali hal yang ditulisnya tampak cocok dengan fragmen-fragmen bukti lain yang sudah disebutkan terdahulu, dan deskripsinya tidak mengandung sama sekali pernyataan-pernyataan yang nyata-nyata salah mengenai daerah yang bersangkutan, sehingga buku itu tampaknya dapat bertahan sebagai salah satu dokumen yang terpenting mengenai islamisasi di Indonesia.

Menurut Pires, di zamannya itu, sebagian besar raja-raja Sumatera beragama Islam, tetapi masih tetap ada negeri-negeri yang belum menganut Islam. Mulai dari Aceh di sebelah utara dan terus menyusur daerah pesisir timur hingga Palembang, para penguasanya beragama Islam. Tapi di sebelah selatan Palembang dan di sekitar ujung selatan Sumatera hingga pesisir barat, sebagian besar penguasanya masih nonmuslim. Di Pasai terdapat suatu komunitas dagang internasional yang sedang berkembang pesat, dan Pires menghubungkan masuknya Islam pertama kali di Pasai dengan 'kelicikan' para pedagang muslim itu. Akan tetapi, penguasa Pasai belum dapat mengubah agama penduduk

daerah pedalaman. Demikian pula, raja Minangkabau dan seratus orang pengikutnya disebut-sebut beragama Islam, walaupun penduduk Minangkabau lainnya belum. Akan tetapi, Pires mengatakan bahwa setiap hari agama Islam selalu mendapatkan pemeluk-pemeluk baru di Sumatera.

Daerah Jawa Barat yang berbahasa Sunda belum menganut agama Islam pada masa Pires, malahan memusuhinya. Meskipun Pires tidak menyebutkan namanya, daerah yang dimaksud adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang menganut agama Hindu-Budha, yang tentang sejarahnya hampir tidak ada sumber yang dapat diandalkan. Islamisasi daerah ini yang dilakukan melalui cara penaklukan pada abad XVI akan dibahas dalam bab 4.

Jawa Tengah dan Jawa Timur, daerah-daerah tempat menetapnya suku bangsa Jawa, tetap diklaim sebagai daerah kekuasaannya oleh raja Hindu-Budha yang hidup di daerah pedalaman Jawa Timur di Daha (Kediri). Akan tetapi, daerah-daerah pesisir sampai sebelah timur Surabaya sudah memeluk agama Islam dan sering terlibat peperangan dengan daerah pedalaman, terkecuali Tuban yang masih tetap setia kepada raja Hindu-Budha. Beberapa raja muslim di daerah pesisir adalah orang Jawa. Beberapa di antaranya bukan orang Jawa asli, melainkan orang Cina, India, Arab, dan Melayu yang telah menetap di daerah pesisir dan mendirikan pusat-pusat perdagangan. Pires menggambarkan proses jawanisasi yang terjadi di kalangan kelompok-kelompok yang disebut terakhir dengan mengatakan bahwa mereka begitu mengagumi budaya istana Hindu-Budha dan berusaha menyamai gayanya dan, dengan demikian, mereka pun menjadi orang Jawa. Batu-batu nisan dari abad XIV yang berasal dari Trawulan dan Tralaya yang telah dibicarakan di depan memberi kesan bahwa pihak istana Hindu-Budha dapat, paling tidak kadang-kadang, bersikap toleran terhadap adanya orang-orang muslim dalam lingkungannya. Oleh karena itu, peperangan antara daerah pesisir dan daerah pedalaman yang digambarkan Pires hendaknya jangan dipandang sebagai akibat dari pertentangan agama dan budaya yang tidak dapat dipertemukan, karena dalam hal ini telah terjadi proses asimilasi budaya ketika agama Islam bertemu dengan budaya tinggi Jawa Kuno yang kuat. Proses asimilasi dan akomodasi itu terus berlangsung sampai lama sesudah mayoritas penduduk Jawa memeluk Islam, setidaknya secara nominal, dan telah me-

nyebabkan Islam Jawa agak berbeda gayanya dengan Islam Malaya atau Sumatera. Peperangan antara daerah pesisir dan daerah pedalaman juga terus berlanjut sampai lama sesudah kedua daerah itu sama-sama menganut agama Islam. Akar persoalannya mungkin dapat ditemukan pada pertentangan-pertentangan politik dan ekonomi antara kedua daerah itu, yang akan dibicarakan



Mesjid Wapauwe, Hila, Ambon, yang menurut cerita setempat dibangun pada 1414

dalam bab-bab berikut. Di sebelah timur Surabaya, daerah pesisir Jawa masih belum menganut Islam, dan agaknya tetap menganut agama Hindu karena masih dilakukannya upacara pembakaran janda. "Jadi," kata Pires, "mereka kehilangan jasad dalam kehidupan ini dan arwah mereka terbakar di kehidupan mendatang" (Cortesão, *Suma Oriental,* 198).

Di Kalimantan, Pires melaporkan bahwa Brunai mempunyai seorang raja yang baru saja masuk Islam. Bagian-bagian Kalimantan lainnya adalah nonmuslim, seperti halnya pulau-pulau Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, dan Timor di sebelah timur Pulau Jawa. Orang-orang Bugis dan Makasar di Sulawesi Selatan juga belum menganut Islam.

Akan tetapi, Islam berkembang di "Kepulauan Rempah-rempah" Maluku di Indonesia Timur. Para pedagang muslim dari Jawa dan Melayu menetap di pesisir Banda, tetapi tidak ada seorang raja pun di sana, dan daerah pedalaman masih dihuni oleh penduduk nonmuslim. Ternate, Tidore, dan Bacan mempunyai raja-raja muslim. Penguasa-penguasa Tidore dan Bacan memakai gelar India "raja", tetapi penguasa Ternate telah menggunakan gelar "sultan", dan Raja Tidore telah bernama Arab, al-Mansur.

Semua bukti itu memberi suatu gambaran umum mengenai perkembangan Islam dari awal abad XIII hingga awal abad XVI. Berawal dari bagian utara Sumatera, Islam telah tersebar sampai ke daerah-daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia Timur. Daerah-daerah yang paling mantap Islamnya adalah daerah-daerah yang paling penting dalam perdagangan internasional: pesisir-pesisir Sumatera di Selat Malaka, Semenanjung Malaya, pesisir utara Jawa, Brunei, Sulu, dan Maluku. Menurut keterangan Tomé Pires, tidak semua daerah perdagangan yang penting telah diislamkan. Misalnya, Timor dan Sumba, daerah penghasil kayu cendana, masih tetap non-Islam. Adanya perdagangan internasional hampir tidak menolong menjelaskan mengapa sudah ada bangsawan-bangsawan yang beragama Islam di istana Majapahit pada abad XIV, atau mengapa Trengganu merupakan daerah Malaya yang pertama tempat islamisasi berlangsung. Namun demikian, tampaknya memang ada semacam kaitan antara perdagangan dan Islam.

Dengan demikian, penentuan waktu secara umum tentang awal islamisasi, sampai batas tertentu, dapat ditetapkan, namun

masih terdapat pertanyaan-pertanyaan penting yang menimbulkan banyak perdebatan. Setelah beberapa abad lamanya orang-orang muslim asing singgah atau menetap di Indonesia, mengapa pengislaman orang-orang Indonesia baru terjadi pada abad XIII, dan terutama pada abad XIV serta XV? Berasal dari manakah Islam yang masuk ke Indonesia? Dan bagaimanakah cara Islam berhasil menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia?

Dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu, beberapa ahli menganggap pantas berpaling dari sumber-sumber sejarah primer yang dibicarakan di atas ke legenda-legenda Indonesia yang mencatat bagaimana penduduk Indonesia sendiri menceritakan kisah pengislaman mereka. Semua legenda itu baru muncul lama sesudah kedatangan Islam; meskipun dongeng-dongeng itu mungkin berisi cerita-cerita kuno, namun sebagian besar isinya hanya dikenal dalam versi-versi dari abad XVIII dan XIX. Dongeng-dongeng itu bukanlah catatan-catatan sejarah yang dapat dipercaya, tetapi karena di dalamnya terkandung titik berat yang merata pada peran-peran yang dimainkan oleh pengetahuan gaib dan kekuatan-kekuatan magis, pada asal-usul non-Indonesia dan koneksi-koneksi dagang para ulama yang pertama, dan pada suatu proses pengislaman yang bermula di kalangan kaum elite dan berlanjut ke golongan-golongan di bawahnya, maka dongeng-dongeng itu dapat menyingkap kejadian-kejadian yang sebenarnya.

Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan salah satu sumber yang demikian itu. Naskahnya berbahasa Melayu, tetapi disalin di Demak (Jawa Utara) pada tahun 1814. Legenda ini menceritakan bagaimana Islam masuk ke Samudra; batu nisan sultan yang pertama, Malik as-Salih, yang bertarikh 1297 M telah dibicarakan di atas. Dalam cerita ini disebutkan bahwa Khalifah Mekah mendengar tentang adanya Samudra dan memutuskan untuk mengirim sebuah kapal ke sana untuk memenuhi ramalan Nabi Muhammad bahwa suatu hari nanti akan ada sebuah kota besar di timur yang bernama Samudra, yang akan menghasilkan banyak orang suci. Kapten kapal itu, Syekh Ismail, singgah di India untuk menjemput seorang sultan yang telah mengundurkan diri dari tahta karena ingin menjadi orang suci. Penguasa Samudra, Merah Silau (atau Silu), bermimpi bahwa Nabi menampakkan diri kepadanya, mengalihkan secara gaib pengetahuan tentang Islam kepadanya dengan cara meludah ke dalam mulutnya, dan mem-

berinya gelar Sultan Malik-as-Salih. Setelah terbangun, sultan yang baru itu mendapati bahwa dia dapat membaca Quran walaupun dirinya belum pernah diajar, dan bahwa dia telah dikhitan secara gaib. Dapat dimengerti bahwa para pengikutnya merasa takjub atas kemampuan sultan mengaji dalam bahasa Arab. Kemudian kapal dari Mekah tadi tiba. Ketika Syekh Ismail mendengar pengucapan dua kalimat syahadat Malik as-Salih, maka dia pun melantiknya menjadi penguasa dengan tanda-tanda kerajaan dan jubah-jubah kenegaraan dari Mekah. Ismail terus mengajar penduduk bagaimana cara mengucapkan dua kalimat syahadat—bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Samudra, sedangkan orang suci berkebangsaan India tadi tetap tinggal untuk menegakkan agama Islam secara lebih kokoh di Samudra.

Sejarah Melayu merupakan naskah berbahasa Melayu lainnya, yang dikenal dalam beberapa versi. Satu naskah bertarikh 1021 H (1612 M), tetapi naskah ini hanya ada dalam salinan dari awal abad XIX. Bila *Hikayat Raja-Raja Pasai* bercerita tentang masuk Islamnya Samudra, *Sejarah Melayu* berisi suatu kisah mengenai masuk Islamnya Raja Malaka. Raja ini juga bermimpi bahwa Nabi menampakkan diri kepadanya, mengajarinya cara mengucapkan dua kalimat syahadat, memberinya nama baru Muhammad, dan memberitahukannya bahwa pada hari berikutnya akan tiba sebuah kapal dari negeri Arab yang mengangkut seorang ulama yang harus dipatuhinya. Setelah terjaga, raja itu mendapati bahwa dirinya telah dikhitan secara gaib, dan sewaktu mengulang terus-menerus pengucapan dua kalimat syahadat, anggota-anggota kerajaan yang lain (yang tidak mengerti bahasa Arab) merasa yakin bahwa rajanya telah gila. Kemudian kapal pun tiba, dan dari kapal itu turunlah Sayid Abdul Aziz untuk bersembahyang di pantai. Penduduk terheran-heran dan menanyakan arti dari gerakan-gerakan ritual itu. Raja memberi tahu bahwa kesemuanya itu sama seperti yang ada dalam mimpinya. Sesudah itu, para pejabat istana mengikutinya memeluk Islam. Raja itu pun menyandang gelar Sultan Muhammad Syah dan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk memeluk Islam. Sayid Abdul-Aziz sendiri kemudian menjadi guru raja.

Kedua naskah Melayu itu bebeda dengan dongeng-dongeng mengenai islamisasi di Jawa yang telah dikenal sampai sekarang ini. Kalau naskah-naskah Melayu itu memandang islamisasi se-

bagai suatu titik balik yang penting yang ditandai dengan tanda-tanda formal dari perubahan agama seperti khitanan, pengucapan dua kalimat syahadat, dan penggunaan nama Arab, sebaliknya dongeng-dongeng Jawa tidak mengungkapkan islamisasi sebagai suatu garis pemisah yang setajam itu. Hal itu agaknya sesuai dengan bukti yang dibicarakan terdahulu, yang memberi kesan bahwa suatu proses asimilasi sedang berlangsung di Jawa. Akan tetapi, dalam cerita-cerita Jawa, peristiwa-peristiwa ajaib masih tetap memainkan peranan penting.

Babad Tanah Jawi ('Sejarah Tanah Jawa') merupakan judul umum yang mencakup sejumlah besar naskah berbahasa Jawa yang beraneka ragam susunan dan uraiannya, dan tak satu naskah pun terdapat dalam salinan dari masa sebelum abad XVIII. Naskah-naskah ini menisbahkan pengislaman pertama orang-orang Jawa pada kegiatan sembilan wali *(wali sanga)*, namun nama-nama dan hubungan-hubungan di antara kesembilan orang ini berbeda-beda dalam berbagai naskah. Adalah mustahil mereduksi keanekaragaman ini menjadi daftar sembilan orang yang disepakati oleh semua naskah itu; memang beberapa naskah menyepakati adanya sembilan orang wali, namun mendaftar sepuluh nama. Akan tetapi, nama-nama berikut terdapat pada hampir semua naskah tersebut: Sunan Ngampel-Denta, Sunan Kudus, Sunan Muriya, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Sitijenar, Sunan Gunungjati, dan Sunan Walilanang. Nama wali yang kesepuluh, Sunan Bayat, juga kerap muncul.

Istilah *wali* yang diberikan kepada semua tokoh itu adalah kata Arab (yang berarti 'orang suci'), sedangkan gelar 'sunan' yang mereka pakai adalah kata Jawa. Asal kata *sunan* agak kurang jelas, tapi mungkin berasal dari kata *suhun* yang berarti 'menghormati'; di sini dalam bentuk pasifnya yang berarti 'dihormati'. Beberapa orang wali, namun tidak semuanya, konon merupakan keturunan non-Jawa. Beberapa di antaranya konon telah menuntut ilmu di Malaka (khususnya Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Walilanang). Beberapa wali lagi konon mempunyai hubungan komersial: Giri sebagai anak angkat seorang saudagar wanita, Bayat sebagai pegawai seorang saudagar beras wanita, dan Kalijaga sebagai seorang penjual rumput.

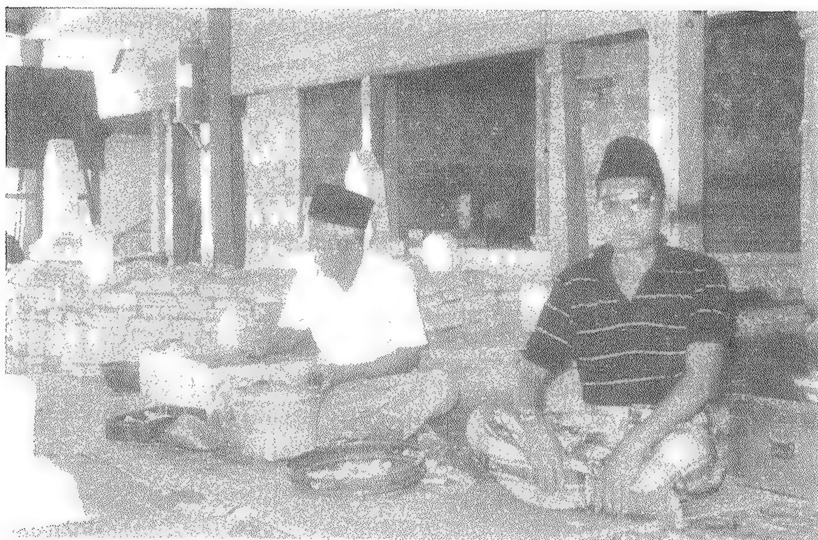
Cerita *Babad Tanah Jawi* tentang bagaimana Sunan Kalijaga terbimbing ke jalan yang benar sangat instruktif. Jelaslah bahwa tanda-tanda pengislaman yang formal (khitanan, pengucapan dua

kalimat syahadat, dan lain sebagainya) sama sekali tidak ada, sehingga sebenarnya tidak jelas apakah Kalijaga secara nominal sudah menjadi muslim pada waktu ia 'masuk Islam'. Di dalam cerita itu, Kalijaga disebutkan sebagai anak laki-laki Tumenggung Wilatikta yang mengabdi kepada Majapahit, yang afiliasi keagamaannya tidak ditegaskan. Namun, pemuda ini bernama Said, sebuah kata Arab. Setelah kalah main judi, Said menjadi perampok jalanan di pesisir utara. Pada suatu hari, Sunan Bonang melewati daerah itu dan didekati oleh Said, tetapi Bonang berkata kepadanya bahwa akan jauh lebih menguntungkan apabila ia merampok seseorang yang akan melewati daerah itu kemudian, yang berpakaian serba biru dan memakai sekuntum bunga sepatu berwarna merah di belakang telinganya. Said pun menuruti nasihat itu, dan tiga hari kemudian muncullah orang yang dikatakan oleh Sunan Bonang. Tentu saja, orang itu tak lain dan tak bukan adalah Bonang sendiri yang sedang menyamar. Ketika Said menyerangnya, Bonang mengubah dirinya menjadi empat orang. Said begitu terguncang karena pengalamannya itu, sehingga dia meninggalkan jalan sesat yang telah ditempuhnya selama ini dan kemudian hidup sebagai seorang petapa. Dia memakai nama Kalijaga, menjadi wali, dan kawin dengan saudara perempuan Sunan Gunungjati.

Sejarah Banten merupakan naskah berbahasa Jawa lainnya yang berisi cerita-cerita pengislaman. Sebagian besar naskah kronik ini bertarikh akhir abad XIX, tetapi dua di antaranya merupakan salinan dari naskah asli yang ditulis dalam tahun 1730-an dan 1740-an. Seperti halnya dongeng-dongeng di dalam *Babad Tanah Jawi*, ada banyak peristiwa ajaib di dalam naskah ini, tetapi soal pengislaman tidak digambarkan secara eksplisit, dan tidak ada penekanan pada pengucapan dua kalimat syahadat, pengkhitanan, dan lain-lainnya. Cerita tentang asal-usul Sunan Giri menjadi perhatian *Sejarah Banten*. Menurut karya ini, seorang suci berkebangsaan asing yang bernama Molana Usalam datang ke Balambangan di Ujung Timur Jawa, suatu daerah yang belum menganut agama Islam sampai akhir abad XVIII. Penguasa Balam bangan mempunyai seorang putri yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi putri itu ternyata sembuh ketika Molana Usalam memberinya buah pinang untuk dikunyah. Putri itu kemudian dikawinkan dengan Molana Usalam. Namun, ketika Molana meminta penguasa Balambangan untuk juga memeluk

Islam, penguasa itu pun menolaknya. Oleh karena itu, Molana Usalam pergi meninggalkan Balambangan dan istrinya yang sudah hamil. Ketika putri itu melahirkan bayi laki-laki, bayi itu dimasukkan ke dalam sebuah peti dan dibuang ke laut, seperti cerita Musa (yang terdapat dalam Surah XX Quran dan juga dalam kitab Injil). Peti itu akhirnya terdampar di pantai Gresik, tempat bayi itu kemudian tumbuh menjadi seorang muslim dan, belakangan, menjadi sunan yang pertama dari Giri. Perlu dicatat bahwa sejauh yang diketahui dewasa ini, dongeng-dongeng Melayu tidak memuat kisah-kisah seperti cerita Balambangan, di mana kekuatan gaib seorang suci yang berkebangsaan asing tidak cukup kuat untuk mendorong orang masuk Islam.

Cerita-cerita dongeng semacam itu tidak dapat memberikan banyak penjelasan mengenai kejadian-kejadian sebenarnya sekitar kedatangan agama Islam, tetapi paling tidak dongeng-dongeng itu benar-benar merefleksikan bagaimana generasi-generasi kemudian dari kaum muslim Indonesia melihat kembali proses islamisasi. Ada suatu perbedaan yang nyata dan penting antara dongeng-dongeng Melayu dan Jawa: dalam dongeng Melayu, islamisasi merupakan suatu titik balik yang penting yang ditegaskan dengan tanda-tanda konversi secara lahiriah yang jelas, sedangkan dalam dongeng Jawa, jarang sekali transisi yang di-



Para juru kunci makam Sunan Giri, yang menurut tradisi wafat pada ± 1506, Gresik, Jawa Timur

sertai dengan tanda-tanda yang jelas. Terdapat pula kesamaan yang penting antara kedua tradisi itu. Kedua-duanya mencerminkan memori-memori tentang asal-usul beberapa ulama awal yang nonpribumi, tentang peristiwa-peristiwa gaib yang menyertai islamisasi, dan tentang proses masuk Islam sebagai sesuatu yang bermula di kalangan kaum elite yang berkuasa di daerah setempat.

Dari pesisir utara Jawa didapatkan dua dokumen lagi yang membantu menambah substansi pada cerita mengenai islamisasi. Kedua naskah yang berbahasa Jawa itu berisi ajaran-ajaran Islam seperti yang diberikan di Jawa pada abad XVI. Walaupun sama-sama tidak bertarikh, namun kedua naskah itu dibawa pulang oleh ekspedisi Belanda yang pertama ke Jawa (1595–7) dan, oleh karenanya, pasti bertarikh sebelum 1597. Kedua-duanya bukanlah karya yang tersusun tentang ilmu agama. Naskah yang satu adalah sebuah *primbon* (buku penuntun) yang berisi catatan-catatan yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang murid dari seorang ulama. Naskah yang satu lagi dinisbahkan oleh G.W.J. Drewes kepada seorang ulama yang bernama Seh Bari dan berisi pertimbangan-pertimbangan terhadap serangkaian hal yang diperdebatkan. Kedua naskah itu bersifat ortodoks dan mistis. Kedua-duanya tidak mencerminkan kepentingan-kepentingan hukum yang berasal dari keempat mazhab Suni, tetapi lebih mencerminkan pertimbangan-pertimbangan metafisik dan etos asketik yang berasal dari mistik Islam, tasawuf, yang pada waktu itu diterima sebagai bagian dari dunia Islam Suni.

Sifat ortodoks kedua naskah itu sangat penting artinya. Islam Indonesia kelak adalah penuh bidah dan khurafat, suatu kenyataan yang mendorong munculnya gerakan-gerakan pembaharuan yang besar pada abad XIX dan XX. Oleh karena itu, naskah-naskah itu penting artinya untuk menunjukkan bahwa Islam yang sepenuhnya ortodoks diajarkan sejak mula pertama, setidak-tidaknya di beberapa daerah. Naskah-naskah tadi menunjukkan adanya beberapa penyesuaian dengan lingkungan-lingkungan Jawa. Sebagai contoh, Tuhan disebut dengan istilah Jawa *pangeran,* dan asketisme disebut dengan kata Jawa *tapa*. Kedua naskah itu menggunakan tulisan Jawa, yang merupakan perkembangan dari tulisan India, walaupun pada abad-abad kemudian, karya-karya keagamaan yang berbahasa Jawa kadang-kadang menggunakan tulisan Arab. Bagaimanapun juga, penyesuaian-penyesuaian dengan lingkungan Jawa itu tidak begitu penting; ajaran-ajaran yang terdapat

dalam kedua naskah itu dapat ditemukan pada semua komunitas sufi ortodoks dalam dunia Islam. Buku yang dinisbahkan kepada Seh Bari mengesankan bahwa sudut pandang ortodoks ini tidak dominan di seluruh Jawa, karena buku ini berisi bagian-bagian panjang yang menyerang doktrin-doktrin yang bersifat klenik. Khususnya, buku ini mengecam setiap pengidentifikasian Tuhan dengan makhluk manusia, yang merupakan bidah terburuk dalam Islam, sekalipun itu merupakan paham Hindu yang agung dan sebuah doktrin yang telah berlaku dalam beberapa kalangan muslim Jawa hingga abad sekarang.

G.W.J. Drewes mengemukakan bahwa naskah ketiga yang berbahasa Jawa, sebuah "aturan etika muslim", juga ditulis pada masa-masa awal proses islamisasi di Jawa. Namun, usia naskah ini kurang dapat dipastikan dibandingkan primbon abad XVI dan karya-karya Seh Bari. Naskah "aturan" ini mungkin baru muncul pada saat gelombang masuk Islam tahap akhir di Jawa Timur pada abad XVIII. Naskah ini cukup berarti untuk menggambarkan ketegangan yang terjadi dalam masyarakat di tengah-tengah proses islamisasi. Penulisnya berulang-ulang mencela praktik-praktik dari mereka yang masih berpegang teguh pada agama tradisional (disebut "agama Jawa"). Naskah ini pun secara umum mengandung pemahaman Islam secara mistik. Tapi ada juga naskah berbahasa Melayu yang pengarangnya tak dikenal yang bertarikh sebelum tahun 1620 yang menunjukkan bahwa penafsiran Alquran yang nonmistik juga dipraktikkan di wilayah Indonesia.

Bukti mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia yang telah dibicarakan di atas tidak dengan mudah memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tegas. Karena alasan inilah maka para ilmuwan berbeda dengan sangat tajam dalam memandang islamisasi. Salah satu perdebatan yang cukup panjang ialah menyangkut daerah tempat asal Islam Indonesia. Gujarat di India barat laut merupakan salah satu kandidat yang terutama; pengaruh Gujarat ditunjukkan oleh kenyataan bahwa batu nisan Malik Ibrahim (w. 1419) di Gresik dan beberapa batu di Pasai dipercaya telah diimpor dari Kambay di Gujarat. Pantai Malabar di India barat daya, Koromandel di India tenggara, Bengali, Cina Selatan, dan tentu saja Arabia, Mesir, dan Persia, semuanya telah disebut sebagai sumber Islam Indonesia. Sering kali perdebatan ini tampak mengungkapkan suatu pandangan yang terlalu sederhana dan tidak dapat dipercaya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ba-

gaimanapun juga, Islamisasi merupakan suatu proses perubahan agama yang terjadi selama beberapa abad. Dalam bab ini, hanya bukti mengenai tahap-tahap awal sajalah yang telah diuji, tetapi antara zaman batu-nisan Sultan Sulaiman bin Abdullah dan catatan Tome Pires ada tiga abad yang terlewati. Daerah yang menjadi pusat perhatian adalah kepulauan yang terbesar di dunia, dan pada waktu yang dibicarakan di sini, daerah itu sudah terlibat dalam perdagangan internasional. Tampaknya sangat mustahil bahwa islamisasi di Indonesia dapat diterangkan dengan merujuk hanya ke satu tempat asal agama itu. Juga, tidaklah tepat apabila orang hanya mempertimbangkan sumber-sumber luar negeri saja, karena tampak jelas bahwa agama Islam didakwahkan di banyak kawasan oleh orang-orang Indonesia sendiri, terutama oleh orang-orang muslim Melayu dan Jawa yang melakukan perjalanan di Indonesia Timur dan oleh para penguasa Muslim yang menaklukkan daerah-daerah non-Islam. Ada cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang muslim asing dari banyak daerah dan kaum muslim Indonesia sendiri sama-sama memainkan peranan yang penting di berbagai daerah dalam berbagai waktu.

Akan tetapi, masih tetap ada pertanyaan yang penting: mengapa Islam dianut oleh begitu banyak orang Indonesia hanya pada abad XIII, XIV, dan XV saja? Pernah ada suatu stereotipe yang diterima secara luas, yang menggambarkan bahwa islamisasi hanya disebabkan oleh para pedagang asing yang melakukan perkawinan campuran dengan penduduk setempat dan, dengan cara ini, membentuk komunitas-komunitas Islam; komunitas-komunitas ini kemudian berkembang ketika orang-orang Indonesia tertarik pada agama baru itu, yang etos egaliternya dianggap dapat membebaskan mereka dari belenggu sistem kasta Hindu. Pemikiran ini sekarang, dengan sangat benar, hampir sepenuhnya ditolak. Tidak terdapat satu pun bukti dalam praktek komunitas-komunitas Islam yang menunjukkan semua orang memang sederajat; semua bukti di dalam bab ini menunjukkan islamisasi berlangsung dari atas dan tak satu pun di antara komunitas-komunitas Islam yang akan dibicarakan di dalam bab-bab berikutnya bersikap egaliter. Begitu pula, kehadiran para pedagang itu semata pun tidak dapat menjelaskan islamisasi itu, karena kelihatan pasti bahwa para pedagang Muslim sudah ada di Indonesia jauh sebelum konversi besar-besaran itu dimulai. Di lain

pihak, islamisasi tidak dapat dibayangkan tanpa adanya perdagangan, karena jaringan perdagangan internasionallah yang menyebabkan orang-orang Indonesia berhubungan dengan Islam.

Bukti yang jelas mengenai kecenderungan mistis dalam Islam di Indonesia telah memberi kesan bahwa kaum sufilah yang menjadi agen utama islamisasi. A.H. Johns adalah pendukung utama argumen ini. Ia menjelaskan bahwa islamisasi di Indonesia bersamaan waktunya dengan periode ketika sufisme mulai mendominasi dunia Islam, setelah jatuhnya Bagdad ke tangan bangsa Mongol pada tahun 1258. Dalam pandangannya, kaum sufi, yang berasal dari berbagai bangsa, datang ke Indonesia dengan menggunakan kapal-kapal dagang dan berhasil menyebarkan di sana pandangan keagamaaan mereka yang lebih terbuka kepada ide-ide dari luar Islam dan tidak begitu ketat dalam soal hukum. Meskipun sangat masuk akal, namun pandangan ini tidak mempunyai bukti karena tidak terdapat satu dokumen pun mengenai tarekat sufi yang terorganisasi di Indonesia pada periode awal itu. Di lain pihak, tentu saja selalu ada sedikit bukti untuk mendukung setiap teori. Lagi pula, di India, tempat islamisasi juga berlangsung dalam komunitas-komunitas yang sebelumnya beragama Hindu, beberapa ilmuwan telah berhujah bahwa kaum sufi bukannya menjadi agen utama dalam proses islamisasi, melainkan hanya merupakan gelombang kedua Islam yang makin menghunjamkan komitmen ortodoks di daerah-daerah yang sudah memeluk Islam. Ini mirip dengan peran yang dinisbahkan kepada orang suci India dalam cerita *Hikayat Raja-Raja Pasai.* Dan teori sufi itu tampaknya tidak relevan dengan kasus-kasus seperti yang disebutkan Tomé Pires bahwa orang-orang Muslim asing menetap dan menjadi Jawa, sehingga persoalannya lebih merupakan masalah jawanisasi daripada islamisasi. Meskipun demikian, nada mistik yang kuat dalam Islam di Indonesia benar-benar jelas di dalam kedua naskah keagamaan berbahasa Jawa dari abad XVI dan lebih nyata lagi pada abad-abad kemudian. Oleh karena itu, mistisisme jelas merupakan suatu bagian dari islamisasi, tetapi peranannya yang pasti masih tetap belum jelas.

Oleh karena bukti itu tidak memuaskan, maka sikap hati-hati sangat penting dalam menarik kesimpulan-kesimpulan. Tampaknya jelas bahwa perdagangan merupakan unsur penting dalam masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin juga perdagangan merupakan pendorong terhadap islamisasi, karena para penguasa

Indonesia yang terlibat dalam perdagangan mungkin mengira bahwa adalah berfaedah bila menganut agama yang sama dengan yang dianut sebagian besar pedagang itu. Akan tetapi, para pedagang barangkali tidak mengenal dengan baik kalangan bangsawan istana Majapahit, yang sangat mungkin menganggap diri mereka jauh lebih tinggi daripada para pedagang dalam kedudukan sosial; lebih mungkin bahwa kaum bangsawan itu terpengaruh oleh kaum mistik Islam dan orang-orang suci yang mengklaim memiliki kekuatan-kekuatan gaib. Sampai di sini, pertanyaan mengapa islamisasi baru dimulai beberapa abad setelah para pedagang muslim dikenal di daerah itu tetap belum terjawab.

Mungkin harus ditarik perbedaan-perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ada bagian-bagian pesisir Sumatera dan Jawa yang tidak diketahui sama sekali sebelum islamisasi; dalam beberapa kasus, kota-kota yang muncul di sana adalah akibat dari bermukimnya orang-orang muslim asing; dalam kasus-kasus lainnya, orang-orang Indonesia yang tinggal di daerah itu mungkin belum banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Hindu-Budha, dan oleh karenanya tertarik pada agama Islam yang membawa perlengkapan budaya, seperti keterampilan membaca. Akan tetapi, di pusat-pusat budaya tinggi yang lama, hal ini tidak benar; di Majapahit dan Bali, Islam menjumpai kendala budaya yang besar. Pengaruh budaya Majapahit adalah sedemikian rupa sehingga orang-orang muslim non-Jawa di daerah pantai pun meniru gayanya. Adalah gejala dari perbedaan ini bahwa di Sumatera Utara sudah ada sultan-sultan sejak akhir abad XIII, sedangkan tak seorang pun raja Jawa yang diketahui secara pasti memakai gelar itu hingga abad XVII. Akan tetapi, akan keliru apabila orang terlalu menekankan dangkalnya islamisasi di Jawa. Walaupun Islam hanya mempunyai dampak yang sangat terbatas terhadap falsafah Jawa, tetapi agama ini telah mengubah beberapa kebiasaan sosial masyarakat Jawa yang mendasar. Misalnya, semua orang Jawa yang memeluk Islam akhirnya melakukan khitanan dan penguburan sebagai pengganti upacara-upacara keagamaan Hindu-Budha semacam kremasi. Dengan demikian, masuknya seseorang ke dalam komunitas keagamaan yang baru ini memiliki tanda yang jelas. Di Bali, karena sebab-sebab yang tidak jelas, kendala-kendala budaya tidak dapat diatasi dan Bali masih tetap Hindu sampai saat ini. Di semua daerah Indonesia, islami-

sasi adalah awal, bukan akhir, dari suatu proses perubahan yang penting. Delapan abad kemudian, proses ini masih tetap berlangsung.

Satu poin terakhir perlu disebutkan. Perdebatan-perdebatan mengenai kepentingan relatif para pedagang dan kaum sufi serta mengenai sumber-asing Islam Indonesia telah membuat kaburnya suatu aspek islamisasi yang penting. Pada umumnya islamisasi dianggap sebagai suatu proses damai karena tidak ada satu pun bukti mengenai ekspedisi-ekspedisi militer asing yang memaksakan agama ini melalui penaklukan. Akan tetapi, segera setelah sebuah kerajaan Islam berdiri di Indonesia, agama Islam kadang-kadang disebarkan dari sana ke kawasan-kawasan lain melalui peperangan. Contoh-contoh mengenai hal ini di Sumatera dan Jawa pada abad XVI dan di Sulawesi pada abad XVII akan dibicarakan dalam bab 4. Ini tidak harus berarti bahwa peperangan-peperangan semacam itu dilakukan terutama dalam rangka menyebarkan agama Islam; sebab-sebab dari peperangan-peperangan itu lebih besar kemungkinannya berupa faktor-faktor kewangsaan, strategi, dan ekonomi. Akan tetapi, sering islamisasi terjadi sesudah penaklukan.[]

Bab 2 ....

Aspek-aspek Umum dari Negara-negara Prakolonial dan Kerajaan-kerajaan Besar, ± 1300–1500

SEJARAH POLITIK Indonesia pada abad XIV dan XV tidak banyak diketahui karena alasan yang sama yang menyebabkan tidak begitu jelasnya proses islamisasi, yaitu sangat langkanya bukti-bukti. Akan tetapi, dua negara besar jelaslah mendominasi periode ini: Majapahit di Jawa Timur dan Malaka di Malaya. Majapahit adalah yang terbesar di antara negara-negara yang ada di Indonesia sebelum datangnya Islam; Malaka mungkin merupakan yang terbesar di antara kerajaan-kerajaan perdagangan yang menganut agama Islam. Kedua-duanya melambangkan zaman peralihan di Indonesia pada abad-abad tersebut. Negara-negara lainnya, seperti Kesultanan Pasai yang baru, meninggalkan terlalu sedikit bukti yang dapat membantu dilakukannya rekonstruksi sejarah.

Sebelum membahas Majapahit dan Malaka, alangkah baiknya apabila dibicarakan terlebih dahulu beberapa ciri umum dari negara-negara yang ada di Indonesia sebelum masa penjajahan. Meskipun bukti-bukti yang berhasil diperoleh berasal dari abad-abad yang belakangan, tetapi tampak jelas bahwa ciri-ciri umum tertentu dari negara-negara yang ada di Indonesia tidaklah berubah selama beberapa abad. Khususnya, kondisi tanah dan iklim di daerah tersebut mempunyai dampak yang penting bukan hanya terhadap pertanian dan perdagangan, melainkan juga terhadap formasi negara.

Jawa mempunyai sederetan gunung berapi yang berjajar dari timur ke barat di sepanjang pulau itu. Gunung-gunung dan

dataran-dataran tinggi lainnya membantu memisahkan wilayah pedalaman menjadi kawasan-kawasan yang relatif terpencil yang sangat cocok bagi persawahan. Daerah-daerah padi di Jawa itu merupakan salah satu di antara yang terkaya di dunia. Jalur-jalur perhubungan utama di Jawa adalah sungai-sungai yang, sebagian besarnya, relatif pendek-pendek. Sungai-sungai yang paling cocok untuk hubungan jarak jauh hanyalah Sungai Brantas dan Bengawan Solo, dan tidak mengherankan apabila lembah-lembah kedua sungai itu menjadi pusat-pusat kerajaan besar. Pada pertengahan abad XVII, dan mungkin sebelumnya, terdapat pula suatu sistem jalan darat di Jawa dengan pos-pos cukai dan jembatan-jembatan permanennya. Pada musim kering (kira-kira Maret-September), jalan--jalan darat yang besar dapat dilalui kendaraan berat. Akan tetapi, jalan darat lebih berbahaya daripada sungai. Para perampok atau penguasa lokal dapat menghambat perjalanan. Sedangkan selama musim penghujan, jalan darat mungkin tidak dapat dilalui dan selalu diperlukan perawatan yang sangat berat.

Dengan demikian, Pulau Jawa terdiri atas kantong-kantong penduduk yang relatif terpisah satu sama lainnya. Populasi Pulau Jawa pada abad-abad permulaan ini tidak diketahui. Reid memperkirakan jumlahnya mencapai empat juta pada tahun 1600, kemudian 5 juta pada tahun 1800, tetapi ini sangat terbuka untuk diperdebatkan. Bahkan kalaupun terdapat populasi sebesar itu sebelum abad XIX, Jawa tetap berpenduduk sangat jarang menurut ukuran abad XXI, dan tentunya terdapat banyak daerah yang tidak berpenduduk sehingga semakin memperbesar tingkat keterkucilan daerah-daerah yang berpenduduk. Setiap kerajaaan besar di wilayah pedalaman Jawa memerlukan suatu bentuk kekuasaan pusat atas beberapa daerah yang terpencil semacam itu, suatu tugas yang sulit dilaksanakan karena faktor perhubungan. Meskipun demikian, dengan perkecualian Majapahit (lihat di bawah ini) dan Demak (lihat bab 4), kerajaan-kerajaan besar di Jawa pada dasarnya adalah kerajaan-kerajaan pedalaman. Karena adanya kesulitan-kesulitan perhubungan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perdagangan luar negeri bukanlah kegiatan utama kerajaan-kerajaan pedalaman semacam itu.

Di luar Jawa, negara-negara terbentuk dalam kondisi fisik yang agak berbeda. Di sini juga sebagian besar permukaan tanah

terdiri atas gunung-gunung, dataran-dataran tinggi, dan hutan belantara; sedangkan banyak daerah pantai merupakan rawa-rawa. Dari peta tidak dapat diketahui betapa kecilnya daerah pulau Sumatera yang cocok dihuni orang. Tidak ada satu perkiraan pun mengenai jumlah penduduk pulau luar Jawa dari zaman sebelum penjajahan. Reid berpendapat bahwa populasi luar Jawa mungkin mencapai 5,8 juta pada tahun 1600 dan 7,9 juta pada tahun 1800. Jadi, dengan menggunakan standar zaman sekarang, wilayah ini pun tergolong berpenduduk sangat jarang.

Di sebagian besar pulau-pulau luar Jawa, negara-negara terbentuk di daerah-daerah pantai yang sangat cocok untuk pertanian padi. Perhatian negara-negara semacam itu diarahkan pada wilayah-wilayah pedalaman sejauh ada bahan pangan atau hasil-hasil perdagangan penting yang dapat diperoleh di situ, seperti lada, emas, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jalur-jalur komunikasi yang terpenting bagi negara-negara seperti itu menuju ke luar, ke arah laut. Pulau-pulau luar Jawa hanya memiliki sedikit jalan darat jarak jauh seperti yang terdapat di Jawa yang dapat membantu komu-nikasi di pulau-pulau tersebut. Beberapa sungai dapat dijadikan jalur untuk menuju ke wilayah-wilayah pedalaman negara-negara itu, tetapi pelayaran ke hulu tentu saja kurang menarik jika dibandingkan pelayaran ke luar menuju lautan bebas. Akan dapat dilihat di dalam bab 4, misalnya, bahwa pada waktu Aceh memperluas kekuasaannya ke pantai timur Sumatera, maka saingan utamanya bukanlah negara-negara Sumatera lainnya, melainkan Johor di seberang Selat Malaka. Demikian pula halnya, negara-negara Kalimantan Selatan lebih sering mengadakan hubungan dengan kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa daripada dengan wilayah pedalaman yang sangat luas dari pulau itu sendiri. Dan ketika suku Bugis dari Sulawesi Selatan memulai emigrasi secara besar-besaran pada abad XVII dan XVIII, mereka tidak bergerak ke utara di dalam pulau mereka sendiri, tetapi justru memilih perahu untuk melakukan pelayaran. Bagi pulau-pulau luar Jawa, lautan adalah jalan raya mereka.

Negara-negara Nusantara yang digambarkan dalam bab ini dan bab-bab berikutnya, semuanya terlibat dalam perdagangan internasional maupun domestik, yang menjadi sumber kebanyakan kekayaan mereka. Di seluruh Nusantara, para pedagang memperjualbelikan beras, lada, dan tekstil dalam jumlah yang besar.

Pulau Jawa merupakan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara sampai abad XIX, sedangkan Sumatera adalah eksportir lada—produk yang paling diminati dari abad XV sampai abad XVII—yang utama di Nusantara. Banyak tekstil yang berkualitas tinggi diimpor ke Indonesia dari India dan Cina, namun terdapat juga perdagangan tekstil yang cukup penting yang diproduksi di Nusantara sendiri, terutama di Sulawesi Selatan dan Jawa (yang, lagi-lagi, merupakan produsen terbesar). Para pedagang asing datang ke Indonesia khususnya untuk mendapatkan hasil-hasil hutan yang bernilai tinggi, seperti kamper dan cendana serta emas dari Sumatera dan Kalimantan Barat. Terutama, mereka memburu lada dari Indonesia bagian barat serta cengkeh, pala, dan bunga pala dari Maluku di Indonesia timur—hasil-hasil bumi yang, seperti akan kita lihat di bab berikut, amat menarik orang-orang Eropa pertama untuk datang ke Indonesia.

Beberapa pengamat telah berusaha menggambarkan perbedaan yang jelas antara negara-negara daratan di Jawa dan negara-negara laut di pulau-pulau luar Jawa dalam kaitannya dengan landasan perekonomian yang berbeda. Jawa dipandang sebagai masyarakat "hidrolis" yang didasarkan pada pertanian sawah, sedangkan negara-negara luar Jawa sebagai kawasan-kawasan yang terutama tergantung pada perdagangan luar negeri. Stereotip ini tidak sepenuhnya memuaskan. Negara-negara luar Jawa biasanya tergantung pada pertanian sawah untuk menghidupi rakyat mereka, sekalipun benar bahwa sebagian dari negara-negara terbesar, seperti Malaka, Aceh, Banten, dan Gowa, menghidupi rakyat mereka terutama dengan beras yang diimpor dari pesisir utara Jawa. Memang, pelabuhan-pelabuhan perdagangan di pantai utara Jawa lebih merupakan bagian dari sistem perdagangan lautan ini ketimbang bagian dari kerajaan-kerajaan pedalaman Jawa, dan kota-kota pelabuhan tersebut memiliki daerah pedalaman yang sangat luas sebagai penghasil beras serta merupakan pengekspor-pengekspor utama beras. Perbedaan pokok antara kedua jenis negara itu adalah arah kegiatan-kegiatan yang dipengaruhi oleh keadaan alamnya: di luar Jawa adalah ke luar, sedangkan di Jawa ke dalam.

Terdapat banyak kondisi yang sama di seluruh Indonesia yang mempengaruhi kehidupan ekonomi dan politik negara-negara prakolonial. Di semua daerah, jumlah penduduknya sangat terbatas,

dan oleh karenanya merupakan basis yang terbatas pula bagi perpajakan dan sumber daya manusia untuk penanaman padi dan pembentukan tentara. Oleh karena itulah maka kadang-kadang salah satu tujuan perang adalah memindahkan penduduk dari daerah yang ditaklukkan ke wilayah pihak yang menang. Terisolasinya wilayah-wilayah yang berpenduduk dan buruknya komunikasi menyebabkan sulitnya penyelenggaraan kekuasaan yang terpusat atas beberapa wilayah yang berpenduduk. Di Jawa, cara pemecahannya adalah dengan menerapkan sistem kerajaan terbatas, dengan pemberian otonomi yang luas kepada para penguasa lokal. Sama halnya, kerajaan-kerajaan luar Jawa sering kali terpaksa harus memberi otonomi yang luas kepada para vasal mereka. Oleh karena itu, selalu timbul ketegangan-ketegangan di dalam negara-negara yang besar sebagai akibat terjadinya benturan antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah, dan negara-negara semacam itu mudah runtuh. Juga ada suatu batas bagi tingkat penindasan yang boleh dilakukan. Adanya wilayah-wi-layah luas yang tidak berpenduduk membuka kemungkinan bagi rakyat untuk berpindah ke suatu daerah baru yang berada di luar kekuasaan raja mereka apabila tindak penindasan mencapai batas-batas yang tidak tertahankan lagi. Ini bukan berarti tidak ada penindasan sama sekali, karena ada banyak penindasan, akan tetapi pembatasan tertentu terhadap penindasan itu juga ada.

Seorang penguasa pusat mempunyai tiga teknik utama yang dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. Pertama, dia dapat memberi otonomi yang cukup luas dan keuntungan-keuntungan langsung yang berbentuk kekayaan, martabat, dan perlindungan kepada penguasa daerah dan lawan-lawan lain yang potensial, seperti para pangeran dan pemimpin daerah, sebagai imbalan bagi dukungan mereka kepadanya. Kedua, dia dapat memelihara kultus kebesaran mengenai dirinya dan istananya yang mencerminkan kekuatan-kekuatan gaib yang mendukung dirinya. Ketiga, dan yang paling penting di antara semua teknik, dia harus memiliki kekuatan militer untuk menghancurkan setiap oposisi. Semua negara di Indonesia prakolonial didirikan pada akhirnya atas kekuatan militer yang tangguh. Dalam hal ini, pulau-pulau luar Jawa mungkin telah mempunyai beberapa keuntungan. Walaupun pola angin musim menyebabkan lautan lepas tidak dapat dilayari di kawasan-kawasan tertentu pada saat-saat tertentu dalam

setahun, namun mungkin masih lebih mudah menggerakkan sebuah pasukan ekspedisi laut ke suatu sasaran daripada menggerakkan suatu pasukan tentara Jawa yang besar melalui medan yang sulit yang diperintah oleh raja-raja lain yang bermusuhan dan yang anggota pasukan itu sendiri dapat dengan mudah kabur seandainya mereka mau. Seorang penguasa yang berhasil akan berdiri di puncak sistem yang sulit ini dengan menyeimbangkan dan memanipulasikan kepentingan pihak-pihak di bawahnya dengan mempertunjukkan keterampilan perang yang sangat tinggi dan dengan menampilkan diri seolah-olah memiliki dukungan kekuatan gaib. Dengan cara demikian, dia membentuk suatu konsensus di antara tokoh-tokoh penting di bawahnya untuk mendukung kekuasaannya. Tentu saja, dia juga memerlukan suatu jaringan mata-mata yang terus memberinya informasi, serta perkawinan-perkawinan politik untuk mempertalikan kepentingan pihak-pihak lain dengan masa depannya sendiri.

Dua negara besar pada abad XIV dan XV, Majapahit dan Malaka, akan dibicarakan secara lebih singkat, karena walaupun keduanya sangat penting namun negara-negara tersebut tidak termasuk tema utama buku ini. Majapahit adalah negara Hindu-Budha, sedangkan perhatian utama buku ini adalah mengenai zaman Islam dalam sejarah Indonesia. Sementara, Malaka, walaupun merupakan negara terpenting di nusantara bagian barat, terletak di kawasan yang sekarang menjadi negeri Malaysia.

Sejarah yang rinci mengenai Majapahit sangat tidak jelas. Sumber-sumbernya yang utama adalah prasasti-prasasti berbahasa Jawa Kuno, nas-kah *Desawarnana* atau *Negarakertagama* berbahasa Jawa Kuno yang ditulis pada tahun 1365 (dikenal hanya dalam manuskrip-manuskrip yang lebih kemudian), naskah *Pararaton* berbahasa Jawa Tengahan (yang dikenal dari salinan-salinan yang lebih kemudian yang ditemukan di Pulau Bali), dan beberapa catatan berbahasa Cina. Keterpercayaan semua sumber yang berbahasa Jawa tersebut telah disangsikan oleh C.C. Berg, yang menyatakan bahwa sumber-sumber itu harus dipandang bukan sebagai dokumen-dokumen sejarah, melainkan sebagai dokumen-dokumen sakti, yang harus dipahami dalam konteks mitos-mitos politiko-religius yang menjadi perhatian para penulis catatan-catatan tersebut. Berg beranggapan bahwa naskah-naskah itu tidak dimaksudkan untuk merekam peristiwa-peristiwa masa lampau,

tetapi lebih dimaksudkan untuk menentukan kejadian-kejadian di masa depan dengan sarana gaib. Namun, pemikiran-pemikiran Profesor Berg hanya memperoleh sedikit dukungan dari para ilmuwan lain.

Kesangsian umum Berg terhadap semua sumber yang berbahasa Jawa tampaknya terlalu berlebihan, dan mungkin sampai batas tertentu ada kepastian mengenai sejarah Majapahit itu. Apa yang sudah jelas ialah siapa yang menjadi penguasa-penguasanya sampai abad XV, dan negara macam apakah Majapahit itu pada umumnya. Para penguasanya adalah sebagai berikut:

Raja Kertarajasa Jayawardhana	1294–1309
Raja Jayanagara	1309–28
Ratu Tribhuwana Wijayottungga Dewi	1328–50
Raja Rajasanagara (Hayam Wuruk)	1350–89
Raja Wikramawardhana	1389–1429
Ratu Suhita	1429–47
Raja Wijayaparakramawardhana	1447–51
Raja Rajasawardhana	1451–3

Ada masa tiga tahun tanpa raja yang memerintah, yang mungkin diakibatkan oleh sebuah krisis suksesi. Keluarga Kerajaan Majapahit pada waktu itu tampaknya pecah menjadi dua kelompok yang bertikai, dan ketegangan-ketegangan serta konflik-konflik antara kedua kelompok itu mungkin berlangsung terus sampai tahun 1480-an. Masa pemerintahan dua orang raja lagi dapat diketahui sebagai berikut:

Raja Girisawardhana	1456–66
Raja Singhawikramawardhana	1466–78

Masa pemerintahan Hayam Wuruk merupakan zaman keemasan Majapahit, dan pada masa kekuasaannya itulah *Desawarnana* ditulis. Kejadian-kejadian setelah itu kurang jelas. Tampaknya terjadi perang saudara pada tahun 1405–06, pergantian raja yang dipertengkarkan pada tahun 1450-an, dan pemberontakan besar yang dilancarkan oleh seorang bangsawan pada tahun 1468. Akan tetapi, garis keturunan raja Majapahit (atau suatu cabang dari garis keturunan itu) semuanya tetap memegang tampuk pemerintahan. Kronik-kronik berbahasa Jawa yang muncul kemudian

menyebutkan bahwa Majapahit jatuh ke tangan negara Islam, Demak, pada tahun 1478. Munculnya Demak dan keruntuhan terakhir negara Hindu-Budha di wilayah pedalaman Jawa sekitar tahun 1527 akan dibahas dalam bab 4. Hanya perlu dikatakan di sini bahwa kalau Majapahit ditaklukkan sekitar tahun 1478, maka yang melakukannya tentu bukan musuh yang beragama Islam.

Desawarnana dan prasasti-prasasti yang disebut di atas memberi kemungkinan bagi dilakukannya penyusunan kembali corak dan pengaruh Majapahit pada abad XIV. Negara ini mempunyai suatu bentuk pengaruh atas negara-negara lain yang jumlahnya sangat banyak di seluruh Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Meskipun keadaan ini mungkin telah membentuk semacam 'kekaisaran' dalam pengertian Indonesia pada waktu itu, namun dapat dilihat dengan jelas dari pembatas-pembatas alam yang umum yang sudah disebutkan di depan dalam bab ini bahwa Majapahit tidak mungkin menyelenggarakan suatu bentuk kekuasaan terpusat yang teratur terhadap daerah-daerah seluas itu. Tampaknya hubungan daganglah yang utamanya menghubungkan daerah-daerah tersebut, dan pada pihak Majapahit, perdagangan ini mungkin sekali menjadi monopoli raja. Jadi, Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus, pada waktu yang sama, negara perdagangan. Negara ini menaklukkan Bali pada tahun 1343, dan pada tahun 1377 mengirim suatu ekspedisi untuk menghukum Palembang di Sumatera. Majapahit juga mempunyai hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, serta mengirim duta-dutanya ke Cina. Kenang-kenangan tentang kejayaan Majapahit masih tetap hidup, dan hal itu kadang-kadang dianggap sebagai suatu preseden bagi perbatasan-perbatasan politik Republik Indonesia dewasa ini.

Ibu kota Majapahit merupakan sesuatu yang hebat dengan pesta-pesta tahunan yang sangat meriah dan agung. Kerajaan mengamalkan agama Budha maupun penyembahan kepada dewa-dewa Hindu, Siwa dan Wisnu, dan terjadi penyatuan kedua agama itu pada diri raja, yang dianggap sebagai 'Siwa-Budha' dan 'Nirguna' bagi para penganut agama Wisnu. *Desawarnana* tidak menyebutkan satu hal pun mengenai Islam, walaupun, seperti yang dilihat pada bab I, sudah ada anggota keluarga istana yang

memeluk agama Islam pada waktu itu. Sejarah terinci mengenai Majapahit memang memerlukan penelitian lebih lanjut, namun jelas bahwa negara ini merupakan salah satu negara terbesar di Indonesia. Pengganti-penggantinya yang sudah menganut agama Islam mengenang negara ini de-ngan penuh rasa bangga dan berusaha menggambarkan diri mereka sebagai pengganti-pengganti dinastinya.

Pada akhir abad XIV dan awal abad XV, pengaruh Majapahit di seluruh nusantara mulai berkurang. Pada waktu yang sama, berdiri suatu negara perdagangan Melayu yang baru di nusantara bagian barat. Asal-usul Malaka yang sebenarnya diperdebatkan. Tampaknya, seorang pangeran dari Palembang bernama Parameswara berhasil meloloskan diri sewaktu terjadi serangan Majapahit pada tahun 1377 dan akhirnya tiba di Malaka sekitar tahun 1400. Di tempat ini dia menemukan suatu pelabuhan yang baik, yang dapat dirapati kapal-kapal di segala musim dan terletak di bagian yang paling sempit dari Selat Malaka. Dengan bersekutu dengan *orang laut,* yaitu perompak-perompak pengembara di Selat Malaka, dia berhasil membuat Malaka menjadi suatu pelabuhan internasional yang besar dengan cara memaksa kapal-kapal yang lewat untuk singgah di pelabuhannya serta memberi fasilitas-fasilitas yang cukup baik dan dapat dipercaya bagi pergudangan dan perdagangan. Malaka mungkin merupakan contoh yang paling murni dari negara pelabuhan transito Indonesia, karena negara ini tidak memiliki hasil-hasil sendiri yang penting; negara ini harus mengimpor bahan pangan untuk menghidupi rakyatnya. Malaka dengan cepat menjadi suatu pelabuhan yang sangat berhasil, karena negara ini dapat menguasai Selat Malaka, salah satu trayek yang paling menentukan dalam sistem perdagangan internasional yang membentang dari Cina dan Maluku di timur sampai Afrika Timur dan Laut Tengah di barat.

Ancaman utama bagi Malaka sejak awal adalah Siam, tetapi Malaka sudah minta dan mendapat perlindungan Cina sejak tahun 1405. Setelah itu, Malaka berulang kali mengirim duta-dutanya ke Cina, yang di dalamnya tiga orang raja yang pertama ikut serta, sedangkan armada-armada Cina secara besar-besaran mengunjungi Malaka di bawah pimpinan Admiral Dinasti Ming bernama Zheng He (Cheng Ho), yang terus berlanjut sampai tahun 1434. Perlindungan Cina yang nyata ini telah membantu

Malaka untuk berdiri kokoh. Pada pertengahan abad XV, Malaka bergerak menaklukkan daerah-daerah di kedua sisi Selat Malaka yang menghasilkan bahan pangan, timah, emas, dan lada, sehingga meningkatkan kemakmuran dan posisi strategisnya. Pada tahun 1470-an dan 1480-an, kerajaan ini menguasai pusat-pusat penduduk yang penting di seluruh Semenanjung Malaya bagian selatan dan pantai timur Sumatera bagian tengah.

Pada mulanya, Parameswara adalah seorang raja yang beragama Hindu--Budha, tetapi tentu dia telah memaksa dan menganjurkan supaya para pedagang yang beragama Islam menggunakan pelabuhannya. Ada suatu perde-batan mengenai kepindahannya ke agama Islam. Tampaknya pada masa akhir pemerintahannya (1390–1413/14), dia menganut agama Islam dan memakai nama Iskandar Syah. Dua orang penggantinya, Megat Iskandar Syah (1414--23/24) dan Muhammad Syah (1424–44), beragama Islam. Akan tetapi, ada kemungkinan telah terjadi suatu reaksi dari kalangan Hindu-Budha selama masa pemerintahan raja keempat, Parameswara Dewa Syah (1445–6), yang tampaknya terbunuh dalam suatu kudeta yang dilancarkan orang Islam dan digantikan oleh saudara sepupunya, Sultan Muzaffar Syah (1446–59). Setelah itu, posisi Islam semakin tidak tersaingi.

Aspek yang paling menarik dari Malaka bagi sejarah Indonesia ini ialah jaringan perdagangannya yang sangat luas yang membentang sampai ke pulau-pulau di Indonesia. Tomé Pires, penulis Portugis, telah melukiskan kebesaran sistem ini dengan semangat yang mungkin berlebihan, tetapi deskripsi umumnya jelas dapat dipercaya. Trayek-trayek utama dan hasil-hasil yang paling penting yang tercakup adalah sebagai berikut:

Malaka – pantai timur Sumatera: emas, kapur barus, lada, sutra, damar dan hasil-hasil hutan lainnya, madu, lilin, tir, belerang, besi, kapas, rotan, beras serta bahan-bahan pangan lainnya, dan budak; hasil-hasil ini terutama ditukarkan dengan tekstil India; jung-jung juga dibeli di Malaka oleh pedagang-pedagang dari beberapa daerah.

Malaka – Sunda (Jawa Barat): lada, asam Jawa, budak, emas, dan bahan-bahan pangan lainnya; hasil-hasil ini ditukarkan dengan tekstil India, pinang, air mawar, dan lain sebagainya.

Malaka – Jawa Tengah dan Jawa Timur: beras dan bahan-bahan pangan lainnya, lada, asam Jawa, batu-batuan semi permata, emas, budak, dan tekstil yang dimanfaatkan sebagai barang dagangan lebih jauh ke timur; hasil-hasil ini ditukarkan dengan tekstil India yang baik mutunya dan barang-barang Cina.

Jawa Barat – pantai barat Sumatera: hasil-hasil yang sama dengan hasil-hasil dari pantai timur Sumatera, juga kuda, dikapalkan ke Jawa Barat; terjadi pula perdagangan secara langsung dengan para pedagang Gujarat yang membawa tekstil.

Jawa Tengah dan Jawa Timur – Sumatera Selatan: kapas, madu, lilin, tir, rotan, lada, dan emas dikapalkan ke Jawa.

Jawa – Bali, Lombok, Sumbawa: bahan-bahan pangan, tekstil kasar, budak, dan kuda; hasil-hasil ini ditukarkan dengan tekstil kasar Jawa.

Bali, Lombok, Sumbawa – Timor, Sumba: kayu cendana dari daerah-daerah Timor dan Sumba ditukarkan dengan tekstil kasar India dan Jawa.

Timor, Sumba – Maluku: pala, cengkih, dan bunga pala dari Maluku ("Kepulauan Rempah-rempah") ditukarkan dengan tekstil kasar Sumbawa, mata uang Jawa, dan perhiasan-perhiasan kecil dari India.

Jawa dan Malaka – Kalimantan Selatan: bahan-bahan pangan, intan, emas, dan kapur barus ditukarkan dengan tekstil India.

Sulawesi Selatan – Malaka, Jawa, Brunei, Siam, Semenanjung Malaya: budak, beras, dan emas dari Makasar ditukarkan langsung oleh orang-orang Bugis dengan tekstil India, damar, dan lain sebagainya.

Di Malaka, sistem perdagangan Indonesia ini dihubungkan dengan jalur-jalur yang membentang ke barat sampai India, Persia, Arabia, Suriah, Afrika Timur, dan Laut Tengah, ke utara sampai Siam dan Pegu; serta ke timur sam-pai Cina dan mungkin Jepang. Ini merupakan sistem perdagangan yang terbesar di dunia pada masa itu, dan dua tempat pertukarannya yang penting

adalah Gujarat di India barat-laut dan Malaka. Rempah-rempah Indonesia merupakan salah satu hasil yang paling berharga di dalam sistem ini. Tetapi perlu diingat bahwa hasil-hasil yang dapat mempertahankan tetap berfungsinya sistem ini adalah barang-barang yang lebih bersifat biasa, terutama tekstil India dan beras Jawa. Meskipun sudah dapat dipastikan bahwa di Malaka terdapat lebih banyak tikus daripada mirah delima, tetapi kekayaan yang berputar di tempat itu sangat mengesankan. Kunci bagi keberhasilan Malaka tersebut bukanlah terutama karena tempat itu merupakan suatu pe-labuhan yang baik (karena ada banyak pelabuhan baik yang lain), tetapi lebih terletak pada kebijakan-kebijakan penguasanya yang berhasil membentuk suatu komunitas internasional kaum pedagang yang mendapatkan fasilitas-fasilitas yang menguntungkan di sana. Bangsa Portugis segera menyadari bahwa merebut pelabuhan tersebut adalah lebih mudah daripada membentuk sendiri komunitas seperti itu.[]

Bab 3 . . . .

Kedatangan Orang-orang Eropa di Indonesia, ± 1509–1620

KEDATANGAN ORANG-ORANG Eropa yang pertama di Asia Tenggara pada awal abad XVI kadang-kadang dipandang sebagai titik penentu yang paling penting dalam sejarah kawasan ini. Pandangan ini tidak dapat dipertahankan. Meskipun orang-orang Eropa—terutama orang-orang Belanda—memiliki dampak yang besar terhadap Indonesia, namun hal itu pada dasarnya merupakan fenomena dari masa-masa kemudian. Bagaimanapun juga, pada tahun-tahun pertama kehadiran mereka, pengaruh orang-orang Eropa sangatlah terbatas, baik dari segi daerah yang dipengaruhi maupun kedalaman pengaruh itu.

Eropa bukanlah kawasan yang paling maju di dunia pada permulaan abad XV, juga bukan merupakan kawasan yang paling dinamis. Kekuatan besar yang sedang berkembang di dunia saat itu adalah Islam; pada tahun 1453, orang-orang Turki Ottoman menaklukkan Konstantinopel, dan di ujung timur du-nia Islam, agama ini berkembang di Indonesia dan Filipina. Akan tetapi, orang-orang Eropa, terutama orang-orang Portugis, mencapai kemajuan--kemajuan di bidang teknologi tertentu yang kemudian melibatkan bangsa Portugis dalam salah satu petualangan mengarungi samudra yang paling berani di sepanjang zaman. Dengan bekal pengetahuan geografi dan astronomi yang bertambah baik—banyak darinya berasal dari bangsa Arab, yang sering kali tersebar di kalangan Kristen Eropa lewat para sarjana Yahudi—bangsa Portugis menjadi mualim-mualim yang semakin mahir. Dengan

memadukan layar yang berbentuk segi tiga dengan yang persegi empat serta memperbaiki konstruksi, mereka telah menciptakan kapal-kapal yang lebih cepat, lebih mudah digerakkan, dan lebih layak mengarungi samudra. Mereka mulai menggunakan meriam di atas kapal: kapal perang lebih merupakan sebuah panggung meriam di lautan daripada sebuah istana terapung bagi para pemanah atau sebuah alat pembentur.

Bangsa Portugis tidak hanya mencapai kemajuan-kemajuan di bidang teknologi yang memungkinkan mereka berekspansi ke seberang lautan; mereka juga memiliki tekad dan kepentingan untuk melakukan itu. Atas dorongan Pangeran Henry "Si Mualim" (w. 1460) dan para pelindung lainnya, para pelaut dan petualang Portugis memulai pencarian panjang mereka menyusuri pantai barat Afrika untuk menemukan emas, memenangi pertempuran, dan meraih jalan untuk mengepung lawan yang beragama Islam. Mereka juga berusaha mendapatkan rempah-rempah, yang berarti mendapatkan jalan ke Asia dengan tujuan memotong jalur pelayaran para pedagang Islam yang, melalui tempat penjualan mereka di Venesia di Laut Tengah (Mediterania), memonopoli impor rempah-rempah ke Eropa. Rempah-rempah merupakan soal kebutuhan dan juga cita rasa. Selama musim dingin di Eropa, tidak ada satu cara pun yang dapat dilakukan agar semua hewan ternak tetap hidup; karenanya, banyak hewan ternak disembelih dan dagingnya kemudian harus diawetkan. Untuk itu diperlukan sekali adanya garam dan rempah-rempah, dan di antara rempah-rempah yang diimpor, cengkih dari Indonesia Timur adalah yang paling berharga. Indonesia juga menghasilkan lada, buah pala, dan bunga pala; oleh karenanya, kawasan itulah yang menjadi tujuan utama Portugis, wa-laupun sampai saat itu mereka masih belum mempunyai gambaran sedikit pun tentang letak "Kepulauan Rempah-rempah" Indonesia itu maupun tentang cara mencapainya.

Pada tahun 1487, Bartolomeu Dias mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Pada tahun 1497, Vasco da Gama sampai di India. Namun, orang-orang Portugis ini segera mengetahui bahwa barang-barang dagangan yang hendak mereka jual tidak dapat bersaing di pasaran India yang canggih dengan barang-barang yang mengalir melalui jaringan perdagangan Asia. Karena itu, mereka sadar harus melakukan

peperangan di laut untuk mengokohkan diri. Orang yang paling bertanggung jawab atas ditempuhnya usaha yang berani itu adalah Afonso de Albuquerque (? 1459–1515), yang mungkin merupakan panglima angkatan laut terbesar pada masa itu. Pada tahun 1503, Albuquerque berangkat menuju India, dan pada tahun 1510 dia menaklukkan Goa di pantai barat yang kemudian menjadi pangkalan tetap Portugis. Pada waktu itu telah dibangun pangkalan-pangkalan di tempat-tempat yang agak ke barat, yaitu di Ormuz dan Sokotra. Rencananya ialah untuk mendominasi perdagangan laut di Asia dengan cara membangun pangkalan-pangkatan tetap di tempat-tempat yang krusial yang dapat digunakan untuk mengarahkan teknologi militer Portugis yang tinggi. Pada tahun 1510, setelah mengalami banyak pertempuran, juga penderitaan serta kekacauan internal, tampaknya Portugis hampir mencapai tujuannya. Sasaran yang paling penting sekarang ialah menyerang ujung timur perdagangan Asia di Malaka.

Setelah mendengar laporan-laporan pertama dari para pedagang Asia mengenai kekayaan Malaka yang sangat besar, maka Raja Portugal mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk menemukan Malaka, menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya, dan menetap di sana sebagai wakil Portugal di sebelah timur India. Tugas Sequeira tersebut tidak mungkin terlaksana seluruhnya ketika dia tiba di Malaka pada tahun 1509. Pada mulanya dia disambut dengan baik oleh Sultan Mahmud Syah (m. 1488–1528), tetapi kemudian komunitas dagang Islam internasional yang ada di kota itu meyakinkan Mahmud bahwa Portugis merupakan ancaman besar baginya. Akhirnya, Sultan Mahmud berbalik melawan Sequeira, menawan beberapa orang anak buahnya dan membunuh beberapa yang lain. Ia juga mencoba menyerang empat kapal Portugis, tetapi keempat kapal tersebut berhasil berlayar ke laut lepas. Seperti yang telah terjadi di tempat-tempat yang lebih ke barat, tampak jelas bahwa penaklukan adalah satu-satunya cara yang tersedia bagi Portugis untuk memperkokoh diri.

Pada bulan April 1511, Albuquerque melakukan pelayaran dari Goa Portugis menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17 atau 18 buah kapal. Peperangan pecah segera setelah kedatanganya dan berlangsung terus secara sporadis sepanjang bulan Juli dan awal Agustus. Pihak Malaka terhambat oleh

pertikaian sengit antara Sultan Mahmud dan putranya, Sultan Ahmad, yang baru saja diserahi kekuasaan atas negara dan yang nantinya dibunuh atas perintah ayahnya. Meskipun tampaknya Malaka telah dilengkapi secara baik dengan meriam, tetapi gabungan antara daya tembak, kebulatan tekad, dan keberanian yang fanatik yang dimiliki Portugis telah membawa mereka menuju kemenangan. Malaka berhasil ditaklukkan. Albuquerque tinggal di Malaka sampai bulan November 1511, dan selama itu dia mempersiapkan pertahanan Malaka guna menahan setiap serangan balasan orang-orang Melayu. Dia juga memerintahkan kapal-kapal yang pertama melakukan pelayaran untuk mencari "Kepulauan Rempah-rempah". Sesudah itu dia berangkat ke India dengan sebuah kapal yang sangat besar namun tidak terawat; dia berhasil meloloskan diri ketika kapal itu karam di lepas pantai Sumatera beserta se-mua barang rampasan yang dijarah di Malaka.

Portugis kini telah menguasai Malaka, tetapi segera terbukti bahwa mereka tidak menguasai perdagangan Asia yang berpusat di sana. Portugis menghadapi banyak masalah. Mereka tidak pernah dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan sangat tergantung pada para pemasok bahan makanan dari Asia seperti halnya para penguasa Melayu sebelum mereka di Malaka. Mereka kekurangan dana dan sumber daya manusia. Organisasi mereka ditandai dengan perintah-perintah yang saling tumpang tindih dan membingungkan, ketidakefisienan, serta korupsi. Bahkan gubernur-gubernur mereka sendiri di Malaka turut berdagang demi keuntungan pribadi di pelabuhan Malaya, Johor, yang pajak dan harga barang-barangnya lebih rendah, dan dengan demikian merusak monopoli yang seharusnya mereka jaga. Para pedagang bangsa Asia mengalihkan sebagian besar perdagangan mereka ke pelabuhan-pelabuhan lain dan menghindari monopoli Portugis dengan mudah.

Di sebelah barat Nusantara, dengan cepat Portugis tidak lagi menjadi suatu kekuatan yang revolusioner. Keunggulan teknologi mereka yang terdiri atas teknik-teknik pelayaran dan militer berhasil dipelajari dengan cepat oleh saingan-saingan mereka dari Indonesia; meriam Portugis dengan cepat direbut oleh orang-orang Indonesia yang merupakan musuh mereka. Malaka Portugis menjadi suatu bagian dari jaringan konflik di Selat Malaka, di mana Johor dan Aceh berlomba-lomba untuk saling mengalahkan

satu sama lain dan juga mengalahkan Portugis lalu, dengan demikian, menjadi suksesor Malaka yang sesungguhnya (lihat bab 4). Pada pertengahan kedua abad XVI, terlihat kapal-kapal di Kepulauan Indonesia yang berawak sebagian orang Portugis dan sebagian lagi orang Indonesia atau yang dimiliki orang-orang Indonesia dan disewa orang Portugis.

Bagaimanapun juga, arti penting penaklukan terhadap Malaka hendaknya jangan dianggap remeh. Kota itu mulai sekarat sebagai pelabuhan dagang selama berada di bawah cengkeraman Portugis; mereka tidak pernah berhasil memonopoli perdagangan Asia; mereka hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap kebudayaan orang-orang Indonesia yang tinggal di Nusantara bagian barat, dan segera mereka menjadi suatu bagian yang agak aneh di dalam lingkungan Indonesia. Bagaimanapun juga, orang-orang Portugis telah melakukan sesuatu yang mempunyai dampak selamanya; mereka telah mengacaukan secara mendasar organisasi sistem perdagangan Asia. Tidak ada lagi satu pelabuhan pusat di mana kekayaan Asia dapat saling dipertukarkan; tidak ada lagi suatu negara Malaya untuk menjaga ketertiban Selat Malaka dan membuatnya aman bagi lalu lintas perdagangan. Sebaliknya, komunitas dagang telah menyebar ke beberapa pelabuhan dan pertempuran sengit meletus di Selat. Setelah jaya selama seabad, Malaka mendadak berubah menjadi sebuah nama yang masa lalunya begitu membanggakan namun masa depannya tidak begitu berarti.

Dampak budaya orang-orang Portugis yang paling langgeng adalah di Maluku (sebuah nama yang sesungguhnya berasal dari istilah yang diberikan para pedagang Arab untuk daerah tersebut, *Jazirat al-Muluk*, 'negeri para raja'). Di kawasan inilah terletak "Kepulauan Rempah-rempah" Indonesia Timur. Segera setelah Malaka ditaklukkan, dikirimlah misi penyelidik-an yang pertama ke arah timur di bawah pimpinan Francisco Serrão. Pada tahun 1512, kapalnya mengalami kerusakan, tetapi dia berhasil mencapai Hitu (Ambon sebelah utara). Di sana dia mempertunjukkan keterampilan perang melawan suatu pasukan penyerang yang membuat dirinya disukai oleh penguasa setempat. Hal ini juga mendorong para penguasa kedua pulau yang bersaing, Ternate dan Tidore, untuk menjajaki kemungkinan memperoleh bantuan Portugis. Pada waktu itu, pelayaran dari Jawa dan Malaya ke pulau-pulau bagian timur untuk sementara waktu berkurang, ter-

utama disebabkan oleh hancurnya armada Jawa di Malaka pada tahun 1511. Dengan demikian, Portugis disambut baik di daerah tersebut karena mereka juga dapat membawa bahan pangan dan membeli rempah-rempah. Akan tetapi, perdagangan Asia segera bangkit kembali, sehingga Portugis tidak pernah dapat melakukan suatu monopoli yang efektif dalam perdagangan rempah-rempah.

Sultan Ternate Abu Lais (atau Bayansirullah; w. 1522) membujuk bangsa Portugis untuk mendukungnya, dan pada tahun 1522, mereka mulai membangun sebuah benteng di sana. Sultan Mansur dari Tidore mengambil keuntungan dari kedatangan sisa-sisa ekspedisi pelayaran keliling dunia Magellan di tahun 1521 untuk membentuk suatu persekutuan dengan bangsa Spanyol yang, bagaimanapun, tidak memberikan banyak hasil dalam periode ini.

Hubungan Portugis dengan Ternate berubah menjadi tegang karena upaya (yang agak lemah) Portugis melakukan kristenisasi dan karena perilaku tidak sopan dari orang-orang Portugis sendiri pada umumnya. Pelosok di ujung lain dunia ini jarang menarik perhatian orang Portugis pun terkecuali orang-orang yang putus asa dan serakah. Pada tahun 1535, orang-orang Portugis di Ternate menurunkan Raja Tabariji (atau Tabarija; memerintah 1523–35) dari singgasananya dan mengirimnya ke Goa yang dikuasai Portugis. Di sana dia masuk Kristen, memakai nama Dom Manuel, dan setelah dinyatakan tidak terbukti melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya, dikirim kembali ke Ternate untuk menduduki singgasananya lagi. Akan tetapi, dalam perjalanan, dia wafat di Malaka pada tahun 1545. Namun, sebelum wafat, dia telah menyerahkan Pulau Ambon kepada orang Portugis yang menjadi ayah baptisnya, Jordao de Freitas. Akhirnya, orang-orang Portugis, yang membunuh Sultan Ternate Hairun (m. 1535–70) pada tahun 1570, diusir dari Ternate pada tahun 1575 setelah terjadi pengepungan selama lima tahun; mereka kemudian pindah ke Tidore dan membangun benteng baru pada tahun 1578. Akan tetapi, Ambonlah yang kemudian menjadi pusat utama kegiatan-kegiatan Portugis di Maluku sesudah itu. Ternate, sementara itu, menjadi sebuah negara yang gigih menganut Islam dan anti-Portugis di bawah pemerintahan Sultan Baab Ullah (m. 1570–83) dan putranya, Sultan Said ad-Din Berkat Syah (m. 1584–1606).

Portugis juga terlibat perang dan terkepung di Solor. Pada tahun 1562, para pendeta Dominik membangun benteng dari batang kelapa di sana, yang pada tahun berikutnya dibakar oleh para penyerang beragama Islam dari Jawa. Namun, orang-orang Dominik bertahan. Mereka membangun ulang benteng dari bahan yang lebih kuat dan mulai melakukan kristenisasi pada penduduk lokal. Pada tahun-tahun sesudahnya, muncul serangan-serangan lagi dari Jawa. Masyarakat Solor sendiri pun tidak secara keseluruhan menyenangi orang-orang Portugis atau agama mereka, sehingga sering kali muncul perlawanan. Pada tahun 1598–9, pemberontakan besar-besaran dari orang-orang Solor memaksa pihak Portugis mengirimkan sebuah armada yang terdiri atas 90 kapal untuk menundukkan para pemberontak itu. Namun, Portugis tetap menduduki benteng mereka di Solor sampai diusir oleh Belanda pada tahun 1613 dan, setelah Portugis melakukan pendudukan kembali, tahun 1636.

Di antara para petualang Portugis tersebut ada seorang Eropa yang tugasnya memprakarsai suatu perubahan yang tetap di Indonesia Timur. Orang ini berbangsa Spanyol dan bernama Santo Francis Xavier (1506–52), yang bersama-sama Santo Ignatius Loyola mendirikan Ordo Jesuit. Pada tahun 1546–47, Xavier bekerja di tengah-tengah orang Ambon, Ternate, dan Morotai (Moro) serta meletakkan dasar-dasar bagi suatu misi yang tetap di sana. Dia melanjutkan kegiatan misinya ke Jepang, tetapi meninggal dunia sebelum dapat memasuki Cina. Setelah Xavier pergi dari Maluku, orang-orang lain melanjutkan pekerjaannya. Pada tahun 1560-an terdapat sekitar 10.000 orang Katolik di wilayah itu, sebagian besar berdomisili di Ambon, dan pada tahun 1590-an terdapat 50.000 sampai 60.000 orang. Orang-orang Dominik, juga, cukup sukses mengkristenkan Solor; pada tahun 1590-an, orang-orang Portugis dan penduduk lokal yang beragama Kristen di sana diperkirakan mencapai angka 25.000 orang. Sepanjang abad-abad berikutnya terus terdapat komunitas-komunitas Kristen di Indonesia belahan timur, dan keadaan ini memberi andil bagi timbulnya rasa memiliki kepentingan yang sama dengan orang-orang Eropa, terutama di kalangan penduduk Ambon, suatu pengamatan yang tak bisa disamai oleh penduduk Indonesia di daerah-daerah lainnya.

Namun Banda, sebagai daerah penghasil pala, merupakan sebuah pengecualian dari pola-pola perkembangan yang digam-

barkan di sini. Di sana, bentuk pemerintahan oligarkis yang dipimpin oleh orang kaya tidak menampilkan antusiasme pada agama Kristen atau pada orang-orang Eropa yang membawanya. Orang-orang Banda berkeras menolak permohonan izin dari Portugis untuk membangun sebuah benteng. Dan, mungkin karena tidak memiliki benteng itu, para pendeta juga tidak melakukan usaha serius untuk mengkristenkan orang-orang Banda. Orang-orang Banda terus memainkan peran aktif dan mandiri dalam perdagangan di Nusantara sampai awal abad XVII.

Perlu pula disebutkan bahwa usaha kaum misionaris yang bersungguh--sungguh ini berlangsung pada paro kedua abad XVI, setelah gerakan penaklukan Portugis berhenti. Salib secara serius sampai ke Indonesia Timur dalam waktu yang cukup lama sesudah sampainya pedang. Pada waktu itu, kepentingan utama Portugis di Timur telah bergeser dari Maluku. Perdagangan dengan Jepang mulai dilakukan pada tahun 1543, dan diserahkannya Makao secara resmi kepada Portugis pada tahun 1557 telah membuka kemungkinan dilakukannya perdagangan yang lebih teratur dengan Cina. Kegiatan-kegiatan Portugis yang sangat luas mulai lebih dipusatkan pada gula Brazil dan budak Afrika ketimbang pada wilayah timur Asia.

Di Maluku, Portugis meninggalkan beberapa ciri lain dari pengaruh kebudayaan mereka. Balada-balada keroncong yang romantis yang dinyanyikan dengan iringan gitar berasal dari kebudayaan Portugis. Sangat banyak kata-kata Indonesia yang berasal dari bahasa Portugis, seperti pesta, sabun, sepatu, bendera, meja, Minggu, dan lain-lainnya. Hal ini mencerminkan peranan yang dimainkan oleh bahasa Portugis, di samping bahasa Melayu, sebagai *lingua franca* di seluruh pelosok Nusantara sampai awal abad XIX. Bahkan di Ambon masih banyak ditemukan nama-nama keluarga yang berasal dari Portugis, seperti da Costa, Dias, de Fretas, Gonsalves, Mendoza, Rodrigues, da Silva, dan lain-lainnya.

Kalau dibandingkan dengan tujuan pertama orang-orang Portugis untuk mendominasi perdagangan Asia, maka warisan yang ditinggalkan mereka di Indonesia hanya sedikit: kosa kata, nama keluarga, keroncong. Dan, semua itu adalah hal-hal yang telah diputuskan oleh bangsa Indonesia sendiri untuk dijadikan milik mereka; bukannya kekuatan militer Portugis yang menjadikan

suatu peristiwa keramaian disebut sebagai 'pesta'. Pengaruh yang paling besar dan paling langgeng dari kedatangan orang-orang Portugis ada dua: terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan sebagai akibat ditaklukkannya Malaka oleh mereka serta penanaman agama Katolik di beberapa daerah di Indonesia timur. Bagaimanapun, pengaruh yang kedua ini lebih merupakan hasil jerih payah segelintir pendeta saleh daripada jerih payah Kerajaan Portugal.

Setelah bangsa Portugis, datanglah orang-orang Belanda yang mewarisi aspirasi-aspirasi dan strategi Portugis. Orang-orang Belanda membawa organisasi, persenjataan, kapal-kapal, dan dukungan keuangan yang lebih baik serta kombinasi antara keberanian dan kekejaman yang sama. Mereka nyaris mencapai apa yang telah diinginkan orang-orang Portugis tetapi yang tidak berhasil mereka peroleh, yaitu menguasai rempah-rempah Indonesia. Akan tetapi, orang-orang Belanda melakukan sesuatu yang tidak dilakukan bangsa Portugis: mereka mendirikan tempat berpijak yang tetap di Jawa. Inilah yang akan membuat keterlibatan mereka berbeda secara fundamental dengan Portugis, dan yang akhirnya menyebabkan Belanda menjadi suatu kekuatan penjajah yang berpangkalan-darat di Jawa.

Pada akhir abad XVI, Perserikatan Propinsi-Propinsi Negeri Belanda (yang paling penting adalah Holland dan Zeeland) berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk melebarkan sayap ke seberang lautan. Perang kemerdekaan Belanda melawan Spanyol, yang berkobar pada tahun 1560-an dan yang baru berakhir pada tahun 1648, membawa perubahan-perubahan besar. Orang-orang Belanda telah bertindak sebagai perantara dalam penjualan rempah-rempah secara eceran dari Portugal ke Eropa bagian utara, tetapi perang kemerdekaan tersebut, ditambah dengan bersatunya tahta Spanyol dan tahta Portugal pada tahun 1580, mengacaukan jalur mereka untuk mendapatkan rempah-rempah yang dibawa dari Asia oleh orang-orang Portugis. Hal ini otomatis memperbesar keinginan mereka untuk mengapalkan sendiri rempah-rempah itu secara langsung dari Asia. Selain itu, perpindahan-perpindahan penduduk yang terjadi selama berlangsungnya perang Belanda–Spanyol telah membuat negeri Belanda menjadi suatu masyarakat Calvinis yang semakin homogen, padahal propinsi-propinsi Spanyol bagian selatan (Belgia sekarang), dan tentunya

Spanyol serta Portugal sendiri, beragama Katolik. Sekarang persaingan dagang dikaitkan dengan perasaan benci antar-agama dari zaman Reformasi.

Orang-orang Portugis berusaha merahasiakan rincian-rincian jalur pelayaran ke Asia, tetapi ada orang-orang Belanda yang bekerja pada mereka. Yang paling termasyhur di antaranya adalah Jan Huygen van Lin-schoten. Pada tahun 1595–6, dia menerbitkan bukunya *Iti-nerario naer Oost ofte Portugaels Indien* ("Pedoman Perjalanan ke Timur atau Hindia Portugis") yang memuat peta-peta dan deskripsi-deskripsi yang rinci mengenai penemuan-penemuan Portugis. Sekarang orang-orang Belanda tidak hanya mengetahui kekayaan besar Asia, tetapi juga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Portugis di sana. Oleh karena orang-orang Belanda meningkatkan penyempurnaan konstruksi kapal dan persenjataan mereka, maka mereka merasa yakin bahwa orang-orang Portugis di Asia tidak dapat menandingi mereka.

Pada tahun 1595, ekspedisi Belanda yang pertama siap berlayar ke Hindia Timur. Sebanyak 4 buah kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dia telah tinggal selama beberapa tahun di Lisbon dan mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang apa yang sedang dikerjakan oleh orang-orang Portugis. Akan tetapi, kepemimpinannya yang kurang cakap menyebabkan terjadinya banyak perselisihan di dalam ekspedisi tersebut, dan setelah mengalami banyak penderitaan dan wabah penyakit, hanya 3 kapal serta 89 awak yang berhasil kembali ke negeri Belanda lebih dari dua tahun kemudian. Pada bulan Juni 1596, kapal-kapal de Houtman tiba di Banten, pelabuhan lada yang terbesar di Jawa Barat. Di situ orang-orang Belanda segera terlibat dalam konflik, baik dengan orang-orang Portugis maupun dengan orang-orang pribumi. De Houtman meninggalkan Banten dan berlayar ke timur dengan menyusuri pantai utara Pulau Jawa, sambil melakukan banyak penghinaan dan menyebabkan kerugian yang besar di setiap pelabuhan yang dikunjunginya. Di Sidayu, dia kehilangan dua belas anak buahnya yang tewas dalam suatu serangan yang dilakukan oleh orang-orang Jawa. Di lepas pantai Madura, orang-orang Belanda itu membunuh seorang penguasa lokal pada waktu orang tersebut mendayung perahunya mendekati kapal Belanda untuk berbicara dengan mereka. Akhirnya, pada tahun

1597, sisa-sisa ekspedisi itu kembali ke negeri Belanda dengan membawa cukup banyak rempah-rempah di atas kapal mereka untuk menunjukkan bahwa mereka mendapat keuntungan. Jelaslah bahwa suatu pelayaran yang dipimpin oleh orang yang tak cakap pun dapat menghasilkan uang.

Kini mulailah zaman yang dikenal sebagai zaman pelayaran-pelayaran "liar" atau "tidak teratur" *(wilde vaart)*, yaitu ketika perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda yang saling bersaing berjuang keras untuk memperoleh bagian dari rempah-rempah Indonesia. Pada tahun 1598, 22 buah kapal milik lima perusahaan yang berbeda mengadakan pelayaran; 14 di antaranya akhirnya kembali. Armada yang berada di bawah pimpinan Jacob van Neck-lah yang pertama tiba di "Kepulauan Rempah-rem-pah" Maluku pada bulan Maret 1599, di mana rombongannya diterima de-ngan baik; kapal-kapalnya kembali ke negeri Belanda pada tahun 1599–1600 dengan mengangkut cukup banyak rempah-rempah yang menghasilkan keuntungan sebesar 400 persen. Dengan diperolehnya banyak keuntungan dari sebagian besar pelayaran yang dilakukan pada tahun 1598 itu, maka pada tahun 1601 empat belas buah ekspedisi yang berbeda berangkat, melakukan pelayaran dari negeri Belanda.

Kini menjadi jelas bahwa persaingan di antara perusahaan-perusa-haan ekspedisi Belanda tersebut tidak dikehendaki. Pada waktu itu ada empat perwakilan dagang Belanda yang bersaing di Banten; persaingan di seluruh wilayah Indonesia yang menghasilkan rempah-rempah itu menyebabkan naiknya harga, sementara meningkatnya pasokan ke Eropa menyebabkan turunnya keuntungan yang diperoleh. Pada tahun 1598, parlemen Belanda *(Staten Generaal)* mengajukan sebuah usulan supaya perseroan-perseroan yang saling bersaing itu sebaiknya menggabungkan kepentingan mereka masing-masing ke dalam suatu fusi. Diperlukan waktu empat tahun sebelum perseroan-perseroan itu dapat disadarkan untuk membentuk fusi semacam itu.

Pada bulan Maret 1602, perseroan-perseroan yang saling bersaing itu bergabung membentuk Perserikatan Maskapai Hindia Timur, VOC *(Vereenig-de Oost-Indische Compagnie)*. Kepentingan-kepentingan yang bersaing itu diwakili oleh sistem majelis (*kamer*) untuk masing-masing dari enam wilayah di negeri Belanda. Setiap majelis mempunyai sejumlah direktur yang telah disetujui, yang

seluruhnya berjumlah tujuh belas orang dan disebut sebagai *Heeren XVII* (Tuan-tuan Tu-juh Belas). Oleh karena Amsterdam mempunyai peranan yang sangat besar, maka wilayah ini diberi jatah delapan orang dari ketujuh belas direktur itu, dan markas besar VOC juga ditempatkan di situ. Berdasarkan sebuah oktroi yang diberikan oleh parlemen, maka VOC mempunyai wewenang untuk mendaftar personel atas dasar sumpah setia, melakukan peperangan, membangun benteng-benteng, dan mengadakan perjanjian-perjanjian di seluruh Asia.

Personel VOC di Asia, seperti dapat diduga orang, tidaklah selalu bermutu tinggi, terutama pada tahun-tahun terakhir masa kekuasaannya. Sulit ditemukan orang-orang terhormat yang mempunyai keinginan untuk menempuh karier yang berbahaya di Asia. Meskipun VOC merupakan organisasi Belanda, tetapi sebagian besar personelnya bukanlah orang Belanda. Para petualang, gelandangan, penjahat, dan orang-orang yang bernasib jelek dari seluruh Eropalah yang mengucapkan sumpah setia. Inefisiensi, ketidakjujuran, nepotisme, dan alkoholisme tersebar luas di kalangan VOC. Terjadi banyak kekejaman yang menurut pikiran modern sangat menjijikkan, tetapi juga harus diingat bahwa masa itu merupakan masa kekejaman, dan orang-orang Indonesia sendiri juga tidak lebih lembut.

Pada tahun-tahun pertama, *Heeren XVII* menangani sendiri segala urusan VOC, tetapi segera disadari bahwa mereka tidak mungkin mengelola dengan baik pelaksanaan tugas harian di Asia. Jarak kawasan ini begitu jauhnya sehingga pertukaran berita antara Amsterdam dan Indonesia dapat memakan waktu dua sampai tiga tahun. Tidak mungkin bagi kita untuk menyimpulkan apakah VOC meraih untung di tahun-tahun awal ini, karena parlemen Belanda mengizinkan perusahaan ini tidak membuat laporan keuangan—yang disyaratkan dalam oktroi yang dibuatnya—untuk sepuluh tahun pertama. Yang pasti, VOC hanya meraih sedikit keberhasilan militer dalam menghadapi orang-orang Portugis dan Spanyol (yang, setelah sampai di Filipina dengan menyeberangi Pasifik pada tahun 1521, mulai menancapkan kekuasaannya pada suatu tempat berpijak yang tetap setelah tahun 1565). Satu-satunya keberhasilan besar VOC adalah pendudukan atas Am-bon pada tahun 1605.

Orang-orang Portugis di Ambon mendapat tekanan berat yang dilancarkan oleh musuh-musuh lokal mereka pada akhir abad XVI. Pada tahun 1600, mereka berhasil memenangkan suatu pertempuran laut yang besar di Teluk Ambon, tapi itu setelah melewati perjuangan yang sangat berat. Kedatangan orang-orang Belanda menentukan nasib mereka. Pada tahun 1600, orang-orang Belanda bergabung dengan penduduk Hitu dalam suatu persekutuan anti-Portugis, dan untuk itu Belanda mendapat imbalan berupa hak tunggal untuk membeli rempah-rempah dari Hitu. Pada tahun 1602, pihak Portugis merespons keadaannya yang semakin memburuk itu dengan mengirim suatu pasukan ekspedisi yang besar (dan terakhir) dari Malaka, yang untuk sementara waktu berhasil menegakkan kembali kekuasaan Portugis di sebagian besar wilayah Maluku. Akan tetapi, pada bulan Februari 1605, suatu armada VOC mengulangi lagi persekutuannya dengan Hitu dan siap menyerang kubu pertahanan Portugis di Ambon. Akhirnya, orang-orang Portugis benar-benar menyerah. VOC menduduki benteng Portugis di Ambon, mengganti namanya menjadi Victoria, dan segera sesudah itu mengusir kaum misionaris Katolik dan mulai mendorong penduduk setempat yang sudah memeluk agama Katolik untuk beralih ke Calvinisme. Bagaimanapun juga, pendudukan atas Ambon ini merupakan suatu keberhasilan yang berdiri sendiri. Pada tahun 1606, suatu armada Spanyol menduduki Ternate dan juga Tidore. Sultan Said dan para pembesar lainnya menjalani akhir kehidupan mereka dalam pengasingan di Manila. Kehadiran Spanyol di Ambon bertahan hingga tahun 1660-an.

Meskipun sudah mencetak keberhasilan di Ambon, tetapi orang-orang Belanda masih jauh dari tujuan mereka: memonopoli semua rempah-rempah dan, dengan jalan mengusir saingan-saingannya sesama bangsa Eropa, mencegah supaya rempah-rempah tidak melimpah ruah di Eropa. Maka, jelaslah bahwa lang-kah-langkah yang lebih keras perlu dilakukan. Untuk menangani secara lebih tegas lagi urusan-urusan VOC di Asia, maka pada tahun 1610 diciptakan jabatan gubernur jenderal. Untuk men-cegah kemungkinan kekuasaan gubernur jenderal yang bersifat despotis, maka dibentuklah Dewan Hindia *(Raad van Indië)* untuk menasihati dan mengawasinya. Walaupun *Heeren XVII* masih tetap memegang seluruh kekuasaan serta mengangkat

dan, dalam beberapa kasus, juga memecat gubernur jenderal, tetapi tampak jelas bahwa kegiatan-kegiatan VOC di Asia mulai tahun 1610 sebagian besar ditentukan oleh gubernur jenderal.

Selama masa jabatan tiga orang gubernur jenderal yang pertama (1610--1619), yang dijadikan pusat VOC adalah Ambon, tetapi tempat ini ternyata tidak begitu memuaskan sebagai markas besar. Walaupun terletak tepat di jantung wilayah penghasil rempah-rempah, namun Ambon jauh dari jalur-jalur utama perdagangan Asia dan, oleh karenanya, jauh dari kegiatan-kegiatan VOC di tempat-tempat lain mulai dari Afrika sampai Jepang. Belanda pun mulai mencari tempat yang lebih baik untuk dijadikan "pusat pertemuan", suatu pelabuhan yang aman tempat mereka dapat mendirikan kantor-kantor, gudang-gudang, dan fasilitas-fasilitas bagi angkutan laut mereka. Dengan sendirinya, perhatian mereka beralih ke Nusantara bagian barat, suatu tempat di dekat Selat Malaka yang sangat penting atau Selat Sunda (yang telah menjadi semakin bertambah penting sebagai jalur perdagangan melalui pantai barat Sumatera, sejak semakin tidak amannya Selat Malaka setelah datangnya bangsa Portugis). Sebenarnya, pusat perdagangan pertama VOC yang permanen telah dibangun di Banten pada tahun 1603, tetapi tempat ini jelas tidak cocok sebagai markas besar. Di tempat ini ada pesaing-pesaing yang hebat dari para pedagang Cina dan Inggris, dan kota ini berada di bawah kekuasaan Banten sendiri yang kaya dan kuat.

Kebutuhan akan suatu markas besar yang permanen di Nusantara bagian barat semakin terasa dengan meningkatnya ancaman persaingan dari pihak Inggris. Sir Francis Drake telah mengadakan kontak pertama Inggris dengan Indonesia dalam pelayarannya mengelilingi dunia ke arah barat pada tahun 1577–80. Dia singgah di Ternate dan pulang ke negaranya dengan membawa muatan cengkih. Orang-orang Inggris, seperti halnya orang-orang Belanda, berada dalam tekanan untuk terlibat secara langsung dalam perdagangan rempah-rempah. Perang Belanda–Spanyol mengacaukan arus rempah-rempah melalui Antwerp, sedangkan perdagangan Inggris dengan Suriah dikacaukan oleh gangguan Spanyol dan Portugis di Selat Gibraltar. Pada tahun 1591, Elizabeth I mendukung usaha pertama Inggris untuk terlibat secara langsung dalam perdagangan rempah-rempah. Sir James Lancaster (yang mempunyai pengalaman di Lisbon) dan

George Raymond siap mengadakan pelayaran pada tahun itu. Perjalanan mereka ini mengalami bencana. Di atas kapal berjangkit wabah penyakit dan timbul banyak kematian, dan Raymond tenggelam di laut bersama kapalnya. Lancaster memang berhasil mencapai Aceh dan Penang, namun dalam perjalanan pulang ke negerinya, dia terdampar di kepulauan Hindia Barat dan baru sampai di Inggris pada tahun 1594 atas kebaikan hati seorang perampok Prancis. Tidaklah aneh apabila orang-orang Inggris meragukan manfaat yang akan diperoleh dari usaha seperti itu. Akan tetapi, kemudian tersiar kabar mengenai keuntungan-keuntungan pertama yang diperoleh Belanda, sehingga lenyaplah semua keraguan tadi.

Pada tahun 1600, Elizabeth I memberi sebuah oktroi kepada Maskapai Hindia Timur *(The East India Company)*, dan mulailah Inggris mendapat kemajuan di Asia. Sir James Lancaster yang malang tadi ditunjuk untuk memimpin pelayaran pertama maskapai ini. Dia tiba di Aceh pada bulan Juni 1602 dan terus menuju Banten, di mana dia mendapat izin membangun kantor dagang. Bandar lada yang sangat kaya ini tetap menjadi pusat kegiatan orang-orang Inggris sampai tahun 1682. Lancaster kembali ke Inggris dengan muatan lada yang demikian banyak sehingga sebagiannya tidak dapat dijual, dan para investor harus dibayar-kembali sebagiannya dalam bentuk lada. Pulihlah nama baik Lancaster.

Pada tahun 1604, pelayaran kedua Maskapai Hindia Timur Inggris yang dipimpin oleh Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidore, Am-bon, dan Banda. Akan tetapi, di wilayah ini mereka mendapat perlawanan dari pihak VOC, dan dimulailah persaingan sengit Inggris–Belanda untuk mendapatkan rempah-rempah. VOC berusaha memaksakan perjanjian-perjanjian monopoli kepada para penguasa kepulauan penghasil rempah-rempah ini dan mereka sangat marah terhadap apa yang mereka namakan sebagai "komplotan penyelundup" Inggris di Maluku. Selama tahun 1611–7, orang-orang Inggris juga mendirikan kantor-kantor dagang mereka di bagian-bagian Indonesia lainnya: di Sukadana (Kalimantan Barat Daya), Makasar, Jayakerta dan Jepara (di Jawa), serta Aceh, Pariaman, dan Jambi (di Sumatera). Konflik Inggris–Belanda semakin memuncak ketika orang-orang Belanda merasa bahwa cita-cita monopoli mereka telah luput.

Ada suatu episode singkat kerja sama dengan pihak Inggris yang terpaksa dilakukan oleh VOC karena pertimbangan-pertimbangan diplomatik di Eropa pada tahun 1620. Inggris dibolehkan mendirikan kantor dagang di Ambon. Tetapi, "Pembantaian Amboyna (Ambon)" di tempat itu pada tahun 1623 memupuskan semua gagasan tentang kerja sama. Dua belas orang agen perdagangan Inggris di Ambon ditangkap dan, setelah mengalami penyiksaan yang kejam, mereka mengakui telah berkomplot untuk melawan VOC. Sepuluh orang Inggris (dan juga sepuluh orang Jepang serta seorang Portugis) dihukum mati. Sebagai akibat peristiwa ini, terjadilah pertikaian diplomatik di Eropa, tetapi tidak sampai menimbulkan peristiwa yang lebih gawat. Mulai saat itu, Inggris lebih mengarahkan perhatiannya pada kawasan-kawasan Asia lainnya dan secara diam-diam menarik diri dari sebagian besar kegiatan mereka di Indonesia, terkecuali perdagangan mereka di Banten.

Orang-orang Inggris memang tidak lagi menentang peranan penting orang-orang Belanda sampai akhir abad XVIII. Sebetulnya, pada awal abad XVII pun pihak VOC hanya mendapat ancaman militer yang lebih kecil dari pihak Inggris dibandingkan dengan ancaman dari pihak Portugis dan Spanyol. Namun demikian, kegiatan-kegiatan Inggris telah memperbesar keinginan VOC untuk mendapatkan suatu "pusat pertemuan". Kegiatan orang-orang Inggris tersebut juga memberi kesan kepada VOC tentang perlunya ditingkatkan langkah-langkah yang keras apabila mereka ingin mencapai tujuan untuk memonopoli rempah-rempah. Pada tahun 1619, Jan Pieterszoon Coen menjadi gubernur jenderal (1619–23, 1627–9), dan dialah yang menempatkan VOC pada suatu tempat berpijak yang kokoh. Apabila para penda-hulunya agak enggan menggunakan kekerasan, Coen tidak segan sama sekali. Pada tahun 1614 dia sudah memberi tahu *Heeren XVII* bahwa VOC tidak akan dapat menguasai perdagangan tanpa melakukan perang dan sebaliknya tidak bisa melakukan perang tanpa menguasai perdagangan. Sejak zaman Coen inilah VOC di Asia benar-benar menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk memperkokoh kekuasaannya: menghancurkan semua yang merintanginya.

Apakah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Coen dan yang diikuti oleh para penggantinya (yang mencapai puncaknya

pada kejadian-kejadian yang digambarkan dalam bab 6) itu lebih menguntungkan dapat diperdebatkan. Di Maluku, VOC jelas mencapai kemajuan dalam menuju cita-citanya: monopoli rempah-rempah. Di wilayah ini penduduk setempat hampir tidak dapat melawan keunggulan angkatan laut VOC. Satu-satunya bentuk perlawanan yang akhirnya dapat mereka lakukan adalah melakukan penyelundupan yang melanggar peraturan-peraturan VOC. Dalam rangka menguasai satu sumber penyelundupan ini maka VOC membuang, mengusir, atau membantai seluruh penduduk Pulau Banda pada tahun 1620-an dan berusaha mengganti mereka dengan orang-orang Belanda pendatang yang mempekerjakan kaum budak. Dengan semakin banyaknya rempah-rempah yang dikirim Belanda ke Eropa, maka jaringan rempah-rempah yang dipegang oleh orang-orang Asia sendiri semakin haus untuk mendapatkan pasaran. Tetapi, apakah kebijakan-kebijakan semacam itu benar-benar memberi keuntungan kepada VOC tidaklah jelas. Cara-cara pembukuan VOC tidak memungkinkan dilakukannya perhitungan yang tegas mengenai rugi-laba yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan VOC di wilayah Maluku pada waktu itu. Akan tetapi, cukup beralasan untuk menduga bahwa ongkos-ongkos akibat kebijakan-kebijakan di Maluku itu setidak-tidaknya sebanding dengan pendapatannya.

Coen juga berhasil mendapatkan "pusat pertemuan" untuk VOC, dan dengan demikian dia mungkin telah menaburkan benih-benih kebangkrutan akhir perusahaan ini. VOC telah melakukan kegiatan perdagangan di Banten sejak tahun 1603, dan sejak tahun 1611 juga telah memiliki sebuah pos di Jayakerta (sekarang Jakarta). Coen lebih menyukai Jayakerta untuk dijadikan sebagai markas besar VOC yang permanen. Tempat ini memiliki pelabuhan yang sangat bagus, yang telah dipuji oleh Tomé Pires satu abad sebelumnya sebagai salah satu pelabuhan yang paling baik di Jawa, dan Coen mengira bahwa VOC dapat berkuasa sepenuhnya di sana. Jayakerta diperintah oleh seorang pangeran muslim bernama Pangeran Wijayakrama yang merupakan vasal Banten. Terjadi ketegangan antara Jayakerta dan Banten, di mana orang-orang Belanda maupun Inggris terlibat di dalamnya.

Pada bulan Desember 1618, Banten mengambil keputusan untuk menaklukkan Jayakerta dan VOC. Laksamana Inggris, Thomas Dale, didesak supaya pergi ke Jayakerta untuk mengusir orang-orang Belanda yang ada di sana. Di pelabuhan, Dale dihadang

oleh Coen bersama armadanya yang kecil, tetapi Dale dapat memaksa Coen mundur. Coen kemudian berlayar ke Maluku guna menghimpun armada yang lebih besar, sementara Dale dan Wijayakrama bersama-sama mengepung benteng Belanda. Ketika personel VOC mengambil keputusan untuk menyerah pada akhir Januari 1619, secara tiba-tiba muncul balatentara Banten menghalangi maksud mereka. Agaknya Banten tidak ingin pos VOC yang menyusahkan itu digantikan oleh pos Inggris yang tentunya juga akan sama menyusahkan bagi Banten. Thomas Dale melarikan diri menuju ke kapalnya dan tak lama kemudian prajurit-prajurit Banten memukul mundur Pangeran Wijayakrama ke wilayah pegunungan. VOC tetap berada di dalam pos mereka yang dikelilingi benteng, sedangkan balatentara Banten menduduki kota. Selama dua bulan tidak terjadi banyak peristiwa kecuali bahwa personel VOC, yang menghabiskan waktu mereka dengan mencampur-adukkan kemaksiatan dan kesalehan, mengambil keputusan pada tanggal 12 Maret 1619 untuk memberi nama baru bagi kota itu, "Batavia", sesuai dengan nama suku bangsa Jerman kuno di negeri Belanda.

Pada bulan Mei 1619, Coen berlayar kembali ke pelabuhan tersebut dengan tujuh belas buah kapal. Pada tanggal 30 Mei, dia menyerang kota, meratakannya dengan tanah, dan memukul mundur tentara Banten. Pusat perdagangan VOC di Batavia, yang berdiri tegak di antara puing-puing Jayakerta, kini menjadi markas besar kerajaan niaga VOC yang luas. Usaha merebut Batavia ini merupakan langkah paling penting yang ditempuh orang-orang Belanda sejak kapal pertama mereka berlayar ke Timur. VOC kini dapat membangun pusat militer dan administrasi di tempat yang relatif aman bagi pergudangan dan pertukaran barang, yang terletak di Nusantara bagian barat dan mudah mencapai jalur-jalur perdagangan ke Indonesia Timur, Timur Jauh, dan Eropa. Tempat ini berada di bawah kekuasaan tunggal VOC, tanpa ada satu kerajaan besar Indonesia yang cukup dekat untuk dapat membahayakannya.

Akan tetapi, timbul pula dampak-dampak yang kurang menguntungkan bagi VOC. Pendudukan permanen atas Batavia itu memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengelolanya. Meskipun jumlah penduduknya yang berkebangsaan Eropa selalu kecil, namun kota ini segera berkembang dengan pesat ketika orang-

orang Indonesia dan terutama orang-orang Cina pindah ke sana untuk mengejar keuntungan perdagangan yang ditawarkan Batavia kepada mereka. Penduduk ini perlu diberi makan, yang berarti bahan makanan harus diimpor, dan sumber terdekatnya ialah pantai utara Jawa. Perlu pula diimpor kayu untuk membangun kapal dan rumah. Meskipun kota ini tidak pernah berhasil ditaklukkan oleh kekuasaan Indonesia, tetapi ada kalanya kota ini harus dipertahankan dari serangan Banten dari barat dan Mataram dari timur, yang keduanya memusuhi VOC. Kesemua aspek ini mengandung arti adanya pengeluaran yang sangat besar dan mau tak mau akan melibatkan VOC dalam urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan Jawa, yang kelak akan menimbulkan bencana baginya. Batavia merupakan penyebab utama merosotnya kondisi keuangan VOC. Kota ini juga menjadi landasan bagi berkembangnya pemerintahan Belanda di Jawa kelak, tetapi tentu saja hanya setelah menimbulkan banyak pertumpahan darah dan kesulitan.[]

Bab 4 ....

Munculnya Negara-negara Baru, ± 1500–1650

NEGARA-NEGARA BARU yang menganut agama Islam muncul di Indonesia ketika orang-orang Eropa tiba untuk pertama kalinya, tetapi sebagian besar sejarah negara-negara tersebut didokumentasikan secara kurang baik. Akan tetapi, terdapat cukup banyak bukti yang terpercaya yang dapat digunakan untuk menyusun kembali sejarah mengenai tiga negara: Aceh, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Aceh terlibat secara mendalam dengan Semenanjung Malaya, karena ada tiga negara besar yang saling berkonfrontasi satu sama lain di Nusantara bagian barat pada awal abad XVI: Aceh, Malaka Portugis, dan Johor. Pada awal abad XVII, untuk beberapa waktu lamanya, Aceh muncul sebagai negara yang paling kuat, makmur, dan beradab di kawasan tersebut.

Penguasa Malaka, Sultan Mahmud, meninggalkan ibu kota negaranya yang telah dikalahkan oleh orang Portugis, dan setelah beberapa kali berpindah tempat, akhirnya dia berhasil menegakkan kembali dinasti Malaka di Johor pada tahun 1518. Portugis menyerang Johor pada tahun 1518, 1520, 1521, 1523, 1524, 1526, 1535, 1536, dan 1537. Johor, Aceh, dan Jepara (di Jawa sebelah utara) juga berusaha menghancurkan pelabuhan baru milik bangsa Eropa itu; pada tahun-tahun 1513, 1537, 1539, 1547, 1551, 1568, 1573, 1574, 1575, 1587, 1615, dan 1629 terjadi serangan-serangan besar terhadap Malaka, tetapi semuanya dapat dipukul mundur oleh pihak Portugis. Pertempuran yang paling penting artinya bagi sejarah Semenanjung Malaya kemungkinan besar adalah serangan Portugis terhadap Johor pada tahun 1536, ketika Sultan Alauddin Riayat Syah I (m. 1529–64) kehilangan

begitu banyak prajuritnya sehingga terpaksa bersedia berdamai dengan pihak Portugis. Sesudah itu, terbentuk persekutuan yang dipaksakan antara Johor dan Malaka Portugis, yang sama-sama memandang Aceh sebagai musuh mereka yang paling besar. Kenyataannya masih terjadi konflik-konflik antara keduanya, dan kapal-kapal milik orang Asia diharuskan singgah di Johor dan membayar cukai sehingga mengurangi penghasilan Malaka. Pada tahun 1551, Johor mengepung lagi Malaka, sedangkan pihak Portugis merampok ibu kota Johor pada tahun 1587. Akan tetapi, setelah tahun 1536, permusuhan-permusuhan seperti itu tidak lagi biasa. Pihak Portugis tidak selalu mencoba merintangi pertumbuhan Johor sebagai pusat perdagangan, dan kadang-kadang gubernur-gubernur Malaka pun mencari keuntungan dengan berdagang sendiri di situ. Pada waktunya nanti, kedatangan VOC akan membuka jalan bagi terbentuknya suatu persekutuan VOC–Johor untuk melawan Portugis, yang berakhir dengan penaklukan Malaka oleh VOC pada tahun 1641.

Di seberang Selat Malaka, Aceh sedang tumbuh sebagai sebuah negara yang kuat pada saat kedatangan orang-orang Portugis. Memang, seandainya pihak Portugis tidak merebut Malaka pada tahun 1511, Aceh mungkin melakukan hal yang sama karena orang-orang Indonesia juga tergiur oleh kekayaan Malaka. Sebelum kira-kira tahun 1500, Aceh belumlah begitu menonjol. Sultan pertama kerajaan yang sedang tumbuh ini adalah Ali Mughayat Syah (m. 1514–30). Selama masa pe merintahannya, sebagian besar komunitas dagang Asia yang bubar karena direbutnya Malaka oleh Portugis menetap di Aceh. Pada tahun 1520, Ali Mughayat Syah memulai serangan-serangannya. Pada tahun itu, dia berhasil merebut Daya yang terletak di pantai barat Sumatera bagian utara, yang menurut Tomé Pires belum menganut agama Islam. Sesudah itu, Ali Mughayat Syah memulai penaklukan-penaklukannya ke pantai timur, merebut kekuasaan atas daerah-daerah penghasil lada dan emas. Dengan melakukan ini, dia mulai membentuk suatu kerajaan yang terbuka bagi ketegangan-ketegangan di dalam negeri. Istana Aceh merupakan suatu pusat militer dan pusat kerajaan yang kelangsungan hidup perekonomiannya tergantung pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai pelabuhan pusat bagi kawasan tersebut; kepentingan-kepentingannya tentu saja bertentangan dengan kepentingan pelabuhan-

pelabuhan produsen yang ingin menyelenggarakan perdagangan bebas mereka sendiri. Mula-mula Ali Mughayat Syah menaklukkan Deli; pada tahun 1524, dia merebut Pedir dan Pasai setelah berhasil mengusir garnisun Portugis yang ditempatkan di situ. Sesudah itu, dia menyerang Aru. Dia juga menghadapi dan berhasil mengalahkan sebuah armada laut Portugis pada tahun 1524. Kini telah mulai berkobar dua perang: tantangan Aceh terhadap kekuasaan Portugis di lautan dan terhadap tuntutan-tuntutan Johor atas daerah-daerah di Sumatera. Sejak sekitar tahun 1540, Aru menjadi medan perang antara Aceh dan Johor, dan baru pada tahun 1613 akhirnya Sultan Iskandar Muda dari Aceh berhasil merebut daerah itu. Akan tetapi, persaingan yang lebih besar yang tersembunyi di balik perang-perang itu, yaitu persaingan untuk menjadi pengganti Malaka sebagai satu-satunya tempat penyaluran barang di Nusantara bagian barat dan negara yang paling kuat di kawasan Selat, tidak berhasil dimenangkan oleh satu pihak pun.

Putra tertua Ali Mughayat Syah yang menjadi penggantinya, Salahuddin (m. 1530–±37/39), dianggap merupakan seorang penguasa yang lebih lemah. Pada tahun 1537, suatu serangan yang dilancarkan oleh pihak Aceh terhadap Malaka mengalami kegagalan dan kira-kira pada masa itulah Salahuddin diturunkan dari tahta melalui suatu kudeta. Kaitan antara kedua peristiwa itu tidak jelas. Djajadiningrat yakin bahwa Salahuddin sudah digulingkan oleh saudaranya, Alauddin Riayat Syah al-Kahar, sebelum serangan terhadap Malaka itu dilancarkan, sedangkan Lombard yakin bahwa Salahuddin-lah yang melakukan serangan itu dan ia baru digulingkan oleh saudaranya pada kira-kira tahun 1539.

Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar (m. ±1537/9–71) adalah salah satu dari prajurit-prajurit Aceh yang terbesar. Dia dipercayai telah menyerang rakyat Batak di sebelah selatan Aceh pada tahun 1539 sesudah penguasa daerah itu menolak memeluk agama Islam. (Beralihnya kelompok-kelompok masyarakat Batak ke dalam agama Islam dan Kristen sebenarnya baru dimulai pada abad XIX). Sesudah itu, dia menyerang Aru, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pasukan Johor, dan Johor menguasai Aru selama 24 tahun berikutnya. Pada tahun 1547, dia pribadi turut serta dalam suatu penyerangan terhadap Malaka yang mengalami kegagalan. Setelah berlangsungnya masa tenang selama beberapa waktu, Alauddin kembali melakukan serangan pada tahun 1560-

an dan kali ini dia lebih berhasil. Pada tahun 1564 atau 1565, dia merampok Johor, membawa serta Sultan Alauddin Riayat Syah I ke Aceh dan kemudian membunuhnya, serta mengambil-alih kekuasaan atas Aru. Pada tahun 1568, dia menyerang Malaka lagi, dan lagi-lagi gagal. Pada masa itu, Aceh tidak pernah mampu mendapatkan suatu tempat berpijak yang tetap di seberang Selat Malaka. Ketika Sultan Johor (seorang putra dari raja yang dibunuh tadi) yang telah didudukkan di singgasana oleh pihak Aceh pada tahun 1564/1565 digulingkan, maka Alauddin al-Kahar mengirim lagi suatu armada pada tahun 1570 agar Johor tetap tunduk kepadanya; tetapi pertahanan Johor begitu kuatnya sehingga pihak Aceh menarik diri secara diam-diam. Alauddin al-Kahar dikenang dalam tradisi Aceh bukan hanya sebagai seorang raja pejuang saja, melainkan juga sebagai penguasa yang melembagakan pembagian masyarakat Aceh menjadi kelompok-kelompok garis keturunan administratif (kaum atau sukeë); tetapi masih belum jelas mengenai benar atau tidaknya riwayat ini.

Selama bagian akhir abad XVI, Aceh tetap merupakan suatu kekuatan militer yang sangat penting artinya di kawasan Selat Malaka. Akan tetapi, negara ini sering dihambat oleh pertikaian dalam negeri. Antara tahun 1571 dan 1607, Aceh diperintah oleh delapan orang sultan, dua di antaranya (1579–89) bukanlah keturunan asli Aceh melainkan dari garis keturunan Raja Perak di Semenanjung Malaya yang diculik. Salah satu di antara kedelapan orang sultan tersebut memerintah selama lima belas tahun (Alauddin Riayat Syah al-Mukamil, 1589–1604), tetapi beberapa orang sultan lainnya hanya memerintah selama beberapa bulan atau tahun saja. Pada masa itu terjadi banyak pembunuhan, kudeta, dan petualangan militer yang gagal. Di Aceh, seperti halnya di semua kerajaan Indonesia lainnya, berhasilnya penyelenggaraan kekuasaan militer tergantung pada seorang penguasa pusat yang kuat, yang dapat mempertahankan tetap berlakunya konsensus di kalangan elite; apabila penguasa seperti itu tidak ada, maka akan segera timbul banyak konflik di dalam negeri.

Diperlukan adanya penjelasan mengenai peranan agama Islam dalam peperangan-peperangan yang terjadi di Nusantara bagian barat. Beberapa orang penulis ingin melihat sebagian dari peperangan-peperangan melawan Malaka Portugis sebagai perang agama. Beberapa orang di antaranya melihat adanya keanehan

ketika ternyata, dalam peperangan-peperangan itu, orang-orang Indonesia yang beragama Islam tidak bersatu melawan musuh yang beragama Kristen. Tafsiran-tafsiran semacam itu tampaknya mencerminkan pandangan Eropa di kemudian hari mengenai konflik-konflik Islam–Kristen. Pada abad XVI, orang-orang Portugis merupakan satu-satunya kekuatan yang beragama Katolik di antara tiga kekuatan besar di Selat Malaka. Dua kekuatan lainnya, Aceh dan Johor, adalah negara-negara yang menganut agama Islam. Dalam berbagai persetujuan yang ada selama masa peperangan ini, identitas agama bukanlah faktor yang menentukan. Negara-negara yang tetap merupakan musuh adalah Johor dan Aceh, yang kedua-duanya adalah negara Islam. Perbedaan agama tidak menghalangi Johor dan Portugis untuk bekerja sama dan bersifat toleran sampai batas-batas tertentu, baik dalam perang maupun dalam perdagangan. Ketika VOC datang, Johor menjalin hubungan persahabatan dengan orang-orang Belanda yang beragama Protestan, sedangkan pihak Portugis berusaha membentuk persekutuan dengan Aceh, sekalipun tidak berhasil. Agama tidak dapat menjelaskan peperangan yang timbul di Selat Malaka, yang sebab-musabab sebenarnya terletak pada benturan di antara ketiga negara besar itu dalam rangka mencapai hegemoni perdagangan dan kekuasaan di kawasan tersebut. Pada akhir abad XVI, masih tetap belum jelas pihak mana yang akan berhasil menjadi pemenang dalam pertikaian ini. Tak satu negara pun berhasil muncul sebagai 'Malaka baru', dan arus perdagangan yang lancar, yang seharusnya menjadi dasar bagi suatu pusat perdagangan seperti itu, terus-menerus terganggu oleh peperangan dan tidak adanya suatu pusat perdagangan yang tunggal. Komunitas dagang Asia yang telah menjadi dasar bagi keberhasilan Malaka masih tetap tersebar di beberapa pelabuhan di kawasan Malaya-Indonesia.

Pada awal abad XVII, penguasa yang terbesar di antara penguasa-penguasa Aceh menduduki singgasana. Dalam waktu singkat, Sultan Iskandar Muda (1607–36) membentuk Aceh menjadi negara yang paling kuat di Nusantara bagian barat. Keberhasilan-keberhasilannya didasarkan pada kekuatan militer yang mengesankan, termasuk angkatan laut yang memiliki kapal-kapal besar yang mampu mengangkut 600-800 orang prajurit, pasukan kavaleri yang di antaranya menggunakan kuda-kuda Persia, satuan pasukan gajah, artileri yang banyak, dan pasukan-pasukan milisi

infantri. Pada tahun 1612, dia berhasil merebut Deli dan kemudian Aru pada tahun 1613. Pada tahun 1613, dia juga menyerang dan berhasil mengalahkan Johor, lalu membawa serta Sultan Johor Alauddin Riayat Syah II (m. 1597–1613) bersama-sama dengan anggota-anggota keluarga kerajaan itu yang lain, juga sekelompok pedagang VOC, ke Aceh. Akan tetapi, usaha Iskandar Muda untuk memelihara kekuasan Aceh yang permanen atas kesultanan Johor mengalami kegagalan. Pihak Johor berusaha keras untuk menuntut kembali kemerdekaannya dan berhasil memukul mundur garnisun Aceh tidak lama sesudah tahun 1613. Kemudian Johor membentuk persekutuan dengan Pahang, Palembang, Jambi, Indragiri, Kampar, dan Siak dalam usahanya melawan Aceh. Akan tetapi, serangan-serangan yang agresif dari pihak Iskandar Muda masih terus berlanjut. Pada tahun 1614, dia berhasil mengalahkan armada Portugis di Bintan; pada tahun 1617, dia berhasil merebut Pahang dan memboyong penguasanya, Sultan Ahmad Syah; pada tahun 1620, Kedah berhasil ditaklukkannya; pada tahun 1623, dia merampok lagi ibu kota Johor; pada tahun 1624/5, dia berhasil merebut Nias.

Akan tetapi, pada tahun 1629, gerakan-gerakan ekspansi Iskandar Muda itu berhasil dihentikan oleh Portugis. Akan terlihat di bawah ini bahwa pendiri kerajaan Jawa yang terbesar, Sultan Agung, juga mengalami kemunduran di tangan orang-orang Eropa pada tahun yang sama. Iskandar Muda mengirim suatu ekspedisi yang terdiri atas beberapa ratus buah kapal untuk menggempur Malaka pada tahun 1629, tetapi ekspedisi ini dihancurkan seluruhnya oleh Portugis. Menurut laporan pihak Portugis, semua kapal Iskandar Muda dan 19.000 prajuritnya hilang. Setelah itu, Iskandar Muda hanya mengirim dua ekspedisi laut lagi, yaitu pada tahun 1630/1 dan 1635, yang kedua-duanya bertujuan menumpas pemberontakan-pemberontakan di Pahang. Setelah tahun 1629, Johor, yang bebas dari ancaman serangan Aceh, mulai berusaha menegakkan kembali pengaruhnya di Semenanjung Malaya dan kawasan Selat bagian selatan. Iskandar Muda telah berhasil membentuk Aceh sebagai kekuasaan yang tertinggi atas pelabuhan-pelabuhan perdagangan yang penting di Sumatera bagian utara. Akan tetapi, dia tidak pernah berusaha menaklukkan Lampung, daerah penghasil lada di Sumatera bagian selatan, yang berada di bawah kekuasaan Banten (lihat di bawah); dia juga tidak pernah mampu menegakkan hegemoni Aceh di Selat Malaka.

Negara Aceh di bawah pemerintahan Iskandar Muda, dalam masa yang dianggap sebagai 'zaman keemasan'-nya, sebenarnya berdiri di atas fundasi-fundasi yang rapuh. Negara ini menghadapi masalah utama yang sama seperti yang dihadapi kesultanan Malaka, Malaka Portugis, Batavia VOC, ataupun negara-negara lain yang bercita-cita menjadi suatu negara perdagangan pantai yang besar: bagaimana cara menghidupi penduduk-penduduk yang bukan kaum agraris tetapi yang sangat diperlukan bagi keberhasilannya dalam perang maupun dalam perdagangan. Wilayah pedalaman Aceh tidak dapat dikendalikan dengan mudah atau, juga tidak mudah menghasilkan surplus bahan pangan yang cukup memadai untuk menopang kota Aceh. Memang, ibu kota negara hanya memiliki pola hubungan yang tidak begitu erat dengan wilayah pedalaman Aceh. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang dominan di kota, sedangkan penduduknya terdiri atas berbagai kebangsaan. Pada garis besarnya, Aceh merupakan sebuah negara perdagangan internasional yang terletak di pantai Aceh yang diperintah oleh bangsa Melayu, tetapi tidak banyak berbeda dari negara-negara Melayu lainnya. Karena ibu kota negara selalu bergantung pada wilayah pedalaman, maka usaha untuk mendapatkan tawanan-tawanan perang yang dapat dipekerjakan sebagai budak-budak pertanian yang terletak di dekat ibu kota merupakan salah satu tujuan dari serangan-serangan yang dilancarkan Iskandar Muda. Lombard melukiskan kemunduran Aceh pada akhir abad XVII sebagai bagian dari keberhasilannya sebelumnya, karena daerah perkotaan telah berkembang dalam ukuran yang lebih besar daripada kemampuannya untuk menghidupi penduduknya.

Ada pula alasan-alasan politik yang menyebabkan mundurnya Aceh kemudian. Seperti halnya di tempat-tempat lain, di bawah sultan terdapat kelompok-kelompok elite yang dukungannya mempunyai arti yang sangat penting bagi kesultanan, tetapi yang sering juga harus mendapat tekanan yang kuat atau penindasan yang keras untuk memberikan dukungan itu. Kalangan elite Aceh, yang disebut orang kaya (orang kuat), dapat dikendalikan semasa pemerintahan Iskandar Muda. Dia selalu mengawasi mereka dengan waspada, dan melalui monopoli raja terhadap hak-hak perdagangan, Sultan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap kaya, sedangkan pihak-pihak lain selalu tergantung pada kemurahan hatinya. Dia menciptakan suatu kelompok bangsawan

baru yang terdiri atas para 'panglima perang' (dalam bahasa Melayu disebut hulubalang dan dalam bahasa Aceh uleëbalang); mereka menguasai daerah-daerah (mukim) berdasarkan hak milik feodal. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, anggota-anggota kelompok elite ini berhasil dipaksa atau dibujuk untuk mendukung cita-cita Sultan. Akan tetapi, sultan-sultan berikutnya kurang berhasil dalam hal ini. Kelompok elite Aceh ini, baik yang bertempat tinggal di ibu kota maupun yang menetap di wilayah pedalaman ataupun para pembesar yang menguasai pelabuhan-pelabuhan taklukan lainnya, sangat tertindas karena aksi-aksi penyerangan Iskandar Muda yang memerlukan biaya yang begitu besar dan juga karena pemerintahan tangan besinya. Untuk mencegah terulangnya kembali suatu pemerintahan tirani yang terpusat seperti itu, mereka berusaha mencari kesempatan untuk membatasi kekuasaan raja.

Iskandar Muda telah memerintahkan agar putranya sendiri dibunuh dan menunjuk Iskandar Tsani Alauddin Mughayat Syah (1636–41), putra Sultan Ahmad dari Pahang, sebagai penggantinya. Dia ini telah diboyong ke Aceh bersama-sama ayahnya pada tahun 1617 dan kemudian menjadi menantu Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya tidak pernah lagi dilakukan aksi-aksi yang agresif, dan istana menjadi sangat terkenal sebagai pusat pengetahuan agama Islam (lihat bab 5). Iskandar Tsani tampaknya merupakan seorang penguasa yang berjasa, tetapi masa pemerintahannya hanya berlangsung singkat. Setelah dia meninggal, kalangan elite Aceh menegakkan pengaruh dan kepentingan pribadi mereka dan mencegah munculnya penguasa kuat lainnya di Aceh sampai abad XIX. Mereka menempatkan janda Iskandar Tsani (putri Iskandar Muda) di atas tahta dengan gelar Ratu Taj ul-Alam (m. 1641–75), dan mengadakan perjanjian dengan Johor yang menyebutkan bahwa mulai saat itu masing-masing pihak akan memikirkan urusannya sendiri. Mulai masa itu, Johor berkembang menjadi sebuah negara yang sangat makmur dan mempunyai pengaruh yang sangat besar, karena pada tahun 1641 bukan hanya ancaman dari Aceh saja yang hilang, melainkan juga Portugis yang berhasil diusir oleh Johor dan VOC dari Malaka.

Aceh memasuki masa perpecahan di dalam negeri yang panjang, dan negara ini tidak lagi menjadi kekuatan yang penting di luar ujung utara Sumatera. Empat orang ratu memerintah negeri

ini antara tahun 1641 dan 1699, dan kekuasaan raja mulai terbatas hanya di ibu kota negara saja. Para uleëbalang berubah menjadi penguasa-penguasa yang turun-temurun di wilayah-wilayah yang terpencil, dan para pemimpin keagamaan (imam atau ulama) muncul sebagai satu-satunya sumber ancaman terhadap kekuasaan mereka. Kesultanan menjadi sebuah lembaga simbolis yang lemah. Sejak tahun 1699 hingga 1838, negara ini diperintah oleh sebelas orang sultan yang hampir tidak berarti sama sekali, termasuk tiga orang berkebangsaan Arab (1699–1726), dua orang Melayu (keduanya memerintah dalam tahun 1726), dan enam orang Bugis (1727–1838).

Sementara Aceh tumbuh sebagai kekuatan yang menonjol di Nusantara bagian barat, di Jawa berdiri negara-negara baru yang sudah menganut agama Islam. Mula-mula ada beberapa negara yang berpengaruh, tetapi pada awal abad XVII hanya tinggal tiga pusat politik utama yang mengonsolidasikan kekuasaan mereka: Banten di Jawa Barat, Mataram di wilayah pedalaman Jawa Tengah, dan Surabaya di Jawa Timur. Bukti-bukti mengenai abad XVI terutama terdiri atas beberapa catatan orang Portugis yang hidup di zaman itu (di antaranya yang paling lengkap informasinya adalah karya Tomé Pires yang berjudul *Suma Oriental*) dan tradisi-tradisi sejarah Jawa dari zaman belakangan yang merupakan campuran yang rumit antara dongeng dan sejarah. Oleh karena itulah maka banyak peristiwa penting pada masa itu tidak dapat diketahui secara lengkap. Baru pada awal abad XVII-lah sumber-sumber sejarah menjadi semakin jelas dengan adanya dokumen-dokumen VOC.

Negara Islam yang paling panting di wilayah pantai utara Jawa pada awal abad XVI adalah Demak. Pada masa itu, Demak merupakan sebuah pelabuhan laut yang baik, walaupun timbunan lumpur yang sangat banyak di pantai pada abad-abad berikutnya telah menjadikan Demak sekarang terletak beberapa kilometer dari laut. Asal-usul negara ini sangat tidak jelas. Tampaknya Demak didirikan pada perempat terakhir abad XV oleh seorang asing yang beragama Islam, yang kemungkinan besar seorang Cina bernama Cek Ko-po. Putranya kemungkinan adalah orang yang diberi nama 'Rodim' oleh orang-orang Portugis, yang kemungkinan besar sama dengan Badruddin atau Kamaruddin; tampaknya dia meninggal sekitar tahun 1504. Putra Rodim, atau mungkin adiknya, adalah orang yang menegakkan hegemoni sementara

Demak di Jawa. Dia dikenal dengan nama Trenggana, dan tradisi-tradisi Jawa yang kemudian menyebutkan bahwa dia bergelar 'sultan', walaupun ini mungkin merupakan anakronisme. Trenggana agaknya memerintah Demak dua kali, sekitar tahun 1505–18 dan sekitar 1521–46; kurun waktu antara dua masa pemerintahan tersebut diisi oleh iparnya, Raja Yunus dari Jepara. Trenggana mengatur pengluasan pengaruh Demak ke arah timur dan barat, dan selama masa pemerintahannya yang kedualah kerajaan Hindu-Budha yang terakhir di Jawa Timur runtuh sekitar tahun 1527.

Apa yang telah terjadi di Majapahit sejak akhir abad XV juga tidak jelas, dan apabila tidak berhasil ditemukan sumber-sumber yang baru, kemungkinan besar tidak akan pernah diketahui secara pasti. Tampaknya pada suatu waktu sebelum tahun 1486, Majapahit telah ditaklukkan oleh negara lain yang juga belum memeluk agama Islam atau oleh suatu kelompok di dalam tubuh keluarga Kerajaan Majapahit yang menentangnya. Pada tahun 1486, garis keturunan Raja Majapahit (atau salah satu cabangnya yang telah memerintah sebelumnya) telah ditegakkan kembali oleh pendahulu seorang raja yang bernama Girindrawardhana Ranawijaya (yang meninggalkan prasasti-prasasti pada tahun 1486). Suatu waktu antara tahun 1486 dan masa kehadiran Tomé Pires (1512–5), pusat kerajaan Hindu-Budha tersebut dipindahkan ke Kediri karena suatu alasan tertentu; apakah kerajaan itu masih tetap berada di bawah dinasti Majapahit tidaklah jelas. Bagaimanapun juga, pada waktu itu kerajaan Hindu-Budha tersebut sedang berada di ambang kehancurannya; terkoyak-koyak oleh pertikaian dalam negeri dan terancam oleh negara-negara baru yang bermunculan di wilayah pantai.

Pada masa pengluasan militer Demak, kerajaan Hindu-Budha (di Kediri) berhasil ditaklukkan sekitar tahun 1527. Kronik-kronik istana Jawa sesudah masa itu melukiskan penaklukan itu dengan berbagai cara, tetapi kesemuanya memperlihatkan suatu kecenderungan untuk membuktikan bahwa Demak kini mewarisi legitimasi Majapahit (kronik-kronik itu mengesampingkan adanya kemungkinan bahwa akhirnya dinasti Majapahit tidak berkuasa lagi). Demak digambarkan sebagai pengganti langsung Majapahit dan 'Sultan' Demak yang pertama, Raden Patah, disebutkan sebagai putra raja Majapahit yang terakhir dengan seorang putri

berkebangsaan Cina, Putri Cina, yang telah diusir dari istana sebelum putranya lahir. Di dalam teks-teks seperti itu, jatuhnya Majapahit biasanya ditempatkan pada akhir abad XIV Jawa (1400 S/1478–9 M). Pergantian abad, belakangan, dianggap sebagai saat yang biasanya terjadi pergantian dinasti atau kerajaan. Legenda-legenda semacam itu hanya menceritakan sedikit tentang kejadian-kejadian yang sesungguhnya, tetapi menceritakan banyak tentang keinginan istana-istana yang muncul belakangan untuk melihat kesinambungan dan legitimasi dinasti sebagai unsur-unsur yang tidak diputus oleh islamisasi.

Usaha-usaha penaklukan yang dilakukan Demak telah memaksa tunduknya pelabuhan-pelabuhan besar lainnya, dan menjangkau banyak wilayah pedalaman Jawa Timur yang mungkin sekali belum menganut agama Islam. Sumber-sumber tidak memberikan kepastian mengenai aksi-aksi yang dilakukan Demak tersebut, tetapi tampaknya telah terjadi aksi-aksi penaklukan berikutnya. Tuban ditaklukkan sekitar tahun 1527. Tuban merupakan sebuah kota pelabuhan Majapahit yang sangat tua yang telah disebutkan oleh sumber-sumber Cina sejak abad XI; meskipun sudah menganut agama Islam sebelum tahun 1527, namun Tuban tetap setia kepada penguasa Hindu-Budha di wilayah pedalaman. Madiun berhasil direbut sekitar tahun 1529–30; pada tahun 1530-an, Surabaya (yang sudah menjadi pelabuhan Islam) mengakui kekuasaan Demak, dan Pasuruan berhasil ditaklukkan juga; pada tahun 1543, Gunung Penanggungan (suatu tempat yang keramat bagi penduduk Jawa Timur yang beragama Hindu) berhasil ditaklukkan; pada tahun 1540-an atau 1550-an, Kediri diserang lagi; dan sekitar tahun 1545, Malang berhasil direbut. "Sultan" Trenggana tampaknya terbunuh dalam sebuah ekspedisi melawan Panarukan pada tahun 1546.

Di Jawa bagian barat, Demak mendukung pertumbuhan Banten dan Cirebon. Pada akhir abad XV, tampaknya Cirebon diduduki oleh orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, tetapi masa kejayaannya dikaitkan secara tradisional dengan salah seorang dari kesembilan wali, Sunan Gunungjati (w. ±1570). Konon dia dilahirkan di Pasai di Sumatera Utara, tetapi ketika orang-orang Portugis menduduki kota pelabuhan itu (1521–4), dia naik haji ke Mekah. Saat pulang dari Mekah, dia pergi ke Demak dan mengawini seorang saudara perempuan Trenggana.

Sebuah negara Hindu di Jawa bernama Sunda kelihatannya sudah ada di wilayah Banten di Jawa Barat dari abad X. Lada adalah produk ekspor terbesar dari daerah ini pada abad XII dan, pada abad XIII dan XIV, tampaknya menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang besar. Pada abad XIV dan XV, Banten kemungkinan secara politik telah didominasi oleh negara pedalaman Pajajaran, namun pada tahun 1500, tingkat perdagangan lada internasional yang semakin cepat memulihkan kembali kekayaannya. Kejatuhan Malaka ke Portugis di tahun 1511 dan menyebarnya perdagangan dan para pedagang Asia ke pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara sebagai akibat dari kejatuhan itu tampaknya telah memberikan keuntungan lebih jauh bagi Banten. Penguasanya yang Hindu-Budha mungkin secara nominal masih merupakan vasal Pajajaran, namun kemunduran Pajajaran memberi penguasa Banten ini peluang untuk bertindak dengan kemandirian yang lebih besar. Banten menolak islamisasi dan terancam oleh Demak yang sudah masuk Islam. Untuk itu, penguasanya lalu memutuskan untuk membangun aliansi anti-Demak bersama Portugis. Pada tahun 1522, Portugis bersepakat dengan Banten untuk mendirikan sebuah pos di perbatasan timurnya sebagai penghadang pasukan muslim dari timur. Namun, ketika mereka kembali ke Banten lima tahun kemudian untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, Portugis menjadi tahu bahwa mereka sudah amat terlambat.

Sekitar tahun 1523–4, Sunan Gunungjati berangkat bersama-sama tentara Demak untuk mendirikan suatu pusat perdagangan yang juga merupakan pangkalan yang strategis di Jawa Barat. Dia mengambilalih Banten, menggulingkan penguasa setempat, dan menolak kesepakatan dengan Portugis ketika yang terakhir ini datang untuk membangun pos mereka pada tahun 1527. Pelabuhan utama kedua Pajajaran, Sunda Kelapa (sekarang Jakarta), juga direbut oleh kaum muslim. Mereka kemudian mengganti namanya menjadi Jayakerta atau Surakarta (keduanya nama-nama Jawa yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti 'jaya dan makmur'). Banten diperintah oleh Gunungjati sebagai vasal Demak, tetapi keturunannya kelak bebas dari kekuasaan Demak. Pada suatu waktu setelah tahun 1552, Gunungjati pindah ke Cirebon dan membentuk garis keturunan kerajaan lain yang juga kelak memerintah secara merdeka.

Identitas dan kegiatan-kegiatan Sunan Gunungjati sebagian besar diketahui dari kisah-kisah semi-dongeng, dan masih tetap terdapat banyak ketidakpastian. Tidak mustahil bahwa penaklukan-penaklukan militer yang dinisbahkan kepadanya lebih merupakan usaha-usaha orang lain yang oleh pihak Portugis dikenal sebagai 'Tagaril' dan 'Falatehan' (mungkin Fadhillah Khan atau Fatahillah), yang mungkin dikacaukan dengan Gunungjati dalam beberapa dongeng. Sebuah naskah bernama *Purwaka Caruban Nagari* membedakan antara Gunungjati dan Fadhillah; dinyatakan naskah ini ditulis pada tahun 1720, tetapi ada alasan untuk menyangsikan keasliannya. Kalaupun tarikh 1720 memang benar, namun ini masih tetap ada selisih dua abad dengan berlangsungnya peristiwanya, dan cara penyelesaian naskah ini atas masalah-masalah yang menyangkut Gunungjati harus disangsikan.

Penguasa Banten yang kedua, Hasanuddin (m. ± 1552–70), memperluas kekuasaan Banten ke daerah penghasil lada di Sumatera Selatan, Lampung, yang sudah sejak lama mempunyai hubungan dengan Jawa Barat. Dengan demikian, dia telah meletakkan dasar-dasar bagi kemakmuran Banten sebagai sebuah pelabuhan lada. Penguasa yang ketiga, Molana Yusup (m. ± 1570–80), berhasil menaklukkan Pajajaran sekitar tahun 1579. Dengan jatuhnya Pajajaran, maka lenyaplah negara besar terakhir yang menganut agama Hindu-Budha di Jawa, walaupun masih ada sebuah negara pra-Islam yang lebih kecil di Ujung Timur dan masih tetap ada komunitas-komunitas kecil non-Islam di beberapa wilayah. Setelah Pajajaran berhasil ditaklukkan, maka konon kalangan elite Sunda memeluk agama Islam.

Pada pertengahan kedua abad XVI, harapan-harapan Demak untuk menguasai Jawa hancur berantakan. Penguasa Demak yang keempat, yang menurut tradisi bernama Sultan Prawata (m. ± 1546–61?), agaknya tidak berusaha melancarkan aksi-aksi seperti yang telah dilakukan pendahulunya, Trenggana. Sulit untuk diketahui berapa jauh sesungguhnya hegemoni Demak berlaku pada 'zaman keemasan'-nya, yaitu selama masa pemerintahan Trenggana yang kedua (± 1521–46). Masa itu tampaknya merupakan zaman kekacauan dan perpecahan, dan "kerajaan" Demak barangkali tidak lebih daripada suatu federasi yang longgar dari sejumlah negara. Disangsikan apakah suatu kekuasaan administratif yang terpusat pernah tercapai, dan usaha-usaha penaklukan



Mesjid di Kudus, pesisir utara Jawa, bertarikh 956 H/1549 M, yang mencerminkan arsitektur Jawa Kuno

yang dilakukan Demak barangkali lebih banyak bersifat serangan-serangan perusakan (dan pengumpulan penduduk). Faktor-faktor geografis yang digambarkan di dalam bab 2 membatasi kekuasaan Demak seperti halnya negara lainnya dalam sejarah Jawa.

Beberapa negara lain juga memainkan peranan yang penting pada awal abad XVI, tetapi tak satu pun dapat menandingi usaha Demak dalam memperluas kekuasaannya di seluruh Pulau Jawa. Kudus merupakan semacam kota suci Islam. Kota ini merupakan

satu-satunya tempat di Jawa yang secara permanen menggunakan nama Arab (*al-Quds,* Yerusalem). Kemunculannya sebagai pusat pengetahuan agama Islam mempunyai kaitan dengan salah seorang dari kesembilan wali, Sunan Kudus, yang konon merupakan imam masjid Demak yang kelima dan pemimpin utama penyerangan tahun 1527 terhadap "Majapahit" sebelum pindah ke Kudus. Masjid Kudus, yang terkenal karena tetap dipertahankannya bentuk-bentuk arsitektur pra-Islam, seperti pintu-pintu Jawa Kuno yang berdaun pintu dua (candi bentar), maupun karena namanya *al-Manar* atau *al-Aqsa* (seperti masjid Yerusalem), bertarikh tahun 956 H (1549 M) yang dipahatkan di atas mihrab (relung yang menunjukkan arah Mekah bagi orang yang salat).

Jepara merupakan pelabuhan lain yang juga memainkan peranan penting. Pada tahun 1513, rajanya, Yunus, memimpin suatu pasukan yang konon terdiri atas seratus kapal dan lima ribu prajurit dari Jepara dan Palembang menyerang Malaka Portugis, tetapi menderita kekalahan. Antara sekitar tahun 1518 dan 1521 tampaknya dia memerintah sebagai raja atas Demak. Akan tetapi, pengaruh Jepara mencapai tingkat yang terbesar pada akhir abad XVI pada waktu daerah ini diperintah oleh seorang ratu bernama Ratu Kalinyamat. Pada tahun 1551, Jepara membantu Johor dalam serangan yang gagal terhadap Malaka; pada tahun 1574, Jepara sekali lagi mengepung Malaka selama tiga bulan.

Menurut dokumen-dokumen Cina, pelabuhan Gresik didirikan oleh seorang Cina pada abad XIV. Pada tahun 1411, penguasa Gresik, yang aslinya adalah seorang penduduk Kanton, mengirim suatu perutusan kepada kaisar Cina. Gresik menjadi sebuah pusat perdagangan internasional yang besar pada abad XV. Menurut Tomé Pires, kota pelabuhan ini merupakan "permata Jawa dalam pelabuhan-pelabuhan perdagangan" (Cortesão, *Suma Oriental,* 193). Kota ini juga menjadi sebuah pusat agama Islam yang besar karena situs Giri yang terletak di dekatnya menjadi markas besar Sunan Giri yang pertama, yang dianggap sebagai salah seorang yang terbesar dari kesembilan wali. Dia mendirikan suatu garis keturunan penguasa-penguasa keagamaan Giri yang bertahan sampai tahun 1680, sedangkan para wali lainnya tidak mempunyai pengganti bagi kekuasaan mereka. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Sunan Giri telah memainkan peranan sangat penting dalam penaklukan terhadap "Majapahit", dan telah memerintah Jawa selama empat puluh hari sesudah runtuhnya

kerajaan tersebut guna membersihkan Jawa dari sisa-sisa pra-Islam. Sampai tahun 1680, Giri tetap merupakan lawan utama bagi para pendiri kerajaan di wilayah pedalaman, dan kekuasaan keagamaan yang ada hubungannya dengan Giri ditakuti dan dibenci oleh para penguasa Mataram. Sunan yang pertama dan para penggantinya dianggap memainkan peranan penting dalam penyiaran agama Islam ke Lombok, Makasar, Kutai (Kalimantan Timur), dan Pasir (Kalimantan Tenggara) melalui penaklukan, perkawinan-perkawinan, ataupun melalui dakwah para bekas muridnya. Ada hubungan yang sangat jelas antara Giri dan Maluku. Zainal Abidin, penguasa Ternate pada tahun 1486–1500, konon adalah murid Sunan Giri pada masa mudanya; sampai tahun 1618, rakyat Ambon terus mengirim upeti berupa cengkih kepada Giri; dan pemimpin masyarakat Hitu, Kakiali (w. 1643), pernah pula belajar di tempat Sunan Giri.

Surabaya juga merupakan sebuah pelabuhan perdagangan yang besar pada awal abad XVI, tetapi baru pada awal abad XVII kota pelabuhan ini muncul sebagai kekuatan pantai yang terkemuka. Madura masih menjalani proses islamisasi pada abad XVI. Pada masa Tomé Pires (1512–5), daerah ini belum diislamkan, tetapi tidak lama sesudah runtuhnya negara Hindu-Budha di Jawa sekitar tahun 1527, penduduk Madura (kemungkinan besar hanya kalangan elite Madura) konon telah memeluk agama Islam; menurut tradisi-tradisi setempat, perubahan itu terjadi pada tahun 1528.

Di ujung timur Jawa, Pasuruan merupakan satu-satunya kekuatan Islam yang penting pada abad XVI. Daerah-daerah lainnya berada di bawah kekuasaan Hindu. Tampaknya telah terjadi suatu gelombang penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Pasuruan pada akhir abad XVI, tetapi sumber-sumber hanya memberi sedikit petunjuk yang dapat dipercaya mengenai rentetan kejadiannya. Ada kemungkinan telah terjadi pertempuran melawan Balambangan Hindu pada tahun 1540-an, 1580-an, dan 1590-an. Pada sekitar tahun 1600–1, ibu kota Balambangan agaknya telah berhasil direbut. Meskipun daerah Balambangan belum masuk Islam, namun para penguasa berikutnya yang beragama Hindu terjepit antara kekuasaan-kekuasaan Jawa yang sedang meluas dari barat dan para penyerang Bali dari timur, dan tidak lagi berkuasa dan berpengaruh kecuali hanya dalam waktu-waktu yang singkat.

Pada pertengahan kedua abad XVI, muncul dua kekuatan baru di wilayah pedalaman Jawa Tengah, yang tidak lagi menjadi pusat sebuah kerajaan besar sejak abad X. Daerah Pajang dan Mataram (lokasi kota Surakarta dan Yogyakarta sekarang) merupakan daerah-daerah pertanian yang sangat subur. Dari akhir abad XVI sampai awal abad XIX, kedua wilayah ini menjadi pusat politik utama Jawa Tengah dan Jawa Timur, negeri suku bangsa Jawa. Dengan munculnya kembali istana-istana di wilayah pedalaman Jawa, maka peran dominan negara-negara pantai dalam politik Jawa mulai berakhir. Akan tetapi, diperlukan suatu periode pertempuran yang sengit antara wilayah pantai dan daerah pedalaman sebelum dominasi daerah pedalaman dapat ditegakkan. Dominasi ini akan menimbulkan dampak yang penting baik terhadap segi-segi ekonomi maupun keagamaan, karena kawasan pedalaman Jawa kurang begitu terlibat dalam perdagangan laut dan tidak begitu mudah ditembus oleh pengaruh Islam dari luar.

Pajang tampaknya merupakan kerajaan yang muncul pertama. Di dalam tradisi sejarah Jawa, kerajaan ini dianggap sebagai pengganti yang berikutnya dalam garis legitimasi yang mengalir dari Majapahit melalui Demak ke Pajang, dan mencapai puncaknya pada dinasti Mataram. Pada abad XV, sebuah negara Hindu yang disebut Pengging, yang tentangnya tidak ada satu pun bukti yang dapat dipercaya, terletak di wilayah Pajang. Menurut beberapa tradisi, Sunan Kudus berhasil menaklukkan daerah ini atas nama Islam, yang mungkin terjadi pada tahun 1530-an. Dongeng-dongeng menyebutkan bahwa seorang menantu laki-laki "Sultan" Trenggana dari Demak yang bernama Jaka Tingkir, yang berasal dari keturunan Pengging dan banyak dipertalikan dengan cerita-cerita gaib, diutus untuk memerintah Pajang sebagai vasal Demak. Sesudah Trenggana meninggal (1546), Jaka Tingkir memperluas kekuasaannya di Jawa Tengah. Konon dia telah dilantik secara resmi sebagai raja oleh Sunan Giri pada tahun 1503 S (1581–2 M) dengan persetujuan negara-negara Islam yang penting lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jaka Tingkir kemudian menjadi "sultan" Pajang, tetapi penisbatan gelar ini dalam cerita-cerita dongeng tersebut agaknya mengandung anakronisme. Dia merupakan satu-satunya penguasa Pajang yang disebutkan dalam sumber-sumber tersebut, dan mungkin telah meninggal sekitar tahun 1587. Kisah-kisah kronik ini merupakan satu-satunya sumber mengenai

sejarah Pajang; sedangkan bukti-bukti yang sezaman yang lebih dapat dipercaya tidak ada sama sekali.

Mataram adalah daerah yang menghasilkan dinasti Jawa modern yang paling kuat dan yang paling lama. Babad-babad Jawa menyebutkan bahwa seseorang yang bernama Kyai Gedhe Pamanahan telah berhasil menunaikan suatu tugas besar untuk Jaka Tingkir dari Pajang dengan membunuh lawan utamanya, Arya Penangsang dari Jipang, yang mungkin berlangsung pada tahun 1540-an atau 1550-an. Sebagai hadiahnya, Pamanahan dijanjikan akan diberi bumi Mataram; tetapi Jaka Tingkir lupa akan janjinya ini sampai Sunan Kalijaga ikut campur tangan dan mendesak supaya Jaka Tingkir memenuhi janjinya. Mungkin Pamanahan menempati daerah Mataram pada tahun 1570-an dan sesudah itu dia disebut Kyai Gedhe (atau Ki Ageng) Mataram di dalam cerita-cerita dongeng. Diperkirakan dia meninggal sekitar tahun 1584. Disebutkan di dalam kronik-kronik Mataram yang belakangan bahwa Pamanahan adalah keturunan raja terakhir Majapahit, tetapi hal ini kemungkinan besar lebih mencerminkan keinginan kuat untuk menciptakan legitimasi daripada mencatat suatu silsilah yang benar. Konon daerah Mataram kosong ketika Pamanahan menempati daerah itu. Cerita ini mungkin berlebihan, tetapi memang ada kemungkinan bahwa baru pada tahun-tahun terakhir abad XVI-lah sejumlah besar penduduk mulai kembali ke lahan-lahan persawahan Mataram yang subur, yang selama lebih dari enam abad sebelumnya telah menopang kerajaan yang membangun candi Barabudur, candi Prambanan, dan candi-candi besar lain di Jawa Tengah itu.

Putra Pamanahan, Panembahan Senapati Ingalaga (± 1584–1601), digambarkan di dalam kronik-kronik Jawa sebagai pemrakarsa pengluasan Kerajaan Mataram. Pada pertengahan abad XVII, duta VOC yang mengunjungi Mataram, Rijklof van Goens, dikabari bahwa Senapati sendirilah sebenarnya yang menaklukkan daerah Mataram. Van Goens melaporkan bahwa sekitar tahun 1576, setelah penguasa Mataram menolak untuk memeluk agama Islam, Senapati menaklukkan daerah itu, memusnahkan keluarga penguasa setempat, memaksakan agama barunya untuk dianut, dan membangun istananya sendiri. Ada banyak masalah historiografi yang meliputi masa pemerintahan Senapati. Sebagian besar hanya diketahui dari kronik-kronik Mataram yang belakangan,

dan C.C. Berg berpendapat bahwa kronik-kronik tersebut tidak dapat dipercaya sepenuhnya sebagai dokumen sejarah. Menurut pendapatnya, para penulis kronik Mataram berusaha menciptakan leluhur-leluhur palsu untuk orang yang dianggapnya sebagai penguasa Mataram pertama yang sesungguhnya, Sultan Agung (1613–46), yang akan dibicarakan di bawah ini. Oleh karena itulah, bantah C.C. Berg, para penulis kronik menciptakan seorang tokoh dongeng bernama Senapati dan menisbahkan kepadanya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dilakukan kemudian oleh Agung. Analisanya didasarkan pada pembandingan kedua pemerintahan tersebut seperti yang dilukiskan di dalam sebuah kronik Jawa; dalam pelukisan-pelukisan tersebut memang terdapat bukti kesimpangsiuran di antara kedua pemerintahan itu.

Masalah-masalah historiografi yang dikemukakan Berg mengenai Senapati itu tidak dapat dijawab secara pasti. Tidak dapat disangkal bahwa cerita-cerita kronik mengenai abad XVI yang disusun atau disalin ulang dua abad sesudahnya atau lebih mengandung ketidaktelitian dan dongeng-dongeng. Dengan tidak adanya bukti yang sezaman, maka memang mustahil untuk menilai isi kronik-kronik itu. Akan tetapi, mengenai awal abad XVII, ketika sudah ada dokumen-dokumen VOC yang sezaman, beberapa kronik Jawa dapat dibuktikan memiliki tingkat ketelitian sejarah yang sangat tinggi. Juga tampak jelas bahwa, apakah pemerintahan Senapati digambarkan secara tepat dalam kronik-kronik itu ataukah tidak, pada waktu orang-orang Belanda yang pertama tiba di Jawa pada akhir abad XVI, Mataram sudah merupakan sebuah negara yang kuat dan sedang mengembangkan kekuasaannya. Oleh karena itu, jelas tidak dapat diragukan sedikit pun bahwa Sultan Agung bukanlah penguasa pertama dari garis keturunan Mataram. Akan tetapi, juga ada benarnya bahwa sebagian besar cerita kronik mengenai Mataram sebelum sekitar tahun 1600 tidak dapat dibuktikan dari sumber-sumber yang lain. Oleh karena itulah maka kronik-kronik tersebut harus digunakan secara hati-hati.

Menurut cerita-cerita dalam kronik, Senapati bertekad melepaskan Mataram dari statusnya sebagai vasal Pajang. Dia memusatkan kekuatan-kekuatan batinnya dengan melakukan samadi dan tapabrata. Sebuah pulung jatuh di atas kepalanya sewaktu dia tidur di atas batu keramat Sela Gilang (di Lipura, yang masih merupakan sebuah tempat suci dinasti) dan meramalkan kejayaan

Mataram dan keruntuhannya nanti di bawah pemerintahan cicit Senapati (Amangkurat I; lihat bab 7). Kemudian Senapati meminta dukungan Dewi Lautan Selatan (Kangjeng Ratu Kidul atau Nyai Lara Kidul), yang akan menjadi pelindung khusus Kerajaan Mataram. Menurut tradisi Mataram, Ratu Kidul adalah seorang putri Pajajaran yang diusir dari istana karena menolak kawin menurut kehendak ayahnya. Raja Pajajaran mengutuk putrinya: dia dijadikan ratu roh-roh halus dengan istananya di bawah perairan Samudra Hindia, dan baru akan menjadi wanita biasa lagi pada hari kiamat. Sang putri berjumpa dengan Raden Susuruh, yang digambarkan secara salah di dalam naskah-naskah *Babad Tanah Jawi* sebagai pendiri Majapahit. Putri ini mengatakan kepada laki-laki itu bahwa dia akan mengabdi kepadanya dan kepada semua keturunannya yang memerintah di wilayah Mataram. Setelah Senapati melewatkan waktu bersama putri ini di istana bawah-airnya selama tiga hari, sang putri menjanjikan dukungan laskar roh halusnya kepada Senapati. Dalam perjalanannya kembali ke daratan, Senapati berjumpa dengan Sunan Kalijaga yang menasihatinya supaya membangun benteng di sekeliling istananya: Pajang tidak akan mengambil tindakan apa-apa, karena Sunan Giri telah mengatakan bahwa munculnya Mataram adalah kehendak Tuhan. Ketergantungan Senapati kepada Sunan Kalijaga dan sekaligus Ratu Kidul dalam cerita-cerita kronik mencerminkan secara halus ambivalensi dinasti Mataram pada waktu itu terhadap agama Islam dan kepercayaan Jawa asli.

Cerita-cerita tersebut hanya sedikit mengungkapkan proses terbentuknya kekuatan militer. Meskipun demikian, perluasan wilayah Mataram adalah masalah kekuatan militer. Sekitar tahun 1587–8, Senapati agaknya berhasil mengalahkan Pajang, dan Jaka Tingkir (Sultan Pajang) meninggal. Senapati mengambil alih tanda-tanda kerajaan yang keramat (pusaka), yang merupakan simbol-simbol dan hiasan-hiasan supranatural kedaulatan. Kemudian Senapati mulai memperluas kekuasaannya ke arah utara ke wilayah pantai dan ke timur ke lembah-lembah Sungai Sala dan Madiun. Ada suatu logika di dalam cerita-cerita kronik mengenai penaklukan atas Demak pada tahun 1588, Madiun pada 1590 atau 1591, dan Kediri pada 1591. Pada tahun 1591 mungkin juga telah terjadi serangan-serangan terhadap daerah-daerah lain di tepi Sungai Sala dan Madiun, seperti Jipang (suatu tempat yang sangat penting untuk dapat menembus ke pantai timur), Jogorogo dan

Ponorogo. Pada tahun 1595 tampaknya terjadi lagi pertempuran di lembah Sungai Madiun, dan pada tahun 1600 rupa-rupanya Mataram memadamkan sebuah pemberontakan di Pati. Para pelaut Belanda melaporkan tentang ekspedisi Mataram melawan Banten sekitar tahun 1597 yang mengalami kegagalan.

Kini Senapati telah mendekati wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Surabaya, yang sedang tumbuh sebagai kota yang paling kuat di antara kota-kota pantai. Pertikaian sengit antara Surabaya dan Mataram untuk mendapatkan hegemoni di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak terselesaikan sebelum tahun 1625. Menurut kronik Jawa, pada tahun 1598 dan 1599 Senapati menyerang Tuban, tetapi mengalami kegagalan. Di sayap selatan Surabaya, konon Senapati telah menyerang Pasuruan pada tahun 1591 dan 1600. Akan tetapi, kisah-kisah tentang Pasuruan tersebut tampaknya agak mustahil, karena tidak jelas bagaimana caranya Mataram dapat mengerahkan tentaranya atau mengirim suatu ekspedisi laut (melalui Demak) ke Pasuruan dengan melewati daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Surabaya. Ada kemungkinan bahwa Pasuruan tunduk kepada Mataram karena ingin menyelamatkan sebanyak mungkin kemerdekaannya dari pertikaian yang timbul antara Surabaya dan Mataram tersebut dengan memilih untuk menyatakan kesetiaannya kepada yang terjauh jaraknya di antara kedua kekuatan itu. Pasuruan agaknya memperkirakan bahwa pertempuran-pertempuran yang utama akan berlangsung di kawasan pantai utara serta lembah-lembah Sungai Sala dan Brantas.

Senapati meninggal sekitar tahun 1601 dan dimakamkan di istananya di Kota Gede. Meskipun dokumentasi mengenai masa pemerintahannya tidak begitu memuaskan, namun dapat diterima bahwa ekspansi militer Mataram telah dimulai. Mataram telah berdiri tegak sebagai negara besar di wilayah pedalaman Jawa Tengah. Boleh dikatakan bahwa Senapati masih jauh dari berdaulat atas seluruh Jawa: Surabaya dan sekutu-sekutunya di pantai utara bagian timur masih tetap kuat dan merdeka, begitu pula Cirebon dan Banten di Jawa Barat. Bagaimanapun juga, dasar kekuasaan dinasti Jawa yang besar dan terakhir telah terbentuk.

Mengenai masa pemerintahan putra Senapati, Panembahan Seda ing Krapyak (± 1601–13), ditemukan beberapa dokumen VOC sehingga peristiwa-peristiwanya menjadi sedikit lebih jelas.

Pada tahun 1602, saudara sepupu raja, Pangeran Puger, yang telah diangkat sebagai penguasa Demak, melakukan pemberontakan. Sebelas orang pelaut Belanda ditawan oleh pasukan-pasukan Demak pada tahun 1602, dan laporan-laporan yang diberikan oleh lima orang pelaut yang telah berhasil meloloskan diri menegaskan terjadinya peperangan antara Mataram dan Demak. Pada tahun 1602, Krapyak dipaksa mundur, tetapi sekitar tahun 1605 Pangeran Puger berhasil dikalahkannya; kronik-kronik Mataram menyebutkan bahwa dia dikirim untuk menjalani kehidupan sebagai santri di Kudus, yang menyiratkan bahwa kota suci ini kini benar-benar berada di bawah kekuasaan Mataram. Saudara sepupu raja yang lain melakukan pemberontakan sekitar tahun 1607–8 dan berhasil dikalahkan di Ponorogo, dan sekitar tahun 1608 Kediri tampaknya juga memberontak namun dapat dipadamkan.

Lawan Krapyak yang paling kuat adalah Surabaya. Sebuah dokumen VOC dari tahun 1620 menggambarkan Surabaya sebagai sebuah negara yang kuat dan kaya. Luas wilayahnya kurang lebih lima mil-Belanda (kira-kira 37 km), yang dikelilingi sebuah parit dan diperkuat dengan meriam. Konon pada tahun itu Surabaya mengirim 30.000 prajuritnya ke medan tempur melawan Mataram, tetapi tidak terlihat adanya pengurangan penduduk yang nyata di kota itu (namun, cerita ini mungkin berlebihan). Pada tahun 1622, Surabaya menguasai Gresik dan Sidayu. Disebutkan pula di dalam kronik-kronik Jawa dan juga oleh penulis awal abad XVIII, François Valentyn, bahwa kota tersebut telah menguasai Pasuruan dan Balambangan, tetapi pernyataan-pernyataan itu tampaknya meragukan. Pengaruhnya mungkin telah meluas ke lembah Brantas sampai Japan dan Wirasaba, ke daerah-daerah di mana kekuasaan Mataram sedang ditegakkan. Surabaya diakui sebagai penguasa oleh Sukadana (Kalimantan Barat Daya), dan kapal-kapal dagang Surabaya terlihat di seluruh kepulauan, dari Malaka sampai Maluku. Sebuah pos dagang VOC berada di Gresik dari tahun 1602 sampai 1615; laporan-laporannya merupakan petunjuk yang paling dapat dipercaya mengenai tahap permulaan peperangan Mataram–Surabaya. Pada tahun 1610, Krapyak mulai menyerang Surabaya secara langsung. Sampai tahun 1613, serangan-serangan Mataram setiap tahun menghancurkan panen padi Surabaya sehingga melemahkan dasar-dasar

ekonominya. Pada bulan Agustus 1613, para agen dagang VOC harus melarikan diri ketika Gresik dan Jortan, yang terletak di dekatnya, dibakar.

Krapyak juga mengadakan kontak pertama antara Mataram dan VOC. Pada tahun 1613, dia mengirim duta kepada Gubernur Jenderal Pieter Both (161014) di Maluku untuk mengadakan persekutuan. Kemungkinan Krapyak beranggapan bahwa dia dan VOC sama-sama menjadi musuh Surabaya. Selanjutnya VOC mendirikan sebuah pos dagang di Jepara di bawah pengawasan Mataram, tetapi masih tetap memiliki posnya di Gresik yang berada di bawah pengawasan Surabaya.

Krapyak meninggal pada tahun 1613 dan digantikan oleh putranya, Sultan Agung (1613–46), raja terbesar dari Mataram. Sesungguhnya dia tidak memakai gelar 'sultan' sampai tahun 1641; mula-mula dia bergelar 'pangeran' atau 'panembahan', dan sesudah tahun 1624 bergelar 'susuhunan' (yang sering disingkat 'sunan', gelar yang juga diberikan kepada kesembilan wali). Namun demikian, ia disebut Sultan Agung sepanjang masa pemerintahannya dalam kronik-kronik Jawa, dan gelar ini biasanya dapat diterima oleh para sejarawan. Dia adalah yang terbesar di antara raja-raja pejuang dari Jawa. Tidak semua peperangan yang tertulis di dalam kronik-kronik Jawa dapat dicek kebenarannya dalam sumber-sumber VOC, tetapi tentang gambaran umum penaklukan-penaklukan yang dilakukan Mataram tampaknya tepat.

Pada tahun 1614, Agung menyerang Surabaya bagian selatan: Ujung Timur, Malang, dan kemungkinan juga Pasuruan. Tentara Surabaya tampaknya berusaha menyerang tentara Mataram di dalam perjalanannya kembali, tetapi dapat dikalahkan oleh tentara Mataram. Pada tahun 1615, Agung menduduki Wirasaba (di dekat kota Maja Agung sekarang); ini sangat penting secara strategis, karena Wirasaba menguasai pintu gerbang ke muara Sungai Brantas, dan mungkin juga penting secara psikologis, karena sekarang Agung menguasai daerah yang pernah menjadi lokasi Majapahit. Kemenangan atas Wirasaba itu dianggap begitu pentingnya sehingga Agung pribadi memimpin tentaranya di sana. Kronik-kronik menyebutkan bahwa persekutuan Surabaya menjadi lemah dalam peperangan yang menentukan ini karena adanya rasa saling curiga antara Surabaya dan Tuban. Akan tetapi, ancaman yang nyata yang diperlihatkan oleh kemajuan yang dicapai Agung

mendorong para sekutu Surabaya untuk bersatu lagi. Sekarang mereka berusaha untuk melakukan serangan dari pantai utara menuju Pajang, di mana mereka mengharapkan penguasa setempat bergabung dengan mereka. Agung memastikan loyalitas Pajang untuk sementara; seorang mata-mata Mataram di Tuban tampaknya mengelabui tentara dari pantai supaya tidak mengikuti rute yang terbaik; dan di Siwalan (di Pajang), tentara Surabaya itu dikepung oleh musuh tanpa memperoleh dukungan dari pihak penguasa setempat. Pada bulan Januari 1616, Agung membinasakan ekspedisi Surabaya ini.

Sekarang Agung melaju dengan kemenangan-kemenangannya di Lasem pada tahun 1616 dan di Pasuruan pada tahun 1616 atau 1617. Pajang akhirnya berusaha memberontak pada tahun 1617, tetapi saat itu sudah terlambat. Agung menghancurkan kotanya dan memindahkan penduduknya ke Mataram; penguasa Pajang melarikan diri ke Surabaya. Pada tahun 1619, Agung menaklukkan Tuban, salah satu unsur terpenting dari persekutuan Surabaya. Hal ini juga memberinya kekuasaan yang tak tertandingi atas daerah-daerah pantai yang terpenting yang menghasilkan kayu jati bagi pembangunan kapal. Sekarang, sebuah angkatan laut Mataram telah muncul dan mengancam kekuasaan Surabaya di lautan. Pada tahun 1620, hanya tinggal Surabaya yang menjadi perintang Agung dalam usaha mencapai tujuannya di Jawa Timur.

Dari tahun 1620 sampai 1625, secara periodik Agung mengepung Surabaya dan membinasakan hasil-hasil panennya. Akhirnya, Sungai Brantas dibendung dan jatah air untuk kota diputus. Selama masa itu, tentara Agung disibukkan oleh penaklukan-penaklukan lain yang berkaitan. Pada tahun 1622, sekutu Surabaya di seberang Laut Jawa, Sukadana, berhasil ditaklukkan sehingga terputuslah salah satu sumber suplai ke kota Surabaya. Pada tahun 1624, setelah melakukan serangan yang melelahkan dan menderita kerugian yang besar, tentara Agung berhasil menaklukkan Madura yang mengakibatkan Surabaya terputus dari sumber suplai penting yang lain lagi. Sebelumnya, Madura terbagi-bagi di antara beberapa penguasa lokal, tetapi sekarang Agung memerintahkan supaya pemerintahan pulau itu dipusatkan di bawah satu orang dari garis kepangeranan Madura, dengan ibu kotanya di Sampang. Sesudah tahun 1678, para pangeran

ini menggunakan nama Cakraningrat, dan mereka nanti memainkan peranan yang penting dalam politik Jawa sampai tahun-tahun 1740-an. Akhirnya, pada tahun 1625, Surabaya sendiri berhasil ditaklukkan, bukan karena diserang melainkan karena mati kelaparan. Penguasanya, yang dalam tradisi Jawa dikenal dengan nama Jayalengkara, konon diizinkan untuk tetap tinggal di Surabaya sebagai vasal Agung, sedang putranya, Pangeran Pekik, diperintahkan untuk menempuh kehidupan sebagai pertapa di makam suci Sunan Ngampel-Denta di dekat Surabaya. Konon Jayalengkara meninggal tak lama sesudah kejadian itu.

Sekarang, perlawanan dari pihak penguasa di pantai dan Jawa Timur terhadap Agung telah berakhir. Balambangan tidak berada di bawah kekuasaannya, dan meskipun Cirebon tampaknya menyatakan kesetiaan kepada Agung, namun Banten di Jawa Barat tetap merdeka. Bagaimanapun juga, Agung telah sangat berhasil dalam meletakkan kedaulatannya di seluruh jantung Jawa Tengah dan Jawa Timur yang rakyatnya berbahasa Jawa, dan juga di Madura. Akan tetapi, penghancurannya atas kekuasaan militer di daerah pantai tidak dapat menghentikan permusuhan yang sangat mendalam antara pantai dan pedalaman, yang nanti timbul lagi pada masa pemerintahan penggantinya. Permusuhan itu timbul sebagai akibat perbedaan loyalitas politik dan kepentingan ekonomi antara kedua daerah tersebut. Pelabuhan-pelabuhan pantai tidak pernah diyakinkan sepenuhnya bahwa kemakmuran mereka, yang terutama didasarkan pada perdagangan laut, dapat dicapai dengan membayar pajak dan tunduk kepada dinasti yang berkuasa di daerah pedalaman. Pada tahun 1625, sudah muncul suatu kekuatan baru di Jawa juga, yaitu VOC di Batavia. Agung jelas-jelas lebih mengutamakan perhatiannya terhadap musuh-musuhnya yang Jawa daripada VOC, tetapi perhatiannya akan segera beralih menghadapi orang-orang Eropa ini.

Kekuasaan Agung di Jawa Tengah dan Jawa Timur didasarkan terutama, tapi tidak semata-mata, pada kekuatan militer. Faktor-faktor yang telah dianalisis dalam bab 2 harus diakui: garnisun-garnisun yang permanen dan pemerintahan secara langsung dari pusat sangat sulit untuk dilaksanakan. Tentu Agung kembali pada metode-metode yang telah dilakukan penguasa-penguasa Jawa lainnya. Dia menindas dengan kejam lawan-lawannya yang muncul, tetapi dia juga memanfaatkan suatu budaya kemegahan dan

kekayaan untuk menarik loyalitas orang-orang kuat lainnya. Tampaknya Agung, berbeda dari sebagian besar penggantinya, memelihara keseimbangan antara legitimasi yang terpusat dan administrasi yang didesentralisasi, yang keduanya bertumpu pada dasar kekuatan militer, bahkan lebih baik dari kebanyakan raja lainnya. Sekitar tahun 1614–22, dia membangun sebuah kompleks keraton baru, suatu ekspresi yang jelas dari legitimasinya, di Karta (kira-kira lima kilometer di sebelah barat daya Kota Gede). Setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, dia memakai gelar kekaisaran, "susuhunan". Tradisi-tradisi Jawa menyebutkan bahwa, seperti Senapati, Agung mengadakan hubungan dengan Dewi Lautan Selatan, Ratu Kidul. Rentetan penaklukan yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Senapati telah membawa ke Mataram pengrajin-pengrajin istana dan para pujangga dari pusat-pusat yang jauh lebih tua, yang tampaknya membawa pengaruh peradaban terhadap dinasti yang baru ini. Sejak waktu itu, raja-raja Mataram telah belajar bagaimana harus memerintah seperti raja-raja dalam tradisi Jawa.

Dalam tahun-tahun 1625–7, Agung berada di puncak kekuasaannya. Akan tetapi, kehancuran sebagai akibat ulahnya untuk mencuat tentu besar. Banyak dari daerah pantai telah hancur; penduduk dipindahkan. Berapa banyak rakyat yang mati dalam peperangan dan karena penyakit serta kelaparan yang disebabkan oleh kerusakan pertanian tidak dapat dihitung. Bencana alam muncul dan memperburuk kerusakan politik, ketika fenomena El Nino menimbulkan kemarau di Jawa. Dalam tahun-tahun 1625–7, timbul epidemi yang dahsyat, dan dokumen-dokumen VOC menyebutkan bahwa di beberapa daerah, dua pertiga dari penduduknya telah meninggal. Akan tetapi, Agung tidak berhenti sampai di situ. Memang tidak mungkin baginya untuk berhenti. Bagaimanapun juga, kerajaannya bergantung pada keunggulan tentaranya. Keampuhan Agung harus selalu didemonstrasikan karena takut jika kepentingan regional dan orang-orang kuat akan mencoba bersikap terlalu bebas. Pada tahun 1627, Pati berusaha memberontak dan Agung menindasnya dengan menimbulkan kerugian besar. Satu-satunya yang dapat menggoyahkan kerajaannya yang rapuh adalah kekalahan; inilah yang harus dihindarinya betapa pun besarnya biaya yang harus ia keluarkan. Akan tetapi, Agung akan segera menderita kekalahan di tangan VOC.

Hubungan Sultan Agung dengan VOC sejak awal mula memang sudah sulit. Pada tahun 1614, pihak Belanda mengutus seorang duta untuk menyampaikan ucapan selamat atas pengangkatan dirinya sebagai raja, dan Sultan Agung memperingatkan duta itu bahwa persahabatan yang mereka sama-sama inginkan tidak akan mungkin terlaksana apabila VOC berusaha merebut Tanah Jawa. VOC sangat memerlukan beras Jawa, sehingga mengharapkan dapat dilakukannya perdagangan dengan daerah-daerah pantai pengeskpor beras. Akan tetapi, peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh Sultan Agung menghancurkan tanaman padi, dan pada tahun 1618, ketika terjadi kekurangan, dia melarang penjualan beras kepada pihak VOC. Hubungan pribadi VOC–Mataram sangat buruk. Konon orang-orang Belanda telah menyamakan Sultan Agung dengan seekor anjing dan telah mengotori masjid Jepara; ada tuduhan-tuduhan mengenai dirampoknya kapal-kapal Jawa oleh pihak VOC. Akhirnya, permusuhan pun meledak. Pada bulan Agustus 1618, orang Gujarat yang memerintah Jepara atas nama Sultan Agung menyerang pos dagang VOC yang ada di kota itu. Tiga orang Belanda tewas, sedangkan yang lain berhasil ditawan. Pada bulan November 1618, VOC melakukan pembalasan dengan membakar semua kapal Jawa yang sedang berlabuh di pelabuhan serta sebagian besar kota. Pada bulan Mei 1619, Jan Pieterszoon Coen menghentikan sebentar perjalanannya untuk merebut Batavia guna membakar Jepara lagi (termasuk pos Maskapai Hindia Timur Inggris).

Penaklukan Coen atas Batavia pada tahun 1619 merupakan titik balik yang menentukan. Pihak Belanda kini telah melakukan apa yang telah diperingatkan oleh Sultan Agung untuk tidak mereka lakukan: mereka telah merebut suatu bagian Pulau Jawa yang ingin diperintahnya sendiri sebagai penguasa tunggal. Selama sepuluh tahun, Sultan Agung memberikan prioritas pada usaha penaklukan lawan-lawannya yang bangsa Jawa yang lebih dekat dengan Mataram. Di pihaknya, Coen sempat mempertimbangkan dijalinnya sebuah persekutuan dengan Surabaya pada tahun 1619–20, tetapi gagasan itu ditinggalkannya. Sambil memusatkan perhatiannya terhadap Surabaya, Sultan Agung mengajukan beberapa tawaran kepada pihak VOC. Pada tahun 1621, personel VOC yang ditawan dipulangkan ke Batavia dan beras pun juga dikirim. VOC mengirimkan perutusan-perutusannya ke-

pada Sultan Agung pada tahun 1622, 1623, dan 1624, tetapi permintaan Sultan Agung akan bantuan angkatan laut VOC dalam rangka melawan Surabaya, Banten, maupun Banjarmasin ditolak oleh pihak VOC. Oleh karena VOC tidak bersedia memberikan bantuan angkatan laut kepadanya, maka tidak ada satu alasan pun bagi Sultan Agung untuk membiarkan kehadiran mereka di Jawa.

Setelah Surabaya jatuh pada tahun 1625, Sultan Agung bersiap-siap menghadapi Belanda. Akhirnya, tentara Mataram diberangkatkan pada tahun 1628. Setelah menempuh perjalanan sejauh kira-kira 500 kilometer dari istana, kontingen-kontingen Jawa yang pertama tiba di Batavia pada bulan Agustus; laskar Jawa yang kedua tiba pada bulan Oktober. Pihak Jawa menderita kerugian besar dalam berbagai bentrokan, tetapi lebih dari satu kali benteng VOC benar-benar terancam jatuh. Pasukan Sultan Agung berusaha membendung Sungai Ciliwung, tetapi gagal. Akhirnya, tentara Jawa mundur pada bulan Desember setelah menghukum mati panglima-panglima mereka yang gagal. VOC menemukan 744 mayat prajurit Jawa yang tidak dikuburkan, beberapa di antaranya tanpa kepala. Pada tahun 1629, Sultan Agung mencoba sekali lagi, tetapi serangan yang kedua ini merupakan malapetaka. Pasukan-pasukannya (termasuk pasukan meriam) mulai bergerak pada akhir bulan Mei, tetapi pada bulan Juli, kapal-kapal VOC berhasil menemukan dan menghancurkan gudang-gudang beras dan perahu-perahu di Tegal dan Cirebon yang dipersiapkan untuk tentara Sultan Agung, sehingga nasib tentara itu sudah ditentukan sebelum mereka tiba di Batavia. Penyerangan tahun 1629 itu hanya bertahan sebulan lebih (21 Agustus–2 Oktober); pihak Jawa mengalami banyak penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kelaparan, dan tentaranya bercerai-berai dalam perjalanan pulang mereka. VOC hanya menderita sedikit kerugian, walaupun pada tanggal 20 September Jan Pieterszoon Coen meninggal dunia karena menderita sakit di dalam benteng.

Ambisi Sultan Agung tidak seimbang dengan kemampuan militer dan logistiknya sehingga telah membawa dirinya ke dalam kehancuran di depan Batavia. Tentara Mataram tidak pernah lagi menyerang Batavia, dan Banten kini pada dasarnya terbebas dari ancaman Mataram kerena terlindungi oleh posisi VOC yang



Situs kubur Sunan Bayat, Tembayat, Jawa Tengah; pintu gerbangnya yang dibangun oleh Sultan Agung pada 1633 berada di tengah-tengah foto

letaknya memisahkan daerah Banten dari Kerajaan Mataram. Para penulis kronik sejarah Mataram, atau mungkin Sultan Agung sendiri, berusaha menyembunyikan kegagalan tahun 1628–9 itu dengan memaklumatkan sebuah ramalan bahwa zaman di mana Mataram dan VOC akan menjadi sekutu akan tiba. Selama beberapa tahun, pertempuran-pertempuran antara Sultan Agung dan VOC di sepanjang daerah pantai terus berlangsung pada tingkatan yang lebih kecil, dan Sultan Agung berusaha menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan pihak Portugis di Malaka dan India. Akan tetapi, pada tahun 1635–6, tampaknya dia menarik kesimpulan bahwa pihak Portugis tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan Belanda dan beralih menjalin hubungan yang lebih bersahabat dengan VOC. Kapal-kapal perang Mataram tidak lagi mengganggu pelayaran VOC, tetapi pemulihan perdamaian secara resmi masih mustahil diadakan, karena Sultan Agung tidak bersedia membebaskan kira-kira delapan puluh orang Belanda yang ditawannya di istana. Meskipun demikian, peperangan-peperangan VOC–Mataram kini tidak lagi berkobar. Alasan-alasan ditempuhnya langkah ini dapat ditemukan dalam analisis Sultan Agung mengenai kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya: VOC tidak dapat diusir dari Batavia; pihak Portugis terlalu lemah untuk dimintai bantuan; dan, yang terpenting, musuh-musuh pribumi

kembali bangkit sehingga perhatian terhadap mereka harus diprioritaskan.

Kekalahan Sultan Agung di Batavia telah menghancurkan mitos bahwa dirinya tidak dapat dikalahkan. Kerajaannya yang rapuh harus dipersatukan kembali dengan kekuatan militer. Pada tahun 1631–6, dia menumpas pusat-pusat perlawanan di Sumedang dan Ukur di Jawa Barat, tetapi ancaman-ancaman yang terbesar sebenarnya datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1630, meletus sebuah pemberontakan yang tampaknya dipimpin oleh para guru agama dari daerah Tembayat (situs pemakaman salah seorang wali, Sunan Bayat); Sultan Agung membantai habis kaum pemberontak itu. Pada tahun 1633, dia melakukan semacam ziarah ke situs keramat di Tembayat, mungkin dalam rangka mengatasi kekuatan spiritual dan sekaligus kekuatan militer pihak penentang.

Ziarah Agung pada tahun 1633 tampaknya merupakan titik balik dalam islamisasi di Jawa. Sampai saat ini, ketika Islam telah menyebar di seluruh Pulau Jawa, tampaknya dinasti Mataram masih belum menganut agama baru itu dengan antusiasme penuh. Paling tidak, kerajaan ini masih menggunakan sistem penanggalan-solar Hindu Saka untuk acara-acara kerajaan, dan bukannya sistem penanggalan-lunar Islam, dan di antara musuh-musuh utamanya adalah keturunan Sunan Giri, yang dikenal sebagai salah satu wali Islam yang paling senior di Jawa. Ziarah Sultan Agung ke Tembayat meninggalkan bukti yang mengesankan bahwa sekarang Agung berusaha menempatkan dinasti Mataram di pusat, dan bukannya di tempat yang jauh dari, proses islamisasi. Legenda-legenda menceritakan bahwa ia menerima petunjuk mistik dari roh Sunan Bayat sendiri. Ia mendirikan gerbang di Tembayat yang masih berdiri sampai sekarang dan yang mengingatkan ziarahnya dengan sebuah prasasti yang bertarikh setara dengan tahun 1633, tampaknya sekitar bulan Oktober--November tahun itu. Pada bulan November 1633, *Serat Yusup*, sebuah terjemahan gaya keraton atas kisah Alquran tentang Yusuf di Mesir, tampaknya ditulis di sebuah desa di dekat Tembayat. Di akhir *Yusup* versi 1633 itu dilampirkan sebuah nukilan dari karya keraton yang bernapaskan Islam lainnya berjudul *Kitab Usulbiyah*, yang pembuatannya rupanya juga diasosiasikan dengan ziarah ke Tembayat.

Saat itu, Agung juga berdamai dengan keturunan raja dari Surabaya yang pernah dikalahkannya dengan mengajak Pangeran Pekik, pangeran senior yang masih hidup, ke istana dan menikahkannya dengan salah satu saudara Agung sendiri, sementara putra Agung (yang kemudian menjadi Amangkurat I, berkuasa tahun 1646–77) menikah dengan putri Pekik. Perkawinan putra-putri ini berarti bahwa semua penguasa dinasti Mataram selanjutnya sampai abad sekarang berasal dari garis keturunan raja Mataram dan Surabaya. Sementara tanggal-tanggal dari peristiwa-peristiwa itu tidak pasti, ada kemungkinan Pekik dibawa ke istana pada tahun 1633. Ia rupanya datang dengan membawa karya penting ketiga yang bernapaskan Islam, *Carita Sultan Iskandar,* yang didasarkan pada kisah-kisah Alquran tentang Alexander Agung. Jelas bahwa *Yusup, Usulbiyah,* dan *Iskandar* dianggap memiliki kekuatan supranatural, setidaknya di masa-masa setelahnya. Penulisan tiga buku itu dalam lingkungan Sultan Agung di saat ia berziarah ke Tembayat mengesankan bahwa tindakan-tindakannya merupakan langkah-langkah ritual dan supranatural yang amat berpengaruh. Ini menjadi jelas dari tindakan Agung mengubah sistem penanggalan Jawa pada tahun 1633 dengan mendekritkan berakhirnya penggunaan kalendar Saka dan diberlakukannya sebuah penanggalan lunar campuran Jawa-Islam *(Anno Javanico),* yang benar-benar mengubah waktu di Jawa. Pada saat wafat di tahun 1646, Agung telah meraih reputasi sebagai manusia suci. Tradisi historis Jawa memandang dirinya sebagai model dari raja agung sekaligus penguasa yang saleh. Ziarah Tembayat tampaknya merupakan bagian yang paling pokok dalam memapankan keagungan dan kesalehan ini.

Situs keramat Giri, yang terletak di dekat Surabaya, merupakan sumber utama perlawanan yang didasarkan pada legitimasi keagamaan. Sekitar tahun 1636, Sultan Agung menghancurkan tempat yang menjadi pusat perlawanan itu. Sekitar tahun 1633, Agung, melalui Pangeran Pekik, berdamai dengan dinasti Surabaya, yang memiliki hubungan dengan Sunan Ngampel-Denta, seorang wali yang bahkan lebih senior daripada Sunan Giri. Pekik kemudian diberi tugas memimpin tentara Mataram untuk menyerang Giri. Pekik barangkali telah memberi legitimasi kepada serangan Sultan Agung; hal ini juga nantinya menimbulkan dampak-dampak militer yang nyata, karena dalam beberapa kejadian

tampak bahwa para prajurit Jawa memiliki perasaan enggan untuk menyerang atau membunuh orang-orang suci atau para pangeran terkecuali jika dipimpin oleh orang yang memiliki tingkat kesucian atau kedudukan kebangsawanan yang lebih tinggi. Waktu terjadinya penaklukan atas Giri tidak diketahui pasti, tetapi kemungkinan besar pada tahun 1636. Penguasa yang berhasil ditawan diperkenan pulang sebagai vasal setelah menyembah Sultan Agung.

Gelombang penyerangan tidak berhenti dengan penaklukan atas Giri. Pada tahun 1633, Agung sudah mengadakan penyerangan di timur: di Balambangan, Panarukan, dan Blitar. Pada tahun 1620-an dan 1630-an, penguasa Balambangan yang beragama Hindu memohon bantuan kepada VOC tetapi ditolak; satu-satunya bantuan yang masih dapat diharapkannya adalah raja atasannya, yaitu Dewa Agung dari Gelgel di Bali Selatan. Pada masa itu, Gelgel sedang memperluas kekuasaannya ke seberang lautan, antara lain ke Lombok dan juga Sumbawa, tetapi akhirnya kekuatannya tidak dapat menandingi tentara Mataram di Balambangan. Pada tahun 1635, serangan besar-besaran Mataram yang pertama dilancarkan untuk menaklukkan Balambangan. Setelah menghancurkan daerah tersebut, tentara Agung berhasil dipukul mundur oleh laskar Bali, namun mereka kembali melakukan penyerangan dan, pada tahun 1636–40, Agung akhirnya berhasil menaklukkan Ujung Timur. Bagaimanapun juga, kekuasaannya atas wilayah ini kemungkinan besar sangat lemah, dan penduduk daerah ini tetap tidak masuk Islam.

Kini Agung melakukan langkah simbolisnya yang terakhir. Pada tahun 1638, penguasa Banten, Pangeran Ratu (m. 1596–1651), merupakan raja pertama di Jawa yang diketahui secara pasti telah menggunakan gelar 'sultan', dengan nama Arabnya Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir. Mungkin sekali Agung tidak mau dilewati oleh Banten, dan usahanya untuk menaklukkan Balambangan, bagaimanapun juga, kemungkinan besar menimbulkan perlunya ia diberi gelar baru. Pada tahun 1639, dia mengutus seorang duta ke Mekah yang kembali pada tahun 1640 dengan wewenang memberikan gelar baru, Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani. Akhirnya, Agung berdiam, dan menikmati satu-satunya masa damai yang penting artinya dalam masa pemerintahannya.

Sekarang Agung bersiap-siap menghadapi akhir hayatnya. Sekitar tahun 1645, dia mulai membangun sebuah situs permakaman baru di puncak sebuah bukit yang tinggi di Imogiri, kira-kira lima kilometer di sebelah selatan istananya. Situs ini akan menjadi permakaman bagi hampir semua penggantinya dan anggota-anggota keluarga kerajaan yang terkemuka. Dewasa ini, situs permakaman tersebut masih tetap merupakan sebuah tempat yang keramat. Kronik-kronik sejarah menyebutkan bahwa dua tahun sebelum Agung meninggal, Ratu Kidul datang menemuinya dan meramalkan saat kematiannya. Wabah-wabah penyakit merajalela pada tahun 1640-an, dan kematian Agung mungkin sekali disebabkan oleh salah satu wabah tersebut. Sultan Agung meninggal pada awal tahun 1646, kira-kira antara awal bulan Februari dan awal bulan April. Pintu-pintu gerbang yang menuju ke istana ditutup untuk mencegah terjadinya kudeta, dan putranya dinyatakan sebagai penggantinya dengan gelar Susuhunan Amangkurat I.

Pada saat meninggalnya, Sultan Agung merupakan penakluk yang terbesar di Indonesia sejak zaman Majapahit. Dia menguasai seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Ujung Timur, dan Madura. Satu-satunya kekurangan permanen kariernya adalah kegagalannya merebut Batavia, dan satu-satunya kerajaan di Jawa yang tetap merdeka adalah Banten yang terletak di ujung bagian barat. Pengaruh Sultan Agung juga tidak hanya terbatas di Jawa dan Madura saja. Pada tahun 1622, dia telah menaklukkan Sukadana; sampai sekitar tahun 1636, Palembang menganggapnya sebagai sesembahan, tetapi sesudah itu hubungan antara Palembang dan Sultan Agung lebih rumit; Banjarmasin adalah sekutunya dalam periode sesudah tahun 1637; dengan Makasar diadakan tukar-menukar perutusan pada tahun 1630 dan 1632. Kecuali di Sukadana, angkatan laut Agung bukanlah suatu kekuatan penakluk yang besar atas pulau-pulau lain, tetapi keberadaannya telah memberi kepada Mataram suatu pengaruh di negeri kepulauan ini yang mungkin boleh dibandingkan dengan pengaruh "kekaisaran" Majapahit. Akan tetapi, pengaruh Sultan Agung ini hanyalah suatu bayangan dari apa yang pernah ditampilkan oleh pengaruh Majapahit. VOC dengan cepat sedang menjadi kekuatan laut yang terkuat di Kepulauan Indonesia, walaupun angkatan laut Agung masih tetap dapat mengancam jalur-jalur menuju ke pelabuhan Batavia.

Kecenderungan Agung yang lebih mengutamakan daerah pedalaman sudah jelas. Dia tidak memindahkan istananya ke pantai utara di mana perdagangan dapat dikembangkan dan diawasi, tetapi tetap memilih Mataram yang tidak memiliki jalur sungai ke pantai utara maupun pelabuhan sendiri dan di mana lautannya hanyalah memberi jalan menuju ke daerah kekuasaan Ratu Kidul. Peperangan-peperangannya telah menghancurkan daerah-daerah pantai sedemikian rupa sehingga menyebabkan terganggunya ekspor beras Jawa, setidak-setidaknya untuk beberapa tahun. Dia sangat memandang rendah perdagangan dan kaum pedagang seperti yang telah dijelaskannya kepada duta VOC yang pertama pada tahun 1614. Dinasti Mataram telah menaklukkan kawasan pantai dengan biaya yang sangat besar; pertanyaan yang sangat penting bagi masa depan kerajaan yang rapuh ini ialah apakah daerah-daerah pantai dapat diperintah dari wilayah pedalaman dengan cara memajukan kemakmuran mereka semua. Apabila hal ini dapat dilakukan maka Jawa akan menjadi sebuah kesatuan kekuatan ekonomi dan militer yang mempunyai potensi yang sangat besar. Akan tetapi, kejadian-kejadian yang muncul akan menunjukkan bahwa hal itu tidak terjadi.

Di luar Jawa dan Sumatera tidak ada satu pun penakluk yang sebanding dengan raja-raja Aceh dan Mataram seperti yang telah dilukiskan di dalam bab ini. Tentu saja ada hal-hal penting yang terjadi di banyak daerah, tetapi sebagian besar sejarah mengenai masa itu di daerah-daerah lain didokumentasikan secara kurang memadai atau belum diselidiki.

Sejarah internal Kerajaan Gelgel dari Bali selama masa keemasannya pada abad XVI tidak dapat direkonstruksi dengan pasti. Legenda-legenda menceritakan keagungan Raja Dalem Baturenggong dan pendetanya Nirartha. Gelgel tampaknya mendominasi seluruh Bali dan semua distrik dari Ujung Timur Jawa sampai Lombok dan Sumbawa, tapi informasi yang tersedia tentangnya hanya sedikit yang meyakinkan. Begitu pula, konfrontasi antara kekuatan Bali dan Makasar yang sama-sama sedang berkembang di Lombok dan Sumbawa pada abad XVII juga tidak diketahui secara rinci dikarenakan tidak adanya sumber-sumber yang cukup memadai. Akan tetapi, mengenai bagaimana cara kekuatan baru ini muncul di Makasar (Sulawesi Selatan) tampak agak lebih jelas.

Di Sulawesi Selatan terdapat beberapa negara kecil yang terbagi antara dua suku bangsa serumpun, Makasar dan Bugis.

Kedua suku bangsa ini sangat terkenal karena reputasi mereka sebagai prajurit-prajurit yang paling ditakuti di Nusantara. Mereka juga prajurit-prajurit yang paling profesional. Terdapat naskah-naskah yang memuat terjemahan karangan-karangan berbahasa Spanyol dan Portugis mengenai pembuatan dan penggunaan meriam ke dalam bahasa Makasar dan Bugis; tidak ada satu pun terjemahan semacam itu dalam bahasa-bahasa Indonesia lainnya. Pada abad XVI, Sulawesi belum memeluk agam Islam. Pulau ini merupakan sumber produk-produk perdagangan yang berharga, khususnya emas, rempah-rempah, beras dan bahan-bahan makanan lainnya, dan, dari abad XVI, budak. Yang terakhir ini berasal terutama dari tawanan-lokal perang yang dijual oleh para atistokrat dan pemimpin perang di pasar-pasar di luar Sulawesi. Bahkan sampai abad XIX, para penjual budak dari Bugis menjual tenaga kerja manusianya di seluruh kepulauan Indonesia dan wilayah-wilayah lain yang lebih luas.

Sekitar tahun 1500, pemimpin negara suku Bugis adalah Luwu, tapi hegemoninya terpecah di hadapan tantangan-tantangan dari para penguasa lokal lainnya. Pada tahun 1509, Luwu menderita kekalahan telak di tangan negara saingan Bugis, yaitu Bone. Sekitar tahun 1530, Gowa, negara suku bangsa Makasar, mulai memperluas kekuasaannya ke wilayah-wilayah tetangganya melalui penaklukan. Pada pertengahan abad XVI, Gowa telah mengukuhkan diri sebagai pemimpin sebuah kerajaan serikat yang renggang dan telah muncul sebagai sebuah kekuatan dagang utama di Indonesia bagian timur. Orang-orang Portugis tiba di kawasan ini pada tahun 1540-an dan, setelah melakukan usaha-usaha kristenisasi secara singkat, segera berpartisipasi dalam perdagangan rempah-rempah dan budak. Kristenisasi tidak lagi menjadi pusat perhatian bagi orang-orang orang Portugis maupun Indonesia, dan kehadiran orang Portugis tidak menjadi penghalang bagi dianutnya agama Islam oleh para penguasa Sulawesi Selatan pada dasawarsa pertama abad XVII.

Pada tahun 1605, Raja Gowa memeluk Islam. Tampaknya ajakannya terhadap Bone, negara orang-orang dari suku Bugis, dan negara-negara lain supaya memeluk agama baru ini ditolak. Gowa menanggapi penolakan itu dengan melancarkan serangkaian serangan pada tahun 1608–11, sehingga mengakibatkan tersebarnya agama Islam di seluruh wilayah Bugis-Makasar. Pada akhir peperangan-peperangan tersebut, Gowa merupakan negara yang

paling menonjol di Sulawesi Selatan. "Kekaisaran"nya, seperti negara-negara lainnya di Indonesia, didasarkan atas keunggulan militernya, tetapi bukannya suatu sistem dominasi terpusat yang ketat. Negara-negara taklukannya tetap memiliki identitas sendiri dan otonomi yang sangat luas. Kemenangan Gowa juga tidak berarti berakhirnya perlawanan. Saingan utamanya adalah Bone, yang akan menjungkirkan hubungan kekuasaannya dengan Gowa pada akhir abad XVII lewat persekutuannya dengan VOC.

VOC mendirikan kantor perdagangannya yang pertama di Sulawesi Selatan pada tahun 1609, tetapi segera diketahuinya bahwa Gowa merupakan penghalang utama bagi rencana-rencananya. Pentingnya Gowa sebagai pusat perdagangan bagi Indonesia timur menarik para saudagar Eropa yang semakin terusir dari Maluku oleh VOC. Sultan Alauddin Tumenanga ri Gaukanna (m. 1593–1639) bekerja sama dengan pedagang-pedagang Inggris, Prancis, Denmark, Spanyol, Portugis, dan Asia dalam rangka mencegah tercapainya usaha-usaha VOC untuk memonopoli rempah-rempah. VOC menarik kesimpulan bahwa untuk menghentikan "komplotan penyelundupan" ini dan mengakhiri bantuan atau dukungan Gowa kepada musuh-musuh mereka di Maluku Selatan itu maka perlu dilakukan tindakan-tindakan yang keras. Pada tahun 1615, kantor VOC ditinggalkan dan mulai berkobarlah peperangan terbatas antara Gowa dan VOC. Perjanjian-perjanjian perdamaian berhasil ditandatangani pada bulan Juni 1637, Desember 1655, dan Agustus–Desember 1660, tetapi perjanjian-perjanjian itu tidak menghapus arti penting Gowa sebagai pusat perdagangan internasional dan pusat perlawanan terhadap VOC. Akan tetapi, pada tahun 1660, pihak Belanda dan Bugis mengambil keputusan untuk menjalin persekutuan dalam melawan musuh bersama, yaitu Makasar, yang nantinya mengakibatkan jatuhnya Gowa (lihat bab 6).[]

Bab 5 ....

Warisan-warisan Kesastraan, Keagamaan, dan Kebudayaan

NEGARA-NEGARA baru di Indonesia yang menganut agama Islam bukan hanya menciptakan dinasti-dinasti dan kerajaan-kerajaan baru saja, tetapi juga sebuah warisan budaya yang beraneka ragam. Beberapa di antaranya adalah benar-benar baru, yaitu warisan-warisan yang bersemangatkan Islam, tetapi sebagian besarnya mempunyai akar yang kuat pada kebudayaan pra-Islam juga. Memang tepat jika warisan ini dianggap klasik dalam arti bahwa warisan tersebut menetapkan norma-norma budaya yang otoritatif dan kerangka-kerangka makna bagi peradaban Indonesia sebelum abad XX. Karena kebanyakan bukti dokumenter mengenai kebudayaan-kebudayaan klasik tersebut berasal dari abad XVIII atau sesudahnya, maka orang tidak selalu dapat memastikan bahwa gambarannya tentang kegiatan-kegiatan budaya sebelum abad XVIII itu lengkap atau benar-benar tepat. Meskipun demikian, masih ada kemungkinan diperoleh suatu gambaran umum mengenai kebudayaan-kebudayaan klasik itu.

Pada kurun waktu itu, tidak ada suatu kesatuan kebudayaan 'Indonesia'. Sebaliknya, terdapat berbagai tradisi budaya daerah yang serumpun yang merupakan milik kelompok-kelompok bahasa dan suku-suku tertentu, yang akan menjadi bagian dari bangsa Indonesia modern. Ada banyak ciri yang sama di antara kebudayaan-kebudayaan daerah itu; akan tetapi hanyalah kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan perniagaan laut, yang menggunakan bahasa Melayu dan Portugis sebagai *lingua-franca,* yang boleh dikatakan berhasil menembus batas-batas bahasa tersebut. Oleh karena itulah maka tradisi-tradisi budaya yang utama

seyogyanya dipahami dalam kaitannya dengan kelompok bahasa dan suku bangsanya. Tradisi budaya ini ada banyak, tetapi dalam bab ini hanya tradisi-tradisi tertulis yang paling terkenal saja yang akan disoroti, yaitu tradisi-tradisi tertulis dari daerah-daerah di Nusantara bagian barat yang berbahasa Melayu serta tradisi-tradisi tertulis dari Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan. Dalam semua kasus ini akan lebih banyak dibahas tradisi-tradisi istana daripada tradisi-tradisi rakyat, walaupun tradisi istana itu bukan termasuk kategori yang eksklusif belaka. Masih banyak tradisi-tradisi budaya lain yang tetap menunggu penelitian ilmiah. Di semua daerah ada komunitas-komunitas yang memiliki tradisi tersendiri tetapi tidak mempunyai kesastraan tertulis, sehingga tentu saja menimbulkan hambatan yang sangat besar bagi studi sejarah.

Di Nusantara bagian barat, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan Semenanjung Malaya. Dengan berbagai cara, kesultanan Malaka meletakkan norma-norma budaya bagi negara-negara tersebut. Karya-karya seperti *Sejarah Melayu* menetapkan kaidah-kaidah kesastraan dan memberikan gambaran-gambaran mengenai kehidupan istana yang ideal serta hubungan yang baik antara rakyat dan penguasa. Maka dari itu, para penguasa yang berbahasa Melayu di Indonesia bagian barat melihat kembali kepada Malaka sebagai model mereka, tidak hanya dalam masalah-masalah politik namun juga dalam masalah-masalah budaya. Dari Sumatera bagian utara muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Hamzah Fansuri (w. 1527), yang batu nisannya telah ditemukan di Mekah, adalah yang pertama di antara penulis-penulis utama yang dikenal berasal dari daerah ini. Dari istana Aceh pada abad XVII muncul karya-karya klasik selanjutnya, yang paling terkemuka adalah karya-karya dua orang Sumatera, Syamsuddin dari Pasai (w. 1630) dan Abdurrauf dari Singkil (± 1615–93), serta seorang India yang paling produktif di antara mereka semua, yaitu Nuruddin ar-Raniri dari Gujarat (w. 1658).

Hamzah dan Syamsuddin menulis karya-karya mengenai tasawuf yang kelak dikecam ar-Raniri sebagai klenik. Batas antara kepercayaan ortodoks dan klenik di dalam tasawuf tidak dapat ditetapkan secara mudah, dan merupakan suatu sumber perdebatan di antara para ilmuwan modern seperti juga halnya yang terjadi di antara para penganut tasawuf di Aceh pada abad XVII.

Semua pengarang Melayu yang terkemuka tersebut mempunyai banyak gagasan dasar yang sama. Syamsuddin, Abdurrauf, dan ar-Raniri, semuanya menerapkan doktrin tasawuf tentang tujuh tahap emanasi *(martabat)*, lewat mana Tuhan mewujudkan diri-Nya di dunia yang fana ini, yang mencapai puncaknya pada Manusia Sempurna (insan kamil). Doktrin ini diajarkan secara luas ke seluruh penjuru Indonesia. Kerumitan-kerumitan teologis tidak perlu dibicarakan di sini, tetapi permasalahan pokoknya adalah: apabila doktrin ini berarti bahwa Tuhan turut terlibat di dalam kemajemukan dunia yang fana ini dan bahwa roh manusia sedikit banyak merupakan bagian dari Tuhan, maka doktrin tersebut melanggar keyakinan dasar Islam yang mengatakan bahwa meskipun Tuhan menciptakan dunia, Dia tidak masuk ke dalam ciptaan-Nya dan tidak diubah atau disentuh oleh ciptaan-Nya.

Karya-karya Hamzah yang berjudul *Syarab al-'Asyiqin* ("Minuman Para Pencinta") dan *Asrar Al-'Arifin* ("Rahasia-Rahasia Para Gnostik") serta karya Syamsuddin yang berjudul *Nur ad-Daqa'iq* ("Cahaya pada Kehalusan-Kehalusan") adalah di antara karya-karya yang terpenting dalam tradisi Islam Melayu. Pengaruh para penulis ini meluas ke kebudayaan-kebudayaan Indonesia lainnya dan beberapa dari karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Indonesia lainnya. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda (1607–36), Syamsuddin mendapat dukungan raja Aceh tersebut.

Pada tahun 1637, Nuruddin ar-Raniri tiba di Aceh. Dengan perlindungan Sultan Iskandar Tsani (m. 1636–41), dia menghukum para penganut tasawuf yang dulu mendapat dukungan Sultan Iskandar Muda. Buku-buku hasil karya Hamzah dan Syamsuddin diperintahkan supaya dibakar, dan dari pena ar-Raniri yang produktif mengalir karya-karya yang menetapkan baik kaidah-kaidah kesastraan maupun apa yang ia pandang sebagai norma-norma keagamaan yang ortodoks. Hasil karyanya yang terbesar, yang juga merupakan salah satu buku terkemuka dalam kepustakaan Melayu, adalah *Bustan as-Salatin* ("Taman Raja-Raja") yang mulai ditulisnya pada tahun 1638 dan yang didasarkan pada sumber-sumber Arab. Karya ensiklopedik ini terdiri atas tujuh buku yang meliputi penciptaan dunia, nabi-nabi Islam serta raja-raja muslim yang pertama di kawasan Timur Tengah dan Melayu, para raja dan penasihat yang adil, raja-raja yang saleh dan orang-orang suci Islam, raja-raja yang lalim dan para penasihat yang

tidak cakap yang memperdayakan raja-raja itu, para bangsawan dan pahlawan yang berjasa dalam peperangan-peperangan Nabi Muhammad, dan kecerdasan serta berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu firasat dan ilmu kedokteran. Karya-karya ar-Raniri juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Indonesia lainnya. Pada tahun 1644, dia meninggalkan Aceh setelah tidak lagi mendapat dukungan dari pengganti Iskandar Tsani, dan meninggal di India empat belas tahun kemudian.

Selama masa kekuasaan Ratu Taj ul-Alam (1641–75), Abdurrauf merupakan pengarang yang terpenting di istana Aceh. Dia menulis karya-karya tentang fikih Syafi'i dan juga tasawuf. Setelah masa itu, ketika Aceh mulai mengalami kemunduran politis seperti yang digambarkan dalam bab 4, negara itu tampaknya juga telah kehilangan peranannya sebagai pusat agama dan sastra dalam kebudayaan Melayu.

Sejumlah besar karya Melayu lain, di samping *Bustan as-Salatin,* diilhami oleh, atau diterjemahkan dari, naskah-naskah berbahasa Islam lainnya. Salah satu di antara karya-karya itu adalah *Mahkota Segala Raja-Raja* atau *Taj as-Salatin,* yang disadur dari sumber-sumber Persia pada tahun 1602–3. Meskipun tidak pasti, kemungkinan besar terjemahan ini dikerjakan di istana Aceh. Naskah ini berisi ajaran-ajaran ortodoks tentang manusia dan Tuhan serta banyak nasihat mengenai berbagai aspek ketatanegaraan; *Taj as-Salatin* juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Banyak naskah yang khusus bersifat keagamaan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, termasuk tafsir Quran dan karya-karya fikih. Ada pula hikayat-hikayat dari dunia Islam. *Hikayat Iskandar Dzulkarnain* ("Kisah tentang Alexander yang Bertanduk-Dua") berkenaan dengan dongeng-dongeng tentang Alexander Agung, dan *Hikayat Amir Hamzah* ("Kisah tentang Amir Hamzah") merupakan sebuah cerita roman berdasarkan dongeng-dongeng Persia mengenai paman Nabi Muhammad.

Akan tetapi, kesastraan Melayu tidak seluruhnya didominasi oleh karya-karya yang berilhamkan Islam. Cerita-cerita Hindu pun berhasil bertahan selama proses islamisasi berlangsung dan terpelihara dalam sastra-sastra klasik seperti *Hikayat Sri Rama* ("Kisah tentang Yang Mulia Rama" yang didasarkan pada *Ramayana*) dan *Hikayat Pandawa Jaya* ("Kisah tentang Keluarga Pandawa yang Jaya" yang didasarkan pada *Mahabharata* yang berbahasa

Sansekerta tapi tampaknya diambil secara langsung dari *Bharatayuddha* yang berbahasa Jawa Kuno). Kisah-kisah Hindu juga menjadi dasar bagi alur-alur cerita wayang kulit yang dimainkan dengan menggerakkan boneka-boneka yang terbuat dari kulit yang rata pada sebuah layar yang tegak lurus dengan menggunakan penerangan dari belakang. Ada juga permainan wayang Melayu yang didasarkan pada kisah-kisah Jawa mengenai pahlawan-pahlawan legendaris dari masa pra-Islam yaitu Panji dan Damar Wulan (dalam bahasa Melayu disebut Damar Bulan).

Kronik-kronik merupakan suatu gaya kesastraan Melayu yang penting. *Hikayat Aceh* ("Kisah tentang Aceh") tampaknya telah ditulis pada masa pemerintahan Iskandar Muda (1607–36). Hikayat ini mengisahkan para leluhur Iskandar Muda serta memuji raja ini pada masa mudanya, dan tampaknya diilhami oleh *Akbarnama* (yang berbahasa Persia) yang ditulis untuk memuji kaisar bangsa Mogol, Akbar (1555–1606). Ada banyak kronik berbahasa Melayu lainnya yang menceritakan sejarah negara-negara lain di Indonesia dan di Semenanjung Malaya.

Sebagian besar karya berbahasa Melayu yang disebutkan di atas berbentuk prosa, walaupun di antara karya-karya tadi juga ditemukan bagian-bagian yang berupa sajak. Ada pula suatu tradisi penulisan dalam bentuk sajak. Ada dua bentuk puisi pokok dalam bahasa Melayu, syair dan pantun. Usia kedua bentuk tersebut tidak diketahui karena langkanya naskah-naskah awal. Sebutan "pantun" berasal dari Indonesia (mungkin dari bahasa Jawa), sedangkan istilah "syair" berasal dari bahasa Arab *(syi'r,* sajak: *sya'ir,* penyajak). Kedua bentuk ini menggunakan bait empat-baris yang masing-masing biasanya berisi empat kata, tetapi pola sajak keduanya berbeda (a-b-a-b dalam pantun, a-a-a-a dalam syair). Perbedaan pokok antara keduanya ialah bahwa pantun juga menggunakan sajak internal secara ekstensif dan keempat barisnya biasanya sempurna dengan sendirinya, di mana dua baris pertama menyinggung dua baris kedua yang menjelaskan maksud si penyair. Di lain pihak, syair empat-baris biasanya merupakan bagian dari karya-karya sajak yang jauh lebih panjang. Syair meliputi banyak pokok permasalahan, termasuk epos-epos sejarah. Beberapa di antaranya merupakan terjemahan Melayu dari epos-epos Jawa, termasuk syair mengenai kisah-kisah Damar Wulan (Damar Bulan) dan Panji yang disebutkan di atas. Contoh-contoh



Wayang kulit yang dibuat oleh Sultan Yogyakarta Hamengkubuwana VIII (1921–39): tokoh Gatotkaca dari *Bharatayuddha* versi Jawa

paling awal yang terkenal dari syair Melayu terdapat dalam karya-karya Hamzah Fansuri, pengarang Aceh yang dibicarakan di atas. Baik syair maupun pantun dinyanyikan dengan keras.

Kesastraan klasik Jawa jelas berbeda dari kesastraan klasik Melayu, meskipun kedua-duanya saling memengaruhi satu sama yang lain. Selain tradisi-tradisi Indonesia dari daerah-daerah lain, ada dua sumber pengaruh dari luar yang dapat ditemukan dalam kesastraan Jawa: tradisi-tradisi India melalui bahasa Jawa Kuno dan tradisi-tradisi Islam. Perbedaan yang paling mencolok antara

tradisi Melayu dan Jawa ialah lebih kecilnya pengaruh Islam dalam tradisi Jawa. Pada tingkatan yang dangkal, perbedaan ini tercermin dalam pemilihan tulisannya. Kesastraan Melayu ditulis dengan tulisan Arab (terkecuali untuk segelintir contoh dari Sumatera Selatan); sebaliknya, dalam kesastraan Jawa, tulisan Jawa yang pada dasarnya berasal dari tulisan India jauh lebih sering digunakan daripada tulisan Arab. Perbedaan penting lainnya ialah lebih menonjolnya puisi daripada prosa, dalam kesastraan klasik Jawa. Para pengarang Jawa menulis karya-karya besar mereka dalam bentuk sajak *macapat,* yang terdiri atas kira-kira dua puluh matra yang berlainan yang menentukan banyaknya suku kata setiap barisnya, huruf hidup yang terakhir pada setiap baris, dan banyaknya baris pada setiap baitnya (berkisar dari tiga sampai sepuluh baris). Kira-kira tujuh di antara matra-matra tersebut biasa digunakan, sedangkan matra-matra lainnya lebih jarang dipakai. Sajak ini dinyanyikan dengan suara lantang. Bentuk-bentuk sajaknya tampaknya asli Jawa, walaupun ada kemungkinan diilhami oleh matra-matra India yang ditemukan dalam kesastraan Jawa Kuno.

Sejarah kesastraan Jawa Kuno di Jawa setelah runtuhnya kerajaan Hindu-Budha yang terakhir sekitar tahun 1527 sangatlah kabur. Apa yang jelas ialah bahwa warisan Jawa Kuno tersebut diteruskan ke zaman Islam. Beberapa di antara karya-karya terbesar yang berbahasa Jawa (atau "Jawa Baru") merupakan saduran-saduran dari karya-karya yang berbahasa Jawa Kuno, terutama *Serat Rama* (dari *Ramayana*), *Serat Bratayuda* (dari *Bharatayuddha), Serat Mintaraga* (dari *Arjunawiwaha*), dan *Serat Arjuna Sasrabau* atau *Lokapala* (dari *Arjunawijaya*). Kapan versi-versi berbahasa Jawa Kuno tidak lagi disalin dan dibaca di Jawa sangatlah sulit untuk diketahui. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa bahasa Jawa Kuno masih tetap dipelajari di istana-istana Jawa sampai pertengahan abad XVIII. Salah satu bukti penting yang mendukung pandangan ini adalah satu naskah berbahasa Jawa Kuno *(Dharmasunya Kakawin)* yang disalin oleh seorang pangeran Kartasura pada tahun 1716. Karena itu, cukup beralasan bila bagian pokok dari kesastraan Jawa dilihat sebagai dipengaruhi secara langsung oleh pemikiran-pemikiran dari masa pra-Islam. Bukan hanya karya-karya yang disadur secara langsung dari bahasa Jawa Kuno itu saja yang penuh dengan pengaruh Hindu-Budha dan

kenangan akan kisah-kisah dari masa pra-Islam, tetapi juga banyak karya-karya lainnya.

Pertunjukan wayang Jawa merupakan sarana penting dalam memelihara dan mempertahankan peninggalan Hindu-Budha di Jawa yang sudah mengalami proses islamisasi. Bentuk wayang yang utama adalah wayang kulit. Cerita-cerita dalam wayang kulit didasarkan pada cerita-cerita kepahlawanan Hindu, *Ramayana* dan *Bharatayuddha*. Kisah-kisah Panji dan Damar Wulan, pahlawan-pahlawan legendaris dari masa pra-Islam, juga dipergelarkan dalam wayang. Wayang golek (boneka-boneka kayu yang bundar bentuknya dengan kepala dan lengan yang dapat digerakkan) biasanya dipakai untuk cerita-cerita Menak, yang merupakan cerita-cerita roman yang diilhami oleh legenda-legenda Islam yang melibatkan paman Nabi Muhammad, Amir Hamzah. Baru pada wayang golek inilah dapat ditemukan adanya semacam inspirasi Islam. Ada alasan untuk menyatakan bahwa setidak-tidaknya di kalangan istana, cerita-cerita klasik Hindu lebih terkenal daripada cerita-cerita Menak. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa masyarakat Jawa selalu sadar bahwa warisan budaya mereka berasal dari masa pra-Islam. Berhubungan dengan ini, cukup aneh bahwa meskipun kelangsungan hidup kebudayaan pra-Islam dipertunjukkan secara nyata dalam wayang, namun tradisi Jawa biasanya beranggapan bahwa wayang diciptakan oleh sembilan orang wali, penyiar-penyiar Islam yang semi-legendaris di Jawa.

Inspirasi langsung Islam terlihat dalam terjemahan karya-karya keagamaan dari bahasa Arab atau Melayu ke dalam bahasa Jawa. Tulisan Arab dan prosa kadang-kadang digunakan dalam karya jenis ini, tetapi tulisan Jawa dan sajak pun lazim pula dipakai. Suatu komitmen yang eksklusif pada sumber-sumber inspirasi Islam tampaknya hanya berlaku untuk sekelompok kecil orang Jawa yang melek huruf. Bahkan, para penulis naskah keagamaan Islam yang saleh pun sering berpaling pada tradisi-tradisi Hindu-Budha untuk memberikan contoh-contoh yang bersifat menjelaskan atau sebagai ilustrasi. Banyak buku-buku sajak ditulis mengenai tasawuf, yang dinamakan 'suluk' (lagu). Dalam karya-karya itu terdapat doktrin-doktrin sufi yang ortodoks, seperti yang bisa ditemukan di masyarakat-masyarakat muslim lain. Akan tetapi, juga ditemukan doktrin-doktrin yang sangat monistis, yang jelas merupakan syirik dan yang masih mencerminkan gagasan-gagasan Hindu-Budha. Kebudayaan Islam juga mengilhami sejumlah besar

cerita roman Jawa, termasuk *Menak Amir Hamsa, Yusup, Ahmad Hanapi,* dan naskah-naskah lain. Akan tetapi, cerita-cerita roman Panji dan Damar Wulan yang non-Islam juga merupakan bagian yang penting dari kesastraan Jawa.

Konflik besar di kalangan keagamaan seperti yang terjadi di Aceh pada abad XVII tampaknya tidak pernah terjadi di Jawa sebelum abad XIX. Meskipun banyak naskah keagamaan Islam Jawa belum dipelajari, namun tampak jelas bahwa bentuk Islam yang berlaku umum di kalangan masyarakat Jawa yang melek huruf adalah tasawuf, yang mengidentifikasikan Manusia dan Tuhan. Karena rupa-rupanya tidak terjadi satu konflik pun di lingkungan agama antara yang ortodoks dan yang heterodoks, maka tampaknya ada kemungkinan bahwa bahkan kaum muslim Jawa yang terpelajar dan saleh pun percaya bahwa tasawuf seperti itu merupakan pemahaman yang benar akan agama Islam. Ada tanda-tanda terjadinya ketegangan menyangkut perlunya menjalankan *sarengat* (dalam bahasa Arab *syari'ah:* syariat dalam bahasa Indonesia), yaitu hukum suci Islam. Naskah-naskah berbahasa Jawa menggambarkan syahidnya atau dihukumnya lima orang guru tasawuf yang bersifat klenik: wali Sitijenar dan Sunan Panggung pada masa Demak, Ki Bebeluk dari Pajang, Seh Amongraga pada masa pemerintahan Sultan Agung, dan Ki Cabolek pada awal abad XVIII. Bagaimanapun juga, sangat penting artinya bahwa dalam cerita-cerita ini, para guru tersebut tidak dikecam karena isi ajaran mereka (bahwa Manusia dan Tuhan adalah satu), tetapi lebih karena mereka mengungkapkan doktrin rahasia ini kepada orang yang belum diinisiasikan dan/atau memberi tahu rakyat bahwa salat setiap hari, kehadiran di masjid, dan lain sebagainya tidak perlu dilakukan, sehingga mengancam ketaatan orang pada hukum Islam. Kebenaran doktrin-doktrin mereka itu sendiri tidak diperdebatkan.

Kronik-kronik (babad) merupakan suatu bagian yang penting dari kesastraan klasik Jawa. Asal-usul jenis kesastraan ini tidak diketahui, karena kronik-kronik yang sangat panjang dan terinci yang ditemukan dalam bahasa Jawa Baru tidak dikenal dalam bahasa Jawa Kuno. Seseorang tidak dapat mengenyampingkan kemungkinan bahwa kronik-kronik Arab mengilhami pujangga-pujangga Jawa untuk mulai menyusun babad-babad, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu. Memang, masalah-masalah

keagamaan hanya mendapat sedikit perhatian dalam kronik-kronik Jawa, yang pada dasarnya lebih banyak memusatkan perhatiannya pada raja-raja, para pahlawan, pertempuran-pertempuran, dan selingan-selingan romantis. Beberapa kronik merupakan karya-karya ensiklopedik yang dimulai dari Adam maupun dewa-dewa Hindu, menceritakan masa pra-Islam yang legendaris dalam sejarah Jawa, dan mencapai puncaknya pada abad XVII atau XVIII; karya-karya ini biasanya disebut dengan nama yang umum, *Babad Tanah Jawi* ("Sejarah Tanah Jawa"). Tebal karya-karya tersebut jarang yang kurang dari beberapa ratus lembar; sebuah karya *Babad Tanah Jawi* yang selesai ditulis di Surakarta pada tahun 1836 terdiri atas delapan belas jilid. Kronik-kronik lain menceritakan sejarah kerajaan-kerajaan, pahlawan-pahlawan, atau kejadian-kejadian tertentu. Kronik-kronik Jawa memang beraneka ragam dipandang dari sudut ketepatan sejarahnya, tetapi setidak-tidaknya beberapa di antaranya dianggap merupakan sumber sejarah yang benar-benar tepat dan penting.

Memang merupakan suatu kenyataan yang aneh dari sejarah kebudayaan Jawa bahwa walaupun banyak kesastraan yang penting dapat ditemukan dalam ribuan naskah, namun hanya beberapa pengarang saja yang dikenal namanya dari masa sebelum abad XIX. Sering sulit untuk memastikan karya-karya yang secara tradisional dianggap ditulis oleh segelintir orang itu benar-benar ditulis oleh mereka. Pengarang pertama yang identitasnya dapat diketahui dari dokumen-dokumen VOC dan juga dari tradisi-tradisi Jawa ialah Carik Bajra (juga dikenal sebagai Tirtawiguna), yang aktif di istana Kartasura sejak sekitar tahun 1718 dan menjadi penasihat utama raja pada tahun 1730-an dan 1740-an dan patih hingga wafatnya pada tahun 1751. Konon dia telah menulis sebuah kronik (*Babad Kartasura*), cerita-cerita Panji, sebuah versi dari karya yang penuh ajaran berjudul *Yudanagara Wulang* ("Ajaran-ajaran Yudanagara", mengenai keterampilan memimpin negara), dan karya-karya lain. Istri Raja Pakubuwana I (m. 1704–19), Ratu Pakubuwana (± 1657–1732), adalah juga seorang tokoh utama kesastraan dan agama di paro pertama abad XVIII. Ia mendorong munculnya banyak karya yang bersemangatkan Islam, termasuk terjemahan kisah-kisah Amir Hamzah ke dalam bahasa Jawa berjudul *Serat Menak,* yang disusun tahun 1715. Pada tahun1729–30, ia memerintahkan produksi versi baru dari buku-

buku yang dinisbahkan kepada ziarah Sultan Agung ke Tembayat, seperti yang akan dilihat nanti pada bab 9.

Pada paro kedua abad XVIII, Yasadipura I (1729–1803) aktif di istana Surakarta. Apabila semua karya yang dinisbahkan kepada Yasadipura I benar-benar ditulis olehnya, maka dia merupakan yang terbesar di antara para pengarang yang hidup sebelum abad XIX. Dia dianggap menghasilkan empat buah karya sastra klasik utama yang disadur dari bahasa Jawa Kuno seperti yang disebutkan di atas: *Serat Rama, Serat Bratayuda, Serat Mintaraga,* dan *Serat Arjuna Sasrabau* atau *Lokapala*. Konon dia juga telah menghasilkan sebuah terjemahan dari *Serat Menak,* walaupun jelas bahwa sebelum zamannya sudah ada terjemahan Ratu Pakubuwana atas naskah itu. Yasadipura I juga dianggap membuat terjemahan *Dewa Ruci* (sebuah cerita yang didasarkan pada *Bharatayuddha,* yang mengajarkan doktrin-doktrin kebatinan Hindu), *Serat Panitisastra* (sebuah buku mengenai tata susila yang didasarkan pada *Nitisastra Kakawin* yang berbahasa Jawa Kuno), terjemahan *Taj as-Salatin* dalam bahasa Jawa yang dinamakan *Serat Tajusalatin,* dan *Anbiya* atau *Tapel Adam* (kehidupan nabi-nabi Islam). Akhirnya, dia dianggap menulis dua buah buku yang bersifat sejarah, *Serat Cabolek* ("Buku tentang Cabolek", yang menyangkut suatu perselisihan agama) dan salah satu kronik berbahasa Jawa yang terbaik, *Babad Giyanti* ("Sejarah Giyanti", yang mencakup kurun waktu 1746–60). Buku yang terakhir ini bukan hanya merupakan sebuah dokumen sejarah yang teliti, tetapi juga sebuah contoh yang sangat baik dari sajak *macapat* yang berbahasa Jawa. Bagaimanapun, ada sejumlah persoalan seputar penisbahan beberapa karya ke Yasadipura I. Tampaknya tak mungkin dia merupakan penulis versi asli *Cabolek,* tapi apabila dia memang mengarang *Babad Giyanti,* maka ia berhak dikenal sebagai salah seorang penulis Jawa terbesar sebelum abad XIX.

Kesastraan Bali dapat dibagi menjadi tiga kelompok atas dasar bahasanya: Jawa Kuno, Jawa Pertengahan (atau "Jawa-Bali", atau "Bali-Jawa"), dan Bali. Kesastraan yang berbahasa Jawa Kuno mencerminkan peranan penting yang dimainkan Bali dalam memelihara warisan kesastraan Jawa pra-Islam setelah Jawa menjadi Islam. Meskipun beberapa naskah dari buku-buku yang berbahasa Jawa Kuno masih dapat ditemukan di Jawa, namun sebagian besar naskah hanya dikenal dalam salinan-salinan dari Bali atau Pulau Lombok yang letaknya bersebelahan. Orang-orang Bali

menolak agama Islam dan tetap mempertahankan warisan kesastraan dan agama yang di Jawa telah berubah (namun tidak pernah terhapus sama sekali) sebagai akibat islamisasi.

Kesastraan yang berbahasa Jawa Pertengahan merupakan suatu subyek yang problematis. Sebagian besar dari naskah-naskah itu dinamakan *kidung* (nyanyian). Naskah-naskah itu terutama berisi legenda-legenda yang romantis mengenai zaman Majapahit di Jawa *(Harsawijaya, Rangga Lawe, Sorandaka, Sunda)*, Pangeran Panji dari kurun waktu sebelumnya (ada banyak *kidung* mengenai tokoh ini), atau tokoh-tokoh yang lebih merupakan pahlawan-pahlawan rakyat daripada bangsawan *(Sudamala, Sri Tanjung, Calon Arang)*. Beberapa *kidung* merupakan saduran dari karya-kaya berbahasa Jawa Kuno yang bertema India, tetapi sebagian besar adalah tentang Jawa. Ada pula karya-karya berbahasa Jawa Pertengahan mengenai agama, dan kronik *Pararaton* (yang juga menyangkut Jawa). Buku-buku tersebut hanya dikenal dalam naskah-naskah dari Bali, sehingga timbul pertanyaan apakah buku-buku itu bagian dari warisan Jawa pra-Islam yang, seperti bahasa Jawa Kuno, dipertahankan di Bali, ataukah memang merupakan produk asli kesastraan Bali yang dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa. Pada masa-masa belakangan ini, pendapat yang ilmiah cenderung ke arah pandangan bahwa kesastraan berbahasa Jawa Pertengahan sepatutnyalah dianggap sebagai bagian yang asli dari kebudayaan Bali, tetapi bukti yang ada tidak cukup memadai untuk menarik suatu kesimpulan yang pasti.

Orang-orang Bali juga menulis dalam bahasa mereka sendiri, terutama mengenai sejarah kerajaan-kerajaan mereka. Meskipun terdapat naskah-naskah dalam bentuk sajak, namun bentuk kronik yang paling lazim adalah dalam bentuk prosa dan dinamakan *babad*, seperti halnya di Jawa. Sejauh ini, penelitian yang dilakukan terhadap kronik-kronik berbahasa Bali masih terbatas. Sebagian dari kronik-kronik tersebut tampak sangat bersifat mitologis dan tidak kronologis sehingga nilainya sebagai sumber-sumber sejarah politik tidaklah besar, walaupun penting sekali dari sudut kesastraan, namun sebagian lainnya merupakan sumber politik yang bernilai. Tujuan utama kronik-kronik itu tampaknya ingin menetapkan para leluhur keluarga-keluarga bangsawan, sehingga dapat memperlancar penghormatan kepada nenek moyang dan membuktikan legitimasi kerajaan-kerajaan. Bentuk-bentuk lain kesastraan juga ditulis dalam bahasa Bali, yang sering sangat

dipengaruhi oleh cerita-cerita dan norma-norma kesastraan Jawa Kuno atau Jawa Pertengahan.

Wayang Bali mempunyai banyak persamaan dengan wayang Jawa, khususnya mengenai ketergantungan sebagian besar alur ceritanya pada cerita-cerita *Ramayana* dan *Bharatayuddha*. Lakon-lakon Calon Arang dan Panji juga dipergelarkan. Prinsip-prinsip umum pertunjukannya sama: boneka-boneka yang terbuat dari kulit yang rata dimainkan pada sebuah layar tegak lurus dan diterangi dari belakang. Meskipun demikian, kedua tradisi itu mempunyai berbagai perbedaan dalam kaidah-kaidah artistiknya. Boneka-boneka Bali lebih sederhana daripada wayang Jawa. Penampilan wayang Bali yang lebih kasar mungkin mencerminkan suatu bentuk wayang yang lebih kuno yang juga pernah ditemukan di Jawa, karena candi-candi Hindu di Jawa Timur dari abad XIII dan XIV memiliki relief-relief dalam corak yang sama.

Suku Bugis dan Makasar di Sulawesi Selatan mempunyai kesastraan yang berkaitan erat, baik prosa maupun sajaknya. Kesastraan mereka menggunakan tulisan asli yang nyata-nyata berbeda dari tulisan Arab maupun Jawa, walaupun mempunyai persamaan-persamaan dengan beberapa tulisan Sumatera dan pada dasarnya berasal dari suatu bentuk tulisan India. Meskipun kedua suku bangsa ini baru memeluk Islam pada tahun-tahun pertama abad XVII, namun mereka segera menjadi terkenal karena kesadaran dan keteguhan mereka pada agama mereka yang baru. Kesastraan mereka banyak berupa terjemahan dari karya-karya keagamaan yang berbahasa Arab dan Melayu, termasuk tulisan-tulisan Nuruddin ar-Raniri. Sebuah syair kepahlawanan asli yang panjang, *La Galigo*, berisi bahan mitologis mengenai seorang raja Sulawesi yang legendaris. *La Galigo* masih tetap dipandang keramat oleh banyak orang Bugis dan Makasar dewasa ini.

Bagi para sejarawan, kesastraan Bugis dan Makasar memiliki dua genre yang sangat penting artinya. Kronik-kronik ditulis dalam kedua bahasa itu, disebut *patturioloang* dalam bahasa Makasar dan *attoriolong* dalam bahasa Bugis (kedua-duanya berarti "sejarah manusia pada zaman kuno"). Apa yang paling membedakan kronik-kronik ini dari kronik-kronik Melayu, Jawa, dan Bali ialah dihindarinya unsur-unsur mitologi atau legenda terkecuali untuk dongeng-dongeng dasar yang bersifat pengantar. Oleh karena itu, tampaknya kronik-kronik tersebut berpotensi

menjadi sumber sejarah yang jauh lebih berharga, tetapi penggunaannya sering menjadi sulit karena sangat langkanya angka-angka tahun yang terdapat di dalamnya. Meskipun demikian, kekurangan ini tertutupi, bahkan secara lebih baik, dengan adanya buku-buku harian yang terinci yang ditulis dalam kedua bahasa itu, yang disimpan oleh raja-raja dan para pejabat tinggi yang dimulai pada awal abad XVII. Tradisi penulisan buku harian ini tidak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia yang lain. Catatan-catatan yang terinci dan sejumlah besar catatan pinggiran dalam buku-buku harian berbahasa Bugis dan Makasar ini merupakan sumber-sumber pengetahuan sejarah yang sangat berharga (walaupun sampai sekarang sebagian besar belum dikaji).

Tentu saja masih ada tradisi-tradisi kesastraan Indonesia lain di samping tradisi-tradisi kesastraan tersebut di atas. Kebanyakan tradisi kesastraan ini, sampai batas tertentu, dipengaruhi oleh tradisi-tradisi utama yang sudah disebutkan, dan terutama oleh kesastraan Melayu dan Jawa, dua budaya kesastraan yang paling berpengaruh di Nusantara. Kesastraan Melayu memengaruhi kesastraan rakyat Minangkabau di Sumatera, kesastraan sebagian besar suku bangsa pantai yang berbahasa Melayu di seluruh kawasan Malaya-Indonesia, serta suku bangsa Bugis dan Makasar. Pengaruh Jawa dapat ditemukan dalam tradisi-tradisi kesastraan Madura dan Sunda. Pengaruh-pengaruh dari Jawa maupun Melayu, satu terhadap yang lain, dapat ditemukan dalam hasil kesastraannya masing-masing. Kesastraan-kesastraan Bali, Bugis, dan Makasar tidak sebesar itu pengaruhnya terhadap luar kelompok bahasanya sendiri.

Kesenian yang berbentuk visual dan pertunjukan juga sangat menonjol dalam kebudayaan-kebudayaan klasik Indonesia, dan masih tetap terkenal hingga saat ini. Wayang, yang mungkin merupakan bentuk kesenian Indonesia yang paling khas, telah dibicarakan di atas. Alat-alat senjata, khususnya keris yang berpola penuh hiasan, hiasan-hiasan buku, arsitektur, batik, dan benda-benda lain menunjukkan suatu tradisi seni yang halus. Tari sudah sejak lama dipertunjukkan di istana-istana di Indonesia dan dipahatkan pada relief candi-candi Hindu kuno di Jawa. Pada zaman Islam, kelestarian pertunjukan-pertunjukan tari terdokumentasikan, namun bentuk-bentuk tariannya mustahil dapat dilukiskan secara seksama sebelum abad XX, sewaktu deskripsi dan

foto-foto yang terinci mulai dibuat. Meskipun demikian, tampak jelas bahwa kesenian Indonesia yang berbentuk visual dan pertunjukan sering bersifat sangat sakral. Wayang, keris, batik, dan tari-tarian tertentu memiliki sifat-sifat keagamaan dan memancarkan tenaga-tenaga gaib; kesemuanya itu hanya dapat digunakan dengan memerhatikan kekuatan-kekuatan gaib. Oleh karena itulah maka kesenian-kesenian Indonesia dilingkupi oleh ritual-ritual dan kaidah-kaidah yang rumit.

Musik klasik Indonesia berkaitan erat dengan pertunjukan-pertunjukan drama. Tradisi-tradisi musik tentu saja terdapat di seluruh Nusantara, tapi yang paling penting artinya adalah tradisi musik Jawa. Dengan masih dapat ditemukannya beberapa perangkat alat musik yang benar-benar kuno (beberapa di antaranya diduga berasal dari abad XVII atau bahkan sebelumnya), maka ada kemungkinan untuk mempelajari sedikit mengenai tradisi-tradisi musik Jawa sebelum abad XX. Tampak ada kemungkinan bahwa pada zaman prasejarah, Jawa merupakan pusat kebudayaan musik genta-gong yang ditemukan di seluruh Asia Tenggara. Memang, istilah *gong* merupakan satu dari segelintir kata Jawa yang berhasil menembus ke dalam bahasa-bahasa Eropa yang utama. Dua jenis utama gong ditemukan dalam orkes gamelan Jawa. Bonang adalah sebuah genta perunggu dengan sebuah tonjolan kecil di atasnya untuk dipukul; biasanya beberapa biji bonang dijejerkan secara horisontal di atas sebuah kerangka yang terbuat dari kayu. Tipe dasar lain ialah gong yang digantungkan secara vertikal, dengan ukuran beraneka ragam; *gong ageng* (gong besar) adalah sebuah gong yang tebal dan besar dan memiliki sisi yang dalam, yang bergaris tengah satu meter atau lebih dan menghasilkan bunyi khas orkes Jawa yang nyaring dan dalam.

Orkes gamelan Jawa sebagian besar terdiri atas instrumen-instrumen yang dipukul, terutama bonang, gong, genta-genta gong lain, dan instrumen-instrumen yang menyerupai *xylophone;* suatu orkes yang lengkap memiliki bentangan nada total tujuh oktaf. Gamelan biasanya juga dilengkapi dengan satu atau lebih biola gesek (rebab), kecapi-kecapi (celempung), seruling-seruling yang ditiup pada bagian ujungnya (suling), dan penyanyi-penyanyi, serta dipimpin oleh seorang penabuh genderang, yang berbentuk horisontal dan berkepala ganda. Sebuah orkes gamelan modern bisa terdiri atas 80 instrumen dan memerlukan kira-kira

25 pemain musik dan beberapa orang penyanyi. Instrumen-instrumen gamelan memiliki dua tingkat nada yang berbeda—*pelog* (tujuh jarak nada yang tidak sama setiap jaraknya) dan *slendro* (lima jarak nada yang hampir sama setiap jaraknya)—dan masing-masing instrumen dirangkap dalam kedua tingkat nada tersebut, walaupun ada orkes gamelan yang hanya menggunakan salah satu dari kedua tingkat nada itu. Kombinasi *pelog* dan *slendro* dalam satu orkestra mungkin merupakan inovasi dari akhir abad XIX. Musik yang dihasilkan oleh orkes gamelan menantang untuk dilukiskan. Suara genta-genta gong yang terdiri atas beraneka ragam pola titi-nada menghasilkan melodi-melodi dasar, melodi-melodi yang berbeda pada tempo dua kali lipat, perluasan-perluasan terhadap suara dasar, semuanya di dalam susunan-susunan yang teratur, sehingga memungkinkan orang asing pun untuk memahami mengapa masyarakat Jawa merasakan kekuatan-kekuatan gaib yang bergerak dalam suara itu. Orkes-orkes gamelan mempunyai identitas-identitas spiritual dan nama-nama diri, diberi sesajian-sesajian, dan beberapa di antaranya hanya boleh dimainkan pada kesempatan-kesempatan tertentu saja. Melodi-melodi gamelan juga terikat oleh kaidah-kaidah dan aturan yang bersifat sakral.

Tradisi-tradisi gamelan Sunda (Jawa Barat), Bali, dan Madura dengan mudah dibedakan dari tradisi-tradisi gamelan Jawa, tetapi prinsip-prinsip umum dan instrumen-instrumen musik-pukulnya yang pokok hampir serupa. Gong-gong juga ditemukan dalam musik daerah-daerah lain di Indonesia dan wilayah-wilayah Asia Tenggara yang lain. Dapat ditambahkan di sini bahwa tentu saja ada tradisi-tradisi rakyat dalam bentuk musik seperti halnya dalam bentuk kesenian lain di seluruh Indonesia. Agaknya telah terjadi proses saling memengaruhi antara tradisi istana dan tradisi rakyat, tetapi hanya sedikit yang dapat diketahui tentang tradisi-tradisi rakyat yang kuno, karena sebagian besar bukti yang dapat ditemukan berasal dari istana.

Bab ini hanya dapat menyampaikan tinjauan yang tidak begitu mendalam terhadap tradisi budaya negara-negara yang ada di Indonesia pada zaman sebelum penjajahan. Akan tetapi, walaupun hanya berdasarkan suatu tinjauan dangkal semacam itu, sangat perlu dipahami bahwa di balik peperangan, persekongkolan, dan penderitaan yang sangat mendominasi sebagian besar

lembaran sejarah negara-negara tersebut, telah tumbuh subur beraneka ragam tradisi budaya. Sebagai dasarnya adalah rasa keagamaan yang mendalam, suatu keyakinan yang dalam yang sering sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Islam dan kadang-kadang oleh pemikiran-pemikiran lain. Rasa keagamaan ini memengaruhi persepsi dan tanggapan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ada sebuah dimensi budaya pada konflik yang diakibatkan oleh tahap pertama intervensi besar-besaran Belanda, yang akan dibahas dalam bagian kedua buku ini. Dimensi budaya ini baru sedikit dipahami hingga saat ini, tetapi dapat dikatakan bahwa banyak orang Indonesia merasa mereka tidak hanya menghadapi suatu konfrontasi militer, politik, dan ekonomi, melainkan juga suatu konfrontasi spiritual.[]

II

Perjuangan Merebut Hegemoni, ± 1630–1800

Bab 6 ....

Indonesia Bagian Timur, ± 1630–1800

SEKITAR TAHUN 1630, Belanda telah mencapai banyak kemajuan dalam meletakkan dasar-dasar militer untuk mendapatkan hegemoni perdagangan atas perniagaan laut di Indonesia. Mereka berkuasa di Ambon, di pusat kepulauan penghasil rempah-rempah, dan mendirikan markas besar di Batavia yang terletak di Nusantara bagian barat. Pada tahun 1641, Malaka Portugis jatuh ke tangan VOC, dan pada tahun 1648, Perang Delapan Puluh Tahun di Eropa berakhir, mengakhiri permusuhan antara Belanda dan Spanyol. Akan tetapi, pada pertengahan abad XVII, menjadi jelas bahwa hegemoni VOC tidak dapat ditegakkan hanya dengan perjanjian-perjanjian perdamaian, pembangunan benteng-benteng, dan dipertahankannya keunggulan angkatan lautnya. Kekuasaan-kekuasaan di Indonesia, baik yang besar maupun yang kecil, masih tetap dapat mengacaukan rencana-rencana VOC. Oleh karena itu, VOC harus melakukan suatu kebijakan militer yang bahkan lebih agresif, dengan campur tangan secara langsung dalam urusan dalam negeri beberapa negara di Indonesia. Dengan demikian, diletakkanlah dasar-dasar bagi apa yang dapat disebut sebagai imperium Belanda yang pertama di Indonesia. Di antara para Gubernur Jenderal yang memerintah selama tahap yang lebih bersifat ekspansionistis ini, maka Antonio van Diemen (1636–45), Joan Maetsuycker (1653–78), Rijklof van Goens (1678–81), dan Cornelis Janszoon Speelman (1681–4)-lah yang menonjol, tetapi bukan sebagai contoh kebajikan melainkan lebih sebagai arsitek ekspansi militer VOC.

Tahap pertama dalam periode yang lebih agresif ini dimulai di Indonesia bagian timur, yakni di kepulauan rempah-rempah Maluku. Belanda sudah berada di sana untuk beberapa waktu lamanya, tapi usaha-usaha mereka memaksakan monopoli atas produksi pala, bunga pala, dan, yang terpenting, cengkeh, baru mencapai sedikit keberhasilan. Kini muncul sebuah persekutuan lokal untuk menentang mereka, yang terutama terdiri atas kaum Muslim Hitu (Ambon bagian utara) dan pasukan-pasukan Ternate yang ada di Hoamoal (Semenanjung Seram bagian barat) dengan dukungan kerajaan bangsa Makasar, Gowa.

Persekutuan anti-VOC tersebut dipimpin oleh seorang Hitu yang beragama Islam, Kakiali (meninggal tahun 1643), yang semasa muda menjadi salah seorang murid Sunan Giri di Jawa. Pada tahun 1633, dia menggantikan ayahnya sebagai 'Kapitein Hitoe', pemimpin masyarakat Hitu di bawah naungan VOC. Seraya berpura-pura bersikap bersahabat dengan pihak Belanda, dia sekaligus mendukung komplotan-komplotan anti-VOC. Orang-orang Hitu mulai membangun benteng-benteng di wilayah pedalaman, dan para pejuang yang beragama Islam mulai menjarah perkampungan-perkampungan Kristen. Penyelundupan cengkeh yang melanggar peraturan-peraturan VOC semakin berkembang. Pihak VOC di Ambon tidak memiliki kekuatan militer baik untuk menumpas perlawanan yang tersebar luas itu, maupun untuk mengawasi perdagangan cengkeh. Pada tahun 1634, VOC memperdaya Kakiali di atas sebuah kapal VOC dan menawannya, yang menyebabkan larinya orang-orang Hitu ke benteng-benteng mereka dan bersiap menghadapi peperangan. Perlawanan terhadap VOC makin besar dan, bahkan, diduga mulai merembes di antara masyarakat Kristen.

Pada tahun 1637, Van Diemen pribadi ikut melancarkan serangan terhadap pasukan-pasukan Ternate di Hoamoal dengan kekuatan yang besar dan berhasil mengusir pasukan tersebut dari benteng-benteng mereka. Kemudian, demi meraih lagi dukungan penduduk Hitu, Van Diemen membebaskan Kakiali dan mendudukkannya kembali pada jabatan 'Kapitein Hitoe'. Tampaknya perdamaian berhasil dipulihkan, dan Kakiali bersumpah akan melaksanakan monopoli VOC. Tapi, perasaan benci terhadap VOC pada waktu itu sudah begitu mendalam sehingga tidak dapat terhapus begitu saja. Setelah Van Diemen meninggalkan Maluku,

Kakiali mengambil langkah-langkah membentuk sebuah persekutuan di antara Hitu, orang-orang Ternate yang berada di Hoalmoal, dan Gowa; sementara itu, dia juga mendorong dilakukannya perdagangan rempah-rempah secara 'gelap'. Namun demikian, Sultan Alauddin Tumenanga ri Gaukanna dari Gowa tetap bersikap hati-hati karena takut pada kekuatan angkatan laut VOC.

Pada tahun 1638, Van Diemen kembali ke Maluku, dan berusaha mencapai suatu persetujuan dengan Raja Ternate. Pihak VOC bersedia mengakui kedaulatan Ternate atas Seram dan Hitu serta menggaji Raja Ternate sebesar 4.000 real setiap tahun, tetapi dengan imbalan sebuah kesepakatan bahwa 'penyelundupan' cengkeh akan dihentikan dan VOC diberi kekuasaan *de facto* di Maluku Selatan. Kakiali dan Gubernur Ternate di Hoamoal tidak bersedia ikut serta dalam perundingan-perundingan tersebut, sehingga tidak dapat dicapai kesepakatan. Tampak jelas bahwa Raja Temate tidak memiliki wewenang untuk memenuhi permintaan VOC. Sementara itu, pertempuran-pertempuran kecil masih terus berlangsung dan Kakiali, yang masih memegang jabatan sebagai 'Kapitein Hitoe', terus berusaha menghadapi dan menyusun rencana untuk menghancurkan pihak Belanda.

Pada tahun 1641, Kakiali melepas kedok persahabatannya. Ia menyerang sebuah desa yang bersahabat dengan VOC, dan kemudian sebuah benteng VOC. Para prajurit Makasar kini bergabung dengan Kakiali, suatu faktor yang akhirnya akan memberi sumbangan pada keyakinan pihak Belanda bahwa Makasar juga harus diperhitungkan. Memang Kakiali dan para sekutunya memilih waktu yang salah untuk merebut kekuasaan. Karena, dengan jatuhnya Malaka ke tangan VOC pada tahun 1641, pihak Belanda kini dapat mengerahkan lebih banyak pasukannya untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka di Indonesia bagian timur.

Sebuah pasukan VOC berhasil mengusir tentara Makasar dari kubu-kubu pertahanan mereka di Hitu pada tahun 1643, tetapi tidak mampu merebut benteng Kakiali. Kemudian, pada bulan Agustus, pihak Belanda mengupah seorang berkebangsaan Spanyol yang telah membelot dari Kakiali supaya kembali ke Hitu dan membunuh Kakiali. Kemudian benteng Kakiali dapat direbut, tapi masih banyak orang Hitu melanjutkan perang mereka melawan VOC dari suatu tempat yang baru, Kapaha, di sebelah utara Hitu.

Pada tahun 1645, tiga buah ekspedisi VOC tidak berhasil menumpas perlawanan rakyat Hitu. Namun, pada Juli 1646, Kapaha akhirnya dapat direbut. Pemimpin tahap terakhir perlawanan masyarakat Hitu, Telukabesi, menyerah dan bersedia memeluk agama Kristen. Meskipun demikian, VOC menghukumnya dengan hukuman mati di Ambon pada September 1646.

Inilah akhir perlawanan yang efektif terhadap VOC di Hitu. Masih dilakukan berbagai usaha membentuk komplotan-komplotan anti-VOC pada tahun-tahun sesudah itu, tapi tak satu komplotan pun yang menjadi ancaman nyata bagi VOC seperti yang pernah ditunjukkan masyarakat Hitu sebelum tahun 1646. Meskipun demikian, kedudukan VOC di Maluku Selatan masih belum benar-benar aman, karena orang-orang Makasar dan Ternate tetap giat berdagang rempah-rempah dengan melanggar monopoli VOC. Di bawah pimpinan Arnold de Vlaming van Outshoorn, yang menjadi Gubernur Ambon dari tahun 1647 sampai 1650 dan Inspektur atas Ambon, Banda, dan Ternate dari tahun 1652 sampai 1656, masalah Ternate tersebut segera dapat ditemukan solusinya. De Vlaming adalah tokoh yang kontroversial sepanjang kariernya, sebagian karena kedua orangtuanya adalah pemeluk Katolik sedangkan dirinya sendiri dicurigai tidak pernah benar-benar menganut Calvinisme, yang menurut pengakuannya telah dianutnya. Selama masa pemerintahannya sebagai Gubernur Ambon, dia melakukan pemberantasan tindak korupsi yang tersebar luas di kalangan para pedagang VOC, dan mengembangkan agama Kristen di antara penduduk Indonesia. Tetapi, tindakan-tindakan militer yang keras yang dilakukan selama masa jabatannya yang kedua di Malukulah yang membuatnya masyhur sekaligus bernama buruk.

Pada tahun 1650, Raja Ternate, Mandar Syah, diturunkan dari tahta dalam suatu kudeta istana. Dia melarikan diri ke benteng VOC di Ternate dan meminta bantuan VOC. De Vlaming diutus untuk mengatasi keadaan itu, dan setelah kedatangannya para pengkudeta menyerah dan Mandar Syah didudukkan kembali di atas singgasananya. Sebuah kelompok kecil yang menentang berkuasanya kembali Mandar Syah berlayar menuju Hoamoal, dan mulai berkobarlah perang total melawan VOC. Dalam waktu seminggu mereka telah membunuh 131 orang Belanda—laki-laki, perempuan, anak-anak, dan para budak. Tampaknya VOC benar-benar tidak siap.

Dalam situasi ini, de Vlaming melihat kesempatan untuk akhirnya mengatasi masalah kelebihan produksi cengkeh. Pertama-tama, dia membawa Mandar Syah ke Batavia guna menandatangani sebuah perjanjian, pada Januari 1652, yang melarang penanaman pohon cengkeh di semua wilayah kecuali Ambon atau daerah-daerah lain yang dikuasai VOC. Pada saat itu Ambon mampu menghasilkan cengkeh dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk konsumsi seluruh dunia, dan tujuan VOC bukanlah untuk memonopoli melainkan membinasakan tanaman cengkeh di tempat-tempat lain. Pala hanya boleh ditanam di Banda.

Selanjutnya de Vlaming bergerak menentang perlawanan orang-orang Ternate yang berpangkalan di Hoamoal serta sekutu-sekutu mereka orang-orang Makasar dan Melayu, dalam satu di antara rangkaian kampanye paling berdarah dalam sejarah VOC. Di pihak VOC terdapat orang-orang Ambon yang beragama Kristen dalam perahu perang mereka. Perang itu berlangsung dari tahun 1652 sampai 1658 di sekitar Hoamoal yang berakhir dengan kemenangan di pihak VOC. De Vlaming sebenarnya ingin melanjutkan gerakannya menghukum Gowa yang telah mendukung musuhnya, Hoamoal, tetapi Batavia menolak permintaannya. Persoalan Hoamoal kini akhirnya diselesaikan VOC. Pada tahun 1656, penduduk yang masih tersisa dibuang ke Ambon. Semua tanaman rempah-rempah di Hoamoal dimusnahkan, dan sesudah itu daerah ini tidak didiami manusia kecuali jika ekspedisi-ekspedisi hongi (armada tempur) melintasi wilayah itu dalam rangka mencari pohon-pohon cengkeh liar yang harus dimusnahkan.

Sultan Saifuddin dari Tidore (m. 1657–89) meminta bantuan VOC untuk mengusir Spanyol dari wilayahnya pada tahun 1662. Pada saat itu telah berkembang rumor tentang akan segera ditariknya pasukan Spanyol, karena pendukung Ming di Taiwan, Koxinga (Cheng Ch'eng-kung; Zheng Chenggong), mengancam markas utama Spanyol di Manila. Pada tahun 1663, Spanyol benar-benar pergi dari Maluku, membuat VOC menjadi kekuatan Eropa paling utama di wilayah itu.

Saifuddin dipandang sebagai raja teladan oleh orang-orang Tidore. Ia pewenang atas adat istiadat tradisi Maluku dan ia sangat baik pada rakyatnya. Ia menderita lepra dan, daripada muncul di depan publik, lebih sering memberi perintah kerajaan dari balik kamarnya yang dipenuhi wangi dupa. Pada tahun 1657,

ia menerima pakta dengan VOC yang mencakup kebijakan pemusnahan tanaman rempah yang tidak sah dengan imbalan mendapat kompensasi moneter dari VOC.

Kebijakan VOC membayar tunai penguasa Maluku sebagai kompensasi sekaligus meraih dukungan mereka untuk memusnahkan rempah-rempah justru memperkuat para penguasa itu. Di masa lalu, para penguasa itu memiliki kebutuhan lebih besar untuk berunding dengan, dan mengakui sumber-sumber kekayaan dan dukungan yang otonom di tangan, para penguasa bawahan. Sekarang, dukungan militer dan finansial VOC yang ditujukan hanya kepada raja-raja memberi mereka kemandirian lebih besar atas bawahan-bawahan mereka. Sultan Mandar Syah dari Ternate (m. 1648–75) adalah pemimpin yang tidak populer dan dipandang sebagai orang berkarakter buruk, tapi mampu bertahan di singgasana berkat bantuan VOC. Untuk mengakui kenyataan ini, ia menamakan putra mahkotanya 'Sultan Amsterdam' (m. 1675–90); putranya yang lain ia namakan 'Rotterdam'. Hasil dari pendekatan ini untuk VOC bermacam-macam. VOC memiliki negara-negara lokal yang lebih tersentralisir untuk dihadapi dan kebijakan pemusnahan dapat dicapai dengan lebih efektif, namun pemusnahan itu tidak pernah benar-benar berhasil. Rakyat setempat masih menemukan sarana untuk menanam rempah-rempah di daerah-daerah yang jauh yang tidak diketahui VOC. Terkadang opsir-opsir VOC melaporkan bahwa mereka telah memusnahkan pohon-pohon rempah di tempat-tempat yang sebenarnya mereka lewatkan, karena tugas pemusnahan itu terlalu sulit atau terlalu berbahaya. 'Penyelundupan' dalam skala kecil untuk menentang monopoli VOC terus berlanjut.

Namun demikian, seharusnya orang tidak melihat sejarah Maluku pada periode ini hanya sesederhana soal siapa yang bersekutu atau tidak dengan orang Eropa. Persaingan lokal berlangsung lebih lama. Dukungan VOC pada kristenisasi menyakitkan hati orang-orang Ternate dan menimbulkan permusuhan antara VOC dan Ternate pada tahun 1680. Namun, tradisi persaingan antara Ternate dan Tidore yang sudah berlangsung lama terbukti lebih kuat daripada identitas agama atau etnik, karena Sultan Saifuddin dari Tidore mendukung VOC melawan Ternate. Persekutuan ini terbukti manjur dan Sultan Amsterdam terpaksa menyerah pada VOC di tahun 1681. Ia dimaafkan dan didudukkan

kembali di singgasana sebagai boneka VOC, tapi para pengikut setianya dihukum mati.

Secara umum, keterlibatan Tidore dengan orang-orang Eropa tidak sebanyak Ternate, tapi pengaruh VOC terhadap persoalan-persoalan Tidore makin besar di akhir abad XVII dan awal abad XVIII. Pada tahun 1720-an, Tidore mengalami krisis berkepanjangan. Dari tahun 1716 sampai 1728, para bawahan Tidore di sebelah tenggara Halmahera dan rakyat Papua dari Kepulauan Raja Ampat memberontak terhadap kekuasaan Sultan Hasanuddin Kaicili Gasea (m. 1708–28). Krisis politik ini diperparah oleh bencana kekeringan dan wabah cacar. VOC mendukung kewenangan Sultan dan mengirim tentara untuk membantunya. Meski saat itu sedang memasuki periode penurunan yang menjadi ciri akhir abad XVIII, VOC masih memainkan peran menentukan dalam politik di Maluku.

Pada akhir abad XVIII, ancaman interferensi terhadap Belanda oleh kekuatan Eropa lainnya muncul kembali di Indonesia bagian timur dalam bentuk East India Company milik Inggris dan para 'pedagang swasta' Inggris lainnya. Ditemukannya rute pelayaran superior menuju Cina—via Selat Dampier atau Selat Pitt, melintasi wilayah Kepala Burung yang sekarang dikenal dengan sebutan Papua—oleh Inggris mengakibatkan meningkatnya pelayaran Inggris di wilayah tersebut dari tahun 1760-an, dan bersamaan dengan itu datanglah ancaman gangguan politik. Pada periode yang sama, pasukan Ilanun dari Mindanao di bagian selatan Filipina menyerang seluruh Maluku. VOC mencurigai Tidore ikut terlibat. Pada tahun 1779, VOC menurunkan Sultan Tidore dan tidak menunjuk pengganti sampai tahun 1781. Di tengah-tengah situasi ini, Kaicili Nuku (w. 1805), seorang anggota terhormat dari Istana Tidore yang dianggap sebagai figur mesianis, bangkit memberontak. Ia mendapat dukungan dari Halmahera tenggara dan orang-orang Papua dari Pulau Raja Ampat. Banyak orang Tidore bergabung dan terbetik kabar bahwa ia didukung Inggris. Pada tahun 1781, ia mengumumkan menyandang gelar bangsawan 'Sri Maha Tuan Sultan Amir Muhammad Saifuddin Syah'. VOC melancarkan ekspedisi yang berhasil mengalahkannya namun tidak mampu menangkapnya. Kampanye Belanda pada tahun 1783 merupakan bencana bagi orang Eropa: komandan Belanda dan orang-orangnya terbunuh dan sisa armada lainnya dibawa sebagai hadiah untuk Nuku.

Pada Oktober 1783, Sultan Tidore mengakui kekuasaan superior Nuku. Ia menyerang pos-pos VOC di Tidore dan seluruh orang Eropa di sana dibunuh. Hal ini mempercepat datangnya respon dalam bentuk persaingan berkelanjutan Ternate-Tidore. Ternate bergabung dengan VOC dalam sebuah ekspedisi menentang Tidore pada November 1783 yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan. Di bulan Desember, VOC memaksakan perjanjian pada Tidore dan mengembalikan pangeran yang pernah diasingkan ke Srilangka, Sultan Hairul Alam Kamaluddin Kaicili Asgar, untuk memerintah sebagai bonekanya. Tapi penguasa baru ini berada di bawah pengawasan VOC. VOC juga mempertahankan kekuatan militernya di sana, karena takut pada serangan Ilanun. Jadi, Nuku tetap mendominasi perbatasan bagian timur wilayah itu, di tengah-tengah laporan bahwa bantuan Inggris akan segera tiba.

Seperti yang akan kita lihat di bab 11, pada tahun 1795, Raja William V dari Belanda, waktu melarikan diri dari tentara Napoleon, memerintahkan para gubernur Belanda di wilayah-wilayah pendudukannya untuk menyerahkan wilayah-wilayah itu kepada Inggris. Atas dasar otoritas ini maka Inggris mengambil Ambon dan Banda pada tahun 1796. Nuku melihat peluang untuk pindah. Ia mengambil Jailolo dan menempatkan seorang sekutunya sebagai sultan. Setahun kemudian ia mengambil Bacan dengan bantuan Inggris dan menduduki Tidore. Nuku dan Inggris kemudian beberapa kali berusaha menyerang Ternate sebelum akhirnya berhasil mengalahkan Belanda pada tahun 1801. Nuku, kini berusia 66 tahun, akhirnya diakui sebagai Sultan Tidore oleh kekuatan Eropa yang dominan. Ia berusaha menyediakan rempah-rempah untuk Inggris dengan imbalan 6.000 dolar Spanyol setiap tahun. Namun, masa pendudukan Inggris di Maluku hanya sementara. Sebagai konsekuensi dari Perdamaian Amiens tahun 1802, Inggris mengembalikan Maluku kepada Belanda pada tahun 1803. Permusuhan antara Nuku dan Belanda terjadi lagi dan berlanjut sampai Nuku wafat pada tahun 1805.

Pada akhir abad XVII, musuh utama yang menentang hegemoni militer dan perdagangan VOC di timur adalah Kesultanan Gowa di Sulawesi Selatan. Kesultanan ini memiliki kekuatan militer yang besar yang harus diperhatikan VOC dengan lebih serius daripada musuh-musuhnya di Maluku Selatan, yang sebenarnya

jadi makin sulit dikalahkan karena dukungan dari pihak Makasar. Gowa dianugerahi dengan serangkaian pemimpin yang cakap. Gowa memiliki sebuah sistem wewenang ganda yang timbul akibat aliansi politik antara Kesultanan Gowa dan Tallo pada pertengahan abad XVI. Sultan-sultan berasal dari garis keturunan Gowa, sementara perdana menterinya berasal dari garis Tallo. Yang paling menonjol di antara para pemimpin terkemuka ini adalah Perdana Menteri Karaeng Pattinngalloang (m. 1639–54), yang memiliki perpustakaan berisi karya-karya dalam bahasa Spanyol dan Portugis dan konon fasih berbicara dalam kedua bahasa itu. Ia juga mampu membaca karya berbahasa Latin, banyak mengetahui soal teologi Katolik, dan ia meminta kepada orang-orang Eropa yang ia temui untuk memberinya terbitan-terbitan Barat dan peralatan ilmiah. Pada pertengahan abad XVII, Gowa masih menjadi pusat utama dari apa yang dianggap pihak Belanda sebagai perdagangan "liar" rempah-rempah. Orang-orang Portugis aktif di sana khususnya sejak mereka kehilangan Malaka pada tahun 1641. Namun, telah terjadi peristiwa-peristiwa di Sulawesi Selatan sendiri yang memungkinkan Gowa ditaklukkan. Seperti yang selalu terjadi dalam berbagai peperangan VOC, bila yang menjadi sasaran adalah sebuah negara utama, maka VOC baru dapat menang jika menjalin aliansi dengan kelompok yang cukup berpengaruh di negara itu. Dalam kasus Gowa, pihak Belanda menjalin persekutuan dengan seorang pangeran Bugis bernama La Tenritatta to Unru' (1634–96), yang lebih dikenal dengan nama Arung Palakka, salah seorang prajurit Indonesia paling terkenal di abad XVII.

Kekuasaan Gowa atas negara-negara Sulawesi Selatan lain memang masih menyisakan otonomi yang luas untuk mereka; namun, tetap menimbulkan rasa benci. Telah terjadi banyak pertempuran antara Gowa dan negara bawahan Bugis, Bone. Pada tahun 1660, Arung Palakka adalah satu di antara sekitar 10.000 orang Bugis dari Bone yang memberontak, tapi berhasil ditumpas pihak Makasar. Lalu, dia bersama beberapa orang lainnya mencari perlindungan di Pulau Butung. Pada tahun 1663, VOC mengabulkan permohonan mereka untuk tinggal di Batavia. Di sana mereka menjadi serdadu VOC dan membuat pihak Belanda terkesan pada keterampilan perang mereka. Arung Palakka dan prajurit-prajurit Bugisnya kini menjadi satu bagian yang penting dari rencana VOC untuk menaklukkan Gowa.

Konflik-konflik antara VOC dan Gowa berlanjut hampir tak terputus sejak tahun 1615. Sebuah armada VOC yang terdiri atas 31 kapal menyerang Gowa pada tahun 1660, menghancurkan kapal-kapal Portugis yang ada di pelabuhan, dan memaksa Sultan Hasanuddin Tumenanga ri Balla'pangkana (m. 1653–69) menerima kesepakatan damai Agustus–Desember 1660. Tapi, kesepakatan ini tidak berhasil mengakhiri permusuhan. Fakta bahwa Arung Palakka dan para pengikutnya mendapat perlindungan dari VOC bahkan makin meningkatkan ketegangan. Pada tahun 1665, sebuah kapal VOC terdampar dan dirampok; ketika seorang pejabat VOC melakukan pemeriksaan terhadap rongsokan kapal nahas itu dia berikut anak buahnya diserang dan dibunuh. Setelah usaha terakhir untuk berunding gagal, maka pada tahun 1666 Gubernur Jenderal Maetsuycker dan Dewan Hindia akhirnya mengambil keputusan untuk menghadapi Gowa. Dihimpunlah suatu pasukan ekspedisi yang terdiri atas 21 kapal yang mengangkut 600 orang tentara berkebangsaan Eropa, serdadu Ambon, dan Arung Palakka beserta pasukan Bugisnya. Panglima armada tersebut adalah Cornelis Speelman, yang kemudian juga menjadi Gubernur Jenderal. VOC berharap orang-orang Bugis di Sulawesi Selatan akan mendukung Arung Palakka dan membantu menghancurkan negara bagian Makasar, Gowa.

Desember 1666, armada VOC itu tiba di Makasar. Seperti yang diharapkan pihak Belanda, kembalinya Arung Palakka ke kampung halamannya setelah menjalani masa pengasingan selama enam tahun telah mendorong rakyat Bugis di Bone dan Soppeng untuk bangkit melakukan pemberontakan melawan kekuasaan Makasar. Perang melawan Gowa ini meliputi pertempuran sengit di darat maupun di lautan yang memakan waktu hampir satu tahun lamanya. Speelman berhasil menghancurkan armada Makasar di dekat Butung, sementara Arung Palakka memimpin serangan melalui daratan yang sangat sulit. Akhirnya VOC dan sekutu-sekutu Bugisnya keluar sebagai pemenang, dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bungaya (18 November 1667). Namun, perjanjian ini pun pada awalnya terbukti tak berarti. Hasanuddin mengobarkan lagi pertempuran, sehingga perlu dilakukan sebuah serangan besar-besaran yang kedua terhadapnya sejak bulan April 1668 sampai Juni 1669. Kali ini Sultan Makasar dan kaum bangsawan kalah telak.

Kini, Perjanjian Bungaya benar-benar dilaksanakan, sehingga menimbulkan perubahan besar terhadap politik Sulawesi Selatan. Bone dan negara-negara Bugis lainnya terbebas dari belenggu kekuasaan Gowa. Benteng pihak Makasar di Ujungpandang diserahkan kepada VOC, dan Speelman memberinya nama baru yang sesuai dengan nama tempat kelahirannya, 'Rotterdam'. Kini kekuasaan Gowa runtuh, dan Bone muncul menggantikan kedudukannya sebagai negara yang paling kuat di Sulawesi Selatan. Hak kekuasaan Makasar atas daerah-daerah di sekitarnya—Minahasa, Butung, dan Sumbawa—terlepas, dan pedagang-pedagang Eropa selain VOC diusir. VOC sudah membangun sebuah benteng di Menado (ujung timur laut Sulawesi) pada tahun 1658 untuk menanggulangi pengaruh Spanyol dan Ternate di sana. Setelah tahun 1677, VOC juga menancapkan kekuasaannya di Gorontalo, Limboto, dan negara-negara kecil Minahasa lainnya, serta Pulau Talaud dan Sangihe.

Arung Palakka kemudian menjadi orang terkuat di Sulawesi Selatan sampai ia wafat pada tahun 1696. Dia diberi penghargaan khusus oleh sekutunya, VOC, semula sebagai panglima tertinggi Bone. Baru pada tahun 1672 dia secara resmi menjadi raja (*arumpone,* yaitu *arung* Bone). Dia adalah orang yang memiliki keberanian, keuletan, dan ambisi luar biasa yang membuatnya meraih posisi yang belum pernah dicapai penguasa sebelumnya. Dia mengabaikan sistem pemerintahan konsultatif yang sudah berlaku sebelumnya, dan memerintah tanpa menghiraukan nasihat adat dari dewan yang beranggotakan para bangsawan. Sebagai gantinya, dia mengandalkan keterampilan perang para pengungsi yang telah menyertainya selama masa pembuangannya. Dia menunjuk orang-orang yang akan menduduki tahta negara-negara taklukannya, termasuk Gowa, berdasarkan pilihannya sendiri. Meski pihak Belanda sendiri terkadang merasakan bahwa Arung Palakka merupakan penguasa yang menyulitkan, nilainya sebagai sekutu militer dan hubungan pribadinya dengan Speelman selalu dapat mengalahkan keberatan-keberatan mereka. Maka, suatu bentuk pemerintahan yang lebih otoriter daripada yang sudah dikenal sebelumnya menjadi mungkin, akibat peristiwa-peristiwa yang menyertai campur tangan VOC di Sulawesi Selatan. Tapi, situasi ini tidak bertahan lama setelah meninggalnya Arung Palakka, karena semua itu tergantung sepenuhnya pada posisi pribadinya yang khas.

Gerakan Arung Palakka tidak berhenti dengan tercapainya kemenangan atas Gowa. Dia melancarkan serangkaian serangan terhadap negara-negara yang menentangnya, sehingga menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat dan mengakibatkan rusaknya tanah di Sulawesi Selatan. Dia juga membawa pasukan ke Jawa guna membantu VOC selama perang Trunajaya (lihat bab 8). Akibat peperangan yang menimbulkan banyak kerusakan dan pemerintahan Arung Palakka yang otoriter, maka sangat banyak orang Makasar dan Bugis yang melarikan diri dari Sulawesi Selatan selama masa kekuasaannya. Mereka lari menuju kapal-kapal mereka bagaikan perompak-perompak Viking yang sedang mencari kehormatan, kekayaan, dan tempat tinggal baru. Mereka melibatkan diri dalam peristiwa-peristiwa di Lombok, Sumbawa, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaysa, bahkan di Siam. Sampai abad XVIII para prajurit ganas ini menjadi momok di Nusantara.

Di akhir abad XVII, VOC telah berhasil mengonsolidasikan kedudukannya di Indonesia Timur. Pihak Belanda masih tetap menghadapi intrik-intrik dan perlawanan, tapi tak ada lagi kekuatan besar di Indonesia yang menentang mereka. Ternate, Tidore, dan Gowa sudah bukan lagi merupakan kekuatan-kekuatan militer yang besar. Tanaman rempah-rempah yang tidak dapat diawasi VOC ditebangi; tak ada lagi penduduk yang tinggal di Hoamoal; sejumlah besar orang Bugis dan Makasar meninggalkan kampung halaman mereka; jumlah korban tewas di antara orang-orang Eropa, sekutu-sekutu, dan lawan-lawan mereka tidak diketahui. Semua ini terjadi semata-mata karena tujuan VOC memonopoli rempah-rempah Maluku. Ironisnya, justru ketika penguasaan atas rempah-rempah itu menjadi semakin pasti, makin lama rempah-rempah makin kurang berarti bagi keuntungan VOC. Pertama, memang tidak mudah menggantungkan keuntungan pada rempah-rempah karena biasanya pihak Belanda mendapat kesulitan dalam meramalkan penawaran, permintaan, dan harga secara tepat. Oleh karena itu, sering sekali terjadi perubahan-perubahan besar dalam kebijakan ketika pohon ditanam, kemudian ditebangi, sesudah itu ditanam lagi dalam usaha mendapatkan jumlah yang tepat. Kedua, arti penting rempah-rempah relatif berkurang dalam perdagangan VOC. Lada menjadi unsur yang lebih besar pada abad XVII; pada tahun 1700 tekstil merupakan barang

dagangan yang paling penting; kopi dan teh menjadi barang-barang perdagangan yang penting pada abad XVIII.

Dalam kenyataannya peperangan yang terjadi di Indonesia Timur bukan semata-mata dilancarkan demi kepentingan perdagangan. VOC sedang dalam perjalanan menjadi kekuasaan imperial. Baik keuntungan maupun kerugian sesungguhnya yang tercakup dalam proses ini tidak jelas, akibat sistem akuntansi VOC, dan karena hal itu hanya merupakan kepentingan nomor dua bagi para pendiri imperium dan para petualang yang menetapkan kebijakan VOC di Indonesia, yang tampaknya memandang keuntungan pribadi sebagai hal yang lebih penting.

VOC pada abad XVII mempunyai dua pusat perhatian. Pertama, Maluku, tempat kekuasaannya kini menjadi relatif kokoh. Kedua, Jawa, di mana terjadi peristiwa-peristiwa yang akan membuka jalan bagi politik intervensi pihak Belanda. Inilah yang menjadi pokok pembahasan bab-bab selanjutnya.

Apa yang terjadi sesudah Belanda berhasil menegakkan kekuasaannya di Indonesia Timur sampai abad XIX belum diteliti secara memuaskan, kecuali untuk Maluku (yang telah dibicarakan di atas), Bali (sampai tahap tertentu), Sulawesi Selatan dan kawasan di sekitar Nusa Tenggara. VOC sudah aktif di Nusa Tenggara sejak abad XVII tetapi masih pada tingkat yang kurang begitu luas. Pulau Timor masih tetap menjadi sumber kayu cendana, tetapi Flores, Sumba, Sawu, dan Roti hanya memiliki arti perdagangan yang kecil. Orang-orang Portugis membangun sebuah benteng di Kupang (Timor) tetapi kemudian meninggalkannya. VOC tiba di Timor pada tahun 1613 dan menduduki Kupang pada tahun 1653. Tetapi, dalam usahanya menguasai kayu cendana, VOC menghadapi saingan berat dari orang-orang 'Portugis hitam' atau masyarakat 'Topas', suatu kelompok penduduk Kristen berdarah campuran yang berbahasa Portugis dan berpangkalan di Flores. Antara orang-orang Topas dan Belanda terjadi semacam kebuntuan sampai tahun 1749, ketika serangan Topas terhadap Kupang dapat digagalkan secara meyakinkan. Pada saat itu Portugis sendiri mengundurkan diri ke Timor-Timur, sehingga sejumlah perwira VOC yang berada di Kupang dan sekutu-sekutu lokal mereka dapat bertindak leluasa sebagai kekuatan utama di Timor Barat. Tapi, pada akhir abad itu hanya sedikit kayu cendana yang bisa diperoleh dan VOC sedang mengalami kemunduran seperti yang dibahas dalam bab 10.

Perkembangan paling mengejutkan yang diketahui sebagai akibat campur tangan pihak Belanda di Nusa Tenggara terjadi di Roti, yang hanya memiliki arti perdagangan yang kecil bagi semua pihak. Di sana pihak Belanda menjalin persekutuan dengan faksi-faksi lokal. Pada tahun 1681, sebuah serangan berdarah VOC memperkokoh kekuasaan sekutu-sekutu lokalnya, dan Roti menjadi basis perbekalan bagi Kupang serta sumber budak. Meski demikian, tidak ada satu pun benteng VOC yang kokoh di Roti.

Pada abad XVIII orang-orang Roti mulai mengambil keuntungan dari keadaan yang timbul karena kehadiran VOC. Berangsur-angsur mereka menganut agama Kristen yang memberikan status sosial yang lebih tinggi, kebebasan dari perbudakan, dan kemungkinan memperoleh dukungan dari VOC. Ketika sebuah perkara hukum yang berlarut-larut pada tahun 1724–9 menetapkan preseden bahwa seorang penduduk Roti yang memeluk agama Kristen berada di luar kekuasaan penguasanya yang menyembah berhala, maka hal itu mempercepat proses pengkristenan penduduk Roti. Pada tahun 1729 penguasa Roti yang pertama sudah memeluk agama Kristen. Kemudian mulai terjadilah suatu perkembangan yang luar biasa. Para penguasa Roti yang beragama Kristen meminta kepada VOC supaya memberi mereka guru-guru sekolah. Pada tahun 1765 penduduk lokal Roti sendiri sudah sanggup mengambil alih pengelolaan sekolah-sekolah berbahasa Melayu itu. Rakyat Roti menciptakan suatu bentuk Kekristenan lokal yang ditunjang sistem sekolah mereka sendiri, yang keduanya dapat mereka pertahankan dari naluri-naluri reformasi kaum misionaris Eropa abad XIX. Dengan demikian penduduk Roti menjadi elite terpelajar di wilayah ini, yang nantinya memberi mereka suatu peranan regional yang menonjol pada abad XX.

Peristiwa-peristiwa di Sulawesi Selatan pada abad XVIII didominasi oleh terus berlanjutnya persaingan militer antara negara-negara Bugis dan Makasar. VOC tidak dapat berbuat lebih banyak selain mempertahankan posisinya sendiri di Makasar dan posisi sekutunya, Bone. Tokoh yang paling dramatis pada masa itu ialah Arung Singkang (La Ma'dukelleng, 1700–65), seorang keturunan keluarga bangsawan Bugis dari Wajo. Dia memulai kariernya sebagai seorang perompak. Pada tahun 1726, dia menaklukkan Pasir dan kemudian Kutai di Kalimantan Timur, keduanya merupakan daerah pemukiman suku Bugis. Pada tahun

1733, panglima perangnya gagal merebut Banjarmasin. Sesudah itu, Arung Singkang kembali ke Sulawesi pada tahun 1735 dan mulai berusaha merebut kekuasaan atas negara-negara Bugis dan Makasar dari Bone.

Arung Singkang bukanlah seorang tamu yang diterima dengan senang hati di Sulawesi, sehingga tidak lama setelah kedatangannya mulai berkobarlah peperangan yang berlangsung terus-menerus sampai saat meninggalnya. Dia berhasil menguasai Wajo pada tahun 1737 dan membentuk sebuah persekutuan yang rentan di antara beberapa negara untuk melawan Bone dan VOC. Pada awal tahun 1739 dia dan sekutu-sekutunya bergerak melawan Makasar. Meskipun istana Bone terbakar, tetapi VOC berhasil menahan serangkaian serangan, dan bahkan kemudian melancarkan serangan balik yang berhasil memukul mundur Arung Singkang ke Wajo.

Kemudian VOC mengirim sebuah ekspedisi untuk menghukum Wajo pada akhir 1740. Tiga bulan kemudian, saat tentaranya kembali ke Makasar setelah mengalami pertempuran yang berat, cuaca buruk, dan berbagai wabah penyakit, Wajo telah mendapat hukuman tetapi tidak hancur. Arung Singkang segera menunjukkan kepada sekutu-sekutunya –yang tidak ikut membantu dia melawan VOC—bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Kekuasaan Wajo ditegakkan kembali di wilayah itu. Tetapi, Arung Singkang harus menghadapi saingan-saingan yang berusaha merebut kekuasaan di Wajo, yang konsekuensinya terlibat dalam sebuah perang saudara yang tampaknya berlangsung sejak 1747 sampai 1751. Pada tahun 1754 rakyat Wajo merasa telah cukup banyak terlibat dalam peperangan dan tidak bersedia membantu Arung Singkang dalam peperangan melawan Sidenreng. Pada tahun itu juga dia meletakkan jabatannya sebagai penguasa Wajo, tetapi tetap melanjutkan perang pribadinya melawan Bone sampai ia wafat pada tahun 1765. Pihak Belanda—yang bersekutu dengan Bone—tetap menguasai Makasar, tetapi tidak menjalankan pengaruh signifikan atas daerah Wajo sampai di akhir abad XIX.

Bali di abad XVII dan XVIII bebas dari campur tangan VOC, namun tetap terpengaruh atas kehadiran VOC. Periode ini tidak terdokumentasi dengan baik dan, sejauh ini, hanya pada Kerajaan Mengwilah pernah dilakukan penelitian historis secara serius. Namun demikian, pola umum berbagai peristiwa dan penyebabnya

menjadi lebih jelas. Kira-kira sebelum 1650, Bali masih merupakan wilayah jajahan Raja Gelgel. Bali tidak terlalu terlibat dalam perdagangan laut dibandingkan negara-negara lain di Indonesia, tapi mengekspor sejumlah besar kapas, beras, babi, ternak, dan unggas. Tapi kemudian, otoritas Gelgel runtuh dan Bali menjadi sekumpulan kerajaan yang guncang dan saling berperang. Pada saat yang sama, kehadiran VOC di Batavia setelah 1619 menciptakan pasar baru yang besar untuk perbudakan. "Ekspor manusia" ini memperkaya para pesaing raja-raja Bali yang menjual tahanan-tahanan, para debitur, dan terutama, tawanan perang mereka. Maka, perdagangan budak mempermudah disintegrasi politik Bali dengan menyediakan sumber daya ekonomi untuk perang dan mengonsumsi tawanan perangnya. Namun, harus diingat bahwa pondasi ekonomi semua kerajaan Bali masih bertumpu terutama pada sistem cocok tanam di sawah. Para keluarga bangsawan turut serta andil dalam pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi, dan aliansi antarmereka seringkali mengalir searah dengan air irigasi.

Pada tahun 1660-an, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti (w. ± 1704) menetapkan Buleleng di Bali Utara sebagai kerajaan utama di pulau itu. Pada tahun 1697, ia menaklukkan Blambangan di Ujung Timur Jawa, mungkin bersekutu dengan petualang Bali, Surapati (lihat bab 9). Sementara itu keturunan Gelgel melanjutkan memerintah Kerajaan Klungkung, yang para bangsawannya bergelar Dewa Agung dan diakui sebagai keturunan bangsawan senior oleh para raja Bali lainnya. Di bagian timur Bali, Karangasem merambah negara-negara seberang sejak 1680-an, memerangi tentara Sumbawa dan Sulawesi demi menguasai Lombok. Tidak sampai tahun 1740, kekuasaan Karangasem atas Lombok telah aman. Di Lombok bagian barat, Karangasem membangun enam kerajaan Bali yang menjadi penyokong utama budaya Jawa-Bali. Pada perempat terakhir abad XVIII, Karangasem mengalahkan Buleleng sepenuhnya dan menggantikannya sebagai kerajaan utama di Bali Utara.

Mengwi muncul sebagai kekuatan utama di Bali Selatan ± 1700 di bawah pimpinan rajanya, Gusti Agung Anom (w. 1722). Ia mengambil keuntungan dari perselisihan suksesi di Buleleng, setelah kematian Gusti Panji Sakti, untuk merebut Blambangan ke sisinya dan untuk mengadu domba para pesaing Buleleng,

lalu ia muncul sebagai bangsawan yang paling berkuasa. Namun, otoritasnya terus berada dalam ancaman. Ia harus berulang kali melakukan penggerebakan terhadap Ujung Timur untuk mempertahankan kekuasaannya atas Blambangan. Bangsawan Bali lokal juga mengujinya. Khususnya, dari 1713 sampai 1717, Mengwi berperang melawan Sukawati (Gianyar), yang membuat Mengwi berjaya. Saat wafatnya, Gusti Agung Anom adalah penguasa dari sebagian besar Bali tengah dan selatan, status yang tercermin dalam gelar kebangsawanan barunya yang ia dapatkan pada tahun 1717, Cokorda Gusti Agung.

Sebagaimana lazimnya kerajaan-kerajaan lain, ketika putra Gusti Agung Anom, Gusti Agung Made Alengkajeng (w. ± 1740), naik tahta, ia berulang kali menghadapi ancaman terhadap kekuasaannya, yang dijawabnya dengan perang. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Blambangan, berusaha mempertahankan kekuasaan Mengwi di sana. Pada tahun 1733, ia dan sekutunya memenangkan pertarungan besar di Buleleng melawan Dewa Anom dari Sukawati, di mana setidaknya 12.000 orang mungkin terlibat. Intrik-intrik di dalam keluarga Kerajaan Mengwi sendiri, bagaimana pun, mengancam kekuasaan Gusti Agung Made Alengkajeng. Ia harus kembali dari salah satu ekspedisinya ke Blambangan pada tahun 1739 untuk meredakan kudeta yang dilakukan seorang saudaranya. Ketika ia wafat pada tahun ± 1740, konflik-konflik lain berlanjut. Pada tahun 1770-an, Gusti Agung Made Munggu (w. ± 1770–80; juga dikenal sebagai Cokorda Munggu) dari Mengwi lagi-lagi menjadi seorang di antara raja-raja Bali yang paling berkuasa. Namun, ia terpaksa menyerahkan kendali atas Blambangan kepada VOC (lihat bab 10) sementara sebagian Buleleng dicaplok Karangasem. Hilangnya Blambangan terutama signifikan dari segi budaya, karena hal itu memutus kedudukan raja-raja Bali di Jawa, tempat yang mereka yakini sebagai asal keluarga-keluarga mereka setelah kekuasaan Islam menggantikan Majapahit. Selama berkali-kali kampanye perang di Blambangan, terjadi tiga ekspedisi Bali (1714, 1726, 1729–30) berusaha menuju situs tua Majapahit di Jawa Timur. Pada kesempatan ketiga, Gusti Agung Made Alengkajeng dari Mengwi didampingi oleh Dewa Agung dari Klungkung, Raja Tabanan, dan pasukan pengiring sekitar 4000 orang. Namun, semua ziarah ini dibatalkan karena ancaman atau kenyataan pecahnya perang di negeri mereka.

Di akhir abad XVIII, tak ada kemungkinan bagi satu Raja Bali pun untuk memaksakan kembali kewenangan terpusat seperti yang dilakukan oleh Gelgel pada abad XVI dan awal abad XVII. Bali masih akan menghadapi konflik-konflik sengit yang akhirnya mencapai puncak pada penaklukan berdarah oleh Belanda, yang dituturkan di bab 13.[]

Bab 7 ....

Indonesia Barat, ± 1640–1800

DI NUSANTARA bagian barat, dari abad XVII sampai akhir abad XVIII, orang dapat mengamati perkembangan umum—atau mungkin lebih baik, disintegrasi—dari jenis-jenis persaingan kekuasaan yang sudah lazim di wilayah ini sampai pada kekacauan yang lebih umum dan tidak koheren. Hal ini merupakan akibat integrasi Indonesia bagian barat yang kian menyeluruh ke dalam ekonomi politik yang mengglobal. Proses itu ditandai oleh munculnya berbagai produk dan pasar baru, teknologi baru, campur tangan pemain-pemain baru—baik dari daerah-daerah di Nusantara maupun dari daerah-daerah yang lebih jauh. Proses ini menekan struktur negara yang telah ada yang tidak siap bertahan.

Seperti tertulis di bab 2, negara-negara di Nusantara ini memiliki hanya sedikit sarana yang terlembaga untuk mengendalikan teritori mereka. Ketika otoritas monarki pusat tertantang, raja (atau, kadang-kadang, ratu) tidak punya banyak cara untuk menuntut atau menerapkan loyalitas. Ketika produk dagang yang menguntungkan dihasilkan di wilayah-wilayah yang tidak langsung berada di bawah kendali raja (seperti yang kerap terjadi pada emas, timah, lada, dan produk-produk lainnya), pertumbuhan pasar eksternal mendatangkan kekayaan untuk para penguasa lokal yang bisa saja memilih menentang otoritas pusat. Jadi, pertumbuhan perdagangan sering kali menjadi penyebab disintegrasi negara.

Pada pertengahan abad XVII, negara-negara utama Nusantara bagian barat adalah Johor—negara Malaysia pengganti Malaka—yang sekarang menjadi Malaysia bagian selatan, Palembang dan Jambi di Sumatera Selatan, dan basis VOC di Batavia di Jawa bagian barat. Pada tahun 1641, VOC merebut Malaka dari Portugis dan, dengan demikian, mengusir pesaing penting mereka

dari Eropa sekaligus memperoleh basis strategis di sisi timur Selat Malaka. Seperti yang ditulis di bab 4, Aceh pada periode ini bukanlah ancaman di luar wilayah negaranya.

Palembang dan Jambi adalah sama-sama eksportir lada. Pasar Cina untuk lada tampaknya tak juga terpenuhi dan sejak abad XVII permintaan dari Eropa juga bertambah dengan pesat. Ketika penanaman pohon lada meluas sejak tahun 1640 dan setelahnya, permintaan atas tenaga kerja menyebabkan pertumbuhan pasar perbudakan di Nusantara bagian barat. Mayoritas budak itu dipasok oleh para pedagang Bugis dan Makasar, Sulawesi Selatan. Tapi pertumbuhan produksi ini juga menyebabkan kelebihan produksi lada di Sumatera dan jatuhnya harga di Eropa, sehingga pada abad XVII dan XVIII pamor lada dari segi ekonomi mengalami penurunan.

Pada tahun 1642, traktat VOC–Palembang secara teoretis memberi hak monopoli kepada VOC untuk mengekspor lada Palembang. Tapi ini hanyalah satu di antara serangkaian traktat yang nilainya tidak lebih tinggi daripada kertas yang digunakan untuk menulis traktat itu. Kebijakan VOC di wilayah ini, seperti di tempat-tempat lainnya, adalah menawarkan perlindungan politik dan militer kepada para raja lokal seperti Sultan Palembang, dengan imbalan akses menguntungkan untuk produk-produk lokal. Vos menunjukkan bahwa ini bukan soal VOC mencampur-adukkan tujuan komersialnya dengan ambisi teritorialnya. Melainkan, VOC tidak memiliki produk yang bisa ditawarkan demi menghasilkan kesepakatan dagang yang saling menguntungkan. Karena itu, mereka menawarkan apa yang mereka punya—kekuatan militer—untuk ditukar dengan apa yang mereka inginkan—lada dan produk-produk lain. Jadi, itu bukan soal mencampur-adukkan perdagangan dengan politik, melainkan pertukaran perdagangan Indonesia dengan imbalan politik VOC. Namun, keadaan lokal-lah yang menentukan apakah pendekatan ini dapat berhasil. Sering kali pendekatan ini tidak berhasil dan biayanya merupakan faktor penting dalam kebangkrutan VOC pada akhirnya, di akhir abad XVIII.

Selain membuat traktat dengan VOC pada tahun 1642, pada tahun-tahun berikutnya Sultan Palembang juga menandatangani perjanjian lain dengan Portugis yang mengizinkan mereka terus berdagang di sana. Namun demikian, pamor perdagangan Portugis

menurun. Para pedagang Cina, yang penting bagi jaringan perdagangan Nusantara dan yang tidak berminat membuat traktat untuk menegaskan posisi mereka, terus memperdagangkan lada Palembang bersama produk-produk lain. Demikian pula di Jambi, orang-orang Cina berperan sebagai makelar bagi para pedagang VOC dan Inggris dalam memperoleh lada lokal.

Pada tahun 1655, VOC berusaha menerapkan hak-hak traktat 1642-nya di Palembang. VOC menghentikan kapal-kapal para pedagang lain dan menyita kargo-kargo lada mereka. Ketika VOC mencoba melanjutkan tindakan itu dengan negosiasi, pihaknya diserang. Lebih dari 40 orang terbunuh, dan 28 prajurit Belanda yang tersisa dipaksa masuk Islam dengan cara disunat. Sebagai pembalasan, pada tahun 1658–9, VOC memblokade dan kemudian menyerang Palembang, dan berhasil merebut kota dengan paksa. Setelah itu barulah diketahui bahwa sebagian besar tahanan Belanda yang tersisa telah dibunuh. Para penyerang merampas dan membakar kota. Jambi telah membantu VOC dengan informasi. Untuk itu, mereka diberi imbalan berupa artileri dan peluang menempati singgasana Palembang.

Dalam pertentangan lokal antara Jambi dan Palembang memperebutkan kekuasaan di Sumatera Selatan, tampak Jambi seolah-olah memimpin, dengan dukungan VOC. Kedua negara tersebut selama ini telah menjadi vasal-vasal kerajaan Jawa yang bernama Mataram. Kedua pemimpin negara itu pernah melakukan kunjungan ke Istana Mataram secara pribadi pada tahun 1650-an. Tapi sekarang, keduanya berusaha memutus hubungan dengan Mataram yang, seperti akan kita lihat di bab 8, tengah berada dalam kekuasaan sang tiran Amangkurat I. Jambi khususnya merasa telah menemukan patron yang lebih baik pada VOC. Ketika penanaman lada meluas sampai ke daerah hulu, Palembang dan Jambi berselisih soal kewenangan mereka. Pada akhir abad XVII, prajurit-prajurit Makasar mulai terlibat dalam perselisihan intern tersebut, sehingga menghasilkan pola keterikatan yang bertentangan yang keras dan membingungkan.

Di Malaysia, usaha VOC untuk memonopoli timah menyebabkan banyak kesulitan dan kebingungan seperti halnya yang mereka alami di Sumatera. Pos VOC di Malaka tidak bisa makmur, sebagian besar karena VOC mengadopsi kebijakan-kebijakan dagang yang cenderung lebih membantu Batavia sebagai pelabuhan daripada Malaka. Para pedagang Cina maupun India tidak

didukung berdagang di Malaka dan malah diarahkan ke Batavia. Di ujung selatan Selat Malaka, Kerajaan Johor mengambil untung dari nilai strategisnya bagi Belanda dengan membangun negara perdagangan yang makmur yang didasarkan pada pelabuhannya (kadang kala juga ibu kota) di Riau. Pada tahun 1687 dilaporkan bahwa 500–600 kapal dagang terlihat di sana, termasuk orang-orang Siam, Cina, Aceh, Perak, Kedah, Portugis, Inggris (yang memiliki pos di Bengkulu), dan lainnya. VOC tidak mampu menghalangi Johor. Namun, pada tahun 1673, Jambi menyerang dari seberang Selat Malaka dan merampas Riau, membawa 3.500 tahanan. Pada dekade terakhir abad XVII, Johor ditimpa oleh intrik-intrik penggulingan-dinasti berdarah yang melemahkan politik dan perdagangannya. Namun, pada awal abad XVIII, Johor tak diragukan lagi merupakan kekuatan Malaysia terbesar, yang membuat VOC merasa wajib mengakomodirnya. Pada saat ini, VOC berada di ambang konflik-konflik yang baru dan mahal di Jawa yang dapat membatasi statusnya sebagai pengamat yang netral atas konflik di Selat Malaka. Berbagai usaha VOC mengendalikan produksi timah Malaysia langsung di wilayah sumbernya menemui kegagalan. Terkadang, kegagalan tersebut memakan korban, seperti di Perak pada tahun 1651 ketika penguasa lokal membunuh 27 orang Belanda di pos VOC lokal.

Di Jambi, ekspansi perdagangan lada membebani negara itu di tahun-tahun akhir abad XVII, ketika kekayaan mengalir ke tangan para pemimpin yang bukan penguasa. Tapi ini tidak begitu menjadi masalah di Palembang. Hal itu sebagian akibat faktor geografi, karena posisi Palembang yang lebih ke selatan menyebabkan Minangkabau, yang memainkan peran signifikan dalam menentang otoritas Sultan Jambi, tidak terlalu terlibat dalam produksi lada di pedalaman Palembang. Pada akhir abad XVII, Palembang tiba pada periode kemakmuran umum yang kemudian dipandang sebagai masa keemasan.

Sultan Abdul Rahman dari Palembang (m. 1662–1706) dikenang dalam tradisi lokal sebagai pemimpin ideal. Hal serupa berlaku juga pada Ratu Sinuhun, tapi dalam kasusnya tidak mungkin dengan pasti mengidentifikasi dia sebagai figur sejarah. Di Palembang, kehadiran VOC dan berbagai praktiknya di sana sering kali mengundang kebencian, khususnya ketika VOC berusaha mengendalikan impor pakaian dan melarang penjualan lada di luar wilayah yang menjadi kesepakatan monopolinya. Namun

demikian, Abdul Rahman menjaga hubungan baik dengan VOC, dan begitu pula sebaliknya. Pertumbuhan pasar lada membuka banyak peluang dagang yang melanggar monopoli teoretis VOC, yang mungkin menyebabkan VOC memperoleh, maksimal, tidak lebih dari setengah produksi Palembang. Abdul Rahman sendiri berpartisipasi dalam perdagangan "liar" ini, yang menjadi sumber utama kekayaannya. Penyebaran produksi lada sebagian besar dimungkinkan oleh dimanfaatkannya budak-budak sebagai buruh. Maka, pasar perbudakan Nusantara bagian barat terus berkembang, seiring bertambahnya kerugian daerah-daerah, terutama di bagian timur Indonesia dan Filipina selatan, yang memasok sebagian besar budak.

Pengalaman Jambi pada periode ini memperlihatkan kontras yang memberikan pelajaran. Serangan Palembang menyebabkan terbengkalainya kebun-kebun lada di daerah hulu Jambi, sehingga pendapatan Sultan menurun dan banyak pedagang Cina pergi. 'Orang laut' (kadang disebut 'pengembara laut')—mereka yang bertindak sebagai pasukan Sultan di Selat Malaka—yang hidup nomaden, sekarang cenderung mencari pendapatan dengan menjadi bajak laut. Permusuhan terbuka dengan VOC pecah pada tahun 1687 dan berakhir dengan diturunkannya penguasa Jambi oleh VOC. Hal itu diikuti periode bermasalah selama 30 tahun ketika dua bersaudara berebut kekuasaan atas Jambi, dan VOC berusaha mencari kebijakan yang mungkin memberikan keamanan sekaligus akses ke lada di sana. Banyak masyarakat lokal pergi menuju Palembang dan tempat-tempat lain. Daerah-daerah di Hulu menentang otoritas kerajaan dan semakin dipengaruhi para pendatang Minangkabau yang masuk ke daerah-daerah ini mencari sumber-sumber emas baru. Pada tahun 1712, Sultan Jambi yang dikenal dengan nama Kiai Gede (m. 1687–1719) menundukkan Hulu secara militer dengan bantuan VOC, tapi hal ini pun tetap tidak menghasilkan kesejahteraan. Johor mampu menyerang Jambi pada periode ini dan, pada tahun 1719, Hulu memberontak lagi. Setelah Kiai Gede meninggal, konflik antara para aristokrat dan perang sipil muncul. Penggantinya, Sultan Astra Ingalaga (m. 1719–25, 1727–43), adalah orang yang tidak terlalu terkenal dan pecandu opium, yang konon jarang bangun sebelum tengah hari. Pada tahun 1743, ia mewariskan tahtanya pada saudaranya. Tetap saja kekuasaan Hilir tidak dapat mengendalikan Hulu.

Dalam keadaan Jambi yang penuh masalah, sering kali para pejabat lokal VOC berpeluang menjalankan fungsi pemerintahan, yang mereka lakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga sering menyakitkan hati orang setempat dan hanya memperkaya pribadi mereka. Bagi rakyat, para penguasa lokal hanyalah boneka atau agen Kompeni yang memberatkan, dan otoritas mereka menurun sejalan dengan itu. Permusuhan terhadap VOC menjadi amat besar sehingga pada tahun 1754, garnisun milik VOC lari dari Jambi menuju Palembang karena takut jiwa mereka terancam. VOC merespon dengan balas memblokade Jambi, yang menyebabkan lahirnya kontrak baru VOC–Jambi pada tahun 1756. Tapi permusuhan berlanjut, dan sekarang dipertajam oleh datangnya para petualang Bugis. Pada tahun 1768, pos VOC diserang. Pada saat ini, VOC memutuskan menyerah. VOC mengabaikan posnya dan tidak kembali ke Jambi sampai abad XIX. Untuk beberapa dekade, Jambi dikenal sebagai sarang penyamun.

Riau, sebaliknya, adalah pelabuhan dagang yang menjanjikan. Kenyataannya, VOC membutuhkan agar Riau makmur, dan dalam hal apa pun VOC tidak punya sarana untuk mencegahnya mewujudkan hal itu, karena VOC membutuhkan sebuah negara yang dapat menegakkan kondisi dagang yang damai di ujung selatan Selat Malaka. Sejak tahun 1708, adik Sultan, Raja Muda Mahmud, menentang perdagangan VOC. Ia menekan negara-negara bawahannya untuk mengirim barang-barang mereka ke Riau. Kapal-kapal Cina dan Jawa yang menuju Malaka dipaksa singgah di Riau. Ini mirip kebijakan kuat yang dicanangkan Parameswara 300 tahun sebelumnya yang telah menjadi kunci pembangunan Malaka sendiri sebagai pelabuhan-dagang-Melayu yang besar. Pada tahun 1713, Riau awalnya menolak tawaran kontrak baru dari VOC yang akan memperbaiki hak-hak dagang istimewa VOC sampai kemudian Batavia memaksa, pada saat mana sebuah traktat baru ditandatangani dan kemudian langsung diabaikan dalam praktik. Ekspor timah dan lada Riau terus tumbuh dengan cepat. Untuk seterusnya di abad XVIII, ketika VOC memasuki ambang kemerosotan yang panjang, hanya kekuatan Indonesialah yang dapat mengancam Johor-Riau.

Pada tahun 1718, orang-orang Minangkabau dari Siak memberontak melawan Johor di bawah pimpinan Raja Kecil (w. 1746), yang mengklaim sebagai keturunan bangsawan Malaka-

Johor. Pada bulan Maret, mereka menguasai Johor. Raja Muda Mahmud terbunuh dalam aksi. Sultan Johor, Abd al-Jalil, turun tahta dan menyelamatkan diri ke Pahang, tempat pembunuh yang dikirim oleh Raja Kecil membunuhnya pada tahun 1721. Johor sekarang merupakan ajang persaingan kekuasaan antara orang-orang Minangkabau, Bugis, dan Melayu Johor. Hasilnya adalah kesepakatan pada tahun 1721 yang menetapkan kuasa bersama Melayu–Bugis atas Johor, kesepakatan yang tetap dipertahankan sampai awal abad XX.

Orang-orang Bugis merebut kembali Riau untuk Johor pada tahun 1722. Pada masa ini, para pengembara Bugis terlibat secara aktif di hampir seluruh bagian barat Nusantara dan menjadi kekuatan utama di Selat Malaka. Dengan Riau di tangan mereka, sekali lagi Selat Malaka memiliki pasukan yang mampu memberikan kondisi perdagangan yang aman dan stabil. Pada tahun 1728, Bugis meraih kemenangan besar atas Raja Kecil. Setelah itu, kekacauan, pelanggaran, dan gangguan perdagangan yang telah lazim terjadi di Selat Malaka mulai memperlihatkan kondisi yang lebih mapan.

Palembang mengalami periode perselisihan suksesi setelah kematian Sultan Abdul Rahman pada tahun 1706, yang berakhir dengan naiknya Sultan Mahmud Badaruddin (m. 1724–57). Ekonomi Palembang mulai tergantung pada produk baru. Produksi lada mereka sedang menurun pada awal Abdul Rahman berkuasa dan makin menurun di akhir masa kekuasaannya. Tapi sekarang timah telah ditemukan dan ditambang di Bangka, negara bawahan Palembang. Awalnya, para penambang kebanyakan berasal dari Bugis. Mengendalikan Bangka dan Belitung sesungguhnya adalah tujuan utama Mahmud Badaruddin. Pada tahun 1731, satu pasukan VOC membantunya memadamkan perlawanan Bugis terhadap Bangka. Setelah itu, para penambang Cina mulai banyak berdatangan. Di akhir masa pemerintahan Sultan, konon terdapat sekitar 25 hingga 30 ribu orang Cina di Bangka. Seperti halnya atas lada Palembang, atas timah Palembang pun VOC, secara teori, mendapat hak monopoli melalui traktat. Namun sekali lagi, monopoli itu sebetulnya hanya untuk tidak lebih dari separuh hasil produksi. Sisanya dijual dalam perdagangan "liar", di mana harganya jauh lebih tinggi daripada yang dibayarkan VOC. Sultan berpartisipasi dalam perdagangan ini dan menjadi kaya karenanya.

Kekayaan dan gaya pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin membuat ia meraih reputasi tinggi di Palembang. Ia berkonsultasi dengan orang-orang terkemuka dan memerintah berdasarkan konsensus, cara yang biasa dipakai oleh raja-raja Indonesia yang bijaksana. Ia beruntung memerintah di masa ketika pengaruh VOC sudah menurun, ketika keuangan VOC memburuk dan mereka makin terlibat dalam urusan dalam negeri Jawa. Bagi VOC, Palembang berbiaya tinggi, biaya yang hampir tidak bisa diimbangi oleh hasil penjualan timah. Para pegawainya di sana, seperti laiknya di tempat-tempat lain, sering kali diragukan kompetensi dan kejujurannya, dan kurang menguasai bahasa Melayu, bahasa utama di Nusantara. Hubungan dengan para elite dan masyarakat umum di Palembang sering tegang. Bahkan, sesungguhnya inilah yang menyebabkan tindak kekerasan berdarah di awal abad XIX.

Seperti dicatat di atas, pada masa Mahmud Badaruddin, orang-orang Bugis merupakan kekuatan besar di bagian barat Nusantara. Kehadiran Inggris juga meningkat, dan pada tahun-tahun selanjutnya di abad XVIII, mereka menjadi kekuatan yang lebih menakjubkan daripada Belanda di banyak tempat. Baik Bugis maupun Inggris merupakan penjual senjata lebih modern, yang didatangkan ke wilayah itu dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan konflik lokal memakan lebih banyak korban, baik nyawa maupun harta. Ini juga memperburuk perang antarkampung yang telah lama terjadi di Hulu dan yang ikut menciptakan iklim ketidakstabilan dan ketiadaan hukum di distrik bagian atas. Penemuan emas pada tahun 1730-an di wilayah penghasil lada di Lampung, yang penguasaan atasnya diperebutkan oleh Palembang dan Banten, mengundang orang-orang Bugis, Minangkabau, dan kaum petualang lain untuk menciptakan kekacauan lebih jauh di sana.

Di antara aktor-aktor baru di selat itu adalah orang-orang Arab dari Hadramaut, orang-orang yang menyandang gelar *sayyid* untuk menandakan bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad. Mereka adalah para pedagang yang cakap dengan jaringan internasional yang membentang hingga Timur Tengah dan Afrika Timur. Di beberapa tempat, seperti Siak, mereka sama berpengaruh dan berkuasanya seperti orang-orang Bugis di Johor. Perdagangan timah Palembang tentu menarik perhatian mereka. Salah satu konsekuensi dari kehadiran mereka adalah bahwa

Palembang mulai berkembang sebagai pusat pengetahuan Islam sepanjang abad XVIII.

Para penambang Cina di Bangka amat sulit dikendalikan kerajaan, sehingga Sultan Ahmad Tajuddin (m. 1757–74) menugaskan para bangsawan Palembang terkemuka untuk bertanggung jawab atas hampir semua distrik di sana. Orang-orang Cina merespon dengan berpindah ke tambang-tambang di tempat lain, khususnya di Kalimantan dan Perak. Pada 1780-an diperkirakan jumlah orang Cina di Bangka telah merosot dari 25.000–30.000 tiga tahun sebelumnya menjadi 6.000–13.000. Tentu saja produksi merosot sebagai akibatnya. Juga, sebagian besar perdagangan timah terus dilaksanakan di luar kontrol Sultan ataupun VOC, terutama melalui Riau.

Di bawah para pemimpin Bugis, Riau terus menjadi pusat perdagangan swasta, di mana VOC tidak memiliki sarana untuk mengontrol. Pada tahun 1782, Raja Haji dari Johor (w. 1784) mengetahui pecahnya perang antara Belanda dan Inggris dan menawarkan diri menjadi sekutu VOC. Tapi mereka berselisih soal pembagian barang rampasan perang dari kapal Inggris yang tertangkap sehingga mereka sendiri berperang pada tahun 1783–4. Pada Januari 1784, kapal utama VOC diledakkan dalam aksi di Riau, yang menewaskan ratusan orang. Tapi pada Mei 1784, sebuah armada pemerintah Belanda yang terdiri atas empat kapal perang, dua pergat, dan 1.400 orang, dipimpin oleh J. P. van Braam, tiba di Indonesia dengan tujuan membuat para penguasa lokal terkesan pada kekuatan Belanda, yang VOC sendiri jelas-jelas tak mampu melakukannya. Van Braam menyerang Riau bulan Juni dan Raja Haji terbunuh dalam peperangan itu.

Perdagangan budak yang meluas di bagian barat Nusantara pada akhir abad XVIII melahirkan peluang bagi kelompok pendatang baru lainnya untuk berkuasa: para pedagang budak dan perompak Ilanun dari kepulauan Sulu. Mereka menyerang posisi VOC, membajak kapal-kapal Palembang dan pada tahun 1788–9 membajak Bangka. Ketika Riau memberontak terhadap kendali VOC pada tahun 1787, satu pasukan yang terdiri atas 7.000 pejuang Ilanun mendukung pihak Riau. VOC merebut kembali Riau, tapi keberhasilan militer ini tidak sekaligus berarti diraihnya kendali atas perdagangan timah. Sumatera bagian selatan juga diserang epidemi cacar dari tahun 1750-an, yang memberi andil pada timbulnya kekacauan.

Pada tahun-tahun terakhir abad XVIII, Sumatera dan Selat Malaka secara umum sedang dalam keadaan amat bingung dan kacau. Negara-negara pesisir Malaysia yang pernah menjadi kekuatan dominan, sekarang paling sedikit terancam; dalam beberapa kasus malah sudah diambil alih, dan dalam kasus lain diganggu, oleh pendatang baru di wilayah itu, terutama Belanda, Inggris, Bugis, Makasar, Minangkabau, Cina, Arab Hadramaut, dan Ilanun. Produk-produk baru sesekali mendatangkan kekayaan bagi para penguasa, tapi sering kali melemahkan posisi mereka. Tidak ada satu kekuatan pun yang cukup kuat untuk mengambil keuntungan dari kekacauan ini untuk menancapkan hegemoninya. Tentu saja Belanda, calon penguasa kolonial Sumatera, terlalu lemah untuk melakukan hal itu. Baru pada abad XIX, Belanda berusaha memegang kendali atas sebagian besar Sumatera, dan baru pada abad XX, mereka berhasil melakukan hal itu di seluruh pulau Sumatera.[]

Bab 8

Jawa, ± 1640–1682

BERDIRINYA KERAJAAN Mataram dan Kerajaan Banten telah dibicarakan pada bab 4. Pada pertengahan dan tahun-tahun terakhir abad XVII, kedua kerajaan itu menghadapi konflik-konflik yang berat di dalam negeri yang tidak dapat diabaikan oleh VOC di Batavia. Dilihat dari segi kepentingan VOC, Banten serupa dengan Maluku dalam beberapa hal. Kerajaan ini merupakan sumber utama lada, yang bahkan menjadi komoditas dagang yang lebih penting daripada rempah-rempah Maluku; di kerajaan ini bertempat tinggal orang-orang Eropa lain pesaing Belanda; negeri ini dapat dicapai dari laut; dan perlawanan di sana dapat membuat Batavia terganggu, seperti yang telah dialami Ambon di timur. Adapun Mataram merupakan suatu masalah yang sangat berbeda. Kerajaan ini jauh lebih besar daripada negeri mana pun yang pernah diserang VOC dan mempunyai wilayah pedalaman yang luas, sehingga kekuatan angkatan laut VOC tidak banyak berarti. Negeri ini menjadi semakin penting bagi VOC bukan karena ekspor utama VOC berasal dari sana atau karena menjadi pusat 'penyelundupan', tetapi lebih karena kerajaan ini menjadi pemasok beras—yang tanpa itu Belanda dan sekutu-sekutunya tidak dapat hidup—dan kayu—yang tanpa itu mereka tidak dapat membangun kapal-kapal atau gedung-gedung mereka. Kerajaan ini juga merupakan suatu ancaman potensial bagi keamanan Batavia. Kepentingan dagang VOC hampir seluruhnya terbatas di pesisir utara Jawa. Tetapi kejadian-kejadian di sana terkait erat dengan wilayah pedalaman sehingga orang-orang Belanda akhirnya terpaksa bergerak menuju jantung Pulau Jawa tersebut.

Putra dan pengganti Sultan Agung sebagai penguasa atas Kerajaan Mataram adalah Susuhunan Amangkurat I (1646–77).

Program pokok pemerintahannya adalah mengonsolidasikan Kerajaan Mataram, menyentralisasikan administrasi dan keuangan, serta menumpas semua perlawanan. Dia ingin mengubah kerajaan yang telah didasarkan Sultan Agung pada kekuatan militer dan kemampuan untuk memenangkan atau memaksakan suatu mufakat, menjadi suatu kerajaan yang bersatu, yang sumber-sumber pendapatannya dimonopoli untuk kepentingan raja. Andai saja ia berhasil, mungkin dia akan merombak politik Jawa, tetapi usaha-usahanya itu memang sudah ditakdirkan mengalami kegagalan; fakta-fakta geografi, komunikasi, dan populasi, yang mengharuskan kekuasaan administratif di Jawa didesentralisasi, tidak dapat diubah dengan perintah raja. Sebagai akibat kebijakan-kebijakannya, Amangkurat I mengucilkan orang-orang yang kuat dan daerah-daerah yang penting, yang akhirnya menyebabkan meletupnya pemberontakan yang terbesar selama abad XVII; hal ini mengakibatkan tumbangnya dinasti tersebut dan masuknya campur tangan VOC.

Amangkurat I memperlihatkan sifatnya sejak awal masa pemerintahannya. Pada tahun 1637, ketika masih berstatus putra mahkota, dia telah terlibat dalam suatu skandal yang melibatkan istri seorang abdi dalem senior, Tumenggung Wiraguna. Pada tahun 1647, raja baru tersebut mengutus Wiraguna ke Ujung Timur, seolah-olah untuk mengusir pasukan Bali. Di tempat yang jauh dari keluarga dan para pendukungnya itu, Wiraguna dibunuh. Sesudah itu, keluarga Wiraguna di Mataram dan orang-orang lain yang terlibat dalam skandal tahun 1637 tersebut dibunuh. Saudara laki-laki Raja, Pangeran Alit, memihak Wiraguna pada tahun 1637, dan ketika mengetahui sahabat-sahabatnya sedang dibunuh, dia mencari dukungan di kalangan para pemimpin Islam. Rupanya mereka menyerang istana tetapi dapat dipukul mundur, dan Pangeran Alit gugur dalam pertempuran itu. Kini Amangkurat I berganti melawan para pemimpin Islam. Sebuah daftar para pemimpin agama terkemuka disusun dan mereka semua dikumpulkan di halaman istana. Kemudian, menurut duta VOC, Rijklof van Goens, antara 5.000 dan 6.000 orang pria, wanita, dan anak-anak dibantai.

Pada tahun 1647, Amangkurat I pindah ke istana barunya di Plered, tepat di sebelah timur laut Karta. Tidak seperti istana lamanya yang terbuat dari kayu, istana baru ini sebagian besar dibangun dari bata merah, mungkin semacam contoh keper-

manenan dan kekokohan yang ingin dilihat Amangkurat I di seluruh pelosok kerajaannya. Pekerjaan di Plered tersebut berjalan terus, paling tidak sampai tahun 1666. Sejalan dengan bertambah besarnya kompleks istana baru itu, susuhunan baru itu pun semakin kejam. Teman-teman lama ayahnya menghilang satu demi satu, beberapa di antaranya mungkin karena usia lanjut, tetapi banyak pula yang dibunuh atas perintah Raja. Pada tahun 1648, Van Goens menggambarkan fakta ini dengan "cara pemerintahan yang aneh ... orang-orang tua dibunuh demi memberi tempat kepada yang masih muda" (de Graaf, *Gezantschapsreizen*, 67). Di antara orang-orang terkemuka yang menjadi korban Raja adalah ayah mertuanya sendiri, Pangeran Pekik dari Surabaya, yang dibunuh bersama-sama dengan sebagian besar anggota keluarganya pada tahun 1659. Jiwa paman Raja pun, yang merupakan satu-satunya saudara laki-laki Sultan Agung yang masih hidup, Pangeran Purbaya, terancam tetapi berhasil selamat karena campur tangan ibu suri.

Amangkurat I berusaha keras meniadakan konsensus orang-orang terkemuka yang memiliki arti penting bagi kedudukan Raja Jawa. Dia membunuh orang-orang yang dicurigai menentangnya, baik di istana maupun di seluruh pelosok kerajaannya, dan tentu saja menimbulkan kegelisahan dan ketakutan di antara mereka yang masih hidup. Tampak jelas perpecahan di daerah-daerah di luar perbatasan kerajaan. Karena menuntut kepatuhan yang sebenarnya tidak dapat dipaksakannya, maka tindakan Amangkurat I tersebut telah mendorong sekutu-sekutu dan vasal-vasalnya untuk meninggalkannya. Pada tahun 1650, dia memerintahkan tentara Cirebon menyerang Banten, dan pada akhir tahun 1657 tentara Mataram sendiri bergerak menyerang Banten. Kedua serangan tersebut mengalami kegagalan, sehingga tidak hanya mempertebal kebencian Banten terhadap Mataram namun, kemungkinan besar, juga menyebabkan Cirebon meragukan manfaat dari sikap tunduknya kepada Amangkurat I. Satu-satunya upaya untuk menguasai Ujung Timur pada tahun 1647 mengalami kegagalan, sehingga sesudah itu wilayah ini tetap bebas dari pengaruh Mataram. Pihak Bali menyerang pesisir timur, dan Mataram tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Jawa, hanya Palembanglah yang masih tetap menyatakan setia dengan harapan yang sangat tipis bahwa Mataram akan bersedia membantunya, pertama-tama melawan musuh bersama mereka, Banten, dan kemudian dalam

perang melawan VOC (1658–9). Jambi dengan tegas menolak kekuasaan Mataram sesudah 1663 dan memilih bekerja sama dengan VOC. Kalimantan juga sama sekali bebas dari pengaruh Mataram sesudah sekitar tahun 1659. Selama peperangannya dengan VOC, Sultan Hasanuddin dari Gowa mengirim utusan-utusan ke Mataram pada tahun 1657 dan 1658. Akan tetapi, Amangkurat I meminta supaya Hasanuddin datang sendiri ke istananya sebagai tanda takluk, yang jelas tidak akan dilakukan oleh Hasanuddin. Akibatnya, hubungan Gowa-Mataram menjadi dingin.

Alasan-alasan yang telah menyebabkan perpecahan di daerah pinggiran kerajaan ini pada dasarnya bersifat kemiliteran. Amangkurat I tidak sanggup menyelenggarakan ekspedisi-ekspedisi seperti yang telah dijalankan oleh Sultan Agung. Hal ini merupakan akibat langsung dari pemerintahannya yang lalim. Dia tidak berani meninggalkan istananya yang dikawal ketat dan menempatkan dirinya di tengah-tengah para komandan yang tidak bisa dipercaya. Dia tidak berani pula memercayakan kepemimpinan atas pasukan utama kepada orang lain. Dengan demikian, kelalimannya telah menyebabkan hancurnya mufakat orang-orang terkemuka, yang membuat kerajaan ini terkucil dari masyarakat sehingga mustahil untuk membentuk suatu pasukan yang besar, untuk memimpinnya, atau untuk memercayakan kepemimpinannya kepada orang lain. Oleh karena itu, para bawahan dan para taklukannya di daerah-daerah terpencil mendapat kesempatan baik untuk melepaskan kesetiaan mereka. Sementara itu, Amangkurat I menyuguhkan sejumlah alasan kepada orang-orang yang punya kekuasaan untuk berpikir bahwa kepentingan pribadi mereka dapat terlayani sebaik-baiknya dengan memerdekakan diri.

Hubungan Raja dengan VOC mula-mula tampak bersahabat. Pada tahun 1646, dia menyetujui suatu perjanjian persahabatan yang menukar tawanan, dan VOC mengembalikan uang yang telah dirampas dari utusan Sultan Agung yang sedang melakukan perjalanan ke Mekah pada tahun 1642. Amangkurat I tampaknya menganggap perjanjian ini sebagai bukti tunduknya Batavia kepada kekuasaannya, dan VOC tidak merasa perlu menyatakan penafsiran lain. Serangkaian misi VOC mengunjungi istana antara 1646 dan 1654, dan pos perdagangan VOC di Jepara dibuka kembali pada tahun 1651. Hubungan dagang VOC dengan daerah pesisir berkembang lagi.

Dimulainya lagi perdagangan Jawa-VOC di daerah pesisir telah mengakibatkan timbulnya suatu krisis internal baru di Jawa. Barang-barang yang dibutuhkan VOC, terutama beras dan kayu, adalah hasil-hasil daerah pesisir. Barangkali para pengusaha, pedagang, dan pejabat-pejabat di daerah pesisir utaralah yang memperoleh sebagian besar keuntungan dengan berlangsungnya lagi perdagangan ini, sedangkan yang diperoleh Raja rupanya kurang daripada yang diinginkannya. Oleh karena itu, Amangkurat I mulai melakukan pengawasan yang semakin ketat terhadap daerah pesisir sehingga membangkitkan kembali antagonisme mendalam antara daerah pesisir dan daerah pedalaman.

Pada tahun 1651, Amangkurat I memerintahkan diadakannya suatu sensus, mungkin untuk mempermudah penarikan pajak. Dia juga mengeluarkan keputusan bahwa tak seorang pun warganya dapat mengadakan perjalanan ke luar Jawa, sehingga secara langsung memukul kepentingan para saudagar dari daerah pesisir. Susuhunan juga mengangkat dua orang gubernur daerah pesisir, yang satu untuk mengawasi bagian barat dan yang lain untuk bagian timur. Pada tahun 1652, dia melarang sama sekali ekspor beras dan kayu. Dia memberi tahu pihak Belanda bahwa tindakan ini bukanlah langkah yang ditujukan terhadap mereka tetapi terhadap Banten, dan bahwa mereka dapat memperoleh beras dengan jalan mengutus seorang duta untuk merundingkan jumlah dan harganya. Dengan kata lain, dia berusaha memastikan bahwa keuntungan dari perdagangan dengan VOC langsung tersalur ke dalam perbendaharaan kerajaan. Pihak Belanda mengeluhkan pembatasan-pembatasan tersebut, tetapi Amangkurat I tetap pada pendiriannya. Sementara itu, warganya di daerah pesisir menderita karena adanya tuntutan Raja berupa uang tunai dari mereka dan gangguan Raja terhadap perdagangan mereka.

Pada tahun 1655, Amangkurat I memerintahkan agar pelabuhan-pelabuhan ditutup sama sekali. Dalam teori, bahkan para nelayan pun tidak diperbolehkan berlayar. Para pejabat dikirim untuk mengambil alih kapal-kapal besar dan memusnahkan semua kapal kecil. Tampaknya tindakan-tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengumpulan pajak, tetapi di balik semua itu terlihat jelas ada keinginan Raja untuk menghancurkan daerah pesisir apabila dia tidak dapat menguasainya. Pada tahun 1657, pelabuhan-pelabuhan tersebut tiba-tiba dibuka kembali,

tetapi pada tahun 1660 dinyatakan tertutup lagi bagi semua pedagang; dan kali ini pos perdagangan VOC di Jepara juga ditutup. Penutupan pelabuhan yang kedua ini konon, setidak-tidaknya sebagian, merupakan pembalasan atas tindakan VOC menghancurkan Palembang pada tahun 1659. Amangkurat I konon tergoncang atas dihancurkannya satu-satunya sekutunya yang tersisa di luar Jawa ini. Namun, jelas bahwa alasan ditutupnya pelabuhan-pelabuhan tersebut lebih luas daripada itu, karena semua saudagar, bukan hanya VOC, dilarang berdagang di pelabuhan-pelabuhan. Akan tetapi, pelabuhan-pelabuhan tersebut dibuka kembali pada tahun 1661.

Usaha-usaha Amangkurat I untuk menguasai daerah pesisir dan keinginannya memonopoli perdagangan dengan VOC tentu saja saling berkait erat. Dia tampaknya mempunyai empat tujuan pokok: (1) menjamin supaya pajak dari perdagangan daerah pesisir langsung tersalur ke istana; (2) menegakkan kembali hubungan 'vasal' VOC yang menurut keyakinannya telah ditetapkan di dalam perjanjian tahun 1646; (3) menerima hadiah-hadiah VOC yang dapat meningkatkan kemegahan dan keagungan istananya, misalnya, kuda Persia, dsb.; dan (4) menerima uang VOC untuk meringankan kekurangan dana yang kronis di kerajaannya. Tujuan-tujuan ini dapat tercapai dengan jalan meruntuhkan otonomi daerah pesisir dan memaksa VOC untuk melakukan semua transaksi secara langsung dengan istana. Amangkurat I terus mendesak agar VOC mengirimkan duta-dutanya kepadanya dengan ancaman bahwa kalau tidak maka pelabuhan-pelabuhan akan ditutup kembali. Misi-misi VOC dikirim ke Plered pada tahun 1667, 1668, dan 1669, tetapi hanya sedikit kemajuan dicapai ke arah penyusunan rencana-rencana dagang yang stabil dan bersahabat. Misi terakhir malah tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanannya ke Plered. Seperti yang akan dibahas di bawah ini, pada masa itu istana sudah mendekati saat kehancurannya.

Sementara itu, VOC mendapat kemajuan di Indonesia Timur. Sebagaimana penghancuran Palembang pada tahun 1659 telah menggoncangkan Amangkurat I, maka begitu pula penaklukan atas Gowa sepuluh tahun kemudian telah menggoncangkan dirinya. Kini dia mulai menyadari bahwa VOC bukan hanya merupakan sumber keuangan tetapi juga sumber bahaya. Itulah yang

semakin membulatkan tekadnya untuk menguasai daerah pesisir. Kedua gubernur daerah pesisir yang diangkat pada tahun 1651 telah digantikan oleh empat gubernur pada tahun 1657. Pada tahun 1669, wewenang mereka dikurangi dan wakil-wakil langsung dari istana, yang disebut *umbul*, dikirim untuk mengawasi urusan administrasi di sana. Kehidupan ekonomi dan administrasi daerah pesisir selanjutnya menjadi kacau, dan mendung mulai menggumpal.

Sulit untuk mengetahui seberapa kuat perlawanan terhadap Amangkurat I sebelum akhir 1660-an. Pasti tersebar luas perlawanan yang laten, mungkin hampir bersifat universal, tetapi hanya beberapa orang yang mempunyai pengaruh cukup besar untuk memimpin suatu kudeta atau pemberontakan yang dapat menyelamatkan diri dari pembunuhan yang terus-menerus itu. Akan tetapi, pada tahun 1660-an, muncul seseorang yang posisi maupun kekuatannya atas pasukan cukup menjamin bahwa dirinya mempunyai harapan untuk selamat dan berhasil. Orang itu adalah putra Raja sendiri, putra mahkota, yang kelak bergelar Susuhunan Amangkurat II (1677–1703).

Putra mahkota ini adalah anak Amangkurat I dengan seorang putri Surabaya, anak Pangeran Pekik. Dia sebenarnya dibesarkan oleh keluarga ibunya, sehingga tidaklah mengherankan kalau dia mempunyai beban mental yang berat akibat pembunuhan yang dilakukan ayahnya terhadap keluarga itu dan Pangeran Pekik pada tahun 1659. Wataknya sewaktu remaja tak banyak diketahui, kecuali bahwa dia mempunyai kegemaran terhadap wanita-wanita cantik. Ini menimbulkan konflik dengan ayahnya yang mempunyai selera yang sama. Pada tahun 1660, pihak Belanda mendengar desas-desus bahwa Amangkurat I bermaksud membunuh putranya; pada tahun 1661, Belanda mendengar bahwa dia telah melakukannya. Segera terbukti bahwa hal itu tidak benar. Tetapi, pada tahun 1663, muncul desas-desus lain mengenai usaha Raja yang gagal untuk meracun putranya. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kelompok Putra Mahkota gagal dalam suatu usaha kudeta pada tahun 1661, yang mengakibatkan banyak pendukungnya terbunuh. Apabila hal itu benar, maka jelas bahwa Putra Mahkota sendiri telah berhasil menyelamatkan diri dari tindakan balas dendam ayahnya, mungkin karena pengawal pribadinya sangat kuat.

Pada tahun 1668–70 terjadi lagi konflik antara Putra Mahkota dan ayahnya mengenai seorang wanita. Perpecahan keduanya sekarang lengkap sudah, kalau saja sebenarnya konflik itu belum lengkap selama satu dasawarsa terakhir. Mulai tahun 1660, Putra Mahkota sudah berusaha menjalin hubungan tersendiri dengan VOC. Antara tahun 1667 dan 1675, dia mengirim sembilan perutusan ke Batavia untuk meminta apa saja, dari ayam Belanda sampai kuda Persia dan gadis-gadis Makasar. Mungkin tujuan sebenarnya adalah untuk menjajaki apakah dia dapat mengharapkan dukungan VOC ataukah tidak. Enam pangeran lain di istana juga mempunyai pengawal bersenjata masing-masing dan tempat tinggal yang dijaga, di antaranya adalah Pangeran Puger yang kelak menjadi Susuhunan Pakubuwana I (m. 1704–19). Kini Plered telah menjadi kumpulan kamp-kamp bersenjata. Para pangeran terpecah-belah oleh rasa iri dan ambisi mereka dalam suatu lingkungan politik, di mana pembunuhan merupakan harga yang harus dibayar bagi suatu langkah yang keliru.

Putra Mahkota sudah beberapa lama berhubungan dengan seseorang yang kelak memainkan peranan penting dalam kekacauan mendatang. Orang itu adalah Raden Kajoran, juga dipanggil Panembahan Rama, seorang suci yang dikenal memiliki kekuatan gaib. Kajoran adalah suatu tempat yang terletak kira-kira 26 km di sebelah timur-laut istana, di kawasan tempat suci Tembayat. Pada tahun 1630-an, daerah ini agaknya telah menjadi pusat perlawanan terhadap Sultan Agung. Dan pada tahun 1633, Sultan Agung mengadakan semacam ziarah ke makam Sunan Bayat di sana. Raden Kajoran adalah keturunan keluarga Sunan Bayat dan mempunyai ikatan perkawinan dengan keturunan Kerajaan Mataram. Bahkan lebih signifikan lagi, putri sulungnya menikah dengan seorang pangeran dari Madura bernama Raden Trunajaya (1649–80?) yang tidak senang dengan pemerintahan Amangkurat I. Kelak, kalau saja tidak ada campur tangan VOC, hampir dapat dipastikan Trunajaya telah menjadi pendiri suatu dinasti baru di Jawa. Dia mempunyai cukup banyak alasan untuk membenci Amangkurat I. Ayahnya dibunuh di istana pada tahun 1656 dan jiwanya sendiri terancam oleh suatu persekongkolan istana beberapa waktu kemudian. Karena itulah dia melarikan diri ke Kajoran dan menjadi menantu Raden Kajoran.

Raden Kajoran memperkenalkan Trunajaya kepada Putra Mahkota sekitar tahun 1670. Hasilnya adalah suatu persekongkolan

yang paling menentukan dalam menentang Amangkurat I. Trunajaya akan melancarkan suatu pemberontakan, dan apabila Raja dapat dikalahkan maka Putra Mahkotalah yang akan menjadi susuhunan baru. Trunajaya akan mendapatkan kekuasaan atas Madura dan, agaknya, sebagian Jawa Timur, dan mungkin pula akan menjadi kepala pejabat administrasi (patih) untuk seluruh kerajaan. Raden Kajoran meramalkan Trunajaya akan menjadi seorang pahlawan besar dan Mataram akan runtuh. Putra Mahkota kembali ke istana untuk menunggu terjadinya peristiwa itu, sedangkan Trunajaya berangkat ke Madura untuk membangun pangkalan bagi pemberontakan tersebut. Di sana dia menghimpun kekuatan dan merebut kekuasaan atas Pamekasan di Madura tengah bagian selatan. Dari pangkalan ini dia berhasil merebut kekuasaan atas seluruh Madura selama tahun 1671.

Ujung tombak pemberontakan adalah orang-orang non-Jawa. Pertama-tama berhimpun prajurit-prajurit Madura, kemudian satuan-satuan prajurit yang ganas dari Indonesia Timur, yaitu orang-orang Makasar. Setelah meninggalkan kampung halaman mereka akibat kekalahan Gowa pada tahun 1669 dan karena pemerintahan Arung Palakka yang bersifat menindas, gerombolan-gerombolan orang Makasar berlayar ke Jawa. Sebagian besar mencari nafkah dengan merompak dan merampok. Suatu kelompok berangkat ke Banten, tetapi sewaktu situasi di sana menjadi genting, mereka pergi dan, pada tahun 1674, sampai di Jepara. Tujuan mereka adalah meminta tanah kepada Amangkurat I untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Mereka tidak diizinkan menghadap ke istana, tetapi tampaknya Putra Mahkota mengizinkan mereka menetap di daerah pesisir Jawa Timur di suatu tempat yang bernama Demung (sekarang Besuki). Orang Makasar yang bergabung dengan mereka semakin banyak dan, pada tahun 1675, mereka bersekutu dengan Trunajaya dan mulai menyerang pelabuhan-pelabuhan Jawa. Harapan akan dibaginya barang-barang rampasan dari suatu peperangan yang besar di Jawa tentu benar-benar membangkitkan semangat orang-orang buangan tersebut.

Kini Kerajaan Mataram mulai mengalami disintegrasi. Raja sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan, tetapi kelaliman dan pembunuhan masih terus berlanjut. Pada tahun 1674–6, bahaya kelaparan merajalela dan berjangkit wabah penyakit. Muncul berbagai pertanda tidak baik: Gunung Merapi meletus pada tahun

1672, beberapa gempa bumi dan gerhana bulan terjadi, dan hujan turun tidak pada musimnya. Lagi pula, akhir abad Jawa telah dekat. Tradisi istana Jawa memercayai suatu siklus abad-abad yang menunjukkan runtuhnya kerajaan-kerajaan pada akhir setiap abad. Ketika tahun Jawa 1600 (yang dimulai pada Maret 1677) hampir tiba, tersebar ramalan-ramalan bahwa hari-hari terakhir Mataram sudah dekat. Dalam sebuah negara serapuh kerajaan Amangkurat I, pemikiran-pemikiran semacam itu hanya memperbesar kemungkinan bahwa percuma saja melakukan perlawanan pada saat tantangan terhadap Raja muncul pada akhirnya.

Pada tahun 1675, pemberontakan benar-benar berkobar. Orang- orang Makasar menyerang dan membakar pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur sampai ke Tuban. Benteng-benteng pertahanan yang dimiliki pelabuhan-pelabuhan tersebut telah dihancurkan oleh Sultan Agung setelah dia berhasil merebutnya, dan oleh karena itu kota-kota ini hampir tidak dapat mempertahankan diri. Angkatan Laut VOC juga berhadapan dengan orang-orang Makasar, dan hanya memperoleh kemenangan yang kecil. Pasukan Madura di bawah pimpinan Trunajaya kini memasuki Jawa dan merebut Surabaya. Kesetiaan daerah pesisir terpecah belah. Pelabuhan-pelabuhan dari Juwana ke timur tampaknya mendukung pemberontakan tersebut, sedangkan pelabuhan-pelabuhan yang letaknya ke barat (terutama Cirebon) tampaknya masih tetap setia kepada Amangkurat I. Namun demikian, timbul kecurigaan tentang sikap semua penguasa daerah pesisir itu. Istana juga terpecah belah. Satu pihak mendukung permintaan bantuan kepada VOC. Pihak lainnya, yang tampaknya dipengaruhi oleh Panembahan Giri, mengajukan usul atas dasar agama agar tidak dijalin kerja sama dengan orang-orang Kristen. Kedudukan Putra Mahkota memang sangat sulit. Dia tetap berada di istana, berusaha mendorong pemberontakan yang menurut keyakinannya akan menguntungkan dirinya, tanpa memperlihatkan keterlibatannya. Pemberontakan meluas ketika kekuatan-kekuatan Trunajaya dan orang-orang Makasar memperoleh kemenangan-kemenangan lebih lanjut di daerah pesisir. Pihak pemberontak, atas nama Islam, menyeru orang-orang Jawa agar mendukung mereka. Seruan ini mendapatkan tanggapan yang positif. Panembahan Giri sekarang merestui mereka dengan mengatakan bahwa Mataram tidak akan

pernah sejahtera selama VOC masih tetap berada di Jawa. Hal ini menunjukkan semakin besarnya unsur anti-VOC, selain unsur anti-Amangkurat I, dalam pemberontakan tersebut. Ini menjadi masalah bagi Putra Mahkota yang agaknya sudah cenderung kepada VOC.

Titik balik militer yang sangat menentukan terjadi pada tahun 1676. Peranan Putra Mahkota dalam pemberontakan itu telah dicurigai pihak istana. Tetapi tidak jelas apakah Amangkurat I sendiri memercayai tuduhan-tuduhan tersebut ataukah dia berpendapat bahwa dia tidak berkesempatan menghukum putranya. Apa pun masalahnya, dia menunjuk Putra Mahkota sebagai pimpinan pasukan yang dikirim untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan Trunajaya. Pangeran-pangeran lain juga dikirim bersamanya, termasuk saudara dan sekaligus musuh utama Putra Mahkota, Pangeran Singasari. Kemungkinan besar Raja menginginkan kematian Putra Mahkota selama penyerangan tersebut. Mungkin pula Putra Mahkota bermaksud melakukan perang pura-pura terhadap Trunajaya, tetapi ia dicegah untuk mewujudkan hal itu dengan kehadiran pangeran-pangeran lainnya. Tentara kerajaan bertempur melawan Trunajaya di Gogodog di daerah pesisir timur-laut pada bulan Oktober 1676. Di sanalah tentara Mataram mengalami disintegrasi. Di antara korban yang tewas di pihak Mataram adalah Pangeran Purbaya yang sudah berusia sangat lanjut, satu-satunya saudara Sultan Agung yang cukup lama hidupnya untuk menyaksikan kehancuran kekaisaran Sultan Agung.

Setelah kejadian di Gogodog, pemberontakan menyebar semakin cepat. Banyak pembesar Jawa tidak mau lagi mengakui Amangkurat I sebagai raja mereka dan bergabung dengan kaum pemberontak. Pada awal tahun 1677, pasukan-pasukan pemberontak menguasai semua pelabuhan. Bahkan Cirebon pun jatuh ke tangan kaum pemberontak, tetapi kapal-kapal perang Banten segera muncul di sana untuk mengambil alih.

Aspirasi Trunajaya sekarang meningkat. Pada tahun 1676, dia telah memakai gelar 'panembahan' (orang yang dihormati) dan 'raja'. Dia mulai menyatakan dirinya sebagai keturunan Majapahit dan berhak atas tahta Mataram. Dengan kata lain, Putra Mahkota sudah tidak dapat mengendalikan pemberontakan yang dirancangnya. Akan tetapi, Trunajaya pun sudah tidak dapat mengendalikan orang-orang Makasar, sekutunya yang sukar diperintah,

yang tak punya kepentingan dengan soal siapa yang memerintah Jawa.

Tentu saja pihak Belanda sangat memerhatikan peristiwa-peristiwa tersebut, dan telah terlibat dalam permusuhan dengan orang-orang Makasar. Putra Mahkota maupun Trunajaya meminta meriam, mesiu, dan perlengkapan lainnya kepada VOC. VOC menghendaki tegaknya stabilitas di daerah pesisir sehingga perdagangan dapat berjalan dengan baik, dan sekarang VOC harus memutuskan apa yang dapat dilakukan demi tercapainya stabilitas itu. Pada akhir tahun 1676, Batavia mengambil keputusan untuk melakukan campur tangan terbatas, dengan tujuan memediasi suatu upaya penyelesaian. Orang yang diserahi tugas ini adalah Laksamana Speelman, penakluk Makasar. Dia diperlengkapi dengan ± 1.500 orang serdadu, tetapi diperintahkan untuk tidak memasuki wilayah pedalaman. Batavia tidak ingin terlibat dalam perang besar di Jawa, karena serdadu-serdadunya mungkin diperlukan di tempat lain: Malaka sedang diganggu orang-orang Melayu dari Johor dan tampak jelas bahwa Banten dan negara-negara lainnya juga sedang menggalang persekongkolan untuk melawan VOC. Juga sangat disangsikan manfaatnya melancarkan peperangan di Jawa, karena beberapa orang meyakini bahwa VOC hanya dapat menaklukkan Jawa dengan menghancurkan pulau itu dan melibatkan pengeluaran besar-besaran. Tetapi bagaimanapun juga, logika dari tindakan campur tangan itu segera membawa VOC masuk ke daerah pedalaman.

Pada Februari 1677, Amangkurat I dan VOC memperbarui perjanjian tahun 1646 yang sudah lama tidak berarti lagi. Pihak Belanda berjanji akan membantu Raja melawan musuh-musuhnya, tetapi Raja harus membayar semua biaya yang dikeluarkan untuk bantuan semacam itu dan memberikan konsesi-konsesi ekonomi kepada VOC, misalnya pembebasan dari cukai. Terbentuknya persekutuan itu hanya mempercepat meletusnya pemberontakan. Kesadaran terhadap Islam tampaknya telah begitu kuat tertanam di kalangan kaum pemberontak. Tersebar ramalan-ramalan bahwa Tuhan tidak akan memberkahi Jawa selama orang-orang Kristen masih berada di sana. Pada bulan Mei 1677, VOC melakukan campur tangan di daerah pesisir. Mereka berhasil memukul mundur Trunajaya dari Surabaya sehingga memaksa pasukannya mundur lebih jauh lagi memasuki wilayah pedalaman.

Hal ini justru mendorong lebih banyak lagi orang Jawa untuk bergabung dengan Trunajaya.

Sekarang pemberontakan mencapai puncaknya. Istana Plered diserang dan jatuh ke tangan pasukan Trunajaya. Hari keruntuhannya tidak jelas, tetapi sudah pasti antara akhir bulan Mei dan akhir bulan Juni 1677. Kronik-kronik Jawa menyebutkan bahwa ketika musuh semakin mendekat, prajurit-prajurit Raja berkerumun di depan istana, tetapi Raja mengatakan supaya mereka tidak menentang kehendak Tuhan: hari terakhir abad itu telah tiba dan bersamaan dengan itulah saat runtuhnya Mataram. Tradisi Jawa juga menyebutkan bahwa hampir seabad sebelumnya, bintang yang jatuh di Sela Gilang telah meramalkan kepada Senapati bahwa Mataram akan jatuh pada zaman cicit laki-lakinya, yaitu Amangkurat I. Raja telah meninggalkan istana sebelum musuh-musuhnya sempat mencapainya. Dia menyerahkan istana kepada putranya, Pangeran Puger, dan membawa serta Putra Mahkota bersamanya ke arah barat laut menuju daerah pesisir. Putra Mahkota, yang telah begitu lama tetap selamat di antara musuh-musuhnya dalam keluarga kerajaan, hanya mempunyai sedikit harapan dapat selamat di tangan bekas sekutunya, Trunajaya. Puger tidak mampu melawan kaum pemberontak, dan terpaksa melarikan diri dan meninggalkan istana untuk mereka. Trunajaya merampok Plered dan sesudah itu bergerak mundur ke arah timur menuju Kediri dengan membawa serta harta kekayaan Mataram. Kemudian Puger menduduki istana lagi dan memakai gelar kerajaan Susuhunan Ingalaga. Gara-gara itu, dimulailah suatu masa ketegangan yang panjang antara dirinya dengan saudaranya, Putra Mahkota.

Amangkurat I tidak kuasa mengatasi penderitaan selama pelariannya. Dia wafat pada bulan Juli 1677; pada tanggal 13 Juli, putranya memakamkannya di Tegal-Wangi (ke selatan dari Tegal), di pesisir utara. Ketika melarikan diri dulu, Raja harus meninggalkan harta kekayaannya dan sebagian tanda-tanda kebesaran kerajaan (pusaka) yang berat di Mataram. Tetapi, tanda-tanda kebesaran kerajaan yang tidak ditinggalkannya itu sekarang menjadi milik Putra Mahkota. Maka, hanya dengan beberapa pusaka yang keramat tersebut namun tanpa harta kekayaan, suatu pasukan, sebuah istana atau kerajaan, Susuhunan Amangkurat II (m. 1677–1703) memulai masa pemerintahannya. Hanya ada satu cara yang

memungkinkannya untuk mengangkat dirinya sebagai penguasa di Jawa: dia harus menghubungi VOC supaya mau bertempur di pihaknya.

Persekutuan VOC–Amangkurat II tersebut, berdasarkan perjanjian bulan Februari 1677, diperkuat pada bulan Juli 1677. Akan tetapi, pada mulanya Raja tampak enggan untuk memercayai sepenuhnya sekutu-sekutunya, dan baru pada bulan September dia setuju untuk pergi dari Tegal ke Jepara, di mana Speelman telah mendirikan markas besarnya di sana sesudah berhasil memukul mundur kekuatan-kekuatan pemberontak dari pusat wilayah pesisir itu. Pada waktu itu, hutang kerajaan kepada VOC untuk biaya-biaya militernya sudah sangat besar, dan Raja tidak mempunyai kekayaan yang dapat dipakai untuk membayar kembali hutang tersebut. Oleh karena itulah, maka pada bulan Oktober 1677 dan Januari 1678, dia mengadakan perjanjian-perjanjian baru. Kini VOC dijanjikan untuk mendapatkan hasil dari pajak pelabuhan-pelabuhan daerah pesisir sampai hutangnya lunas, hak monopoli pembelian beras dan gula, hak monopoli atas impor tekstil dan candu, dan pembebasan dari cukai. Raja juga berjanji menyerahkan Semarang kepada VOC dan mengakui perbatasan-perbatasan Batavia yang sekarang telah membentang ke selatan sampai Samudra Hindia, sehingga seluruh dataran tinggi Priangan menjadi wilayah VOC. Baru kemudian VOC menyadari bahwa sebagian besar janji-janji tersebut adalah palsu (lihat bab 9).

Sekarang Speelman ingin sekali bergerak ke wilayah pedalaman, tetapi Batavia keberatan. Akan tetapi, terjadinya pergantian personel di Batavia segera membuka peluang untuk dijalankannya kebijakan yang lebih aktif. Gubernur Jenderal Maetsuycker meninggal dunia pada bulan Januari 1678 dan digantikan oleh Direktur Jenderal Rijklof van Goens. Lalu, jabatan direktur jenderal yang ditinggalkan diisi oleh Speelman sendiri. Kekuasaan Speelman di Jepara akhirnya diserahkan kepada Anthonio Hurdt pada bulan Juni. Hurdt hanya memiliki sedikit pengalaman militer dan tidak tahu apa-apa tentang Jawa, namun akan menjadi alat dari keagresivan baru Batavia.

Pada bulan September 1678, Hurdt bergerak menuju wilayah pedalaman bersama Amangkurat II untuk menghancurkan kubu pertahanan Trunajaya di Kediri. Pasukan tersebut banyak meng-

hadapi kesulitan. Perwira-perwiranya yang berkebangsaan Eropa tidak tahu-menahu sedikit pun mengenai daerah pedalaman, sehingga kadang-kadang disesatkan oleh para penunjuk jalan mereka. Pasukan itu mengalami serangan penyakit dan kekurangan bahan pangan. Bagaimanapun juga, akhirnya Kediri berhasil dicapai, dan pada tanggal 25 November, kota itu berhasil direbut. Trunajaya melarikan diri ketika pasukan gabungan Jawa dan Eropa itu merampok kota, sekaligus merampas harta kekayaan Mataram. Kapten François Tack menemukan suatu benda yang digambarkan sebagai "mahkota emas Majapahit", suatu bagian dari harta benda kerajaan yang tidak dikenal lagi di Jawa. Dia bertindak cukup lancang dengan menjual benda itu kepada Amangkurat II dengan harga 1.000 real; Raja di kemudian hari tidak mau membayar penuh, dan akhirnya mengganjar kekurangajaran Tack itu dengan membunuhnya di istana pada tahun 1686.

Pemberontakan tersebut kini hancur dengan cepat. Pada akhir tahun 1679, Trunajaya tertangkap di Jawa Timur dan dihadapkan kepada Raja. Ia kemudian ditikam sampai mati oleh Amangkurat II pribadi pada bulan Januari 1680. Pada bulan November 1679, pasukan Makasar dipukul mundur dari kubu pertahanan utama mereka di Keper, Jawa Timur. Di sini VOC mendapat bantuan dari suatu pasukan yang paling besar keahliannya dalam memerangi orang-orang Makasar tersebut, yaitu Arung Palakka dari Bone bersama prajurit-prajurit Bugisnya. Suatu pasukan VOC yang berada di bawah pimpinan Kapten Jan Albert Sloot bergerak menuju Pajang, dan pada September 1679, pasukan ini berhasil membunuh Raden Kajoran. Pada bulan April 1680, dalam suatu pertempuran yang digambarkan oleh pihak Belanda sebagai yang paling dahsyat, Panembahan Giri gugur dan sebagian besar anggota keluarganya dibunuh. Seiring dengan semakin banyak kemenangan yang diperoleh Amangkurat II dan VOC, maka makin lama semakin banyak pula orang Jawa yang menyatakan kesetiaan mereka kepada raja ini.

Akan tetapi, masih ada masalah tentang daerah-daerah pusat di Jawa. Saudara Raja, Pangeran Puger, tetap mempertahankan istana Mataram dan nyata-nyata tidak mau mengakui Amangkurat II sebagai raja. Pangeran-pangeran yang lain juga menentang Amangkurat II, tetapi dua orang pangeran terkemuka telah wafat pada tahun 1678 sehingga tinggal Pugerlah yang masih menjadi

penghalang utama antara Amangkurat II dan tahtanya. Pada bulan September 1680, Amangkurat II berangkat ke Pajang dan membangun sebuah istana baru yang diberi nama Kartasura. Akan tetapi, dia tidak mampu membujuk saudaranya supaya menyerah. Pada bulan November, pasukannya dan pasukan VOC menyerang dan berhasil mengusir Puger dari istana lama di Plered. Akan tetapi, pada bulan Agustus 1681, Puger telah menghimpun kembali kekuatannya hingga mencapai 10.000 orang dan berhasil merebut kembali wilayah Mataram. Selanjutnya dia melancarkan serangan terhadap Kartasura dan nyaris berhasil merebut istana baru itu sebelum dipukul mundur oleh VOC. Pada bulan November 1681, VOC berhasil mengalahkannya lagi, dan akhirnya Puger menyerah. Dia pergi ke Kartasura dan mengakui kedaulatan saudaranya; keselamatan jiwanya dijamin oleh VOC. Sementara itu, para pemberontak lain yang kurang begitu penting menderita kekalahan dan tewas; beberapa orang pemberontak melarikan diri ke daerah-daerah pegunungan. Akhirnya, Raja menduduki kembali singgasananya.

Pemberontakan yang kini sudah berakhir itu mempunyai akar yang dalam pada masa lampau, dan beberapa tema yang muncul pada perang tersebut juga akan tetap mempunyai arti yang penting sampai abad XVIII. Konflik tersebut sebagian bersifat regional: Madura dan daerah pesisir timur-laut menentang kekuasaan Jawa Tengah. Perlawanan ini berakar pada akhir abad XVI ketika Kerajaan Mataram mulai berdiri, dan diperburuk oleh pemerintahan Amangkurat I yang lalim. Perang itu juga merupakan pertarungan di dalam dinasti kerajaan yang melibatkan raja dan para pangeran serta ambisi mereka yang bertentangan. Mungkin perang tersebut sebagian juga bersifat religius, karena para pemimpin dan daerah-daerah yang mendukung pemberontakan, juga orang-orang Makasar, terkenal sebagai kaum muslim yang memiliki kesadaran tinggi. Seruan-seruan yang berbau Islam sering muncul di pihak pemberontak. Mungkin juga ini telah terungkap dalam sikap anti-Belanda kaum pemberontak. Namun demikian, agama bukanlah satu-satunya alasan utama mengapa pemberontak-pemberontak yang berusaha menggulingkan dinasti itu tidak menyukai campur tangan VOC. Yang mungkin lebih mendasar adalah bahwa pertempuran ini merupakan suatu konflik yang menyangkut legitimasi dinasti, karena dengan pemerin-

tahannya yang lalim, tindakan-tindakan pembunuhannya, usaha-usahanya untuk menghancurkan otonomi regional, dan ketidakmampuannya menggunakan kekuatan militer, Amangkurat I telah menghancurkan mufakat-para-pembesar yang sangat penting artinya bagi legitimasi dan pemerintahan yang efektif.

Peranan yang dimainkan VOC sekarang juga tetap agak sama untuk beberapa dasawarsa lamanya. Di sini terdapat suatu kekuatan militer yang sangat kuat, lebih terlatih, lebih baik persenjataannya, dan lebih disiplin daripada kebanyakan musuh-musuhnya. Akan tetapi, VOC juga menghadapi banyak kesulitan. VOC sering kali tampak terpencil di tengah-tengah pasukan-pasukan musuh yang jauh lebih besar, tidak mengenal medan, perbekalannya kurang baik, diserang penyakit, disesatkan atau ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya orang-orang Indonesia, serta diperlemah oleh ketidakcakapan dan konflik-konflik internal yang tak ada henti-hentinya di antara para komandan maupun pejabat-pejabat tingginya. Aksi-aksi penyerangannya mengakibatkan banyak kerugian dan pengeluaran biaya yang sangat besar. Kemenangan-kemenangannya atas pasukan-pasukan musuh yang besar hanya mungkin tercapai karena adanya banyak kekuatan berkebangsaan Indonesia yang berpihak kepadanya. Pada dasarnya, kekuatan militer VOC hanya terbatas untuk mendapatkan dan mempertahankan dataran-dataran rendah tertentu. Sering kali wilayah-wilayah yang bergunung-gunung berada di luar jangkauan VOC—kecuali bagi satuan-satuan yang sesekali mengadakan penyerangan—dan kadang-kadang daerah semacam itu menjadi tempat persembunyian kelompok-kelompok pemberontak selama beberapa generasi. Oleh karena itulah maka strategi VOC pada dasarnya bersifat defensif. VOC dapat melindungi seorang penguasa atas dasar mendapat bayaran dan konsesi-konsesi; VOC dapat menumpas kelompok-kelompok pemberontak yang besar dan mempertahankan tempat-tempat yang strategis, tetapi ia tidak mampu memelihara ketertiban di seluruh Jawa.

Bagaimanapun juga, kini campur tangan VOC telah memungkinkan seorang raja, meskipun tidak mendapat dukungan rakyat Jawa yang cukup memadai untuk menjalankan kekuasaan secara efektif dan mengakui legitimasinya, dapat duduk di atas singgasananya. VOC dapat melindunginya, tetapi tidak dapat membuatnya legitimatif atau memberinya alat-alat untuk memerintah.

VOC selalu percaya bahwa legitimasi itu pada dasarnya lebih banyak tergantung pada status sebagai keturunan raja sebelumnya. Selanjutnya VOC percaya bahwa kekuasaan raja lebih absolut daripada yang diperkenankan oleh tradisi Jawa dan situasi. Oleh karena itulah, dalam usahanya menegakkan stabilitas, VOC mendukung para penguasa yang oleh tokoh-tokoh terkemuka Jawa diyakini tidak mempunyai hak yang sah atau tidak memiliki kecakapan untuk memerintah. Pihak Belanda, dengan demikian, lebih banyak memperburuk daripada memecahkan sumber instabilitas ini. Pada tahun 1680, VOC tidak menghendaki yang lain kecuali menarik kekuatan militernya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi kelak terbukti bahwa akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan ini akan memaksanya untuk selalu siap siaga secara militer. Kebijakan-kebijakan tersebut juga menuntut biaya yang sangat besar di bidang militer dan inilah sebenarnya yang menjadi sebagian penyebab merosotnya keuangan VOC selama abad XVIII.

Di Jawa Barat, Banten juga mengalami suatu krisis yang mengakibatkan intervensi VOC. Masa pemerintahan Sultan Ageng (m. 1651–83), yang juga terkenal sebagai Sultan Tirtayasa, merupakan zaman keemasan Kerajaan Banten. Dia memiliki suatu armada yang mengesankan yang dibangun menurut model Eropa. Kapal-kapal yang berlayar dengan menggunakan surat jalan Sultan menyelenggarakan suatu perdagangan yang aktif di Nusantara. Atas bantuan pihak Inggris, Denmark, dan Cina, maka orang-orang Banten berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Cina, Filipina, dan Jepang. Memang, di sini ada sisa-sisa terakhir pedagang-pedagang jarak jauh Jawa.

Sultan Ageng juga menaruh perhatian pada pengembangan sumber daya pertanian negaranya. Dari tahun 1663 sampai 1677, ia memesan pembangunan sistem irigasi yang besar-besaran di Banten. Kanal-kanal baru sepanjang 30–40 km dibangun, mempekerjakan hingga 16.000 orang dalam satu kesempatan. Sepanjang kanal-kanal ini, dibuka sekitar 30–40.000 hektar persawahan baru dan ribuan hektar perkebunan kelapa. Kira-kira 30.000 orang petani ditempatkan di lahan-lahan ini, sering kali termasuk orang-orang yang oleh Sultan dipandang jahat dalam suatu pengertian, seperti para pendatang Bugis dan Makasar dan para pecandu opium. Raja memesan kincir angin yang paling mutakhir

dari Batavia untuk digunakan dalam irigasi. Proyek-proyek ini berguna tidak hanya dalam meningkatkan kekayaan pertanian kerajaan, tetapi juga dalam membawa daerah-daerah pedalaman, khususnya yang berada di sepanjang perbatasan dengan Batavia yang mudah terlepas, ke dalam kontrol pusat yang lebih efektif. Sebuah produk baru juga muncul, dengan diperkenalkannya tebu oleh para pedagang Cina untuk pertama kalinya dari tahun 1620-an. Kerajaan menjadi makmur. Ibu kota Banten sendiri diperkirakan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dari sekitar 150.000 jiwa pada awal kekuasaan Sultan Ageng menjadi sekitar 200.000 jiwa pada akhir kekuasaannya. Banten bukan tak pernah mengalami krisis: sebuah wabah pada tahun 1625 dilaporkan telah melenyapkan sepertiga populasinya, dan sebuah musim kemarau telah menimbulkan krisis beras pada tahun 1670-an. Akan tetapi, secara keseluruhan, kebijakan Raja memajukan perdagangan luar negeri maupun pertanian daerah pedalaman tergolong berhasil.

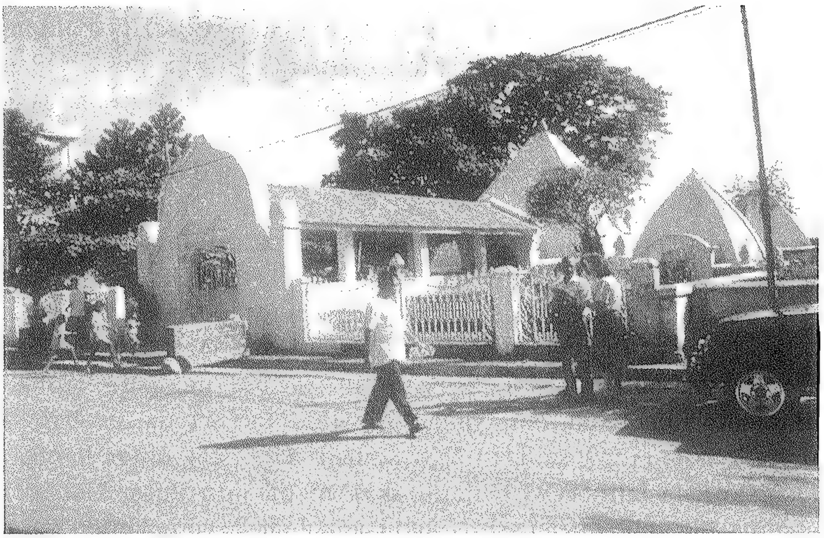
Sultan Ageng merupakan musuh VOC yang tangguh. Pihak Belanda ingin mendapatkan monopoli atas penyediaan lada Banten yang sangat kaya ini dan merasa cemas akan adanya sebuah negara yang kaya dan sangat kuat yang letaknya dekat dengan markas besar mereka di Batavia, kira-kira 75 kilometer di sebelah timurnya. Permusuhan Banten–VOC yang mengiringi takluknya Batavia pada tahun 1619 telah dibahas dalam bab 3. Pada tahun 1633–9 terjadi lagi peperangan lain yang berakhir dengan dicapainya suatu persetujuan yang samar-samar untuk menghentikan permusuhan. Pada tahun 1645 ditandatangani suatu perjanjian yang mengatur hubungan VOC–Banten. Akan tetapi, segera timbul lagi konflik ketika Sultan Ageng naik tahta pada tahun 1651. Pada tahun 1656, meletus perang: pihak Banten menyerang daerah-daerah Batavia dan kapal-kapal VOC, sedangkan VOC memblokade pelabuhan. Pada tahun 1659 tercapai suatu penyelesaian damai. Bagaimanapun juga, menjadi jelas bagi Batavia akan perlunya semacam pemecahan akhir atas masalah Banten. Kesempatan mendapatkan cara pemecahan itu muncul dalam bentuk seperti yang sudah lazim di seluruh Nusantara: suatu konflik internal dalam keluarga Kerajaan Banten.

Putra mahkota Banten, yang kelak bergelar Sultan Haji (m. 1682–7), menjalankan kekuasaan yang sangat besar di Banten, dan memang dijuluki VOC sebagai 'Sultan muda', sedangkan ayah-

nya dijuluki 'Sultan tua'. Ambisi ayah dan anak telah menimbulkan konflik, dan hubungan dengan VOC tentu saja ikut terbawa-bawa ke dalam pertikaian-pertikaian mereka. Istana terpecah menjadi dua faksi. Pihak Putra Mahkota bermaksud meminta dukungan pihak Belanda. Pihak Sultan Ageng menentang VOC, dan kalangan elite muslim yang lebih militan berpihak kepadanya. Pada tahun 1671, gerombolan-gerombolan orang Makasar, yang mempunyai segudang alasan untuk membenci VOC, tiba di Banten. Segera terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dan orang-orang Makasar sebagai akibat perlakuan Sultan terhadap wanita-wanita Makasar dan perilaku orang-orang Makasar sendiri yang sukar dikendalikan. Maka, gerombolan-gerombolan prajurit tersebut, yang mungkin nanti dapat mendatangkan kemenangan bagi Sultan Ageng kalau tinggal di Banten, pun pergi menuju Jawa Timur pada tahun 1673–4.

Di antara orang-orang Makasar yang datang ke Banten itu terdapat seorang guru agama Islam yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia, Syekh Yusup Makasar (1626–99). Pada tahun 1644, ia meninggalkan tanah kelahirannya di Sulawesi Selatan dan melakukan perjalanan ke barat untuk menuntut ilmu agama. Di Aceh, ia masuk tarekat sufi Qadiriyyah. Ia melanjutkan perjalanan ke Yaman dan bergabung dengan tarekat Naqsyabandiyyah di sana. Ia belajar beberapa tahun di Mekah dan Madinah. Di antara guru-gurunya di sana adalah dua orang yang paling terkenal dari seluruh pengikut Naqsyabandiyyah, Muhammad 'Abd al-Baqi dan Ibrahim al-Kurani. Al-Kurani mengajarinya tarekat Syattariyyah. Di tanah Arab, Syekh Yusuf juga bergabung dengan tarekat Khalwatiyyah. Ketika kembali ke Indonesia pada tahun 1672 setelah bertahun-tahun belajar, Yusuf pergi ke Banten di bawah kekuasaan Sultan Ageng dan bukannya ke Sulawesi Selatan, yang saat itu sudah jatuh ke tangan VOC dan Arung Palakka. Di Banten, Syekh Yusuf memperkenalkan tarekatnya sendiri, Khalwatiyyah-Yusuf. Ketika teman-temannya dari Makasar menyingkir dari Banten pada tahun 1673–4, Syekh Yusup tetap tinggal di Banten dan memberikan dukungan yang berpengaruh kepada faksi Sultan Ageng. Pada tahun 1671, Sultan Ageng menarik diri ke sebuah tempat di luar kota, menuduh putranya bermaksud merebut seluruh kekuasaan.

Selama pemberontakan Trunajaya, Sultan Ageng menyatakan diri berpihak kepada kaum pemberontak, mengirim amunisi



Makam Syekh Yusuf Makasar (1626–99), Makasar, Sulawesi Selatan

kepada mereka, serta mengganggu kapal-kapal VOC dan wilayah-wilayah Batavia. Pada tahun 1678, dia menulis surat kepada Amangkurat II, menuduhnya sebagai bukan muslim maupun Kristen melainkan sesuatu di antara keduanya, dan bukan lagi seorang raja melainkan hanya orang biasa di bawah kekuasaan VOC. Ketika Mataram runtuh pada tahun 1677, pasukan-pasukan Sultan Ageng bergerak menuju ke daerah-daerah vasal Mataram di barat, yaitu Cirebon dan dataran-dataran tinggi Priangan. Mereka tampaknya sudah siap menyerang Batavia segera sesudah kemenangan Trunajaya dapat dipastikan. Dengan dikepungnya Batavia oleh pasukan-pasukan Banten dari arah barat, selatan, timur, dan juga dari laut, tentu saja VOC secepatnya memberitahukan kemenangannya di Kediri pada tahun 1678 kepada pihak Banten. Sultan Ageng pun tidak jadi bergerak.

Pada tahun 1680, dengan hampir berakhirnya peperangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sultan Ageng akhirnya mengumumkan perang ketika para pedagang Banten dianiaya oleh VOC. Apa yang mungkin terjadi apabila dia melakukan hal itu dua atau tiga tahun sebelumnya tidak dapat diduga. Tetapi yang pasti, pada tahun 1680, saat yang tepat untuk melakukan langkah semacam itu sudah lewat. Akan tetapi, sebelum perselisihan dapat dimulai, pada bulan Mei 1680, putra mahkota setempat meng-

ambil alih kekuasaan dan menawan Sultan Ageng di kediamannya. Akan tetapi, posisi pangeran ini lemah; dengan melancarkan kudeta istana, dia telah melukai sentimen-sentimen Islam yang kuat. Semakin dia berpaling kepada VOC untuk mendapatkan bantuan, semakin banyak pula dia kehilangan dukungan kaum muslim. Sementara itu, VOC hanya bersedia memberi bantuan berdasarkan syarat-syarat tertentu: bahwa para budak dan pembelot yang melarikan diri dari Batavia dikembalikan sekalipun mereka telah masuk Islam, bahwa para perompak dihukum dan VOC diberi ganti rugi, bahwa tuntutan Banten terhadap Cirebon ditarik kembali, bahwa keterlibatan dalam masalah-masalah Mataram dihentikan, dan, yang terpenting dari semua itu, bahwa orang-orang Eropa saingan VOC diusir dari pelabuhan Banten. Dengan kata lain, VOC berjanji akan membantu Putra Mahkota apabila dia mau melepaskan kebijakan luar negeri Banten yang bebas dan melepaskan basis kemakmurannya. Karena posisinya yang semakin sulit, maka akhirnya sang pangeran terpaksa menerima semua persyaratan itu.

Pada bulan Maret 1682, sebuah pasukan VOC yang dipimpin oleh François Tack dan Isaac de Saint-Martin berlayar menuju Banten. Pada saat itu, Putra Mahkota telah terkepung di dalam istananya. Para pendukung Sultan Ageng telah berhasil merebut kembali kota tersebut dan membakarnya. Pangeran tunduk sepenuhnya kepada VOC dan, oleh karenanya, VOC pun mengakuinya sebagai sultan. Belanda kini berperang di pihaknya. Orang-orang Eropa yang melakukan perdagangan di Banten diusir; orang-orang Inggris mengundurkan diri ke Bengkulu di Sumatera Selatan, satu-satunya pos permanen mereka yang masih ada di Indonesia. Artileri Belanda memaksa keluar Sultan Ageng dari tempat kediamannya dan, setelah dikejar sampai ke daerah-daerah pegunungan, maka pada bulan Maret 1683, dia pun menyerah. Untuk beberapa waktu lamanya dia ditahan di Banten, tetapi kemudian dipindahkan ke Batavia, tempat dia wafat pada tahun 1695. Syekh Yusup ditangkap pada tahun 1683 dan diasingkan ke Tanjung Harapan, tempat ia wafat enam belas tahun kemudian.

Cirebon dan dataran tinggi Priangan kini juga mulai berada di bawah pengaruh VOC. Mataram tidak mempunyai sarana-sarana untuk menguasai Priangan, dan bagaimanapun juga,

Amangkurat II telah menyerahkan wilayah ini kepada VOC pada bulan Oktober 1677. Dengan tumbangnya kekuasaan Banten, maka penguasaan VOC atas daerah ini menjadi mungkin. Amangkurat II masih tetap menginginkan Cirebon sebagai vasalnya, tetapi para pangeran yang berada di sana tidak merasa tertarik untuk setia kepada Mataram. Pada tahun 1680–1, mereka berada di bawah perlindungan VOC. Cirebon diduga tetap bersahabat dengan Mataram, tetapi sebetulnya VOC-lah kini sebagai kekuatan luar yang menentukan di Cirebon. VOC berhasil mendapatkan monopoli atas impor tekstil dan candu, keterbebasan dari cukai, dan monopoli atas pembelian lada di sana. Amangkurat II merasa tidak senang, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa atas terlepasnya Cirebon dari kekuasaannya.

Sekitar tahun 1682, musuh-musuh utama VOC di Jawa telah berhasil dihancurkan. Akan tetapi, seperti yang akan kita lihat pada bab berikutnya, segera menjadi jelas bahwa campur tangan VOC di Kerajaan Mataram yang luas lebih banyak memperburuk permasalahan daripada memecahkannya.[]

Bab 9 ....

Jawa, Madura, dan VOC, ± 1680–1754

NASIB VOC dan penduduk Jawa kini saling jalin-menjalin. Bagi VOC, kejadian-kejadian di Jawa merupakan masalah penting karena mereka telah menginvestasikan tenaga dan dana bagi pemulihan dinasti Mataram, sehingga kini ingin memperoleh keuntungan dari investasi itu. Bagi pihak Jawa, ada prioritas-prioritas lain yang harus dipikirkan, namun tidak mungkin lagi terjadi satu pun perubahan besar tanpa adanya kemungkinan VOC terlibat. Keterlibatan orang-orang Madura dalam kejadian-kejadian di Jawa yang telah mengundang campur tangan VOC pun masih terus berlanjut. Hingga pertengahan abad XVIII, keterikatan urusan-urusan Belanda, Madura, dan Jawa ini mengakibatkan timbulnya berbagai malapetaka.

Pada awal masa pemerintahannya, Susuhunan Amangkurat II (m. 1677–1703) tampak benar-benar merupakan ciptaan VOC. Bahkan pada tahun 1680 tersebar desas-desus di tengah rakyat Jawa bahwa Amangkurat II sesungguhnya bukanlah putra mahkota yang dulu, melainkan putra Speelman yang menyamar. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tahun 1677–8, VOC memang tampak berada pada kedudukan yang sangat kuat. Akan tetapi, perjanjian-perjanjian tersebut hanyalah baik sepanjang Raja bersedia memenuhinya. Dengan ditumpasnya berbagai pemberontakan kecil pada awal tahun 1680-an dan pulihnya kembali Jawa Tengah menjadi suatu wilayah yang relatif tenang, maka Amangkurat II mulai merasa aman. Ketika kebutuhannya akan persenjataan VOC berkurang, maka hilang pulalah rasa hormatnya kepada VOC.

Hubungan Raja dengan VOC segera memburuk. Pembayaran-pembayaran yang seharusnya dilakukan untuk mengganti pengeluaran militer VOC tidak diberikan; pengiriman beras, kayu, dan gula diganggu; ganti rugi untuk garnisun VOC yang ditempatkan di istana tidak dibayarkan; Semarang tidak diserahkan kepada VOC karena terus timbul persoalan mengenai batas-batasnya, dan markas besar VOC di kawasan pesisir pun tetap berada di Jepara. VOC tidak lagi menambahkan beban bunga pada utang Raja tersebut sejak tahun 1682 dengan harapan langkah ini akan mendorong Raja untuk melunasi sebagian utangnya. Akan tetapi, utang tersebut sudah mencapai jumlah 1.540.000 *real,* diduga lima kali jumlah kekayaan yang dimiliki Mataram ketika Trunajaya merebutnya pada tahun 1677. Monopoli VOC atas impor candu dan tekstil ternyata juga tidak ada artinya, karena rakyat Jawa menjadi sedemikian miskinnya setelah bertahun-tahun mengalami kelaliman dan perang sehingga mereka tidak mampu membelinya. Memang, di saat gudang-gudang VOC penuh dengan barang-barang yang tidak laku dijual, ada tanda-tanda bahwa industri tekstil pribumi mengalami kebangkitan kembali. Sementara itu, kawasan pantai Jawa menjadi tidak aman karena adanya kegiatan para perompak yang tampaknya telah melibatkan beberapa pembesar Jawa. Raja sendiri memberi perlindungan kepada para pelarian Makasar dan Bali yang telah melarikan diri dari tugas atau perbudakan VOC.

VOC sendiri kini memasuki masa sulit yang panjang. Ketika Gubernur Jenderal Speelman meninggal pada tahun 1684, terbongkarlah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaannya. Konon dia memerintah tanpa menghiraukan nasihat Dewan Hindia, telah menahan lebih dari seratus orang yang, kecuali seorang, kini dinyatakan tidak bersalah, telah menjual orang-orang merdeka sebagai budak, telah mengesahkan pembayaran-pembayaran untuk serdadu-serdadu yang sebenarnya tidak ada dan untuk pekerjaan yang tidak dilakukan, dan telah membayar di bawah harga terhadap orang-orang Indonesia yang memasok lada. Selama masa kekuasaannya (1681–4), jumlah penjualan tekstil turun 90%, monopoli candu tidak efektif, dan para pedagang swasta dibiarkan melanggar monopoli VOC. Dia juga telah menggelapkan sejumlah besar dana. Pada tahun 1685, semua peninggalannya disita oleh VOC, tetapi diyakini bahwa lebih banyak harta kekayaan

telah diselundupkan ke negeri Belanda dalam bentuk batu permata. Lagi pula, dia sangat terkenal sebagai seorang yang tidak bermoral.

Personel VOC pada umumnya tidak mendapat kesempatan seperti yang telah dinikmati Speelman, tetapi sejauh mungkin mereka mencari peluang untuk menandingi gaya hidupnya. Hal ini sering kali berakhir dengan inefisiensi, kebejatan moral, korupsi, serta tindakan kekasaran dan kekejaman terhadap orang-orang Indonesia sehingga memperbesar perasaan benci mereka kepada VOC. Sebagai contoh, komandan garnisun VOC di Kartasura pada tahun 1682 melaporkan bahwa serdadu-serdadu VOC memperkosa wanita-wanita Jawa di dalam rumah mereka, dan bahwa para serdadu, baik yang berkebangsaan Indonesia maupun Eropa, menghisap candu dan minum tuak beras ketan yang tidak sehat. Dalam suatu perjanjian yang mengatur hubungan VOC–Banten pada Februari 1686, diwajibkan bagi Batavia untuk mengusahakan supaya pegawai-pegawai VOC di Banten tidak mengambil barang-barang dari para pedagang pasar dengan paksa sebelum harganya disepakati dan dibayar, tidak memasuki masjid-masjid tanpa izin atau bertindak secara tidak pantas di dalamnya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh kepada wanita-wanita Banten di dalam rumah mereka atau di jalan-jalan, dan tidak boleh memandang Sultan atau perempuan-perempuannya ketika mereka sedang mandi di sungai. Perbuatan semacam itu pada kenyataannya hampir tidak dapat diawasi dari Batavia.

Jadi, di balik masalah-masalah besar yang dibahas dalam bab ini, ada perkara-perkara kecil yang tak berkesudahan, masalah-masalah pribadi yang menyebabkan timbulnya rasa permusuhan terhadap VOC. Personel VOC juga hanya mempunyai sedikit alasan untuk berpikir bahwa mereka hidup di sebuah surga tropis. Seandainya mereka tidak terbunuh dalam suatu pertempuran yang kejam atau suatu percekcokan lokal, maka hampir pasti mereka akan mengalami kematian dini karena penyakit atau alkohol. Pada tahun 1620, Coen telah mengamati bahwa "bangsa kita harus minum atau mati"; kenyataannya, sangat banyak pegawai VOC mengalami keduanya. Karena sangat buruknya masa depan mereka, maka tidaklah mengherankan apabila sebagian besar dari mereka berusaha mencari pelarian pada kesenangan-kesenangan yang bersifat sekejap dan keserakahan yang maksimal.

Di istana Kartasura, perasaan anti-VOC terus tumbuh. Meskipun demikian, pihak keraton sangat berhati-hati agar tidak terjadi keretakan total, karena pengalaman telah memberi cukup bukti tentang kemampuan militer VOC. Tetapi, pada tahun 1684, mulai dipertimbangkan tindakan yang lebih keras ketika di sana datang seseorang yang kelak menjadi musuh yang paling dibenci VOC ketimbang musuh mana pun. Orang itu adalah Surapati, seorang budak Bali yang telah menetap di Batavia. Seperti kebanyakan budak lainnya, dia telah melarikan diri ke dataran tinggi di sebelah selatan Batavia dan menjadi pemimpin segerombolan perampok. Pada tahun 1683, secara tak terduga dia menyerah dan masuk dinas militer VOC. Dia kemudian membantu menangkap seorang putra Sultan Ageng dari Banten yang melarikan diri. Tetapi, pada Januari 1684, dia menyerang sebuah pasukan VOC, membunuh 20 dari 39 serdadu berkebangsaan Eropa, kemudian melarikan diri ke arah timur setelah terjadi serangan balasan VOC yang menimbulkan banyak korban di kalangan anak buahnya. Di Kartasura, kelompok anti-VOC yang dipimpin oleh Patih Anrangkusuma (1682–6) membujuk Raja agar melindungi Surapati dan gerombolannya yang berjumlah 80 orang. Mereka dihadiahi wanita dan tempat tinggal di dekat istana. Kelompok yang anti-VOC tersebut yakin, mereka telah menemukan orang yang mereka perlukan.

Pada tahun 1685, Batavia memutuskan bahwa guna memecahkan semua persoalan yang belum terselesaikan, perlu dikirim duta khusus ke istana. Kapten François Tack, juru selamat Sultan Haji dari Banten, dan orang yang telah menjual mahkota emas Majapahit kepada Amangkurat II pada tahun 1678, diangkat menjadi duta. Dia adalah orang Belanda yang paling dibenci Amangkurat II. Tack diperintahkan untuk menangani serentetan daftar keluhan. Dia harus mengatur masalah Cirebon sebagai vasal VOC, batas-batas Batavia, penyediaan kayu dan beras, dsb. Yang terpenting, dia diberi wewenang untuk merundingkan kembali utang Raja, bahkan kalau perlu menurunkannya sampai 16% dari jumlah yang diminta, agar Raja mau membayar. Dan dia harus menangkap Surapati, apa pun caranya. Pada November 1685, Tack meninggalkan Batavia; pada tanggal 4 Februari 1686, dia berangkat dari Semarang menuju Kartasura.

Menjelang hari kedatangan Tack di istana, Raja menghadapi suatu dilema. Dia tidak bersedia menyerahkan Surapati, tetapi

dia juga takut menunjukkan perlawanan terang-terangan kepada VOC. Karena itu, dilancarkanlah sebuah serangan tipuan oleh prajurit Raja terhadap tempat tinggal Surapati pada tanggal 8 Februari 1686. Saat itulah Tack tiba. Karena mengira pasukan Raja sedang sungguh-sungguh menyerang Surapati, dia pun ikut melakukan pengejaran. Kemudian dia mendengar tembakan meriam di belakangnya dan menyimpulkan bahwa Surapati telah kembali untuk menyerang pos VOC di istana. Tack bergegas kembali, tetapi di depan istana dia diserang oleh Surapati dan prajurit-prajurit Amangkurat II yang menyamar sebagai orang Bali. Tack tewas; konon terdapat 20 luka pada tubuhnya. Dalam pertempuran siang itu, 74 serdadu Belanda juga mengalami nasib serupa. Sumber-sumber berbahasa Jawa menyebutkan, pihak istana telah merencanakan serangan itu secara hati-hati. Malah disebutkan lebih lanjut bahwa Pangeran Puger-lah, yang keselamatannya menjadi perhatian khusus VOC, yang sebenarnya membunuh Tack. Sebanyak 248 serdadu berkebangsaan Eropa yang berhasil menyelamatkan diri bergerak mundur ke garnisun VOC. Di sana mereka tinggal sampai tanggal 20 Maret, ketika mereka diperbolehkan mundur ke Jepara tanpa gangguan. VOC tidak mempunyai garnisun lagi di istana.

Segera sesudah penyerangan tersebut, Surapati pergi ke Pasuruan di Jawa Timur, di mana Anrangkusuma kemudian menggabungkan diri. Di sana Surapati selanjutnya membentuk suatu daerah kekuasaan yang merdeka. Dia dan anak cucunya kemudian memerintah sebagian besar wilayah Jawa Timur di sebelah selatan Sungai Brantas selama lebih dari delapan dasawarsa. Dengan jalan bekerja sama dengan para raja Bali, Surapati bahkan juga mempunyai pengaruh yang besar di Ujung Timur. Dengan berkembangnya kekuasaan Surapati di kawasan Timur, maka menjadi jelas bahwa Amangkurat II telah mengorbankan sebagian kerajaannya untuk membalas dendam terhadap VOC. Pada tahun 1690, dia mengirim pasukan untuk menundukkan Surapati, tetapi gagal sama sekali. Pasukan Jawa tersebut tidak sanggup melawan Surapati yang menguasai teknik-teknik militer Eropa dengan baik. Akan tetapi, hubungan Surapati dengan istana tampaknya tidak pernah benar-benar terputus, karena beberapa pembesar keraton kelihatannya tetap menjalin hubungan dengannya.



Kapten Tack digambarkan dalam teater Jawa sebagai raksasa wayang, sedangkan Surapati sebagai pahlawan

Amangkurat II mengirim surat ke Batavia yang isinya menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dalam peristiwa penyerangan terhadap Tack dan VOC di Kartasura. Tak seorang Kompeni pun percaya kepadanya. Ternyata segera terbongkar bukti mengenai usaha-usaha yang dilakukan Raja untuk membentuk suatu persekutuan anti-VOC dengan siapa saja yang bersedia. Pada tahun 1686, VOC menemukan surat-surat yang ditulis sebelum terjadinya penyerangan itu, yang merupakan bukti adanya hubungan antara Susuhunan dengan seorang petualang Minangkabau, Raja Sakti (Ahmad Syah ibn Iskandar), yang mengancam Banten maupun VOC di Sumatera. Amangkurat II juga mengirim surat ke Cirebon pada tahun 1686 dan ke Siam pada tahun 1687, dan tampaknya telah terjalin pula hubungan dengan Johor serta Palembang. Kemudian disebutkan bahwa dia juga telah menghubungi Inggris untuk meminta bantuan sebelum terjadinya penyerangan tersebut. Dalam tahun-tahun 1686–9 tersebar desas-desus tentang akan meletusnya suatu pemberontakan besar-besaran menentang VOC di seluruh wilayah Nusantara. Pihak Belanda percaya bahwa musuh-musuh mereka itu berangkat dari sentimen Islam yang membenci segala sesuatu yang berbau asing,

tetapi kesediaan beberapa musuh mereka untuk meminta bantuan kepada pihak Inggris atau Siam dan terlibatnya gerombolan-gerombolan orang Bali di beberapa tempat membuktikan bahwa antagonisme tersebut ditujukan secara khusus kepada VOC, bukannya terhadap pihak nonmuslim secara umum.

Pada tahun 1689 terbongkar suatu komplotan yang membuat VOC ngeri. Sejak tahun 1665, pimpinan orang Ambon di Batavia adalah seorang muslim bernama Kapten Jonker. Dia telah bertempur di pihak VOC melawan orang-orang Portugis di Timor dan Sri Lanka, melawan orang-orang Makasar, orang-orang Banten di dekat Batavia, orang-orang Minang di Sumatera; di Jawa, dia bukan hanya bertempur melawan Trunajaya melainkan menawannya sendiri pada akhir tahun 1679. Pada Agustus 1689 diketahui bahwa Jonker telah bergabung dengan musuh-musuh VOC lainnya untuk merencanakan pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Eropa di Batavia. Diduga dia telah menjalin hubungan dengan Raja Sakti maupun Amangkurat II, dan kabarnya prajurit-prajurit, kuda, dan dana sedang dikirim dari Kartasura untuk membantunya. Dengan terbongkarnya komplotan itu, VOC berusaha menangkap Jonker. Tetapi Jonker mulai melakukan perampokan serta pembunuhan dan baru tertangkap dan dibunuh setelah dilakukan suatu pengejaran. Para pengikutnya kemudian melarikan diri ke Kartasura, di mana mereka memperoleh perlindungan. Kedudukan Jonker sebagai pemimpin orang-orang Ambon yang menjadi serdadu VOC digantikan oleh kemenakannya yang beragama Kristen, Zacharias Bintang (meninggal ± tahun 1730).

VOC maupun Amangkurat II sama-sama merasa takut. Dengan dihadapinya kesulitan-kesulitan di pelbagai medan, maka VOC tidak menginginkan meletusnya perang baru di Jawa Tengah. Lagi pula, dengan meningkatnya kesulitan keuangan, VOC tidak mampu membayar ongkosnya. Angkatan bersenjata VOC lemah. VOC masih tetap mempertahankan pos-pos perdagangannya di Jepara, Semarang, Surabaya, Rembang, Demak, dan Tegal dalam rangka mendapatkan hasil-hasil yang mungkin diperoleh, tetapi pada tahun 1702 jumlah keseluruhan kekuatan militer di pos-pos itu hanya 869 serdadu berkebangsaan Eropa. Administrasi VOC juga kacau balau. Pada tahun 1691 terjadi

perselisihan antara Gubernur Jenderal Willem van Outhoorn (1691–1704) dengan Dewan Hindia, khususnya dengan Direktur Jenderal Johan van Hoorn. Perselisihan ini baru selesai ketika Van Hoorn menikah dengan putri Van Outhoorn. Namun, *Heeren XVII* di Amsterdam mengkhawatirkan kemungkinan timbulnya akibat nepotisme sehingga, pada tahun 1701, mempensiunkan Van Outhoorn dan mengangkat Van Hoorn menjadi gubernur jenderal. Van Hoorn menolak, sehingga terjadi kekacauan selama lebih dari dua tahun. *Heeren XVII* tetap bersikukuh pada keputusannya dan memilih seorang direktur jenderal baru, sehingga pada waktu itu ada dua gubernur jenderal (yang satu tidak bersedia mengundurkan diri dan yang lain menolak untuk menduduki jabatannya) dan dua direktur jenderal. Akhirnya Van Hoorn mengalah; dia menjadi gubemur jenderal pada bulan Juli 1704 dan menduduki jabatan tersebut sampai 1709.

Bagi Amangkurat II, berperang melawan VOC tidak memiliki prospek menarik. Kerajaannya sedang mengalami perpecahan. Kekuasaan Surapati semakin bertambah besar di timur; pada tahun 1699, sudah mencapai Madiun. Jawa Timur di sebelah utara sungai Brantas jatuh ke pelukan penguasa kuat dari Madura Barat, Panembahan Cakraningrat II (m. 1680–1707), bersama dengan menantunya Angabei Jangrana I (w. 1693) dan putranya, Jangrarana II (m. 1693–1709). Istana Amangkurat II terpecah-belah ke dalam kelompok-kelompok: kelompok putra mahkota (kelak Amangkurat III) berhadapan dengan kelompok pendukung Pangeran Puger (kelak Pakubuwana I). Dalam usahanya mencari sekutu, tampaknya Putra Mahkota mempunyai hubungan erat dengan Surapati. Pada tahun 1702, Raja mengirim seorang utusan pada suatu pertemuan rahasia dengan VOC di Semarang. Dalam pertemuan itu diutarakan keadaan Raja yang sangat menyedihkan dan harapannya untuk rujuk kembali dengan pihak Belanda. Tetapi, VOC tidak mau mempercayainya.

Pada tahun 1703, Amangkurat II wafat dan digantikan oleh putranya, Amangkurat III (m. 1703–8; w. 1734). Perselisihan-perselisihan Amangkurat III dengan pamannya, Pangeran Puger, dan keluarganya menyebabkan Puger lari dari istana pada bulan Maret 1704. Dia pergi ke Semarang dan memberi tahu VOC bahwa Amangkurat III adalah musuh mereka bersama dan merupakan sekutu Surapati. Dia menyatakan bahwa kebanyakan

pembesar Jawa mendukung dirinya menjadi raja yang baru, dan meminta agar VOC bersedia mengakuinya sebagai raja. Pihak Belanda sangat dipengaruhi oleh Panembahan Cakraningrat II, yang mereka anggap sebagai sekutu yang dapat dipercaya. Dia menyokong pernyataan-pernyataan Puger dan meyakinkan pihak VOC bahwa Puger mendapat dukungan orang-orang Jawa.

Tidak jelas mengapa Cakraningrat II mendukung Puger yang kelak akan sangat dibencinya. Mungkin alasan utamanya adalah ancaman dari persekutuan Amangkurat III–Surapati terhadap rencana Cakraningrat II sendiri di Jawa Timur. Pada saat itu, Cakraningrat II diam-diam sedang memperluas kekuasaannya atas wilayah pesisir Jawa dari Surabaya di timur sampai Juwana dan Pati di kawasan pesisir utara bagian tengah, dan mungkin juga telah memperoleh kekuasaan atas pintu-pintu gerbang cukai di sepanjang Sungai Sala. Oleh karena itu, dia lebih suka bila penguasa di Kartasura adalah orang yang ia perkirakan lebih lemah dan lebih kecil kemungkinannya untuk mengacaukan rencana-rencananya. Agaknya dia juga mengharapkan kemungkinan meletusnya suatu perang baru di Jawa Tengah yang akan memberi peluang pertama kepada pihak Madura untuk melakukan campur tangan di sana sejak kekalahan yang dialami kemenakan Cakraningrat II, Trunajaya.

Pada Juni 1704, VOC mengakui Puger sebagai Susuhunan Pakubuwana I (1704–19), dan meletuslah konflik yang terkenal sebagai Perang Suksesi Jawa I (1704–8). Segera terbukti bahwa daerah-daerah pesisir, yang tadinya telah diklaim Pakubuwana I sebagai mendukungnya, hanya memberi sedikit perhatian pada dirinya. Beberapa di antaranya meminta supaya dijadikan daerah kekuasaan VOC, seperti halnya Cirebon, sehingga akan menghindarkan mereka dari konflik yang bakal terjadi dan beban di bawah pemerintahan dinasti Mataram. Inilah yang tidak dikehendaki oleh VOC. Perlawanan utama wilayah pesisir terhadap Pakubuwana I datang dari Demak yang berhasil ditaklukkan pada Oktober dan November 1704. Daerah-daerah pesisir kini bahu-membahu menyusun kekuatan, dan pada Agustus 1705 suatu kekuatan yang terdiri dari orang-orang Jawa dan Madura, bersama-sama dengan serdadu-serdadu VOC berkebangsaan Eropa, Bugis, Makasar, Bali, Melayu, Banda, Ambon, dan kaum *Mardijkers* (serdadu bayaran berkebangsaan Indonesia berbahasa

Portugis) bergerak menuju Kartasura. Pasukan utama Amangkurat III berbalik setelah Pakubuwana I dan sekutu-sekutunya mendekati Ungaran, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Amangkurat III kecuali melarikan diri dari Kartasura. Pada bulan September, Pakubuwana I memasuki Kartasura tanpa mendapatkan perlawanan, dan menduduki singgasana.

Amangkurat III lari ke arah timur dan bergabung dengan Surapati. Ia membawa serta semua tanda kebesaran (pusaka) kerajaan. Pada tahun 1706, 1707, dan 1708, pasukan-pasukan VOC, Madura, dan Kartasura melancarkan serangan besar-besaran di Jawa Timur. Timbul banyak korban akibat perang dan juga penyakit, dan perniagaan VOC serta keuangannya sangat terpengaruh. Pada tahun 1706, Surapati terbunuh di Bangil, tetapi selain ini serangan tersebut merupakan suatu kegagalan. Namun, pada tahun 1707, Pasuruan berhasil ditaklukkan, sedangkan Amangkurat III dan putra-putra Surapati melarikan diri ke Malang.

Perang Suksesi Jawa I adalah intervensi militer besar pertama oleh VOC di Jawa sejak perang melawan Trunajaya. Pasukan-pasukan yang dipimpin VOC dan Pakubuwana I itu cukup besar. Menurut satu sumber Eropa, pada tahun 1707, 46.000 orang berbaris dalam kampanye terbesar itu (sebanding dengan 52.000 pasukan yang dipimpin Duke of Marlborough pada pertempuran Blenheim pada tahun 1704). Kampanye tersebut merupakan upaya mahal yang harus dibayar dengan banyak nyawa, yang lebih banyak tewas karena penyakit ketimbang karena pertempuran militer.

Satu di antara ciri paling menonjol dari pertempuran ini adalah bukti bahwa inovasi dalam teknologi militer yang muncul dari peperangan di Eropa pada abad XVII dan diperkenalkan ke Jawa oleh VOC, dengan cepat diadopsi oleh orang-orang Jawa. Senjata *matchlock* (senjata yang serbuk mesiunya diletuskan dengan sumbu; pertama kali diperkenalkan oleh orang-orang Portugis) digantikan oleh *snaphaenen* (senjata yang memakai cetusan dari batu api untuk meletuskan serbuk mesiunya), kata Belanda yang berasal dari kata Jawa dan Indonesia 'senapan'. Begitu juga, sarung peluru kertas, mortir kecil, granat, dan (setelah pengenalan usai Perang Suksesi Jawa I) bayonet segara diadopsi oleh orang-orang Jawa. Artileri Jawa dan Eropa, perbentengan dan seni penyerbuan telah, dan tetap, mencapai tingkat teknologi yang bisa dibandingkan. Perbedaan budaya—yang kemungkinan ditingkat-

kan oleh proses familiarisasi yang terjadi antara Eropa dan Jawa dan menyebabkan tidak muncul keinginan lebih besar untuk saling meminjam elemen budaya satu sama lain—tidak menghalangi alih teknologi militer yang cepat kepada pihak Jawa. Dengan demikian, peperangan Jawa makin modern dan, konsekuensinya, memakan lebih banyak korban, baik nyawa maupun harta. Maka demikianlah Belanda dan Jawa, dua di antara bangsa-bangsa prajurit utama pada abad XVII di Eropa dan Asia, saling berbagi buah berdarah dari kemajuan teknologi kontemporer.

Pada tahun 1708, akhirnya Amangkurat III menyerahkan diri kepada VOC berdasarkan kesepakatan bahwa dia diperbolehkan memerintah sebagian Jawa dan tidak harus tunduk kepada Pakubuwana I. Akan tetapi, VOC lebih pandai berperang daripada menepati janji-janjinya. Amangkurat III ditawan dan dibuang ke Sri Lanka, tempat dia wafat pada tahun 1734. Kemudian berlangsunglah suatu usaha pencarian pusaka-pusaka yang hilang. Rupanya Amangkurat III entah telah membagi-bagikan pusaka-pusaka tersebut kepada para pengikutnya, menyembunyikannya di Jawa Timur, menyelundupkannya ke tempat pengasingan bersamanya, atau meleburnya. Beberapa pusaka berhasil dibawa kembali ke Jawa pada tahun 1737, yaitu ketika putra-putra Amangkurat III diperbolehkan pulang dari Sri Lanka. Tetapi diragukan apakah seluruh perangkat pusaka tersebut benar-benar pernah berhasil dikumpulkan kembali. Selama bertahun-tahun, berbagai tanda kebesaran kerajaan itu dilaporkan berada di tangan kaum pemberontak. Sampai akhir tahun 1762, seorang cicit laki-laki Amangkurat III bernama Raden Mas Guntur tampaknya masih mempunyai sebuah keris pusaka dari keraton.

Pada Oktober 1705, Pakubuwana I dan VOC mencapai suatu perjanjian baru. Pihak Belanda menghapuskan segala utang dinasti tersebut sebelum tahun 1705, sebagai imbalan atas konsesi-konsesi besar yang diberikan Pakubuwana I kepada VOC. Konsesi-konsesi yang penting ialah: (1) pengakuan ulang atas batas-batas Batavia, termasuk Priangan; (2) pengakuan bahwa Cirebon merupakan daerah di bawah naungan VOC; (3) diserahkannya separuh Madura bagian timur; (4) ditegaskannya kekuasaan VOC atas Semarang (tempat VOC akhirnya memindahkan markas besarnya di wilayah pesisir pada tahun 1708); (5) diberikannya hak membangun benteng-benteng di mana pun di Jawa; (6) diberikannya hak membeli beras sebanyak yang diinginkan; (7) di-

sahkannya monopoli atas impor candu dan tekstil; (8) 800 koyan (± 1.300 metrik ton) beras gratis per tahun selama 25 tahun; (9) ditempatkannya kembali satu garnisun VOC di istana atas biaya Raja; dan (10) larangan bagi orang-orang Jawa untuk berlayar lebih jauh dari Lombok ke arah timur, dari Kalimantan ke arah utara, atau dari Lampung (Sumatera Selatan) ke arah barat. Pada tahun 1709 dibuatlah perjanjian-perjanjian lebih lanjut mengenai penyerahan beras, kayu, nila, dan kopi (yang penanamannya telah diperkenalkan ke Jawa oleh VOC sejak tahun 1696). Tampaknya pihak VOC telah dapat mengamankan kekuasaannya di Jawa. Tampak jelas bahwa kebijakan Pakubuwana I ialah untuk menyetujui semua yang diminta VOC, dan kemudian memberitahukan kepada rakyatnya untuk membayarnya.

Akan tetapi, Jawa tidak dapat dieksploitasi dengan lembaran-lembaran kertas. Tampaknya, beban berat mengakibatkan terjadinya gerak perpindahan penduduk dari beberapa daerah; dengan pindahnya para petani, maka urusan penyerahan barang menjadi lebih sulit. Kawasan pesisir utara banyak kehilangan hutannya sehingga tidak dapat menyediakan kayu, kecuali dari tempat-tempat yang letaknya sangat jauh. Pakubuwana I benar-benar berusaha membayar utangnya, tetapi hal itu ada di luar kemampuannya. Selama tiga tahun pemerintahannya, keseluruhan jumlah yang ia bayarkan sebenarnya telah melampaui jumlah yang harus ia lunasi dalam waktu satu tahun, tetapi ia tidak pernah dapat menghapuskan tunggakan yang menumpuk pada tahun-tahun 1705–9. Sampai tahun 1718/1719, dia telah melunasi 69% dari seluruh utangnya, tetapi pembayarannya kemudian mulai tersendat-sendat lagi ketika kerajaannya terpecah-belah. Para pembesar daerah tentu saja tidak menyukai beban utang maupun sang raja yang menyuruh mereka agar membayarnya. Dengan memaksakan beban-beban yang berat terhadap Jawa, VOC hanya memperkecil peluang calonnya sendiri yang berada pada tahta Mataram untuk dapat memerintah dengan tenteram.

VOC menghadapi masalah-masalah keuangan yang sangat berat. Di antara 23 kantornya di Asia selama kurun waktu 1683–1710, hanya tiga (Jepang, Surat, dan Persia) yang biasanya memperlihatkan keuntungan. Sembilan menunjukkan kerugian setiap tahun, termasuk Ambon, Banda, Ternate, Makasar, Banten, Cirebon, dan wilayah pesisir Jawa. VOC kini mengelola suatu perusahaan yang hampir tidak dapat memberi keuntungan. Pengeluaran-pe-

pengeluaran yang sangat tinggi mendorong VOC menuntut semakin banyak kepada rakyat Jawa, yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan dan perlawanan lebih lanjut, sehingga menjadikan pengeluaran lebih tinggi lagi.

Berbagai persekongkolan dan rasa benci semakin berkembang di istana Kartasura dan di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 1709, atas permintaan VOC, Jangrana II dari Surabaya dibunuh di istana karena pengkhianatannya dalam perang tahun 1706. Tindakan ini memperbesar hasrat saudara-saudaranya, yang menggantikannya di Surabaya, untuk memisahkan diri. Pangeran Cakraningrat III (1707–18) dari Madura Barat mulai menyusun rencana untuk memperluas pengaruhnya. Pada tahun 1712, Cakraningrat III, dan tahun 1714 Jayapuspita dari Surabaya, tidak bersedia menghadap ke istana lagi. Tentu saja keturunan Surapati dan prajurit-prajurit Bali terlibat dalam persekongkolan tersebut dan persekongkolan-persekongkolan lain. Para pembesar daerah secara terang-terangan menunjukkan rasa tidak antusias kepada Raja, sedangkan para pangeran dan pejabat-pejabat tinggi di istana terpecah-belah ke dalam faksi-faksi. Sementara itu, komandan VOC di Kartasura sejak tahun 1715, Letnan Jochum Frederikse, terlalu sering mabuk sehingga dia tidak terpercaya lagi.

Pada tahun 1717, Surabaya memberontak dan mendatangkan prajurit-prajurit Bali untuk dijadikan sekutu. Dengan demikian, meletuslah perang yang kejam selama enam tahun. VOC berhasil menaklukkan kembali kota Surabaya pada tahun 1718, tetapi pasukan-pasukan pemberontak tidak dapat dihancurkan. Pada tahun 1718, Ponorogo, Madiun, Magetan, dan Jogorogo memberontak. Pada tahun yang sama, putra Raja, Pangeran Diponegoro, dikirim untuk menyerang kaum pemberontak, tetapi dia sendiri juga memberontak. Ia diakui sebagai raja oleh para pemberontak, yang kini mempunyai seorang anggota keluarga kerajaan Mataram untuk memimpin mereka. Ia menggunakan gelar raja itu, yang nantinya menjadi terkenal di tangan Dipanagara yang lain lagi, pemimpin besar pemberontakan di awal abad XIX (lihat bab 11). Ia menyebut dirinya Panembahan Erucakra, sebuah gelar yang dalam tradisi mesianik Jawa berkaitan dengan Ratu Adil. Sikap Cakraningrat III tidak jelas bagi VOC; dia tetap menyatakan kesetiaannya yang bisa disangsikan kepada VOC. Pada Januari 1718, dia naik ke sebuah kapal VOC,

di mana suatu kesalahpahaman telah menyebabkan perkelahian dan kematiannya. Pasukan Bali kemudian merampok Madura Barat, tetapi sesudah suatu penyerangan yang sulit, mereka dapat dipukul mundur oleh pasukan-pasukan yang terdiri atas orang-orang Madura dan Eropa pada tahun 1718 itu juga.

Di tengah runtuhnya bagian timur kerajaannya ini, Pakubuwana I wafat pada Februari 1719. Dia digantikan oleh putranya, Amangkurat IV (1719–26), yang pada awal masa pemerintahannya digambarkan oleh VOC sebagai penguasa yang ditinggalkan oleh seluruh rakyatnya dan mendapati hampir seluruh dunia Jawa memusuhinya. Pada Juni 1719, adik-adiknya, Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya, melancarkan serangan terhadap istana. Mereka didukung oleh seluruh pemimpin Islam di istana dan mendapat simpati terang-terangan dari ibu mereka (juga ibu Raja), Ratu Pakubuwana, yang memiliki pengaruh kuat di istana. Tetapi mereka dapat dipukul oleh tembakan meriam dari pasukan VOC yang mengawal istana. Maka, para pangeran yang memberontak itu lari ke Mataram bersama para pengikut mereka. Paman mereka, Pangeran Arya Mataram, tidak berperan serta dalam pemberontakan awal ini. Tetapi, dia juga tidak menyukai Amangkurat IV. Pada hari berikutnya, ia meninggalkan istana pula, menuju ke pesisir utara dan memproklamirkan dirinya di sana sebagai raja tandingan. Dengan demikian, dimulailah Perang Suksesi Jawa II (1719–23). Sekali lagi, hanya VOC-lah yang dapat menyelamatkan Raja.

Pada November 1719, VOC melakukan serangan dan berhasil menghalau tokoh-tokoh pemberontak itu dari kubu pertahanan mereka di Mataram. Pada tahun 1720, mereka melarikan diri ke arah timur menuju pusat daerah-daerah yang sudah memberontak, dan sekarang usaha terpenting VOC diarahkan ke daerah-daerah timur tersebut. Ketika VOC berhasil mencapai kemenangan demi kemenangan—seperti biasanya dengan korban sangat besar di semua pihak—maka beberapa pasukan yang memberontak di timur tersebut bersatu padu. Akan tetapi, karena jatuh banyak korban sebagai akibat penyakit dan perang, pemberontakan-pemberontakan itu mulai bercerai-berai. Sebelumnya, pada bulan Oktober 1719, Pangeran Arya Mataram sudah menyerah, dan lalu dicekik di Jepara. Dari kalangan keluarga Surabaya, Jangrana III wafat pada tahun 1718 dan Jayapuspita pada

tahun 1720. Pangeran Blitar wafat pada tahun 1721. Akhirnya, pada bulan Mei dan Juni 1723, sisa-sisa pemberontak menyerah, termasuk beberapa keturunan Surapati, Surengrana dari Surabaya, Pangeran Purbaya, serta Pangeran Dipanagara. Purbaya ditahan di Batavia, sedangkan yang lain dibuang ke Sri Lanka. Keluarga Surapati yang tersisa dan pasukan Bali masih tetap terlibat di Jawa bagian timur dan di Ujung Timur selama beberapa lama, tetapi pemberontakan-pemberontakan utama kini telah dapat dipatahkan. Biaya perang tersebut ditambahkan pada utang Raja kepada VOC.

Meskipun kaum pemberontak telah ditumpas, namun tahun-tahun terakhir pemerintahan Amangkurat IV masih jauh dari ketenteraman. Pangeran Cakraningrat IV (m. 1718–46, w. 1753) dari Madura Barat melawan kekuasaan Raja sebagaimana telah dilakukan para pendahulunya. Dia lebih ingin berada di bawah VOC daripada Kartasura, tetapi Raja maupun VOC tidak menyetujui hal itu. Kebencian pribadinya terhadap Raja turut memperkuat penolakannya untuk menghadap ke istana, karena dia merasa takut akan diracun. Dengan semakin meningkatnya persekongkolan-persekongkolan istana, maka VOC berpendapat bahwa tidak ada peluang yang baik untuk merundingkan kembali perjanjian-perjanjiannya dengan pihak keraton.

Bagi VOC, ini adalah masa frustrasi berkelanjutan, ketika makin jelas bahwa peran mereka dalam kemenangan Amangkurat IV tidak memberi keuntungan atau kekuasaan yang mereka cari. Orang-orang Jawa sekarang memiliki pemahaman yang canggih mengenai cara operasi VOC dan memanfaatkan pengetahuan itu dengan baik. Di bagian barat pantai utara Jawa, yang dianggap penting bagi VOC karena suplai beras dan kayu, bangsa Eropa menghadapi gubernur berdarah Cina-Jawa, Adipati Jayaningrat (w. 1726), yang, bersama tuan tanah lokal lainnya, menguasai pasar beras lokal dan memanipulasi harga sehingga merugikan VOC. Mereka juga mengacaukan akses cadangan kayu, yang sekarang mulai habis. Pada tahun 1724, timbul perselisihan yang melibatkan VOC, Jayaningrat, dan istana—yang sekarang lebih banyak dikuasai Patih Danureja (bertugas 1708–33, w. 1745)—mengenai koin mana yang diimpor oleh VOC yang akan digunakan dalam perdagangan legal di Jawa. Istana memutuskan mengakui seluruh koin tersebut, namun dengan nilai tukar baru antara kurs Belanda dan *real* Spanyol, unit perhitungan utama di kerajaan itu.

Hal ini menyebabkan devaluasi kurs VOC di Jawa sekitar 7% dan karenanya mengurangi utang kerajaan kepada VOC. VOC tidak mampu berbuat apa pun kecuali menerima nilai baru tersebut dengan protes.

Bulan Maret 1726, Raja jatuh sakit. Sebelum sempat memutuskan siapa di antara keluarganya dan para pembesar keraton yang meracuninya, dia wafat pada tanggal 20 April. Dia digantikan oleh putranya, Pakubuwana II (1726–49), yang pemerintahannya berbeda dari penguasa Jawa lain yang digambarkan dalam bab ini karena menjadi penyebab bencana yang malah lebih besar lagi.

Pakubuwana II baru berusia 16 tahun ketika diangkat menjadi raja. Dan, pada awal masa pemerintahannya, dia dikuasai oleh ibunya, Ratu Amangkurat, Patih Danureja, dan nenek suri yang sangat berpengaruh, Ratu Pakubuwana, yang juga seorang sufi saleh. Agaknya, pengaruh Ratu Pakubuwanalah yang menyebabkan raja baru ini berkeinginan mempromosikan nilai-nilai Islam. Hubungan dengan Cakraningrat IV telah pulih kembali dan dia dikawinkan dengan salah seorang saudara perempuan Raja. Sesudah itu, Cakraningrat IV dan ibu mertuanya, Ratu Amangkurat, tampaknya telah mencapai saling pengertian yang simpatik. VOC juga merasa gembira atas janji Pakubuwana II untuk melunasi utang kerajaan. Sumber-sumber statistik tidak lengkap, tetapi tampaknya Pakubuwana II menepati pembayaran beban utangnya menurut perjanjian-perjanjian lama. Sehingga pada tahun 1733, sisa tunggakan yang belum dibayar sebagian besar terdiri atas utang tahun 1705–9 yang tidak pernah dilunasi oleh Pakubuwana I, ditambah tunggakan selama tahun 1718–23. Meskipun demikian, kira-kira sepertiga biaya yang dikeluarkan VOC untuk mengantarkan Pakubuwana I ke atas singgasana dan pembiayaan sebuah garnisun di istana sejak waktu itu masih belum dibayar; juga VOC sama sekali belum menerima ganti rugi perang tahun 1717–23. Oleh karena itu, VOC ingin sekali mengadakan sebuah perjanjian baru guna mengatur pembayaran utang-utang Raja tersebut.

Meskipun pada awal pemerintahan Pakubuwana II tampak ada harapan, dengan cepat istana menjadi pusat intrik di antara orang-orang kuat yang melakukan manuver demi kekayaan dan pengaruh. Lagi-lagi hal itu melibatkan hubungannya dengan VOC, karena VOC merupakan jaminan militer yang terpenting bagi ke-

kuasaan dinasti itu tetapi juga pengisap terbesar kekayaan kerajaan. Kekuatan Danureja tumbuh dengan cepat. Saudara laki-laki Raja, Pangeran Arya Mangkunegara, yang dulu melakukan pemberontakan bersama pangeran-pangeran lain namun telah menyerah pada tahun 1723 dan diperbolehkan kembali ke Kartasura, menjadi populer dan berpengaruh. Dia dan Danureja saling membenci. Pada tahun 1728, Danureja merancang suatu jebakan terhadapnya. Dia dituduh mencoba menjalin hubungan gelap dengan salah seorang istri Raja. Raja pun meminta supaya VOC membuangnya. VOC tidak memercayai tuduhan-tuduhan tersebut, tetapi mereka takut Mangkunegara akan memberontak dan banyak pembesar akan bergabung dengannya. Oleh karena itu, VOC terpaksa mengirimnya ke pengasingan, mula-mula ke Batavia, lalu ke Sri Lanka, dan kemudian ke Tanjung Harapan. Banyak pembesar memandang diasingkannya Mangkunegara ini sebagai tanda bahwa kerajaan tengah berada di tangan seorang raja yang impulsif dan seorang patih yang berbahaya.

Kecurigaan pihak Belanda terhadap Danureja kini semakin bertambah besar. Tampak jelas bahwa dia bersikap tidak bersahabat terhadap VOC dan dicurigai telah menjalin hubungan dengan keturunan Surapati yang sangat dibenci VOC, yang masih bertahan di Jawa Timur. Para pembesar Jawa makin lama makin ingin melepaskan diri dari kekuasaan Danureja yang memberatkan. Cakraningrat IV tidak memercayai Danureja maupun Raja, dan sekali lagi menyatakan keinginannya untuk menjadi taklukan VOC.

Nenek Raja yang berpengaruh, Ratu Pakubuwana, sekarang mengambil langkah untuk membebaskan Raja dari pengaruh Patih, dan membuatnya sebagai raja sufi teladan. Ia beralih pada langkah supernatural untuk mengundang campur tangan Tuhan dan pengaruh Sultan Agung yang terus-menerus, raja terbaik dinasti ini dan simbol kesalehan Islam yang paling kuat. Buku-buku yang ditulis sehubungan dengan ziarah Sultan Agung ke Tembayat pada tahun 1633, sekarang, seabad kemudian, ditulis kembali atas perintah sang ratu. Pada tahun 1729–30, *Carita Sultan Iskandar, Serat Yusup,* dan *Kitab Usulbiyah* dikomposisikan ulang oleh juru tulis Ratu Pakubuwana. Pada pembukaan *Iskandar* dan *Yusup,* Ratu Pakubuwana digambarkan sebagai orang yang berpengetahuan luas, berpengaruh, dan diberkati Tuhan. Di situ ia juga berdoa semoga Pakubuwana II "dapat langgeng menjadi

raja, penguasa dunia, memiliki kekuasaan besar, kelimpahan dalam menjalankan pemerintahan; semoga ia dicintai Tuhan dan Rasulnya (Nabi Muhammad)." Kitab *Usulbiyah*-nya bahkan bertutur lebih eksplisit soal kekuatan supernatural yang ia jalankan dalam kitab-kitab ini. Tertulis di dalamnya bahwa ia menciptakan kitab ini karena "upayanya menyempurnakan pemerintahan cucunya; karena mataharinya, sesungguhnya, bertengger di puncak-puncak gunung, serta karena ia telah lanjut usia dan mendekati kesempurnaan." *Usulbiyah* sendiri secara eksplisit disetarakan dengan Alquran. Ia disebut-sebut berisi firman Tuhan dan mampu menjamin kekebalan serta kejayaan dalam Perang Suci. Membaca kitab ini sama dengan pergi haji ribuan kali atau membaca Alquran ribuan kali; mereka yang memelihara kitab ini akan dijaga oleh 7.700 malaikat dan dilindungi dari sihir. Seorang kafir yang memilikinya akan menjadi muslim, orang bodoh yang membacanya akan menjadi seorang ahli dalam ilmu kesempurnaan (suluk)

Satu di antara karya-karya Ratu Pakubuwana yang paling berharga adalah sebuah teks pendek yang ditulis pada tahun 1730 yang disebut *Suluk Garwa Kancana* (kira-kira berarti "Tembang Rumah Emas"). Suluk ini, agaknya, dianggap sebagai karya Sultan Agung sendiri dan bercerita tentang filsafat kerajaan Jawa yang terinspirasi oleh mistisisme sufi. Sang Raja diperingatkan agar berpaling dari kesenangan duniawi dan puja-puji di istananya. "Biarkan perjuangan tanpa henti menjadi benteng-bentengmu, ingatan yang agung (terhadap Tuhan) menjadi senjatamu, iman yang teguh terhadap Tuhan menjadi wahanamu." Raja berangkat perang dengan bersenjatakan mistisisme: kesalehan, zikir dan Alquran menjadi senjatanya. Maka, ia akan menerima jubah baru, dengan hakikat sebagai mahkotanya, tarekat sebagai puncak mahkotanya, dan *sarengat* (syariat) sebagai kainnya.

Ratu Pakubuwana dan para bangsawan berpengaruh yang mendukungnya mewakili gerakan islamisasi terkuat di istana Jawa sejak masa Sultan Agung. Mereka ternyata amat berhasil. Pakubuwana II terus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesalehan dan moralitas Islam. Lawan terkemuka bagi faksi Islam ini tampaknya adalah Patih Danureja.

Pada tahun 1732, Pakubuwana II mulai berbalik melawan patihnya. Pada tahun 1733, dia mengumumkan akan mengambil alih tanggung jawab atas urusan-urusan kenegaraan dan meminta VOC membuang Danureja, yang dilakukan VOC dengan senang

hati. Raja kemudian menenangkan Cakraningrat IV dan membebaskan dia dari kewajiban menghadap ke istana. Akhirnya, perbaikan perjanjian dengan VOC juga dilakukan. Setelah melalui perundingan-perundingan yang panjang, Raja berjanji membayar 10.000 real setiap tahun selama 22 tahun untuk menutup tunggakan dan bunganya, 15.600 real setiap tahun untuk membiayai garnisun VOC di Kartasura, dan 1.000 koyan (± 1.700 metrik ton) beras setiap tahun selama 50 tahun. Penyerahan beras tersebut adalah 1,15 kali dari penyerahan tertinggi yang pernah dilakukan oleh pihak keraton sebelumnya, sedangkan pembayaran tunainya adalah 1,52 kali dari pembayaran terbaik sebelumnya. Yang betul-betul luar biasa ialah bahwa Pakubuwana II tetap melakukan pembayaran-pembayaran tersebut sampai hubungan dengan VOC terputus pada tahun 1741.

Sulit untuk memperkirakan pengaruh tingkat pembayaran ini terhadap masyarakat Jawa secara umum. Ketiadaan informasi yang dapat diandalkan, baik tentang populasi Jawa di masa ini maupun mengenai mekanisme-mekanisme apa yang dilakukan untuk membagi rata beban-beban tersebut, membuat orang hanya dapat melakukan perkiraan kasar. Tapi rupanya kita boleh memperkirakan bahwa beban rata-rata setiap keluarga petani tidaklah berlebihan: sekitar 16 kilogram beras per tahun atau setara dengan harga satu ekor sapi setiap lima tahun. Tidak diragukan lagi bahwa bagi sebagian orang Jawa, kehadiran VOC mendatangkan peluang komersil yang menggembirakan. Namun demikian, jelaslah bahwa banyak orang Jawa membenci tindakan dan campur tangan agen-agen VOC, yang kebanyakan adalah etnis Cina, yang berkeliling ke pelosok negeri untuk mencari produk-produk pertanian. Hubungan orang Jawa dengan orang Cina cukup rumit. Sementara sebagian orang Cina jelas dianggap asing oleh masyarakat Jawa dan menerima sikap bermusuhan dari orang-orang Jawa, sebagian lain memiliki akar lokal, memeluk Islam, menggunakan nama-nama Jawa atau Melayu, kawin campur dan bahkan menjadi pejabat tinggi di kerajaan. Seperti yang akan kita lihat di bawah ini, pada tahun 1740-an, banyak orang Jawa siap bersekutu dengan pemberontak Cina yang melawan VOC, karena menganggap orang-orang Kristen Eropa lebih asing daripada Cina. Bagaimanapun, pada tahun 1733, orang-orang Eropa mengira bahwa mereka akhirnya memiliki hubungan stabil dengan

negara Jawa. Mereka hampir tidak menduga bahwa proses islamisasi di istana—yang tidak terlalu mereka perhatikan—akan memiliki pengaruh atas diri mereka. Mereka mempertahankan pos garnisun mereka di Kartasura, tapi mereka menarik detasemen itu dari Siti Inggil di depan istana, yang telah mereka kuasai sebelumnya.

VOC mendapati sejumlah urusan mereka terjebak dalam intrik-intrik para elite Jawa yang rumit, yang gelap bagi orang-orang Eropa. Sekarang, setelah wafatnya Ratu Pakubuwana, kesalehan Raja jelas didukung oleh adik iparnya, Pangeran Purbaya, dan patih yang baru, Raden Adipati Natakusuma (bertugas 1733–42), yang oleh Belanda digambarkan sebagai orang yang saleh lagi bodoh. Pada tahun 1735, VOC mengumumkan revaluasi unilateral atas koin utamanya sekitar 25%, sebagai balasan atas devaluasi unilateral Jawa terhadap kurs Belanda pada tahun 1724. Para abdi Belanda dibayar dengan kurs baru (yaitu, 25% lebih sedikit), tapi negara Jawa dan masyarakatnya menolak mengakui kurs itu. Maka, para abdi Belanda itu menderita kerugian sebanyak 25% reduksi dalam daya beli, sementara VOC sendiri tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah kebijakan Jawa dalam hal ini. Setelah setahun, Pakubuwana II mengumumkan bahwa rakyatnya bebas menerima valuta baru tapi dengan berbagai pengecualian (terutama, mengenai nilai pajak yang harus mereka bayarkan kepada penguasa Jawa mereka), sehingga tentu saja rakyat tetap menolak. VOC menyalahkan Purbaya atas berbagai masalah di Kartasura. Pandangan ini muncul akibat laporan para bangsawan anti-Purbaya yang menuduh dia atas berbagai penyalahgunaan. VOC juga menganggap Patih Natakusuma sebagai pemimpin kunci konspirasi anti-VOC. Pada tahun 1737, Pakubuwana II mengangkat Purbaya menjadi patih kedua, berdampingan dengan Natakusuma.

Pengaruh Pangeran Purbaya terhadap Raja berakhir ketika saudara perempuannya, istri Pakubuwana II, wafat setelah melahirkan bayi yang telah mati, pada tahun 1738. VOC ingin lepas darinya. Tanpa dukungan saudara perempuannya dalam majelis kerajaan, ditambah dengan musuh-musuhnya yang kuat dari kalangan para elite Jawa dan posisinya sebagai sasaran berbagai kritik dari orang-orang Eropa, Purbaya diserahkan oleh Raja kepada VOC, yang dengan senang hati membuang dia ke Sri Lanka

pada November 1738. VOC juga menginginkan agar Natakusuma dibuang, tapi Raja ingin mempertahankannya. Sejak saat itu, kebencian Raja terhadap VOC tampaknya makin tumbuh. Ia sekarang harus sendirian, tanpa neneknya, Ratu Pakubuwana, atau Purbaya yang memandunya. Kemungkinan, pada masa inilah Pakubuwana II menulis kitab pengajaran *Serat Wulang Pakubuwana II*. Kitab ini menekankan doktrin-doktrin mistik Islam, mengutuk praktik-praktik seperti menghisap opium, dan mendorong kehidupan yang saleh dan bermoral.

Ketika istananya di Kartasura terpecah menjadi beberapa faksi, kerajaan Pakubuwana II di perbatasan sebelah timur mulai runtuh. Pada tahun 1738, Cakraningrat IV menolak menghadap ke istana meski Raja telah memerintahkannya, dan bahkan untuk beberapa waktu ia menolak mengirimkan istrinya (saudara perempuan Raja) atau putranya sebagai wakil. Kekuasaan Cakraningrat IV di Jawa Timur makin besar dan mengancam kekuasaan Bali di Ujung Timur; lagi-lagi ia berkeras melepaskan kesetiaannya kepada Kartasura dan minta dijadikan vasal VOC. Tampaknya Ratu Amangkurat mendukung niatnya, tapi VOC menolak memberikan kendali atas lebih banyak wilayah di kawasan pesisir timur laut kepada dia atau putranya. Pakubuwana II menghadapi dilema yang amat rumit. Ia diharapkan dapat menjadi teladan raja sufi, memimpin rakyatnya dalam kesalehan dan mistisisme, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi dunia nyata yang ia hadapi penuh dengan masalah, dan kesalehan yang ia miliki tidak—atau, paling tidak, belum—memberi solusi. Ia amat bergantung pada VOC dan banyak berutang, tapi tidak ingin dipersalahkan karena membebani rakyat dan mengundang campur tangan VOC urusan Jawa akibat ketergantungan ini. Ia tidak ingin pula menyinggung perasaan VOC yang kafir itu. Dilema ini bisa menjelaskan inkonsistensi dan kebimbangan yang menjadi ciri sepanjang masa pemerintahannya.

Markas VOC di Batavia sekarang mendapat reputasi buruk sebagai sumber wabah mematikan yang terus dipertahankan hingga abad XIX. Kolam-kolam ikan yang dibangun sepanjang pesisir Batavia merupakan tempat berkembang biak yang ideal bagi nyamuk-nyamuk anopheles. Sejak 1733, kota ini menyebarkan wabah malaria yang mematikan. Antara 1733 dan 1795, sekitar 85.000 serdadu dan pejabat VOC di Batavia mati karena wabah ini dan



Gedung balai kota Batavia, dibangun pada 1710, sekarang dipugar di tempat lama di Jakarta modern

sebab-sebab serupa. Pada tahun 1734, diumumkanlah satu hari pembacaan doa dan puasa untuk memohon kepada Tuhan agar melenyapkan wabah tersebut dari kota ini. Permohonan penduduk Batavia, yang sering dianggap sebagai gembel bermoral bejat dan tidak beriman, ini tidak mengubah keadaan. Penyakit terus merajalela dan mengakibatkan meninggalnya Gubernur Jendral Dirk van Cloon (1732–5). Pejabat tinggi VOC terpecah akibat konflik dan banyak berselisih, kecuali untuk satu hal: VOC beruntung tidak dihadapkan pada perang lain di Jawa karena mereka tidak siap. Dewan Hindia tidak bisa bersepakat tentang siapa yang harus menggantikan Van Cloon, sehingga terpaksa dilakukan undian. Undian itu dimenangkan oleh Abraham Patras (satu-satunya orang Prancis yang menjabat Gubernur Jenderal) yang tua renta. Sebelum *Heeren XVII* mengabulkan permintaannya agar dibebaskan dari tugas itu, Abraham sudah wafat pada tahun 1737. Sementara itu, pembukuan VOC untuk Banten dan pesisir Jawa terus menunjukkan kerugian besar. Nilai ekspor kecil dan perhitungan-perhitungan pasarnya keliru. Pada tahun 1738, misalnya, gula yang dikirim ke Belanda terlalu banyak, sementara kopinya terlalu sedikit. Sehingga, Gubernur Jenderal dan Direktur Jenderal diperintahkan menutup semua kerugian itu dari kocek mereka sendiri.

Krisis-krisis yang semakin memuncak di istana Kartasura, di daerah-daerah di luar kerajaan, di dalam tubuh VOC pada umumnya, dan di kota Batavia itu akhirnya menyatu pada tahun 1740. Katalisatornya adalah kehadiran sejumlah besar orang Cina di Batavia. Orang-orang Cina sudah ada di Indonesia sebagai pedagang selama berabad-abad dan, sejak tahun 1619, mereka sudah menjadi bagian penting dari perekonomian Batavia. Di sana mereka aktif sebagai pedagang, tukang yang terampil, penggiling tebu, dan pengusaha toko. Pada tahun 1740 terdapat 2.500 rumah orang Cina di dalam tembok Batavia, sedangkan keseluruhan jumlah orang Cina di kota itu dan daerah-daerah sekitarnya ditaksir tidak kurang dari 15.000 jiwa. Jumlah ini setidak-tidaknya merupakan 17% dari total jumlah penduduk di tempat itu. Ada kemungkinan bahwa populasi orang Cina sebenarnya lebih besar, karena menurut sensus yang diadakan pada tahun 1778, sekitar 26% dari jumlah penduduk daerah di luar tembok kota itu adalah orang Cina, dan pada periode pemerintahan Inggris (1811–6), kira-kira 24% dari populasi di dalam kota dan daerah-daerah pinggiran adalah orang Cina. Pada tahun 1740, ada pula orang-orang Cina di kota-kota pelabuhan Jawa dan di Kartasura, walaupun jumlah mereka hanya sedikit.

Heeren XVII di Amsterdam mengagumi industri orang-orang Cina, tetapi penduduk lokal Batavia tidak menyukai dan mencurigai mereka. Perkembangan lain ikut meningkatkan rasa tidak aman orang Eropa di Batavia. Pada Desember 1721, VOC mengetahui apa yang diduga sebagai komplotan orang-orang Islam yang bermaksud melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Eropa di Batavia, dengan dukungan dari Banten, Cirebon, Bali, Balambangan, dan Kartasura. Menurut dugaan, pemimpin kelompok itu adalah seorang *mestizo* Batavia yang kaya bernama Pieter Erbervelt. Sebanyak 49 orang, termasuk tiga perempuan, dihukum mati oleh VOC secara kejam. Perlakuan VOC dan penduduk lokal terhadap orang-orang Cina di Batavia sejak tahun 1722 juga bertambah kejam dan korup. Meskipun demikian, jumlah mereka bertambah pesat. VOC menjalankan sistem kuota untuk membatasi imigran, tetapi kapten kapal-kapal Cina mampu menghindarinya, sering kali atas bantuan para pejabat VOC yang korup. Kebanyakan Cina pendatang itu tidak dapat memperoleh pekerjaan, dan sebagian besar dari mereka bergabung dengan gerombolan-gerombolan penjahat di sekitar Batavia.



Rumah-rumah tua di bekas wilayah Cina di Batavia, sekarang merupakan bagian dari ibu kota Jakarta modern

Perasaan saling curiga menyebabkan meletusnya tindak kekerasan pada bulan Oktober 1740. Berdasarkan bukti-bukti yang berhasil diperoleh, VOC menyimpulkan bahwa orang-orang Cina sedang merencanakan pemberontakan. Pihak Cina merasa yakin, VOC akan mengirim kelebihan orang Cina ke luar Batavia dan membuang mereka ke laut segera sesudah mereka melewati ufuk. Pada tanggal 7 Oktober, gerombolan-gerombolan Cina yang berada di luar kota menyerang dan membunuh beberapa orang Eropa. VOC khawatir, orang-orang Cina yang berada di dalam kota akan bergabung dengan pihak penyerang tersebut, sehingga diberlakukanlah jam malam dan penggeledahan terhadap rumah-rumah orang Cina untuk mencari senjata. Apa yang sebenarnya terjadi sesudah itu tidak jelas, dan kelak hal itu akan menjadi bahan perdebatan yang hangat. Tampaknya Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier (1737–41) mengisyaratkan bahwa pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Cina bukanlah tidak disetujui. Penggeledahan atas rumah-rumah orang Cina segera tidak terkendalikan lagi. Tembakan-tembakan dilepaskan, dan pada tanggal 9 Oktober dimulailah pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Cina. Orang-orang Eropa dan para budaklah yang

paling banyak melakukan pembunuhan. Akhirnya ada sekitar 10.000 orang Cina yang tewas. Perkampungan orang Cina dibakar selama beberapa hari, dan perampokan baru berhenti setelah VOC sendiri memberi uang premi kepada serdadu-serdadu VOC supaya bersedia kembali menjalankan tugas rutinnya. Pembantaian ini menimbulkan reaksi yang penting di dalam tubuh VOC seperti yang akan terlihat di bawah ini. Kejadian tersebut juga mempunyai arti yang sangat penting di Jawa karena merupakan awal dari rentetan terakhir peperangan abad XVIII.

Peperangan yang sekarang meletus di Jawa akan berlangsung terus, hampir tanpa henti, selama 17 tahun. Orang-orang Cina yang berhasil lolos dari pembantaian di Batavia melarikan diri ke timur, menyusur sepanjang daerah pesisir dan bergabung dengan warga sebangsanya yang telah memulai permusuhan di sana. Mereka merebut pos VOC di Juwana pada Mei 1741. Markas besar VOC untuk wilayah pesisir di Semarang dikepung dan pos-pos lainnya terancam. Pos di Demak ditinggalkan oleh VOC pada Mei 1741. Pada bulan Juni, VOC berusaha mengosongkan posnya di Rembang, tetapi usaha itu gagal sama sekali dan, pada bulan Juli, personel VOC di sana dibantai. Orang-orang Belanda di Semarang mengalami perpecahan di kalangan mereka sendiri serta kekurangan tenaga serdadu dan perbekalan militer. Mereka memberi tahu Batavia bahwa mereka hanya mempunyai sedikit peluang untuk bertahan, tetapi pada akhirnya mereka mampu menang juga.

Pakubuwana II kini menghadapi suatu keputusan yang paling sulit selama masa pemerintahannya. Menurut sebuah sumber berbahasa Jawa, istananya terbagi dalam dua kelompok utama. Kelompok yang satu, dipimpin oleh Patih Natakusuma, memilih melawan VOC dengan jalan bergabung dengan orang-orang Cina. Kelompok lain, yang dipimpin oleh para penguasa daerah pesisir yang kuat, mempunyai pertimbangan bahwa VOC akan menang pada akhirnya; oleh karenanya, Raja harus menunggu sampai keadaan VOC menjadi semakin sulit, dan baru sesudah itu menawarkan bantuannya dengan imbalan peninjauan kembali hubungan VOC–Jawa secara menyeluruh, pembebasan dari pembayaran-pembayaran, garnisun-garnisun, dan sebagainya. Ditinjau dengan pengetahuan kita sekarang, pendapat para penguasa daerah pesisir ini mungkin merupakan suatu perhitungan yang tepat mengenai

cara memperoleh peluang emas. Akan tetapi, seperti biasa, Pakubuwana II mengambil pilihan yang salah dan menetapkan untuk memutuskan hubungan dengan VOC. Dia mengirim pasukan dan artileri ke Semarang seolah-olah akan membantu VOC, namun sebenarnya prajurit-prajurit itu bergabung dengan orang-orang Cina yang sedang mengadakan pengepungan. Pada November 1741, pos VOC di Semarang dikepung oleh kira-kira 20.000 orang Jawa dan 3.500 orang Cina dengan 30 pucuk meriam. Cakraningrat IV kini merasa yakin bahwa Pakubuwana II sedang menuju bencana. Ia, karena itu, memandang persekutuannya dengan VOC sekarang lebih penting lagi daripada sebelumnya.

Pihak VOC sudah menduga bahwa Pakubuwana II telah hampir memutuskan hubungannya. Semua keraguan selama ini lenyap pada Juli 1741, ketika para prajurit Raja di Kartasura menyerang pos garnisun VOC di sana. Pada serangan awal, Komandan VOC, Kapten Johannes van Velsen, dan beberapa serdadu lainnya luka-luka dan sekitar 35 orang Eropa tewas. Pasukan Jawa dipukul mundur dan kemudian mengepung benteng VOC tersebut selama tiga minggu. Mereka memaklumkan kepada orang-orang Eropa bahwa bila mereka mau masuk Islam, mereka akan selamat. Awalnya tak ada yang menyambut seruan itu. Ketika garnison tersebut akhirnya menyerah pada bulan Agustus, mereka ditawari pilihan, beralih ke agama Islam atau mati, dan banyak yang memilih berganti agama. Sejumlah pejabat berkebangsaan Eropa diwajibkan menjalankan ajaran Islam. Van Velsen dibunuh dan benteng VOC di Kartasura dihancurkan. Pakubuwana II telah dengan tegas menyatakan dirinya sebagai musuh orang-orang Eropa, raja-mistik-penakluk Perang Suci

Dalam keadaan putus asa inilah VOC berpaling kepada satu-satunya kekuatan militer besar yang menawarkan diri menjadi sekutu: Cakraningrat IV dan laskar Maduranya. Cakraningrat IV mengatakan akan membantu VOC apabila dirinya disetujui lepas dari Kartasura dan memerintah secara merdeka di bawah perlindungan VOC, serta diperbolehkan leluasa bergerak di Jawa Timur. Pada bulan Juni–Juli 1741, VOC dengan resmi menerima tawaran bantuannya, tetapi menangguhkan semua janji yang berkenaan dengan Jawa Timur. Akan tetapi, Cakraningrat IV terus meningkatkan usahanya untuk menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Sementara itu, pasukan-pasukan bala bantuan telah tiba di Semarang, sehingga jumlah tentara di benteng VOC pada bulan

November lebih dari 3.400 orang. VOC kini berbalik melancarkan serangan. Mereka berhasil memukul mundur dari Semarang pihak penyerang dan membunuh semua orang Cina yang berada di daerah itu. Pada akhir 1741 dan awal 1742, VOC merebut kembali daerah-daerah lain yang terancam serangan, sementara Cakraningrat IV meneruskan operasi pembersihan di seluruh wilayah Jawa Timur.

Pakubuwana II sekarang baru menyadari betapa buruk kesalahan yang telah diperbuatnya. Sekutunya, orang-orang Cina, kalah perang, banyak pembesar Jawa tidak tertarik pada kebijakannya, dan bagian timur kerajaannya dengan cepat jatuh ke tangan Cakraningrat IV. Dia dan ibunya, Ratu Amangkurat, kini menghubungi VOC dan memohon pengampunan. Tentu saja, walaupun merasa sangat curiga, VOC tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan jawaban yang agak menyenangkan. Sekelompok kecil pasukan Belanda yang terdiri atas tujuh orang serdadu di bawah pimpinan Kapten Johan Andries Baron van Hohendorff menempuh perjalanan yang berbahaya menuju istana pada Maret 1742, dan memulai serentetan perundingan. Pada pertengahan Juni 1742, Raja mengutus patihnya, Natakusuma, ke Semarang; VOC, dengan persetujuan Raja, menawannya di sana dan mengirimkannya ke pengasingan. Dengan demikian, tokoh utama terakhir di istana yang dihubungkan dengan model raja Islam yang saleh telah disingkirkan.

Raja kini telah menjauhkan diri dari perang anti-VOC. Akan tetapi, perang ini mempunyai akar-akar yang sangat dalam. Beribu-ribu orang Jawa yang telah bergabung dengan orang-orang Cina bukan hanya didorong oleh perasaan benci terhadap VOC semata, tetapi juga karena perasaan curiga mereka terhadap Raja. Kecurigaan tersebut sekarang diperkuat dengan terjadinya kembali persahabatan, meskipun belum begitu erat, antara Pakubuwana II dan pihak Belanda. Tidak mengherankan jika pemberontakan kini bertambah kuat. Pada awal 1742, kaum pemberontak mengangkat susuhunan baru, seorang cucu laki-laki Amangkurat III, yang dibuang VOC, dan baru berusia dua belas tahun, bernama Raden Mas Garendi (Sunan Kuning). Selain bersifat anti-VOC, perang tersebut sekarang bersifat anti-Pakubuwana II juga, dan kekuatan utamanya sekarang ini lebih banyak terdiri atas orang Jawa daripada Cina. Beberapa pangeran terkemuka berpihak pada kaum pemberontak.

Pada akhir Juni 1742, pemberontakan mencapai puncak dengan takluknya Kartasura. Pakubuwana II dan Van Hohendorff melarikan diri ke arah timur, menuju Panaraga. Setelah enam minggu, Van Hohendorff lari ke pesisir, meninggalkan Pakubuwana II dalam pengawalan beberapa bangsawan yang masih setia.

Raja yang malang ini hampir tidak bisa lari dari kesimpulan bahwa dirinya telah gagal menjadi raja sufi yang saleh, dan bahkan paling tidak turut andil dalam kekalahan itu. Ia yang dahulu tampil di hadapan rakyatnya sebagai pemimpin Perang Suci melawan kompeni kafir, sekarang dipandang sebagai sekutu VOC, seperti para pendahulunya selama tujuh dekade terakhir. Ketika berusaha menenangkan diri dengan praktik mistisismenya, tampaknya ia telah beralih dari sufisme Ratu Pakubuwana yang saleh ke praktik supernatural pra-Islam. Khususnya, cerita mengenai dirinya berkomunikasi dengan roh Gunung Lawu, bernama Sunan Lawu, yang menjanjikan bantuan supernatural untuk merebut kembali kerajaannya. Ada pula cerita tentang raja putus asa ini mencari dukungan spiritual di pesantren terkenal, Tegalsari, namun ada alasan untuk mengatakan bahwa tradisi sejarah ini diciptakan belakangan. Di tahun-tahun terakhir pemerintahan Pakubuwana II, tidak terbukti ada desakan islamisasi seperti di tahun-tahun sebelumnya.

Pakubuwana II mengajukan permohonan nekat kepada VOC. Apabila dia dapat menduduki singgasananya, maka dia akan menghadiahkan wilayah pesisir kepada pihak Belanda dan memperkenankan mereka memilih patih. VOC memutuskan untuk menerima tawaran itu. Namun, pemberontakan berjalan terus, dan VOC menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak dapat menyerang pasukan-pasukan pemberontak di wilayah pedalaman walaupun mereka dapat bertahan di daerah pesisir. Pakubuwana II sendiri tidak mempunyai pasukan, sehingga satu-satunya kekuatan ofensif antipemberontak adalah pasukan Cakraningrat IV.

Pada November 1742, pasukan-pasukan Cakraningrat IV berhasil merebut Kartasura dan memukul mundur pihak pemberontak. Selama hampir tujuh dasawarsa, para penguasa Madura, yang dimulai dari Trunajaya, telah melakukan campur tangan di Jawa. Kini, untuk kedua kalinya, hadiah besar, yaitu istana raja sendiri, jatuh ke tangan salah seorang di antara mereka. Cakraningrat IV mengajukan permintaan kepada VOC agar Pakubuwana II dibu-

nuh untuk menjadi contoh bagi para penguasa yang tidak setia. Akan tetapi, pihak VOC memutuskan bahwa stabilitas tetap akan diusahakan dengan jalan mengadakan persekutuan dengan seorang raja yang lunak dari dinasti Mataram, dan tidak ada seorang raja pun yang bisa lebih lunak daripada Pakubuwana II pada tahun 1742. Untuk menghindari putusnya hubungan dengan VOC, maka Cakraningrat IV bersedia mengembalikan istana yang telah berhasil direbutnya itu kepada Pakubuwana II. VOC sekarang mulai merasa khawatir terhadap ambisi sekutunya dari Madura itu.

Sekarang, pemberontakan mulai mereda. Garendi menyerah pada bulan Oktober 1743, yang disusul oleh banyak pemberontak lain. Pada akhir tahun 1743, sisa-sisa kaum pemberontak yang penting hanya tinggal dua saudara laki-laki Raja, Pangeran Singasari dan Pangeran Mangkubumi (kelak bergelar Sultan Hamengkubuwana I, m. 1749–92), dan kemenakan laki-lakinya, Mas Said (kelak bergelar Pangeran Adipati Mangkunegara I, m. 1757–95). Mangkubumi, saudara laki-laki Raja yang paling berpengaruh, memiliki hubungan yang rumit dengan Pakubuwana II, campuran antara berontak dan patuh yang membingungkan VOC.

Hubungan VOC dipulihkan kembali dalam perjanjian November 1743, yang secara resmi mendudukkan kembali Pakubuwana II ke singgasananya. Tidaklah keliru apabila pemulihan ini dikatakan sebagai satu-satunya keberhasilan Pakubuwana II selama masa pemerintahannya. Di samping janji-janji lain, Raja memberi VOC kedaulatan penuh atas Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara, serta Ujung Timur (di mana klaimnya atas daerah-daerah ini hanyalah keinginan hampa belaka), dan sebagian dari pendapatan semua pelabuhan lainnya. Selanjutnya VOC diberi kebebasan untuk mengambil suatu daerah yang sempit di sepanjang kawasan pesisir dan di sepanjang semua sungai yang mengalir ke Laut Jawa apabila VOC menginginkannya. Raja juga akan menyerahkan 5.000 koyan (sekitar 8.600 metrik ton) beras setiap tahun untuk selama-lamanya, dan hasil-hasil bumi lainnya. Patih hanya dapat dipilih dengan persetujuan VOC, dan harus ada sebuah garnisun VOC di istana. Orang-orang Jawa tidak boleh berlayar ke mana pun di luar Jawa, Madura, dan Bali.

Sekali lagi kelihatan seolah-olah VOC merupakan "penguasa Pulau Jawa", dan demikianlah yang dikatakan Batavia kepada *Heeren XVII* pada tahun 1745. Akan tetapi, sekali lagi hal itu

ternyata tidak benar. VOC bahkan benar-benar bukan tuan atas dirinya sendiri. Pembantaian orang-orang Cina pada tahun 1740 telah menjerumuskan VOC dalam permusuhan internal yang paling sengit. Gustaaf Willem Baron van Imhoff telah dipilih oleh *Heeren XVII* untuk memulihkan VOC, dan sejak kedatangannya di Batavia pada tahun 1740, dia memimpin kelompok penentang Gubernur Jenderal Valckenier. Peran apa yang sebenarnya dimainkan oleh kedua orang ini dalam pembantaian orang-orang Cina sama sekali tidak jelas, tetapi Van Imhoff menyalahkan Valckenier atas semua kejadian tersebut. Bulan Desember 1740, Valckenier menahan Van Imhoff dan mengirimnya ke negeri Belanda sebagai tawanan militer. Sementara itu, tanpa mengetahui kejadian-kejadian tersebut, *Heeren XVII* mengangkat Van Imhoff sebagai Gubernur Jenderal (1743–50), dan ketika dia sampai di negeri Belanda, mereka segera mengirimnya kembali ke Batavia. Ketika pengangkatan Van Imhoff itu diumumkan di Batavia pada akhir tahun 1741, maka Valckenier meletakkan jabatan dan berlayar pulang ke negaranya. Pada Mei 1743, kapal Van Imhoff tiba di Batavia dan dia segera mengambil alih jabatan dari Gubernur Jenderal Sementara Johannes Thedens (1741–3). Sebuah perintah telah dikirim ke Tanjung Harapan agar menawan Valckenier saat dia singgah di sana. Dia dibawa kembali ke Batavia pada November 1742 dan dipenjarakan dalam benteng hingga akhir hayatnya. Dia didakwa telah melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi hukuman mati oleh suatu pengadilan yang diatur oleh Van Imhoff. Dia terhindar dari hukuman penggal kepala karena naik banding. Sahabat-sahabatnya di negeri Belanda juga mengajukan gugatan atas namanya yang tetap belum terselesaikan hingga tahun 1760, setelah kedua pelaku utama itu meninggal dunia: Van Imhoff pada tahun 1750 dan Valckenier pada tahun 1751. Putra Valckenier memenangkan gugatan tersebut.

Episode pahit ini berlangsung di Batavia. Di Jawa, ada lebih banyak lagi perang yang meletus. Cakraningrat IV merasa yakin bahwa dia mempunyai hak atas sebagian besar wilayah Jawa Timur. Akan tetapi, VOC tidak mau mengakui "hasrat luar batasnya" itu. Pihak VOC telah mengambil kesimpulan secara arif bahwa ketenangan tidak akan mungkin tercapai dengan adanya suatu daerah kekuasaan Madura di Jawa Timur. Karena itu, Cakraningrat IV menjalin hubungan dengan keluarga yang berkuasa di Sura-

baya dan mendatangkan, berkat jalinan hubungan dengan keturunan Surapati, prajurit-prajurit Bali, serta menghentikan pembayaran-pembayaran beras dan cukai pelabuhan dari Jawa Timur kepada VOC. Pada Juli 1744, VOC berusaha melakukan perundingan dengannya, tetapi sia-sia belaka. Pada Februari 1745, VOC menyatakan bahwa dirinya diturunkan dari tahta dan akan diperlakukan sebagai seorang pemberontak. Cakraningrat IV terjun dalam perang dan berhasil merebut Madura Timur. Peperangan kini berlangsung di seluruh Madura dan di sepanjang daerah pesisir Jawa, dari Pasuruan sampai Rembang. Satu pasukan VOC yang berada di Madura dikepung selama enam bulan. Tetapi, setelah tahun 1745, VOC mulai memetik kemenangan demi kemenangan. Akhirnya, Cakraningrat IV menyadari bahwa cita-citanya telah kandas dan, pada akhir tahun 1745, dia melarikan diri ke Banjarmasin, Kalimantan. Di sana dia mencari perlindungan di atas sebuah kapal Inggris, di mana dia dirampok. Kemudian Sultan mengkhianatinya dan menyerahkannya kepada VOC, yang membawanya ke Batavia dan kemudian membuangnya ke Tanjung Harapan pada tahun 1746. Putranya menggantikan dia sebagai raja vasal VOC di Madura Barat.

Intervensi pembesar-pembesar Madura di Jawa berakhir dan Pakubuwana II kembali bertahta. Akan tetapi, seperti yang akan kita lihat dalam bab berikutnya, Jawa belum damai.[]

Bab 10 ....

Jawa dan VOC, ± 1745–92

KEMAJUAN MILITER yang dibahas sejak bab 6 belum membuahkan stabilitas dan hanya memberi sedikit keuntungan kepada pihak VOC. Di Jawa, kemajuan itu diikuti oleh serangkaian peperangan yang kejam dan ketidakstabilan yang terus-menerus. Pada paruh kedua abad XVIII, kemajuan VOC terhenti dan usaha pertama orang-orang Belanda untuk menguasai nusantara Indonesia ini berakhir dengan ditarik mundurnya sebagian kekuatannya. Pihak VOC membatasi kegiatan-kegiatannya hanya di wilayah Jawa Barat dan pesisir utara Jawa serta Maluku, dan dengan demikian memungkinkan terjadinya semacam pemulihan kerajaan Jawa. Akan tetapi, kaum elite Jawa masih harus menghadapi persoalan yang menimbulkan banyak pergolakan dan pertumpahan darah: perpecahan di antara mereka sendiri. Cara mereka menyelesaikan persoalan ini adalah membagi kerajaan. Tetapi sebelum semua itu terjadi, masih banyak peperangan yang harus dilakukan.

Pakubuwana II memutuskan untuk meninggalkan istana Kartasura yang sudah kacau. Kira-kira 12 kilometer ke arah timur, di tepi Sungai Sala, dia mendirikan sebuah istana baru, Surakarta, yang nantinya tetap didiami oleh keturunannya. Bangunan ini selesai pada tahun 1745, dan kepindahan resminya terjadi pada Februari 1746. Sementara itu, kekuasaan VOC ditegakkan di Surabaya, Rembang, serta Jepara, dan tentu saja Semarang tetap berada di tangan VOC.

Istana baru tersebut sama tidak stabilnya dengan istana lama. Mas Said, Pangeran Singasari, dan sedikitnya empat pangeran lainnya masih memberontak. Untuk meredam pemberontakan, Raja mengumumkan bahwa siapa pun yang dapat mengusir mereka dari Sokawati, daerah di sebelah timur laut, akan diberi

hadiah berupa tanah sejumlah 3.000 cacah. Pangeran Mangkubumi yang berapi-api itu menerima tantangan tersebut. Pada tahun 1746, dia berhasil mengalahkan Mas Said dan menuntut hadiahnya. Akan tetapi, musuh lamanya di istana, Patih Pringgalaya (1742–55), membujuk Pakubuwana II agar menahan hadiah tersebut. Di tengah keadaan sulit ini, datanglah Gubernur Jenderal Van Imhoff, yang ternyata bukan orang yang cocok untuk mengatasi keadaan sedemikian. Inilah pertama kalinya seorang gubernur jenderal yang sedang menjabat muncul ke istana. Van Imhoff tidak mempunyai pengalaman yang dapat membuatnya mengerti soal kerajaan Jawa atau yang bisa menuntunnya untuk tidak terjebak dalam jaringan persekongkolan istana yang berbahaya. Kunjungannya itu mempercepat meletusnya perang yang berlangsung selama sebelas tahun.

Tujuan utama Van Imhoff adalah menangani masalah pesisir. Menurut perjanjian tahun 1743, VOC mempunyai hak atas daerah yang sempit di sepanjang wilayah pesisir dan semua sungai yang mengalir ke laut. Tetapi, apa yang diinginkan Van Imhoff adalah penyerahan sepenuhnya semua pelabuhan daerah pesisir yang belum diserahkan beserta wilayah-wilayah pedalaman yang dikuasainya. Baginya, daerah ini adalah sumber keuntungan yang potensial. Dia mengajukan hal ini kepada Raja sebagai solusi atas ketidakmampuan istana Mataram memerintah wilayah pesisir, yang telah cukup terbukti selama satu abad. Pakubuwana II yang peragu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tetapi Van Imhoff terus mendesak sehingga ia terpaksa menyerah. Daerah pesisir disewakan kepada VOC seharga 20.000 real per tahun.

Ketika Pakubuwana II memberi tahu para penasihat terdekatnya soal penyewaan wilayah pesisir tersebut, Pangeran Mangkubumi merasa keberatan. Jumlah 20.000 real terlalu sedikit, katanya. (Dapat dicatat di sini bahwa pada tahun 1744, jabatan-jabatan sebagai syahbandar di pesisir disewakan dengan total nilai 94.176 real setahun; semua ini dan sejumlah penghasilan lainnya kini akan jatuh ke tangan VOC). Yang lebih mendasar, Mangkubumi beranggapan bahwa di bawah tekanan VOC, Raja telah melanggar prinsip pokok kerajaan Jawa. Raja mengambil keputusan penting, malah menyerahkan bagian kerajaannya yang paling kaya, tanpa konsultasi dengan para pembesar keraton. Dalam lingkungan semacam itu, para pembesar yang kuat seperti Mangkubumi tentu

saja meragukan apakah kepentingan pribadi mereka akan terlayani dengan tetap setia. Bagaimana masa depan kerajaan tanpa daerah pesisir, juga menjadi sumber keresahan. Kemarahan Mangkubumi semakin memuncak ketika Van Imhoff ikut campur dalam percekcokan mengenai hadiahnya yang berjumlah 3.000 cacah. Gubernur Jenderal meyakinkan Raja bahwa hadiah tersebut akan memberi Mangkubumi kekuatan yang terlalu besar. Ia mendesak agar hadiah itu tidak diserahkan. Di depan sebuah pertemuan istana, Van Imhoff pribadi menegur Mangkubumi karena terlalu ambisius.

Mangkubumi merasa sangat terpukul. Pada Mei 1746, dia melancarkan pemberontakan, dan meletuslah Perang Suksesi Jawa III (1746–57). Sekarang, Mangkubumi bergabung dengan Mas Said, dan dalam waktu singkat keduanya mendapatkan banyak pengikut. Pada tahun 1747, Mangkubumi memimpin pasukan yang diperkirakan berjumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500 prajurit kavaleri. Pada saat itu, pasukan VOC dalam keadaan lemah, dan walaupun masih mampu bertahan di daerah pesisir, mereka tidak dapat mengalahkan kaum pemberontak yang berada di daerah pedalaman. Pada tahun 1748, Mangkubumi dan Mas Said menyerang Surakarta dan untuk beberapa waktu malah mengancam istana.

Di tengah pemberontakan itu, di penghujung tahun 1749, Pakubuwana II jatuh sakit. Karena itu, Gubernur VOC untuk wilayah pesisir timur laut, Baron van Hohendorff (1748–54), berangkat ke Surakarta untuk mengawasi berlangsungnya pergantian kekuasaan. Dialah yang dulu mengurus rujuknya kembali Pakubuwana II dengan VOC pada tahun 1742, dan tetap berada di istana sebagai komandan VOC sampai tahun 1748. Ketika sekarang dia kembali ke Surakarta, Pakubuwana II memandangnya sebagai sumber keselamatan kerajaan. Pakubuwana II mengusulkan agar Von Hohendorff sendirilah yang mengambil alih kepemimpinan atas negara. Meski awalnya terkejut, namun Van Hohendorff segera menyetujui usul tersebut. Dibuatlah suatu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1749, yang menyerahkan kedaulatan atas seluruh kerajaan kepada VOC. Raja wafat sembilan hari kemudian. Bagaimanapun juga, perjanjian yang telah ditandatanganinya itu bukanlah sesuatu yang penting sebagaimana tampaknya, bukan pula langkah terakhir VOC

dalam usaha menaklukkan Jawa. Seperti sejumlah perjanjian sebelumnya, perjanjian tersebut hanyalah secarik kertas. Pada tahun 1749, VOC terlibat dalam perang besar Jawa terakhir di abad XVIII, dan tak satu dokumen pun dapat memenangkan perang itu. Kenyataannya, hingga awal abad XIX, perjanjian itu tidak berarti sama sekali. VOC tidak lagi mengacu pada perjanjian tersebut, dan ketika perang berakhir, Belanda tidak punya cara atau keinginan untuk berdaulat di wilayah pedalaman Jawa Tengah.

Pada 15 Desember 1749, Van Hohendroff mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwana III (1749–88). Tetapi, sebelum upacara penobatannya terlaksana, Mangkubumi telah dinyatakan sebagai raja oleh para pengikutnya. Tanggal 12 Desember 1749, di markas besarnya di Yogyakarta, Mataram, Mangkubumi juga memakai gelar Susuhunan Pakubuwana. Maka, dimulailah masa pemerintahan yang panjang (1749–92) seorang penguasa yang paling cakap dari keluarga Kerajaan Mataram sejak Sultan Agung. Pada tahun 1755, dia menjadi penguasa pertama sejak Sultan Agung yang memakai gelar sultan, dan kemudian dia memakai nama Hamengkubuwana (I), yang dipakai oleh semua penerusnya. Dengan demikian, sejak akhir tahun 1749, Jawa sekali lagi terbagi antara seorang raja pemberontak dan seorang raja yang didukung oleh VOC. Perbedaannya sekarang ialah bahwa pihak pemberontak sangat kuat, dan VOC jauh lebih lemah, baik di bidang keuangan maupun militer, sehingga kaum pemberontak tidak dapat dihancurkan.

Dari tahun 1750 sampai tahun 1754, pemberontakan semakin kuat. Pada tahun 1750, Mas Said, yang kini menjabat sebagai Patih Mangkubumi, menyerang Surakarta lagi dan menimbulkan kerugian yang besar di pihak VOC. Para pembesar Surakarta semakin banyak yang meninggalkan Pakubuwana III; bahkan pada tahun 1753, putra mahkota Surakarta pun bergabung dengan pihak pemberontak. Akan tetapi, tak satu pihak pun dapat memperoleh kemenangan akhir, dan kedua belah pihak mulai menarik kesimpulan bahwa kemenangan semacam itu tidak mungkin diperoleh. VOC dapat mempertahankan Pakubuwana III, tetapi tidak mampu menundukkan kerajaannya untuknya. Pihak pemberontak pun berhasil meraih kemenangan demi kemenangan, namun mereka tidak dapat menyingkirkan Raja dari Sura-

karta. Pada tahun 1752, juga timbul perpecahan antara Mangkubumi dan Mas Said, dan Mangkubumi mungkin takut kehilangan kekuasaannya atas pasukan-pasukan pemberontak. VOC memutuskan untuk mencoba merundingkan suatu penyelesaian untuk melepaskan diri dari berbagai peperangan di Jawa yang membuatnya bangkrut. Pada tahun 1754, Mangkubumi juga siap mengusahakan perundingan-perundingan.

Pada tahun 1754, gubernur baru untuk wilayah pesisir timur laut, Nicolaas Hartingh (1754–61), diberi wewenang menenangkan Mangkubumi dengan menawarkan sebagian Jawa kepadanya. Melalui seorang penengah berkebangsaan Turki bernama Seh Ibrahim, dijalinlah hubungan dan perundingan-perundingan tidak langsung yang dimulai pada April 1754. Bulan September, mereka telah mencapai banyak kemajuan untuk mengadakan pertemuan pribadi antara Hartingh dan Mangkubumi. Saat itu, Mangkubumi ingin mendapatkan bantuan militer dari VOC untuk melawan Mas Said. Walaupun pada awalnya terdapat banyak perbedaan antara Mangkubumi dan VOC, namun berbagai perundingan itu berhasil menyepakati penyelesaian berdasarkan syarat-syarat Mangkubumi. Dia akan mendapat separuh bagian kerajaan, termasuk ibu kotanya di Mataram. Dia tampaknya merasa keberatan mengakui kekuasaan VOC atas wilayah pesisir, tetapi akhirnya menyetujuinya sebagai imbalan bagi sebuah persekutuan, dan dia juga akan menerima separuh pembayaran sewanya sejumlah 20.000 real setiap tahun. Dia dan VOC akan bersatu melawan Mas Said. Batavia tidak begitu senang dengan ketetapan-ketetapan tersebut, tetapi merasa berkewajiban meratifikasinya. Pakubuwana III tidak dimintai pendapat tentang pembagian kerajaannya itu, tetapi dia juga tidak punya pilihan lain kecuali menyetujuinya.

Pada tanggal 13 Februari 1755, Perjanjian Giyanti ditandatangani, dan VOC mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I, penguasa separuh wilayah Jawa Tengah. Kejadian ini menggambarkan kegagalan kebijakan VOC di Jawa. Sejak campur tangan militer mereka yang pertama hampir 80 tahun lalu, Belanda berusaha menciptakan stabilitas dengan cara mempertahankan seorang raja di atas tahta Mataram yang akan memerintah seluruh Jawa demi kepentingan mereka. Mereka baru menyadari bahwa bukannya menikmati stabilitas, mereka malah terus-menerus menghadapi banyak pertempuran untuk kepentingan

raja-raja yang mereka dukung, dengan biaya yang sangat memberatkan. Pada tahun 1743–6, mereka menempuh langkah pertama yang menyimpang dari kebijakan ini, yaitu dengan memutuskan bahwa akan lebih baik jika VOC berkuasa langsung atas daerah pesisir daripada diperintah oleh istana. Kini mereka mengakui pula bahwa mereka tidak dapat menjaga kesatuan kerajaan di bawah seorang raja tunggal yang lembek. Sebaliknya, mereka harus mengakui pemberontak terkuat yang pernah mereka hadapi sebagai penguasa atas separuh wilayah kerajaan tersebut. Bagaimanapun juga, gagalnya sebuah kebijakan segera menimbulkan kebijakan lain yang peluang berhasilnya sedikit lebih besar. VOC segera mengetahui bahwa pembagian kerajaan memungkinkan dijalankannya kebijakan *divide et impera*. Akan tetapi, pada paruh kedua abad XVIII, VOC sedang dalam keadaan tidak mampu, dilanda korupsi, dan menghadapi kesulitan keuangan sehingga peluang tersebut jarang membuahkan keberhasilan. Karena itu, keadaan yang dihadapi Hamengkubuwana I lebih menguntungkan dibandingkan dengan raja-raja lain selama beberapa generasi, dan dia pun memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya.

Pada tahun 1755, Hamengkubuwana I pindah ke Yogya. Dia membangun sebuah istana di sana pada tahun 1756, dan memberikan kota ini sebuah nama baru, Yogyakarta. Tetapi, sultan baru ini menghadapi rintangan-rintangan berat. Masih ada raja lain di Surakarta, Pakubuwana III. Masalah yang timbul akibat kehadiran dua raja, karena teori legitimasi Jawa didasarkan pada pemerintahan hanya seorang raja yang memiliki kekuatan supernatural, tidak dapat diselesaikan selama beberapa dekade. Agaknya, Hamengkubuwana I berpikir bahwa Pakubuwana III tidak akan bertahan lama, karena pada tahun 1755 hampir tidak seorang pun pembesar di Surakarta yang mendukungnya. Akan tetapi, setelah perjanjian Giyanti, banyak pembesar kerajaan, yang sebelumnya kabur dari istana, kembali ke Surakarta. Untuk pertama kalinya, Pakubuwana III menjadi saingan berat dalam mencari dukungan golongan elite. Hal ini mengawali suasana permanennya perpisahan kedua istana tersebut.

Namun perang belum berakhir. Walaupun saingan utama telah menjadi sultan, masih banyak pemberontak lain yang bebas. Mas Said adalah yang terpenting dan pasukannya masih kuat, meski pembelotan makin meningkat. Pada Oktober 1755, dia



Bagian dalam kraton Yogyakarta, dibangun oleh Sultan Hamengkubuwana I pada 1755–6

berhasil mengalahkan satu pasukan VOC; pada Februari 1756, dia hampir berhasil membakar istana baru di Yogyakarta. Pasukan-pasukan dari Surakarta, Yogyakarta, dan VOC tidak sanggup menawan Mas Said, tetapi jelas pula bahwa dia tidak mampu menaklukkan Jawa karena menghadapi lawan gabungan semacam itu. Maka dia mulai mengadakan perundingan-perundingan pada tahun 1756. Bulan Februari 1757 dia menyerah kepada Pakubuwana III dan bulan Maret, di Salatiga, dia resmi mengucapkan sumpah setia kepada Surakarta, Yogyakarta, dan VOC. Imbalannya, dia mendapat tanah berikut 4.000 cacah dari Pakubuwana III, tetapi tidak memperoleh apa-apa dari Hamengkubuwana I. Mas Said sekarang menjadi Pangeran Adipati Mangkunegara I (m. 1757–95). Dia mempunyai daerah kekuasaan sendiri yang berada di bawah Surakarta, tetapi status daerah kekuasaan ini dan apakah keturunannya akan mewarisinya atau tidak masih belum jelas. Hamengkubuwana I ingin sekali menyingkirkan, bukan mendamaikan, Mangkunegara, dan mencemooh penyelesaian tersebut. Permusuhan yang berlarut-larut di antara mereka terus menjadi tema pokok sejarah Jawa selama beberapa tahun.

Peperangan besar berakhir setelah tahun 1757. Dari tahun 1757 sampai 1825 tidak terjadi satu peperangan besar pun di

Jawa, periode damai terpanjang sejak, paling tidak, awal abad XVI. Kaum pemberontak yang masih tersisa atau mereka yang berusaha mengobarkan pemberontakan-pemberontakan baru pada masa-masa sesudah itu hanya mempunyai pengikut yang relatif sedikit. Mereka berhasil ditumpas dan dibunuh atau mencari perlindungan di daerah-daerah yang tidak dapat ditembus, terutama di Malang yang masih dikuasai oleh keturunan Surapati. Dengan tercapainya perdamaian, maka pertanian Jawa mulai berkembang lagi. Para pembesar ini menikmati kehidupan yang lebih mapan serta memperoleh penghasilan yang lebih teratur, dan tampaknya kebanyakan mulai berpendapat bahwa Jawa tidak selalu memerlukan peperangan. Di kalangan golongan elite mulai timbul tekad untuk memelihara perdamaian. Walaupun pembagian kerajaan belum diterima sebagai suatu ketetapan yang permanen, namun peperangan tidak lagi menjadi satu-satunya cara yang tepat untuk mengubahnya. Dengan perasaan sangat lega, VOC sekarang membebastugaskan sebagian besar serdadunya yang berkebangsaan Indonesia dan dengan tenang mengurusi daerah pesisir; akhirnya VOC dapat menarik mundur pasukan-pasukannya dari wilayah pedalaman Jawa (kecuali garnisun-garnisun yang ditempatkan di istana-istana), seperti yang ingin mereka lakukan sejak tahun 1680.

Setelah peperangan tidak lagi menjadi satu-satunya cara untuk mempersatukan kembali kerajaan, maka Sultan Hamengkubuwana I, Pangeran Mangkunegara I, dan Susuhunan Pakubuwana III kini lebih banyak terlibat dalam permainan diplomasi perkawinan yang rumit. Hadiah yang dicarinya adalah suksesi di Surakarta. Soalnya, Pakubuwana III tidak mempunyai anak laki-laki. Karena itu, perkawinan dengan salah seorang putrinya akan dapat melegitimasi suksesi di Surakarta, baik oleh garis keturunan Hamengkubuwana I maupun Mangkunegara I. Mangkunegara sudah mengawini putri sulung Hamengkubuwana I, ketika mereka dulu menjadi sekutu, dan walaupun Sultan mempunyai beberapa putra laki-laki, perkawinannya ini mungkin juga bermanfaat di Yogyakarta. Kemudian menyusul adu siasat yang rumit selama beberapa tahun, yaitu permohonan dan penolakan lamaran perkawinan, serta letusan-letusan kecil tindak kekerasan. Semua menjadi semakin rumit dengan adanya fakta bahwa Pakubuwana III tidak mempunyai kepribadian yang kuat atau

kecakapan politik seperti Hamengkubuwana I, sehingga istana Surakarta tetap dipenuhi jaring-jaring persekongkolan selama masa pemerintahannya.

Pada tahun 1762, putra tertua Mangkunegara I menikah dengan putri sulung Pakubuwana III, sehingga memberinya peluang besar untuk menggantikan Raja. Tetapi, hak potensial Mangkunegara I melalui perkawinan di Yogyakarta hilang pada tahun 1763 ketika istrinya, Ratu Bendara (putri Hamengkubuwana I), meninggalkannya dan kembali ke Yogyakarta. Untuk sementara waktu, kelihatan seolah-olah akan berkobar suatu perang besar, tetapi akhirnya Ratu Bendara menceraikan suaminya. Mangkunegara I terus membenci kejadian ini sampai akhir hayatnya, karena merasa yakin bahwa Hamengkubuwana I-lah yang telah memaksa sang putri supaya menceraikannya, sedangkan sang putri sendiri tidak menginginkannya. Namun, dia tidak melancarkan perang. Segala permainan diplomasi perkawinan ini hancur berantakan pada akhir Agustus 1768, ketika Pakubuwana III akhirnya mempunyai seorang putra yang kelak akan memerintah sebagai Pakubuwana IV. Sekarang, karena di kedua istana sudah ada ahli warisnya, kerajaan Jawa selangkah lebih dekat dengan pembagian kerajaan yang permanen.

Masih ada pemberontak-pemberontak yang belum mau menerima kekuasaan Hamengkubuwana I, Pakubuwana III, maupun Mangkunegara I. Mereka meliputi beberapa pemberontak yang merupakan ancaman potensial yang penting, tetapi selama tahun 1760-an mereka dapat dilenyapkan. Pada tahun 1762, Raden Mas Guntur, cicit laki-laki Amangkurat III dan menantu Mangkunegara I, tewas setelah berusaha melancarkan pemberontakan. Dengan demikian, berakhirlah usaha-usaha yang dilakukan oleh garis keturunan Amangkurat III, yang disingkirkan dengan dilantiknya Pakubuwana I, untuk mendapatkan kembali kekuasaan di Jawa. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha-usaha Raden Mas Garendi dalam Perang Cina dan Raden Mas Guntur dan beberapa peristiwa lain yang tidak begitu penting. Garis keturunan Amangkurat III mewakili cabang lain, dan mungkin lebih sah, dari dinasti itu sejak tahun 1708, tetapi kini telah berakhir. Pada tahun 1763–5, seorang pemberontak bernama Abdul Kadir bersama dua orang putranya mencapai banyak keberhasilan di daerah-daerah sebelah barat Semarang, mungkin dengan dukungan diam-diam Hamengkubuwana I. Akan tetapi, putra-putranya terbunuh oleh

prajurit-prajurit Pakubuwana III; Abdul Kadir sendiri menghilang dan mungkin meninggal pada tahun 1764.

Akhirnya, perhatian beralih pada Pangeran Singasari, saudara laki-laki Hamengkubuwana I dan paman Pakubuwana III. Dia berada di Malang bersama-sama dengan keturunan Surapati. Berbagai usaha telah dijalankan oleh Surakarta maupun Yogyakarta untuk membujuknya agar mau menyerah, tetapi semuanya sia-sia. Kemudian VOC mengambil keputusan untuk menumpas perlawanan di Ujung Timur, yang sudah menjadi miliknya atas dasar perjanjian tahun 1743. Karena Belanda maupun orang-orang Jawa tidak tahu persis soal garis-garis bujur di Jawa Timur, keduanya dengan keliru menganggap Malang berada di sisi VOC sesuai dengan garis yang telah ditetapkan pada tahun 1743. Pada tahun 1767 dan 1768, VOC mengirim serentetan ekspedisi ke daerah-daerah sebelah timur tersebut, ketika pihak Bali sedang terganggu perang saudara. Pangeran Singasari ditangkap bulan Juli 1768. Hamengkubuwana I maupun Pakubuwana III meminta supaya dia dibuang ke luar Jawa, tetapi dia meninggal saat sedang ditahan di Surabaya sebelum tindakan tersebut terlaksana. Anak cucu Surapati dapat dikalahkan, dan keturunannya yang terakhir dapat ditangkap pada tahun 1771. Walaupun pada waktu itu VOC tahu bahwa Malang tidak terletak di sisinya sesuai garis perbatasan tahun 1743, namun kedua raja Jawa membiarkan VOC memiliki daerah itu.

Seluruh wilayah Malang dan Ujung Timur hampir tidak dihuni penduduk sama sekali setelah sekian lama mengalami kekacauan. Sebagai raja-raja vasal mereka di Ujung Timur, pihak VOC mengakui dua pangeran Balambangan yang meninggalkan agama Hindu dan menganut agama Islam. Dengan begitu, VOC berharap dapat memisahkan mereka dari orang-orang Hindu Bali. Namun, pada 1771–2 perlu dilancarkan lagi peperangan untuk menghadapi perlawanan orang-orang Bali dan penduduk setempat. Sesudah itu, VOC kurang memaksakan islamisasi; meskipun demikian, agama Hindu dengan cepat kehilangan pijakan di Ujung Timur. Inilah salah satu keanehan sejarah VOC, bahwa justru di Ujung Timur, tempat mereka menghadapi ancaman intervensi dari orang-orang Hindu Bali, VOC membantu penyebaran agama Islam yang sangat ditakuti di tempat-tempat lain di Indonesia.

Pada akhir tahun 1760-an, situasi politik Jawa Tengah dapat dikatakan hampir stabil. Alternatif-alternatif bagi pembagian kerajaan makin lama makin pudar. Demikian pula halnya dengan VOC, mereka sudah mapan dengan peran barunya sebagai penguasa daerah pesisir. Campur tangannya dalam berbagai urusan istana kini tidak lagi disertai kekuatan militernya. Bahkan, Hamengkubuwana I pun mencegah VOC untuk membangun sebuah benteng pertahanan yang kuat di Yogyakarta sampai menjelang akhir pemerintahannya. Namun demikian, di balik semakin stabilnya pembagian kerajaan itu, terdapat kekuatan potensial VOC. Siapa pun yang berperang pasti akan menjumpai VOC di antara musuh-musuhnya, suatu prospek yang sangat tidak menarik. Pakubuwana III merasa sangat takut melukai perasaan VOC dan mudah terpengaruh oleh VOC (sesungguhnya, dia mudah sekali dipengaruhi oleh hampir semua orang). Hamengkubuwana I paham betul bahwa VOC dapat menjadi lawan yang berbahaya, walaupun dia juga benar-benar tahu bahwa mereka dapat dikalahkan dan diperalat. Dia berusaha keras mencegah VOC untuk mencampuri urusan-urusan di istana, dan pada umumnya ia berhasil menempuh jalannya sendiri. Di antara ketiga tokoh sejarah Jawa pada kurun waktu ini, hanya Mangkunegara I-lah yang tampaknya merasa jijik terhadap VOC, tetapi ia tidak pernah mendapat kesempatan, atau mungkin tidak mempunyai keberanian yang cukup, untuk mengekspresikan rasa jijiknya lewat pertempuran.

Pada awal tahun 1770-an, pemisahan Jawa telah mencapai tingkat yang lebih mantap dan kebutuhan terhadap hadirnya VOC sebagai penengah di antara kedua istana menurun lagi. Berbagai masalah perbatasan yang muncul akibat pemisahan pada tahun 1755 menyebabkan banyak pertentangan dan tindak kekerasan. Pada tahun 1773–4, sensus baru dan kesepakatan pembagian wilayah antara Surakarta dan Yogyakarta dicapai, dan tata cara penyelesaian sengketa selanjutnya ditetapkan. Disetujui pula perundang-undangan baru, yang mengakhiri masalah yurisdiksi yang rumit akibat dari pembagian tersebut dan yang secara resmi mengatur hubungan antarwarga kedua istana. *Angger-Ageng* (Peraturan Hukum Besar) dan *Angger-Arubiru* (Undang-Undang tentang Gangguan terhadap Ketenteraman) disetujui masing-masing pada tahun 1771 dan 1773, dan sesudah itu secara teratur

diperpaniang waktunya oleh kedua patih. Sehingga, sistem pembagian tersebut menjadi semakin teratur dan stabil karena para tokoh Jawa sepakat untuk membuatnya begitu. Dengan terjadinya hal ini, hilanglah sumber-sumber konflik antara Surakarta dan Yogyakarta serta terhapus pula kebutuhan akan peran mediasi VOC.

Walaupun pembagian kerajaan itu jadi makin teratur, tapi hal itu belum dipandang sah. Dalam kerajaan-kerajaan Jawa yang pada dasarnya rapuh, soal legitimasi, dengan efek-efek supernaturalnya, merupakan salah satu sokoguru kerajaan, lebih-lebih setelah pertengahan abad XVIII, ketika fungsi militer kerajaan dengan cepat kehilangan relevansinya. Kalangan atas dan kalangan bawah rakyat Jawa sudah muak dengan perang saudara yang tidak menentu. Karena itu, sangatlah penting artinya untuk mencari legitimasi, terutama oleh Hamengkubuwana I, karena istana barunya di Yogyakarta jelas berada di luar jalur istana-istana yang mengarah ke Surakarta dan yang memberinya suatu bentuk legitimasi.

Tradisi sejarah Jawa kini menampilkan sebuah krisis legitimasi sekaligus menawarkan pemecahannya. Kronik-kronik istana melukiskan muncul dan tumbangnya istana-istana dalam siklus tetap selama berabad-abad. Menurut cukup banyak naskah itu, Majapahit runtuh pada tahun 1400 S (1478 M), Demak berdiri pada tahun 1403 S (1481 M) dan runtuh pada tahun 1500 S (1578 M), sedangkan Pajang berdiri pada tahun 1503 S (1581 M). Pajang dan Mataram dipandang sebagai satu-satunya zaman dalam siklus ini, sehingga peristiwa berikutnya adalah runtuhnya Plered pada tahun 1600 J (1677 M) yang disusul oleh berdirinya Kartasura pada tahun 1603 J (1680 M). Jatuhnya Plered dan berdirinya Kartasura memang terjadi pada tahun-tahun itu. Mungkin karena itulah peristiwa-peristiwa tersebut menjadi model bagi keseluruhan teori. Tetapi, ada bukti-bukti yang menimbulkan dugaan bahwa teori tersebut sebenarnya mendahului peristiwa-peristiwanya dan, karena itu, mungkin saja malah memengaruhi terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Ketika pembagian kerajaan menjadi semakin kokoh pada abad XVIII, maka sekali lagi abad Jawa hampir berakhir. Tahun 1700 J dimulai pada bulan Maret 1774. Mungkin keprihatinan kalangan Keraton tentang datangnya tahun itu, ketika sebuah kerajaan diduga akan runtuh, yang mendorong Surakarta maupun Yogyakarta untuk menyelesaikan perjanjian-

perjanjian mengenai tanah dan kitab undang-undang yang resmi dari tahun 1771–4, yang telah semakin meningkatkan stabilitas kedua kerajaan tersebut.

Pada awal tahun 1700 J (Maret 1774), Putra Mahkota Yogyakarta, yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwana II, menulis sebuah buku yang luar biasa berjudul *Serat Surya Raja*, 'Buku Matahari Raja-Raja'. Karya yang hebat ini nantinya menjadi salah satu tanda kebesaraan (pusaka) kerajaan yang keramat dari kesultanan itu. Buku ini meramalkan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi Yogyakarta dalam bentuk kiasan yang agak tersamar. Kerajaan-kerajaan dan tokoh-tokoh samarannya menggambarkan tokoh-tokoh utama di Yogyakarta pada masa mendatang. Menurut skenario *Surya Raja*, kerajaan yang terpecah itu akan bersatu kembali dan orang-orang Belanda beralih ke agama Islam setelah terjadinya serangkaian peperangan yang mengerikan, di mana Ratu Kidul, dan akhirnya Tuhan, akan datang membantu sang pahlawan, yang tak lain dan tak bukan adalah Putra Mahkota sendiri. Apakah, atau bagaimanakah, hal ini akan terjadi dalam kehidupan nyata masih belum jelas. Tetapi, akan tampak bahwa *Surya Raja* merupakan suatu upaya untuk mengatasi krisis tahun 1700 J. Dalam hal ini tampak jelas bahwa Sultan Hamengkubuwana I juga berpikir untuk menyerahkan tahta kepada putranya demi menciptakan seorang penguasa baru, jika bukan sebuah istana baru, untuk abad yang baru. Meskipun demikian, usaha mencari pemecahan krisis melalui kesastraan tampaknya belum cukup. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menerjemahkan hal itu ke dalam peristiwa-peristiwa yang nyata mungkin terlalu besar untuk diatasi. Paling tidak, karena VOC tidak mau mengakui hak Putra Mahkota atas tahta, maka Hamengkubuwana I tidak jadi turun tahta. Namun demikian, teori sejarah harus tetap dihadapi. Bagaimanapun juga, lingkungan politik saat itu adalah sedemikian rupa sehingga tidak ada satu kekuatan utama pun yang berani memulai perang yang dapat, sesuai dengan teori tersebut, menyebabkan runtuhnya suatu kerajaan.

Pada tahun 1703 J (1777 M), saat sebuah kerajaan baru seharusnya berdiri, seorang menantu laki-laki Sultan menulis buku lain. Karya ini merupakan sebuah kronik yang berjudul *Babad Kraton*, 'Kronik tentang Istana-Istana'. Tidak seperti *Surya Raja*, buku ini cenderung melihat ke belakang daripada ke depan. Ia

menyajikan suatu tinjauan mengenai masa lampau yang menyebabkan Yogyakarta seakan-akan tampil sebagai pengganti langsung Kartasura. Buku ini melakukan dua usaha untuk memilih titik yang tepat tempat diakhirinya kronik tersebut, tetapi akhirnya buku ini diakhiri dengan jatuhnya Kartasura (1742). Implikasi yang muncul adalah bahwa Kartasura, istana terakhir yang didirikan sesuai teori sejarah, dapat dianggap sama dengan istana yang seharusnya runtuh pada tahun 1700 J/1774 M (waktu bagi runtuhnya Kartasura menurut teori tersebut). Oleh karena itu, Yogyakarta dapat dipandang sebagai penggantinya yang sah pada tahun 1703 J/1777 M. Jadi, kalangan elite Yogyakarta mencari perlindungan pada gambaran yang dibuat mengenai masa lalu dalam rangka menghindari implikasi-implikasi yang berat, dan mungkin berdarah, dari pergantian abad Jawa tersebut.

Suatu bentuk legitimasi telah diperoleh, dan dengan itu pembagian kerajaan dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang mantap. Akan tetapi, legitimasi ini didasarkan pada suatu khayalan. Masing-masing raja adalah sah bagi para pendukungnya, masing-masing berada di bawah perlindungan Ratu Kidul, masing-masing perangkat pusaka kerajaan adalah asli, tetapi hanya jika keberadaan kerajaan lain tidak diakui. Sejumlah kesepakatan hukum dan perjanjian tentang pengaturan tanah pada tahun 1771–4 telah memungkinkan kedua raja tersebut untuk saling mengabaikan satu sama lain, karena konflik-konflik antara kedua istana itu berkurang dan semua pertentangan yang baru akan diselesaikan oleh para patih. Raja-raja itu berlindung di balik ilusi bahwa raja lainnya tidak ada, dan karenanya tidak memandang perlu dilancarkan peperangan untuk mempersatukan kembali kerajaan. Namun masih ada dua istana, dan perasaan benci yang timbul sebagai akibat pembagian kerajaan itu tidak pernah lenyap sama sekali. Bagaimanapun, sistem tersebut sudah begitu mantap pada tahun 1770-an dan sangat banyak pembesar mengikutinya demi kepentingan mereka sendiri, sehingga sistem itu tidak akan pernah tumbang. Legitimasi yang dapat diklaim oleh masing-masing pihak pada abad Jawa yang baru didasarkan pada suatu khayalan, tetapi hal itu sudah cukup bagi para pembesar senior, yang telah menarik kesimpulan bahwa tidak ada alternatif untuk pembagian kerajaan tersebut.

Dengan demikian, pembagian yang tetap atas Jawa Tengah antara dua istana tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Setiap

pihak, baik Hamengkubuwana I maupun Pakubuwana III, dapat terus memerintah tanpa merasa takut adanya tantangan dari pihak lainnya. Walaupun masih ada masalah, tetapi kini masalah itu lebih bersifat intern di dalam daerah kekuasaan masing-masing. Tinggal rasa permusuhan yang masih berlanjut antara Hamengkubuwana I dan Mangkunegara I yang menyebabkan timbulnya ketegangan-ketegangan yang menerobos perbatasan Yogyakarta dan Surakarta. Akan tetapi, posisi Mangkunegara I juga berubah. Dia tampaknya telah menanggalkan semua rencana yang serius untuk menguasai tahta salah satu istana. Sebagai gantinya, dia memusatkan perhatiannya pada usaha memantapkan daerah kekuasaannya. Walaupun status daerah kekuasaannya masih belum jelas, pembentukan suatu lembaga kepangeranan di Surakarta yang permanen, dapat diwariskan, tetapi masih merupakan kekuasaan di bawah kekuasaan yang lebih tinggi mulai mendapatkan bentuk.

Seiring berlalunya waktu, generasi tua yang telah merancang pembagian kerajaan yang permanen itu mulai ditantang oleh generasi muda yang baru muncul. Di Yogyakarta, Putra Mahkota (lahir ± 1749–50) memperoleh kekuasaan yang lebih besar, yang kadang-kadang menimbulkan perasaan tidak senang pada diri ayahnya. Pemerintahannya kelak sebagai Sultan Hamengkubuwana II (lihat bab 11) hampir tidak dapat dikatakan berhasil, tetapi ketika kekuasaannya mulai bertambah besar pada tahun 1770-an dan 1780-an, penampilannya seperti orang yang mempunyai bakat yang hebat. Dia mengetahui kelemahan militer VOC. Ketika pengaruhnya di istana semakin besar, perhatiannya terhadap VOC semakin lama semakin berkurang. Sebagian besar tragedi nanti yang terjadi pada masa pemerintahannya sebagai sultan disebabkan oleh kegagalannya mengetahui perubahan kekuatan bangsa Eropa yang terjadi pada awal abad XIX. Pengaruh Putra Mahkotalah yang menyebabkan dibangunnya secara mendadak perbentengan bergaya Eropa yang besar di sekeliling istana pada tahun 1785, dan pada saat itu agaknya Sultan telah secara resmi menyerahkan sebagian besar kekuasaannya kepada putranya itu.

Hamengkubuwana I sendiri makin kurang peduli dalam memelihara persahabatan dengan Belanda. Tujuan utama aliansinya dengan VOC, yakni penghancuran Mangkunegara I, tidak pernah tercapai. Setelah tahun 1757, VOC dalam beberapa kesempatan menolak permintaan Sultan supaya mengasingkan Mangkunegara

I. Sementara itu, kesultanan itu sendiri semakin lama semakin kuat, makmur, stabil, dan nyata-nyata merupakan kekuatan militer yang paling menonjol di Jawa Tengah. Hamengkubuwana I tetap mempertahankan aliansinya dengan VOC, tetapi dia memperlihatkan perasaan tidak puasnya yang semakin besar terhadap mereka pada beberapa kesempatan. Misalnya, dari tahun 1777 sampai akhir masa pemerintahannya, dia tidak bersedia mengirim utusan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada para gubernur jenderal baru, karena dia tidak bersedia menerima perubahan protokol VOC yang dirasa merendahkan martabatnya. Sebaliknya, Pakubuwana III menerima aturan-aturan baru itu.

Di Surakarta, masalah-masalah intern terus berkembang. Ketidakcakapan Pakubuwana III secara umum, berbagai persekongkolan istana, dan perilaku pejabat-pejabat VOC yang buruk bahkan menurut ukuran masa itu, mulai mengancam keamanan dan stabilitas di sana. Pihak Belanda sepenuhnya memercayai kesetiaan Pakubuwana III, tetapi mulai mencemaskan kondisi kerajaannya yang nyata-nyata sangat lemah. Mereka tidak pernah memercayai Mangkunegara I dan cenderung menyalahkannya atas timbulnya banyak ketegangan di Surakarta. Akan tetapi, Mangkunegara I mulai menunjukkan kesetiaan dan kerja sama yang lebih besar kepada Pakubuwana III maupun VOC pada tahun 1780-an, agaknya dengan harapan agar mereka bersedia menetapkan keturunannya sebagai pewaris kedudukannya.

Ujian besar pertama terhadap ketahanan pembagian kerajaan terjadi ketika Pakubuwana III wafat pada tahun 1788 dan kedudukannya sebagai Susuhunan Surakarta digantikan oleh putranya yang baru berumur 19 tahun, Pakubuwana IV (m. 1788–1820). Dia membawa aspirasi-aspirasi yang tidak realistis dan senantiasa tidak mampu menilai lingkungan politiknya di istana yang diliputi ketegangan dan persekongkolan, di mana beberapa personel VOC yang paling korup dan tidak cakap menjalankan tugas mereka. Pada awal tahun 1789, Pakubuwana IV mulai mengangkat suatu kelompok baru yang disenanginya pada jabatan-jabatan yang tinggi. Orang-orang ini menganut ide-ide keagamaan yang ditentang oleh hierarki keagamaan yang sudah mapan di Surakarta. Mereka meyakinkan Raja agar beranggapan bahwa Surakarta dapat menjadi kerajaan Jawa yang lebih senior, dan dengan demikian meniadakan asas kesetaraan yang mendasari

pembagian permanen antara Surakarta dan Yogyakarta. Istana Yogyakarta merasa yakin bahwa Pakubuwana IV sedang merencanakan perang untuk mempersatukan kembali kerajaan. Sesungguhnya, langkah militer tidaklah diambil. Alih-alih, cita-cita Pakubuwana IV dicapai dengan jalan mendesak VOC agar mengakui kedudukan utama Surakarta.

Desas-desus mulai tersebar. Mangkunegara I mencemaskan masa depannya sendiri dan keturunannya; Yogyakarta merasa khawatir akan stabilitas pembagian kerajaan; tokoh-tokoh terkemuka Surakarta yang tersisih mencemaskan nasib mereka dan nasib kerajaan. Mereka semua mulai berusaha mengajak VOC agar mau bergabung dengan mereka melawan Pakubuwana IV. VOC terlambat menyadari adanya suatu ancaman, walaupun gubernur wilayah pesisir timur laut mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan Residen Surakarta, W.A. Palm (1784–8), yang korup dan pemeras telah menimbulkan rasa benci raja baru tersebut terhadap bangsa Eropa. Bagaimanapun, pada Juli 1789, pihak Belanda tiba-tiba tergoncang karena ada desas-desus bahwa Pakubuwana IV dan para penasihatnya yang baru merencanakan suatu pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Eropa yang berada di Jawa. Kemudian, pada bulan September 1789, residen VOC di Surakarta, Andries Hartsinck (1788–90), diketahui pergi menghadiri suatu pertemuan rahasia di istana pada suatu malam dengan memakai busana Jawa. VOC kini mulai merasa khawatir bahwa pengkhianatan bahkan telah menyusup ke dalam benteng mereka di Surakarta. Sesungguhnya, desas-desus tentang pembantaian terhadap orang-orang Eropa tersebut kemungkinan tidak benar dan peranan Hartsinck tidak pernah dijelaskan seluruhnya. Namun demikian, VOC mulai panik. Pada saat itu, Hamengkubuwana I sudah tua dan kadang kala jatuh sakit. Belanda khawatir beliau wafat dan krisis pergantian raja di Yogyakarta akan mengundang intervensi militer oleh pihak Surakarta.

Istana Yogyakarta semakin menyebarkan rumor yang lebih menggemparkan kepada VOC. Dengan cara begini, istana Yogyakarta pada akhirnya berhasil meyakinkan orang-orang Belanda bahwa diperlukan langkah-langkah militer untuk menghentikan rencana-rencana Pakubuwana IV. Baik Hamengkubuwana I maupun Mangkunegara I sama-sama percaya bahwa ancaman yang mungkin timbul dari sejumlah rencana Pakubuwana IV itu akan

sedemikian dahsyatnya sehingga, untuk pertama kalinya dalam hampir 40 tahun, mereka bekerja sama. Kini, Mangkunegara I menerima 4.000 real setiap tahun dari VOC untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan pada Pakubuwana IV dan untuk memastikan dukungannya terhadap tindakan-tindakan VOC. Kemudian, pada tahun 1792, VOC juga menetapkan bahwa keturunan Mangkunegara I akan mewarisi daerah kekuasaannya yang terdiri atas 4.000 cacah; dengan demikian, daerah kadipaten Mangkunegaran menjadi suatu lembaga yang permanen.

Pada November 1790, musuh-musuh Pakubuwana IV mulai mengepung istana. Beberapa ribu prajurit dari Yogyakarta dan daerah Mangkunegara I mengambil posisi di sekitar Surakarta. VOC mengirim ratusan serdadu Madura, Bugis, Melayu, dan Eropa ke bentengnya yang berada di dalam kota. Para pangeran dan pejabat tinggi senior Surakarta menambah tekanan terhadap Pakubuwana IV supaya menyingkirkan penasihat-penasihatnya dan meninggalkan rencana-rencana mereka sebelum mereka membuat kerajaan hancur. Sultan Hamengkubuwana I mulai berpikir bahwa penggabungan Surakarta sekarang sudah dimungkinkan; dia mengajukan permintaan kepada VOC agar putra mahkotanya dijadikan raja di sana seandainya Pakubuwana IV dimakzulkan. Tetapi, VOC menolak permintaan itu karena diam-diam telah memutuskan untuk mengakui Mangkunegara I sebagai Raja Surakarta seandainya Pakubuwana IV nanti dimakzulkan.

Akhirnya, Pakubuwana IV sadar bahwa posisinya tidak mungkin tertolong lagi. Pada 26 November 1790, dia menyerahkan para penasihatnya kepada VOC dan mereka segera diasingkan. Dia memohon pengampunan kepada VOC, yang dengan cepat dikabulkan. VOC merasa lega karena tidak jadi mengeluarkan biaya perang dan generasi tua mempunyai pengaruh lagi di Surakarta. Pembagian yang permanen atas Jawa Tengah berhasil dipertahankan: kepentingan-kepentingan pribadi yang menopangnya sedemikian rupa sehingga bahkan para anggota keluarga terdekat seorang raja dan para pegawai istana pun akan menentang usaha sang raja untuk merusaknya. Bagi Yogyakarta, penyelesaian krisis ini hanya merupakan keberhasilan yang parsial. Mereka telah berhasil mendesak VOC untuk bertindak, tetapi tidak berhasil menurunkan status Surakarta.

Krisis tahun 1790 itu telah melibatkan kekuatan-kekuatan supernatural, kekuatan-kekuatan magis yang diklaim oleh para

guru-raja yang baru, dan perdebatan-perdebatan tentang apa itu pengetahuan agama yang tepat. Dalam konteks ini, pada bulan puasa berikutnya, Mei 1791, para pembesar Surakarta menghasilkan versi baru dari *Iskandar* dan *Yusup*, dua karya tulis berkekuatan spiritual yang ditulis atas perintah Ratu Pakubuwana pada tahun 1729–30, yang mengacu kembali pada teks-teks yang ditulis saat ziarah Sultan Agung ke Tembayat pada tahun 1633. Versi baru ini secara khusus diklaim sebagai turunan dari versi Ratu Pakubuwana dan muncul sebagai bagian dari upaya istana Surakarta untuk memanggil kekuatan supernatural untuk menangani krisis 1790. *Yusup* versi 1791 juga memuat peringatan agar menghindari guru palsu, nasihat yang mungkin ditujukan langsung buat Pakubuwana IV. Tampaknya ia pun menerima nasihat ini, paling tidak untuk sesaat. Kitab pengajaran yang dianggap berasal dari Raja sendiri, berjudul *Wulang Reh*, 'Ajaran Perilaku', dibuka dengan peringatan agar memilih guru yang memiliki perhatian besar dan berpegang pada dasar-dasar hukum Islam.

Krisis 1790 menghasilkan sebuah perjanjian baru yang merumuskan unsur-unsur pokok dari pembagian yang permanen atas Jawa Tengah. Atas desakan VOC, perjanjian ini ditandatangani oleh Pakubuwana IV, Hamengkubuwana I, Mangkunegara I, dan Gubernur VOC untuk wilayah pesisir timur laut, Jan Greeve (1787–91), pada bulan September–November 1790. Tentu saja, perjanjian ini merupakan sepucuk surat yang tidak ada artinya sampai setelah menyerahnya Pakubuwana IV pada akhir bulan November. Perjanjian baru ini lebih maju dari perjanjian-perjanjian sebelumnya karena nyata-nyata mengakui Mangkunegara I sebagai penandatangan, yang dengan demikian berarti mengakui kedudukannya yang khusus di atas pangeran-pangeran lainnya. Juga, perjanjian ini secara resmi mengakui bahwa VOC merupakan pengadilan banding yang terakhir bagi sengketa-sengketa yang tak terpecahkan di antara para penandatangan yang berkebangsaan Jawa itu. Sebagaimana campur tangan militer VOC dari tahun 1677 ikut berperan atas terjadinya pembagian kerajaan, maka begitu pula kelanjutan kehadirannya kini diakui sangat penting bagi berlakunya pembagian tersebut atas dasar yang kokoh.

Hamengkubuwana I wafat pada Maret 1792, pada usia kira-kira 80 tahun, setelah menjadikan Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan yang makmur, permanen, dan kuat. Dia mewariskan suatu

tradisi kejayaan yang ingin diteruskan oleh putranya yang kini bergelar Sultan Hamengkubuwana II (m. 1792–1810, 1811–2, 1826–8). Akan tetapi, persekongkolan-persekongkolan sudah terbentuk di antara para pembesar Yogyakarta yang termasuk generasi muda. Dan keyakinan mereka bahwa bangsa Eropa merupakan faktor yang dapat diabaikan atau dimanfaatkan semaunya segera kehilangan basis dalam kenyataannya. Meskipun demikian, sejenis pemulihan telah tercapai pada tahun 1792. Yogyakarta merupakan kerajaan Jawa yang paling merdeka dan paling kuat sejak abad XVII, dan Hamengkubuwana I merupakan raja yang terbesar dari dinasti Mataram sejak Sultan Agung. Akan tetapi, kerajaan Jawa tersebut terbagi secara tetap sehingga tidak dapat bersatu padu dalam menghadapi ancaman orang-orang Eropa yang akan muncul dari puing-puing VOC pada awal abad XIX.

Di Banten, sebuah kerajaan besar yang lain di Jawa, telah timbul pula kesulitan-kesulitan pada pertengahan abad XVIII, tetapi akibat yang timbul di sini sangat berbeda dari yang terjadi di Jawa Tengah. Banten jauh lebih dekat dengan Batavia dan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Surakarta dan Yogyakarta. Demi keamanan militer Batavia dan Priangan, dan dikarenakan pentingnya arti finansial Banten sebagai sumber lada, maka pihak Belanda tidak dapat mengabaikan adanya instabilitas di daerah itu. Kekuasaan yang telah ditegakkan VOC di Banten pada tahun 1682 (lihat bab 8) mulai digerogoti persekongkolan-persekongkolan istana selama masa pemerintahan Sultan Zainul Arifin (1733–48). Istrinya yang berkebangsaan Arab, Ratu Sarifa, merancang terjadinya konflik antara Zainul Arifin dan putranya, putra mahkota, yang berakhir dengan dibuangnya sang pangeran ke pengasingan dan diangkatnya kemenakan laki-laki Sarifa sebagai putra mahkota yang baru pada tahun 1747. Akan tetapi, putra mahkota yang baru ini terlalu muda untuk memerintah, dan Zainul Arifin menunjukkan tanda-tanda penyakit jiwa. Oleh karena itu, atas persetujuan Ratu Sarifa, VOC menangkap Sultan dan membuangnya ke Ambon pada November 1748. Kemudian Sarifa diangkat menjadi wali atas nama VOC, yang mengumumkan kekuasaan langsungnya atas Banten sampai tercapainya persetujuan lebih lanjut mengenai lembaga kesultanan tersebut.

Perwalian Sarifa ini segera memancing timbulnya oposisi di dalam negeri. Kalangan elite Banten mengeluh bahwa dia telah

mengesampingkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan kebijakannya yang menindas telah menuai protes dari kalangan rakyat jelata maupun kaum bangsawan. Pada Oktober 1750, meletus sebuah pemberontakan besar di bawah pimpinan seorang guru agama bernama Kyai Tapa. Pasukan VOC sedang berada dalam kondisi yang buruk, dan sudah begitu dalam terlibat dalam Perang Suksesi Jawa III. Pada November 1750, pasukan gabungan Ratu Sarifa dan VOC, yang seluruhnya berjumlah 800 orang, dikalahkan oleh kaum pemberontak tersebut. Segera sesudah itu suatu pasukan VOC yang berjumlah 460 orang (termasuk lebih dari 300 orang Eropa) dipukul mundur oleh pasukan lawan yang diperkirakan berjumlah 7.000 orang, dengan korban lebih dari 30 opsir dan serdadu berkebangsaan Eropa. VOC mampu mempertahankan dua buah bentengnya di dalam kota, tetapi sebagian besar wilayah Banten jatuh ke tangan kaum pemberontak. Mereka juga mulai mengancam perbatasan-perbatasan Batavia, dan memaksa VOC untuk meninggalkan posnya yang terletak di Tulang Bawang, Lampung. VOC melihat perlunya mengambil langkah-langkah yang lebih hebat apabila tidak ingin menderita kekalahan di Mataram dan Banten.

Pada November 1750, Batavia memerintahkan komandan VOC di Banten untuk menangkap serta mengirim Ratu Sarifa dan kemenakan laki-lakinya, putra mahkota, ke tempat pengasingan. Pada bulan Maret 1751, Ratu Sarifa wafat di Pulau Edam di Teluk Batavia. Tahta diserahkan kepada Pangeran Arya Adi Santika, saudara laki-laki Sultan Zainul Arifin yang sedang dalam pengasingan. Adi Santika menerima kedudukan 'Wali-Sultan' hanya sampai penggantinya yang sah, putra mahkota yang telah diasingkan pada tahun 1747, kembali. Pengangkatan Adi Santika tidak menyebabkan rakyat Banten meninggalkan pemberontakan. Batavia mengirim sebanyak mungkin pasukan ke Banten, dan pada bulan Januari 1751 ada lebih dari 1.000 orang serdadu berkebangsaan Eropa dan 350 orang berkebangsaan Indonesia (terutama serdadu-serdadu Bali) di sana. Walaupun sebagian besar serdadu-serdadu tersebut sedang sakit, tetapi mereka yang sehat berhasil memukul mundur kaum pemberontak dari kota. Kemudian Kyai Tapa mulai melakukan pembakaran, perampokan, dan pembunuhan di dataran-dataran tinggi Batavia; hampir setiap perkebunan milik orang Eropa dimusnahkan. Akan tetapi, kubu pertahanannya yang utama akhirnya dapat direbut pada bulan Sep-

tember 1751. Kyai Tapa dan pewaris tahta yang didukungnya, Ratu Bagus Buang, berhasil menyelamatkan diri. Bagus Buang dibunuh pada tahun 1755. Untuk beberapa waktu, Kyai Tapa terus melancarkan serangan-serangan yang tidak teratur terhadap VOC di Selat Sunda, di dekat Bandung, dan Bogor (Buitenzorg). Sesudah itu, dia pergi ke arah timur ke dalam daerah Perang Suksesi Jawa III, dan dia akhirnya menghilang.

Putra Sultan Zainul Arifin yang diasingkan telah dibawa kembali dari Sri Lanka pada tahun 1753 dan diangkat menjadi Sultan Zainul Asyikin (m. 1753–77). Setelah itu, Banten secara resmi menjadi suatu wilayah jajahan VOC. Banten kembali damai, tetapi perdamaian di sini tidak seperti perdamaian yang dapat dinikmati di Jawa Tengah. Di Banten, perdamaian tercapai bersama-sama dengan ketundukan kepada kekuasaan VOC. Memang masih banyak masalah yang harus dihadapi, dan perasaan benci terhadap VOC tidak pernah benar-benar sirna, tetapi pengaruh VOC di Banten tidak pernah lagi mendapat tantangan serius.

Pengalaman rakyat Banten adalah luar biasa. Di luar Jawa, abad XVIII menunjukkan pengurangan umum kedudukan-kedudukan VOC pada tingkat yang lebih kecil seiring dengan penarikan mundur kekuatannya ke daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur. VOC tidak lagi bersaing ketat dengan bangsa Eropa lainnya di Indonesia, kecuali dengan orang-orang Inggris di Sumatera Selatan. Pos-pos yang letaknya jauh, seperti di Timor, Makasar, Palembang, Padang, dan Kalimantan Selatan, pada dasarnya sekadar menjadi lambang kehadiran VOC belaka. Bahkan, monopoli cengkih VOC di Ambon juga tumbang; pada tahun 1769–72, dua ekspedisi Prancis merampas tanaman-tanaman cengkih di sana dan membawanya ke Mauritius, dan segera juga ke wilayah-wilayah jajahan Prancis lainnya. Kondisi keuangan VOC mengalami kemunduran. VOC sangat letih karena menghadapi banyak peperangan, dan tidak menghendaki terjadinya perang lagi. Usahanya yang utama kini beralih ke produksi teh dan kopi di dataran-dataran tinggi Priangan. Imperium Belanda yang pertama di Indonesia ini terlena dalam tidur yang pulas di tengah-tengah merajalelanya korupsi, ketidakefisienan, dan krisis keuangan.[]

III

Pembentukan Negara Jajahan, ± 1800–1910

Bab 11

Jawa, 1792–1830

PADA DASAWARSA terakhir abad XVIII, kerajaan Surakarta dan Yogyakarta menghadapi banyak masalah, tetapi kedua kerajaan ini lebih merdeka dari tekanan orang-orang Eropa daripada kerajaan-kerajaan Jawa lainnya sejak akhir abad XVII. Golongan elite bangsawan masih tetap berkuasa, dan di Yogyakarta khususnya telah diselesaikan suatu pemulihan kerajaan secara besar-besaran. Akan tetapi, segera konflik-konflik internal menimbulkan krisis bagi Yogyakarta, justru ketika ancaman orang-orang Eropa muncul lagi secara tiba-tiba. Akibatnya adalah hancurnya kemerdekaan Jawa secara total dalam waktu kurang dari empat puluh tahun sesudah wafatnya Hamengkubuwana I, dan dimulainya zaman penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah Jawa.

Perdamaian telah berlangsung sejak tahun 1750-an, dan jumlah penduduk Jawa mulai bertambah dengan pesat, yang terutama akan mencolok pada abad XIX. Walaupun semua angka statistik selama kurun waktu itu diragukan, namun agaknya jumlah penduduk Surakarta dan Yogyakarta pada tahun 1755 tidak lebih (dan mungkin kurang) dari sekitar 690.000 jiwa sampai satu juta jiwa, sedangkan pada tahun 1795 jumlahnya sekitar 1,4 sampai 1,6 juta jiwa. Kawasan pertanian meningkat pesat, dan masih terdapat pula tanah bagi pengembangan lebih lanjut.

Penduduk Jawa menikmati kesejahteraan dalam pelbagai segi, dan Yogyakarta khususnya merupakan sebuah kerajaan yang sangat kuat. Misalnya, jumlah prajurit profesional Sultan Hamengkubuwana II pada sekitar tahun 1808 mencapai 1.765 orang dan, setidaknya secara teori, dia dapat mengumpulkan pasukan sebanyak 100.000 prajurit lebih dari negeri-negeri taklukannya. Situasi pihak Belanda sangat berbeda: garnisun Belanda di Yogyakarta

pada tahun 1803 hanya berjumlah 89 orang serdadu, sebagian besar masih sangat muda atau terlalu tua dan melakukan berbagai tingkatan kejahatan dan/atau menderita bermacam-macam penyakit. Akan tetapi, di kedua kerajaan Jawa ini terdapat masalah-masalah intern. Pakubuwana IV dari Surakarta (m. 1788–1820) adalah seorang yang pikirannya berubah-ubah yang tidak menyukai kehadiran istana Yogyakarta dan ingin membalas dendam atas penghinaan yang dideritanya pada tahun 1790 (lihat bab 10). Hamengkubuwana II dari Yogyakarta (m. 1792–1810, 1811–12, 1826–8) adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kemerosotan Yogyakarta pada kurun waktu ini, dan akan dibahas di bawah ini.

Daerah-daerah pesisir utara yang berada di bawah kekuasaan VOC sejak 1743–6 kurang dipelajari. Bagaimanapun juga, daerah-daerah itu telah berkembang. Sekali lagi, semua penghitungan angka penduduk sangat diragukan, tetapi agaknya jumlah penduduk daerah-daerah pesisir dan Madura tidak lebih dari sekitar 380.000 sampai 490.000 jiwa pada tahun 1755, sedangkan pada tahun 1795 jumlahnya mungkin sudah mencapai 1,5 juta jiwa. Laju pertambahan penduduknya dengan demikian jauh lebih besar daripada laju pertambahan penduduk di kerajaan-kerajaan Jawa, suatu perbedaan yang agaknya menunjukkan telah terjadinya imigrasi intern ke daerah pesisir.

VOC sendiri sudah hampir gulung tikar. Selama Perang Inggris IV (1780–84), VOC di Indonesia semakin terpisah dari negeri Belanda. VOC bukan hanya harus meminjam sekitar 2.300 prajurit dari Surakarta dan Yogyakarta guna mempertahankan Batavia dari serangan yang diduga akan dilancarkan oleh pihak Inggris (yang tidak pernah terjadi), melainkan juga meminta bantuan keuangan kepada pemerintah di negeri Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai penyelidikannya terhadap kondisi VOC dan berhasil mengungkapkan kebangkrutan, skandal, dan salah urus di segala segi. Dalam kurun Desember 1794 sampai Januari 1795, Prancis menyerbu negeri Belanda dengan penuh sukses dan membentuk pemerintahan bonekanya di sana. Pada tahun 1796, *Heeren XVII* dibubarkan dan digantikan oleh suatu komite baru. Sesudah itu, pada tanggal 1 Januari 1800, VOC pun secara resmi dibubarkan. Wilayah-wilayah yang menjadi miliknya kini menjadi milik pemerintah Belanda. Akan tetapi, hanya perubahan kecil

yang terjadi di Indonesia, karena para pemegang jabatan masih tetap orang-orang lama dan tetap pula melakukan cara-cara lama.

Hubungan Belanda dengan Jawa dapat dikatakan agak stabil pada tahun 1792. Dalam teori, pihak Belanda berkuasa secara langsung atas daerah pesisir utara, tetapi dalam kenyataannya para penguasa lokal (bupati)-lah yang bertindak sebagai wakil-wakil mereka. Di wilayah pedalaman, perjanjian tahun 1749 yang telah menyerahkan kedaulatan atas Kerajaan Mataram kepada VOC tidaklah mempunyai arti, dan hubungan pihak Belanda dengan istana-istana Jawa dalam kenyataannya hanya berbentuk persekutuan belaka. Para residen Belanda di istana-istana bertugas sebagai duta, bukan sebagai penguasa-penguasa penjajah. Pihak Jawa telah menciptakan justifikasi mitologis bagi hubungan mereka dengan pihak Belanda, yang ditemukan terutama di dalam teks-teks yang berjudul *Serat Baron Sekendher* ('Kitab tentang Baron Sakendher'). Teks-teks ini menggambarkan orang-orang Belanda sebagai ahli waris bagi kedaulatan (dan kekuatan-kekuatan supranatural) Pajajaran di Jawa Barat dan sekutu senior alami dari raja-raja Jawa Tengah, tetapi bukan sebagai kekuatan yang berdaulat di Jawa Tengah. Kelemahan militer pihak Belanda dan kekuatan militer negara-negara Jawa, khususnya Yogyakarta, mengandung arti bahwa tidak mungkin ada tuntutan di pihak Belanda untuk menjadi penguasa yang berdaulat di wilayah pedalaman.

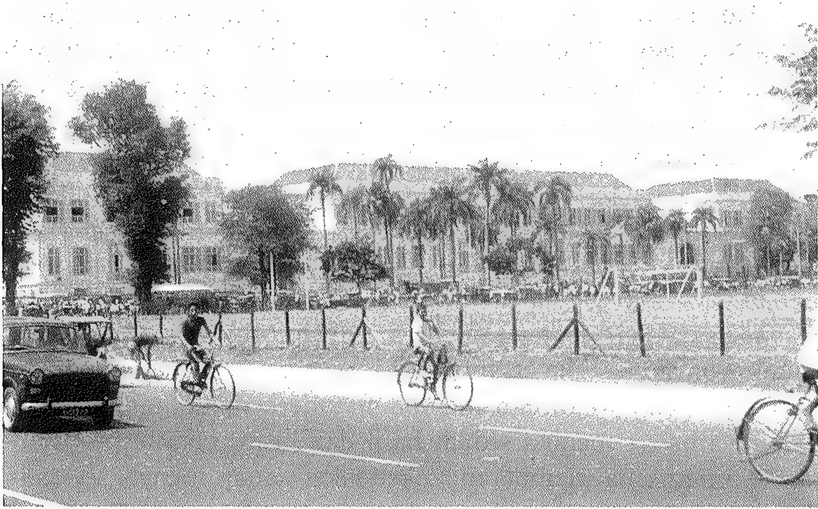
Akan tetapi, keunggulan militer Yogyakarta terancam oleh pemerintahan Hamengkubuwana II, yang mulai merusak mufakat golongan elite yang sangat penting artinya bagi kekuatan dan stabilitas. Sultan ini bertikai dengan saudara-saudaranya, terutama dengan Pangeran Natakusuma (1764–1829) yang cerdik, cakap, dan berpengaruh di istana. Sebagian besar penasihat dan pejabat Hamengkubuwana I sudah meninggal dunia atau berusia sangat lanjut, dan Hamengkubuwana II segera mengganti mereka dengan orang-orangnya sendiri yang disukainya tetapi yang kurang cakap. Patih ayahnya yang cakap, Danureja I (1755–99), diganti oleh cucunya, Danureja II (1799–1811); dia tidak efisien dan segera menggalang persekutuan yang erat dengan suatu klik istana yang mengelilingi putra mahkota (kelak bergelar Hamengkubuwana III). Sistem perpajakan dan kerja paksa yang diberlakukan Sultan dengan cepat menjadi semakin menindas. Proyek-proyek pembangunannya di istana meletakkan beban kerja yang sangat

berat terhadap rakyat dari daerah-daerah luar *(mancanegara)*. Penghinaannya terhadap kelemahan VOC segera mengakibatkan semakin memburuknya hubungannya dengan orang-orang Belanda yang berada di istananya. Dan ketiga orang istrinya menjadi semakin berpengaruh sebagai penengah persekongkolan istana. Dari semua keadaan itu, perasaan tidak tentu dan tidak puas semakin berkembang.

Di Surakarta, Pakubuwana IV maupun Pangeran Adipati Arya Mangkunegara II (m. 1796–1835; pada awal masa pemerintahannya dikenal sebagai Pangeran Prangwadana) berusaha mengisolasikan Yogyakarta dan meminta kepada pihak Belanda untuk berbalik melawan Sultan. Mangkunegara II mempunyai alasan untuk membenci orang-orang Belanda, karena pada waktu pengangkatannya, semua harta yang ia warisi disita oleh residen Belanda di Surakarta, J. Frederik Baron van Reede tot de Parkeler (1790–6). Orang ini mungkin dapat dianggap sebagai pejabat yang paling korup selama sejarah VOC, suatu status yang ditandai dengan ketidakjujuran yang benar-benar luar biasa. Baru pada tahun 1809, Mangkunegara II berhasil memperoleh kembali harta warisannya setelah melalui proses pengadilan yang lama sekali. Meskipun demikian, dia memutuskan bahwa masa depannya lebih terjamin apabila dia bekerja sama dengan orang-orang Belanda, satu-satunya pelindung dari ancaman permusuhan Susuhunan maupun Sultan. Pada tahun 1808, atas perintah Daendels (lihat di bawah), Mangkunegara II membentuk 'Legiun Mangkunegara' yang terdiri atas prajuritnya sendiri dengan bantuan keuangan pihak Belanda. Dia dianugerahi pangkat kolonel dan diberi 10.000 *ryksdaalders* lebih setiap tahun sebagai gaji dan dukungan terhadap legiun yang beranggotakan 1.150 orang prajurit itu. Legiunnya ini akan melaksanakan banyak tugas dalam persekutuan dengan pihak pemerintah kolonial di masa mendatang, termasuk penyerangan terhadap Yogyakarta pada tahun 1812, Perang Jawa 1825–30, dan Perang Aceh pada tahun 1873–4. Pakubuwana IV juga berusaha mengambil hati pihak Belanda, tetapi pada saat yang sama bertindak seolah-olah bersahabat dan ramah terhadap Hamengkubuwana II. Tujuannya adalah merekayasa kehancuran Yogyakarta. Karena hubungan Hamengkubuwana II dengan pihak Belanda semakin memburuk dan perlawanan di daerah kekuasaannya semakin bertambah besar, maka jelas dia akan menjadikan bulan-bulanan musuh-musuhnya.

Pada tahun 1808 mulai berlangsung suatu zaman baru dalam hubungan Jawa–Eropa. Negeri Belanda telah berada di bawah kekuasaan Prancis sejak tahun 1795. Sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar, maka Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon, sebagai penguasa di negeri Belanda pada tahun 1806. Pada tahun 1808, Louis mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia untuk menjadi gubernur-jenderal (1808–11) dan untuk memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis melawan Inggris di Samudra Hindia. Daendels adalah seorang pemuja prinsip-prinsip pemerintahan yang revolusioner. Dia membawa ke Jawa suatu perpaduan antara semangat pembaruan dan metode-metode kediktatoran, yang sebenarnya hanya menuai sedikit hasil dan justru banyak perlawanan. Dia berusaha memberantas ketidakefisienan, penyelewengan, dan korupsi yang menyelimuti administrasi Eropa, tetapi banyak dari langkah-langkah pembaruannya tak begitu berhasil. Dia memiliki perasaan tidak suka, yang muncul dari naluri-naluri antifeodalnya, terhadap para penguasa Jawa (bupati) di daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Bagi Daendels, mereka bukan penguasa atau pemimpin atas masyarakat mereka melainkan pegawai administrasi Eropa. Dia pun mengurangi wewenang dan penghasilan mereka.

Daendels memperlakukan para penguasa Jawa Tengah seolah-olah mereka merupakan vasal-vasal Batavia. Menurut hukum, tindakannya itu betul, karena perjanjian tahun 1749 telah menyerahkan kedaulatan kepada VOC. Akan tetapi, Batavia sesungguhnya tidak pernah berusaha melaksanakan kekuasaannya di wilayah pedalaman. Para residen di istana-istana kini dinamakan 'Minister', bukan 'Residen'. Mereka dipandang bukan sebagai duta dari sekutu yang satu untuk sekutu yang lain, melainkan sebagai wakil-wakil lokal dari kekuasaan pemerintahan Eropa, yang diwakili di Batavia oleh gubernur-jenderal. Dalam semua urusan protokol, mereka mulai sederajat dengan raja-raja Jawa. Ini merupakan suatu pelanggaran langsung terhadap hubungan yang sudah terjalin sejak tahun 1750-an. Sesuai dengan kepribadian dan kebijakan mereka, Pakubuwana IV menyambut baik perubahan-perubahan tersebut tetapi Hamengkubuwana II menolaknya. Dari sinilah bermula suatu periode konflik yang panjang yang akan berakhir dengan meletusnya Perang Jawa.



Bekas kediaman Gubernur Jenderal H.W. Daendels (1808–11), di Medan Merdeka, Jakarta

Daendels tidak membawa pasukan baru bersamanya, tetapi dia segera meningkatkan jumlah pasukannya yang sebagian besar terdiri atas orang-orang Indonesia, dari 4.000 menjadi 18.000 orang. Serdadu-serdadu tersebut tidak mempunyai disiplin yang baik dan berkelakuan buruk dalam beberapa peristiwa. Meskipun demikian, kekuatan militer pihak Eropa di Jawa tidak boleh diabaikan lagi. Akan tetapi, Hamengkubuwana II tetap saja mengabaikannya. Dia menentang semua yang diwakili oleh Daendels: suatu zaman baru dalam sikap Eropa, di mana pelaksanaan kedaulatan atas seluruh penduduk Jawa dan pembaruan atas masyarakat Jawa dianggap sebagai tujuan pemerintah yang tepat dan benar.

Tanggapan-tanggapan Pakubuwana IV yang semakin cerdik meyakinkan Daendels bahwa dia bersedia bekerja sama, tetapi tampaknya Hamengkubuwana II sedang bersiap-siap melancarkan perang. Sebenarnya, tampaknya dia belum bermaksud melancarkan perang total pada tahap ini, tetapi kecurigaan Daendels telah memperbesar ancaman bahaya terhadap posisi Yogyakarta. Pada tahun 1810, kepala pemerintahan Sultan untuk wilayah-wilayah luar *(mancanegara)*, Raden Rangga, melancarkan sebuah pemberontakan terhadap pemerintahan Eropa. Dia saudara ipar Sultan dan mendapat dukungan secara diam-diam dari Sultan dan

kalangan bangsawan Yogyakarta. Pemberontakan ini berhasil ditumpas dengan mudah dan Rangga terbunuh, tetapi putranya, Sentot, masih hidup untuk memainkan peranan penting dalam Perang Jawa. Sementara itu, semakin meningkatnya ketegangan di dalam istana mendorong Sultan untuk melangkahi Patih Danureja II (yang, menurut perjanjian, jabatannya merupakan penunjukan bersama Jawa-Belanda) dan menyerahkan wewenangnya kepada Pangeran Natadiningrat, putra saudara Sultan yang bernama Natakusuma.

Pemberontakan Raden Rangga menyebabkan dikeluarkannya ultimatum oleh Daendels yang ditujukan kepada Hamengkubuwana II. Dia harus menyetujui perubahan terhadap upacara istana yang berkaitan dengan kedudukan 'Minister' Eropa, mengangkat kembali Danureja II dengan kekuasaan penuh, dan bertanggung jawab atas pemberontakan Rangga. Sultan menolak sehingga, pada bulan Desember 1810, Daendels bergerak menuju Yogyakarta dengan membawa 3.200 serdadu dan memaksa Hamengkubuwana II turun tahta dan menyerahkannya kepada putranya yang kini menjadi 'wakil raja' (Hamengkubuwana III, m. 1810–1, 1812–4). Uang rampasan sebesar kira-kira 500.000 gulden diambil oleh pihak Eropa. Namun, atas desakan si 'wakil raja', Hamengkubuwana II diperkenankan tetap tinggal di Yogyakarta.

Pada bulan Januari 1811, Daendels memaksakan perjanjian-perjanjian baru, yang melibatkan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan Belanda, kepada Surakarta maupun Yogyakarta. Sesuai dengan anggapan Daendels bahwa pemerintah koloniallah yang berdaulat maka uang sewa daerah pesisir, yang selama ini telah dibayarkan oleh Batavia sejak tahun 1746, kini dihapuskan. Dengan demikian, dengan sekali pukul, Deandels telah menghapuskan insentif finansial yang paling penting bagi istana-istana Jawa untuk bersedia menerima pemerintahan orang-orang Eropa atas daerah pesisir, dan meniadakan sumber utama penghasilan istana. Dia kemudian mengasingkan Pangeran Natakusuma dan putranya, Natadiningrat, ke penjara di Cirebon, karena dia yakin bahwa mereka telah begitu jauh terlibat dalam pemberontakan Rangga. Walaupun tidak memerintahkan supaya mereka dibunuh, namun dia memberitahukan bahwa dia akan senang mendengar kematian mereka. Kedua orang ini tetap hidup hanya karena nasib baik saja. Kini ada

perasaan benci yang mendalam di semua pihak, karena Hamengkubuwana II menduga Danureja II-lah yang telah mengadukan kedua pengeran itu, sedangkan Natakusuma tidak akan memaafkan Hamengkubuwana III atas pembuangan yang ia alami dan penderitaan yang ia rasakan hingga nyaris mati.

Kini peperangan-peperangan Napoleon di Eropa telah merembet ke Indonesia. Ketika William V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan pasukan Prancis dan melarikan diri ke Inggris pada tahun 1795, dia memperoleh tempat tinggal di Kew dan mengeluarkan apa yang dikenal sebagai 'surat-surat Kew'. Dokumen ini memerintahkan para pejabat jajahan Belanda untuk menyerahkan wilayah mereka kepada orang-orang Inggris supaya tidak jatuh ke tangan Prancis. Berdasarkan otoritas ini, dan dengan kapal, pasukan, dan senjata yang lebih banyak daripada yang dimiliki oleh pihak Belanda di Indonesia, maka orang-orang Inggris berhasil merebut atau diberi beberapa pos di Indonesia. Pada tahun 1795, mereka menduduki Padang (yang dulu, pada tahun 1781–4, sebenarnya sudah pernah mereka duduki) dan Malaka, lalu Ambon dan Banda pada tahun 1796. Mulai tahun 1795, pihak Inggris meningkatkan blokadenya terhadap Batavia. Dengan mengacaukan ekspor kopi, blokade ini sangat memengaruhi pendapatan pemerintah Belanda. Dengan jatuhnya pangkalan utama Prancis di Mauritius pada akhir tahun 1810, pihak Inggris sudah siap merebut jantung jajahan Belanda, Pulau Jawa.

Pada bulan Mei 1811, kedudukan Daendels sebagai gubernur-jenderal digantikan oleh Jan Willem Janssens, yang telah menderita penghinaan akibat menyerahkan Tanjung Harapan kepada pihak Inggris pada tahun 1806. Dia mampu bertahan cukup lama di Jawa hanya untuk melakukan hal yang sama. Pada tanggal 4 Agustus 1811, enam puluh kapal Inggris muncul di depan Batavia dan, pada tanggal 26 Agustus, kota tersebut berikut daerah-daerah sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Janssens mundur ke Semarang, di mana Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta dan Surakarta bergabung dengannya. Pihak Inggris berhasil memukul mundur mereka dan, pada tanggal 18 September, Janssens menyerah di dekat Salatiga.

Penaklukan Inggris itu diikuti suatu periode kekacauan. Hamengkubuwana II memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali tahta Yogyakarta. Putranya diturunkan ke kedudukannya

semula sebagai putra mahkota, dan sesudah itu Sultan memerintahkan supaya Patih Danureja II dibunuh. Akan tetapi, dia salah menilai tanda zaman, sehingga tindakannya itu segera disusul dengan terjadinya serangkaian peristiwa yang menimbulkan malapetaka. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan-Gubernur Jawa (1811–6, di bawah Inggris tidak ada jabatan gubernur-jenderal di Jawa). Jika Hamengkubuwana II mengira bahwa pemerintahan Raffles akan berbeda dari pemerintahan Daendels, maka akan segera terbukti bahwa dia salah. Raffles adalah seorang pembaharu dan penentang "despotisme" sebagaimana Daendels. Pada mulanya dia membiarkan semua tindakan Hamengkubuwana II, tetapi segera menjadi jelas bahwa Sultan adalah orang yang keras dan tegas yang tidak dapat diharapkan kerja samanya oleh pihak Inggris. Mulai kelihatan seakan-akan nyawa putra mahkota (Hamengkubuwana III), yang didukung Inggris, terancam bahaya di istana ayahnya. Di lain pihak, Pakubuwana IV tampak supel dan layak.

Pada bulan November 1811, John Crawfurd tiba di Yogyakarta sebagai residen yang baru (1811–4, 1816). Dia adalah seorang yang pandangan-pandangannya tidak dapat diubah. Salah satu di antaranya ialah bahwa Hamengkubuwana II tidak dapat dibiarkan. Dia melontarkan dan sekaligus menerima hinaan dan cercaan di istana sampai akhirnya dia menarik kesimpulan bahwa hanya langkah-langkah yang paling keraslah yang akan dapat mengubah situasi. Raffles memerintahkannya supaya berhati-hati sampai datangnya pasukan yang cukup besar. Tetapi, secara substansial, Raffles tidak membantah pandangan Crawfurd terhadap Sultan. Ketika berkunjung ke istana pada bulan Desember 1811, Raffles mengalami sendiri sikap permusuhan Sultan dan menanggapinya dengan sikap yang sama, yang dalam satu kejadian hampir saja menimbulkan perkelahian bersenjata di dalam sebuah ruangan yang penuh orang. Sementara itu, Pangeran Natakusuma telah dibebaskan dari penjara. Sebagai musuh Daendels, dia tentu saja bersekutu dengan pihak Inggris; sebagai musuh Hamengkubuwana II maupun putranya, maka dia mengerahkan segala daya untuk mendapatkan status merdeka di istana.

Pakubuwana IV kini melibatkan diri ke dalam konflik tersebut. Secara diam-diam dia mengadakan surat-menyurat dengan Hamengkubuwana II yang menyebabkan Sultan percaya bahwa

Surakarta akan mendampinginya dalam perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Eropa. Tujuan Susuhunan yang sesungguhnya ialah mendorong supaya Sultan menjadi berani, sehingga akan menyebabkan hancurnya kesultanan di tangan orang-orang Eropa. Pihak Inggris segera mengetahui adanya surat-menyurat Surakarta–Yogyakarta ini. Mereka mulai mengadakan perundingan-perundingan rahasia dengan putra mahkota Yogyakarta (Hamengkubuwana III) dan Natakusuma, dan bersiap-siap menghancurkan Yogyakarta.

Pada bulan Juni 1812, 1.200 prajurit berkebangsaan Eropa dan sepoy India, didukung 800 prajurit Legiun Mangkunegara, berhasil merebut istana Yogyakarta setelah tembakan-tembakan artileri yang seru. Pakubuwana IV tidak berbuat apa-apa kecuali menempatkan pasukannya di seberang jalur-jalur komunikasi Inggris. Istana Yogyakarta dirampok, perpustakaan dan arsipnya dirampas, sejumlah besar uang diambil, dan Hamengkubuwana II dimakzulkan dan dibuang ke Penang. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh putranya, Hamengkubuwana III. Natakusuma, atas bantuannya kepada pihak Inggris, dihadiahi suatu daerah yang merdeka dan dapat diwariskan yang meliputi 4.000 rumah tangga di wilayah-wilayah Yogyakarta dan dianugerahi gelar Pangeran Pakualam I (m. 1813–29). Dengan demikian, Pakualaman di Yogyakarta merupakan cerminan dari Mangkunegaran di Surakarta, dan lengkaplah sudah pembagian Kerajaan Mataram ke dalam dua kerajaan senior dan dua yunior. Dibentuk pula Korps Pakualaman yang terdiri atas 100 prajurit kavaleri (kelak menjadi 50 prajurit kavaleri dan 100 prajurit infantri). Akan tetapi, tidak seperti Legiun Mangkunegara, korps ini tidak pernah mempunyai arti yang penting dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1892.

Dampak penaklukan atas Yogyakarta tidak dapat dibuat berlebihan. Ini hanya terjadi sekali dalam sejarah Jawa, ketika sebuah istana direbut dengan serangan oleh pasukan pemerintahan bangsa Eropa. Kalangan bangsawan Yogyakarta merasa sangat dihina. Tak seorang pun dapat meragukan lagi bahwa suatu zaman baru telah menyingsing di Jawa.

Pakubuwana IV segera menyadari bahwa dia telah gagal dalam rencananya menghancurkan Yogyakarta, sementara Surakarta tetap utuh. Semua pemerintahan bangsa Eropa di Jawa menempuh kebijakan mempersamakan kedua istana tersebut supaya

tidak merusak keseimbangan dalam politik Jawa, sehingga apa yang dilakukan terhadap istana yang satu selalu dilakukan terhadap istana yang lain. Apalagi, kegiatan surat-menyurat Surakarta–Yogyakarta yang penuh liku-liku itu telah terbongkar dan mencurigakan pihak Inggris terhadap Pakubuwana IV. Malah, Raffles nyaris mengambil keputusan untuk bergerak menuju Surakarta dan memakzulkannya juga. Sebagai gantinya, Raffles merebut banyak wilayah, baik daerah-daerah luar Yogyakarta maupun Surakarta, sehingga banyak pejabat tinggi kehilangan tanah apanage mereka. Pihak Inggris juga mengambil alih pengelolaan atas cukai lalu lintas dan pasar-pasar. Cukai-cukai tersebut kemudian disewakan kepada orang-orang Cina, yang telah mengelolanya sejak abad sebelumnya tetapi kini pengelolaan tersebut ditandai oleh semakin meningkatnya penyelewengan dan pemerasan terhadap orang-orang Jawa. Sebagai imbalasan atas bantuannya, Mangkunegara II menerima 1.000 rumah tangga lagi yang berasal dari tanah Pakubuwana IV.

Pada tahun 1814–5, Pakubuwana IV mengadakan persekongkolan yang terakhir dan yang paling unik. Dia bersekongkol dengan prajurit-prajurit Sepoy India, yang ditempatkan di Jawa, untuk menghancurkan pemerintahan Eropa maupun Yogyakarta. Akan tetapi, persekongkolan tersebut terbongkar. Hampir 70 orang Sepoy yang menjadi biang keladi dihadapkan ke pengadilan militer; 17 orang ditembak mati; sisanya dipulangkan ke India dengan belenggu di tangan. Raffles mengambil keputusan untuk tidak memakzulkan Pakubuwana IV atas keterlibatannya itu, tetapi membuang seorang pangeran penting yang terlibat dalam persekongkolan tersebut. Inilah untuk ketiga kalinya sejak tahun 1788 Pakubuwana IV nyaris diturunkan dari tahta.

Dalam penulisan sejarah penjajahan, Raffles tercantum sebagai pembaharu yang hebat. Bastin menunjuk terutama kepada penyikapannya terhadap "kesejahteraan penduduk asli" sebagai tanggung jawab pemerintah, tindakannya membuat sistem *'land rent'* (pajak tanah) yang meletakkan dasar bagi perkembangan perekonomian uang selanjutnya, penekanannya pada desa sebagai unit administrasi penjajahan yang utama, dan keteguhan hatinya pada prinsip Daendels untuk memperlakukan para pejabat Jawa sebagai bagian dari mesin birokrasi pemerintah. Banyak dari pembaruan-pembaruannya, seperti halnya pembaruan-pembaruan

Daendels, tidak pernah dapat terlaksana, tetapi beberapa prinsipnya diteruskan oleh para penggantinya. Akan tetapi, pemikiran bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia hendaknya menjadi perhatian utama bagi pemerintah kolonial hanya merupakan teori saja pada zaman Raffles. Sesudah itu pun gagasan ini jarang sekali dilaksanakan, paling tidak sampai akhir abad XIX. Daendels dan Raffles sama-sama merupakan tokoh yang paling penting bagi sejarah Indonesia sebagai pencetus revolusi penjajahan, suatu kebijakan baru yang menuntut pelaksanaan kedaulatan dan kekuasaan administrasi Eropa di seluruh Jawa dan yang bertujuan memanfaatkan, memperbaharui, atau menghancurkan lembaga-lembaga asli semaunya. Pada tahun 1816, Jawa dan pos-pos Indonesia lainnya dikembalikan kepada pihak Belanda sebagai bagian dari penyusunan kembali secara menyeluruh urusan-urusan Eropa setelah perang-perang Napoleon. Raffles sudah meninggalkan Jawa dan kembali ke Inggris; dia akhirnya akan terkenal sekali sebagai pendiri Singapura pada tahun 1819.

Dari tahun 1812 sampai tahun 1825, perasaan tidak senang semakin meningkat di Jawa karena belum terselesaikannya beberapa persoalan. Orang-orang Eropa masih tetap melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan istana pada umumnya, dan khususnya dalam pergantian raja di Yogyakarta. Korupsi dan persekongkolan semakin merajalela di kedua istana. Orang-orang Eropa dan Cina menyewa tanah yang bertambah luas di Jawa Tengah untuk dijadikan perkebunan-perkebunan tebu, kopi, nila, dan lada, terutama dari kalangan bangsawan yang membutuhkan uang. Di perkebunan-perkebunan tersebut, penduduk pedesaan Jawa dan hukum adat dipandang rendah. Para petani semakin terpaksa untuk membayar pajaknya dalam bentuk kontan, yang semakin mendorong mereka untuk meminjam uang dari para lintah darat, kebanyakannya adalah orang Cina. Pengusaha-pengusaha Cina dan penyewa pajak Cina memainkan peran yang semakin menonjol dalam masyarakat pedesaan Jawa. Ini semuanya meningkatkan ketegangan etnis antara Cina dan Jawa.

Di daerah-daerah yang tetap berada di bawah penguasa-penguasa Jawa, para penarik pajak dan para pengelola pajak lalu lintas bertindak memeras; sungguh, jumlah pendapatan pemerintah Eropa dari pajak lalu lintas di Yogyakarta mencapai tiga kali lipat dari tahun 1816 sampai tahun 1824. Di daerah-daerah yang

baru dicaplok oleh pemerintah penjajah, kondisi-kondisi mungkin malah lebih buruk lagi untuk petani yang harus membayar pajak. Berkembangnya jumlah pintu pajak di jalan nyaris mematahkan perdagangan lokal.

Penderitaan mengakibatkan terjadinya dislokasi sosial, dan gerombolan-gerombolan perampok semakin bertambah banyak dan berani. Pemakaian opium meluas di kalangan penduduk Jawa sebagai konsekuensi dislokasi semacam itu, yang meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Hampir 12% dari pendapatan pemerintah kolonial berasal dari monopoli opium dalam kurun waktu 1827–33.

Di tengah-tengah keadaan yang menjadi semakin kacau itu, tampillah salah seorang tokoh yang sangat termasyhur dalam sejarah Indonesia, Pangeran Dipanagara (1785–1855). Sebagai putra tertua Sultan Hamengkubuwana III, dia tumbuh menjadi dewasa di tengah-tengah persekongkolan-persekongkolan dan kekacauan-kekacauan yang timbul selama masa pemerintahan Hamengkubuwana II. Selama masa kecil dan masa remajanya, dia tinggal bersama neneknya, Ratu Ageng (w. 1803), di Tegalreja, sebuah tempat tinggal terpencil beberapa kilometer dari istana Yogyakarta. Di sana dia melakukan samadi dan mempelajari kitab-kitab agama Islam maupun karya-karya sastra dan sejarah Jawa. Dia memasuki lingkungan-lingkungan pesantren dan tidak mau muncul ke istana yang tidak disukainya karena banyaknya persekongkolan, kemerosotan akhlak, pelanggaran susila, dan pengaruh Barat yang bersifat merusak. Hubungannya dengan komunitas-komunitas Jawa lainnya mungkin sangat unik. Sebagai pangeran senior, dia dapat menjalin hubungan dengan kalangan bangsawan; sebagai penganut tasawuf, dia dapat menjalin hubungan dengan komunitas agama; sebagai penduduk desa, dia dapat menjalin hubungan dengan rakyat desa. Sebagai seorang pengecam kondisi di Jawa Tengah, dia pun menjadi pusat kesetiaan bagi orang-orang yang merasa tidak puas.

Sekitar tahun 1805–8, Dipanagara mengalami suatu pengalaman religius yang membuatnya merasa yakin bahwa dia merupakan calon raja Jawa yang ditunjuk secara supranatural. Dia mulai mengadakan ziarah ke tempat-tempat suci yang ada hubungannya dengan dinasti Mataram, dimana dia mengalami serangkaian mimpi. Ratu Kidul menemuinya dan menjanjikan

bantuan; janji itu menegaskan statusnya sebagai calon raja. Akhirnya, sebuah suara memberitahukan bahwa dia harus mencetuskan zaman kehancuran yang akan menyucikan negerinya.

Selama hampir dua puluh tahun, Dipanagara menantikan waktunya yang baik. Selama masa itu, situasi di Jawa bertambah buruk dan pengikut Dipanagara bertambah banyak. Pada tahun 1820-an, pemberontakan-pemberontakan kecil mulai meletus. Pada tahun 1821, panen padi tidak memuaskan dan penyakit kolera berjangkit di Jawa untuk pertama kalinya. Pada tahun 1822, Hamengkubuwana IV (1814–22) wafat di tengah-tengah tersebarnya desas-desus bahwa dia diracun. Terjadi perdebatan-perdebatan sengit dalam soal penunjukan wali bagi putranya yang berumur tiga tahun, Hamengkubuwana V (m. 1822–6, 1828–55). Pada akhir tahun 1822, Gunung Merapi meletus dengan dahsyat. Hal ini dianggap sebagai pertanda tentang akan terjadinya kekacauan. Bibit-bibit perang yang sudah tertanam sejak tahun 1808, kini segera tumbuh mencapai kematangannya.

Pada tahun 1823, Gubernur-Jenderal G.A.G.Ph. van der Capellen (1816–26) mengambil keputusan untuk mengakhiri penyelewengan-penyelewengan di seputar penyewaan tanah swasta di Jawa Tengah. Dia memerintahkan agar sewa-menyewa semacam itu dihapuskan. Para bangsawan yang telah menyewakan tanah mereka, kini tidak hanya kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga harus mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh penyewa-penyewa Cina dan Eropa (yang umumnya sudah habis dibelanjakan) dan membayar ganti rugi kepada mereka atas berbagai perbaikan yang telah mereka lakukan di tanah-tanah tersebut (yang kebanyakannya tidak berharga bagi para bangsawan, yang tidak berkeinginan mengolah tanah-tanah apanage mereka menjadi perkebunan). Inilah langkah terakhir yang telah mendorong banyak bangsawan melancarkan pemberontakan.

Sebuah jalan raya baru akan dibangun di dekat Tegalreja pada bulan Mei 1825. Suatu bentrokan antara para pengikut Dipanagara dengan para pengikut musuhnya, Patih Danureja IV (1813–47), terjadi ketika patok-patok untuk jalan raya tersebut dipancangkan. Sesudah itu, berlangsung suatu periode ketegangan. Pada tanggal 20 Juli, pihak Belanda mengirim serdadu-serdadu dari Yogyakarta untuk menangkap Dipanagara. Segera meletus pertempuran terbuka. Tegalreja direbut dan dibakar, tetapi Dipanagara

berhasil meloloskan diri dan mencanangkan panji pemberontakan. Perang Jawa (1825–30) pun dimulai.

Pemberontakan tersebut dengan cepat tersebar di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi pusatnya adalah di kawasan Yogyakarta. Lima belas dari 29 pangeran, demikian pula 41 dari 88 bupati (pejabat senior istana), bergabung dengan Dipanagara. Surakarta tetap menjaga jarak, tetapi agaknya pihak istana sudah siap untuk memihak pemberontak apabila keberhasilannya sudah jelas. Komunitas agama bergabung dengan Dipanagara, di antaranya Kyai Maja yang menjadi pemimpin spiritual pemberontakan tersebut. Dipanagara memakai gelar Erucakra; dengan begitu, ia telah mengklaim sebagai Ratu Adil yang dinanti-nanti, seorang raja yang adil yang akan menyelamatkan Jawa dari penindasan. Rakyat pedesaan bertempur di pihak Dipanagara dan membantu pasukan-pasukannya apabila mereka tidak sanggup bertempur sendiri. Prajurit-prajurit yang dikirim oleh istana Surakarta, yang bersifat ambivalen, untuk membantu pihak Belanda hanya meraih sedikit sukses dalam menghadapi pihak pemberontak. Pihak Belanda juga mendapat bantuan pasukan dari Sultan Yogyakarta: harus diingat bahwa selain terhadap orang-orang Belanda, kemurkaan Dipanagara tertuju pula terhadap pihak istana. Akan tetapi, banyak prajurit Yogyakarta menyeberang ke pihak pemberontak. Para prajurit Legiun Mangkunegara menunjukkan kecakapan maupun kesetiaan mereka terhadap gerakan anti pemberontakan. Pangeran-pangeran dari Madura dan sebagian besar pembesar Jawa dari daerah juga menentang Dipanagara.

Dengan menjalarnya serangan-serangan pihak pemberontak terhadap orang-orang Cina dan Eropa, maka mulai terancamlah kekuasaan pemerintahan Belanda di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tetapi, pada akhir tahun 1825, sudah tampak jelas bahwa pihak pemberontak tidak akan dapat mengusir Belanda dari Jawa dengan mudah. Pihak Belanda kekurangan serdadu, tetapi dengan adanya bantuan dari sekutu-sekutu mereka yang berkebangsaan Indonesia, mereka berhasil menahan serangan-serangan yang pertama. Sebenarnya, pada tahun 1826, kekuatan pasukan pemerintah Belanda sudah cukup memadai, namun mereka kurang dimanfaatkan. Satuan-satuan pasukan pemerintah yang besar kurang berhasil jika menghadapi taktik-taktik gerilya pihak pemberontak yang sering berpindah-pindah tempat.

Dipanagara menderita kekalahan besar pada bulan Oktober 1826 ketika dia dapat dipukul mundur dari Surakarta. Meskipun demikian, pada akhir tahun 1826, pasukan-pasukan pemerintah tampaknya tidak mampu maju lagi, dan Dipanagara masih menguasai sebagian besar wilayah pedalaman Jawa Tengah. Pada bulan Agustus 1826, pihak Belanda memulangkan Sultan Hamengkubuwana II yang sudah berusia lanjut dari tempat pengasingannya di Ambon dan mendudukkannya kembali di atas tahta Yogyakarta (1826–8). Tetapi, langkah ini sama sekali gagal untuk mendorong rakyat Jawa supaya tidak lagi mendukung pemberontakan.

Pada tahun 1827, pihak Belanda berhasil mengetahui bagaimana cara yang terbaik untuk memanfaatkan serdadu-serdadu mereka. Mereka menerapkan *benteng-stelsel* (sistem-benteng). Dengan sistem ini, satuan-satuan-bergerak kecil dapat beroperasi secara sendirian, terlepas dari jaringan pos-pos berbenteng yang strategis yang selalu berkembang, dan dapat mengawasi penduduk setempat secara permanen. Gerombolan-gerombolan pemberontak dipaksa bertempur sebelum mereka sempat tumbuh dalam jumlah yang besar. Mereka juga dicegah untuk tinggal lama di setiap daerah. Setelah tahun 1827, Dipanagara dan pasukannya terus dikejar-kejar dan terjepit. Kolera, malaria, dan disentri menelan banyak korban di kedua belah pihak, tetapi pada tahun 1828 tampak jelas bahwa perang telah berbalik menguntungkan Belanda dan sekutu-sekutunya.

Pembelotan dan jumlah tawanan dari pihak pemberontak semakin meningkat. Pada bulan November 1828, Kyai Maja bersama pemimpin-pemimpin Islam lainnya menyerahkan diri ke pihak Belanda. Penarikan diri mereka dari gerakan Dipanagara muncul terutama dari perselisihan antara tujuan-tujuan keagamaan mereka dan tujuan-tujuan yang lebih sekular dari para bangsawan penasihat Dipanagara. Pada bulan September 1829, paman Dipanagara, Pangeran Mangkubumi, menyerah; dia diizinkan untuk kembali ke Yogyakarta di mana ia menjadi salah seorang pangeran yang paling senior dan dihormati. Pada bulan Oktober 1829, panglima Dipanagara yang utama, Ali Basa Prawiradirja, lebih dikenal sebagai Sentot, juga menyerah. Sentot kelak menjadi anggota tentara penjajah dan berpangkat letnan kolonel. Ia berangkat ke Sumatera Barat pada tahun 1831 dan bertempur untuk pihak Belanda melawan kaum Padri (lihat bab

13). Tetapi, sentimen anti-Belandanya tetap tersimpan dalam hatinya. Memang, Sentot memikirkan kesempatan untuk menjadi seorang raja pedalaman Minangkabau yang merdeka di Sumatera. Namun, intrik-intriknya diketahui Belanda, yang kemudian menempatkannya di bawah pengawasan yang ketat di Bengkulu pada tahun 1833, tempat ia hidup hingga wafatnya di tahun 1854. Akhirnya, pada bulan Maret 1830, Dipanagara bersedia melakukan perundingan-perundingan di Magelang. Apa yang diharapkannya dengan menghadiri pertemuan ini tidaklah jelas, tetapi sudah pasti bahwa dia akan ditawan. Pihak Belanda mengasingkannya ke Manado dan kemudian ke Makasar, tempat dia wafat pada tahun 1855. Pemberontakan kini berakhir. Di pihak pemerintah, perang ini telah menelan nyawa 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa dan 7.000 berkebangsaan Indonesia. Sedikitnya 200.000 orang Jawa tewas, sehingga jumlah penduduk Yogyakarta menyusut kira-kira separonya.

Setelah berakhirnya Perang Jawa tersebut, pemerintah menganggap Yogyakarta sebagai pihak yang bertanggung jawab. Semua daerah luar *(mancanegara)* miliknya dicaplok. Untuk mempertahankan prinsip persamaan yang telah dijalankan oleh semua pemerintahan Eropa di Jawa, maka daerah-daerah luar Surakarta pun dicaplok juga. Pakubuwana VI (m. 1823–30) merasa demikian terganggu atas ketidakadilan yang dilakukan secara terang-terangan ini, sehingga dia meninggalkan Surakarta dan berangkat ke Samudra Hindia untuk berunding dengan Ratu Kidul. Karena merasa takut akan meletusnya lagi suatu pemberontakan, maka pihak Belanda menjemputnya pulang dan mengasingkannya ke Ambon, tempat dia wafat pada tahun 1849.

Perang Jawa merupakan perlawanan terakhir kelompok elite bangsawan Jawa. Perlawanan ini merupakan suatu gerakan konservatif, suatu usaha yang sia-sia untuk kembali lagi kepada keadaan-keadaan sebelum meningkatnya kekuatan kolonial yang telah muncul sejak tahun 1808. Luasnya gerakan protes sosial yang mendukung langkah perang tersebut mengungkapkan dengan nyata, dengan menoleh ke belakang, betapa dalamnya revolusi penjajahan sudah merobek-robek masyarakat Jawa; dalam hal ini, Perang Jawa seakan-akan membayangi gerakan anti penjajahan di abad XX. Akan tetapi, Dipanagara dan para pengikutnya yang senior tampaknya justru tidak menyadari betapa revolusionernya perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh ancaman

baru bangsa Eropa itu. Karena hanya bersenjatakan cita-cita, tradisi-tradisi, dan norma-norma yang semakin tidak relevan, maka Dipanagara akhirnya takluk.

Banyak penguasa lokal dan pangeran memihak Belanda dalam perang itu. Setelah tahun 1830, hampir seluruh kalangan elite bangsawan melakukan hal yang sama. Dengan demikian, protes massa yang telah mencetuskan pemberontakan itu ditinggalkan tanpa akses ke kepemimpinan bangsawan. Istana-istana Jawa Tengah, yang kini telah kehilangan sebagian besar wilayah mereka, menjadi lembaga-lembaga ritual dan pada umumnya menjadi bawahan Belanda yang patuh. Namun demikian, perasaan tidak senang atas posisi sebagai bawahan sering kali tetap berada di bawah permukaan kejadian-kejadian istana yang beradab. Atas jasa-jasanya, Mangkunegara II dianugerahi bintang kehormatan dan daerah kekuasaannya diperluas.

Dukungan yang telah diberikan banyak bangsawan Jawa kepada pihak Belanda dan kemelut sosial yang berakar sangat dalam yang telah mengakibatkan meletusnya perang sama-sama mendorong pihak Belanda untuk melakukan perombakan besar terhadap kebijakannya. Bahaya dari merongrong lembaga-lembaga yang dianggap "tradisional" dan manfaat mempertahankan kesetiaan kaum bangsawan tampak jelas. Oleh karena itulah maka naluri-naluri antifeodal Daendels dan Raffles disingkirkan jauh-jauh oleh pihak Belanda. Selama beberapa dasawarsa kemudian, kekuasaan Belanda didasarkan pada persekutuan dengan bangsawan pribumi. Dalam sebuah pengertian parsial, ini berarti kalangan bangsawan Jawa yang konservatif secara kolektif telah berhasil memenangi perdamaian, walaupun para bangsawan yang lebih dinamis telah menderita kekalahan dalam perang. Akan tetapi, kalangan bangsawan telah kehilangan kesempatan terakhir untuk menguasai lingkungannya secara bebas.[]

Bab 12 ....

Jawa, 1830–1900

PADA TAHUN 1830 dimulailah masa penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah Jawa. Untuk pertama kalinya, pihak Belanda mampu mengeksploitasi dan menguasai seluruh pulau ini, dan tidak ada satu pun tantangan yang serius terhadap kekuasaan mereka sampai abad XX. Akan tetapi, kedudukan mereka memang aneh. Mereka telah terlibat di Jawa selama lebih dari 200 tahun, lebih dari 150 tahun di antaranya di wilayah pedalaman secara langsung. Perang Jawa merupakan investasi tenaga manusia dan dana mereka yang besar dan terakhir dalam pertarungan memperebutkan hegemoni. Dominasi politik atas seluruh Jawa akhirnya diperoleh pada tahun 1830, tetapi secara finansial, sebaliknya, usaha ini merupakan suatu kegagalan. Andaikan ada keuntungan yang bisa didapatkan dari keterlibatan VOC di Jawa Tengah dan Jawa Timur, selama lebih dari dua abad itu tak seorang pun berhasil memperolehnya terkecuali untuk keuntungan oknum-oknum yang telah mendapatkan kekayaan pribadi secara korup. Hanya perkebunan-perkebunan kopi di Priangan (Jawa Barat) yang merupakan usaha-usaha yang selalu mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, keuntungan-keuntungan yang berhasil diperoleh dari sana telah habis untuk biaya militer dan administrasi. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi pihak Belanda pada tahun 1830 itu adalah apakah dominasi yang akhirnya berhasil mereka peroleh itu dapat memberikan keuntungan ataukah tidak.

Keuntungan dari Jawa diperlukan sekali. Keuntungan ini tidak hanya harus bisa menutup biaya-biaya administrasi di Jawa, tetapi juga diperlukan untuk mendukung posisi keuangan di negeri Belanda yang sedang memburuk. Sebagai akibat perang-perang

Napoleon, hutang dalam negeri Belanda berikut bunganya membubung tinggi. Keadaan tetap memburuk ketika uni Belanda–Belgia yang dibentuk oleh Kongres Wina pada tahun 1815 runtuh dalam revolusi Belgia pada tahun 1830. Usaha Belanda untuk menaklukkan kembali Belgia pada tahun 1831–2 menemui kegagalan; pada tahun 1839, Belanda mengakui kemerdekaan Belgia. Dengan demikian, Belanda telah kehilangan sebagian dari wilayah negaranya, dan masih menanam uang lebih banyak lagi dalam usahanya yang gagal untuk mendapatkan kembali wilayah itu.

Selama Perang Jawa berlangsung, pihak Belanda memikirkan berbagai rencana untuk Jawa. Semuanya mempunyai sasaran umum yang sama, yaitu bagaimana memperoleh hasil daerah tropis dalam jumlah dan harga yang tepat sehingga akan memberikan keuntungan, suatu sasaran yang telah menjadi fokus pemikiran orang-orang Belanda sejak keberangkatan pelayaran mereka yang pertama pada tahun 1595. Pada tahun 1829, Johannes van den Bosch (1780–1844) menyampaikan kepada Raja Belanda usulan-usulan yang kelak disebut *cultuurstelsel* (sistem tanam paksa). Raja menyetujui usulan-usulan tersebut, dan pada bulan Januari 1830, van den Bosch tiba di Jawa sebagai gubernur jenderal yang baru (1830–3).

Pemikiran van den Bosch mengenai *cultuurstelsel* tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit, tetapi tampaknya sistem itu didasarkan pada suatu prinsip umum yang sederhana. Desa-desa Jawa berhutang pajak tanah *(land rent)* kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan sebesar 40% dari hasil panen utama desa itu (biasanya beras). Dalam kenyataannya, taksiran yang sesungguhnya sering kali di bawah angka ini dan pemungutan pajak tersebut (sebagian besar dibayar dalam uang tunai) sering kali sulit dilaksanakan karena tidak memadainya administrasi dan adanya kekurangan mata uang. Rencana van den Bosch ialah bahwa setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya guna ditanami komoditi ekspor (khususnya kopi, tebu, dan nila) untuk dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Dengan begitu, desa akan mampu melunasi hutang pajak tanahnya, dan van den Bosch memperkirakan bahwa 20% (kelak 33%) dari hasil panen desa tersebut akan cukup memadai untuk tujuan ini. Apabila pendapatan desa dari penjualan hasil panennya kepada pemerintah lebih banyak daripada pajak tanah

yang harus dibayarnya, maka desa itu akan menerima kelebihannya; apabila kurang, maka desa tersebut masih tetap harus membayar kekurangannya dari sumber-sumber lain. Pernyataan-pernyataan van den Bosch pada tahun 1833 mengenai kaitan antara pajak tanah dengan pembayaran-pembayaran pemerintah untuk hasil bumi kurang jelas; alih-alih, dia malah berbicara tentang produksi komoditi ekspor sebagai sesuatu yang lebih menguntungkan bagi desa daripada menanam padi. Bagaimanapun juga, prinsipnya jelas, yaitu bahwa bagi desa harus ada perimbangan antara pajak tanah yang didasarkan atas produksi beras dengan penjualan komoditi ekspor kepada pemerintah.

Dalam teori, setiap pihak akan memperoleh keuntungan dari sistem ini. Desa masih memiliki tanah yang lebih luas untuk kegunaannya sendiri dan akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk tunai. Sebagai pengganti pendapatan yang tidak pasti dari pajak tanah, pemerintah akan mendapatkan komoditi daerah tropis yang begitu murahnya sehingga, menurut perkiraan van den Bosch, masih dapat bersaing dengan gula Hindia Barat di pasaran dunia yang dihasilkan oleh tenaga budak. Selanjutnya, komoditi-komoditi tersebut akan dikapalkan ke Eropa oleh Perusahaan Dagang Belanda (NHM: Nederlandsche Handelmaatschappij), yang didirikan pada tahun 1824–5 atas prakarsa Raja Belanda. Hal ini akan mematahkan dominasi pelayaran Inggris–Amerika di kawasan Malaya-Indonesia, dan akan memberi penghasilan angkutan kepada negeri Belanda.

Dalam praktik, tidak pernah ada 'sistem' sama sekali. Terdapat banyak variasi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dalam pelaksanaan rencana-rencana van den Bosch tersebut di Jawa. Konsepnya tentang akan diperolehnya keuntungan oleh semua pihak berubah menjadi bagian dari kisah-kisah pemerasan yang lebih besar di dalam sejarah penjajahan. Para pejabat lokal, baik yang berkebangsaan Belanda maupun Indonesia, menetapkan taksiran besarnya pajak tanah maupun banyaknya komoditi ekspor bagi setiap desa, kemudian memaksa desa untuk merealisasikannya. Dengan semakin meningkatnya pembayaran pemerintah untuk hasil-hasil bumi, maka para pejabat memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menaikkan taksiran pajak tanah, sehingga sebagian besar kelebihan pembayaran komoditi tersebut kembali kepada pemerintah lagi. Sebenarnya, *cultuurstelsel* ini

sama dengan penyerahan-wajib komoditi ekspor kepada pemerintah, dan sangat mirip dengan sistem penyerahan-wajib yang telah dijalankan VOC terhadap kopi di Priangan pada abad XVIII. Memang, seperti sebelum kedatangan van den Bosch, kopi merupakan komoditi yang selalu sangat menguntungkan; komoditi ini juga merupakan jenis komoditi terakhir yang dihapuskan ketika *cultuurstelsel* berakhir.

Struktur administrasi *cultuurstelsel* sesuai dengan konservatisme kebijakan Belanda yang baru setelah tahun 1830. Percobaan-percobaan terdahulu dalam berhubungan langsung dengan petani ditinggalkan, dan desa menjadi unit dasar pemerintahan. Kepala desa merupakan mata rantai antara petani dan pejabat-pejabat bangsa Indonesia yang lebih tinggi tingkatannya, yang mencapai puncaknya pada bupati (yang disebut *regent* oleh Belanda), yaitu seorang bangsawan yang mengepalai kabupaten. Bupati bertanggung jawab kepada pemerintahan bangsa Eropa, tetapi para pejabat bangsa Eropa juga terlibat pada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah. Untuk pertama kalinya, kehadiran para pejabat berkebangsaan Eropa di tingkat desa menunjukkan kepada rakyat Jawa biasa bahwa hidup mereka dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Para pejabat, baik yang berkebangsaan Belanda maupun Indonesia, yang ditugaskan melaksanakan skema baru tersebut dibayar berdasarkan persentase dari komoditi pertanian yang diserahkan. Ini merupakan sumber korupsi yang subur dan perangsang munculnya tuntutan-tuntutan yang bersifat memeras terhadap desa-desa. Ya, korupsi dan penyelewengan merajalela. Hasil-hasil bumi ditaksir terlalu kecil, perdagangan swasta di bidang komoditi pertanian pemerintah semakin meningkat, dan transaksi-transaksi yang curang berkembang di kalangan pejabat-pejabat pribumi, orang-orang Belanda, dan para pengusaha Cina. Pemerintah kolonial di Batavia tidak pernah mampu memantau dan mengawasi pelaksanaan perintah-perintahnya, kecuali dengan cara yang paling umum.

Masukan utama ke dalam 'sistem' ini adalah tenaga kerja Jawa dan Sunda. Tanah yang digarap hanya sebagian kecil saja. Di luar daerah-daerah untuk tanaman kopi (yang tumbuh di atas tanah yang tidak dapat ditanami padi), maka untuk seluruh Jawa hanya 6% yang dijadikan tanah garapan pada tahun 1840 dan 4% pada tahun 1850. Ada perbedaan yang besar antara satu daerah dengan lainnya, tetapi angka-angka resmi yang tertinggi

adalah untuk Bagelen dan Pekalongan, di mana 15% dari tanahnya diperuntukkan bagi tanaman untuk pemerintah pada tahun 1840. Akan tetapi, investasi tenaga kerja jelas sangat besar. Angka-angka statistik untuk *cultuurstelsel* tidak dapat dipercaya rinciannya karena banyaknya laporan yang memperkecil angkanya. Angka-angka yang dilaporkan oleh Fasseur, yang tidak dikoreksi, menunjukkan bahwa 57% dari jumlah penduduk Jawa terlibat dalam penanaman komoditi-komoditi pertanian pemerintah pada tahun 1840, dan 46% pada tahun 1850. Dengan memerhatikan laporan yang memperkecil angka, Van Niel memperkirakan bahwa selama kurun waktu 1837–51, lebih dari 70% keluarga petani menghasilkan komoditi-komoditi ekspor, lebih dari separonya kopi. Beban yang sangat besar ini tersebar secara sangat tidak merata. Angka-angka Fasseur yang tidak dikoreksi menunjukkan bahwa di beberapa daerah, jumlah penduduk yang terlibat jauh lebih sedikit dari separonya; akan tetapi, angka untuk Banten pada tahun 1840 adalah 92%, dan untuk Kedu pada tahun 1845 adalah 97%. Elson menghitung bahwa pada tahun 1840, 73% dari seluruh keluarga petani dimanfaatkan untuk melakukan penanaman, di mana untuk daerah Banten, Banyumas, dan Kedu angkanya mencapai 100% dan di beberapa daerah selainnya kurang dari 50%. Di kebanyakan tempat, kopi benar-benar merupakan hasil terbesar, tapi di Pekalongan, Tegal, Jepara, Madiun, Pasuruan, dan Surabaya, gulalah komoditi utamanya.

Persentase-persentase tersebut barangkali menunjukkan suatu eksploitasi yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah manusianya, karena selama abad XIX, jumlah penduduk Jawa tetap menunjukkan peningkatan yang telah dimulai pada abad XVIII. Terdapat masalah-masalah yang serius, dan boleh jadi tak terpecahkan, dalam hal angka-angka jumlah penduduk, tetapi jumlah penduduk pada akhir abad XVIII mungkin mencapai sekitar 5 juta jiwa dan pada tahun 1830 sekitar 7 juta. Pada tahun 1850, jumlahnya telah mencapai 9,5 juta, tahun 1870 16,2 juta, dan tahun 1890 23,6 juta jiwa. Dengan demikian, telah terjadi peningkatan sebesar kira-kira lima kali lipat selama masa satu abad itu. Tersedianya tenaga kerja yang selalu bertambah inilah yang menopang keberhasilan *cultuurstelsel*. Hubungan sebab-akibat yang mungkin ada antara *cultuurstelsel* dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi ini merupakan persoalan sejarah

yang diperdebatkan. Boomgaard berhujah bahwa kesempatan menjadi karyawan non-pertanian yang mendapat upah telah mendorong pasangan-pasangan untuk kawin dini dan memiliki anak lagi. Pada paro kedua abad XIX, ketika jumlah kelahiran sepertinya agak menurun, angkanya lebih tinggi daripada angka kematian yang juga menurun (khususnya kematian bayi) berkat vaksinasi cacar yang berhasil dan berkurangnya bahaya kolera dan wabah tipus.

Dampak *cultuurstelsel* terhadap orang-orang Jawa dan Sunda di seluruh Jawa sangat beragam, dan hal ini masih terus diperdebatkan. Sementara menunggu penelitian lebih lanjut, perkiraan-perkiraan tertentu tampak masuk akal. Bagi kalangan elite bangsawan di seluruh Jawa, ini adalah zaman yang benar-benar menguntungkan. Kedudukan mereka menjadi lebih aman dan penggantian secara turun-temurun untuk jabatan-jabatan resmi menjadi norma, terutama setelah dikeluarkannya Ketentuan Konstitusi tahun 1854. Mereka sering kali membuat keuntungan yang besar dari persentase yang dibayarkan atas penyerahan-penyerahan hasil bumi. Akan tetapi, mereka tergantung secara langsung pada kekuasaan Belanda untuk kedudukan dan penghasilan mereka, dan harus melakukan pemaksaan terhadap petani yang terbukti sangat diperlukan bagi berfungsinya *cultuurstelsel.* Mereka semakin sering menjadi sasaran pengawasan dan campur tangan para pejabat Belanda. Mereka terpisah dari masyarakat mereka sendiri, terbebas dari tekanan sanksi-sanksi pribumi sebelumnya bila menyelewengkan kekuasaan, dan sama sekali tidak merasa terpanggil untuk melakukan modernisasi. Memang, itulah tujuan utama pemerintahan Belanda untuk memanfaatkan prestise 'tradisional' kaum bangsawan supaya mendapatkan administrasi yang murah. Dengan demikian, para bangsawan yang tunduk pada kekuasaan Belanda tersebut secara perlahan-lahan meninggalkan kedudukan mereka sebagai pimpinan di dalam masyarakat, walaupun prestise mereka masih tetap kuat di kalangan penduduk desa.

Adalah tidak mungkin untuk menarik generalisasi yang pasti tentang dampak *cultuurstelsel* bagi masyarakat Jawa yang lebih rendah karena dua alasan. Pertama, bukti statistik dari periode ini sangat banyak tapi keandalannya sering kali meragukan. Kedua, sumber-sumber yang diragukan ini, meskipun begitu, cukup memadai untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan yang besar

antara satu dan lain daerah di Jawa. Namun demikian, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa sementara sebagian orang menikmati keuntungan-keuntungan yang pasti, mayoritas penduduk asli Jawa mungkin merasakan masa ini sebagai zaman yang sulit.

Dampak dari penanaman paksa komoditi-komoditi pertanian untuk pemerintah tersebut tergolong rumit. Pengembangan gula dan perkebunan nila telah mengambil lahan, tenaga kerja, dan air dari penanaman beras (sehingga merugikan penduduk setempat), tapi memberikan kesempatan untuk menjadi karyawan upahan (sehingga menguntungkan mereka). Di sebagian daerah, terutama Pasuruan, penduduk setempat mengembangkan suatu hubungan simbiosis dengan industri gula yang menguntungkan kedua belah pihak. Di mana-mana, pembayaran pemerintah atas hasil-hasil panen dan kesempatan yang lebih besar untuk menjadi buruh upahan telah meningkatkan jumlah uang yang berputar. Ini memberikan rangsangan umum terhadap perdagangan. Pertumbuhan produksi mendorong munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan-kegiatan non-pertanian yang berkaitan dengan perkebunan dan perpabrikan dan daerah pedalaman. Terdapat penanaman modal yang cukup besar dalam membangun infrastruktur: pabrik, gudang, jalan, jembatan, sistem pengaturan air, dan fasilitas-fasilitas pelabuhan.

Kalaupun ada keuntungan yang terlihat, khususnya setelah tahun 1840, namun ada juga beban yang sangat serius yang menimpa kebanyakan rakyat lokal. Pada tempat pertama, sekalipun penyebaran keuntungan-keuntungan itu sulit dibuktikan, namun pastilah ia tidak merata. Orang yang paling berpeluang mengambil keuntungan dari *cultuurstelsel* adalah para elite desa dan yang berwenang pada tingkat di atas desa lewat penguasaan mereka atas tanah dan wewenang lokal, para pedagang nonpri (terutama Cina, tapi ada juga Arab) lewat penguasaan mereka atas modal dan pajak (khususnya distribusi candu), dan para pejabat dan pedagang Eropa lewat penguasaan mereka atas modal dan pengaruh mereka atas pemerintahan. Kepentingan-kepentingan yang sama sering kali menghubungkan ketiga kelompok ini dalam urusan-urusan gelap. Ada alasan untuk percaya bahwa tatanan sosial lokal tumbuh kurang setara, lebih bertingkat-tingkat, karena para elite beroleh kesempatan untuk meningkatkan tanah

dan pendapatan mereka, sementara teman-teman sekampung mereka yang lainnya menjadi buruh tanpa tanah milik. Sekitar tahun 1830–50, di beberapa wilayah mungkin telah ada kecenderungan ke arah kepemilikan tanah secara bersama dengan maksud membagi beban pajak dan buruh yang ada pada tanah milik, tapi ini juga mempertinggi posisi elite desa yang menentukan distribusi tanah di bawah pengaturan perputaran secara bersama. Bagi rakyat Jawa yang paling miskin, yaitu buruh-buruh yang tak punya tanah, kesempatan baru untuk menjadi buruh upahan mungkin berarti kesempatan memperbaiki secara berarti kondisi material mereka. Kaum tani Jawa tampak sudah cukup mobil di masa ini. Sejumlah besar dari mereka berpindah jauh untuk menghindari beban-beban atau untuk mencari pekerjaan. Bentuk-bentuk perlawanan lain juga terlihat, seperti sabotase, tindakan-tindakan kekerasan perseorangan, dan demonstrasi-demonstrasi protes secara bersama. Ini terjadi di daerah-daerah yang memiliki tanggung jawab besar untuk menghasilkan komoditi-komoditi pertanian untuk pemerintah maupun di daerah yang memiliki tanggung jawab sedikit atau yang tidak memilikinya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa banyak persoalan yang dirasakan rakyat Jawa muncul lebih karena kondisi umum kebijakan pemerintah Belanda daripada karena pengaturan-pengaturan khusus dalam rangka *cultuurstelsel*.

Akibat *cultuurstelsel* bagi pihak Belanda sangat jelas: segera diraih keuntungan yang sangat besar dan ajek. Sejak tahun 1831, anggaran belanja kolonial Indonesia sudah seimbang, dan sesudah itu hutang-hutang lama VOC dilunaskan. Uang dalam jumlah yang sangat besar dikirim ke negeri Belanda; dari tahun 1831 hingga tahun 1877, perbendaharaan negeri Belanda menerima 832 juta florins (f.). Sebelum tahun 1850, kiriman uang ini mengisi sekitar 19% dari pendapatan negara Belanda, lalu menjadi sekitar 32% pada tahun 1851–60, dan sekitar 34% pada tahun 1860–6. Pendapatan-pendapatan ini membuat perekonomian dalam negeri Belanda stabil: hutang-hutang dilunasi, pajak-pajak diturunkan, kubu-kubu pertahanan, terusan-terusan, dan jalan kereta api negara dibangun, semuanya dengan keuntungan-keuntungan yang diperas dari desa-desa Jawa. Ironisnya, dana-dana tersebut juga digunakan untuk membayar ganti rugi kepada para pemilik budak guna memerdekakan kaum budak Suriname.

Amsterdam sekali lagi menjadi pasar dunia yang penting bagi hasil bumi daerah tropis, khususnya kopi dan gula.

Telah ditunjukkan bahwa Jawa mampu menghasilkan surplus yang banyak, setidak-tidaknya secara paksa. Akan tetapi, surplus ini digunakan untuk menopang pemerintahan penjajahan Belanda di Jawa, upaya-upaya penaklukannya di daerah-daerah luar Jawa (lihat bab 13), dan perekonomian dalam negeri Belanda. Investasi yang utama adalah tenaga kerja orang Jawa dan Sunda, sedangkan teknik-teknik pertanian maupun administrasinya bersifat tradisional. Pihak Belanda berhasil memeras perekonomian Jawa, sambil mengembalikan keuntungan-keuntungan yang berarti hanya kepada sekelompok kecil masyarakat pribumi.

Pada tahun 1840, *cultuurstelsel* sudah menghadapi berbagai masalah. Tanda-tanda tentang penderitaan di kalangan orang Jawa dan Sunda mulai tampak, khususnya di daerah-daerah penanam tebu. Batang tebu ditanam di tanah yang sama untuk penanaman padi. Waktu yang diperlukan untuk tumbuhnya tebu dan menuainya, disusul dengan persiapan lahan bagi penanaman padi, telah mempersulit tercapainya pergiliran yang konstan bagi kedua komoditi tersebut. Pabrik-pabrik gula juga bersaing dengan pertanian padi untuk jatah air. Nila juga menciptakan masalah. Misalnya, bisa dipercaya bahwa pada wilayah yang luas yang diperuntukkan bagi nila di Pekalongan, gizi tanah begitu terkuras sehingga mengakibatkan rangkaian panen padi yang buruk selama beberapa tahun setelah penanaman nila dikurangi. Terjadilah kekurangan beras. Harganya menjadi bergejolak di mana-mana, yang paling kuat terjadi di akhir tahun 1830-an dan 1840-an. Namun, kelaparan yang melanda Jawa lebih disebabkan oleh kemelaratan petani dan keserakahan orang-orang yang memegang kekuasaan ketimbang oleh kelangkaan beras, karena sering kali beras tersedia (tidak jarang digudangkan oleh para elit lokal dan pedagang-pedagang Cina yang menginginkan harga lebih tinggi) tapi para petani tak sanggup membelinya. Pada tahun 1844 terjadi gagal panen besar-besaran yang diikuti oleh kelaparan di Cirebon. Wabah-wabah penyakit, khususnya tipus, berjangkit pada tahun 1846–50, dan kelaparan meluas di Jawa Tengah sekitar tahun 1849–50. Sementara itu, pemerintah menetapkan kenaikan pajak tanah dan pajak-pajak lainnya secara drastis. Kepergian penduduk dari desa-desa mengakibatkan semakin turunnya hasil

pertanian padi. Krisis-krisis keuangan juga terjadi di Perusahaan Dagang Belanda (NHM) maupun pada anggaran belanja kolonial di Jawa. Perluasan *cultuurstelsel* mencapai batasnya, dan pada tahun 1845–50 ekspor kopi, gula, dan nila merosot. Akan tetapi, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kopi dan gula segera meningkat lagi setelah tahun 1850, yaitu ketika harga pasaran dunia untuk komoditi-komoditi tersebut naik. Malah pada tahun 1851–70, perbendaharaan kerajaan Belanda menerima kiriman uang sejumlah dua kali lipat dari yang telah diterima pada tahun 1831–50. Akan tetapi, meningkatnya pengeluaran militer secara drastis (lihat bab 13) mengakibatkan anggaran keuangan kolonial mengalami defisit sejak tahun 1858, yang hanya dapat diperbaiki dengan keuntungan-keuntungan *cultuurstelsel.* Surplus keuangan dari Hindia Belanda akhirnya benar-benar berakhir pada tahun 1877.

Penentangan terhadap *cultuurstelsel* kini muncul di negeri Belanda. Pemerintah mulai bimbang apakah sistem itu dapat dipertahankan lebih lama, walaupun sistem itu mulai mendatangkan keuntungan lagi. Pada tahun 1848, untuk pertama kalinya sebuah konstitusi yang liberal memberikan kepada parlemen Belanda *(States-General)* peranan yang berpengaruh dalam urusan-urusan penjajahan. Di dalam parlemen, oposisi bersatu. Kepentingan-kepentingan kelas menengah Belanda, yang semakin bertambah kaya berkat keuntungan-keuntungan yang diterima perekonomian Belanda dari Jawa, menuntut diadakannya perubahan. Mereka mendesak diadakannya suatu pembaharuan yang 'liberal': pengurangan peranan pemerintah dalam perekonomian negara jajahan secara drastis, pembebasan dari pembatasan-pembatasan atas perusahaan swasta di Jawa, dan diakhirinya kerja paksa dan penindasan terhadap orang-orang Jawa dan Sunda. Pada tahun 1860, seorang mantan pejabat kolonial, Eduard Douwes Dekker (1820–87), menerbitkan sebuah novel yang berjudul *Max Havelaar* dengan nama samaran 'Multatuli'. Buku ini mengungkapkan dengan sangat pas keadaan pemerintahan kolonial yang lalim dan korup di Jawa. Buku ini menjadi sebuah senjata yang ampuh dalam menentang rezim penjajahan pada abad XIX di Jawa. Akan tetapi, kaum liberal menghadapi suatu dilema: mereka ingin dibebaskan dari *cultuurstelsel* tetapi tidak dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh Belanda dari Jawa.

Hasil dari perdebatan politik di negeri Belanda ini adalah dihapuskannya *cultuurstelsel* sedikit demi sedikit, ketika pemerintah kolonial menghapuskan penanaman paksa komoditi pertanian negara di seluruh wilayahnya di Indonesia. Penghapusan tersebut dimulai dari yang paling sedikit mendatangkan keuntungan atau yang tidak menguntungkan sama sekali: lada pada tahun 1862, cengkih dan pala pada tahun 1864 (ini benar-benar merupakan akhir dari suatu masa, setelah lebih dari 250 tahun), nila, teh, dan kayu manis pada tahun 1865, dan tembakau pada tahun 1866 (akan tetapi, segera terbukti bahwa tembakau menguntungkan bagi para penanam swasta; lihat bab 14). Kopi dan gula—yang disebut terakhir merupakan sumber yang khas bagi terjadinya skandal-skandal—adalah yang paling menguntungkan dan paling akhir dihapuskan. Di dalam Undang-Undang Gula tahun 1870 ditetapkan bahwa pemerintah akan menarik diri dari penanaman tebu selama 12 tahun, yang dimulai pada tahun 1878. Penanaman paksa kopi dihapuskan melalui tahapan-tahapan yang bahkan lebih lambat sejak tahun 1870-an. Penghapusan penanaman kopi itu baru berakhir di Priangan—tempat komoditi ini mulai ditanam pada awal abad XVIII—pada awal tahun 1917, dan di beberapa daerah-daerah pesisir utara Jawa pada bulan Juni 1919.

Undang-Undang Agraria tahun 1870 membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Hanya orang-orang Indonesialah yang dapat memiliki tanah, tetapi orang-orang asing diperkenankan menyewanya dari pemerintah sampai selama 75 tahun atau dari para pemilik pribumi untuk masa paling lama antara 5 dan 20 tahun (tergantung pada persyaratan hak pemilikan tanah). Perkebunan swasta kini dapat berkembang di Jawa maupun di daerah-daerah luar Jawa. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 dan perkembangan pelayaran dengan kapal uap (sebagian besar berada di tangan orang-orang Inggris) dalam waktu yang kira-kira sama mendorong lebih lanjut perkembangan swasta dengan semakin membaiknya sistem perhubungan dengan Eropa. Pada tahun 1860, ekspor swasta dan pemerintah dari seluruh Indonesia kira-kira sama nilainya, tetapi pada tahun 1885 ekspor swasta mencapai jumlah sepuluh kali lipat dari ekspor pemerintah. Keseluruhan nilai ekspor negara dan swasta pada tahun 1885 adalah dua kali lipat

dari nilai ekspor tahun 1860. Jumlah orang sipil Eropa di Jawa meningkat dengan pesat, yaitu dari 17.285 orang pada tahun 1852 menjadi 62.477 orang pada tahun 1900. Periode 'liberal' ini (sekitar 1870–1900) merupakan zaman ketika semakin hebat eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian Jawa maupun daerah-daerah luar Jawa (lihat bab 14).

Dampak periode 'liberal' setelah sekitar tahun 1870 terhadap rakyat Jawa masih perlu diselidiki. Secara umum dapat dikatakan bahwa harapan-harapan para pembaharu liberal gagal terwujud bila yang dijadikan ukuran adalah anggapan mereka bahwa pengaturan ekonomi baru dapat menguntungkan rakyat pribumi dan sekaligus melanjutkan penyerapan surplus pertanian Jawa untuk keuntungan ekonomi negeri Belanda dan para pedagang swasta. Para pedagang Cina tampaknya menikmati kemakmuran dari tahun 1870-an sampai pergantian abad itu, tapi pendapatan para pedagang Indonesia, para pengrajin, dan karyawan-karyawan upahan merosot tajam. Konsumsi beras per kapita juga jatuh, khususnya setelah tahun 1855, tapi perluasan produksi bahan makanan (khususnya jagung dan singkong) membuat pasokan makanan biasanya cukup untuk mencegah kelaparan, sekalipun kelaparan melanda Banten pada tahun 1881–2 dan Jawa Tengah, khususnya Semarang, pada tahun 1900–2.

Pada tahun 1880-an terjadi krisis besar yang memengaruhi rakyat pribumi Jawa maupun orang-orang yang berhasil mengeksploitasi mereka. Dari tahun 1870-an, penyakit daun kopi mulai menyebar dan produksi kopi pun jatuh. Lebih penting lagi, pada tahun 1882 hama gula menghantam Cirebon. Dari sana hama ini kemudian menyebar ke timur menyeberangi Pulau Jawa dan mencapai ujung timurnya pada tahun 1892. Industri gula Jawa kemudian terpukul lebih jauh ketika gula bit membanjiri pasar Eropa. Pada tahun 1884, harga gula terpuruk. Karena gula mendominasi perekonomian Jawa, maka krisis tersebut berdampak luas. Depresi melanda pedesaan secara umum yang mencapai titik terendahnya pada tahun 1887–8. Perdagangan berhenti. Kebangkrutan yang menimpa pedagang dan pemilik perkebunan membuat banyak pengusaha jatuh ke tangan bank dan perusahaan-perusahaan dagang besar. Bahkan para pedagang-candu Cina yang kaya-kaya di pulau Jawa pun ikut tertekan: pada tahun 1889, hanya 4 dari 19 perusahaan candu yang tidak bangkrut.

Para petani yang mata pencahariannya tergantung pada pekerjaan di industri kopi dan, khususnya, gula terdepak dari pekerjaannya. Karena tergantung pada penjualan komoditi-komoditi ekspor, para petani juga terkena risikonya. Industri gula akhirnya bertahan. Sesudah uji coba yang panjang dan sulit dalam seleksi pembastaran berganda, pihak Belanda akhirnya menghasilkan tebu yang menolak hama. Industri ini juga meningkatkan produksinya. Wilayah yang ditanami tebu diperluas, tapi pertumbuhan produksi yang lebih besar berasal dari kemajuan teknologi. Pada tahun 1885, produksi gula dari Jawa berjumlah 380.400 metrik ton dan hanya sedikit di bawah 400.000 metrik ton pada tahun 1890. Tapi ia meningkat hingga 581.600 metrik ton pada tahun 1895 dan 744.300 metrik ton pada tahun 1900. Industri ini juga meningkat labanya dengan memotong upah dan juga harga sewa tanah kepada para petani. Maka, sementara industri ini meningkat, para petani tetap nestapa.

Pembebasan petani secara berangsur-angsur dari kewajiban menanam komoditi-komoditi ekspor hanya menimbulkan sedikit perbaikan, karena pajak tanah dan bentuk-bentuk pembayaran lainnya masih tetap harus diserahkan kepada pemerintah, sementara sumber penghasilan untuk membayar pajak-pajak tersebut telah dihapuskan. Laporan van Deventer tahun 1904 memperkirakan bahwa rata-rata keluarga di Jawa harus membayar kepada pemerintah sebesar 23% dari penghasilan tunainya dan 20% dari keseluruhan penghasilannya (uang dan barang). Penderitaan tersebut terutama terasa di daerah-daerah penanaman kopi, karena lahan kopi tidak dapat diubah untuk menanam komoditi-komoditi perdagangan lainnya. Penyakit-penyakit kopi berjangkit sejak tahun 1878; ditambah tidak adanya paksaan terhadap tenaga kerja atau upah dan harga yang menarik, maka hasil kopi pun merosot. Untuk dapat membayar pajak dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan lainnya, para petani harus berpaling kepada para lintah darat, di antaranya yang mencolok adalah para haji lokal. Para haji lokal secara hukum adalah 'penduduk pribumi' sehingga dapat memiliki tanah. Penyitaan tanah yang mereka lakukan membuat orang yang tidak mempunyai tanah semakin banyak. Orang-orang Cina, yang termasuk golongan 'orang-orang Timur Asing', tidak dapat memiliki tanah sehingga harus bekerja melalui para penghubung pribumi, tetapi mereka mempunyai posisi yang

kuat karena memiliki rumah-rumah gadai dan sekaligus tempat-tempat mencandu. Hak menjual candu oleh pemerintah dihapuskan secara bertahap mulai tahun 1894, dan akhirnya digantikan oleh Administrasi Candu negara di seluruh Jawa pada awal tahun 1904. Pergadaian dihapuskan secara bertahap tidak lama sesudah itu. Akan tetapi, dalam pandangan van Deventer, orang-orang Arab-lah yang merupakan lintah darat yang paling serakah di antara yang lain.

Elite kerajaan Jawa kini tergeser dari urusan-urusan politik. Pemberontakan benar-benar ditinggalkan sesudah tahun 1830. Memang terjadi beberapa kekacauan di daerah-daerah kekuasaan kerajaan, tetapi sangat jarang yang melibatkan para anggota keluarga kerajaan. Pada tahun 1842, lima orang pangeran muda Surakarta pergi meninggalkan istana dan berusaha menimbulkan kerusuhan, tetapi mereka dapat ditangkap dalam waktu lima hari. Di Yogyakarta, sebuah pemberontakan untuk kepentingan seorang pangeran yang agak dungu yang bernama Pangeran Suryengalaga direncanakan oleh ibunya pada tahun 1883. Kejadian ini mencemaskan pihak Belanda dan kalangan kerajaan Yogyakarta, tetapi akhirnya pemberontakan tersebut dapat segera ditumpas. Suryengalaga maupun ibunya dibuang ke pengasingan di Manado dalam waktu seminggu setelah upaya pemberontakan mereka itu. Akan tetapi, nama Suryengalaga masih disebut-sebut dalam beberapa persekongkolan kemudian. Perasaan benci terhadap Belanda tampaknya masih tetap berlanjut di beberapa kalangan istana, tetapi hal ini tidak menyebabkan timbulnya perlawanan yang serius terhadap kekuasaan Belanda. Dalam teori, keempat keluarga kepangeranan (kepangeranan senior dari Kesultanan Yogyakarta dan Kesusuhunan Surakarta serta kepangeranan tambahan Mangkunegaran dan Pakualaman) memerintah wilayah mereka masing-masing *(Vorstenlanden)*, sedangkan kekuasaan Belanda bersifat tidak langsung. Dalam kenyataannya, para residen Belanda-lah yang menyelenggarakan kekuasaan yang sebenarnya di sana, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan antara kerajaan-kerajaan itu dengan daerah-daerah yang diperintah secara langsung karena adanya perbedaan dalam dasar hukum penguasa Belanda. *Cultuurstelsel*, misalnya, dalam teori tidak berlaku bagi kerajaan-kerajaan tersebut, walaupun dalam hal penanaman komoditi-komoditi ekspor terdapat aturan-aturan yang sama. Pada akhir tahun 1872, penduduk kerajaan-kerajaan ini mencapai 1,1 juta jiwa.

Karena hanya ada sedikit peluang untuk menjalankan manuver politik, maka kalangan elite kerajaan mengalihkan perhatian mereka ke bidang budaya. Pakubuwana V (l. 1785, m. 1820–3), ketika masih putra mahkota, telah memerintahkan disusunnya *Serat Centhini;* buku ini merupakan suatu karya besar yang memberi pengetahuan tentang mistik Jawa melalui kisah seorang murid agama yang sedang berkelana bernama Seh Amongraga pada zaman Sultan Agung. Para pengganti Pakubuwana V adalah juga pendukung-pendukung kegiatan sastra. Dengan perlindungan raja, Raden Ngabei Ronggawarsita (1802–73) aktif di Surakarta sebagai penulis karya-karya berbentuk prosa maupun puisi berbahasa Jawa. Ia biasanya dianggap sebagai pujangga terakhir dari pujangga-pujangga besar istana. Karya prosanya yang monumental, *Pustakaraja Purwa,* 'Buku tentang Raja-Raja pada Zaman Kuno', dan pendahuluannya, *Paramayoga,* 'Zaman yang Agung' (?), mencakup dongeng-dongeng mengenai Jawa pada Zaman Kuno, bermula dari Adam serta dewa-dewa India dan berakhir pada tahun 730. Dia juga menulis beberapa karya kesusilaan dalam bentuk prosa dan sajak. Mangkunegara IV (m. 1853–81) adalah seorang pujangga besar, dan bekerja sama dengan Ronggawarsita. Di antara karya-karya yang dinisbahkan kepadanya, sajak *Wedatama,* 'Kearifan yang Agung', adalah yang paling terkenal; buku ini mengajarkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan mistik Jawa-Islam, dan bersifat kritis terhadap masyarakat Islam di Jawa yang semakin berpegang teguh kepada syariat-syariat agamanya.

Kalangan elite kerajaan Yogyakarta juga merupakan pelindung-pelindung kesusastraan. Pakualam II (m. 1829–58) dan Pakualam III (m. 1858–64) adalah penulis-penulis penting, dan keluarga Pakualam melindungi banyak kegiatan di bidang sastra. Sultan Hamengkubuwana V (m. 1822–6, 1828–55) juga mendorong dengan penuh semangat penulisan karya-karya sastra, dan mungkin menyusun sendiri beberapa buku. Dengan demikian, perpustakaan kesultanan, yang telah dirampok oleh orang-orang Inggris pada tahun 1812, dibangun kembali secara bertahap. Perlindungan raja terhadap kesenian juga menyebabkan berlangsungnya banyak kegiatan di bidang musik dan wayang di Surakarta maupun Yogyakarta. Pada umumnya, Mangkunegaran dan Pakualaman tampaknya lebih aktif dan lebih terbuka kepada ide-ide baru daripada kedua kerajaan senior.

Akan tetapi, kegiatan budaya istana-istana sesudah tahun 1830 tidak menimbulkan banyak pembaruan. Kegiatan itu sebagian besar merupakan ungkapan cita-cita etos kebangsawanan yang semakin tidak relevan dalam masa damai, tetapi etos itu menyenangkan kalangan elite kerajaan dan dianggap berfaedah oleh pihak Belanda sebagai bagian dari kebijakan mereka memanfaatkan penguasa 'tradisional' untuk keamanan. Hanya ada sedikit sekali yang dapat dibandingkan dengan perkembangan pemikiran dan bentuk-bentuk sastra yang lebih modern dari kalangan penulis Filipina, Vietnam, Jepang, India, atau Arab abad XIX.

Di bidang seni rupa ada tanda-tanda munculnya pemikiran-pemikiran baru. Raden Saleh (± 1814–80), keturunan keluarga yang berkuasa di Semarang di bawah VOC, tinggal lebih dari dua puluh tahun di Eropa, di mana dia dipengaruhi oleh Delacroix dan menjadi seorang pelukis istana yang terkenal. Setelah kembali ke Jawa pada tahun 1851, dia melukis di istana Yogyakarta dan Mangkunegaran selama beberapa waktu. Beberapa orang Indonesia (kebanyakan tidak diketahui namanya) juga menjadi juru lukis yang cakap dan beberapa lukisan mereka muncul di dalam penerbitan-penerbitan Eropa abad XIX tentang Indonesia. Ini sebagian besar merupakan perkara orang-orang yang sepenuhnya menganut gaya Eropa. Akan tetapi, seni 'tradisional' Jawa juga sedikit terpengaruh. Misalnya, beberapa naskah berbahasa Jawa menempatkan gambar-gambar wayang di atas latar belakang cat air yang lebih naturalis atau berisi gambar-gambar bergaya Eropa yang kasar. Berbeda dengan seni sastra, pembaruan yang agak lebih besar dalam seni rupa ini tampaknya dapat terjadi karena tidak adanya tradisi lukisan atau gambaran pribumi yang berarti (kecuali untuk hiasan naskah atau pola-pola batik) untuk menandingi gaya-gaya baru itu.

Perubahan budaya di Jawa abad XIX mungkin tidak sedahsyat yang terjadi kemudian di abad XX, tapi bukan kurang penting. Sejak bangkitnya semangat islamisasi pada masa Pakubuwana II (bab 9), tampaknya telah terjadi penyesuaian setahap demi setahap dengan peraturan-peraturan dan praktik-praktik Islam yang lebih saleh dalam kehidupan orang Jawa. Beberapa bukti menunjukkan bahwa cerita-cerita wayang disesuaikan dan ditafsirkan dalam pengertian-pengertian yang lebih islami. Namun, pada akhir abad XIX, beberapa elite Jawa yang bekerja pada rezim kolonial

melihat ini sebagai fenomena yang berbahaya, dan kaum muslim yang lebih reformis dalam masyarakat melihat itu sebagai kompromi yang tak semestinya. Pengaruh kelompok elite ini begitu kuat sehingga islamisasi atas bentuk kesenian lama yang baru terjadi itu malah mundur.

Isu budaya yang kurang lebih sama juga menghadang para misionaris Kristen di Jawa yang menghadapi versi lokal agama mereka. Para misionaris tersebut gagal hampir total dalam mengkristenkan kaum muslim Jawa, seperti yang juga terjadi di dunia Islam lainnya. Tapi di Jawa Timur, tumbuh komunitas Kristen pribumi yang luar biasa, dipimpin oleh guru-guru Kristen setempat. Mereka diilhami oleh risalah-risalah kristiani yang mereka baca dan ingin mengasimilasikan kekristenan dengan identitas dan gaya hidup kejawaan mereka. Tapi mereka tak banyak berhubungan—dan sesekali bertentangan tajam—dengan para misionaris konvensional yang dikirim oleh gereja-gereja Belanda. Gerakan ini dimulai oleh C.L. Coolen (± 1773–± 1873), seorang indo, anak dari bapak Rusia dan ibu Jawa-bangsawan dari Surakarta. Ia menggabungkan Kristen dengan mistik dan adat lokal Jawa. Yang paling terkenal di antara para pemimpin Kristen lokal ini adalah Sadrach Surapranata (l. ± 1835, w. 1924). Pemahamannya tentang Kristen menimbulkan konflik dengan para misionaris Kristen, yang mendakwahnya menganut ajaran palsu. Memang, ajaran-ajarannya menunjukkan penyesuaian yang jelas dengan gagasan-gagasan kejawaan. Ia menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah 'ratu adil', sang raja adil yang dinanti-nanti dalam tradisi Jawa. Ia menggunakan kata Jawa-Arab untuk menyebut gereja dan pemimpin jemaat, masing-masing dengan 'mesjid' dan 'imam'. Namun, tidak seperti para misionaris berkebangsaan Eropa yang menjadi pesaingnya, Sadrach berhasil melakukan pengkristenan. Karena alasan ini juga, ia dipandang sebagai ancaman oleh para misionaris maupun pemerintah. Pada tahun 1887, ia bahkan membaptis seorang bangsawan dari kerajaan Pakualaman. Pada tahun 1890, umat Sadrach terdiri atas hampir 7.000 anggota yang tersebar di 371 desa. Antara tahun 1855 dan 1963, anggota pribumi gereja-gereja di Jawa Timur yang dibaptis tumbuh dari 2.000 menjadi 60.000 orang, sebuah angka pertumbuhan yang lebih besar dibanding dengan pertumbuhan penduduk.

Sebuah pers berbahasa daerah muncul di Jawa dalam periode ini. Surat kabar berbahasa daerah yang pertama dalam sejarah

Indonesia mulai diterbitkan di Surakarta pada tahun 1855. Koran ini dipimpin oleh seorang penerjemah indo Eropa, C.F. Winter (1799–1859), dan terbit setiap minggu dalam tulisan dan bahasa Jawa dengan nama *Bramartani.* Koran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi umum, termasuk berita-berita dari segenap penjuru nusantara dan dari negara-negara lain, untuk dibaca oleh kaum elite. Setahun kemudian, surat kabar mingguan pertama dalam bahasa Melayu muncul di Surabaya dengan nama *Soerat Kabar Bahasa Melaijoe.* Ia ditujukan untuk menjadi bacaan para pedagang dan penjaga toko, tapi kemudian berhenti terbit setelah tiga bulan. Dengan pendidikan modern yang masih sangat terbatas di Jawa, kebanyakan surat kabar dan terbitan-terbitan berkala di masa-masa awal ini berumur pendek. Jarang yang bertahan lebih dari dua tahun. *Bramartani* dan penggantinya yang bernama *Jurumartani* memiliki sejarah yang, walaupun juga mengalami beberapa kesulitan, lebih panjang, bertahan hingga tahun 1932.

Di antara semua istana kerajaan, Mangkunegaranlah yang paling berhasil menyesuaikan diri dengan keadaan baru pada masa kekuasaan Belanda. Mungkin penting untuk dicatat bahwa inilah juga satu-satunya istana di mana tradisi-tradisi militer bangsawan Jawa tetap hidup, sekalipun di bawah kekuasaan Belanda. Legiun Mangkunegaran, yang terdiri atas pasukan infantri, kavaleri, dan artileri, tetap dipertahankan dengan dukungan keuangan Belanda. Mangkunegaran juga mengembangkan perkebunan negara secara luas, khususnya untuk komoditi kopi dan gula. Landasan dari kegiatan ekonomi ini diletakkan oleh Mangkunegara IV (m. 1853–81). Dia mempekerjakan orang-orang Eropa untuk memperkenalkan teknik-teknik Eropa dalam pengelolaan dan eksploitasi negara, tetapi dengan perbedaan yang penting bahwa keuntungan-keuntungannya ditanamkan kembali di daerah kekuasaannya daripada dikirim ke luar negeri. Dua kali, di tahun 1857 dan 1877, Mangkunegara IV gagal mendapat kembali perkebunan-perkebunan yang sudah disewakan kepada pengusaha-pengusaha Eropa. Akan tetapi, dia berhasil sedikit demi sedikit mengganti sistem apanage bagi para abdi-dalem dan pejabatnya dengan sistem gaji. Walaupun penduduk pedesaan menanggung beban yang berat, namun terjadinya perpindahan penduduk ke daerah-daerah kekuasaannya menunjukkan bahwa beban tersebut

lebih ringan jika dibandingkan dengan di beberapa daerah lainnya. Akan tetapi, Mangkunegara IV telah menciptakan suatu perekonomian 'terbelakang' yang khas, yang penghasilannya tergantung pada harga pasaran dunia untuk beberapa jenis komoditi. Sesudah masa pemerintahannya, Mangkunegaran, sebagaimana juga daerah-daerah lain di Jawa, mengalami krisis keuangan yang hebat sebagai akibat berjangkitnya penyakit-penyakit kopi dan munculnya gula bit di Eropa. Keadaan ini menyebabkan Residen Surakarta melakukan pengawasan langsung terhadap keuangan Mangkunegaran dari tahun 1888 sampai tahun 1899. Selama masa itu, keuangan Mangkunegaran dapat dipulihkan kembali.

Ketika muncul kursi-kursi gaya Eropa yang disepuh emas, batu pualam Italia, tempat-tempat lilin yang terbuat dari kristal, serta tanda-tanda jasa dan seragam-seragam militer Belanda, maka istana- istana tampak lebih bagus daripada sebelumnya. Prestise budaya mereka di kalangan rakyat tampaknya tetap tinggi. Perpaduan antara ketidakmampuan politik dan prestise budaya mereka mungkin dapat menjelaskan mengapa raja-raja Jawa dengan keluarganya tidak menjadi sasaran utama kecaman dari pergerakan nasional yang timbul pada awal abad XX. Namun demikian, hanya sedikit isi yang tertinggal dalam kehidupan istana: kalangan elite kerajaan merupakan ksatria-ksatria yang tidak lagi menghadapi pertempuran. Oleh karena itulah maka istana-istana turun derajatnya menjadi suatu formalisme yang lemah, suatu instansi buatan yang rumit dan kuno.

Kalangan elite daerah yang tinggi, yang merupakan landasan kekuasaan Belanda di luar kerajaan-kerajaan, juga mengalami perubahan dalam kedudukan mereka di bawah 'liberalisme', ketika semangat baru bagi pembaharuan sosial mewarnai kebijakan pemerintah kolonial. Selama dilaksanakannya *cultuurstelsel,* para bupati dan kalangan elite pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya memperoleh banyak keuntungan, baik dalam hal penghasilan maupun jaminan kedudukannya. Akan tetapi, penyelewengan-penyelewengan yang telah mereka lakukan, terutama dalam penggunaan tenaga kerja paksa, mengakibatkan timbulnya dendam dari masyarakat mereka sendiri dan juga meningkatkan kecaman dari tuan-tuan mereka yang berkebangsaan Belanda. Dari tahun 1860-an dan sesudahnya, pihak Belanda mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki struktur pemerintahan yang serampangan

dan menciptakan suatu pemerintahan pribumi yang lebih teratur agar seimbang dengan pemerintahan Belanda. Dalam teori, para bupati (yang pada tahun 1900 berjumlah 72 orang) tetap merupakan pejabat pribumi yang tertinggi dan pimpinan masyarakat mereka. Akan tetapi, lama-kelamaan praktik pihak Belanda melangkahi mereka dan lebih menaruh kepercayaan kepada pembantu-pembantu mereka, yaitu para patih. Wedana (kepala distrik, yang pada tahun 1900 berjumlah 434 orang) juga semakin bertambah penting, dan pusat gravitas dalam pemerintahan pribumi mulai terletak pada patih dan wedana yang, bersamaan dengan berjalannya waktu, tugas dan jabatan keduanya cenderung lebur menjadi satu.

Dengan demikian, maka elite bangsawan daerah yang tertinggi tingkatannya itu mulai dilangkahi. Kekayaan para bupati dan kesempatan mereka untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan juga terkikis. Pada tahun 1867, mereka dicabut apanagenya. Sebagai gantinya, mereka diberi gaji yang sering kali dikatakan kurang memadai. Pada tahun yang sama, pembayaran persentase kepada pegawai-pegawai Belanda atas penyerahan hasil bumi kepada pemerintah dihapuskan, tapi pembayaran kepada pejabat-pejabat pribumi tetap berlanjut hingga tahun 1907. Namun, ketika *cultuurstelsel* dihapus, pendapatan mereka dari sumber ini pun hilang. Pada tahun 1882, semua pejabat pribumi kehilangan hak mendapat pelayanan pribadi dari warga mereka. Selama dua puluh tahun kemudian, banyak bentuk tenaga kerja paksa lainnya dalam pekerjaan umum dihapuskan tahap demi tahap. Walaupun hal ini sangat banyak mengurangi peluang pejabat pribumi untuk melakukan penyelewengan, namun semua itu hanya menghasilkan sedikit perbaikan bagi penduduk desa. Kewajiban mereka untuk bekerja diubah menjadi pajak kepala secara tunai, yang bahkan mungkin merupakan beban yang lebih berat.

Belanda sebelumnya tidak pernah tertarik untuk "memodernkan" para bupati, karena mereka sangat bermanfaat dengan status 'tradisional' mereka. Tingkat pendidikan mereka rendah; pada tahun 1900, hanya ada 4 dari 72 bupati yang dikatakan dapat berbahasa Belanda. Pemerintah kolonial memanfaatkan para bupati untuk kepentingannya sendiri, menyalahgunakan status mereka, dan memudahkan mereka untuk melakukan penyelewengan.

Ketika penyelewengan-penyelewengan menjadi jelas dan para bupati tidak bermanfaat lagi, maka pemerintah mulai melangkahi mereka. Bahkan, mulai tahun 1900, penampilan-penampilan luar dari status kebangsawanan juga mendapat serangan. *Hormat circulaire* (surat edaran tentang etiket) dari tahun 1904 mengakhiri dukungan resmi Belanda terhadap penampilan-penampilan yang "sudah ketinggalan zaman", seperti payung-payung, jumlah pelayan yang banyak, tanda kebesaran, dll.

Pada zaman 'liberal' ini, pemerintah tidak hanya bertindak menghapuskan lambang-lambang foedal kaum elite bangsawan, tetapi juga berusaha menanamkan semangat baru kepada generasi mudanya. *Hoofdenscholen* (sekolah untuk para kepala) didirikan mulai tahun 1878 untuk anak kalangan elite atas. Mulai sekitar tahun 1893, sekolah-sekolah ini lebih bersifat kejuruan dengan mata pelajaran di bidang hukum, tata buku, pengukuran tanah, dll. Akan tetapi, kalangan keluarga bupati sudah kehilangan semangat, sedemikian rupa sehingga banyak anak mereka tidak ingin menggantikan kedudukan sang ayah. Lama-kelamaan, pemerintah harus mengisi jabatan-jabatan tinggi pemerintahan dengan anak-anak pejabat yang lebih rendah tingkatannya atau bahkan dari luar kalangan bangsawan pribumi.

Pada tahun 1900, prestise, kekuasaan, dan kepercayaan diri kaum elite bangsawan Jawa mencapai titik yang rendah. Tentu saja ada perkecualian secara perorangan. Bupati Majakerta, misalnya, pada tahun 1896 mendirikan suatu yayasan yang meminjamkan padi bibit tanpa bunga kepada para petani, yang pembiayaannya menggunakan dana-dana masjid. Akan tetapi, banyak bupati lainnya yang menanggapi zaman yang sedang berubah dan sulit itu secara kurang positif. Banyak generasi muda meninggalkan jabatan dalam pemerintahan dan mencari karir di bidang hukum atau kedokteran. Bangsawan lainnya menciptakan gerakan-gerakan intelektual yarg nyata-nyata bersifat anti-Islam dan yang berkaitan erat dengan teosofi. Gerakan-gerakan semacam itu menghubung-hubungkan buruknya keadaan di Jawa dengan penyebaran agama Islam, dan berusaha memulihkan keadaan dengan cara menyatukan *budi* ('intelek', dalam hal ini berarti pemikiran ilmiah Barat) dan *buda* (kebudayaan Jawa sebelum masuknya agama Islam). Kira-kira pada waktu yang sama, kalangan Islam mulai menyimpulkan tentang perlunya peningkatan

kembali semangat dan pemurnian Islam. Jadi, ketika Jawa memasuki abad XX, sudah muncul perbedaan antara dua ideologi yang bertentangan sebagai dasar bagi peremajaan nasional.

Elite bangsawan yang lebih tinggi juga merasakan adanya tantangan dari kelompok pejabat baru yang jumlahnya semakin bertambah besar. Kalangan atas dalam pemerintahan Jawa secara kolektif disebut 'priyayi', dan kelompok pejabat baru tadi dapat disebut priyayi 'baru' atau 'yang lebih rendah'. Munculnya kelompok ini mencerminkan adanya ambivalensi dalam kebijakan kolonial pada akhir abad XIX mengenai perlunya bentuk kekuasaan yang 'tradisional'. Tugas-tugas mereka adalah baru seluruhnya, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dituntut oleh dinas-dinas pemerintahan yang baru. Akan tetapi, mereka secara resmi dimasukkan ke dalam kelas priyayi dan diberi gelar serta bentuk-bentuk kemegahan sesuai dengan kelas itu. Ini dimaksudkan untuk memberi jabatan-jabatan baru tersebut suatu status yang jelas di dalam masyarakat pribumi. Pada tahun 1861, misalnya, guru-guru sekolah pemerintah diberi pangkat mantri guru dan hak untuk tampil di depan umum dengan sebuah payung, sebuah tombak, sebuah tikar, seperangkat buah pinang, dan empat orang pengiring. Suatu pelayanan vaksinasi telah dimulai secara kecil-kecilan pada tahun 1811, dan pada tahun 1851 sekolah 'Dokter-Jawa' didirikan di Weltevreden (suatu daerah di kota Batavia, sekarang Gambir). Pada tahun 1875, kursus mantri cacar diperbarui, dan sesudah itu masa pendidikannya berlangsung selama lima sampai enam tahun dan diberikan dalam bahasa Belanda. Priyayi baru lainnya muncul di dinas-dinas pengajian, kehutanan, kereta api, telegrap, dan dinas-dinas lainnya. Setelah *hormat circulaire* tahun 1904, proses ini mulai ditinggalkan. Kelompok terakhir yang ditetapkan menjadi kelas priyayi adalah para juru gadai pemerintah pada tahun 1906.

Para priyayi baru tersebut berbeda dari elite bangsawan yang lama lebih atas dasar status mereka daripada asal-usul sosial mereka (karena banyak yang berasal dari keluarga yang setidak-tidaknya lebih baik keadaannya). Priyayi baru mencapai kedudukan mereka melalui bakat pribadi, sedangkan priyayi lama memperoleh status mereka karena keturunan. Tentu saja terjadi konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan antara kedua kelompok ini. Pada abad XX, priyayi baru ditakdirkan memainkan peranan yang sangat penting. Mereka yang tetap berada di dalam birokrasi

bergabung dengan priyayi lama untuk menjadi tulang punggung pemerintahan: pertama-tama pemerintahan Belanda, kemudian pemerintahan Jepang, dan sesudah itu pemerintahan Indonesia. Mereka yang meninggalkan dinas pemerintahan menjadi pimpinan gerakan anti-penjajahan dan membentuk negara yang merdeka.

Karena elite kerajaan dan birokrasi Jawa begitu terikat kepada pemerintah kolonial, berpusat di daerah-daerah perkotaan, atau berkurang peranan politiknya, maka protes-protes petani pedesaan hanya menemukan sedikit pimpinan. Protes-protes tersebut sering meletus, terutama mulai tahun 1870-an dan seterusnya. Memang, protes-protes tersebut maupun pemberontakan-pemberontakan kecil-kecilan sering kali ditujukan khususnya terhadap pemerintahan pribumi, dan juga terhadap orang Cina atau para pejabat dan pengusaha Eropa. Para petani mencari ilham dalam gagasan-gagasan yang sifatnya mesianistis, baik dalam Islam maupun dalam ajaran asli Jawa. Kepemimpinan yang mereka dapat sering kali berasal dari para pemimpin Islam pedesaan. Akan tetapi, tak satu pun dari gerakan-gerakan ini benar-benar mengancam kekuasaan kolonial. Kekecewaan rakyat mengakar secara mendalam pada akhir abad XIX, tetapi tanpa pimpinan atau koordinasi yang efektif.

Sementara itu, suatu kelompok kepemimpinan baru secara berangsur-angsur muncul di kalangan-kalangan Islam. Gerakan-gerakan kebangkitan kembali yang bersifat keagamaan akan memainkan peranan penting pada abad XX, tetapi latar belakangnya di Jawa pada abad XIX masih sedikit diketahui. Jelas bahwa jumlah jemaah haji dari Indonesia ke Mekah, sebagian besar dari Jawa, meningkat sangat besar. Hal ini terjadi terutama setelah dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, yang mengalihkan jalur-jalur pelayaran utama Asia Tenggara-Eropa ke Laut Merah. Pada tahun 1850-an dan 1860-an, jumlah orang Indonesia yang berangkat naik haji setiap tahun rata-rata sekitar 1.600 orang, tetapi pada tahun 1870-an berjumlah 2.600 orang, pada tahun 1880-an 4.600 orang, dan pada akhir abad tersebut mencapai lebih dari 7.000 orang. Beberapa orang Indonesia menjadi tokoh penting di Mekah, terutama Syekh Muhammad Nawawi (1813–97) dari Banten. Tahun 1828, pada usia 15 tahun, ia pergi ke Mekah, tempat ia menghabiskan seluruh sisa hidupnya. Sekitar tahun 1884, ia menerbitkan sebuah tafsir Alquran yang panjang

dalam bahasa Arab, sehingga ia menjadi mufasir besar Indonesia yang pertama sejak Abdurrauf Singkil di abad XVII. Sementara tafsir Nawawi dalam banyak hal tergolong konservatif, Johns menunjukkan bahwa pendekatan Nawawi sesuai dengan pembaharuan yang muncul kemudian di dunia Islam.

Jemaah haji Indonesia tentu saja tersentuh oleh gerakan-gerakan pembaharuan dan kebangkitan yang muncul dalam Islam Timur Tengah pada abad XIX. Setibanya kembali di daerah pedesaan Jawa, para haji tersebut tidak hanya menjadi tukang kredit dan tuan tanah saja, tetapi juga menjadi pemimpin beberapa gerakan protes. Tampaknya mereka juga mempermasalahkan kedudukan sosial para guru agama pedesaan *(kyai)* yang sudah mapan, sehingga menimbulkan ketegangan di kalangan-kalangan yang berpegang teguh pada agama Islam. Kelompok-kelompok persaudaraan mistik, yaitu tarekat-tarekat sufi, juga mengalami kebangkitan yang sangat penting. Tarekat Naqsyabandiyyah khususnya menyebar dari tahun 1850-an, terutama di kalangan elite Jawa Barat dan Jawa Tengah. Orientasinya yang cenderung ke golongan atas di banyak wilayah di Jawa telah mencegah tarekat ini untuk menjadi kekuatan anti-penjajahan sebagaimana yang terjadi di beberapa bagian lain dunia Islam. Tarekat lain yang menggabungkan unsur-unsur tarekat Naqsyabandiyyah dan Qadiriyyah, dan karenanya disebut tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah, didirikan oleh Ahmad Khatib dari negara Sambas, Kalimantan, yang wafat pada tahun ± 1878. Tarekat ini mempunyai pengikut-pengikut yang lebih banyak dan berperan penting dalam pemberontakan petani di Banten tahun 1888. Dengan demikian, sektor-sektor Islam yang lebih saleh di Jawa bangkit keluar dari dunia religius abad-abad sebelumnya yang agak menyimpang dan memasuki suatu masa konflik dan pembaharuan. Ketika hal ini terjadi, kalangan-kalangan yang kurang taat kepada Islam menghadapi suatu tantangan yang tidak lazim, dan beberapa di antaranya menanggapinya dengan sikap bermusuhan. Situasi yang berubah-ubah pada akhir abad XIX ini belum begitu jelas, tetapi akibat yang nanti ditimbulkannya adalah perpecahan-perpecahan sosial dan agama yang sangat penting pada abad XX.

Di Jawa, tatanan yang lama telah benar-benar hancur pada tahun 1900. Perimbangan yang menguntungkan antara jumlah penduduk dengan tanah pertanian, vitalitas elite lama, kesepakatan

keagamaan, serta struktur kekuasaan dan wewenang yang ada sebelumnya, semuanya telah lenyap atau menghilang dengan cepat. Munculnya gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah dan pertumbuhan penduduk di Jawa memainkan peranan dalam perkembangan-perkembangan tersebut, tetapi banyak dari penyebabnya dinisbahkan secara langsung pada kebijakan dan praktik penjajahan Belanda. Pada tahun 1900, Jawa berada dalam keadaan peralihan, di mana zaman lama telah berakhir tetapi bentuk zaman baru belum juga jelas.[]

Bab 13 ....

Daerah-daerah Luar Jawa, ± 1800–1910

PADA SEKITAR tahun 1910, sebagian besar wilayah yang sekarang ini membentuk Republik Indonesia telah jatuh di bawah kekuasaan Belanda. Gubernur Jenderal van den Bosch (1830–3) menanamkan keuntungan sebagai prinsip utama pemerintah, dan meyakini bahwa oleh karenanya maka Belanda harus membatasi perhatian mereka hanya terhadap Jawa, Sumatera, dan Bangka (sumber timah). Meskipun demikian, mulai tahun 1840 dan seterusnya, keterlibatan Belanda di seluruh wilayah luar Jawa semakin meningkat. Ada banyak alasan untuk hal ini. Sering kali ada dorongan-dorongan ekonomi, termasuk usaha melindungi perdagangan antarpulau. (Perkembangan-perkembangan ekonomi yang mengikuti perluasan kekuasaan Belanda akan dibahas dalam bab 14). Sering kali para pejabat Belanda di daerah melakukan campur tangan karena adanya ambisi untuk mendapatkan kehormatan atau kenaikan pangkat, walaupun ada kebijakan resmi Batavia untuk menghindari perluasan kekuasaan Belanda. Ada dua pertimbangan umum yang berlaku di mana-mana. Pertama, untuk menjaga keamanan daerah-daerah yang sudah berhasil dikuasai, Belanda merasa terpaksa untuk menaklukkan daerah-daerah lain yang mungkin akan mendukung atau membangkitkan gerakan perlawanan. Kedua, ketika persaingan bangsa Eropa untuk memperoleh daerah-daerah jajahan mencapai puncaknya pada akhir abad XIX, pihak Belanda merasa wajib untuk menetapkan hak mereka terhadap daerah-daerah di luar Jawa dalam rangka mencegah masuknya kekuatan Barat lain di sana, termasuk tempat-tempat yang pada mulanya Belanda sendiri tidak meminatinya.

Pada perempat terakhir abad XIX, perimbangan kekuatan militer berubah secara menentukan terhadap negara-negara Indonesia yang masih merdeka, dan inilah yang memungkinkan berlangsungnya tahap terakhir perluasan kekuasaan Belanda. Pada zaman kapal-layar kayu dan senapan yang pelurunya diisi dari moncong larasnya, kesenjangan di bidang teknologi militer antara bangsa Indonesia dan Eropa tidaklah begitu besar. Akan tetapi, ketika kekuatan penjajah yang berkembang itu mulai menggunakan senapan yang pelurunya diisi dari bagian belakang, mauser, kapal perang bertenaga uap, dan hasil-hasil militer lain dari suatu perekonomian industri, sebagian besar negara-negara praindustri Indonesia hanya dapat melawan dengan tekad dan senjata-senjata api yang kuno. Segelintir penguasa yang masih merdeka berusaha memperbaiki perimbangan itu dengan jalan membeli persenjataan modern, tetapi mereka jarang sekali dapat menyamai kekuatan militer angkatan perang penjajah untuk waktu yang lama.

Perluasan kekuasaan Belanda ke daerah-daerah luar Jawa benar-benar berbeda dengan perluasan kekuasaannya di Jawa, karena di sebagian besar daerah luar itu tidak pernah ada tuntutan yang permanen atau sungguh-sungguh untuk menguasai dari pihak Belanda. Ada beberapa daerah di mana orang-orang Belanda sudah sejak lama menjalin hubungan, tetapi sangat sedikit daerah di mana mereka telah menjadi kekuatan utama sebelumnya. Di daerah-daerah tempat VOC sebelumnya telah mendirikan pos-pos perdagangan, pada tahun 1800 pos-pos tersebut hampir semuanya hanya merupakan bukti tentang kehadiran atau minat Belanda yang tidak berdaya; beberapa di antaranya malah telah hilang sama sekali. Bahkan di tempat yang kehadiran Belanda tergolong berarti, pendudukan pos-pos Belanda oleh Inggris selama perang-perang Revolusi Prancis telah memutuskan hubungan Belanda. Di pulau-pulau luar Jawa, perluasan kekuasaan Belanda pada abad XIX pada dasarnya melambangkan pembentukan suatu kerajaan baru, bukannya puncak dari keterlibatan yang lama dan intensif. Di semua daerah, perluasan kekuasaan Belanda berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa penduduk asli Indonesia. Sayangnya, perkembangan-perkembangan yang dialami rakyat Indonesia di sebagian besar daerah tersebut sampai sekarang belum mendapat perhatian sejarah yang memuaskan.

Madura, yang terletak di lepas pantai timur-laut Jawa, mempunyai tradisi keterlibatan yang lama dengan Belanda. Hal ini terjadi bukannya karena kepentingan langsung Belanda di Madura, tetapi lebih dikarenakan keterlibatan orang-orang Madura di Jawa mulai abad XVII dan seterusnya. Madura Timur diserahkan kepada VOC pada tahun 1705 dan Madura Barat pada tahun 1743. Pulaunya tidak begitu subur, dan pada mulanya hanya mempunyai nilai ekonomi yang kecil bagi Belanda. Hasil utamanya adalah manusia, yang melakukan migrasi secara besar-besaran ke Jawa Timur dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik. Madura juga merupakan sumber serdadu kolonial, dan inilah nilainya yang utama bagi Belanda. Akan tetapi, pada paruh kedua abad XIX (terutama setelah tahun 1870), Madura mempunyai nilai ekonomi yang lebih besar sebagai pemasok utama garam ke daerah-daerah yang dikuasai Belanda di seluruh Nusantara, di mana garam merupakan monopoli yang menguntungkan bagi pemerintah kolonial.

Ada berbagai aturan untuk memerintah Madura, dengan kekuasaan yang terbagi di antara penguasa-penguasa Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Pada tahun 1817, seluruh pulau ini menjadi satu keresidenan; pada tahun 1828, ia dijadikan bagian dari keresidenan Surabaya. Selanjutnya, Jawa dan Madura bersama-sama dianggap sebagai satu kesatuan administrasi oleh Belanda. Sebelum pemulihan kekuasaan Belanda (setelah masa peralihan kekuasaan Inggris) pada tahun 1816, penguasa-penguasa Madura biasanya tetap merdeka dalam masalah-masalah dalam negeri. Sesudah masa itu, Belanda menaruh perhatian secara lebih langsung dalam pemerintahan Madura, dan gelar-gelar maupun hak-hak istimewa para penguasa Madura dikurangi. Daendels dan Raffles telah menghadiahi gelar 'sultan' kepada keturunan Cakraningrat dari Sumenep dan Bangkalan, tetapi pada paruh kedua abad XIX Belanda tidak bersedia memberikan gelar ini ketika penguasa-penguasa baru Madura tampil. Pada tahun 1887, para penguasa Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep diturunkan ke status yang sama dengan para bupati di Jawa: mereka hanya merupakan pimpinan kabupaten yang berdarah bangsawan di bawah kekuasaan langsung Belanda.

Intensifikasi kekuasaan kolonial di Madura pada abad XIX itu telah memfasilitasi terjadinya perubahan-perubahan sosial

yang berarti. Setelah kekuasaan yang sewenang-wenang dari para elite pribumi atas rakyat berakhir, orang-orang Madura menikmati kesempatan bergerak yang lebih bebas. Ini membawa pada dibukanya lahan-lahan baru untuk pertanian dan, bersamaan dengan meningkatnya infrastruktur, pada perdagangan dan kemakmuran yang lebih besar. Buah dari situasi ini sering dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan keagamaan, untuk menyumbang sekolah-sekolah agama dan mesjid-mesjid. Dengan tradisi Islam yang saleh, Madura juga merespon gelombang-gelombang pembaharuan yang terjadi di Timur Tengah dan yang dibawa pulang oleh para haji asal Madura, yang jumlahnya meningkat seiring dengan berlalunya abad XIX. Seperti di Jawa, para pemimpin Islam di sini menjadi alternatif yang berpengaruh dari elite bangsawan, yang makin hari makin dikait-kaitkan dengan pemerintah kolonial yang kafir.

Pengalaman Bali berbeda sekali dengan pengalaman Madura. Belanda telah menghadapi prajurit-prajurit Bali di Jawa pada abad XVIII dan juga menjadi pembeli utama budak-budak Bali, yang banyak di antaranya bertugas dalam pasukan VOC dan angkatan perang kolonial. Akan tetapi, Belanda tidak terlibat secara langsung di pulau yang bergolak ini. Pemerintah Inggris di Jawa telah berperang dengan raja-raja Buleleng dan Karangasem pada tahun 1814 dalam usaha mengakhiri perdagangan budak. Pihak Bali menyerah, tetapi perdagangan budak berjalan terus. Setelah tahun 1816, pemerintah kolonial Belanda melakukan beberapa usaha untuk membujuk raja-raja Bali (yang pada tahun 1839 berjumlah sepuluh orang) agar bersedia menerima kekuasaan Belanda, tetapi tidak berhasil. Walaupun Raja Badung setuju untuk menyediakan prajurit-prajurit untuk angkatan perang kolonial, tetapi Belanda tidak mempunyai pengaruh yang besar di pulau tersebut.

Selama abad XIX, Bali mengalami suatu rangkaian tragedi alam, budaya, ekonomi, dan politik yang memberi sejarahnya suatu arti yang lebih lebar dan sebuah kengerian yang melekat. Dramanya bermula dari ledakan alam yang terbesar yang pernah diketahui, yang akibatnya dirasakan oleh Bali bersama pulau-pulau tetangganya. Dari April sampai Juli 1815, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa meletus, menewaskan lebih banyak orang daripada letusan Krakatau pada tahun 1883 yang lebih terkenal. Sepuluh ribu nyawa langsung melayang, 38.000 orang diperkirakan

mati akibat kelaparan yang menyusul letusan tersebut, dan total korban yang meninggal mungkin mencapai 117.000 orang di Sumbawa, Bali, dan Lombok. Sedikitnya, 25.000 orang mati di Bali. Pulau ini ditutupi oleh abu gunung berapi setebal 20 cm atau lebih, yang menghancur-leburkan lahan persawahannya. Tragedi ini disertai oleh sejumlah penyakit pes, yang merusak pasokan makanan, dan oleh kelaparan serta wabah penyakit. Wabah menghantam Bali lagi pada tahun 1817 dan wabah cacar datang mengamuk pada tahun 1828. Antara tahun 1850 dan 1888 muncul 7 kali wabah cacar, 5 kali wabah kolera, 4 kali pes, beberapa kali disentri, dan akhirnya, pada tahun 1888, sebuah gempa bumi. Korban tewas terburuk terjadi dalam wabah cacar tahun 1871, menghabisi 15.000–18.000 orang.

Ekonomi Bali pada permulaan abad XIX masih sangat tergantung pada ekspor budak. Sekitar 2.000 orang dijual oleh para bangsawan Bali setiap tahun. Sebaliknya, mereka mengimpor terutama koin-koin tembaga, senjata, dan khususnya candu, yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat Bali. Sejak masa pemerintahan sementara Inggris, pemerintah kolonial di Batavia berupaya membatasi dan, akhirnya, menghapuskan perdagangan budak. Ini mengancam pendapatan kaum bangsawan Bali, tepat ketika Gunung Tambora sedang melancarkan aksi penghancurannya atas perekonomian pertanian Bali. Tetapi, perkembangan politik dan ekologi yang lebih positif kemudian menghasilkan suatu transformasi ekonomi. Timbunan abu Gunung Tambora segera menaikkan kesuburan tanah, sementara Singapura, daerah jajahan Inggris, menjadi pasar ekspor Bali yang baru (dan membangkitkan ketertarikan pihak Inggris kepada Bali yang dipandang Belanda dengan penuh curiga). Dalam dua dasawarsa, Bali beralih dari sebuah negara pengekspor budak menjadi pengekspor hasil bumi (khususnya beras, kopi, dan nila) dan daging babi. Bukannya menjual rakyatnya, para raja Bali sekarang justru membutuhkan mereka untuk menggarap lahan-lahan pertanian. Kaum aristokrat Bali tetap menguasai usaha baru ini, seperti halnya perdagangan budak. Ini berbeda sekali dengan Minangkabau di mana, seperti yang akan diperlihatkan di bawah nanti, pengembangan produk-produk baru di akhir abad XVIII dan awal abad XIX telah meruntuhkan dominasi elite lama. Akan tetapi, persaingan di antara *puri* (istana) Bali dipertajam oleh sumber kekayaan baru

ini, seperti yang juga terjadi di antara para 'raja lada' Sumatera Utara, sebagaimana yang akan diperlihatkan di bawah nanti.

Pada sekitar tahun 1840, dua faktor meyakinkan pihak Belanda bahwa Bali harus ditempatkan di bawah pengaruh mereka. Yang pertama adalah perampokan dan perampasan yang dilakukan oleh orang-orang Bali terhadap kapal-kapal yang terdampar, dan yang kedua adalah adanya kemungkinan kekuatan Eropa lainnya akan campur tangan di Bali. Segera menjadi jelas bahwa tidak ada alasan untuk merasa takut akan terjadinya campur tangan bangsa Eropa lainnya, karena rasa kemerdekaan orang-orang Bali begitu kuat sehingga dapat diduga mereka akan melawan setiap kekuatan asing. Akan tetapi, masih tetap ada soal perampokan dan perampasan. Pada tahun 1841, seorang duta Belanda membujuk raja-raja Badung, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang mengakui kedaulatan pemerintah kolonial Belanda. Sebenarnya tujuan utama pemerintah penjajahan bukanlah menguasai Bali, tetapi hanya menciptakan dasar hukum untuk menutup Bali dari kekuatan-kekuatan Barat lainnya. Diberitahukan kepada raja-raja Bali tersebut bahwa persetujuan-persetujuan itu tidak akan membatasi kedaulatan mereka dalam negeri. Mereka menerima persetujuan-persetujuan tersebut dengan harapan bahwa pihak Belanda bersedia membantu mereka dalam menyerang kerajaan Mataram di Lombok. Dukungan militer itu rupanya dijanjikan oleh utusan Belanda, yang bertentangan dengan perintah-perintah pihak Belanda sendiri, dan sampai batas itu perjanjian-perjanjian ini hanyalah muslihat.

Pada tahun 1842–3, raja-raja tersebut dan raja-raja Tabanan dan Lombok (yang diperintah oleh sebuah jalur raja-raja dari Karangasem) menandatangani perjanjian-perjanjian lebih lanjut yang ditujukan untuk mengakhiri masalah perampasan terhadap kapal-kapal yang terdampar. Perjanjian-perjanjian itu ternyata tidak efektif dan perampasan berjalan terus. Raja Buleleng kini menjadi marah ketika pihak Belanda tampaknya memasukkan penafsiran yang lebih luas atas penyerahan kedaulatannya, dan pada tahun 1844 dia menolak meratifikasi persetujuan-persetujuan tersebut. Raja Karangasem juga menolak. Ketegangan meningkat dan raja-raja Bali bersiap-siap menghadapi perang. Pada akhir tahun 1845, Buleleng dan Karangasem bersekutu dalam usaha menaklukkan negara-negara Bali lainnya. Pihak Belanda merasa wajib

untuk bertindak. Pada tahun 1846, mereka berhasil menyerang Buleleng dan Karangasem, tetapi serangan ini hanyalah langkah pertama dalam suatu peperangan yang sengit dan panjang. Raja senior Bali, Dewa Agung dari Klungkung, bersama-sama dengan sebagian besar raja-raja lainnya, secara diam-diam mendukung usaha-usaha yang dilakukan Buleleng dan Karangasem untuk melawan Belanda dan mulai membentuk suatu koalisi militer. Pihak Belanda menyerang lagi pada tahun 1848, tetapi mereka menghadapi perlawanan yang lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Serangan mereka gagal. Pada tahun 1849, mereka melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya. Serangan ini meraih sukses di Bali Utara. Namun, ketika tentara kolonial mengarahkan hasrat mereka ke Bali Selatan, mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang hebat. Pedagang Denmark bernama Mads Lange ikut campur dan memungkinkan tentara pemerintah Belanda menghindari pertempuran yang menentukan di sana.

Dari tahun 1849 sampai kira-kira tahun 1882, pemerintah kolonial mengamati, tetapi tidak melakukan campur tangan yang berarti dalam, kejadian-kejadian di dalam negeri Bali Selatan dan Bali Timur (Klungkung, Badung, Tabanan, Gianyar, Mengwi, Bangli, dan Karangasem). Akan tetapi, setelah terjadinya sebuah pemberontakan dalam negeri di Buleleng pada tahun 1853, pihak Belanda menjalankan kekuasaan yang lebih langsung atas Bali Utara dan Bali Barat (Buleleng dan Jembrana). Pegawai-pegawai Belanda ditempatkan di sana untuk pertama kalinya pada tahun 1855–6, dan sesudah itu kekuasaan Belanda berkembang meskipun timbul perlawanan-perlawanan yang berdiri sendiri-sendiri dari pihak Bali. Pada tahun 1882, Bali dan Lombok disatukan menjadi satu keresidenan Hindia Timur Belanda, dan Bali Utara ditempatkan di bawah kekuasaan langsung Belanda.

Raja-raja Bali Selatan dan Bali Timur terkejut oleh pengumuman tentang keresidenan Bali yang baru ini, yang tampaknya menegaskan suatu tingkat kekuasaan kolonial atas keseluruhan pulau tersebut, yang tak pernah mereka setujui. Tetapi pihak Belanda meyakinkan mereka bahwa tidak ada maksud untuk mengubah status mereka dan menguatkan pernyataan itu dengan mengambil kebijakan untuk tidak mencampuri urusan mereka. Sementara itu, daerah Bali ini berubah menjadi ajang pertempuran yang luas setelah tahun 1883, ketika berbagai pertikaian

dan intrik dalam negeri menyebar. Pada tahun 1885, Raja Gianyar menawarkan wilayahnya kepada pemerintah kolonial sebagai cara untuk melindungi dirinya dari serangan Klungkung, Bangli, dan Mengwi. Tetapi Batavia menolaknya. Bukti nyata bahwa Belanda tidak akan campur tangan ini meruntuhkan upaya Klungkung untuk membangun suatu fron bersatu di antara para raja, dan mendorong pertikaian lebih lanjut. Pada tahun 1891, Raja Mengwi takluk dan dibunuh. Kerajaannya diambil alih oleh Badung. Sekarang, pihak-pihak utama yang bertempur di Bali Selatan adalah Klungkung dan Karangasem. Karena kerajaan yang dipimpin orang Bali di Lombok merupakan atasan dari Karangasem, maka sekarang perang saudara tersebut melibatkan Lombok juga.

Walaupun raja-raja asal Bali memerintah Lombok, penduduknya sebagian adalah orang-orang Bali yang beragama Hindu dan sebagian lagi warga pribumi Sasak yang beragama Islam. Aneka upaya Belanda untuk menanamkan pengaruh di Bali juga diberlakukan di Lombok. Maka, pada tahun 1843, Raja Lombok, yang asal Bali itu, pun menerima kedaulatan Belanda. Ia selanjutnya memperlihatkan keinginan untuk menerima berbagai permintaan pihak Belanda. Sesungguhnya, pada tahun 1849, ia mendukung kampanye pihak penjajah di Bali dengan menyerang Karangasem; sejak itu Karangasem diperintah oleh keturunan dinasti Lombok. Tapi pemerintah kolonial mencari-cari dalih untuk memerintah Lombok secara lebih langsung. Dari tahun 1877 dan seterusnya, hasrat Belanda untuk mengendalikan penyelundupan candu dan perbudakan, dan untuk mempertahankan wibawa Belanda di wilayah tersebut, membuat serangan pemerintahan kolonial di Lombok ini nyaris tak terelakkan.

Ketika, pada tahun 1891, Raja Lombok yang asal Bali mengerahkan warga Sasak-nya untuk berperang di Bali, ia membangkitkan pemberontakan warga Sasak yang dipimpin oleh seorang guru agama dari tarekat Naqsyabandiyyah. Ini memberikan alasan kepada Batavia untuk campur tangan. Pihak Belanda mengadakan suatu pemblokiran, yang terbukti tidak efektif, dan tahun 1894 mereka pun menyerbu. Pasukan ekspedisi pertama mereka dikalahkan oleh serangan balik pasukan Bali, dan kekuatan tambahan harus didatangkan. Pertempuran berlangsung sengit, tapi akhirnya ibu kota Mataram takluk. Pasukan Bali yang terakhir

lalu bertahan dalam benteng di Cakranegara. Di sana, mereka terjun dalam *puputan,* sebuah pertempuran bunuh diri yang terakhir. Ini adalah akhir yang mengerikan bagi perlawanan terhadap penaklukan, sesuatu yang segera menyusul di Bali Selatan juga.

Sebagai akibat dari penaklukan Belanda atas Lombok, Karangasem di Bali Timur menjadi jajahan Belanda, yang disebut 'tanah pemerintah' *(gouvernements-landschap).* Status ini membuat Gusti Gede Jelantik, Raja Karangasem, mendapat perlindungan Belanda dari musuh-musuhnya. Ini tampak begitu menarik bagi Raja Gianyar yang sedang terancam sehingga, pada tahun 1900, ia pun menawarkan diri untuk menjadi jajahan Belanda, dan tawarannya diterima. Merasa bahwa dominasi Belanda tak terelakkan lagi, dua raja ini menggunakan kenyataan politik Indonesia yang baru itu untuk melindungi diri mereka. Dewa Agung dari Klungkung memprotes meluasnya kekuasaan Belanda ini, tapi sia-sia saja.

Memasuki abad XX, Belanda menerapkan kebijakan Etis—akan dibahas pada bab 14. Dalam kasus Bali, yang tetap tak terlalu bernilai ekonomis buat Batavia, pihak Belanda terutama sekali bermaksud memberangus peraturan yang sewenang-wenang, perbudakan, dan penyelundupan candu. Yang terakhir bukan dimaksudkan untuk menghapuskan pemakaian candu tetapi dalam rangka memasukkannya ke dalam pengaturan candu oleh pemerintah sendiri yang sangat menguntungkan. Adat membakar janda hidup-hidup pada saat kremasi suami mereka yang berasal dari keluarga kerajaan, yang jarang dipraktikkan tapi penting secara budaya, juga amat sangat mengganggu pihak Belanda. Sungguh, Gubernur Jenderal W. Rooseboom (1898–1904) begitu marah gara-gara tidak mampu mencegah sebuah pembakaran janda di Tabanan pada tahun 1903 (boleh jadi kasus pembakaran yang terakhir) sehingga ia mengajukan pengunduran diri ke Menteri Urusan Daerah Jajahan, tapi ditolak. Pemerintah menekan raja-raja Bali dalam soal ini dan, pada tahun 1905, semua sepakat untuk menghapus praktik pembakaran janda.

Kemerdekaan Bali berakhir secara mengejutkan. Perampasan terhadap sebuah kapal yang terdampar pada tahun 1904 memberi peluang kepada pihak Belanda untuk melakukan intervensi militer. Mereka melancarkan serangan pada tahun 1906. Kedua keluarga raja Badung menanggapinya dengan cara yang meng-

hantui sejarah Indonesia sejak itu. Pertama-tama di Denpasar dan kemudian di Pamecutan, mereka menyucikan diri secara keagamaan untuk menyongsong kematian, berpakaian serba putih, dan hanya dengan bersenjatakan tombak dan keris mereka menghambur menuju pertempuran mereka yang terakhir *(puputan)*. Ketika senapan-senapan pihak kolonial menewaskan raja-raja tersebut dan keluarga mereka, termasuk kaum wanita dan anak-anak, maka keluarga kerajaan Bali berhenti sebentar hanya untuk membunuh mereka yang luka dan kemudian bergerak maju lagi sampai hampir semuanya mati. Pasukan-pasukan kolonial bergerak terus menuju Tabanan, di mana Raja menyerah tetapi kemudian melakukan bunuh diri bersama putranya. Karangasem, Klungkung, Bangli, dan Gianyar juga dipaksa menerima kekuasaan Belanda yang bersifat lebih langsung. Tindakan terakhir dalam tragedi Bali terjadi pada tahun 1908. Raja senior Bali, Dewa Agung dari Klungkung, menolak pengaturan candu oleh pemerintah pada bulan April 1908 dan melancarkan upaya terakhir dan sia-sia dalam menentang kekuasaan Belanda. Ini menyebabkan pengiriman ekspedisi-penaklukan Belanda yang terakhir ke Bali. Dewa Agung dan para pengikutnya tewas dalam *puputan* yang terakhir. Kemerdekaan Bali pun berakhir. Keluarga-keluarga Raja yang tetap berpengaruh sampai batas tertentu di bawah pemerintahan kolonial adalah mereka yang mengakui bahwa kekuasaan Belanda tak terelakkan dan telah mencari suatu penyesuaian sebelum penaklukan terjadi.

Tambah ke timur, pulau-pulau Nusa Tenggara lainnya (Kepulauan Sunda Kecil), suatu istilah yang mencakup Lombok, baru berhasil diletakkan di bawah kekuasaan Belanda yang efektif pada dasawarsa pertama abad XX. Pulau-pulau yang penting adalah Sumbawa, Flores, Sumba, Savu, Roti, Timor, serta kepulauan Solor dan Alor. Flores merupakan sasaran utama kegiatan Belanda pada abad XIX. Perdagangan budak dan perampasan terhadap kapal-kapal yang terdampar di kawasan ini mengundang datangnya ekspedisi-ekspedisi ke Flores pada tahun 1838 dan 1846. Orang-orang Portugis masih tetap menguasai Timor Timur dan menyatakan klaim atas wilayah-wilayah lainnya, tetapi pada tahun 1859 mereka mengakui klaim Belanda atas Flores. Pada tahun 1890, suatu ekspedisi militer Belanda yang lebih lanjut dikirim ke sana untuk melindungi suatu misi eksplorasi timah.

Suatu pemberontakan yang meletus pada tahun 1907 menyebabkan bergeraknya suatu pasukan ekspedisi kolonial yang menyapu bersih seluruh Flores pada tahun 1907–8 dan berhasil menumpas perlawanan di semua tempat, tetapi tidak menghapuskan perasaan benci penduduk setempat terhadap kekuasaan Belanda. Daerah-daerah Nusa Tenggara lainnya juga dapat ditundukkan di bawah kekuasaan Belanda secara definitif pada tahun 1905–7. Akan tetapi, pihak Portugis tetap menguasai Timor Timur.

Sifat budaya, ekonomi, dan demografi Nusa Tenggara sangat dipengaruhi oleh perluasan kekuasaan Belanda. Selain menyediakan serdadu-serdadu untuk VOC, Savu relatif tetap terpencil sebelum abad XIX, walaupun telah terjadi perpindahan penduduk Savu ke Sumba. Penduduknya menolak Islam maupun Kristen. Mulai sekitar tahun 1860, Savu dipaksa membuka diri bagi dunia luar. Salah satu di antara akibat-akibatnya yang pertama adalah berjangkitnya wabah cacar yang menewaskan antara sepertiga sampai separuh penduduk Savu pada tahun 1869. Misionaris Kristen juga mulai beroperasi di sana. Orang-orang yang masuk Kristen ditolak oleh masyarakat Savu, yang sangat berbeda dengan keadaan di Roti. Orang-orang Savu pemeluk Kristen tersebut kini didorong oleh pihak Belanda untuk menetap di Sumba dalam jumlah yang lebih besar, dalam rangka menghambat penyiaran agama Islam di sana, dan di Timor (tetapi dalam jumlah yang lebih kecil). Pada waktu yang bersamaan, orang-orang Roti yang beragama Kristen didorong untuk menetap di Timor. Dengan demikian, ekonomi penyadapan-lontar orang-orang Roti dan Savu dipindahkan ke Sumba dan Timor. Di kedua pulau tersebut, kaum pendatang tadi membentuk suatu elite yang terpercaya dan terpelajar, yang dilindungi oleh pihak Belanda dari serangan-serangan penduduk setempat. Pada abad XX, orang-orang Roti dan Savu yang beragama Kristen itu mendominasi dinas pemerintahan maupun gerakan-gerakan anti-penjajahan di Timor. Perubahan-perubahan yang penting juga terjadi dengan diperkenalkannya peternakan kuda untuk ekspor di Sumba mulai tahun 1840-an dan peternakan sapi Bali di Timor mulai sekitar tahun 1910; perkembangan-perkembangan ini dianalisis secara rinci oleh Fox *(Harvest of the Palm)*.

Sulawesi Selatan merupakan suatu tantangan yang besar bagi pihak Belanda. Sebagai sekutu utama VOC, Bone telah menjadi

negara yang terkuat di wilayah itu. Pada tahun 1814 dan 1816, Bone dan negara-negara Sulawesi Selatan lainnya menyerang orang-orang Inggris, tetapi menderita kekalahan. Ketika orang-orang Belanda kembali pada tahun 1816, tidak ada permusuhan lagi, tetapi timbul ketegangan-ketegangan antara pihak Belanda dan Bone. Banyak penguasa Sulawesi Selatan berpendapat bahwa hubungan mereka sebelumnya dengan pihak Belanda telah putus karena menyerahnya Belanda kepada Inggris pada tahun 1811, dan bahwa Perjanjian Bungaya (1667) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Pada tahun 1824, Gubernur Jenderal van der Capellen mengunjungi wilayah itu dan membujuk negara-negara Sulawesi Selatan lainnya untuk memperbarui Perjanjian Bungaya, tetapi Bone menolaknya. Setelah van der Capellen pergi meninggalkan daerah itu, Ratu Bone memimpin negara-negara Bugis melancarkan perang. Mereka merebut wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda dan membantai dua garnisun Belanda.

Pada tahun 1825, pasukan Belanda dan pasukan Makasar dari Gowa berhasil mengalahkan Bone. Tetapi ketika Perang Jawa (1825–30) meletus, seluruh pasukan, kecuali sejumlah kecil yang mutlak diperlukan, ditarik ke Jawa sehingga Bone dapat melanjutkan lagi sikap permusuhannya. Baru pada tahun 1838 Bone memperbaharui Perjanjian Bungaya. Akan tetapi, hal ini tidak menegakkan supremasi Belanda. Pemberontakan-pemberontakan terus berlanjut sebagai akibat terjadinya konflik di dalam negeri sendiri maupun karena perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Pasukan-pasukan kolonial kembali melancarkan serangan besar-besaran pada tahun 1858–60, tetapi penaklukan yang terakhir dan menentukan baru terjadi pada tahun 1905–6, ketika perlawanan negara-negara Bugis dan Makasar dapat dipatahkan. Pada tahun 1905, Belanda juga memperluas kekuasaan mereka atas rakyat Toraja di Sulawesi Tengah yang menganut animisme dan pengayau yang melakukan perlawanan sengit.

Pihak Belanda juga menghadapi berbagai masalah justru setelah masa pemerintahan peralihan Inggris di Ambon, daerah pertama di Indonesia yang mereka kuasai secara langsung. Rakyat Ambon merasa senang dengan dua masa pemerintahan Inggris (1796–1803, 1810–17), dan telah kehilangan kekaguman mereka terhadap kekuatan pihak Belanda. Ketika Belanda kembali berkuasa pada tahun 1817, mereka tampaknya tidak mau menyo-

kong gereja Protestan sampai tingkat yang dianggap layak oleh rakyat Ambon. Inilah penyebab utama segera meletusnya tindak kekerasan. Seorang prajurit Ambon yang beragama Kristen bernama Thomas Matulesia (? 1783–1817), yang juga terkenal sebagai Pattimura, memimpin sebuah pemberontakan di Saparua. Ia berhasil merebut benteng Belanda di sana dan berhasil memukul mundur pasukan kolonial yang dikirim untuk melawannya. Setelah Residen Belanda di Saparua berikut keluarganya (kecuali seorang anak kecil) dibunuh, pihak Belanda mengirim bala bantuan dari Batavia. Kaum pemberontak kemudian dapat dikalahkan dan Matulesia menyerah. Pada bulan Desember 1817, dia dihukum gantung di Ambon bersama tiga orang lainnya. Sedikit demi sedikit Ambon kembali pada peranannya sebagai wilayah yang paling setia kepada Belanda di antara semua wilayah di Indonesia. Pada tahun-tahun terakhir abad XIX, berakhirnya monopoli pemerintah atas cengkeh menciptakan sebuah krisis ekonomi di Ambon. Bagi orang-orang Ambon yang lebih terpelajar—yang jauh lebih banyak Kristen daripada Islam—kesempatan utama untuk meraih keuntungan ekonomi adalah dengan bekerja pada pemerintah kolonial yang sedang meluaskan kekuasaannya, apakah itu sebagai birokrat ataukah sebagai tentara. Peran khusus yang kemudian mereka mainkan di seluruh kepulauan Indonesia itu menjadikan orang-orang Kristen Ambon sebagai sasaran kecurigaan kaum nasionalis di abad XX.

Wilayah Indonesia dewasa ini yang letaknya paling timur, Papua, merupakan daerah terakhir yang masuk ke dalam yurisdiksi Belanda. Pada tahun 1828, benteng Du Bus didirikan di Lobo sekarang, semata-mata untuk mencegah bercokolnya kekuatan lain di sana. Dengan cepat orang Belanda menarik kesimpulan, sejauh yang dapat dilihat pada waktu itu, bahwa tidak ada sesuatu apa pun yang menarik perhatian orang di pulau yang luas dan terpencil ini, yang didiami oleh gerombolan-gerombolan manusia yang masih hidup pada "zaman batu". Benteng Du Bus terletak di suatu daerah malaria dan meminta banyak korban jiwa dan uang; benteng ini ditinggalkan pada tahun 1836. Papua sebenarnya baru berada di bawah pendudukan Belanda secara permanen setelah tahun 1898, terutama pada kurun waktu 1919–28.

Kepulauan Aru dan Tanimbar yang terletak di sebelah barat Irian tidak begitu menarik bagi Belanda. Hanya Aru yang memi-

liki nilai ekonomi lebih besar sebagai sumber mutiara dan kerang mutiara serta burung cenderawasih. VOC telah memonopoli perdagangan antara Banda dan Aru mulai tahun 1620-an, tetapi dengan penarikan mundur VOC secara umum pada akhir abad XVIII, perdagangan ini telah diambil alih oleh orang-orang Bugis dan Makasar. Baru setelah tahun 1882 Aru dan Tanimbar berada di bawah pemerintahan Belanda secara tetap.

Di Kalimantan terjadi persaingan yang lebih langsung antara kepentingan-kepentingan penjajah yang sedang memperluas kekuasaannya. Pada awal abad XIX, baik Inggris maupun Belanda mempunyai kepentingan di sana yang ditetapkan secara jelas. Bagi Inggris, pokok persoalannya bersifat strategis: Kalimantan sendiri tidak begitu berarti, tetapi karena ia diapit jalur pelayaran antara India dan Cina, Inggris tidak dapat mengabaikan kemungkinan bercokolnya kekuatan Eropa lainnya, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Kepentingan Belanda pada dasarnya lebih bersifat penjajahan: Kalimantan terletak di sebelah utara Laut Jawa dan merupakan pusat para bajak laut dan orang-orang Cina yang anti Belanda. Walaupun wilayah pedalamannya tidak dikenal dan tampaknya kecil nilainya, tetapi Belanda berminat menguasai pesisir selatan dan baratnya.

Pada akhir tahun 1820-an dan 1830-an, pihak Belanda telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan Pontianak, Mempawah, Sambas, dan negeri-negeri kecil lainnya di pesisir barat. Akan tetapi, kegiatan yang dilakukan Belanda di sana sangat sedikit. Pada tahun 1834, misalnya, seluruh garnisun Belanda di Mempawah terdiri atas seorang perwira yang berkebangsaan Indonesia dan empat orang polisi. Di beberapa daerah, setelah ditandatanganinya perjanjian-perjanjian tahun 1830-an, Belanda tidak mempunyai hubungan lebih lanjut sampai tahun 1840-an. Di Banjarmasin, Kalimantan Tenggara, terdapat pos VOC, tetapi Deandels telah manariknya kembali pada tahun 1809. Pada tahun 1817, Belanda kembali lagi ke sana dan Sultan Banjarmasin menyerahkan beberapa daerah kepada pemerintah Belanda, termasuk Kotawaringin (tetapi Belanda tidak bersusah-susah untuk membuka kantor di sana). Pada tahun 1826, daerah-daerah pesisir Banjarmasin lainnya juga diserahkan kepada pemerintah kolonial, tetapi Sultan tetap berdaulat di negerinya sendiri. Sampai tahun 1840, perhatian Belanda terbatas pada kawasan pesisir Kalimantan, dan kenyataan yang berkaitan dengan kekuasaan

Belanda di sana pun hanya kecil.

Kepentingan kerajaan Belanda di Kalimantan tiba-tiba dibangkitkan karena adanya intervensi seorang Inggris yang bernama James Brooke (1803–68) di Sarawak. Brooke menggunakan harta warisannya yang tidak begitu besar untuk membeli sebuah kapal yang dipersenjatai. Pada tahun 1839, dia berlayar ke Singapura dan kemudian ke Sarawak dalam rangka bertualang. Dia turut campur dalam suatu perang saudara di sana dengan mendukung seorang pangeran Brunei, dan pada tahun 1841 (setelah mengalami kesulitan dengan pangeran tersebut) dia diberi penghargaan dengan diangkat sebagai gubernur daerah Kucing, yang menjadi divisi pertama kerajaan pribadi Brooke yang luar biasa. Kekuasaan teritorial James Brooke dan dua orang penggantinya, yaitu tiga 'raja putih' dari Sarawak, yang semakin luas menimbulkan rasa malu di London dan kecemasan di kalangan orang-orang Belanda. Kemungkinan intervensi bangsa-bangsa Eropa lainnya yang selama ini menghantui pikiran Belanda tiba-tiba telah menjadi kenyataan sekarang. Sikap Belanda yang lesu terhadap Kalimantan pun berubah menjadi suatu kebijakan perluasan wilayah kerajaan yang lebih aktif. Pada tahun 1840-an dan 1850-an, Belanda melakukan campur tangan di beberapa wilayah, memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri, dan mengatur hubungan dengan perjanjian-perjanjian baru. Mulai tahun 1846 dan seterusnya, tambang-tambang batu bara mulai dibuka di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur; inilah yang menyebabkan pulau tersebut mulai mempunyai nilai ekonomi yang lebih besar bagi rezim kolonial Belanda.

Di Kalimantan Barat dan Tenggara, sikap baru pihak Belanda itu menimbulkan perlawanan hebat. *Kongsi-kongsi* (asosiasi-asosiasi) Cina yang menguasai tambang-tambang emas di daerah Pontianak-Sambas saling bertikai satu sama lain mengenai penguasaan atas sumber-sumber emas yang semakin menurun. Walaupun pihak Belanda turun tangan, persaingan ini terus berlanjut, bahkan sesekali meletus pertempuran-pertempuran kecil dari tahun 1850 sampai 1854. Akhirnya, pasukan kolonial Belanda keluar sebagai pemenang, tetapi sesudah itu pun kerusuhan-kerusuhan tetap berlangsung di daerah itu.

Banjarmasin menjadi kancah dari suatu bentuk perlawanan bangsa Indonesia yang lebih lazim. Ketika Sultan Adam (m. 1825–

57) meninggal pada tahun 1857, Belanda mengangkat cucunya Pangeran Tamjidillah menjadi sultan (m. 1857–9). Putera Sultan Adam sendiri, yaitu Putera Mahkota Abdul Rakhman, ayah dari Tamjidillah, telah wafat tahun 1852 dan sejak itu tidak jelas siapa yang akan menjadi Sultan Banjarmasin berikutnya jika Sultan Adam meninggal dunia. Tamjidillah adalah putera pertama Abdul Rakhman. Tetapi ia tidak disukai oleh rakyat Banjarmasin, pertama karena ibunya seorang keturunan Cina, bukannya seorang bangsawan Banjar, dan kedua karena ia gemar minuman keras, yang melukai rasa keislaman penduduk. Pangeran Hidayatullah, putera Abdul Rakhman yang lebih muda dari isteri seorang bangsawan, adalah calon yang lebih populer bagi rakyat. Tetapi Tamjidillah lebih disukai Belanda karena ia menjanjikan konsesi yang lebih besar. Keteguhan Belanda untuk tetap mengangkat Tamjidillah menjadi sultan di tengah-tengah ketidaksukaan rakyat segera membangkitkan ketegangan-ketegangan yang, tak lama kemudian, menyebabkan meletusnya Perang Banjarmasin (1859–63).

Pada bulan April 1859, pecah sebuah pemberontakan besar di Banjarmasin, dipimpin oleh Pangeran Antasari, seorang pangeran dari suatu cabang keluarga kerajaan yang haknya telah disingkirkan pada abad XVIII, dan dua orang pemimpin kaum tani. Mereka menyerang perusahaan pertambangan batu bara Belanda dan pos-pos misionaris serta membunuh orang Eropa yang mereka jumpai di sana. Pihak Belanda mendatangkan pasukan-pasukan bala bantuan dan berhasil mengambil inisiatif militer pada akhir tahun 1859, tetapi dengan terjunnya para pemimpin Islam pedesaan memimpin suatu perlawanan yang berani dan gigih, perang tersebut menelan biaya dan meminta korban jiwa yang sangat besar di pihak Belanda. Belanda memaksakan Tamjidillah untuk turun dari tahta pada bulan Juni 1859 dan mengasingkannya ke Bogor, Jawa Barat. Pada tahun 1860, pihak Belanda menyatakan bahwa kesultanan Banjarmasin 'dihapuskan' dan mengumumkan kekuasaan kolonial yang bersifat langsung. Hidayatullah bergabung dengan pihak penentang, tapi menyerah pada awal tahun 1862 dan kemudian diasingkan ke Cianjur di Jawa Barat. Setelah pengasingan Hidayatullah, Antasari menjadi pusat-kesetiaan kerajaan bagi orang-orang yang ingin melawan penaklukan Belanda, hingga kematiannya sendiri akibat cacar pada

bulan Oktober 1862. Pertempuran-pertempuran besar berlangsung hingga tahun 1863, tetapi perlawanan yang bersifat sporadis tetap berlanjut sesudah itu. Keturunan Antasari bersekutu dengan keturunan pemimpin utama muslim Dayak, Surapati (w. 1875), dan bersama-sama melakukan perlawanan selama bertahun-tahun dalam upaya menjaga kesultanan dari penaklukan penjajah. Akhirnya, pada tahun 1905, Sultan Mahmud Seman dari keluarga Antasari terbunuh, yang mengakhiri garis kepemimpinan raja. Perlawanan terakhir terhadap kekuasaan Belanda selesai pada tahun 1906.

Beberapa peperangan yang paling berlarut-larut yang berhubungan dengan tahap baru ekspansionisme Belanda terjadi di Sumatera. Pulau yang luas ini sudah sejak lama diincar oleh Belanda. Sumatera menempati posisi strategis yang sangat penting, merupakan wilayah yang dipersengketakan dengan Inggris, dan menghasilkan lada dan jenis-jenis komoditi lain yang berharga. VOC telah aktif di beberapa daerah di Sumatera. Akan tetapi, ada benarnya bahwa, seperti di tempat-tempat lainnya, merosotnya VOC pada abad XVIII dan tampilnya pemerintahan sementara Inggris sesudah itu mengandung arti bahwa Belanda harus menegakkan kembali dan memperluas pengaruhnya di Sumatera setelah tahun 1816 dari nol lagi.

Di Sumatera Selatan, kesultanan Palembang sudah sejak lama mempunyai hubungan dengan Belanda. Kerajaan ini penting karena posisinya yang strategis, ladanya, dan kedaulatannya atas pulau-pulau Bangka dan Belitung. Timah telah ditemukan di Bangka pada awal abad XVIII. Walaupun pentingnya timah turun pada akhir abad itu, tambang-tambang timah memperoleh arti penting yang baru dan mencapai produktivitas yang lebih tinggi pada awal abad XIX. Belitung jaga memiliki kandungan timah, dan diduduki oleh Belanda pada tahun 1817 tanpa menghiraukan protes Inggris. Pelaku utama dalam drama Palembang ini, Sultan Mahmud Badaruddin (m. 1804–12, 1813, 1818–21), bukanlah sahabat Belanda. Di tengah kekacauan-kekacauan yang berhubungan dengan penaklukan Inggris atas Jawa pada tahun 1811, dia menyerang dan membantai ke-87 orang (24 di antaranya adalah orang Belanda) di garnisun Belanda yang ada di Palembang. Dia juga tidak kooperatif terhadap pihak Inggris. Akibatnya, pada tahun 1812 Inggris menyerang Palembang, merampok istana, dan melantik adik Badaruddin sebagai Sultan Ahmad

Najamuddin (m. 1812–3, 1813–8). Badaruddin berhasil meloloskan diri tetapi, pada tahun 1813, dia menyerah dan menduduki singgasana lagi hanya selama sebulan, sampai Raffles menolak penetapan ini (yang telah dibuat oleh Residen Palembang) dan mendudukkan kembali Najamuddin di singgasana. Ketegangan-ketegangan antara kedua bersaudara ini terus berlanjut sampai setelah pihak Belanda kembali lagi pada tahun 1816. Setelah itu, pihak Belanda tidak mampu menjalankan kekuasaan yang nyata, dan pihak Inggris semakin merumitkan keadaan dengan melakukan campur tangan dalam kejadian-kejadian di Palembang dari pos mereka di Bengkulu.

Pada tahun 1818, suatu ekspedisi Belanda dikirim ke Palembang dan Najamuddin diasingkan ke Batavia. Karena tindakan ini tidak dapat mengakhiri kemerdekaan Palembang, maka dikirim lagi suatu ekspedisi pada tahun 1819, tetapi ekspedisi ini dikalahkan oleh Badaruddin. Pada tahun 1821, pihak Belanda menghimpun suatu pasukan besar yang berisi lebih dari 4.000 serdadu. Namun, serangan pertamanya dapat dipukul mundur. Serangannya yang kedua berhasil, dan Badaruddin diasingkan ke Ternate. Palembang kini mendekati akhir kemerdekaannya. Putra sulung Najamuddin diangkat menjadi sultan, juga dengan nama Ahmad Najamuddin (m. 1821–3). Pada tahun 1823, Belanda menempatkan Palembang di bawah kekuasaan langsung mereka, dan Sultan dipensiunkan. Dia dan pengikut-pengikutnya di istana merasa tidak puas. Pertama-tama mereka mencoba meracun garnisun Belanda pada tahun 1824. Serangan mereka berikutnya terhadap garnisun tersebut dapat dipukul mundur dengan mudah. Sultan melarikan diri, namun menyerah pada tahun 1825 dan diasingkan ke Banda; kemudian dia dipindahkan ke Manado pada tahun 1841. Pemberontakan yang terakhir meletus pada tahun 1849, yang dapat ditumpas Belanda.

Jambi telah menjalin hubungan dengan VOC sejak abad XVII, tetapi pos VOC di sana telah ditinggalkan pada tahun 1768. Belanda mulai melibatkan diri lagi pada tahun 1833 ketika Sultan Muhammad Fakhruddin (m. 1821/9–41) meminta dan mendapat bantuan Belanda dalam melawan para bajak laut, tetapi sesudah itu Sultan menyerang wilayah-wilayah Palembang. Sultan dipukul mundur oleh pasukan Palembang, dan pihak Belanda memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksa Sultan menan-

datangani suatu perjanjian yang mengakui kedaulatan Belanda (1834). Suatu garnisun kolonial didirikan di muara sungai di Muarakumpe. Pada tahun 1855, Sultan Abdul Rahman Nasiruddin (m. 1841–55) digantikan oleh Ratu Taha Saifuddin (m. 1855–1904). Penolakannya untuk menandatangani perjanjian segera mengundang serangan Belanda pada tahun 1858. Taha melarikan diri ke wilayah pedalaman dengan membawa tanda kebesaran kerajaan yang paling penting. Para penggantinya, yang mendapat dukungan Belanda, mengakui kedaulatan Belanda, tetapi Taha dan para pendukungnya menguasai sebagian besar wilayah pedalaman dan membangkitkan perlawanan selama beberapa dasawarsa. Dia akhirnya terbunuh oleh suatu patroli pemerintah di wilayah pedalaman pada tahun 1904. Pada tahun 1899, sultan terakhir yang diakui oleh Belanda, Ahmad Zainuddin (m. 1886–99), mengundurkan diri. Oleh karena pihak Belanda dan kalangan elite Jambi tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai penggantinya, maka Residen Belanda di Palembang diserahi kekuasaan atas Jambi pada tahun 1901. Meletuslah perlawanan baru, yang tidak dapat ditumpas oleh ekspedisi-ekspedisi militer yang dikirim ke daerah-daerah pedalaman Jambi sampai tahun 1907.

Di daerah-daerah pesisir barat Sumatera, yaitu daerah Minangkabau, ekspansionisme Belanda berbenturan keras dengan gerakan pembaruan Islam pertama yang besar di Indonesia. Minangkabau telah menjadi pusat perubahan sosial, agama, dan politik sejak akhir abad XVIII dan, oleh karenanya, mempunyai arti yang penting, yang lebih besar daripada kebanyakan daerah luar Jawa lainnya, bagi wilayah-wilayah Indonesia lainnya.

Suatu sistem pemerintahan kerajaan telah diterapkan di Minangkabau oleh Adityavarman (m. ± 1356–75), yang berada di bawah perlindungan Majapahit. Minangkabau mulai diislamkan pada abad XVI, dan sesudah itu muncul sistem tiga raja: Raja Alam (raja dunia), Raja Adat (raja hukum adat), dan Raja Ibadat (raja agama Islam). Wewenang kerajaan terutama terletak pada penguasaan atas emas. Desa-desa yang menopang kepentingan-kepentingan kerajaan terletak di daerah-daerah penghasil emas yang utama (di wilayah Tanah Datar) serta di jalur-jalur ekspor yang penting, dan menganut sistem hukum adat yang dinamakan *Kota Piliang*. Pada tahun 1780-an, sumber emas semakin menyusut dan tatanan lama masyarakat Minangkabau terancam oleh

munculnya sumber-sumber kemakmuran yang baru, terutama kopi, garam, gambir, dan tekstil. Komoditi-komoditi ini berpusat di wilayah-wilayah pegunungan Agam dan Limapuluh Kota, di desa-desa yang menganut sistem hukum adat yang berbeda yang disebut *Bodi Caniago* dan yang terutama mengadakan hubungan dagang dengan orang-orang Amerika dan Inggris (didirikannya Penang pada tahun 1786 sangat mendorong revolusi perdagangan ini).

Dari kegiatan perdagangan yang baru ini, muncullah suatu gerakan pembaruan Islam yang bermula di Agam pada tahun 1780-an. Setelah sekitar tahun 1803–4, gerakan pembaruan Islam tersebut menjadi terkenal sebagai gerakan Padri karena pimpinannya adalah *orang Pidari,* 'orang dari Pedir' yang telah pergi naik haji ke Mekah melalui pelabuhan Aceh yang bernama Pedir. Dorongan bagi timbulnya gerakan pembaruan itu berasal dari Agam dan Limapuluh Kota, dari wilayah-wilayah pegunungan, dari desa-desa *Bodi Caniago,* dan dari para pedagang yang mencari perlindungan pada hukum Islam yang murni dari kekerasan dan ketidakamanan yang sedang meluas yang mengancam kontrak-kontrak mereka, barang-barang mereka, dan diri mereka sendiri. Para guru sufi, terutama dari tarekat Syattariyyah, memainkan peranan yang penting, walaupun pada tahap-tahap akhir dari gerakan itu terdapat tanda-tanda perasaan antisufi.

Suatu kelompok yang terdiri atas tiga orang haji, yang kembali ke Minangkabau pada tahun 1803 atau 1804, terilhami oleh penaklukan Mekah (pada awal tahun 1803) oleh kaum pembaharu-pemurnian Wahhabi dan, seperti Wahhabi, ingin menggunakan kekerasan untuk memperbarui masyarakat Minangkabau. Gerakan Padri menentang perjudian, sabung ayam, aspek-aspek hukum adat setempat yang didasarkan pada garis ibu (khususnya mengenai warisan), penggunaan candu, minuman keras, tembakau, dan buah pinang, dan juga ketaatan yang umumnya lemah terhadap kewajiban-kewajiban keagamaan Islam yang formal. Akan tetapi, mereka tidak mengikuti semua pemurnian gerakan Wahhabi di tanah Arab, karena mereka tidak menentang pemujaan terhadap orang-orang suci atau tempat-tempat keramat.

Pimpinan-pimpinan utama kaum padri diberi gelar kehormatan Minangkabau untuk para guru agama, *tuanku;* yang paling terkemuka di antaranya ialah Tuanku Imam Bonjol (1772–1864).

Para pengamat Belanda cenderung memahami konflik tersebut dalam pengertian Islam lawan adat, atau *tuanku* (para pemimpin agama) lawan *penghulu* (para kepala suku, pemimpin-pemimpin adat atau 'sekuler'). Anggapan ini kelak menjadi suatu prinsip pemerintahan Belanda di sini seperti halnya di wilayah-wilayah Indonesia lainnya, seperti yang akan dilihat di bawah ini. Akan tetapi, anggapan tersebut kurang menggambarkan masalah-masalah sosial dan agama yang rumit yang menyelimuti gerakan Padri, seperti yang telah terlihat di atas. Sesungguhnya, para *tuanku* saling bertikai mengenai tujuan-tujuan maupun metode-metode gerakan pembaruan tersebut, sedangkan di antara para *penghulu* ada yang mendukung gerakan pembaruan itu.

Selama perang saudara yang meletus karena adanya usaha-usaha mengadakan pembaruan tersebut, kaum Padri menghadapi perlawanan paling sengit di Tanah Datar dan di dataran-dataran rendah, yaitu di wilayah-wilayah yang tidak begitu terlibat dalam revolusi perdagangan. Tetapi kaum pembaharu ini berhasil memperoleh kemenangan demi kemenangan. Pada tahun 1815, sebagian besar keluarga kerajaan Minangkabau terbunuh di Tanah Datar, dan kemenangan kaum Padri nyaris sempurna. Kini kaum Padri menyebar ke Tapanuli Selatan dan memulai pengislaman terhadap orang-orang Batak penyembah berhala di sana. Akan tetapi, kemenangan militer kaum Padri itu segera terancam oleh kembalinya Belanda (setelah pemerintahan sementara Inggris) ke Padang pada tahun 1819. Para *penghulu* yang anti Padri dan anggota-anggota keluarga kerajaan yang masih hidup meminta bantuan pihak Belanda. Pada bulan Februari 1821, mereka menandatangani suatu perjanjian penyerahan Minangkabau, yang atasnya mereka tidak lagi mempunyai kekuasaan riil, kepada kekuasaan Belanda. Serangan pertama Belanda terhadap kaum Padri dilancarkan segera sesudah itu, dan meletuslah Perang Padri (1821–38).

Tentara kolonial menyadari bahwa mereka menghadapi lawan berat. Kemenangan-kemenangan mereka bercampur dengan kegagalan-kegagalan, termasuk kekalahan besar di Lintau pada tahun 1823. Selama berlangsungnya Perang Jawa (1825–30), Belanda tidak mampu bertindak secara menentukan, tetapi kemudian ada bala bantuan. Pada saat itu, Imam Bonjol mendapat bantuan rakyat Aceh; namun demikian, pada tahun 1832, kaum

Padri tampaknya dikalahkan. Akan tetapi, perang mulai berkobar lagi pada tahun 1833 dan pihak penjajah perlu melancarkan serangan-serangan baru. Garis bantuan ekonomi gerakan perlawanan Minangkabau dapat dipatahkan, yaitu ketika Belanda menutup pesisir barat dan kemudian pesisir timur yang merupakan pintu gerbang perdagangan Minangkabau. Pada tahun 1837, kota Bonjol yang berbenteng akhirnya dapat direbut. Tuanku Imam Bonjol meloloskan diri, namun kemudian menyerah. Dia mula-mula diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan akhirnya ke Menado, tempat dia wafat pada tahun 1864. Perang Padri berakhir dengan kemenangan pihak penjajah yang terakhir di Daludalu pada akhir tahun 1838.

Belanda kini berkuasa di seluruh Minangkabau. Pemerintah kolonial mengandalkan para 'kepala adat' *(penghulu)* untuk menghalang-halangi apa yang dianggapnya sebagai fanatisme Islam. Dengan demikian, Belanda memperbesar perbedaan antara adat dan Islam di dalam masyarakat Minangkabau dan memberi andil bagi merosotnya prestise kaum *penghulu.* Pemerintah kolonial tidak mengizinkan keluarga kerajaan Minangkabau mendapatkan kembali kekuasaan yang otonom, tetapi memperlakukan mereka hanya sebagai bupati, berdasarkan model Jawa.

Walaupun menderita kekalahan di bidang militer, kaum Padri telah meninggalkan bekas yang mendalam dan abadi kepada masyarakat Minangkabau. Tetap ada perhatian yang kuat terhadap Islam ortodoks. Di dalam perimbangan yang berubah-ubah antara adat dan Islam, maka peranan Islam sebagai bagian dari keseluruhan perangkat peraturan yang mengatur masyarakat Minangkabau menjadi bertambah besar. Di bawah kekuasaan Belanda, memang muncul lagi suatu gelombang pembaruan pada pertengahan abad XIX, yaitu ketika tarekat Qadiriyyah dan khususnya Naqsyabandiyyah dari aliran sufi, yang mempunyai perhatian lebih besar pada upacara-agama yang ortodoks, memaksa tarekat Syattariyyah kehilangan posisi utamanya di kawasan tersebut.

Naqsyabandiyyah rupanya diperkenalkan pertama kali ke Minangkabau pada awal tahun 1850-an oleh seorang haji yang pulang dari Mekah. Tarekat ini tersebar cepat, melawan praktik-praktik yag lebih sinkretis dari tarekat-tarekat yang sudah ada sebelumnya di Minangkabau. Dalam sebagian hal, ini adalah gelombang pertama dari suatu reformisme yang akan memuncak



pada gerakan kaum modernis di Minangkabau (lihat bab 15), sekalipun gerakan tersebut bersikap antisufi. Sesungguhnya, beberapa pemimpin awal yang menonjol dari modernisme Minangkabau adalah putra-putra para syekh Naqsyabandiyyah.

Kemajuan pihak Belanda di Sumatera kini tampak terus melaju sampai di perbatasan Aceh. Suatu perjanjian ditandatangani dengan Inderagiri pada tahun 1838, Singkil dan Barus diduduki pada tahun 1839–40, dan suatu perjanjian perlindungan dengan Siak hampir mendekati penyelesaian pada tahun 1840. Sebagai akibat Perang Padri, pengaruh Belanda juga menembus wilayah-wilayah Batak yang terletak di sebelah utara Minangkabau. Rakyat Batak adalah suatu masyarakat penyembah berhala yang ganas, yang kehidupan agamanya merupakan campuran antara pengaruh animisme, magi, dan Hindu kuno (atau Hindu-Jawa). Kaum Padri telah membantu penyebaran agama Islam di kalangan rakyat Batak, dan dari tahun 1850-an pihak Belanda membantu kristenisasi dan mulai menindas kanibalisme. Rakyat Batak tidak memiliki organisasi politik yang lebih tinggi selain suatu kesetiaan tertentu terhadap seorang raja yang diperdewakan yang bernama Si Singamangaraja di Bangkara. Oleh karenanya, perlawanan terhadap Belanda tidak terpadu. Tetapi, tentara kolonial harus menghadapi beberapa peperangan yang dahsyat. Pada tahun 1872 berkobar apa yang terkenal sebagai Perang Batak yang berakhir dengan kemenangan pihak Belanda dan sekutu-sekutu lokal mereka, tetapi perlawanan Batak baru dapat ditumpas pada tahun 1895.

Akan tetapi, kemajuan pihak Belanda yang tampak tidak terbendung lagi itu untuk sementara waktu dihentikan oleh faktor yang sama dengan yang sebagian telah mendorongnya: ancaman pengaruh Inggris di wilayah itu. Sepanjang abad XIX, Inggris melebihi Belanda dalam hal kekuatan laut dan perdagangannya di kawasan Malaya-Indonesia. Inggris sangat menaruh perhatian terhadap segala sesuatu yang terjadi di Selat Malaka, jalur perdagangan Cina-India. Dengan pendirian Penang (1786) dan Singapura (1819), hubungan perdagangan Inggris dengan Sumatera semakin luas. Untuk menghindari terjadinya konflik Inggris–Belanda di Selat Malaka, maka pada bulan Maret 1824, Perjanjian London menetapkan ruang lingkup kepentingan Inggris dan Belanda. Pada pokoknya, ruang lingkup Inggris mencakup Semenanjung Malaya dan ruang lingkup Belanda mencakup Sumatera.

Malaka yang diduduki Belanda dan pos-pos Belanda di India diserahkan kepada Inggris dan kedaulatan Inggris atas Singapura diakui; Bengkulu di Sumatera diserahkan kepada Belanda. Ada dua aspek perjanjian ini yang sangat penting bagi peristiwa-peristiwa mandatang. Pertama, perdagangan Inggris dengan Sumatera tidak boleh dibatasi, bagaimanapun keadaan dominasi politik Belanda di sana. Dan yang kedua, kemerdekaan Aceh dijamin, tetapi Belanda diharapkan menanamkan pengaruh sekadarnya yang tidak jelas atas Aceh.

Ketika Belanda tampak akan menaklukkan seluruh Sumatera sampai perbatasan Aceh, para pedagang Singapura dan Penang berkeberatan dengan mengatakan bahwa cukai Belanda membatasi perdagangan mereka, yang bertentangan dengan Perjanjian London. Belanda terpaksa mengalah karena takut melukai perasaan Inggris. Pada tahun 1842–4, Belanda meninggalkan pos-pos mereka di pantai timur di sebelah utara Palembang dan membatalkan perundingan-perundingan perjanjian dengan Siak. Garnisun mereka di dekat Jambi tetap dipertahankan berdasarkan alasan bahwa kekuatan tersebut sangat penting artinya bagi pertahanan Palembang, tetapi cukai yang bersifat diskriminatif di sana dihapuskan. Selama beberapa tahun, ekspansionisme Belanda terbatas ke Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi, wilayah-wilayah yang sudah lebih dulu dibahas di dalam bab ini. Di bagian barat Nusantara, mereka memperluas pengaruh mereka hanya ke Pulau Nias, yang penduduknya menyembah berhala, yang bukan daerah yang penting bagi perdagangan Inggris. Suatu perjanjian telah ditandatangani di sana pada tahun 1825 untuk mengakhiri perdagangan budak; meskipun demikian, perdagangan budak tetap berlangsung, sebagian besar dijual di Padang dan Singapura (walaupun di sana Raffles telah secara resmi menghapus perbudakan). Sebuah kantor Belanda dibuka di Gunungsitoli pada tahun 1840. Diperlukan ekspedisi-ekspedisi militer pada tahun 1847, 1855, dan 1863 guna memperkokoh kekuasaan Belanda atas Nias.

Aceh kini tumbuh sebagai kekuatan perdagangan dan politik. Pada tahun 1820-an, daerah ini menghasilkan lebih dari separuh pemasokan lada dunia. Berkembangnya produksi lada menjadi sumber-sumber kekayaan yang mandiri bagi banyak penguasa pelabuhan-pelabuhan kecil yang di atas kertas merupakan vasal-

vasal Aceh. Ketika orang-orang Eropa dan Amerika bersaing untuk mendapatkan lada ini, maka Sumatera bagian utara menjadi pusat disintegrasi politik. 'Raja-raja lada' bertindak bebas dan kapal-kapal perang Amerika, Inggris, dan Prancis mengambil tindakan sebagai akibat terjadinya berbagai peristiwa kekerasan. Akan tetapi, seorang pemimpin baru Aceh yang gagah berani dan cakap, Tuanku Ibrahim, mulai memulihkan ketertiban dan kekuasaan kesultanan, yaitu untuk pertama kalinya sejak masa-masa jayanya pada abad XVII. Selama masa pemerintahan saudaranya, Sultan Muhammad Syah (m. 1823–38), Tuanku Ibrahim muncul sebagai kekuatan yang terbesar di kesultanan. Pada tahun 1838, dia menjadi wali dari ahli waris, Sulaiman (yang di atas kertas menjadi sultan dari tahun 1838 sampai wafatnya pada tahun 1857); dari tahun 1838 sampai 1870, Tuanku Ibrahimlah yang sebenarnya memerintah Aceh, bergelar Sultan Ali Alauddin Mansur Syah. Pemerintahannya hanya terancam oleh usaha-usaha Sulaiman untuk menuntut tahtanya pada tahun 1850–7, yang semuanya mengalami kegagalan.

Tuanku Ibrahim mengadu domba 'raja lada' yang satu dengan 'raja lada' lainnya. Pada tahun 1854, ia mengirim suatu ekspedisi ke pesisir timur yang memaksakan kekuasaannya di Langkat, Deli, dan Serdang. Dengan demikian, Aceh bergerak ke selatan tepat ketika pihak Belanda menghentikan untuk sementara gerak majunya ke utara. Terjadinya benturan antara dua kekuatan itu tidak terelakkan lagi. Aceh terlalu kuat dan kaya untuk dibiarkan oleh pihak Belanda sebagai sebuah negara yang merdeka. Perasaan takut Belanda akan kemungkinan campur tangan negara Eropa lainnya di sana juga bertambah besar. Berbagai desas-desus dan peristiwa memberi kesan bahwa Aceh akan membiarkan campur tangan semacam itu. Dikabarkan bahwa, pada tahun 1852, seorang utusan Aceh telah diterima oleh kaisar Prancis, Napoleon III (m. 1852–70). Diketahui pada tahun 1869 bahwa pihak Aceh telah meminta perlindungan kepada pemerintah Turki. Kini Belanda menyadari bahwa Perjanjian London, yang menyingkirkan keterlibatan Inggris di Aceh dan mengharuskan pihak Belanda menghormati kemerdekaannya, sebetulnya berarti bahwa Aceh terbuka bagi masuknya semua kekuatan lain di luar Inggris atau Belanda. Tidaklah mengherankan apabila desakan-desakan untuk melaku-

kan perluasan kekuatan mulai muncul lagi di kalangan orang-orang Belanda.

Pada tahun 1857, perundingan-perundingan dengan Siak yang telah dihentikan dimulai lagi dan, pada tahun 1858, menghasilkan suatu perjanjian yang menetapkan Siak sebagai wilayah Belanda. Pasal kedua dari perjanjian ini menetapkan garis-garis perbatasan Siak secara berlebihan; perbatasan sebelah utara mencapai Alas dan Langkat, yang berarti mencakup pelabuhan-pelabuhan lada yang berada di bawah yurisdiksi Aceh dan mempunyai arti yang penting bagi perdagangan Inggris. Pihak Inggris merasa keberatan dan, pada tahun 1863–5, mengirim kapal-kapal perang ke pelabuhan-pelabuhan lada tersebut. Beberapa negara Sumatera, terutama sekali Aceh, menarik kesimpulan bahwa Inggris (mitra dagang mereka yang utama) akan bersedia membela mereka dalam melawan Belanda. Di Batavia, Dewan Hindia menyadari bahwa perjanjian Siak melanggar wilayah Aceh, tetapi merasa bahwa mereka tidak dapat mundur dan memperlihatkan kembali kelemahannya seperti yang pernah ditunjukkan dalam penarikan mundur kekuatannya pada tahun 1840-an. Keputusan sudah dibuat.

Kebijakan Inggris terhadap Aceh kini berubah. Kebijakan perdagangan Belanda telah berkembang semakin liberal sejak tahun 1848. Pada akhir tahun 1860-an, tampaknya tidak lagi penting, atau memang tidak lagi ada kemungkinan, untuk tetap menuntut kemerdekaan bagi Aceh. Ketika persaingan di antara kekuatan-kekuatan Eropa untuk mendapatkan wilayah jajahan meningkat, maka London mengambil keputusan bahwa akan lebih baik membiarkan Belanda menguasai Aceh daripada negara yang lebih kuat seperti Prancis atau Amerika. Hasilnya adalah terwujudnya Perjanjian Sumatera antara Inggris dan Belanda pada bulan November 1871 yang, bersama-sama dengan dua perjanjian yang terkait, dianggap sebagai salah satu pertukaran yang terbesar selama zaman penjajahan. Belanda menyerahkan Pantai Emas di Afrika kepada Inggris; Inggris memperbolehkan pengiriman kuli-kuli kontrak India ke Suriname, jajahan Belanda di Amerika Selatan; Belanda diberi kebebasan penuh di Sumatera atas persetujuan Inggris; perdagangan Inggris dan Belanda mempunyai hak-hak yang sama di Sumatera, dari Siak ke utara. Perjanjian ini merupakan pengumuman bahwa Belanda ingin menguasai Aceh,

suatu keinginan yang, dalam zaman penjajahan ini, harus dilaksanakan dengan cepat. Bagi Inggris maupun Belanda, pertukaran ini berarti perang: pada pertengahan tahun 1873, Inggris terlibat dalam Perang Ashanti di Afrika dan Belanda dalam Perang Aceh.

Pada awal tahun 1873, konsul Amerika di Singapura mengadakan pembicaraan dengan utusan Aceh mengenai kemungkinan terwujudnya suatu perjanjian Aceh–Amerika. Belanda memandang hal ini sebagai alasan untuk melakukan campur tangan. Pada bulan Maret, mereka menembak ibu kota Aceh, Banda Aceh (Kutaraja), dan pada bulan April mereka mendaratkan suatu pasukan yang berjumlah 3.000 orang. Akan tetapi, mereka telah salah menilai perlawanan pihak Aceh. Pasukan mereka dipukul mundur oleh pihak Aceh. Jenderalnya dan delapan puluh orang serdadu menjadi korban. Belanda kini beralih melakukan suatu blokade dan rakyat Aceh bersatu padu untuk bertempur; jumlah mereka diperkirakan berkisar dari 10.000 sampai 100.000 orang. Kemajuan pihak penjajah kini telah menghadapi lawan yang paling kaya, paling tegas, paling terorganisasikan, paling baik persenjataannya, dan paling kuat rasa kemerdekaannya. Pada bulan-bulan terakhir kemerdekaan formalnya, Sultan Mahmud Syah (m. 1870–4) meminta bantuan kepada Turki, Inggris, Amerika, dan Prancis. Ia tidak mendapat apa pun selain sentimen-sentimen keagamaan dari pemerintah Turki (yang bagaimanapun juga tidak berdaya memberikan bantuan), penolakan mentah-mentah oleh pihak Inggris, balasan positif dari konsul Amerika namun penolakan oleh Washington, dan sama sekali tidak ada tanggapan dari pihak Prancis. Rakyat Aceh harus berjuang sendirian.

Ekspedisi Belanda yang kedua dikirim pada akhir tahun 1873. Ekspedisi ini adalah yang terbesar di antara ekspedisi-ekspedisi yang pernah mereka himpun di Indonesia: 8.500 orang serdadu, 4.300 orang pelayan dan kuli, dengan pasukan cadangan berjumlah 1.500 orang serdadu yang segera ditambahkan. Baik pihak pasukan Belanda maupun Aceh sangat menderita karena kolera dan penyakit-penyakit lainnya. Di pihak pasukan penjajah, 1.400 orang meninggal antara bulan November 1873 dan April 1874. Pihak Aceh memutuskan untuk meninggalkan Banda Aceh. Belanda bergerak masuk pada bulan Januari 1874 dan beranggapan bahwa dengan demikian mereka telah memenangkan

perang. Mereka mengumumkan bahwa Aceh berhasil dicaplok dan kesultanan dihapuskan. Walaupun hal itu cukup memadai untuk mencegah masuknya kekuatan-kekuatan asing lainnya, namun hal itu tidak dapat melemahkan perlawanan rakyat Aceh. Sultan Mahmud dan para pengikutnya mundur ke wilayah-wilayah pegunungan. Di sana Mahmud wafat karena penyakit kolera. Seorang cucu Tuanku Ibrahim yang bernama Tuanku Muhammad Daud Syah diproklamasikan oleh orang-orang Aceh sebagai Sultan Ibrahim Mansur Syah (m. 1875–1907).

Kesultanan Aceh tetap berdiri dan perlawanan rakyatnya terus berjalan selama beberapa dasawarsa setelah aneksasi Belanda tersebut. Sebenarnya, pasukan kolonial di Banda Aceh kini berada dalam keadaan terkepung. Setiap bulannya jatuh korban 150 orang karena penyakit kolera. Para penguasa pelabuhan-pelabuhan Aceh dengan cepat menyatakan tunduk kepada Belanda dengan harapan dibebaskan dari blokade, tetapi kemudian menggunakan pendapatan mereka untuk membantu pasukan-pasukan perlawanan di wilayah pedalaman. Pihak Belanda berharap dapat membereskan dominasi mereka dengan suatu perjanjian seperti yang pernah mereka capai di tempat-tempat lain di Nusantara, tetapi tindakan mereka menghapus kesultanan telah menghapus pula kemungkinan diadakannya perundingan-perundingan. Karena rakyat Aceh tidak mau menyerah, maka satu-satunya pilihan yang tertinggal bagi Belanda adalah penaklukan secara total.

Perang Aceh merupakan perang yang amat sengit dan berlangsung lama. Ketika pihak Belanda bergerak maju dengan menembak dan membakar desa-desa, rakyat melarikan diri ke pegunungan-pegunungan dan tetap melanjutkan perlawanan mereka. Pada tahun 1881, pihak Belanda mengumumkan bahwa peperangan telah selesai, salah satu di antara pernyataan-pernyataan kolonialisme yang paling bersifat khayalan. Perlawanan gerilya mulai didominasi oleh para ulama, yang paling terkenal di antaranya ialah Teungku Cik di Tiro (1836–91), dan perlawanan tersebut berubah sifat menjadi perang sabil kaum muslim melawan kaum kafir. Belanda menyadari bahwa mereka tidak menguasai apa-apa selain yang telah diduduki secara permanen oleh garnisun-garnisun mereka. Biaya perang ini sangat besar sehingga membutuhkan penghematan besar di bidang-bidang lain anggaran kolonial dan pajak-pajak atas orang Indonesia harus dinaikkan. Pada tahun 1884–5 diperintahkan untuk mundur. Oleh ka-

rena itu, banyak dari wilayah pedalaman kembali berada dalam kekuasaan pihak Aceh.

Belanda akhirnya menemukan pemecahan atas dilema mereka dalam kebijakan yang diajukan oleh dua orang, Dr. Christiaan Snouck Hurgronje (1857–1936) dan Joannes Benedictus van Heutsz (1851–1924). Snouck Hurgronje adalah ahli Islam Belanda yang terkemuka. Darl tahun 1891 sampai 1906, dia menjadi penasihat utama pemerintah kolonial dalam masalah Islam dan dalam masalah-masalah penduduk asli Indonesia. Dia mengakhiri masa pengabdiannya sebagai guru besar Universitas Leiden. Dia menyatakan bahwa tidak ada satu pun yang dapat diperbuat untuk meredakan perlawanan yang fanatik dari kaum ulama. Maka, mereka harus ditumpas sampai habis dan pemerintah Belanda harus mengandalkan *uleebalang* (yang dilihat sebagai para pemimpin adat atau 'sekuler'). Namun, ini akan menjadi kebijakan yang sangat mahal. Bagaimanapun, selain motivasi-motivasi penjajahan, sekarang pertimbangan ekonomi berperan dalam menentukan kebijakan Belanda. Tadinya hanya sedikit yang percaya bahwa Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yag besar, tapi dari sekitar tahun 1880 dan seterusnya pandangan ini mulai berubah. Sementara itu, seperti yang akan diperlihatkan pada bab 14, industri minyak dari Hindia Timur Belanda berkembang. Pada tahun 1898, masa depan 'de Koninklijke' (perusahaan minyak Belanda yang utama—lihat bab 14) tampaknya terancam oleh munculnya Amerika sebagai pesaing dan menurunnya hasil dari lahan minyaknya yang ada. Minyak telah ditemukan lebih ke utara, di daerah-daerah yang terlibat dalam pertempuran Aceh. 'De Koninklijke' dengan tepat memobilisasi koneksi-koneksi politiknya yang sangat diperhitungkan di Den Haag dan Batavia untuk mendesakkan diambilnya langkah militer yang akan mengamankan akses ke daerah-daerah sumber minyak yang lebih ke utara ini. Tindakan militer besar-besaran pun dilakukan, di bawah pimpinan van Heutsz, seorang serdadu yang sudah bertugas di Aceh untuk waktu yang lama sejak tahun 1874. Ia diangkat sebagai Gubernur Aceh (1898–1904). Ia lalu melancarkan serangan-serangan yang akhirnya memberi Aceh semacam perdamaian, dengan Snouck Hurgronje di sisinya sampai tahun 1903. Belanda mencari-cari kaum *uleebalang* yang sudi bekerja sama, yang mereka kira sama dengan bupati di Jawa atau *penghulu* di Minangkabau—para pemimpin adat yang bersedia mengimbangi pengaruh politik

Islam. Secara berangsur-angsur kaum *uleebalang* berkompromi dengan pihak Belanda, sehingga menimbulkan perpecahan yang benar-benar mendalam dan akhirnya banyak menumpahkan darah di antara mereka dan sebagian besar masyarakat Aceh. Snouck Hurgronje juga mengajukan bentuk kesepakatan politik yang baru dengan para raja lokal, yang disebut Pernyataan Singkat *(Korte Verklaring)*, yang dipekenalkan pertama kali di Aceh pada tahun 1898 dan sesudah itu menjadi bentuk standar perjanjian di seluruh Nusantara. Pernyataan Singkat membuat kontrak-kontrak yang panjang dan tidak praktis dengan penguasa-penguasa secara perorangan digantikan oleh sebuah kesepakatan standar yang singkat yang di dalamnya seorang penguasa Indonesia mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Timur Belanda dan setuju menerima perintah-perintahnya.

Pada sekitar tahun 1903 dibentuklah suatu pemerintahan yang benar-benar stabil, yang didasarkan pada persekutuan dengan para *uleebalang* yang bersedia bekerja sama. Pada tahun 1903, Sultan Ibrahim Mansur Syah (Tuanku Daud Syah) menyerah, tetapi dia tetap menjalin hubungan dengan kaum gerilyawan. Pada tahun 1905, dia menghubungi konsul Jepang di Singapura, dan pada tahun 1907 dia merencanakan suatu serangan terhadap garnisun Belanda di Banda Aceh tetapi gagal. Sultan kemudian diasingkan. Panglima Polem Muhammad Daud (1879–1940), pemimpin militer utama selama tahap terakhir perang tersebut, juga menyerah pada tahun 1903 dan menjadi pejabat penting di bawah kekuasaan Belanda. Akan tetapi, para ulama meneruskan perlawanan mereka selama satu dasawarsa lagi atau lebih. Kapan perang Aceh benar-benar berakhir memang merupakan masalah pendapat. Beberapa di antara ulama terkemuka gugur dalam pertempuran pada tahun 1910–12. Akan tetapi, di antara orang Aceh ada yang berpendapat bahwa perang tersebut tidak pernah berakhir. Adalah penting bahwa setelah Perang Dunia II, ketika Belanda berusaha menduduki Indonesia kembali, Aceh adalah satu-satunya keresidenan yang tidak mereka coba untuk masuki kembali. Dengan tiadanya kehadiran Belanda, maka *uleebalang-uleebalang* yang terkemuka dipenjarakan atau dibunuh pada tahun 1946.

Van Heutsz menjadi gubernur jenderal (1904–9). Dalam jabatan ini, dia bertanggung jawab atas penaklukan-penaklukan

terakhir di seluruh Indonesia yang telah dibahas di dalam bab ini. Daerah kekuasaan Belanda di Nusantara bagian barat disempurnakan dengan pendudukan militer atas Kepulauan Mentawai dari sekitar tahun 1905, walaupun ada perlawanan lokal yang berlangsung lama. Pada sekitar tahun 1910, perbatasan negara Indonesia yang sekarang ini telah ditentukan secara kurang lebih oleh angkatan bersenjata kolonial, yang menelan banyak korban jiwa, uang, kerusakan, kepaduan sosial, dan martabat serta kebebasan manusia. Akan tetapi, perasaan benci terhadap penaklukan dan eksploitasi kolonial tidak boleh membuat seseorang buta akan akibat-akibat yang lebih positif dari perluasan kekuasaan Belanda. Sistem-sistem politik feodal, perbudakan, pembakaran janda, perang saudara, pengayauan kepala, kanibalisme, perampokan, dan praktik-praktik yang tidak dapat diterima lainnya dihapuskan di bawah kekuasaan Belanda. Tentu saja bentuk-bentuk kejahatan yang baru dan lebih modern menggantikan praktik-praktik tersebut ketika pihak penjajah yang hidup dalam alam industrialisasi mulai mengeksploitasi rakyat yang dijajahnya. Akan tetapi, dalam hal-hal yang penting, banyak orang Indonesia telah dipaksa memasuki zaman yang lebih modern. Rakyat Indonesia juga telah diberi musuh bersama yang potensial. Dasar-dasar telah diletakkan bagi pembentukan suatu bangsa baru yang disatukan oleh tradisi-tradisi budaya dan politik selama berabad-abad dan oleh pengalaman terakhir dari penaklukan dan pemerintahan Belanda. Belanda tidak menciptakan Indonesia, tetapi mereka telah menetapkan luas wilayahnya dan menciptakan suatu lingkungan di mana kekuatan-kekuatan kaum nasionalis akhirnya dapat tumbuh dan berkembang.

Bagaimanapun juga, memang bijaksana apabila kita memerhatikan cara-cara yang diselenggarakan untuk membangun negara jajahan baru ini. Karena rakyat Indonesia masih terpecah-belah, maka mereka tidak saja dapat ditaklukan oleh kekuatan penjajah yang relatif kecil tetapi juga secara aktif ikut serta dalam penaklukan satu sama lain. Pada tahun 1905, penduduk asli Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 37 juta jiwa. Seluruh orang Eropa yang bertugas di dalam angkatan darat dan angkatan laut kolonial di Indonesia pada waktu itu hanya berjumlah 15.866 orang. Akan tetapi, orang Indonesia yang bertempur di pihak mereka berjumlah 26.276 orang. Sebagian besar bertugas dalam

angkatan darat (24.522), dan 68% di antaranya adalah orang Jawa, 21% orang Ambon, dan sisanya orang-orang Sunda, Madura, Bugis, dan 'Melayu' (kebanyakan dari Timor). Perasaan tentang identitas-bersama Indonesia atau tujuan-tujuan bersama belum ada. Sebagian besar orang Jawa, misalnya, tidak mengetahui dan tidak pula memedulikan apa yang terjadi di Aceh, kecuali mereka yang bertempur di pihak Belanda untuk menghancurkan kemerdekaannya. Tumbuhnya suatu identitas Indonesia yang menjadi milik bersama harus menunggu terjadinya peristiwa-peristiwa yang menggemparkan pada abad XX.[]

IV

Munculnya Konsepsi Indonesia, ± 1900–42

Bab 14

Zaman Penjajahan Baru

PADA PERMULAAN abad XX, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya. Kekuasaannya memperoleh definisi kewilayahan baru dengan selesainya upaya-upaya penaklukan yang telah dibicarakan dalam bab sebelumnya. Kebijakan kolonial Belanda tersebut kini juga memiliki tujuan baru. Eksploitasi terhadap Indonesia mulai kurang dijadikan sebagai alasan utama kekuasaan Belanda, dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. Kebijakan ini dinamakan 'politik Etis'. Masa di mana kebijakan ini muncul melahirkan perubahan-perubahan yang begitu mendasarnya di lingkungan penjajahan sehingga orang tidak akan dapat memahami sejarah Indonesia pada awal abad XX tanpa mengacu pada kebijakan tersebut. Sebenarnya, dalam kebijakan-kebijakan politik Etis terdapat lebih banyak janji daripada pelaksanaan, dan fakta-fakta penting tentang eksploitasi dan penaklukan sesungguhnya tidak berubah, tetapi ini tidak mengurangi arti penting zaman penjajahan baru ini.

Politik Etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Kecaman-kecaman terhadap pemerintahan bangsa Belanda yang dilontarkan dalam novel *Max Havelaar* (1860) dan dalam berbagai pengungkapan lainnya mulai membuahkan hasil. Semakin banyak suara Belanda yang mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Jawa yang tertindas. Pada akhir abad XIX, para pegawai kolonial baru berangkat menuju Indonesia dengan membawa *Max Havelaar* di dalam kopor mereka dan isi novel itu di kepala mereka. Selama zaman 'liberal' (± 1870–1900), kapitalisme swasta memainkan pengaruh yang sangat menentukan terhadap kebijakan penjajahan.

Industri Belanda mulai melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial yang standar hidupnya perlu ditingkatkan. Modal Belanda maupun internasional mencari peluang-peluang baru bagi investasi dan eksploitasi bahan-bahan mentah, khususnya di daerah-daerah luar Jawa. Kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia dalam perusahaan-perusahaan modern pun terasa. Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan bisnis mendukung keterlibatan yang semakin intensif dari penjajah dalam rangka mencapai ketenteraman, keadilan, modernitas, dan kesejahteraan. Para pejuang kemanusiaan membenarkan apa yang oleh kalangan pengusaha diperkirakan akan menguntungkan itu, dan lahirlah politik Etis tadi.

Pada tahun 1899, C. Th. van Deventer, seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama tahun 1880–97, menerbitkan sebuah artikel berjudul "Een eereschuld", "suatu hutang kehormatan", di dalam jurnal Belanda *de Gids.* Dia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia semua kekayaan yang telah diperas dari negeri mereka. Hutang ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia di dalam kebijakan kolonial. Sampai saat meninggalnya pada tahun 1915, van Deventer adalah salah satu kampiun politik Etis yang terkemuka, sebagai penasihat pemerintah, dan anggota parlemen. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina (m. 1890–1948) mengumumkan suatu penyelidikan tentang kesejahteraan di Jawa, dan dengan demikian politik Etis secara resmi disahkan. Pada tahun 1902, Alexander W.F. Idenburg menjadi Menteri Urusan Daerah Jajahan (1902–5, 1908–9, 1918–9). Dengan memegang jabatan ini dan jabatan Gubernur Jenderal (1909–16), Idenburg pun mempraktikkan pemikiran-pemikiran politik Etis, lebih daripada siapa pun. Pihak Belanda menyebutkan tiga prinsip yang dianggap merupakan dasar kebijakan baru tersebut: pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Untuk melaksanakan proyek-proyek semacam itu diperlukan dana. Oleh karena itu, hutang pemerintah kolonial yang mencapai sekitar 40 juta gulden diambil alih oleh pemerintah Belanda, sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran tanpa harus dibebani hutang lagi. Politik Etis mulai berjalan.

Semua ini berlangsung dalam suatu lingkungan ekonomi yang sedang berubah dengan cepat. Aksi-aksi penaklukannya di daerah-daerah luar Jawa telah memperluas wilayah kekuasaan

Belanda, dan daerah-daerah tersebut menjadi fokus yang lebih penting daripada Jawa dalam pembangunan ekonomi baru. Ini melibatkan sebuah perusahaan pelayaran besar: Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), "perusahaan paket pos kapal uap kerajaan". Perusahaan ini didirikan di Amsterdam pada tahun 1888 dan mulai beroperasi pada tahun 1891. KPM sesungguhnya menangani hampir seluruh keperluan pelayaran pemerintah kolonial di seluruh Indonesia. Jaringannya yang terus meluas menjadi unsur vital dalam perluasan kekuasaan Belanda. Di tangan perusahaan-perusahaan swasta, produksi komoditi daerah tropis meningkat dengan cepat di daerah luar Jawa. Dari tahun 1900 sampai 1930, produksi gula meningkat hampir empat kali lipat, dan produksi teh meningkat hampir sebelas kali lipat. Produksi tembakau berkembang pesat mulai tahun 1860-an, terutama di pesisir timur Sumatera. Produksi lada, kopra, timah, kopi, dan komoditi-komoditi lainnya semakin meningkat, dan kini sebagian besar dikembangkan di daerah-daerah luar Jawa. Ada dua jenis komoditi yang sangat penting untuk menempatkan Indonesia pada garis depan bagi kepentingan perekonomian dunia pada abad XX: minyak bumi dan karet. Kedua jenis komoditi ini, walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakannya dihasilkan oleh daerah-daerah luar Jawa.

Adanya kandungan-kandungan minyak bumi di daerah Langkat, Sumatera Utara, telah diketahui sejak tahun 1860-an. Daerah ini merupakan kawasan yang tidak tenang selama berkecamuknya Perang Aceh. Pada tahun 1883, A.J. Zijlker mendapat persetujuan pemerintah untuk suatu konsesi dari Pangeran Langkat, dan dimulailah pengeboran-pengeboran percobaan. Setelah menghadapi banyak masalah di bidang personel, keuangan, medan, iklim, dan kebakaran sumur pada tahun 1888, akhirnya minyak mulai mengalir dalam jumlah yang menjanjikan. Pada tahun 1890, Zijlker mendirikan Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum-bronnen in Nederlandsch-Indië, "perusahaan Kerajaan Belanda bagi eksploitasi sumber-sumber minyak bumi di Hindia Belanda", lazim dikenal dengan 'de Koninklijke' saja. Produksi dimulai pada tahun 1892. Pada tahun 1900, de Koninklijke mengekspor minyak bumi ke kawasan-kawasan Asia lainnya, mulai dari pelabuhan-pelabuhan Cina di timur sampai pelabuhan-pelabuhan India di barat. Pada tahun

1901, perusahaan tersebut memperluas kegiatan-kegiatannya ke Kalimantan.

Pada mulanya, minyak bumi dimanfaatkan terutama untuk minyak lampu. Memang merupakan salah satu kejadian luar biasa yang sifatnya kebetulan di dalam sejarah modern bahwa tepat ketika lampu pijar, yang diproduksi secara komersial mulai tahun 1880-an, mengancam akan menghancurkan industri minyak bumi, mobil-mobil dengan mesin yang menggunakan minyak bumi memberi peluang baru kepada industri minyak bumi mulai sekitar tahun 1900 dan seterusnya. Perusahaan-perusahaan lain segera tertarik pada kandungan minyak bumi Indonesia. Pada tahun 1920-an, ada kira-kira lima puluh perusahaan yang beroperasi di Sumatera (sepanjang pesisir timur dari Aceh sampai Palembang), Jawa (di Semarang, Rembang, dan Surabaya), dan Kalimantan (di pesisir timur). Eksplorasi berlangsung terus di daerah-daerah lainnya, tetapi hanya menjanjikan sedikit harapan untuk berhasil. Untuk membiayai pengeboran di Kalimantan Timur, maka pada tahun 1897 di London didirikan suatu perusahaan dengan modal Inggris, yaitu Shell Transport and Trading Company, "perusahaan pengangkutan dan perdagangan Shell". Pada tahun 1907, Shell dan de Koninklijke bergabung dan menjadi salah satu perusahaan multinasional minyak yang besar dengan nama Royal Dutch Shell. Pada tahun 1930, Royal Dutch Shell memproduksi sekitar 85% dari keseluruhan produksi minyak bumi Indonesia. Perusahaan-perusahaan Amerika telah mendapatkan konsesi-konsesi yang besar mulai tahun 1920-an; yang paling penting di antara perusahaan-perusahaan itu adalah Caltex (California Texas Oil Corporation) dan Stanvac (Standard Vacuum Oil Co.). Pada tahun 1930, pihak Jepang ikut bermain dalam bisnis minyak Indonesia lewat Borneo Oil Company-nya yang beroperasi di Kutai, Kalimantan Timur.

Produk baru lainnya adalah karet, yang juga berhubungan erat dengan industri mobil yang baru itu. Pohon karet yang asli, *ficus elastica,* diusahakan menjadi tanaman perkebunan di Jawa Barat dan pesisir timur Sumatera mulai tahun 1864. Akan tetapi, percobaan-percobaan pertama yang dilakukan pemerintah dengan pohon karet impor, *hevea brasiliensis,* pada tahun 1900-lah yang telah membuka jalan menuju keberhasilan. Pemerintah kolonial mendorong penyebaran jenis komoditi baru ini (seperti yang

telah dilakukannya terhadap jenis-jenis komoditi lainnya) dengan jalan memberikan nasihat, mengadakan penelitian ilmiah, menetapkan peraturan umum, dan sebagainya. Mulai sekitar tahun 1906, *hevea brasiliensis* berkembang pesat, terutama di Sumatera. Ketika tanaman-tanaman yang pertama sudah cukup umur untuk disadap (setelah kira-kira lima tahun), maka karet mulai diekspor pada tahun 1912. Rencana Pembatasan Karet Stevenson tahun 1922 yang disetujui secara internasional tidak berlaku di Indonesia, tetapi membatasi produksi di Malaya, jajahan Inggris. Sesudah itu, produksi karet di Indonesia meledak. Pada tahun 1930, 44% dari luas tanah yang disediakan bagi tanaman-tanaman perkebunan yang utama di Indonesia ditanami karet. Pada masa itu, Indonesia memproduksi hampir separo pasokan karet dunia. Akan tetapi, depresi membawa krisis besar terhadap industri karet pada tahun 1930, seperti halnya terhadap jenis-jenis usaha lainnya.

Bukan hanya para pengusaha Belanda yang aktif di Indonesia. Pembentukan Royal Dutch Shell pada tahun 1907 mencerminkan internasionalisasi investasi secara umum. Pengembangan pertanian hampir sepenuhnya dikuasai modal Belanda. Akan tetapi, kira-kira 70% dari modal Belanda pada tahun 1929 diinvestasikan di Jawa, kira-kira separo di antaranya pada tebu. Pembangunan di daerah-daerah luar Jawa lebih menginternasional. Di Sumatera Timur dan Selatan, lebih dari 40% investasi pertanian pada tahun 1929 adalah non-Belanda, lebih dari 18% di antaranya adalah modal Inggris. Industri minyak bumi juga semakin bersifat internasional. Orang-orang Indonesia sendiri juga aktif dalam pertanian, terutama di daerah-daerah luar Jawa. Pada tahun 1931, para pengusaha kecil Indonesia berhasil memproduksi 35% dari hasil karet, 79% tembakau, 57% kopi, 19% teh, dan hampir seluruh produksi kelapa, lada, dan kapas.

Semua kegiatan tersebut menunjukkan bahwa daerah-daerah luar Jawa telah mengungguli Jawa, baik sebagai pusat investasi maupun sumber ekspor. Komoditi-komoditi ekspor Jawa yang terpenting adalah kopi, teh, gula, karet, ubi kayu, dan tembakau. Untuk sebagian besar komoditi ini, hasil produksi daerah-daerah luar Jawa lebih banyak daripada Jawa. Sering sekali terjadi pasang-surut, akan tetapi secara keseluruhan nilai ekspor kopi Jawa menurun hampir 70% dari tahun 1880 sampai tahun 1930; pada

tahun 1930, ekspor kopi daerah-daerah luar Jawa menjadi dua kali lipat dari nilai ekspor kopi Jawa, nilai ekspor karetnya hampir dua kali lipat dari nilai ekspor karet Jawa, dan nilai ekspor tembakaunya hampir empat kali lipat dari nilai ekspor tembakau Jawa (tembakau juga banyak ditanam oleh orang-orang Indonesia di Jawa dan daerah-daerah luar Jawa untuk pasaran dalam negeri). Di antara komoditi-komoditi ekspor yang penting, Jawa mengungguli non-Jawa hanya pada komoditi teh dan gula; yang disebut terakhir hampir sepenuhnya merupakan produksi Jawa. Nilai ekspor gula dari Jawa mencapai puncaknya pada tahun 1920, tetapi merosot 75% pada dasawarsa berikutnya karena semakin rendahnya harga (sebenarnya jumlah produksinya meningkat). Ekspor teh Jawa semakin meningkat nilainya, tetapi pada tahun 1930 hanya mencapai separo dari nilai ekspor karet daerah-daerah luar Jawa. Ekspor ubi kayu hampir seluruhnya berasal dari Jawa, tetapi nilainya pada tahun 1930 hanya sekitar seperdelapan dari ekspor karet pulau-pulau luar Jawa. Pada tahun 1925, 99% (nilai) ekspor minyak bumi berasal dari daerah-daerah luar Jawa. Pada tahun 1930, komoditi-komoditi ekspor yang penting (ubi kayu, kopi, kopra, karet, gula, teh, tembakau, timah, dan minyak bumi) mencapai jumlah sekitar 930,5 juta gulden, 55,3% di antaranya berasal dari daerah-daerah luar Jawa. Jawa menghasilkan 44,7%, tetapi lebih dari 60%-nya berupa ekspor gula, sehingga Jawa (terutama Jawa Timur) menjadi salah satu penghasil gula yang terbesar di dunia. Turunnya harga gula dan kebutuhan untuk menggunakan lahan tebu bagi penanaman padi untuk kepentingan penduduk Jawa yang semakin bertambah banyak jumlahnya juga mengancam komoditi ekspor yang penting ini.

Bergesernya kegiatan ekonomi ke daerah-daerah luar Jawa itu menimbulkan kesulitan yang besar dalam kebijakan pemerintah, kesulitan yang terus berlangsung sejak saat itu. Kini, lapangan-lapangan investasi dan penghasil-penghasil komoditi ekspor yang terpenting adalah daerah-daerah luar Jawa. Akan tetapi, masalah-masalah kesejahteraan yang utama, tuntutan-tuntutan pokok terhadap 'hutang kehormatan' adalah di Jawa. Dalam teori, program-program kesejahteraan di Jawa dapat dibiayai dengan mengharuskan daerah-daerah luar Jawa memberikan subsidi bagi program-program tersebut, sehingga menghindarkan naiknya pajak

yang sudah sangat berat di Jawa. Hal ini akan memaksa dikenakannya pajak yang tinggi terhadap keuntungan-keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan di luar Jawa. Tidaklah mengherankan apabila hal ini tidak terjadi. Daerah-daerah luar Jawa tidak dikenakan pajak sampai tingkat yang diperlukan untuk meningkatkan standar hidup di Jawa. Kepentingan-kepentingan kemanusiaan dan ekonomi, yang perpaduannya telah menghasilkan politik Etis, dalam kenyataannya berjalan sendiri-sendiri, sekalipun memakai retorika yang sama. Ketika langkah-langkah kesejahteraan mulai dijalankan di Jawa, maka orang-orang Sunda dan Jawa menyadari bahwa dana dan tenaga kerja diminta dari mereka untuk membiayai program-program baru tersebut. Ketika kondisi keuangan kolonial terancam setelah Perang Dunia I, maka pajak yang dikenakan kepada orang Indonesia mengalami kenaikan yang sangat besar, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan kurang penting daripada anggaran yang seimbang.

Dengan demikian, perbedaan antara Jawa dan luar Jawa yang berakar pada masa lalu menjadi semakin mencolok sekarang. Daerah-daerah luar Jawa mempunyai ikatan dengan Islam yang lebih mendalam, kegiatan kewiraswastaan yang lebih besar, komoditi-komoditi ekspor yang lebih berharga, dan investasi asing yang lebih besar. Selain itu, kawasan ini lebih belakangan ditaklukan oleh Belanda dan tekanan jumlah penduduknya kurang padat. Jawa, sebaliknya, merupakan kawasan yang pengislamannya kurang mendalam, yang kegiatan kewiraswastaannya kurang besar, yang nilainya sebagai sumber komoditi ekspor merosot, yang pertumbuhan ekonomi barunya tidak pesat, yang menghadapi campur tangan penjajah lebih lama dan lebih mendasar, dan yang jumlah penduduknya sangat padat. Generalisasi-generalisasi semacam itu memang menyembunyikan banyak variasi dan perubahan, tetapi sejarah Indonesia abad XX dibentuk secara berarti oleh perbedaan-perbedaan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dan masalah kesejahteraan penduduk pribumi hanya berkaitan dalam proyek-proyek infrastruktur saja. Misalnya, perluasan jaringan rel kereta api dan trem. Pada tahun 1867, jaringan rel kereta api di seluruh wilayah Hindia Timur Belanda hanya mencapai panjang kira-kira 25 kilometer, dan pada tahun 1873 hanya sekitar 260 kilometer. Akan tetapi setelah itu terjadi perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 1930,

jaringan rel kereta api dan trem sudah mencapai panjang 7.425 kilometer. Yang mempunyai kaitan lebih langsung dengan kesejahteraan adalah proyek-proyek pengairan yang diupayakan pemerintah namun tidak selalu berhasil. Suatu rencana besar untuk mengairi lembah Bengawan Sala ditinggalkan setelah menghabiskan dana sekitar 17 juta gulden. Meskipun demikian, luas kawasan persawahan yang dapat diairi antara tahun 1885 dan 1930 meningkat sekitar 1,8 kali lipat. Arti pentingnya dapat dilihat pada perspektif jumlah penduduk yang juga meningkat dengan jumlah yang kira-kira sama dalam periode yang sama. Pemerintah kolonial Belanda gagal membuat kebijakan yang dapat mendorong industrialisasi di Indonesia.

Belanda meningkatkan produksi bahan pangan dengan jalan mengadakan percobaan dengan bibit-bibit baru, mendorong pemakaian pupuk, dan sebagainya. Usaha-usaha ini sangat berhasil, tetapi tidak sebanding dengan banyaknya penduduk. Konsumsi beras per kepala di Jawa dan Madura tampaknya sedikit menurun antara tahun 1913 dan 1924, walaupun hal ini sebagian diimbangi oleh meningkatnya konsumsi bahan-bahan pangan yang lain tetapi yang kurang bergizi.

Pertambahan jumlah penduduk memengaruhi semua perkembangan yang terjadi selama zaman penjajahan baru ini dan juga menghantui sejarah Indonesia semenjak itu. Singkatnya, penduduk Jawa (khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur) meningkat sampai sangat berlebihan, sementara di daerah-daerah luar Jawa masih banyak daerah yang jarang penduduknya atau tidak berpenduduk sama sekali. Baru pada tahun 1930 dilakukan sensus yang dapat dikatakan memberikan angka-angka yang dapat dipercaya untuk seluruh Indonesia, walaupun kecenderungannya yang umum sebelum itu sudah tampak jelas. Pada tahun 1900, jumlah penduduk asli di Jawa dan Madura mencapai sekitar 28,4 juta jiwa, suatu peningkatan dramatis di atas jumlah 5 juta yang telah dikemukakan di dalam bab 2 sebagai jumlah tertinggi yang layak untuk masa sebelum tahun 1800. Pada tahun 1920, jumlah penduduk asli di Jawa dan Madura sudah mencapai 34,4 juta jiwa, dan angka pasti untuk sensus tahun 1930 menunjukkan 40,9 juta jiwa. Penduduk asli di daerah-daerah luar Jawa diperkirakan berjumlah 7,3 juta jiwa pada tahun 1905, 13,9 juta jiwa pada tahun 1920, dan angka yang terakhir pada tahun 1930

menunjukkan jumlah 18,2 juta jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk asli Indonesia pada tahun 1930 adalah 59,1 juta jiwa (ditambah 1,6 juta orang Eropa dan 'Timur Asing', 1,2 juta di antaranya orang Cina, sehingga jumlah seluruhnya 60,7 juta jiwa).

Dengan demikian, hampir 70% penduduk Indonesia pada tahun 1930 tinggal di Jawa dan Madura, yang luasnya sekitar 7% dari luas seluruh daratan Indonesia. Jawa, yang pernah menjadi lumbung padi Nusantara, sekarang telah menjadi wilayah yang kekurangan bahan pangan. Akan tetapi, ironisnya, setelah tahun 1936 wilayah ini menjadi pengekspor beras lagi ketika dampak Depresi (terutama dikeluarkannya gula Jawa dari beberapa pasar utama internasional) menyebabkan banyak perkebunan tebu dipakai lagi untuk pertanian padi; tentu saja hal ini bukan petunjuk tentang kemakmuran umum, melainkan salah satu di antara banyak keanehan yang ditimbulkan oleh Depresi. Pada umumnya sulit untuk menghindarkan dugaan bahwa pihak Belanda sudah kalah berpacu dengan jumlah penduduk di Jawa sebelum mereka atau pihak mana saja menyadari bahwa perlombaan itu sudah dimulai.

Pertumbuhan penduduk Jawa mempunyai kaitan yang mendasar dengan tingkat kesejahteraannya yang rendah, tetapi pihak Belanda tidak mempunyai kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Memang, sulit untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan. Kecuali beberapa eksperimen yang terbatas dan gagal dalam pembaharuan agraria, satu-satunya jawaban yang diberikan Belanda adalah emigrasi dari Jawa ke luar Jawa, suatu kebijakan yang masih terus dilanjutkan setelah kemerdekaan Indonesia dengan nama 'transmigrasi'. Pada tahun 1905, koloni-koloni orang Jawa yang pertama ditempatkan di Lampung (Sumatera Selatan); sesudah itu daerah-daerah lainnya dibuka bagi transmigrasi. Pada tahun 1930, penduduk koloni-koloni tersebut seluruhnya berjumlah sekitar 36.000 jiwa. Banyak juga penduduk Jawa yang meninggalkan pulau mereka untuk bekerja sebagai kuli-kuli kontrak di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur dan di tempat-tempat lainnya (pada tahun 1931 terdapat lebih dari 306.000 orang tenaga kerja semacam itu), dan sebagian lagi pergi untuk mencari kerja di bidang lain atau berdagang. Akan tetapi, orang-orang yang seperti itu seluruhnya hanya berjumlah sampai beberapa ratus ribu orang saja. Sementara itu, jumlah

penduduk Jawa antara tahun 1905 dan 1930 bertambah sekitar 11 juta jiwa.

Pihak Belanda telah meningkatkan anggaran belanja mereka untuk proyek-proyek kesehatan umum sebesar hampir sepuluh kali lipat antara tahun 1900 dan 1930. Akan tetapi, menghadapi kemiskinan yang mendalam dan penduduk Jawa yang terlalu banyak, hasilnya terbatas. Diadakannya berbagai program imunisasi, kampanye-kampanye anti malaria, dan perbaikan-perbaikan kesehatan barangkali menyebabkan turunnya angka kematian (dan dengan demikian juga bertambahnya jumlah penduduk), walaupun angka-angka statistiknya masih diragukan. Apa pun yang benar, yang pasti angka kematian masih tetap tinggi. Hasil yang paling langgeng dari langkah perbaikan kesehatan itu adalah dipakainya genteng secara luas untuk atap rumah sebagai pengganti jerami. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi gangguan tikus dan jenis-jenis binatang kecil pengganggu lainnya, khususnya karena adanya keprihatinan setelah berjangkitnya wabah pes yang pertama pada tahun 1911. Akan tetapi, perlengkapan medis yang profesional pada umumnya masih tetap tidak memadai. Pada tahun 1930, di Indonesia hanya ada 1.030 orang dokter yang memenuhi syarat (667 orang di antaranya di Jawa), yang berarti hanya ada satu dokter untuk setiap 62,5 ribu penduduk (segala bangsa) di Jawa dan untuk setiap 52,4 ribu penduduk di luar Jawa. Dokter-dokter tersebut kebanyakan tinggal di kota besar dan kota kecil, di perkebunan-perkebunan, dan sebagainya; perawatan medis yang profesional untuk penduduk desa hampir tidak ada. Sebagai tambahan, terdapat pelayanan-pelayanan kesehatan dan kesejahteraan lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi Indonesia, yang akan dibicarakan dalam bab 15.

Desa akan menjadi perangkat pokok pemerintah dalam mengusahakan kesejahteraan. Peraturan Desa tahun 1906 dan praktik-praktik selanjutnya dari pihak Belanda bertujuan untuk meningkatkan peran serta rakyat secara demokratis dalam urusan-urusan desa, untuk meningkatkan kepaduan sosial, serta untuk memungkinkan Residen dan *Controleur* Belanda, bersama kepala desa, memimpin desa menuju langkah-langkah kesejahteraan yang diperlukan. Usaha-usaha tersebut gagal. Kemiskinan dan kelebihan penduduk itu sendiri agaknya cukup untuk merusak kehidupan

desa-desa Jawa yang otonom dan semidemokratis. Bagaimanapun juga, beban paternalisme Belanda memastikan akibat ini. Belanda berpendapat bahwa desa Jawa merupakan unit pemerintahan yang tidak efisien. Untuk menciptakan suatu struktur pemerintahan yang lebih rasional dan untuk menjamin penghasilan yang lebih besar bagi kepala desa, maka dilaksanakanlah suatu kebijakan penggabungan desa-desa. Pada tahun 1897 terdaftar 30.500 desa di Jawa yang masing-masing berpenduduk rata-rata 800 jiwa. Pada tahun 1927 hanya 18.584 desa gabungan yang tertinggal, masing-masing berpenduduk rata-rata 1.800 jiwa. Unit-unit pemerintahan yang baru ini sering kali tidak mempunyai dasar dalam masyarakat pribumi dan gagal tumbuh menjadi organisasi-organisasi kesejahteraan yang bersifat otonom yang berusaha dicapai oleh pemerintah kolonial. Perkembangan bank-bank desa, kedai-kedai beras, dan proyek-proyek lainnya juga didorong oleh pemerintah Belanda, tetapi hasil-hasilnya bercampur-aduk. Banyak terjadi korupsi dan salah urus. Pertambahan jumlah penduduk terus mengakibatkan sawah-sawah dan ladang-ladang dibagi-bagikan menjadi lebih kecil; kemiskinan dan pengangguran mendorong timbulnya tindak-tindak kekerasan dan kejahatan. Banyak penduduk desa juga terlibat dalam kerusuhan dan kekerasan politik yang akan dibicarakan dalam bab berikutnya. Tak aneh, para pejabat pemerintah koloniallah, baik yang berkebangsaan Belanda maupun Indonesia, yang sesungguhnya mengarahkan langkah-langkah kesejahteraan, dan bukannya penduduk desa sendiri.

Banyak sekali usaha yang dijalankan di bidang pendidikan, dan hasil-hasilnya sering kali membuat bangga para pejabat Belanda. Semua pendukung politik Etis menyetujui ditingkatkannya pendidikan bagi rakyat Indonesia, tetapi ada dua aliran pemikiran yang berbeda mengenai jenis pendidikan yang bagaimana dan untuk siapa. Snouck Hurgronje dan direktur pendidikan 'Etis' yang pertama (1900–5), J.H. Abendanon, mendukung pendekatan yang bersifat elite. Mereka menginginkan pendidikan yang lebih bergaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya bagi kaum elite Indonesia yang dipengaruhi Barat, yang dapat mengambil alih banyak dari pekerjaan yang ditangani para pegawai pemerintah yang berkebangsaan Belanda. Dengan demikian, ini akan menciptakan suatu elite yang tahu berterima kasih dan bersedia bekerja sama, memperkecil anggaran belanja peme-

rintah, mengendalikan 'fanatisme' Islam, dan akhirnya menciptakan suatu keteladanan yang akan menjiwai masyarakat Indonesia golongan bawah. Idenburg dan Gubernur Jenderal van Heutsz (1904–9) mendukung pendidikan yang lebih mendasar dan praktis dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya bagi golongan-golongan bawah. Pendekatan elitis diharapkan menghasilkan pimpinan bagi zaman pencerahan baru Belanda-Indonesia, sedangkan pendekatan yang merakyat diharapkan memberikan sumbangan secara langsung bagi kesejahteraan. Tak satu kebijakan pun dijalankan dengan dana yang cukup memadai, dan tak satu pun menghasilkan apa yang diinginkan oleh para pendukungnya.

Di bawah Abendanon, pendekatan elitislah yang diutamakan. Pada tahun 1900, tiga *hoofdenscholen*, "sekolah para kepala", yang lama di Bandung, Magelang, dan Probolinggo disusun kembali menjadi sekolah-sekolah yang nyata-nyata direncanakan untuk menghasilkan pegawai pemerintahan dan diberi nama baru OSVIA (Opleidingscholen voor inlandsche ambtenaren, "sekolah pelatihan untuk para pejabat pribumi"). Masa pendidikannya kini berlangsung selama lima tahun, dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya dan terbuka bagi semua orang Indonesia yang telah menyelesaikan sekolah rendah Eropa. Calon-calon muridnya tidak lagi harus berasal dari kalangan elite bangsawan. Pada tahun 1927, masa pendidikannya dikurangi menjadi tiga tahun. Pada tahun 1900–2, sekolah 'Dokter-Jawa' di Weltevreden diganti menjadi STOVIA (School tot opleiding van inlandsche artsen, "sekolah untuk pelatihan dokter-dokter pribumi"). Mata pelajarannya juga diberikan dalam bahasa Belanda. Sejak tahun 1891, sekolah-sekolah rendah Eropa, yang merupakan prasyarat wajib untuk dapat memasuki OSVIA dan STOVIA, terbuka untuk orang-orang Indonesia, tetapi hanya orang-orang kayalah yang mampu membayar iuran sekolahnya. Abendanon memperluas kesempatan bagi rakyat Indonesia yang bukan bangsawan untuk memasukinya dan menghapuskan iuran sekolah bagi para orang tua yang penghasilannya di bawah 50 gulden per bulan.

Dalam pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan tersebut, Abendanon menghadapi tentangan dari berbagai kalangan, termasuk para bupati yang lebih konservatif. Bagaimanapun juga, dia tetap gigih dan baru gagal ketika ingin memperluas kesempatan pendidikan bagi kaum wanita Jawa kalangan atas. Cita-

citanya itu juga dimiliki Raden Ajeng Kartini (1879–1904), putri Raden Mas Adipati Arya Sasraningrat dari Jepara, salah seorang di antara bupati-bupati Jawa yang paling maju. Kartini memasuki sekolah rendah Eropa di saat kebanyakan bupati berpandangan bahwa gagasan mengenai pendidikan kaum wanita sama sekali tidak dapat diterima. Gadis yang luar biasa ini berharap akan dapat memberikan sumbangan bagi semakin cerahnya masa depan kaum wanita golongannya. Dia menikah dengan seorang bupati lain yang progresif, Raden Adipati Arya Djajadiningrat dari Rembang, tetapi tragisnya dia wafat pada usia 25 tahun, beberapa hari sesudah melahirkan anaknya yang pertama.

Cita-cita tentang pendidikan kaum wanita yang begitu didambakan oleh Kartini dan Abendanon tersebut tidak pernah mendapat prioritas pemerintah, terutama karena pengaruh para bupati yang konservatif dan pejabat-pejabat kolonial yang skeptis. Pada tahun 1911, Abendanon memberikan penghargaan pribadi kepada Kartini dengan menerbitkan surat-surat Kartini yang mengharukan yang ditulis Kartini kepada istrinya dan orang-orang lain antara tahun 1899 dan 1904 dengan judul *Door duisternis tot licht*, "Habis gelap terbitlah terang". Bagaimanapun juga, gagasan tentang pendidikan kaum wanita tersebut mendapat perhatian dari organisasi-organisasi nonpemerintah. Kegiatan-kegiatan orang Indonesia di bidang ini akan dibicarakan dalam bab 15. Di negeri Belanda, pada tahun 1913 didirikan suatu yayasan swasta bernama Kartini Fonds, "Yayasan Kartini", untuk mengurusi pendidikan berbahasa Belanda bagi kaum wanita Jawa, dan kemudian pemerintah kolonial memberikan subsidi. Sekolah-sekolah Kartini yang didirikan oleh yayasan ini di Jawa memainkan peranan yang penting pada masa-masa mendatang, dan Kartini dikenang sebagai seorang tokoh emansipasi wanita yang pertama dan tokoh kebangkitan nasional yang akan menjadi pokok bahasan bab-bab berikut.

Selama van Heutsz menjabat sebagai Gubernur Jenderal (1904–9) dan Dirk Fock menjabat sebagai Menteri Urusan Daerah Jajahan (1905–8) di negeri Belanda, gagasan mengenai pendidikan rakyat memperoleh lebih banyak dukungan. Fock mengutamakan sekolah-sekolah teknik dan kejuruan. Snouck Hurgronje dan para pengikutnya menyatakan bahwa para tamatan sekolah-sekolah tersebut tidak akan membangkitkan perusahaan-perusahaan pribumi,

seperti yang diharapkan Fock, tetapi hanya mendapat pekerjaan di perusahaan-perusahaan Eropa. Akan tetapi, Fock tetap bersikeras. Berbagai sekolah kejuruan telah didirikan oleh misi-misi Kristen sejak tahun 1881 di Minahasa, daerah-daerah Batak di Sumatera, dan Jawa. Sekolah-sekolah kejuruan pemerintah yang pertama didirikan di Batavia, Semarang, dan Surabaya pada tahun 1909. Akhirnya, sekolah-sekolah tersebut mengajarkan kursus-kursus bagi para pandai besi dan tukang kayu, para tukang listrik, para montir mobil, dan sebagainya. Para lulusan sekolah-sekolah itu kadang-kadang membangkitkan perusahaan-perusahaan pribumi, tetapi sebagian besar menjadi karyawan perusahaan-perusahaan Eropa. Kelompok orang-orang skeptis terbukti benar.

Perbaikan-perbaikan pendidikan yang paling berarti adalah dalam sistem sekolah dasar dua-kelas yang dibuka secara kecil-kecilan untuk orang-orang Indonesia sejak tahun 1892–3. Sekolah-sekolah Kelas Satu diperuntukkan bagi golongan atas, sedangkan sekolah-sekolah Kelas Dua untuk rakyat jelata. Untuk mengurangi tekanan terhadap sekolah-sekolah rendah Eropa, satu-satunya lembaga di mana seorang Indonesia dapat belajar bahasa Belanda dengan cukup memadai dan melanjutkan sekolah ke OSVIA dan STOVIA, maka sekolah-sekolah Kelas Satu diubah pada tahun 1907. Sekolah-sekolah ini sekarang menerapkan masa pendidikan lima tahun yang mengajarkan bahasa Belanda, dan pada tahun keenam bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar dalam proses belajar-mengajar; pada tahun 1911 ditambah tahun ketujuh. Guru-guru yang berkebangsaan Belanda kini muncul di sekolah-sekolah tersebut (kebanyakan wanita, karena rekan-rekan pria mereka enggan mengajar 'rakyat pribumi'). Di sekolah-sekolah pelatihan-guru pribumi (*kweekscholen*), sekolah yang pertama dibuka pada tahun 1852 dan yang kemudian disusul oleh yang lain-lain terutama setelah tahun 1870, bahasa Belanda diajukan lagi sebagai mata pelajaran setelah dihapuskan selama sekitar dua puluh tahun; segera sesudah itu bahasa ini menjadi bahasa pengantar.

Orang-orang Indonesia kini mempunyai kesempatan lebih luas untuk memperoleh pelajaran bahasa Belanda, tetapi masih ada masalah yang sifatnya struktural. Sekolah-sekolah Kelas Satu berada dalam sistem pendidikan 'pribumi'; tidak ada kesempatan bagi seorang Indonesia untuk melompat dari sistem ini ke sistem

Eropa yang paralel, yang merupakan satu-satunya lembaga untuk menuju ke pendidikan lanjutan. Oleh karenanya, sekolah-sekolah Kelas Satu diubah menjadi sekolah-sekolah Hollandsch-Inlandsche, "Belanda-Pribumi", (HIS) pada tahun 1914. Walaupun sekolah-sekolah tersebut masih tetap diperuntukkan bagi bangsa Indonesia dari golongan atas (masih ada persyaratan mengenai penghasilan terendah orang tua), namun kini secara resmi telah menjadi bagian dari sistem sekolah Eropa di Indonesia. Walaupun sekolah-sekolah Hollandsch-Inlandsche, sekolah-sekolah Hollandsch-Chineesche, "Belanda-Cina", yang mulai dibuka pada tahun 1908, dan sekolah-sekolah rendah Eropa pada dasarnya berbeda dalam hal suku bangsa, tetapi semuanya kini mengarah ke pendidikan Eropa tingkat lanjutan dan kemudian ke lapangan kerja birokrasi yang lebih tinggi. Bahasa Belanda merupakan bahasa pengantar di semua sekolah tersebut.

Di atas tingkatan HIS, pemisahan ras dalam pendidikan sudah tidak ada. Pada tahun 1914, sekolah-sekolah MULO (Meer uitgebreid lager onderwijs, "pendidikan rendah yang lebih diperpanjang", semacam SLTP) didirikan untuk orang-orang Indonesia golongan atas, orang-orang Cina, dan orang-orang Eropa yang telah menyelesaikan sekolah dasar mereka masing-masing. Pada tahun 1919, AMS (Algemeene middelbare scholen, "sekolah menengah umum", semacam SMU) didirikan untuk membawa para murid memasuki tingkat perguruan tinggi. Hingga saat itu, belum ada pendidikan tingkat perguruan tinggi di Indonesia. Sejumlah kecil orang Indonesia yang mendapat kesempatan memasuki perguruan tinggi adalah mereka yang telah berhasil menembus sistem Eropa menuju HBS (Hoogere burgerschool, "sekolah atas untuk kelas menengah") dan kemudian ke perguruan tinggi di negeri Belanda. Pada tahun 1905, hanya ada 36 orang Indonesia yang berhasil memasuki HBS. Pada tahun 1913, Hoesein Djajadiningrat (l. 1886), yang berasal dari salah satu keluarga bupati Jawa Barat yang paling terkemuka, menjadi orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor di Universitas Leiden dengan disertasi yang berjudul *Sejarah Banten.* Pendidikan tingkat universitas, yang tidak memandang ras, akhirnya hadir di Indonesia pada tahun 1920 dengan dibukanya Technische Hoogeschool, "sekolah tinggi teknik", di Bandung. Pada tahun 1924, sebuah Rechtshoogeschool, "sekolah tinggi hukum", dibuka di Batavia,

dan pada tahun 1927 STOVIA diubah menjadi Geneeskundige Hoogeschool, "sekolah tinggi kedokteran".

Pembaharuan sekolah-sekolah Kelas Satu dan pengembangan-pengembangan lebih lanjut dalam pendidikan yang dibicarakan di atas sama sekali tidak ada kaitannya dengan rakyat Indonesia golongan bawah. Untuk mereka, sekolah-sekolah Kelas Dua disediakan. Memperluas pendidikan untuk rakyat banyak merupakan suatu masalah keuangan yang luar biasa, dan suatu cita-cita yang sama sekali tidak mendapat dukungan penuh bahkan dari kalangan pendukung gagasan-gagasan Etis sekalipun. Pada tahun 1918 diperkirakan bahwa akan menghabiskan biaya 417 juta gulden setahun guna mengurus sekolah-sekolah Kelas Dua bagi seluruh penduduk Indonesia; biaya ini jauh lebih besar daripada seluruh pengeluaran pemerintah kolonial. Rencana-rencana pertama untuk memperbanyak sekolah-sekolah Kelas Dua ditunda karena alasan-alasan keuangan ini.

Pada tahun 1907, van Heutsz berhasil mendapatkan jawabannya. Sekolah-sekolah desa *(desascholen,* juga disebut *volksscholen,* "sekolah rakyat") akan dibuka yang sebagian besar biayanya ditanggung oleh penduduk desa sendiri, tetapi dengan bantuan pemerintah seperlunya. Seperti halnya dengan banyak perbaikan Etis lainnya, pemerintah menetapkan apa yang baik untuk rakyat Indonesia dan sesudah itu memberitahukan berapa yang harus mereka bayar demi perbaikan itu. Di sekolah-sekolah tersebut akan diterapkan masa pendidikan tiga tahun dan mata pelajarannya, yang memberikan keterampilan-keterampilan dasar membaca, berhitung, dan keterampilan praktis, diajarkan dalam bahasa daerah. Uang sekolah dipungut. Ternyata desa-desa kurang menyambut gagasan tentang sekolah desa tersebut, sehingga pihak Belanda mulai menggunakan *perintah halus,* 'desakan lembut' dari atas yang menjadi ciri pendekatan pihak Belanda bagi langkah-langkah kesejahteraan desa. Pada tahun 1912 telah berdiri lebih dari 2.500 sekolah desa. Pada tahun 1930-an ada kira-kira 9.600 sekolah dan lebih dari 40% anak-anak Indonesia berumur antara 6 dan 9 tahun memasuki sekolah semacam itu selama beberapa waktu, sebagian besar di sekolah-sekolah desa pemerintah dan kebanyakan dengan rasa terpaksa. Pada tahun 1915 didirikan Inlandsche Vervolgscholen, "sekolah lanjutan pribumi", untuk membawa para murid ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pada tahun 1908, sekolah Kelas Dua menjadi Standaardscholen, "sekolah standar", dan kini diperuntukkan bagi mereka yang menggeluti perdagangan atau yang meninggalkan kehidupan desa yang agraris; bagi mereka yang masih hidup dalam lingkungan desa, diperuntukkan sekolah desa. Orang-orang Cina kini dapat memasuki sekolah standar, yang secara teoritis menjadi sekolah 'golongan menengah', yaitu antara sekolah desa golongan bawah dan sekolah Kelas Satu golongan elite. Sekolah-sekolah tersebut benar-benar menyimpang dalam sistem pendidikan, dan ketika dampak-dampak Depresi terasa sesudah tahun 1930 maka sekolah-sekolah itu diubah menjadi sekolah-sekolah desa bersama dengan Vervolgscholen.

Sistem sekolah yang rumit ini kini tampaknya terbuka bagi setiap orang, terkecuali anak desa yang ingin melanjutkan dari sekolah desanya ke tingkat lanjutan, yang hanya ada dalam sistem Eropa. Pada tahun 1921 dibuka Schakelschool, "sekolah sambungan", yang pertama, yang masa pendidikannya lima tahun, yang merupakan lanjutan dari tingkat sekolah desa sampai tingkat akhir HIS. Muridnya kemudian dapat melanjutkan ke MULO. Sekolah-sekolah sambungan tidak begitu penting. Sebagian besar orang Indonesia golongan atas memasukkan anak mereka ke HIS atau sekolah-sekolah Eropa; penduduk desa tidak begitu tertarik pada pendidikan yang lebih tinggi dan jarang yang kuat membayar uang sekolahnya. Pada tahun 1929, sebagian besar sekolah sambungan ditutup.

Titik puncak upaya perbaikan pendidikan tersebut, seperti halnya langkah-langkah perbaikan Etis lainnya, tercapai sekitar tahun 1930. Setelah itu, Depresi menghentikan semua perkembangan besar yang baru, walaupun jumlah tempat untuk bersekolah bagi anak-anak terus bertambah. Peningkatan kesempatan di bidang pendidikan telah jauh lebih luas. Pada tahun 1900, orang Indonesia yang menuntut ilmu di sekolah-sekolah swasta maupun pemerintah di seluruh Indonesia hanya berjumlah 265.940 orang. Pada tahun 1930–1, jumlah orang Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan Barat semacam itu sudah mencapai lebih dari 1,7 juta orang. Akan tetapi, apabila angka-angka itu diperbandingkan dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dapat dilihat betapa terbatasnya semua upaya tersebut. Pada tahun 1930–1, sekitar 1,66 juta orang Indonesia menuntut ilmu di sekolah-sekolah dasar, yang menggunakan bahasa daerah sebagai

bahasa pengantar, yang memang diperuntukkan bagi mereka. Jumlah ini berarti 2,8% dari keseluruhan jumlah penduduk, atau 8% dari kelompok penduduk antara anak yang belum dapat berjalan dan orang dewasa. Jumlah orang Indonesia yang menuntut ilmu di dalam sistem sekolah Eropa di bawah tingkatan universitas (termasuk HIS, MULO, AMS, dan sekolah-sekolah kejuruan, tetapi tidak termasuk taman kanak-kanak) adalah 84.609 orang: 0,14% dari keseluruhan jumlah penduduk. Di tingkat perguruan tinggi hanya terdapat 178 orang Indonesia: 0,0003% (3/1.000.000) dari jumlah penduduk. Di sekolah-sekolah kejuruan pertanian dan kehutanan, suatu bidang yang seharusnya diutamakan, hanya terdapat 392 orang Indonesia: 0,0007% dari jumlah penduduk.

Dalam sensus tahun 1930, perbandingan orang Indonesia usia dewasa di seluruh kepulauan yang sudah melek huruf hanya 7,4%: di Sumatera 13,1%, di Jawa dan Madura 6%, dan di Bali dan Lombok 4%. Sebagian dari jumlah tersebut merupakan tamatan dari lembaga-lembaga pendidikan pribumi, baik sekolah-sekolah Quran yang lama maupun sekolah-sekolah yang lebih modern yang akan dibicarakan dalam bab selanjutnya. Tingkat penduduk melek huruf yang tertinggi (50%) terdapat di daerah-daerah Maluku Selatan yang beragama Kristen, di mana misi-misi Kristen aktif di bidang pendidikan. Jumlah orang yang sudah melek huruf dalam bahasa Belanda di antara penduduk Indonesia pada tahun 1930 hanyalah 0,32% (tetapi mencapai 13% di kota Ambon). Keadaan ini memang buruk jika dibandingkan dengan program pendidikan rakyat yang paling ambisius di suatu negeri jajahan, yaitu program pendidikan rakyat yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat di Filipina, di mana pada tahun 1939 lebih dari seperempat jumlah penduduk dapat berbahasa Inggris. Pihak Belanda tidak pernah memberi janjinya dalam hal pendidikan rakyat seperti yang dilakukan Amerika Serikat, dan bahkan seandainya mereka melakukan hal itu, masalah-masalah yang mereka hadapi mungkin tidak dapat diatasi.

Pendidikan tidak menghasilkan elite baru yang tahu berterima kasih dan bersedia bekerja sama, tidak pula melahirkan semangat baru yang berkobar-kobar di kalangan rakyat; langkah-langkah kesejahteraan umumnya tidak menghasilkan kesejahteraan. Sungguhpun semua penelitian kesejahteraan selama periode politik Etis menghasilkan angka-angka statistik yang meragukan,

tidak ada bukti tentang meningkatnya kemakmuran umum sebelum tahun 1930, dan ada sedikit bukti mengenai menurunnya standar hidup sesudah tahun 1914. Tidak ada perdebatan mengenai menurunnya kemakmuran setelah tahun 1930. Pendidikan menghasilkan beberapa pegawai yang cakap dan setia, tetapi juga menghasilkan sedikit kaum elite yang tidak puas yang memimpin gerakan-gerakan anti-penjajahan, yang akan dibicarakan dalam bab-bab berikutnya. Cerita yang sama terjadi pula dalam perbaikan-perbaikan di bidang politik dari politik Etis.

Desentralisasi adalah sasaran utama para pendukung politik Etis: desentralisasi dari Den Haag ke Batavia, dari Batavia ke daerah-daerah, dari orang-orang Belanda ke orang-orang Indonesia. Akan tetapi, walaupun dilakukan langkah-langkah perubahan, Den Haag masih tetap menguasai Indonesia. Dewan-dewan lokal untuk kota-kota besar mulai dibentuk pada tahun 1905. Pada tahun 1939, ada 32 dewan kota (19 di antaranya di Jawa). Dewan-dewan kota ini dapat dikatakan cukup berhasil, tetapi semuanya mempunyai anggota yang mayoritas orang Belanda dan hak suara hanya diberikan kepada penduduk laki-laki yang melek huruf dan yang tingkat pajak penghasilannya tinggi; jadi, hanya mencakup segolongan kecil rakyat Indonesia. Dewan-dewan juga dibentuk untuk setiap 76 kabupaten di Jawa, tetapi sebagian besar orang Indonesia yang menjadi anggotanya adalah para pegawai, sedangkan ketuanya adalah bupati. Para bupati memang merupakan kelompok utama bangsa Indonesia yang diuntungkan oleh perbaikan-perbaikan tersebut. Ketika aksi politik meningkat (lihat bab 14), maka mulai sekitar tahun 1915, pihak pemerintah tidak lagi begitu mencurigai para bupati dan mulai mendukung mereka lagi sebagai pemimpin masyarakat mereka. Semua dewan tersebut pada dasarnya adalah penasihat, dan sebetulnya ada pendelegasian wewenang yang kurang dari Batavia. *Bestuurshervormingwet* (undang-undang pembaharuan pemerintahan) tahun 1922 menetapkan Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah yang luas yang memiliki dewan-dewan lokal. Jawa Barat dijadikan daerah semacam itu pada tahun 1926, Jawa Timur pada tahun 1929, Jawa Tengah pada tahun 1930, dan tiga daerah pemerintahan yang meliputi daerah-daerah luar Jawa dibentuk pada tahun 1934. Akan tetapi, seluruh rencana itu menjadi sasaran banyak kecaman. Mayoritas yang duduk dalam dewan-dewan tersebut

adalah orang Belanda dan 'kelompok lain' (terutama Cina), sedangkan orang Indonesia yang menjadi anggotanya adalah terutama para pegawai pemerintah. Dalam praktik, pemerintahan di Indonesia masih tetap bersifat sentralisasi.

Langkah paling nyata ke arah desentralisasi dan peningkatan peran serta orang-orang Indonesia dalam pemerintahan adalah pembentukan Volksraad, "dewan rakyat", yang menyelenggarakan sidangnya yang pertama pada tahun 1918. Asal-usul lembaga ini berkaitan erat dengan agitasi *Indië weerbaar*, "pertahanan Hindia", yang akan dibahas dalam bab berikutnya. Volksraad didirikan sebagai lembaga dengan satu majelis yang hanya mempunyai wewenang menasihati, tetapi kalau menyangkut masalah keuangan harus dikonsultasikan oleh Gubernur Jenderal. Pada mulanya, lembaga ini terdiri atas 19 orang anggota yang dipilih (10 di antaranya bangsa Indonesia), dan 19 orang anggota yang ditunjuk (5 di antaranya adalah bangsa Indonesia), ditambah seorang ketua. Akan tetapi, lembaga yang berhak memilih terdiri atas dewan-dewan lokal yang konservatif dan didominasi oleh kaum pegawai. Orang-orang Indonesia yang lebih radikal dapat menjadi anggota Volksraad hanya apabila Gubernur Jenderal mengangkat mereka. Orang Indonesia yang menjadi anggotanya semula berjumlah sekitar 39%, yang naik menjadi 40% ketika anggota Volksraad ditambah menjadi 49 orang pada tahun 1921, menjadi 42% ketika jumlah anggota lembaga tersebut ditambah menjadi 60 orang pada tahun 1927, dan menjadi 50% ketika perbandingan antara anggota-anggotanya yang berkebangsaan Eropa, Indonesia, dan bangsa lain (terutama Cina) diubah pada tahun 1931. Jumlah anggotanya yang dipilih mulai melebihi jumlah anggota yang ditunjuk, tetapi yang berhak memilih masih tetap terdiri atas dewan-dewan lokal yang konservatif tadi. Pada tahun 1939, dari sekitar 70 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia pada saat itu, yang berhak memilih anggota Volksraad hanya berjumlah 2.228 jiwa.

Pada masa awalnya, Volksraad merupakan sumber banyak kecaman dan desakan terhadap pemerintah kolonial. Suatu *staatsinrichting* (konstitusi) baru untuk Indonesia yang diberlakukan pada tahun 1925 telah menurunkan fungsi Dewan Hindia menjadi badan penasihat dan memberi Volksraad wewenang-wewenang legislatif yang terbatas. Anggaran belanja dan pembuatan

peraturan dalam negeri lainnya memerlukan persetujuan Volksraad, dan lembaga ini dapat mengajukan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, wewenang parlemen di Den Haag dalam masalah anggaran belanja kolonial masih sebesar waktu-waktu sebelumnya. Gubernur Jenderal dan para pimpinan departemen pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada Volksraad dan tidak dapat diberhentikan oleh lembaga tersebut. Volksraad tidak pernah tumbuh menjadi parlemen yang sebenarnya. Melalui berbagai tahapannya, lembaga ini tidak pernah berubah dari apa yang selalu dimaksudkan dengannya: suatu isyarat menuju peran serta rakyat di negeri yang masih tetap merupakan negara jajahan yang didasarkan pada dominasi ekonomi dan militer, yang di dalamnya sejumlah kecil orang Eropa menguasai suatu wilayah Asia yang luas. Akan tetapi, tidak mengherankan bahwa sejak awal mulanya, Volksraad mengambil tempat dalam kesadaran politik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.

Sebuah pertanyaan besar tentang periode politik Etis yang telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara banyak ilmuwan adalah kapan kebijakan tersebut berakhir. Beberapa pendapat telah diajukan. Ada yang menyebutkan periode Menteri Daerah Jajahan Simon de Graaff (1919–25) yang konservatif dan Dirk Fock sebagai gubernur jenderal (1921–6). Dalam rangka membuat anggaran belanja kolonial seimbang, maka banyak lapangan pekerjaan dihapuskan dan beban pajak atas rakyat Indonesia yang sudah berat dinaikkan. Mereka yang menekankan aspek politik (lihat bab 15) juga mengacu ke kurun waktu dari tahun 1919, ketika kegiatan politik dan tindak kekerasan yang meningkat mengakibatkan beberapa orang pemimpin Indonesia ditangkap, dipenjarakan, dan diasingkan, atau ke tahun 1927, ketika pemberontakan komunis mengawali periode penindasan politik yang selalu bertambah hebat. Mereka yang tertarik pada masalah ekonomi memilih tahun 1930, ketika Depresi merusak harga ekspor serta pendapatan dan pengeluaran pemerintah dan semakin menurunkan tingkat kesejahteraan. Mereka yang menekankan adanya tanggung jawab umum akan kesejahteraan Indonesia, sekalipun tidak terwujud, sebagai suatu prinsip pemerintah menunjuk tahun 1942, ketika pihak Jepang mengakhiri kekuasaan orang-orang Belanda.

Akan tetapi, apabila kita memerhatikan bentuk umum dari masa penjajahan yang baru ini, pertanyaan mengenai kapan masa

tersebut berakhir menjadi semakin rumit. Selama masa yang dibicarakan di dalam bab ini terdapat perbedaan yang umum antara prinsip-prinsip yang dikemukakan dan pelaksanaan yang sebenarnya. Kesejahteraan dicanangkan, tetapi apabila dibandingkan dengan perspektif jumlah penduduk, hasilnya kecil. Desa yang semidemokratis seharusnya menjadi dasar dari segalanya, tetapi dalam kenyataannya desa hanya diperlakukan sebagai perangkat yang pasif dan lunak oleh para pejabat yang ingin mengatur perkembangannya. Rakyat seharusnya dikaitkan dengan para penguasanya, tetapi hanya sebagai pengikut suatu elite konservatif yang tahu berterima kasih dan mau bekerja sama. Tidak ada penyelesaian yang nyata terhadap pertambahan jumlah penduduk. Kekayaan Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan asing, sedangkan industri-industri pribumi tidak dikembangkan. Pertumbuhan ekonomi yang penting berlangsung di daerah-daerah luar Jawa, padahal masalah-masalah kesejahteraan yang tersulit ada di Jawa. Pendidikan seharusnya menjadi kunci bagi suatu zaman yang baru, tetapi jumlah sekolah yang disediakan terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Konsesi-konsesi kekuasaan politik yang dangkal dipergunakan untuk mengesahkan suatu pemerintahan yang otoriter. Langkah-langkah kesejahteraan yang dangkal dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pemerintah tersebut baik. Ciri-ciri ini akan muncul lagi sepanjang sejarah Indonesia pada abad XX, bahkan setelah orang-orang Belanda keluar dari gelanggang. Dalam beberapa pengertian, politik Etis telah menetapkan pola-pola bukan untuk dua, tiga, atau empat dasawarsa, tetapi untuk sebagian besar abad XX.[]

Bab 15

Langkah-langkah Pertama Menuju Kebangkitan Nasional, ± 1900–27

TIGA DASAWARSA pertama abad XX bukan hanya menjadi saksi penentuan wilayah Indonesia yang baru dan suatu pencanangan kebijakan penjajahan yang baru. Masalah-masalah dalam masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan yang begitu besar sehingga, dalam masalah-masalah politik, budaya, dan agama, rakyat Indonesia menempuh jalan baru. Perubahan yang cepat terjadi di semua wilayah yang baru saja ditaklukkan oleh Belanda. Akan tetapi, dalam hal gerakan-gerakan anti-penjajahan dan pembaharuan yang mula-mula muncul pada masa ini, Jawa dan daerah Minangkabau di Sumatera menarik perhatian yang khusus. Perubahan-perubahan yang terjadi di sana sedemikian rupa sehingga sejarah Indonesia modern memasuki zaman baru dan memperoleh kosa kata baru. Alasan-alasan yang mendorong Jawa dan Minangkabau menjadi pelopor dalam perubahan yang mendadak ini cukup jelas. Tingkatan kekacauan dan perubahan sosial di Jawa telah dijelaskan di dalam bab-bab terdahulu. Minangkabau telah mengalami pembaharuan Islam besar-besaran yang pertama di Indonesia di bawah kaum Padri, telah mengalami perubahan-perubahan yang besar sejak dipaksakannya kekuasaan Belanda, dan memiliki tradisi untuk berhubungan secara aktif dengan dunia luar yang telah mempertemukannya dengan ide-ide baru. Ketika raja-raja Bali dan kaum ulama Aceh masih berjuang untuk mempertahankan tatanan yang lama dari upaya penaklukan penjajah, orang-orang Minangkabau dan rakyat Jawa telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu tatanan baru.

Perkembangan-perkembangan pokok pada masa ini adalah munculnya ide-ide baru mengenai organisasi dan dikenalnya definisi-definisi baru dan lebih canggih tentang identitas. Ide baru tentang organisasi meliputi bentuk-bentuk kepemimpinan yang baru, sedangkan definisi yang baru dan lebih canggih mengenai identitas meliputi analisis yang lebih mendalam tentang lingkungan agama, sosial, politik, dan ekonomi. Pada tahun 1927 telah terbentuk suatu jenis kepemimpinan Indonesia yang baru dan suatu kesadaran diri yang baru, tetapi dengan akibat yang sangat mahal. Para pemimpin yang baru terlibat dalam pertentangan yang sengit satu sama lain, sedangkan kesadaran diri yang semakin besar telah memecah belah kepemimpinan ini menurut garis-garis agama dan ideologi. Pihak Belanda mulai menjalankan tingkat penindasan baru untuk menanggapi perkembangan-perkembangan tersebut. Periode ini tidak menunjukkan pemecahan masalah, tetapi benar-benar mengubah pandangan kepemimpinan Indonesia itu mengenai dirinya sendiri dan masa depannya.

Kalangan priyayi Jawa yang 'baru' atau yang 'lebih rendah', pejabat-pejabat yang maju dan yang memandang pendidikan sebagai kunci menuju kemajuan, adalah kelompok pertama yang mengambil prakarsa. Kelompok ini mewakili suatu aliran sosial dan budaya yang penting di Indonesia pada abad XX. Mereka terutama adalah 'abangan' (secara harfiah, orang-orang cokelat atau merah), suatu istilah Jawa untuk menyebut orang-orang muslim yang keislamannya jarang lebih daripada sekadar komitmen formal dan nominal saja. Kaum abangan merupakan mayoritas penduduk Jawa; pemikiran-pemikiran agama mereka cenderung bersifat mistik, relatif tidak memedulikan tuntutan kewajiban-kewajiban upacara agama Islam (salat lima kali sehari, puasa, zakat, dll.), dan secara budaya terikat pada bentuk-bentuk seni Jawa, seperti wayang, yang pada dasarnya diilhami oleh nilai-nilai pra-Islam. Pada awal abad XX, pendidikan Barat tampaknya akan memberikan kepada kalangan atas pemerintahan (priyayi) dari lingkungan kaum abangan suatu kunci menuju perpaduan baru yang mereka anggap sebagai dasar bagi peremajaan kembali kebudayaan, kelas, dan masyarakat mereka. Di antara kelompok ini, sebagian besar siap memandang Islam secara netral dan bersahabat, tetapi dengan semakin meningkatnya tekanan-tekanan Islam, beberapa di antara mereka menjadi memusuhi Islam.

Gagasan pembebasan bangsa Indonesia lewat pendidikan kaum priyayi didorong sejak awal oleh jurnal *Bintang Hindia,* diterbitkan pertama kali di Belanda pada tahun 1902. Jurnal ini dipimpin oleh seorang Minangkabau, sarjana keluaran sekolah Dokter-Jawa (sesudah tahun 1900 bernama STOVIA) di Weltevreden, pada saat itu suatu bagian pinggir kota Batavia, bernama Abdul Rivai (l. 1871) dan seorang Belanda yang kemudian merasa bahwa gagasan-gagasan Rivai terlalu progresif. *Bintang Hindia* diedarkan di Indonesia dan dibaca amat luas oleh kalangan elite Indonesia sebelum penerbitannya berhenti pada tahun 1906.

Dr. Wahidin Soedirohoesodo (1857–1917) adalah inspirator bagi pembentukan organisasi modern pertama untuk kalangan priyayi Jawa. Ia juga lulusan sekolah Dokter-Jawa dan bekerja sebagai dokter pemerintah di Yogyakarta sampai tahun 1899. Pada tahun 1901, dia menjadi redaktur majalah *Retnadhoemilah,* "Ratna yang berkilauan", yang dicetak dalam bahasa Jawa dan Melayu untuk kalangan pembaca priyayi dan mencerminkan perhatian priyayi terhadap masalah-masalah dan status mereka. Selain berpendidikan Barat, Wahidin adalah seorang pemain musik Jawa klasik (gamelan) dan wayang yang berbakat. Dia memandang bahwa kebudayaan Jawa dilandasi terutama oleh ilham Hindu-Budha, mengisyaratkan bahwa sebagian penyebab kemerosotan masyarakat Jawa adalah kedatangan agama Islam, dan berusaha memperbaiki masyarakat Jawa melalui pendidikan Belanda.

Wahidin berusaha menghimpun beasiswa guna memberikan pendidikan Barat kepada golongan priyayi Jawa. Akan tetapi, hanya segelintir pejabat dari generasi tua atau kelas bupati yang bergairah; elite yang bersifat turun-temurun ini sebenarnya cenderung merasa takut menghadapi persaingan dari golongan priyayi rendah yang sedang tumbuh. Pada tingkatan tertinggi masyarakat Jawa, hanya seorang pangeran dari garis keturunan Pakualam di Yogyakarta yang mendukungnya. Memang, beberapa keturunan Pakualaman memainkan peranan penting dalam perkembangan-perkembangan baru pada masa itu.

Pada tahun 1907, Wahidin berkunjung ke STOVIA. Di sana, di salah satu lembaga terpenting yang menghasilkan priyayi rendah Jawa itu, dia mendapat tanggapan yang bersemangat dari murid-murid sekolah tersebut. Diambil keputusan untuk membentuk suatu organisasi pelajar guna memajukan kepentingan-

kepentingan priyayi rendah. Pada bulan Mei 1908, diselenggarakan suatu pertemuan yang melahirkan Budi Utomo. Nama Jawa ini (yang seharusnya dieja *budi utama)* diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh organisasi tersebut sebagai *het schoone streven* (ikhtiar yang indah). Tetapi menurut konotasi-konotasi bahasa Jawa yang beraneka ragam, nama itu juga mengandung arti cendekiawan, watak, atau kebudayaan yang mulia. Pada pertemuan pertama itu, hadir para perwakilan mahasiswa dari STOVIA, OSVIA, sekolah-sekolah guru, serta sekolah-sekolah pertanian dan kedokteran hewan. Cabang-cabang Budi Utomo didirikan pada lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Pada bulan Juli 1908, Budi Utomo sudah mempunyai anggota 650 orang. Mereka yang bukan mahasiswa juga menggabungkan diri, sehingga pengaruh mahasiswa mulai berkurang dan organisasi tersebut tumbuh menjadi partai priyayi rendah Jawa pada umumnya.

Budi Utomo pada dasarnya tetap merupakan suatu organisasi priyayi Jawa. Organisasi ini secara resmi menetapkan bahwa bidang perhatiannya meliputi penduduk Jawa dan Madura; dengan demikian, mencerminkan kesatuan administrasi kedua pulau itu dan mencakup masyarakat Sunda dan Madura yang kebudayaannya berkaitan erat dengan Jawa. Adalah bahasa Melayu, dan bukan bahasa Jawa, yang dipilih sebagai bahasa resmi Budi Utomo. Namun demikian, kalangan priyayi Jawa dan, sampai tingkat yang jauh lebih kecil, Sunda-lah yang menjadi pendukung inti Budi Utomo. Rasa keunggulan-budaya orang Jawa cukup sering muncul ke permukaan; bahkan di Bandung ada cabang-cabang khusus untuk anggota-anggota orang Jawa dan Sunda. Budi Utomo tidak pernah memperoleh landasan rakyat yang nyata di antara kelas-kelas bawah dan mencapai jumlah keanggotaan tertinggi hanya 10.000 orang pada akhir tahun 1909. Organisasi ini pada dasarnya juga merupakan lembaga yang mengutamakan kebudayaan dan pendidikan; seperti yang akan terlihat di bawah ini, ia jarang memainkan peran politik yang aktif.

Pada bulan Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Pada saat itu, Wahidin tinggal menjadi sesepuh saja dan bermunculan suara-suara baru untuk mengatur organisasi tersebut. Tjipto Mangunkusumo (1885–1943), yang radikal dan juga seorang dokter, memimpin sekelompok minoritas. Dia ingin agar Budi Utomo menjadi partai

politik yang berjuang untuk mengangkat rakyat pada umumnya, bukan hanya golongan priyayi, dan kegiatan-kegiatannya lebih tersebar di seluruh Indonesia, tidak terbatas di Jawa dan Madura saja. Tjipto juga tidak mengagumi kebudayaan Jawa sebagai dasar bagi peremajaan kembali. Dr. Radjiman Wediodiningrat (1879–1951), seorang 'Dokter-Jawa' lain, mengemukakan ide-idenya. Dia dipengaruhi kebudayaan Jawa, dialektika Hegel, subyektivisme Kant, dan antirasionalisme Bergson, dan sudah menganut doktrin-doktrin mistik teosofi sebagai perpaduan Timur dan Barat. Teosofi adalah salah satu gerakan yang menyatukan elite Jawa, orang-orang Indo-Eropa, dan orang-orang Belanda pada masa itu, dan sangat berpengaruh di kalangan banyak anggota Budi Utomo. Di antara penganut teosofi yang terkemuka adalah Pangeran Pakualam VII (m. 1903–38) dari Yogyakarta dan Susuhunan Pakubuwana XI (m. 1939–44) dari Surakarta. Akan tetapi, baik Tjipto maupun Radjiman tidak berhasil meraih kemenangan. Tjipto tampaknya seorang radikal yang berbahaya dan Radjiman rupanya seorang reaksioner yang kaku. Dipilihlah suatu dewan pimpinan yang didominasi oleh para pejabat generasi tua yang mendukung pendidikan yang semakin luas bagi kaum priyayi dan mendorong kegiatan pengusaha Jawa. Tjipto terpilih sebagai anggota dewan, tetapi mengundurkan diri pada tahun 1909 dan akhirnya bergabung dengan Indische Partij yang radikal.

Gubernur Jenderal van Heutsz menyambut baik Budi Utomo, persis seperti ia sebelumnya menyambut baik penerbitan *Bintang Hindia*, sebagai tanda keberhasilan politik Etis. Memang itulah yang dikehendakinya: suatu organisasi pribumi yang progresif-moderat yang dikendalikan oleh para pejabat yang maju. Pejabat-pejabat Belanda lainnya mencurigai Budi Utomo atau sekadar menganggapnya sebagai gangguan yang potensial. Akan tetapi, pada Desember 1909, Budi Utomo dinyatakan sebagai organisasi yang sah. Sambutan hangat yang diterimanya dari Batavia menyebabkan banyak orang Indonesia yang tidak puas dengan pemerintah untuk mencurigai Budi Utomo. Sepanjang sejarahnya (organisasi ini secara resmi dibubarkan pada tahun 1935), sebenarnya Budi Utomo sering kali tampak sebagai partai pemerintah yang seakan-akan resmi.

Pada umumnya, Budi Utomo sudah mengalami kemandekan hampir sejak awal permulaannya, baik karena kekurangan dana

maupun karena kekurangan kepemimpinan yang dinamis. Organisasi ini mendesak pemerintah untuk menyediakan lebih banyak pendidikan Barat, tetapi desakan itu tidak begitu berperan dalam upaya-upaya perbaikan seperti yang dibicarakan pada bab 14. Banyak bupati Jawa dan Madura yang senior memandang rendah asal-usul priyayi-rendah yang bergabung dalam Budi Utomo dan merasa takut bahwa pengaruh mereka sendiri terhadap pemerintah akan terancam oleh organisasi ini. Pada tahun 1913, mereka membentuk Serikat Para Bupati (Regentenbond), yang sebenarnya hampir tidak memainkan peran apa pun selama beberapa tahun. Elite birokrasi Jawa terlalu cemas akan karier mereka dan begitu terpecah-belah karena adanya perbedaan sosial antara yang satu dengan yang lainnya dan rakyat sehingga tidak mampu memainkan peran yang dinamis.

Organisasi-organisasi yang lebih aktif dan penting segera berdiri. Beberapa di antaranya bersifat keagamaan, kebudayaan, dan pendidikan, beberapa lagi bersifat politik, dan beberapa yang lain bersifat keduanya. Organisasi-organisasi itu bergerak di kalangan masyarakat bawah dan untuk yang pertama kalinya terjalin hubungan antara rakyat desa dan elite-elite baru. Golongan priyayi-rendah penting di dalam beberapa gerakan tersebut, tetapi mereka ini merupakan cabang priyayi rendah yang berbeda dari yang aktif di dalam Budi Utomo. Kalau anggota-anggota Budi Utomo sebagian besar mencetak karier mereka dalam dinas pemerintahan, maka mereka yang memimpin gerakan-gerakan yang lebih aktif tersebut hampir semuanya merupakan orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan sekolah-sekolah Belanda, namun kemudian mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaan-pekerjaan pemerintahan. Muncul pula suatu kepemimpinan agama yang baru yang membuat Islam Indonesia memasuki periode pembaharuan yang paling penting dalam sejarahnya.

Dalam masyarakat Jawa, kelompok minoritas yang berusaha benar-benar menaati kewajiban-kewajiban Islam dalam kehidupan sehari-hari disebut, secara silih berganti, *wong muslimin* (kaum muslim), *putihan* (golongan putih), atau *santri* (murid sekolah agama). Ada dua kelompok yang dapat dibedakan dalam golongan masyarakat ini: kaum muslim pedesaan yang mengelompok di sekeliling para guru agama Islam (kyai) dan sekolah-sekolah agama mereka (pesantren, tempat para santri) dan, yang lainnya,

kelompok-kelompok muslim perkotaan yang sering kali berkecimpung di bidang perdagangan. Kelompok-kelompok muslim perkotaan tinggal di daerah tersendiri di kota-kota Jawa yang disebut *kauman* (tempat orang-orang yang saleh), biasanya di dekat masjid raya. Pada awal abad XX, kaum muslim perkotaan ini bersentuhan dengan gagasan-gagasan pembaharuan dan kemajuan. Mereka semakin bersengketa dengan orang-orang Cina setempat. Yang terakhir ini terlibat persaingan dagang dengan para pengusaha Jawa. Hubungan mereka dengan masyarakat Jawa pada umumnya menjadi tegang gara-gara meningkatnya kesombongan dan kebanggaan yang mereka perlihatkan pada saat bangkitnya revolusi Cina tahun 1911.

Pada tahun 1909, seorang lulusan OSVIA bernama Tirtoadisurjo (1880–1918), yang telah meninggalkan dinas pemerintahan dan menjadi wartawan, mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Pada tahun 1910, dia mendirikan organisasi semacam itu lagi di Buitenzorg (Bogor). Kedua organisasi tersebut dimaksudkan untuk membantu pedagang-pedagang Indonesia. Tirtoadisurjo sendiri telah meraih keberhasilan yang sangat berarti. Tahun 1903, ia mendirikan surat kabar pertama yang didirikan, didanai, dan dijalankan oleh orang-orang Indonesia asli, yaitu mingguan berbahasa Melayu *Soenda Berita*, yang dicetak di Cianjur. Pada tahun 1907, ia mendirikan mingguan *Medan Prijaji* di Batavia. Pada tahun 1910, *Medan Prijaji* berubah menjadi harian, surat kabar harian pertama yang dikelola oleh pribumi. Peran Tirtoadisurjo sebagai bapak jurnalisme Indonesia dikisahkan dalam novel *Sang Pemula* karangan Pramoedya Ananta Toer (l. 1925). Pada tahun 1911, Tirtoadisurjo mendorong seorang pedagang batik yang berhasil di Surakarta bernama Haji Samanhudi (1868–1956) untuk mendirikan Sarekat Dagang Islam sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Cabang-cabang lainnya segera didirikan. Di Surabaya, H.O.S. Tjokroaminoto (1882–1934) menjadi pimpinan organisasi itu. Dia juga seorang lulusan OSVIA yang telah mengundurkan diri dari dinas pemerintahan. Dia merupakan tokoh yang memiliki kharisma, yang terkenal karena sikapnya yang memusuhi orang-orang yang memegang kekuasaan, baik yang berkebangsaan Belanda maupun Indonesia. Dia dengan cepat menjadi pemimpin yang paling terkemuka dari gerakan rakyat yang pertama itu.

Pada tahun 1912, organisasi tersebut mengubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Tirtoadisurjo dan Samanhudi terlibat cekcok. Samanhudi, yang sebagian besar waktunya tersita untuk urusan dagang, lalu meminta Tjokroaminoto untuk memimpin organisasi itu. Asal-usul organisasi yang bersifat Islam dan dagang segera menjadi kabur. Istilah Islam pada namanya kini sedikit banyak lebih mencerminkan adanya kesadaran umum bahwa anggota-anggotanya yang berkebangsaan Indonesia adalah kaum muslim, sedangkan orang-orang Cina dan Belanda adalah bukan muslim. Tjokroaminoto sendiri tampaknya tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam, setidak-tidaknya jika dibandingkan dengan para ulama yang akan dibicarakan di bawah ini yang mendirikan gerakan pembaharuan agama yang sebenarnya.

Sejak tahun 1912, SI berkembang dengan pesat, dan untuk yang pertama kalinya tampak adanya basis rakyat walaupun sukar dikendalikan dan hanya berlangsung sebentar. Pada tahun 1919, SI menyatakan mempunyai anggota 2 juta orang, tetapi jumlah yang sesungguhnya mungkin tidak pernah lebih dari setengah juta orang. Tidak seperti Budi Utomo, SI berkembang ke daerah-daerah luar Jawa, tetapi Jawa tetap menjadi pusat kegiatannya. Anggota-anggotanya harus mengangkat sumpah rahasia dan memiliki kartu anggota, yang sering kali dianggap sebagai jimat oleh orang-orang desa. Tjokroaminoto kadang-kadang dianggap sebagai Ratu Adil, 'raja yang adil' yang diramalkan oleh tradisi-tradisi mesianik Jawa, yang disebut Erucakra (yaitu, nama yang sama dengan *Cakra*-aminata, Tjokroaminoto). Bahkan beberapa anggota elite kerajaan Jawa, yang tak suka dengan campur tangan Belanda dalam urusan mereka, mendukung SI.

SI menyatakan setia kepada rezim Belanda. Tetapi ketika organisasi tersebut berkembang di desa-desa, maka meletuslah tindak kekerasan. Rakyat pedesaan tampaknya lebih menganggap SI sebagai alat bela diri dalam melawan struktur kekuasaan lokal yang kelihatannya monolitis, yang tidak sanggup mereka hadapi, daripada sebagai gerakan politik modern. Oleh karena itulah, organisasi tersebut menjadi lambang solidaritas kelompok, yang dipersatukan dan tampaknya didorong oleh perasaan tidak suka kepada orang-orang Cina, pejabat-pejabat priyayi, mereka yang tidak menjadi anggota SI, dan orang-orang Belanda—kira-kira

dengan urutan seperti itu. Di beberapa daerah, SI benar-benar menjadi pemerintahan bayangan dan para pejabat priyayi harus menyesuaikan diri. Aksi boikot terhadap pedagang batik Cina di Surakarta dengan cepat meningkat menjadi aksi saling menghina Cina–Indonesia dan tindak kekerasan di seluruh Jawa. Pada tahun 1913–4 terjadi letupan tindak kekerasan yang sangat hebat di kota-kota dan desa-desa, di mana cabang-cabang SI setempat memainkan peranan panting.

Gubernur Jenderal Idenburg secara hati-hati mendukung SI. Pada tahun 1913, dia memberi pengakuan resmi kepada SI. Meskipun demikian, dia tidak mengakuinya sebagai suatu organisasi nasional yang dikendalikan oleh markas besarnya (Centraal Sarekat Islam, CSI), melainkan hanya sebagai kumpulan cabang-cabang yang otonom. Dengan bertindak begitu, Idenburg menganggap bahwa dia membantu para pemimpin pusat organisasi baru tersebut dengan tidak membebani CSI dengan tanggung jawab hukum atas kegiatan-kegiatan semua cabang SI. Akan tetapi, akibat keputusannya itu ialah bahwa dalam kenyataannya CSI menjadi semakin sulit melakukan pengawasan. Orang-orang Belanda lainnya beranggapan bahwa pengakuan resmi Idenburg terhadap SI sama sekali keliru, sehingga muncullah ungkapan bahwa arti SI yang sebenarnya adalah 'salah Idenburg'.

Suatu bentuk protes pedesaan yang lebih istimewa juga mencapai puncaknya pada tahun 1914. Di daerah Blora bagian selatan (Jawa Tengah-Utara), seorang petani Jawa yang buta huruf bernama Surantiko Samin (1859–1914) telah menghimpun pengikut dari kalangan para petani yang menolak segala bentuk kekuasaan dari luar, dan yang khususnya tidak menyukai peraturan-peraturan kehutanan yang baru diterapkan di kawasan hutan jati ini. Kaum Samin menganut suatu kepercayaan asli yang oleh Samin disebut *elmu Nabi Adam* (ilmu pengetahuan dari Nabi Adam) yang, walaupun memakai istilah-istilah Arab, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Kepercayaan ini tampaknya juga tidak diilhami oleh Hindu-Budha. Kepercayaan ini lebih merupakan suatu kumpulan doktrin-doktrin etika dan agama yang menitikberatkan pada pentingnya kerja pertanian, kekuatan seksual, perlawanan pasif, dan keutamaan keluarga inti, sementara menolak perekonomian uang, struktur-struktur desa yang bersifat non-Samin, dan segala bentuk kekuasaan dari luar. Kaum Samin

menolak membayar pajak, melaksanakan kerja paksa, atau memanfaatkan sekolah-sekolah pemerintah. Pada tahun 1907, pihak pemerintah merasa khawatir bahwa tidak lama lagi akan meletus pemberontakan, suatu anggapan yang benar-benar keliru sejauh yang bisa diketahui sekarang. Oleh karena itu, pemerintah mengasingkan Samin ke Palembang, tempat dia kemudian meninggal. Akan tetapi, gerakannya terus berjalan, dan perlawanan pasif kaum Samin mencapai puncaknya pada tahun 1914, ketika pihak Belanda memungut pajak kepala yang semakin besar. Golongan priyayi yang marah tidak dapat menghentikan gerakan Samin, yang memang terus hidup di wilayah itu sampai tahun 1970-an.

Pada masa sesudah sekitar tahun 1909, di seluruh Indonesia banyak bermunculan organisasi-organisasi baru di kalangan elite terpelajar, yang sebagian besar didasarkan atas identitas-identitas kesukuan. Para mahasiswa STOVIA di Batavia, tempat Budi Utomo lahir pada tahun 1908, juga menghasilkan beberapa organisasi baru ini, meliputi Tri Koro Dharmo (1915) yang di tahun 1918 menjadi Jong Java, "pemuda Jawa", Jong Sumatranen Bond, "perserikatan pemuda Sumatera", (1917), Studerenden Vereeniging Minahasa, "perserikatan mahasiswa Minahasa", (1918), dan Jong Ambon, "pemuda Ambon", (1918). Organisasi-organisasi lain yang semacam itu terdiri atas Sarekat Ambon (1920), Pasundan, "tanah Sunda", (1914), yang dimaksudkan sebagai organisasi semacam Budi Utomo untuk orang Sunda. Pada tahun 1921, orang-orang Roti dan Savu mendirikan Timorsch Verbond, "persekutuan orang-orang Timor", untuk membela kepentingan orang-orang Timor. Kaum Betawi (1923) giat berusaha memajukan hak-hak warga Indonesia 'asli' dari Batavia; Pakempalan Politik Katolik Jawa, "persatuan politik orang-orang Jawa yang beragama Katolik", (1925) melayani kepentingan-kepentingan kelompok minoritas itu. Organisasi-organisasi tersebut, dan masih banyak kelompok lainnya, tidak hanya mencerminkan adanya kegairahan baru untuk berorganisasi, namun juga mencerminkan kuatnya identitas-identitas kesukuan dan kemasyarakatan yang terus berlangsung. Konsep tentang suatu identitas untuk seluruh Indonesia masih belum mempunyai pendukung yang berarti.

Serikat-serikat buruh pun bahkan berdiri di Indonesia selama masa ramai-ramainya pembentukan organisasi ini. Serikat pertama didirikan tahun 1905 untuk karyawan-karyawan perusahaan kereta

api negara yang berkebangsaan Eropa. Tapi karyawan-karyawan Indonesia segera bergabung dan, pada tahun 1910, menjadi anggota mayoritas, walaupun tanpa hak suara. Pada tahun 1908 didirikan Vereeniging voor Spoor en Tramweg Personeel, "serikat buruh kereta api dan trem", (VSTP); keanggotaannya terbuka untuk karyawan-karyawan berkebangsaan Indonesia dengan status yang sama dengan karyawan-karyawan Eropa sejak awal. Sesudah itu lebih banyak lagi serikat didirikan untuk para guru di sekolah-sekolah pemerintah, para petugas pabean, para pegawai pegadaian pemerintah, para pegawai monopoli candu pemerintah, para pegawai pekerjaan umum, para pekerja perbendaharaan, para buruh pabrik gula, serta untuk kaum tani dan kaum buruh pada umumnya. Akan tetapi, organisasi serikat buruh pada umumnya lemah karena adanya tenaga kerja yang berlebihan dan karena para majikan (pemerintah maupun swasta) tidak dilarang, baik oleh hukum maupun sentimen, untuk memanfaatkan segala alat yang ada guna mematahkan pemogokan-pemogokan. Namun, pada tahun 1918–21, kekurangan tenaga kerja untuk sementara menempatkan serikat-serikat dagang dalam posisi kuat yang tak biasa, seperti akan dilihat di bawah nanti.

Suatu tanda yang bahkan lebih mencolok bahwa suatu zaman baru sedang menyingsing ialah lahirnya gerakan pembaharuan Islam. Latar belakang gerakan pembaharuan ini harus dicari baik di Indonesia maupun di Timur Tengah. Islam Indonesia memang menonjol karena keanekaragamannya. Semua kaum muslim Indonesia pada dasarnya adalah kaum Suni (Ortodoks, dibedakan dari kaum Syiah) dan merupakan penganut mazhab hukum Syafi'i, yang didirikan di Timur Tengah pada akhir abad VIII dan awal abad IX Masehi. Banyak orang Indonesia yang saleh terlibat juga dalam mistik sufi, terutama tarekat-tarekat Syattariyyah, Qadiriyyah, dan Naqsyabandiyyah, dan gabungan dua tarekat yang terakhir yang disebut Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah. Akan tetapi, di balik keseragaman yang tampak ini terdapat banyak perbedaan, penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam, dan ketidaktahuan. Seperti halnya di semua tempat di mana terdapat salah satu agama besar dunia, Islam di Indonesia telah dipengaruhi oleh banyak adat dan ide-ide lokal. Oleh karena itu, dengan memerhatikan semua yang ada di sekeliling mereka, maka orang-orang muslim terpelajar Indonesia melihat adanya kebutuhan yang sangat besar untuk pembaharuan; perasaan me-

reka ini diperkuat oleh dominasi bangsa Belanda, yang mereka anggap dimungkinkan karena mundurnya Islam.

Beberapa orang muslim Timur Tengah sudah berkesimpulan yang sama pada abad XIX. Jamal ad-Din al-Afghani (1839–97), Muhammad Rasyid Rida (1865–1935), dan terutama Muhammad 'Abduh (1849–1905) menciptakan suatu gerakan pembaharuan yang disebut 'modernisme' dengan pusatnya di Kairo. Modernisme mempunyai tujuan ganda. Di satu pihak, gerakan ini ingin membebaskan diri dari dominasi keempat mazhab abad pertengahan dan kembali kepada sumber-sumber Islam yang asli: *Alquran,* perintah Tuhan yang disampaikan kepada Nabi-Nya, Muhammad, dan *hadis* atau *sunah,* tradisi-tradisi mengenai kehidupan Nabi. Hanya sumber-sumber itulah yang menjadi dasar syariat dan akidah. Keempat mazhab Suni itu muncul melalui proses pemikiran (ijtihad) yang dilakukan oleh para ulama terpelajar yang telah mencapai kesepakatan (ijmak) mengenai penafsiran terhadap sumber-sumber agama. Ijmak telah menyebabkan terbentuknya keempat mazhab Suni itu. Sesudah itu, para ulama Suni merasa yakin bahwa tak seorang muslim pun cukup terpelajar untuk menjadi mujtahid baru. Kaum modernis mengatakan bahwa ijmak tidak dapat menutup pintu ijtihad, dan bahwa keadaan-keadaan baru menuntut dilakukannya penelitian ulang terhadap kebenaran-kebenaran Alquran dan hadis yang abadi. Islam harus disucikan dari segala inovasi yang tidak sah (bidah) yang telah merasukinya selama berabad-abad. Dengan demikian, tujuan modernisme yang pertama ini berdasar pada sumber-sumber suci, bersifat fundamentalis, dan bersemangat kemurnian. Tujuan yang kedua ialah apa yang menjadi alasan istilah modernisme. Ijtihad baru ini harus memanfaatkan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan modern (yaitu pengetahuan Barat) yang, menurut keyakinan kaum Islam modernis, dapat dipadukan dengan Islam yang murni untuk mengangkat peradaban Islam keluar dari zaman kebodohan, ketakhayulan, dan kemunduran (seperti yang mereka lihat). Karena mendasarkan diri pada kitab suci, bersifat fundamentalis, menentang doktrin-doktrin abad pertengahan, dan terbuka bagi kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan, maka modernisme merupakan campuran antara yang progresif dan konservatif.

Singapura, yang merupakan wilayah jajahan Inggris, memainkan peranan yang penting dalam penyebaran analisis Islam

modernis tersebut ke Indonesia. Pihak Belanda mencurigai Islam dan berusaha membatasi perjalanan haji ke Mekah sampai sekitar tahun 1902, ketika Snouck Hurgronje berhasil mengubah kebijakan ini atas dasar bahwa sebagai doktrin keagamaan, Islam harus bebas dari campur tangan, walaupun sebagai kekuatan politik agama ini harus dimusnahkan. Oleh karena itu, pada akhir abad XIX dan awal abad XX, banyak haji Indonesia menempuh perjalanan melalui Singapura, di mana pihak Inggris tidak melarang mereka. Lagi pula, di sana tersedia tempat di kapal yang lebih banyak dan lebih murah. Orang-orang Indonesia sering kali menetap lama di Singapura berkenaan dengan perjalanan haji mereka.

Di Singapura terdapat suatu komunitas besar orang-orang Arab (kebanyakan orang Hadramaut) dan kaum muslim India yang lahir di sana. Kedua kelompok tersebut sering kali beribukan orang Melayu. Komunitas muslim Singapura itu mempunyai hubungan dengan Timur Tengah, banyak terlibat dalam perdagangan di seluruh pelosok kepulauan Indonesia, agama Islamnya tidak begitu dipengaruhi oleh tradisi-tradisi lokal yang telah memengaruhi Islam Melayu, dan benar-benar menyadari identitas keagamaannya karena bersaing secara langsung dan bergaul setiap hari dengan orang-orang Cina. Pada akhir abad XIX, orang-orang muslim Singapura mendirikan percetakan-percetakan litograf yang mengakibatkan membanjirnya buku-buku keagamaan dan surat-surat kabar yang mencerminkan ide-ide Islam modernis. Sebagian buku-buku dan surat-surat kabar tersebut dicetak dalam bahasa Melayu. Dipandang dari segi pembaharuan agama, Singapura jauh lebih berpengaruh di Indonesia daripada di Malaya, di mana lembaga-lembaga keagamaan konservatif yang didominasi sultan-sultan menolak ide-ide Islam modernis, dan ide-ide semacam itu kelihatannya tidak banyak mendapat tanggapan.

Orang-orang Minangkabau memainkan peranan penting dalam gerakan pembaharuan awal itu. Pada tahun 1906, surat kabar berbahasa Melayu *al-Imam*, "pemimpin agama", mulai terbit di Singapura dengan menyajikan analisis Islam modernis pertama yang benar-benar mendalam mengenai masalah-masalah sosial, agama, dan ekonomi. Di antara orang-orang muslim yang terlibat di dalam *al-Imam* adalah seorang ulama Minangkabau bernama Syekh Tahir bin Jalaluddin (Muhammad Tahir bin Jalaluddin al-

Azhari, 1869–1957), putra seorang syekh Naqsyabandiyyah asal Minangkabau yang terkenal. Tahir Jalaluddin pernah menetap di Mekah selama dua belas tahun, di mana dia tinggal bersama saudara sepupunya dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib (1852–1915). Syekh Ahmad Khatib menjadi imam mazhab Syafi'i di masjid Mekah (Masjid al-Haram) dan banyak pemimpin pembaharuan dari Indonesia menjadi muridnya di sana. Tentu saja, Ahmad Khatib membela mazhab Syafi'i, tetapi dia memperkenankan murid-muridnya membaca karya-karya kaum modernis. Tahir Jalaluddin meneruskan belajar di Kairo selama empat tahun, di mana dia dipengaruhi oleh ide-ide 'Abduh dan menjadi sahabat karib Rasyid Rida. Ahmad Khatib mendukung ide pembaharuan dan mencela paham sufi, yang sangat berpengaruh di Indonesia. Pada tahun 1906–8, ia menulis tiga risalah yang secara khusus mencela praktik-praktik tarekat Naqsyabandiyyah dengan alasan bahwa praktik-praktik itu adalah bidah. Kaum Islam modernis di Indonesia harus mencapai suatu pendapat mengenai sufisme: sebagian bersedia membiarkan paham tersebut sebagai cara hidup yang saleh, sebagian yang lain mencurigai paham itu sebagai praktik keislaman yang berlebihan, dan yang lain lagi memusuhi sepenuhnya sufisme karena menganggapnya sebagai tempat berlindungnya ilmu klenik.

Syekh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947) pulang dari Mekah ke Minangkabau pada tahun 1903 dan Haji Rasul (Haji Abdul Karim Amrullah, 1879-1945) pada tahun 1906. Keduanya adalah murid Ahmad Khatib, dan keduanya muslim modernis. Haji Rasul sangat terkenal karena penentangannya yang keras terhadap adat atau terhadap siapa saja yang menentang dirinya. Pada tahun 1909, sekolah modernis yang pertama, sekolah Adabiyah, dibuka di Padang. Tetapi pada tahun 1915, ketika sekolah itu menerima bantuan pemerintah dan seorang Belanda sebagai kepalanya, maka sekolah tersebut tersingkir dari gerakan pembaharuan agama. Sekolah Thawalib di Padangpanjang adalah lebih penting, ketika Haji Rasul dan lain-lainnya mengembangkannya menjadi model pembaharuan pendidikan modernis. Bahasa Arab mendapat tekanan supaya murid-murid dapat leluasa mempelajari sumber-sumber Islam. Sistem kelas bertingkat dibuka pada tahun 1916, dan meja tulis serta kurikulum yang lebih luas diperkenalkan pada tahun 1919. Buku-buku pelajaran dari Mesir

mulai digunakan dan mata pelajaran seperti ilmu bumi dan sejarah ditambahkan pada mata pelajaran agama. Pendidikan kaum wanita Islam dimulai pada tahun 1915 ketika Sekolah Diniyah dibuka di Padangpanjang. Pada tahun 1911, sebuah surat kabar dua-mingguan bernama *al-Munir*, "penerangan", jurnal Islam modernis yang pertama di Indonesia, mulai terbit di Padang (kemudian di Padangpanjang).

Gerakan Islam modernis di Minangkabau tersebut menimbulkan perlawanan. Sekelompok kaum bangsawan dan pejabat yang mendukung jenis kemajuan yang tampaknya akan dihasilkan oleh gaya pendidikan dan sosial Belanda mencurigai pengaruh para guru agama tersebut. Mereka dipimpin oleh Datuk Sutan Maharaja. Kelompok ini menginginkan diadakannya pembaharuan terhadap adat. Dengan begitu, mereka juga bertentangan dengan banyak pejabat generasi tua. Sutan Maharaja mendukung pendidikan kaum wanita, yang mencerminkan status wanita yang tinggi di dalam adat Minangkabau. Pada tahun 1909, ia mendirikan sekolah pertenunan yang pertama untuk kaum wanita di Padang; pada tahun 1911, ia menerbitkan sebuah surat kabar bernama *Soenting Melajoe*, "hiasan Melayu", salah satu terbitan pertama untuk kaum wanita di Indonesia.

Gerakan pembaharuan agama juga menyebar ke Jawa. Yang mengambil prakarsa-prakarsa pertama adalah komunitas Arab di Batavia, yang pada tahun 1905 mendirikan *Jam'iyyat Khair*, "perserikatan bagi kebaikan". Perserikatan ini membuka sebuah sekolah modern yang pelajarannya diberikan dalam bahasa Melayu. Pada tahun 1911, sekolah ini mengundang seorang guru Islam modernis dari Sudan bernama Syekh Ahmad Surkati (1872-1943). Surkati segera terlibat pertentangan dengan para majikannya, dan pada tahun 1915 dia membentuk *al-Irsyad (Jam'iyyat al-Ishlah wal-Irsyad*, "perserikatan bagi pembaharuan dan bimbingan"). Al-Irsyad mendirikan sekolah-sekolah campuran (pria dan wanita) yang pelajarannya disampaikan dalam bahasa Melayu, Arab, dan Belanda, sebagian besar di Jawa. Walaupun sebagian besar muridnya keturunan Arab, tetapi terdapat pula beberapa orang Indonesia asli yang belajar di situ.

Pada tahun 1911, kaum muslim Indonesia di Jawa Barat mengambil langkah-langkah pertama ke arah pembaharuan secara hati-hati. Para ustaz Suni membentuk Persyarikatan Ulama; tetapi

mereka menerima beberapa ide pembaharuan kaum modernis dan hanya sedikit berhubungan dengan kalangan pesantren gaya lama. Persyarikatan Ulama membuka sebuah sekolah (1916), mendirikan sebuah panti asuhan yang dikelola oleh cabang wanitanya, serta melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti percetakan, pertenunan, dan pertanian.

Organisasi Islam modernis yang paling penting di Indonesia berdiri di Yogyakarta pada tahun 1912. Kyai Haji Ahmad Dahlan (1868–1923) berasal dari elite agama kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1890, dia naik haji ke Mekah dan belajar kepada Ahmad Khatib dan yang lain-lain. Dia pulang dengan tekad bulat untuk memperbaharui Islam dan menentang usaha-usaha kristenisasi yang dilakukan oleh kaum misionaris Barat. Pada tahun 1909, dia masuk Budi Utomo dengan harapan dapat berkhotbah tentang pembaharuan di kalangan para anggotanya, tetapi para pendukungnya mendesaknya supaya mendirikan organisasi sendiri. Pada tahun 1912, dia mendirikan Muhammadiyah, "jalan Muhammad", di Yogyakarta. Muhammadiyah mencurahkan kegiatannya pada usaha-usaha pendidikan serta kesejahteraan dan pada program dakwah guna melawan agama Kristen dan takhyul-takhyul lokal. Pada tahun 1917, Dahlan membentuk seksi perempuan dengan nama Aisyiyah, menurut nama seorang istri Nabi, yang kelak akan memainkan peranan penting dalam modernisasi kehidupan perempuan Indonesia.

Pada mulanya, Muhammadiyah hanya berkembang secara lamban. Organisasi ini ditentang atau diabaikan oleh para pejabat, guru-guru Islam gaya lama di desa-desa, hierarki-hierarki keagamaan yang diakui pemerintah, dan oleh komunitas-komunitas orang saleh yang menolak ide-ide Islam modernis. Dalam rangka menjalankan upaya-upaya pemurniannya, organisasi ini mengecam banyak kebiasaan yang telah diyakini oleh orang-orang saleh Jawa selama berabad-abad sebagai Islam yang sebenarnya. Dengan demikian, pada masa-masa awalnya, Muhammadiyah mengundang banyak permusuhan dan kebencian dari komunitas agama di Jawa. Pada tahun 1925, dua tahun sesudah wafatnya Dahlan, Muhammadiyah hanya beranggotakan 4.000 orang, tetapi organisasi ini telah mendirikan 55 sekolah dengan 4.000 orang murid, dua balai pengobatan di Yogyakarta dan Surabaya, sebuah panti asuhan, dan sebuah rumah miskin. Organisasi ini diperke-

nalkan di Minangkabau oleh Haji Rasul pada tahun 1925. Begitu berhubungan dengan dunia Islam Minangkabau yang dinamis, organisasi ini berkembang dengan pesat. Pada tahun 1930, jumlah anggota organisasi ini sebanyak 24.000 orang, pada tahun 1935 menjadi 43.000 orang, dan pada tahun 1938 organisasi ini mengaku mempunyai anggota yang luar biasa banyaknya, 250.000 orang. Pada tahun 1938, organisasi ini telah menyebar di semua pulau utama di Indonesia, mengelola 834 mesjid dan langgar, 31 perpustakaan umum, dan 1.774 sekolah, serta memiliki 5.516 orang mubalig pria dan 2.114 orang mubalig wanita. Sampai batas-batas yang sedemikian jauh, sejarah Islam modernis di Indonesia sesudah tahun 1925 adalah sejarah Muhammadiyah.

Dua aliran pemikiran yang bertentangan telah muncul sebagai dasar bagi dilakukannya peremajaan secara nasional. Kini, muncul aliran pemikiran yang ketiga. Selain aliran kalangan atas yang mencari modernisasi secara Barat (dan setidak-tidaknya berpotensi anti-Islam) yang diwakili paling jelas oleh Budi Utomo dan aliran Islam modernis yang diwakili oleh Muhammadiyah, kini muncul ide-ide sosialis yang radikal. Pada tahun 1911, suatu partai politik yang bernama Indische Partij, "partai Hindia", didirikan oleh seorang Indo-Eropa yang radikal bernama E.F.E. Douwes Dekker (1879-1950, juga dikenal sebagai Setiabuddhi), seorang keluarga jauh E. Douwes Dekker (Multatuli). Partai ini mempermaklumkan suatu nasionalisme 'Hindia' dan menuntut kemerdekaan. Dua orang Jawa yang terkemuka, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat (kemudian disebut Ki Hadjar Dewantara, 1889-1959), bergabung dengan Douwes Dekker. Pemerintah tidak mau mengakui partai ini. Pada tahun 1913, ketiga pemimpin tersebut diasingkan ke negeri Belanda (Tjipto sampai tahun 1914, Douwes Dekker sampai tahun 1918, dan Suwardi sampai tahun 1919).

Pada tahun 1913, H.J.F.M. Sneevliet (1883-1942) tiba di Indonesia. Dia memulai kariernya sebagai penganut mistik Katolik tetapi kemudian beralih ke ide-ide sosial-demokrat yang revolusioner dan aktivisme serikat buruh. Dia kemudian bertindak sebagai agen Komintern di Cina dengan nama samaran G. Maring. Pada tahun 1914, dia mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), "ikatan sosial-demokrat Hindia", di Surabaya. Partai kecil beraliran kiri ini dengan cepat akan menjadi partai

komunis pertama di Asia yang berada di luar negeri Uni Soviet. Anggota ISDV hampir seluruhnya orang Belanda, tetapi organisasi ini ingin memperoleh basis di kalangan rakyat Indonesia. Pada tahun 1915-6, partai ini menjalin persekutuan dengan Insulinde, "kepulauan Hindia", sebuah partai yang didirikan pada tahun 1907 dan, setelah tahun 1913, menerima sebagian besar anggota Indische Partij yang berkebangsaan Indo-Eropa yang radikal. Anggota Insulinde berjumlah 6.000 orang, termasuk beberapa orang Jawa terkemuka, tetapi organisasi ini jelas bukanlah alat yang ideal untuk mendapatkan basis rakyat. Oleh karena itu, perhatian ISDV mulai beralih kepada Sarekat Islam, satu-satunya organisasi yang memiliki pengikut yang besar di kalangan rakyat Indonesia.

Perang Dunia I (1914–8) menandai dimulainya zaman kegiatan politik yang bergejolak di Indonesia. Pelayaran antara Indonesia dan Eropa terganggu oleh perang itu, komunikasi terhambat, anggaran belanja militer kolonial meningkat sedangkan anggaran belanja untuk kesejahteraan dikurangi, harga barang-barang naik dan kesejahteraan rakyat Indonesia merosot. Dengan terganggunya impor, maka berkembanglah beberapa industri lokal pengganti impor, yang bertumbangan ketika impor kembali normal pada saat berakhirnya perang. Di tengah-tengah zaman kacau ini, muncullah suatu masalah politik yang besar di mana partai-partai Indonesia yang baru memainkan peranan penting.

Masalah *Indië weerbaar* (pertahanan Hindia) mula-mula merupakan persoalan pertahanan, tetapi segera berkaitan erat dengan usul-usul bagi pembentukan Volksraad, "dewan rakyat". Gagasan pembentukan milisi paruh-waktu yang terdiri atas orang-orang Indonesia telah dipertimbangkan, dan ditolak oleh pemerintah pada tahun 1913-4. Akan tetapi, dengan pecahnya Perang Dunia I pada bulan Agustus 1914, gagasan tersebut dibicarakan lagi, karena milisi merupakan kekuatan pertahanan yang lebih murah daripada memperbesar pasukan profesional. Budi Utomo, yang mempunyai cabang-cabangnya di kalangan orang-orang Jawa yang berdinas pada tentara kolonial, bangkit dari tidurnya dan mulai mengampanyekan pembentukan milisi semacam itu. Kecaman-kecaman muncul bahwa Budi Utomo dengan demikian telah diatur oleh pemerintah. Sarekat Islam melontarkan pandangan bahwa rakyat Indonesia dapat diharapkan mempertahankan rezim penjajahan hanya apabila mereka diwakili dalam pemerintahan.

Pada tahun 1915, Budi Utomo juga mendukung pandangan ini. Dengan demikian, kampanye *Indië weerbaar* dengan cepat berubah menjadi isu perwakilan rakyat. Pada tahun 1916-7, suatu delegasi yang terdiri atas wakil-wakil Budi Utomo, SI, Regenten bond, dan organisasi-organisasi serupa dari keempat kerajaan Jawa berkunjung ke negeri Belanda. Mereka mengajukan petisi kepada Ratu Wilhelmina dan berkeliling negara itu guna memberikan ceramah-ceramah. Ketika parlemen Belanda bertindak menangani masalah-masalah itu, maka rancangan undang-undang bagi pembentukan milisi pribumi tidak disetujui, tetapi pada bulan Desember 1916 rancangan undang-undang bagi pembentukan Volksraad disetujui.

Partai-partai Indonesia kini bersiap-siap untuk pemilihan anggota Volksraad. Keterbatasan Budi Utomo segera terlihat. Organisasi ini ingin menjadikan daya tarik Islam sebagai bagian dari program partai dalam rangka menarik massa pengikutnya dan untuk memperluas ruang lingkup kegiatannya ke luar Jawa dan Madura. Akan tetapi, kekuatan anti-Islam dalam ide-ide Radjiman dan anggota-anggota lainnya mendapat kemenangan. Juga, tidak terdapat cukup dukungan untuk melepaskan Budi Utomo dari belenggu pemikirannya yang Jawa sentris. Budi Utomo pun mulai terpecah antara kelompok moderat dan kelompok konservatif. Karena Gubernur Jenderal J.P. Graaf (Pangeran) van Limburg Stirum (1916–21) tetap mendukung pembaharuan politik lebih lanjut, maka Budi Utomo agak cenderung untuk menjadi lebih konservatif daripada pemerintah kolonial.

Pengaruh kiri di dalam Sarekat Islam semakin bertambah besar karena ISDV berusaha memperoleh basis rakyat. Pada tahun 1914, seorang pemuda Jawa buruh kereta api yang bernama Semaun (1899–1971) menjadi anggota SI cabang Surabaya. Pada tahun 1915, dia pindah ke Semarang, di mana Sneevliet aktif dalam Serikat Buruh Kereta Api dan Trem (VSTP). Kini Semaun juga bergabung dengan ISDV. Jumlah anggota SI Semarang berkembang pesat mencapai 20.000 orang pada tahun 1917. Di bawah pengaruh Semaun, cabang ini mengambil garis antikapitalis yang kuat. Cabang ini menentang keikutsertaan SI dalam kampanye *Indië weerbaar*, menentang gagasan untuk duduk dalam Volksraad, dan dengan sengit menyerang kepemimpinan Central Sarekat Islam (CSI). Dalam kongres SI tahun 1917, kelompok

radikal tampak memperoleh dukungan yang sangat besar. Tjokroaminoto khawatir akan memulai pertikaian intern dengan mereka dan setuju melontarkan kecaman terhadap kapitalisme yang "berdosa"; dengan demikian, nyata-nyata mengecam modal asing dan Cina, tetapi bukan modal yang ada pada para haji Indonesia dan lain-lainnya. Abdul Muis (1890-1959), seorang Minangkabau yang pernah menjadi wakil SI di dalam delegasi *Indië weerbaar* ke negeri Belanda, melangkah sedemikian jauh ketika mengatakan bahwa apabila ternyata Volksraad gagal, SI akan memberontak.

SI kini terpecah menjadi beberapa kelompok, walaupun arti penting sepenuhnya kelompok-kelompok tersebut belum jelas. Kelompok yang beraliran kiri yang dipimpin oleh cabang Semarang berusaha keras mendapat kekuasaan. Di Jawa Barat, suatu cabang revolusioner rahasia yang diberi nama 'Afdeeling B' (Seksi B) atau 'Sarekat Islam B' didirikan oleh Sosrokardono dari CSI dan beberapa orang aktivis lainnya pada tahun 1917. Sementara itu, CSI mengharapkan dapat menjalankan kegiatan politik yang sah di dalam Volksraad. Keanggotaan rakyat yang sulit dikendalikan masih cenderung terhadap tindakan kekerasan. Akhirnya, sejak tahun 1915, muncul suatu kekuatan baru di dalam tubuh SI. Pada tahun itu, seorang mata-mata polisi asal Minangkabau bernama Haji Agus Salim (1884-1954), yang menghadiri suatu rapat SI, berbalik mendukung tujuan SI, dan menjadikan komitmen pada Pan-Islam dan modernisme sebagai dasar yang tepat untuk menjalankan kegiatan politik. Sebagai anak muda, Salim telah belajar di sekolah-sekolah kolonial Belanda dan, sesungguhnya, berharap pergi ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya. Akan tetapi, ia gagal memperoleh beasiswa yang diperlukan, meskipun ada dukungan dari Kartini. Alih-alih, ia malah mendapat pekerjaan pada kantor konsulat Belanda di Jedah (1906–11), di mana ia bertugas menangani urusan jemaah haji Indonesia—ia sendiri naik haji lima kali—dan tumbuh dekat dengan sepupunya dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib. Dari sana ia meraih kembali keyakinan agamanya yang telah pudar selama ia belajar di sekolah Belanda. Saat kembali ke Indonesia, Salim ditakdirkan menjadi salah seorang tokoh Islam terdepan dari generasinya.

Pada awal tahun 1918, hasil pemilihan anggota Volksraad diumumkan. Abdul Muis dari CSI dan seorang Minangkabau yang tadinya menjadi anggota Insulinde, Abdul Rivai, berhasil terpilih,

tetapi sebagian besar dari orang-orang Indonesia lainnya yang terpilih menjadi anggota adalah para bupati atau pejabat-pejabat lainnya. Gubernur Jenderal van Limburg Stirum tidak puas dengan hasil ini. Dia menggunakan hak penunjukannya untuk mengangkat, antara lain, Tjipto Mangunkusumo (yang sudah kembali dari pengasingan) dari Insulinde dan Tjokroaminoto dari SI dengan harapan dapat melibatkan lebih banyak kekuatan radikal dan membawa mereka pada pendekatan yang bersifat kerja sama. Orang-orang Eropa yang berhasil terpilih sebagai anggota lebih progresif daripada sebagian besar anggota orang Indonesia. Orang-orang Belanda yang menentang pembaharuan-pembaharuan Etis sebagian besar mengabaikan pemilihan tersebut. Dengan demikian, Nederlandsch Indische Vrijzinnige Bond, "persekutuan liberal Hindia Belanda", yang cenderung pada politik Etis bersama-sama dengan kaum sosialis Belanda (Sociaal Democratische Arbeiderspartij, "partai buruh sosial demokrat") dan orang-orang Indonesia yang lebih liberal menjadi mayoritas dari anggota-anggota yang terpilih. Kini ISDV mulai merasa cemas bahwa Volksraad mungkin akan terbukti berhasil, sehingga dengan demikian menjauhkan orang-orang Indonesia yang progresif dari aliran kiri yang ekstrem.

Pada bulan November 1918, gairah politik masa Perang Dunia I mencapai puncaknya ketika tampak bahwa revolosi sosial-demokrat di Jerman seolah-olah akan meluap ke negeri Belanda. Upaya tersebut mengalami kegagalan. Akan tetapi, ketika hasilnya yang pasti belum diketahui di Indonesia, van Limburg Stirum, yang barangkali sudah tahu bahwa kerajaan Belanda selamat dan semata-mata memanfaatkan kesempatan itu untuk mendukung pembaharuan lebih lanjut, memberikan 'janji-janji November'-nya yang menyetujui pengalihan wewenang yang lebih luas kepada Volksraad dan perbaikan-perbaikan sosial lainnya yang tidak terinci. Volksraad kelihatan semakin memberi harapan.

Akan tetapi, selama tahun 1919, pemerintah kolonial meninggalkan paham liberal, karena van Limburg Stirum pun mulai menyadari bahwa segala sesuatunya mulai tidak terkendalikan. Mula-mula dia berpaling kepada ISDV. Sejak Revolusi Rusia tahun 1917, ISDV telah menjadi badan komunis yang lebih nyata. Pada akhir tahun 1917, organisasi ini menghimpun sebanyak 3.000 orang serdadu dan kelasi ke dalam soviet-soviet (dewan-dewan),

terutama di kota pelabuhan Surabaya. Selama tahun 1918 dan 1919, pemerintah membubarkan dewan-dewan tersebut, mengasingkan Sneevliet dan menahan atau mengasingkan sebagian besar orang-orang Belanda lainnya yang menjadi pimpinan partai ini. Akan tetapi, ketika orang-orang Belanda yang radikal itu menghilang, ISDV dipimpin orang-orang Indonesia, yang dengan cepat memungkinkan partai ini pada akhirnya mendapatkan basis massanya. Insulinde adalah organisasi berikutnya yang terkena pukulan. Pada awal tahun 1919, berlangsung kekacauan-kekacauan pedesaan di Surakarta yang dipimpin oleh Haji Misbach (w. 1926), yang khotbahnya mengenai doktrin bahwa Islam dan komunisme adalah hal yang sama menjadikan dirinya terkenal sebagai 'haji merah'. Pemimpin-pemimpin Insulinde lainnya tampaknya juga terlibat, sehingga Misbach dan Douwes Dekker ditahan dan Tjipto Mangunkusumo diasingkan dari semua wilayah yang berbahasa Jawa. Berikutnya adalah giliran SI.

Pada bulan Mei 1919, seorang kontrolir Belanda terbunuh di Tolitoli (Sulawesi Utara) segera sesudah Abdul Muis dari CSI mengadakan perjalanan pidato kelilingnya di daerah itu. CSI dianggap bertanggung jawab dan Abdul Muis ditangkap. Selanjutnya, dengan terjadinya peristiwa penembakan di Garut (Jawa Barat) pada bulan Juni 1919, maka terbongkarlah rahasia adanya Seksi B. Sosrokardono dari CSI, bersama-sama beberapa orang Indonesia anggota ISDV, ditangkap. Tjokroaminoto sendiri ditangkap pada tahun 1921 karena dituduh memberikan sumpah palsu dalam pemeriksaan pengadilan terhadap Seksi B. Anggota SI yang moderat kini mulai mencemaskan nasib organisasi tersebut dan basis massanya mulai rontok karena rakyat pedesaan merasa takut bahwa kartu anggota SI hanya akan membawa mereka kepada kesulitan. Para pegawai priyayi Jawa menjadi lebih sengaja lagi menentang gerakan-gerakan rakyat, dan pihak Belanda memperluas organisasi-organisasi intelijen dan polisi mereka.

Lingkungan politik berbalik menentang radikalisme. Ironisnya, keadaan ini menempatkan ISDV dalam posisi untuk memimpin gerakan politik rakyat. ISDV kini berada di tangan Semaun dan seorang pemuda bangsawan Jawa yang bernama Darsono (l. 1897). Organisasi ini masih sangat kecil (jumlah anggotanya 269 orang pada tahun 1920), tetapi sekarang sebagian besar anggotanya adalah orang Indonesia. Pada bulan Mei 1920, organisasi

ini berganti nama menjadi Perserikatan Kommunist di India; pada tahun 1924, namanya berganti lagi menjadi Partai Komunis Indonesia. PKI lahir.

Propaganda PKI kini menunjukkan bahwa partai ini telah benar-benar mengindonesia. PKI kurang menekankan doktrin-doktrin teoritis Marx dan Lenin, melainkan lebih banyak berbicara dengan bahasa yang menarik bagi rakyat Indonesia, khususnya kaum abangan (kaum muslim nominal) Jawa. Masyarakat tanpa kelas dikemukakan sebagai penjelmaan kembali dari negara Majapahit yang diromantiskan, yang dipandang sebagai zaman persamaan derajat yang mulia sebelum datangnya bangsa Belanda dan, secara berarti, sebelum Islam. Pahlawan-pahlawan PKI adalah para pejuang dari Perang Jawa: Dipanagara, Kyai Maja, dan Sentot. Ramalan-ramalan yang bersifat mesianistis mengenai Ratu Adil juga dimanfaatkan sebagai daya tarik PKI. Dan ada suatu versi lagi dari kesemuanya ini, yaitu komunisme Islam. Antara pembebasannya dari penjara pada akhir tahun 1922 dan penangkapannya setahun kemudian, Haji Misbach menyebarkan komunisme Islam di wilayah Surakarta. Komunisme Islam juga tersebar di Minangkabau dan di Jawa Barat. Perlu dicatat bahwa walaupun murid-murid sekolah Islam modernis sering kali tertarik pada komunisme Islam, gerakan itu kebanyakan dipimpin oleh guru-guru sufi dan para tokoh lain dari bentuk-bentuk Islam yang lebih tradisional. Para pemimpin Islam modernis, dengan dedikasi mereka pada ortodoksi berdasarkan Alquran dan hadis secara ketat, merupakan penentang utama komunisme Islam.

Antara tahun 1918 dan 1921, serikat-serikat buruh Indonesia meraih sukses besar dalam meningkatkan kondisi dan upah anggota-anggotanya. Ini terutama berkat gabungan peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun tersebut berupa inflasi harga, kurangnya tenaga buruh trampil, dan munculnya organisasi buruh yang sukses dari partai-partai politik, terutama SI dan PKI. Kesuksesan serikat-serikat itu, tentu saja, mendorong orang untuk bergabung dengan mereka. Dengan masuknya anggota-anggota baru, serikat-serikat tersebut memainkan peranan yang penting dalam mempolitisasi para pekerja dan dalam memberi kontribusi terhadap pengembangan dan organisasi anti-penjajahan Indonesia. Pada bulan Desember 1919 muncul upaya untuk menciptakan suatu federasi dari serikat-serikat PKI dan SI, yang terdiri atas 22 serikat

dan 72.000 orang anggota. Semaun memimpin federasi ini. Akan tetapi, wakil ketuanya, pemimpin serikat kerja dari CSI, Surjopranoto, yang dijuluki 'raja mogok', segera menggugat kepemimpinan Semaun. Federasi pun lumpuh akibat pertikaian internal tersebut. Sementara itu, para majikan menjadi lebih terorganisir dan efektif dalam melawan pemogokan, pemerintah lebih menekan serikat-serikat kerja Indonesia, dan kondisi ekonomi berbalik melawan serikat-serikat tersebut ketika jumlah buruh trampil yang tadinya kurang berubah menjadi berlebihan pada tahun 1921. Jadi, konteks di mana serikat-serikat kerja tadi berusaha untuk beroperasi sedang menjadi kurang kondusif.

Kini, SI dan PKI terlibat pertikaian terbuka dan tak terdamaikan. Pada bulan November 1920, surat kabar PKI yang berbahasa Belanda, *Het vrije woord,* "kata yang bebas", menerbitkan tesis-tesis Lenin tentang masalah-masalah nasional dan penjajahan, yang berisi kecaman-kecaman terhadap Pan-Islam dan Pan-Asianisme. SI kini makin lama makin dipengaruhi oleh Haji Agus Salim dan orang-orang lain yang mendukung Pan-Islam. Akibatnya terjadi pertikaian terbuka yang sengit, dan tidak menjadi soal apakah langkah-langkah pemutarbalikan yang dilancarkan PKI tidak dapat mengelakkan tuduhan bahwa organisasinya adalah anti-Islam. Persaingan-persaingan sengit yang bersifat pribadi yang memecah gerakan politik Indonesia kini telah mencapai definisi ideologis. Dengan munculnya pertikaian terbuka itu secara berapi-api dalam pertemuan-pertemuan dan surat-surat kabar, maka basis massa yang diklaim SI lebih cenderung lagi untuk keluar sama sekali dari organisasi-organisasi politik.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa orang pemimpin untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian tersebut mengalami kegagalan. 'Disiplin partai' disetujui dalam kongres SI pada bulan Oktober 1921. Dengan adanya 'disiplin partai', maka seorang anggota SI tidak mungkin lagi menjadi anggota partai lain (walaupun ada beberapa pengecualian, misalnya Muhammadiyah). Anggota-anggota PKI kini dikeluarkan dari CSI, tetapi pertikaian tetap harus diselesaikan di setiap cabang SI. Sebagai akibatnya, SI terpecah dalam cabang-cabang 'SI Merah' dan 'SI Putih'. Semaun meninggalkan Indonesia menuju Uni Soviet, sedangkan Tjokroaminoto kini masuk penjara. Dengan tidak adanya kedua tokoh itu, seorang Minangkabau yang bernama Tan Malaka (1897–

1949) melakukan beberapa usaha untuk memulihkan kerja sama PKI–SI, namun sia-sia. Pada tahun 1922, meletus pemogokan besar-besaran pertama di dalam serikat buruh pegadaian yang dipimpin oleh Abdul Muis dari CSI. PKI merasa wajib menyatakan dukungannya. Pemogokan tersebut dapat dipatahkan oleh pemerintah hanya dengan memecat para pegawai yang mogok, sedangkan Muis dan Tan Malaka diasingkan.

Pada bulan Mei 1922, Semaun kembali memasuki kancah yang nyata-nyata merupakan malapetaka. Dia segera berusaha untuk mendirikan kembali serikat-serikat kerja PKI serta menegakkan kembali pengaruh PKI pada cabang-cabang dan sekolah-sekolah SI. Tjokroaminoto dibebaskan dari penjara pada bulan Mei 1922 (dia secara resmi dibebaskan dari tuduhan melakukan sumpah palsu pada bulan Agustus); dia telah bertekad untuk melepaskan diri selama-lamanya dari PKI, yang antara lain telah menyebutnya sebagai seorang pemabuk yang tidak jujur. Dalam kongres SI pada bulan Februari 1923, dia mendirikan Partai Sarekat Islam yang memiliki disiplin partai. Ia bertekad akan mendirikan cabang partai ini di mana saja yang ada cabang 'SI Merah'. Cabang-cabang 'SI Merah' kini diberi nama baru Sarekat Rakyat, dan pertikaian pun terus berlanjut.

Pada pertengahan tahun 1923, Semaun dibuang ke Eropa setelah pemerintah berhasil menumpas pemogokan yang dilancarkan oleh serikat buruh kereta api dan trem (VSTP) yang dipimpinnya. Darsono menjadi pimpinan PKI. Pengaruh Agus Salim dalam CSI kini mendorong organisasi ini untuk menempuh kebijakan nonkooperasi (organisasi ini menarik mundur anggota-anggotanya yang duduk di dalam Volksraad), yang disebut 'hijrah', untuk mengenang hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Medinah pada tahun 622 M. CSI kini menjauhkan diri dari setiap aksi politik yang penting. Ketika CSI semakin lama menjadi semakin tidak aktif, maka PKI mulai melancarkan kampanyenya yang terakhir untuk mengambil alih kepemimpinan atas pergerakan rakyat yang nyaris padam. Kini, kancah utama perjuangan berada di tangan cabang-cabang SI pedesaan yang tersisa yang sukar dikendalikan.

Ketika pergerakan politik terpecah-belah, maka pertikaian agama dan budaya pun menimbulkan perpecahan-perpecahan yang semakin mendalam. Pada tahun 1916, SI sudah terpecah

di Minangkabau karena adanya perbedaan doktrin. Kaum Islam modernis menyebut diri mereka 'SI kartu putih', sedangkan kelompok-kelompok agama yang tradisional yang dipimpin oleh kaum sufi disebut 'SI kartu merah'. Sementara itu, kelompok dari pemimpin-pemimpin adat yang progresif yang berada di bawah pimpinan Datuk Sutan Maharadja rujuk kembali dengan kalangan bangsawan yang berpikiran kolot. Pada tahun 1916, mereka mendirikan Sarekat Adat Alam Minangkabau; organisasi ini menjadi partai politik propemerintah yang menentang para pemimpin agama reformis. Pada tahun 1918, para pemimpin agama tradisional dan kaum adat semakin mempererat kerja sama dalam menentang Islam modernis. Pada tahun 1919, Sumatera Thawalib (Organisasi Umum Pelajar Sumatera) didirikan untuk para pelajar di sekolah-sekolah Islam modernis dan, pada tahun 1922, mereka sudah banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Sampai saat ditangkapnya pada bulan November 1923, Haji Datuk Batuah (l. 1895) menyebarkan komunisme Islam di kalangan pelajar, yang menghadapi perlawanan sengit dari Haji Rasul dan guru-guru Islam modernis. Seperti yang telah disebutkan di atas, pada tahun 1925, Haji Rasul mengembangkan Muhammadiyah ke Minangkabau, setelah tampaknya tidak mempunyai harapan lagi dengan Sumatera Thawalib.

Nasionalisme yang terpusat pada Jawa—bukan Indonesia—masih penting dalam masa ini. Para nasionalis Jawa secara umum tidak menerima Islam yang lebih reformis dan cenderung melihat masa Majapahit pra-Islam sebagai zaman keemasan. Hasil dari pekerjaan arkeologi yang didanai pemerintah, termasuk pembangunan kembali candi-candi pra-Islam yang sangat indah, dan penerbitan teks-teks Jawa Kuno oleh para sarjana filologi telah membuat Jawa pra-Islam dikenal baik, menggambarkannya sebagai titik tinggi peradaban Jawa 'klasik', dan karena itu merangsang bangkitnya sentimen nasionalis Jawa. Pada tahun 1917, Comité voor het Javaansch Nationalisme, "komite untuk nasionalisme Jawa", didirikan; komite ini aktif pada tahun 1918 ketika ia mulai menerbitkan bulanan *Wederopbouw*, "rekonstruksi". Kekuatan penuntun yang pokok di balik gerakan ini adalah Kerajaan Mangkunegaran, khususnya Mangkunegara VII (m. 1916–44). Nasionalisme Jawa dan pembaharuan Islam berbenturan ketika muncul sebuah tulisan dalam surat kabar di Surakarta, *Djawi Hisworo*,

"Jawa raja", pada bulan Januari 1918 yang memfitnah Nabi Muhammad sebagai pemabuk dan pemadat. Kaum muslim menjadi sangat marah; pada bulan Februari, mereka membentuk suatu komite yang dinamakan Tentara Kangjeng Nabi Muhammad. Comité voor het Javaansch Nationalisme mengeluarkan suatu pamflet yang mengutuk fanatisme agama. Meskipun orang-orang ini juga mencela gaya artikel *Djawi Hisworo* tersebut, namun Islam seperti yang kini diajarkan oleh kaum pembaharu dianggap mereka sebagai impor asing yang tidak disukai.

Reaksi yang lebih positif dan penting terhadap arus pasang pembaharuan Islam muncul dari mantan anggota radikal Indische Partij, Suwardi Surjaningrat. Dia keturunan keluarga Pakualaman dari Yogyakarta dan seorang saudara pemimpin serikat kerja CSI, Surjopranoto. Selama masa pengasingannya di negeri Belanda (1913–9), dia mencurahkan perhatiannya pada gerakan-gerakan pendidikan yang baru. Setelah pulang dari pengasingan, dia bergabung dengan suatu kelompok mistik Jawa di Yogyakarta, kota yang menjadi pusat Muhammadiyah. Kelompok mistik ini menganggap perlu diciptakannya suatu sistem pendidikan yang benar-benar bersifat pribumi (yakni yang nonpemerintah dan non-Islam). Oleh karena itu, pada tahun 1922, Suwardi, yang kini memakai nama baru Ki Hadjar Dewantara, mendirikan sekolah Taman Siswa yang pertama di Yogyakarta, yang memadukan pendidikan gaya Eropa yang modern dengan seni-seni Jawa tradisional. Pada tahun 1924, sekolahnya menerima murid sampai tingkat MULO dan sekolah guru. Akan tetapi, Taman Siswa tidak menerapkan kurikulum pemerintah dan, oleh karenanya, tidak mendapat bantuan pemerintah (memang tidak mau menerimanya, karena mengutamakan kebebasan). Dari sini muncul hasil logis berupa perasaan di kalangan banyak orang Jawa bahwa Islam, dan tentunya Islam modernis, bukanlah dasar yang tepat bagi kebangkitan nasional. Taman Siswa dengan cepat tersebar ke luar Yogyakarta. Pada tahun 1932, organisasi ini telah mempunyai 166 sekolah dan 11.000 murid.

Sementara itu, Islam modernis mencapai puncak-puncak baru. Pada tahun 1923, sekelompok pedagang mendirikan Persatuan Islam di Bandung. Pada tahun 1924, seorang Tamil kelahiran Singapura bernama A. Hassan (l. 1887) yang beribukan orang Jawa bergabung dengan organisasi tersebut. Pembelaannya yang

gigih terhadap doktrin-doktrin Islam modernis, kecamannya terhadap segala sesuatu yang berbau takhyul (yaitu banyak dari apa yang diterima sebagai Islam yang sebenarnya oleh kaum muslim lokal), perlawanannya yang berapi-api terhadap nasionalisme dengan alasan bahwa nasionalisme telah memisahkan kaum muslim di satu daerah dari daerah lainnya, kesemuanya itu membenarkan nama panggilan organisasi tersebut, yaitu 'Persis' (berdasarkan kata Belanda *precies*, tepat). Hal ini mengakibatkan keluarnya banyak anggota yang lebih moderat dari kelompok ini; pada tahun 1926, mereka mendirikan organisasi sendiri yang bernama Permufakatan Islam.

Komunitas Islam yang berpegang teguh pada agamanya di Indonesia kini juga mengalami perpecahan seperti halnya dengan gerakan politik. Dijalankannya kebijakan hijrah yang nonkooperatif oleh SI yang sedang mengalami kemunduran malah menyeret organisasi ini ke dalam konflik dengan organisasi yang sedang berkembang tapi terutama bersifat nonpolitis, Muhammadiyah, yang menerima bantuan dari pemerintah untuk sekolah-sekolahnya. Pada tahun 1929, SI akhirnya menerapkan disiplin partai terhadap Muhammadiyah sehingga mendorong para anggotanya untuk keluar. Akan tetapi, reaksi yang paling besar muncul dari dalam lingkungan kaum muslim ortodoks yang bermazhab Syafi'i yang merasa keberatan terhadap usaha-usaha pemurnian kaum modernis dan penolakan mereka terhadap kewenangan keempat mazhab-hukum Sunni. Pertikaian berlangsung sangat sengit, malah masing-masing pihak melontarkan tuduhan bahwa pihak lainnya adalah kafir. Suatu krisis di Timur Tengah akhirnya mengakibatkan terjadinya perpecahan terbuka antara orang-orang Indonesia penganut Islam tradisional dan penganut Islam modernis.

Pada tahun 1924, Turki menghapuskan jabatan khalifah, pemimpin agama semua kaum muslim, yang telah diklaim oleh sultan-sultan Usmani sebagai haknya selama sekitar enam dasawarsa. Mesir bermaksud menyelenggarakan suatu konferensi Islam internasional guna membahas masalah kekhalifahan tersebut. Akan tetapi, terjadi kekacauan lagi ketika, pada tahun 1924, Ibn Sa'ud merebut Mekah. Ia membawa serta ide-ide pemurnian Wahhabi dan mengklaim dirinya sebagai khalifah. Dia pun mengundang seluruh umat Islam ke dalam suatu konferensi kekhalifahan. Selama tahun 1924-6, kaum muslim Indonesia membentuk

komite-komite yang akan menghadiri dua konferensi tersebut, tetapi wakil-wakilnya sebagian besar adalah modernis, dan Tjokroaminoto tampil menonjol.

Para ulama Syafi'i di Jawa sudah cukup makan garam. Mereka membenci modernisme yang mereka samakan dengan Wahhabisme (suatu gerakan pemurnian yang hanya mengakui kewenangan mazhab Hanbali). Mereka meremehkan Tjokroaminoto, dan mereka merasa takut bahwa kepentingan-kepentingan mazhab Syafi'i akan diabaikan di Mekah dan Kairo, sebagaimana mereka telah dikecam di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1926, Kyai Haji Wahab Chasbullah (± 1883/4–1971), dengan dukungan dan restu dari kyai yang paling dihormati di Jawa Timur, Kyai Haji Hasjim Asjari (1871–1947), mendirikan Nahdlatul Ulama, "kebangkitan para ulama", (NU) untuk membela kepentingan kaum muslim tradisional. Para kyai tradisional pedesaan lainnya di Jawa Timur bergabung dengan NU; para pemimpinnya terutama adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Hasjim Asjari. NU berkembang di daerah-daerah lain, tetapi Jawa Timur tetap menjadi pusatnya. Organisasi ini mendukung kemajuan sekolah-sekolah Islam tradisional, pemeliharaan kaum fakir miskin, dan usaha-usaha ekonomi. Pada tahun 1942, organisasi ini mempunyai 120 cabang di Jawa dan Kalimantan Selatan, yang sebagian besar anggotanya adalah pedagang.

Pemerintah sekarang berusaha melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang semakin berkembang, yang dianggapnya sebagai ancaman yang potensial terhadap rezim kolonial. Pada tahun 1905, pemerintah mempermaklumkan suatu *goeroe ordonnantie,* "peraturan guru", untuk Jawa, yang menyatakan bahwa sebelum pelajaran agama dapat diberikan, harus ada izin tertulis dari pihak penguasa dan harus ada daftar muridnya. Banyak pesantren yang guru-gurunya tidak mengetahui abjad Barat, melainkan hanya tulisan pribumi dan Arab, serta yang mempunyai populasi murid yang mengambang, tidak dapat memenuhi persyaratan itu. Akan tetapi, pada masa-masa sebelum dimulainya kerusuhan agama dan politik, tidak ada satu pun protes yang terorganisasikan. *Goeroe ordonnantie* tampaknya hanya menimbulkan dampak yang terbatas. Pada tahun 1925 dikeluarkan *goeroe ordonnantie* yang baru. Kali ini peraturan tersebut diberlakukan untuk seluruh Indonesia dan dalam beberapa hal

bersifat lebih lunak: yang diminta hanyalah pemberitahuan tertulis tentang tujuan pemberian pelajaran agama, tetapi daftar murid dan rincian-rincian kurikulum harus diajukan menurut formulir-formulir standar. Di Minangkabau, protes terhadap campur tangan dalam masalah-masalah agama kini menjadi begitu hebatnya sehingga Gubernur Jenderal memutuskan akan lebih bijaksana untuk menangguhkan pelaksanaan *goeroe ordonnantie* tersebut di sana. Baik di Minangkabau maupun di Jawa, peraturan yang baru itu berdampak meningkatkan kegiatan politik dan sentimen anti-pemerintah di kalangan kaum muslim yang taat.

Dengan meningkatnya rasa permusuhan di semua pihak, maka partai-partai politik Indonesia mendekati malapetaka. Persaingan merebut pengikut penduduk desa antara cabang-cabang SI dan cabang-cabang Sarekat Rakyat telah menyeret PKI ke dalam suatu lingkungan yang keras dan anarkis. Pimpinan PKI mulai meragukan cita-cita, ideologi, atau propagandanya ketika menemukan bahwa jumlah pengikutnya yang nonproletar semakin bertambah banyak. Perpecahan di dalam tubuh SI terus berlanjut ketika Agus Salim dan pemimpin-pemimpin Pan-Islam lainnya menjadi semakin berpengaruh. Sosrokardono (yang dibebaskan dari penjara pada tahun 1923) memutuskan hubungan dengan SI dan bergabung dengan PKI pada tahun 1924. Dua orang Jawa lainnya yang juga terlibat dalam perkara Seksi B, Alimin Prawirodirdjo (1889–1964) dan Musso (1897–1948), yang keduanya pernah menjadi anggota ISDV namun setia kepada Tjokroaminoto dalam pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan terhadap kasus Seksi B, bergabung dengan PKI ketika mereka dibebaskan. Surjopranoto juga condong ke pihak komunis.

Tindak kekerasan di wilayah pedalaman Jawa semakin meningkat pada awal tahun 1924, ketika bermunculan kelompok-kelompok yang menamakan diri 'sarekat hijau', terutama di Priangan. Kelompok-kelompok tersebut merupakan gerombolan-gerombolan penjahat, para anggota polisi, dan para kyai yang mendapat dukungan pemerintah Belanda dan pejabat-pejabat priyayi. Pada awal tahun 1925, sekitar 20.000 orang anggotanya menyerang rapat-rapat PKI dan SI serta mengancam para anggota mereka. Pengawasan pemerintah semakin diperketat, dan pimpinan PKI yang tersisa sering ditahan.

PKI akhirnya tergelincir dalam pemberontakan ketika organisasi ini tidak dapat memutuskan apakah harus membubarkan Sarekat Rakyat dalam rangka mempertahankan sifat proletarnya ataukah tidak. Pada bulan Desember 1924 diputuskan untuk bersiap-siap mengadakan pemberontakan. Pimpinan PKI di Jawa dikecam oleh Komintern dan oleh para pemimpinnya sendiri yang berada di pengasingan, terutama Semaun dan Tan Malaka, tetapi partai ini tetap tegar. Suatu usaha untuk menggerakkan gelombang pemogokan besar-besaran pada tahun 1925 merupakan suatu malapetaka. Sesudah itu, PKI nyaris terdesak untuk bergerak di bawah tanah ketika polisi membubarkan rapat-rapatnya dan menangkap oknum-oknum pimpinannya. Pada bulan September 1925, Darsono dan banyak pemimpin lainnya ditangkap; Darsono diperbolehkan pergi ke Uni Soviet dengan biaya sendiri pada tahun berikutnya. Alimin lari ke Singapura di mana dia bergabung dengan Tan Malaka. Dengan semakin memuncaknya kekacauan, maka PKI tampil dengan serangkaian pameran gaya lokal yang aneh, yang di antaranya tidak banyak yang berkaitan dengan komunisme teoritis. Di Banten, partai ini menjadi Islam yang berlebih-lebihan. Ketika partai ini semakin bertambah menarik bagi unsur-unsur masyarakat pedesaan yang menyukai kekacauan, PKI berkembang pesat di Sumatera dan Jawa, tanpa koordinasi pusat yang kuat.

Pada bulan Desember 1925, para pemimpin PKI yang masih tersisa memutuskan untuk melancarkan pemberontakan. Pemerintah berusaha menangkap sebagian besar pimpinan pusatnya pada bulan Januari 1926, tetapi banyak yang berhasil meloloskan diri. Satu-satunya pemimpin yang terkenal yang masih tinggal adalah Musso, yang lari ke Singapura. Dengan terus bertikainya para pemimpinnya di pengasingan dengan pengganti-pengganti mereka di Jawa mengenai tujuan yang sebenarnya, maka PKI semakin terpecah-belah. Pihak polisi telah berhasil menembus jalur-jalur hubungannya yang kacau dan, sebelum pemberontakan sempat berkobar, pada bulan November 1926 banyak pimpinan cabangnya berhasil ditangkap, termasuk cabang-cabang di sepanjang pesisir utara Jawa di mana dorongan untuk memberontak adalah yang paling kuat. Ketika saatnya tiba, cabang-cabang tersebut tidak berbuat apa-apa. Pemberontakan PKI meletus di Banten, Batavia, dan Priangan pada malam hari, 12 November 1926. Di

Batavia, pemberontakan dapat ditumpas pada hari berikutnya, sedangkan di seluruh Banten dan Priangan pada bulan Desember. Seorang Eropa tewas. Setelah pemberontakan di Jawa benar-benar ditumpas, meletus pemberontakan di Sumatera pada tanggal 1 Januari 1927. Pertempuran di sini lebih berat, tetapi pemberontakan itu dapat dipadamkan pada tanggal 4 Januari. Seorang Eropa lainnya terbunuh oleh kaum pemberontak.

PKI sudah mati, dan tidak bangkit kembali selama hampir dua puluh tahun. Sekitar 13.000 orang ditangkap; beberapa orang ditembak. Kira-kira 4.500 orang dijebloskan ke dalam penjara, dan 1.308 orang dikirim ke kamp penjara yang terkenal mengerikan di Boven Digul, Irian, yang khusus dibangun pada tahun 1927 untuk mengurung mereka. Dengan hancurnya PKI maka selama berlangsungnya zaman penjajahan, berakhir pula dua hal lainnya. Hingga Perang Dunia II, rakyat pedesaan tidak pernah lagi memainkan peranan aktif dalam pergolakan politik. Dan pihak Belanda juga tidak pernah lagi bersifat toleran terhadap gerakan-gerakan anti-penjajahan yang radikal untuk waktu yang lama. Pandangan-pandangan yang konservatif di kalangan penjajah Belanda sekarang sebagian besar menang mutlak.

Tahapan pertama kebangkitan nasional berakhir ketika goncangan yang ditimbulkan oleh pemberontakan PKI dan kegagalan totalnya tersebar di seluruh Indonesia. Kehidupan rakyat Indonesia, khususnya di Jawa dan Minangkabau, benar-benar telah berubah. Meskipun demikian, masih tetap belum jelas apakah kehidupan tersebut maju ataukah tidak. Telah tampak adanya beberapa pola yang penting, tetapi pola-pola itu hanya meningkatkan rasa perpecahan di kalangan rakyat Indonesia. Sebagai pengganti pengertian yang samar-samar tentang identitas Islam yang dirasakan bersama, yang kini dipersoalkan adalah muslim macam apa seseorang itu atau, sesungguhnya, apakah seseorang ingin menjadi muslim sepenuhnya ataukah tidak. Sebagai pengganti rasa tidak puas yang umum terhadap kekuasaan Belanda, yang menjadi persoalan kini adalah jenis doktrin anti-penjajahan yang bagaimana yang dianut seseorang atau, sesungguhnya, apakah kepentingan seseorang benar-benar terlayani oleh rezim kolonial ataukah tidak. Sebagai pengganti keyakinan umum bahwa rakyat Indonesia memiliki sesuatu yang sama, identitas-identitas daerah bahkan menjadi semakin mencolok karena bermunculan-

nya organisasi-organisasi yang didasarkan pada suku. Sebagai pengganti anggapan bahwa berbagai kelas di setiap wilayah merupakan semacam saudara, elite-elite birokrasi dan warga mereka diperingatkan secara jelas akan kepentingan-kepentingan yang memisahkan mereka.

Bagaimanapun juga, ada tanda-tanda yang lebih memberi harapan. Generasi politisi Indonesia berikutnya akan melibatkan beberapa orang yang lebih realistis; Islam sedang menjalani pembaharuan yang sebenarnya, dan sifat musuh lebih terang dipahami. Nanti, para pemimpin Indonesia akhirnya akan menyadari adanya hal-hal yang mempersatukan mereka, dan bahwa hal-hal ini dapat dianggap lebih penting daripada masalah-masalah yang memecah-belah mereka, setidak-tidaknya sebagai suatu jalan keluar sementara. Sebagai akibat dari penemuan ini, nasionalisme yang sungguh-sungguh segera lahir. Hal ini menjadi suatu langkah baru, karena di kalangan organisasi-organisasi penting yang dibahas di dalam bab ini, pengaruh dari pembaharuan agama, dari Pan-Islam, dari ide-ide Marxis internasional, atau dari identitas-identitas regional dan komunal adalah sedemikian rupa sehingga tak satu pun yang benar-benar nasionalis. Akan tetapi, nanti beberapa pemimpin akan segera mulai berpikir tentang seluruh rakyat pribumi Indonesia sebagai pengikut-pengikut mereka dan sebuah negara nasional Indonesia sebagai tujuan mereka. Terhadap hal ini, setidak-tidaknya, banyak yang akhirnya akan dapat menyepakati.[]

Bab 16 ....

Represi dan Krisis Ekonomi, 1927–1942

ANTARA TAHUN 1927 dan runtuhnya negara jajahan Belanda oleh Jepang pada tahun 1942, kebangkitan nasional Indonesia mulai bergaya kurang semarak. Dalam masalah politik, gerakan anti-penjajahan melanjutkan langkah-langkah yang tidak menghasilkan apa-apa. Rezim Belanda memasuki tahapan yang paling menindas dan paling konservatif dalam sejarahnya pada abad XX. Rakyat daerah pedesaan tidak lagi memainkan peranan politik yang aktif karena dikecewakan oleh pengalaman mereka dengan SI dan PKI pada tahun-tahun sebelumnya dan juga karena, mulai tahun 1930 dan seterusnya, mereka lebih disibukkan dengan usaha untuk mengatasi masa-masa sulit yang ditimbulkan oleh Depresi.

Akan tetapi, ada beberapa aspek masa itu yang menyiapkan panggung peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah tahun 1942. Pertama, semua harapan bagi terjalinnya kerja sama dengan Belanda benar-benar sudah hancur, sehingga satu-satunya taktik yang dimungkinkan untuk masa mendatang hanyalah perlawanan terhadap Belanda. Kedua, perpecahan-perpecahan yang mendalam di kalangan elite Indonesia yang sangat kecil jumlahnya umumnya tidak mengalahkan kesepahaman bahwa tujuan utama upaya politik adalah pembentukan negara Indonesia yang otonom atau merdeka; dengan demikian, nasionalisme menempati posisi ideologis yang paling berpengaruh. Ketiga, demi kepentingan persatuan yang maksimal di antara kelompok-kelompok budaya, agama, dan ideologi di Indonesia, maka ide nasionalis ini menolak naluri-naluri Pan-Islam dan pembaharuan dari para pemimpin Islam

perkotaan, dengan mengambil suatu posisi yang secara konvensional disebut 'sekuler' tetapi yang dalam praktik sering dilihat sebagai anti-Islam oleh para pemimpin Islam; dengan demikian, Islam didesak pada posisi politik yang terkucil yang, dengan perkecualian-perkecualian yang jarang terjadi, ditempatinya sampai akhir abad XX. Keempat, adanya kesadaran di antara para pemimpin agama bahwa mereka menghadapi banyak tantangan yang sama dan mempunyai suatu komitmen yang sama pada agama mereka mengurangi pertentangan-pertentangan sengit antara kaum muslim modernis dan tradisional serta membawa kedua kelompok tersebut lebih dekat satu sama lain. Yang terakhir, tokoh-tokoh yang muncul sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia pada masa itu sangat penting karena, betapapun ketidakberhasilan mereka saat itu, mereka ditakdirkan menjadi generasi pertama dalam sejarah Indonesia untuk memimpin seluruh kepulauan ini sebagai bangsa yang bersatu dan merdeka.

Di antara pemimpin-pemimpin baru yang tampil sesudah hancurnya PKI, maka perhatian utama tertuju pada orang yang akhirnya menjadi presiden pertama Indonesia merdeka. Sukarno (1901–70) adalah putra seorang Jawa yang bekerja sebagai guru pada sekolah pemerintah dengan istrinya yang dari Bali. Ayahnya berasal dari lingkungan muslim nominal (abangan) Jawa dan seorang teosof. Setelah menyelesaikan pelajarannya di sekolah ayahnya di Mojokerto (Jawa Timur), Sukarno memasuki sistem sekolah Eropa. Ia menyelesaikan Sekolah Rendah Eropa di kota tersebut pada tahun 1916. Kemudian dia dikirim ke HBS di Surabaya, di mana dia tinggal di rumah seorang sahabat ayahnya, Tjokroaminoto dari SI.

Di Surabaya, Sukarno berkenalan dengan banyak pemimpin politik awal, antara lain Tjokroaminoto sendiri, Agus Salim, Sneevliet, Semaun, Musso, Alimin, dan Ki Hadjar Dewantara. Dia mulai banyak membaca, mempelajari sejarah Eropa dan Amerika, dan menyerap banyak ide baru. Kebenciannya terhadap diskriminasi kecil-kecilan yang dialaminya di HBS, segala sesuatu yang didengarnya dari pemimpin-pemimpin politik, serta kegiatan membaca dan belajarnya, semuanya mulai menggerakkannya ke arah sikap politik anti-penjajahan. Pada tahun 1918, dia menjadi anggota gerakan pemuda Jong Java, mulai menulis untuk surat kabar SI, *Oetoesan Hindia*, dan mulai berbicara secara mengesankan

dalam rapat-rapat SI. Pada tahun 1920 atau 1921, dia memperkuat statusnya sebagai anak didik Tjokroaminoto dengan memperistri putri Tjokroaminoto yang berusia lima belas tahun secara kawin gantung, suatu bentuk ikatan perkawinan yang pelaksanaan pernikahannya ditunda, sering kali karena masih terlalu mudanya usia salah satu atau kedua pasangan.

Pada tahun 1921, Sukarno tamat HBS dan melanjutkan ke Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang baru saja dibuka. Ketika Tjokroaminoto ditangkap karena dituduh telah memberikan sumpah palsu dalam pemeriksaan pengadilan Seksi B pada bulan Agustus 1921, Sukarno meninggalkan kuliahnya dan kembali untuk bekerja sebagai pegawai perusahaan kereta api di Surabaya dalam rangka menopang penghidupan keluarga Tjokroaminoto. Ketika Tjokroaminoto dibebaskan pada tahun 1922, Sukarno kembali ke Bandung. Akan tetapi, pengaruh-pengaruh baru yang ia dapatkan di Bandung mulai melemahkan hubungannya dengan Tjokroaminoto. Istri pemilik rumah pondokannya yang baru, Inggit Garnasih, mulai memancarkan daya tarik yang kuat terhadap dirinya. Pada tahun 1922, dia menceraikan putri Tjokroaminoto dan tahun berikutnya dia menikah dengan Inggit, sehingga terputuslah hubungan pribadinya dengan Tjokroaminoto. Bandung juga menjadi pusat berbagai ide baru yang menyebabkan semakin canggihnya pandangan Sukarno. Di sini, Islam modernis mencapai bentuknya yang paling ekstrem dalam Persatuan Islam. PKI juga aktif di sini.

Yang terpenting, di Bandung Sukarno bertemu dan begitu terkesan dengan Douwes Dekker dan terutama Tjipto Mangunkusumo, serta semakin bertambah dekat dengan Ki Hadjar Dewantara. Sebelum diasingkan pada tahun 1913, ketiga orang itu telah memimpin Indische Partij yang radikal, yang sebagian besar anggotanya adalah orang-orang Indo-Eropa dan merupakan satu-satunya partai yang lebih banyak berpikir dalam kerangka nasionalisme Indonesia daripada dalam kerangka Islam, Marxisme, atau ukuran-ukuran suku bangsa yang sempit. Kini, ketiga orang itu telah kembali dari pembuangan. Pengaruh mereka berulang kali terlihat dalam karier Sukarno di kemudian hari. Di dalam ide-ide mereka, Sukarno menemukan alasan bagi suatu bentuk nasionalisme yang tidak mengandung komitmen tertentu terhadap Islam, teori perjuangan kelas, maupun kaitan formal dengan

kelompok etnik tertentu. Sistem sekolah Taman Siswa-nya Dewantara, yang dimulai pada tahun 1922, menolak Islam pembaharu dan memakai kebudayaan Jawa sebagai dasar filosofis bagi ciri nasional yang baru. Hal ini mendapat tanggapan positif di dalam pemikiran Sukarno. Bagi Sukarno, cara *kaum abangan* Jawa, dan terutama golongan atas di antara mereka itu, menyerap ide-ide Hindu, Budha, Islam, dan Barat ke dalam suatu sintesis yang unik yang mereka anggap memuaskan, tampaknya merupakan model bagi seluruh bangsa Indonesia.

Di tangan Sukarno, seruan-seruan akan nasionalisme dan persatuan demi kepentingan nasionalisme mengandung arti bahwa doktrin-doktrin lainnya harus takluk di hadapan seperangkat ide yang menolak kebutuhan akan pembaruan atau dominasi Islam, akan perjuangan sosial dalam masyarakat Indonesia, atau akan segala sesuatu selain penolakan yang bersifat radikal terhadap kekuasaan penjajahan. Falsafah politik ini hampir sama sekali tidak mempunyai resep yang positif tentang apa yang seharusnya dilaksanakan segera sesudah tercapainya kemerdekaan. Sumbangan utama Sukarno pada nasionalisme ini adalah pencantuman unsur yang romantis, suatu keyakinan bahwa dirinya barangkali dapat mirip dengan orang-orang besar dalam sejarah yang telah dibacanya: Washington, Lincoln, Garibaldi, dan lain-lainnya. Selama kariernya, Sukarno amat percaya akan takdir sejarahnya sendiri, begitu rupa sehingga banyak orang lain juga mulai memercayainya.

Pada bulan November 1925, waktu tahun terakhirnya di Sekolah Tinggi Teknik, Sukarno membantu mendirikan Algemeene Studieclub, "kelompok belajar umum", di kalangan mahasiswa. Organisasi ini diilhami oleh Study Club yang didirikan di Surabaya pada tahun 1924 oleh dr. Sutomo (1888–1938), salah seorang pendiri Budi Utomo yang terkenal karena pandangannya bahwa Islam mengurangi sentimen-sentimen nasionalistis yang selayaknya. Kelompok Belajar-nya Sukarno nyata-nyata bersifat politis, dengan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuannya. Di dalam gerakan anti-penjajahan yang terpecah-pecah saat itu, Sukarno melihat adanya bukti bahwa yang terpenting adalah dicapainya persatuan.

Ketika berhasil memperoleh gelar insinyur di Bandung pada tahun 1926, Sukarno masih tetap ragu-ragu apakah akan memasuki dinas pemerintahan ataukah kegiatan politik. Dia kini

merupakan salah satu orang Indonesia yang berpendidikan paling tinggi pada zamannya, tetapi untuk apakah dia akan menerapkan status dan pengetahuannya? Tentu saja, dilemanya adalah dilema kaum priyayi tingkat rendah pada umumnya. Sementara itu, perasaannya bahwa gerakan anti-penjajahan perlu dipersatukan, dan bahwa dialah orang yang akan dapat mewujudkannya, terus berkembang. Kelak, pada tahun 1926, dia menerbitkan serangkaian artikel yang menganjurkan, seperti yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin lain sebelumnya, bahwa Islam, Marxisme, dan nasionalisme seharusnya bersatu untuk kemerdekaan. Dalam praktiknya, secara tidak langsung dia mengatakan bahwa nasionalisme hendaknya lebih diutamakan daripada Islam dan Marxisme. Dengan anggapan bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan yang berarti di antara ideologi-ideologi itu, dan dengan menolak terlibat di dalam pertentangan-pertentangan yang sengit saat itu, maka Algemeene Studieclub berhasil memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok lainnya. Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI pada akhir tahun 1926 dan awal tahun 1927 dan dengan semakin tidak aktifnya SI pada waktu yang sama, tampaknya takdir telah menentukan pilihan karier Sukarno. Dengan hancurnya komunisme dan semakin tidak berdayanya Islam sebagai kekuatan politik, agaknya zaman bagi nasionalisme telah tiba.

Pada tanggal 4 Juli 1927, Sukarno dan Algemeene Studieclub memprakarsai pembentukan sebuah partai politik baru, Perserikatan Nasional Indonesia, dengan Sukarno sebagai ketuanya. Pada bulan Mei 1928, nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Tujuan PNI adalah kemerdekaan bagi Kepulauan Indonesia yang akan dicapai dengan cara nonkooperatif dan dengan organisasi massa. Inilah partai politik penting pertama yang beranggotakan etnis Indonesia, semata-mata mencita-citakan kemerdekaan politik, berpandangan kewilayahan yang meliputi batas-batas Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan berideologi nasionalisme 'sekuler'. Pada bulan Mei 1929, PNI telah mempunyai cabang-cabangnya di kota-kota besar di Jawa dan satu cabang di Palembang, serta menyatakan memiliki anggota sebanyak 3.860 orang (sebagian besar di Bandung, Batavia, dan Surabaya); pada akhir tahun 1929, jumlah anggota partai ini mencapai 10.000 orang.

Pada akhir tahun 1927, tampaknya Sukarno sudah berhasil merealisasikan suatu front bersatu dari organisasi-organisasi politik Indonesia yang penting. Pemimpin Partai Sarekat Islam, Sukiman Wirjosandjojo (l. 1896) memberi Sukarno dukungan yang sangat menentukan dalam mewujudkan persatuan yang bersifat sementara itu, meskipun ditentang Agus Salim yang mencela nasionalisme 'sekuler' dan tidak menyukai pengaruh generasi baru kaum terpelajar yang kebarat-baratan. Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Study Club Surabaya, serta organisasi-organisasi kedaerahan dan Kristen yang penting bergabung bersama PNI dalam suatu wadah yang dikenal sebagai PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Gagasan nasionalisme seluruh Indonesia sebagai ukuran umum kini muncul semakin kuat. Para pemimpin terpelajar kelompok-kelompok suku bangsa dan kedaerahan menerima konsep itu antara lain sebagai alat untuk mempertahankan diri dari dominasi suku Jawa yang potensial, sedangkan kelompok-kelompok Kristen memandang konsep tersebut antara lain sebagai alat untuk mempertahankan diri dari dominasi Islam. Beberapa kalangan komunitas Cina dan Arab juga mendukung nasionalisme Indonesia atas dasar multirasial. Akan tetapi, pertumbuhan nasionalisme juga memiliki akar-akarnya yang lebih positif, karena banyak pemimpin merasa yakin akan adanya bangsa Indonesia dan bahwa bangsa ini mempunyai hak atas kehidupannya sendiri.

Akan tetapi, perbedaan-perbedaan tujuan, ideologi, dan kepribadian yang nyata masih tetap memecah-belah gerakan-gerakan tersebut, dan persatuan yang dicapai oleh PPPKI tidaklah begitu mendalam. Partai Sarekat Islam (yang pada tahun 1929 berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII) mengundurkan diri dari PPPKI pada tahun 1930 karena kelompok-kelompok lainnya menolak untuk mengakui peranan utama Islam yang, oleh para pemimpin Islam perkotaan, dianggap pantas. Memang, kaum nasionalis 'sekuler' cenderung mengagumi Mesir, Persia, Irak, dan terutama Turki, yang memisahkan agama dan negara demi tercapainya modernitas. Pimpinan Islam Indonesia tidak dapat menerima ide-ide semacam itu. Persatuan, walaupun tidak kokoh, yang diperlihatkan oleh PPPKI ini memperkuat ide bahwa nasionalisme yang tidak mempunyai kaitan kedaerahan atau agama merupakan dasar yang memungkinkan bagi dilakukannya

aksi bersama, tetapi hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aksi bersama hampir pasti akan mengesampingkan kelompok-kelompok Islam sehingga mereka akan terkucil dari arus utama kepemimpinan politik. Meskipun demikian, hal ini belum membawa kaum muslim untuk lebih saling mendekati. Para pemimpin PSII perkotaan terus menitikberatkan pada ide-ide Islam modernis yang tidak dapat diterima oleh pemimpin-pemimpin NU pedesaan yang tradisional.

Di negeri Belanda pun muncul suatu kelompok kepemimpinan baru di kalangan para mahasiswa Indonesia. Kelompok ini segera akan memberikan alternatif utama pada gaya nasionalisme Sukarno yang netral-agama. Pada tahun 1922, organisasi lama para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, Indische Vereeniging, "persatuan Hindia", (didirikan tahun 1908), berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia dan menjadi semakin terlibat dalam masalah-masalah politik. Pemimpin-pemimpin PKI yang diasingkan, antara lain Tan Malaka dan Semaun, berpidato pada rapat-rapatnya dan organisasi tersebut bergerak ke arah radikal. Dua di antara pemimpin-pemimpin utamanya adalah orang Minangkabau: Mohammad Hatta (1902–80) dan Sutan Sjahrir (1909–66). Hatta kelak menjadi wakil presiden dan perdana menteri dan Sjahrir akan menjadi perdana menteri. Dua orang Jawa yang kelak menjadi perdana menteri, Ali Sastroamidjojo (1903–75) dan Sukiman Wirjosandjojo, juga menonjol. Secara umum, mereka ini adalah pemimpin-pemimpin Indonesia yang paling terpelajar; mereka telah menuntut ilmu di universitas-universitas Belanda dan mempunyai pandangan yang cukup jelas dan, pada umumnya, tidak romantis tentang dunia luar, tentang Belanda dan imperialisme, tetapi sering kali mereka kurang pengertian dengan orang-orang biasa sebangsanya di tanah air. Hatta merupakan tokoh yang dominan di antara mereka. Dalam ideologi, mereka sebagian besar adalah sosialis yang menerima banyak penafsiran Marxis tentang imperialisme. Kemudian, pada tahun 1931, Perhimpunan Indonesia retak ketika kaum komunis yang berorientasi ke Moskow berhasil memegang kekuasaan; Sjahrir maupun Hatta lantas dikeluarkan.

Pada bulan September 1927, Hatta, Ali, dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dengan tuduhan menganjurkan dilakukannya perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan Belanda di Indo-

nesia. Setelah disekap di penjara selama lebih dari lima bulan, pada bulan Maret 1928 mereka diadili di Den Haag dan dibebaskan, yang membuat pihak penguasa malu sekali. Hatta memanfaatkan pidato pembelaannya untuk melontarkan kecaman yang meyakinkan terhadap kekuasaan Belanda dan pembenaran atas nasionalisme Indonesia. Di Indonesia, pemerintah kolonial juga mulai melawan para pemimpin baru.

Pada kurun waktu itu, komunitas orang-orang Belanda di Indonesia juga semakin condong ke kanan. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, gagasan-gagasan baru yang telah usang tentang modernisasi bangsa Indonesia dan pertemuan budaya antara lokal dan modern (yaitu Eropa)—gagasan-gagasan yang mendasar bagi politik Etis—takluk di hadapan relativisme budaya dan determinisme rasial, seperti yang juga terjadi di negeri-negeri jajahan lain. Kini, kaum konservatif berhasil mendapat dalih bahwa bangsa Indonesia asli dan bangsa Eropa memang berbeda selamanya tanpa tak bisa dihilangkan. Pendidikan modern tak dapat menjembatani perbedaan ini, sama halnya dengan kalangan intelektual yang kebudayaannya setengah Indonesia dan setengah Eropa. Maka, kata mereka, jalan terbaik adalah membiarkan bangsa Indonesia di tangan para pejabat Belanda yang paternalistik dan para *volkshoofden* (pemimpin rakyat) tradisional, yang merupakan sekutu lokal dari dan dilindungi oleh pemerintahan Eropa. Komunitas Eropa yang lebih konservatif ini merasa sangat cemas dan sakit hati dengan rapat-rapat umum yang besar, di mana Sukarno dan pemimpin-pemimpin lainnya dengan seenaknya mencerca penguasa kolonial. Gubernur Jenderal Andries C.D. de Graeff (1926–31), yang cenderung memihak politik Etis, masih enggan untuk mendukung tindakan represi umum. Meskipun demikian, pada tahun 1928, dia mengirim Tjipto Mangunkusumo ke pengasingan di Banda (sampai tahun 1941) dan menyuruh penumpasan terhadap sisa-sisa terakhir gerakan serikat buruh yang berhaluan kiri ketika pimpinan Sarekat Kaum Buruh Indonesia (berdiri tahun 1928) ditangkap pada tahun 1929.

Akhirnya, pada tahun 1929, pemerintah mengambil tindakan terhadap PNI dengan menangkap Sukarno dan pemimpin-pemimpin lainnya. Walaupun terjadi kegagalan dalam kasus Hatta dkk. di Den Haag, tetapi akhirnya diambil keputusan untuk mengajukan Sukarno ke pengadilan umum di Bandung pada akhir

tahun 1930. Dia melakukan pidato pembelaan yang cemerlang yang menyuarakan ulang komitmen, kalau bukan kedalaman intelektual, pidato Hatta di Den Haag. Sukarno dihukum dengan tuduhan membahayakan ketertiban umum dan dijatuhi hukuman penjara empat tahun di penjara Sukamiskin, Bandung. Dengan ditangkap dan dipenjarakannya pemimpinnya itu, maka lumpuhlah PNI dan berhentilah kegiatan-kegiatannya. Tanpa Sukarno, PNI nyaris tak ada apa-apanya.

Meskipun demikian, gagasan tentang identitas nasional Indonesia yang tidak mempunyai kaitan keagamaan maupun kedaerahan tertentu mulai diterima secara luas di kalangan elite dan kini ditopang oleh perkembangan-perkembangan di bidang budaya. Suatu kesastraan baru mulai tumbuh yang didasarkan pada bahasa Melayu, yang selama berabad-abad telah digunakan sebagai *lingua franca* di Nusantara dan, oleh karenanya, pada hakikatnya bebas dari sifat-sifat kesukuan. Lebih khusus lagi, bahasa itu bukan bahasa Jawa sehingga tidak membawa implikasi dominasi suku Jawa. Dengan berkembangnya kesastraan ini, maka kaum terpelajar Indonesia tidak lagi menyebutnya 'bahasa Melayu', melainkan 'bahasa Indonesia'. Dari sinilah lahir bahasa Indonesia sebagai sarana persatuan nasional.

Segala bidang penulisan meluas dengan cepat di Indonesia. Pada tahun 1918 telah terbit sekitar 40 surat kabar, sebagian besar dalam bahasa Indonesia; pada tahun 1925 ada sekitar 200; pada tahun 1928 ada lebih dari 400 harian, mingguan, dan bulanan. Muncul pula suatu kesastraan modern yang di dalamnya para pengarang Minangkabau memainkan peranan yang penting. Mereka berasal dari suatu masyarakat yang dinamis yang peranannya dalam modernisasi Indonesia sudah dibahas dalam bab terdahulu, dan di antara semua bahasa daerah di Nusantara ini, bahasa Minangkabaulah yang paling dekat dengan bahasa Melayu/Indonesia. Muhammad Yamin (1903–64), yang kelak menjadi salah satu pemimpin politik Indonesia yang paling radikal, meninggalkan bentuk-bentuk pantun dan syair dan menerbitkan sajak-sajak pertama yang benar-benar modern dalam tahun 1920–2. Pada tahun 1922, Marah Roesli (l. 1898) menerbitkan roman modern yang pertama, *Sitti Noerbaja*, yang menceritakan suatu hubungan cinta yang tragis sebagai akibat terjadinya benturan antara nilai-nilai tradisional dan modern. Seorang pengarang Batak,

Sanusi Pane (1905–68), juga menulis puisi modern pada tahun 1921, dan setelah tinggal di India pada tahun 1929–30, dia mulai menganjurkan agar ilham kebudayaan dicari pada masa pra-Islam Indonesia, walaupun faktanya dia sendiri seorang muslim.

Banyak dari kesastraan modern Indonesia ini diterbitkan oleh perusahaan percetakan pemerintah, Balai Pustaka (dalam bahasa Belanda: Commissie—setelah tahun 1917, Kantoor—voor de Volkslectuur, "komisi/kantor untuk kesastraan rakyat"), yang didirikan pada tahun 1908. Balal Pustaka melaksanakan tiga fungsi pokok: menerbitkan karya-karya sastra klasik yang lebih tua dan cerita-cerita rakyat dalam bahasa-bahasa daerah, menerjemahkan literatur Barat ke dalam bahasa Indonesia, dan menerbitkan kesastraan Indonesia baru. Dengan demikian, pada waktu yang sama, perusahaan percetakan tersebut sekaligus membantu mempertahankan kelestarian budaya-budaya daerah, membuka Indonesia bagi nilai-nilai sastra yang lebih universal, dan memberikan sumbangan bagi terbentuknya suatu kebudayaan se-Indonesia. Jadi, di bidang kesastraan, Balai Pustaka mempertahankan beberapa cita-cita politik Etis yang luhur, lama setelah cita-cita itu sirna dari masalah-masalah politik. Balai Pustaka juga mendirikan perpustakaan umum di dalam HIS (sekolah Belanda-pribumi) dan setelah itu menyebarkan terbitan-terbitannya hingga luar biasa luasnya, mengingat rendahnya tingkat melek huruf di kalangan bangsa Indonesia saat itu. Pada tahun 1920, Balai Pustaka menjual seratus ribu buku dan membukukan satu juta peminjaman. Terbitan-terbitannya digunakan tidak hanya untuk menyampaikan karya-karya kesastraan ke kalangan pembaca yang sedang meluas, tapi juga untuk menyebarkan gagasan-gagasan yang diakui tentang cara-cara hidup modern, baik berkaitan dengan kesehatan pribadi, aturan berlalu-lintas ataupun dengan soal tak diinginkannya perempuan modern yang teremansipasi yang terjun di dunia politik.

Dalam bidang-bidang kreatifitas lainnya pun terjadi perubahan-perubahan yang dramatis. Pada akhir tahun 1920-1930-an, muncul bentuk modern dari lukisan Bali. Sebelumnya, seni Bali terikat pada aturan-aturan klasik dan nama senimannya tidak diketahui. Pada akhir tahun 1920-an, pelukis Jerman Walter Spies (1895–1942) dan seniman Belanda Rudolf Bonnet (1895–1978) tinggal di Bali dan terjadilah proses saling memengaruhi antara

kesenian Bali dan kesenian Eropa. Seniman-seniman modern lainnya, seperti Miguel Covarrubias (1904–57) dari Meksiko, juga berperan dalam pertukaran budaya yang saling menguntungkan ini. Seniman Bali kini menggunakan media baru, warna-warna yang baru dan lebih dramatik, dan gaya baru yang penuh tenaga, bercirikan gambar-gambar manusia dengan banyak lengkungan dalam suasana tropis yang menggairahkan, dengan sedikit perspektif. Sekarang mereka menandatangani karya-karya mereka, yang mencerminkan individualisme modern dalam karya seni mereka. Gaya lukis yang baru ini dan beberapa orang yang membuatnya berhasil mendapat pengakuan yang luas di luar Indonesia dan membantu mempertahankan posisi Bali sebagai surga tropis yang murni di mata orang Barat.

Pada bulan Oktober 1928, kegiatan-kegiatan budaya dan politik ke arah persatuan Indonesia bergabung secara resmi pada Kongres Pemuda yang diadakan di Batavia. Di dalam Sumpah Pemuda-nya, Kongres menyetujui tiga pengakuan: satu tanah air, Indonesia; satu bangsa, Indonesia; dan satu bahasa, bahasa persatuan Bahasa Indonesia. Dalam memperingati kongres ini, Yamin menulis sekumpulan sajak yang diterbitkan pada tahun 1929 dengan judul *Indonesia Tumpah Darahku*. Sajak-sajak tersebut mencerminkan keyakinan di kalangan kaum terpelajar muda bahwa pertama-tama mereka adalah orang Indonesia, dan baru yang kedua, orang Minangkabau, Batak, Jawa, Kristen, Islam, atau apa saja.

Konteks ekonomi yang di dalamnya bangsa Indonesia hidup tiba-tiba berubah karena depresi ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1930-an. Sebagaimana ada gejala krisis yang akan terjadi di negara-negara industri sebelum Kejatuhan Wall Street pada bulan Oktober 1929, maka demikian juga di Indonesia ada indikasi bahwa kemakmuran yang tampak pada akhir tahun 1920-an tidak akan bertahan lama. Harga beberapa produk Indonesia telah mengalami tren menurun dan pasar untuk ekspor gula menciut karena produksi gula bit meluas di mana-mana, terutama di Inggris dan Jepang. Namun, tak ada yang cukup siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelah Oktober 1929. Indonesia amat tergantung pada ekspornya, terutama produk minyak bumi dan pertanian. Pada tahun 1930, sebanyak 52% dari produk-produk ini diekspor ke negara-negara industri Eropa dan

Amerika Utara. Krisis ekonomi di kedua daratan ini yang berakibat diberlakukannya kebijakan proteksi secara menyeluruh, ditambah dengan harga-harga yang menurun, tiba-tiba menjerumuskan Indonesia ke dalam suatu krisis ekonomi yang tak pernah sepenuhnya teratasi sebelum penaklukan oleh bangsa Jepang pada tahun 1942.

Fluktuasi harga tadinya telah menjadi fenomena umum, tetapi kini harga untuk seluruh ekspor utama Indonesia turun secara bersamaan dan menimbulkan bencana. Dimulai pada tahun 1929, harga rata-rata ekspor Indonesia menurun drastis. Pada tahun 1935, nilai ekspor Indonesia tinggal sekitar 32% dari nilai yang diperoleh pada tahun 1929. Volume ekspor juga turun karena menciutnya pasar dan diberlakukannya kebijakan proteksi. Dampak terhadap berbagai sektor amat beragam. Industri minyak bumi menambah produksinya untuk mengatasi harga-harga yang sedang turun, begitu juga yang terjadi pada produksi karet, kopra, dan hasil tanam lainnya. Tetapi karet, gula, kopi, dan tembakau—produk-produk yang memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak rakyat Indonesia sebagai buruh dan yang para produsennya merupakan perusahaan-perusahaan berskala kecil—menghadapi bencana. Pada tahun 1932, harga karet hanya 16% dari harga pada tahun 1929. Gula turun tajam. Lahan garapan tebu lantas dikurangi dengan cepat: pada tahun 1934 ada 200.000 hektar yang digarap, namun pada tahun 1939 hanya ada 90.000 hektar. Para pekerja diberhentikan dan akibatnya gaji yang dibayarkan dalam industri gula pun berkurang sampai 90%. Pada kenyataannya, setelah lebih dari satu abad berlangsung, depresi akhirnya menyebabkan ekspor Indonesia tidak lagi didominasi oleh gula dan kopi. Orang-orang Jawa yang bekerja pada perkebunan-perkebunan di Sumatra Timur mulai kembali lagi ke daerahnya karena kesempatan kerja sudah tidak ada lagi di sana. Pada tahun 1930 ada 336.000 pekerja kebun di Sumatra Timur; pada tahun 1934, angka ini menurun menjadi 160.000 saja. Akibatnya, pendapatan Indonesia di luar Jawa lebih merosot dibandingkan dengan di Jawa, tetapi krisis memang memukul semua wilayah.

Karena ekspor turun, maka impor pun perlu dikurangi, termasuk bahan makanan. Pendapatan pemerintah sebagian besar diperoleh dari retribusi dan pajak terhadap pendapatan dan pengeluaran. Maka, Batavia sekarang menghadapi krisis pendapatan.

Pajak tanah yang dibayarkan terutama oleh rakyat Indonesia juga turun, tetapi tak secepat harga beras, produk pertanian terbesar, sehingga beban pajak riil bagi rakyat Indonesia naik. Pajak pemerintah harus dikurangi. Rekrutmen pegawai sipil hampir secara keseluruhan dihentikan, gaji dipotong (walaupun, karena harga-harga turun, pendapatan riil sering naik), dan pegawai-pegawai negeri yang tidak penting diberhentikan. Hal ini hanya memperburuk masalah pengangguran bagi orang-orang Indonesia lulusan sistem sekolah modern. Namun, bersamaan dengan itu, ada kecenderungan ke arah sebaliknya ketika perusahaan-perusahaan memberhentikan pegawai-pegawai Eropa, Indo-Eropa, dan Cina yang bergaji lebih tinggi dan menggantikan mereka dengan orang-orang Indonesia yang upahnya lebih rendah.

Pemerintah kolonial Belanda tidak lagi menggunakan naluri ekonomi *laissez-faire*-nya dalam rangka meredakan tingkat bencana. Contohnya, dia merestrukturisasi produksi karet, menggunakan skema pembatasan dan cukai penjualan yang jauh lebih merugikan pemilik perkebunan kecil pribumi dibandingkan dengan pemilik perkebunan besar. Salah satu kesulitan terbesar Batavia muncul dari penetrasi Jepang yang tiba-tiba terhadap ekonomi Indonesia. Pada tahun 1929–30, Jepang mengisi 10% dari nilai total impor Indonesia. Sementara Belanda masih terpaku pada standar emas hingga September 1936, Jepang mendevaluasi yen pada tahun 1931 dan selanjutnya dengan cepat menggantikan posisi Belanda dalam impor Indonesia. Ketersediaan barang-barang murah dari Jepang penting untuk mengurangi dampak depresi bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1934, tahun puncak kesuksesan Jepang dalam hal ini, impor Jepang mewakili 32,5% dari nilai total impor Indonesia, hampir dua setengah kali lipat dari nilai impor Belanda yang masuk ke negara koloni ini. Negosiasi dengan Jepang untuk membatasi penetrasi impornya gagal pada 1934, sehingga Batavia memberlakukan sistem lisensi dan kuota yang berdampak pada pembatasan impor Jepang saja. Pada tahun 1936, Batavia dan Tokyo sudah mencapai kesepahaman informal tentang masalah perdagangan. Impor Jepang pun turun menjadi 25.4% dari total nilai impor Indonesia pada tahun 1937 dan akhirnya kalah dibandingkan dengan impor Belanda pada tahun 1938, ketika impor Belanda mencapai 22% dan impor Jepang hanya 14.4% dari total nilai impor Indonesia. Karena

Jepang didorong keluar dari pasar yang sebelumnya telah mereka masuki, bangsa Indonesia mendapatkan barang-barang dari Belanda yang lebih mahal sebagai pengganti barang-barang Jepang yang murah. Jaringan retail Jepang sebelumnya telah menggunakan para pekerja Indonesia, tetapi kini mereka kehilangan pekerjaan karena importir Eropa kembali mempekerjakan para pekerja Cina mereka yang sudah biasa.

Dampak krisis ini terhadap bangsa Indonesia jelas sangat serius. Memang benar, seperti dikatakan beberapa pengamat Belanda pada waktu itu, bahwa para pekerja Indonesia cenderung kembali ke pertanian untuk menyambung hidup, namun juga benar bahwa banyak di antaranya tidak memiliki kesempatan itu sama sekali. Sebagian lahan yang tidak lagi digunakan untuk produksi gula digunakan kembali untuk produksi padi, tetapi peningkatan produksi padi tidak sepenuhnya dapat menyediakan keperluan makanan dan pekerjaan bagi populasi yang terus-menerus bertambah. Dalam kenyataannya, ketersediaan bahan makanan untuk per kapita menurun dari tahun 1930 hingga tahun 1934. Sungguh, tidak diragukan lagi bahwa setidaknya hingga akhir tahun 1930-an, kesejahteraan Indonesia menurun. Pada tahun 1937, pendapatan per kapita mungkin telah meningkat hingga seperti tahun 1929, tetapi hal itu tidak menunjukkan sama sekali pemerataan pendapatan. Tidak diragukan lagi, bagi banyak orang Indonesia, zaman tetap saja sangat sulit sampai ke masa penaklukan Jepang. Organisasi kesejahteraan Indonesia seperti Muhammadiyah dan beberapa partai politik mengadakan kegiatan bantuan pada tingkat desa. Beberapa serikat kerja masih cukup berfungsi untuk membantu pekerja-pekerja yang kekurangan uang, khususnya serikat kerja pegadaian. Bagi orang-orang Indonesia yang berusaha bertahan sebagai pegawai pada sektor formal di kota, ini adalah masa-masa yang jauh lebih sulit, karena sekalipun gaji turun lebih sedikit dari harga barang, tetapi jam kerja mereka dan kondisi lainnya memburuk.

Seperti halnya tidak ada alasan untuk optimis dalam bidang ekonomi pada tahun 1930-an, demikian pula tidak ada alasan yang sama di bidang politik, karena pemerintah Belanda benar-benar telah condong ke kanan. Yang menjabat sebagai gubernur jenderal antara tahun 1931 dan tahun 1936 adalah Bonifacius C. de Jonge, mantan menteri peperangan dan Direktur Royal Dutch

Shell. Dia menentang semua bentuk nasionalisme dan juga tidak ingin melihat Volksraad memainkan peranan penting. Rapat-rapat politik orang Indonesia sering kali dibubarkan oleh pihak polisi dan para pembicaranya ditangkap. Pengganti de Jonge, Alidius W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1936–45), sedikit lebih luwes, namun tidak membawa perubahan besar. Menteri Urusan Daerah Jajahan di Den Haag mulai tahun 1933 sampai tahun 1937 adalah Hendrikus Colijn, orang yang sangat menentang ide-ide Etis dan pernah menjadi Direktur Shell. Dalam lingkungan seperti ini, maka tidak mengherankan apabila nasionalisme hanya mendapat sedikit kemajuan. Pada tahun 1930-an, Belanda benar-benar menguasai Indonesia dan bertekad untuk tetap begitu.

Pemimpin-pemimpin politik bereaksi terhadap penangkapan atas Sukarno dengan berbagai cara. Di dalam Volksraad, pada bulan Januari 1930, Muhammad H. Thamrin (1894–1941), pemimpin Kaum Betawi, membentuk Kelompok Nasional (Nationale Fractie) dengan anggota-anggota dari Jawa maupun luar Jawa. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan semacam bentuk otonomi Indonesia di dalam kerja sama dengan Belanda. Di Surabaya, pada bulan Oktober 1930, Sutomo mereorganisasi Study Clubnya dan mengubahnya menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), yang dipandang dengan sangat curiga oleh pemerintah. Organisasi ini beralih ke bidang-bidang kegiatan ekonomi dan sosial di Jawa Timur, seperti mendirikan balai-balai pengobatan, asrama-asrama mahasiswa, bank-bank desa, biro-biro penasihat, dan lain-lain. Oleh karena itu, kegiatan organisasi ini serupa dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam. Bila Taman Siswa memberi tantangan terhadap Islam di bidang pendidikan, maka PBI memberi tantangan di bidang sosial dan ekonomi.

PNI sendiri dibubarkan pada bulan April 1931. Para pemimpinnya telah mendapat peringatan-peringatan tegas dari para penguasa Belanda pada bulan Januari 1930 bahwa PNI tidak akan diizinkan melanjutkan kegiatan-kegiatan politiknya selama tuntutan-tuntutan terhadap para pemimpinnya belum diputuskan. Setelah Sukarno dihukum, para pemimpin PNI merasa bahwa partai tersebut sebenarnya telah menjadi organisasi terlarang. Sebagai gantinya dibentuklah Partindo (Partai Indonesia) yang mempunyai cita-cita yang sama dengan PNI, yaitu mencapai ke-

merdekaan secara nonkooperasi dan dengan aksi rakyat. Akan tetapi, banyak mantan anggota PNI yang kini sangat kehilangan semangat. Sebagai akibatnya, jumlah anggota Partindo pada bulan Februari 1932 hanya 3.000 orang. Beberapa pemimpin Indonesia mengecam keputusan pembubaran PNI ini, di antaranya yang paling menonjol adalah Hatta, yang masih berada di negeri Belanda.

Pada bulan Desember 1931, Sjahrir, yang baru saja pulang dari negeri Belanda, membentuk organisasi tandingan terhadap Partindo. Organisasi ini adalah Pendidikan Nasional Indonesia. Dikarenakan huruf-huruf awalnya, organisasi ini disebut PNI-Baru. Organisasi ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki gaya yang berbeda dengan Sukarno, tapi memiliki gagasan-gagasan yang pada awalnya sungguh-sungguh sama dengannya. Namun, mulai tahun 1933 nanti, dengan meningkatnya tekanan politik dari pemerintah Belanda, PNI-Baru akan menempuh taktik- taktik yang membedakannya dengan PNI lama. Para pemimpin PNI-Baru kemudian mengembangkan pandangan bahwa aksi massa benar-benar sulit, jika bukan mustahil, dilaksanakan dalam lingkungan seperti saat itu, dan ketergantungan hanya kepada seorang pemimpin saja dapat mengakibatkan lumpuhnya suatu partai apabila sang pemimpin ditangkap. Oleh karena itulah maka PNI-Baru lebih bertujuan menghasilkan kader-kader pemimpin yang dapat menggantikan para pemimpin yang ditangkap. Tampak jelas pula adanya pengaruh-pengaruh Marxis terhadap PNI-Baru, karena organisasi ini merasa yakin akan perlunya perjuangan melawan kaum borjuis pribumi, sehingga membuatnya jauh dari kalangan dagang Islam maupun priyayi pemerintahan. Dengan demikian, gerakan nasionalis yang tidak bersifat keagamaan terpecah antara model 'aksi massa' dan model 'pembentukan kader'. Sesungguhnya, pada tahun 1930-an, kedua model tersebut sama-sama tidak mempunyai peluang untuk berhasil.

Ketika kaum terpelajar kota sedang berusaha mencari bentuk-bentuk baru bagi organisasi politik dalam menghadapi oposisi Belanda, gerakan politik yang terbesar di Indonesia didirikan oleh suatu jenis kepemimpinan yang sangat berbeda. Pada bulan Juni 1930, seorang tokoh kharismatik, seorang pangeran yang sangat tradisional dan kurang berpendidikan dari Yogyakarta, Pangeran Surjodiningrat, mendirikan PKN (Pakempalan Kawula Ngayogya-

karta, "perkumpulan warga Yogyakarta"). Perpaduan antara banyaknya keluhan kaum tani selama Depresi dan daya tarik seorang pemimpin yang berdarah bangsawan telah memberi PKN kekuatan yang tidak dimiliki oleh gerakan-gerakan terpelajar perkotaan. Pada bulan Mei 1931, organisasi tersebut menyatakan mempunyai anggota lebih dari 100.000 orang di Yogyakarta; pada bulan Agustus 1939, organisasi itu menyatakan mempunyai anggota hampir 260.000 orang. Dengan demikian, jumlah anggotanya di wilayah Yogyakarta sama dengan jumlah anggota Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Karena aktif membela kepentingan kaum tani, maka PKN mulai menjadi semacam pemerintahan bayangan dan banyak petani yang tertarik kepada organisasi tersebut dengan keyakinan bahwa Surjodiningrat adalah Ratu Adil; dalam hal ini, PKN lebih merupakan pengganti Sarekat Islam pada tahun-tahun pertamanya daripada partai kota yang mana pun. Akan tetapi, organisasi ini juga membangkitkan dendam dari birokrasi dan bangsa Belanda. Adanya tekanan dari pemerintah dan gangguan dari pihak kepolisian setelah tahun 1934 memaksa Surjodiningrat membatasi kegiatan-kegiatan PKN pada masalah-masalah sosial dan ekonomi, khususnya usaha memajukan koperasi-koperasi. Kaum nasionalis kota juga tidak bersedia menjalin hubungan dengan organisasi yang nyata-nyata bersifat feodal seperti itu, suatu organisasi yang membuat malu mereka karena jauh lebih berhasil dalam menghimpun dukungan rakyat daripada usaha-usaha mereka sendiri. Meskipun demikian, PKN tetap mampu bertahan hingga masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1951, ia bangkit lagi sebagai suatu partai lokal Yogya dengan nama Gerinda (Gerakan Rakyat Indonesia), yang masih tetap berada di bawah kepemimpinan mutlak Surjodiningrat.

Salah satu di antara tindakan-tindakan terakhir Gubernur Jenderal de Graeff adalah mengurangi masa hukuman penjara Sukarno. Pada bulan Desember 1931, Sukarno dibebaskan. Dia segera berusaha mempersatukan kembali gerakan nasionalis, tapi gagal. Pada bulan Agustus 1932, dia bergabung dengan Partindo yang tampaknya juga mempunyai naluri seperti yang dimilikinya dalam hal aksi massa. Pada bulan Juli 1933, Partindo menyatakan mempunyai anggota sebanyak 20.000 orang. Pada bulan Agustus 1932, Hatta pulang setelah sebelas tahun tinggal di negeri Belanda dan mengambil alih pimpinan atas PNI-Baru. Sekarang,

perbedaan antara Sukarno dan Hatta melambangkan perpecahan dalam nasionalisme 'sekuler', seperti halnya kerja sama mereka kelak setelah tahun 1942 melambangkan tersembunyinya perbedaan-perbedaan: di satu pihak adalah seorang muslim abangan Jawa yang romantis dengan naluri-naluri kerakyatan, dan di pihak lain seorang Minangkabau elite dan sangat intelektual, seorang muslim yang saleh namun tak kurang teguhnya memegang doktrin-doktrin politik sosialis yang bersifat sekuler.

Reaksi pimpinan Islam terhadap perkembangan nasionalisme 'sekuler' tersebut pada umumnya bersifat memusuhi. Orang Minangkabau lainnya yang kelak juga menjabat sebagai Perdana Menteri RI, Mohammad Natsir (1908–93), tampil pada kurun waktu ini sebagai seorang ahli polemik Islam yang terkemuka. Dia mendapat pendidikan dalam sistem sekolah Eropa, tetapi juga menuntut ilmu pada sekolah-sekolah Islam di Minangkabau. Pada tahun 1927, dia dikirim ke Sekolah Menengah Umum (AMS) di Bandung. Di sana dia menjadi akrab dengan pemikiran Islam modernis yang ekstrem dari Persatuan Islam dan, pada tahun 1932, dia mengambil alih pimpinan atas sistem sekolahnya yang baru. Sejak tahun 1925, Agus Salim sudah memperingatkan kaum muslim yang saleh bahwa ide Sukarno tentang 'ibu pertiwi Indonesia' membahayakan kesetiaan tunggal mereka kepada Tuhan. A. Hassan dari Persatuan Islam juga mengecam ide-ide kaum nasionalis. Pada tahun 1931, Natsir menulis artiket-artikel yang menyatakan bahwa hanya Islamlah yang dapat menjadi dasar bagi suatu kebangsaan Indonesia, tetapi bagi kaum muslim kemerdekaan Indonesia itu sendiri tidak dapat menjadi tujuan terakhir; lebih dari itu, mereka harus berjuang mendirikan sebuah negara yang dapat melayani kepentingan Islam, yang di dalamnya hukum Islam dan pemimpin-pemimpin Islam berkuasa.

Para pemimpin Islam modernis mencela nasionalisme karena paham ini merupakan ide manusia padahal Islam merupakan wahyu dari Tuhan, karena paham ini memecah-belah umat Islam sedunia, dan juga karena paham ini berasal dari Eropa serta telah menimbulkan perang dan imperialisme bagi Barat. Mereka pada dasarnya tidak dapat memahami bagaimana, di sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sesuatu selain Islam dapat secara serius diajukan sebagai dasar persatuan. Adanya fakta bahwa para pemimpin Islam modernislah yang paling menentang

nasionalisme 'sekuler', dan khususnya bahwa Persatuan Islam yang ekstrem yang menempati posisi ini, hanyalah cenderung mempertebal perasaan curiga di kalangan pihak-pihak yang tidak menyetujui ide-ide Islam modernis bahwa Islam adalah suatu kekuatan politik yang berbahaya dan bersifat memecah-belah. Hal ini selanjutnya mengakibatkan terkucilnya Islam dalam bidang politik. Hal ini juga menyebabkan terkucilnya elite nasionalis dari rakyat, karena pada waktu itu baru Islamlah yang dapat memberikan pertalian-pertalian keorganisasian yang potensial antara pemimpin-pemimpin yang berpendidikan di kota-kota dengan masyarakat pedesaan. Sementara itu, satu-satunya lembaga politik Islam yang terpenting, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), yang tetap berada di bawah pengaruh Agus Salim dan Tjokroaminoto, masih cenderung mendukung Pan-Islam dan pengaruh politiknya terus berkurang.

Hanya di Minangkabaulah ada usaha yang serius untuk mempersatukan Islam dan nasionalisme. Mahasiswa-mahasiswa Minangkabau yang berada di Kairo mulai menyangsikan manfaat ide-ide Pan-Islam, dan keragu-raguan ini diperkuat oleh gagalnya konferensi-konferensi kekhalifahan yang diselenggarakan di Kairo dan Mekah pada bulan Mei dan Juni 1926. Iljas Jacub (l. 1902) dan Muchtar Lutfi (l. 1901) pulang ke Minangkabau masing-masing pada tahun 1929 dan 1931. Mereka mengambil alih pimpinan atas Permi (Persatuan Muslim Indonesia) yang didirikan pada bulan Mei 1930 dengan slogan "Islam dan kebangsaan". Perpaduan ini membuat banyak pemuda Minangkabau sangat tertarik, termasuk kaum Islam tradisional yang jumlahnya lebih banyak daripada kaum Islam modernis. Pada bulan Agustus 1933, Permi menyatakan mempunyai 10.000 orang anggota, kira-kira 40% di antaranya wanita. Akan tetapi, Permi juga memancing banyak oposisi.

Pada akhir tahun 1932, semua aliran politik yang penting terwakili di Minangkabau. Permi telah menjalin hubungan dengan Partindo, dan PNI-Baru telah diperkenalkan ke wilayah tersebut. PSII berusaha mengokohkan posisinya sebagai suatu gerakan yang radikal dan secara sengit mengecam doktrin-doktrin nasionalis partai-partai lain. Kemudian pemerintah menghadapkan partai-partai tersebut dan partai-partai yang bergerak di Jawa pada suatu permasalahan yang sangat menggugah emosi; masalah

itu mempersatukan mereka dan, dengan demikian, menyebabkan kehancuran mereka.

Pada bulan September 1932, pemerintah mengumumkan suatu 'peraturan sekolah-sekolah liar' *(wilde scholen ordonnantie)*, yang mengharuskan adanya izin dari pihak penguasa sebelum sebuah sekolah swasta yang tidak mendapat subsidi pemerintah (yang menempatkan suatu sekolah di bawah pengawasan pemerintah) dapat didirikan. Timbullah protes yang bersifat nasional atas campur tangan terhadap sekolah-sekolah swasta ini, justru tepat pada waktu sistem sekolah pemerintah dibatasi karena alasan-alasan keuangan. Ki Hadjar Dewantara dari Taman Siswa memimpin suatu kampanye nasional bersama-sama dengan kelompok-kelompok Islam. Setiap organisasi Indonesia yang penting, termasuk Budi Utomo pun, bergabung dengan kaum oposisi. Bahkan Volksraad pun mengecam peraturan baru itu dan, pada tahun 1932, menolak anggaran belanja pendidikan pemerintah sebagai protes. Pada bulan Februari 1933, Gubernur Jenderal de Jonge menyerah dan mencabut peraturan tersebut.

Pemerintah kini melihat adanya suatu kemungkinan yang berbahaya pada aksi terpadu di kalangan gerakan-gerakan Indonesia. Kekhawatiran pemerintah semakin meningkat dengan terjadinya suatu pemberontakan singkat para awak kapal yang berkebangsaan Belanda dan Indonesia di atas kapal angkatan laut Zeven Provinciën pada bulan Februari 1933. De Jonge mengaitkan itu antara lain dengan agitasi politik partai-partai nasionalis. Ia pun bereaksi keras. Atas dasar perundang-undangan yang berlaku, pemerintah mengambil tindakan terhadap sekolah-sekolah di Minangkabau, tempat di mana penentangan terhadap peraturan 1932 tersebut paling kuat. Sekolah-sekolah digeledah, bahan bacaan politik disita, beberapa sekolah ditutup, dan banyak guru dilarang mengajar. Kemudian pemerintah meneruskan langkahnya dengan melakukan penindasan secara umum terhadap para pemimpin politik. Bermula pada akhir tahun 1932 dan terus berlanjut sampai tahun 1934 (tetapi terutama pada tahun 1933), para pemimpin Permi dan PSII di Minangkabau, termasuk Muchtar Lutfi dan Iljas Jacub, ditangkap dan diasingkan ke Boven Digul.

Pada bulan Agustus 1933, Sukarno ditangkap. Ia sangat terpukul dengan penangkapan yang kedua ini. Selama minggu-

minggu berikutnya, ia menulis empat surat ke penguasa Belanda, meminta supaya dirinya dibebaskan dan, sebagai tebusannya, ia akan mengundurkan diri dari kegiatan politik. Tetapi usahanya ini sia-sia. Kali ini tidak ada pemeriksaan pengadilan umum; dia diasingkan ke Flores, tetapi pada tahun 1938 dipindahkan ke Bengkulu di mana keadaannya lebih menyenangkan. Pada bulan Februari 1934, Hatta, Sjahrir, dan pemimpin-pemimpin PNI-Baru lainnya ditangkap dan kemudian diasingkan ke Boven Digul (pada tahun 1936, Hatta dan Sjahrir dipindahkan ke Banda). Dengan hilangnya pemimpin-pemimpin mereka dan semakin meningkatnya gangguan dari pihak kepolisian, maka menjadi semakin lemahlah gerakan-gerakan nasionalis sekuler, Partindo dan PNI-Baru, dan gerakan-gerakan Islam yang anti-penjajahan, Permi dan PSII. Dengan wafatnya Tjokroaminoto pada bulan Desember 1934, maka gerakan politik Islam kehilangan pemimpinnya yang pertama dan terkemuka, serta mulai terpecah-pecah menjadi lebih banyak kelompok lagi.

Setelah tahun 1934, gerakan antikolonialisme radikal yang didasarkan pada asas nonkooperasi benar-benar padam, tetapi metode-metode yang bersifat kooperasi belum sepenuhnya tertutup. Pada bulan Desember 1935, partai-partai yang moderat dan pada dasarnya berbau Jawa, Persatuan Bangsa Indonesia dan Budi Utomo, berfusi membentuk Parindra (Partai Indonesia Raya). Tujuannya adalah kemerdekaan pada akhirnya lewat kerja sama dengan Belanda. Sutomo menjadi ketuanya. Thamrin dan tokoh-tokoh lain turut bergabung. Partai ini pada dasarnya merupakan organisasi kaum konservatif yang bersifat sekuler atau anti-Islam, dan beberapa pemimpinnya mulai memandang Jepang sebagai model. Pada tahun 1937, partai ini mempunyai anggota lebih dari 4.600 orang dan, pada akhir tahun 1939, sekitar 11.250 orang, sebagian besar di Jawa Timur. Pada bulan Mei 1941, partai ini menyatakan mempunyai anggota sekitar 19.500 orang. Dengan munculnya fasisme di Eropa dan Jepang, maka banyak pemimpin Indonesia yang condong ke kiri juga mulai merasa bahwa mereka harus bergabung dengan Belanda untuk melawan musuh bersama, yaitu kaum fasis.

Akan tetapi, mereka yang mendukung kerja sama dengan Belanda pun mulai meragukan manfaatnya. Seberapa jauh ide-ide nasionalis dan perasaan tidak puas telah menembus kelompok-

kelompok yang bahkan paling dekat dengan pemerintah terungkap pada tahun 1936. Soetardjo Kartohadikoesoemo (l. 1892) adalah seorang Jawa anggota Volksraad yang mempunyai karier dalam birokrasi kolonial. Oleh karenanya, dia berasal dari luar kelompok politikus nasionalis yang utama. Akan tetapi, dia dan pegawai-pegawai pemerintah lain semakin merasa tidak puas dengan pengurangan-pengurangan gaji, pemecatan-pemecatan, pembatasan kesempatan dalam bidang pendidikan, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang umumnya bersifat mencurigai, campur tangan, dan kikir sejak sekitar tahun 1930. Pada bulan Juli 1936, Soetardjo mengajukan suatu petisi kepada Volksraad yang meminta diselenggarakannya suatu konferensi guna mengatur otonomi Indonesia di dalam suatu uni Belanda-Indonesia selama kurun waktu sepuluh tahun. Pada dasarnya, bentuk inilah yang telah diberikan Amerika Serikat kepada Filipina pada tahun 1933, yang mengakibatkan terbentuknya pemerintah Persemakmuran Filipina pada bulan November 1935. Soetardjo dan para pendukungnya tahu akan, dan terilhami oleh, kasus Filipina itu. Partai-partai nasionalis Indonesia yang penting terpecah-belah oleh petisi ini, tetapi wakil-wakil Kristen, Arab, Cina, dan Indo-Eropa di dalam Volksraad mendukungnya. Pada bulan September 1936, petisi tersebut disetujui, terutama karena sebagian besar anggota yang berkebangsaan Eropa juga menginginkan otonomi yang lebih luas dari Den Haag.

Kemudian berlangsunglah suatu perdebatan publik mengenai petisi Soetardjo tersebut. Parindra merasa curiga dan tidak senang ide Soetardjo tersebut berhasil, sementara para pemimpin terkemuka gerakan-gerakan anti-penjajahan gagal. PSII terpecah dalam masalah ini. Pada bulan November 1936, Agus Salim, yang telah memutuskan bahwa kebijakan nonkooperasi dalam bentuk hijrah merupakan suatu kegagalan, membentuk suatu kelompok yang bersifat kooperatif dengan nama Barisan Penyadar PSII. Pada tahun 1937, Barisan Penyadar secara resmi dikeluarkan dari PSII. Sayap yang radikal juga menyusun diri kembali. Pada bulan November 1936, Partindo bubar dan, pada bulan Mei 1937, Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) berdiri. Organisasi ini mencakup orang-orang radikal seperti Yamin dan orang yang kelak menjadi Perdana Menteri RI, seorang Batak Kristen yang beraliran kiri, Amir Sjarifuddin (1907–48). Tujuan Gerindo adalah terben-

tuknya parlemen penuh bagi Indonesia, tetapi atas dasar kerja sama dengan Belanda dalam melawan ancaman bersama yaitu fasisme, khususnya fasisme Jepang. Akan tetapi, tak satu pun di antara partai-partai tersebut menunjukkan dukungan yang nyata terhadap petisi Soetardjo.

Dengan sangat dominannya metode-metode kooperatif di kalangan elite Indonesia (orang-orang yang menolak metode-metode seperti itu tidak berani menonjol atau disingkirkan oleh pihak kepolisian) dan lunaknya usulan-usulan yang menjiwai petisi Soetardjo, tampaknya cita-cita luhur mereka yang memprakarsai politik Etis akhirnya dapat terwujud. Akan tetapi, para penguasa Belanda telah melewati jalan yang panjang sejak dasawarsa-dasawarsa pertama abad XX, sebagian besar dengan arah yang berlawanan. Akhirnya, pada bulan November 1938, keluarlah ketetapan kerajaan Belanda atas petisi tersebut: ditolak. Di Indonesia hanya timbul reaksi kecil, karena pada waktu itu hanya sedikit orang yang memperkirakan bahwa petisi tersebut akan berhasil. Sebagian besar kaum nasionalis Indonesia menyimpulkan bahwa sejak nonkooperasi hanya merupakan paspor menuju penjara atau pengasingan, maka hanya metode-metode yang lunak dan evolusionerlah yang mungkin dijalankan. Akan tetapi, sikap pemerintah tetap membuat mereka ragu-ragu apakah Belanda akan menanggapi secara baik maupun jujur.

Sementara itu, sastra Indonesia masih tetap bergairah dan membentuk suatu cita-cita tentang kebangsaan Indonesia yang sedikit pun tidak mengandung sifat khusus Islam. Pada bulan Juli 1933 mulai diterbitkan majalah sastra yang sangat berpengaruh pada kurun waktu sebelum perang, *Poedjangga Baroe.* Di bawah pimpinan redaktur seorang Minangkabau, Takdir Alisjahbana (1908–94), dan seorang Batak, Armijn Pane (1908–70), tersusunlah kaidah-kaidah sastra dan bahasa bagi bahasa persatuan Indonesia. Penyair yang sangat terkemuka pada masa itu, Amir Hamzah (1911–46), tampil di dalam *Poedjangga Baroe.* Suatu debat budaya juga dimuat di dalamnya, di mana Takdir menganjurkan modernisasi (yaitu diterimanya ide-ide Barat) sebagai bagian yang terpenting dari identitas baru Indonesia, sementara Sanusi Pane (saudara Armijn Pane) mengacu pada nilai-nilai budaya Asia pra-Islam. Tak seorang pun secara serius mengusulkan Islam sebagai dasar bagi kebudayaan baru ini. Balai Pustaka terus menerbitkan

roman-roman baru yang penting, termasuk *Salah Asuhan* karangan Abdul Muis pada tahun 1928 dan *Lajar Terkembang* karangan Takdir pada tahun 1936. *Belenggoe* karangan Armijn Pane ditolak oleh Balai Pustaka karena, dengan membahas hubungan cinta di luar nikah, dianggap tidak memenuhi standar-standar moral yang lazim; meskipun demikian, karya ini diterbitkan di dalam *Poedjangga Baroe* pada tahun 1940.

Ketika pimpinan Islam semakin menyadari tentang keterkucilannya dari perkembangan-perkembangan politik maupun budaya, dan menghadapi rezim kolonial yang semakin bersikap memusuhi, akhirnya meredalah pertikaian-pertikaian sengit antara golongan tradisional dan modernis. Kaum modernis menyadari bahwa pemurnian yang mereka inginkan akan memerlukan waktu yang panjang, sedangkan kaum tradisional menyadari bahwa kaum modernis tidak akan hilang dari lingkungannya. Pihak tradisional juga mulai menerima banyak dari pembaharuan yang disodorkan oleh kaum modernis yang tidak mengancam dominasi mazhab Syafi'i atau pemahaman keimanan mereka yang agak lebih fleksibel. Pada tahun 1928, Nahdlatul Ulama telah mulai menggunakan bahasa Jawa di samping bahasa Arab di dalam khotbah Jumatnya, dan sekolah-sekolah Islam tradisional di Jawa dan Minangkabau segera mulai memperkenalkan kurikulum-kurikulum formal dan sistem kelas bertingkat. Kedua golongan tersebut mulai menyadari bahwa apa pun perbedaan mereka, mereka dipersatukan dalam keyakinan kepada Islam.

Pada bulan September 1937, para pemimpin Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memprakarsai pembentukan Majlis Islam A'laa Indonesia, "dewan Islam tertinggi Indonesia", (MIAI). Persatuan Islam, al-Irsyad, dan hampir semua organisasi Islam lain di seluruh Indonesia segera bergabung ke dalam MIAI. MIAI tidak bertujuan untuk menjadi lembaga politik, melainkan lebih sebagai forum untuk melakukan diskusi. Banyak pertikaian berlanjut di dalam organisasi ini. Terdapat perselisihan tentang masalah-masalah syariat Islam yang mendasar yang, bagaimanapun juga, tidak dapat dirujukkan. Akan tetapi, di kalangan para pemimpin Islam memang benar-benar terdapat keinginan untuk bersatu. Meskipun demikian, mereka tetap tidak dapat mengubah keinginan itu menjadi suatu peran yang berarti dalam perkembangan-perkembangan politik maupun budaya.

PSII masih tetap terpecah ke dalam kelompok-kelompok. Pada tahun 1933, Surjopranoto dan Sukiman Wirjosandjojo mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) setelah mereka dikeluarkan dari PSII, tetapi organisasi ini tidak berkembang. Pada tahun 1938, Sukiman, Wiwoho Poerbohadidjojo, dan yang lain-lainnya menghidupkan kembali PII dan dengan cepat mengembangkannya di Jawa dah daerah-daerah luar Jawa. Inilah usaha serius terakhir sebelum Perang Dunia II untuk menegakkan Islam sebagai dasar persatuan politik di kalangan rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam banyak hal, perjuangan ini sudah gagal.

Segala harapan akan kemajuan politik pada waktu itu dihancurkan oleh bayang-bayang fasisme yang semakin meluas. Pada tahun 1931, Jepang menyerbu Manchuria; dua tahun kemudian, Hitler menjadi Kanselir Jerman; pada tahun 1936, berkobar Perang Saudara Spanyol dan, pada bulan Juli 1937, meletus perang Cina–Jepang; pada bulan Maret tahun berikutnya, Hitler mencaplok Austria dan, pada bulan September, Konferensi Munich membagi-bagi Chekoslowakia; pada bulan Maret 1939, Hitler menyerbu sisa-sisa wilayah negara ini. Persepsi bangsa Belanda dan Indonesia terpolarisasi ketika peperangan semakin membayang di Eropa dan Pasifik. Bangsa Indonesia menduga bahwa kesediaan mereka bekerja sama melawan fasisme dan akan terkurasnya kekuatan Belanda sebagai akibat perang seharusnya mengilhami Belanda untuk memberi semacam otonomi kepada Indonesia. Belanda beranggapan bahwa saat itu bukanlah waktunya untuk melakukan percobaan-percobaan politik baru, yang hanya akan meningkatkan ketidakstabilan dan ketidaktentuan dan yang, bagaimanapun juga, ditentang dengan keras oleh sebagian besar rakyat Belanda pada saat itu. Bahkan mereka semakin membatasi organisasi-organisasi Indonesia. Rapat-rapat dibubarkan dan pemimpin-pemimpin lokal ditangkap. Parindra, yang bersimpati kepada Jepang, merupakan sasaran khusus.

Pada bulan Mei 1939, organisasi-organisasi nasionalis Indonesia yang penting, kecuali PNI-Baru, membentuk GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang menghendaki dibentuknya parlemen penuh bagi Indonesia. Pada bulan Desember, GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia di Batavia yang dipandang sebagai suatu keberhasilan yang besar. Akan tetapi, di dalam Volksraad, kepemimpinan Indonesia masih tetap terpecah. Pada

tanggal 1 September 1939, Hitler menyerbu Polandia dan mulai berkobarlah Perang Dunia II di Eropa. GAPI menekan Belanda supaya memberikan otonomi sehingga dapat dibentuk aksi bersama Belanda–Indonesia dalam melawan fasisme. Tentu saja Belanda tidak memberi tanggapan. Pada bulan Februari 1940, pemerintah Belanda menyatakan bahwa selama tanggung jawab terakhir atas Indonesia masih di tangannya, tidak akan ada masalah otonomi maupun pemerintahan parlemen Indonesia.

Pada tanggal 10 Mei 1940, Hitler menyerbu negeri Belanda. Pemerintah Belanda lari ke pengasingan di London. Wajarlah apabila sesudah itu Belanda tidak mau mengubah status Indonesia di saat peperangan sedang berlangsung. Pada hari yang sama, di Indonesia diberlakukan undang-undang darurat perang dan segala rapat politik umum dilarang. Pemimpin-pemimpin Indonesia di dalam Volksraad masih terus berharap akan memperoleh beberapa konsesi dari Belanda, tetapi mereka tetap mengalami kekecewaan. Mereka hanya mendapat jawaban-jawaban yang samar-samar dari Gubernur Jenderal van Starkenborgh bahwa mungkin akan dilakukan beberapa perubahan setelah peperangan berakhir. Van Starkenborgh sebetulnya tidak dapat memperkirakan seberapa besar perubahan-perubahan yang akan terjadi kelak.

Tiga mosi di dalam Volksraad yang disponsori oleh Thamrin, Soetardjo, dan Wiwoho meminta agar pemerintah menggunakan istilah 'Indonesiër' (orang Indonesia) sebagai pengganti kata *inlander* (pribumi) dalam dokumen-dokumen resmi, menetapkan kewarganegaraan Hindia, dan melakukan penyelidikan agar mengubah Volksraad supaya menjadi semacam parlemen yang sebenarnya. Pada bulan Agustus 1940, mosi-mosi tersebut mendapat tanggapan yang umumnya negatif dari pemerintah sehingga ditarik kembali oleh para sponsornya. Pada bulan yang sama, GAPI memulai upayanya yang terakhir ketika organisasi tersebut mengusulkan pembentukan suatu uni Belanda–Indonesia yang berdasarkan atas kedudukan yang sama bagi kedua belah pihak, di mana Volksraad akan berubah menjadi badan legislatif yang bersifat bikameral atas dasar sistem pemilihan yang adil. MIAI mendukung GAPI tetapi, sesuai dengan ketidakluwesan yang berlaku umum di kalangan para pemimpin Islam dalam masalah-masalah seperti itu, MIAI menambahkan bahwa pimpinan dari

sistem baru ini dan dua pertiga anggota kabinet harus beragama Islam dan harus ada suatu kementerian untuk urusan-urusan Islam. Akan tetapi, tidak ada waktu lagi bagi Belanda untuk melakukan penolakan secara resmi.

Kini peperangan di Asia sudah di ambang pintu. Sudah sejak lama sumber-sumber alam Indonesia yang berupa minyak, karet, bauksit, timah, dan bahan-bahan strategis lainnya adalah penting di mata Jepang. Setelah sekitar tahun 1930, ketika dampak dari Depresi terasa di Indonesia, Jepang segera melakukan penembusan ekonomi secara damai dan bersamaan dengan itu memperluas kegiatan-kegiatan intelijennya. Jepang mendapat banyak simpati dari rakyat Indonesia yang menyambut gembira barang-barang Jepang yang murah dan pelayanan toko-tokonya yang sopan serta mengagumi kekuatannya. Menjelang akhir tahun 1930-an, bagian Jepang dalam perdagangan Indonesia turun drastis. Pada bulan Juli 1939 Amerika Serikat membatalkan perjanjian perdagangannya dengan Jepang dan mulai melakukan embargo terhadap pengiriman bahan-bahan strategis ke Jepang serta membekukan aktiva Jepang di Amerika Serikat. Hal ini bahkan mengakibatkan semakin pentingnya arti Indonesia bagi Jepang.

Pada bulan September 1940, Pakta Tiga Pihak mengesahkan persekutuan Jepang–Jerman–Italia. Prancis dikalahkan oleh Jerman pada bulan Juni 1940. Pada bulan September, pemerintah Prancis di Vichy yang bekerja sama dengan pihak Jerman memperbolehkan Jepang membangun pangkalan-pangkalan militer di Indocina jajahan Prancis. Pada saat itu, pemimpin-pemimpin Jepang mulai membicarakan secara terang-terangan tentang 'pembebasan' Indonesia. Di Den Haag sebelum jatuhnya negeri Belanda dan di Batavia sesudah itu, Jepang mendesak agar Belanda memperbolehkannya memasuki Indonesia seperti mereka diperbolehkan di Indocina, tetapi perundingan-perundingan itu akhirnya mengalami kegagalan pada bulan Juni 1941. Pada bulan Juli, ekspor Indonesia ke Jepang dihentikan dan aset Jepang di Indonesia dibekukan. Pada bulan yang sama, balatentara Jepang di Indocina diperkuat.

Belanda melakukan dua langkah penting lagi dalam rangka persiapan menghadapi perang. Langkah yang pertama adalah menyingkirkan beberapa orang yang berpotensi menimbulkan masalah. Pada bulan Januari 1941 pihak kepolisian menangkap

Thamrin, yang sedang sakit gawat, karena menjalin hubungan dengan pihak Jepang bersama-sama dengan Douwes Dekker yang menjabat sebagai sekretaris Kamar Dagang Jepang. Lima hari kemudian, Thamrin wafat di dalam tahanan. Memang tidak ada kesan bahwa pihak Belanda telah menganiayanya, tetapi kejadian ini berarti hilangnya seorang pemimpin yang terkemuka dan juga semakin mendalamnya perasaan curiga terhadap Belanda. Haji Rasul, yang sudah berusia 62 tahun namun masih tetap merupakan seorang pemimpin Islam modernis yang sangat aktif dan sumber gangguan yang tak ada habis-habisnya bagi pemerintah, ditangkap dan dibuang dari Minangkabau pada waktu yang sama. Banyak organisasi Indonesia mengajukan protes, tetapi sia-sia.

Selanjutnya, masalah pertahanan yang telah mengilhami bangsa Indonesia untuk mengusulkan pembentukan Volksraad pada tahun 1914–8 mengakhiri sejarah Volksraad. Pemerintah sedang memperbesar kekuatan militernya. Di antara tenaga-tenaga baru pada angkatan perang kolonial yang profesional itu terdapat tokoh yang di kemudian hari menjadi presiden kedua Indonesia, seorang pemuda Jawa bernama Soeharto (l. 1921) yang memasuki sekolah militer di Gombong (Jawa Tengah) pada bulan Juni 1940. Belanda juga ingin membentuk suatu milisi yang terdiri atas orang-orang Indonesia yang jumlahnya sampai 6.000 orang. Kaum nasionalis Indonesia di dalam Volksraad berpendapat bahwa seharusnya tidak ada milisi tanpa adanya parlemen penuh. Meskipun demikian, usulan tentang milisi tersebut disahkan Volksraad pada bulan Juli 1941 karena mendapat dukungan dari anggota-anggota yang ditunjuk oleh pemerintah dan yang berkebangsaan Eropa.

Akan tetapi, kini kekuasaan Belanda berada pada saat-saat terakhirnya. Pada tanggal 8 Desember 1941 (7 Desember di Hawaii), Jepang menyerang Pearl Harbor, Hongkong, Filipina, dan Malaysia. Negeri Belanda segera mengikuti jejak sekutu-sekutunya dengan menyatakan perang terhadap Jepang. Pada tanggal 10 Januari 1942, penyerbuan Jepang ke Indonesia dimulai. Pada tanggal 15 Februari, pangkalan Inggris di Singapura, yang menurut dugaan tidak mungkin terkalahkan, menyerah. Pada akhir bulan itu, balatentara Jepang menghancurkan armada gabungan Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika dalam pertempuran di laut Jawa. Tidak mengherankan apabila rakyat Indonesia mem-

berikan sedikit sekali bantuan kepada pasukan kolonial yang terancam dan kadang-kadang dengan senang hati berbalik melawan orang-orang sipil dan serdadu-serdadu Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1942, pihak Belanda di Jawa menyerah dan Gubernur Jenderal van Starkenborgh ditawan oleh pihak Jepang. Berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia. Ia hanya meninggalkan sedikit sahabat di kalangan rakyat Indonesia. Bahkan kalangan elite yang telah mengharapkan berlangsungnya evolusi melalui kerja sama kini benar-benar menyangsikan niat baik pihak Belanda. Dan di antara orang-orang Indonesia yang ditangkap di seluruh kepulauan ini terdapat suatu generasi pemimpin yang memandang kolonialisme Belanda sebagai beban berat yang tidak dapat ditahan lagi.[]

V

Runtuhnya Negara Jajahan, 1942–50

Bab 17 ....

Perang Dunia II dan Pendudukan Jepang, 1942–5

MASA PENDUDUKAN Jepang selama tiga setengah tahun merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Sebelum serbuan Jepang, tidak ada satu pun tantangan yang serius terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada waktu Jepang menyerah, telah berlangsung begitu banyak perubahan luar biasa yang memungkinkan terjadinya Revolusi Indonesia. Jepang memberi sumbangan langsung pada perkembangan-perkembangan tersebut. Terutama di Jawa, dan sampai tingkatan yang lebih kecil di Sumatera, mereka mengindoktrinasi, melatih, dan mempersenjatai banyak generasi muda serta memberi kesempatan kepada para pemimpin yang lebih tua untuk menjalin hubungan dengan rakyat. Di seluruh Nusantara, mereka mempolitisasi bangsa Indonesia sampai pada tingkat desa dengan sengaja dan dengan menghadapkan Indonesia pada rezim kolonial yang bersifat sangat menindas dan merusak dalam sejarahnya itu. Dengan demikian, desa-desa secara keras digoncang dari kelesuan dan isolasi politik yang terjadi pada akhir periode Belanda. Akhirnya, sesuatu yang paling menunjang ialah kekalahan Jepang dalam perang, karena andaikan tujuan mereka membentuk suatu 'Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya' tercapai, maka hanya ada sedikit harapan bagi kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya.

Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah oleh Jepang. Sumatera ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke-25, sedangkan Jawa dan Madura berada di bawah Angkatan Darat ke-16; kedua wilayah ini berada di bawah Angkatan Darat Wilayah ke-7 dengan markas besarnya di Singapura. Kalimantan dan Indonesia

Timur dikuasai oleh angkatan laut. Kebijakan di antara wilayah-wilayah tersebut sangat berbeda. Pada umumnya, Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju namun secara ekonomi kurang penting; sumber dayanya yang utama adalah manusia. Kebijakan-kebijakan Jepang di sana membangkitkan rasa kesadaran nasional yang jauh lebih mantap daripada di kedua wilayah lainnya, dan dengan demikian semakin memperbesar perbedaan tingkat kecanggihan politik antara Jawa dan daerah-daerah lainnya. Dikarenakan pentingnya arti perkembangan-perkembangan itu bagi masa yang akan datang, maka Jawa juga mendapatkan perhatian ilmiah yang lebih besar daripada pulau-pulau lainnya. Sumatera mempunyai arti yang penting untuk pihak Jepang karena sumber-sumber strategisnya, dan setelah Jepang berada di ambang kekalahan, barulah ide-ide nasionalis diperbolehkan berkembang di sana. Bagi Jepang, wilayah yang berada di bawah kekuasaan angkatan laut dianggap terbelakang secara politik dan penting secara ekonomi; pemerintahan atas wilayah tersebut bersifat sangat menindas.

Untuk menyapu bersih pasukan-pasukan Belanda dan Sekutu serta mengambil alih pemerintahan diperlukan waktu berbulan-bulan. Kekuatan militer Belanda tumbang; hanya ada segelintir gerombolan tentara yang masih tetap bertahan di beberapa daerah terpencil. Kebanyakan rakyat Indonesia tidak memberi bantuan kepada mereka. Di beberapa daerah, rakyat Indonesia malah menyerang serdadu-serdadu dan warga sipil Belanda, sehingga satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri ialah menyerah kepada pihak Jepang. Pihak Jepang berniat menawan semua orang Eropa (kecuali warga negara sekutu-sekutu Jepang, terutama orang-orang Jerman), tetapi dalam beberapa hal keahlian mereka dibutuhkan untuk menjaga agar industri-industri tetap berjalan. Setahun lebih telah berlalu sebelum hampir semuanya ditawan. Perkiraan-perkiraan tentang jumlah terakhir seluruh tawanan adalah sekitar 170.000 orang, 65.000 orang di antaranya tentara Belanda, 25.000 orang serdadu-serdadu Sekutu lainnya, dan 80.000 orang warga sipil (termasuk 60.000 wanita dan anak-anak). Kondisi di kamp-kamp tawanan sangat buruk. Kurang lebih 20% dari tawanan militer Belanda, 13% dari warga sipil wanita, dan 10% dari anak-anak meninggal dunia. Jumlah tertinggi korban yang wafat terdapat di kamp-kamp sipil pria, yaitu 40%.

Salah satu tugas pertama pihak Jepang adalah menghentikan revolusi-revolusi yang mengancam akan mengikuti penaklukan mereka. Serangan-serangan terhadap orang-orang Eropa dan perampokan terhadap rumah-rumah mereka di Banten, Cirebon, Surakarta, dan banyak kota kecil lainnya di Jawa tampak akan menjurus ke suatu gelombang revolusi. Di beberapa daerah, tindakan-tindakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam setempat. Orang-orang Eropa dan harta mereka, toko-toko dan para pedagang Cina, dan, di beberapa tempat, orang-orang Jawa Kristen menjadi sasaran kekerasan dan, terkadang, pembunuhan. Begitu pula, di Aceh dan di Sumatera Barat dan Timur, ketegangan penduduk asli yang berasal dari zaman penjajahan Belanda mulai meletus dalam tindak kekerasan. Para ulama Aceh membentuk PUSA (Persatuan Ulama-Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939 di bawah pimpinan Mohammad Daud Beureu'eh (1899–1987) untuk mempertahankan Islam dan mendorong modernisasi sekolah-sekolah Islam. Organisasi tersebut segera menjadi pusat perlawanan terhadap pejabat-pejabat *uleëbalang*, yang mendapat dukungan Belanda. PUSA telah menghubungi pihak Jepang dan merencanakan akan membantu serangan mereka. Pada tanggal 19 Februari 1942, tiga minggu sebelum mendaratnya Jepang di daerah itu, para ulama Aceh memulai kampanye sabotase terhadap Belanda. Pada awal bulan Maret, Aceh pun memberontak. Kebanyakan para *uleëbalang* memutuskan untuk tidak melawan arus, dan Belanda tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengungsi ke selatan. Para pemimpin PUSA berharap pihak Jepang memberi hadiah atas usaha mereka dengan menggeser kekuasaan para *uleëbalang*. Di Sumatera Timur, orang-orang Batak Karo bersama pimpinan Gerindo yang beraliran nasionalis membantu pihak Jepang dengan harapan menyaksikan terdepaknya kaum bangsawan dukungan Belanda dari kekuasaan mereka. Mereka mulai mendiami tanah yang mereka nyatakan sebagai milik mereka sendiri dan menyerang lawan-lawan mereka, terutama di daerah Deli pada bulan Juni–Juli 1942. Di Minangkabau, para ulama juga berharap menyaksikan terdepaknya pemimpin-pemimpin *penghulu* dari kekuasaan mereka.

Akan tetapi, Jepang harus menghadapi peperangan, dan prioritas mereka tidak mencakup menghadapi revolusi di wilayah-wilayah yang telah ditaklukkannya. Mereka dengan cepat turun

tangan di mana pun revolusi mengancam dan menghentikannya. Seperti halnya Belanda, mereka harus memerintah Indonesia dan tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyandarkan diri pada orang-orang setempat yang berpengalaman: para raja di Sumatera Timur, para *penghulu* di Minangkabau, para *uleëbalang* di Aceh, para penguasa priyayi di Jawa, dan kelompok-kelompok serupa di daerah-daerah lainnya. Walaupun sudah sejak lama propaganda mereka ditujukan untuk mendapatkan simpati para pemimpin Islam, tetapi pihak Jepang menyadari bahwa suatu kelompok yang umumnya telah menolak bekerja sama dengan Belanda mungkin pula akan menyusahkan mereka. Mereka memberi para pemimpin Islam kesempatan-kesempatan yang tidak pernah diberikan oleh Belanda, seperti yang akan kita lihat di bawah. Akan tetapi, ketika nanti kekalahan tak terelakkan lagi, barulah pihak Jepang memutuskan untuk membiarkan gelombang revolusi berjalan, dengan harapan menghalangi penaklukan kembali oleh Sekutu.

Tujuan utama Jepang adalah menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencana-rencananya bagi dominasi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara. Peraturan-peraturan baru yang mengendalikan dan mengatur kembali hasil-hasil utama Indonesia serta putusnya hubungan dengan pasar-pasar ekspor tradisional, secara bersama-sama menimbulkan kekacauan dan penderitaan yang menjadikan tahun-tahun terburuk dari Depresi tampak ringan. Jepang tidak dapat menampung semua hasil ekspor Indonesia, dan kapal-kapal selam Sekutu segera menimbulkan begitu banyak kerugian terhadap pelayaran Jepang sehingga komoditi-komoditi yang diperlukan Jepang pun tidak dapat dikapalkan dalam jumlah yang memadai. Pada tahun 1943, produksi karet adalah sekitar seperlima dari tingkat produksi tahun 1941 (di Jawa dan Kalimantan Barat, produksi karet hampir terhenti sama sekali), dan produksi teh sekitar sepertiganya. Jepang dan Formosa (Taiwan) akan menjadi pemasok utama gula untuk Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, sehingga komoditi yang merupakan sumber pokok pendapatan di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini (terutama bagi para buruh upahan yang tidak memiliki tanah) akan menurun. Pihak Jepang mulai mengambil alih perkebunan-perkebunan tebu pada bulan Agustus 1943, dan baru sesudah itulah pengelola-

pengelolanya yang berkebangsaan Eropa ditawan. Demikian pula, perkebunan tembakau yang luas di Sumatera Timur diubah untuk produksi pangan.

Sementara itu, pemerintahan militer membanjiri Indonesia dengan mata uang pendudukan, yang mendorong meningkatnya inflasi, terutama mulai tahun 1943 dan seterusnya. Pada pertengahan tahun 1945, mata uang ini bernilai sekitar 2,5 persen dari nilai nominalnya. Pengaturan pangan dan tenaga kerja secara paksa, gangguan transportasi dan kekacauan umum telah mengakibatkan timbulnya kelaparan, terutama pada tahun 1944 dan 1945. Angka kematian meningkat dan kesuburan menurun; sepanjang yang diketahui, pendudukan Jepang adalah satu-satunya periode selama dua abad di mana jumlah penduduk tidak meningkat secara berarti. Seperti wilayah-wilayah pendudukan lainnya, Indonesia menjadi suatu negeri yang tingkat penderitaan, inflasi, ketekoran, pencatutan, korupsi, pasar gelap, dan kematiannya sangat ekstrem.

Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas: menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan mereka dan memobilisasi mereka demi kemenangan Jepang. Seperti halnya Belanda, Jepang bermaksud menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menghadapi banyak masalah yang sama dengan yang dihadapi Belanda dan menggunakan banyak cara pemecahan yang sama (malah hukum kolonial Belanda tetap berlaku, terkecuali yang bertentangan dengan hukum militer Jepang). Akan tetapi, di tengah-tengah suatu perang besar yang memerlukan pemanfaatan maksimum atas sumber-sumber, pihak Jepang memutuskan untuk berkuasa melalui mobilisasi (khususnya di Jawa dan Sumatera) daripada dengan memaksakan suatu ketenangan yang tertib. Dengan berkembangnya peperangan, maka usaha-usaha mereka yang semakin menggelora untuk memobilisasi rakyat Indonesia telah meletakkan dasar bagi Revolusi yang terjadi kemudian.

Perlu diingat betapa cepatnya kemajuan militer Jepang terhenti. Pada bulan Mei 1942, suatu serangan terhadap Australia terhenti dalam pertempuran Laut Koral. Suatu serangan serupa terhadap Hawaii terhenti di Midway pada bulan Juni. Pada bulan Agustus 1942, pasukan-pasukan Amerika mendarat di Guadalkanal (Kepulauan Solomon); pada bulan Februari 1943, pihak Jepang berhasil dipukul mundur dari sana dengan menderita banyak

kerugian. Mulai tahun 1943, Amerika ganti menjadi pihak ofensif di wilayah Pasifik. Oleh karena itu, kebijaksanaan Jepang di Indonesia berkembang dalam konteks militer yang terus-menerus memburuk. Ketika perang mendekati akhirnya, barulah pihak Jepang benar-benar menyadari bahwa kekalahan tidak terelakkan lagi. Namun demikian, sejak tahap pertama pendudukan mereka atas Indonesia, mereka sudah memperkirakan kemungkinan serbuan pihak Sekutu. Bagaimanapun juga, dalam kenyataan akhirnya, kemajuan Sekutu akan melangkahi sebagian besar wilayah Indonesia.

Untuk memusnahkan pengaruh Barat, maka pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan memajukan pemakaian bahasa Jepang. Pelarangan terhadap buku-buku yang berbahasa Belanda dan Inggris membuat pendidikan yang lebih tinggi benar-benar mustahil ada selama masa perang. Kalender Jepang diperkenalkan untuk tujuan-tujuan resmi, patung-patung Eropa diruntuhkan, jalan-jalan diberi nama baru, dan Batavia dinamakan Jakarta lagi, sebuah nama yang tidak pernah benar-benar hilang dalam pemakaiannya di kalangan orang Indonesia. Suatu kampanye propaganda yang intensif dimulai untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka dan bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan dalam perang yang luhur untuk membentuk suatu tatanan baru di Asia. Pihak Jepang mempekerjakan orang-orang Indonesia untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan propaganda mereka, khususnya guru-guru sekolah, para seniman, dan tokoh-tokoh sastra yang dikenal anti-Belanda. Muhammad Yamin, Sanusi Pane, dan Armijn Pane adalah sebagian dari mereka itu. Film, drama, wayang, dan terutama radio digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan Jepang. Karena sedikitnya radio, maka banyak propaganda radio disiarkan lewat pengeras-pengeras suara yang dipasang pada tempat-tempat umum. Akan tetapi, upaya propaganda ini sering mengalami kegagalan karena adanya kenyataan-kenyataan berikut akibat pendudukan Jepang: kekacauan ekonomi, teror Polisi Militer *(Kenpeitai)*, kerja paksa, penyerahan wajib beras, kesombongan dan kekejaman orang-orang Jepang pada umumnya, pemukulan dan pemerkosaan, serta kewajiban memberi hormat kepada setiap orang Jepang. Orang-orang yang telah menyambut baik orang-orang Jepang sebagai pembebas sering kali dengan

cepat menjadi kecil hati. Namun, bagaimanapun juga, kampanye anti-Barat ini benar-benar mempertajam sentimen anti-Belanda pada seluruh masyarakat Indonesia dan mendorong menyebarnya gagasan tentang Indonesia di kalangan rakyat. Karena bahasa Jepang hanya sedikit diketahui, maka bahasa Indonesia menjadi sarana bahasa yang utama untuk propaganda dan, dengan demikian, statusnya sebagai bahasa nasional menjadi semakin kokoh.

Sampai bulan Agustus 1942, Jawa tetap berada di bawah struktur-struktur pemerintahan sementara, tetapi kemudian dilantik suatu pemerintahan yang dikepalai oleh seorang gubernur militer *(gunseikan)*. Banyak orang Indonesia diangkat untuk mengisi tempat pejabat-pejabat Belanda yang ditawan, tetapi banyak pula pejabat-pejabat berkebangsaan Jepang yang diangkat. Kebanyakan pejabat-pejabat baru yang berkebangsaan Indonesia itu adalah para mantan guru, dan kepindahan mereka dari sistem pendidikan mengakibatkan merosotnya secara tajam standar pendidikan.

Untuk membantu orang Jepang mengatur negeri ini, maka di samping para pejabat baru tersebut, pihak Jepang di Jawa juga mencari pemimpin-pemimpin politik guna membantu memobilisasi rakyat. Pertama-tama mereka menghapuskan semua organisasi politik. Pada bulan Maret 1942, semua kegiatan politik dilarang dan kemudian semua perkumpulan yang ada secara resmi dibubarkan dan pihak Jepang mulai membentuk organisasi-organisasi baru. Sejak mula pertama, Islam tampak menawarkan suatu jalan utama bagi mobilisasi. Pada akhir bulan Maret 1942, pihak Jepang di Jawa sudah mendirikan sebuah Kantor Urusan Agama (dalam bahasa Jepang: *Shumubu)*.

Pada bulan April 1942, usaha pertama dalam bentuk gerakan rakyat, "Gerakan Tiga A", dimulai di Jawa. Nama ini berasal dari slogan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, pelindung Asia, dan cahaya Asia. Di dalam gerakan tersebut, pada bulan Juli, didirikan suatu subseksi Islam yang dinamakan Persiapan Persatuan Umat Islam di bawah pimpinan Abikoesno Tjokrosoejoso (l. 1897), saudara Tjokroaminoto dan penggantinya sebagai Ketua PSII. Abikoesno untuk sementara dianggap oleh pihak Jepang sebagai pemimpin Islam Indonesia yang wajar. Akan tetapi, ini tidak lama sebelum pihak Jepang (seperti halnya orang-orang Belanda) mulai meragukan pemimpin-pemimpin

Islam modernis yang aktif secara politik, seperti yang akan dilihat di bawah. Secara umum, Gerakan Tiga A tidak berhasil mencapai tujuan-tujuannya. Para pejabat Indonesia hanya memberi sedikit dukungan. Juga, tidak ada seorang nasionalis Indonesia terkemuka yang terlibat di dalamnya. Selain itu, propagandanya dilancarkan secara keras sehingga bahkan pada masa-masa awal pendudukan pun hanya sedikit orang Indonesia yang menanggapinya secara serius.

Pihak Jepang mulai menyadari bahwa apabila mereka hendak memobilisasi rakyat Jawa, mereka harus memanfaatkan tokoh-tokoh terkemuka gerakan nasionalis sebelum perang. Sjahrir dan Hatta telah dipulangkan ke Jawa oleh pihak Belanda, tidak lama sebelum penyerangan Jepang. Kedua tokoh ini menentang fasisme dan telah menawarkan dukungan mereka kepada pihak Belanda. Hatta dan Sjahrir bersahabat akrab dan memutuskan untuk memakai strategi-strategi yang bersifat saling melengkapi dalam situasi baru kekuasaan Jepang. Hatta akan bekerja sama dengan pihak Jepang, berusaha mengurangi kekerasan pemerintahan mereka, dan memanipulasi kejadian-kejadian untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sjahrir akan tetap menjauhkan diri dan membentuk suatu jaringan 'bawah tanah' yang didukung terutama oleh para mantan anggota PNI-Baru, dan akan berusaha menjalin hubungan dengan pihak Sekutu. Sjahrir dan Hatta saling berhubungan dengan erat selama perang berlangsung.

Pada tanggal 9 Juli 1942, Sukarno, yang telah dikirim ke Jakarta oleh pihak Jepang di Sumatera atas permintaan Angkatan Darat ke-16, bergabung dengan Hatta dan Sjahrir. Sukarno tidak begitu tertarik terhadap perbedaan-perbedaan teoretis antara fasisme dan demokrasi dan menganggap perang tersebut terutama sebagai pertarungan antara kedua macam imperialisme. Dia bergabung dengan Hatta dalam bekerja sama dengan pihak Jepang demi tujuan yang lebih luhur, yaitu kemerdekaan. Sukarno dan Hatta mulai segera mendesak pihak Jepang yang masih tetap merasa enggan supaya membentuk suatu organisasi politik massa di bawah pimpinan mereka.

Hanya seorang pemimpin terkemuka dari masa sebelum perang yang melakukan kegiatan perlawanan atau bawah tanah yang aktif di Indonesia, sebagaimana istilah-istilah tersebut dipahami dalam konteks Eropa yang sedang diduduki (walaupun

ada beberapa orang Indonesia di negeri Belanda yang bergabung dengan gerakan bawah tanah Belanda). Tak lama sebelum kemenangan Jepang, Amir Sjarifuddin menerima sejumlah besar uang dari seorang pejabat Belanda guna membentuk gerakan perlawanan anti-Jepang. Akan tetapi, kini perlawanan bersenjata malah lebih sia-sia lagi daripada semasa di bawah Belanda. Polisi Militer Jepang menembus organisasi Amir dan, pada bulan Januari 1943, dia dan 53 orang lainnya ditangkap. Pada bulan Februari 1944, beberapa orang pembantunya dihukum mati, sedang hukuman Amir sendiri diperingan menjadi seumur hidup karena adanya permintaan dari Sukarno dan Hatta. Pihak Jepang tidak berani melukai perasaan elite intelektual di Jawa yang sedikit sekali jumlahnya dengan menghukum mati salah seorang anggotanya yang terkemuka.

Di daerah-daerah luar Jawa ada beberapa perlawanan dari kelompok-kelompok yang tidak ada kaitannya dengan kaum politisi perkotaan dari masa sebelum perang. Suatu pemberontakan petani terhadap pihak Jepang di Aceh dipimpin oleh seorang ulama muda pada bulan November 1942, tetapi dapat ditumpas dengan korban seratus orang Aceh lebih dan delapan belas orang Jepang. Di Kalimantan Barat dan Selatan, pihak Jepang mencurigai adanya komplotan-komplotan yang melawan mereka di kalangan orang-orang Cina, para pejabat, dan bahkan para sultan. Semua komplotan semacam itu dihancurkan melalui penangkapan-penangkapan di Kalimantan Selatan pada bulan Juli 1943 dan pemenjaraan terhadap sedikitnya 1.000 orang, termasuk dua belas orang sultan, di Kalimantan Barat antara September 1943 dan awal tahun 1944. Suatu usaha untuk mendirikan negara Islam di daerah Amuntai, Kalimantan Selatan, ditumpas pada bulan September 1943. Pada akhir tahun 1944, orang-orang Dayak di Kalimantan Barat mulai membunuh orang-orang Jepang. Akan tetapi, tak satu pun dari bentuk-bentuk perlawanan rakyat tersebut yang benar-benar mengancam kekuasaan Jepang, dan semuanya mengalami akibat-akibat yang sangat buruk.

Di Jawa tidak ada satu pun perlawanan rakyat yang serius sampai tahun 1944. Sementara itu, pihak Jepang mencari pemimpin-pemimpin Indonesia untuk membantu mereka memobilisasi rakyat demi kepentingan perang. Pada bulan September 1942, di Jakarta diselenggarakan suatu konferensi para pemimpin

Islam yang menelurkan hasil-hasil yang mengecewakan pihak Jepang. Ini memaksa mereka mengalihkan pandangan kepada kelompok-kelompok pimpinan lainnya. Pihak Jepang berharap akan mengganti MIAI dari masa sebelum perang dengan suatu organisasi baru yang berada di bawah arahan mereka. Akan tetapi, para pemimpin Islam tidak hanya memutuskan untuk tetap mempertahankan MIAI, melainkan juga memilih pengurus baru yang lebih didominasi oleh tokoh-tokoh PSII daripada pemimpin-pemimpin Muhammadiyah dan NU yang pada dasarnya bersifat nonpolitik. Pihak Jepang memang sudah meragukan para politisi Islam perkotaan. Mereka mulai menyadari bahwa jalan menuju rakyat melalui Islam hanya dapat diberikan oleh Muhammadiyah dan NU yang memiliki sekolah-sekolah, kegiatan-kegiatan kesejahteraan, dan hubungan-hubungan informal yang membentang dari wilayah-wilayah perkotaan sampai ke kota-kota kecil serta desa-desa, dan yang tidak mempunyai tuntutan-tuntutan politik yang jelas. Jelaslah, diperlukan suatu pendekatan baru untuk mobilisasi.

Pada bulan Oktober 1942, suatu pertemuan para pimpinan daerah-daerah pendudukan di Tokyo diberi tahu bahwa, dengan terhentinya kemajuan militer, mobilisasi rakyat di wilayah-wilayah pendudukan harus diberi prioritas. Kolonel Horie Choso, Kepala Kantor Urusan Agama di Jakarta, melakukan perjalanan keliling Jawa pada akhir tahun itu, mengadakan pertemuan dengan para kyai yang pesantren-pesantrennya tampaknya menjadi alat yang ideal untuk memobilisasi dan mengindoktrinasi para pemuda. Pada bulan Desember 1942, Horie mengatur agar 32 orang kyai diterima di Jakarta oleh Gunseikan, suatu kehormatan yang tidak mungkin terjadi pada zaman Belanda. Pihak Jepang kini menemukan saluran bagi mobilisasi. Pada bulan Desember, mereka membuka saluran lain lagi dengan berjanji di depan suatu pertemuan rakyat Jakarta bahwa sebuah partai politik baru akan segera didirikan.

Pada awal tahun 1943, pihak Jepang mulai mengerahkan usaha-usahanya pada mobilisasi. Gerakan-gerakan pemuda yang baru diberi prioritas tinggi dan ditempatkan di bawah pengawasan ketat pihak Jepang. Pada bulan Agustus 1942, sekolah-sekolah latihan bagi para pejabat dan guru baru sudah dibuka di Jakarta dan Singapura, tetapi kini organisasi-organisasi pemuda

berkembang jauh lebih luas. Suatu Korps Pemuda (Seinendan) yang bersifat semi militer dibentuk pada bulan April 1943 untuk para pemuda yang berusia antara 14 dan 25 tahun (kemudian 22 tahun). Korps tersebut mempunyai cabang-cabangnya sampai ke desa-desa yang besar, tetapi terutama aktif di daerah-daerah perkotaan. Untuk para pemuda yang berusia 25 sampai 35 tahun, dibentuklah suatu Korps Kewaspadaan (Keibodan) sebagai organisasi pembantu polisi, kebakaran, dan serangan udara. Pada pertengahan tahun 1943, dibentuk Heiho (Pasukan Pembantu) sebagai bagian dari angkatan darat dan angkatan laut Jepang. Pada akhir perang, sekitar 25.000 pemuda Indonesia berada dalam Heiho, di mana mereka mendapat latihan dasar yang sama dengan para serdadu Jepang. Berbagai organisasi lainnya juga dibentuk, yang beberapa di antaranya akan dibahas di bawah. Pada semua organisasi itu terdapat indoktrinasi yang intensif dan disiplin yang keras. Konon, lebih dari dua juta pemuda Indonesia berada dalam organisasi-organisasi semacam itu pada akhir perang, kira-kira 60% di antaranya dalam Keibodan.

Pada bulan Maret 1943, organisasi politik yang dijanjikan juga muncul di Jawa dan Gerakan Tiga A dihapuskan. Badan baru itu dinamakan Putera, sebuah singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Badan ini berada di bawah pengawasan ketat pihak Jepang, tetapi empat orang Indonesia yang terkemuka diangkat sebagai ketuanya: Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Kyai Haji Mas Mansur (1896–1946), Ketua Muhammadiyah dari masa sebelum perang. Dengan demikian, pihak Jepang telah menghubungkan dua orang tokoh nasionalis perkotaan yang terkemuka dengan pemimpin dua sistem pendidikan yang penting. Akan tetapi, organisasi baru ini lagi-lagi hanya mendapat sedikit dukungan, antara lain karena pihak Jepang tetap tidak bersedia memberi kebebasan kepada kekuatan-kekuatan rakyat yang begitu potensial. Misalnya, pihak Jepang tidak memberi Putera kekuasaan apa pun atas gerakan-gerakan pemuda. Dalam kenyataannya, Dewantara kembali ke Yogyakarta pada awal tahun 1944 untuk memusatkan perhatian pada sekolah-sekolah Taman Siswanya guna melewati masa-masa sulit, sedangkan Mansur sedikit demi sedikit menarik diri dari keterlibatan aktif, mungkin dikarenakan kesehatannya yang buruk.

Kini, pihak Jepang mencoba mengembangkan para guru Islam tradisional pedesaan sebagai mata rantai utama mereka dengan rakyat Jawa. Terdapat banyak kesulitan antara pihak Jepang dengan para pemimpin Islam pada umumnya, khususnya antara mereka dengan kaum Islam modernis di kota-kota. Haji Rasul memimpin perlawanan Islam terhadap sikap membungkuk sebagai penghormatan kepada Kaisar di Tokyo yang bertentangan dengan kewajiban seorang muslim untuk bersembahyang menghadap ke Mekah dan tunduk hanya kepada Tuhan. Akhirnya, pihak Jepang sepakat tentang tidak perlunya membungkukkan badan kepada Kaisar pada upacara-upacara keagamaan. Pihak Jepang juga menginginkan agar Perang Dunia II dinyatakan sebagai Perang Sabil, yang dengan tegas ditolak oleh kaum muslim karena orang-orang Jepang, seperti halnya Sekutu, adalah kaum kafir: peperangan atas nama mereka tidak dapat disebut sebagai Perang Sabil. Pada akhir tahun 1942, pihak Jepang juga harus melupakan keinginan mereka melarang pemakaian bahasa Arab, tetapi penggunaan itu hanya dilakukan dengan syarat bahwa bahasa Jepang juga diajarkan di sekolah-sekolah Islam dan bahwa kurikulum pihak Jepang bagi pelajaran-pelajaran nonagama diterima. Pihak Jepang tetap mempertahankan Peraturan Guru *(goeroe ordonnantie)* tahun 1925 dan para pejabat bangsa Indonesia bahkan melaksanakannya secara lebih keras, baik sebagai perlawanan mereka terhadap kaum elite Islam maupun karena rasa takut akan tindakan disipliner pihak Jepang apabila mereka tampak terlalu lunak. Sekolah-sekolah Islam modernislah yang paling terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan ini.

Sementara para politisi Islam modernis di kota-kota dan pihak Jepang saling merasa kecewa, para kyai wilayah pedesaan Jawa yang lebih sederhana tampak lebih menyetujui akan rencana-rencana pihak Jepang. Kombinasi disiplin fisik, militer, dan rohani orang-orang Jepang menyentuh perasaan yang responsif di kalangan masyarakat pesantren. Pada bulan Juli 1943, pihak Jepang mulai membawa kelompok-kelompok kyai yang berjumlah sekitar enam puluh orang ke Jakarta untuk mengikuti kursus-kursus latihan selama kurang lebih sebulan. Sampai bulan Mei 1945, lebih dari seribu orang kyai telah menyelesaikan kursus-kursus tersebut. Di dalamnya mereka mendengarkan bebe-

rapa ceramah tentang masalah-masalah agama, tetapi terutama diindoktrinasi dengan propaganda Jepang. Mereka tampaknya begitu bermanfaat bagi maksud-maksud pihak Jepang sehingga semua usaha yang dilakukan MIAI sendiri untuk mengorganisasikan para kyai dihalangi oleh pihak Jepang. Pimpinan MIAI ingin menjalin hubungan dengan Islam pedesaan, tetapi pihak Jepang lebih suka berurusan langsung dengan mereka yang sudah mempunyai hubungan itu.

Untuk merangsang dukungan terhadap perang yang semakin memburuk, pihak Jepang juga mulai menjanjikan keterlibatan beberapa orang Indonesia dalam urusan-urusan pemerintahan di Jawa. Pada bulan Agustus dan Oktober 1943, berturut-turut Birma dan kemudian Filipina diberi kemerdekaan semu. Jawa dianggap belum siap memperoleh kemerdekaan, tetapi beberapa dewan dibentuk untuk memberi kesan adanya partisipasi. Jumlah orang Indonesia yang menjadi penasihat *(sanyo)* pemerintahan Jepang bertambah banyak. Di Jakarta dibentuk Dewan Penasihat Pusat (Chuo Sangi-in) yang diketuai oleh Sukarno, dan dewan-dewan daerah (Shu Sangi-kai) juga dibentuk. Akan tetapi, kesemuanya itu berfungsi sebagai penasihat belaka. Langkah-langkah yang malah kurang berarti lagi terhadap keterlibatan rakyat dimulai di Sumatera pada akhir tahun 1943. Pada tahapan ini, angkatan laut tidak melakukan langkah-langkah yang sama di wilayahnya kecuali memperkenankan adanya beberapa konsultasi dalam pemerintahan kotapraja.

Angkatan Darat ke-16 Jepang di Jawa ingin bergerak lebih cepat dalam menarik peran serta bangsa Indonesia daripada yang dilakukan Angkatan Darat ke-25 di Sumatera, angkatan laut di Indonesia Timur, ataupun Tokyo. Mungkin karena alasan inilah maka Sukarno, Hatta, dan Ketua Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo (l. 1890), terbang ke Tokyo pada bulan November 1943 untuk diberi tanda jasa oleh Kaisar. Inilah saat pertama kali Sukarno berada di luar negeri atau melihat sebuah negara industri. Perjalanan ini mungkin mempunyai kesan yang hebat bagi Sukarno, tetapi usahanya untuk memperoleh dukungan pihak Jepang yang lebih besar bagi nasionalisme Indonesia mengalami kegagalan. Perdana Menteri Jenderal Tojo Hideki (1941–4) menolak permintaannya untuk menggunakan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" atau bendera Sang Merah-Putih.

Pihak Jepang masih tetap membutuhkan sumber-sumber alam Indonesia untuk keperluan perang, dan semua hal selain itu tak begitu penting. Tenaga kerja Indonesia kini mulai dieksploitasi secara lebih kejam daripada saat-saat sebelumnya. Pada bulan Oktober 1943, pihak Jepang memerintahkan penghimpunan 'serdadu-serdadu ekonomi' *(romusha)*, terutama para petani yang diambil dari desa-desa mereka di Jawa dan dipekerjakan sebagai buruh di mana pun pihak Jepang memerlukan mereka, sampai ke Birma dan Siam. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terlibat, tetapi kemungkinan besar paling sedikit ada 200.000 orang dan mungkin sampai sebanyak setengah juta orang. Di antara mereka, tidak lebih dari 70.000 orang yang dapat ditemukan dalam keadaan hidup pada akhir perang. Keluarga mereka ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, pihak Jepang memberlakukan peraturan-peraturan baru bagi penjualan beras secara wajib kepada pemerintah dengan harga rendah, yang sebenarnya merupakan sistem penyerahan wajib guna memenuhi kebutuhan balatentara Jepang. Para pejabat bangsa Indonesia yang harus melaksanakan pengerahan *romusha* dan penyerahan beras secara wajib sangat dibenci oleh penduduk desa.

Pada bulan Oktober 1943, pihak Jepang membentuk organisasi pemuda Indonesia yang paling berarti, yaitu Peta (Pembela Tanah Air). Organisasi ini merupakan suatu tentara sukarela bangsa Indonesia. Pada akhir perang, anggotanya berjumlah 37.000 orang di Jawa, 1.600 di Bali, dan sekitar 20.000 orang di Sumatera (di mana organisasi ini biasanya dikenal dengan nama Jepangnya, Giyugun, 'prajurit-prajurit sukarela'). Tidak seperti Heiho, Peta tidak secara resmi menjadi bagian dari balatentara Jepang, melainkan dimaksudkan sebagai pasukan gerilya pembantu guna melawan serbuan pihak Sekutu. Korps perwiranya meliputi para pejabat, para guru, para kyai, dan orang-orang Indonesia yang sebelumnya menjadi serdadu kolonial Belanda. Di antara mereka adalah seorang bekas guru sekolah Muhammadiyah yang bernama Soedirman (? 1915–50), yang nantinya menjadi salah seorang tokoh militer terkemuka pada masa revolusi. Disiplin Peta sangat ketat dan ide-ide nasionalis Indonesia dimanfaatkan dalam indoktrinasi.

Pada bulan Oktober 1943, pihak Jepang juga membentuk organisasi baru untuk mengendalikan Islam. MIAI dibubarkan

dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang mempunyai cabang-cabangnya di setiap keresidenan di Jawa. Pihak Jepang benar-benar melangkahi para politisi Islam modernis perkotaan yang sebelumnya berhasil mendominasi MIAI; kepemimpinan Masyumi diserahkan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU. Hasjim Asjari, pendiri NU yang pernah dipenjarakan dengan konyol oleh Jepang pada awal pendudukan mereka tapi kemudian dibebaskan pada bulan Agustus 1942, dijadikan sebagai ketua Masyumi, namun dia tetap tinggal di pesantrennya di Jombang. Yang menjadi ketua efektif adalah putranya, Kyai Haji Wachid Hasjim (1913–53).

Pada bulan Januari 1944, Putera digantikan oleh suatu gerakan rakyat yang baru dalam rangka mencari suatu organisasi atap yang lebih memuaskan guna memobilisasi penduduk Jawa. Jawa Hokokai, 'persatuan kebaktian Jawa', didirikan bagi setiap orang yang berusia lebih dari empat belas tahun. Gunseikan menjadi ketua persatuan tersebut, sedangkan Sukarno dan Hasjim Asjari dijadikan penasihat utamanya, sementara pengelolaannya diserahkan kepada Hatta dan Mansur. Pihak Jepang tentu saja bermaksud memanfaatkan para pemimpin Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri, tetapi para pemimpin Indonesia tersebut kini mengambil keuntungan dari orang-orang Jepang. Sukarno sangat berhasil dalam memanfaatkan tamasya propaganda bagi Hokokai untuk memperkokoh posisinya sendiri sebagai pemimpin utama kekuatan rakyat. Para pejabat priyayi terikat secara langsung pada organisasi baru itu dengan dijadikannya mereka sebagai ketuanya pada setiap tingkat pemerintahan. Hokokai juga memiliki suatu alat organisasi untuk menembus desa-desa. Rukun Tetangga (dalam bahasa Jepang: *Tonari Gumi*) dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk menjadi sel-sel yang terdiri atas sepuluh sampai dua puluh keluarga untuk mobilisasi, indoktrinasi, dan pelaporan. Para penguasa tingkat bawah dan kepala-kepala desa bertanggung jawab atas sel-sel tersebut. Pada bulan Februari 1944, para kepala desa juga mulai menjalani kursus-kursus indoktrinasi.

Akan tetapi, pihak Jepang mulai menyadari bahwa mereka akan kalah dalam perang dan kehilangan kendali atas kekuatan rakyat yang sudah digairahkan mereka. Pada bulan Februari 1944, perlawanan serius pertama kaum tani di Jawa terhadap

kewajiban menyerahkan beras meletus di sebuah desa di Priangan dan berhasil ditumpas secara kejam. Perlawanan ini dipimpin oleh seorang kyai NU setempat bersama murid-muridnya, orang-orang dari kelompok yang justru paling diharapkan oleh pihak Jepang untuk dapat dimanfaatkan. Pemberontakan-pemberontakan selanjutnya yang dipimpin oleh para haji setempat meletus di Jawa Barat pada bulan Mei dan Agustus, dan sejak saat itu dan seterusnya protes-protes kaum tani yang terisolasi menjadi semakin umum. Pihak Jepang berusaha mendapatkan pegangan yang lebih kuat pada Islam pedesaan dengan jalan mendirikan cabang-cabang Kantor Urusan Agama di seluruh Jawa. Pada bulan Agustus, mereka mengangkat Hasjim Asjari (yang dalam kenyataannya diwakili oleh putranya, Wachid Hasjim) sebagai kepala kantor itu. Akan tetapi, sekali berkobar, kekuatan revolusioner Islam pedesaan tersebut tidak dapat dengan mudah dikuasai. Di kota-kota besar, terutama di Jakarta dan Bandung, para pemuda yang berpendidikan mulai menggalang jaringan-jaringan bawah tanah mereka sendiri, yang dalam banyak hal ada di bawah pengaruh Sjahrir. Mereka tahu bahwa posisi Jepang dalam perang memburuk, dan mereka mulai menyusun rencana-rencana untuk merebut kemerdekaan nasional dari kekalahan yang mengancam Jepang itu.

Pada bulan Februari 1944, pasukan-pasukan Amerika berhasil mengusir Jepang dari Kwajalein di Kepulauan Marshall, dan serangan-serangan pengebom B-29 terhadap Jepang dimulai pada bulan Juni. Pada bulan yang sama, angkatan laut pihak Jepang menderita suatu kekalahan yang melumpuhkan dalam pertempuran di Laut Filipina. Pada bulan Juli, pihak Jepang kehilangan pangkalan angkatan laut mereka di Saipan (Kepulauan Mariana), yang mengakibatkan terjadinya krisis kabinet di Jepang. Tojo meletakkan jabatan dan Jenderal Koiso Kuniaki menggantikannya sebagai perdana menteri (1944–5). Ia memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memikirkan kemerdekaan semu bagi Indonesia. Sementara itu, serbuan yang dilakukan pihak Sekutu terhadap Eropa bagian utara telah dimulai pada bulan Juni dan sekutu Jepang di Eropa sedang menghadapi kekalahan. Pada bulan September, pasukan-pasukan Amerika mendarat di Morotai, dekat Halmahera di bagian timur Indonesia. Pada bulan yang sama, pesawat-pesawat Amerika mulai mengebom Manila.

Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi 'To-Indo' (istilah dalam bahasa Jepang untuk 'Hindia Timur' yang terus dipakai secara resmi sampai bulan April 1945). Akan tetapi, dia tidak menentukan tanggal kemerdekaan itu, dan jelas diharapkan bahwa bangsa Indonesia akan membalas janji ini dengan cara mendukung Jepang sebagai tanda terima kasih. Angkatan Darat ke-16 di Jawa kini diberi tahu supaya mendorong kekuatan-kekuatan nasionalis, dan bendera Indonesia boleh dikibarkan di kantor-kantor Jawa Hokokai. Pada umumnya, pihak angkatan laut masih tidak tertarik pada keseluruhan gagasan tersebut. Sejak bulan Maret 1944, angkatan laut telah membentuk beberapa komite penasihat di daerah kekuasaannya, tetapi komite-komite itu tidak mempunyai kekuasaan, hanya beranggotakan para pejabat serta bangsawan pribumi, dan hanya mengadakan pertemuan beberapa kali sebelum menyerahnya Jepang. Angkatan Darat ke-25 di Sumatera mengumumkan berdirinya suatu Badan Penasihat Pusat (Sumatera Chuo Sangi-in) yang sifatnya konsultatif untuk pulau itu pada bulan Maret 1945, tetapi lembaga ini hanya satu kali mengadakan pertemuan di Bukittinggi sebelum berakhirnya perang.

Sementara pihak angkatan laut masih tetap menentang setiap usaha untuk memajukan nasionalisme di wilayah kekuasaannya, seorang perwira angkatan laut yang luar biasa yang ditempatkan di Jawa kini mengambil peran aktif. Laksamana Madya Maeda Tadashi bertugas menangani kantor penghubung angkatan darat–angkatan laut di Jakarta. Dia mempunyai pandangan-pandangan maju mengenai nasionalisme Indonesia. Dia kini mulai menggunakan dana angkatan laut untuk membiayai perjalanan pidato keliling Sukarno dan Hatta, bahkan mengirim mereka ke Makasar pada bulan April 1945 serta ke Bali dan Banjarmasin pada bulan Juni. Pada bulan Oktober 1944, dia juga mendirikan Asrama Indonesia Merdeka di Jakarta untuk melatih para pemimpin pemuda yang baru bagi sebuah negara merdeka atau, kemungkinan lain, untuk menemukan cara untuk menyusup ke jaringan-jaringan bawah tanah pemuda yang telah ada. Maeda menjadi orang kepercayaan banyak orang Indonesia terkemuka dari berbagai tingkat usia, dan memberikan andil pada proses yang menjadikan para pemimpin dari generasi muda dan tua saling mengenal dan memahami (jika tidak selalu saling menghormati) satu sama lain di Jakarta.

Kini dibentuklah kelompok-kelompok pemuda dan militer yang baru. Untuk pertama kalinya, Jawa Hokokai diberikan organisasi pemuda sendiri, Barisan Pelopor, yang pada akhir perang konon beranggotakan 80.000 orang. Pada mulanya, Barisan Pelopor akan digunakan untuk menyiarkan propaganda, tetapi pada bulan Mei 1945 organisasi ini mulai mengadakan latihan gerilya. Para pemimpin pemuda perkotaan yang berpendidikan berhubungan dengan pemuda-pemuda kelas-bawah yang ada di kota-kota besar dan kecil, dan sebaliknya mereka secara resmi berhubungan dengan tokoh-tokoh Hokokai yang dipimpin oleh Sukarno. Pada bulan Desember 1944, Masyumi juga diperbolehkan memiliki sayap militer yang bernama Barisan Hizbullah, 'pasukan Tuhan', yang memulai latihannya pada bulan Februari 1945 dan konon mempunyai 50.000 orang anggota pada akhir perang. Kepemimpinannya didominasi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dan anggota-anggota faksi PSII dari masa sebelum perang yang bersifat kooperatif yang dipimpin oleh Agus Salim. Sekali lagi, para politisi penting Islam dari masa sebelum perang yang bersifat nonkoopetatif dilangkahi.

Kini semakin banyak orang Indonesia yang diangkat menjadi pejabat pemerintahan. Pada bulan November 1944, orang-orang Indonesia mulai diangkat menjadi wakil residen. Para penasihat *(sanyo)* dihimpun ke dalam semacam majelis tinggi (Dewan Sanyo, Dewan Penasihat) dari Dewan Penasihat Pusat yang mempunyai wewenang memberikan nasihat yang agak lebih luas. Para pejabat tinggi tersebut diikutkan dalam kursus-kursus indoktrinasi pada bulan Januari 1945. Pengalaman ini mendorong pemikiran nasionalis di antara mereka dan sekaligus meningkatkan ketidaksenangan mereka terhadap Jepang gara-gara mengharuskan mereka menjalani sesuatu yang tampaknya akan merendahkan martabat mereka.

Pihak Jepang akhirnya harus memenuhi janji kemerdekaan mereka karena runtuhnya posisi militer mereka yang berlangsung secara cepat itu. Pada bulan Oktober 1944, armada Jepang yang masih tersisa nyaris tersapu bersih di Teluk Leyte; dengan hancurnya armada itu, bahkan pertahanan Jepang sendiri hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pada bulan Januari 1945, serbuan Amerika terhadap Luzon di Filipina dimulai; pada bulan Februari, Manila berhasil direbut. Setelah kekalahan di Filipina

itu, angkatan laut Jepang mengakhiri oposisinya terhadap pemberian kemerdekaan semu kepada Indonesia, karena bagaimanapun juga mereka tidak mempunyai harapan lagi untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Jadi, mereka mengakui perlunya memperoleh jasa baik dari pihak Indonesia. Akan tetapi, dalam kenyataannya, mereka sendiri hanya berbuat sedikit untuk mendorong hal ini. Sementara itu, kesulitan mempertahankan jasa baik itu menjadi semakin jelas. Pada bulan Februari 1945, detasemen Peta di Blitar (Jawa Timur) menyerang gudang persenjataan Jepang dan membunuh beberapa serdadu Jepang. Sebanyak 68 orang prajurit Peta diajukan ke depan mahkamah militer (delapan orang di antaranya dihukum mati) dan empat orang pejabat senior Indonesia dipaksa untuk meletakkan jabatan. Kini pihak Jepang mulai merasa takut jangan-jangan mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan militer Indonesia yang telah mereka ciptakan. Perasaan takut ini menjadi semakin kuat pada bulan Maret ketika angkatan bersenjata serupa di Birma berbalik melawan mereka dan bergabung dengan pasukan penyerbu Sekutu.

Menyadari bahwa mereka tengah terancam kehilangan kekuasaan, pihak Jepang lalu memutuskan untuk menghapuskan kekangan-kekangan yang masih ada terhadap kekuatan rakyat Indonesia. Angkatan Darat ke-16 mendesak unsur-unsur yang lebih bersikap hati-hati di dalam hierarki-hierarki Jepang supaya bertindak dengan cepat, karena mereka benar-benar mengetahui bahwa bibit-bibit revolusi telah tertanam dalam di Jawa. Pada bulan Maret 1945, pihak Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini mengadakan pertemuan pada akhir bulan Mei di bangunan lama Volksraad di Jakarta. Keanggotaannya mewakili sebagian besar pemimpin setengah baya di Jawa yang masih hidup yang berasal dari semua aliran pemikiran yang penting. Radjiman Wediodiningrat menduduki jabatan ketua, sedangkan Sukarno, Hatta, Mansur, Dewantara, Salim, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasjim, Muhammad Yamin, dan yang lain-lain duduk sebagai anggotanya. Pihak Jepang tentu saja memutuskan bahwa bilamana kemerdekaan terwujud, hendaknya kemerdekaan itu berada di tangan para pemimpin dari generasi tua yang mereka pandang lebih mudah untuk bekerja sama daripada generasi muda yang sulit diterka.

Pada bulan Juli 1945, pihak Jepang di Jawa berusaha mempersatukan gerakan-gerakan pemuda, Masyumi dan Jawa Hokokai, ke dalam satu Gerakan Rakyat Baru. Akan tetapi, upaya tersebut gagal ketika para pemimpin pemuda menuntut langkah-langkah nasionalistis yang dramatis, yang tidak akan dilakukan oleh kebanyakan generasi tua yang lebih ketakut-takutan (dan lebih realistis). Pertemuan yang pertama berakhir dengan percekcokan sengit dan Gerakan Rakyat Baru pun mati sebelum lahir. Pihak Jepang menangkap Yamin yang mereka yakini telah mengobarkan semangat kaum aktivis muda, tetapi kini kejadian-kejadian bergerak terlalu cepat bagi pihak Jepang untuk kedua kalinya mempersatukan pemimpin-pemimpin yang tua dan muda.

Di dalam Badan Penyelidik di Jakarta, Sukarno mendesak agar versinya tentang nasionalisme yang bebas dari agama disetujui. Karena konsep ini memang merupakan satu-satunya dasar yang dapat disepakati pemimpin-pemimpin lainnya, maka menanglah Sukarno. Pada pidatonya pada tanggal 1 Juni, dia mengemukakan doktrin Pancasilanya, 'lima dasar' yang akan menjadi falsafah resmi dari Indonesia merdeka: ketuhanan, kebangsaan, perikemanusiaan, kesejahteraan, dan demokrasi. Walaupun dasar-dasar ini pada umumnya diterima oleh anggota-anggota Badan Penyelidik, akan tetapi para pemimpin Islam merasa tidak senang karena Islam tampaknya tidak akan memainkan peranan yang istimewa. Akhirnya, mereka menyetujui suatu kompromi yang disebut Piagam Jakarta yang menyebutkan bahwa negara akan didasarkan atas "ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Implikasi Piagam Jakarta terhadap hubungan antara syariat Islam dan negara menjadi sumber pertentangan-pertentangan sengit di tahun-tahun mendatang. Badan Penyelidik mengakhiri tugasnya dengan merancang konstitusi pertama Indonesia, yang menghendaki sebuah republik kesatuan dengan jabatan kepresidenan yang sangat kuat, dan dengan menetapkan bahwa negara baru tersebut tidak hanya akan meliputi Indonesia saja tetapi juga Malaya dan wilayah-wilayah Inggris di Kalimantan (Borneo).

Pada bulan Juli 1945, semua unsur di kalangan Jepang sepakat bahwa kemerdekaan harus diberikan kepada Indonesia dalam waktu beberapa bulan. Pada bulan Maret, Amerika telah berhasil merebut Iwojima dan mulai menggunakannya sebagai

pangkalan pesawat pengebom untuk melancarkan serangan-serangan terhadap Jepang. Koiso mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri pada bulan April dan digantikan oleh Laksamana Suzuki Kantaro yang cenderung melakukan perundingan perdamaian. Pada bulan Mei, Jerman menyerah, yang berarti memberi Sekutu peluang untuk memusatkan perhatian pada perang Pasifik. Pada bulan yang sama, Rangoon jatuh. Okinawa jatuh pada bulan Juni dan dimulailah pengeboman secara besar-besaran terhadap Jepang. Pada akhir bulan Juli, para pemimpin Sekutu di Potsdam mengeluarkan tuntutan agar Jepang menyerah tanpa syarat. Jepang tidak dapat lagi memikirkan kemenangan ataupun tindakan mempertahankan wilayah-wilayah penduduk-annya. Tujuannya di Indonesia kini adalah membentuk sebuah negara yang merdeka dalam rangka mencegah berkuasanya kembali Belanda, musuh mereka. Pada akhir bulan Juli, angkatan darat dan angkatan laut Jepang mengadakan pertemuan di Singapura guna merencanakan pengalihan perekonomian ke tangan bangsa Indonesia. Mereka memutuskan bahwa Jawa akan diberi kemerdekaan pada awal bulan September, sedangkan daerah-daerah lainnya segera menyusul.

Pada tanggal 6 Agustus, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima yang menewaskan sedikitnya 78.000 orang. Peperangan di Asia sedang mendekati tahap akhir yang mengerikan. Hari berikutnya, keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang baru dibentuk diumumkan di Jakarta, dan berita-berita mengenai panitia ini disiarkan ke seluruh Indonesia. Lembaga tersebut beranggotakan wakil-wakil dari Jawa maupun dari luar Jawa, didominasi oleh generasi tua. Pertemuannya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 Agustus. Pada tanggal 7 Agustus, kepanitiaan yang serupa dari pihak Jepang yang akan mengambil keputusan-keputusan yang riil mengadakan pertemuan. Uni Soviet mengumumkan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Agustus. Pada hari berikutnya, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki dan pihak Soviet menyerbu Manchuria. Pada hari itu, karena tampak tak terelakkan lagi bahwa pihak Jepang akan menyerah, Sukarno, Hatta, dan Radjiman terbang ke Saigon untuk menemui Panglima Wilayah Selatan, Panglima Tertinggi Terauchi Hisaichi, yang mereka temui di Dalat pada tanggal 11 Agustus. Kepada mereka, Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi seluruh bekas wilayah Hindia Timur Belanda, tetapi memveto

penggabungan Malaya dan wilayah-wilayah Inggris di Kalimantan. Sukarno ditunjuk sebagai Ketua Panitia Persiapan dan Hatta sebagai wakil ketua. Pada tanggal 14 Agustus, Sukarno dan rekan-rekannya tiba kembali di Jakarta.

Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus, dan dengan demikian menghadapkan para pemimpin Indonesia pada suatu masalah yang berat. Karena pihak Sekutu tidak menaklukkan kembali Indonesia, maka kini terjadi suatu kekosongan politik: pihak Jepang masih tetap berkuasa namun telah menyerah, dan tidak tampak kehadiran pasukan Sekutu yang akan menggantikan mereka. Rencana-rencana bagi kemerdekaan yang disponsori pihak Jepang secara teratur kini tampaknya terhenti, dan pada hari berikutnya Gunseikan telah mendapat perintah-perintah khusus supaya mempertahankan *status quo* sampai kedatangan pasukan Sekutu. Sukarno, Hatta, dan generasi tua ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan dan takut memancing konflik dengan pihak Jepang. Maeda ingin melihat pengalihan kekuasaan secara cepat kepada generasi tua, karena merasa khawatir terhadap kelompok-kelompok pemuda yang dianggapnya berbahaya maupun terhadap pasukan-pasukan Jepang yang kehilangan semangat. Para pemimpin pemuda menginginkan suatu pernyataan kemerdekaan secara dramatis di luar kerangka yang disusun oleh pihak Jepang, dan dalam hal ini mereka didukung oleh Sjahrir. Akan tetapi, tak seorang pun berani bergerak tanpa Sukarno dan Hatta.

Pada tanggal 16 Agustus pagi, Hatta dan Sukarno tidak dapat ditemukan di Jakarta. Mereka telah dibawa oleh para pemimpin pemuda pada malam harinya ke garnisun Peta di Rengasdengklok, sebuah kota kecil yang terletak ke arah utara dari jalan raya Jakarta–Cirebon, dengan dalih melindungi mereka bilamana meletus suatu pemberontakan Peta dan Heiho. Ternyata tidak ada pemberontakan sama sekali, sehingga Sukarno dan Hatta segera menyadari bahwa kejadian ini merupakan usaha memaksa mereka supaya menyatakan kemerdekaan di luar rencana pihak Jepang. Mereka menolak melakukan hal itu. Maeda mengirim kabar bahwa jika mereka dikembalikan dengan selamat, maka dia dapat mengatur agar pihak Jepang tidak peduli bilamana kemerdekaan dinyatakan. Pada malam itu, Sukarno dan Hatta sudah berada di rumah Maeda di Jakarta.

Pernyataan kemerdekaan dirancang sepanjang malam. Kaum aktivis muda menginginkan bahasa yang dramatis dan berapi-api, tetapi untuk menjaga supaya tidak melukai perasaan pihak Jepang atau mendorong terjadinya kekerasan, maka disetujuilah suatu pernyataan yang sejuk dan bersahaja yang dirancang oleh Sukarno

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, Sukarno membacakan pernyataan kemerdekaan tersebut di hadapan sekelompok orang yang relatif sedikit jumlahnya di luar rumahnya sendiri:

Proklamasi:

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dll.,
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17-8-1945

Atas nama bangsa Indonesia,

(tertanda) Sukarno Hatta

Bendera merah-putih dikibarkan dan berkumandanglah lagu "Indonesia Raya".

Republik Indonesia telah lahir. Sementara itu, Sekutu sebagai pihak yang menang, yang hampir sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi di Indonesia selama berlangsungnya perang, dengan tergesa-gesa merencanakan kedatangan mereka untuk menerima penyerahan pihak Jepang dan memulihkan kembali rezim kolonial. Akan tetapi, zaman Jepang telah menciptakan kondisi yang begitu kacau, telah begitu mempolitisasi rakyat, dan telah begitu mendorong para pemimpin dari generasi tua maupun muda untuk mengambil prakarsa, sedemikian rupa sehingga pihak Sekutu menghadapi suatu perang kemerdekaan revolusioner.[]

Bab 18 ....

Revolusi, 1945–50

REVOLUSI YANG menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsur yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk tatanan sosial yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah Perang Dunia II. Untuk yang pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba. Tidaklah mengherankan apabila hasilnya bukanlah munculnya suatu bangsa baru yang serasi namun suatu pertarungan sengit di antara individu-individu dan kekuatan-kekuatan sosial yang bertentangan. Sekalipun begitu, di balik pertarungan-pertarungan yang sering kali keras itu, terdapat suatu rasa rindu akan kemerdekaan. Tradisi nasional berikutnya yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia berjuang bahu-membahu selama Revolusi hanya mempunyai sedikit dasar sejarah. Akan tetapi, keyakinan bahwa itu merupakan zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, bahwa hak Indonesia akan kemerdekaan ditunjukkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan atas nama Revolusi, memang didukung banyak fakta.

Penyelidikan-penyelidikan akademis tentang Revolusi berusaha untuk mendapat semacam tatanan mengenai masa yang pada dasarnya kacau balau. Mengenai orang-orang Indonesia yang mendukung Revolusi, maka ditarik perbedaan-perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan-kekuatan diplomasi, antara mereka yang mendukung revolusi

sosial dan mereka yang menentangnya, antara generasi muda dan generasi tua, antara golongan kiri dan golongan kanan, antara kekuatan-kekuatan Islam dan kekuatan "sekuler", dan sebagainya. Walaupun sangat bermanfaat, namun perlu diingat bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak selalu serupa. Perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah sebutan-sebutan yang berbeda untuk perbedaan dasar yang sama; semua perbedaan itu sebagian merupakan gambaran-gambaran tentang suatu masa ketika perpecahan-perpecahan yang menimpa bangsa Indonesia beraneka ragam bentuknya dan terus-menerus berubah. Di awal Revolusi, tidak satu pun pembagian dasar di antara bangsa Indonesia telah terpecahkan terkecuali sepanjang ada kesepakatan tentang kemerdekaan sebagai tujuan pertama; bagi kaum revolusioner, segala sesuatunya tampak dimungkinkan kecuali kekalahan. Pada akhirnya, kekalahan telah nyaris terjadi dan kemungkinan-kemungkinan terbatas secara drastis. Walaupun saling mencurigai, namun kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan-kekuatan diplomasi secara bersama-sama berhasil mencapai kemerdekaan. Kekuatan-kekuatan yang mendukung revolusi sosial, generasi muda, golongan kiri, dan kekuatan Islam, semuanya menghadapi harapan yang sangat terbatas.

Baik pihak Belanda maupun pihak revolusioner Indonesia menganggap Revolusi Indonesia sebagai suatu zaman yang merupakan kelanjutan dari masa lampau. Bagi Belanda, tujuannya adalah menghancurkan sebuah negara yang dipimpin oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Jepang dan memulihkan suatu rezim kolonial yang, menurut keyakinan mereka, telah mereka bangun selama 350 tahun. Bagi para pemimpin Revolusi Indonesia, tujuannya adalah melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai empat dasawarsa sebelumnya. Masing-masing merasa yakin bahwa takdir dan kebenaran berada di pihaknya. Kedua pandangan tersebut mempunyai dasar kebenaran, tetapi keduanya juga menyesatkan.

Sebenarnya, inilah saat ketiga kalinya pihak Belanda bermaksud menaklukkan Indonesia. Usaha mereka yang pertama, pada abad XVII dan XVIII, telah berakhir dengan penarikan mundur pihak mereka karena menghadapi perlawanan bangsa Indonesia serta ketidakcakapan mereka sendiri, dan akhirnya dengan dikalahkannya mereka oleh Inggris. Usaha yang kedua, yaitu pada

abad XIX dan awal abad XX, berakhir dengan dikalahkannya mereka oleh pihak Jepang. Mereka kini akan mencoba untuk yang ketiga kalinya, dan masalah yang kini mereka hadapi ialah menaklukkan seluruh Nusantara sekaligus. Bagi bangsa Indonesia, mereka sedang menghadapi keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk yang pertama kalinya sejak abad XVI, mereka menguasai hampir seluruh wilayah nasional mereka dan lebih bersatu daripada sebelumnya dalam menghadapi pihak Belanda yang jauh lebih kecil jumlahnya. Akan tetapi, persatuan nasional yang bulat masih tetap jauh. Sistem perhubungan yang buruk, perpecahan-perpecahan internal, lemahnya kepemimpinan pusat, dan perbedaan kesukuan menandakan bahwa sebenarnya Revolusi merupakan suatu kejadian yang terpotong-potong. Terutama karena alasan inilah maka penaklukan yang dilakukan oleh pihak Belanda hampir berhasil. Usaha itu akhirnya gagal karena adanya perlawanan bangsa Indonesia dan dukungan negara-negara yang bersimpati, terutama Amerika Serikat. Bagaimanapun juga, kemenangan pihak Belanda yang hampir tercapai ini banyak menolong untuk menggalang kebinekaan bangsa Indonesia menjadi sebuah republik kesatuan yang bersepakat terhadap apa yang ditentangnya, kalau bukan selalu menyepakati apa yang disokongnya. Dengan demikian, akhirnya pihak Belanda harus melupakan usahanya membentuk imperium baru di Indonesia, dan meninggalkan suatu warisan persatuan yang sangat berharga.

Pemerintah pusat Republik segera dibentuk di Jakarta pada akhir Agustus 1945. Pemerintah ini menyetujui konstitusi yang telah dirancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebelum menyerahnya Jepang. Akan tetapi, pihak angkatan laut Jepang memperingatkan bahwa orang-orang Indonesia yang beragama Kristen di wilayahnya tidak akan menyetujui peranan istimewa Islam, sehingga Piagam Jakarta dan syarat bahwa kepala negara haruslah seorang muslim tidak jadi dicantumkan. Sukarno diangkat sebagai presiden (1945–67) dan Hatta sebagai wakil presiden (1945–56), karena para politisi Jakarta merasa yakin bahwa hanya merekalah yang dapat berurusan dengan pihak Jepang. Seraya menantikan pemilihan umum, yang dalam kenyataan belum diselenggarakan juga setelah sepuluh tahun, maka ditunjuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu Presiden, dan komite-komite nasional serupa akan dibentuk di tingkat propinsi serta karesidenan.

Suatu struktur pemerintahan juga ditetapkan dengan mudah. Orang-orang Indonesia yang menjabat sebagai penasihat pemerintahan *(sanyo)* dan wakil residen diangkat sebagai pejabat Republik, sehingga pihak Jepang dapat menyerahkan pemerintahan secara damai dan hati-hati kepada mereka tanpa melakukan pelanggaran yang begitu mencolok terhadap syarat-syarat penyerahan Jepang kepada pihak Sekutu. Jawa Hokokai yang telah terbukti bermanfaat bagi Sukarno dan pemimpin-pemimpin Republik juga akan diteruskan sebagai partai negara. Partai ini diberi nama seperti partai Sukarno dari masa sebelum perang, Partai Nasional Indonesia, tetapi partai ini segera hancur. Sjahrir dan para pendukungnya berkeberatan atas berlanjutnya secara mencolok suatu organisasi Jepang dan, tentu saja, atas berlanjutnya dominasi elite yang bekerja sama dengan Jepang yang ingin dipertahankan oleh PNI. Bagaimanapun juga, Jawa Hokokai merupakan suatu fusi dari golongan-golongan elite yang dipaksakan oleh Jepang yang kepentingan-kepentingannya sering kali jauh dari sama, sehingga tanpa adanya paksaan pihak Jepang maka Jawa Hokokai/PNI mengalami benturan internal. Pada akhir bulan Agustus 1945, pembentukan partai negara itu ditangguhkan, sehingga hanya KNIP dan komite-komite nasional di tingkat daerahlah yang merupakan organ politik utama.

Sementara persiapan-persiapan pemerintahan tampak akan berjalan lancar di Jawa, terjadilah perpecahan di kalangan kekuatan-kekuatan militer Republik. Antara tanggal 18 dan 25 Agustus, Jepang yang ada di Jawa dan Sumatera melucuti serta membubarkan Peta/Giyugun dan Heiho, yang kebanyakan anggotanya belum mengetahui proklamasi kemerdekaan. Dengan begitu, mereka membongkar struktur-struktur komando dan keanggotaan pasukan-pasukan yang oleh pimpinan Republik telah dianggap sebagai dasar bagi tentara nasional. Angkatan bersenjata yang mulai terbentuk pada awal bulan September lebih banyak merupakan hasil prakarsa para pemimpin lokal, yang cakap, biasanya masih muda, serta memiliki kharisma dan/atau mudah memperoleh persenjataan, daripada tentara yang terlatih, bersenjata, dan berstruktur secara hierarkis yang diwarisi oleh Republik (sekalipun Peta dan Heiho tidak mempunyai tingkat-tingkat komando yang lebih tinggi). Salah satu masalah pokok pada zaman Revolusi dan sesudahnya ialah menciptakan,

dari struktur militer yang kacau ini, suatu struktur militer yang rasional yang patuh kepada pemerintah pusat.

Saat tersiarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari Jakarta tidak memercayainya. Pada tanggal 22 Agustus, pihak Jepang akhirnya mengumumkan menyerahnya mereka, tetapi baru pada bulan September 1945 proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang lebih terpencil. Sesaat sesudah hal itu diketahui, timbullah segera masalah kesetiaan. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan mereka kepada Republik pada awal bulan September. Akan tetapi, banyak raja-raja luar Jawa, yang telah didukung dan dijadikan kaya, dan karenanya mudah diatur, oleh Belanda, tidak tertarik kepada Revolusi. Mereka tidak suka terhadap pimpinan di Jakarta yang tampaknya bersifat radikal, bukan ningrat, dan kadang-kadang bersifat Islam, juga terhadap pemuda Republik lokal yang paling menonjol sebagai wakil kekuatan-kekuatan Revolusi setempat. Akan tetapi, di Sulawesi Selatan, Raja Bone (Arumpone) La Mappanjuki, yang masih tetap ingat akan pertempuran-pertempuran melawan Belanda pada awal abad itu, menyatakan dukungannya. Kebanyakan raja-raja suku Makasar dan Bugis mengikuti jejaknya mengakui kekuasaan G.S.S.J. Ratulangie (1890–1949), seorang Manado beragama Kristen yang ditunjuk oleh Jakarta sebagai gubernur Republik di sana. Raja-raja Bali juga mengakui kekuasaan Republik. Akan tetapi, di banyak wilayah lainnya, raja-rajanya memilih menentang Revolusi sehingga sering kali menjadi korbannya, seperti yang akan kita lihat di bawah.

Bagi rakyat Indonesia, ada rasa kebebasan yang mendorong kebanyakan dari mereka untuk menganggap dirinya sebagai pro-Republik, tetapi tanpa pengetahuan yang jelas tentang konsekuensi dari sikap ini. Bagaimanapun juga, orang-orang Indonesia yang menjadi pegawai birokrasi menghadapi keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan hilangnya sanksi-sanksi kekuasaan asing untuk pertama kalinya dalam karier mereka. Banyak yang sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Para priyayi Jawa yang menjadi pejabat pemerintahan sering kali betul-betul tidak mampu bereaksi secara positif; mereka diatur oleh para penguasa asing dan tercerabut dari keahlian militer masa pra-penjajahan yang dimiliki golongan mereka. Dengan

demikian, prakarsa jatuh kepada orang-orang lain yang tidak enggan melakukan kekerasan.

Euforia Revolusi segera mulai melanda negeri ini, dan khususnya kaum muda Indonesia merespons kegairahan dan tantangan kemerdekaan. Para komandan pasukan Jepang di daerah-daerah sering kali meninggalkan wilayah-wilayah perkotaan dan menarik mundur pasukan mereka ke pinggiran kota guna menghindari konfrontasi. Banyak yang dengan bijaksana memperbolehkan pemuda-pemuda Indonesia memperoleh senjata. Antara tanggal 3 dan 11 September, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api, sistem trem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa mendapat perlawanan dari pihak Jepang. Pada akhir bulan September, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung juga sudah berada di tangan para pemuda Indonesia. Walaupun para pemimpin dari generasi tua merasa khawatir akan timbulnya kemarahan pihak Jepang, namun rapat-rapat raksasa diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 11 dan 17 September dan di Jakarta pada tanggal 19 September, di mana kurang lebih 200.000 orang konon memadati lapangan yang kini dinamakan Medan Merdeka. Pada peristiwa-peristiwa itu, kekuatan Jepang, termasuk tank-tank, berjaga-jaga dengan mengelilingi rapat-rapat umum tersebut, tetapi tindak kekerasan berhasil dielakkan. Pada tanggal 19 September, Sukarno memanfaatkan bakat pidatonya untuk meyakinkan khalayak Jakarta agar bubar tanpa menantang pihak Jepang. Keberhasilannya pada kejadian ini memperkuat kesan bahwa hanya Sukarnolah yang dapat mencegah terjadinya kekerasan massal.

Terlihat adanya semangat revolusi di dalam kesastraan dan kesenian, selain dalam politik. Surat-surat kabar dan majalah-majalah Republik bermunculan di banyak daerah, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Suatu generasi sastrawan dinamakan 'Angkatan 45', orang-orang yang daya kreatifnya memuncak pada zaman revolusi. Di antara mereka adalah penyair Chairil Anwar (1922–49), penulis prosa Pramoedya Ananta Toer (l. 1925), yang sebagian besar tulisannya dikerjakan di penjara Belanda pada tahun 1947–9, wartawan Mochtar Lubis (1922–2004), dan lain-lain. Kebanyakan dari orang-orang ini merasa yakin bahwa seni mereka dapat menjadi bagian dari perkembangan Revolusi. Tulisan yang khusus bersifat Islam masih

sedikit jumlahnya, terkecuali Bahrum Rangkuti (1919–77) yang banyak diilhami oleh penulis Pakistan Muhammad Iqbal. Lukisan modern juga mulai menjadi matang dalam Revolusi ketika seniman-seniman seperti Affandi (1910–90) dan Sudjojono (l. 1913) tidak hanya menuangkan semangat Revolusi dalam lukisan-lukisan mereka, tetapi juga memberikan dukungan secara lebih langsung dengan cara membuat poster-poster anti-Belanda.

Banyak pemuda bergabung dengan badan-badan perjuangan. Di Sumatera, mereka benar-benar memonopoli kekuasaan revolusioner, karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah mapan di sana hanya segelintir dan mereka itu ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan. Para mantan prajurit Peta dan Heiho membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin, tetapi banyak badan perjuangan sangat tidak berdisiplin, baik sebagai akibat dari situasi pembentukan mereka maupun sebagai reaksi terhadap apa yang dianggap sebagai semangat revolusi. Laskar Masyumi, Barisan Hizbullah, menerima banyak pejuang baru dan kini ikut bergabung kelompok-kelompok bersenjata Islam lainnya yang pada umumnya disebut Barisan Sabilillah (Pasukan di Jalan Tuhan), yang kebanyakan dipimpin oleh para kyai.

Segera meletus tindak kekerasan antara Revolusi dengan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuhnya. Setelah Jepang menyerah, banyak orang Belanda yang menjadi tawanan pergi begitu saja meninggalkan kamp-kamp mereka dan pulang ke rumah. Pada bulan September telah terjadi berbagai keributan di jalan-jalan Surabaya antara pemuda Indonesia dengan orang Eropa, dan ketegangan-ketegangan memuncak di daerah-daerah lain. Semua peristiwa ini lebih banyak terjadi di Jawa daripada di daerah-daerah luar Jawa, di mana terdapat pasukan Jepang yang lebih banyak jumlahnya (terutama di wilayah-wilayah yang dikuasai angkatan laut), komandan-komandan Jepang yang kurang simpatik terhadap Revolusi, dan pemimpin serta aktivitas Republik yang lebih kecil. Sedemikian jauh, Revolusi belum menghadapi perlawanan serius. Akan tetapi, hal ini akan segera terjadi.

Dengan mulai tibanya pihak Sekutu guna menerima penyerahan Jepang, maka muncullah tantangan-tantangan serius yang pertama terhadap Revolusi. Kemajuan yang dicapai Amerika melalui Samudera Pasifik telah membikin daerah-daerah kantong Sekutu di Kalimantan (Tarakan dan Balikpapan), di Morotai, dan

di berbagai wilayah di Irian Jaya. Para pejabat Belanda sudah kembali ke daerah-daerah tersebut. Pada akhir Juni 1945, satuan-satuan komando kecil (sebagian besar terdiri atas orang-orang Belanda, tetapi disertai beberapa perwira Inggris) juga telah diterjunkan di Sumatera Utara. Pada awal tahun 1945, pihak Sekutu telah memutuskan bahwa pasukan-pasukan Amerika akan memusatkan perhatian pada pulau-pulau di Jepang. Dengan demikian, pada saat terakhir, tangung jawab atas Indonesia dipindahkan dari Komando Pasifik Barat Daya Amerika kepada Komando Asia Tenggara Inggris di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten. Tentu saja Belanda ingin sekali menduduki kembali Indonesia dan menghukum mereka yang telah bekerja sama dengan pihak Jepang, tetapi mereka tidak sanggup melakukan hal itu sendirian pada tahun 1945, sehingga harapan mereka kini tertumpu pada pihak Inggris. Akan tetapi, Mountbatten nanti menunjukkan bahwa dia tidak berniat menaklukkan Indonesia untuk Belanda; dia pun memang tidak memiliki cukup banyak serdadu untuk melakukan hal itu. Dia menetapkan sasarannya secara terbatas: membebaskan para tawanan bangsa Eropa dan menerima penyerahan pihak Jepang. Hal-hal lainnya terserah kepada Belanda; sebenarnya Mountbatten memperlakukan pemerintahan-pemerintahan Republik yang ada di daerah-daerah sebagai kekuasaan *de facto*.

Di wilayah yang dikuasai angkatan laut Jepang, Revolusi terhenti pada awalnya ketika pihak Sekutu bergerak masuk. Pasukan-pasukan Australia menerima penyerahan Jepang di sana (terkecuali untuk Bali dan Lombok) dan bersama mereka datanglah pasukan-pasukan dan pejabat-pejabat Belanda. Antara pertengahan bulan September dan pertengahan Oktober 1945, Australia menduduki kota-kota besar di Indonesia Timur, yang pada umumnya terjadi sebelum pemerintahan Republik terbentuk di daerah-daerah tersebut. Demonstrasi-demonstrasi dipadamkan dan beberapa pejabat yang pro-Republik ditangkap. Raja-raja di Sulawesi Selatan yang pro-Republik memutuskan bahwa akan tidak bijaksana melawan tentara Australia, sehingga dengan berat hati terpaksa membiarkan saja kembalinya orang-orang Belanda.

Sementara itu, pasukan-pasukan Inggris, yang sebagian besar terdiri atas orang-orang India, bergerak memasuki Jawa dan Sumatera. Pasukan pertama sampai di Jakarta pada pertengahan

kedua bulan September 1945, dan sepanjang bulan Oktober mereka tiba di Medan, Padang, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Panglima Inggris untuk Indonesia, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, ingin menghindari bentrokan dengan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dia mengirimkan serdadu-serdadu lama bekas tentara kolonial Belanda dan pasukan-pasukan-Belanda-yang-baru-tiba ke Indonesia Timur, di mana pendudukan kembali Belanda berlangsung dengan cepat. Letnan Gubernur Belanda Hubertus J. van Mook (1942–8; tidak ada pengangkatan gubernur jenderal sesudah perang) juga lebih senang dengan pemusatan perhatian Belanda pada Indonesia Timur pada mulanya, yang memiliki nilai ekonomi yang besar dan yang penduduknya diduga tidak begitu anti-Belanda.

Dengan mulai munculnya pasukan-pasukan Sekutu, maka semakin meningkatlah ketegangan-ketegangan di Jawa dan Sumatera. Pada bulan Oktober, meletus pertempuran di jalan-jalan antara para pemuda Republik di satu pihak dengan orang-orang Belanda bekas tahanan, pasukan-pasukan kolonial Belanda (termasuk orang-orang Ambon), orang-orang Cina, orang-orang Indo-Eropa, dan orang-orang Jepang di pihak lain. Pihak Jepang berada dalam posisi sangat sulit, karena mereka tidak mungkin lagi mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada pihak Sekutu dan terus bersikap lepas tangan terhadap kaum revolusioner.

Pada bulan Oktober 1945, pihak Jepang berusaha mendapatkan kembali kekuasaan di kota-kota besar dan kecil di Jawa yang baru saja ia setujui diambil alih oleh bangsa Indonesia. Ini menyebabkan dimulainya tahapan-tahapan pertama dari peperangan. Pada tanggal 3 Oktober, Polisi Militer Jepang (Kenpeitai) membantai pemuda-pemuda Republik di Pekalongan. Pada tanggal 10 Oktober, pasukan-pasukan Jepang mendesak kaum Republik sehingga keluar dari Bandung dan, seminggu kemudian, menyerahkan kota itu kepada pihak Inggris. Pada tanggal 14 Oktober, mereka mulai merebut kembali Semarang. Pihak Republik di sana membalas dendam dengan membunuh sedikitnya 130, dan mungkin 300, orang Jepang yang mereka tawan. Pihak Inggris tiba di Semarang enam hari kemudian, ketika pihak Jepang sudah hampir berhasil merebut kekuasaan atas kota itu, dengan membawa korban tewas kira-kira 500 orang Jepang dan sekitar 2.000 orang Indonesia. Pihak Inggris memutuskan untuk me-

ngungsikan para tawanan Indo-Eropa dan Eropa secepat mungkin dari wilayah pedalaman Jawa yang bergolak. Detasemen-detasemen berangkat ke Magelang dan Ambarawa untuk membebaskan sekitar 10.000 tawanan (kebanyakan wanita dan anak-anak), tapi mereka menghadapi begitu banyak perlawanan dari pihak Republik sehingga harus digunakan serangan-serangan udara. Pada tanggal 2 November, Sukarno memerintahkan gencatan senjata atas permintaan pihak Inggris, tetapi pada akhir bulan November, pertempuran telah berkobar lagi dan pihak Inggris mundur ke daerah pesisir.

Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama Revolusi, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Panglima senior Jepang di sana, Laksamana Madya Shibata Yaichiro, memihak Republik dan membuka pintu gudang persenjataan Jepang kepada orang-orang Indonesia. Ketika seorang kapten angkatan laut Belanda tiba di Surabaya sebagai wakil Sekutu yang pertama, Shibata menyerah kepadanya pada tanggal 3 Oktober dan sesudah itu, dengan mengakui kenyataan akan kekuasaan bangsa Indonesia atas kota itu, memerintahkan pasukannya supaya menyerahkan senjata mereka yang tersisa kepada rakyat Indonesia yang akan bertanggung jawab atas penyerahan senjata-senjata itu kepada pihak Sekutu (yang tentu saja tidak akan mereka lakukan). Pada akhir bulan Oktober dan awal bulan November, para pemimpin Nahdlatul Ulama dan Masyumi menyatakan bahwa perang mempertahankan tanah air Indonesia adalah Perang Sabil, suatu kewajiban atas semua muslim. Para kyai dan murid-murid mereka mulai mengalir dari pesantren-pesantren di Jawa Timur ke Surabaya. Soetomo (1920–81), seorang yang berapi-api dan yang lebih terkenal sebagai "Bung Tomo", menggunakan radio setempat untuk menimbulkan suasana semangat revolusi yang fanatik ke seluruh penjuru kota.

Di kota yang sedang bergolak inilah kira-kira 6.000 pasukan Inggris yang terdiri atas serdadu-serdadu India tiba pada tanggal 25 Oktober untuk mengungsikan para tawanan. Dalam waktu tiga hari, pertempuran pun berkobar. Antara 10–20 ribu anggota Tentara Keamanan Rakyat reguler yang baru saja terbentuk dan antara 70–140 ribu orang rakyat membunuh kebanyakan prajurit-prajurit India itu dan tampaknya siap menyapu bersih mereka. Pihak Inggris mendatangkan Sukarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin

(yang telah menjadi menteri penerangan dalam pemerintahan Republik) dan, pada tanggal 30 Oktober, ditetapkanlah suatu gencatan senjata. Akan tetapi, pertempuran meletus lagi dan panglima pasukan Inggris setempat, Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, terbunuh. Selama masa tenang berikutnya dalam pertempuran tersebut, pihak Inggris mendatangkan bala bantuan dan mengungsikan para tawanan. Pada tanggal 10 November subuh, hari yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan, pasukan Inggris memulai suatu aksi pembersihan berdarah di seluruh pelosok kota di bawah lindungan pengeboman dari udara dan laut, dalam menghadapi perlawanan Indonesia yang fanatik. Dalam waktu tiga hari, hampir separo kota berhasil dikuasai oleh pihak Inggris, tetapi pertempuran baru berakhir tiga minggu kemudian. Sedikitnya enam ribu rakyat Indonesia gugur dan ribuan lainnya meninggalkan kota yang hancur itu.

Pihak Republik kehilangan banyak tenaga manusia dan senjata dalam pertempuran Surabaya, tetapi perlawanan mereka yang bersifat pengorbanan tersebut telah menciptakan lambang dan pekik persatuan demi Revolusi. Hal itu juga meyakinkan pihak Inggris bahwa akanlah bijaksana apabila mereka bersikap netral dalam Revolusi. Pertempuran Surabaya juga merupakan titik balik bagi Belanda, karena peristiwa itu telah mengejutkan kebanyakan dari mereka dalam menghadapi kenyataan. Banyak dari mereka telah benar-benar merasa yakin bahwa Republik hanya mewakili segerombolan kolaborator yang tidak mendapat dukungan rakyat. Kini, tak seorang pun pengamat yang serius dapat mempertahankan lagi anggapan seperti itu.

Pimpinan pusat di Jakarta hanya mempunyai sedikit hubungan, pengaruh atau simpati dengan tindak kekerasan yang kini tersebar luas. Kehadiran pihak Sekutu yang lebih awal dan lebih kuat di Jakarta mengakibatkan di sana hanya terjadi sedikit kekerasan revolusioner, dan pimpinan pusat terikat pada suatu revolusi yang tertib yang akan memperoleh pengakuan dan dukungan diplomatik. Akan tetapi, sosok Sukarno, yang tampaknya sangat dibutuhkan di Indonesia, merupakan beban yang menyulitkan untuk mendapat dukungan internasional. Van Mook diberi tahu oleh pemerintah Belanda bahwa dia tidak boleh berurusan dengan kolaborator terbesar ini. Di sisi lain, walaupun Sukarno terus-menerus menunjukkan kemampuannya mem-

pengaruhi rakyat, namun peranannya yang berhati-hati sejak pernyataan kemerdekaan dan, yang paling utama, campur tangannya menetapkan gencatan senjata di Magelang dan Surabaya atas permintaan pihak Inggris juga telah mendorong banyak kaum revolusioner muda untuk tidak memercayai dirinya.

Dengan demikian, muncullah Sutan Sjahrir dalam gerakan di kalangan elite Jakarta, sebagian karena dia tidak pernah bekerja sama dengan pihak Jepang sehingga lebih dapat diterima oleh pihak Sekutu (hal ini memang benar), sebagian lagi karena dia diyakini mempunyai pengaruh istimewa di kalangan para pemuda Republik (hal ini hanya benar sampai batas-batas tertentu). Pamfletnya yang berjudul *Perdjuangan Kita,* yang diterbitkan pada bulan November 1945, menunjukkan bahwa Sjahrir benar-benar memihak gagasan tentang suatu revolusi sosialis internasional yang akan bersifat demokratis, antibangsawan, dan antifasis (dan dengan demikian menentang orang-orang seperti Sukarno yang telah mengagumi gagasan-gagasan Jepang). Akan tetapi, hal itu juga mencerminkan jalan pikiran Sjahrir yang sangat Eropa, sehingga sulit baginya untuk memahami pengaruh kepercayaan terhadap kekebalan dan tradisi-tradisi ramalan, mendalamnya ketegangan-ketegangan sosial di kalangan pribumi atau atraksi kekerasan bagi banyak rakyat Indonesia. Lebih jauh, hal itu mengungkapkan dasar dari sikap saling tidak percaya antara dirinya dengan kekuatan-kekuatan militer Republik, yang kebanyakannya mempunyai akar-akarnya pada pendudukan Jepang.

Pada tanggal 16 Oktober 1945, Sjahrir dan Amir Sjarifuddin (yang tidak saja telah menolak untuk bekerja sama dengan pihak Jepang tetapi juga telah dijebloskan dalam penjara dan nyaris dihukum mati oleh mereka) merencanakan suatu pengambilalihan kekuasaan di dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Masa kekuasaan presiden yang istimewa berakhir. KNIP diberi kekuasaan legislatif, yang akan diselenggarakan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP yang dipilih oleh Sjahrir dan Amir. Partai-partai politik kini dibentuk, sehingga mulailah suatu proses yang melembagakan konflik-konflik di kalangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 11 November, kabinet menjadi bertanggung jawab kepada KNIP dan bukan lagi kepada presiden. Akhirnya, pada tanggal 14 November, dibentuklah suatu kabinet baru. Sjahrir menjadi perdana menteri (1945–7) merangkap sebagai menteri luar negeri

dan dalam negeri; Amir menjadi menteri keamanan rakyat (yaitu menteri pertahanan) dan penerangan. Dengan demikian, hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan, Undang-Undang Dasar 1945 dicabut dalam praktik, walaupun dalam teori masih tetap berlaku. Sukarno, Hatta, dan para pemimpin lainnya yang telah dimanfaatkan oleh pihak Jepang terdesak ke belakang, sementara Sjahrir, Amir, dan para pengikut mereka dalam gerakan-gerakan pemuda bawah tanah dulu memperoleh kekuasaan di pusat. Tak ada kelompok yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap Revolusi di kawasan pedesaan, tetapi setidak-tidaknya mulai saat itu dan seterusnya semakin sulit bagi pihak Belanda untuk menuduh bahwa Republik adalah suatu pemerintahan dari para kolaborator. Pembicaraan-pembicaraan antara Sjahrir dengan van Mook segera dimulai.

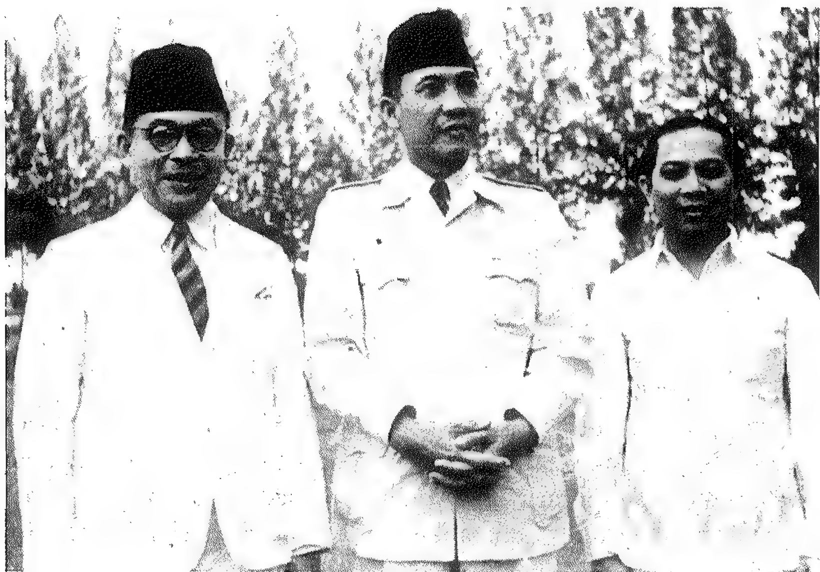
Pada bulan November dan Desember 1945, Revolusi di wilayah pedesaan memasuki suatu tahapan yang lazim dikenal sebagai 'revolusi sosial'. Akan tetapi, istilah ini agak menyesatkan jika dianggap sebagai istilah untuk pertentangan kelas: kelas sosial yang rendah jarang menumbangkan kekuasaan kelas sosial yang dominan. Kebanyakan 'revolusi sosial' diakibatkan oleh persaingan antara elite-elite alternatif, kelompok-kelompok kesukuan dan kemasyarakatan atau antargenerasi; struktur-struktur kelas sosial kurang penting. Kebanyakan 'revolusi sosial' juga hanya mempunyai arti penting untuk sementara waktu, kecuali di beberapa wilayah Sumatera, seperti yang akan dilihat di bawah.

Kedatangan pasukan-pasukan pertama Sekutu hanya meningkatkan ketegangan di Sumatera dan Jawa, dan mendorong orang-orang yang mendukung Republik dengan sepenuh hati untuk melawan orang-orang yang kesetiaannya diragukan. Atas nama 'kedaulatan rakyat', para pemuda revolusioner mengintimidasi, menculik, dan kadang-kadang membunuh para pejabat pemerintahan, kepala-kepala desa, dan anggota-anggota polisi yang kesetiaannya disangsikan, atau yang dituduh melakukan korupsi, pencatutan, atau penindasan selama pendudukan Jepang. Di Jawa, penggabungan desa-desa kecil ke dalam desa-desa yang lebih besar yang tidak berakar yang dilakukan oleh pihak Belanda telah menempatkan masyarakat muslim yang taat (santri) dan masyarakat muslim abangan di bawah satu pimpinan. Ketegangan abangan–santri di desa-desa tersebut telah meningkat selama abad itu sebagai akibat semakin tingginya desakan untuk

menjalani kehidupan beragama yang lebih taat, akan tetapi kekuasaan asing telah mencegah setiap pertentangan yang serius antara kedua kelompok itu. Kini, dengan timbulnya semangat Revolusi, para anggota salah satu kelompok itu sering kali menggulingkan pemimpin yang berasal dari kelompok lainnya dan menggantikannya dengan seseorang dari kelompok mereka sendiri, kesemuanya atas nama 'kedaulatan rakyat'. Dalam kekacauan ini, tindakan-tindakan atas nama Revolusi kadang-kadang sulit dibedakan dari tindakan-tindakan perampokan, perampasan, pemerasan, dan pembalasan dendam semata.

Ketegangan sosial di wilayah pesisir utara Jawa mencapai puncaknya pada bulan Desember 1945. Di tiga kabupaten, yaitu Brebes, Pemalang, dan Tegal, yang ketiga-tiganya merupakan bagian dari karesidenan Pekalongan, terjadi apa yang terkenal sebagai 'peristiwa tiga daerah'. Di sini, protes sosial kaum tani dan keinginan untuk membalas ketertindasan yang dialami selama masa pendudukan Jepang telah mengompori tindakan kekerasan yang luas. Pada awal bulan Oktober, aksi-aksi menentang para kepala desa di kawasan ini sudah berlangsung, yang prakarsanya diambil oleh para aktivis muda dari masyarakat Islam tradisional dan kaum komunis bawah-tanah dari masa sebelum perang. Pada akhir bulan November, bupati-bupati Brebes, Tegal, dan Pemalang digantikan oleh para pendukung 'revolusi sosial' ini. Pada tanggal 12 Desember, kaum revolusioner sosial menggulingkan Residen Pekalongan sendiri dan menggantikannya dengan seorang mantan anggota rahasia PKI dan pemimpin gerakan bawah-tanah yang telah dipenjarakan oleh pihak Jepang. Kini, perlawanan setempat mulai beraksi. Satuan-satuan tentara Republik setempat dan para pemuda yang mendukung mereka bergerak di ketiga kabupaten itu dan menangkap lebih dari 1.000 orang pendukung 'revolusi sosial' ini, yang menyebabkan revolusi ini berakhir dengan kegagalan. Akan tetapi, banyak kepala-desa baru yang berasal dari pihak santri tetap menjabat.

Di kerajaan Yogyakarta terjadi perubahan sosial untuk selamanya, kali ini dari atas ke bawah. Pada tahun 1939, Sultan Hamengkubuwana VIII (m. 1921–39) memerintahkan putranya agar kembali dari negeri Belanda, tempat dia sedang belajar di Universitas Leiden. Tidak berapa lama setelah dia kembali, Sultan



Presiden Sukarno bersama Wakil Presiden Hatta dan Perdana Menteri Sjahrir, Yogyakarta, 1946

wafat dan anak muda tersebut (l. 1912) menjadi Sultan Hamengkubuwana IX (m. 1939–88). Selama pendudukan Jepang, dia melakukan langkah-langkah kecil ke arah pembaharuan kerajaannya, tetapi barulah setelah bulan Agustus 1945 usaha ini dapat dilanjutkan dengan berhasil. Pada awal bulan itu, patihnya meninggal dan Sultan tidak mengangkat penggantinya, sehingga ia harus menangani sendiri segala urusan. Ketika Jepang menyerah dan kemerdekaan diproklamasikan, Sultan mendapat kesempatan untuk mewujudkan harapan-harapannya akan perubahan dan—dikarenakan popularitas pribadinya, penanganannya secara langsung atas kerajaannya, dan prestise kesultanan tersebut—menemukan sarana untuk melaksanakannya. Ketika patih dari Pakualam VIII (m. 1938–98) meninggal, dia mengikuti jejak Sultan dengan tidak mengangkat penggantinya; kini Pakualam VIII menjadi wakil Sultan dalam mereformasi Yogyakarta.

Pada awal tahun 1946, sudah muncul di Yogyakarta beberapa undang-undang yang memperbanyak jumlah orang yang berhak memilih dewan-dewan dan kepala-kepala desa dan yang menghapus pajak kepala. Pemerintahan desa di Yogyakarta kini mungkin merupakan yang paling maju di Indonesia. Kekuasaan

birokrasi istana yang lama segera dikurangi dan penghasilannya, yang sudah berkurang karena inflasi, dibiarkan tetap kecil. Dalam hal ini, Sultan menghapus praktik Belanda dan memberikan peranan yang lebih terbatas namun lebih berarti kepada elite istana. Mereka kini lebih merupakan pengawal tradisi-tradisi kerajaan di dalam istana daripada atavisme-atavisme sosial di wilayah pedesaan. Bahasa Indonesia menggantikan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi resmi, sehingga mengurangi pengaruh tingkat-tingkat hierarki sosial Jawa di kalangan para pejabat pemerintahan. Sultan juga membentuk laskar rakyat yang setia kepadanya. Dia memang memainkan dengan sengaja peranan militer seperti yang dilakukan para raja sebelum masa penjajahan, sedemikian rupa sehingga dia menganggap dirinya sebagai perwira tentara dan diakui demikian oleh para panglima tentara Republik.

Pada bulan Januari 1946, pendudukan kembali Belanda atas Jakarta telah berjalan begitu jauh sehingga diputuskan untuk memindahkan ibu kota republik ke Yogyakarta, yang tetap menjadi ibu kota Indonesia yang merdeka selama masa Revolusi. Pendudukan Belanda atas Bandung dan Jakarta juga berarti hilangnya kekuasaan Indonesia atas universitas-universitas yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, pada tahun 1946, Universitas Gajah Mada dibuka di Yogyakarta; dalam hal ini, Sultan menyediakan bagian depan istananya sebagai tempatnya. Dengan demikian, seperti yang telah ditulis oleh salah seorang penasihat Sultan yang terdekat, di Yogyakarta "Revolusi tidak mungkin mendobrak pintu-pintu istana, karena pintu-pintu itu sudah terbuka lebar" (Selosoemardjan, *Social Changes,* 365).

Di Sumatera terjadi "revolusi-revolusi sosial" yang keras yang menentang elite-elite bangsawan. Di Aceh, permusuhan sengit antara para pemimpin agama (ulama) dan para bangsawan birokrat *(uleëbalang)* mengakibatkan timbulnya suatu perubahan yang permanen di tingkat elite. Banyak *uleëbalang* mengharapkan kembalinya Belanda dan menjadi tak terlindungi ketika Belanda tidak kembali. Pada bulan Agustus 1945, suatu pasukan Belanda tiba di Sabang untuk memulangkan para buruh yang telah diangkut ke sana oleh pihak Jepang. Sekelompok kecil orang Belanda berada di Kutaraja (Banda Aceh) mulai awal bulan Oktober sampai awal bulan November, tetapi mereka mundur ke Medan ketika suasana menjadi semakin panas. Orang-orang Aceh kini mulai

menyerang pihak Jepang atau memberi mereka bahan pangan hanya kalau ditukar dengan senjata. Pada pertengahan bulan Desember, pihak Sekutu mulai mengungsikan orang-orang Jepang dari Aceh, kecuali seratus orang Jepang lebih yang telah bergabung dengan pasukan-pasukan Republik sebagai pelatih. Kemudian perang saudara meletus.

Para *uleëbalang* gagal melaksanakan perlawanan terpadu terhadap kekuatan-kekuatan pro-Republik yang dipimpin oleh para ulama. Antara bulan Desember 1945 dan Maret 1946, para *uleëbalang* Aceh yang terkemuka beserta keluarga mereka dijebloskan ke dalam penjara atau dibunuh. Dengan demikian, perpecahan sosial yang keras yang berakar pada Perang Aceh dan pada konflik-konflik yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah, pengadilan dan pemerintahan—konflik-konflik yang telah dihentikan untuk sementara waktu oleh pihak Jepang pada tahun 1942—diselesaikan dengan digantikannya dominasi *uleëbalang* untuk selamanya oleh para pemimpin Islam. Selama Revolusi, Belanda membiarkan Aceh tak tersentuh. Setelah tahun 1946, kokohnya kekuasaan suatu elite yang saling berkaitan dan adanya hanya satu ideologi (Islam) di Aceh telah menjadikannya sebagai wilayah yang paling stabil di Indonesia selama Revolusi. Akan tetapi, keadaan seperti itu juga membuat Aceh berjarak dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya, karena sementara wilayah-wilayah lain pada tahun-tahun berikutnya memperdebatkan apakah Islam akan mendominasi bangsa ataukah tidak, hal itu sudah terlaksana di Aceh.

Di Sumatera Timur, kelompok-kelompok bersenjata yang sebagian besar terdiri atas orang-orang Batak dan dipimpin oleh kaum kiri, menyerang raja-raja Batak Simalungun dan Batak Karo pada bulan Maret 1946, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1942. Penangkapan-penangkapan dan perampokan-perampokan terhadap para raja segera berubah menjadi pembantaian yang mengakibatkan tewasnya beratus-ratus bangsawan Sumatera Timur, di antaranya penyair Amir Hamzah. Pimpinan Republik di Jakarta, para politisi Republik setempat, dan satuan-satuan tentara setempat, semuanya menentang tindak kekerasan ini, dan pada akhir bulan April, para pemimpin terkemuka "revolusi sosial" berdarah ini telah ditangkap atau menyelamatkan diri dalam persembunyian. Bagaimanapun juga, kekuasaan raja-raja

Sumatera Timur benar-benar melemah. Perpecahan di dalam tubuh kekuatan-kekuatan revolusi di Sumatera Timur tampak jelas dengan penindasan terhadap "revolusi sosial" tersebut; Belanda segera akan memperoleh keuntungan dari perpecahan ini. Kekerasan serupa juga meletus di Tapanuli (Sumatera Utara), di mana kira-kira 300 orang tewas dalam pertempuran antara orang-orang Batak Toba dan Batak Karo pada bulan Mei 1946, suatu konflik kesukuan yang diperkuat oleh kuatnya agama Kristen di kalangan suku Toba dan agama Islam di kalangan suku Karo.

Sementara itu, perpecahan di kalangan elite revolusi di Jawa menjadi semakin tegang ketika partai-partai politik terbentuk. Walaupun beberapa partai politik mewakili aliran-aliran ideologi, banyak partai politik hanya merupakan pengikut-pengikut pribadi pemimpin-pemimpin tertentu. Suatu kelompok informal terbentuk di sekeliling Tan Malaka, mantan pemimpin PKI yang kembali dari pembuangan secara diam-diam pada tahun 1942. Pada bulan Agustus 1945, dia membuka kedoknya di Jakarta dan segera menarik banyak pengikut. Pada saat itu, Tan Malaka sudah membuang ide-ide Stalinis dan, dengan demikian, mendirikan apa yang di Indonesia terkenal sebagai "Komunisme nasional", suatu sikap mental yang pada umumnya kiri-kirian yang didasarkan pada ide bahwa Indonesia harus mencari jalannya sendiri menuju ke negara sosialis dan merumuskan susunan negara itu. Tan Malaka tidak pernah membentuk partai politik sendiri, tetapi menjadi pemimpin yang diakui dari sekelompok organisasi dan individu-individu yang menentang golongan elite dalam pemerintahan Republik.

Pada bulan-bulan pertama tahun 1946, partai-partai politik yang penting di masa revolusi telah dapat diidentifikasi. Partai Komunis (PKI) terbentuk kembali pada bulan Oktober 1945. Setelah mengalami banyak pertikaian internal dan suatu bentrokan dengan satuan-satuan tentara Republik pada bulan Februari 1946, maka pada April 1946 PKI telah dikuasai oleh para pemimpin generasi tua yang berorientasi internasional ortodoks, yang kebanyakan adalah mantan aktivis dari tahun 1920-an yang kini bebas dari tahanan. Pada bulan November 1945, para pengikut Amir Sjarifuddin dalam gerakan-gerakan pemuda bawahtanah dahulu membentuk Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia); sebagai menteri pertahanan, Amir juga membentuk polisi militer

sebagai kekuatan yang setia kepadanya. Para pengikut Amir bergabung dengan pengikut-pengikut Sjahrir untuk membentuk Partai Sosialis pada bulan Desember 1945; pada awal tahun 1947, mereka pecah lagi menurut garis-garis ini. Golongan sosialis membentuk kekuatan propemerintah yang utama selama Sjahrir dan Amir memegang kekuasaan. Partai politik Islam yang paling penting adalah Masyumi. Di dalamnya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, masing-masing sebagai organisasi (bukan per individu anggotanya), menjadi anggota. Pada bulan November 1945, para politisi Islam modernis perkotaan yang dipimpin oleh Sukiman Wirjosandjojo, Natsir, dan lain-lainnya berhasil memperoleh kembali kekuasaan dari para pemimpin Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang didukung oleh pihak Jepang. Partai Nasional Indonesia (PNI) bangkit lagi pada bulan Januari 1946, tetapi Sukarno tidak dijadikan ketuanya karena, sebagai presiden, ia secara teoritis berada di atas partai-partai politik. Dukungan utama PNI masih tetap berasal dari kalangan abangan Jawa dan khususnya dari kalangan birokrasi Jawa, tetapi partai ini juga memperoleh pengaruh yang besar di Sumatera. Meskipun kini PNI merupakan partai baru yang, dengan tidak terlibatnya lagi Sukarno, terbebas dari noda pengaruh Jepang, namun tidak dapat diragukan bahwa sebagian besar daya tariknya berasal dari fakta bahwa partai ini memakai nama partai Sukarno yang lama dan dipimpin oleh tokoh-tokoh PNI dan Partindo dari masa sebelum perang.

Tentara juga muncul sebagai suatu kekuatan politik, tetapi tercerai berai. Dapat ditarik suatu perbedaan umum antara dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka dari kalangan mantan prajurit Peta dan Heiho serta laskar-laskar nonreguler yang tidak pernah mendapat latihan militer di masa pra-Jepang, yang diilhami semangat revolusi dan terutama terlatih untuk perang gerilya. Kelompok ini diwakili terutama oleh Soedirman, yang dipilih oleh kalangan tentara sebagai panglima besarnya pada bulan November 1945. Kelompok lainnya adalah para mantan serdadu tentara kolonial Belanda (yang menganggap bahwa menyerahnya Belanda pada tahun 1942 telah membebaskan mereka dari sumpah setia mereka kepada Ratu Belanda) yang lebih terlatih untuk pekerjaan staf dan umumnya memiliki pandangan yang lebih profesional, namun kurang merakyat, tentang peranan militer. Kelompok ini meliputi orang-orang

seperti seorang Batak yang beragama Islam, A.H. Nasution (1918–2000), dan seorang Batak beragama Kristen, T.B. Simatupang (1920–90). Pemerintah pusat Republik sangat tidak memercayai Soedirman dan cenderung menyukai "kelompok profesional", yang segera mendominasi staf umum dan Kementerian Pertahanan. Pada bulan Mei 1946, Nasution menjadi Panglima Divisi Siliwangi di Jawa Barat, yang menjadi unsur propemerintah yang utama di kalangan tentara reguler. Sementara itu, perasaan tidak suka Amir dan Sjahrir terhadap segala sesuatu yang ternoda oleh fasisme Jepang serta keinginan Amir untuk mempolitisasikan angkatan perang Republik menurut garis Marxis telah ikut mendorong Soedirman dan para pengikutnya untuk lebih gencar menentang pemerintahan Republik.

Pada bulan-bulan pertama tahun 1946, tekanan-tekanan terhadap pihak Republik maupun pihak Belanda mulai meningkat. Pada bulan Desember 1945–Januari 1946, Belanda menggantikan Australia di Indonesia Timur. Mereka menangkap Ratulangie, enam orang pembantunya, dan raja-raja Bone dan Luwu pada bulan April 1946. Dengan demikian, Sulawesi Selatan kehilangan pimpinan seniornya, dan para pemuda Republik bergerak di bawah tanah atau berlayar ke Jawa. Pada awal tahun 1946, Belanda juga menduduki Bangka, Belitung, dan Riau. Inggris menyerahkan Bandung kepada Belanda pada bulan April, dan pada tanggal 13 Juli 1946 Komando Asia Tenggara secara resmi menyerahkan seluruh Indonesia, kecuali Jawa dan Sumatera, kepada penguasa Belanda. Dengan berlangsungnya pendudukan Belanda, Inggris mendesak Belanda supaya mencapai kesepakatan dengan pihak Republik. Masalah Indonesia juga muncul di dalam PBB untuk yang pertama kalinya pada bulan Januari 1946. Ini merupakan awal keterlibatan PBB yang, pada akhirnya, menjadi penting.

Sementara itu, tekanan di dalam negeri terhadap Sjahrir semakin meningkat. Lawan-lawan pemerintahannya, terutama para pengikut Tan Malaka, menyatakan bahwa kesediaan Sjahrir berunding dengan Belanda pasti akan mengakibatkan runtuhnya Republik. Pada bulan Januari 1946, Persatuan Perjuangan dibentuk di bawah pengaruh Tan Malaka. Para pemimpin pemuda (termasuk orang yang kelak menjadi wakil presiden, Adam Malik, 1917–84), kaum radikal seperti Yamin, dan sebagian besar tentara yang tidak reguler mendukung tuntutan Persatuan Perjuangan

berupa 'kemerdekaan 100 persen' sebagai dasar Republik di dalam perundingan. Sjahrir dan para pengikutnya benar-benar terancam oleh koalisi ini.

Dengan memuncaknya tekanan, maka Sukarno menampilkan dirinya dari posisi pinggiran yang telah ditempatinya selama beberapa bulan. Sebagai satu-satunya orang Jawa di antara pemimpin-pemimpin utama Republik dan, karenanya, satu-satunya orang yang dapat secara langsung menghimbau kepada rakyat Jawa, dan sebagai orang yang mampu berbicara seperti kaum radikal sambil dengan diam-diam mendukung politik diplomasi, maka sekali lagi Sukarno menjadi sangat penting sebagai penengah konflik yang dapat memberikan legitimasi kepada semua pihak atas nama Revolusi.

Pada bulan Maret 1946, Sjahrir dan Amir menarik para pengikutnya, khususnya satuan-satuan bersenjata Pesindo, dari Persatuan Perjuangan. Dalam konferensi organisasi ini di Malang pada bulan itu, satuan-satuan Pesindo dan polisi militer menawan para pemimpinnya. Tan Malaka ditahan selama lebih dari dua tahun sambil menunggu diadili. Tetapi serangan pihak oposisi terhadap pemerintah belum berakhir. Karena ibu kota Republik terletak di Yogyakarta, maka tidak mustahil bahwa kota-istana yang menjadi saingannya, Surakarta, merupakan pusat oposisi.

Di Surakarta, penguasa yang lemah, Pakubuwana XII (m. 1944–2004) dan Mangkunegara VIII (1944–87) hanya menunjukkan sedikit kepandaian seperti yang dimiliki Hamengkubuwana IX dan Pakualam VIII di Yogyakarta. Apalagi mereka tidak dapat bekerja sama. Mereka tidak berhasil memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk memainkan peranan positif dalam Revolusi. Karena itu, mereka pun tidak pernah dapat menguasai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kaum radikal Surakarta dipimpin oleh Dr. Muwardi (1907–48), yang memimpin kelompok-kelompok bersenjata yang dikenal sebagai Barisan Banteng. Pada bulan Januari 1946, mereka menculik Pakubuwana XII dalam waktu singkat untuk menunjukkan rasa tidak senang rakyat. Sesudah bulan April, satu-satunya kekuasaan riil di Surakarta dijalankan oleh Barisan Banteng. Soedirman dan para panglima tentara setempat berhasil melindungi Barisan Banteng dari kemauan pemerintah untuk menumpasnya dan memulihkan kekuasaan pusat atas Surakarta. Akhirnya, atas desakan Soedirman dan kaum radikal,

hak-hak istimewa para raja Surakarta di luar tembok istana mereka secara resmi dihapuskan oleh pemerintah pada tanggal 1 Juni 1946; pemerintah Sjahrir harus menyaksikan jatuhnya seluruh Surakarta ke tangan kaum oposisi, baik di bidang militer maupun politik.

Perundingan-perundingan dengan pihak Belanda kini berada pada tahap yang sulit. Pada bulan Maret 1946, Sjahrir secara rahasia telah bersepakat dengan van Mook untuk berunding atas dasar kedaulatan *de facto* Republik hanya atas Jawa, Madura, dan Sumatera, pengakuan terhadap kedaulatan Belanda di wilayah-wilayah lainnya, dan upaya bersama Belanda–Republik untuk membentuk negara Indonesia federal di dalam suatu uni Belanda–Indonesia. Pada bulan April, dua orang menteri kabinet Indonesia menghadiri pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut di negeri Belanda yang mengalami kemacetan karena pemerintah Belanda sedang menghadapi pemilihan umum pada tanggal 17 Mei dan tidak berani kelihatan bersedia memberi konsesi-konsesi kepada pihak Republik. Hal ini meyakinkan banyak pemimpin Republik bahwa Belanda tidak akan bertindak jujur, suatu kesan yang segera menjadi lebih kuat ketika van Mook memutuskan secara sepihak untuk membentuk sebuah negara Indonesia federal di bawah kekuasaan Belanda.

Pada tanggal 27 Juni 1946, Hatta menyampaikan sebuah pidato di Yogyakarta yang mengungkapkan keterbatasan posisi berunding pemerintah. Kekuatan-kekuatan oposisi menganggap hal ini sebagai pengkhianatan terhadap "kemerdekaan 100 persen". Pada malam harinya, ketika Sjahrir dan beberapa orang lainnya singgah di Surakarta dalam perjalanan pulang mereka dari suatu perjalanan keliling ke Jawa Timur, mereka ditangkap oleh satuan-satuan tentara setempat yang mengharapkan bahwa tindakan ini akan memungkinkan Sukarno, Soedirman, dan "kemerdekaan 100 persen" berkuasa atas Republik. Akan tetapi, sebaliknya Sukarno mengumumkan keadaan perang dan meminta agar Perdana Menteri dibebaskan. Namun demikian, Soedirman tidak bersedia membebaskan Sjahrir. Pada tanggal 30 Juni, Sukarno mengadakan siaran radio, menyatakan bahwa penangkapan terhadap Sjahrir membahayakan persatuan bangsa. Himbauan Sukarno ini, seperti yang begitu sering dilakukannya di dalam karirnya, menggoyahkan kepercayaan diri pihak oposisi. Malam itu Sjahrir dibebaskan dan segera kembali ke Jakarta.

Kini pemerintah menangkap beberapa lawan utamanya. Yamin berhasil lolos, tetapi Malik dan beberapa orang lainnya tertangkap. Kemudian giliran tentaralah untuk meminta pembebasan tawanan-tawanan tersebut. Pada tanggal 3 Juli 1946, satuan-satuan tentara membebaskan mereka dari penjara dan mengirim suatu delegasi kepada Sukarno di Yogyakarta yang meminta agar dia membubarkan kabinet dan menugaskan Soedirman menangani urusan-urusan keamanan. Akan tetapi, para anggota delegasi itu ditawan dan kemudian sekitar seratus orang lainnya ditangkap oleh para pendukung pemerintah (kali ini Yamin tidak berhasil melarikan diri). "Peristiwa 3 Juli" ini sangat penting artinya. Semua menyadari betapa berbahayanya persaingan mereka di dalam negeri, betapa dekatnya sebenarnya mereka pada perang saudara di Jawa Tengah. Pemerintah menyalahkan Tan Malaka yang masih berada dalam tahanan sebagai yang bertanggung jawab atas semua peristiwa itu. Untuk kepentingan Revolusi dan para pendukungnya, Soedirman memutuskan untuk bersikap lebih luwes. Dan sekali lagi Sukarno tampil sebagai satu-satunya orang yang mampu mencegah terjadinya kekacauan. Dukungan dalam negeri terhadap Sjahrir nyata-nyata tampak kecil, tetapi untuk kepentingan diplomasi Republik, dia belum dapat digantikan.

Sementara itu, Belanda mendapat kemajuan dalam usaha mereka mencapai cara penyelesaian federal. Pada bulan Juli 1946, mereka menyelenggarakan suatu konferensi di Malino (Sulawesi Selatan), di mana 39 orang Indonesia yang merupakan wakil-wakil para raja, umat Kristen, dan beberapa kelompok etnik dari Kalimantan dan Indonesia Timur mendukung ide tentang negara federal tersebut dan suatu bentuk kelanjutan hubungan dengan Belanda. Akan tetapi, pihak Belanda terkejut ketika mengetahui bahwa orang-orang Indonesia ini pun menginginkan langkah-langkah ke arah otonomi yang murni. Disusunlah rencana-rencana untuk membentuk sebuah negara di Kalimantan dan satu lagi untuk Indonesia Timur.

Akhirnya, pihak Belanda mencapai kesepakatan diplomatik mereka yang pertama dengan Republik pada bulan November 1946. Pihak Inggris telah mendesak tercapainya suatu kesepakatan sebelum menarik semua pasukan mereka dari Jawa dan Sumatra pada bulan Desember. Pada bulan Oktober, perundingan-perundingan dimulai dan disepakati suatu gencatan senjata di

Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 12 November, di Linggajati (dekat Cirebon), Belanda mengakui Republik sebagai penguasa *de facto di* Jawa, Madura, dan Sumatera, kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pembentukan (pada tanggal 1 Januari 1949) negara Indonesia Serikat yang berbentuk federal, yang di dalamnya Republik akan menjadi salah satu di antara beberapa negara federal lainnya, dan Ratu Belanda akan menjadi pemimpin simbolis uni Belanda–Indonesia yang terdiri atas negara Belanda dan Indonesia Serikat tersebut. Persetujuan perdamaian ini hanya berlangsung singkat. Kedua belah pihak saling tidak mempercayai dan pengesahan persetujuan itu di kedua negara menimbulkan pertikaian-pertikaian politik yang sengit mengenai konsesi-konsesi yang telah dibuat.

Pihak Belanda kini mulai menyadari bahwa federalisme tidak selalu merupakan cara pemecahan yang mudah. Pada bulan November 1946, kedudukan mereka di Sulawesi Selatan benar-benar terancam oleh para pemuda Republik setempat yang kembali dari Jawa, di mana mereka telah mendapatkan latihan militer lebih lanjut. Pada bulan Desember, pihak Belanda menanggapi ini dengan melepas seorang tokoh yang namanya paling keji bagi Revolusi, Kapten Raymond 'Turk' Westerling. Metode-metodenya menggunakan teror yang sewenang-wenang segera diikuti oleh pihak-pihak anti-Republik lainnya di Sulawesi Selatan. Dalam waktu tiga bulan, sedikitnya 3.000 orang Indonesia diperkirakan telah terbunuh sebagai akibat metode-metode tersebut. Di antara mereka ialah Datu dari Supa yang pro-Republik, yang dibunuh oleh pasukan-pasukan Westerling pada bulan Februari 1947. Kelompok-kelompok pemuda Republik dibinasakan. Di Bali, sekitar 1.500 pejuang pro-Republik dibagi menurut garis pemisahan seperti yang berlaku di Jawa antara kelompok yang lebih profesional dan kelompok yang lebih revolusioner secara politis, dan selanjutnya dibagi menurut kasta. Pada bulan November 1946, kelompok militer yang lebih profesional, dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, sebagian besarnya ditumpas habis oleh pasukan-pasukan kolonial. Ini mengakibatkan kaum Republik di Bali kebanyakan berada di tangan para pemimpin politik yang muda-muda yang berasal dari kasta yang lebih rendah. Kaum Republik Bali lebih menekankan aktivitas di bidang politik daripada militer sampai sesudah "aksi polisional"

Belanda yang pertama pada tahun 1947, yang akan dibicarakan di bawah.

Pihak Belanda terus bergerak maju dengan rencana-rencana mereka membentuk negara-negara federal sedapat mungkin. Sebuah negara Indonesia Timur didirikan dalam suatu konferensi di Den Pasar (Bali) pada bulan Desember 1946. Negara ini dinamakan Negara Indonesia Timur dan disingkat NIT; pihak lawan berkelakar dengan mempelesetkan kepanjangannya menjadi "negara ikut tuan" (yaitu Belanda). Walaupun kekuasaan Belanda masih berlanjut, namun bahkan di Den Pasar pun ide-ide nasionalis tetap kuat: "Indonesia Raya" dipakai sebagai lagu kebangsaan NIT dan seorang Bugis yang pro-Republik nyaris terpilih sebagai presiden. Ternyata mustahil untuk mendirikan sebuah negara bagi seluruh rakyat Kalimantan, karena kaum muslim di pantai selatan dan timur sangat pro-Republik. Maka, sebuah negara yang terpisah untuk Kalimantan Barat pun dibentuk di bawah Sultan Abdul Hamid II (m. 1946–50) dari Pontianak pada bulan Mei 1947. Sjahrir memprotes pembentukan kedua negara yang dilakukan secara sepihak itu, namun sia-sia.

Perkembangan-perkembangan tersebut justru memperdalam kecurigaan pihak Republik terhadap Belanda dan ketidaksenangan terhadap persetujuan Linggajati. Dalam rangka memperbesar peluang bagi disahkannya persetujuan itu oleh KNIP, maka dirasa perlu untuk memperbanyak jumlah anggota komite ini dari 200 menjadi 514 orang dengan memasukkan tokoh-tokoh propemerintah yang telah membentuk suatu koalisi bernama Sayap Kiri pada bulan Desember 1946. Meskipun demikian, pengesahan tidak dapat dipastikan. Akan tetapi, ketika menjadi semakin jelas bahwa Hatta dan Sukarno akan meletakkan jabatan apabila Linggajati tidak disetujui, maka KNIP mengesahkan persetujuan itu pada bulan Februari 1947. Bagaimanapun juga, perluasan koalisi Sayap Kiri tersebut dalam KNIP berarti berakhirnya dominasi Sjahrir, karena kelompok-kelompok kiri lainnya kini mempunyai jumlah pengikut yang sama dengan jumlah pengikutnya dalam Partai Sosialis. Pada bulan Juni 1947, Amir Sjarifuddin dan sebagian besar anggota Sayap Kiri menarik dukungan mereka kepada Sjahrir, yang pergi ke luar negeri untuk mewakili Republik di PBB. Pada bulan Juli, Amir menjadi perdana menteri yang baru (1947–8), tepat untuk menghadapi serangan besar-besaran Belanda yang pertama terhadap Republik.

Sekitar bulan Mei 1947, pihak Belanda sudah memutuskan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Biaya pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur karena perang. Apabila mereka ingin mempertahankan pasukan ini, maka pihak Belanda memerlukan komoditi dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatera (khususnya minyak dan karet). Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan.

Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam, pihak Belanda melancarkan "aksi polisional" mereka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dalam kebingungan dan menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan. Di beberapa daerah terjadi aksi-aksi pembalasan detik terakhir: orang-orang Cina di Jawa Barat dan kaum bangsawan yang dipenjarakan di Sumatera Timur dibunuh. Beberapa orang Belanda, termasuk van Mook, ingin melanjutkan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang tidak menyukai "aksi polisional" tersebut menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa kini terlibat langsung dalam konflik tersebut, suatu keterlibatan yang akhirnya akan menjebak pihak Belanda dalam posisi diplomatik yang sulit. India dan Australia sangat aktif mendukung Republik di dalam PBB. Uni Soviet juga memberikan dukungannya. Akan tetapi, peranan yang paling penting akhirnya dimainkan oleh Amerika Serikat. Orang-orang Belanda yang menentukan kebijakan, bahkan yang lebih progresif di antara mereka, merasa yakin bahwa sejarah dan pikiran sehat memberi mereka hak untuk menentukan per-

kembangan Indonesia, tetapi hak ini hanya dapat dijalankan dengan menghancurkan Republik terlebih dahulu. Sekutu-sekutu utama negeri Belanda—terutama Inggris, Australia, dan Amerika (negara yang paling diandalkan Belanda untuk memberi bantuan pembangunan kembali di masa sesudah perang)—tidak mengakui hak semacam itu kecuali kalau rakyat Indonesia mengakuinya, dan itu jelas tidak mungkin apabila pihak Belanda harus menyandarkan diri pada penaklukan militer. Mereka mulai mendesak negeri Belanda supaya mengambil sikap yang tidak begitu kaku, dan PBB menjadi forum umum untuk memeriksa tindakan-tindakan Belanda. Keadaan ini justru semakin memperbesar hasrat Belanda untuk menemukan cara penyelesaian secepatnya di Indonesia.

Pada akhir bulan Juli 1947, pihak Belanda menyadari bahwa mereka harus menerima himbauan PBB untuk melakukan gencatan senjata, yang kemudian diperintahkan oleh Belanda dan Sukarno pada tanggal 4 Agustus. PBB selanjutnya memperkenankan Sjahrir untuk berbicara atas nama Republik, tetapi tidak bersedia menerima para wakil dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Pada bulan Oktober dibentuklah Komite Jasa-Jasa Baik PBB yang beranggotakan wakil-wakil Amerika, Australia, dan Belgia untuk membantu perundingan-perundingan Belanda–Republik dalam mencapai gencatan senjata yang baru. Sejak bulan Agustus, pihak Belanda telah melanjutkan operasi-operasi pembersihan di belakang garis terdepan mereka, di mana banyak kaum pejuang Republik tinggal. Khususnya, Divisi Siliwangi tetap berada di belakang garis-garis Belanda di Jawa Barat.

Pada bulan Januari 1948 tercapai persetujuan baru di atas kapal USS Renville milik Amerika di pelabuhan Jakarta. Persetujuan ini mengakui gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut sebagai "Garis van Mook", suatu garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan pihak Belanda walaupun kenyataannya masih tetap ada banyak daerah yang dikuasai pihak Republik di belakangnya. Walaupun persetujuan ini tampaknya seperti kemenangan besar pihak Belanda dalam perundingan, namun tindakan yang bijaksana dari pihak Republik dalam menerima persetujuan itu (suatu tindakan yang sebagian didorong oleh kurangnya amunisi di pihak Republik) menyebabkan mereka mendapatkan dukungan Amerika yang sangat menentukan.

Penghinaan dari "aksi polisional" pertama dan persetujuan Renville yang diakibatkannya menyebabkan jatuhnya pemerintahan Amir Sjarifuddin. Anggota-anggota PNI dan Masyumi dalam kabinetnya meletakkan jabatan ketika persetujuan Renville ditandatangani, dan kemudian Amir meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dia mungkin mengharapkan tampilnya kabinet baru yang beraliran kiri untuk menggantikannya, tetapi Sukarno berpaling ke arah lain. Dia menunjuk Hatta untuk memimpin suatu "kabinet presidentil" darurat (1948–9), yang bukan bertanggung jawab kepada KNIP melainkan kepada Sukarno sebagai presiden. Para anggota kabinetnya rata-rata berasal dari golongan tengah, terutama terdiri atas orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan Sayap Kiri kini menjadi pihak oposisi. Para pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan jalan membentuk partai tersendiri, Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948 dan memberikan dukungan mereka kepada pemerintahan Hatta.

Sementara itu, pihak Belanda terus bergerak maju dalam upaya mereka membentuk negara-negara federal di wilayah-wilayah yang telah direbutnya, tetapi hanya memperoleh sedikit keberhasilan karena dukungan yang mereka dapatkan menghilang dengan cepat. Pada bulan Desember 1947, mereka membentuk negara Sumatera Timur, pada bulan Februari 1948 negara Madura dan negara Jawa Barat yang dinamakan Pasundan, pada bulan September 1948 negara Sumatera Selatan, pada bulan November 1948 negara Jawa Timur, dan begitu seterusnya sampai terdapat lima belas negara federal di seluruh wilayah yang telah berhasil mereka rebut. Pada bulan Maret 1948, van Mook mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara untuk Indonesia yang berbentuk federal dengan dirinya bertindak sebagai presiden. Pada bulan Juli, pihak Belanda membentuk Majelis Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federale Overleg) yang terdiri atas para pemimpin negara-negara federal. Mereka bermaksud membentuk Negara Indonesia Serikat yang berbentuk federal, dengan atau tanpa persetujuan Republik, pada akhir tahun itu. Akan tetapi, di dalam negara-negara federal tersebut terdapat perasaan pro-Republik yang begitu besar di kalangan elite dan dukungan yang tidak begitu besar terhadap federalisme di kalangan rakyat. Oleh karena itu, pihak Belanda melangkah lebih

jauh dengan mempertimbangkan penyelesaian terakhir secara militer.

Keadaan di dalam Republik di Jawa pada tahun 1948 sangat kacau. Kekuasaan Republik secara efektif telah terdesak ke wilayah pedalaman Jawa Tengah yang sangat padat penduduknya dan kekurangan beras, di mana penderitaan semakin meningkat sebagai akibat blokade Belanda dan masuknya sekitar enam juta pengungsi dan tentara Republik. Pemerintah Republik mencetak lebih banyak uang lagi untuk menutup biaya, dan inflasi pun melonjak. Akan tetapi, tindakan ini bukannya tidak bermanfaat. Dengan meningkatnya inflasi dan harga beras, maka meningkat pula penghasilan para petani dan sebagian besar hutang mereka dapat dilunasi, sementara penghasilan para pekerja merosot. Sebagai akibatnya ialah terjadinya pemerataan yang memperbaiki nasib kaum tani secara relatif. Akibat selanjutnya, berkuranglah desakan dari bawah bagi perubahan sosial secara besar-besaran. Kekacauan juga berlangsung di Tapanuli (Sumatera Utara), di mana satuan-satuan Republik yang sedang bergerak mundur bergerombol dan terjadilah semacam perang saudara di antara pasukan-pasukan Republik yang bersaing.

Golongan kiri yang berada di luar pemerintahan Republik memulai suatu usaha yang menimbulkan bencana untuk mendapatkan kembali kekuasaan di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin. Pada bulan Februari 1948, koalisi Sayap Kiri berganti nama menjadi Front Demokrasi Rakyat dan mencela persetujuan Renville yang sebetulnya dirundingkan sendiri oleh pemerintahan Amir. Front tersebut berusaha membentuk organisasi-organisasi petani dan buruh, tetapi usaha itu hanya meraih sedikit keberhasilan. Pada bulan Mei 1948 dimulailah suatu pemogokan pada sebuah pabrik tekstil milik negara di Delanggu (Jawa Tengah). Dalam tindak kekerasan yang mengikuti pemogokan ini, tampak jelas bahwa basis front tersebut di wilayah pedesaan lebih merupakan soal identitas kemasyarakatan daripada masalah kelas sosial atau ideologi. Para buruh abangan yang mendukung front itu mendapat serangan dari para santri pengikut Masyumi yang didukung oleh satuan-satuan Hizbullah. Pada bulan Juli, pemogokan tersebut berhasil diakhiri dengan syarat-syarat yang menguntungkan pihak pemogok, tetapi kemudian terbukti bahwa siasat-siasat politik pusat sudah terlibat dalam ketegangan-ketegangan kemasyarakatan di desa-desa Jawa.

Sementara itu, telah terjadi suatu gerakan militer yang genting. Sesuai dengan persetujuan Renville, maka Kolonel Nasution memimpin 22.000 prajurit Siliwangi keluar dari wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda menuju ke wilayah Jawa Tengah yang dikuasai Republik pada bulan Februari 1948. Hal ini menimbulkan akibat-akibat penting di wilayah yang mereka tinggalkan maupun di wilayah yang mereka masuki.

Di Jawa Barat masih terdapat gerilyawan Islam militan yang dipimpin oleh seorang Jawa penganut tasawuf bernama S.M. Kartosuwirjo (1905–62). Pada tahun 1927, dia dikeluarkan dari sekolah kedokteran karena pemikiran-pemikiran politiknya yang radikal dan kemudian tinggal bersama ayah angkatnya, Tjokroaminoto, sampai tahun 1929. Kemudian dia menderita sakit keras dan selama masa pemulihan kesehatannya dia belajar agama Islam kepada berbagai guru aliran tasawuf. Sesudah itu, dia aktif di Partai Serikat Islam Indonesia sampai dikeluarkan pada tahun 1939 karena ketidaksetujuannya terhadap kebijaksanaan politik partai. Pada tahun 1940, dia mendirikan Institut Suffah di daerah Garut, Jawa Barat, di mana para pemuda yang militan diberi pelajaran umum serta agama dan diarahkan untuk memberikan kesetiaan pribadi kepada Kartosuwirjo. Pihak Jepang menutup Institut Suffah, tetapi Kartosuwirjo tetap mempertahankan hubungannya di daerah ini dan menjadi pemimpin gerilya Hizbullah setempat. Pada tahap-tahap pertama Revolusi, dia memperbesar pasukannya dan aktif dalam Masyumi. Akan tetapi, kini dia tidak lagi menyukai ide-ide yang kekiri-kirian dan, oleh karenanya, tidak memercayai banyak pemimpin Republik.

Ketika Divisi Siliwangi bergerak mundur, Kartosuwirjo merasa bahwa Jawa Barat telah ditinggalkan dan diserahkan kepada Belanda oleh pihak Republik. Reaksinya ialah melancarkan apa yang merupakan pemberontakan daerah yang pertama terhadap Republik Indonesia, sambil melanjutkan perjuangan melawan Belanda di Jawa Barat. Pada bulan Mei 1948, dia memproklamasikan dirinya sebagai imam (pemimpin) negara baru yang dinamakan Negara Islam Indonesia, yang lebih lazim disebut sebagai Darul Islam (dari bahasa Arab *dar al-Islam,* berarti wilayah atau rumah Islam). Pemerintahan Darul Islam didasarkan pada hukum Islam dan diselenggarakan oleh para kyai. Bagaimanapun juga, sebagian besar dukungan setempat muncul dari

kesetiaan kepada Kartosuwirjo yang memiliki kharisma, yang oleh para pengikutnya dipandang mempunyai kekuatan gaib. Dengan berjalannya waktu, maka semakin lama semakin sulit untuk membedakan gerakan Darul Islam dari tindak perampokan, pemerasan, dan terorisme biasa dalam ukuran luas. Gerakan yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah pedalaman Jawa Barat ini tetap merupakan pemberontakan daerah sampai Kartosuwirjo tertangkap dan dihukum mati pada tahun 1962. Sementara Revolusi terus berlangsung, pemerintah Republik terpaksa mengabaikan saja Darul Islam; beberapa pemimpin Masyumi malah bersimpati kepada gerakan ini.

Gerakan Siliwangi ke Jawa Tengah menimbulkan akibat-akibat di wilayah itu yang sangat penting artinya bagi pencapaian terakhir kemerdekaan. Nasution dan para pengikutnya, yang sebagian besar adalah orang Sunda, membentuk suatu pasukan yang setia kepada pemerintahan Hatta. Segera timbul pertentangan antara mereka dengan satuan-satuan setempat, yang beranggotakan orang-orang Jawa, yang cenderung kepada kepemimpinan Soedirman atau Front Demokrasi Rakyat di bawah Amir Sjarifuddin. Pemerintah Hatta ingin mengurangi jumlah anggota angkatan bersenjata yang sangat besar—secara kasar diperkirakan sekitar 350.000 tentara reguler dan 470.000 tentara takreguler—yang menjadi tanggung jawabnya. Nasution pun lebih menyukai suatu angkatan bersenjata yang jumlah anggotanya lebih sedikit tetapi memiliki standar-standar profesional yang lebih tinggi. Namun, tentu saja pihak yang akan tersingkir dalam rencana rasionalisasi seperti itu pastilah akan menjadi pejuang-pejuang yang mendukung lawan-lawan pemerintahan. Dengan terpecah-pecahnya pihak militer ke dalam berbagai kelompok sebagai akibat diajukannya usaha rasionalisasi tersebut, maka mulai timbul penculikan-penculikan, pembunuhan-pembunuhan, dan bentrokan-bentrokan bersenjata di wilayah Yogyakarta–Surakarta. Pada akhir bulan Agustus 1948, tampaknya ada kemungkinan terjadi lagi perang saudara. Kini berlangsung suasana panas yang merupakan campuran dari siasat-siasat politik kaum elite, politik pihak militer, dan ketegangan-ketegangan kemasyarakatan di Jawa Tengah, sementara pasukan-pasukan Belanda telah mengambil posisi di barat, utara, dan timur Republik.

Pada tanggal 11 Agustus 1948, secara tiba-tiba Musso, pemimpin PKI pada tahun 1920-an, tiba di Yogyakarta dari Uni Soviet. Kecuali untuk suatu kunjungan rahasia pada tahun 1935 untuk membentuk sebuah organisasi PKI bawah-tanah, Musso tidak pernah menginjakkan kaki di Indonesia sejak tahun 1926. Amir dan sebagian besar pemimpin lain Front Demokrasi Rakyat di Jawa Tengah dan Jawa Timur segera mengakui kekuasaan Musso dan mengumumkan bahwa dirinya telah menjadi anggota PKI bawah-tanah sejak tahun 1935. Musso menganut pemikiran Stalinis bahwa hanya boleh ada satu partai kelas buruh. Pada awal bulan September, partai-partai penting yang beraliran kiri di dalam Front Demokrasi Rakyat telah membubarkan diri dan bergabung ke dalam PKI. Pada tanggal 1 September dibentuklah suatu politbiro baru PKI yang beranggotakan beberapa pemuda yang lebih suka untuk menerima kekuasaan Musso daripada pemimpin-pemimpin PKI yang sudah ada; tokoh-tokoh baru tersebut meliputi kelompok pimpinan PKI di masa mendatang, yaitu D.N. Aidit (1923–65), M.H. Lukman (1920–65), Njoto (1925–65), dan Sudisman (1920–68).

Kini PKI mendorong dilakukannya demonstrasi-demonstrasi dan pemogokan-pemogokan oleh kaum buruh dan petani. Kaum tani di daerah Surakarta, dan kemudian di daerah-daerah lainnya, didorong supaya mengambil alih ladang-ladang milik para tuan tanah mereka. Masyumi mencela aksi-aksi komunis tersebut dan para petani santri tidak bersedia mendukung pemogokan. Sementara itu, pernyataan-pernyataan Musso yang pro-Soviet membahayakan strategi utama diplomasi Republik untuk memperoleh simpati Amerika Serikat. Para tuan tanah (banyak dari mereka adalah kaum santri), para kepala desa, kaum birokrat, pimpinan pusat Republik, dan kekuatan-kekuatan militer yang propemerintah, semuanya menyadari bahwa mereka menghadapi tantangan serius. Pada bulan September, pemerintah membebaskan Tan Malaka dengan harapan bahwa dia dapat menjauhkan golongan kiri dari Musso, tetapi harapan ini tinggal harapan.

Pada pertengahan bulan September 1948, pertempuran terbuka antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang pro-PKI dan propemerintah meletus di Surakarta. Pada tanggal 17 September, Divisi Siliwangi berhasil memukul mundur para pendukung PKI dari kota itu. Mereka mundur ke Madiun. Di sana, mereka bergabung dengan satuan-satuan pro-PKI lainnya yang telah

meninggalkan posisi mereka di sepanjang Garis van Mook untuk menghadapi serangan yang diduga akan dilancarkan pemerintah terhadap Madiun.

Pada tanggal 18 September, para pendukung PKI tersebut merebut tempat-tempat yang strategis di daerah Madiun, membunuh tokoh-tokoh propemerintah, dan mengumumkan melalui radio bahwa suatu pemerintahan Front Nasional yang baru telah terbentuk. Musso, Amir, dan para pemimpin PKI lainnya bergegas pergi ke Madiun untuk menangani usaha kudeta yang prematur ini. Soedirman terjepit dalam posisi yang sulit. Dia bersimpati pada satuan-satuan yang pro-PKI yang tidak setuju dengan demobilisasi dan kurang mendukung tindakan-tindakan pemerintah Republik. Tetapi dia juga menentang setiap usaha yang dilakukan Musso dan PKI untuk memperoleh pengaruh atas pemerintah Republik yang menyebabkan timbulnya usaha-usaha untuk memaksakan kekuasaan PKI atas tentara. Dan, tentu saja, dia tidak menginginkan terjadinya perang saudara. Soedirman ingin merundingkan suatu cara penyelesaian yang hanya mencakup penangkapan terhadap para biang keladi peristiwa Madiun tersebut, tetapi Sukarno, Hatta, dan Nasution memilih cara penyelesaian yang lebih drastis.

Pada tanggal 19 September, sekitar 200 orang anggota PKI dan pemimpin-pemimpin golongan kiri lainnya yang masih berada di Yogyakarta ditangkap. Malam itu, Sukarno mengecam para pemberontak Madiun melalui radio dan menghimbau bangsa Indonesia agar bergabung dengan dirinya dan Hatta daripada dengan Musso dan rencana-rencananya membentuk pemerintahan gaya Soviet. Kurangnya pengalaman Musso di Indonesia selama dasawarsa-dasawarsa terakhir mungkin membuatnya tidak dapat mengerti kekuatan dahsyat dari himbauan Sukarno itu. Dia membuat kesalahan yang menimbulkan bencana dengan menjawab melalui radio Madiun bahwa dia akan berperang sampai titik darah penghabisan. Ketika menghadapi pilihan yang tidak dapat dirujukkan lagi antara Musso dan Sukarno, maka banyak satuan militer yang pada dasarnya bersimpati kepada pihak antipemerintah memutuskan untuk menjauhkan diri. Organisasi-organisasi Front Demokrasi Rakyat di Banten dan Sumatera menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan gerakan Madiun.

Pasukan-pasukan propemerintah yang dipelopori oleh Divisi Siliwangi kini bergerak menuju Madiun, di mana terdapat sekitar 5.000 sampai 10.000 tentara pro-PKI. Ketika terdesak mundur, para pemberontak mulai membunuh para pejabat pemerintah dan para pemimpin dari Masyumi dan PNI. Di desa-desa mulai terjadi pembunuhan-pembunuhan menurut garis santri–abangan. Pada tanggal 30 September, kaum pemberontak meninggalkan kota Madiun dan terus dikejar oleh pasukan-pasukan propemerintah ke wilayah-wilayah pedesaan. Aidit dan Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Pada tanggal 31 Oktober, Musso tewas saat berupaya melarikan diri dari tahanan, yang mengakhiri karirnya sebagai pemimpin PKI yang hanya berlangsung selama delapan puluh hari. Amir dan segerombolan tentara yang berjumlah 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada 1 Desember; Amir kelak ditembak mati bersama-sama para pemimpin terkemuka PKI lainnya. Dalam aksi-aksi penangkapan yang dilakukan setelah pemberontakan Madiun tersebut, sekitar 35.000 orang ditangkap. Berapa banyak orang yang tewas selama peristiwa itu tidaklah diketahui, tetapi diduga sedikitnya 8.000 orang. Sebagai akibatnya, para petani santri di Surakarta melakukan pembalasan dan membunuh kaum abangan pendukung PKI di sana.

Peristiwa Madiun merupakan salah satu titik balik Revolusi yang sangat penting. PKI tidak lagi merupakan ancaman bagi para pemimpin Republik sampai tahun 1950-an, dan untuk selamanya ternoda oleh pengkhianatannya terhadap Revolusi. Golongan kiri pada umumnya tidak dipercaya lagi dan banyak pemimpinnya dijebloskan ke dalam penjara atau mati. Dengan lenyapnya kelompok Stalinis, maka kaum komunis nasional yang menganut pemikiran Tan Malaka dan menentang pemberontakan PKI di Madiun bergabung membentuk Partai Murba pada bulan Oktober 1948; mereka kini merupakan kelompok kiri yang utama di kalangan kaum revolusioner. Peristiwa Madiun menciptakan tradisi permusuhan tentara–PKI dan memperbesar pertentangan antara Masyumi dan PKI seperti juga halnya dengan ketegangan kemasyarakatan santri–abangan. Persekutuan antara perwira militer yang lebih profesional dan pemerintah Hatta menjadi semakin kuat. Pihak militer sendiri lebih ditempa dalam pertempuran dan lebih bersatu, dan segera sesudah itu dilakukanlah pembersihan di kalangan korps perwira dan demobilisasi terhadap banyak satuan liar.

Mungkin yang terpenting ialah bahwa keberhasilan Republik menumpas pemberontakan kaum komunis mengubah simpati samar-samar Amerika yang didasarkan atas sentimen-sentimen anti-penjajahan menjadi dukungan diplomatik yang didasarkan pada strategi global. Tahun 1948 merupakan awal blokade Uni Soviet terhadap Berlin, kup komunis di Cekoslowakia, awal pemberontakan komunis di Malaya, pemberontakan Kaum Komunis Bendera Merah di Birma (Kaum Komunis Bendera Putih telah memberontak sejak tahun 1946), terus berlanjutnya pemberontakan komunis di Filipina, terus majunya pihak komunis di Cina, dan munculnya bukti dari berbagai kawasan lain yang menggambarkan kemajuan-kemajuan pesat kaum komunis. Pemikiran strategi Amerika kini didominasi oleh ide bahwa "perang dingin" sedang berlangsung antara "dunia bebas" yang dipimpin oleh Amerika dengan blok yang dipimpin oleh Soviet. Di dalam kerangka ini, Republik Indonesia telah menunjukkan dirinya antikomunis dan, oleh karenanya, patut mendapat dukungan Amerika. Ketika pihak Belanda melaksanakan percobaan terakhir mereka untuk menaklukkan Indonesia, Amerika Serikat memberikan dukungan diplomatik mereka kepada pihak Indonesia.

Sementara Belanda secara sepihak melanjutkan penyelesaian federal mereka, perundingan-perundingan antara mereka dan pihak Republik terhenti sama sekali. Hatta tidak bersedia mengabulkan permintaan pihak Belanda agar mereka bertanggung jawab atas keamanan di dalam negeri selama peralihan ke kemerdekaan atau agar tentara Republik diintegrasikan ke dalam tentara federal. Sementara itu, pertempuran-pertempuran kecil terus berlangsung di belakang Garis van Mook dan meningkat ketika sebagian Divisi Siliwangi mulai merembes masuk kembali ke Jawa Barat setelah peristiwa Madiun. Pada bulan November–Desember 1948, Belanda memutuskan untuk melancarkan serangan militer terakhir guna menghancurkan Republik.

Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda melancarkan "aksi polisional" mereka yang kedua, yang menimpakan bencana militer maupun politik bagi mereka walaupun mereka tampak memperoleh kemenangan dengan mudah. Pada tanggal 19 Desember, Yogyakarta diduduki. Para pemimpin Republik membiarkan dirinya ditangkap dengan harapan bahwa opini dunia akan begitu tersinggung sehingga kemenangan militer Belanda akan berbalik

menjadi kekalahan diplomatik. Sukarno, Hatta, Agus Salim (Menteri Luar Negeri), dan seluruh anggota kabinet, kecuali beberapa orang yang tidak ada di tempat, ditangkap, demikian pula Sjahrir. Akan tetapi, pada umumnya tentara Republik tidak dapat memahami alasan menyerahnya para politisi sipil kepada Belanda sementara para prajurit mengorbankan jiwa mereka demi Republik. Pihak tentara kini menganggap dirinya sebagai satu-satunya penyelamat Republik.

Pasukan-pasukan Republik mengundurkan diri ke pedalaman dan memulai perang gerilya secara besar-besaran di kedua sisi Garis van Mook. Pihak tentara mundur dari Yogyakarta pada tanggal 19/20 Desember malam. Dengan langkah itu, mereka membunuh Amir Sjarifuddin dan lebih dari lima puluh orang beraliran kiri yang ada dipenjara karena khawatir orang-orang ini akan dibebaskan oleh Belanda. Sampai akhir bulan Desember, semua kota besar di Jawa dan Sumatera telah jatuh ke tangan Belanda. Satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di bawah kekuasaan Republik adalah Aceh, di bawah pimpinan Daud Beureueh. Belanda merasa akan lebih bijaksana jika tidak mengutik-utik Aceh.

Dewan Keamanan PBB merasa tersinggung sekali, sesuatu yang memang diharapkan oleh pemerintah Republik. Komite Jasa-Jasa Baik PBB sebenarnya sedang berada di Kaliurang yang letaknya hanya beberapa kilometer dari Yogyakarta ketika Belanda menyerang, dan dengan demikian martabat, wewenang, serta jasa-jasa baik PBB tampaknya telah diperlakukan secara tidak pantas oleh Belanda. Opini Amerika juga menjadi berang. Pada tanggal 22 Desember, Amerika Serikat menghentikan pemberian-pemberian dana bantuan lebih lanjut kepada negeri Belanda yang dimaksudkan untuk pengeluaran di Indonesia, sementara tekanan untuk menghentikan sama sekali semua bantuan ekonomi kepada Belanda semakin meningkat di dalam kongres Amerika. Bagaimanapun juga, para pemimpin Republik Indonesia masih mengharapkan dukungan Amerika yang lebih tegas.

Pihak Belanda segera menyadari bahwa kemajuan militer mereka hanya menimbulkan permasalahan melulu. Hanya sedikit sekali orang sipil Indonesia yang bersedia lagi untuk bekerja sama dengan mereka dan operasi-operasi gerilya Indonesia berhasil mengancam banyak posisi pihak Belanda sehingga mereka

sebenarnya berada dalam keadaan terkepung. Belanda juga tidak berhasil mendapat dukungan politik Indonesia. Sebagai contoh dari ketidakmampuan mereka untuk memahami seberapa jauh keadaan telah berubah, mereka berusaha membujuk Sultan Hamengkubuwana IX supaya menjadi pemimpin sebuah negara Jawa yang baru. Hamengkubuwana IX sama sekali tidak bersedia membicarakan tawaran mereka. Dia meletakkan jabatannya sebagai kepala daerah Yogyakarta pada bulan Januari 1949 dan istananya menjadi saluran utama komunikasi antara kota dengan satuan-satuan Republik yang berada di luar kota. Kabinet Negara Indonesia Timur maupun kabinet Pasundan sangat mempersulit posisi Belanda dengan jalan mengundurkan diri sebagai protes terhadap "aksi polisional".

Belanda menerima himbauan PBB supaya mengadakan gencatan senjata pada tanggal 31 Desember 1948 di Jawa dan tanggal 5 Januari 1949 di Sumatera, tetapi perang gerilya terus berlangsung. Soedirman kini berada dalam keadaan kritis karena penyakit TBC-nya; walaupun masih tetap menjadi lambang persatuan tentara, namun dia hampir tidak dapat menjalankan komando lagi. Nasutionlah yang secara efektif menjalankan komando sebagai wakil panglima dan, pada tanggal 22 Desember, dia memproklamasikan suatu pemerintahan militer untuk Jawa. Sebenarnya, sebagian besar satuan tentara beroperasi secara otonom selama masa gerilya ini. Di samping banyak kemenangan kecil mereka atas pihak Belanda, pasukan-pasukan Republik yang berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto mendapat kemenangan psikologis ketika mereka menyerang Yogyakarta selama enam jam pada tanggal 1 Maret 1949. Di tahun-tahun mendatang, setelah Soeharto menjadi presiden kedua Indonesia, penyerangan ini diangkat ke tingkat pemitosan Soeharto sebagai pahlawan nasional utama yang merebut kembali Yogyakarta dari Belanda dan menguasainya selama enam jam, yang cukup banyak dilebih-lebihkan.

Satu-satunya politisi sipil utama yang masih hidup dan bebas ialah Tan Malaka, yang sedang berada di Jawa Timur ketika Belanda melancarkan serangan. Dia melontarkan himbauan untuk melakukan perlawanan semesta, tetapi dia sendiri tidak lagi mempunyai banyak pengikut. Pada bulan Februari 1949, dia sedang berada di Jawa Timur bersama suatu satuan

tentara yang menderita kekalahan dalam bentrokan dengan satuan Republik lainnya. Tan Malaka ditangkap dan dibunuh.

PBB dan Amerika Serikat mulai bersikap lebih tegas terhadap Belanda. Tekanan ini, bersama-sama dengan tekanan militer Republik, akhirnya memaksa Belanda untuk memutuskan upaya-nya yang terakhir membentuk imperium di Indonesia. Pada akhir bulan Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menuntut pembebasan kabinet Republik, pembentukan suatu pemerintahan sementara, dan penyerahan kedaulatan secara penuh sebelum tanggal 1 Juli 1950. Amerika Serikat secara terang-terangan mencela Belanda di dalam PBB dan mengancam akan menghentikan bantuan pembangunan yang menjadi tumpuan utama perekonomian dalam negeri Belanda. Pada bulan April, Belanda sepakat untuk menyerah, tetapi mendesak untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan dengan pemerintah Republik. Pada tanggal 7 Mei disepakati bahwa Sukarno dan Hatta akan memerintahkan gencatan senjata sekembalinya mereka ke Yogyakarta, bahwa Belanda akan menerima pihak Republik pada Konferensi Meja Bundar yang akan digelar, dan bahwa mereka tidak akan mendirikan negara-negara federal baru.

Pada tanggal 6 Juli 1949, pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta, yang sudah ditinggalkan oleh pasukan-pasukan Belanda pada akhir bulan Juni. Soedirman dan pimpinan-pimpinan tentara lainnya enggan mengakui kekuasaan sipil yang mereka anggap telah meninggalkan Republik. Akan tetapi, pihak militer akhirnya mengakuinya ketika Sukarno mengancam akan mengundurkan diri kalau mereka tidak melakukannya. Suatu konferensi diselenggarakan di Yogyakarta dan Jakarta pada bulan Juli. Di dalam konferensi itu, negara-negara federal ternyata mempunyai banyak kepentingan yang sama dengan Republik, sebagian besar dikarenakan rasa hormat mereka atas perlawanan Republik dan kekecewaan mereka atas kelalaian Belanda untuk menyerahkan kekuasaan yang penting kepada mereka. Konferensi tersebut bersepakat bahwa tentara Republik akan menjadi inti kekuatan militer bagi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang baru dan bahwa Sukarno serta Hatta akan menjadi presiden dan wakil presiden negara itu.

Pada tanggal 1 Agustus, diumumkanlah gencatan senjata yang akan mulai berlaku di Jawa pada tanggal 11 Agustus dan

di Sumatera pada tanggal 15 Agustus. Justru sebelum gencatan senjata itu dilaksanakan, pasukan-pasukan Republik berhasil merebut kembali sebagian besar Surakarta dan mempertahankannya selama dua hari. Bentrokan-bentrokan berikutnya yang berdiri sendiri berlanjut sampai bulan Oktober. Akan tetapi, sedikit demi sedikit, penyerahan kekuasaan militer dari Belanda dan pasukan-pasukan liar kepada satuan-satuan reguler Republik dan pembentukan kekuasaan militer yang terintegrasi bagi RIS diurus oleh Hamengkubuwana IX selaku koordinator keamanan. Akan tetapi, ada beberapa wilayah yang bergolak seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat, di mana proses ini menghadapi perlawanan dari pasukan-pasukan liar setempat.

Dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949, Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag. Hatta mendominasi pihak Indonesia selama berlangsungnya perundingan-perundingan dan semua peserta mengaguminya. Suatu uni yang longgar antara negeri Belanda dan RIS disepakati dengan ratu Belanda sebagai pimpinan simbolis. Sukarno akan menjadi Presiden RIS dan Hatta sebagai perdana menteri (1949–50) merangkap wakil presiden. Berbagai jaminan diberikan kepada investasi-investasi Belanda di Indonesia dan disepakati bahwa akan diadakan konsultasi-konsultasi mengenai beberapa masalah keuangan. Banyak orang Indonesia menganggap rencana-rencana tersebut sebagai pembatasan-pembatasan yang tidak adil terhadap kedaulatan mereka. Pihak Indonesia harus memberikan konsesi-konsesi pula dalam dua masalah yang paling sulit. Belanda tetap mempertahankan kedaulatan atas Papua sampai ada perundingan-perundingan lebih lanjut mengenai status wilayah itu. Dan RIS memikul tanggung jawab atas hutang Hindia Timur Belanda yang, setelah terjadi banyak tawar-menawar, jumlahnya ditetapkan sebesar 4,3 milyar gulden; sebagian besar dari jumlah ini sebenarnya merupakan biaya yang dipakai oleh pihak Belanda dalam usahanya menumpas Revolusi.

Pada tanggal 27 Desember 1949, negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia, tidak termasuk Papua, kepada RIS, sebuah negara federal yang hanya bertahan secara utuh selama beberapa minggu saja. Ada banyak sentimen pro-Republik di negara-negara federal yang didirikan oleh Belanda

itu, sentimen yang telah menjadi semakin kuat dengan dibebaskannya sekitar 12.000 orang tawanan Republik dari penjara-penjara Belanda antara bulan Agustus dan Desember 1949. Federalisme pada umumnya telah dicurigai dikarenakan asalnya jelas sebagai muslihat Belanda; kini ia akhirnya dinodai oleh upaya flamboyan terakhir "Turk" Westerling untuk mengubah jalannya sejarah.

Pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling dan sekitar 800 orang serdadunya merebut tempat-tempat penting di Bandung, tetapi Komisaris Tinggi Belanda dan komandan garnisun Belanda yang masih berada di Bandung mendesaknya supaya mundur pada hari itu juga. Hari berikutnya diketahui bahwa Westerling merencanakan untuk menyerang kabinet RIS dan membunuh beberapa orang menteri. Serdadu-serdadu Westerling telah menyusup memasuki Jakarta setelah meninggalkan Bandung, tetapi mereka dapat dipukul mundur. Pada bulan Februari, Westerling meninggalkan negeri ini dengan jalan menyamar. Timbul kegoncangan yang luas atas terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.

Ditangkapnya beberapa pemimpin Pasundan karena dicurigai terlibat dalam komplotan Westerling mendorong parlemen negara bagian itu meminta, pada tanggal 27 Januari 1950, agar Pasundan dibubarkan. Sampai akhir bulan Maret, sebagian besar negara federal yang kecil telah mengikuti contoh ini dengan memutuskan untuk membubarkan diri dan bergabung dengan Republik. Kabinet Hatta merasa dibawa oleh suatu gelombang persatuan dan dipaksa melakukan persiapan-persiapan legislatif secara tergesa-gesa untuk menghadapinya. Pada awal bulan April, Sultan Abdul Hamid II dari Pontianak, kepala negara di Kalimantan Barat dan menteri tanpa portofolio dalam kabinet RIS, ditangkap karena dituduh sebagai penghasut utama dalam kelompok Westerling. Setelah itu, kekuasaan atas Kalimantan Barat diambil alih oleh pemerintah RIS.

Oposisi yang terbesar terhadap gerakan persatuan tersebut berasal dari negara-negara Sumatera Timur dan Indonesia Timur. Di Negara Indonesia Timur, banyak orang Ambon yang beragama Kristen, pro-Belanda, dan telah berperang melawan Revolusi menentang pembubaran federalisme. Mereka menganggap Republik sebagai negara yang didominasi oleh orang Jawa, kaum muslim, dan tokoh-tokoh yang mereka pandang berhaluan kiri. Pada

bulan April 1950 terjadi bentrokan antara para serdadu kolonial (kebanyakan orang Ambon) dengan satuan-satuan Republik di Makasar yang mengakibatkan pemerintah Indonesia Timur dicurigai. Pada bulan Mei dibentuklah suatu kabinet baru Indonesia Timur dengan tujuan membubarkan negara itu dan meleburkannya ke dalam negara kesatuan Indonesia. Akan tetapi, pada tanggal 25 April, mantan menteri kehakiman dalam pemerintahan Indonesia Timur, seorang Ambon yang bernama Dr. Soumokil, memproklamasikan Republik Maluku Selatan di Ambon. Setelah melalui serangan-serangan yang hebat dari bulan Juli sampai November, negara baru ini dapat ditumpas oleh pasukan-pasukan Republik. Dihadapkan pada keruntuhan negara-negara federal lainnya, maka Sumatera Timur tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti arus.

Akhirnya, pada saat peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang kelima pada tanggal 17 Agustus 1950, semua struktur konstitusional semasa tahun-tahun Revolusi secara resmi dihapuskan. Republik Indonesia Serikat, dengan Republik Indonesia sebagai unsur di dalamnya, serta negara-negara Sumatera Timur serta Indonesia Timur digantikan oleh Republik Indonesia yang baru, yang memiliki konstitusi kesatuan (namun bersifat sementara). Jakarta dipilih sebagi ibu kota negara baru ini.

Revolusi politik usai sudah. Masih tetap ada banyak persoalan, tetapi tahun-tahun Revolusi tampaknya telah memecahkan beberapa masalah. Cukup alasan untuk berpendapat bahwa Indonesia tidak akan menjadi negara federal, negara Islam, atau negara komunis, ataupun terutama sekali suatu jajahan Belanda. Akan tetapi, tahun-tahun yang akan datang akan menunjukkan bahwa hal-hal itu tidak sama pastinya dengan yang terlihat pada tahun 1950. Juga, tidaklah jelas apa implikasi dari kemerdekaan terhadap banyak masalah sosial, agama, kemasyarakatan, kesukuan, kebudayaan, dan ekonomi yang masih tetap ada. Masih terdapat masalah-masalah dasar yang pada masa antikolonialisme, perang, dan Revolusi belum pernah dihadapi oleh bangsa Indonesia karena tidak adanya waktu atau kesempatan. Kini, ketika mereka menghadapi masalah-masalah tersebut, maka menjadi jelas bahwa, di luar kemenangan atas Belanda, masih banyak permasalahan yang belum dipecahkan oleh Revolusi.[]

VI

Indonesia Merdeka

Bab 19 ....

Percobaan Demokrasi, 1950–7

INDONESIA AKHIRNYA merdeka, setidak-tidaknya dalam pengertian hukum internasional, dan kini menghadapi prospek menentukan masa depannya sendiri. Dalam sebuah negeri yang masih menunjukkan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi-tradisi otoriter, maka banyak hal bergantung pada kearifan dan nasib baik kepemimpinan negeri itu. Akan tetapi, sebagian sejarah bangsa Indonesia sejak tahun 1950 merupakan kisah tentang kegagalan rentetan pimpinan untuk memenuhi harapan-harapan tinggi yang ditimbulkan oleh keberhasilan mencapai kemerdekaan. Dalam tahun 1950, kendali pemerintahan berada di tangan kaum nasionalis perkotaan dari generasi yang lebih tua dari partai-partai sekuler dan Islam yang terkemuka. Ada suatu kesepakatan umum bahwa demokrasi diinginkan dan bahwa mereka itulah orang-orang yang akan dapat menciptakan sebuah negara demokrasi. Akan tetapi, pada tahun 1957, percobaan demokrasi tersebut telah mengalami kegagalan, korupsi tersebar luas, kesatuan wilayah negara terancam, keadilan sosial belum tercapai, masalah-masalah ekonomi belum terpecahkan, dan banyak harapan yang ditimbulkan oleh Revolusi tidak terwujud.

Mengingat keadaan-keadaan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia pada kurun waktu 1950–7, tidak mengherankan bila percobaan demokrasi tersebut gagal, karena dasar untuk dapat membangun demokrasi perwakilan hampir tidak ditemukan. Dari Belanda dan Jepang, Indonesia mewarisi tradisi-tradisi, asumsi-asumsi, dan struktur hukum sebuah negara polisi. Rakyat Indonesia—kebanyakan buta huruf, miskin, terbiasa dengan kekuasaan yang otoriter dan paternalistik, dan tersebar di kepulauan yang

sangat luas—berada dalam posisi yang sulit untuk memaksa pertanggungjawaban atas perbuatan para politisi di Jakarta. Mereka yang melek politik hanyalah sekelompok kecil masyarakat perkotaan. Para politisi Jakarta, walaupun mengaku mengusung cita-cita demokrasi, kebanyakan adalah kaum elite dan merasa sebagai pengikut suatu budaya perkotaan baru yang lebih unggul daripada budaya-budaya kedaerahan. Mereka bersikap paternalistis terhadap orang-orang yang tidak seberuntung mereka dan kadang-kadang tinggi hati terhadap orang-orang yang, misalnya, tidak dapat berbicara lancar dalam bahasa Belanda. Tanggung jawab mereka hanya kecil terhadap struktur demokrasi perwakilan yang merakyat dan mereka berhasil menunda pemilihan umum selama lima tahun lagi. Tanaman indah seperti demokrasi perwakilan hampir tidak dapat tumbuh di bumi semacam itu. Bagaimanapun juga, harus dikatakan bahwa dikarenakan tanggung jawab golongan elite terhadap ide demokrasi itulah maka kurun waktu 1950–7 merupakan masa yang sangat bebas bagi artikulasi politik.

Masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setelah pendudukan Jepang dan Revolusi sangatlah besar. Perkebunan-perkebunan dan instalasi-instalasi industri di seluruh penjuru negeri rusak berat. Mungkin yang paling penting ialah bahwa jumlah penduduk meningkat tajam. Diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 1950 adalah 77,2 juta jiwa, pada tahun 1955 berjumlah 85,4 juta jiwa, dan menurut sensus pada tahun 1961 adalah 97 juta jiwa. Produksi pangan meningkat, tetapi tidak cukup. Di Jawa, produksi beras per kapita sedikit menurun dari tahun 1950 sampai 1960. Maka, sejumlah besar impor makanan masih diperlukan. Pertanian banyak menyerap tenaga kerja baru dengan membagi pekerjaan kepada sejumlah buruh yang jumlahnya meningkat terus. Tetapi dengan menurunnya jumlah lahan yang dimiliki, banyak keluarga petani tidak lagi memiliki lahan yang cukup untuk menafkahi hidup mereka dan harus mencari banyak, atau kebanyakan, pendapatan mereka dengan menjadi buruh upahan. Banyak dari mereka berduyun-duyun ke kota-kota yang tumbuh secara cepat sekali. Pada tahun 1930, 3,8 persen dari jumlah penduduk digolongkan sebagai penduduk perkotaan; pada tahun 1961, jumlahnya menjadi 14,8 persen. Antara tahun 1945 dan 1955, jumah penduduk Jakarta meningkat dua kali lipat menjadi 1,8 juta jiwa dan kemudian

bertambah lagi menjadi 2,9 juta jiwa pada tahun 1961. Pada waktu itu, jumlah penduduk dua kota lainnya adalah sekitar 1 juta jiwa (Surabaya dan Bandung) dan jumlah penduduk tiga kota lainnya adalah sekitar 0,5 juta jiwa (Semarang, Palembang, dan Medan). Secara alami, kota-kota dan kota-kota praja yang lebih besar menjadi fokus kegiatan politik, sehingga masalah-masalah wilayah pedesaan sering diabaikan.

Karena di Jawa terdapat ibu kota negara, sebagian besar kota-kota besar lainnya, mayoritas kaum politisi sipil, dan mayoritas penduduk negara (61 persen pada tahun 1961), maka daerah-daerah luar Jawa pada umumnya cenderung dilupakan oleh pemerintah pusat. Dalam upaya menyubsidi perekonomian impor Jawa, maka rupiah Indonesia (mata uang yang diperkenalkan pertama kali pada masa Revolusi) dipertahankan pada nilai tukar yang sengaja dibuat tinggi. Tindakan ini menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi daerah-daerah luar Jawa yang berperekonomian ekspor serta mendorong munculnya pasar-pasar gelap dan terjadinya penyelundupan. Sebagian besar bidang perdagangan dan industri menderita. Walaupun banyak politisi sipil merasa yakin bahwa perusahaan-perusahaan asing sangat penting artinya bagi pembangunan ekonomi, namun secara politik tidak bijaksana untuk mendukung mereka dengan terlalu terang-terangan. Golongan menengah setempat secara politik lemah dan terpecah-belah antara orang Cina, yang mempunyai jaringan perdagangan yang sangat luas namun tidak mempunyai dukungan politik, dan kaum borjuis Indonesia yang sebagian besar berpegang teguh kepada agama Islam, yang jaringan perdagangannya tidak begitu luas dan hanya mempunyai dukungan politik terbatas.

Pendidikan diberi prioritas utama dan jumlah lembaga pendidikan meningkat secara drastis. Antara tahun 1953 dan 1960, jumlah anak yang memasuki sekolah dasar meningkat dari 1,7 juta menjadi 2,5 juta orang, tetapi sekitar 60% dari jumlah itu keluar sebelum tamat. Sekolah-sekolah lanjutan negeri dan swasta (kebanyakan sekolah agama) dan lembaga-lembaga tingkat universitas bermunculan di mana-mana, tetapi terutama sekali di Jawa, dan banyak yang mencapai standar yang tinggi. Dua keuntungan penting dari perluasan pendidikan ini segera tampak nyata. Pada tahun 1930, jumlah orang dewasa yang melek huruf adalah 7,4%, sedangkan pada tahun 1961 jumlahnya mencapai

46,7% dari jumlah anak-anak di atas usia 10 tahun (56,6% di Sumatera dan 45,5% di Jawa). Untuk penduduk laki-laki berusia antara 10 dan 19 tahun, jumlahnya di atas 76%. Angka-angka ini menunjukkan prestasi yang hebat sejak zaman Belanda. Lalu, pemakaian bahasa Indonesia di seluruh sistem pendidikan, dan juga dalam semua komunikasi resmi dan media massa, benar-benar memantapkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Meningkatnya jumlah orang Indonesia yang melek huruf tercermin pada oplah surat kabar harian yang, bagaimanapun juga, masih tetap kecil untuk jumlah penduduk sebesar itu. Oplah surat kabar harian meningkat hampir dua kali lipat dari hanya di bawah 500.000 eksemplar pada tahun 1950 menjadi di atas 933.000 eksemplar pada tahun 1956, sementara oplah majalah-majalah lainnya meningkat tiga kali lipat menjadi di atas 3,3 juta eksemplar dalam kurun waktu yang sama. Akan tetapi, pada saat perkembangan-perkembangan yang penuh harapan itu membawa hasil, sistem demokrasi konstitusional yang dapat didukung oleh perkembangan-perkembangan itu sudah hampir kehilangan kepercayaan.

Kini lebih banyak orang yang mencari pekerjaan, termasuk mereka yang berasal dari lembaga-lembaga pendidikan yang semakin banyak, para mantan pejuang gerilya, serta para mantan pejabat negara-negara federal dan Republik. Pemerintah-pemerintah dari tahun 1950-an memberi kedudukan kepada banyak dari mereka di dalam birokrasi, dan jumlahnya terus membengkak. Mereka menjadikan pekerjaan di pemerintahan sebagai salah satu rebutan utama dari kekuasaan politik. Pada tahun 1930, pegawai sipil kolonial berjumlah sekitar 145.000 orang, kira-kira seorang pegawai mewakili setiap 418 orang penduduk. Pada tahun 1950, birokrasi bekas negara-negara federal (kira-kira 180.000 orang) dan birokrasi Republik (kira-kira 240.000 orang) dijadikan satu. Kemudian banyak mantan gerilya diberi pekerjaan kantor. Para pelajar juga masuk, dan para politisi mengganjar para pendukung mereka. Di negara ini secara keseluruhan terdapat hampir sebanyak 807.000 pegawai negeri tetap pada tahun 1960, kira-kira satu orang pegawai mewakili setiap 118 orang penduduk. Gaji tergolong rendah dan sangat dipengaruhi inflasi. Ketidakefisienan, salah urus, dan korupsi kecil-kecilan menjadi biasa, sehingga birokrasi yang janggal ini menjadi semakin tidak mampu berbuat apa-apa.

Pemulihan ekspor Indonesia berlangsung lambat. Minyak, penghasil devisa terbesar kedua setelah karet, adalah yang paling besar harapannya untuk jangka panjang. Pada tahun 1957, produksi minyak mencapai dua kali lipat tingkat produksi pada tahun 1940, tetapi sebagian dari peningkatan ini dikonsumsi di dalam negeri. Selama tahun 1950–6, permintaan bensin di dalam negeri meningkat 64,5% dan permintaan minyak tanah meningkat 200,5%. Pada umumnya, program-program infrastruktur pemerintah yang sangat penting untuk sektor ekspor (seperti jalan raya, pelabuhan, pengendalian banjir, irigasi, kehutanan) memburuk, dan nilai tukar yang dibuat mendiskriminasikan para pengekspor.

Di bidang ekonomi, pada umumnya kepentingan-kepentingan non-Indonesia tetap mempunyai arti yang penting. Shell dan perusahaan-perusahaan Amerika, Stanvac dan Caltex, mempunyai posisi yang kuat di bidang industri minyak, dan sebagian besar pelayaran antarpulau berada di tangan perusahaan pelayaran KPM Belanda. Perbankan didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda, Inggris, dan Cina. Orang-orang Cina juga menguasai kebanyakan kredit pedesaan. Bagi para pengamat yang tahu, tampak jelas bahwa bangsa Indonesia secara ekonomi tidak merdeka, suatu kenyataan yang mendukung radikalisme pada akhir tahun 1950-an.

Dengan lambannya pemulihan ekonomi dan meluasnya pengeluaran pemerintah, maka tidaklah mengherankan bahwa inflasi dari masa perang dan revolusi terus berlanjut. Biaya hidup umum meningkat sekitar 100 persen selama tahun 1950–7, tetapi angka ini menyembunyikan fluktuasi yang lebih tajam di daerah-daerah, pada kurun waktu, dan untuk komoditi-komoditi tertentu. Semua sektor kemasyarakatan menderita sampai tingkatan tertentu akibat kenaikan harga. Para pegawai yang digaji dan para buruh upahan sangat terpengaruh, sedangkan para tuan tanah, para pejabat desa yang diberi tanah sebagai pengganti gaji, dan para petani produsen beras relatif diuntungkan. Dibandingkan dengan masa pendudukan Jepang dan tahun-tahun Revolusi, keadaannya lebih baik bagi sebagian besar rakyat Indonesia pada tahun 1950–7, tetapi kemerdekaan tidak menghasilkan kemakmuran umum yang diharapkan banyak orang.

Di antara masalah-masalah yang dihadapi negara baru ini ialah apa yang harus dilakukan dengan tentara. Inilah sumber dari persoalan-persoalan yang mendominasi sebagian besar sejarah Indonesia setelah tahun 1950: siapakah yang menguasai tentara, bagaimana tentara akan dibentuk, dan apakah peranannya dalam kehidupan bangsa? Pada tahun 1950, para politisi sipil beranggapan bahwa menentukan urusan militer adalah hak mereka. Pada waktu kemerdekaan, pemerintah mempunyai sekitar 250.000 sampai 300.000 anggota tentara dan begitu banyak anggota lasykar yang jumlahnya tidak diketahui yang harus diurus, dan harus menampung sekitar 26.000 serdadu kolonial Belanda. Pada bulan November 1950, jumlah tentara dikatakan sudah berkurang menjadi 200.000 orang, suatu jumlah yang dipertahankan sampai sekitar tahun 1960. Para panglima tentara terpecah-pecah di antara mereka sendiri, merasa tidak pasti akan peranan mereka yang sebenarnya, kurang terpelajar jika dibandingkan dengan para politisi terkemuka, dan kebanyakan sedikitnya sepuluh tahun lebih muda daripada mereka. Masih akan memerlukan beberapa waktu sebelum tentara mendapat peranan dalam gelombang politik nasional.

Perpecahan-perpecahan di dalam tubuh tentara mencerminkan asal-usulnya pada masa-masa Belanda, Jepang, dan Revolusi. Pimpinan pusat berada di tangan Nasution, Simatupang, dan lain-lain yang menginginkan profesionalisme dalam tentara, suatu sikap yang menguntungkan orang-orang semacam mereka, dan struktur-struktur hierarkis yang dapat mereka kendalikan. Lawan mereka adalah para panglima daerah yang lebih menyukai semangat revolusi, desentralisasi militer, dan hierarki yang minimum. Namun, tentara agak bersatu secara ideologis setelah terbebas dari sayap kirinya di Madiun serta dari unsur-unsur Islamnya sebagai akibat demobilisasi dan pemberontakan Darul Islam. Komitmennya yang terdalam ialah pada semangat Revolusi, walaupun apa yang persis diperlukan oleh semangat ini tidak dirumuskan dengan jelas kecuali gagasan bahwa bagaimanapun juga, tentara adalah perwujudannya yang tertinggi. Kelompok-kelompok tersebut juga sama-sama mencurigai para politisi sipil yang mereka anggap hanya sedikit memberikan sumbangan terhadap pencapaian kemerdekaan.

Para politisi sipil membentuk banyak partai politik, tetapi hanya beberapa partai saja yang benar-benar mempunyai arti penting di Jakarta. Sjahrir tetap memimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang didukung oleh kaum intelektual Jakarta tetapi hanya mendapat sedikit dukungan umum di luar Jakarta. Akan tetapi, Sjahrir sendiri tidak pernah lagi duduk dalam kabinet. PSI berpengaruh di kalangan pejabat tinggi pemerintahan dan mempunyai pendukung di kalangan tentara pusat. Kaum "komunis nasional" yang mengagumi Tan Malaka menjadi anggota Partai Murba; mereka merupakan musuh utama kaum komunis dalam merebut dukungan sayap kiri, tetapi tidak begitu kuat di luar Jakarta. Umat Kristen memiliki Parkindo (Partai Kristen Indonesia) untuk orang Protestan dan Partai Katholik; arti mereka menjadi semakin penting karena sangat banyak orang beragama Kristen yang menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan dan militer dikarenakan lebih tingginya tingkat pendidikan mereka.

Masyumi mewakili kepentingan-kepentingan politik Islam dan dianggap merupakan partai yang terbesar di negara ini, walaupun sampai terselenggaranya pemilihan umum hal ini hanya dapat menjadi anggapan belaka. Partai ini tidak terorganisasikan secara teratur, dan mengalami perpecahan utama di dalamnya antara para pemimpin Islam ortodoks dan modernis. Nantinya, pada tahun 1952, golongan-golongan ini terpecah. Di tingkat tertinggi, Masyumi dipimpin oleh Sukiman Wirjosandjojo dan Mohammad Natsir, dua politisi dari golongan Islam modernis. Akan tetapi, ada sedikit ketegangan antara para pengikut kedua tokoh ini: sebagian besar dukungan terhadap Sukiman berasal dari orang-orang Jawa, sedangkan Natsir berasal dari orang-orang non-Jawa. Basis politik Masyumi terdiri atas kaum muslim yang taat, termasuk sebagian besar kaum borjuis pribumi, para kyai dan ulama, serta kaum gerilya Hizbullah dan Sabilillah yang didemobilisasikan. Akan tetapi, partai ini tidak pernah secara resmi menempatkan ide tentang sebuah negara Islam di antara prioritas-prioritasnya pada tahun 1950-an. Walaupun dalam kehidupan pribadi para pemimpin nasionalnya mengabdi kepada Tuhan, tetapi dalam politik mereka mengabdi untuk Indonesia. Mereka menghindari sikap-sikap yang doktriner yang dapat mengancam persatuan nasional atau kelihatan mempertalikan partai ini dengan pemberontakan Darul Islam.

Mereka yang menentang Masyumi, bagaimanapun juga, mencurigai partai ini memiliki fanatisme agama yang terpendam.

Partai Nasional Indonesia (PNI) dianggap merupakan partai terbesar kedua. Basis utamanya ialah di dalam birokrasi dan kalangan pegawai kantor. Di daerah pedesaan Jawa, partai ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat muslim abangan, sebagian karena partai ini dianggap sebagai partai Sukarno (yang secara resmi tidak demikian karena presiden tidak menjadi anggota atau pimpinan partai mana pun) dan sebagian karena partai ini dianggap merupakan imbangan utama terhadap keinginan-keinginan politik Islam. Demikian pula, PNI mendapat banyak dukungan di daerah-daerah Kristen di luar Jawa dan di Bali yang menganut agama Hindu, di mana juga terdapat perasaan-perasaan anti-Islam.

Akhirnya, Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dihancurkan namun tidak dilarang pada tahun 1948, hampir siap muncul kembali secara paling menakjubkan dalam sejarahnya yang berganti-ganti. Dalam suatu persaingan di dalam tubuh partai yang berakhir pada bulan Januari 1951, para pemuda Aidit, Lukman, Njoto, dan Soedisman mengambil alih kekuasaan atas Politbiro dari tangan generasi tua yang berhasil selamat dari peristiwa Madiun. Sejak awal mulanya, Aidit menekankan bahwa Marxisme merupakan pedoman untuk bertindak, bukannya dogma yang kaku. Kepemimpinannya membawa suatu pragmatisme baru bagi PKI yang memungkinkan partai ini segera menjadi salah satu partai politik terbesar. Pada mulanya, basis PKI terutama adalah kaum buruh perkotaan dan buruh perusahaan pertanian, yang diorganisasikan melalui federasi serikat SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang sepenuhnya dikendalikan oleh PKI. Kemudian partai ini melebarkan sayap ke sektor-sektor kemasyarakatan lainnya, termasuk kaum tani, yang menjadikannya kehilangan banyak sifat proletarnya.

Aidit berpendapat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang bersifat semikolonial dan semifeodal, dan bahwa sasaran pertama partai ini haruslah sisa-sisa kolonialisme. Karena itu, partai ini harus mencari kerja sama dengan kekuatan-kekuatan nonkomunis yang anti penjajahan. Sebenarnya, dia mula-mula mengharapkan dukungan dari PNI. Strategi partai ini berselubung dalam terminologi Marxis-Leninis yang menyembunyikan penyimpangan dari teori Marxis-Lininis yang konven-

sional. Di dalam uraian-uraian Aidit, orientasi politiklah yang menjadi faktor penentu kelas sosial, bukannya kelas sosial itu sendiri yang menentukan orientasi politik. Jadi, dia menyatakan bahwa kaum komunis dapat bekerja sama dengan kaum borjuis kecil-kecilan dan kaum borjuis nasional melawan kelas borjuis komprador dan kelas feodal. Akan tetapi, partai politik utama yang didukung oleh kaum borjuis pribumi adalah Masyumi yang para pemimpinnya bersikap antikomunis. Oleh karena itu, Masyumi, bersama-sama dengan PSI, dicap sebagai partai kaum borjuis komprador. PNI, yang lebih bersifat birokratis (malah dalam beberapa hal "feodal") daripada borjuis, ternyata lebih dapat menerima rayuan PKI dan, oleh karenanya, PNI diidentifikasikan oleh Aidit sebagai partai kaum borjuis nasional. Ketika Nahdatul Ulama memisahkan diri dan Masyumi pada tahun 1952, maka Aidit merasa lega untuk dapat memandang NU sebagai partai borjuis, yang dalam beberapa hal memang demikian adanya. Strategi Aidit dalam mencari sekutu dengan aliran-aliran politik lainnya mengandung arti bahwa sebenarnya PKI menyesuaikan diri dengan suatu struktur sosial yang di dalamnya kesetiaan budaya, agama, dan politik lebih bersifat vertikal atau komunal (apa yang disebut aliran) daripada horizontal seperti dalam masyarakat yang sadar-kelas. Dengan menyesuaikan diri dengan cara ini, maka pada dasarnya PKI menghalangi setiap usaha untuk membangkitkan kesadaran-kelas yang lebih besar yang akan mengabaikan kesetiaan komunal dan partai yang ada.

Strategi Aidit bersifat defensif, karena PKI secara luas tidak dipercaya oleh banyak pihak di kalangan elite politik dan militer. Tujuan utamanya ialah melindungi partai ini dari pihak-pihak yang mengharapkan kehancurannya, apa pun penyesuaian-penyesuaian teoritis atau aliansi-aliansi politik yang harus dilakukan untuk itu. Aidit sangat berhasil mempertahankan PKI selama hampir lima belas tahun, tetapi usaha ini membawa partai ini ke jalan yang aneh. Akhirnya, apa yang dipertaruhkan lebih merupakan masa depan PKI sebagai suatu organisasi daripada masa depan kelas buruh atau komunisme sebagai ideologi politik. Bagaimanapun juga, sebagian besar lawan-lawan PKI memandang partai ini dalam kerangka sikap ideologisnya yang eksklusif dan ancaman-ancaman yang mereka yakini ditimbulkan oleh komu-

nisme terhadap agama dan terhadap dominasi elite militer dan politik yang mapan. Sejujurnya, harus diakui bahwa kita tidak bisa mengetahui langkah-langkah apa yang mungkin diambil oleh PKI seandainya partai ini berhasil berkuasa.

Penting untuk dicatat bahwa para politisi sipil yang mendominasi Indonesia pada masa itu sebagian besar tetap berasal dari kelas priyayi bawah, kelompok yang telah mengambil kepemimpinan di dalam gerakan nasionalis. Mereka adalah kaum terpelajar dengan latar belakang aktivisme politik dan tugas pemerintahan. Hanya sedikit yang mempunyai usaha-usaha dagang atau kekayaan tanah. Politik adalah apa yang mereka ketahui dan merupakan satu-satunya sumber status dan penghasilan mereka yang penting. Ini hampir sama halnya dengan para pemimpin militer, yang menganggap bahwa kehidupan militer adalah semua yang mereka ketahui atau dapat menguntungkan mereka. Fakta-fakta ini menjelaskan banyak dari pertikaian tajam dalam politik yang berlangsung pada tahun 1950–7, karena akibat dari kegagalan di dalam politik tidak hanya kehilangan kekuasaan tetapi juga hilangnya penghasilan dan status. Beberapa politisi dan anggota tentara mulai memperoleh keuntungan-keuntungan dagang, tetapi baru setelah tahun 1957 keadaan itu mengalami perubahan yang penting (lihat bab 20).

Pada tahun 1950, para politisi Jakarta tentu saja membentuk suatu sistem parlementer seperti yang paling baik yang mereka ketahui: demokrasi multi partai dari negeri Belanda. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen satu majelis (Dewan Perwakilan Rakyat) yang jumlah anggotanya 232 orang yang mencerminkan apa yang dianggap sebagai kekuatan-kekuatan partai. Masyumi mendapat 49 kursi (21%), PNI 36 kursi (16%), PSI 17 kursi (7,3%), PKI 13 kursi (5,6%), Partai Katholik 9 kursi (3,9%), Partai Kristen 5 kursi (2,2%), dan Murba 4 kursi (1,7%), sedangkan lebih dari 42 persen kursi dibagi di antara partai-partai atau perorangan-perorangan lainnya, yang tak satu pun dari mereka ini mendapat lebih dari 17 kursi. Ini merupakan suatu struktur yang tidak menopang pemerintahan yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan. Sukarno selaku presiden tidak memiliki kekuasaan riil kecuali menunjuk para formatur untuk membentuk kabinet-kabinet baru, suatu tugas yang sering kali melibatkan negosiasi-negosiasi yang rumit.

Kabinet pertama (September 1950–Maret 1951) dibentuk oleh Natsir dan berintikan Masyumi dengan dukungan PSI setelah usaha membentuk koalisi Masyumi–PNI gagal. Kebijakan luar negeri Natsir adalah bebas dan netral namun tetap bersimpati kepada negara-negara Barat. Pada bulan September 1950, Indonesia diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintahan Natsir menghadapi keadaan ekonomi yang paling menguntungkan selama masa demokrasi konstitusional, karena kenaikan harga komoditi sebagai akibat Perang Korea meningkatkan pendapatan ekspor dan bea ekspor pemerintah sampai pertengahan tahun 1951. Ketika para politisi yang berkuasa di Jakarta mulai berebut keuntungan ekonomi, maka Menteri Keuangan dari Masyumi, Sjafruddin Prawiranegara (1911-89), dikecam karena menolak menggunakan pendapatan-pendapatan tersebut untuk memberikan keuntungan kepada mereka.

Kebijakan-kebijakan Sjafruddin sejalan dengan konsentrasi kabinet Natsir pada kebutuhan-kebutuhan pembangunan kembali perekonomian dan pemulihan keamanan. Pemberontakan Ambon berakhir pada bulan November 1950, tetapi tidak tercapai kemajuan sedikit pun dalam perundingan dengan Kartosuwirjo di Jawa Barat. Pada awal tahun 1951, akhirnya tercapai penyelesaian bagi serdadu-serdadu kolonial asal Ambon yang menolak untuk didemobilisasikan di Indonesia. Mereka bersama keluarganya yang berjumlah sekitar 12.300 orang diangkut ke negeri Belanda, di mana mereka menghadapi masalah-masalah integrasi yang baru. Akan tetapi, perundingan-perundingan dengan Belanda mengenai kedaulatan atas Papua tidak menghasilkan kemajuan. Harapan pemerintah untuk merampingkan birokrasi juga tidak berhasil. Bagaimanapun juga, kabinet berhasil membangkitkan tanda-tanda oposisi yang pertama terhadap sistem politik yang baru terbentuk itu. Sesuai dengan konstitusi, Natsir bersikeras agar Sukarno membatasi dirinya dalam peran presiden sebagai lambang saja. Sukarno tidak begitu senang dengan peranan semacam itu dan merasa dirinya semakin cocok dengan pandangan PNI dan kelompok radikal bahwa merebut kedaulatan atas Papua tidak boleh diberi prioritas yang rendah hanya karena adanya kebutuhan akan pembangunan ekonomi. Kabinet Natsir meletakkan jabatan setelah berkuasa selama kurang lebih tujuh bulan tanpa mencapai banyak hal penting dan tanpa membangun suatu basis pendukung di dalam maupun di luar parlemen.

Perdana Menteri berikutnya (April 1951–Februari 1952) adalah Sukiman Wirjosandjojo, yang berhasil membentuk koalisi Masyumi–PNI yang oleh banyak orang dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang wajar. Sukarno lebih senang dengan susunan itu, paling tidak karena kabinet memberinya anggaran belanja yang lebih besar dan juga kebebasan yang lebih besar untuk berpidato. Tak seorang pun pengikut Natsir di dalam Masyumi atau pimpinan PSI masuk di dalamnya; dengan demikian, kelompok-kelompok yang sangat bersimpati kepada pimpinan tentara pusat ditempatkan di luar kabinet. Tidak masuknya Hamengkubuwana IX dalam kabinet untuk pertama kalinya sejak tahun 1946 telah melemahkan hubungan tentara–kabinet.

Segera terjadi konflik dengan pihak tentara. Tokoh radikal yang bukan anggota sebuah partai, Muhammad Yamin, menjadi menteri kehakiman di dalam kabinet baru tersebut. Pada saat itu terdapat sekitar 17.000 orang tahanan, kebanyakan belum dituntut, yang telah ditahan oleh tentara sejak tahun 1949 karena terlibat dalam kelompok-kelompok pemberontak atau penjahat. Pada awal bulan Juni, Yamin membebaskan 950 orang tahanan, termasuk beberapa kaum kiri terkemuka. Pihak tentara segera menangkap mereka kembali kecuali yang berhasil menyembunyikan diri. Yamin meletakkan jabatan dan, dengan demikian, pergulatan awal antara pemerintah sipil dan pihak militer dimenangkan oleh pihak militer.

Kabinet Sukiman menjadi paling terkenal dengan dilakukannya satu-satunya usaha yang serius pada masa itu untuk menumpas PKI. Kaum komunis menjadi marah dengan bersedianya PNI berkoalisi dengan Masyumi, karena strategi mereka tergantung pada masih terus bertikainya kedua partai itu satu sama lain. Pada bulan Juni–Agustus 1951, serangkaian pemogokan terjadi, sebuah granat tangan dilemparkan kepada suatu kerumunan massa di Bogor, dan suatu gerombolan bersenjata yang berlencana palu-dan-arit menyerang sebuah pos polisi. Pemerintah memutuskan bahwa PKI-lah yang bersalah, suatu tuduhan yang diingkari oleh Aidit tetapi sia-sia. Tanpa berkonsultasi dengan pihak tentara, pemerintah memerintahkan penangkapan besar-besaran. Pada tanggal 11 Agustus, para pemimpin PKI di Medan ditangkap. Beberapa hari kemudian menyusul suatu gelombang penangkapan besar-besaran di Jakarta, termasuk enam belas orang anggota parlemen (antara lain ayah Aidit yang

menjadi anggota sebuah partai kecil). Tidak jelas berapa banyak orang yang ditangkap pada waktu itu, tetapi pada akhir bulan Oktober, pemerintah menyebut angka 15.000. Tak seorang pun pernah diajukan ke pengadilan dan semuanya dibebaskan oleh kabinet berikutnya, kabinet Wilopo. Aidit, Lukman, dan Nyoto menyembunyikan diri dan mempertimbangkan kembali strategi mereka.

Dari peristiwa itu, para pemimpin PKI menyimpulkan bahwa para politisi Jakarta tidak akan membiarkan mereka memainkan politik atas dasar yang sama dengan partai-partai lainnya. Oleh karena itu, mereka memilih suatu strategi jangka panjang untuk membentuk suatu basis massa yang bebas yang begitu besarnya sehingga partai tersebut tidak dapat diabaikan ataupun dilumpuhkan oleh penangkapan terhadap para pemimpinnya, sementara pada waktu yang sama bekerja paling tidak untuk menetralkan kekuatan-kekuatan nonkomunis. Dengan demikian, kebijakan "front persatuan nasional" diambil dan slogan-slogan nasionalis lebih diutamakan daripada tuntutan-tuntutan kelas. Kini mulai dilakukan suatu kampanye untuk memperoleh anggota, terutama di Jawa. Pada akhir tahun 1952, dinyatakan bahwa jumlah anggota partai tersebut meningkat dari 100.000 orang (pada bulan Mei) menjadi 126.671 orang; pada bulan Maret 1954, jumlah itu mencapai 165.206 orang.

Karena merasa tidak pasti terhadap PNI sebagai sekutu, maka PKI juga mulai mencari dukungan Sukarno. Meskipun segala kebencian pribadi mereka terhadap Presiden, mulai saat itu para pemimpin PKI tidak lagi menyebutnya sebagai kolaborator Jepang atau fasis, dan tidak lagi menyalahkannya karena memancing meletusnya Peristiwa Madiun; rasionalisasi mereka kini melemparkan semua kesalahan dari episode itu kepada Hatta, Sukiman, dan Natsir (kesemuanya anggota kabinet pada saat itu). Untuk menenangkan sekutu-sekutu yang potensial, partai tersebut mengambil peran yang kurang militan dengan memberi tahu SOBSI pada bulan Maret 1952 bahwa melakukan pemogokan untuk menuntut upah yang lebih tinggi adalah "sektarianisme" yang mengancam strategi front persatuan nasional. Seperti yang akan kita lihat di bawah nanti, perkembangan PKI sesudah itu sangat menakjubkan, tetapi sebagian besar perkembangan ini pastilah karena partai itu meninggalkan sifat militannya demi kelangsungan hidupnya.

Sementara itu, masalah-masalah keamanan muncul kembali setelah tercapai banyak keberhasilan di beberapa daerah pada tahun 1950–1. Di Sulawesi Selatan diselenggarakan perundingan-perundingan yang sulit mengenai pengurangan jumlah dan penggabungan satuan-satuan tentara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Muzakkar (1921–65), seorang komandan Republik yang terkemuka dalam Revolusi. Pada bulan Juli 1950, Kahar bergabung dengan sekitar 20.000 orang prajurit yang menolak untuk didemobilisasikan. Setelah perundingan-perundingan selanjutnya gagal, pada bulan Agustus 1951 dia lari ke wilayah pegunungan dan melancarkan pemberontakan secara terbuka. Pada bulan Januari 1952, Kahar menghubungi Kartosuwirjo dan secara resmi menjadikan pemberontakannya sebagai bagian dari gerakan Darul Islam yang masih tetap belum mereda di Jawa Barat. Kegagalan kabinet Sukiman dalam menangani masalah Kahar sangat melemahkan kekuasaannya.

Akhirnya, kabinet Sukiman jatuh karena terjadinya suatu krisis kebijakan luar negeri. Kabinet itu telah menganut garis pro-Barat secara lebih aktif, dan pada bulan Januari 1952 menteri luar negeri dari Masyumi secara diam-diam menandatangani suatu persetujuan bantuan dengan Amerika Serikat yang mengikat Indonesia pada pertahanan "dunia bebas". Segera sesudah komitmen ini diketahui timbullah suatu kegemparan politik. Pada bulan Februari, menteri luar negeri, dan kemudian disusul seluruh anggota kabinet, meletakkan jabatan. Kabinet berikutnya menghapus persetujuan dengan Amerika itu dan berusaha memperoleh bantuan dengan syarat-syarat yang kurang mengikat. Orang sudah mulai bertanya-tanya apakah jenis politik yang terlihat di Jakarta itu memang merupakan tujuan dari Revolusi yang telah diperjuangkan.

Koalisi PNI–Masyumi terjadi lagi, kali ini Wilopo (l. 1909) dari PNI yang menjadi perdana menteri (April 1952–Juni 1953). Akan tetapi, kedua partai itu sejak permulaannya memang tidak bersemangat untuk bekerja sama. Kini berlangsung penyusunan kembali kekuatan-kekuatan politik secara besar-besaran. PNI semakin mencurigai motivasi-motivasi keagamaan dari beberapa pemimpin Masyumi dan mencari sekutu untuk membantunya menunda pemilihan umum, karena merasa takut bahwa Masyumi mungkin akan meraih kemenangan yang sangat besar. PKI, dengan

strategi front persatuan nasionalnya, bersedia menawarkan bantuan kepada PNI dan tidak mencela kabinet yang ada seperti yang mereka lakukan terhadap kabinet sebelumnya. Semua orang yang ditangkap dalam operasi pembersihan antikomunis pada tahun 1951 kini dibebaskan. PKI maupun PNI merupakan partai-partai yang dukungan utamanya berasal dari kalangan orang Jawa abangan; aliansi kedua partai itu mungkin merupakan aliansi yang wajar, walaupun juga mengandung benih-benih persaingan.

Hatta dan Sjahrir, yang pada tahun 1931 telah dikeluarkan dari Perhimpunan Indonesia oleh kaum komunis, menganggap PKI sebagai ancaman yang muncul kembali. Oleh karena itu, para pengikut dan pengagum mereka dalam Masyumi dan PSI menjadi semakin benar-benar anti-PKI dan kedua partai itu semakin erat hubungannya. Partai-partai tersebut dipersatukan pula oleh persamaan keduanya yang memiliki kaum intelektual Sumatera yang berpendidikan Belanda sebagai pemimpin-pemimpin nasional.

Sementara itu, terjadi perpecahan antara kaum muslim tradisional dan modernis di dalam Masyumi. Ada banyak alasan mengenai terjadinya perpecahan tersebut, termasuk perbedaan-perbedaan doktrin yang mendasar, tetapi kejadian yang sekarang adalah perselisihan mengenai jabatan menteri agama. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1949, jabatan ini diberikan kepada pihak modernis dan bukannya kepada Wachid Hasjim. Antara bulan April dan Agustus 1952, Nahdatul Ulama menarik diri dari Masyumi dan berubah menjadi partai politik tersendiri yang dipimpin oleh Wachid Hasjim hingga saat meninggalnya pada tahun 1953. Perpecahan itu meninggalkan kepahitan yang dalam. Segera terlihat jelas bahwa NU, yang basisnya terutama di Jawa Tengah dan khususnya di Jawa Timur, merasa lebih mudah untuk bekerja sama dengan partai-partai lain yang mempunyai basis di Jawa, yaitu PNI dan PKI, daripada dengan Masyumi. Di pihak lainnya, PNI dan PKI merasa senang dapat berhubungan dengan suatu partai Islam tanpa harus berhubungan dengan Masyumi. Kini mulai timbul perpecahan politik antara partai-partai yang mempunyai basis di Jawa dan yang mempunyai basis di luar Jawa.

Keadaan ekonomi kini memburuk dengan berakhirnya Perang Korea. Antara bulan Februari 1951 dan September 1952, harga

karet, ekspor nasional yang terpenting, turun 71%. Penghasilan pemerintah tentu saja merosot. Dalam upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan yang tidak menguntungkan serta keluarnya cadangan emas dan devisa, maka pemerintah mengenakan bea tambahan sebesar 100 sampai 200 persen terhadap impor barang mewah dan mengurangi pengeluaran. Langkah-langkah tersebut memperbaiki dampak-dampak yang paling buruk dari krisis ekonomi, tetapi menimbulkan akibat-akibat yang paling buruk terhadap para pendukung utama PNI. Masyumi mendukung kebijakan-kebijakan itu, sehingga meningkatkan ketegangan PNI–Masyumi. Kabinet juga berencana untuk memperkecil jumlah birokrasi dan militer. PNI merasa tidak senang terhadap setiap usaha untuk mengurangi birokrasi, sedangkan pengurangan-pengurangan yang direncanakan di kalangan militer menimbulkan konflik yang gawat di dalam tubuh tentara.

Sultan Hamengkubuwana IX menjadi menteri pertahanan lagi dalam kabinet Wilopo. Kerja sama yang erat dengan kelompok-kelompok profesional dalam pimpinan pusat tentara pun pulih lagi. Walaupun Sultan, Nasution, Simatupang, dan sebagian besar pendukung terdekat mereka di Jakarta adalah orang-orang nonpartai, namun mereka mempunyai hubungan informal yang kuat dengan Sjahrir dan PSI. Akan tetapi, Nasution sendiri terutama lebih terikat pada tentara daripada kelompok sipil mana pun. Tokoh-tokoh ini kini memulai dengan suatu rencana sentralisasi dan demobilisasi untuk mengurangi jumlah anggota tentara dari 200.000 menjadi 100.000 orang. Usulan-usulan ini mengadu domba kelompok pusat dengan para panglima tentara daerah yang kebanyakan bersimpati kepada PNI dan Sukarno. Kritik terhadap rencana tersebut menyatakan bahwa PSI bermaksud mengurangi jumlah tentara sampai menjadi suatu organisasi yang hanya setia kepadanya dan kemudian menggunakannya untuk melancarkan suatu kudeta. Kudeta-kudeta militer terjadi di Muangthai pada bulan November 1951 dan di Mesir pada bulan Juli 1952; sebagian orang Indonesia bertanya-tanya apakah negara mereka giliran berikutnya.

Para panglima daerah berusaha menentang rencana itu. Mereka didukung oleh sekutu-sekutu politik mereka di Jakarta. Di dalam DPR muncul tuntutan agar kepemimpinan tentara pusat dibubarkan dan kementerian pertahanan direorganisasikan.

Menghadapi tantangan ini, maka kelompok tentara pusat mengadakan unjuk kekuatan namun secara fatal salah menghitung kekuatan di sekitar mereka. Pada tanggal 17 Oktober 1952, mereka membawa tank-tank serta artileri militer dan banyak demonstran sipil, yang akhirnya konon berjumlah sekitar 30.000 orang, menuju istana presiden untuk menuntut dibubarkannya DPR. Sukarno sendiri tidak begitu menghargai rencana demobilisasi yang akan memberhentikan banyak pemimpin revolusi yang ia hormati. Dan, walaupun dia, seperti halnya Nasution, tidak senang pada gaya politik DPR, namun dia tidak ingin ditunggangi oleh pimpinan tinggi tentara. Dia berbicara kepada massa yang berkerumun, dan mereka kemudian bubar atas perintahnya; sekali lagi Sukarno menganggap dirinya, dan yang lain-lainnya harus memandang dirinya, sebagai orang yang dapat berbicara secara langsung kepada rakyat. Kemudian dia menerima suatu delegasi tentara dan secara samar-samar berjanji bahwa kepentingan mereka akan dipenuhi. Mereka pun, seperti halnya kerumunan massa, bubar atas perintah Sukarno.

Unjuk kekuatan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Sukarno berbicara di radio untuk menghimbau supaya rakyat tenang dan menjelaskan bahwa upaya-upaya untuk memaksa presiden tidak dapat diterima. Kini para pendukung tentara pusat segera dipecat. Selama bulan Oktober dan November, para panglima yang baru saja dilantik oleh pimpinan pusat untuk memimpin pasukan-pasukan daerah digulingkan oleh para panglima sebelumnya. Pada bulan Desember 1952, Nasution diskors dan selama tiga tahun dia tetap berada dalam daftar nonaktif. Selama masa itu, dia menjadi lebih matang (dia berusia 33 tahun pada waktu "Peristiwa 17 Oktober", demikian kejadian itu kemudian dinamakan, sedangkan Sukarno berumur 51 tahun) dan mempertimbangkan kembali taktik-taktiknya, lalu menyimpulkan bahwa lebih baik menghadapai Sukarno sebagai sekutu daripada sebagai lawan. Pada bulan Januari 1953, Hamengkubuwana IX mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan. Pada bulan Maret, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan diganti. Pada bulan November, Simatupang dipecat ketika jabatannya sebagai kepala staf angkatan bersenjata dihapuskan. Tak seorang pun dari mereka itu dituduh telah berusaha melancarkan kudeta, tetapi kekuasaan pimpinan tentara pusat telah dipatahkan.

Tentara kini dibiarkan berada dalam keadaan sangat terdesentralisasikan dan bahkan lebih terbuka bagi campur tangan sipil. Kekuatan rundingnya di Jakarta telah hancur, dengan akibat bahwa penganggaran pemerintah untuk militer turun dan para panglima daerah mulai mencari sumber-sumber dana yang lebih tidak lazim. Bahkan akhirnya mereka pun terpaksa mengakui bahwa ada manfaat dalam suatu pimpinan pusat yang kuat. Dengan timbulnya konflik antarkelompok di dalam tubuh tentara, maka kegiatannya dalam menghadapi kaum pemberontak dan penjahat menurun. Kabinet Wilopo kehilangan kepercayaan akibat kegagalan rencana demobilisasinya. Sukarno berbesar hati karena keberhasilannya dalam peristiwa tersebut dan mulai memainkan peranan umum yang lebih tegas sebagai pengritik para politisi.

Pembubaran DPR telah menjadi isu dalam Peristiwa 17 Oktober; tidak begitu mudah lagi bagi kaum politisi untuk menunda pemilihan umum untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pada bulan April 1953, undang-undang pemilihan umum akhirnya disahkan. Waktu pelaksanaan pemilihan anggota DPR kemudian ditetapkan pada bulan September 1955 dan pemilihan anggota Majelis Konstituante, yang akan merancang suatu undang-undang dasar, ditetapkan berlangsung pada bulan Desember 1955. Untuk pertama kalinya, para politisi Jakarta kini mulai bekerja membangun dukungan massa yang akan memberikan suara. Dalam usaha mencari dukungan rakyat itu, mereka menggunakan banyak daya tarik ideologis yang meningkatkan ketegangan-ketegangan masyarakat di desa-desa. Para aktivis partai Islam di tingkat bawah menghendaki sebuah negara yang didasarkan pada hukum Islam. Partai-partai "sekuler", terutama sekali PNI dan PKI, berusaha mengait-kaitkan Masyumi dengan Darul Islam dan mengubah Pancasila lebih sebagai slogan anti-Islam daripada falsafah pangayoman seperti yang dikehendaki Sukarno. Selama lebih dari dua tahun, kekacauan politik dan kekerasan meningkat, dan diharapkan oleh banyak orang bahwa pemilihan-pemilihan tersebut akan menghasilkan suatu struktur politik yang kokoh untuk masa mendatang.

Koalisi PNI–Masyumi tidak pernah berjalan mesra dan pada bulan-bulan awal 1953, hakikat yang masih tersisa dari persekutuan ini tinggal sedikit. Pada bulan Maret, pihak kepolisian membunuh lima orang petani di dekat Medan ketika memindahkan para penghuni liar dari tanah-tanah perkebunan milik

orang-orang asing. PKI bergerak aktif di kalangan para penghuni liar tersebut dan sekarang bersekutu dengan PNI di dalam DPR guna menuntut agar kabinet mengundurkan diri. Sebelum suatu mosi tidak percaya diterima dalam DPR, kabinet mengembalikan mandatnya kepada Sukarno.

Setelah terjadi perundingan selama lebih dari enam minggu dan lima kali upaya membentuk berbagai gabungan partai, sebuah kabinet PNI yang didukung oleh NU dan partai-partai kecil dibentuk oleh Ali Sastroamidjojo (Juli 1953–Juli 1955). Masyumi dan PSI tidak dimasukkan ke dalam kabinet, sedangkan dua orang tokoh simpatisan kepada PKI dimasukkan. Yamin kembali menjadi menteri pendidikan; dia dan beberapa orang lainnya, termasuk Ali, dianggap sebagai orang-orang sayap kiri. Akan tetapi, sebenarnya hanya terjadi sedikit perubahan dalam kebijakan pemerintah. Sesungguhnya, kebijakan menjadi semakin kurang penting bagi pemerintah-pemerintah yang berkuasa karena perhatian lebih banyak ditujukan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan serta membagi hasil-hasilnya. Kabinet Ali memperluas birokrasi dengan lebih banyak pendukung PNI, sebagian karena penguasaan atas birokrasi diduga akan memiliki arti yang sangat penting dalam pemilihan yang akan datang. Kabinet juga menekankan indonesianisasi perekonomian dan memberi dorongan kepada para pengusaha pribumi. Akan tetapi, kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan baru hanya merupakan kedok-kedok palsu bagi persetujuan-persetujuan antara para pendukung pemerintah dan orang-orang Cina—apa yang disebut perusahaan-perusahaan "Ali-Baba", di mana seorang Indonesia ("Ali") mewakili seorang pengusaha Cina ("Baba") yang sebetulnya merupakan pemilik perusahaan tersebut. Peristiwa-peristiwa korupsi dan skandal-skandal yang melibatkan tokoh-tokoh PNI menjadi semakin biasa.

Setelah harga relatif stabil pada tahun 1952–3, inflasi melonjak lagi. Selama masa kabinet Ali, persediaan uang meningkat 75% dan nilai tukar rupiah pada pasar bebas turun dari 44,7% dari nilai resmi menjadi 24,6%. Para eksportir, di antaranya banyak pendukung Masyumi di luar Jawa, terkena dampak yang sangat buruk. Penyelundupan meningkat. Satuan-satuan tentara yang miskin ikut serta dalam penyelundupan tersebut. Sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh PNI, maka PKI

meredam kecamannya terhadap korupsi dan masalah-masalah ekonomi. Pada bulan Mei 1955, anggota-anggota SOBSI bahkan membantu mengakhiri pemogokan yang dilancarkan oleh sebuah serikat buruh PSI. Perekonomian, sistem politik, dan negara pada umumnya mulai pecah-belah pada waktu para politisi Jakarta hanya bermuslihat untuk keuntungan mereka.

Kaum muslim militan Aceh telah cukup melihat politisi Jakarta yang hidup menyenangkan, tidak religius, dan tidak cakap. Pada tahun 1949, Aceh telah dijadikan suatu propinsi Republik yang otonom, tetapi pada tahun 1950 propinsi ini digabungkan dengan propinsi Sumatera Utara. Anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) meliputi baik guru dan ulama modernis maupun kaum muslim awam yang taat *(zuama)*. Kelompok pertama tidak puas dengan rangkaian perkembangan nasional terutama atas dasar agama, sementara kelompok *zuama* prihatin khususnya dengan hilangnya otonomi propinsi Aceh. Gabungan kekecewaan ini membentuk dasar yang potensial bagi perlawanan terhadap Jakarta. Pada tahun 1950, Daud Beureu'eh, orang kuat Aceh dan benteng Republik dalam Revolusi, menolak untuk menerima suatu pekerjaan di Jakarta dan tetap bermukim di Aceh sambil memerhatikan perkembangan. Selama tokoh-tokoh Masyumi memegang kedudukan yang penting di dalam kabinet, dia tidak melakukan tindakan apa pun. Akan tetapi, pada bulan Mei 1953 ditemukan bukti bahwa dia telah menjalin hubungan dengan Kartosuwirjo dari Darul Islam. Ketika kabinet Ali terbentuk, Daud menjadi curiga; tersebar desas-desus bahwa kabinet bermaksud menangkapi orang-orang terkemuka Aceh.

Pada tanggal 19 September 1953, Daud dan para pengikutnya dalam PUSA secara terang-terangan memberontak terhadap Jakarta dengan dukungan banyak orang Aceh yang menjadi pegawai pemerintah dan tentara. Daud mengumumkan bahwa di Aceh, yang kini merupakan bagian dari Darul Islam, tidak ada lagi pemerintahan Pancasila. Pemerintah Ali mengirimkan pasukan-pasukan untuk menghalau kaum pemberontak dari kota-kota yang penting. PKI mendukung kebijakan kabinet dan mengutuk pemberontakan Aceh sebagai bersifat kolonial, militeristis, feodal, dan fasis, kebanyakan julukan yang dianggap pihak Aceh lebih tepat diterapkan untuk Jakarta. Daud mundur ke bukit-bukit dan menyusullah suatu jalan buntu militer yang

berlanjut sampai tahun 1959. Di Jawa Barat, aktivitas Darul Islam juga meningkat selama kabinet Ali. Darul Islam, yang kini meliputi wilayah-wilayah pedalaman Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, telah menjadi tantangan yang bahkan semakin besar bagi pemerintah dan penguras utama dana-dananya.

Pada tahun 1955, perhatian rakyat untuk sementara dialihkan dari masalah-masalah dalam negeri oleh sebuah peristiwa diplomatik yang besar, Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Ali menginginkan Indonesia menjadi pemimpin aktif dari blok negara-negara Afro-Asia, suatu tujuan yang didukung dengan hangat oleh Sukarno. Pada bulan April–Mei 1954, pertemuan antara para Perdana Menteri India, Pakistan, Sri Lanka, Burma, dan Indonesia—yang disebut 'Kekuatan Colombo'—diselenggarakan di Colombo. Di sana Ali mengusulkan suatu konferensi besar negara-negara Afro-Asia; yang lain segera mendukung gagasan tersebut. Suatu konferensi pun dijadwalkan akan diadakan pada bulan April 1955. Sebelum saat itu, terjadi perkembangan-perkembangan diplomatik penting lainnya.

Republik Rakyat Cina kini melupakan permusuhannya dengan negara-negara Asia yang nonkomunis dan netral. Indonesia mengirimkan duta besarnya yang pertama ke Cina pada bulan Mei 1953. Pada bulan Desember, pemerintah Ali menandatangani persetujuan perdagangan Cina–Indonesia yang pertama. Hubungan kedua negara itu semakin lama semakin akrab dan mencapai puncaknya pada konferensi Bandung, di mana suatu perjanjian kewarganegaraan ganda ditandatangani. Cina secara tradisional menyatakan bahwa semua orang Cina perantauan adalah warga negara Cina, sehingga memberi komunitas ini status kewarganegaraan ganda di Indonesia yang tidak jelas. Persetujuan kewarganegaraan ganda tahun 1955 tersebut mengharuskan orang-orang Cina Indonesia untuk memilih kewarganegaraan Cina atau Indonesia, tetapi dengan persyaratan yang menyulitkan mereka untuk memilih kewarganegaraan Indonesia.

Sementara itu, upaya-upaya diplomatik untuk mendapatkan Papua mengalami kemacetan lagi. Perundingan-perundingan dengan Belanda menghasilkan suatu protokol pada bulan Agustus 1954 yang mengusulkan penghapusan Uni Belanda–Indonesia (sesuatu yang kecil artinya) dan beberapa perubahan kecil terhadap persetujuan-persetujuan Meja Bundar, tetapi tidak

tercapai sedikit pun kemajuan mengenai masalah Papua. Indonesia gagal dalam usahanya supaya suatu mosi yang lunak mengenai Papua diterima oleh PBB pada bulan yang sama. Di dalam parlemen Indonesia, Masyumi memanfaatkan kegagalan-kegagalan tersebut untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah menyangkut Papua pada bulan Desember. Mosi itu gagal, tetapi hal itu mengungkapkan bahwa pihak oposisi dapat mengumpulkan begitu banyak suara sehingga hanya kerja sama PKI di dalam DPR yang dapat menjamin kelangsungan hidup pemerintah.

Pada bulan April 1955, konferensi Bandung diselenggarakan dan menunjukkan kejayaan pemerintahan Ali. Dalam konferensi itu, hadir 29 negara. Di antara negara-negara besar Afrika dan Asia, hanya Korea Utara, Korea Selatan, Israel, Afrika Selatan, dan Mongolia Luar yang tidak diundang. Banyak pemimpin penting Asia hadir, termasuk Zhou Enlai (Chou En-lai), Nehru, Sihanouk, Pham Van Dong, U Nu, Mohammad Ali, dan Nasser. Sukarno dan Ali Sastroamidjojo merasa puas dan memperoleh prestise di dalam negeri karena dipandang sebagai pemimpin-pemimpin dunia Afro-Asia, dan komunike akhir konferensi tersebut mendukung tuntutan Indonesia atas Papua. Jelas ada kemungkinan bagi Indonesia untuk memainkan peranan penting di dunia, dan Sukarno mulai menjadikan peran semacam itu sebagai tanggung jawab pribadinya.

Segera sesudah konferensi Bandung berakhir, para politisi mengerahkan tenaga mereka terhadap pemilihan umum yang akan datang. Akan tetapi, kekuatan-kekuatan yang akhirnya akan menghancurkan keseluruhan sistem parlementer sudah mulai terbentuk. Perkembangan PKI selama kabinet Ali, ketika partai ini bebas dari penindasan, sangat menakjubkan. Antara bulan Maret dan Nopember 1954 diklaim bahwa jumlah anggota partai ini meningkat tiga kali lipat dari 165.206 menjadi 500.000, dan pada akhir tahun 1955 mencapai 1.000.000. PKI kini mulai melakukan usaha serius untuk menerima para petani sebagai anggota. Barisan Tani Indonesia (BTI), suatu organisasi PKI, menyatakan mempunyai 360.000 anggota pada bulan September 1953, tetapi jumlah tersebut mencapai lebih dari sembilan kali lipat (3,3 juta) pada akhir tahun 1955; hampir 90% anggotanya berada di Jawa, dan hampir 70% di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jumlah anggota Pemuda Rakyat, pengganti Pesindo dari

masa Revolusi, meningkat tiga kali lipat dari 202.605 pada bulan Juli 1954 menjadi 616.605 orang pada akhir tahun 1955; 80% anggotanya adalah para pemuda tani dan sebagian besar berada di Jawa. Oplah surat kabar PKI, *Harian Rakyat*, meningkat lebih dari tiga kali lipat antara bulan Februari 1954 (15.000 eksemplar) dan Januari 1956 (55.000 eksemplar); kini oplahnya adalah yang terbesar di antara surat-surat kabar mana pun yang berafiliasi pada partai. PKI juga merupakan partai yang paling kaya di antara partai-partai politik dengan penerimaan dari iuran anggota (akan tetapi pungutan iuran sering kali kurang teratur), dari gerakan-gerakan pemungutan dana, dan sumber-sumber lainnya. Sebagian besar uangnya mungkin berasal dari komunitas dagang Cina, yang memberikannya baik dengan senang hati ataupun karena tekanan dari kedutaan besar Cina.

Akan tetapi, ketika PKI meluas ke wilayah pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur, identitas kelas dan kemilitanan potensialnya benar-benar tenggelam. Banyak petani yang miskin bergabung karena PKI berjanji akan membela kepentingan mereka, tetapi banyak yang bergabung karena alasan-alasan lain. Tim-tim PKI memperbaiki jembatan, sekolah, rumah, bendungan, WC dan kamar mandi umum, saluran air, dan jalan; mereka membasmi hama dan mengadakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf, mengorganisasi kelompok-kelompok olah raga dan musik desa, dan memberikan bantuan kepada anggota pada saat-saat sulit. Sebagai suatu organisasi masyarakat, PKI mengungguli semua organisasi lainnya, dan karena partai ini tampak tidak menganut kekerasan dan lunak, para penduduk pedesaan berduyun-duyun menjadi anggotanya. Di desa-desa, partai ini sering kali dipimpin oleh guru-guru, kepala desa, para petani menengah dan kaya, dan beberapa tuan tanah, yang membawa bersama-sama mereka seluruh komunitas atau kelompok pengikut mereka ke dalam organisasi ini. Komunitas-komunitas tersebut hampir seluruhnya muslim nominal (abangan). Para santri pedesaan sebagian besar adalah pendukung-pendukung NU. Dengan demikian, perbedaan politik di tingkat desa ini mencerminkan perbedaan kemasyarakatan, dan perbedaan itu menjadi lebih tajam karena adanya usaha untuk mempolitisasikannya. Namun, selama kampanye pemilihan umum berlangsung, NU, PKI, dan PNI menahan diri untuk tidak saling melontarkan

kecaman satu sama lain di Jawa dan mengalihkan serangan bersama-sama mereka terhadap Masyumi. Sementara itu, kecaman-kecaman Masyumi yang keras dan tajam yang bersifat anti-komunis bahkan mungkin mendorong lebih banyak kaum abangan untuk bergabung ke kubu PKI.

Dengan perkembangan seperti itu, PKI memperoleh basis massa yang memungkinkan partai ini menekan kekuatan-kekuatan politik lainnya dan dalam waktu singkat membuat penampilan yang mengesankan dalam pemilihan umum. Akan tetapi, semua ini tidak mungkin benar-benar menjadi dasar bagi revolusi. Kepemimpinan Aidit harus mengadakan kursus-kursus umum pemberantasan buta huruf dan kursus-kursus pendidikan dasar sebelum partai ini dapat mengungkapkan gagasan-gagasan Marxis-Leninis kepada sebagian besar pengikutnya yang dengan cepat bertambah banyak itu. Strategi mencari jalan melalui parlemen secara damai untuk mencapai kekuasaan dengan cara membangun keanggotaan massa yang sangat besar sekarang ini begitu berhasil, sehingga akan sulit bagi PKI untuk memikirkan jalan yang lain.

Sementara itu, salah satu lawan utama PKI, yaitu tentara, sedang sibuk membereskan urusannya sendiri. Kelompok-kelompok di dalam tubuh tentara menyadari bahwa mereka harus menyelesaikan pertikaian-pertikaian mereka apabila mereka ingin menghadapi para politisi sipil dan PKI. Pada pertengahan tahun 1954, dua kelompok utama yang muncul dari peristiwa 17 Oktober mulai berdamai. Pada Februari 1955, sebuah konferensi yang diselenggarakan di Yogyakarta dan dihadiri oleh 270 orang perwira menyetujui suatu piagam persatuan dan sepakat untuk melupakan peristiwa tersebut. Akan tetapi, persatuan korps perwira yang baru itu sangat rapuh. Nasution tidak hadir, karena nonaktif, dan dia masih tetap mempunyai banyak lawan di kalangan tentara.

Kemudian pihak tentara menantang pemerintah perihal siapa yang akan diangkat sebagai kepala staf mereka. Para perwira tidak mau mengakui orang yang diangkat oleh kabinet pada tanggal 27 Juni 1955, dan partai-partai oposisi mendukung mereka. Persoalan tersebut belum terpecahkan sampai sesudah pemilihan umum. Saat timbulnya krisis politik baru ini, Sukarno memutuskan untuk berangkat (18 Juli) menunaikan ibadah haji

ke Mekah dan melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir. NU sudah sejak lama merasa tidak puas dengan kebijakan kabinet dalam bidang personel, ekonomi, dan keamanan, dan pada tanggal 20 Juli memutuskan bahwa pemerintah harus mengundurkan diri. Karena dukungan yang diperoleh di dalam DPR tidak mencukupi lagi, maka pemerintah Ali mengundurkan diri empat hari kemudian.

Setelah berlangsung perundingan yang rumit, Burhanuddin Harahap (l. 1917) dari Masyumi berhasil menyusun suatu kabinet yang didasarkan pada dukungan Masyumi bersama PSI dan NU (Agustus 1955–Maret 1956). Pihak tentara tidak puas sepenuhnya karena merasa bahwa banyak anggota kabinet baru tersebut sama korupnya dengan para pendahulu mereka. Akan tetapi, tentara memanfaatkan kesempatan untuk menangkap beberapa tokoh PNI atas tuduhan korupsi, termasuk juga menteri kehakiman dalam kabinet sebelumnya (yang diadili dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara pada bulan Januari 1956 tetapi diberi pengampunan oleh Sukarno pada bulan Juli). Saat pertikaian-pertikaian politik di Jakarta menjadi semakin sengit dan ketegangan di desa-desa semakin meningkat, pemilihan umum yang lama ditunggu-tunggu akhirnya terlaksana juga.

Jumlah orang yang hadir dalam pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota DPR, pada bulan September 1955 sangat banyak. Lebih dari 39 juta orang memberikan suara, mewakili 91,5% dari para pemilih yang terdaftar. Walaupun pasti banyak pemilih yang memberikan suara sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh para pemimpin keagamaan, para kepala desa, para pejabat, para tuan tanah, atau para atasan lainnya, bagaimanapun juga, ini adalah pemilihan umum nasional yang terpenting dalam lima puluh tahun pertama Indonesia merdeka. Pemilihan umum ini menawarkan pilihan yang paling bebas di kalangan partai-partai yang tak terbatas, yang kesemuanya berkampanye dengan penuh semangat; oleh karena itu, hasil-hasil pemilihan umum tersebut dapat menunjukkan kesetiaan-kesetiaan politik pada saat itu. Hasil-hasil yang paling penting diberikan di bawah ini.

Partai	*Suara yang sah*	*% Suara yang sah*	*Kursi parlemen*	*% Kursi parlemen*
PNI	8.434.653	22,3	57	22,2
Masyumi	7.903.886	20,9	57	22,2
NU	6.955.141	18,4	45	17,5
PKI	6.176.914	16,4	39	15,2
PSII	1.091.160	2,9	8	3,1
Parkindo	1.003.325	2,6	8	3,1
Partai Katholik	770.740	2,0	6	2,3
PSI	753.191	2,0	5	1,9
Murba	199.588	0,5	2	0,8
Lain-lain	4.496.701	12,0	30	11,7
Jumlah	37.785.299	100	257	100

Pemilihan umum tersebut menimbulkan beberapa kekecewaan dan kejutan. Jumlah partai bertambah banyak dan bukannya berkurang, dengan 28 partai mendapat kursi, padahal sebelumnya hanya 20 partai yang mendapat kursi. Akan tetapi, hanya empat partai yang mendapat lebih dari delapan kursi: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Di kalangan partai-partai "empat besar" ini hampir terjadi jalan buntu. Partai yang terbesar hanya menguasai 22% kursi DPR. Beberapa pemimpin Masyumi merasa bahwa kemajuan Islam menuju kekuasaan nasional kini terhalang dan bahwa perhatian mereka seharusnya dialihkan untuk mengintensifkan Islam di tingkat rakyat jelata. Akan tetapi, para pemimpin NU sangat gembira atas hasil yang menambah kursi DPR mereka dari 8 menjadi 45 kursi. Penampilan PKI sangat mengejutkan kalangan elite Jakarta dan membuat PNI semakin cemas akan ancaman potensial yang ditimbulkan oleh mitra mudanya itu.

Mungkin pola yang paling tidak menyenangkan ialah perbedaan partai yang jelas antara Jawa dan luar Jawa. Sejauh ini, Masyumi adalah partai terkuat di luar Jawa, dengan memenangi antara seperempat sampai setengah suara di seluruh wilayah selain Bali dan daerah-daerah Kristen, dan tiga perempat jumlah suara di Aceh; partai ini juga terbesar di Jawa Barat yang kuat Islamnya, walaupun di sana PNI tidak jauh tertinggal, sedangkan PKI maupun NU lemah. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, posisi PNI, NU, dan PKI kira-kira seimbang. Jika hanya memerhatikan

suara yang diberikan di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk "empat besar", PNI memenangi 32%, NU 30% (dan merupakan partai yang terbesar di daerah pusatnya di Jawa Timur), dan PKI 27%, sedangkan Masyumi hanya memenangi 12%. Pemilihan umum tersebut tidak memecahkan masalah-masalah politik, tetapi hanya membantu menarik garis-garis perjuangan secara lebih jelas.

Pemilihan umum itu tidak menghasilkan penyelesaian apa-apa dan, oleh karenanya, merupakan langkah lebih lanjut dalam mendiskreditkan keseluruhan sistem parlementer. Pemilihan anggota Majelis Konstituante dalam bulan Desember merupakan suatu antiklimaks dan menimbulkan hasil-hasil menyeluruh yang serupa. Majelis Konstituante tidak mengadakan sidang sampai bulan November 1956 dan, seperti yang akan terlihat dalam bab berikutnya, dibubarkan hampir tiga tahun kemudian tanpa melahirkan rancangan undang-undang dasar yang baru.

Kabinet Burhanuddin bertahan selama mungkin, melawan tekanan untuk melapangkan jalan bagi DPR yang terpilih dan suatu pemerintahan baru. Secepat mungkin kabinet Burhanuddin menempatkan para birokrat PNI pada kedudukan-kedudukan yang tanpa kekuasaan dan mengangkat para pendukung PSI dan Masyumi di tempat mereka. Kabinet juga mencapai penyelesaian dengan pihak tentara. Pada bulan Agustus 1955, kabinet menerima usulan pihak tentara untuk melupakan peristiwa 17 Oktober, sehingga para perwira yang diskors kemudian (di antaranya Nasution) dapat kembali bertugas secara aktif. Setelah berlangsung perundingan yang memakan waktu lama, Nasution tampil sebagai calon utama pihak tentara untuk memenangi jabatan kepala staf, dan kabinet mengangkatnya pada bulan Oktober. Nasution mulai menjalankan tugasnya pada bulan November 1955 dan dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal. Pemerintah juga memulai lagi perundingan-perundingannya dengan Belanda pada akhir tahun 1955, tetapi sia-sia. Pada bulan Februari 1956, pemerintah mengumumkan pembubaran Uni Belanda-Indonesia yang tidak berarti itu secara sepihak dan berjanji akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut mengenai persetujuan-persetujuan Meja Bundar. Akan tetapi, kabinet tidak dapat lagi bertahan setelah NU menarik dukungannya pada bulan Januari 1956 dan akhirnya menyerahkan mandatnya pada awal bulan Maret.

Ali Sastroamidjojo sekali lagi membentuk sebuah kabinet (Maret 1956–Maret 1957). Dia bertekad membentuk koalisi PNI–Masyumi–NU, sehingga dia tidak perlu tergantung pada PKI. Dia berhasil, tetapi akibatnya kabinet tersebut begitu terpecah-belah di dalamnya sehingga hampir tidak dapat berfungsi. Pada tanggal 26 Maret, DPR yang baru bersidang, parlemen pertama (dan terakhir sebelum pemilhan parlemen tahun 1999) dalam sejarah Indonesia yang dapat menyatakan dirinya sebagai cerminan pilihan bebas dari suara rakyat umum yang sudah dewasa yang berasal dari semua partai tanpa halangan. Parlemen ini bertahan selama empat tahun sebelum dibubarkan. Akan tetapi, baik DPR yang baru maupun pemerintah yang baru tidak menunjukkan banyak wewenang, dan pada waktu itu hanya sedikit rakyat Indonesia yang berpikir bahwa parlemen atau pemerintah akan berhasil. Dalam pidato pembukaannya di depan DPR, Sukarno mengutarakan harapannya akan suatu bentuk demokrasi yang benar-benar bersifat Indonesia, demokrasi yang lebih didasarkan atas mufakat daripada demokrasi secara Barat yang bersifat memecah-belah berdasarkan keputusan "50 persen tambah 1" dengan persaingan antara pemerintah dan pihak oposisi di dalam parlemen. Sukarno kini mulai menghendaki suatu "demokrasi terpimpin", suatu istilah yang telah lama dipakai oleh sahabat lamanya, Ki Hadjar Dewantara, untuk menggambarkan pemerintahan sekolah-sekolah Taman Siswanya.

Hubungan dengan negeri Belanda terus memburuk, terutama karena penolakan pihak Belanda untuk merundingkan penyerahan Papua kepada Indonesia. Pada tanggal 4 Agustus 1956, kabinet Ali secara sepihak menolak mengakui hutang negara sebesar 3.661 milyar gulden di bawah persetujuan Meja Bundar, 85% dari jumlah yang disepakati pada tahun 1949, atas dasar pemikiran bahwa hutang tersebut merupakan biaya perang Belanda untuk melawan Revolusi. Pengingkaran ini disambut hangat di Indonesia. Akan tetapi, hanya ada sedikit prestasi lain yang dicapai pemerintah ini. Pemerintah Ali merencanakan akan menyelenggarakan pemilihan anggota DPR-DPR Daerah pada tahun 1957, tetapi di luar itu sebagian besar perhatiannya ditujukan pada pemanfaatan kekuasaan demi keuntungan sendiri. Semakin banyak skandal yang menjadi rahasia umum.

Di dalam partai oposisi yang terbesar, PKI, kepemimpinan Aidit menyelesaikan dua masalah dalam tubuh partai itu pada tahun 1956 dan akhirnya tetap mengikuti jalan politik yang sama. Pada waktu Aidit sedang berkunjung ke Uni Soviet pada bulan Maret, kepemimpinannya mendapat tantangan dari Alimin, orang yang telah dua kali menyaksikan kehancuran PKI dan kini sudah berusia akhir enam puluhan. Dia mengedarkan suatu pernyataan bahwa para pengurus dalam kepemimpinan Aidit adalah lunak, oportunis, dan menyimpang dari garis politik komunisme yang benar dan membawa PKI menjadi suatu partai borjuis biasa dengan mematikan rasa kesadaran kelas. Apa yang dikatakannya itu sebagian besar memang betul, tetapi sangatlah sulit melihat bagaimana PKI dapat tetap hidup dengan cara yang lain. Alimin tidak mendapat dukungan. Ia terpaksa menarik kembali kata-katanya dan mengundurkan diri ke kehidupan masa tua yang sepi dan pahit. Dia meninggal pada tahun 1964 sebelum menyaksikan kehancuran PKI yang ketiga dan paling berdarah.

Pembatalan Uni Belanda–Indonesia secara sepihak pada bulan Februari 1956 dan pengingkaran persetujuan hutang dari hasil persetujuan Meja Bundar pada bulan Agustus mengakibatkan hilangnya bukti utama yang dipegang PKI bahwa Indonesia berstatus semikolonial. Aidit mengubah caranya sedikit dan kini memberi tekanan pada masalah tetap dikuasainya Papua oleh Belanda (yang merupakan persoalan umum yang semakin penting) dan adanya kaum reaksioner di dalam negeri (terutama dituduhkan kepada Masyumi) yang secara sembunyi-sembunyi berkomplot dengan kaum imperialis asing untuk membatasi kemerdekaan bangsa. Semakin lama semakin sama masalah-masalah dan lawan-lawan PKI dengan masalah-masalah dan lawan-lawan Sukarno.

Struktur sosial dan politik negara kini mulai hancur. Para politisi Jakarta yang telah menunjukkan betapa mudahnya norma hukum diabaikan mau tidak mau harus gigit jari ketika menyaksikan orang-orang lain mengikuti contoh yang mereka berikan dengan lebih kasar. Kesulitan ekonomi cenderung ditimpakan kepada orang Cina, dan segera gerombolan-gerombolan massa menyerang kelompok ini, khususnya di daerah-daerah luar Jawa dan wilayah-wilayah Jawa yang Islamnya lebih kuat. Sentimen-sentimen kesukuan dan kedaerahan menjadi semakin jelas, yang

didorong oleh perbedaan-perbedaan daerah yang terungkap di dalam pemilihan umum tahun 1955. Suku Sunda di Jawa Barat menyatakan kejengkelan mereka terhadap suku Jawa, yang dikarenakan jumlahnya mendominasi banyak aspek kehidupan nasional. Suku-suku dari luar Jawa juga merasa tidak puas dengan banyaknya orang Jawa yang diangkat menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Di Sumatera Timur, terutama orang-orang Batak Toba menjadi sasaran permusuhan dan beberapa orang meninggal dalam keributan-keributan massa. Pada umumnya, di daerah-daerah luar Jawa, kekecewaan terhadap uang rupiah yang diberi nilai terlalu tinggi dan terhadap kelalaian umum Jakarta mencapai puncaknya.

Pada saat itu, kepentingan-kepentingan daerah berkaitan erat dengan urusan-urusan pihak tentara. Pada tahun-tahun sejak 1952, banyak panglima daerah menjalin hubungan yang tidak resmi dengan instansi-instansi sipil daerah luar Jawa sebagai cara untuk membiayai satuan-satuan mereka dan penghasilan pribadi mereka. Keadaan tersebut tidak begitu disenangi oleh Nasution dan para pendukungnya, yang menginginkan tentara yang dikendalikan oleh pusat, bersatu, dan bebas dari keterlibatan pihak sipil. Pada akhir tahun 1954 dan awal tahun 1955, penyelundupan secara besar-besaran telah dimulai dari Sulawesi (terutama Minahasa). Pada bulan Juni 1956, pemerintah memerintahkan supaya pelabuhan penyelundupan utama Minahasa ditutup, tetapi para pemimpin setempat membalas dengan suatu ultimatum bahwa perintah tersebut harus ditarik kembali dalam waktu tujuh hari. Jakarta menyetujuinya. Pada awal tahun 1956 diketahui suatu operasi penyelundupan karet yang dilancarkan oleh panglima Sumatera Utara, Kolonel Maludin Simbolon (l. 1916), seorang Batak Toba beragama Kristen, salah satu perwira tentara yang paling dihormati dan saingan Nasution. Pada bulan Juli, dia mencapai persetujuan damai dengan Jakarta dan tidak pernah dituntut.

Akhirnya, krisis yang berlarut-larut di dalam tubuh militer menyebabkan runtuhnya sistem politik parlementer. Karena partai-partai politik semakin terpolarisasi dalam pembagian Jawa–luar-Jawa dan birokrasi tidak begitu efektif, maka pihak tentaralah yang seharusnya menjaga kesatuan pemerintahan nasional; ketika tentara terpecah-pecah, negara terpecah-belah pula. Setelah

menjadi kepala staf tentara pada bulan November 1955, Nasution mengumumkan rencana lain bagi pemindahan para perwira secara besar-besaran, yang kebanyakan dari mereka kini telah terlibat dalam perusahaan-perusahaan swasta lokal. Ketika pemindahan-pemindahan mulai dijalankan pada tahun 1956 dengan banyak perwira yang berusaha untuk melambatkannya, maka kepentingan-kepentingan tentara dan sipil yang bertalian terpecah menjadi dua kelompok utama. Akan tetapi, pengelompokan tersebut tidak meniru pengelompokan dalam Peristiwa 17 Oktober. Kini Nasution dan para pendukungnya di kalangan tentara bekerja sama dengan Sukarno, Ali, dan PNI; kelompok ini meliputi beberapa orang perwira yang telah menentang Nasution pada tahun 1952. Lawan mereka ialah Simbolon dan Wakil Kepala Staf Letnan Kolonel Zulkifli Lubis (l. 1923), yang juga merupakan lawan Nasution pada tahun 1952; mereka bersekutu dengan tokoh-tokoh Masyumi dan PSI. Sebagian besar dukungan terhadap mereka berasal dari para perwira non-Jawa yang anti-Jakarta. Seperti yang akan dilihat di dalam bab berikutnya, ini merupakan konstelasi kelompok-kelompok yang mendasari pemberontakan Sumatera tahun 1958.

Pada bulan Agustus 1956, ketegangan meninggi di Jakarta. Salah seorang pendukung Lubis berusaha menawan menteri luar negeri dari PNI, Roeslan Abdulgani (l. 1914), dengan tuduhan melakukan korupsi, tetapi perintah tersebut dibatalkan oleh Nasution. Kemudian Lubis, yang diberhentikan dari jabatan wakil kepala staf pada tanggal 20 Agustus, merencanakan suatu kudeta dengan dukungan beberapa perwira dari Divisi Siliwangi Jawa Barat, divisi yang paling baik perlengkapannya dan paling terlatih di kalangan tentara. Sukarno sedang ke luar negeri (28 Agustus–16 Oktober 1956) dalam suatu kunjungan kenegaraan ke Cina, Uni Soviet, dan negara-negara komunis lainnya, dan para anggota komplotan tersebut ingin memecat Nasution dan membubarkan kabinet sebelum Presiden pulang. Mereka gagal. Pada tanggal 11 Oktober dan, sekali lagi, pada tanggal 16 November, pasukan-pasukan pro-Lubis tidak berhasil memasuki Jakarta, pada kesempatan pertama dihentikan oleh satuan-satuan pro-Nasution dan pada kesempatan kedua digagalkan oleh siasat-siasat keorganisasian Nasution yang lebih unggul. Tidak terjadi tembak-menembak, tetapi keluar perintah untuk menangkap Lubis; dia

menyembunyikan diri dan kelak akan muncul lagi dalam pemberontakan Sumatera.

Kini dengan cepat Nasution menangkap atau memindahkan lawan-lawannya di dalam Divisi Siliwangi dan mengubahnya menjadi divisinya yang paling dapat dipercaya. Ketika Mochtar Lubis, seorang wartawan dan pengarang roman di Jakarta yang sangat terpandang dan yang memiliki keteguhan moral yang hebat, menuduh Menteri Luar Negeri Roeslan terlibat korupsi, dia ditangkap dan diajukan ke depan pengadilan pada bulan besember 1956 dengan tuduhan melakukan fitnah. Dia tetap berada di penjara atau dalam tahanan rumah selama sembilan tahun. Roeslan akhirnya diketahui bersalah melakukan pelanggaran yang tak disengaja terhadap peraturan-peraturan pengawasan nilai tukar devisa dan didenda Rp. 5.000,00 pada bulan April 1957.

Tampaknya terjadi jalan buntu politik di Jakarta, karena banyak orang merasa bahwa sistem konstitusional tidak dapat dipertahankan lagi tetapi tidak tahu langkah apa yang harus diambil lagi. Beberapa orang menyerukan kabinet Hatta yang baru, tetapi sekarang kerja sama lama antara Hatta dan Sukarno sudah bubar. Pada tanggal 20 Juli 1956, Hatta mengajukan pengunduran dirinya sebagai wakil presiden, yang kemudian mulai berlaku tanggal 1 Desember. Ini berarti terlemparnya tokoh luar Jawa yang paling dikagumi dari pusat pemerintahan. Dia tidak melakukan langkah-langkah yang cemerlang, tetapi jelas merasa tidak puas dengan jalan yang ditempuh oleh negara Indonesia. Dalam pidatonya yang terakhir, dia mengecam perilaku partai-partai yang didasarkan atas kepentingan pribadi yang sempit. Mengenai hal ini, dia dan Sukarno sepakat, tetapi dalam hal-hal lain, mereka jarang bersepakat. Hatta lebih suka memperbaiki partai-partai, sedangkan Sukarno ingin membebaskan diri dari partai-partai sama sekali.

Sukarno meningkatkan prakarsanya di muka umum. Di sekelilingnya kini berkerumun sekelompok kaum radikal nonpartai; beberapa di antaranya adalah pengagum Tan Malaka semasa Revolusi. Dalam pidatonya pada tanggal 28 Oktober 1956, Sukarno meminta agar partai-partai dibubarkan. Dua hari kemudian dia menyatakan bahwa dia mempunyai suatu pikiran, suatu konsepsi tentang sebuah sistem baru, yaitu "demokrasi terpimpin". Natsir dan para pemimpin Masyumi lainnya menentang gagasan itu.

Murba, yang hanya mempunyai kemungkinan kecil untuk dapat mencapai kekuasaan dalam sistem parlementer, memuji gagasan itu dan membuat ikatan yang lebih erat dengan Sukarno. PNI dan NU, yang tertarik pada Sukarno tetapi akan menderita banyak kerugian jika sistem parlementer dihapuskan, bersikap mendua. PKI, yang terutama mencari perlindungan, mendukung Presiden tetapi dengan harapan bahwa partai-partai politik tidak akan dihapuskan. Orang-orang luar Jawa merasa cemas terhadap suatu sistem pemerintahan Sukarno–Murba–PKI–PNI–NU, suatu pemerintahan Jawa dan kaum radikal yang bertentangan dengan mereka dan Masyumi. Di kalangan militer, para panglima di luar Jawa melihat sedang terbentuknya suatu sistem yang sama, yang diselenggarakan oleh Jakarta melawan mereka.

Pada bulan Desember 1956, para perwira tentara di Sumatera, yang kebanyakannya adalah veteran-veteran dari bekas Divisi Banteng dari masa Revolusi, mengambil keputusan untuk melawan Jakarta dengan dukungan kaum sipil setempat. Pada tanggal 20 Desember, komandan resimen di Sumatera Barat mengambil alih pemerintahan sipil. Pada tanggal 22 Desember, Simbolon mengumumkan pengambilalihan kekuasaan di Sumatera Utara. Dua hari kemudian, panglima Sumatera Selatan memaksa gubernur sipil di sana untuk memulai langkah-langkah otonomi. Dewan-dewan militer di Sumatera dengan cepat mendapat dukungan rakyat karena melakukan pembaruan-pembaruan, memperbaiki sekolah-sekolah serta jalan-jalan, dan membasmi korupsi. Mereka tampaknya mendapat simpati dari perusahaan-perusahaan asing di pulau itu, termasuk perusahaan-perusahaan minyak Amerika. Mereka juga mulai mengadakan penangkapan terhadap anggota-anggota PKI, yang oleh karenanya dengan cepat mengecam kudeta-kudeta itu.

Jakarta tidak dapat mengabaikan hilangnya kekuasaan atas pulau yang terkaya di Indonesia itu. Hasil-hasil ekspor Sumatera Utara (yang meliputi bekas keresidenan Sumatera Timur pada zaman Belanda) menghasilkan pendapatan sekitar separo dari devisa negara pada tahun 1956. Ini mendorong kaum sipil Sumatera untuk menuntut otonomi yang jauh lebih besar dari Jakarta. Akan tetapi, kalangan militer di Sumatera mempunyai ambisi-ambisi yang tidak berjangkau luas, karena perhatian utama mereka ialah sifat hubungan mereka dengan pimpinan tentara pusat. Di kalangan tentara, jelas bahwa tak seorang pun

menginginkan terjadinya perang saudara pada tahapan ini. Jakarta bereaksi dengan memblokade Medan dan kemudian mengumumkan pengangkatan-pengangkatan tentara baru di Sumatera Utara, yang menimbulkan gerakan-gerakan intern yang rumit. Pada tanggal 27 Desember, Simbolon digulingkan di Medan oleh sekelompok perwira Batak Karo. Ia melarikan diri ke Tapanuli.

Sementara itu, krisis Sumatera yang meluas itu telah mendorong Jakarta untuk mengakhiri perlawanan di Aceh. Kabinet Ali memutuskan untuk mendirikan ulang provinsi Aceh, yang disetujui parlemen pada bulan Oktober 1956. Namun, Sukarno lambat menyetujui hal ini. Ia baru melakukannya setelah (dan mungkin karena) gerakan Simbolon untuk melepaskan Sumatera Utara dari Jakarta benar-benar nyata. Dengan didirikannya kembali provinsi Aceh di bawah gubemur orang asli Aceh, para zuama (muslim awam yang saleh) kehilangan alasan untuk mendukung perlawanan terhadap Jakarta. Karena itu, mereka menekan para ulama untuk mengakhiri permusuhan. Akhirnya, Daud Beureu'eh setuju untuk melakukan gencatan senjata pada April 1957. Setelah itu dimulailah pembicaraan dengan Jakarta untuk mencari solusi permanen atas persoalan Aceh.

Krisis Sumatera tersebut menyebabkan muncul lagi seruan-seruan supaya kabinet Ali mundur untuk digantikan oleh suatu kabinet nonparlementer yang dipimpin oleh Hatta, yang dianggap merupakan satu-satunya orang yang dapat memuaskan Sumatera. Ketika PNI dan NU menolak untuk mundur, maka Masyumi menarik diri dari kabinet pada tanggal 9 Januari 1957. Sementara perundingan-perundingan antara kelompok-kelompok tentara di Sumatera dan Jakarta terus berlangsung, semakin banyak dewan-dewan perwira bermunculan di Kalimantan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, serta Maluku yang ikut menuntut otonomi yang lebih besar dari Jakarta. Dalam banyak hal, mereka mempunyai pertalian dengan pemimpin-pemimpin Masyumi setempat, satu-satunya partai di antara partai-partai "empat besar" yang bersimpati pada kekecewaan daerah.

Sementara itu, Sukarno masih tetap merahasiakan rincian dari konsepsinya, apabila memang dia telah menyusunnya. Pada awal tahun 1957 terungkap jelas bahwa penghapusan partai politik tidak wajib, dan oleh karenanya PKI mendukung sepenuhnya

Sukarno. Aidit ingin mempertahankan bentuk sistem parlementer di mana PKI telah berhasil dengan baik, tetapi demi mempertahankan partai maka dia tetap dekat pada Sukarno. Sukarno sendiri kini lebih senang dengan PKI daripada PNI, karena kaum komunis bersih dari skandal-skandal korupsi (karena tidak pernah memerintah dan, oleh karenanya, tidak punya akses ke sarana korupsi) dan juga bersikap revolusioner yang disukai oleh Sukarno. Karena kaum komunis dimusuhi oleh pihak tentara dan partai-partai lainnya, maka Sukarno memperhitungkan bahwa PKI akan bergantung pada perlindungannya dan oleh karenanya merupakan alat yang dapat dipercaya untuk mengorganisasikan dukungan rakyat yang dianggap Sukarno sewajarnya menjadi miliknya.

Pada tanggal 21 Februari 1957, Sukarno membongkar kabut rahasia tersebut. Dia mengusulkan bahwa "demokrasi terpimpin"-nya yang baru akan merupakan suatu bentuk pemerintahan yang lebih cocok dengan kepribadian nasional. Pemerintahan itu akan didasarkan pada "kabinet gotong-royong" yang terdiri atas partai-partai besar, termasuk PKI, dengan penasihat sebuah Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional (pemuda, kaum buruh, kaum tani, kelompok agama, kelompok daerah, dan lain-lain) dan bukannya partai-partai politik. Akan tetapi, dia tidak mengusulkan penghapusan parlemen. Gagasan tentang kabinet Hatta, satu-satunya langkah yang mungkin akan meredakan gerakan-gerakan protes daerah, nyata-nyata tidak terpikirkan oleh Sukarno. PNI, PKI, Murba, dan beberapa partai kecil lainnya menyetujui usulan-usulan itu. Masyumi dan Partai Katolik tidak menyetujuinya. NU, PSI, dan partai-partai lainnya tampaknya juga tidak mendukungnya, sejauh yang dapat dilihat dari keterbatasan dan ketidakjelasan tanggapan mereka.

Sementara demonstrasi-demonstrasi massa mendukung gagasan-gagasan Sukarno, krisis daerah semakin bertambah serius. Pada tanggal 2 Maret 1957, panglima untuk Indonesia Timur, Letnan Kolonel H.N.V. Sumual (l. 1923), mengumumkan keadaan darurat perang di seluruh wilayahnya dari markas besarnya di Makasar. Dengan begitu, secara teoritis dia mengambil alih semua kekuasaan sipil dari Bali sampai Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian, suatu "Piagam Perjuangan Semesta Alam" (Permesta) yang panjang dibacakan kepada para perwira

Sumual, yang berikrar akan menyelesaikan Revolusi Indonesia. Dengan demikian, meletuslah pemberontakan Permesta. Pada tanggal 8 Maret, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan mengajukan mosi tidak percaya kepada gubernur dan pihak tentara mengambil alih kekuasaan di wilayah itu.

Waktu negara Indonesia benar-benar pecah, Nasution mengambil prakarsa untuk mengakhiri demokrasi parlementer. Masih tetap muncul banyak seruan untuk membentuk kabinet Hatta, suatu cara pemecahan yang juga didukung oleh NU pada tanggal 11 Maret 1957. Nasution berusaha mengatur pertemuan antara Hatta dan Presiden, tetapi Sukarno menolak. Maka, dia mengusulkan agar Sukarno mengumumkan keadaan darurat perang untuk seluruh Indonesia. Ini akan menempatkan pihak militer sebagai pemegang kekuasaan di seluruh Indonesia dan memberinya alat untuk mengurus perpecahan-perpecahan internalnya sendiri, sambil secara teknis meniadakan tantangan yang ditimbulkan oleh kudeta-kudeta militer regional semata-mata dengan mengesahkan kudeta-kudeta itu. Usulan tersebut disetujui. Pada tanggal 14 Maret, kabinet Ali mengundurkan diri dan Sukarno mengumumkan keadaan darurat perang. Demokrasi parlementer, seperti yang telah berjalan di Indonesia, tumbang. Tak seorang pun tahu bagaimana bentuk baru dari pemerintahan yang akan datang, kecuali bahwa pemerintahan tersebut tidak akan semacam demokrasi banyak-partai yang dirasakan telah gagal di negara ini.

Meskipun sistem politik sampai tahun 1957 tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, namun rakyat Indonesia telah mendapatkan suatu kemenangan yang luar biasa. Indonesia merupakan sebuah negara tunggal. Bahkan gerakan-gerakan daerah yang tidak setuju dengan Jakarta dan Darul Islam pun tidak mempersoalkan hal ini: mereka memprotes cara negara itu dibentuk dan diperintah, bukan eksistensinya. Tidak pernah mudah untuk mengetahui bagaimana komitmen-komitmen massa seperti itu timbul, tetapi beberapa unsur tampaknya telah menimbulkan perasaan identitas yang benar-benar Indonesia. Fakta bahwa Indonesia memang merdeka, tersebarnya bahasa Indonesia secara cepat, pendiskreditan identitas-identitas politik kedaerahan atau kesukuan oleh upaya Belanda pada federalisme selama Revolusi, tumbuhnya pusat-pusat kota yang semakin kosmopolitan, ditekankannya secara terus-menerus tema persatuan

nasional oleh Sukarno, agitasi atas Papua, desakan partai-partai politik terhadap peranan mereka sebagai organisasi nasional, simbolisme pemilihan umum tahun 1955, pengabdian pihak militer terhadap semangat revolusi, aspirasi semua pihak yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di pusat daripada di suatu bagian negeri itu, dan tersebar luasnya perasaan rakyat bahwa pengorbanan-pengorbanan demi Revolusi tidak akan sia-sia, kesemuanya itu memberikan sumbangan kepada perkembangan ini.

Ironi yang terbesar selama kurun waktu 1950–7 ialah bahwa ketika negara Indonesia terpecah-pecah, negara itu juga bersatu padu. Jarang sekali motto nasional Bhinneka Tunggal Ika (secara resmi tapi sebetulnya agak kurang akurat diterjemahkan sebagai "persatuan dalam keragaman") lebih cocok dengan keadaannya. Masih tetap terjadi banyak perpecahan dan konflik di dalam negara, beberapa di antaranya akhirnya tidak dapat dirujukkan. Akan tetapi, kini semuanya jelas merupakan perpecahan dan konflik di dalam suatu bangsa yang tunggal.[]

Bab 20 ....

Demokrasi Terpimpin, 1957–65

DI TENGAH-TENGAH krisis tahun 1957, diambillah langkah-langkah pertama menuju suatu bentuk pemerintahan yang oleh Sukarno dinamakan "demokrasi terpimpin". Ini merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus-menerus berubah sepanjang masa yang paling kacau dalam sejarah Indonesia sejak Revolusi. Demokrasi terpimpin didominasi oleh kepribadian Sukarno, walaupun prakarsa pelaksanaannya diambilnya bersama-sama dengan pimpinan angkatan bersenjata. Pada waktu itu, beberapa pengamat menganggap Sukarno sebagai diktator dan, ketika sikapnya semakin berapi-api, beberapa pengamat cenderung menganggapnya hanya sebagai sebuah karikatur yang sudah lanjut usia. Sukarno tidak seperti itu semua. Dia adalah ahli manipulator rakyat dan manipulator lambang-lambang. Dia dapat berpidato kepada khalayak ramai atau membuat terpesona musuh yang potensial dengan sama mudahnya, meskipun dia juga sangat ahli dalam membenci musuh-musuhnya. Dia menawarkan sesuatu untuk diyakini kepada bangsa Indonesia, sesuatu yang diharapkan banyak orang akan memberi mereka dan negara mereka martabat atau kebanggaan. Kekuatan-kekuatan besar lainnya berpaling kepadanya untuk mendapatkan bimbingan, legitimasi, atau perlindungan. Dengan menampilkan dirinya ke depan dalam krisis tahun 1957, maka ia didukung oleh para pemimpin lainnya dalam mempertahankan posisi sentralnya. Akan tetapi, semua ini adalah untuk mendukung suatu keseimbangan politik yang bahkan tidak dapat ditegakkan oleh Sukarno, suatu keseimbangan politik yang

merupakan kompromi antara kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dirujukkan kembali dan, oleh karenanya, tidak memuaskan semua pihak. Meskipun Sukarno memiliki pandangan tentang masa depannya sendiri, tetapi dia tidak mempunyai satu pun pandangan (atau setidak-tidaknya satu pun pandangan yang akhirnya dapat diterima oleh pimpinan lainnya) mengenai masa depan negara dan bangsanya. Janji dari demokrasi terpimpin adalah palsu.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh para ilmuwan untuk menggambarkan demokrasi terpimpin sebagai sebuah sistem pemerintahan, suatu percobaan yang agak mirip dengan melukiskan bentuk amuba. Beberapa ilmuwan menyetujui pendapat Sukarno bahwa ini merupakan langkah kembali ke sesuatu yang lebih sesuai dengan masa lalu Indonesia dan, khususnya, Jawa. Kadang-kadang analisa-analisa semacam itu mempunyai ciri deteminasi psiko-kultural, seolah-olah arwah Sultan Agung berbisik di telinga Sukarno. Memang benar bahwa dalam beberapa hal, Sukarno mirip seorang raja Jawa dari masa prakolonial. Dia merupakan pusat legitimasi yang diperlukan oleh para pemimpin lainnya. Penampakan yang mencolok adalah pengungkapan legitimasi ke luar: stadion-stadion, patung-patung, dan upacara-upacara umum yang besar mungkin mempunyai fungsi yang sama dengan upacara dan bangunan-bangunan istana dari masa lalu. Sukarno sendiri hanya memiliki sedikit kekuatan yang terorganisasi dan harus memanipulasi, mengancam, dan membujuk orang-orang kuat lainnya. Intrik persekongkolan menjadi lazim dalam politik. Elite politik menjadi himpunan kelompok-kelompok yang mengelilingi orang-orang berpengaruh. Sistem keuangan dan sistem hukum menjadi semakin sewenang-wenang dan tidak menentu karena hancurnya norma-norma birokrasi. Pemerintah daerah semakin mengandalkan para petani sebagai tenaga kerja yang tidak digaji.

Meskipun mempunyai kesamaan-kesamaan yang menarik dengan masa prakolonial, tetapi kesemuanya itu hanya sedikit memberi penjelasan tentang, dan juga tidak bercorak khas, Indonesia. Mustahil bahwa demokrasi terpimpin diilhami secara sadar ataupun bawah-sadar oleh prinsip-prinsip asli negara dari masa prakolonial. Tradisi-tradisi politik Jawa sudah sedemikian diubah oleh kolonialisme Belanda sehingga, pada tahun 1950-an, tidak ada satu pun yang masih tersisa selain legenda-legenda

yang romantis, gambaran-pmbaran dari pertunjukan wayang yang hanya mencerminkan sistem politik dahulu sampai batas-batas tertentu, dan lembaga-lembaga istana itu sendiri yang tidak berdaya lagi. Bahwa rakyat pedesaan dapat memahami Sukarno dari segi model-model wayang, semata-mata mencerminkan kehalusan dan kekayaan bentuk kesenian itu serta kecintaan Sukarno sendiri pada wayang dan keterampilannya dalam memanipulasi lambang-lambang. Peranan militer secara pribadi dari raja-raja prakolonial Indonesia tidak kita jumpai dalam demokrasi terpimpin. Sebagai ganti satuan-satuan kecil prajurit profesional dan pasukan-pasukan besar yang dihimpun dari kalangan petani, kini terdapat satuan tentara tetap yang besar di bawah panglima-panglimanya sendiri. Kurangnya pengalaman dan kekuatan Sukarno secara pribadi di bidang militer sama dengan ketidaktahuannya di bidang ekonomi yang merupakan bencana besar. Dia tidak menyukai stabilitas, ketertiban, dan hal-hal yang dapat diramalkan, yang merupakan tujuan semua penguasa dari masa prakolonial. Dia menginginkan revolusi yang berkesinambungan dan mobilisasi massa, dan di sini kelihatan dampak dari pergerakan nasional, pendudukan Jepang, dan Revolusi, yaitu pengaruh-pengaruh yang lebih mendasar daripada kerajaan-kerajaan Jawa yang mungkin sedikit diketahui Sukarno.

Hanya sedikit keadaan pada abad XX yang dapat diperbandingkan dengan masa prakolonial. Indonesia merupakan bagian dari tatanan internasional yang bersifat bersaing dan dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain dengan cara yang berbeda sama sekali dengan kerajaan-kerajaan kuno. Meledaknya jumlah penduduk serta terjadinya revolusi di bidang komunikasi dan teknologi membuat potensi munculnya suatu tatanan dalam negeri yang otoriter semakin jauh lebih besar. Rakyat dapat diamati, diberi informasi, dimobilisasi, atau dipaksa dengan lebih berhasil daripada di setiap kerajaan dahulu. Jepang, bahkan lebih daripada Belanda, telah menunjukkan bagaimana kesemuanya itu dapat dilakukan. Ketika Sukarno dan kekuatan-kekuatan politik lainnya meraba-raba jalan mereka ke arah tatanan yang lebih otoriter, maka dalam beberapa hal mereka kembali ke zaman dahulu. Namun, mereka lebih condong kembali ke gagasan negara-negara yang bersifat menindas seperti Belanda dan terutama Jepang daripada ke gagasan kerajaan-kerajaan Jawa kuno yang hampir tidak

mereka ketahui sama sekali. Penjajahan Belanda dan Jepang merupakan bentuk-bentuk pemerintahan yang sudah dikenal oleh kalangan elite dan yang, meskipun mempunyai segala kekurangannya, setidak-tidaknya tampak lebih efektif daripada sistem multipartai dari tahun 1950–7.

Tampak jelas bahwa pada tahun 1957, partai-partai politik berada pada posisi defensif, tetapi rasa saling bermusuhan satu sama lain terlalu berat bagi mereka untuk bekerja sama dalam mempertahankan sistem parlementer. Pada bulan April 1957, Sukarno mengumumkan pembentukan Kabinet Karya di bawah seorang politisi nonpartai, Djuanda Kartawidjaja (1911-63), sebagai perdana menteri. Djuanda telah duduk dalam hampir setiap kabinet sejak tahun 1945 dan dihormati sebagai orang yang cakap dan bijaksana yang mengerti soal ekonomi. Salah seorang kepercayaan Sukarno yang paling dekat, Chaerul Saleh (1916–67), masuk dalam kabinet tersebut sebagai menteri urusan veteran. Dia adalah salah seorang pemimpin pemuda yang pada tahun 1945 mendesak Sukarno dan Hatta agar menyatakan kemerdekaan, dan telah mengikuti jejak Tan Malaka dalam Revolusi; dia ditangkap oleh pihak tentara, dibebaskan oleh Yamin pada bulan Juni 1951, dan kemudian ditangkap lagi oleh tentara. Dia pergi ke negeri Belanda pada tahun 1952 hanya untuk diusir pada tahun 1953. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1955, dia menjadi salah seorang dari lingkungan penasihat Sukarno yang radikal dan mulai memperkokoh posisinya di puncak kelompok yang berpengaruh dan menguntungkan. Menteri luar negeri dijabat Dr. Subandrio (1914–2004), seorang mantan duta besar untuk London (1947–54) dan Moskow (1954–6). Dia juga menjadi tokoh utama dalam persekongkolan-persekongkolan dan konflik-konflik dalam tahun-tahun ini. Diangkat tiga orang wakil perdana menteri: Hardi dari PNI (l. 1918), Kyai Haji Idham Chalid dari NU (l. 1921), dan Dr. Johannes Leimena (1905–77) dari Partai Kristen.

Meskipun secara teoritis bersifat nonpartai, namun pada hakikatnya kabinet ini merupakan suatu koalisi antara PNI dan NU. Tidak ada satu pun anggota PSI atau PKI di dalamnya, tetapi pihak komunis mempunyai beberapa simpatisan. Dua anggota Masyumi menjadi anggota kabinet, tetapi partai tersebut memecat keduanya karena menerima kedudukan itu. Sukarno

dan Djuanda mengatakan bahwa kabinet masih tetap bertanggung jawab kepada DPR dan aneka partai yang terlibat di dalamnya merupakan mayoritas di dalam DPR, tetapi ini tidak lebih daripada suatu isyarat bagi suatu sistem yang mendekati ajalnya.

Pada bulan Mei 1957 dibentuklah Dewan Nasional yang terdiri atas 41 wakil 'golongan karya' (pemuda, tani, buruh, wanita, cendekiawan, agama, daerah, dan lain-lain), ditambah beberapa anggota *ex officio*. Kebanyakan partai politik, termasuk PKI, secara tidak langsung diwakili melalui anggota-anggota golongan karya, tetapi tidak demikian halnya dengan Masyumi dan Partai Katholik. Sukarno menjadi ketuanya, tetapi urusan-urusan dewan tersebut secara langsung berada di tangan wakil ketuanya, Roeslan Abdulgani, yang tampil sebagai seorang arsitek ideologi demokrasi terpimpin.

Dengan terbentuknya sistem pemerintahan baru tersebut, PKI dan tentara mengambil langkah-langkah untuk memperkuat posisi mereka. Setidak-tidaknya pada tahun 1957 (dan mungkin sudah pada tahun 1955), seorang anggota rahasia PKI mulai menyusup ke tubuh militer melalui kontak dengan perwira-perwira intelijen yang juga berusaha menyusup ke dalam tubuh PKI. Orang itu ialah tokoh misterius bernama 'Sjam' (Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah, w. 1986). Dia kabarnya berasal dari keluarga santri tradisional di pesisir utara Jawa dan lahir sekitar tahun 1920. Akan tetapi, kehidupan dan kariernya sangat tidak jelas, begitu juga hubungannya dengan Aidit. Ketika pekerjaan itu berlangsung, PKI juga sedang mencapai keberhasilan riilnya yang pertama di kalangan kaum cendekiawan. Pada bulan Oktober 1956, Pramoedya Ananta Toer sangat terkesan dengan kunjungannya ke Beijing, sehingga dia mulai mempropagandakan tujuan PKI di kalangan para cendekiawan. Kekagumannya terhadap Cina diperkuat oleh kunjungannya yang kedua pada tahun 1958–9, pada saat dimulainya 'Lompatan Maju Besar' Mao. Pramoedya menjadi tokoh terkemuka di dalam organisasi para seniman dan pengarang PKI, Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat, didirikan tahun 1950), yang segera akan menjadi alat utama untuk melakukan penindasan intelektual. Anggota-anggota PKI juga menjadi berpengaruh di dalam sistem sekolah Taman Siswa, di mana mereka didukung oleh persamaan-persamaan yang dekat antara ideologi Taman Siswa dan ideologi demokrasi terpimpin.

Kalangan militer berusaha memastikan bahwa cara baru yang bersandar pada golongan-golongan karya akan meningkatkan peranan tentara. Banyak golongan karya berafiliasi dengan partai; pada bulan Juni 1957, Nasution mulai membentuk badan-badan kerja sama tentara–sipil guna memisahkan golongan-golongan tersebut dari partai. Selama dua tahun berikutnya, badan-badan seperti itu menjalin hubungan dengan sayap pemuda NU, Ansor (didirikan tahun 1934 dengan nama yang berasal dari kata *al-anshar,* 'kaum penolong', orang-orang yang membantu Nabi di Madinah), Pemuda Rakyat dari PKI, kelompok-kelompok pemuda dari PNI dan Masyumi, dan lain-lain. Akan tetapi, kebanyakan partai dapat menahan gerakan-gerakan itu. Bagaimanapun juga, Nasution berhasil mempersatuan semua organisasi para veteran ke dalam suatu liga veteran di bawah kekuasaan pihak tentara pada bulan Agustus 1959. PKI, yang telah mendapatkan banyak keberhasilan di kalangan kaum veteran, sangat terpukul oleh langkah ini sehingga partai tersebut kehilangan satu-satunya badan pendukungnya yang terorganisasi yang mempunyai nilai militer yang potensial.

Sukarno juga mencari cara baru bagi pembentukan organisasi massa. Pada bulan Juni 1957, dia memuji-muji sistem satu-partai dari Uni Soviet dan mengatakan bahwa dia lebih menyukai struktur seperti itu. Pada bulan Agustus, dia menghidupkan lagi gagasan yang telah gagal dilaksanakan pihak Jepang pada bulan Juli 1945 ketika Gerakan Rakyat Baru mereka mengalami kegagalan. Dia menyerukan pembentukan Gerakan Hidup Baru yang, secara samar-samar, diharapkan akan menghidupkan kembali bangsa Indonesia. PKI menjanjikan dukungannya, tetapi tidak ada suatu perkembangan pun yang terjadi dan gerakan tersebut segera menjadi sasaran lelucon-lelucon politik. Bagaimanapun juga, Sukarno tetap bersikeras bahwa budaya *rock-and-roll* dari Barat yang bersifat merusak harus ditinggalkan demi suatu kepribadian yang betul-betul Indonesia.

Kabinet, Dewan Nasional, dan pihak tentara juga berusaha memecahkan masalah-masalah yang telah mengakibatkan terjadinya krisis pemerintahan. Berdasarkan undang-undang darurat perang, Nasution memerintahkan dilakukannya pembersihan. Akibatnya, beberapa orang politisi yang diduga telah melakukan korupsi ditangkap dan beberapa lainnya melarikan diri. Pada

bulan Mei 1957, ahli ekonomi dan mantan menteri dari PSI, Profesor Sumitro Djojohadikusumo (1917–2001), merupakan salah seorang yang kabur dari Jakarta ke Sumatera. Para panglima daerah menangkap banyak kaum sipil dan membatasi kegiatan-kegiatan partai. PKI sangat menderita karena pembatasan semacam itu. Pada bulan Juli 1957, markas besar PKI dan SOBSI di Jakarta diserang dengan granat-granat tangan. Partai-partai politik mulai meminta dihapuskannya undang-undang darurat perang, tetapi undang-undang tersebut tetap diberlakukan selama enam tahun dan ketika undang-undang itu dicabut, pihak tentara sudah begitu kuat sehingga pencabutan undang-undang tersebut tidak begitu berarti.

Kabinet menjalin hubungan dengan dewan-dewan militer daerah yang telah mengambil alih kekuasaan di daerah-daerahnya dan bahkan memberi mereka dana-dana Jakarta yang terbatas dengan kedok pembangunan daerah. Djuanda menyelenggarakan Musyawarah Nasional di Jakarta dari tanggal 10 sampai 14 September 1957, yang disusul dengan Musyawarah Nasional Pembangunan dua bulan berikutnya. Ada harapan yang besar bahwa musyawarah yang pertama khususnya akan menghasilkan cara-cara pemecahan yang riil. Para wakil dari dewan-dewan daerah tampaknya bersedia bekerja sama. Akan tetapi, tidak tercapai kemajuan dan jalan buntu tetap menghadang. Usaha-usaha baru yang dilakukan untuk memulihkan kerja sama antara Hatta dan Sukarno tenggelam dalam ketidakmampuan dan keengganan mereka untuk bekerja sama.

Pemilihan-pemilihan untuk memilih anggota dewan-dewan propinsi diselenggarakan pada semester kedua tahun 1957. Terlihat bahwa PKI memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini memperbesar tekad pihak tentara dan kaum sipil yang antikomunis bahwa sistem politik yang lama harus secepatnya diakhiri. PKI merupakan satu-satunya partai yang mempunyai suatu organisasi rakyat 'akar rumput' yang aktif. Organisasi tersebut telah mengampanyekan pelaksanaan demokrasi terpimpin gagasan Sukarno, *land reform*, dan penghapusan korupsi. Di Jawa, perolehan suara PKI adalah 37,2% lebih tinggi daripada jumlah suara yang diperolehnya pada tahun 1955. Kebanyakan dukungan baru tersebut berasal dari para mantan pemilih PNI. Perolehan suara "empat besar" di daerah pemilihan Jawa Tengah dan Jawa

Timur pada bulan Juli adalah: PKI 34%, NU 29%, PNI 26%, dan Masyumi 11%. PNI hanya memperoleh mayoritas di satu kabupaten dan para pemimpin partai ini di Jawa Tengah mulai mendesak agar kerja sama dengan PKI dihentikan. Di Jawa Timur, NU masih tetap di urutan pertama, tetapi perolehan suaranya berkurang dan PKI hanya kalah kurang dari 3% di belakangnya. Masyumi masih tetap memimpin dalam pemilihan-pemilihan di Jawa Barat pada bulan Agustus, tetapi PKI menggantikan posisi PNI di urutan kedua. Hasil-hasil tersebut nyata-nyata memperkuat pendapat Sukarno bahwa PKI harus diberi peranan dalam pemerintahan.

Pada bulan September dan Oktober 1957, Kolonel Simbolon dan para pembangkang militer lainnya di Sumatera, Kolonel Sumual dari gerakan Permesta, dan Kolonel Lubis mengadakan beberapa pertemuan di Sumatera guna mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka. Mereka meringkas tujuan-tujuan mereka menjadi tiga sasaran: diselenggarakannya pemilihan umum untuk memilih seorang presiden baru guna mengakhiri kegiatan-kegiatan pro-PKI Sukarno, digantinya Nasution dan stafnya di pusat, dan dilarangnya PKI. Sementara itu, Masyumi, yang tidak mau tahu tentang demokrasi terpimpin, menyelenggarakan Muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang pada bulan September yang memfatwakan bahwa komunisme haram bagi kaum muslim dan bahwa PKI harus dilarang. NU, yang berusaha keras mempertahankan Islam tradisional di dalam sistem yang sedang muncul ini, tidak bersedia mengirimkan delegasi resmi ke muktamar tersebut. Pada pertengahan bulan November, Majelis Konstituante memulai sidang-sidangnya di Jakarta dan kemudian macet dalam perdebatan antara pihak yang mendukung Islam dan pihak yang mendukung Pancasila sebagai dasar falsafah bagi undang-undang dasar yang baru.

Pada akhir bulan November 1957, dua kejadian meningkatkan ketegangan politik. Pada tanggal 29 November, PBB tidak berhasil mengesahkan suatu resolusi yang menghimbau agar Belanda merundingkan penyelesaian mengenai masalah Papua; Sukarno telah memperingatkan bahwa Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang akan menggoncangkan dunia apabila resolusi tersebut gagal. Kemudian, pada tanggal 30, ketika Sukarno sedang berkunjung di sekolah puteranya di daerah Cikini, Jakarta, terjadilah usaha pertama, dari beberapa usaha

yang menyusul kemudian, untuk membunuhnya. Sekelompok muslim fanatik, yang diduga merupakan anak buah Lubis dan para pembangkang di daerah, melemparkan granat-granat tangan yang meminta korban beberapa jiwa, namun tidak mencederai Sukarno. Kini Nasution merasakan bahwa batas-batas kewajaran dan persekongkolan telah dilewati dan tidak mungkin lagi tercapai kompromi dengan para pembangkang.

Gagalnya resolusi PBB tersebut secara langsung mengakibatkan terjadinya ledakan radikalisme anti-Belanda yang dikobarkan oleh Sukarno. Pada tanggal 3 Desember, serikat-serikat buruh PKI dan PNI mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor dagang Belanda. Djuanda maupun Nasution tidak mampu menguasai keadaan. Perusahaan pelayaran milik Belanda, KPM, merupakan perusahaan pertama yang disita, tetapi sebagian besar kapalnya sedang berada di laut dan dengan mudah berlayar keluar dari perairan Indonesia. Dengan demikian, hanya dengan satu pukulan, bangsa Indonesia kehilangan banyak pelayaran antarpulaunya. Ini semakin memperbesar perasaan tidak puas daerah atas tindakan-tindakan yang dilakukan Jakarta. Hatta dan para pemimpin Masyumi mengecam buruknya perencanaan atas tindakan pemgambilalihan itu. Salah satu sokoguru kekuatan perekonomian Inggris-Belanda, *Royal Dutch Shell,* tidak dinasionalisasikan namun, pada tanggal 5 Desember, Kementerian Kehakiman memerintahkan pengusiran terhadap sekitar 46.000 warga Belanda yang berada di Indonesia.

Pada tanggal 13 Desember 1957, Nasution mengambil kendali atas keadaan tersebut dengan memerintahkan agar pihak tentara bersedia mengelola perusahaan-perusahaan yang telah disita itu. PKI dan SOBSI, yang ingin sekali menghindarkan terjadinya konfrontasi dengan pihak tentara, menjanjikan dukungan mereka untuk menjaga supaya perusahaan-perusahaan itu tetap berjalan. Ini merupakan suatu perkembangan yang menentukan, karena kini pihak tentara mulai berperan sebagai kekuatan ekonomi yang penting; pihak tentara mendapatkan sumber pendanaan sendiri yang dapat disalurkannya kepada para anggota dan pendukungnya. Ini memperkuat posisi Nasution dan komando pusat terhadap panglima-panglima daerah, juga posisi angkatan darat sebagai suatu keseluruhan terhadap angkatan-angkatan lainnya serta pemerintahan sipil. Hal ini mempersatukan pihak tentara dengan orang-orang yang lebih menyukai peru-

sahaan negara daripada perusahaan swasta: kelompok yang lebih menyukai perusahaan swasta terutama adalah para pendukung Masyumi dan NU. Dengan demikian, persamaan kepentingan antara panglima daerah luar Jawa dan Masyumi terancam.

Akan tetapi, manfaat pengambilalihan itu terhadap perekonomian dan tentara tidak terlihat. Terjadi banyak salah urus dan ketidakefisienan, terutama sebagai akibat adanya kecenderungan Nasution untuk menugaskan para perwira yang sudah tua dan kurang cakap memimpin perusahaan-perusahaan, sementara para panglima yang lebih cakap tetap ditugaskan memimpin pasukan. Perhatian pihak tentara mulai jauh berpaling dari fungsi-fungsi militer yang murni, sehingga mempercepat korupsi di kalangan korps perwira; tak satu pun dari perkembangan-perkembangan ini menggembirakan Nasution. Namun demikian, suatu langkah yang sangat penting telah diambil ke arah pengonsolidasian kekuatan-kekuatan politik, militer, administrasi, dan ekonomi di tangan pihak tentara. Suatu langkah lagi diambil pada tanggal 10 Desember 1957 ketika Nasution menempatkan wakilnya yang kedua, Kolonel Dr. Ibnu Sutowo (l. 1914), untuk memimpin suatu perusahaan minyak baru yang diberi nama Permina (Perusahaan Minyak Nasional). Ini merupakan langkah pertama pihak tentara ke dalam industri minyak.

Gelombang radikal terus berlangsung selama bulan Desember 1957 dan Januari 1958. Pada bulan Desember, Natsir dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya kabur dari Jakarta karena adanya intimidasi dari kelompok-kelompok pemuda. Pada bulan yang sama, pemilihan-pemilihan daerah di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa Masyumi masih tetap merupakan partai yang terbesar, akan tetapi bahkan di sini pun PKI telah menggeser PNI di urutan kedua. Kini PKI memberi penekanan kepada kekuasaan Belanda yang terus berlanjut atas Papua sebagai fakta pokok dari status semikolonial Indonesia. Pada bulan Januari, Nasution bergerak untuk menempatkan radikalisme ini di bawah kendali pihak tentara dengan membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat yang didasarkan pada badan-badan kerja sama tentara–sipil. Akan tetapi, partai-partai berusaha keras menghalangi perkembangannya, dan Sukarno sangat berpengaruh di dalam front itu.

Pada bulan Januari 1958, PSI dan Masyumi menuntut dibentuknya kabinet baru guna menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa. Tentu saja, PNI dan NU mempertahankan kabinet yang ada. Tersebar desas-desus adanya ancaman pemberontakan. Ketika Sukarno berada di luar negeri (6 Januari–16 Februari), diselenggarakanlah suatu pertemuan di dekat Padang antara Simbolon, Lubis, para perwira lainnya di Sumatera, Natsir dan Sjafruddin dari jajaran pimpinan Masyumi, dan Sumitro Djojohadikusumo (salah satu di antara segelintir orang Jawa yang bergabung dengan kaum pembangkang) dari PSI. Nasution, kabinet, serta para pemimpin PSI dan Masyumi yang masih berada di Jakarta menghubungi teman-teman mereka di Sumatera untuk berusaha mencegah terjadinya pemberontakan, tetapi sia-sia. Tokoh-tokoh Sumatera merasa yakin bahwa kejadian-kejadian di Jakarta sedang mengarah ke sifat radikal yang tidak terbendung lagi dan harus ditentang.

Pada tanggal 10 Februari 1958, kaum pembangkang Padang mengirimkan suatu ultimatum lima hari kepada pemerintah: kabinet harus dibubarkan, Hatta dan Sultan Hamengkubuwana IX harus ditunjuk untuk membentuk kabinet karya baru sampai terselenggaranya pemilihan umum, dan Sukarno harus kembali ke posisi konstitusionalnya sebagai presiden lambang saja (suatu posisi yang telah dituntut oleh Natsir selama masa jabatannya sebagai perdana menteri). Kabinet segera menolak ultimatum tersebut dan para perwira penting yang terlibat diberhentikan dengan tidak hormat karena merencanakan pemberontakan dan berupaya membunuh Sukarno di Cikini.

Pada tanggal 15 Februari diumumkanlah suatu pemerintahan pemberontak di Sumatera, dengan markas besarnya di Bukittinggi. Pemerintahan ini terkenal dengan nama PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Sjafruddin menjadi perdana menterinya (1958–61); anggota kabinetnya termasuk Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro Djojohadikusumo, dan Simbolon. Dua hari kemudian, kaum pemberontak di Sulawesi, Permesta, bergabung dengan PRRI. Kini, pihak pemberontak mendapat jaminan dukungan secara rahasia dari Amerika Serikat, yang juga cemas terhadap Sukarno dan PKI. Akan tetapi, sejak awal pihak pemberontak menghadapi kekurangan-kekurangan yang serius. Panglima Sumatera Selatan tidak bergabung dengan mereka,

karena merasa gelisah akibat letaknya yang dekat dengan Jawa dan khawatir dengan banyaknya orang Jawa yang menjadi buruh pada ladang-ladang minyak yang menjadi anggota organisasi-organisasi PKI. Pemberontakan ini pun tidak memeroleh dukungan yang berarti di Sumatera Utara maupun Kalimantan. Kaum pemberontak Darul Islam di Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan tetap menempuh cara mereka sendiri, walaupun pada akhir tahun 1959 terjalin juga hubungan yang tidak begitu erat antara Darul Islam dan PRRI. Perusahaan-perusahaan minyak Caltex, Stanvac, dan Shell mendapat jaminan dari Jakarta bahwa kepentingan mereka akan dilindungi dan tetap membayar pajak mereka ke Jakarta. Dengan demikian, PRRI merosot menjadi suatu pemberontakan yang terutama berpangkalan di dua pusat yang berjauhan, Sumatera Barat dan Sulawesi (khususnya Sulawesi Utara yang kini telah menjadi pusat gerakan Permesta).

Pada tanggal 16 Februari, Sukarno kembali dan mendesak diterapkannya perlakuan yang keras terhadap kaum pemberontak. Djuanda, Nasution, serta kebanyakan pemimpin PNI dan PKI juga menghendaki agar pemberontakan itu ditumpas. Hatta, bersama-sama dengan para pemimpin Masyumi dan PSI di Jakarta, mendesak agar dilakukan penyelesaian dengan perundingan, sehingga menempatkan diri mereka pada posisi kompromis. Hamengkubuwana IX, yang secara tidak resmi merupakan sekutu PSI, juga lebih menyukai perundingan dan tidak bersedia menerima jabatan dalam kabinet ketika diubah susunannya pada bulan Juni 1958 karena adanya garis keras pemerintah terhadap PRRI. Sejak itu, dia tidak memainkan peran kenegaraan yang penting sampai sesudah bulan Oktober 1965. Masyumi terpecah-belah, kehilangan semangat, dan tidak dipercaya lagi. Kelompok Sukiman berkeinginan memecat Natsir, Sjafruddin, dan Burhanuddin namun dicegah oleh para pendukung mereka. Dalam kenyataannya, Natsir tetap menjadi ketua partai selama setahun sesudah meletusnya pemberontakan.

Pihak militer bertindak secara meyakinkan. Angkatan udara mengebom instalasi-instalasi PRRI di Padang, Bukittinggi, dan Manado pada akhir Februari 1958. Pada awal Maret, pihak tentara mulai mendaratkan di Sumatera satuan-satuan dari Divisi Siliwangi dan Divisi Diponegoro yang berpangkalan di Jawa di bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani (1922–65). Pihak

Amerika memasok persenjataan kepada kaum pemberontak dan meminta kepada Jakarta untuk mendaratkan suatu pasukan marinir Amerika dengan dalih melindungi warga negara dan milik Amerika di ladang-ladang minyak Sumatera. Pemerintah Indonesia menolak permintaan tersebut dan, mulai tanggal 12 Maret, telah mengamankan ladang-ladang Caltex untuk mencegah terjadinya aksi sepihak Amerika. Kemudian pihak pemberontak dipukul mundur dari Medan pada tanggal 17 Maret dan sebulan kemudian Padang berhasil direbut oleh pihak Jakarta setelah menghadapi perlawanan yang tidak berarti. Pada tanggal 5 Mei, Bukittinggi berhasil direbut dan gerakan PRRI di Sumatera berubah menjadi perang gerilya di wilayah pedalaman. Selanjutnya perhatian beralih ke Sulawesi Utara, di mana pertempuran berlangsung lebih berat. Di sini, Jakarta mengandalkan Divisi Brawijaya dari Jawa Timur. Gorontalo berhasil direbut pada pertengahan bulan Mei, kemudian Manado pada akhir bulan Juni. Lagi, pemberontakan di sini pun berubah menjadi perang gerilya. Pada pertengahan tahun 1958, pemberontakan PRRI sudah dapat dikatakan gagal, walaupun kehancurannya yang terakhir masih terjadi tiga tahun kemudian.

Meletusnya pemberontakan PRRI dan runtuhnya gerakan itu secara cepat menimbulkan dampak yang besar terhadap hubungan luar negeri Indonesia. Ribuan nyawa telah menjadi korban, dan tak seorang pun dapat melupakan kejadian itu dengan mudah. Simpati dan dukungan Amerika kepada PRRI sangat jelas bagi Jakarta dan benar-benar merusak hubungan Indonesia–Amerika Serikat. Pada tanggal 18 Mei, seorang pilot sipil Amerika yang mengendalikan pesawat pengebom B-26 ditembak jatuh di atas Ambon ketika sedang sibuk melakukan pengeboman sebagai dukungan kepada pihak pemberontak. Amerika Serikat telah menyadari bahwa dirinya mendukung suatu gerakan yang akan mengalami kegagalan. Dalam waktu dua hari, Menteri Luar Negeri Amerika J.F. Dulles mengecam campur tangan untuk kepentingan PRRI dalam usaha memperbaiki hubungan dengan Jakarta. Akan tetapi, peristiwa itu telah meninggalkan suatu perasaan tidak enak dan membuat Sukarno serta banyak pemimpin lainnya cenderung memandang Amerika Serikat dengan kecurigaan yang bahkan lebih besar daripada yang biasanya terjadi antara negara berkembang dan negara besar. PKI segera memanfaatkan perasaan anti Amerika itu.

Malaya, yang telah merdeka pada tahun 1957 dan masih memerangi sisa-sisa "keadaan darurat" yang ditimbulkan oleh kaum komunis di negaranya sendiri, juga telah membantu kaum pemberontak PRRI dan menjadi saluran utama bagi pemasokan senjata, seperti halnya Singapura. Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan juga menyatakan simpati kepada PRRI. Dengan demikian, keinginan Indonesia untuk melaksanakan kebijakan luar negeri yang netral menjadi semakin sulit terwujudkan karena daftar lawannya semakin panjang. Pada bulan Agustus 1958, Guomindang (Kuomintang) dilarang di Indonesia dan segera setelah itu tentara mengambil alih perusahaan-perusahaan Cina yang pro-Taiwan, sehingga secara tidak sadar telah memberi PKI kesempatan untuk memonopoli dukungan politik dari kalangan masyarakat Cina di Indonesia.

PRRI telah membantu menyederhanakan politik militer Indonesia. Kini banyak perwira militer yang membangkang dikeluarkan dari urusan-urusan militer sehingga Nasution menjadi pimpinan militer yang tak tertandingi. Pada bulan Juli 1958, pangkat Nasution dinaikkan menjadi letnan jenderal, sehingga dialah orang pertama yang mendapat pangkat itu semenjak Soedirman. Kebanyakan perwira yang diberhentikan itu berasal dari daerah-daerah luar Jawa, sehingga korps perwira semakin banyak ditempati oleh orang-orang Jawa; pada tahun 1960-an, diperkirakan 60 sampai 80 persen perwira militer adalah orang Jawa, padahal jumlah kelompok suku itu hanya sekitar 45 persen dari jumlah total penduduk Indonesia.

Dampak psikologis pemberontakan itu sangat besar. Pemberontakan itu telah menodai Masyumi dengan cap pengkhianat, seperti halnya peristiwa Madiun mencemarkan nama PKI. Pemberontakan itu juga merupakan suatu langkah yang penting dalam mengonsolidasikan keunggulan Jawa atas daerah-daerah luar Jawa dan keunggulan pihak militer atas kekuatan-kekuatan politik lainnya. Pemberontakan di daerah kini menjadi semakin sulit terjadi karena ditempatkannya para perwira dan satuan-satuan dari Divisi Siliwangi, Divisi Diponegoro, dan Divisi Brawijaya di daerah-daerah luar Jawa. Meskipun demikian, para panglima daerah masih tetap tidak begitu ketat dikendalikan oleh pimpinan pusat.

Keberhasilan atas PRRI tidak menjadikan tentara disukai oleh masyarakat umum. Penanganan pemerintahan yang keras di bawah undang-undang darurat perang telah mengakibatkan pihak tentara mendapat banyak kecaman, sehingga memberi angin kepada mereka yang beranggapan bahwa kekuasaan tentara harus dibatasi. Di antara mereka itu ialah Sukarno, yang lawan-lawan dan musuh-musuh lamanya dari kalangan politisi sipil, seperti Hatta dan Natsir, kini tidak berperanan lagi. Sukarno dan pihak tentara menjadi saling bersaing dalam mengatur sistem politik yang sedang tumbuh. PKI, yang masih belum memainkan peranan penting, ingin sekali menempatkan dirinya sedekat mungkin dengan Sukarno. Presiden tidak begitu menghargai para pemimpin PNI seperti Ali Sastroamidjojo dan Hardi, dan semakin menganggap PKI sebagai sekutu utamanya dalam menghadapi pihak tentara.

Para politisi Jakarta, baik sipil maupun militer, kini mengalihkan perhatian pada soal bagaimana caranya menyelesaikan peralihan ke demokrasi terpimpin. Masyumi dan PSI, yang pernah berperan sebagai pembela-pembela demokrasi, mulai mendesak supaya pemilihan anggota DPR yang menurut rencana akan diadakan pada tahun 1959 ditangguhkan, karena mereka beranggapan bahwa PKI-lah yang akan menjadi pemenangnya. PNI dan NU juga berpandangan seperti itu. Pada bulan September 1958, Djuanda mengumumkan bahwa pemilihan umum akan ditunda. Akan tetapi, kaum elite politik yang ada di Jakarta tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang langkah berikutnya yang akan diambil. Tersebar desas-desus bahwa Sukarno akan membentuk suatu partai negara, atau bahwa akan ada kudeta oleh pihak tentara. Majelis Konstituante tetap menghadapi jalan buntu mengenai dasar falsafah bagi konstitusi yang baru.

Pada bulan Juli 1958, Nasution mengusulkan suatu cara penyelesaian. Daripada menyusun undang-undang dasar baru, ia memilih untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang dasar ini menetapkan seorang presiden yang kuat yang bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang jarang bersidang, tetapi memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa pasal dapat diartikan sebagai memperbolehkan perwakilan golongan karya, dan walaupun undang-undang dasar tersebut tidak mengakui eksistensi partai politik,

mereka tidak dilarang. Pertentangan filosofis akan terpecahkan dengan dicantumkannya Piagam Jakarta yang dibuat pada bulan Juni 1945, yang mewajibkan umat Islam menjalankan syariat Islam sambil membiarkan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa. Usulan ini lambat laun mulai mendapat dukungan, tetapi Sukarno tidak berkeinginan memikul sendiri tanggung jawab berat yang ditetapkan oleh undang-undang dasar ini bagi presiden. Dia juga merasa takut bahwa usulan ini merupakan cara untuk menciptakan suatu sistem yang, dalam kenyataannya, tentaralah yang akan berkuasa. Pada saat itu telah disepakati bahwa angkatan bersenjata sendiri merupakan golongan karya, sehingga terjadilah perdebatan-perdebatan panjang tentang apakah proporsi dari setiap badan perwakilan baru harus terdiri atas golongan-golongan semacam itu.

Nasution menginginkan tentara dicabut hak suaranya sehingga terbebas dari campur tangan partai politik, tetapi terwakili secara langsung di segala tingkat pemerintahan melalui golongan karya militer. Pada bulan November 1958, dia merumuskan usulan ini sebagai doktrin jalan tengah: tentara tidak disisihkan dari urusan politik dan tidak juga mengambil alih pemerintahan. Meskipun demikian, pihak-pihak lain merasa takut tentang kemungkinan terjadinya kudeta, perasaan takut yang menjadi semakin besar dengan terjadinya gelombang pengambilalihan oleh pihak militer di negara-negara dunia ketiga pada bulan Juli–November 1958 (Irak, Pakistan, Birma, Muangthai, dan Sudan).

Pada bulan September 1958, Nasution tiba-tiba melarang Masyumi, PSI, Partai Kristen, dan sebuah organisasi front tentara yang mendukung lawan-lawannya (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, didirikan tahun 1954) di semua daerah di mana mereka telah membantu kaum pemberontak. Selanjutnya dia menangkap seorang pemimpin Masyumi dari kelompok Natsir karena menyampaikan suatu pidato yang bersimpati kepada PRRI. Karena jelas Nasution telah merebut prakarsa, maka partai-partai politik mulai merasa harus menyetujui apa saja yang ditawarkan oleh Sukarno kalau tidak ingin menghadapi kudeta yang dilakukan tentara. Kini Sukarno mulai lebih cenderung pada diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, sebagian dengan harapan bahwa tindakan ini akan menghidupkan kembali semangat optimisme, pengabdian, dan revolusi yang

berhubungan dengan suasana tahun 1945. Hanya Masyumilah yang tetap mempertahankan oposisinya yang teguh terhadap demokrasi terpimpin.

Para pemimpin PNI dan PKI menyetujui gagasan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada awal tahun 1959. Pada bulan Februari, NU setuju, sebagian di bawah tekanan ancaman akan dituntutnya beberapa pemimpinnya dengan tuduhan melakukan tindak korupsi, tetapi dengan pengertian bahwa Piagam Jakarta dicantumkan di dalam undang-undang dasar tersebut dan mempunyai kekuatan hukum. Kemudian kabinet memutuskan untuk mengajukan usulan ini kepada Majelis Konstituante. Apabila NU menyatakan persetujuannya di sana, maka usulan tersebut akan mendapatkan suara mayoritas dua pertiga yang diperlukan. Akan tetapi, sekali lagi segala sesuatunya macet dalam konflik yang berlarut-larut antara partai-partai Islam dan non-Islam. Sementara tentara menggelar demonstrasi-demonstrasi untuk mendukung Undang-Undang Dasar 1945 dan kelompok-kelompok pemuda dari PKI dan Masyumi juga turun ke jalan-jalan di Bandung, tempat Majelis Konstituante bersidang, Sukarno memulai suatu perjalanan keliling dunia (23 April–29 Juni 1959) dan Ketua NU Idham Chalid pergi naik haji ke Mekah. Ketika pada bulan Mei Majelis menolak usulan agar Piagam Jakarta dimasukkan sebagai bagian dari undang-undang dasar yang memiliki kekuatan hukum, maka NU berbalik menentang diberlakukannya konstitusi lama itu. Pada tanggal 2 Juni 1959, jumlah suara terakhir yang menyetujui diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 adalah 56%, kurang dari jumlah dua pertiga yang diperlukan. Sekali lagi terjadi jalan buntu.

Sementara sentimen-sentimen Islam tetap menjadi penghalang bagi perubahan konstitusional di tingkat nasional, pemerintah berhasil mencapai suatu penyelesaian dengan daerah pemberontakan Darul Islam yang paling diilhami oleh agama. Sejak bulan Maret 1957 telah disepakati suatu gencatan senjata di Aceh, tetapi ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya. Pada bulan Mei 1959, ketika terjadi percekcokan di dalam Majelis Konstituante, pemerintah menyetujui pembentukan sesuatu yang sebenarnya merupakan sebuah 'negara Islam dalam negara' dengan memberikan status Daerah Istimewa kepada Aceh. Penduduk Aceh diberi otonomi dalam masalah-masalah keagamaan, hukum

adat, dan pendidikan. Pertempuran pun berhenti, walaupun beberapa gerilyawan masih tinggal di bukit-bukit selama lebih dari dua tahun. Daud Beureu'eh diberi pensiun sebagai mantan gubernur dan aktif dalam memajukan proyek-proyek pekerjaan umum. Penyelesaian seperti itu dapat diterima untuk Aceh yang sangat jauh letaknya, tetapi jelas tidak dapat diterima untuk Jawa Barat atau bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kini Nasution memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk memecahkan jalan buntu pada tingkat nasional adalah diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 lewat dekrit presiden. PKI dan PNI sepakat bahwa inilah satu-satunya cara untuk dapat menerobos keteguhan pendirian partai-partai Islam yang tidak dapat ditawar dan menghindari terjadinya kudeta oleh pihak tentara. NU juga lebih menyukai cara ini; kepentingan utamanya adalah dipertahankannya dan terwakilinya Islam tradisional pada rezim apa pun yang akan tampil, tetapi tampaknya tidak akan memberikan suara di dalam Majelis Konstituante bagi suatu undang-undang dasar yang tidak memberi tempat khusus kepada Islam. Sikap kaku Masyumi jelas merupakan jalan buntu; dengan demikian, NU memilih suatu cara penyelesaian yang setidak-tidaknya akan menyelamatkannya dari pertentangan-pertentangan filosofis yang tajam di muka umum dan menghindarkannya ikut tenggelam dalam ketidakmampuan politik yang dihadapi Islam modernis. Pada tanggal 3 Juni, Nasution mengeluarkan larangan sementara terhadap semua kegiatan politik di muka umum dan minta kepada kalangan pers supaya tetap tenang. Sekarang, semuanya menunggu kembalinya Sukarno.

Pada tanggal 29 Juni 1959, Sukarno kembali ke Jakarta dan merasa cemas atas semakin besarnya kekuasaan Nasution. Dia memutuskan untuk menyetujui usulan Nasution. Pada tanggal 5 Juli, dia membubarkan Majelis Konstituante dan memberlakukan kembali undang-undang dasar yang lama. Dia mengatakan bahwa Piagam Jakarta merupakan suatu dokumen sejarah yang mengilhami keseluruhan undang-undang dasar tersebut tetapi tidak dengan sendirinya menjadi bagian yang resmi darinya. Menurut penjelasan ini, maka negara tidak wajib mengawasi pelaksanaan syariat Islam di kalangan orang-orang yang menamakan dirinya muslim, tetapi para pemimpin Islam tetap bersikeras bahwa negara mempunyai kewajiban demikian. Dekrit tersebut

jelas tidak konstitusional, tetapi banyak pihak merasa lega bahwa sebagian dari jalan buntu nasional telah berhasil ditembus.

Pada tanggal 9 Juli diumumkan suatu kabinet baru bernama 'Kabinet Kerja' dengan Sukarno sebagai perdana menteri dan Djuanda sebagai "menteri utama". Leimena, Chaerul Saleh, dan Subandrio tetap berada di dalam inti kabinet; Idham Chalid tidak masuk, tetapi tokoh NU lainnya menjadi menteri agama (kementerian yang paling ingin dikuasai oleh NU). Guna memberi tekanan pada sifat nonpartai dari pemerintahan baru tersebut, beberapa orang menteri keluar dari partai mereka, termasuk Subandrio dari PNI dan Leimena dari Partai Kristen. Tidak terdapat satu pun anggota PKI, tetapi beberapa orang menteri dianggap sebagai simpatisan komunis. Sukarno ingin melemahkan Nasution dengan cara memasukkannya ke dalam kabinet dan menggantikannya di puncak pimpinan tentara. Sukarno tidak berhasil menghadapi tekad Nasution, sehingga Nasution menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan merangkap Kepala Staf Angkatan Darat. Para kepala staf angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian juga menjadi anggota *ex officio* cabinet. Beberapa orang perwira menjadi menteri.

Lembaga-lembaga demokrasi terpimpin lainnya segera diumumkan. Pada bulan Juli 1959, Dewan Nasional dibubarkan dan dibentuklah Dewan Pertimbangan Agung yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, begitu juga suatu lembaga baru yang disebut Dewan Perancang Nasional yang diketuai oleh Yamin. Masyumi dan PSI tidak terwakili di dalam kedua lembaga tersebut; PNI, PKI, NU, dan partai-partai lainnya terwakili di dalam keduanya. Kemudian Sukarno memerintahkan bahwa para pejabat tinggi negara dan pimpinan perusahaan-perusahaan negara tidak boleh menjadi anggota partai politik. Pada bulan September 1959, para kepala daerah dibebaskan dari tanggung jawab mereka terhadap dewan daerah yang dipilih, yang digantikan oleh dewan yang ditunjuk pada tahun 1960–1. Partai-partai masih tetap ada, tetapi hanya PKI-lah yang menunjukkan vitalitas yang besar. Pengaruh para pemimpin politik semakin lama semakin tidak diperoleh melalui lembaga-lembaga resmi atau struktur-struktur kepartaian, melainkan melalui kedekatan kepada Sukarno atau pihak tentara.

Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959, Sukarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (dari Manifesto Politik). Dia menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial, dan pelengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan. Pada awal tahun 1960, kaidah yang samar-samar ini menjadi semakin rumit karena ditambahkannya kata USDEK, yang berarti Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

Manipol-USDEK kini merupakan definisi resmi dari ortodoksi ideologi. Apa arti tepatnya tergantung pada siapa yang mendukungnya. Manipol-USDEK diperkenalkan di segala tingkat pendidikan dan pemerintahan, dan pers diharuskan mendukungnya. Beberapa redaktur yang pro-Masyumi dan pro-PSI menolak melakukannya dan surat kabar mereka pun dilarang terbit. Antara tahun 1959 dan 1961, oplah surat kabar berkurang dengan kira-kira sepertiganya, dari 1.039.000 eksemplar untuk 90 surat kabar menjadi 710.000 eksemplar untuk 65 surat kabar.

Mulai terjadi kekacauan ekonomi sehubungan dengan masa demokrasi terpimpin ini. Dalam rangka mengendalikan inflasi, maka pada tanggal 25 Agustus 1959 mata uang rupiah didevaluasikan sebesar 75%, semua nilai uang kertas Rp. 500,00 dan Rp. 1.000,00 diturunkan menjadi sepersepuluh dari nilai nominalnya, dan deposito-deposito bank yang besar jumlahnya dibekukan. Tindakan ini mengurangi jumlah pasokan uang dari Rp 34 milyar menjadi Rp 21 milyar dengan sekali pukul. Sukarno sendiri tampaknya telah mengilhami langkah-langkah deflasi yang ekstrem itu. Orang-orang kaya, para birokrat, dan terutama sekali para pengusaha Cina serta pribumi sangat terpengaruh. Bagaimanapun juga, beberapa panglima daerah tidak bersedia menjalankan tindakan-tindakan tersebut secara penuh. Krisis likuiditas itu begitu berat sehingga pemerintah terpaksga memperbolehkan penambahan hutang, dan dalam waktu enam bulan jumlah pasokan uang telah kembali lagi ke tingkatan sebelumnya dan inflasi pun naik lagi. Kebijaksanaan ekonomi menjadi bersifat tragis dan lucu dengan dicanangkannya suatu rencana pembangunan delapan tahun pada akhir tahun 1960. Rencana pembangunan tersebut merupakan omong kosong ritual besar yang

dibagi menjadi 17 bagian, 8 jilid, dan 1945 pasal untuk melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan.

Campur tangan tentara dalam perekonomian dan pemerintahan juga semakin meningkat. Pada bulan Mei 1959 telah diputuskan bahwa, mulai tanggal 1 Januari 1960, orang-orang asing dilarang melakukan perdagangan di daerah pedesaan. Walaupun ketetapan ini mengena ke para pedagang Arab dan India, tetapi pada dasarnya ketetapan ini merupakan langkah yang didorong oleh pihak militer untuk memukul orang-orang Cina, melemahkan persahabatan Jakarta dengan negara Cina, dan memersulit urusan PKI. Pada akhir tahun 1959, pihak tentara mulai memindahkan orang-orang Cina secara paksa dari daerah-daerah pedesaan ke kota-kota. Akhirnya, kira-kira 119.000 orang bahkan dipulangkan kembali ke Cina. Pemerintah Cina melakukan tekanan diplomatik yang sangat berat terhadap Jakarta, sementara PKI dan Sukarno berusaha membela orang-orang Cina dan setidak-tidaknya dapat mencegah pihak militer untuk melakukan tindakan yang lebih keras. Keluarnya orang-orang Cina dari daerah pedesaan dan dari Indonesia secara keseluruhan, serta adanya ketakutan umum di dalam komunitas dagang yang sangat penting ini, mengakibatkan terjadinya dislokasi ekonomi, penimbunan barang, dan gelombang inflasi baru yang serius. Selama tahun 1960, pihak militer juga meningkatkan pengaruh langsungnya terhadap pemerintahan sipil ketika lima orang perwira menjadi gubernur propinsi.

Dalam persaingan memperebutkan kekuasaan dengan Nasution, Sukarno menempuh dua taktik pokok. Dia berusaha mendapatkan dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, khususnya PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama angkatan udara. Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara Surjadi Surjadarma (l. 1912) dekat dengan Sukarno dan mempunyai hubungan yang kurang baik dengan Nasution. Istrinya aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berhaluan kiri dan PKI dan pernah ditahan untuk beberapa waktu pada tahun 1948 atas perintah Nasution. Angkatan udara merasa iri atas keunggulan angkatan darat dan kini menjadi kekuatan militer yang paling dekat yang pernah dapat diandalkan oleh Sukarno. Akan tetapi, tidak ada seorang kepala staf militer pun yang benar-benar dapat menjamin perilaku anak buahnya sendiri. Hal ini terlihat secara jelas pada bulan Maret 1960, ketika

seorang pilot angkatan udara memberondong istana kepresidenan di Jakarta dan Bogor saat suatu satuan tentara memasuki Jakarta, yang rupa-rupanya merupakan semacam usaha kudeta yang gagal. Di pihak partai-partai politik, mereka semakin berpendapat harus menyetujui kehendak Sukarno atau dibubarkan sama sekali oleh pihak militer.

PSI dan Masyumi melancarkan perlawanan terakhir mereka terhadap demokrasi terpimpin pada tahun 1960, dan disapu bersih. Pada bulan Maret, DPR yang terpilih, lembaga terakhir pemerintahan di mana keduanya terwakili, menolak anggaran belanja pemerintah dalam suatu pameran kekuatan yang tidak disangka-sangka. Sukarno mengesahkan anggaran belanja tersebut dengan dekrit dan membubarkan DPR itu. Kemudian dia mengumumkan akan membentuk suatu DPR–GR (Dewan Perwakilan Rakyat–Gotong Royong). Atas dorongan Hatta dan beberapa tokoh militer, maka PSI, Masyumi, dan beberapa sekutunya membentuk Liga Demokrsi guna menentang langkah itu.

Pada bulan Juni, ketika Sukarno sekali lagi pulang dari perjalanan kelilingnya ke luar negeri, liga tersebut segera hancur dan DPR–GR yang terdiri atas 283 kursi itu ditetapkan. Masyumi dan PSI tidak memperoleh satu pun kursi. Lebih dari separo jumlah kursi (154) jatuh ke tangan golongan-golongan karya, tetapi banyak di antara orang-orang yang diangkat itu juga merupakan anggota partai. PKI diperkirakan memperoleh antara 17% dan 25% dari jumlah kursi dan Lukman menjadi salah seorang wakil ketua. Angkatan bersenjata terwakili sebagai golongan karya. Kemudian Sukarno juga menetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang beranggotakan 616 orang, di mana Aidit menjadi wakil ketua. Kini PKI terdapat di setiap lembaga pemerintahan kecuali kabinet; Masyumi dan PSI tidak terwakili di dalam lembaga pemerintahan mana pun. Di kalangan Islam, kemenangan politik pihak tradisional (NU) atas modernis (Masyumi) kini tampak meyakinkan. Akhirnya, pada bulan Agustus 1960, Masyumi dan PSI dilarang sebagai akibat permusuhan para pemimpin mereka terhadap Sukarno selama bertahun-tahun, oposisi mereka terhadap demokrasi terpimpin, dan keterlibatan mereka dalam PRRI.

Kini Sukarno mulai memberi penekanan pada tema yang sudah terlihat dalam tulisan-tutisannya pada tahun 1926, yang

menghendaki persatuan antara nasionalisme, Islam, dan marxisme. Tema itu sekarang dinamakan doktrin Nasakom (dari Nasionalisme, Agama, Komunisme). Tampaknya doktrin ini mengandung arti bahwa PNI (untuk nasionalisme), NU (untuk agama), dan PKI (untuk komunisme) akan sama-sama berperan dalam pemerintahan di segala tingkatan, sehingga menghasilkan suatu sistem yang, antara lain, akan didasarkan pada koalisi kekuatan-kekuatan politik yang berpusat di Jawa. Karena PNI dan NU sudah benar-benar terwakili, maka satu-satunya masalah serius yang ditimbulkan oleh Nasakom pada tahap ini ialah dimasukkannya para menteri PKI ke dalam kabinet. Inilah yang tidak disetujui pihak militer.

Pihak tentara mengambil tindakan membatasi PKI pada semester kedua tahun 1960. Pada bulan Juli, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet, terutama Subandrio yang dituduh telah menghina Cina, dan terhadap pihak tentara yang masih belum menumpas habis kaum pemberontak PRRI. Semua anggota Politbiro PKI ditangkap guna diperiksa oleh tentara, tetapi Sukarno berhasil mendesak Nasution supaya membebaskan mereka. Para panglima daerah di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan melarang PKI dan menahan kaum komunis setempat pada bulan Agustus. Atas desakan Sukarno juga, larangan-larangan tersebut dicabut pada bulan Desember, kecuali di Kalimantan Selatan di mana larangan itu berlangsung selama setahun. Di daerah-daerah itu, PKI terus diawasi, diganggu, dan dibatasi oleh pihak militer. Pada akhir bulan Oktober, tujuh majalah Politbiro ditutup untuk selamanya, dan mulai saat itu dan seterusnya jatah kertas koran untuk surat kabar *Harian Rakyat* dikurangi. Orang-orang di dalam tubuh PKI yang menyangsikan strategi Aidit sekarang terpaksa mengakui bahwa tidak ada jalan lain kecuali bersekutu dengan Sukarno. Dan Sukarno terpaksa mengakui bahwa dia belum dapat memasukkan para menteri PKI ke dalam kabinet.

Kini Indonesia bergerak menuju radikalisme yang akan memberi peluang kepada PKI untuk berkembang walaupun masih menghadapi permusuhan dari pihak tentara. Belanda berusaha mendirikan sebuah negara merdeka di Papua dengan dukungan dari penduduk setempat. Pada awal tahun 1960, mereka mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota dewan

perwakilan akan diselenggarakan di sana. Pada bulan Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Setahun sebelumnya, Dewan Pertimbangan Agung telah membentuk Front Nasional yang diharapkan oleh Sukarno dapat menggantikan Front Nasional Pembebasan Irian Barat bentukan pihak tentara. Pada bulan Agustus 1960, pimpinan Front Nasional yang baru itu diumumkan; Aidit dan Nyoto menjadi anggota, begitu juga beberapa pemimpin organisasi-organisasi yang berafiliasi ke PKI. Kini dimulailah penyusupan militer kecil-kecilan ke Papua dan kemampuan PKI yang sangat besar dalam memobilisasikan demonstrasi-demonstrasi massa turut ambil bagian dalam rangka merebut Papua.

Kebutuhan militer untuk melancarkan serangan guna merebut Papua mendorong pihak tentara dan pemerintah berpaling kepada Uni Soviet, yang sedang berusaha meningkatkan pengaruhnya di Indonesia supaya merugikan Amerika Serikat maupun Cina. Pada bulan Januari 1960, Khrushchev berkunjung ke Jakarta dan memberikan kredit sebesar 250 juta dolar AS kepada Indonesia. Pada bulan Januari 1961, Nasution pergi ke Moskow dan memperoleh pinjaman sebesar 450 juta dolar untuk membeli persenjataan dari Soviet. Kini, untuk pertama kalinya sejak Revolusi, angkatan bersenjata mulai bertambah besar, yang mencapai jumlah sekitar 300.000 prajurit pada tahun 1961 dan 330.000 prajurit pada akhir tahun 1962. Semakin banyak peralatan militer Indonesia berasal dari Soviet, termasuk pesawat-pesawat tempur modern dan pesawat-pesawat pengebom jarak jauh untuk angkatan udara serta kapal-kapal baru untuk angkatan laut. Memang, sebagian besar peralatan baru itu jatuh ke tangan angkatan laut dan angkatan udara, angkatan-angkatan yang dipandang Sukarno lebih kooperatif daripada angkatan darat. Akan tetapi, perang Papua masih tetap berupa kegiatan militer yang tingkatnya rendah. Ketika John F. Kennedy memangku jabatan Presiden Amerika Serikat pada bulan Januari 1961, dia mulai menandingi pengaruh Soviet di Indonesia dengan mengupayakan tercapainya suatu penyelesaian atas masalah Papua melalui perundingan.

Sementara perhatian pihak militer semakin berpaling ke perang Papua, perundingan-perundingan pihak tentara dengan kaum pemberontak PRRI yang berlangsung sejak akhir tahun 1958 pada akhirnya membuahkan hasil. Pada saat itu, pihak pem-

berontak sedang kehabisan amunisi dan perbekalan lainnya. Pada bulan Februari–April 1961, beberapa gerombolan Permesta menyerah di Sulawesi Utara. Kemudian Sjafruddin memerintahkan supaya pasukan-pasukannya menyerah, dan antara bulan Juni dan Oktober 1961 banyak gerombolan mentaati perintah tersebut. Simbolon, Zulkifli Lubis, Sumual, Sjafruddin, Natsir, dan para pemimpin lainnya dikembalikan ke Jakarta. Sumitro Djojohadikusumo sedang berada di luar negeri dan menetap di sana hingga tahun 1967. Banyak kaum pemberontak Aceh, anggota Darul Islam di Jawa Barat, dan pengikut Kahar Muzakar juga meletakkan senjata. Akan tetapi, Kahar sendiri tetap berada di bukit-bukit Sulawesi Selatan, yang semakin terjepit oleh pasukan-pasukan pemerintah, sampai saat ia tewas pada bulan Februari 1965. Pada bulan Oktober 1961, sejumlah kira-kira 100.000 orang pemberontak telah menyerah. Meskipun Sukarno mendesak agar para pemimpin pemberontak tersebut diberi perlakuan yang keras, namun pihak militer hanya mengenakan tahanan rumah atau tahanan kota yang longgar terhadap Sjafruddin dan para pemimpin lainnya dan tidak mengajukan tuntutan terhadap mereka. Walaupun pihak tentara tidak memaafkan pemberontakan, tetapi banyak di antara pemimpinnya bersimpati kepada oknum-oknum yang terlibat dalam PRRI.

Sukarno terus mengecam perlakuan lembut pihak militer terhadap para pemimpin PRRI dan akhirnya berhasil mengalahkan Nasution dalam persoalan ini. Perasaan radikal di dalam negeri semakin meningkat dan atmosfir persekongkolan semakin panas dengan adanya usaha pembunuhan lagi terhadap Presiden pada bulan Januari 1962 ketika dia berkunjung ke Sulawesi Selatan. Sukarno lalu mendesak supaya musuh-musuhnya dihukum. Pada bulan Januari, Sjafruddin, Natsir, Simbolon, Burhanuddin, serta banyak pemimpin senior lainnya dari Masyumi dan PSI dije

bloskan ke dalam penjara. Musuh lama Presiden, Sjahrir, yang sedang sakit dan tidak banyak terlibat dalam politik semenjak Revolusi, juga ditahan; pada tahun 1965, dia diizinkan pergi ke Swiss untuk mendapatkan perawatan medis, tetapi tindakan ini terlalu lambat untuk menyelamatkan nyawanya. Dengan dipenjarakannya orang-orang yang merupakan bagian dari inti pimpinan kaum nasionalis sejak Revolusi dan masa sebelumnya, maka politik Indonesia tampak jelas semakin bertambah pahit.

Berakhirnya PRRI telah memberi peluang kepada pihak tentara untuk memusatkan perhatian pada tujuan barunya di Papua dan musuh lamanya di Jawa Barat, Darul Islam. Pada akhir tahun 1961 dilancarkanlah suatu serangan baru terhadap Darul Islam. Kartosuwirjo terluka pada bulan April 1962, yang menggoyahkan keyakinan para pengikutnya bahwa dirinya kebal. Pada bulan Juni, dia ditangkap dan diadili dengan tuduhan telah melakukan pemberontakan dan berusaha melakukan pembunuhan terhadap Sukarno pada bulan sebelumnya. Dia dihukum mati pada bulan September. Untuk pertama kalinya sejak Revolusi, keamanan di wilayah pedalaman Jawa Barat berhasil dipulihkan kembali.

Pihak militer dan Nasution semakin menguasai keadaan, walaupun Sukarno telah berusaha merebut prakarsa dan adanya ketidakpopuleran tentara sendiri. Sukarno menginginkan supaya kampanye untuk merebut Papua menjadi alat untuk menggembleng Indonesia ke dalam momentum massa yang ia pandang sangat penting artinya bagi revolusi yang berkesinambungan dan sangat cocok dengan bakat-bakat kepemimpinannya. PKI juga melihat adanya kesempatan untuk meningkatkan peranan nasionalnya. Akan tetapi, ada bahaya bahwa pihak tentara akan menguasai keadaan lagi. Oleh karena itulah maka Sukarno maupun PKI ingin mencegah jangan sampai perang Papua menjadi suatu operasi militer sepenuhnya.

Sebagai cara pencegahan yang utama, maka Sukarno harus tetap mengawasi kampanye Papua. Pada bulan Desember 1961 dibentuklah Komando Operasi Tertinggi (KOTI) baru bagi pembebasan Papua. Sukarno menjadi panglimanya. Nasution mewakilinya dan Mayor Jendral Yani menjadi kepala stafnya. Perang ini akan berada di bawah Komando Mandala yang diketuai oleh Mayor Jenderal Soeharto. Sukarno juga bertindak untuk mengurangi kekuasaan Nasution di kalangan militer. Pada bulan Januari 1962, suatu pasukan Indonesia menderita kekalahan besar di lepas pantai Irian, di mana Wakil Panglima Angkatan Laut dan lima puluh orang lainnya gugur. Angkatan darat menuntut agar Surjadarma digantikan sebagai pimpinan angkatan udara karena tidak berhasil memberikan bantuan kekuatan udara yang cukup memadai. Sukarno menggantinya dengan Marsekal Madya Udara Omar Dhani, yang pada mulanya dipandang tidak begitu terikat kepada Presiden. Akan tetapi, Sukarno memanfaatkan kesombongan

Omar Dhani dan dia segera menjadi sekutu Presiden dan PKI dalam menghadapi para pemimpin angkatan darat. Sukarno juga mendukung saingan-saingan Nasution di kalangan angkatan darat. Nasution berhasrat menjadi panglima dari seluruh angkatan bersenjata, tetapi pada bulan Juni 1962 dia diperdayai oleh Sukarno (dengan bantuan Omar Dhani) dan menderita kekalahan politik yang besar. Sukarno hanya mengangkat Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata (orang pertama yang mengisi kedudukan ini sejak bulan November 1953) yang hanya memainkan peranan koordinasi dan pertahanan sipil saja; dia masih tetap memegang jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Kedudukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat digantikan oleh Yani yang perasaan anti PKI-nya sama kuatnya dengan Nasution tetapi lebih mudah dipengaruhi oleh Sukarno.

PKI memanfaatkan kampanye Papua untuk meningkatkan pengaruh dan memperbanyak jumlah anggotanya sendiri. Pada bulan Juli 1962, jumlah anggota front kaum tani PKI (BTI) mencapai 5,7 juta orang yang konon merupakan seperempat dari keseluruhan jumlah petani dewasa. Pada akhir tahun itu, jumlah anggota SOBSI konon mencapai hampir 3,3 juta orang. Pada awal tahun 1963, jumlah anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia, didirikan tahun 1954) masing-masing konon mencapai 1,5 juta orang. Jumlah anggota PKI sendiri pada akhir tahun 1962 mencapai lebih dari 2 juta orang, sehingga menjadikannya sebagai partai komunis terbesar di negara nonkomunis di mana pun. Jumlah anggota front intelektual PKI, Lekra, mencapai 100.000 orang pada bulan Mei 1963. Sejak itu, Lekra melancarkan serangan tajam terhadap mentalitas 'borjuis' lawan-lawannya dari kalangan kaum intelektual. Pramoedya dan orang-orang yang berhaluan kiri di dalam Lekra mendapat dukungan dari front intelektual PNI, yaitu LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional), yang berada di bawah pimpinan Sitor Situmorang (l. 1924), seorang pengarang yang dengan setia mendukung Sukarno dan Manipol-USDEK-nya. Para cendekiawan tersebut memberikan semacam legitimasi bagi tindakan Sukarno ke arah keortodoksan dan penindasan terhadap lawan-lawannya. Pada bulan Maret 1962, Sukarno mengangkat Aidit dan Nyoto sebagai menteri-menteri penasihat tanpa *portofolio*. Akan tetapi, tindakan ini masih berarti bahwa mereka tinggal di luar kabinet

inti dan berpotensi memberikan kesulitan bagi mereka, karena dengan kedudukan itu maka mereka bertanggung jawab untuk kegiatan pemerintah namun tidak mempunyai kekuasaan. PKI tidak semakin mendekati kekuasaan; partai ini hanya semakin kelihatan dan dibenci oleh musuh-musuhnya.

Ketika perekonomian terperosok ke dalam hiper-inflasi yang permanen (yang masih tetap di sekitar 100% per tahun mulai akhir tahun 1961 sampai tahun 1964) dan bangsa Indonesia hanyut ke dalam radikalisme, dan ketika pihak militer menjadi semakin tergantung kepada Uni Soviet dan PKI berkembang dengan pesat, maka Amerika Serikat menjadi semakin cemas akan kehilangan pengaruhnya di Indonesia. Dalam semacam pengulangan diplomasi Revolusi, pihak Amerika kini mendesak supaya negeri Belanda merundingkan soal penyelesaian masalah Papua. Mulai saat itu, pihak Belanda menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk mempertahankan kedaulatan atas Papua kemungkinan mahal dan mengakibatkan terjadinya perang di hutan belantara yang berlarut-larut. Pendudukan Goa dan dua daerah kantong Portugis lainnya di India oleh Nehru secara militer pada bulan Desember 1961 setelah gagalnya berbagai perundingan sangat mengesankan Belanda, walaupun tentu saja Papua merupakan masalah militer yang jauh lebih besar. Pada bulan Januari 1962, pihak Belanda menyatakan bahwa mereka bersedia berunding. Pada bulan Februari, Presiden Kennedy mengutus adiknya, Jaksa Agung Robert F. Kennedy, ke Indonesia dan ke negeri Belanda untuk bertindak sebagai penengah. Rangkaian perundingan yang pertama ini mengalami jalan buntu pada bulan Maret dan jumlah orang Indonesia yang menyusup ke Papua meningkat. Akan tetapi, perundingan-perundingan baru digelar lagi yang ditengahi oleh pihak Amerika.

Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah suatu penyelesaian atas masalah Papua. Pihak Belanda sepakat menyerahkan wilayah itu pada tanggal 1 Oktober 1962 kepada suatu pemerintah sementara PBB yang selanjutnya akan menyerahkannya kepada pihak Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Sebelum akhir tahun 1969, Jakarta akan menyelenggarakan pemilihan yang bebas di Papua untuk menyelidiki apakah penduduknya menghendaki tetap menjadi bagian dari Indonesia ataukah tidak. Segera terjadi eksodus warga Belanda dari Papua.

Kemenangan Papua itu mengawali suatu masa yang paling tidak menentu dari demokrasi terpimpin, suatu masa yang mendorong bangsa Indonesia ke arah kekacauan, karena upaya memulihkan stabilitas tampaknya kurang menarik. Pihak militer takut bahwa undang-undang darurat perang akan dicabut dan anggaran belanja militer dikurangi; PKI takut bahwa politik yang kurang radikal akan merintangi perkembangannya; Sukarno takut bahwa semangat rakyat yang berkobar-kobar selama kampanye Papua berlangsung akan padam sehingga menghambat usahanya untuk kembali ke semangat yang revolusioner. Dengan demikian, terdapat ambivalensi yang sangat besar mengenai masa depan Indonesia.

Kini Amerika Serikat berusaha menarik Indonesia keluar dari arah yang menuju ke kiri. Setelah mencapai keberhasilan dalam masalah Papua, Amerika mendapat banyak muhibah dari kalangan elite yang nonkomunis, tetapi dapat dipahami apabila PKI menyebut Amerika Serikat sebagai musuh bangsa Indonesia yang paling berbahaya. Pada bulan November 1962, suatu tim Dana Moneter Internasional berkunjung ke Jakarta guna membahas usaha-usaha perbaikan perekonomian. Seandainya PKI memegang kekuasaan, tidak mungkin diperoleh bantuan dari sumber-sumber Amerika sehingga, pada awal tahun 1963, Sukarno memberi tahu PKI bahwa bukan waktunya bagi mereka untuk menuntut kedudukan-kedudukan yang penting di dalam kabinet. Setelah melewati banyak penyelidikan dan perundingan, maka pada bulan Mei 1963 pemerintah Indonesia mengumumkan diambilnya langkah-langkah penting yang baru. Pada tanggal 1 bulan itu, undang-undang darurat perang dicabut. Pada tanggal 26 Mei diumumkanlah tentang pengurangan-pengurangan secara drastis terhadap anggaran belanja (termasuk belanja militer), pengawasan yang ketat terhadap kredit, kenaikan harga, pelaksanaan suatu devaluasi *de facto,* dan peningkatan dua kali lipat gaji pegawai negeri. Langkah-langkah ini dilakukan demi didapatkannya bantuan dari Amerika dan Dana Moneter Internasional. Masyarakat konsumen di perkotaan dan para pengusaha kecil terkena dampaknya yang paling buruk dan terjadilah banyak protes rakyat.

Akan tetapi, muncul lagi masalah kebijakan luar negeri yang baru. Selama tahun 1961, Malaya, Singapura, dan Inggris mengupayakan suatu penyelesaian terhadap beberapa masalah bersama:

keinginan Singapura untuk merdeka, kecemasan Malaya terhadap jumlah penduduk minoritas Cina yang besar dan implikasi-implikasi rasial seandainya Malaya digabungkan dengan Singapura, serta keinginan Inggris untuk menetapkan masa depan wilayah-wilayahnya di Kalimantan (Sabah, Brunai, dan Sarawak). Tampaknya, cara pemecahan yang akan dipakai ialah penggabungan semua wilayah tersebut menjadi Federasi Malaysia yang baru.

Jakarta merasa tidak senang sama sekali. Hubungan Indonesia dengan Malaya bersifat ambivalen sejak kemerdekaan Malaya pada tahun 1957. Banyak pemimpin Indonesia menganggap bahwa Malaya tidak benar-benar merdeka karena tidak terjadi satu revolusi di sana, dan merasa curiga dengan tetap hadirnya Inggris di sana, merasa iri terhadap keberhasilan Malaya di bidang ekonomi, dan merasa sangat tersingggung karena Malaya dan Singapura membantu PRRI. Kini tampak seakan-akan Malaysia akan menjadi negara neokolonial, karena tetap adanya pangkalan-pangkalan Inggris di sana, dan membuka peluang bagi komunitas Cina yang dinamis dari Singapura untuk mendominasi negara baru itu. Ini, menurut anggapan beberapa orang Indonesia, akan meningkatkan pengaruh orang-orang Cina dan perkembangan komunisme di kawasan itu.

Wilayah-wilayah Kalimantan tidak bersemangat atas usulan-usulan Malaysia itu. Oposisi yang paling kuat timbul di Brunai. Pada bulan Desember 1962, Syekh A.M. Azahari, pemimpin Partai Ra'ayat Brunai, melancarkan suatu pemberontakan, yang tidak berlangsung lama, menentang pembentukan federasi dan memilih sebuah negara merdeka Kalimantan Utara. Dia telah berada di Indonesia pada waktu Revolusi dan terus menjalin hubungan dengan Nasution, yang bersimpati terhadap cita-cita Azahari. Akan tetapi, hubungan dengan pihak pemberontak Brunai tersebut segera dimonopoli oleh Badan Pusat Intelijen Indonesia yang dipimpin oleh Subandrio. Pada bulan Januari 1963, Sukarno menyatakan bahwa usulan Malaysia itu tidak dapat diterima oleh Indonesia, dan Subandrio menegaskan sikap Indonesia sebagai sikap 'konfrontasi'.

Keinginan pihak Amerika untuk memulihkan hubungan dengan Jakarta sama besarnya dengan perasaan tanggung jawabnya kepada Inggris dan Malaysia. Sukarno dan banyak pemimpin lainnya di Indonesia menginginkan bantuan Amerika dan menentang



Malaysia pada waktu yang bersamaan. Selama beberapa bulan ditempuh upaya-upaya untuk merujukkan kepentingan-kepentingan tersebut. Pemerintahan Presiden Diosdado Macapagal dari Filipina semakin mempersulit masalah dengan mengajukan klaim terhadap Sabah atas dasar kaitan sejarahnya dengan kesultanan Sulu. Pada bulan Mei–Agustus 1963 diselenggarakanlah pertemuan-pertemuan tingkat menteri Indonesia–Malaya–Filipina dan konferensi-konferensi tingkat puncak antara Sukarno, Macapagal, dan Tunku Abdul Rahman dari Malaya. Untuk sementara, yang dibicarakan adalah pembentukan suatu konfederasi yang longgar antara ketiga negara tersebut yang dinamakan 'Maphilindo'. Tampaknya ada kemungkinan tercapai kompromi pada bulan Agustus ketika Malaya sepakat untuk mengadakan penyelidikan terhadap pendapat umum di Sarawak dan Sabah sebelum dibentuknya federasi (pada bulan Juli, Brunai, negara yang sangat kaya akan minyak, sudah menyatakan akan tetap di luar Malaysia). Tampak seakan-akan Sukarno dan Subandrio bersedia mengompromikan antikolonialisme mereka demi stabilnya perekonomian.

Cina sangat menentang Malaysia. Keterlibatan Amerika di Vietnam Selatan meningkat pesat dan Cina tidak menyukai kemungkinan adanya satu negara lagi yang pro-Barat di sebelah selatannya setelah Muangthai, Vietnam Selatan, Filipina, dan Taiwan. PKI sangat khawatir akan berpalingnya kiblat Indonesia ke Amerika Serikat. Perpecahan Cina–Soviet kini sudah sangat sulit untuk dirujukkan kembali dan Uni Soviet nyata-nyata telah memanfaatkan perang Papua lebih untuk meningkatkan pengaruhnya terhadap pemerintah dan militer Indonesia daripada untuk mendukung PKI. Ketika Uni Soviet menandatangani perjanjian larangan percobaan senjata nuklir pada bulan Agustus 1963, Cina khawatir bahwa Soviet siap berkomplot dengan Amerika untuk mengendalikannya. Oleh karena itulah maka Cina dan PKI mengharapkan suatu kebijakan anti-Malaysia yang radikal yang mungkin akan menggagalkan pembentukan Malaysia dan mungkin membuat tentara Inggris tak dapat bergerak dari sana, sambil merusak rencana stabilisasi ekonomi dan pengaruh Amerika di Jakarta. Akan tetapi, mereka tidak menginginkan perkembangan pesat pihak militer Indonesia yang mendapat dukungan dan peralatan dari Uni Soviet.

Dengan demikian, terjadilah persaingan kepentingan segi tiga yang sangat berbahaya antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan

Cina di tingkat internasional; sedangkan persaingan lainnya adalah antara Sukarno, militer, dan PKI di tingkat dalam negeri. Langkah pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan persaingan-persaingan tersebut terjadi pada bulan September 1963.

Sebelum hasil-hasil uji coba pendapat umum di Sarawak dan Sabah dilaporkan, diumumkan bahwa Malaysia akan terbentuk pada tanggal 16 September 1963. Ini tampaknya merupakan penghinaan besar bagi Indonesia, yang para pemimpinnya tidak mempertimbangkan bahwa tindakan mereka menyoal Malaysia telah dipandang sama dengan kelancangan yang lebih besar di seberang Selat Malaka itu. PKI membawa para anggotanya turun ke jalan-jalan dalam demonstrasi besar-besaran menentang Malaysia. Kedutaan besar Inggris dan sebanyak 21 rumah stafnya di Jakarta dibakar habis. Kedutaan besar Malaya diserang; sebagai balasan, kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur juga mendapat serangan. Pada tanggal 17 September, Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dan, dalam waktu empat hari, Indonesia memutuskan semua hubungan dengan Malaya dan Singapura, yang menyangkut hampir separo dari ekspor Indonesia. Pada tanggal 25 September, Sukarno mengumumkan bahwa dia akan "ganyang Malaysia". Amerika Serikat melepaskan harapannya untuk tetap bersahabat dengan Malaysia maupun Indonesia pada saat yang sama, dan rencana perbaikan perekonomiannya di Indonesia pun mengalami kegagalan. Cina dan Uni Soviet sama-sama memuji kebijakan Sukarno.

Kini konfrontasi muncul sebagai masalah pokok pada masa itu. Sukarno dapat menumbuhkan kembali semangat revolusioner, pihak militer dapat mengharapkan kenaikan anggarannya, dan PKI dapat mengambil kendali dalam menghasut rakyat. Indonesia segera beralih ke orbit diplomatik yang anti-Amerika, tetapi kejadian-kejadian di dalam negerilah yang menjadi paling dramatis.

Sukarno merasa khawatir bahwa perang Malaysia mungkin akan menjadi sarana bagi Nasution dan pihak militer untuk mendominasi jalannya kejadian. Dia memperkuat kedudukan Yani dalam ketentaraan dengan mengadakan perombakan terhadap Komando Operasi Tertinggi (KOTI) pada bulan Juli 1963. Yani tetap menjadi kepala stafnya, tetapi Nasution tidak lagi menjadi wakil panglima. Dua dari kelima seksinya dikuasai oleh pihak tentara, tetapi peranan intelijennya kini ditempatkan di

bawah Subandrio, operasi-operasi ditempatkan di bawah seorang perwira angkatan udara, dan mobilisasi ditempatkan di bawah seorang sipil. Pada bulan Mei 1963, yaitu pada akhir perang Papua, Soeharto telah diberi kedudukan baru yang akan menentukan nanti, yaitu ketika dia ditunjuk untuk memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), yang meliputi satuan-satuan udara, infantri, unit-unit lapis baja dan artileri. Kini Soeharto mendapatkan reputasi sebagai seorang pemimpin tentara yang cakap dan—agak kurang akurat—orang sederhana yang tidak melakukan korupsi yang berlebih-lebihan yang dilakukan oleh jenderal-jenderal tingkat atas lainnya.

PKI-lah yang menempuh langkah-langkah yang paling dramatis untuk merebut prakarsa. Karena adanya banyak pengaruh, hubungan, dan intrik di dalam negeri maupun di kancah internasional yang melingkupi urusan-urusan Indonesia pada masa itu, maka motivasi yang tepat dari ketegasan PKI yang baru tidaklah jelas. Apa pun kombinasi alasannya, kepemimpinan Aidit berusaha menerobos kendala-kendala domestiknya. Pada akhir bulan September 1963, Aidit kembali dari perjalanan kunjungannya yang lama ke Uni Soviet dan Cina. Saat kembali, untuk pertama kalinya dia secara tegas menyekutukan PKI dengan Cina dalam menghadapi Uni Soviet. Kemungkinan Aidit telah menerima nasihat pihak Cina supaya meningkatkan ofensif politik di dalam negeri. Akan tetapi, dia juga mempunyai alasan sendiri untuk merasa yakin bahwa hanya kampanye anti-Malaysialah yang menghindarkan Indonesia untuk berkiblat ke Amerika Serikat. Kemungkinan adanya gerakan anti-PKI di dalam negeri sudah jelas. Dengan demikian, PKI berusaha mendesak untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar, karena pada masa itu tampaknya ofensiflah yang merupakan cara bertahan yang terbaik.

Akan tetapi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi PKI segera menjadi jelas. Cina segera merasa yakin akan pengaruhnya di Jakarta pada tingkat pemerintah-pemerintah, sehingga dukungannya kepada kebijakan-kebijakan pedesaan PKI mungkin dikuranginya. Uni Soviet mengharapkan tentara Indonesia dan kelompok-kelompok kiri yang anti-PKI sebagai sekutu. Amerika hampir pasti terlibat dalam usaha rahasia untuk mengobarkan semangat antikomunis. Dan, yang terpenting, aksi-aksi PKI

menyempurnakan pengucilan banyak pendukung PNI serta mendorong NU dan beberapa perwira militer yang penting ke arah oposisi yang aktif di Jawa. Dengan demikian, strategi Front Persatuan Nasional terancam oleh PKI sendiri. Basis massanya yang kurang cukup diatur itu tidak cukup kuat untuk menghadapi kombinasi keadaan semacam itu, walaupun pada waktu itu banyak pengamat di Indonesia dan di luar negeri percaya bahwa PKI sedang berada di ambang kekuasaan dengan Sukarno sebagai pelindungnya.

Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan kampanye 'aksi sepihak' guna memberlakukan undang-undang *land reform* dari tahun 1959–60, yang pelaksanaannya hampir belum pernah terwujud. Ketika para penduduk desa anggota PKI mulai merampas tanah—terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi juga di Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Utara—mereka terlibat dalam pertentangan yang sengit dengan para tuan tanah (yang kebanyakan adalah kaum muslim yang taat atau para pendukung PNI), kaum birokrat, para pengelola yang berasal dari kalangan tentara, dan, khususnya di Jawa Timur, dengan para santri pendukung NU. Keributan-keributan, pembakaran-pembakaran, penculikan-penculikan, dan pembunuhan-pembunuhan banyak terjadi, yang sebagian berbentuk kekerasan komunal, yaitu benturan kaum abangan pendukung PKI dengan para santri. Tindak kekerasan anti-PKI di Jawa Timur dipelopori oleh kelompok pemuda NU, Ansor. Dalam beberapa hal, PKI kini sedang menghidupkan kembali kebijakan-kebijakan pedesaan yang tegas seperti yang telah dilakukan saat kembalinya Musso pada bulan Agustus 1948, tetapi dengan perbedaan yang penting bahwa partai ini sekarang tidak memiliki kekuatan militer. Mungkin, kepemimpinan Aidit terkecoh oleh jumlah anggota komunis dan kebaikan hati Sukarno, sebagaimana halnya musuh-musuh PKI sampai merasa yakin bahwa PKI telah cukup kuat untuk menghadapi lawan-lawannya.

Dengan meninggalnya Djuanda pada bulan November 1963, tidak ada lagi wakil moderat yang disegani di dalam kabinet. Tiga serangkai *(triumvirate)* Subandrio, Chaerul Saleh, dan Leimena selanjutnya mengambil alih kepemimpinan dengan Subandrio sebagai tokoh yang semakin dominan. Dia kini mulai bertindak sebagai sekutu PKI, kemungkinan besar karena dia ingin me-

mantapkan kedudukannya sendiri sebagai satu-satunya pengganti Sukarno dan sadar bahwa pihak militer tidak akan bersedia mendukungnya. Sebaliknya, pimpinan PKI merasa wajib menutupi perasaan tidak sukanya terhadap Subandrio. PKI semakin menuntut *retooling* (perombakan) secara besar-besaran terhadap para pejabat pemerintah yang anti-PKI.

Pada tanggal 17 Agustus 1963, sekelompok cendekiawan yang menentang Lekra memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (Manikebu) yang, walaupun mendukung Pancasila, tidak mau mendukung Manipol-USDEK atau Nasakom dan menghendaki suatu kebudayaan nasional yang tidak didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu. Kritikus sastra terkenal, H.B. Jassin (1917–2000), adalah salah seorang pencetus Manikebu. PKI dan Lekra dengan dukungan front cendekiawan PNI (LKN) secara keras mengecam Manikebu sebagai suatu penyimpangan yang bersifat borjuis, tidak revolusioner, dan "humanis universal". Sukarno menyepakatinya. Pada tanggal 8 Mei 1964, dia melarang Manikebu atas dasar bahwa Indonesia hanya punya tempat untuk satu manifesto saja, yaitu Manipol. Kini PKI dan kaum pelajar pendukungnya bahkan semakin aktif memburu kaum cendekiawan lawan-lawannya atas nama *retooling*. Segera sesudah itu, Jassin dipecat dari jabatannya sebagai dosen di Universitas Indonesia di Jakarta.

Harapan Amerika untuk menghentikan pembelokan ke kiri di Indonesia sia-sia saja. Komitmen Amerika di Vietnam Selatan semakin bertambah berat dan sulit, terutama setelah terjadinya krisis kaum Buddha pada tahun 1963 serta tergulingnya dan terbunuhnya Ngo Dinh Diem pada bulan November, dan Amerika merasa cemas akan kemungkinan Indonesia menjadi sebuah negara komunis atau prokomunis. Pada bulan Januari 1964, Robert F. Kennedy mengatur gencatan senjata Malaysia–Indonesia. Akan tetapi, ketika dia masih berusaha mewujudkannya, para buruh PKI mulai mengambil alih perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan milik Inggris. Lagi-lagi pihak tentara turun tangan memimpin perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya dilakukan upaya-upaya lebih lanjut dalam rangka perundingan-perundingan Malaysia–Indonesia–Filipina, tetapi menemui jalan buntu pada bulan Maret. Pada bulan yang sama, Sukarno menyatakan bahwa Amerika boleh *go to hell* (pergi ke neraka) dengan bantuannya. Pengaruh Amerika

yang resmi di Jakarta kini benar-benar hilang. Suatu pertemuan terakhir antara Sukarno, Abdul Rahman, dan Macapagal di Tokyo pada bulan Juni mengalami kegagalan total.

Sementara itu, perang perbatasan Indonesia–Malaysia secara kecil-kecilan di hutan-hutan Kalimantan dimenangkan oleh pasukan-pasukan Malaysia dan Inggris. Tentara Indonesia enggan melibatkan terlalu banyak pasukan di Kalimantan karena semakin besar kemungkinan terjadinya krisis di dalam negeri. Pada bulan Mei 1964, Sukarno menugaskan Marsekal Udara Omar Dhani memimpin Komando Siaga (Koga) untuk melanjutkan konfrontasi dengan Malaysia. Pihak angkatan darat merasa cemas bahwa kini angkatan udara akan menguasai kampanye itu. Pada bulan Agustus dan September 1964, Indonesia melancarkan serangan kecil-kecilan ke Semenanjung Malaysia Barat, yang tampaknya tanpa seizin Yani. Dalam pada itu, PKI memelopori pemobilisasian dukungan rakyat bagi konfrontasi tersebut dan, pada bulan Maret 1964, para ketua komite-komite Front Nasional di semua tingkatan pemerintahan, yang kebanyakan adalah anggota PKI, diberi suara dalam masalah-masalah pemerintahan. Ketidakstabilan di dalam negeri semakin meningkat karena panen padi yang buruk pada bulan Februari dan meningkatnya inflasi yang mencapai 134% pada tahun 1964.

Karena merasa cemas terhadap arah kejadian-kejadian yang meningkat, pimpinan angkatan darat mulai menghalangi konfrontasi dan mengadakan hubungan rahasia dengan Malaysia. Pada bulan Juni, Yani mendesak Sukarno supaya membatasi wewenang Koga hanya pada tindakan balasan seandainya Inggris melakukan serangan. Pada bulan Oktober, pihak angkatan darat berhasil mengubah struktur komando Koga. Omar Dhani masih tetap memegang komando, tetapi wewenangnya hanya berlaku di Sumatera dan Kalimantan, sementara satuan-satuan tentara yang diperuntukkan bagi kampanye Malaysia dipindahkan dulu ke Kostrad di bawah komando Soeharto, yang menjaga supaya banyak pasukan terbaik tetap tersedia untuk beraksi di Jawa.

Pada akhir tahun 1964, tindak kekerasan yang melingkupi kampanye "aksi sepihak" PKI telah menempatkan PKI pada posisi defensif di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dan pimpinan PKI tampaknya akan kehilangan kendali atas kader-kadernya di tingkat-tingkat yang lebih rendah. Lawan-lawannya mulai

menyimpulkan bahwa PKI tidak sekuat yang dinyatakan oleh PKI sendiri dan Sukarno. Pada waktu itu, mulai terjadi suatu ledakan di dalam negeri, tetapi komplotan-komplotan yang berada di balik peristiwa itu tentu saja tidak jelas sama sekali. Pada tingkatan-tingkatan yang masih belum jelas, suatu kelompok militer yang anggota-anggota terpentingnya adalah para perwira intelijen tampaknya menjalin hubungan dengan para pemimpin NU serta para pemimpin Islam lainnya, dan mungkin dengan kaum radikal yang anti-PKI, pihak-pihak antikomunis lainnya, dan badan-badan intelijen Barat. Dari sinilah timbul persekongkolan-persekongkolan yang terutama ditujukan untuk melawan PKI, Subandrio, Sukarno, dan para perwira militer yang tampaknya tidak mampu atau tidak mau menentang mereka bertiga itu sebagai akibat keyakinan ideologi atau karena mereka menganggap korupsi yang sedang berlangsung itu sangat menguntungkan. Di dekat pusat komplotan-komplotan tersebut terdapat suatu organisasi intelijen angkatan darat yang terkenal dengan nama Opsus (Operasi Khusus) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ali Moertopo (1924–84) di bawah bimbingan Soeharto, orang yang oleh Yani diberi tanggung jawab untuk menjalin hubungan rahasia angkatan darat dengan Malaysia. Komplotan-komplotan lain sangat banyak jumlahnya, dan banyak di antaranya tidak dapat bertahan lama. Di kalangan militer, tumbuh rasa tidak puas terhadap tindak korupsi yang berlebih-lebihan yang dilakukan oleh beberapa jenderal di Jakarta. Pada saat itu, beberapa perwira intelijen mempunyai hubungan yang erat dengan agen bawah tanah PKI, Sjam; hubungan mereka dengan jaringan-jaringan intelijen anti-PKI tidak diketahui.

Uni Soviet tampaknya berusaha meningkatkan pengaruhnya terhadap pihak militer dan partai Murba pada tahun 1964 dalam usaha untuk mengurangi komitmen Sukarno dan PKI kepada Cina. Walaupun Rusia merupakan salah satu sumber utama bantuan ekonomi dan militer bagi Indonesia, tetapi mereka tidak mempunyai banyak pendukung erat di kalangan militer maupun pemerintahan. Di antara para perwira angkatan darat yang menjalani latihan di luar negeri, sebagian besar (kira-kira 4.000 orang selama tahun 1958–65) dikirim ke Amerika Serikat, walaupun harus dikatakan bahwa banyak dari mereka itu kecewa setelah melihat sendiri kehidupan Amerika, terutama rasialisme dan per-

mukiman-permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Beberapa perwira angkatan udara dan angkatan laut mendapatkan latihan teknis di Uni Soviet, tetapi mereka ini pun sering kali merasakan bahwa kehidupan sehari-hari di sana tidak menarik. Bagaimanapun juga, beberapa pemimpin Murba mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak Rusia. Hal ini benar sekali untuk Adam Malik, yang pernah menjadi duta besar untuk Moskow pada tahun 1959.

Pada bulan September 1964, sekelompok wartawan anti-PKI yang dipimpin oleh Adam Malik membentuk Badan Pendukung (atau Penyebar) Sukarnoisme. Chaerul Saleh dan Yani mendukung badan ini dalam usaha memisahkan Sukarno dari PKI. Sukarno mengetahui tujuan itu dan melarang organisasi tersebut pada tanggal 17 Desember 1964; ia kemudian menyatakan bahwa organisasi itu merupakan suatu komplotan yang dibentuk oleh Badan Intelijen Pusat (Central Intelligence Agency, CIA) Amerika Serikat. Selanjutnya pihak angkatan darat mengambil langkah-langkah lain untuk mengoordinasikan sekutu-sekutunya. Pada bulan Oktober 1964, mereka membentuk suatu badan yang dinamakan Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya). Badan-badan kerja sama militer-sipil dan beberapa organisasi yang pernah berafiliasi ke organisasi terlarang PSI dan Masyumi ikut bergabung. Akan tetapi, angkatan darat belum berada dalam posisi untuk mengambil tindakan yang positif.

Pada saat itu, persatuan di kalangan militer sendiri diragukan. Hal ini membuat PKI jadi berani dan sekaligus memaksa para perwira yang anti-PKI untuk segera bertindak. Angkatan udara sudah dekat dengan PKI dan Sukarno serta menentang angkatan darat. Angkatan laut cenderung memihak angkatan darat, tetapi kesetiaan dari beberapa perwira mudanya tidak jelas. Pada bulan Maret 1965, suatu pemberontakan yang dilancarkan oleh para perwira angkatan laut yang "progresif" (antara lain seorang putra Leimena) di Surabaya berakhir dengan pemindahan atau pemecatan terhadap 145 orang perwira. Pimpinan tertinggi angkatan darat terpecah sedikitnya menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang mengikuti Yani dan mereka yang mengikuti Nasution. Keduanya anti-PKI, tetapi Yani merasakan bahwa Sukarno terlalu menarik dan bahwa kehidupan tingkat atas Jakarta terlalu nikmat bagi beberapa orang perwira. Soeharto ada di antara para perwira senior yang berusaha mencegah agar

kelompok-kelompok di dalam tubuh angkatan darat tersebut tidak menjadi bermusuhan secara terang-terangan.

Bahkan yang lebih berbahaya lagi, PKI telah menyusup ke dalam tubuh angkatan darat, terutama ke dalam Divisi Diponegoro di Jawa Tengah dan Divisi Brawijaya di Jawa Timur. Menurut kesaksian Sjam di kemudian hari, pada bulan November 1964, PKI membentuk Biro Khusus di bawah pimpinannya guna mengoordinasikan penyusupan ke dalam tubuh angkatan bersenjata. Pada pertengahan tahun 1965, sekali lagi menurut Sjam, PKI mempunyai hubungan tetap dengan sekitar 450 orang perwira yang bersimpati kepada PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta sekitar 200–250 orang perwira di daerah-daerah lainnya. Seberapa jauh hal ini diketahui oleh para perwira yang anti-PKI pada saat itu tidaklah jelas, tetapi tidak diragukan lagi bahwa pihak angkatan darat juga melakukan usaha untuk menyusup ke dalam tubuh PKI. Kerumitan-kerumitan dan kemungkinan-kemungkinan persekongkolan selama kurun waktu itu ditunjukkan oleh fakta bahwa pimpinan intelijen angkatan darat, Mayor Jenderal S. Parman (1918–65), adalah adik anggota Politbiro PKI, Sakirman (1911–67?).

Ketika perasaan anti-Amerika di kalangan rakyat mencapai taraf yang menggelora pada akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965, sebagian sebagai reaksi atas meningkatnya dengan cepat perang Amerika di Vietnam, Cina memulai suatu serangan diplomatik di Jakarta yang masih tetap diselubungi oleh suatu tabir rahasia. Pada tanggal 16 Oktober 1964, Cina meledakkan bom nuklirnya yang pertama. Kejadian ini bertepatan dengan jatuhnya Khrushchev secara tiba-tiba dari puncak kekuasaan Uni Soviet, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai sasaran-sasaran kebijakan luar negeri pimpinan baru Rusia. Tiga minggu kemudian, Sukarno bertemu dengan Zhou Enlai di Shanghai untuk mengadakan pembicaraan rahasia. Pada pertengahan bulan November, kepala gudang senjata angkatan darat RI mengatakan bahwa Indonesia juga akan memiliki bom nuklir pada tahun 1965. Pada akhir bulan November, Menteri Luar Negeri Cina Chen Yi (Ch'en Yi) berkunjung ke Jakarta dan diumumkan bahwa Cina dan Indonesia akan bekerja sama dalam masalah-masalah kebijakan luar negeri; laporan-laporan juga menyebutkan bahwa telah dijanjikan akan adanya latihan dalam teknologi

nuklir di Cina. Setelah itu muncul pernyataan-pernyataan lebih lanjut mengenai peledakan nuklir Indonesia di kemudian hari.

Beberapa pengamat percaya bahwa Cina, yang semakin yakin terhadap kerja sama pemerintah Indonesia, menawarkan untuk meledakkan suatu bom nuklir di wilayah Indonesia dan membiarkan Indonesia menyatakan bahwa bom itu adalah bikinan Indonesia demi mengurangi permusuhan angkatan darat dan melemahkan pengaruh Soviet. Pihak Cina tidak dapat menandingi bantuan Soviet dalam bentuk senjata-senjata konvensional, tetapi mungkin mereka berharap dapat memanfaatkan keadaan yang tidak menentu yang menyelubungi pimpinan Soviet yang baru. Pada bulan Maret 1964, Cina juga telah menawarkan pengalihan aset Bank Cina di Jakarta kepada pemerintah Indonesia, dan pelaksanaannya terjadi pada bulan November. Tindakan tersebut masih belum benar-benar jelas. Diyakini bahwa bank tersebut merupakan sumber utama bantuan keuangan Cina terhadap PKI. Bahwa kejadian ini merupakan langkah lebih lanjut dalam persekutuan Jakarta–Beijing adalah jelas. Yang tidak jelas ialah apakah langkah itu dimaksudkan untuk memberi kekuatan kepada pemerintah Indonesia untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan pedesaan PKI yang bersifat avonturisme sebelum mereka mengancam perimbangan politik yang pada saat itu tampaknya akan dimanfaatkan oleh Cina dengan sukses, ataukah tidak.

Pada bulan Desember 1964, PKI sudah mulai berusaha meredakan "aksi sepihak"-nya, yang menunjukkan bahwa jumlah anggotanya yang sangat besar tidak dapat dikendalikan secara baik dan juga tidak dapat digunakan sebagai landasan melakukan aksi revolusioner yang positif. Dalam waktu beberapa bulan berikutnya, para aktivis front taninya (BTI) berhasil dikendalikan, tetapi NU terus melakukan serangan balasan di Jawa Timur dengan dukungan para pengikut PNI setempat. Namun, pembunuhan-pembunuhan masih terus berlangsung dalam skala yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan apa yang akan terjadi nanti pada akhir tahun 1965 dan 1966. PKI terus melancarkan perang mulut terhadap para "kapitalis birokrat" angkatan darat dan golongan-golongan lain yang memerlukan "pengaturan kembali" *(retooling)* dan, seperti halnya pemerintah Cina, mulai mengalihkan perhatiannya lagi untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi di Jakarta daripada di wilayah pedesaan. Partai

ini sekarang lebih menyerupai seseorang yang kehilangan keseimbangan saat berjalan di atas seutas tali yang berusaha menyelesaikan beberapa langkah terakhirnya.

Persekutuan Jakarta dengan Beijing diresmikan pada bulan Januari 1965, ketika Indonesia keluar dari PBB setelah Malaysia diberi kedudukan sebagai anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan. Hal ini semakin meningkatkan pengucilan diplomatik Indonesia dari negara-negara Asia-Afrika lainnya. Kemudian Subandrio mengadakan kunjungan ke Cina untuk memperkokoh persahabatan itu. Dalam pemeriksaan pengadilan terhadap dirinya di kemudian hari, dia mengatakan bahwa Zhou Enlai menawarkan persenjataan untuk mempersenjatai milisi rakyat, satu-satunya bentuk kekuatan militer yang mungkin dapat diorganisasi oleh PKI. Saat itu, Aidit mengusulkan kepada Sukarno untuk membentuk "angkatan kelima", yang terdiri atas kaum buruh dan tani yang dipersenjatai, untuk ditambahkan pada angkatan laut, angkatan darat, angkatan kepolisian, dan angkatan udara yang sudah ada, serta diangkatnya para penasihat Nasakom (yaitu kader-kader PKI) pada satuan-satuan kekuatan bersenjata yang ada. Usulan-usulan tersebut secara langsung mengancam angkatan darat. Subandrio tampaknya juga mengancam pihak militer ketika, pada bulan Januari, dia mengatakan bahwa beberapa mantan kawan seperjuangannya telah menjadi kaum kontra revolusioner dan mungkin harus disingkirkan.

Pada bulan Januari 1965, posisi PKI di Jakarta tampak semakin kuat ketika Sukarno melarang partai Murba. Ini menjadi bukti bagi orang-orang yang berpendapat bahwa Sukarno benar-benar menginginkan PKI memegang kekuasaan, karena para pemimpin Murba seperti Adam Malik telah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap Sukarno, seperti halnya juga Chaerul Saleh yang, walaupun nonpartai, dianggap sebagai orang Murba. Murba sudah sejak lama menentang PKI dalam memperebutkan kepemimpinan golongan kiri, dan tampaknya juga mendapat dukungan dari Uni Soviet. Kini PKI meningkatkan tuntutannya bagi *retooling* Malik dan Chaerul Saleh. Mereka kehilangan sedikit-banyak kekuasaan dalam perubahan susunan kabinet pada bulan Maret, tetapi masih tetap duduk dalam pemetintahan.

Pada akhir bulan Februari, 21 surat kabar di Jakarta dan Medan yang menentang PKI dilarang terbit. Angkatan darat bereaksi dengan mulai menerbitkan surat kabar sendiri. Pada bulan yang sama, ketika perasaan-perasaan anti-Amerika masih terus memuncak sebagai reaksi atas pengeboman-pengeboman terhadap Vietnam Utara, serikat-serikat sekerja PKI dan kelompok sayap kiri lainnya menyita perusahaan-perusahaan Amerika. Pihak angkatan darat mengambil alih pengelolaannya. Stanvac, Caltex, dan Shell ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah pada bulan Maret dan perusahaan-perusahaan tersebut merasa semakin sulit untuk melanjutkan operasi-operasi yang normal. Kini perekonomian di ambang kekacauan. Pada bulan April, *Peace Corps* (Korps Damai) Amerika diusir, tetapi pembicaraan-pembicaraan dengan Amerika Serikat dan sumber-sumber bantuan ekonomi yang potensial lainnya tampaknya terus berlangsung. Bahkan di saat perasaan-perasaan anti-Barat mencapai puncaknya, mitra-mitra dagang Indonesia yang utama masih tetap Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman Barat.

Delegasi-delegasi Cina berkali-kali berkunjung ke Jakarta. Pada bulan April 1965, Zhou Enlai sendiri yang datang. Pihak Cina secara terang-terangan mendesak supaya dibentuk "angkatan kelima", tetapi pihak angkatan darat bergerak lamban. Apalagi Sukarno tidak memerintahkan pembentukan "angkatan kelima" itu, yang merupakan bukti kepada orang-orang yang berpendapat bahwa Presiden memang tidak bermaksud membantu PKI untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan hanya berusaha menekan pimpinan angkatan darat. Pada bulan Mei, atmosfir persekongkolan semakin bertambah panas dengan terbongkarnya rahasia sebuah telegram yang dikirim ke London oleh Duta Besar Inggris di Jakarta—apa yang disebut 'surat Gilchrist'—yang dalam pandangan Sukarno memperkuat adanya komplotan-komplotan angkatan darat–Inggris yang menentang pemerintahan.

Pada bulan Mei, Yani berbicara dengan Sukarno perihal 'nasakomisasi' angkatan darat. Tidak pernah jelas apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Sukarno mengenai arti 'nasakomisasi' ini. Pada kesempatan ini, dia menerima tafsiran pihak angkatan darat bahwa gagasan tersebut sama dengan semangat persatuan yang menghubungkan nasionalisme, agama, dan komunisme, bukan suatu struktur formal yang akan dapat memberi PKI

peranan dalam urusan-urusan angkatan darat. Segera sesudah itu, angkatan darat mengumumkan bahwa pihaknya sudah bersemangatkan Nasakom sehingga tidak ada lagi yang perlu dilakukan.

Akan tetapi, usulan-usulan tentang "angkatan kelima" tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tanggal 31 Mei 1965, Sukarno membicarakan tawaran Zhou untuk mempersenjatai rakyat dan memerintahkan agar keempat angkatan bersenjata mengajukan rencana-rencana bagi pelaksanaannya. Yani dan Nasution terus mengulur waktu dengan mengatakan bahwa seluruh rakyat sebaiknya dipersenjatai, bukan hanya kaum buruh dan kaum tani saja (istilah eufemisme yang umum bagi para pengikut PKI yang terorganisasi), dan bahwa "angkatan kelima" itu seyogyanya dikendalikan oleh angkatan darat. Pada bulan Juni, tampaknya angkatan laut akan mendukung gagasan tersebut. Angkatan kepolisian terpecah menjadi beberapa kelompok, tetapi sejumlah perwiranya (terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur) bersimpati kepada PKI. Pada bulan Juni, seorang perwira seperti itu diangkat menjadi panglima polisi di Jakarta. Akan tetapi, angkatan udara yang berada di bawah Omar Dhanilah yang bertindak dengan memberi substansi kepada "angkatan kelima". Pada tanggal 5 Juli, angkatan udara mulai memberikan kursus-kursus latihan singkat kepada orang-orang sipil dari organisasi-organisasi massa PKI di pangkalan angkatan udara Halim Perdanakusumah, di sebelah tenggara Jakarta. Sampai akhir bulan September, lebih dari 2.000 orang sipil telah mengikuti kursus-kursus tersebut.

Kemajuan yang tampak dari PKI menuju kekuasaan di Jakarta berlangsung terus. Pada awal bulan Agustus 1965, di bawah tekanan Sukarno, para pemimpin PNI yang tidak bersedia bekerja sama dengan PKI dan yang mempunyai teman-teman yang anti-PKI di kalangan angkatan darat disingkirkan. Hardi, Hadisubeno Sosrowerdojo (1912–71), dan sekitar 150 orang pimpinan PNI lainnya diberhentikan. Ini menyebabkan tinggal Ali Sastroamidjojo dan para pengikutnyalah, yang setidaktidaknya bersedia bermain-main dengan nasakomisasi, sebagai pemimpin PNI. Pada bulan yang sama, PKI mengumumkan jumlah anggotanya yang terakhir. Lebih dari 27 juta rakyat Indonesia dinyatakan sebagai anggota PKI atau organisasi-organisasi massanya. Dengan memperhitungkan adanya keanggotaan rangkap, mungkin anggota PKI dan organisasi-organisasinya

berjumlah sekitar 20 juta orang. Berapa banyak yang hanya nominal atau bahkan fiktif saja tidaklah jelas. Adalah sulit untuk menjumlah lebih dari sekitar seperempat anggotanya atas dasar jumlah yang di kemudian hari tewas, dijebloskan ke dalam penjara, dan dicabut hak suaranya dalam pemilihan umum tahun 1971 karena alasan-alasan politik, atau yang telah meninggal dunia secara wajar sebelum tahun 1971. Pengalaman sejarah perihal tindakan-tindakan terhadap radikalisme pedesaan di Jawa menunjukkan bahwa basis pedesaan PKI kemungkinan besar berkurang dan bukannya bertambah sejak tahun 1963.

Banyak yang tergantung pada Presiden, karena kebanyakan orang Indonesia sepakat dengan dia bahwa Indonesia tanpa Sukarno hampir tidak mungkin terpikirkan. Siapakah yang didukungnya, langkah revolusioner apakah yang akan dicanangkan berikutnya, siapakah yang dapat memengaruhinya? Sejak awal tahun 1965, sebuah masalah baru menjadi penting: siapakah yang akan menggantikan Sukarno? Dia sedang menderita sakit ginjal yang, menurut keyakinan beberapa orang, akan mengancam jiwanya, dan para peramal Indonesia semakin sering meramalkan keruntuhan ataupun kematian Sukarno. Pada minggu pertama bulan Agustus 1965, Sukarno mendadak muntah-muntah dan jatuh tidak sadarkan diri ketika sedang menerima suatu delegasi. Dia segera sembuh, tetapi persekongkolan menjadi semakin memuncak karena para pemimpin politik menarik kesan secara kuat akan kemungkinan kematian Presiden. Aidit bergegas kembali dari Cina dan, menurut bukti pemeriksaan pengadilan terhadapnya di kemudian hari, dia memutuskan untuk menyemangati suatu kelompok perwira angkatan darat yang "progresif" yang sedang bersiap-siap untuk bertindak terhadap pimpinan tertinggi angkatan darat. Kekuatan-kekuatan anti-PKI juga bersatu padu.

Pada bulan Agustus 1965, Sukarno menarik Indonesia dari hubungan-hubungan yang masih tersisa dengan dunia kapitalis (Dana Moneter Internasional/IMF, Interpol, Bank Dunia). Ketika Lee Kuan Yew dengan sedih mengumumkan pemisahan Singapura dari Malaysia pada tangal 9 Agustus, Sukarno menganggap kejadian ini sebagai sesuatu yang membuktikan benarnya konfrontasi. Akan tetapi, pemisahan Singapura itu juga menghilangkan sebagian besar dasar bagi perasaan cemas para pemimpin angkatan darat terhadap Malaysia dan memperbesar hasrat mereka untuk mengakhiri konfrontasi.

Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus, Sukarno mengumumkan poros Jakarta–Phnompenh–Hanoi–Beijing–Pyongyang yang antiimperalis, menyatakan bahwa rakyat akan dipersenjatai, mengisyaratkan bahwa para jenderal angkatan darat sedang mencoba merintanginya dalam hal ini, dan menjanjikan akan diambilnya suatu keputusan dengan segera. Pada tanggal 16–19 September, Omar Dhani secara diam-diam pergi ke Cina atas perintah Sukarno untuk membicarakan, antara lain, tawaran Cina akan senjata-senjata ringan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dulu kepada Nasution sebagai menteri pertahanan. Pada waktu itu, tampaknya Cina telah melupakan rencananya untuk menawari Indonesia bom nuklir (seandainya memang negara ini benar-benar bermaksud begitu), kemungkinan besar karena takut akan kelihatan sangat tidak bertanggung jawab sehingga pihak Amerika atau Soviet akan merasa beralasan untuk menyerang Cina lebih dulu. Akan tetapi, dukungan Cina terhadap pembentukan "angkatan kelima" masih tetap kuat.

Kini, struktur sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia hampir runtuh. Inflasi sangat tinggi, dengan harga-harga barang naik sekitar 500% selama tahun itu. Diduga, harga beras pada akhir tahun 1965 naik sebesar 900% setiap tahun. Kurs pasar gelap untuk rupiah terhadap dolar Amerika jatuh dari Rp 5.100,00 pada awal tahun 1965 menjadi Rp 17.500,00 pada kuartal ketiga tahun itu dan Rp 50.000,00 pada kuartal keempat. Di kota-kota besar, kota-kota kecil, dan desa-desa, kaum komunis maupun yang antikomunis percaya akan cerita-cerita tentang sedang dipersiapkannya regu-regu pembunuh dan sedang disusunnya daftar calon-calon korbannya. Ramalan-ramalan, pertanda-pertanda, dan tindak kekerasan merajalela. Sejak akhir bulan September, dengan berkumpulnya puluhan ribu tentara di Jakarta dalam rangka mempersiapkan peringatan Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 5 Oktober, dugaan-dugaan tentang akan terjadinya kudeta menjadi semakin santer. Pada tanggal 27 September, Yani akhirnya mengumumkan bahwa angkatan darat menentang pembentukan "angkatan kelima" atau nasakomisasi militer dalam artian struktural.

Pada tanggal 30 September malam–1 Oktober 1965, ketegangan-ketegangan meletus karena terjadinya percobaan kudeta di Jakarta yang kacau sekali perencanaannya. Apa yang terjadi

pada malam itu dan hari-hari berikutnya lumayan jelas. Akan tetapi, masih terus terjadi perbedaan pendapat yang rumit dan kadang-kadang tajam sekali mengenai siapa yang mendalangi kejadian-kejadian tersebut dan muslihat-muslihat yang ada di belakangnya. Rumitnya situasi politik, hubungan-hubungan, persahabatan-persahabatan, dan perasaan-perasaan benci yang memertalikan sebagian besar pelaku utamanya satu sama lain, serta sifat yang mencurigakan dari sebagian besar bukti, membuat kebenaran yang sepenuhnya tidak akan pernah diketahui. Tampaknya, mustahil bahwa hanya ada satu dalang yang mengendalikan semua peristiwa itu, dan tafsiran-tafsiran yang berusaha menisbahkan hal itu semata-mata ke PKI, angkatan darat, Sukarno, atau Soeharto harus diwaspadai.

Pada tanggal 30 September malam itu, satu batalyon pengawal istana yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung (sebelumnya dari Divisi Diponegoro), satu batalyon dari Divisi Diponegoro, satu batalyon dari Divisi Brawijaya, dan orang-orang sipil dari Pemuda Rakyat PKI meninggalkan pangkalan udara Halim. Mereka pergi untuk menculik Nasution, Yani, Parman, dan empat orang jenderal senior angkatan darat lainnya dari rumah-rumah mereka di Jakarta. Pemimpin-pemimpin usaha kudeta tersebut termasuk Brigadir Jenderal Supardjo dari Divisi Siliwangi dan Kepala Intelijen Divisi Diponegoro. Untung tampaknya hanya menjadi sebuah pion. Mereka mendapat dukungan dari Omar Dhani, yang telah memberikan pangkalan udara Halim sebagai markas besar mereka dan dia sendiri hadir di sana. Mereka juga menjalin hubungan dengan Biro Khusus PKI Sjam, dan beberapa orang anggota Politbiro PKI mengetahui rencana-rencana mereka, setidak-tidaknya secara samar-samar. Akan tetapi, hanya Aiditlah satu-satunya pemimpin senior PKI yang hadir di Halim. Njoto dan Lukman sedang tidak berada di Jakarta, seperti halnya Subandrio, Chaerul Saleh, dan Ali Sastroamidjojo.

Kudeta yang diusahakan itu menampakkan ketidakcakapan dan kekacauan yang luar biasa. Yani dan dua orang jenderal lainnya dibunuh di rumah mereka karena melawan ketika hendak ditangkap. Nasution berhasil meloloskan diri serta melewatkan sisa malam itu dan sebagian esok harinya di tempat persembunyiannya, tetapi putrinya yang baru berusia lima tahun tertembak dan kemudian wafat pada tanggal 6 Oktober dan

salah seorang ajudannya ditangkap. Ajudan ini, mayat ketiga jenderal tadi, dan tiga orang jenderal lainnya yang berhasil ditangkap hidup-hidup dibawa menuju Halim. Di sana, Parman dan ketiga orang tawanan lain yang masih hidup itu dibunuh secara kejam. Anggota-anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat ikut ambil bagian dalam pembunuhan-pembunuhan ini. Ketujuh mayat itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan terjadinya pembunuhan-pembunuhan itu, maka suatu babak baru kekerasan telah melintas. Pembunuhan-pembunuhan itu juga memusnahkan para jenderal senior yang menjadi anggota faksi Yani, sehingga angkatan darat jatuh ke tangan orang-orang yang lebih bersedia menentang Sukarno dan musuh-musuh angkatan darat. Sementara itu, sekitar 2.000 prajurit dari kelompok kudeta menempati ketiga sisi Medan Merdeka yang menguasai istana kepresidenan, stasiun radio, dan pusat telekomunikasi, tetapi tidak menduduki sisi timurnya di mana terletak markas besar Kostrad.

Tepat menjelang fajar tanggal 1 Oktober, Soeharto, yang tidak masuk dalam daftar penculikan, pergi ke Kostrad setelah diberi tahu tentang hilangnya para jenderal dan terjadinya penembakan-penembakan di rumah mereka. Dari sana dia dapat menyaksikan prajurit-prajurit yang sedang menduduki Medan Merdeka. Nasution dan Yani hilang, maka Soeharto mengambil alih komando atas angkatan bersenjata dengan persetujuan jenderal-jenderal angkatan darat, angkatan kepolisian, dan angkatan laut yang dapat dihubunginya. Dia memerintahkan supaya semua prajurit tetap tinggal di asrama mereka kecuali mendapat perintah khusus darinya untuk bergerak. Soeharto mulai menyelidiki apa yang sedang terjadi.

Tepat sesudah pukul tujuh, pihak pemberontak mengumumkan melalui radio bahwa 'Gerakan 30 September' adalah suatu kelompok militer yang telah bertindak untuk melindungi Sukarno dari kudeta yang direncanakan oleh suatu dewan yang terdiri atas jenderal-jenderal Jakarta yang korup dan menikmati penghasilan tinggi yang menjadi kaki tangan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA). Kira-kira dua jam kemudian, Sukarno, yang sebenarnya telah berangkat menuju istana kepresidenan tetapi membelokkan arah perjalanannya setelah mendengar tentang adanya pasukan-pasukan yang tak dikenal, tiba di Halim—di

kemudian hari dia mengatakan bahwa tindakan ini dilakukan supaya dia berada di dekat pesawat terbang seandainya dia harus meloloskan diri. Apa yang telah diketahui Sukarno mengenai rencana-rencana kudeta tidak pernah jelas. Di Halim, dia bertemu dengan Omar Dhani dan tokoh-tokoh kudeta lainnya, tetapi tampaknya Aidit berada di sebuah gedung yang terpisah. Presiden memanggil Leimena, Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Kepolisian, dan lain-lainnya ke pangkalan udara itu guna mengadakan konsultasi. Akan tetapi, Sukarno tidak pernah secara terbuka mendukung usaha kudeta tersebut, mungkin karena dia telah mendengar bahwa enam orang jenderal telah gugur sedangkan Nasution berhasil meloloskan diri, keadaan yang menjadikan keberhasilan kudeta itu sangat diragukan. Bagaimanapun juga, kehadirannya di Halim membuat banyak perwira angkatan darat mencurigainya.

Sementara itu, para prajurit yang berada di Medan Merdeka kepanasan, lelah, lapar, haus, dan para pemimpin kudeta tidak mengirim perbekalan. Soeharto membujuk supaya pasukan-pasukan Brawijaya datang ke markas besar Kostrad kurang lebih pukul 4 sore. Dua jam kemudian, pasukan-pasukan Diponegoro mengundurkan diri ke Halim. Dengan demikian, Soeharto berhasil menguasai kembali pusat Jakarta tanpa menembakkan satu peluru pun. Pada waktu itu, Nasution telah bergabung dengannya dan menjadi semakin jelaslah kejadian di malam sebelumnya, walaupun masih belum diketahui bahwa enam orang jenderal telah dibunuh. Pada pukul 4 sore, Sukarno mengirim berita bahwa dia mengambil alih komando atas angkatan bersenjata, tetapi Soeharto menganggap sepi sama sekali kabar itu, bukti pertama mengenai keteguhan hati dari orang yang tak pernah dipikirkan untuk diculik oleh kelompok pelaku kudeta ini.

Pada pukul 9 malam, Soeharto mengumumkan lewat radio bahwa enam orang jenderal telah diculik oleh kaum kontra revolusioner tetapi bahwa kini dialah yang memegang kendali atas angkatan bersenjata dan akan menumpas Gerakan 30 September dan melindungi Sukarno. Selanjutnya dia mengirim ultimatum kepada kelompok kudeta yang berada di Halim. Sekitar pukul 10 malam, Sukarno berangkat dengan mobil menuju istananya di Bogor. Kemudian para pemimpin kudeta meninggalkan Halim karena menduga akan terjadi serangan oleh Kostrad. Aidit

melarikan diri dengan pesawat ke Yogyakarta, sedangkan Omar Dhani menuju Madiun. Menjelang fajar tanggal 2 Oktober, Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) bergerak memasuki kawasan Halim. Setelah berlangsung beberapa pertempuran kecil, komandan angkatan udara di sana memerintahkan dihentikannya tembak-menembak. Kudeta di Jakarta berakhir.

Divisi Diponegoro di Jawa Tengah merupakan basis orang-orang militer yang bergabung dalam persekongkolan kudeta itu. Terjadinya serangkaian kudeta di dalam tubuh angkatan darat selama tanggal 1 Oktober mengakibatkan jatuhnya lima dari ketujuh batalyon infantri Diponegoro ke tangan Gerakan 30 September. Walikota Surakarta yang anggota PKI menyatakan dukungannya. Pada tanggal 2 Oktober, sesudah kudeta mengalami kegagalan total di Jakarta, PKI bangkit di Yogyakarta dengan mengadakan pawai untuk mendukung gerakan tersebut. Juga pada tanggal 2 Oktober, harian PKI di Jakarta, *Harian Rakyat,* secara mengejutkan menerbitkan tajuk rencana yang memuji-muji gerakan itu, yang dilukiskannya sebagai urusan intern angkatan darat. Kejadian-kejadian tersebut, bersama-sama dengan peranan Gerwani dan Pemuda Rakyat dalam pembunuhan-pembunuhan di Halim, telah menentukan nasib PKI. Para perwira angkatan darat yang anti-PKI bukan lagi hanya ingin membatasi dan melarang PKI; mereka kini mendapat alasan dan kesempatan untuk memusnahkannya. Orang-orang sipil yang anti-PKI, khususnya para aktivis Islam, menyetujuinya dengan sepenuh hati.

Gagalnya kudeta di Jakarta menghilangkan semangat orang-orang penting militer di Jawa Tengah yang ikut dalam persekongkolan itu. Sepanjang malam tanggal 1–2 Oktober, mereka mundur ke kawasan Merapi–Merbabu bersama dua kompi tentara. Para perwira yang mereka tinggalkan menyadari bahwa gerakan tersebut telah gagal dan meminta pengampunan. Dengan demikian, Jakarta berhasil mengusai kembali keadaan di daerah itu, tetapi kesetiaan sebagian besar prajurit masih tetap diragukan. Setelah semakin banyak pasukan yang dapat dipercaya bergerak masuk sesudah pertengahan bulan Oktober, barulah Soeharto merasa yakin akan pemulihan ketertiban di Jawa Tengah.

Sekali lagi Indonesia berada di simpang jalan; sekali lagi suatu sistem politik yang bersifat coba-coba telah menimbulkan krisis. Sukarno dan PKI, dengan dukungan angkatan udara, terus

mengambil suatu kebijakan yang bertujuan untuk menghancurkan dominasi angkatan darat, yang setelah krisis tahun 1956–7 telah tampil sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan administrasi yang paling besar di Indonesia, karena angkatan daratlah kekuatan militer yang paling tangguh. Dengan berbuat begitu, mereka telah menimbulkan rasa permusuhan dari pihak angkatan darat. Pimpinan angkatan darat memanfaatkan sistem yang kacau-balau itu untuk keuntungannya sendiri, tetapi pada tahun 1965 sudah tampak jelas bahwa, kecuali jika seseorang menentang kuat, angkatan darat akan menghadapi ancaman-ancaman yang serius terhadap posisinya. Demikian pula, NU berusaha memanfaatkan sistem tersebut untuk mempertahankan Islam tradisional, tetapi terpaksa menjadi oposisi yang aktif dan keras, bahkan sebelum angkatan darat, ketika PKI mengancam kepentingan agama dan ekonomi para pendukungnya.

Pada tanggal 30 September 1965 malam itu, bangunan yang rapuh tersebut runtuh. Akibat-akibatnya baru menjadi jelas berbulan-bulan kemudian, tetapi pada malam hari itu perimbangan kekuatan-kekuatan yang bermusuhan yang mendukung demokrasi terpimpin telah berakhir. Banyak pengamat telah menyaksikan peristiwa yang menyedihkan pada kurun waktu itu, terutama tragedi Sukarno, orang yang hidup lebih lama daripada zamannya dan memanfaatkan dukungan rakyatnya untuk mempertahankan suatu rezim korupsi dan kemunafikan yang amat berlebihan. Akan tetapi, tragedi yang jauh lebih berat terletak dalam penderitaan rakyat Indonesia.[]

Bab 21 ....

Menciptakan Orde Baru, 1965–75

SAMPAI BEBERAPA bulan setelah usaha kudeta 1965, masa depan politik Indonesia masih belum jelas. Pada akhirnya, Soeharto membangun apa yang dikenal dengan 'Orde Baru' Indonesia, untuk membedakannya dengan 'Orde Lama' dari masa pemerintahan Sukarno. Orde Baru terbentuk dengan dukungan yang sangat besar dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu. Dalam kehidupan intelektual, terjadi pembicaraan tentang suatu angkatan pemimpin muda baru dan suatu zaman baru, suatu "angkatan 66". Namun, dalam waktu beberapa tahun, elite Orde Baru—yang intinya terdiri atas faksi militer yang didukung oleh sekelompok kecil sipil—telah mengasingkan banyak sekutu aslinya.

Periode 1965–75 mengundang beragam pendapat dari para pengamat dalam dan luar negeri. Sayap kanan memuji pemerintahan Soeharto karena mampu membasmi PKI dan mengadopsi kebijakan yang pro-Barat. Sebaliknya, sayap kiri mencibirnya karena kedua kebijakan tersebut. Di antara para pengamat yang kurang memihak, terdapat banyak pengamat yang, di samping memuji prestasi pemerintahan Soeharto dalam menyeimbangkan ekonomi, juga mengutuk catatan buruk hak asasi manusia dan korupsi pemerintahan tersebut.

Terdapat persamaan antara kebijakan Orde Baru pada dekade awal dan kebijakan periode politik etis pemerintahan kolonial yang dijelaskan pada bab 14. Seperti pemerintahan zaman Belanda, Orde Baru juga berjanji akan membangun ekonomi nasional dan meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan. Orde Baru memang mampu membangun ekonomi nasional, tetapi tidak

mampu meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan pada periode seperti yang dimaksud dalam bab ini. Orde Baru mengembangkan gaya pemerintahan yang paternalistik, namun juga menindas. Orde Baru berusaha mencari keterlibatan rakyat untuk mendapatkan legitimasi, tetapi hanya lewat cara-cara yang dikendalikan dengan cermat. Sebagian besar pembangunan ekonomi nasional bergantung pada perusahaan asing dan hanya terjadi pertumbuhan kecil pada industri pribumi. Pandangan Snouck Hurgronje mengenai Islam tetap penting, karena Orde Baru juga menghormati Islam sebagai praktik agama pribadi tetapi tidak memberinya peluang untuk menjadi kekuatan politik, seperti ketika periode awal aliansi antara aktivis Islam dan tentara yang pro-Soeharto berhasil membasmi PKI dan menyingkirkan Sukarno.

Terdapat perbandingan lain antara pemerintahan jajahan Belanda dan Orde Baru yang, bagaimanapun, menunjukkan perbedaan tingkat yang signifikan. Kedua pemerintahan ini memberlakukan hukuman penjara politik untuk menyingkirkan lawan-lawan politik mereka. Tetapi pemerintahan Orde Baru lebih banyak memberlakukan hukuman tersebut daripada pemerintahan jajahan Belanda. Di samping itu, Orde Baru mengizinkan penyiksaan terhadap para narapidana politiknya. Sentralisasi kekuasaan ekonomi, politik, administrasi, dan militer di tangan segelintir elite dalam pemerintahan Soeharto juga mungkin lebih besar daripada dalam pemerintahan Belanda.

Salah satu perbedaan yang paling penting antara kondisi masyarakat pada masa Orde Baru dan masa jajahan Belanda adalah menyangkut Islam. Karena banyak alasan—sebagian alasan ini akan dibahas di bawah ini—kesadaran beragama masyarakat Indonesia, baik itu umat Islam ataupun umat agama lain, semakin meningkat setelah tahun 1965. Hal ini terjadi bukan tanpa risiko. Karena aktivitas para reformis Islam dan reaksi lawan mereka sejak awal abad XX, masyarakat Indonesia tersusun lebih berdasarkan garis aliran daripada kelas, sebuah pola yang diperkuat dengan politisasi aliran selama periode tahun 1950–65. Akibatnya, potensi konflik sosial lokal membesar dibanding dengan pada saat peralihan abad, terutama dalam masyarakat Jawa.

Perubahan persepsi angkatan tua para tokoh Islam modernis menyebabkan lingkungan agama lebih mudah berubah. Angkatan

tua kehilangan kepercayaan diri yang pernah mereka miliki di tahun-tahun awal abad XX. Bukannya menunggu pengakuan pihak lain terhadap apa yang mereka anggap sebagai hak mereka yang wajar untuk memimpin bangsa, mereka terpaksa menyesuaikan diri dengan peranan para politisi luar. Mereka kini melihat kepemimpinan sebagai sesuatu yang harus dimenangkan, bukan sesuatu yang diterima. Sementara itu, kepercayaan mereka bahwa seseorang yang ditunjukkan kebenaran Islam menurut interpretasi mereka akan dengan sendirinya memeluk interpretasi itu telah pudar. Hal ini terjadi karena kurang berkembangnya (meskipun sangat penting) interpretasi Islam kaum modernis dan reaksi bermusuhan yang terkadang ditimbulkan oleh interpretasi tersebut.

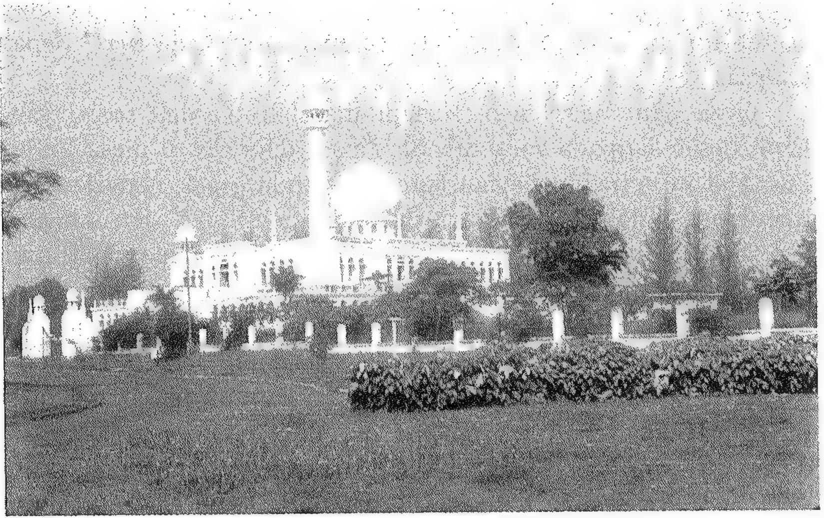
Banyak kaum modernis mengalihkan perhatian mereka dari politik ke dakwah. Dengan begitu, mereka berharap Islamisasi masyarakat Indonesia akan dapat disempurnakan. Mereka rasa, hanya dengan cara ini, Islam suatu saat nanti akan benar-benar mengatur kehidupan berbangsa. Sikap ini menyebabkan banyak umat Islam yang taat mencurahkan tenaga mereka ke lembaga pendidikan dan kesejahteraan. Tetapi peralihan perhatian ini muncul sebagian karena frustrasi. Frustrasi politik kaum modernis lengkap sudah ketika, setelah tahun 1965, mereka sadar bahwa pembasmian PKI tidak lalu mengakibatkan Islam menjadi kuat. Kaum modernis juga mengalami frustrasi agama akibat pertumbuhan agama lain yang tak terduga setelah tahun 1965, seperti yang akan dibahas di bawah ini. Begitu mereka sampai pada kesimpulan bahwa masa depan Islam terletak pada Islamisasi masyarakat yang lebih dalam, kaum modernis dihadapkan pada tantangan baru dalam bidang agama ini. Kadang-kadang frustrasi mereka berubah menjadi kemarahan.

Di lain sisi, Islam tradisional tampak lebih mampu menyesuaikan diri dengan keadaan politik yang berubah-ubah dan mempertahankan kekuatan dan daya tahannya di daerah pedalaman. Sementara itu, angkatan baru para tokoh Islam sedang muncul, dan mereka terkadang tidak senang dengan kepemimpinan yang dicontohkan para tokoh tua. Mereka juga kurang memerhatikan isu-isu lama, tentang perpecahan antara ortodoks dan modernis, atau tentang kesulitan hidup dalam masyarakat yang semakin multiagama. Para tokoh muda muslim ini cenderung lebih mudah menghormati para tokoh muda Kristen.

Banyak orang Indonesia menilai angkatan dari dua komunitas agama ini merupakan salah satu harapan besar bagi masa depan bangsa.

Orde Baru harus menghadapi masalah-masalah sosial yang lebih besar daripada yang dihadapi para reformis di masa Politik Etis. Hal ini terjadi sebagian karena Belanda gagal menyelesaikan masalah-masalah ini beberapa dekade sebelumnya, dan sebagian lagi karena berlalunya waktu dan pergolakan yang terjadi sejak penaklukan Jepang membuat masalah tersebut kian kompleks. Belanda gagal memenuhi kesejahteraan bangsa yang pada tahun 1930 berpenduduk 60,7 juta. Karena kelalaian selama beberapa dekade lalu dan mendesaknya kebutuhan untuk terlebih dahulu mengendalikan ekonomi bangsa di tahun-tahun setelah 1965, maka mungkin tak mengejutkan jika pemerintahan Orde Baru awalnya tidak mampu berkontribusi banyak dalam memenuhi kesejahteraan penduduknya, yang pada sensus tahun 1971 telah mencapai 119,2 juta jiwa dan 147,3 juta pada tahun 1980.

Standar kesehatan dan pendidikan masih rendah, tetapi jauh lebih baik daripada di zaman Belanda. Pada tahun 1974, terdapat 6.221 dokter. Di Jawa terdapat satu dokter untuk setiap 21,7 ribu penduduk dan di luar pulau Jawa terdapat satu dokter untuk setiap 17,9 ribu (angka ini tidak berarti akses untuk mendapatkan dokter lebih mudah di sana, karena penduduk tersebar di tempat yang saling berjauhan). Sensus tahun 1971 menunjukkan bahwa tingkat melek huruf bagi anak yang berusia 10 tahun adalah 72% di kalangan laki-laki dan 50,3% pada perempuan. Tetapi secara umum kualitas sistem sekolah telah menurun sejak tahun 1950-an, sehingga angka melek huruf ini tidak bisa dianggap sebagai bukti bahwa pendidikan formal sudah cukup tersedia. Pada tahun 1973, walaupun 57% (11,8 juta) dari penduduk yang berusia 7–12 tahun duduk di sekolah dasar, namun masih tersisa sekitar 8,9 juta dalam kelompok ini yang tidak berpendidikan. Pada tingkat perguruan tinggi, pemerintahan Indonesia mampu melampaui rekor yang dicapai Belanda. Namun, pada tahun 1973, hanya sekitar seperempat dari 1% penduduk (329.300) yang terdaftar di lembaga perguruan tinggi negeri dan swasta, 117.600 di antaranya terdaftar di universitas atau lembaga perguruan tinggi negeri. Jumlah ini agak rendah, tetapi jumlah lulusannya lebih banyak daripada yang bisa dipekerjakan negara, karena faktanya tingkat pengangguran



Mesjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dibangun setelah kemerdekaan dan mencerminkan pengaruh arsitektur Timur Tengah

bagi lulusan kian bertambah. Kualitas pendidikan pada tingkat perguruan tinggi ini juga menuai kritik. Pemerintah baru mampu membuat kemajuan besar di bidang kesehatan dan pendidikan di pertengahan tahun 1970-an.

Masalah sosial bangsa semakin rumit dengan berlanjutnya urbanisasi. Pada tahun 1971, sebanyak 17,3% dari penduduk Indonesia tinggal di kota—bandingkan dengan 14,8% pada tahun 1962 dan 3,8% pada tahun 1930. Pada tahun 1971, penduduk Jakarta sudah melampaui 4,5 juta jiwa. Jawa tetap tercatat sebagai pulau dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia (60,4% pada tahun 1971). Orde Baru, seperti juga Belanda, gagal memindahkan penduduk di pulau Jawa ke luar pulau dalam proporsi yang signifikan. Kebijakan memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang ini kini disebut dengan 'transmigrasi'.

Pada pusat peristiwa-peristiwa rumit dan kekerasan yang berlanjut pada pembentukan dan stabilisasi rezim Orde Baru ini, berdirilah seseorang yang dulu kurang dikenal, Jenderal Soeharto. Dia, seperti Sukarno, berasal dari suku Jawa asli (dari Jawa Tengah, bukan Jawa Timur). Namun, Soeharto hidup lebih benar-benar sebagai putra pedalaman Jawa daripada Sukarno. Karena itu, Soeharto dapat lebih dimengerti, bahkan mengagumkan, bagi

banyak orang yang diklaim Sukarno sebagai konstituen utamanya. Ketika masih remaja, Soeharto tidak pernah mengenal antikolonialisme kota atau pendidikan Barat yang lebih tinggi yang memengaruhi pandangan-pandangan Sukarno. Pendidikannya hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (setingkat MULO) Muhammadiyah di Yogyakarta, yang lalu dia tinggalkan pada tahun 1939. Dia juga tidak mengenal bentuk fasisme Jepang yang lebih besar di Jakarta yang disukai Sukarno selama Perang Dunia II.

Sebagai pemuda, Soeharto hidup bersama dan dibantu kyai yang dikenal sebagai dukun. Dia hidup di alam demikian di dalam batas antara versi Islam ortodoks yang populer, dengan pembacaan Quran dan mistisnya, dan semangat kebatinan Jawa, dengan hantu, cerita-cerita rakyat, dan magisnya. Dia sangat memercayai klenik kebatinan Jawa pedalaman yang kental, sebuah klenik yang hanya mengakui Islam dalam bentuk yang lebih esoteris dan hukum agama hanya memiliki kekuatan kecil. Dalam dunia inilah Soeharto menemukan kedamaian batin yang bisa menjelaskan gaya kepemimpinannya yang berkepala dingin selama bertahun-tahun. Soeharto mengagumi Sultan Hamengkubuwana IX Yogyakarta dan ingin mendapatkan semacam legitimasi gaib seperti yang diperoleh para penguasa Jawa. Konon, dia membawa beberapa pusaka dari keraton Surakarta yang melindunginya di Jakarta pada tahun 1966, dan segera mengembalikannya ketika banjir besar yang melanda Surakarta dianggap sebagai akibat dari dipindahkannya pusaka-pusaka itu.

Di samping berakar pada Jawa dan memiliki kekuatan batin, Soeharto juga pandai berpolitik. Pada tahun 1965, dia sudah memiliki sekelompok sekutu dekat di dalam tentara. Dukungan Soeharto terhadap perwira-perwira lainnya tidak hanya berupa penghormatan pribadi, tetapi juga kemauannya mengizinkan para pengikutnya untuk mendapatkan imbalan uang atas kesetiaan mereka dengan sedikit memerhatikan hukum. Di lain sisi, penolakan panjang Nasution terhadap praktik korupsi di korps perwira membuatnya tidak populer di kalangan perwira-perwira yang melihat perubahan keadaan politik setidaknya juga berarti perubahan potensi pendapatan tunai mereka. Kenyataannya, Nasution memang tidak berusaha mengambil inisiatif dari Soeharto.

Lingkaran kroni Soeharto meluas di luar militer. Dia memiliki koneksi yang bertahan sangat lama dengan pengusaha Cina Liem Sioe Liong (l. 1916), juga dikenal sebagai Sudomo Salim, yang bermigrasi dari Fujian ke Indonesia pada tahun 1936. Ketika Orde Baru telah terbentuk, koneksi yang didasarkan pada ketertarikan pribadi dan kesalingpercayaan yang menguntungkan ini membuat Liem memperoleh status orang terkaya di Indonesia dan salah satu jutawan yang paling terkemuka di Asia Tenggara. Dia dan pengusaha Cina lainnya—dalam bahasa sehari-hari disebut 'cukong' (dari bahasa Hokkien yang artinya 'bos' dan 'kakek')—menjadi tak terhingga nilainya bagi para elite pribumi Orde Baru. Para cukong menyediakan modal, koneksi di luar Indonesia, dan kelihaian berdagang tanpa mengancam mitra-mitra mereka yang orang Indonesia dalam hal ini, karena sentimen anti-Cina di Indonesia berarti bahwa cukong tidak akan pernah bisa membangun kekuatan politik. Elite Indonesia memberi mereka proteksi, kesempatan, izin, informasi dari dalam, rencana keuangan yang tak jujur, dan, jika perlu, kekuatan pemerintah sebagai pengganti atas jumlah uang yang banyak. Pada akhirnya, elite Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, keluarga, dan kroni-kroninya menciptakan bentuk pemerintahan yang terkadang disebut kleptokrasi: pemerintahan yang dipimpin oleh para pencuri. Hanya ada sedikit cukong yang pernah beralih ke kerajaan bisnis yang mandiri dan sah.

Sukarno tampak telah meremehkan kehebatan pesaingnya, Soeharto. Selama beberapa bulan, Sukarno berusaha membuktikan bahwa usaha kudeta hanya merupakan insiden kecil dalam proses revolusi yang masih bergulir dan bahwa dia masih berkuasa. Tetapi Soeharto membuktikan dirinya sebagai lawan yang sangat licin dan mampu menaklukkan Sukarno yang sudah tua, sakit-sakitan, dan terlalu membesar-besarkan diri. Sang Presiden akhirnya kalah menghadapi penggantinya, dan bersama dengan itu visinya tentang revolusi-tanpa-henti ikut hilang.

Selama bulan Oktober 1965, runtuhnya demokrasi terpimpin dimulai. Pada 2 Oktober, Soeharto mengakui perintah dari Sukarno untuk mengambil sendiri komando tentara, tetapi dengan syarat bahwa Soehartolah yang memiliki kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Kekuasaan ini kemudian dilembagakan pada tanggal 1 November dengan pembentukan

Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Pada tanggal 3 Oktober, mayat para jenderal yang dibunuh ditemukan di Halim, dan Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober menjadi pemakaman umum besar-besaran bagi mereka. Tentara mulai secara terang-terangan menyalahkan PKI yang melakukan usaha kudeta tersebut, yang kini disebut Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) dengan sindiran jelas pada Gestapo Nazi Jerman. Bantahan PKI atas keterlibatannya dalam pembunuhan itu sama sekali tak dihiraukan.

Para pemuda antikomunis kini menguasai jalan-jalan, membakar markas besar PKI di Jakarta pada 8 Oktober. Pada akhir bulan Oktober, para mahasiswa anti-PKI membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan dukungan dan perlindungan tentara. KAMI berintikan kelompok pemuda Islam, Katolik, dan mantan PSI. Front kesatuan pelajar yang sama disebut KAPPI (Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia), dan front alumni universitas, KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), dibentuk pada awal tahun 1966. Kedua front yang terakhir ini berintikan simpatisan Masyumi–PSI. Sementara itu, penahanan masih terus berlangsung. Lebih dari 10.000 aktivis dan pemimpin PKI telah diculik di Jakarta dan Jawa Barat pada Desember 1965; di antara mereka adalah Pramoedya Ananta Toer.

Pada bulan Oktober 1965, pembunuhan dimulai. Kekerasan terhadap orang-orang yang dikaitkan dengan PKI terjadi di seluruh daerah, tetapi pembunuhan masal yang terburuk terjadi di Jawa dan Bali. Konflik di Jawa Timur antara PKI dan NU yang telah dimulai pada 1963 berubah menjadi pembunuhan masal secara menyeluruh yang dimulai dari minggu kedua bulan Oktober 1965. Pada pertengahan bulan Oktober, Soeharto mengirim satuan-satuan prajurit penyerang yang terpercaya ke Jawa Tengah; dia memerintahkan para pasukan yang kurang setia untuk keluar dari Jawa Tengah. Mereka memilih untuk mematuhi perintah tersebut daripada melawan prajurit penyerang. Pembunuhan masal anti-PKI mulai dilakukan di sana, bersama tentara yang membantu para pemuda menemukan para komunis. Di Bali, tanpa keterlibatan kekuatan Islam, tuan tanah PNI yang berkasta tertinggi memimpin dalam mendorong pembasmian anggota PKI. Pucuk pimpinan nasional PKI juga ditemukan dan dibunuh. Njoto tertembak kira-kira pada 6 November dan Aidit pada 22 November; Lukman juga segera tewas setelahnya.

Pada pertemuan di Jakarta pada 9–11 November 1965, Muhammadiyah mengumumkan bahwa pembasmian Gestapu/PKI sama dengan perang sabilillah. Kelompok Islam lainnya mendukung pandangan ini. Apa pun yang mungkin dimaksudkan oleh para pemimpin Islam dengan perang suci, pengumuman ini tampaknya untuk menjustifikasi pembunuhan terhadap para komunis sebagai tugas agama dan tiket masuk surga bagi setiap muslim yang kehilangan nyawanya dalam kekerasan itu. Masyarakat Indonesia yang mencurigai fanatisme laten Islam merasa kecurigaan mereka kini terbuktikan.

Oleh karena kesetiaan politik periode 1950–65 telah semakin bersesuaian dengan kesetiaan aliran di Jawa, begitu juga banyak pembunuhan terjadi menurut perbedaan aliran. Tentara mendorong dan mendukung orang-orang fanatik dari pihak santri masyarakat Jawa untuk menemukan sasaran PKI di antara saudara-saudara mereka yang *abangan*; jurang pemisah antara santri dan *abangan* di tingkat desa semakin melebar karena terjadinya pertumpahan darah di antara mereka. Tidak hanya pendukung PKI yang tewas. Di Jawa, banyak yang dianggap sebagai "PNI kiri" juga dibunuh. Kadang-kadang perseteruan lama diselesaikan dalam wilayah konflik politik. Konon, para tuan tanah dengan gampang menyingkirkan para penghuni liar dengan membunuh mereka.

Pembunuhan berakhir pada bulan-bulan pertama 1966, meninggalkan korban kematian yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Sebagian besar ahli memperkirakan setidaknya setengah juta orang tewas, tetapi tak ada seorang pun yang benar-benar tahu, karena tak seorang pun menghitungnya. Dalam sejarahnya, Indonesia belum pernah menyaksikan pembunuhan masal yang merenggut korban sebegitu besar. Pembunuhan ini meninggalkan bekas yang begitu dalam dan tak terlupakan bagi banyak rakyat Indonesia. Sebagian merasa bangga bisa membantu membasmi PKI. Namun, sebagian lainnya merasa bahwa pembunuhan masal ini merupakan peristiwa paling memalukan dan tak bisa dimaafkan, sebuah tindakan kegilaan kolektif. Banyak orang ditahan, diinterogasi (sering di bawah siksaan), dan ditahan tanpa pemeriksaan pengadilan. Jumlah orang yang diperlakukan seperti ini juga tidak diketahui pasti. Mungkin, satu dekade setelah kejadian yang mengerikan pada tahun 1965–6,

sebanyak 100.000 orang masih dipenjara tanpa pemeriksaan pengadilan.

Sukarno disusahkan dengan pembunuhan besar-besaran itu dan keruntuhan revolusi usangnya. Pada bulan November 1965, dia dengan sedih menghimbau kaum muslim untuk setidaknya menguburkan yang tewas. Pada bulan Desember, dia mengubah sejarah dan menyakitkan hati perwira-perwira yang dahulu bersimpati kepadanya karena memuji peranan PKI dalam Revolusi. Tetapi, sekarang PKI sudah dimusnahkan. Para pendukung PKI yang lolos dari kematian atau penahanan kini sedang bersembunyi atau berusaha menyembunyikan masa lalu mereka. Tentara sedang menuju kekuasaan yang tak tertandingi, meskipun kekuatan politik Islam masih menipu diri mereka sendiri bahwa mereka akan ikut masuk dalam kekuasaan ini.

Sukarno tetap berusaha memegang panggung pusat, tetapi magis lamanya tidak mampu berfungsi lagi. Pada bulan Januari 1966, dia berpidato di radio, menyerukan semua rakyat untuk mengikutinya, sementara Subandrio menyerukan pembentukan Barisan Sukarno. Soeharto mengimbangi seruan Subandrio dengan berikrar bahwa dia tetap setia kepada Sukarno dan meminta kepada semua pendukung setia Presiden untuk mendukung tentara. Walaupun Soeharto mungkin lebih suka melihat Sukarno berfungsi sebagai tokoh yang memberi legitimasi bagi dominasi tentara, jelas sudah bahwa presiden tua itu harus segera disingkirkan.

Pada bulan Februari 1966, Sukarno melakukan usaha terakhirnya untuk menyelamatkan demokrasi terpimpin. Pada 21 Februari, dia merombak kabinetnya. Dia memberhentikan Nasution sebagai Menteri Pertahanan dan menghapus jabatan kepala staf angkatan bersenjata; Nasution tentu menolak pemecatannya. Omar Dhani dan Subandrio—dua orang yang diincar tentara—dipertahankan sebagai menteri. Sukarno menunjuk Letkol Imam Sjafei sebagai Menteri Negara Urusan Keamanan, bos para preman Jakarta. Preman-preman anti-KAMI pun segera diorganisir.

Kebijakan Soeharto konon menyulut kekerasan di Jakarta, yang pada akhirnya mendesak Sukarno menyerahkan kekuasaannya pada Soeharto untuk memulihkan ketertiban. Para pemuda pro-Sukarno dan anti-Sukarno berkelahi di jalan-jalan ibu kota. Kedutaan Amerika diserang oleh pendukung Sukarno pada

23 Februari. Sukarno lalu melarang KAMI, tetapi para mahasiswa dan penasihat mereka dari kalangan tentara tidak menghiraukannya. Sukarno memerintahkan Universitas Indonesia ditutup pada 3 Maret, tetapi mahasiswa anti-Sukarno menduduki kampus, sementara tentara sekutu mereka menjaga garis luarnya.

Sementara itu, Mahmillub (Mahkamah Militer Luar Biasa, didirikan pada bulan Desember 1965) menggelar persidangan untuk menguatkan pandangan bahwa PKI-lah yang mendalangi usaha kudeta 30 September 1965 dan untuk mencari tahu peranan Sukarno dalam usaha kudeta tersebut. Pada bulan Februari 1966, Njono Prawiro, mantan Sekjen SOBSI, divonis mati. Pada 7 Maret, Untung menerima vonis yang sama.

Tentara mendorong mahasiswa untuk berdemonstrasi menuntut pelarangan PKI (yang pada tahap ini merupakan celaan semata bagi Sukarno, karena faktanya hanya sedikit PKI yang tersisa), membentuk kabinet baru dan reformasi ekonomi. Ekonomi masih berjalan tak menentu, indeks biaya hidup pada bulan Desember 1965–Januari 1966 meningkat 50%. Pada 5 Maret, Soeharto mengajukan kepada Sukarno daftar menteri yang harus diberhentikan, yang kemudian ditolak Sukarno.

Pada 11 Maret 1966, permainan manuver halus antara Sukarno dan Soeharto—yang menghasilkan kekerasan berdarah di ibu kota—berakhir dengan meyakinkan untuk kemenangan Soeharto. Sukarno mengadakan pertemuan kabinet di Jakarta, sementara para mahasiswa-demonstran memadati jalan-jalan. Sukarno mendapat informasi bahwa pasukan tak dikenal (sebenarnya, pasukan penyerang) tengah mengepung istana. Maka, dia segera naik helikopter menuju Bogor, ditemani Subandrio dan Chaerul Saleh. Malam itu, tiga jenderal yang bertindak sebagai utusan Soeharto pergi ke Bogor dan membujuk Sukarno untuk menandatangani sebuah dokumen yang memberi Soeharto kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban, menjalankan pemerintahan, dan melindungi Presiden atas nama Revolusi. Dengan mengambil kata kiasan Semar, dewa-badut yang paling tangguh dalam wayang Jawa, dokumen ini disebut Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

Dengan kekuasaan Supersemar yang diperolehnya, Soeharto dan para pendukungnya kini menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan Sukarno yang marah tapi tak mampu

berbuat apa-apa. Pada 12 Maret, PKI dan semua organisasi masanya dilarang. Pada 18 Maret, Subandrio, Chaerul Saleh, Imam Syafei, dan sebelas menteri kabinet lainnya ditahan; salah satu anggota kabinet yang menjadi sasaran tentara, Surachman, lolos tetapi akhirnya terbunuh di Blitar Selatan pada tahun 1968. Chaerul Saleh mati di penjara pada tahun 1967. Orang-orang yang beraliran Sukarno moderat tidak ditahan; orang-orang seperti Idham Chalid, Leimena, dan Roeslan Abdulgani tetap berada di kabinet baru yang dilantik pada 27 Maret. Kabinet ini dipimpin oleh tiga serangkai, yaitu Soeharto, Sultan Hamengkubuwana IX, dan Adam Malik. Sultan Hamengkubuwana IX dan Adam Malik muncul sebagai kalangan sipil paling terkemuka yang mendukung Orde Baru.

Pembersihan tentara dan birokrasi kini dimulai. Sekitar 2.600 pasukan Divisi Diponegoro dibebastugaskan, diskors, dipecat, atau ditertibkan, dan banyak yang lainnya ditahan. Sebagian perwira tentara anti-PKI tetapi pro-Sukarno dipindahkan dari komando strategis pada bulan Mei.

Kebijakan luar negeri demokrasi terpimpin diserahkan kepada Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri yang baru. Poros Jakarta–Beijing dimusnahkan dengan cepat. Gedung milik para diplomat dan swasta Cina diserang oleh aktivis anti-PKI. Pada awal tahun 1966, Beijing tahu bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan operasinya di Indonesia. Pada bulan Maret, Beijing menutup agen beritanya di Jakarta, Xinhua (Hsin Hua), dan tiga konsulatnya, dan menarik duta besarnya pada bulan Mei. Duta besar Indonesia untuk Beijing diperintahkan pulang pada bulan Februari, tetapi dia menolak dan diberikan suaka politik oleh Cina. Para diplomat yang terkait dengan Cina secara formal 'dibekukan' oleh Jakarta pada 31 Oktober 1967, setelah terjadi gelombang kerusuhan anti-Cina lainnya.

Kebijakan luar negeri baru bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan negara-negara Barat guna memperoleh bantuan ekonomi yang memang sangat diperlukan. Syarat-syarat tersebut termasuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Pada bulan April 1966, Indonesia bergabung lagi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa; pada bulan Mei, Malik mengumumkan bahwa Indonesia kembali bekerja sama dengan International Monetary Fund (IMF). Hamengkubuwana IX menangani urusan ekonomi,



Jenderal Suharto, 1966

keuangan, dan pembangunan. Dia mengumumkan langkah reformasi ekonomi pertama pada bulan April. Namun, usaha mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia agak terhambat akibat sikap keras sebagian personel militer. Mereka berpendapat bahwa usaha mengakhiri konfrontasi tidak harus dilakukan dengan cara

merendahkan negara sendiri. Maka, dalam upayanya menegosiasikan penyelesaian konfrontasi ini, Malik mendapat gangguan dari Ali Murtopo dan organisasi OPSUS-nya, yang telah memiliki hubungan terselubung dengan Malaysia.

Pada bulan Mei 1966, Soeharto mendukung berakhirnya konfrontasi, dan delegasi perwira senior menunjukkan iktikad baik dengan berkunjung ke Kuala Lumpur. Hanya dalam hitungan hari, Jepang mendukung pemerintahan nonkomunis Orde Baru dengan menawarkan utang darurat sebesar US$ 30 juta. Pada 29 Mei, Malik bertemu dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak, di Tokyo dan konfrontasi akhirnya berakhir. Berakhirnya konfrontasi dipastikan dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian pada 11 Desember. Hubungan diplomatik penuh antara Indonesia dan Malaysia dipulihkan pada bulan Agustus 1967.

Namun, situasi politik dalam negeri tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Orde Baru. Serangan balasan oleh kekuatan pro-Sukarno masih mungkin terjadi, mungkin dengan bersandar pada PNI sebagai basis politik mereka. Orang-orang yang anti-Sukarno di kalangan militer dan Islam menginginkan PNI dilarang, tetapi Soeharto masih cemas akan apa yang dianggapnya sebagai fanatisme Islam dan menginginkan PNI sebagai imbangannya. Maka, Soeharto bukannya melarang, tetapi membersihkan PNI. Pada bulan April 1966, dia mengatur kongres PNI yang menurunkan kepemimpinan orang-orang Sukarnois di bawah Ali Sastroamidjojo yang dilantik bulan Agustus sebelumnya. Hardi dan teman lama Soeharto, Hadisubeno, kini memimpin PNI.

Di bawah UUD 1945, presiden bertanggung jawab kepada MPRS. Kini jumlah anggota MPRS berkurang akibat penahanan sekitar 180 anggotanya, dan sentimen anti-Sukarno meningkat di kalangan anggota MPRS yang tersisa. Soeharto merasa aman untuk mengundang MPRS bersidang pada Juni–Juli 1966. MPRS meratifikasi Supersemar, melarang PKI, mengharamkan Marxisme sebagai doktrin politik, menuntut pemilu diadakan pada tahun 1968, dan mendesak Sukarno untuk memberi penjelasan tentang pelanggaran susila, korupsi, dan mismanajemen ekonomi yang dilakukan pemerintahan demokrasi terpimpin dan tentang peran Sukarno sendiri dalam usaha kudeta pada tahun 1965. Gelar 'presiden seumur hidup' yang dianugerahkan MPRS pada bulan

Mei 1963 ditanggalkan. Sukarno juga dilarang untuk mengeluarkan keputusan presiden. Sukarno menolak tuntutan MPRS untuk memberi penjelasan, tetapi jelas sudah bagi semua orang bahwa era Sukarno sudah berakhir. Baru pada bulan Januari 1967, dia akhirnya mengatakan kepada MPRS bahwa dia tidak mengetahui usaha kudeta itu sebelumnya—mungkin apa yang dikatakannya benar.

Perpisahan dengan demokrasi terpimpin terbukti menjadi kenyataan pada pertengahan tahun 1966 dengan dilepaskannya orang-orang yang ditahan karena peranan mereka dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Sumual, Simbolon, dan orang-orang militer lainnya yang dibebaskan memperoleh karier baru dalam dunia bisnis. Sjafruddin, Natsir, dan warga sipil lainnya yang telah terlibat tidak mendapat peluang yang sebesar itu untuk berkarier, karena mereka kurang dipercaya oleh elite Orde Baru seperti halnya di zaman rezim Sukarno.

Ketika Orde Baru semakin mengendalikan negara dan peluang bangkitnya pendukung Sukarno menyusut, prospek Soeharto memperoleh bantuan keuangan dalam jumlah besar dari dunia barat semakin meningkat pula. Salah satu masalah pertama Suharto adalah utang luar negeri yang begitu besar yang diwariskan pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada akhir tahun 1965, jumlahnya mencapai US$ 2,36 miliar, 59,5% di antaranya merupakan utang kepada negara komunis (42% kepada Uni Soviet), 24,9% kepada negara barat, dan sisanya utang kepada negara-negara nonkomunis lainnya. Jepang adalah kreditor terbesar di luar negara-negara komunis (9,8% dari total utang). Walaupun utang ini sangat besar, harus dicatat bahwa jumlah ini jauh lebih kecil daripada utang yang kelak diperoleh Orde Baru. Para kreditor nonkomunis Indonesia setuju untuk bertindak bersama-sama dan akhirnya membentuk IGGI (Inter-Govermental Group on Indonesia) pada tahun 1967. Dari bulan Juli 1966, mereka mulai menjadwal ulang pembayaran utang Indonesia. Pada bulan Oktober, Adam Malik, yang telah lama memiliki hubungan baik dengan Uni Soviet, juga menjadwal ulang sebagian pembayaran utang Indonesia kepada Uni Soviet.

Sebagai imbalan atas bantuan ekonomi yang diberikan negara-negara barat, pemerintahan Soeharto mengadopsi langkah-langkah reformasi yang terus-menerus dipuji oleh Bank Dunia

dan IMF. Langkah-langkah ini mendominasi kebijakan ekonomi pada tahun 1970-an. Strategi *laissez-faire* pintu terbuka untuk meningkatkan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi maksimum diiringi dengan pengendalian ekonomi intern yang tegas. Yang terpenting dengan kebijakan-kebijakan baru ini adalah hadirnya sekelompok ahli ekonomi Indonesia yang terdidik secara akademis, para teknokrat yang dikenal dengan "mafia Berkeley" karena beberapa di antara mereka lulusan Universitas Berkeley. Karena mereka mampu berbicara dalam bahasa ekonomi internasional, mereka menambah kredibilitas pemerintahan Soeharto di mata negara-negara barat. Mereka juga tetap berpengaruh dalam rezim yang didominasi militer itu, walaupun terkadang ditentang oleh orang-orang yang lebih mendukung nasionalisme ekonomi yang lebih besar.

Laporan pemerintah Indonesia bulan September 1966 kepada para kreditornya yang nonkomunis menggambarkan tingkat bencana nasional yang dihadapi rezim baru ini. Inflasi tahunan terhitung melebihi 600%, persediaan uang 800 kali lebih tinggi daripada angka di tahun 1955 dan defisit pemerintah 780 kali lebih banyak daripada tahun 1961 (dan 1,8 kali dari persediaan total uang). Saat berkonsultasi dengan IMF, para teknokrat memperkenalkan pengendalian anggaran, tarif bunga tinggi, pengendalian ekspor yang lebih ketat, dan langkah-langkah anti-korupsi yang akan dimulai pada bulan Oktober. Perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika yang sebelumnya disita segera dikembalikan kepada pemiliknya. Pada bulan Februari 1967, undang-undang investasi baru disahkan untuk mendorong investasi asing.

Tetapi para teknokrat sesungguhnya hanya mampu mengendalikan sebagian ekonomi. Pengurangan drastis pada anggaran resmi militer tidak terlalu diperhatikan tentara, karena kini bisnis yang dilakukan tentara sendiri sudah berkembang dengan baik. Kenyataannya, anggaran resmi yang ditetapkan hanya menutupi tidak lebih dari setengah pengeluaran militer, sedang sisa pengeluarannya dibiayai dari bisnis yang dijalankan tentara sendiri. Perusahaan minyaknya sangat penting. Sejak tahun 1963, Permina telah membuat kesepakatan pembagian keuntungan dengan Caltex dan Stanvac. Pada akhir tahun 1965, Shell menjual semua sahamnya kepada Permina. Pemberi pendapatan utama lainnya adalah Bulog (Badan Urusan Logistik), dibentuk pada tahun 1966 dan menangani terutama urusan beras.

Kerajaan bisnis yang dijalankan oleh Chaerul Saleh dan pemimpin Orde Lama lainnya diambil alih oleh elite Orde Baru, baik militer ataupun birokrat pendukung mereka. Koneksi yang paling erat antara kepemimpinan Indonesia baru dan dunia modal swasta tercipta. Elite merasa beruntung bekerja sama dengan para cukong Cina, yang menarik karena akses mereka pada modal, kelihaian mereka dalam dagang, dan ketidakberdayaan mereka dalam politik. Selama bertahun-tahun, kekayaan yang mengalir deras ke tangan elite Indonesia menciptakan kelas atas baru, basis sosial terkemuka rezim Soeharto, sementara sebagian keluarga cukong juga menjadi kaya raya.

Sementara reformasi ekonomi terus berjalan, tekanan politik domestik mendekati puncaknya. Kesaksian dalam beberapa pemeriksaan pengadilan oleh Mahmillub menuduh Sukarno terlibat dalam usaha kudeta 1965. Subandrio dan Omar Dhani divonis mati, berturut-turut pada bulan Oktober dan Desember 1966 (yang tidak pernah dieksekusi dan keduanya dilepas pada tahun 1995). Pada bulan Desember 1966, Sudisman ditangkap; dia divonis mati pada bulan Juli 1967 dan dieksekusi pada tahun 1968. Pada bulan Januari 1967, perwira militer tertinggi yang terlibat dalam usaha kudeta, Brigjen Supardjo, ditemukan; pada bulan Maret, dia divonis mati. Pada bulan itu juga, Sjam ditangkap dan, dengan demikian, Orde Baru mendapatkan sumber paling penting tentang bagaimana rencana kudeta disusun. Menurut laporan, Sjam ditahan dan diperiksa secara reguler untuk memperoleh informasi tentang rencana kudeta tersebut, sampai akhirnya dia dieksekusi pada tahun 1986. Mahasiswa, pengacara, dan hakim kini mulai menuntut agar Sukarno juga diseret ke pengadilan.

Pada bulan November 1966, para perwira pro-Sukarno di Divisi Brawijaya Jawa Timur serta kepolisian dan angkatan laut Jawa Timur berencana menculik Sukarno selama kunjungannya yang direncanakan ke Jawa Timur, dengan maksud untuk mendesak Sukarno melawan Soeharto. Tetapi rencana mereka gagal. Sukarno menolak bekerja sama dalam suatu persekongkolan yang mungkin akan menimbulkan perang saudara. Soeharto membatalkan kunjungan itu dan mulai membungkam perwira-perwira yang pro-Sukarno dengan memberi mereka jabatan duta besar atau jabatan-jabatan menguntungkan lainnya.

Soeharto kini melakukan langkah terakhirnya menuju kemenangan politik dalam negeri dan percaya bahwa inilah saat yang paling memungkinkan untuk menyingkirkan sang presiden tua. Dia menunjuk anggota baru parlemen (DPR-GR) untuk mengganti para anggota yang telah disingkirkan, dan menggelar sidang MPRS pada bulan Maret 1967. Di tengah-tengah rumor bahwa korps marinir angkatan laut (KKO: Korps Komando), polisi, dan Divisi Brawijaya akan tetap mendukung Sukarno, dan dengan 80.000 pasukan yang menduduki Jakarta, pada 12 Maret MPRS menanggalkan semua kekuasaan dan gelar Sukarno serta mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Beragam ideologi Sukarno dinyatakan tidak lagi menjadi ideologi negara, yang direduksi menjadi Pancasila saja. Soeharto diberi kekuasaan untuk menentukan apakah Sukarno harus dibawa ke pengadilan, tetapi dia tidak pernah menuntut pendahulunya itu karena dia khawatir tindakan ini akan memobilisasi sisa-sisa pendukung Sukarno. Presiden pertama Indonesia secara *de facto* pensiun dengan status tahanan rumah dan diisolasi di Istana Bogor; dia tetap berada di sana hingga wafatnya pada bulan Juni 1970. Soeharto menguasai politik Indonesia secara penuh.

Perubahan ekonomi terjadi dengan cepat, yang memengaruhi kondisi politik dalam negeri. Inflasi terpangkas hingga sekitar 100% pada tahun 1967; angkanya masih sangat tinggi tetapi bisa digolongkan kemajuan besar mengingat inflasi yang terjadi sebelumnya. Pertukaran mata uang asing dibebaskan. Dari tahun 1966 hingga akhir tahun 1968, rupiah dibiarkan mengambang secara bebas. Kebijakan semacam ini mengurangi ekspor gelap dan impor asing dan mendorong pertambahan bantuan dan investasi luar negeri. Normalnya, pengusaha rantauan dan cukong yang memiliki akses dana luar negeri akan berusaha memperoleh keuntungan yang paling cepat dan paling tinggi, dan menyisakan lahan keuntungan yang lebih kecil bagi investor pribumi. Kepercayaan pemerintah pada tingkat suku bunga tinggi untuk menahan inflasi menyebabkan para pengusaha pribumi yang tidak memiliki akses langsung ke modal asing sangat terpukul. Para pengusaha pribumi merasa disingkirkan bahkan dari bisnis yang secara tradisional milik mereka (contohnya, tekstil, makanan dan minuman, rokok kretek) oleh Cina dan pesaing asing lainnya yang memiliki akses ke uang yang lebih murah. Maka, para

pengusaha pribumi, yang cenderung antikomunis, tergolong Islam yang taat, dan karena itu menjadi bagian dari koalisi awal yang mendukung Soeharto, mulai ragu apakah kepentingan mereka akan benar-benar dilayani oleh Orde Baru. Sementara itu, pengangguran dan kurangnya pekerjaan semakin meningkat, dan informasi tentang penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi oleh para pemimpin rezim semakin tersebar. Pada tahun 1967, para mahasiswa—aliansi-aliansi yang setia terhadap Orde Baru pada 1965–6—mulai berdemonstrasi mengkritik Orde Baru, meminta harga diturunkan dan tindakan korupsi dihentikan.

Isu agama yang baru dan menghebohkan juga muncul. Sepanjang abad XX, para reformis Islam telah menyerukan untuk lebih memperkokoh dasar akidah. Setelah tahun 1965, ketegasan Islam yang kian meningkat terbuktikan lewat besarnya peran para aktivis Islam dalam pembunuhan masal 1965–6, lewat seruan salat yang diudarakan dengan suara keras, dan lewat peringatan berulang-ulang kepada kaum mukmin untuk menyempurnakan akidah mereka. Banyak umat muslim menganggap positif atmosfer kesadaran beragama yang semakin tinggi ini. Tetapi, sebagian masyarakat Indonesia menganggap Islam dengan gayanya yang baru dan lebih dinamis ini tidak menarik. Sebagian bahkan keluar dari Islam dan memeluk kepercayaan lain. Banyak *abangan* Jawa beralih ke Kebatinan, sebuah istilah yang digunakan untuk sekte mistis pribumi dengan teologi campuran. Bahkan lebih serius lagi, terjadi gelombang perpindahan agama ke Kristen yang tak terduga dan belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Indonesia, khususnya di kota-kota Jawa Timur dan Jawa Tengah. Perpindahan agama ke Hindu dan Budha juga terjadi, walaupun dalam jumlah yang lebih kecil. Perpindahan agama ini sebagian karena alasan agama dan sebagian lagi karena alasan politik. Ketika peristiwa 1965 terjadi, orang memeluk agama bukan karena memang ingin menjadi penganut agama dunia yang dikenal secara resmi, namun lebih karena khawatir akan diberi label ateis dan komunis jika tidak beragama. Karena itu, sebagian orang Indonesia yang tidak ingin menyebut diri mereka muslim menyatakan diri mereka sebagai Kristen, kadang-kadang tanpa sebelumnya mengalami kontak dengan penyebar agama Kristen. Fakta yang bersifat anekdot menunjukkan bahwa hal ini terutama terjadi di desa-desa bekas basis PKI. Kewajiban ritual

Kristen yang tidak terlalu sukar dan tidak adanya larangan Kristen dalam makanan jelas berperan dalam hal ini, selain juga pertimbangan politik. Tentu, misionaris Kristen pun berperan, dan praktik penyebaran agama dari beberapa gereja, khususnya *Jehovah's Witnesses* dan Adven Hari Ketujuh, mengundang banyak kritik dari pihak Islam.

Sensus tahun 1971 menunjukkan perubahan komposisi agama yang besar sejak data terakhir pada tahun 1930-an, tetapi mungkin perubahan ini tidak sedramatis yang dikhawatirkan sebagian umat Islam. Pada tahun 1933, hanya 2,8% (di bawah 2 juta) dari total penduduk Indonesia beragama Kristen, sedangkan pada tahun 1971 angkanya meningkat menjadi 7,5% (hampir mencapai 9 juta orang). Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, peningkatannya lebih dramatis. Pada tahun 1930-an, hanya 0,1% dari populasi di Jawa Tengah dan 0,4% di Jawa Timur beragama Kristen; pada tahun 1971, angka ini melonjak menjadi masing-masing 2,1% dan 1,7%. Prosentase ini tentu masih kecil, tetapi umat Kristen sangat menonjol karena keunggulan sekolah-sekolah Kristen dan karena perpindahan agama itu paling banyak terjadi di wilayah perkotaan. Pada tahun 1971, umat Kristen tercatat 11,6% dari penduduk perkotaan di Jawa Tengah; 14,9% di Yogyakarta dan 15,1% di Surakarta dan Magelang. Sebagian pemeluk Kristen baru ini beretnis Cina, tetapi sebagian besar orang Jawa.

Indonesia memang telah terbentuk menjadi masyarakat multiagama, tetapi di masa lalu komunitas agama yang berbeda itu umumnya berdasarkan pada wilayah geografis atau kelompok etnis yang berbeda pula. Kini, para penganut agama yang berbeda hidup saling berdampingan dan sering sekali berasal dari kelompok atau bahkan keluarga yang sama. Pada masa terjadinya kekerasan dan konflik politik yang luar biasa, tidak aneh jika peralihan Indonesia ke bentuk multiagama yang baru ini tidak berjalan begitu lancar. Pada bulan April 1967, serangkaian peristiwa kekerasan mulai terjadi ketika umat muslim menyerang gereja-gereja Kristen di Aceh. Pada bulan Oktober, kerusuhan anti-Kristen yang sangat serius terjadi di Makasar. Kekerasan agama dilaporkan juga terjadi di Jawa dan Sumatera.

Pada bulan Oktober 1967, Soeharto mengutuk kekerasan agama itu dan menggerakkan pemerintah untuk menghentikan kekerasan itu. Pemerintah mengadakan sebuah dialog antaragama

di Jakarta pada bulan November, di mana pemimpin Kristen dan Islam berkesimpulan bahwa tidak ada dasar untuk berkompromi. Karena Islam dan Kristen sama-sama merupakan agama misi, yang ingin sekali membawa pesan universal kepada semua orang, maka meminta salah satu pihak untuk menghentikan dakwahnya sama dengan memintanya untuk mengkhianati agamanya. Tetapi, para pemimpin Kristen dan Muslim setidaknya berusaha saling mengenal pengabdian tulus mereka kepada Tuhan. Para tokoh muda Kristen dan Islam lebih bisa saling menghormati daripada para tokoh tua mereka. Hal ini mungkin karena banyak di antara tokoh muda dari kedua agama itu sudah pernah bekerja sama dalam menyelesaikan kekacauan politik pada tahun 1965–6 dan juga karena para tokoh muda muslim tidak merasakan frustrasi seperti yang sering dialami para tokoh tua mereka. Di samping itu, kedua tokoh muda dari kedua agama ini memiliki pandangan yang lebih bijaksana dalam melihat bahaya kekerasan agama, meskipun mereka tidak selalu mampu atau mau mengurangi kebencian antara pengikut-pengikut mereka. Kekerasan agama mereda setelah tahun 1967, sebagian besar karena militer menyatakan dengan tegas siap menggunakan kekuatan untuk menghentikannya.

Konflik partai politik era Sukarno masih terjadi pada akhir tahun 1960-an, tetapi kerangka politik berubah dengan cepat. Pada bulan April–Mei 1967, usaha menghidupkan kembali Masyumi dengan nama berbeda dilakukan oleh para politisi Islam modernis. Soeharto tidak menyetujui usaha ini, karena baginya, para politisi Islam modernis di perkotaan sudah tercemar oleh pemberontakan dan fanatisme. Pada bulan Mei 1967, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia didirikan untuk melakukan Islamisasi yang lebih jauh ke dalam masyarakat Indonesia, dengan Natsir sebagai ketuanya. Elite militer Orde Baru memandang lembaga ini sebagai peran tepat bagi Natsir dan bagi agama; politik dianggap tidak cocok untuk Natsir maupun agama. Para tokoh muslim mencurigai pemerintah memiliki prasangka anti-Islam secara diam-diam. Mereka melihat sebagian personel militer senior beragama Kristen dan agama personel-personel lainnya—khususnya Presiden—tampak lebih dekat ke Kebatinan.

PNI dan NU semakin ditekan oleh pemerintah pada tahun 1967, seperti yang dilakukan terhadap sebagian militer. Banyak

personel militer ingin memusnahkan apa pun yang berhubungan dengan Orde Lama, dan karena itu mereka berharap bisa menghancurkan PNI. Tetapi, Soeharto lebih memilih untuk memperlemah dan mengendalikan partai ini. Sitor Situmorang, pemimpin intelektual PNI dan bekas sekutu Lekra, dipenjara pada tahun 1967 dan ditahan hingga tahun 1975 tanpa pemeriksaan pengadilan. Para komandan daerah di Sumatera, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan melarang PNI untuk sementara. Tetapi, partai itu bertahan karena Soeharto memang tetap ingin mempertahankannya. Para pemimpin NU juga dikecam, tetapi kelompok ini kurang memerlukan perlindungan Soeharto karena basis sosialnya yang lebih kuat di pedesaan. Banyak elite Orde Baru percaya bahwa NU tidak akan menimbulkan masalah selama kepentingan agamanya tidak terancam. Unsur-unsur yang setia kepada Sukarno tetap dipertahankan di badan-badan kepolisian, angkatan laut, angkatan udara, dan tentara, terutama di Divisi Brawijaya. Pada kurun waktu tahun 1967, pembersihan unsur-unsur pendukung Sukarno dilakukan tanpa perlawanan berarti, kecuali sedikit baku tembak antara kesatuan tentara dan marinir di Jawa Timur pada bulan Juni.

Pada bulan Agustus 1967, Soeharto menghapuskan empat kementerian angkatan bersenjata yang terpisah dan memegang langsung kekuasaan atas empat angkatan tersebut. Gaya Sukarno yang mendorong persaingan antar keempat angkatan itu digantikan oleh kebijakan Soeharto yang sentralistik. Militer yang lebih terpusat ini juga mengambil alih pemerintahan daerah. Pada tahun 1968, 17 dari 25 provinsi diperintah oleh perwira militer; pada tahun 1969, lebih dari setengah dari keseluruhan bupati dan walikota adalah militer. Sentralisasi kekuasaan dalam lingkaran inti orang-orang militer di sekitar Soeharto kini berkembang dengan baik.

Pada bulan Maret 1968, MPRS mengadakan sidang lagi dan memilih Soeharto sebagai presiden untuk masa lima tahun, yang menegaskan keberhasilan dan ketahanan kekuasaannya. Dia melantik kabinet baru pada bulan Juni yang diisi lebih banyak oleh teknokrat sipil daripada militer. Sumitro Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan, sekalipun terdapat penolakan dari orang-orang yang tidak menyetujuinya karena bergabung dalam PRRI. Pengaruh para teknokrat terhadap kebijakan

negara sangat besar, karena Indonesia masih sangat memerlukan dukungan ekonomi dari para donatur nonkomunis, yang bahasa dan kebijakan ekonominya dikuasai para teknokrat. Dalam kabinet tahun 1971 terdapat sepuluh profesor universitas, yang paling terkemuka adalah ekonom Widjojo Nitisastro (l. 1927). Tetapi, keputusan strategis tetap berada di tangan militer lingkaran dalam.

Rezim baru masih menghadapi masalah keamanan, tetapi jumlahnya tidak banyak dan bisa diselesaikan dengan cepat. Pada tahun 1967, Blora Selatan (Jawa Tengah bagian utara) menjadi saksi kebangkitan kembali gerakan Samin yang pada awal abad XX dipimpin oleh Surantiko Samin. Orang suci lokal bernama Mbah Suro (1921–67) menarik banyak petani sebagai pengikut. Pemerintah menganggap ini sebagai kebangkitan kembali komunisme dan mengirim pasukan yang menewaskan Mbah Suro dan sejumlah pengikutnya yang tak dikenal. Sebuah organisasi komunis bawah tanah yang lebih terang-terangan muncul di Blitar Selatan (Jawa Timur bagian selatan) pada pertengahan tahun 1968. Para tokoh PKI yang masih hidup bersembunyi di sana untuk mempersiapkan perlawanan gerilya. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan para pendukung mereka dari kalangan petani abangan, yang mulai balas dendam membunuh para tokoh NU. Fakta inilah yang menunjukkan masih adanya sisa-sisa PKI. Pada bulan Juli dan Agustus, organisasi itu dimusnahkan. Sebagian besar tokohnya dan delapan ratus pengikutnya dipenjarakan. Interogasi terhadap orang-orang ini berdampak pada disingkirkannya beberapa ratus orang militer yang terkait secara terselubung dengan PKI. Di Kalimantan Barat, orang Indonesia dan Cina yang komunis bertahan dengan bersembunyi di hutan tetapi dampaknya kecil. Operasi gabungan antara Malaysia dan Indonesia dilakukan untuk mengawasi mereka dengan ketat sepanjang perbatasan Serawak. Pada akhir tahun 1968, tidak ada lagi ancaman yang berarti dari PKI. Namun demikian, organisasi keamanan yang terkemuka dari rezim ini, Kopkamtib, tetap melakukan penjagaan terhadap penduduk, meskipun terhambat dengan aparat administrasi negara yang tidak efisien.

Pada bulan Februari 1968, partai politik berbasis Islam modernis bernama Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) didirikan. Pada sidang MPRS tahun 1968, bersama dengan NU, Parmusi

mendesak agar Piagam Jakarta disahkan menjadi undang-undang sehingga hukum Islam memiliki basis konstitusional agar bisa diterapkan bagi umat Islam. Namun usulan ini ditolak. Lalu, pada bulan November, Parmusi memilih para pemimpin baru yang mencakup mantan tokoh-tokoh Masyumi, meskipun bukan Natsir atau Sjafruddin. Pemerintah tidak menyetujui kepemimpinan baru ini dan, karena itu, meninggalkan Parmusi begitu saja tanpa kepemimpinan selama dua tahun. Namun, pemerintah mengizinkan kebangkitan kembali beberapa surat kabar antikomunis yang sebelumnya dilarang pada tahun 1968, termasuk *Indonesia Raya* milik Mochtar Lubis, surat kabar Masyumi dulu dan sekarang Parmusi, *Abadi*, dan surat kabar PSI *Pedoman*.

Ketika politik dalam negeri sudah bisa dikendalikan dengan baik, arah kebijakan asing ditetapkan, dengan ASEAN (Association of South East Asian Nations) sebagai landasan regional. ASEAN dibentuk pada bulan Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina untuk memajukan kerja sama ekonomi dan budaya di antara negara-negara yang antikomunis sewilayah. Namun, hingga pertengahan 1970-an, tidak banyak yang bisa dilakukan ASEAN. Fungsi utamanya bersifat simbolis: ASEAN tidak didirikan untuk menggalang beragam proyek, tapi pertemuan-pertemuan dan proyek-proyeknya hanya untuk membenarkan kehadiran organisasi itu sendiri. Tujuan utamanya adalah menjadi lambang kerja sama regional dan memulihkan citra Indonesia sebagai aktor regional yang konstruktif, bebas dari sentimen era Sukarno dan sikap agresif. Adam Malik dan elite Orde Baru juga berharap bahwa kerja sama regional ini bisa berfungsi sebagai penyeimbang terhadap pengaruh besar Jepang dan Amerika serikat terhadap Indonesia.

Struktur ekonomi juga bisa dimantapkan pada tahun 1968. Minyak merupakan fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah, meskipun industri lain yang memerlukan modal intensif dan teknologi tinggi dan menghasilkan mineral dan karet juga berkembang dengan pesat. Pengeboran lepas pantai dimulai pada tahun 1966 dan berkembang pesat pada tahun 1968. Pada bulan Agustus 1968, peran bisnis tentara semakin kokoh ketika perusahaan minyak Pertamin (didirikan pada 1961) dan Permina digabung menjadi Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas

Bumi Negara). Pertamina dimanfaatkan sebagai kerajaan pribadi oleh Ibnu Sutowo, yang segera memperoleh reputasi internasional berkat manajemennya yang agresif dan penuh visi, reputasi yang kemudian runtuh pada tahun 1975. Pertamina hanya sedikit melakukan pengeboran sendiri; selebihnya, perusahaan ini (dan bukan pemerintah) mengadakan perjanjian pembagian produksi dengan perusahaan asing. Produksi minyak tumbuh sekitar 15% pada tahun 1968–9 dan hampir 20% pada tahun 1970. Sementara itu, para teknokrat kian mampu mengendalikan inflasi. Inflasi bisa berkurang hingga menjadi sekitar 85% pada tahun 1968, namun timbul pertanyaan tentang kapan rakyat secara umum memperoleh kemakmuran seperti yang dijanjikan Orde Baru.

Tahun 1969 bisa dikatakan sebagai masa akhir transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Inflasi akhirnya benar-benar dapat dikendalikan. Kenaikan harga bisa ditekan hingga sekitar 10% selama tahun tersebut. Pada 1 April, pemerintah mengalihkan perhatian utamanya dari stabilisasi ekonomi menuju pembangunan dengan menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama (Repelita I) untuk tahun 1969–74. Dalam Repelita I ini, investasi pemerintah lebih ditanamkan pada bidang usaha yang menghasilkan dampak yang paling besar, seperti pertanian, infrastruktur ekonomi, dan perluasan industri ekspor dan pengganti impor. Tiga perempat pengeluaran pada Repelita I dibiayai dari pinjaman asing, yang jumlahnya membengkak hingga US$ 877 juta pada akhir periode. Pada tahun 1972, utang asing baru yang diperoleh sejak tahun 1966 sudah melebihi pengeluaran saat Sukarno berkuasa. Pada tahun 1969, pulihnya nama Indonesia di dunia antikomunis ditandai dengan kunjungan dari beberapa kepala negara asing, termasuk Presiden Amerika Richard Nixon. Menyusul kunjungan Nixon, bantuan militer Amerika untuk Jakarta pun meningkat tajam, mencapai US$ 40 juta pada tahun 1976.

Pada tahun 1969, Indonesia juga mampu menyelesaikan masalah lama dengan bergabungnya Irian sebagai provinsi ke-26. Penggabungan ini terlaksana setelah sebuah 'pemilihan bebas' yang disponsori PBB, yang hasilnya sudah bisa diketahui sebelumnya. Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada 1.022 tokoh Irian untuk memilih dan, tak terlalu mengejutkan, mereka semua memilih bergabung dengan Indonesia seperti yang

diperkirakan. Dengan bergabungnya Irian, Jakarta menghadapi tantangan budaya dan administratif, serta masalah keamanan dalam bentuk pergerakan perlawanan bernama Organisasi Papua Merdeka.

Pemerintah kini berusaha mencari solusi akhir bagi masalah administrasi dan keamanannya yang tak beres-beres, yaitu masalah para narapidana politik. Di seluruh nusantara, penjara-penjara penuh sesak dengan orang yang ditahan tanpa pemeriksaan pengadilan sejak tahun 1965. Jumlah narapidana itu tidak diketahui pasti. Pada akhir tahun 1977, Amnesti Internasional memperkirakan narapidana politik Indonesia berjumlah antara 55.000 dan 100.000 orang. Mereka dibagai ke dalam tiga kelompok yang menunjukkan tingkat keterlibatan mereka dalam usaha kudeta tahun 1965. Kategori A adalah orang yang terlibat langsung, kategori B orang yang terlibat tidak langsung (anggota PKI atau organisasi massanya atau para simpatisannya), dan kategori C orang yang tingkat keterlibatannya di bawah kategori B (perbedaannya sering tidak jelas). Pada bulan Juli 1969, pemerintah mengumumkan bahwa pemerintah memenjarakan sejumlah besar narapidana kategori B di Pulau Buru di Maluku Selatan. Narapidana kategori C diumumkan akan dibebaskan, tetapi kelompok Islam dan anti-PKI enggan menerima para narapidana ini kembali ke masyarakat. Namun, tampaknya mereka dibebaskan dengan sembunyi-sembunyi selama beberapa tahun berikutnya. Sedangkan narapidana kategori B dipenjarakan secara permanen, baik itu di Buru maupun di penjara-penjara lainnya. Pada tahun 1977, terdapat sekitar 14.000 narapidana di Buru, salah satunya adalah Pramoedya Ananta Toer yang menulis tetralogi novel sejarahnya selama di penjara: *Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah,* dan *Rumah Kaca* yang membuatnya mendapatkan pengakuan internasional lagi pada tahun 1980-an. Para narapidana kategori A harus menunggu lama untuk dibawa ke pengadilan dan hampir selalu berakhir dengan hukuman mati.

Tahap akhir pembentukan kembali organisasi militer pemerintahan Soeharto terjadi pada tahun 1969–70. Para komandan keempat angkatan diganti dengan kepala-kepala staf dan kekuasaan Departemen Pertahanan Keamanan terhadap komandan-komandan regional dan semua angkatan bersenjata ditingkatkan. Para pendukung setia Soeharto menguasai angkatan darat, se-

mentara kepala staf angkatan laut yang baru adalah kolega lama Suharto, Laksamana Muda Sudomo (l. 1926). Pembersihan terakhir di angkatan laut menyusul sesudah itu. Beberapa perwira angkatan darat juga ditahan pada tahun 1970 akibat kedekatan mereka dengan PKI, beberapa di antaranya sudah cukup senior. Pada bulan Oktober 1970, Soeharto menurunkan usia pensiun bagi perwira menjadi 48 tahun dan mengumumkan bahwa 86 jenderal akan pensiun dalam dua tahun ke depan. Sejak saat itu, militer menjadi begitu terpusat, sedemikian rupa sehingga perselisihan antarfaksi di dalamnya hampir tak terlihat oleh pengamat luar.

Pemerintah sudah siap melaksanakan pemilihan umum yang tertunda itu. Pada bulan November 1969, DPR-GR mengeluarkan undang-undang pemilihan umum yang menetapkan keanggotaan dari parlemen yang baru (DPR). DPR ditetapkan terdiri atas 360 anggota yang dipilih, ditambah 100 anggota yang diangkat. Seluruh anggota parlemen ini menjadi bagian dari 920 anggota MPR bersama-sama dengan 207 militer dan anggota golongan fungsional yang dipilih oleh Presiden, 131 anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 112 anggota yang dipilih menurut hasil perolehan suara partai pada pemilihan umum, dan 10 anggota yang dipilih dari partai-partai yang kurang berhasil. Dengan demikian, pemerintah menunjuk langsung 22% anggota DPR dan 33% anggota MPR, cukup untuk menggagalkan amandemen undang-undang. Pada bulan Februari 1970, pemerintah mengumumkan bahwa semua pegawai pemerintah harus setia kepada pemerintah. Mereka tidak diizinkan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golkar (Golongan Karya). Partai ini didirikan oleh tentara pada tahun 1964 untuk mempererat hubungan kerja sama antara tentara dan sipil. Jadi, pemerintah menekan pemilih tradisional PNI yang tersisa dalam birokrasi. Orde Baru ingin menjadikan Golkar sebagai kendaraan untuk mendirikan sebuah kondominium birokratis-militer di dalam negara.

Pemerintah belum yakin sudah cukup melemahkan partai-partai politik. Maka, Ali Murtopo ikut campur dalam kompetisi kepemimpinan PNI dan Soeharto memaksakan agar kepemimpinan Parmusi berada di tangan orang yang dapat dipercayainya secara politik, H. Mohammed Safaat Mintaredja (l. 1921). Di antara empat partai besar dalam pemilihan umum terakhir pada

tahun 1955, hanya NU yang masih eksis seperti dulu.

Ada sedikit keraguan tentang kemungkinan hasil yang akan diperoleh pada pemilihan umum, karena kritik publik terhadap rezim dan keluarga Presiden kian meningkat. Meskipun banyak orang memandang Soeharto sendiri mengagumkan, istrinya Siti Hartinah Soeharto (1923–96), lebih dikenal dengan Ibu Tien, dipercaya secara luas banyak memanfaatkan posisi suaminya untuk keuntungan finansial. Dia mengetuai beberapa yayasan dengan investasi bisnis yang besar. Saudara kandung Soeharto, Probosutedjo (l. 1930), dan saudara tiri Soeharto, Sudwikatmono (l. 1934), juga mengembangkan karier bisnis. Banyak orang percaya bahwa kesuksesan mereka lebih karena pengaruh kedudukan mereka sebagai kerabat Presiden, bukan karena kepintaran mereka dalam berbisnis. Demonstrasi para mahasiswa terhadap kenaikan harga dan korupsi menempatkan mahasiswa sebagai oposisi langsung terhadap pemerintah. Pada bulan Juni 1970, sebuah tim antikorupsi yang dipimpin mantan Perdana Menteri Wilopo, bersama dengan Hatta sebagai seorang anggota, melaporkan bahwa korupsi sudah menyebar ke mana-mana. Tim itu kemudian dibubarkan tanpa ada tindakan berarti yang dilakukan.

Ali Murtopo, Amir Mahmud (Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab mengurus birokrasi), dan Kopkamtib ditugaskan memastikan kemenangan Golkar dalam pemilihan umum. Kopkamtib menyaring kandidat semua partai dan mendiskualifikasi sekitar 20% karena tidak dipercaya secara politik. Para perwira militer dan pejabat-pejabat yang turun ke desa diwajibkan menarik suara dalam jumlah yang sudah ditentukan. Intimidasi disebarluaskan, tetapi jangan bayangkan bahwa hanya ini yang menentukan kemenangan Golkar. Para pemilih yang melihat pemilihan umum ini sebagai persaingan antara kekuatan Islam dan pemerintah yang 'sekuler' (atau anti-Islam) dan para pemilih yang tidak percaya terhadap Islam mendukung Golkar; karena itu, secara ironis, Golkar meraih banyak suara dari bekas basis pemilih PKI dan PNI.

Tingkat kemenangan Golkar pada pemilihan umum Juli 1971 mengejutkan bahkan pemerintah sekalipun. Golkar memperoleh 62,8% suara, memenangkan 236 (65,6%) dari 360 kursi yang diperebutkan. PNI hanya memperoleh 6,9%, hasil terbaiknya adalah 19,5% di Jawa Tengah. NU meraih perolehan terbaik di antara partai-partai nonpemerintah dengan 18,7% di tingkat

nasional dan 35,2% di Jawa Timur (tetapi Golkar lebih unggul di provinsi ini dengan 54,9%). Golkar memenangkan mayoritas mutlak di setiap provinsi kecuali di Aceh, Jakarta, dan Maluku, dimana Golkar tetap merebut suara terbanyak. Penjumlahan jatah kursi anggota yang diangkat dan anggota yang dipilih menunjukkan bahwa pemerintah menguasai 73% kursi DPR, partai-partai Islam 20,4%, dan partai-partai non-Islam 6,5%. MPR dikuasai pemerintah dengan jumlah sekitar 82%.

Pemerintah tidak melihat kemenangan pemilihan umum ini sebagai tanda bahwa kekuatan politik Indonesia sudah bisa dikendalikan, tetapi hanya sebagai justifikasi untuk mengubur partai-partai lama. Pemerintah mendesak mereka untuk meleburkan diri ke dalam dua partai. Pada bulan Januari 1973, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dibentuk dari partai-partai Islam, terutama dari NU dan Parmusi. Dari partai-partai non-Islam (Murba, PNI, Katolik, Kristen, dan IPKI kecil) dibentuk PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Kecuali pada masa kampanye pemilihan umum, partai-partai ini tidak boleh memiliki cabang-cabang di bawah tingkat kabupaten, keterbatasan yang tidak dialami Golkar karena organisasi ini sudah memiliki jaringan kuat dalam birokrasi dan, bagaimanapun, ia disamarkan seolah-olah bukan partai politik. Mulai saat ini hingga selanjutnya, partai-partai politik bukan lagi merupakan tantangan serius bagi pemerintah.

Pada bulan Maret 1973, MPR yang baru terbentuk bersidang dan kembali memilih Soeharto sebagai presiden untuk kedua kalinya selama periode lima tahun. Jabatan wakil presiden yang ditetapkan oleh UUD 1945 dipegang untuk pertama kalinya, sejak Hatta, oleh Sultan Hamengkubuwana IX (1973–8). Sultan Hamengkubuwana IX sangat dikagumi oleh Soeharto dan rakyat Indonesia. Banyak orang berharap dia bisa meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Tetapi pada akhirnya, kehadirannya hanya memberikan sedikit perubahan. Satu-satunya masalah yang paling serius saat sidang MPR tahun 1973 adalah menyangkut ajaran Kebatinan. Sejak tahun 1957, kelompok Kebatinan berjuang memperoleh pengakuan yang sama dengan agama-agama lainnya, pengakuan mana akan membuka jalan bagi mereka untuk memperoleh dana dari Departemen Agama dan menghindarkan mereka dari penindasan. Kelompok Islam khawatir pemerintahan Soeharto akhirnya akan memberi pengakuan ter-

sebut. Namun pada akhirnya, pemerintah mengakui Kebatinan hanya sebagai kepercayaan, yang disebutkan dalam UUD 1945 bersama dengan agama, dengan secara resmi mengakuinya sebagai fenomena budaya, bukan agama, dan karena itu tidak memiliki seksi di dalam Departemen Agama.

Namun, elite penguasa ternyata tidak setangguh seperti yang pemerintah sendiri dan pendukung luarnya percayai dan harapkan. Pada awal tahun 1970-an, kemakmuran yang melimpah pada segelintir elite dan sekutu cukong Cina mereka mengundang berbagai reaksi, mulai dari lelucon-lelucon politik yang tersebar luas sampai demonstrasi mahasiswa dan kekerasan anti-Cina. Kesadaran moral Islam yang semakin meningkat dan kemarahan pengusaha pribumi dari kalangan Islam yang taat menyatu untuk mendesak agar persoalan agama dipandang penting. Ali Murtopo dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam pemerintahan yang anti-Islam. Ketika dia mendukung ide undang-undang perkawinan baru yang mengizinkan wanita muslim menikah dengan pria nonmuslim dan mengakui pernikahan sipil, kaum muslim yang taat marah. Pada bulan September 1973, para mahasiswa muslim menyerbu gedung parlemen dan memaksa pemerintah menarik kembali rancangan undang-undang tersebut. Ali Murtopo dan pemerintah harus menerima bahwa kompromi tak terelakkan, dan undang-undang perkawinan hasil revisi pun kemudian disahkan pada bulan Desember. Penggulingan pemerintahan Thailand dari Thanom Kittikachorn oleh demonstrasi mahasiswa pada bulan Oktober 1973 menaikkan keberanian para pengkritik pemerintahan Soeharto dan sekaligus mendorong para pendukungnya untuk melunak dan mau berkompromi.

Persaingan faksi di dalam pemerintahan terbawa-bawa dalam urusan publik, terutama mengenai peranan Jepang. Jepang mengambil 53% ekspor Indonesia pada tahun 1973 (71% di antaranya berupa minyak) dan memasok 29% impor Indonesia. Di samping itu, Jepang lebih menonjol karena investasi mereka yang meningkat pada industri pabrik di Jawa, yang tetap menghambat pertumbuhan pengusaha pribumi. Jepang dipandang secara luas sebagai pemeras ekonomi Indonesia, dibantu oleh orang yang dekat dengan istana kepresidenan. Kritik dilontarkan terutama kepada Ali Murtopo dan salah satu kolega terdekat Soeharto lainnya, Mayjen Sudjono Humardani (1919–86), yang dianggap

sebagai pembimbing mistis Presiden dan juga perantara bagi para investor asing (terutama Jepang) yang mencari kebaikan hati pemerintah. Mereka menghadapi kepala Kopkamtib, Jen Soemitro (1927–98), yang membuka diri untuk berdialog dengan pengkritik rezim.

Kunjungan Perdana Menteri Tanaka Kakuei ke Jakarta pada bulan Januari 1974 memicu kerusuhan yang paling buruk di ibu kota sejak kejatuhan Sukarno, sebuah peristiwa yang dikenal dengan Malari (Malapetaka Januari). Para mahasiswa dan pemuda kota yang miskin membakar sekitar 800 mobil dan 100 gedung, dan merampok banyak toko yang menjual produk-produk Jepang. Di lain tempat, diperkirakan 20.000 orang mengelilingi rumah-tamu Tanaka, sementara 5.000 orang mengelilingi istana kepresidenan. Baru setelah hari kedua peristiwa inilah Kopkamtib bertindak, penundaan yang menambah kecurigaan bahwa Soemitro bermurah hati kepada para demonstran atau berusaha menggunakan krisis negara untuk kepentingan politiknya.

Pemerintah mengawasi peristiwa ini dengan sangat serius. Pada 17 Januari, kerusuhan bisa diredakan. Untuk pertama kalinya, alih-alih menuduh orang-orang komunis sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kerusuhan itu, pemerintah mengalamatkan kecamannya kepada para mantan aktivis Masyumi dan PSI. Kopkamtib menahan 770 orang, hampir semuanya dibebaskan pada bulan Mei 1976. Namun, tiga tokoh mahasiswa dijebloskan ke dalam penjara dengan bukti yang meragukan. Di antara orang yang ditahan adalah Mochtar Lubis. Surat kabarnya, *Indonesia Raya*, ditutup, seperti juga *Pedoman*, *Abadi*, dan delapan surat kabar lainnya. Soemitro diberhentikan dari Kopkamtib, yang lagi-lagi diambil alih langsung oleh Soeharto dengan Laksama Sudomo sebagai kepala stafnya.

Pemerintah kini tumbuh dalam iklim ekonomi dunia yang berubah dengan cepat, yang membuatnya tidak terlalu tergantung pada dana bantuan dan petunjuk dari luar negeri. Perang Arab–Israel yang terjadi pada bulan Oktober 1973 menyebabkan revolusi harga minyak. Harga ekspor minyak mentah Indonesia meningkat dari US$ 2,96 per barel pada bulan April 1973 menjadi US$ 12,60 pada bulan Juli 1974. Pada tahun 1966, minyak menyumbang 30% dari nilai ekspor Indonesia dan pada tahun 1974 melonjak hingga 74%. Di bawah Repelita II (1974–79),

72% pengeluaran dapat dibiayai dari pendapatan dalam negeri, tidak lagi dari pinjaman asing. Kenaikan harga minyak yang pesat ini tidak lalu membuat Indonesia menjadi negara kaya. Indonesia merupakan anggota OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) yang paling banyak penduduknya dan paling miskin, dengan pendapatan per kapita GNP yang tak sampai setengah dari pendapatan per kapita anggota termiskin berikutnya, Nigeria. Tetapi kebijakan ekonomi kini bisa berjalan bersesuaian dengan nasionalisme ekonomi yang selalu berada dalam pikiran rezim. Pengaruh kebijakan IMF dan IGGI, juga para teknokrat Indonesia yang mendukung mereka, agak melemah untuk sementara waktu.

Rencana ekonomi pemerintah tergantung pada pengendalian pendapatan minyak, yang berarti harus mampu mengendalikan Pertamina. Di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, Pertamina telah tumbuh menjadi salah satu korporasi terbesar di dunia. Pertamina menghasilkan sendiri 28,2% minyak nasional pada akhir tahun 1973 dan mengadakan perjanjian pembagian produksi dengan Caltex (menghasilkan 67,8% minyak) dan Stanvac (3,6%). Pertamina juga menguasai 7 kilang minyak Indonesia, terminal-terminal minyak, 116 kapal tangki, 102 kapal lainnya, dan sebuah maskapai penerbangan. Pertamina juga menanamkan modalnya di perusahaan semen, pupuk, gas alam cair, baja, rumah sakit, perumahan, pertanian padi, dan telekomunikasi, dan membangun kantor eksekutif kepresidenan (Bina Graha) di Jakarta. Hampir semua kebijakan Pertamina berada di luar kendali pemerintah dan dilakukan berdasarkan utang besar-besaran, manajemen yang kacau balau, dan korupsi.

Pada tahun 1973, pemerintah memperketat syarat-syarat peminjaman dana oleh Ibnu Sutowo dari luar negeri. Pada bulan Februari 1975, Pertamina tidak mampu lagi membayar pinjaman dari beberapa bank Amerika dan Kanada. Informasi yang kelak dikeluarkan banyak menghilangkan nama baik elite Indonesia di mata masyarakat Indonesia dan asing. Pemerintah mengambil alih Pertamina dan berusaha membayar utang-utangnya, yang tercatat lebih dari US$ 10 milyar. Pertamina kini berada di bawah kendali pemerintah, namun dengan harga yang mahal.

Ketika iklim ekonomi dunia dengan cepat berubah, panggung politik internasional pun berubah. Kunjungan Nixon ke Cina pada tahun 1972 menandai babak baru hubungan Cina dan Amerika, sementara perbaikan hubungan Soviet dan Amerika telah

menjadi topik diskusi selama beberapa waktu. Persetujuan Paris tahun 1973 mengawali penarikan pasukan Amerika dari Vietnam. Sesudah itu, bantuan militer Amerika kepada Indonesia kian meningkat. Pada tahun 1975, peperangan di Indocina berakhir dengan kemenangan komunis. Dalam keadaan demikian, elite militer Indonesia agak tidak yakin dengan konteks politik luar negeri dan cemas terhadap transformasi potensial dalam negeri.

Kekhawatiran terburuk militer menjadi kenyataan ketika negara koloni Portugal yang terbelakang, Timor Timur, menimbulkan krisis hebat. Revolusi tahun 1974 di Portugal mengakhiri kerajaan penjajahan Portugal yang sudah hampir ambruk. Tiga partai politik bermunculan di Timor Timur: Fretilin (Frente Revolucionária Timor Leste Independente, Fron Revolusioner Kemerdekan Timor Timur) yang radikal dan ingin segera merdeka, UDT (Uniáo Democrática Timorense, Persatuan Demokratik Rakyat Timor) yang ingin merdeka secara bertahap, dan Apodeti (Associação Popular Democrática Timorense, Ikatan Demokratik Popular Rakyat Timor), yang terkecil dari ketiga partai itu dan ingin bergabung dengan Indonesia. Pada pertengahan tahun 1975, Fretilin menguasai jabatan-jabatn penting di wilayah tersebut. Lalu, pada bulan Agustus 1975, perang saudara pecah, ketika UDT melakukan usaha kudeta yang kemudian dilawan Fretilin dengan dukungan militer Portugal yang ada di wilayah tersebut.

Jakarta tidak ingin menoleransi adanya sebuah negara merdeka, dan cenderung kiri, di dalam kepulauannya sendiri. Tetapi, seberapa jauh persiapan untuk mencegah kemerdekaan ini baru jelas ketika Indonesia menyerang Timor Timur pada 7 Desember 1975. Pasukan Indonesia tidak terlatih dengan baik dan tidak punya pengalaman kecuali hanya dalam operasi keamanan dalam negeri melawan warga sipilnya. Jadi, serangan Indonesia di Timor Timur tidak dilaksanakan dengan disiplin militer yang memadai. Pemerintah Indonesia membantah laporan adanya penyiksaan, pemerkosaan, dan perampasan oleh para pasukannya, yang konon menempatkan etnis Cina sebagai sasaran utama. Lima wartawan Australia dibunuh selama penyerangan, tetapi Jakarta tetap menolak bertanggung jawab atas kematian mereka. Warga sipil yang menjadi korban diperkirakan 60.000 orang, yang merupakan 10% dari penduduk Timor Timur. Pada bulan April 1976, 30–35.000 pasukan Indonesia berada di sana, dan sekitar

500 orang telah tewas dalam pertempuran. Fretilin terdesak ke bukit, tempat ia mempertahankan perlawanannya. Pada bulan Juli 1976, Timor Timur digabungkan menjadi provinsi Indonesa yang ke-27. Negara-negara tetangga dan Barat yang mendukung Indonesia lebih memprioritaskan hubungan mereka dengan Jakarta daripada hak rakyat Timor Timur. Mereka mengakui secara *de facto* penaklukan itu. Akhirnya, Australia juga memberikan pengakuan secara *de jure*. Amerika tidak ingin menentang penguasaan Indonesia terhadap wilayah tersebut, sehingga pengakuan PBB bahwa Portugal masih memegang kekuasaan di wilayah tersebut sudah tidak berarti lagi. Pada tahun 1976, IGGI meningkatkan bantuannya, menjanjikan proyek bantuan sebesar US$ 990 juta dan kredit tambahan lebih dari US$ 1 miliar. Berbagai investasi utama dijanjikan oleh Jepang, Uni Soviet, dan Shell.

Penaklukan Timor Timur temyata menimbulkan masalah yang berkelanjutan dan serius bagi Jakarta. Penyatuan rakyat Timor Timur, yang memiliki sejarah yang sangat berbeda, ke dalam bangsa Indonesia menimbulkan masalah budaya yang sangat sulit. Pengembangan wilayahnya menimbulkan persoalan di sektor ekonomi dan administrasi. Dan ketidaksenangan rakyat Timor Timur dengan aturan Indonesia menimbulkan masalah politik dan keamanan. Perlawanan Fretilin tidak begitu sengit lagi, tetapi tetap merupakan masalah bagi militer. Sejak dimulainya penaklukan, Amnesti Internasional dan organisasi hak asasi manusia lainnya mengutuk kebrutalan yang menyertai kekuasaan Jakarta atas Timor Timur, tetapi Indonesia menolak tunduk pada kritik hak asasi internasional semacam itu dan berusaha keras mencegah penyelidikan dari luar negeri.

Pada awal tahun 1976, Orde Baru boleh dikatakan stabil. Pemerintah bergantung pada sentralisasi kekuasaan yang kokoh di tangan Presiden Soeharto dan sekelompok pengikut setianya. Kebebasan berpolitik ditekan dengan kekerasan fisik, penahanan, dan pelarangan penerbitan, atau dengan ancaman tindakan demikian. Partai-partai politik tidak diberi peluang untuk mengubah tatanan politik, tetapi tetap mengikuti proses pemilihan umum yang dikendalikan dengan hati-hati dan meminjam legitimasi pemerintah. Militer mengambil keputusan utama, tetapi mengambil keputusan ekonomi bersama-sama para teknokrat dan mengurus administrasi negara bersama dengan birokrasi. Golkar adalah

kendaraan bagi dominasi militer dan birokrasi. Kebijakan ekonomi ditetapkan sesuai dengan pembangunan gaya kapitalis dan memperoleh hasil yang mengesankan. Janji Orde Baru bahwa pembangunan akan meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan rakyat masih belum terbukti. Di lain sisi, elite yang memerintah jelas sekali memanfaatkan pembangunan ekonomi untuk memperkaya diri mereka sendiri dan kroni mereka. Minyak merupakan unsur terpenting dalam semua kalkulasi ekonomi; revolusi harga minyak setelah tahun 1973 memungkinkan dilakukannya pembangunan yang signifikan, seperti yang terlihat di bab berikut. Kebijakan politik dan ekonomi bergantung pada kerja sama dengan kekuatan Barat, tetapi Indonesia menolak, seperti yang dilakukannya sejak kemerdekaan, untuk bergabung dengan pakta militer formal. ASEAN adalah landasan regional dari kebijakan asing. Perbatasan negara ditetapkan dengan memasukkan Irian dan Timor Timur, dua daerah yang menimbulkan masalah utama bagi rezim. Masyarakat berubah; ia kini menjadi lebih multiagama, tetapi aliran tampak kurang begitu penting lagi dengan runtuhnya partai politik yang sebelumnya mempertegas batas-batas aliran tersebut. Banyak transformasi mendasar telah terjadi sejak pertengahan tahun 1960-an. Perlu diketahui bahwa semua transformasi ini memang terjadi tanpa mengancam kesatuan negara, tapi juga dengan ongkos yang belum pernah dialami sebelumnya: sejak penaklukan kepulauan Indonesia oleh penjajah Belanda, belum pernah begitu banyak orang Indonesia mati atau kehilangan kebebasan mereka demi pembentukan sebuah tatanan politik baru.[]

Bab 22 ....

Masa Keemasan Orde Baru, 1976–88

SELAMA SEKITAR dua belas tahun rezim Orde Baru, Soeharto mengecap keberhasilan luar biasa. Rencana pembangunan ekonominya disokong oleh melonjaknya harga minyak pada tahun 1970-an. Di tengah-tengah kota metropolitan Jakarta, dengan segala gedung pencakar langit yang mentereng, muncul satu kelas menengah baru. Kelas menengah ini tidak begitu keberatan dengan menggejalanya korupsi dan juga dengan berbagai penindasan rezim, karena Orde Baru dianggap mendatangkan keuntungan besar bagi mereka beserta anak-cicitnya. Keberhasilan pembangunan ekonomi juga mengalir kepada kaum miskin dan ke kampung-kampung pedalaman. Dalam konteks internasional, Indonesia masih mendapatkan dukungan dari negara donor dan mitra dagang berorientasi Baratnya, sambil tetap berusaha memanfaatkan kesempatan untuk menggalang kerja sama dengan negara-negara komunis. Birokrasi dan militer Indonesia bekerja secara produktif dengan Presiden dan klik-klik pejabatnya demi memajukan kesejahteraan umum sekaligus memajukan kepentingan mereka sendiri. Kesalehan agama publik menjadi lebih umum. Banyak pemuka agama tidak lagi menganggap rezim Orde Baru sebagai ancaman, dan malah menganggapnya sebagai pendukung, bagi gagasan mereka tentang aktivitas Tuhan: persepsi ini terbentuk, bagi kaum muslim, karena pemerintah tidak lagi menganggap Islam sebagai bahaya, sedangkan alasannya bagi kaum nonmuslim adalah karena pemerintah melindungi mereka dari momok negara Islam. Tahun-tahun ini sesungguhnya memberikan gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan Indonesia

masa depan, jika saja pemerintah Orde Baru bukan pemerintah yang begitu kejam, brutal, korup, dan hanya didominasi oleh satu orang.

Hingga awal 1980-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dari tahun 1971 hingga 1981, tingkat pertumbuhan tahunan Produksi Domestik Bruto (PDB) berkisar pada angka 7,7%, dan tidak pernah berada di bawah angka 5%. Prestasi ini kebanyakan karena pendapatan dari minyak, yang tetap tinggi hingga 1982, terutama dipicu lagi oleh perang Irak-Iran 1979. Pada tahun 1981, Indonesia merupakan penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Kaum nasionalis ekonomi memanfaatkan renggangnya tingkat ketergantungan terhadap donor luar sebagai alasan untuk menuntut lebih besarnya peranan perusahaan negara (BUMN), pemberdayaan usaha dalam negeri, dan pembatasan terhadap perusahaan asing.

Krisis yang melilit Pertamina memerlukan waktu yang cukup lama untuk diatasi. Pemerintah mempertahankan perusahaan Krakatau Steel milik Pertamina dan pengembangan pulau Batam, meskipun hanya dalam skala yang lebih kecil. Caltex dan Stanvac dituntut untuk menerima pengurangan keuntungan. Akhirnya, krisis itu bisa diatasi. Kebetulan saja, krisis ini menghilangkan begitu banyak likuiditas sehingga mengendalikan tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak. Kalau pada tahun 1974 tingkat inflasi tahunan mencapai 41%, pada tahun-tahun selanjutnya dalam dekade itu, tingkat inflasi hanya berkisar antara 10 sampai 20%—dianggap masih terlalu tinggi bagi sekalangan ekonom.

Prospek politik dari rezim Orde Baru tampaknya aman-aman saja pada akhir tahun 1970-an. Setelah mampu mengatasi krisis yang telah digambarkan pada bab sebelumnya, rezim Orde Baru Suharto tampaknya akan langgeng. Ujian formal berikutnya dalam menilai dukungan yang dimilikinya adalah pemilihan umum (pemilu) memperebutkan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diadakan pada bulan Mei 1977. Fusi (penggabungan) partai-partai politik yang dipaksakan pada tahun 1973 telah menyingkirkan segala kemungkinan bakal adanya saingan yang berarti bagi partai alat pemerintah, Golkar. Namun, ada juga kemungkinan untuk melakukan aksi golput.

Yang unik dari partai-partai politik lama adalah NU—yang sudah tergabung dalam PPP—yang masih memiliki konstituen

tradisionalnya. Banyak kyai dari Jawa (terutama Jawa Timur), dengan jaringan pesantren, santri, dan pengikut desa, menolak tekanan pemerintah. Mereka condong mencurigai pemerintah dan militer, membenci birokrasi pemerintah, dan condong terbebas dari patronasinya. Namun, ada sekalangan kyai yang mulai menyadari untungnya bekerja sama dengan pemerintah. Beberapa kyai Jawa Timur membentuk organisasi mirip tarikat yang tidak diakui, baik oleh kaum modernis urban maupun oleh para pemimpin NU. Kelompok-kelompok ini berhasil dalam menarik pengikut abangan dan mengarahkan mereka untuk lebih taat kepada Islam. Kelompok-kelompok inilah yang merupakan unsur-unsur Islam pertama yang masuk dalam Golkar. Pemerintah, kemudian, terbukti bersedia mendukung kegiatan-kegiatan non-politik, seperti pembangunan mesjid. Namun, arus utama dalam NU tetap mengambil jarak dengan pemerintah dan bahkan terkadang jelas-jelas mengambil kedudukan oposisi. Pemerintah dengan curiga menganggap NU atau organisasi politik Islam lainnya sebagai kekuatan oposisi.

Pemilu 1977 didominasi oleh Golkar yang mendapatkan 62,1% suara, sementara PDI mendapat 8,6%. Karena adanya NU, PPP mendapatkan 29,3%. Jadi, Golkar merebut mayoritas kursi DPR dan, tentunya, memegang kendali atas anggota-anggota yang diangkat pemerintah dan atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada tahun 1978, seperti sudah diduga, MPR memilih Soeharto sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Adam Malik diberhentikan sebagai Menteri Dalam Negeri pada tahun 1977 untuk dilantik menjadi ketua DPR dan MPR; pada tahun 1978, dia dipilih oleh MPR menjadi wakil presiden (1978–83). Soeharto tampak memegang kendali penuh, meskipun tampak jelas bahwa Islam dengan 30% suara masih merupakan kekuatan politik yang tidak boleh diremehkan pemerintah.

Bersamaan dengan momentum politik yang nyata dari rezim Orde Baru, kritik terhadap korupsi juga berdatangan. Pada tahap ini, kritisisme publik terutama diwakili oleh mahasiswa dan beberapa kaum eksentrik terkemuka. Pada September 1976, seorang mistikus dan mantan pegawai negeri, Sawito Kartowibowo, ditahan. Dia dipecat dari birokrasi tahun 1968 karena berhubungan dengan sayap kiri PNI. Pada tahun 1972, dia mendapat ilham yang membuatnya berkesimpulan bahwa dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1976, Sawito

menghujat Soeharto dan kroni korupsinya. Dia menulis satu dokumen berjudul "Menuju Keselamatan", dan membujuk beberapa pemuka agama terkenal (termasuk T.B. Simatupang yang waktu itu merupakan ketua Dewan Gereja Indonesia) dan mantan Wakil Presiden Hatta untuk menandatanganinya. Soeharto terkejut dengan hal ini, mungkin karena heran kenapa tokoh-tokoh Indonesia bisa-bisanya terbujuk oleh seorang eksentrik politik, atau mungkin juga karena klaim Sawito atas kekuasaan itu bertumpu pada kekuatan mistik Islam-Jawa yang sama-sama diyakini Soeharto. Pengadilan Sawito tahun 1977–78 menjadi satu forum publik untuk menentang korupsi rezim—yang, tentu saja, tidak mampu mencegah dipenjarakannya Sawito.

Demonstrasi mahasiswa menentang Soeharto dan korupsi rezimnya secara rutin bisa dijumpai dalam kampus-kampus. Pada tahun 1979, ketua Dewan Mahasiswa ITB berusia 25 tahun, Herry Akhmadi, dipenjara selama dua tahun karena menghina Presiden, DPR, dan MPR. Pada saat vonis, Herry sudah ditahan selama lebih dari dua tahun.

Tingkat korupsi sudah sedemikian besar. Meskipun dalam kebohongan tingkat tinggi sudah umum bahwa sang pelaku biasanya memiliki sarana untuk menutupi perbuatan dan tingkat kehebohannya, tetap saja ada beberapa kasus yang sudah menjadi rahasia umum. Pada tahun 1977, *New York Times* memberitakan bahwa seorang pejabat Departemen Penerangan meminta bayaran US$ 40 juta untuk kontrak satelit telekomunikasi. Pada saat tersebut, sudah umum diperkirakan (namun harus dikatakan bahwa ini tanpa bukti yang kuat) bahwa korupsi telah menggerogoti 30% bantuan luar negeri dan anggaran belanja pemerintah. Pada November 1976, *Newsweek* dilarang beredar karena menurunkan liputan tentang korupsi dalam istana kepresidenan, dengan secara khusus menyebut nama Soeharto, Ibu Tien, dan putra tertua mereka, Sigit Haryoyudanto (lahir 1951). Belakangan, ketika keenam anak Soeharto beranjak dewasa, mereka menjumpai banyak kesempatan usaha yang sangat menggiurkan. Mereka terus-menerus menyangkal bahwa kesempatan itu datang karena status ayah mereka yang presiden. Sebagaimana akan dibahas dalam bab berikut, anak-anak ini memainkan peranan penting dalam keruntuhan rezim Seoharto.

Catatan penegakan hak asasi manusia dari pemerintah tidaklah bagus, apalagi dengan masih membayangnya peristiwa pembantaian 1965–66. Amnesti Internasional mencatat masih ada 55.000–100.000 tahanan politik di Indonesia pada tahun 1977 yang ditahan tanpa jalur pengadilan sejak usaha kudeta 1965. Jimmy Carter naik menjadi Presiden Amerika Serikat pada November 1976 dengan kampanye yang mengusung isu hak asasi manusia. Jadi, Jakarta, yang masih sangat tergantung pada bantuan dan dukungan Amerika Serikat, dengan enggan memutuskan bahwa mesti ada yang dilakukan terhadap para tawanan tersebut. Pada kesempatan pertama, Indonesia mencoba program pembebasan pura-pura, yang termasuk 'mentransmigrasikan' para tahanan menuju penjara permanen dan kamp-kamp kerja paksa di pulau-pulau seberang. Tapi, tipuan ini segera ketahuan belangnya, sehingga pada Desember 1977, pemerintah memutuskan bahwa para tahanan yang tidak bisa diajukan ke pengadilan harus dibebaskan. Pada akhir 1980, semua tahanan kategori B dan C tampaknya telah dibebaskan semua. Termasuk di antara yang dibebaskan adalah penulis terkenal Pramoedya Ananta Toer. Pram dan teman-teman setahanan politiknya mengalami pembatasan dalam pekerjaan. Mereka tidak bisa memegang peranan dalam kehidupan politik publik, dan kerap menghadapi kesulitan-kesulitan untuk kembali kepada keluarga dan komunitas mereka.

Namun, pemerintah tidak kapok, dan bahkan terus melakukan penahanan politik. Pada tahun 1978, terjadi lebih dari 100 penahanan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa 1965, namun pada saat itu berhasil bersembunyi di pulau-pulau luar Jawa. Mereka kembali ke Jawa dengan asumsi keadaan sudah aman, dan pada saat itulah mereka diciduk untuk ditahan.

Seiring waktu, rezim Orde Baru sudah tidak begitu condong menyebut komunisme sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional. Yang terjadi adalah penggunaan eufemisme-eufemisme seperti "ideologi impor" untuk menggambarkan momok ancaman Islam radikal. Pada Februari 1977, sebelum pemilu, Kopkamtib mengumumkan bahwa mereka telah mengidentifikasi adanya sebuah organisasi bernama Komando Jihad yang cenderung kepada kekerasan demi mencapai tujuan terbentuknya negara Islam. Beberapa kalangan menduga bahwa organisasi ini palsu

adanya dan hanya dibuat-buat oleh mesin keamanan rezim. Sejumlah aktivis Islam yang jumlahnya sulit diketahui persis (yang pasti ratusan) ditahan oleh pemerintah pada tahun-tahun berikutnya, dan mereka ditahan untuk waktu yang lama tanpa melalui jalur pengadilan.

Situasi luar Indonesia merupakan kondisi yang mendukung sikap developmentalis, represif, antikomunis, dan anti-Islam-radikal dari rezim. Kemenangan komunis di Indocina pada tahun 1975 menimbulkan kecemasan akan ancaman sayap kiri di Asia Tenggara, sebagaimana Revolusi Iran yang terjadi belakangan tahun 1979 menimbulkan kecemasan Barat terhadap radikalisme Islam. Konferensi pertama kepala pemerintahan ASEAN yang antikomunis diadakan di Bali pada Februari 1976. Konferensi ini mendekatkan hubungan pribadi antar-pemimpin ASEAN dan merupakan satu langkah penting menuju terciptanya koordinasi kebijakan luar negeri negara-negara anggota. ASEAN juga memutuskan untuk mendirikan satu sekretariat tetap di Jakarta. Sekretaris Jenderal ASEAN pertama adalah mantan Komandan Divisi Siliwangi Letnan Jenderal Hartono Dharsono. Posisi sentral Indonesia bagi ASEAN tercermin dalam perkembangan-perkembangan seperti ini.

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, antikomunisme merupakan satu unsur penting dalam keputusan Indonesia menduduki Timor Timur pada Desember 1975. Pada tahun 1976, perlawanan Fretilin ditumpulkan menjadi perlawanan sporadis di bukit-bukit, dan pada tahun 1979, Fretilin akhirnya dikalahkan meskipun gerakan ini sudah menjadi gerakan gerilya. Sebagian besar pemimpin Fretilin tewas atau tertangkap, alat-alat komunikasinya dihancurkan, dan sebagian besar senjatanya hilang. Falintil (Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste, Angkatan Bersenjata Pembebasan Negara Timor Timur) kehilangan 80% dari 4.000 prajurit angkatan bersenjatanya. Pada Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi Indonesia ke-27, satu status yang harus ditanggung Timor Timur selama 23 tahun penuh kesengsaraan. Jakarta kini berada dalam posisi untuk menguasai, mengembangkan, dan mengeksploitasi daerah baru ini. Timor Timur dibiarkan tetap terputus dari ekspos dunia luar selama bertahun-tahun demi meminimalisir liputan tentang apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Namun, kejadian-kejadian penindasan, pelanggaran HAM, dan gerakan perlawanan terus

saja dilaporkan oleh gerakan kemerdekaan Timor Timur di luar negeri pimpinan José Ramos-Horta (lahir 1949), oleh LSM HAM, dan oleh beberapa pemerintahan, terutama pemerintahan Portugal.

Sebagai negara yang antikomunis, mencurigai Islam radikal, dan mendukung pembangunan ala kapitalis, Indonesia pada akhir 1970-an telah mengamankan posisinya untuk tetap mendapatkan dukungan AS dan, dengan begitu, juga kekuatan-kekuatan Barat lainnya. Pemerintahan dalam negara maju demokratis yang letaknya paling dekat, yaitu Australia, adalah sama mendukungnya bagi Indonesia. Sorotan terhadap isu pelanggaran HAM, korupsi, dan pendudukan Timor Timur memang mengusik negara-negara Barat. Tetapi, hal-hal ini tidaklah membuat mereka mengabaikan isu-isu geopolitik yang lebih besar, yang menentukan bagaimana dunia terbagi menjadi kubu-kubu dalam Perang Dingin dan yang membuat Indonesia menjadi negara yang persahabatannya diperlukan Barat. Tidak diragukan lagi bahwa para elite pembuat kebijakan di Indonesia menyadari posisi tawarnya dalam isu-isu tersebut dan mengetahui bahwa, setidaknya dalam batas tertentu, berbagai pelanggaran akan ditolerir oleh sekutu Barat adidaya mereka. Ketika rezim telah mampu menangani isu besar mengenai puluhan ribu tahanan politik pasca-1965, Indonesia selama sekitar satu dekade menikmati kebebasan-berkat-Perang-Dingin dalam urusan dalam negeri yang siap dieksploitasi oleh kaum elite. Sementara itu, pemerintahan dan usahawan Barat mencari kesempatan untuk ikut menangguk keuntungan dari pembangunan Indonesia, dari bidang kehutanan sampai ke bidang manufaktur persenjataan.

Bagi sebagian besar warga Indonesia, keuntungan yang ditimbulkan oleh harga minyak 1970-an memberikan perbaikan nyata dalam standar hidup. Kini, pemerintah dapat memenuhi janjinya untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia, suatu janji yang menjadi landasan legitimasi rezim. Prestasinya dalam sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan sangat mengagumkan, terutama jika dibandingkan dengan catatan prestasi pemerintah kolonial Belanda atau pada masa pemerintahan Sukarno.

Investasi untuk irigasi, jenis bibit baru, pupuk, dan pestisida menggenjot produksi beras dan bahan pangan lainnya. Pada tahun 1960-an, tingkat ketersediaan beras diperkirakan kurang dari 100 kilogram per kapita, namun pada tahun 1983 angka

itu berubah menjadi 146 kilogram. Impor beras berkurang hingga hampir tidak ada, dan Jakarta mengklaim telah mencapai swasembada beras pada pertengahan tahun 1980-an. Prediksi-prediksi pesimistis bahwa Indonesia pasti akan mengalami krisis pangan segera tersingkir oleh optimisme. Prestasi luar biasa ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, dan inisiatif serta kerja keras dari para petani-jelata Indonesia.

Terjadi kemajuan pesat dalam sektor pendidikan. Lebih dari 100.000 sekolah dibangun, terutama di daerah-daerah pedalaman, dan lebih dari 500.000 guru dipekerjakan. Pada tahun 1984, dilaporkan bahwa 97% dari anak berusia 7–12 tahun sedang mengenyam bangku sekolah, dibandingkan dengan angka 57% pada tahun 1973. Tingkat melek huruf terus meningkat. Sensus penduduk 1980 melaporkan bahwa 80,4% kaum laki-laki di atas sepuluh tahun dan 63,6% wanita sudah melek huruf. Pada sensus 1990, angka itu meningkat menjadi 89,6 dan 78,7%. Seperti sudah bisa diduga, terdapat perbedaan tingkat pendidikan antara kota dan desa. Ketimpangan yang jelas adalah, tahun 1990, tingkat melek huruf laki-laki kota di atas sepuluh tahun adalah 95,9%, sedangkan untuk wanita desa adalah 74,1%.

Manfaat pendidikan publik dalam perkembangan bahasa Indonesia tidak hanya terlihat dari meningkatnya tingkat melek huruf, melainkan juga dari pertumbuhan persentase penduduk yang mampu menggunakan bahasa nasional tersebut. Pada tahun 1971, persentase kemampuan penggunaan bahasa nasional itu baru mencapai 40,8%. Sensus 1980 menunjukkan kenaikan angka itu sampai 61,4%, dan pada tahun 1990 melonjak hingga 80% bagi orang Indonesia di atas 5 tahun. Peningkatan ini juga menunjukkan pengaruh penggunaan bahasa nasional dalam surat kabar dan majalah serta, ini mungkin yang lebih besar pengaruhnya, dalam radio dan televisi. Penyebaran bahasa Indonesia berlanjut menjadi sarana penting untuk meningkatkan identitas nasional di seantero nusantara.

Ukuran-ukuran kesejahteraan lainnya juga menunjukkan perbaikan. Tapi, jika perbaikan itu dibandingkan dengan capaian negara-negara Asia lain, potret kemiskinan Indonesia masih tampak jelas. Sensus 1971 melaporkan bahwa hanya ada satu dokter untuk melayani 20,9 ribu penduduk. Sensus 1980 menunjukkan, jumlah penduduk 147,3 juta dengan 12.932 dokter: satu dokter per 11,4 ribu penduduk. Sensus 1990 mencatat 179,2

juta penduduk. Pada tahun 1992, dilaporkan ada 25.125 dokter umum, spesialis, dan dokter gigi, sehingga rasionya menjadi satu dokter bagi 7,1 ribu penduduk. Tapi, tingkat ketersediaan medis ini belum membuat Indonesia mampu mengejar ketertinggalannya dengan tetangga ASEAN-nya, yaitu Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Salah satu sukses terbesar Indonesia adalah program Keluarga Berencana. Pada umumnya, sterilisasi dan aborsi tidak dapat diterima secara kultural dan secara religius, sehingga program KB dilakukan terutama dengan pil kontrasepsi dan alat kontrasepsi intra-uterus. Pemerintah mengalokasikan sumber daya yang besar dalam program KB. Ditambah fakta bahwa organisasi Islam tidak menentang langkah-langkah ini, maka tercapailah hasil yang mengesankan. Pada awal 1950-an, tingkat kelahiran total (rata-rata seorang wanita dapat melahirkan sepanjang hidupnya) di Indonesia adalah 6,4, sedangkan pada tahun 1995 turun menjadi 2,8, atau di bawah Filipina, Malaysia, atau India, namun masih di atas Thailand. Tingkat pertumbuhan penduduk tahunan turun dari 2,32% pada tahun 1960-an menjadi 2,10% pada tahun 1970-an, dan 1,97% pada tahun 1980-an. Ini menjadikan program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, yang meredakan ketakutan bahwa Indonesia akan menghadapi krisis pertumbuhan penduduk yang gawat dan sekaligus menarik perhatian bangsa-bangsa lain untuk mengikuti kesuksesan Indonesia.

Perbaikan kesejahteraan dan pendidikan yang dilakukan rezim, sebagaimana perkembangan ekonomi, lebih terkonsentrasi di Indonesia bagian barat, terutama pulau Jawa. Sebanyak 60% penduduk Indonesia tinggal di Jawa pada tahun 1990, turun dari angka 61,9% pada tahun 1980 dan hampir 70% pada tahun 1930. Jawa tetap menjadi daerah letak ibu kota negara, fokus pembangunan pemerintah, tempat tinggal mayoritas penduduk, dan jadinya juga merupakan fokus dari perpolitikan Indonesia. Bagi kaum elite Indonesia, pulau luar Jawa menempati urutan bawah dalam daftar prioritas mereka.

Pembangunan ekonomi dan investasi pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan membawa perubahan signifikan bagi Indonesia, termasuk urbanisasi yang pesat. Pada tahun 1990, sebanyak 30,9% penduduk bisa diang-



Jakarta modern, 1998

gap sebagai kaum urban. Penduduk Jakarta mencapai 8,3 juta, sementara penduduk Bandung dan Surabaya sudah melebihi angka 2 juta, dan Semarang memiliki lebih dari 1 juta penduduk. Di daerah pedesaan, listrik, sekolah, sepeda motor, dan tayangan-tayangan televisi mengenai peristiwa-peristiwa nasional dan gaya hidup perkotaan mampu mengubah persepsi secara radikal. Kaum kaya perkotaan semakin kaya, dan demikian juga halnya dengan banyak penduduk pedesaan. Ada suatu persepsi politis bahwa terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara kaum kaya dan miskin di pedesaan, namun hanya sedikit bukti yang mendukung hal tersebut, dan malah beberapa bukti menunjukkan kebalikannya.

Pilar utama rezim Seoharto adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI terdiri atas empat angkatan: angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan polisi. Dalam menjabat sebagai presiden, Soeharto menggunakan pengetahuannya tentang politik dan personel militer sepanjang masa kekuasaannya. Tapi, seiring berlalunya waktu, beberapa perwira ABRI mulai tidak nyaman dengan ketundukan militer kepada rezim yang semakin hari semakin korup. Perwira berpikiran reformis berusaha menyelamatkan ABRI dari noda penyimpangan dan korupsi, serta dari

gangguan dan politisasi yang selama ini menjadikan militer dekat dengan istana kepresidenan. Mereka berharap untuk mengembalikan profesionalisme, disiplin, dan kehormatan militer dengan menjauhkan ABRI dari Soeharto. Perwira pensiunanlah yang terutama sering melontarkan kritik tajam terhadap rezim. Namun, tidak ada satu pun upaya ini yang berhasil. Cercaan ABRI terhadap birokrasi dan politik sipil, kepentingan ABRI sendiri, dan kesuksesan manipulasi Soeharto, semuanya memastikan bahwa ABRI tetap menjadi pilar utama rezim.

Pada Desember 1977, tokoh-tokoh senior ABRI mengadakan rapat tiga hari di Jakarta. Rapat ini diselenggarakan setelah adanya aksi mahasiswa menentang kebijakan pembangunan, penyimpangan pemilu, dan kenaikan tarif angkutan Jakarta pada bulan Juli dan Agustus. Pada bulan Desember, terjadi demonstrasi mahasiswa menentang pelanggaran HAM. Seorang purnawirawan ABRI, Jenderal Nasution, berbicara di hadapan 20.000 kerumunan orang dan mengkritik, salah satunya, reputasi penegakan HAM pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, ada banyak spekulasi tentang apa yang dibahas ABRI dalam rapat itu, dan terjadilah sedikit kejutan ketika diumumkan bahwa ABRI menerima pandangan yang menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah harus melalui saluran resmi. Para pengamat mempertanyakan bagaimana bisa diperlukan waktu tiga hari hanya untuk mengeluarkan keputusan yang sudah bisa ditebak semacam itu. Mereka tadinya menduga ada masalah-masalah lebih besar yang dibahas. Tapi, sebagaimana biasa terjadi dalam politik internal ABRI, orang luar tidak mendapatkan cukup bukti untuk mendukung spekulasi mereka.

Demonstrasi mahasiswa menentang Soeharto dan suasana sandiwara yang mewarnai pengadilan Sawito terus berlangsung hingga memasuki tahun 1978. Dalam sidang MPR Maret 1978, isu pertentangan utama adalah mengenai status apa yang harus dikenakan kepada kebatinan, yaitu aliran mistis lokal, yang disebut sidang MPR 1973 sebagai 'kepercayaan' dan bukan agama. Perlindungan dan pemberian dana dari pemerintah bagi kelompok-kelompok semacam itulah yang dipertaruhkan dalam debat ini. Pihak-pihak Islam yang tergabung dalam PPP dengan gigih menentang segala dukungan terhadap aliran kepercayaan, dan pemerintah akhirnya menyerah dengan menghapuskan segala program tentang kepercayaan dari rencana pembangunan lima

tahunnya. Demonstrasi mahasiswa berkurang setelah ini, namun pemerintah tampaknya sudah berkesimpulan bahwa perlu ada satu kampanye untuk membentuk pikiran orang Indonesia.

Untuk mendorong keseragaman ideologis, pada tahun 1978 pemerintah memulai satu program indoktrinasi wajib mengenai ideologi negara Pancasila bagi semua warga negara. Tokoh utama yang merancang program ini adalah Roeslan Abdulgani, yang sebelumnya merupakan seorang pendukung aktif ideologi demokrasi terpimpin Soekarno. Kursus penataran bernama P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dilakukan dalam departemen-departemen pemerintahan, tempat-tempat kerja, sekolah, dan tempat-tempat lainnya. Sejak awal, ideologi mentah P4 sudah menuai kritik dan cemoohan dari kaum intelektual. Namun, konsep bahwa Pancasila merupakan ideologi khas Indonesia yang bisa memandu negara dan warganya serta mampu melindungi rakyat dari ancaman sayap kanan dan sayap kiri, rupanya menimbulkan dampak terhadap rakyat. Seperti banyak kasus yang dilakukan rezim Soeharto, penyimpangan konsep P4 oleh Soeharto, keluarganya, dan kroninyalah yang kemudian merusak konsep tersebut. Soeharto semakin hari tampak menganggap dirinya sebagai perwujudan Pancasila, dan menganggap kepentingan pribadinya sebagai buahnya yang layak.

Rezim Orde Baru juga berusaha mencapai keseragaman administratif. Undang-Undang Desa tahun 1979 menjadikan istilah-istilah Jawa sebagai standar untuk menyebut pedesaan dan dusun, suatu hal yang mengusik kaum non-Jawa. Undang-undang itu itu juga menyatakan bahwa, meskipun komunitas pedesaan yang menyerahkan daftar nama calon kepala desa, jajaran administratif yang lebih tinggilah yang akan memilih salah satu darinya. Para kepala desa ini menjadi pegawai birokrasi pemerintah yang digaji. Jadi, satu struktur pengendalian hirarkis dan sentralistis dari pemerintah dipaksakan kepada pedesaan di seluruh provinsi. Mengulangi pendekatan birokratis gegabah dari Peraturan Pedesaan Belanda 1906, Undang-Undang Desa tahun 1979 terkadang mencampurbaurkan komunitas yang memiliki tradisi sosial dan religius berbeda menjadi unit-unit yang tidak begitu memiliki satu landasan alami bagi kohesi sosial, sehingga hal ini meningkatkan ketegangan sosial pada tingkat bawah struktur administrasi. Usaha sentralistis untuk menjadikan

Indonesia sebagai satu kesatuan birokratis berpikiran Pancasilais dan kohesif dari tingkat atas sampai bawah tidak begitu berhasil mengingat begitu beragamnya budaya, etnis, bahasa, dan agama bangsa Indonesia. Contoh dari ketegangan yang ditimbulkan keberagaman itu adalah kerusuhan anti-Cina di Surakarta pada bulan November 1980. Dalam peristiwa ini, tidak ada orang Cina yang menjadi korban, tapi 8 orang Jawa tewas; 240 toko Cina, 230 rumah tinggal, 23 pabrik, 32 gedung perkantoran, dan satu sekolah hancur; dan 680 orang ditahan.

Dari tahun 1980, ABRI berusaha menduduki posisi sentral dalam pembangunan desa dengan melancarkan satu kebijakan bernama 'ABRI Masuk Desa'. Ini merupakan program aksi kewarganegaraan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan, untuk mempertahankan posisi sentral ABRI, dan untuk mendapatkan dukungan rakyat terhadap militer. Kelompok-kelompok prajurit memperbaiki jembatan dan sumur, membetulkan jalan, membangun rumah-rumah ibadah dan klinik kesehatan, dan, tentu saja, melakukan indoktrinasi Pancasila. Militer secara terus-menerus menekankan satu peranan bagi dirinya sendiri yang berkonsentrasikan pada isu-isu dalam negeri, karena tidak ada lagi sumber ancaman berbahaya dari luar terhadap Indonesia. Militer bisa membantu mengembangkan ekonomi, mengajarkan pendidikan kewarganegaraan, dan mengukuhkan dominasinya terhadap berbagai isu nasional. Ketika penduduk lokal mulai menunjukkan kepentingan dan aspirasi yang berbeda dengan prioritas ABRI, ABRI siap menggunakan tindakan kekerasan untuk tanpa kenal ampun menumpas para disiden. Di balik pendekatannya, ABRI menyimpan rasa "lebih mulia" atas penduduk desa yang 'terbelakang' dan atas kaum sipil secara umum, hal mana merupakan bagian tak terpisahkan dari kultur ABRI.

Rezim kini menjadi sasaran rutin kritik perwira militer pensiunan dan juga mahasiswa. Pada tahun 1979, mantan panglima Kopkamtib, Soemitro, menulis sebuah artikel yang menyatakan harus ada pembahasan terbuka mengenai potensi adanya calon presiden lain—seakan-akan bisa ada calon lain selain Soeharto. Yang lebih serius lagi, pada bulan Mei 1980, muncul Petisi 50 yang ditandatangani oleh 50 orang terkemuka, termasuk tokoh pensiunan ABRI seperti Nasution, mantan gubernur Jakarta Ali Sadikin (lahir 1927), Hartono Dharsono, dan tokoh-tokoh lain

yang memainkan peranan penting dalam tahun-tahun awal Orde Baru. Petisi ini menuduh Presiden telah salah menafsirkan Pancasila dengan berlaku seolah-olah dia merupakan perwujudan darinya. Tuduhan lainnya adalah penyalahgunaan ABRI dengan menuntutnya untuk berpihak dalam urusan politik, sebagaimana terlihat dalam kebijakan tangan besi ABRI untuk menggenjot suara Golkar pada tahun 1977. Petisi ini cepat beredar di jalan-jalan, namun surat-surat kabar Jakarta selama dua bulan terlalu gelisah untuk berani menerbitkannya. Sebelum muncul petisi ini, terjadi perdebatan publik tentang undang-undang pemilu baru, yang memicu seruan bagi adanya pemilu yang bebas dan memicu *walkout* orang NU dari DPR pada bulan Maret. Undang-undang itu akhirnya tetap saja disahkan. Petisi 50 merupakan langkah simbolik penting yang terus bergema hingga tahun-tahun berikutnya, tapi tetap saja pengaruhnya terhadap rezim tidak besar. Untuk menghambat aktivisme kampus, pemerintah menghapuskan dewan mahasiswa hasil pemilihan dan menggantikannya dengan badan-badan yang mewakili administrasi kampus, yang tentu saja tidak digubris oleh mahasiswa.

Walkout anggota NU dari DPR pada bulan Maret 1980 meningkatkan kewaspadaan pemerintah terhadap Islam sebagai sumber oposisi politik. Hal ini diperkuat oleh pembajakan sebuah pesawat Garuda oleh lima kaum ekstremis Islam pada bulan Maret 1981. Di Bangkok, satu pasukan-antiteroris RI membunuh empat pembajak tersebut dan membebaskan semua sandera. PPP tidak memiliki kaitan dengan pembajakan tersebut, namun sebagai wakil dari politik Islam yang resmi, PPP semakin menjadi sasaran manipulasi dan interferensi pemerintah. Hal ini terutama terjadi pada unsur utama PPP, NU.

Sejak 1971, tidak ada seorang pun dari sayap tradisional Islam Indonesia itu yang dipilih menjadi Menteri Agama. Akibatnya, peranan NU dalam Departemen Agama—yang sebenarnya sudah lama menjadi benteng birokratisnya dan sumber patronasi terkayanya—berkurang jauh. Ketika mereka bersiap menyongsong pemilu 1982, NU dan sayap modernis PPP tidak bertemu kata sepakat mengenai daftar kandidat anggota legislatif. Lembaga Pemilihan Umum bentukan pemerintah menyatakan bahwa daftar calon keluaran NU tidak sah. Daftar satunya yang dinyatakan sah sangat menguntungkan kandidat modernis ketimbang kandidat

NU. Mengingat posisi NU sebagai oposisi terhadap pemerintah, posisinya sekarang sebagai oposisi dalam tubuh PPP juga tidak meredakan sama sekali sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh semua jajaran pemerintahan. Banyak kyai yang menjadi soko guru NU sebetulnya tidak menyukai politik di Jakarta, dan memutuskan bahwa kepentingan Islam tradisional akan bisa lebih tercapai dengan menarik diri sekaligus dari partai politik. Para kyai memberikan prioritas utama kepada peranan mereka sebagai guru, pemandu spiritual, dan pemuka umat, yaitu peranan-peranan yang selama ini terhambat oleh posisi oposisi NU. Maka, antusiasme NU terhadap partai politik memudar dengan cepat.

Kampanye pemilu 1982 ditandai dengan kekerasan kampanye berskala besar. Surat kabar harian Islam, *Pelita*, dilarang terbit karena menurunkan laporan tentang kekerasan tersebut, sebagaimana dilarang terbitnya mingguan berita *Tempo*, yang didirikan tahun 1971 oleh salah seorang intelektual terkemuka Indonesia, Goenawan Mohamad (lahir 1941). Persentase suara Golkar pada saat itu merupakan hasil terbaik dengan meraih 64,3% suara. Golkar meraih kemenangan di Jakarta, yang sebelumnya dikuasai PPP pada pemilu 1977, dan menang juga di seluruh provinsi kecuali Aceh. PDI merosot perolehannya menjadi 7,9% dan PPP menjadi 27,8%.

Dalam banyak hal, Soeharto dan struktur pemerintahannya nampak tak tertandingi, namun terjadi beberapa perubahan signifikan di sekitar diri Soeharto. Dari 1982 hingga 1986, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan turunnya harga minyak; hari-hari keuntungan telah berlalu. Terjadi kelebihan produksi minyak dunia dan resesi di perekonomian negara-negara maju. Devisa dan ekspor Indonesia menurun. Pembangunan sejauh ini masih mengesankan dan pertumbuhan tahunan terus berada pada level 4%. Pada tahun 1982, pendapatan tahunan per kapita meningkat hingga hampir US$ 600, yang membuat Bank Dunia mengklasifikasikan ulang Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah. Namun, pembangunan juga menimbulkan tingkat utang luar negeri yang tinggi, yang sebagian besarnya dalam bentuk yen Jepang dan dolar Amerika. Total utang luar negeri mencapai US$ 20.944 juta pada tahun 1982, 40.071 juta tahun 1986, dan 51.415 juta pada tahun 1988. Secara berurutan, masing-masing total utang mewakili 29,2, 52,2, dan 64,1% PDB

atau merupakan 18,1, 37,3, dan 40,2% rasio pembayaran utang (*debt service ratio*). Angka-angka ini sudah cukup membunyikan peringatan bahaya dalam banyak sektor. Namun, produksi beras terus meningkat, menurut sumber pemerintah, dan ini sangat penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Selama lima tahun hingga 1982, produksi beras meningkat 36% dan swasembada nasional hampir tercapai. Hasil panen yang luar biasa besarnya menyusul pada periode 1983–5.

Indonesia kini memainkan peranan lebih besar dalam panggung dunia, cocok dengan citra-diri rezim sebagai salah satu kesuksesan pembangunan dari apa yang disebut sebagai 'Dunia Ketiga.' Pada tahun 1982, Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington dan Tokyo, dan menerima beberapa kepala negara asing di Jakarta: Indira Gandhi dari India, Zia Ul-Haq dari Pakistan, dan Nicolae Ceauçescu dari Rumania yang merupakan kepala negara komunis pertama yang mengunjungi rezim Orde Baru Soeharto. Pada tahun 1983, Perdana Menteri Jepang Nakasone Yasuhiro datang ke Jakarta dan berjanji untuk memberikan bantuan yang lebih besar dan membeli lebih banyak minyak.

Pergantian generasi besar-besaran terjadi dalam tubuh ABRI pada awal 1980-an. Pada level atas, orang-orang seangkatan Soeharto, angkatan 45, sudah pensiun dan digantikan oleh perwira yang lebih muda. Hal ini disimbolkan terutama dengan tindakan Soeharto menunjuk Jenderal L.B. (Benny) Murdani (1932–2004) sebagai Panglima ABRI pada tahun 1983. Murdani merupakan orang Jawa beragama Katolik, yang latar belakang etnis dan pengalaman kariernya telah merebut kepercayaan Soeharto dan yang agamanya membuat Murdani tidak akan pernah berpikir untuk merebut posisi presiden. Di bawah pengaturan baru yang diperkenalkan Soeharto, Menteri Pertahanan dan Keamanan tidak lagi merupakan Panglima ABRI. Posisi panglima kini terpisah dari departemen tersebut dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Pada tahap ini, ABRI memiliki sekitar 350.000 personel. Anggaran resmi pertahanan berada di bawah angka 10% dari total belanja negara, namun angka ini memberikan kesan yang salah tentang signifikansi finansial ABRI. Militer memiliki berbagai perusahaan dan yayasan sendiri yang menjadi sumber dananya dan juga menerima alokasi istimewa yang tidak muncul

dalam angka-angka anggaran rutin pemerintah. Militer juga memiliki peranan dalam industri lokal persenjataan yang memegang lisensi manufaktur asing untuk memproduksi senjata ringan, amunisi, helikopter, perahu patroli kecil, dan pesawat penumpang kecil. Tapi, kemandirian finansial ABRI dibatasi oleh Soeharto sejak awal 1980-an dengan mengharuskan persetujuan sekretariat kabinet untuk pembelian di atas jumlah US$ 250.000. Hal ini mengurangi keuntungan ABRI dan menjadikan bisnis ABRI berada di bawah pengawasan yang lebih sentralistis.

Tahun 1980-an juga menyaksikan munculnya seorang pemain lain, yang masih sangat muda, dalam politik ABRI: menantu Soeharto, Letnan Jenderal Prabowo Subianto (lahir 1951). Prabowo merupakan putra dari ekonom terkemuka sekaligus mantan politikus PSI, Sumitro Djojohadikusumo, dan ia menikah dengan putri Soeharto, Siti Hediati Hariyadi (akrab dipanggil Titiek, lahir 1959). Prabowo merupakan orang yang brilyan, berpendidikan tinggi dan, di mata lawan-lawannya, merupakan pria dengan ambisi yang tak terbendung. Pada tahun 1983, dia dipilih menjadi wakil panglima pasukan khusus angkatan darat—sebelumnya disebut sebagai RPKAD dan setelah 1986 dikenal sebagai Kopassus (Komando Pasukan Khusus). Kopassus terdiri atas pasukan perang rahasia dan parakomando. Di bawah kepemimpinan Prabowo, pasukan khusus bertempur melawan gerakan-gerakan separatis di Irian Jaya, Timor Timur, dan Aceh. Catatan tindakan Kopassus menggunakan teror terhadap kaum sipil mungkin yang terburuk dalam ABRI. Ketika Prabowo meniti jalan menanjaknya melalui militer, dia mendapatkan pengagum dan juga musuh bebuyutan. Beberapa kalangan mengira telah muncul calon pengganti Soeharto, sedangkan kalangan lain menilai Prabowo merupakan lambang puncak dari terkotorinya ABRI oleh favoritisme Presiden.

Seiring dengan tindakan Soeharto menempatkan orang-orang kepercayaannya dalam posisi-posisi kunci di tubuh ABRI, dia juga mengurangi pengaruh ABRI terhadap Golkar. Dia, dengan demikian, terus memastikan bahwa dialah yang merupakan tokoh utama dalam urusan-urusan nasional dan berada dalam posisi untuk mengadu domba kekuatan-kekuatan yang saling bertikai. Pada tahun 1983, Soeharto menunjuk asisten kepercayaannya Sudharmono (lahir 1927), yang sebelumnya memegang posisi penting sebagai Sekretaris Negara sejak 1973, sebagai Ketua

Umum Golkar. Meskipun Sudharmono merupakan purnawirawan jenderal ABRI, latar belakangnya adalah sebagai pengacara militer dan bukan sebagai perwira lapangan, dan ABRI pun tidak menyukainya. Di bawah kepemimpinannya (1983–8), orang-orang sipil dipromosikan dalam tubuh Golkar. Berbagai usaha dilancarkan untuk mengurangi dominasi ABRI terhadap Golkar dan untuk membuat Golkar sebagai partai politik sipil yang siap membentuk masa depan Indonesia. Pada akhirnya, hal ini terlalu berlebihan bahkan bagi Soeharto.

Transisi-transisi ini sama sekali tidak mengurangi ketidakpedulian rezim terhadap aturan hukum dalam masalah keamanan. Pada tahun 1983–5, gelombang pasang kejahatan dihadapi dengan pembunuhan negara tanpa jalur pengadilan terhadap 5.000 tersangka kriminal di seluruh negeri. Pembunuhan bernama Petrus (singkatan dari penembakan misterius) ini dilaksanakan oleh polisi dan militer, yang kemudian membuang mayat-mayat di tempat-tempat umum sebagai peringatan. Meskipun pemerintah membantah mengetahui program ini, dalam otobiografinya tahun 1989, Soeharto menegaskan bahwa pembunuhan itu memang merupakan 'terapi kejut' yang disponsori negara.

Nasionalisme ekonomi didorong oleh meningkatnya rasa bangga Indonesia atas prestasinya. Ketika kontrak Stanvac atas ladang minyak Sumatra habis masa berlakunya pada bulan November 1983, Pertamina mengambil alih. Pemerintah menuntut perusahaan-perusahaan asing untuk melatih penduduk lokal. Pemerintah juga berusaha mengembangkan industri lokal sebisa mungkin dan, terutama, mendorong ekspor nonmigas. Pariwisata menjadi salah satu sumber utama devisa asing dan meledak sejak pertengahan 1980-an, terutama di Bali. Devaluasi rupiah hingga 28% pada bulan Maret 1983 mendorong pertumbuhan pariwisata, sebagaimana halnya didorong oleh ijin masuk bebas visa bagi sebagian besar wisatawan asing, yang diberlakukan pada tahun yang sama.

Kepercayaan diri rezim dan konsentrasinya untuk mencegah meningkatnya keteguhan Islam untuk bersatu menjadi gerakan politik yang berbahaya membuat rezim berusaha mewujudkan keseragaman ideologis yang lebih besar lagi di seluruh sektor sosial politik. Pada tahun 1983, pemerintah memutuskan bahwa semua organisasi harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya

asas ideologis. Satu rancangan undang-undang diajukan ke DPR yang kemudian disahkan pada bulan Februari 1985. Ini secara langsung, dan memang disengaja, menantang organisasi-organisasi Islam, yang dengan ini diharuskan menjadikan sesuatu selain Islam sebagai satu-satunya dasar. Organisasi Islam yang secara politik paling signifikan adalah NU, yang masih berada dalam PPP (yang menerima Pancasila sebagai asas tunggalnya pada bulan Agustus 1984). Banyak tokoh senior NU yang sudah bersikap skeptis terhadap kemungkinan aktivitas partai politik dan keterlibatan dalam PPP akan mampu memberikan manfaat bagi NU dan konstituennya. Tuntutan bahwa Pancasila harus menjadi asas tunggal NU datang pada saat yang tepat bagi organisasi ini untuk memikirkan kembali peranannya secara fundamental.

Satu generasi kepemimpinan baru mulai muncul dalam NU, yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid (lahir 1940), yang nantinya menjadi presiden keempat Indonesia. Abdurrahman adalah putra dari mantan pemimpin NU Wachid Hasjim dan cucu dari pendiri NU Hasjim Asjari, sehingga silsilahnya sebagai pemimpin NU tidak terbantahkan. Dia mengenyam pendidikan di sekolah negeri di Jakarta dan Yogyakarta serta di sebuah pesantren ternama di Jawa Timur yang merupakan jantung NU. Pada tahun 1963, dia pergi ke Timur Tengah untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, untuk kemudian pindah ke Universitas Baghdad (1968–70) karena tidak betah dengan standar belajar Al-Azhar. Abdurrahman, jadinya, berada jauh dari kekacauan dan peristiwa berdarah di Indonesia yang terjadi pada permulaan Orde Baru Soeharto. Abdurrahman kemudian kembali ke Indonesia dan mengajar di pesantren Tebuireng di Jombang, pesantren yang dipimpin ayah dan kakeknya dulu. Dia pindah ke Jakarta pada tahun 1971, di mana pengalaman dan bacaannya yang luas, keterbukaan pikiran dan kharisma individualnya mengangkat dia ke status terkemuka dalam dunia intelektual dan kultural kota itu. Abdurrahman lebih akrab dikenal sebagai Gus Dur—kata *gus* merupakan istilah Jawa bagi keturunan keluarga terhormat dan *dur* merupakan kependekan dari Abdurrahman. Pemikiran, ceramah umum, dan tulisan Gus Dur menekankan Islam sebagai agama yang didasarkan pada rasionalitas dengan komitmen kepada toleransi dan pluralisme sosial. Dia juga memiliki pemahaman mendalam terhadap pemikiran mistis yang

begitu kuat menghunjam dalam NU. Dalam krisis yang dihadapi NU sejak kampanye pemilu 1982, Abdurrahman mulai muncul sebagai tokoh kunci.

Pada bulan Desember 1983, suatu rapat nasional yang dihadiri ulama-ulama senior NU di Situbondo, Jawa Timur, memutuskan bahwa NU harus menarik diri dari PPP, meninggalkan total partai politik, dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Tekanan dan pelecehan yang terus-menerus dirasakan NU dari pemerintah pada semua tingkat, dan segala kesulitan yang dirasakan organisasi ini dalam PPP akhirnya membuahkan ongkosnya. Bagaimanapun juga, banyak kyai senior menganggap NU sebagai organisasi mereka, bukan sebagai organisasi para politikus yang bertindak di Jakarta dengan mengatasnamakan diri mereka, dan mereka merasa bahwa kini saatnya untuk mengambil alih kendali. Hal ini merupakan kerugian bagi sayap politik Jakarta yang dipimpin oleh Idham Chalid, yang telah ditekan oleh para kyai senior untuk mengundurkan diri pada tahun 1982, katanya karena alasan kesehatan. Kemudian, umum diyakini bahwa faksi reformis muda pimpinan Abdurrahman Wahid berada di balik penjungkirbalikan pendulum keuntungan ini.

Langkah-langkah ini menimbulkan perpecahan dalam NU. Para pemimpin pesantren dan reformis muda kini ditantang oleh pendukung Idham di Jakarta. Banyak pemimpin tarekat dan kyai Madura—keduanya memiliki pengaruh penting dalam NU—yang juga menentang pemisahan diri NU dari PPP. Namun, pada penghujung tahun 1983, pemerintah menolak wewenang sayap Idham untuk mengadakan kongres NU tandingan di Jakarta. Aliansi dari kaum reformis muda dan kyai senior sudah mendekati kemenangan akhir.

Peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam konteks meningkatnya peneguhan terhadap identitas Islam dan kesalehan di seluruh negeri. Jumlah jamaah mesjid meningkat dan mesjid serta rumah-rumah ibadah dibangun dengan pesat. Di Jawa Timur, terdapat 15.600 mesjid pada tahun 1973 dan menjadi 25.700 pada tahun 1990. Peningkatannya mencapai 65%, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 50% sepanjang periode yang sama. Bentuk religiusitas yang lain juga muncul. Pada periode yang sama, gereja-gereja Katolik di Jawa Timur meningkat dari 206 menjadi 324, atau meningkat 57%. Sedangkan gereja

dan balai pertemuan Protestan meningkat dari 1.200 pada tahun 1973 menjadi 2.300 pada tahun 1984, jauh di atas pertumbuhan penduduk. Di Jawa Tengah, jumlah mesjid meningkat dari 15.700 pada tahun 1980 menjadi 28.700 pada tahun 1992, atau meningkat sebesar 83% dalam periode 12 tahun. Tarekat sufi juga tumbuh pesat. Model keberagamaan Jawa atau abangan tampaknya mulai memudar, sehingga dikemukakan dengan yakin bahwa di beberapa daerah, politik aliran lama yang ada pada tahun 1950-an dan 1960-an sudah tidak lagi relevan dalam Indonesia yang semakin kental nuansa Islamnya.

Sensus 1990 mencatat ada 156,3 juta kaum muslim di Indonesia, atau 87,2% dari jumlah penduduk dan merupakan populasi kaum muslim terbesar di dunia. Persentase ini cukup stabil, karena pada tahun 1980 persentasenya adalah 87,1%. Umat Kristen (Katolik dan Protestan) berjumlah 17,2 juta, atau 9,6% dari jumlah penduduk, sedangkan pada tahun 1971 persentasenya adalah 7,5% dan pada tahun 1980 adalah 8,8%. Jadi, jumlah umat Kristen terus berkembang. Terutama dalam kota-kota besar Jawa Tengah, jumlah umat Kristen mencapai hampir 20% dari jumlah penduduk. Pasangnya gelombang religiusitas ini juga tercermin dalam umat-umat agama lain yang lebih kecil seperti Hindu (3,3 juta, atau 1,8% dari jumlah penduduk pada tahun 1990) dan Buddha (1,8 juta, atau 1% dari jumlah penduduk).

Abdurrahman Wahid merupakan salah satu dari pemimpin intelektual gelombang Islamisasi ini. Tokoh pemimpin lainnya adalah intelektual moderat Dr. Nurcholish Madjid (lahir tahun 1939), yang merupakan sumber dari banyak pemikiran baru yang kontroversial mengenai interpretasi Islam yang fleksibel. Pada tahun 1986, Nurcholish mendirikan organisasi Paramadina untuk menarik jamaah kaum urban. Mesjid Salman di Insititut Teknologi Bandung, dipimpin oleh Imaduddin Abdulrahim yang kharismatis, merupakan pusat revivalisme kampus.

Jaringan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) memainkan peranan penting dalam Islamisasi ini. Kampus ini merupakan lembaga pendidikan tersier yang berada di bawah Departemen Agama dan bukan di bawah Departemen Pendidikan. Jaringan ini tumbuh pesat pada masa Orde Baru. Dua IAIN paling terkenal di Jakarta dan Yogyakarta merupakan lahan penting yang menghasilkan arus intelektual muslim yang terdidik dan berko-

mitmen. Di seluruh Indonesia, orang-orang dari berbagai generasi dan latar belakang mulai mengabdikan diri mereka lebih intens kepada Islam. Tidak nampak ada gerakan sekularis atau skeptis yang menghambat peningkatan religiusitas ini. Pemerintah dan pimpinan ABRI tentunya sangat memerhatikan implikasi politik hal ini terhadap stabilitas politik.

Kongres NU di Situbondo pada bulan Desember 1984 mengakhiri peranan NU sebagai partai politik. Kongres menerima keputusan pertemuan para kyai setahun sebelumnya dan memutuskan untuk kembali kepada Khittah 1926 (semangat 1926), yaitu kembali kepada akar NU sebagai organisasi keagamaan, pendidikan, kultural, sosial, dan ekonomi. Tokoh-tokoh utama dalam transformasi ini adalah Abdurrahman Wahid dan Kyai Achmad Siddiq (1926–91), seorang pemimpin senior yang tersohor karena sikap antikomunismenya dan yang sudah lama menjabat sebagai koordinator dewan penasihat keagamaan NU, Syuriyah. Abdurrahman memiliki musuh pula dalam jajaran kepemimpinan NU, yang beberapa di antaranya menganggap Gus Dur terlalu provokatif, *nyeleneh,* dan sulit ditebak. Achmad Siddiq menepis kritik-kritik ini dengan menuturkan sebuah mimpi yang dialaminya, di mana dia bertemu Wachid Hasjim. Mimpi ini kemudian ditafsirkan sebagai tanda bahwa roh Wachid Hasjim menginginkan putranya untuk memimpin NU. Achmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid kini menapak naik ke tampuk kepemimpinan NU. Abdurrahman terpilih menjadi sekretaris umum dewan eksekutif (Tanfidziyah) dan Achmad Siddiq menjadi pemimpin keagamaan senior (Rois Aam).

NU, jadinya, telah terde-politisasi dan terde-radikalisasi di mata pemerintah. Tetapi, dalam menerima Pancasila sebagai asas, NU memakai satu formula yang juga meneguhkan identitas keagamaannya. Anggaran dasar barunya menyatakan bahwa 'Nahdlatul Ulama berasaskan Pancasila' namun juga mengukuhkan NU sebagai sebuah organisasi agama Islam yang mengikuti salah satu dari mazhab fikih ortodoks. Anggaran dasar itu juga menyebutkan bahwa NU melaksanakan tujuannya dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang mana merupakan penolakan khusus terhadap adanya kebutuhan akan negara Islam.

Karena NU menampilkan dirinya tidak lagi sebagai oposisi politik, kaum reformis muda mulai melakukan langkah rekon-

siliasi dengan pemerintah. Sebagai contoh, Benny Murdani, panglima ABRI beragama Katolik, diundang untuk mengunjungi pesantren Jawa Timur pada tahun 1984. Sejak ini, NU akan memanfaatkan status nonpolitiknya sebisa mungkin untuk menjalin hubungan kooperatif dengan semua tingkat pemerintahan. Pesantren-pesantren NU menjadi mesin pembangunan sosial ekonomi. Jadi, Islamisasi masyarakat Indonesia semakin dipercepat.

Organisasi modernis nonpolitik Muhammadiyah menerima Pancasila dalam kongres 1985. Dalam menerima Pancasila sebagai asas tunggalnya, Muhammadiyah juga mengokohkan identitasnya sebagai satu gerakan keyakinan Islam yang didasarkan pada Alquran dan sunah. Tetapi, Muhammadiyah tidak sesukses NU dalam mencapai tujuannya bekerja sama dengan pemerintah di tahun-tahun berikutnya. Modernisme ini lebih skripturalis dan cenderung kurang fleksibel dibandingkan Islam tradisional NU, sehingga banyak pemimpin nasional mewaspadai aliran modernis ini.

Beberapa pemimpin dan kelompok Islam menunjukkan respons yang kurang ramah dibandingkan NU dan Muhammadiyah terhadap isu Pancasila dan isu-isu lainnya. Pemerintah, kroni-kroninya, dan cukong-cukongnya semakin tidak bisa ditolerir di mata banyak pemimpin Islam, dan terutama di mata pengikut-pengikut mereka yang miskin. Korupsi dan kekayaan besar-besaran kaum elite, serta pelanggaran terhadap moralitas Islam yang nampak dilakukan kaum elite tersebut, semakin memperdalam kebencian massa dan memberikan justifikasi keagamaan. Pada lima bulan pertama tahun 1984, pemerintah membekukan atau menutup tiga majalah karena menerbitkan artikel tentang kaum elite kaya Indonesia beserta kawan-kawan cukong mereka.

Pada tanggal 12 September 1984, terjadi kerusuhan terparah sejak peristiwa Malari satu dekade sebelumnya, yaitu ketika terjadi insiden di Tanjung Priok, distrik pelabuhan di Jakarta. Meskipun detail-detail insiden ini tetap kabur, yang pasti ada sebuah demonstrasi massa kalangan mesjid yang mengumandangkan slogan-slogan antipemerintah dan anticukong, menolak Pancasila sebagai asas tunggal, menuduh prajurit ABRI telah mengotori mesjid, dan memekikkan kalimat "Allahu Akbar". ABRI merentetkan tembakan kepada massa yang bergerak maju dan membunuh setidaknya 28 orang, dan mungkin bahkan lebih

dari seratus. Karena insiden Tanjung Priok ini, pamflet anti-pemerintah tersebar sepanjang Jawa, menyerukan kaum muslim untuk membela agama mereka. Pengeboman dan pembakaran terjadi di Jakarta. Bank Central Asia miliki Liem Sioe Liong merupakan sasaran utama. Kuil peribadatan Buddha kuno, Candi Borobudur, di Jawa Tengah, dibom pada bulan Januari 1985. Demi menenangkan sentimen-sentimen Islam, panglima Katolik ABRI, Murdani, mengunjungi mesjid dan madrasah-madrasah untuk memastikan kaum muslim bahwa mereka masih memegang posisi sentral dalam Indonesia. Akan tetapi, kerusuhan tetap berlangsung. Pada bulan Juli 1985, api menghanguskan pusat perbelanjaan utama di daerah bisnis perkampungan Cina (Glodok) di Jakarta dan menghancurkan kantor pusat Radio Republik Indonesia. Beberapa minggu kemudian, 60 gedung dibakar di sebuah areal bisnis di Jakarta.

Pemerintah dengan sigap menangani pihak-pihak yang dianggapnya bertanggung jawab atas kerusuhan ini. Sekitar 30 orang dipenjarakan sampai selama 3 tahun karena insiden Tanjung Priok. Sepuluh orang diadili atas tuduhan pengeboman Bank Central Asia. Seorang dai Islam diganjar hukuman seumur hidup. Kemudian, orang-orang dengan kedudukan penting divonis penjara. Mantan Menteri Perindustrian, H. Mohamad Sanusi (lahir 1920), dihukum 19 tahun. Yang paling mengejutkan, mantan Panglima Divisi Siliwangi dan Sekretaris Jenderal ASEAN pertama, Dharsono, dihukum 10 tahun, yang nantinya dikurangi menjadi 7 tahun. Ada indikasi bahwa teman-temannya yang ikut menandatangani Petisi 50 juga akan diadili, namun ternyata hal itu tidak terjadi.

Langkah tegas terhadap pemberontakan dan usaha untuk membendung laporan-laporan mengenai korupsi terus berlanjut. Sebuah artikel yang ditulis David Jenkins dalam *Sydney Morning Herald* mengenai perjalanan bisnis keluarga Soeharto menimbulkan krisis singkat hubungan Indonesia-Australia pada tahun 1986. Pada tahun yang sama, sembilan pengikut PKI berusia lanjut yang sudah dipenjara selama bertahun-tahun akhirnya dieksekusi, termasuk (menurut beberapa laporan) Sjam. Dua ribu buruh industri minyak dipecat karena diduga terlibat dengan PKI yang terjadi 20 tahun sebelumnya. Karya-karya Pramoedya dilarang. Pada bulan Oktober 1986, ketika harian Protestan terkemuka bertiras besar *Sinar Harapan* menerbitkan artikel

mengenai suksesi kepresidenan dan sisi gelap dunia bisnis Indonesia, pemerintah menutupnya sekaligus mengakhiri periode penerbitan harian itu yang sudah berjalan 23 tahun. Setelah beberapa bulan, harian itu muncul kembali dengan menggunakan nama *Suara Pembaruan*. Tetapi, represi ini tidak memengaruhi pandangan positif pemerintahan Barat terhadap rezim Soeharto. Pada bulan April 1986, Presiden Amerika Ronald Reagan datang ke Bali untuk bertemu dengan Soeharto dan pemimpin-pemimpin ASEAN lainnya.

Kampanye pemilu 1987 merupakan ujian serius pertama bagi makna sesungguhnya dari depolitisasi NU. Aliansi akar rumput yang mulai timbul antara kyai NU dan birokrasi mulai membuahkan hasil karena para kyai mendorong pengikut mereka untuk mendukung Golkar. Abdurrahman Wahid sendiri menghadiri kampanye Golkar. Birokrat tidak lagi melihat adanya hambatan politik untuk bekerja sama dengan NU atas nama pembangunan, dan para birokrat itu sendiri sering kali siap menganut Islam dengan lebih saleh, yang tidak lagi menjadi aib dalam politik dan karier.

Peralihan pendukung NU dari PPP ke Golkar nampak jelas dalam hasil pemilu April 1987. Perolehan Golkar menanjak dari 64,3% pada tahun 1982 menjadi 73,2%, sementara PPP merosot dari 27,8 menjadi 16%. PDI meningkat perolehannya dari 7,9% tahun 1982 menjadi 10,9%. Jadi, 11,9% suara telah meninggalkan PPP, 8,9% beralih ke Golkar dan sisanya ke PDI. Golkar bahkan menang di Aceh dengan meraih 51,8% suara, di atas PPP yang meraih 42,8% dan PDI yang hanya mendapatkan 5,4%. Kepercayaan diri rezim meningkat dengan hasil yang dicapai Golkar, karena ini tampaknya menunjukkan bahwa Islam sudah dapat dikendalikan. NU rupanya sudah bisa dikooptasi, PPP melemah, dan para aktivis yang bertanggung jawab atas insiden Tanjung Priok beserta akibat susulannya sudah wafat atau berada dalam penjara.

Pemerintahan Soeharto juga sukses melewati masa lima tahun kesulitan ekonomi. Perencanaan ekonomi yang cermat, penghematan fiskal, dan devaluasi rupiah mampu menggairahkan perbaikan ekonomi. Demi mengatasi masalah "kesesakan" (*bottleneck*) yang besar dalam dunia perdagangan Indonesia, Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden pada tahun 1985 yang menghapuskan badan cukai Indonesia yang terkenal korup dan tidak

kompeten dan meneken kontrak dengan Swiss Societe General de Surveillance untuk mengambil alih fungsinya, hal mana membawa perubahan dramatis. Pengurangan besar-besaran dalam hal tarif diperkenalkan pada tahun 1986, meskipun kepentingan pribadi para kroni dalam industri baja, plastik, dan katun dilindungi dari perubahan-perubahan ini. *Asian Wall Street Journal* memperkirakan bahwa harga baja di Indonesia berada 25–45% di atas harga pasar internasional, sedangkan plastik berada 15–25% di atas harga pasar internasional. Dari 1987 hingga 1992, pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan adalah 6,7%, meskipun sudah tidak ada lagi pendapatan yang tinggi dari minyak. Manufaktur dan ekspor nonmigas lainnya menjadi unggulan dari perekonomian Indonesia. Pada awal 1990-an, proporsi tenaga kerja dalam sektor pertanian turun menjadi di bawah 50% untuk pertama kalinya. Kemiskinan menurun dan hanya ada sedikit bukti yang mendukung kecurigaan adanya jurang yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin.

Namun, memang terdapat bukti mengenai adanya kesenjangan lebar pembangunan regional, yang berakibat jelek di masa depan. Tetapi, pembedaan utama kini bukan pembedaan lama antara Jawa dan luar Jawa, karena sekarang Jawa memberikan kontribusi signifikan bagi ekspor Indonesia. Pada tahun 1990, Jawa menghasilkan 62% dari PDB (Produksi Domestik Bruto) nonmigas. Terjadi pula perkembangan yang signifikan di Sumatra dan banyak devisa dari turisme Bali. Jadi, pembedaan yang dikedepankan adalah antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur yang jauh tertinggal. Indonesia secara keseluruhan masih merupakan negara miskin, terlepas dari kemajuan yang dicapai dalam pembangunan dan munculnya gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, dan bagian timur jauh lebih miskin ketimbang bagian barat.

Kesuksesan rezim menangani tantangan politik dan ekonomi dibarengi pula dengan prestasi diplomatis yang menonjol. Pada pertemuan FAO PBB di Roma bulan Oktober 1985, terjadi dialog 'Utara-Selatan' di mana Soeharto muncul sebagai juru bicara pihak Selatan dan François Mitterand mewakili pihak Utara. Soeharto pergi mengunjungi Eropa Timur dan pada bulan Oktober, Deputi PM Uni Soviet mengunjungi Jakarta. Pada peringatan ulang tahun ke-30 Konferensi Asia-Afrika di awal-awal tahun itu, Indonesia kembali tampil sebagai pemimpin negara-negara nonblok.

Inisiatif internasional Jakarta yang paling menonjol terjadi di Asia Tenggara. ASEAN menghadapi masalah diplomatis regional besar pertamanya ketika Vietnam menduduki Kamboja pada akhir tahun 1978. Demi menjunjung prinsip nonintervensi, negara-negara ASEAN mendukung rezim Khmer Merah Pol Pot yang kejam dan suka membunuh. Hal ini menimbulkan dilema bagi Indonesia karena pemerintah dan militer Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Vietnam. Komunisme tidak lagi menjadi isu penting bagi Indonesia ketimbang fakta bahwa Vietnam merupakan satu-satunya negara selain Indonesia di Asia Tenggara—bahkan di seluruh Asia—yang meraih kemerdekaan dari kekuasaan kolonial melalui revolusi bersenjata. Selain itu, Indonesia berulang kali merasa ditegur, sama dengan Vietnam, oleh Majelis Umum PBB untuk menarik diri dari wilayah yang didudukinya: Vietnam dari Kamboja, Indonesia dari Timor Timur. Meskipun Indonesia cenderung menganggap Thailand sebagai negara 'lini depan' ASEAN, tetapi Indonesia tetap enggan menerima posisi anti-Vietnam ASEAN. Dengan begitu, Indonesia juga menjauhkan dirinya dari sikap Washington.

Indonesia berusaha menggunakan hubungannya dengan Vietnam untuk menyelesaikan kebuntuan masalah Kamboja. Benny Murdani mengunjungi Hanoi untuk tujuan ini pada tahun 1984, sementara Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja pergi ke Moskow pada tahun 1984 dan ke Hanoi pada tahun 1985. Menteri Luar Negeri Vietnam Nguyen Co Thach dan Menteri Pertahanan Jenderal Van Tien Dung mengunjungi Jakarta secara terpisah pada tahun itu. Tapi, upaya-upaya ini tidak menghasilkan pemecahan apa pun pada tahap ini.

Pada tahun 1988, Ali Alatas (lahir 1932) menjadi Menteri Luar Negeri dan mengeluarkan langkah-langkah yang menghasilkan kesepakatan di Kamboja. Pada bulan Juli 1988, diadakan Jakarta Informal Meeting pertama untuk mempertemukan antara empat faksi Kamboja yang saling bertikai, semua pemerintahan ASEAN, Vietnam, dan Laos. Proses ini berlanjut dengan konferensi internasional di Paris yang dibuka tahun 1989 dengan diketuai bersama oleh Prancis dan Indonesia, yang diwakili oleh Alatas. Suatu kesepakatan komprehensif akhirnya ditandatangani pada bulan Oktober 1991 di Paris. Pasukan Indonesia ikut bagian dalam membantu Kekuasaan Sementara PBB di Kamboja, yang bertugas mengawasi transisi dari konflik aktif ke arah

bentuk politik yang lebih damai. Kepemimpinan regional Indonesia terhadap Kamboja membuat Indonesia mendapatkan respek internasional.

Indonesia mulai berkampanye untuk mengetuai Gerakan Non-Blok, namun kedudukannya dalam gerakan ini masih cacat karena kekuasaannya secara kolonial atas Timor Timur. Pada tahun 1988, Yugoslavia terpilih menjadi ketua gerakan, tetapi perhatian internasional terhadap nasib Timor Timur sudah mulai memudar. Tidak satu pun pemerintahan asing yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Jakarta yang secara serius berpikir bahwa Indonesia akan menarik diri dari sana, sehingga pemerintahan asing pun merasa tidak ada gunannya menekan Indonesia untuk membebaskan Timor Timur, meskipun Indonesia secara diam-diam sering dituntut untuk memperbaiki perlakuannya terhadap penduduk Timor Timur. Pada tahun 1985, Perdana Menteri Australia Bob Hawke mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur dan memblokir hubungan radio luar Fretilin dengan Australia. Suara anti-Indonesia di PBB melemah setiap tahun. Pada tahun 1991, Indonesia berhasil menjadi ketua Gerakan Non-Blok, dan ini mencerminkan posisi internasional Indonesia serta mencerminkan pengakuan umum—meskipun sering dengan rasa kurang enak—terhadap pendudukan negara ini atas Timor Timur.

Pada bulan maret 1988, Soeharto kembali terpilih oleh MPR sebagai presiden untuk kelima kalinya. Dengan segala kepercayaan diri yang dimiliki seorang *ndeso* yang menjadi negarawan dunia dan dikelilingi oleh keluarga yang semakin kaya, para kroni, dan para penjilat yang menaburinya dengan pujian berlebihan, Soeharto bertindak untuk memastikan tidak ada seorang pun yang akan menantang kekuasaannya. Benny Murdani tampak terlalu kuat dan independen sebagai Panglima ABRI. Dilaporkan secara luas bahwa kegagalan Murdani di mata Soeharto adalah karena Murdani berani mencoba menasihati Presiden untuk membatasi kegiatan bisnis anak-anaknya. Maka, pada bulan Februari 1988, Murdani digantikan oleh Try Sutrisno (lahir 1935), sementara Murdani diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Soeharto memulai proses yang dikenal sebagai 'de-Bennyisasi' ABRI, yaitu dengan menggantikan para perwira yang mengagumi dan setia kepada Murdani dengan orang-orang yang bagi

Soeharto bisa dipercayainya. Pada sidang MPR bulan Maret, Soeharto memilih Sudharmono, yang dianggap ABRI sebagai musuh utama, sebagai wakil presiden (1988–93). Kopkamtib juga menjadi terlalu kuat, dengan sering mengesampingkan badan-badan lain, sering merasa dirinya sebagai hukum itu sendiri, dan, dalam perhitungan Soeharto, lebih cenderung menjadi alat Murdani. Maka, Kopkamtib dibubarkan pada bulan September 1998 dan digantikan dengan Bakorstanas (Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional) yang berada langsung di bawah Presiden dan Panglima ABRI.

ABRI menaruh perhatian kepada tanda-tanda meningkatnya independensi dan pengaruh sipil dalam Golkar yang kini memiliki 25 juta anggota. Soeharto juga tampaknya tidak sreg dengan arah Golkar. Kongres Golkar diadakan pada bulan Oktober 1988. ABRI kembali memasukkan pengaruhnya karena meraih 2/3 kursi dalam DPD Golkar sehingga mampu mengendalikan jalannya kongres. ABRI menyebarkan rumor bahwa Sudharmono bila dirunut memiliki hubungan dengan PKI, sehingga semakin mudahlah untuk mendepaknya dari kursi ketua. Sudharmono digantikan oleh seorang jenderal pensiunan. Memang tidak jelas apakah peristiwa ini melambangkan peneguhan kembali kendali ABRI ataukah peneguhan kendali Soeharto, namun independensi yang mulai muncul dalam Golkar segera dipasung.

Soeharto, ABRI, dan seluruh elite-atas Indonesia menyadari bahwa perkembangan ekonomi dan perubahan sosial yang terjadi di sepanjang dataran Asia telah menimbulkan tuntutan akan reformasi politik di mana-mana. Di Filipina, Taiwan, Korea Selatan, dan negara-negara lain, perubahan demokratis mulai terjadi. Tumbangnya dan kaburnya diktator Filipina Ferdinand Marcos pada bulan Februari 1986 oleh revolusi *'people's power'* merupakan peristiwa yang menggelisahkan Soeharto karena terdapat banyak kesamaan dan hubungan pribadi antara kedua rezim yang korup dan menindas ini. Dalam ABRI, pemikiran doktrinalnya kini didominasi oleh konsep kewaspadaan. Dalam pandangan ABRI, kewaspadaan dibutuhkan untuk mencegah munculnya ancaman terhadap stabilitas dan pembangunan. Kewaspadaan semacam itu tampaknya berhasil. Islam kini berhasil dijinakkan dengan kombinasi antara kooptasi dan represi. Sedangkan independensi Golkar telah dibuat mandek.

Kondisi domestik dan internasional tetap suportif terhadap rezim Soeharto. Di dalam negeri, kelas menengah urban kosmopolitan yang terdidik muncul dengan identitas dan perilaku yang semakin Islami. Usaha untuk mendefinisikan dan mengukur kelas ini masih kabur dan kontradiktif, namun tidak diragukan bahwa sudah terjadi perubahan sosial yang signifikan. Kelas menengah ini menyadari bahwa mereka diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan Soeharto dan bahwa mereka berada di tengah-tengah jutaan rakyat Indonesia yang masih sangat miskin. Jadi, kelas menengah Indonesia berharap adanya reformasi rezim, namun secara umum mereka tidak begitu tertarik dengan kemungkinan revolusi *'people's power'* di Indonesia. Mereka tahu bahwa jika kaum miskin dimobilisir secara politis, sasaran utamanya pastilah kaum elite atas dan para cukong, sedangkan sasaran keduanya mungkin sekali harta kelas menengah. Makanya, dibuatlah kompromi-kompromi, yaitu kelas menengah menolerir pelanggaran hukum dan pendekatan keamanan ABRI yang keras sebagai harga pembangunan.

Tidak hanya kelas menengah yang menolerir penyimpangan rezim sebagai harga bagi keuntungan mereka. Penduduk desa pedalaman mengalami pemerahan dari pihak-pihak di atas mereka, namun mereka juga memandang adanya keuntungan nyata dari rezim Soeharto: listrik di pedesaan, dibangunnya sekolah dan klinik, beras dan uang berlimpah, inflasi moderat, dan kemungkinan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Kaum miskin urban mendapatkan kesempatan dalam sektor informal, dalam kerja-kerja bangunan, dan dalam sektor lain ekonomi urban serta dalam industri-industri yang sedang berkembang. Kaum muslim yang saleh melihat masyarakat mereka menjadi lebih Islami. NU dan Muhammadiyah tampaknya telah berdamai dengan rezim, dan hal ini mendukung Islamisasi masyarakat Indonesia secara lebih jauh lagi. Meskipun masih ada kesenjangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur, sebagian besar rakyat Indonesia masih bisa memercayai bahwa terjadi perbaikan hidup.

Di luar negeri, negara-negara Barat memandang Indonesia sebagai negara pembangunan yang konservatif. Indonesia merupakan contoh aksi penyelamatan yang luar biasa suatu negara dari bencana sosial-politik-ekonomi. Pembangunan Indonesia memberikan berbagai kesempatan bagi individu, usahawan, dan

pemerintahan Barat untuk menangguk keuntungan dari pertumbuhan Indonesia. Dalam bidang politik, Jakarta tidak mau menggabungkan diri dengan segala macam aliansi militer dan memandang dirinya sebagai pemimpin dari negara-negara nonblok. Dalam dunia Perang Dingin yang penuh persaingan, hal ini terbukti bahkan lebih penting bagi Barat untuk menjalin persahabatan dengan Indonesia. Fakta bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar juga membuat pemerintahan-pemerintahan Barat mendukung rezim Soeharto, yang telah menunjukkan bahwa dia mampu menjinakkan potensi politik Islam. Jadi, demi kepentingan yang lebih besar, kekuatan-kekuatan Barat juga bersedia menolerir sikap-sikap rezim yang sebetulnya keterlaluan.

Pada dekade berikutnya, perubahan dalam rezim, perubahan dalam konteks sosial politik dalam negeri, dan perubahan dalam lingkungan internasional akan mengoyak ikatan kepentingan segala pihak yang telah memberi kestabilan bagi rezim dari pertengahan 1970-an hingga akhir 1980-an. Kemudian, isu selanjutnya adalah kapan, kenapa, dan bagaimana rezim ini runtuh.[]

Bab 23 ....

Tantangan, Krisis, dan Keruntuhan Orde Baru, 1989–98

INDONESIA DAN konteks internasional berubah drastis sejak akhir 1980-an. Berakhirnya Perang Dingin dan keruntuhan serta pecahnya Uni Soviet mengartikan bahwa pemerintahan demokratis Barat tidak begitu lagi melihat perlunya kerja sama dengan rezim-rezim Dunia Ketiga. Pada saat yang sama, perkembangan-perkembangan itu mengarahkan pemerintah Indonesia dan militer untuk meningkatkan kekerasan, karena mereka khawatir Indonesia dengan segala potensi kekerasan etnisnya juga akan runtuh seperti Soviet. Rezim Soeharto melakukan hal ini ketika kelas menengah Indonesia mulai tidak begitu toleran terhadap penyimpangan-penyimpangan rezim, dan ketika peningkatan rasa keislaman telah menuntut adanya keadilan dan moralitas yang lebih besar. Dalam kondisi penuh tantangan ini, keluarga Soeharto dan klik penguasa semakin menggila dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan mereka. Kemudian, krisis keuangan Asia menceburkan Indonesia ke dalam bencana ekonomi, sehingga tidak ada lagi alasan utama bagi rakyat untuk mendukung pemerintahan. Pada tahun 1998, rezim Soeharto runtuh di tengah-tengah suasana yang mirip dengan suasana kelahirannya di tahun 1965–6, yaitu di tengah-tengah krisis ekonomi, kerusuhan dan pertumpahan darah di jalan-jalan.

Runtuhnya imperium Soviet dan, kemudian, negara Soviet itu sendiri merupakan kejutan tidak menyenangkan bagi pemerintah Indonesia. Seperti kasus Soviet, rezim Soeharto memerintah

satu negara besar yang terdiri atas berbagai etnis dan identitas agama, dengan keterbatasan sarana komunikasi dan infrastruktur, tingginya kemiskinan dan kesenjangan pembangunan regional. Keruntuhan Soviet dimulai pada tahun 1988. Terjadi kerusuhan etnis antara Azerbaijan yang mayoritas penduduknya Islam dan Republik Soviet Armenia yang mayoritas Kristen, dan ada pula tuntutan dari republik-republik Baltik untuk memerdekakan diri secara kultural dan politik. Pada tahun 1989, Polandia dan Hungaria berjalan menuju demokrasi multipartai dan pemerintah Jerman Timur mulai pecah. Tembok Berlin diruntuhkan pada bulan November 1989. Pada bulan Desember, Nicolae Ceauçescu—yang tujuh tahun sebelumnya menjadi tamu negara Soeharto—digulingkan di Rumania dan dibunuh. Tahun berikutnya, Lithuania memproklamasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet dan terjadi kerusuhan di Republik Soviet Kirghiz yang mayoritas Islam. Pada tahun 1991, Yugoslavia mulai berantakan. Pada bulan Desember 1991, Uni Soviet secara resmi dibubarkan. Seakan-akan ingin mengingatkan dunia bahwa kerusuhan dan perbedaan etnis itu bukan sekadar monopoli dari wilayah Soviet, pada bulan Desember 1992, terjadi kerusuhan Hindu-Islam di mesjid di Ayodya, India. Pada minggu-minggu berikutnya, lebih dari 1.200 orang tewas. Keruntuhan Soviet diartikan di beberapa tempat sebagai akibat kebijakan reformasi (*perestroika*) dan keterbukaan (*glasnost*) Mikhael Gorbachev. Sebaliknya, pada bulan Mei 1989, pemerintah Cina membuktikan di lapangan Tiananmen bahwa gerakan demokrasi mahasiswa bisa dilibas dengan kekerasan oleh kekuatan militer.

Soeharto, ABRI, dan elite pemerintah Indonesia rupanya memandang peristiwa-peristiwa ini sebagai peringatan akan bahaya yang terkandung dalam perbedaan etnis dan agama, serta bahaya dari konsesi demokratis. Mereka tampaknya tidak membayangkan betapa akhir Perang Dingin akan mengubah konteks global. Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan adidaya dunia, yang membuatnya tidak perlu lagi bertawar-menawar atau berkompromi dengan rezim-rezim busuk untuk menjaga mereka tetap dalam 'kubu' Amerika. Meluasnya gelombang demokrasi juga mendorong tuntutan-tuntutan di seluruh dunia akan kebebasan dan martabat yang lebih besar, serta akan isolasi dan penghukuman rezim-rezim lalim. Peristiwa mengerikan Lapangan Tianan-

men terutama meningkatkan tekanan umum terhadap Washington dan sekutu-sekutu Eropanya untuk tidak lagi memberikan dukungan kepada diktator penindas.

Di Aceh, rezim Soeharto bisa melihat bagaimana separatisme yang diilhami rasa kesukuan dan agama muncul kembali. Aceh selama ini dalam keadaan tenang sejak masa kegiatan pemberontakan 1976–82 (termasuk proklamasi kemerdekaan pada tanggal 4 Desember 1976), namun pemberontakan kembali muncul pada Mei 1988. Pemberontakan ini menjadi serius pada tahun 1989 ketika pejuang GAM (Gerakan Aceh Merdeka) menyerang pos-pos ABRI dan mengambil senjata. Para pemberontak memiliki hubungan penting dengan pendukung-pendukung luar negeri. Beberapa ratus pemberontak mendapatkan latihan bergerilya di Libya. GAM memiliki sumber pendanaan dari komunitas orang Aceh kaya di Malaysia. Indonesia menyatakan bahwa kartu identitas Malaysia ditemukan dalam tubuh para pemberontak, dan buronan GAM bisa mengungsi ke Malaysia.

GAM tidak dipimpin oleh ulama, melainkan oleh penduduk lokal biasa yang sudah muak dengan cara Jakarta mengelola Aceh. Secara khusus, *boom* gas alam cair menghasilkan pendapatan tinggi sektor migas lokal, namun Aceh hanya mendapatkan bagian yang kecil. Tetapi, pembangunan kawasan industri Lhokseumawe memang mengakibatkan perubahan yang tidak bisa diterima orang Aceh, termasuk dirampasnya hak petani lokal, pelacuran, perjudian, alkohol, obat-obatan, dan gerombolan preman yang memiliki kaitan dengan ABRI. Kemudian nampak jelas bahwa GAM memiliki dukungan populer yang signifikan terutama di Pidie, Aceh utara, dan Aceh timur.

Pada pertengahan 1990, karena memuncaknya pemberontakan, Jakarta mengirim pasukan Kostrad ke Aceh di bawah pimpinan Prabowo. Sejak saat itu hingga 1998, Aceh dianggap sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dan di situ diberlakukan hukum darurat perang. Respons utama Jakarta terhadap protes rakyat Aceh tetap bersifat militeristik. Teror menjadi taktik standar. Tersangka simpatisan GAM ditangkap, disiksa dan dieksekusi tanpa pengadilan. Mayat-mayat ditinggalkan di tempat-tempat umum untuk mengintimidasi penduduk. ABRI dengan sukses mengurangi kegiatan GAM, tetapi hal ini berakibat buruk pada reputasi ABRI dan pada rasa komitmen rakyat Aceh terhadap

Indonesia. Sejak saat ini, kebencian lokal terhadap ABRI dan Jakarta menjadi alat rekrutmen ampuh bagi kaum pemberontak.

Hanya sedikit ulama Aceh yang mendukung GAM, dan kebanyakan terlibat dalam aksi kontra-pemberontakan dan kampanye propaganda pemerintah: satu lagi kesuksesan kooptasi terhadap kekuatan politik Islam. Hal ini mencerminkan sejauh mana ulama Aceh, sebagai elite lokal, diuntungkan oleh kebijakan pembangunan Jakarta. Para ulama itu kebanyakan sudah menjadi bagian dari kelas menengah Indonesia yang punya banyak kepentingan dengan *status quo*.

Pemimpin Islam tidak selalu terkooptasi oleh rezim. Di Lampung, Sumatra Selatan, ABRI berhadapan dengan gerakan kuat pada awal 1989 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh religius lokal. Militer meresponsnya dengan brutal. Sekitar seratus orang desa dibunuh. ABRI pertama-tama mengatakan bahwa gerakan ini terdiri atas kaum fanatik agama, namun kemudian mengakui bahwa keluhan-keluhan tentang hak tanahlah yang memicu protes.

Timor Timur juga mulai muncul lagi sebagai wilayah berbahaya bagi Jakarta. Hingga 1989, provinsi itu tertutup bagi dunia luar dan ABRI bebas berkeliaran di sana, sebelum akhirnya provinsi itu dibuka kembali. Hal ini memberikan kesempatan terhadap dunia luar untuk menilai hasil kekuasaan pemerintah Indonesia di Timor Timur. Hasil kekuasaannya adalah kombinasi dari investasi pembangunan (meskipun Timor Timur tetap menjadi provinsi dengan PDB per kapita terendah di Indonesia) dengan usaha untuk menekan identitas politik rakyat Timor Timur, eksploitasi sumber daya setempat (terutama kopi, kayu cendana dan marmer) oleh tokoh-tokoh senior ABRI dan oleh kebrutalan ABRI. Dalam tahun-tahun berikutnya, muncul masalah-masalah baru karena meningkatnya dominasi pembangunan ekonomi lokal oleh pemukim Indonesia dari luar Timor Timur (terutama orang Bugis dan Makasar).

Gereja Katolik menjadi alat ampuh identitas bagi rakyat Timor Timur, dengan jaringan organisasi dan kekuatan politik internasional mendukung tujuan mereka, meskipun tidak selalu demikian halnya. Pada tahun 1952, hanya 13% populasi Timor Timur yang beragama Katolik, sedangkan kebanyakan rakyat Timor Timur di pegunungan masih menganut animisme. Pada tahun 1973, dua tahun sebelum pendudukan Indonesia, Katolik meraih

pengikut sebesar 29% populasi. Di bawah kekuasaan Indonesia, sejumlah besar orang Timur Timur bergabung dengan Gereja Katolik. Pada tahun 1990, orang Katolik sudah berjumlah sekitar 80% dari populasi, dan pada tahun 1994 meningkat menjadi hampir 90%. Agama Katolik merupakan sarana bagi rakyat Timor Timur untuk membedakan diri mereka dengan pasukan-pasukan Indonesa yang sebagian besar Islam, dan dengan pemukim non-Timor yang mendominasi daerah mereka. Namun, konversi (pemindahan agama) itu juga mencerminkan kepemimpinan agama Katolik setempat dalam membela Timor Timur. Tokoh utama Gereja adalah kepala hirarki Timor Timur, Monsignor Carlos Filipe Ximenes Belo (lahir 1948), yang merupakan Administrator Apostolik (1983–8), dan kemudian menjadi uskup sejak Juni 1988. Ketika pemerintah Indonesia tidak mengizinkan penggunaan bahasa Portugis di Timor Timur pada tahun 1981, Gereja memutuskan untuk menggunakan salah satu bahasa setempat, Tetun, dan bukannya bahasa Indonesia, sebagai bahasa pengantar kebaktian gereja. Gereja, jadinya, mendukung Tetun sebagai alat identitas rakyat Timor Timur. Tetun menghadapi persaingan ketat dari bahasa Indonesia, yang digunakan dalam sistem pendidikan dan dalam semua media umum, tetapi Tetun berhasil menjadi bahasa lokal utama di Timor Timur.

Pada bulan Oktober 1989, Paus Johannes Paulus II mengunjungi Dili. Di sana, dia mentahbiskan katedral dan mengadakan misa terbuka di hadapan 10.000 orang. Kemudian, terjadi demonstrasi pro-kemerdekaan setelah misa. Polisi memukuli para demonstran di hadapan kamera-kamera jurnalis internasional yang meliput kunjungan Paus. Polisi, kemudian, menangkap 140 aktivis muda, yang beberapa di antaranya mengaku bahwa mereka disiksa. Sejak saat ini, perhatian internasional terhadap Timor Timur meningkat, tetapi pemerintahan pusat Jakarta dan ABRI setempat bertekad untuk menentang segala perubahan fundamental di sana.

Pemerintahan luar negeri terus mendukung rezim Soeharto dan menganggap Timor Timur sebagai gangguan kecil yang mereka yakini seharusnya mampu diatasi Jakarta. Pada bulan Desember 1989, tidak lama setelah insiden yang mewarnai kunjungan Paus, Australia menanda tangani satu perjanjian dengan Indonesia untuk secara bersama mengeksploitasi zona 'Celah

Timor' antara dua negara. Tidak satu pun dari kedua pemerintahan yang akan membayangkan bahwa sepuluh tahun kemudian, Timor Timur akan memisahkan diri dan menggantikan Indonesia sebagai mitra Australia dalam perjanjian itu. Amerika Serikat meneruskan penjualan pesawat F-16 kepada Jakarta pada akhir tahun tersebut. Pada bulan Juni 1990, konsorsium pemberi bantuan, IGGI, setuju untuk meningkatkan bantuan kepada Indonesia menjadi US$ 4,5 milyar, atau meningkat 4,6% dari bantuan 1989.

Beberapa elite Orde Baru, bagaimanapun, mewaspadai dampak globalisasi. Mereka bisa melihat dampak kemajuan komunikasi dunia dalam liputan Timor Timur dan protes yang dihasilkannya, dan di Indonesia tuntutan akan 'keterbukaan' yang lebih besar bisa dikatakan sebagai variasi lokal dari *glasnost*-nya Gorbachev. Ketika duta besar Amerika meninggalkan Jakarta pada bulan Mei 1989, dia menimbulkan debat publik hangat karena menghimbau akan perlunya keterbukaan yang lebih besar dalam masalah politik. Pemerintah kadang-kadang tampaknya menerima ide tersebut, namun kemudian selalu berusaha membatasinya. ABRI menganggap meningkatnya suara rakyat Indonesia yang vokal bersama dengan jaringan aktivis internasional, meningkatnya demonstran dan LSM yang terjun dalam isu-isu seperti Aceh, Timor Timur, antikorupsi, perlindungan lingkungan, dan bantuan hukum, sebagai ancaman bagi stabilitas rezim, bagi pembangunan ekonomi, dan bagi posisi sentral ABRI dalam masalah nasional. Respons ABRI menjadi semakin represif. Jadi, berpisahnya rakyat Indonesia dan rezim—yang pertama mencari kebebasan yang lebih besar, sedangkan yang kedua berusaha untuk menguranginya—lebih menonjol.

Ada pembahasan luas tentang suksesi Soeharto pada tahun 1990, namun hal ini tidak berdampak pada realitas politik. Pada bulan Agustus, sekelompok intelektual, aktivis, dan mantan pejabat menulis surat terbuka yang menyatakan bahwa lima masa pemerintahan itu sudah cukup lama bagi Soeharto sebagai presiden, dan bahwa semua anggota MPR dan DPR harus dipilih. Soeharto mungkin membiarkan diskusi ini, karena dia yakin diskusi itu tidak lebih dari sikap publik yang sedikit menganggu. Pada tahun 1990, dia sudah menjabat Presiden Indonesia lebih lama dari Sukarno. Soeharto begitu berkuasa dan bertekad untuk

tetap demikian. Ketika Soeharto menerbitkan otobiografinya pada tahun 1989 berjudul *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya,* banyak kalangan terkejut dengan kesombongan yang ditunjukkannya dalam buku itu.

Soeharto kini merupakan seorang negarawan dunia. Pada tahun 1989, dia melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet, yang saat itu sudah menuju ambang keruntuhan. Pengalaman dia di sana mungkin semakin memperkuat tekadnya untuk menghindari peristiwa serupa di Indonesia. Soeharto juga menormalkan hubungan Indonesia dengan Cina pada tahun itu. Dia dan Perdana Menteri Cina Li Peng saling bertukar kunjungan pada tahun 1990 dan Jakarta menerima Duta Besar Palestina pertama, yang kesemua langkah ini meningkatkan kedudukan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Pada bulan September 1991, Indonesia terpilih sebagai Presiden Gerakan Non-Blok dan tahun berikutnya diadakan konferensi puncak di Jakarta.

Kondisi politik lokal rezim tampaknya masih terkendali. Baik PPP dan PDI mengalami konflik kepemimpinan yang dikompori pemerintah. Kendati demikian, rezim ini tidak pernah mengendorkan kewaspadaannya terhadap ancaman potensial. Sebagai pengingat terhadap ongkos politik radikal, empat orang yang telah ditahan sejak 1965 dieksekusi pada tahun 1990. Para mahasiswa dihukum. *New York Times* tidak boleh memasuki Indonesia setelah menurunkan suatu artikel tentang bisnis keluarga Soeharto. Dan wacana politik 'suksesi' dilarang. Tahun berikutnya, *International Herald Tribune* dilarang selama empat bulan, 50 pembangkang dicekal ke luar negeri, dua SIUPP dibatalkan, dan beberapa drama dan puisi tidak dibolehkan dipentaskan.

ABRI tetap menjadi alat utama rezim untuk menekan pembangkangan. Soeharto bertekad melakukan 'de-Bennyisasi.' Promosi dalam lingkungan militer kini sangat bergantung pada kedekatan dengan Soeharto, yang bahkan menjadi lebih penting dibandingkan kompetensi profesional. Pada tahun 1990, Soeharto menunjuk saudara iparnya, Mayor Jenderal Wismoyo Arismunandar (lahir 1940), sebagai Panglima Kostrad.

Dalam kondisi Indonesia yang semakin religius, Soeharto berusaha mengkooptasi dan mendapatkan dukungan sentimen Islam. Pada tahun 1989, 21 tokoh Islam terkemuka dari NU dan Muhammadiyah secara diam-diam mendukung Soeharto

untuk tetap menjadi presiden, satu dukungan yang menjadi rahasia umum pada tahun berikutnya. Pada tahun 1991, Soeharto pergi haji ke Mekah untuk pertama kalinya. Setelah itu, dia menyandang nama 'Haji Muhammad Soeharto'. Dia mencari dukungan para pengusaha pribumi terkemuka, yang biasanya menunjukkan rasa identitas keislaman yang kuat. Pada tahun 1990-91, Soeharto menghimbau para cukong dan perusahaan besar untuk memberikan saham kepada pengusaha pribumi. Usaha-usaha ini tidak memiliki dampak luas dan mungkin hanya bisa semakin menyadarkan betapa besar peranan cukong dan semakin membuat orang Indonesia beretnis Cina menjadi sasaran kritik utama.

Langkah paling dramatis dalam mengaitkan rezim dengan lingkaran Islam melibatkan anak didik Soeharto, Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie (lahir 1936), yang nantinya menjadi Presiden Indonesia ketiga di penghujung dekade. Habibie lahir di Sulawesi dan berdarah campuran Jawa-Bugis. Ayahnya wafat tahun 1950 ketika Habibie berusia 14 tahun. Pada tahun yang sama, dia mendapatkan pengasuh baru dan, kemudian, berkuasa dalam sosok Soeharto yang bertugas sebagai komandan militer muda dan bermarkas di seberang rumah Habibie di Ujung Pandang. Soeharto mengambil anak yatim itu di bawah asuhannya. Habibie tampil menonjol di sekolah. Dia digambarkan sebagai jenius oleh para pengagumnya. Di kemudian hari, dia sendiri memuji Soeharto sebagai 'super jenius'. Habibie mengambil sekolah menengahnya di Bandung, dan kemudian mengambil jurusan teknik di Institut Teknologi Bandung. Dia kemudian melanjutkan kuliah ke Jerman Barat untuk mempelajari teknik konstruksi pesawat. Habibie mendapatkan gelar *diploma of engineering* dari Technische Hochschule di Aachen pada tahun 1960, dan meraih gelar doktor pada tahun 1965. Dia bekerja sebagai teknisi aeronautika di perusahaan Jerman Barat yang nantinya dimasukkan ke dalam perusahaan Messerschmitt. Pada tahun 1974, ketika masa kerjanya di Messerschmitt akan berakhir, Habibie ditunjuk sebagai wakil presiden dan direktur teknologi perusahaan tersebut.

Pada akhir 1973, Ibnu Sutowo dari Pertamina mengunjungi Jerman Barat dan menyampaikan kepada Habibie pesan dari Presiden Soeharto yang memanggil Habibie pulang. Pada tahun 1974, Habibie kembali ke Jakarta dan Soeharto memintanya untuk mendirikan satu industri pembangunan pesawat terbang lokal.

Dari sini, lahirlah IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) yang merupakan pusat dari apa yang nantinya menjadi kompleks kerajaan besar Habibie dari BUMN berteknologi tinggi, yang mencakup aviasi, amunisi, elektronika, dan pembuatan kapal. Pada tahun 1978, Habibie diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Dia, kemudian, terpilih sebagai anggota akademi kehormatan bidang teknik dan aorenautika di Jerman, AS, Inggris, Prancis, Swedia, Jepang, dan Malaysia, serta menerima berbagai penghargaan dari badan-badan internasional. Bagi para pengikutnya, Habibie adalah seorang jenius teknologi yang memberikan masa depan teknologi-tinggi bagi Indonesia. Bagi para musuhnya, Habibie merupakan pejabat gila tak bertanggung jawab yang menggunakan kedekatannya dengan Soeharto untuk mengucurkan milyunan dolar demi upaya-edan-merugikan yang ditutupi dengan tidak memberikan daftar pengeluaran lengkap. ABRI secara khusus tidak menyukai interferensi Habibie dalam bidang teknologi militer, karena ABRI tidak melihat alasan kenapa bidang itu harus berada di bawah kendali orang sipil.

Habibie menyebut dirinya sendiri sebagai seorang muslim taat. Dia melakukan umrah pada tahun 1982, dan juga melaksanakan haji pada tahun 1984 sebagai tamu pemerintahan Saudi Arabia. Sebagaimana layaknya kebanyakan muslim, Habibie mengatakan bahwa pengalaman hajinya memperdalam rasa keagamaannya. Dia melaksanakan ibadah sunat puasa Senin-Kamis setiap minggu sebagai latihan keagamaan.

Habibie merupakan kombinasi unik dari latar belakang sipil, kebrilyanan akademis, kesalehan Islami, dan kedekatan kepada Soeharto, yang membuatnya sebagai kunci menuju masa depan bagi banyak kaum intelektual-kelas-menengah Islam. Ketika kelompok tersebut memutuskan untuk mendirikan organisasi baru, mereka meminta Habibie untuk memimpinnya. Soeharto menyetujui dibentuknya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) pada bulan Desember 1990.

ICMI mengubah konteks politik dan religius di Indonesia. ICMI melambangkan rekonsiliasi antara negara dan Islam modernis yang tidak terbayangkan satu dekade sebelumnya. Namun, terjadi perdebatan panjang tentang siapa mengooptasi siapa dengan dibentuknya ICMI. Intelektual-kelas-menengah Islam melihat adanya tangga kesempatan dan pengaruh di hadapan

mereka. Pada bulan Agustus 1992, ICMI memiliki 11.000 anggota dan bertambah menjadi 40.000 tujuh bulan kemudian. ICMI mulai menerbitkan hariannya sendiri, *Republika*, dan mendirikan satu organisasi penelitian *think-tank* bernama CIDES (Centre for Information and Development Studies). Sebagian besar intelektual Islam terkemuka Jakarta bergabung dengan ICMI sejak awal. Namun, Abdurrahman Wahid menolak bergabung dan dengan konsisten mencela ICMI sebagai organisasi elitis sektarian yang bisa mengancam Indonesia yang pluralis.

Usaha Soeharto mendapatkan dukungan Islam menghasilkan sejumlah konsesi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Perempuan dibolehkan memakai jilbab dan pendidikan agama Islam diperkuat di sekolah-sekolah negeri. Peradilan Islam di Indonesia memiliki kekuatan yang meningkat, dan hukuman berat dijatuhkan kepada para jurnalis dan orang-orang lain yang dituduh telah menghina Islam secara publik. Hal ini terjadi dalam satu lingkungan sosial di mana segregasi jenis kelamin di beberapa universitas meningkat, dan di mana meningkat pula tekanan dari kelompok Islam konservatif terhadap wanita untuk membatasi diri mereka hanya pada peran istri dan ibu rumah tangga.

Meningkatnya rasa keislaman didorong, antara lain, oleh korupsi elite dan pemameran kekayaan besar-besaran yang dimungkinkan oleh korupsi itu. Pada awal 1990-an, korupsi rezim sudah begitu menggurita dan menjadi rahasia umum di dalam dan luar negeri. Semua anak Soeharto menumpuk kekayaan: putrinya Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut, lahir 1949), Siti Hediyati Hariyadi (Titiek, lahir 1959) dan Siti Endang Adiningsih (Mamiek, lahir 1964), serta putranya Sigit Haryoyudanto (lahir 1951), Bambang Trihatmojo (lahir 1953), dan Hutomo Mandala Putra (Tommy, lahir 1962). Mereka menjalankan perusahaan pengumpul uang berskala besar. Perusahaan Tommy diperkirakan mengumpulkan pendapatan lebih dari US$ 500 juta pada tahun 1992. Anak-anak Soeharto menikmati transaksi istimewa dalam jalan tol, impor komoditi strategis, eksplorasi sumber daya alam, dan dalam banyak bidang lain. Beberapa cukong yang dulu mendapatkan kekayaan kotor hasil kerja sama dengan Soeharto, kini dengan sukses mengubah bisnisnya menjadi bisnis yang legal. Diperkirakan sekitar 70% kegiatan ekonomi swasta berada di tangan orang Cina pada tahun 1990-an. Aburizal Bakrie (lahir

1946) merupakan satu-satunya usahawan pribumi berskala besar yang bisa berjalan secara sah sejajar dengan kelompok cukong Salim, Astra, dan Dharmala. Banyak kelompok lain mengumpulkan kekayaan dengan cara yang jelas-jelas tidak jujur. Setelah seperempat abad pemerintahan Soeharto, lembaga peradilan dan polisi sudah begitu korup sehingga tidak ada pengendalian efektif terhadap keserakahan pengusaha dan pedagang yang memiliki hubungan dengan istana.

Beberapa skandal terburuk berkaitan dengan hutan tropis Indonesia yang berharga. Diperkirakan pada tahun 1950, Indonesia memiliki 152 juta hektar hutan, namun pada tahun 1989, luas itu menyusut hampir 30% menjadi sekitar 109 juta hektar dan hanya kurang dari 92 juta hektar yang berada dalam kondisi baik. Dalam dekade pertama pemerintahan Soeharto, konsesi penebangan kayu diberikan dengan biaya rendah kepada perusahaan cukong dan ABRI yang kemudian mengsub-kontrakkannya kepada penebang Malaysia dan Filipina. Tokoh utama dalam eksploitasi hutan ini adalah kroni cukong Soeharto, 'raja kayu' Bob Hasan (lahir 1931). Pada tahun 1980, Indonesia merupakan pengekspor kayu keras tropis terbesar di dunia. Pada pertengahan 1980-an, sekitar separo dari ekspor pabrikan Indonesia terdiri atas kayu lapis, yang nilainya meningkat dari US$ 68 juta di tahun 1980 menjadi US$ 3,5 miliar di tahun 1992. Ketika permintaan dunia terhadap kayu lapis menurun pada pertengahan 1990-an, raja-raja kayu berpaling kepada pemerintah untuk mensubsidi perpindahan usaha mereka menjadi produsen papan serat.

Banyak area yang dihancurkan, terutama di Kalimantan. Mungkin sekitar 2,5 juta orang Dayak terusir dari rumah tradisional mereka di sana. Pembersihan lahan untuk kayu bakar dan pertanian demi mendukung bertambahnya jumlah penduduk Indonesia juga mengakibatkan berkurangnya hutan Indonesia. Pada 1981, di Kalimantan terjadi kebakaran hutan yang, sejauh pengetahuan kita, terparah dalam sejarah manusia, yang berkobar selama dua tahun dan menghancurkan 3,6 juta hektar hutan. Menteri Kehutanan menjadi badan impoten ketika menghadapi proteksi presiden dalam bentuk konsesi perkayuan.

Kekayaan berlebihan keluarga Soeharto, para kroni dan cukong, jelas melukai rakyat jelata Indonesia dan usahawan pribumi, sehingga memicu respons bersentimen agama. Islam

sering menjadi muara serangan selama bertahun-tahun, namun kini usaha rezim untuk mengkooptasi kepentingan Islam membuatnya harus bereaksi lebih positif terhadap aspirasi Islam dibandingkan dengan masa lalu. Beberapa cukong juga menyadari bahwa kondisi sosial Indonesia mencakup orang-orang yang keluhannya beralasan dan, jika dibiarkan memburuk, bisa mengancam kekayaan mereka. Ada juga beberapa cukong yang, tidak diragukan lagi, memiliki perhatian tulus terhadap sesama warga negara. Tetapi, sebagaimana disinggung di atas, usaha Soeharto supaya perusahaan para cukong memberikan saham bagi koperasi pribumi tidak membuahkan hasil. Kini, inisiatif berada di tangan NU dan ICMI.

Pada tahun 1990, Abdurrahman Wahid mengejutkan banyak pengikutnya dengan mengumumkan bahwa NU akan mendirikan bank kredit pedesaan untuk membantu usahawan kecil dan para petani, dan bank itu akan dijalankan berdasarkan prinsip Barat, yaitu memberlakukan bunga yang melanggar prinsip Alquran. Yang mengejutkan lagi, mitra NU adalah Bank Summa, bagian dari grup Astra yang dipegang oleh keluarga Cina-Kristen, keluarga Soeryadjaya. Dua ribu cabang akan dibangun. Tetapi, yang terjadi hanya sembilan cabang yang dibuka sebelum Bank Summa bangkrut tahun 1992 karena adanya beban kredit macet sebesar US$ 720 juta. Sembilan cabang ini pada umumnya sukses: setelah dua tahun, tiga cabang impas dan empat cabang untung. Saham Bank Summa diambil alih oleh koran *Jawa Pos*, salah satu surat kabar daerah yang paling progresif di Indonesia. Grup Astra diambil alih oleh dua cukong, Prajogo Pangestu (lahir 1942) dan Liem Sioe Liong.

Hal yang lebih signifikan lagi adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan tidak memberlakukan bunga dan beroperasi dengan prinsip ortodoks bagi-hasil dan bagi-rugi. ICMI mendukung insiatif ini dan Soeharto membantu dengan uang dari salah satu yayasan yang ia kendalikan. Ketika Indonesia mengalami krisis moneter enam tahun kemudian, Bank Muamalat bertahan lebih baik dibandingkan bank-bank umum, karena bank ini tidak terikat dengan komitmen finansial yang akan membangkrutkan hampir seluruh sektor bisnis modern Indonesia.

Ketika muncul tuntutan akan adanya masyarakat yang lebih adil dan ketika perilaku rezim semakin menyimpang, pendekatan represif ABRI terhadap segala masalah menimbulkan insiden heboh yang berdampak internasional. Pada tanggal 12 November 1991, iring-iringan jenazah di permakaman Santa Cruz di ibu kota Timor Timur, Dili, berubah menjadi demonstrasi pro-kemerdekaan. Di hadapan kamera televisi internasional dan para fotografer, ABRI tampak menembaki kerumunan massa. Militer kemudian mengakui ada 19 orang terbunuh, sebuah investigasi pemerintah memperkirakan ada sekitar 50, dan sumber-sumber lain mengatakan korban sejumlah 100 orang atau lebih. Satu laporan dari Portugal mengatakan: 271 orang tewas, 382 orang luka-luka, dan 250 orang hilang. Pembantaian ini menempatkan kekuasaan Indonesia atas Timor Timur dalam agenda hak asasi manusia internasional. Pemerintah Kanada, Belanda, dan Denmark membatalkan program-program bantuan. Kongres Amerika—yang di dalamnya ada beberapa anggota Kongres Katolik yang mulai mengambil peran menonjol dalam masalah Indonesia—memutuskan untuk memotong anggaran latihan militer senilai US$ 2,3 juta yang diberikan kepada ABRI. Ini merupakan hal besar bagi ABRI karena beberapa perwira seniornya telah menerima latihan di Amerika Serikat. Portugal menjadi Presiden Uni Eropa pada paro pertama 1992 dan menggunakan posisi ini untuk menghentikan negosiasi UE-Indonesia dengan alasan pelanggaran HAM Indonesia di Timor Timur. Soeharto memerintahkan penyelidikan terhadap pembantaian Dili, yang kemudian direspons antara skeptis dan terkejut. Penyelidikan ini mengkritik ABRI atas penggunaan kekerasan secara berlebihan, dua jenderal dicopot dari kedudukan mereka, dan beberapa prajurit dihukum. Ali Alatas mengunjungi berbagai negara untuk meredakan isu ini.

Secara umum, sebagian besar pemerintahan dunia tetap menganggap Timor Timur sebagai isu pinggiran—meskipun sangat tidak menyenangkan—sedangkan kalangan LSM, intelektual, dan aktivis HAM menganggapnya sebagai prioritas utama. Namun, pembantaian Dili merupakan titik balik bahkan bagi pemerintah-pemerintah dunia. Kebrutalan ABRI terpampang di layar-layar televisi di seluruh dunia. Aktivis Timor Timur di luar Indonesia, terutama Ramos-Horta, setelah peristiwa ini banyak menerima perhatian internasional. Militer menangkap pemimpin

Timor Timur Ray Kala Xanana Gusmão (lahir 1946) pada bulan November 1992 dan memutuskan dia dari hubungan dengan pihak lain, namun anehnya militer tidak membunuhnya. Xanana dituduh melakukan pemberontakan, diadili dan dihukum penjara seumur hidup, yang tak lama kemudian diubah menjadi 20 tahun. Tetapi, unggulnya keamanan lokal ini berakibat pada munculnya seorang pahlawan internasional kharismatis baru yang mewakili cita-cita Timor Timur.

Seiring dengan ABRI yang terus memberikan bukti kepada dunia mengenai betapa rezim ini begitu mengandalkan kekerasan, semakin meningkat pula tekanan terhadap pemerintahan demokrasi Barat untuk menghukum Indonesia karena alasan HAM. Namun, selama perekonomian masih stabil dan kekuasaan Soeharto tampak masih langgeng, kebanyakan pemerintah asing bersikap hati-hati untuk mengutuk pelanggaran HAM Jakarta. Kebanyakan ekonom yang tertarik dengan Indonesia terus meyakinkan dunia bahwa fundamental ekonomi Indonesia baik-baik saja. Dan represi rezim pun tampak efektif, meskipun sebenarnya bersifat gegabah dan berpikiran pendek.

Pemerintah Portugal dan Belanda mengambil sikap yang agak berbeda dari negara-negara lain. Komunitas Timor yang tinggal di Portugal, jaringan aktivis HAM, dan rasa tanggung jawab nasional yang berada dalam konstitusinya, semuanya mendorong Portugal untuk tetap menjadi yang terdepan dalam dunia internasional mengenai isu Timor Timur. PBB masih secara formal menganggap Portugal sebagai penguasa sah atas Timor Timur. Di Belanda, tekanan domestik serupa dan tradisi panjang keterlibatan Belanda di Indonesia juga menimbulkan respons aktivis. Pada awal 1992, pemerintah Belanda, yang mengetuai konsorsium IGGI, menegaskan bahwa bantuan kepada Indonesia harus dibarengi dengan perbaikan Indonesia atas penegakan HAM. Respons Soeharto mencerminkan keyakinannya pada kedudukan dirinya sendiri dan kedudukan bangsanya. Soeharto tidak mau menerima petuah-petuah dari satu pemerintah asing dan mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan lagi menerima bantuan dari IGGI. Soeharto, dengan demikian, membubarkan kelompok yang telah menyalurkan bantuan ke Jakarta selama 25 tahun itu. Soeharto meraih penghormatan yang luas di Indonesia, bahkan dari banyak pengkritiknya, karena reaksi yang sangat nasionalis ini.

Soeharto meminta Bank Dunia untuk membentuk konsorsium bantuan baru tanpa Belanda sebagai anggota. Dia tahu pasti bahwa dia tidak akan merugi apa pun karena pada tahun 1991, sumbangan Belanda hanya berada di bawah 2% dari total bantuan IGGI. Hasilnya adalah terbentuknya Consultative Group on Indonesia (CGI) yang beranggotakan semua mantan anggota IGGI, kecuali Belanda. CGI mengadakan rapat pada tahun 1992 dan meningkatkan total bantuannya ke Indonesia dari US$ 4,8 milyar pada tahun 1991 (termasuk sumbangan Belanda) menjadi US$ 4,9 milyar.

Pemilu Juni 1992 lagi-lagi dimenangkan Golkar, namun tetap membunyikan peringatan bahaya dalam koridor kekuasaan Jakarta. Golkar meraih 68,1% suara, atau turun 5,1% dibandingkan pemilu 1987. PPP tampaknya meraih 1% perpindahan suara ini, naik dari 16,0% tahun 1987 menjadi 17,0% tahun 1992. PDI memperoleh kenaikan suara yang paling besar, naik dari 10,9% menjadi 14,9%. Di bawah kepemimpinan Soerjadi, PDI melakukan kampanye menarik, dengan menyerukan supaya masa jabatan presiden dibatasi, mencitrakan partainya sebagai pembela rakyat miskin, menarik bakat dan kharisma besar dari putra bungsu Sukarno, Guruh Sukarnoputra, dan akhirnya menampilkan diri sebagai partai oposisi yang sesungguhnya. ABRI tampaknya menyimpulkan bahwa ia harus meningkatkan kewaspadaannya kalau tidak mau ide-ide demokratis tersebar terlalu jauh. Namun, ABRI juga mewaspadai tindakan Soeharto yang ingin menarik dukungan Islam, munculnya Habibie dan pengaruh ICMI.

ABRI dibentuk pada prinsipnya sebagai satu angkatan bersenjata dan kekuatan polisi untuk keamanan dalam negeri, dan bukan sebagai kekuatan pertahanan luar. Pada tahun 1993, angkatan darat memiliki 211.000 personel, ditambah 99.000 pegawai sipil, dan direncakan akan meningkat menjadi 243.000 personel pada tahun 1999 dan 330.000 pada tahun 2019. Polisi memiliki 180.000 personel, ditambah 24.000 orang sipil, dan direncanakan akan meningkat menjadi 192.000 pada tahun 1999. Sebaliknya, pada tahun 1993, angkatan laut hanya memiliki 42.000 personel ditambah 15.000 orang sipil, sedangkan angkatan udara memiliki 19.000 personel ditambah 10.000 pegawai sipil. Angkatan laut dan udara memiliki peralatan yang buruk, dan keduanya tidak mampu menampilkan diri sebagai

kekuatan yang tangguh. Padahal, mengingat kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, dua angkatan inilah yang merupakan lini depan pertahanan terhadap konflik internasional. Namun, konflik semacam itu tidak menjadi isu penting dalam Indonesia tahun 1990-an. Yang dipentingkan adalah keamanan dan stabilitas internal. Dalam konteks mendekatnya perubahan sosial, ABRI mengambil pendekatan represif yang memperdalam kemarahan populer. Ini memastikan bahwa, jika represi militer itu gagal, prospek konflik sosial semakin jelas.

Hubungan ABRI-Soeharto merupakan kombinasi dari saling ketergantungan dan ketidakpercayaan. Saling ketidakpercayaan menjadi lebih kuat setelah hasil sidang MPR Maret 1993 yang kembali memilih Soeharto sebagai presiden untuk keenam kalinya. Soeharto selalu bisa memilih wakil presiden yang akan mendampinginya, di mana wakil presiden terakhir yang dipilihnya adalah Sudharmono, yang tidak disukai ABRI. Sekarang, militer bertindak untuk memastikan hasil yang lebih memuaskan dengan secara cepat mengumumkan bahwa ABRI mencalonkan Jenderal Try Sutrisno (lahir 1935), yang merupakan mantan Panglima ABRI, sebagai wakil presiden. Soeharto dihadapkan pada satu *fait accompli* dan, tampaknya, dia tidak pernah memercayai penuh ABRI lagi. Ketika Soeharto membentuk kabinet baru, kabinet itu didominasi oleh musuh ABRI, yaitu Habibie dan para pendukung visi industri negara dan teknologi tinggi bagi masa depan Indonesia. Murdani diberhentikan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan Soeharto mempromosikan saudara iparnya, Wismoyo, menjadi Kepala Staf ABRI dan menunjuk Letnan Jenderal Feisal Tanjung (lahir 1939) sebagai Panglima ABRI. Feisal Tanjung merupakan orang yang setia kepada Soeharto dan muslim yang taat. Banyak perwira senior ABRI tampaknya merasa bahwa kinilah saatnya untuk mencari pengganti Soeharto, yang sudah berusia 72 tahun pada tahun 1993, demi memastikan masa depan bangsa dan posisi ABRI di dalamnya. Beberapa kalangan berpikiran bahwa ABRI memosisikan Try Sutrisno—seorang perwira yang ramah namun dianggap tidak terlalu cerdas—sebagai pengganti Soeharto. Namun, bukan ini yang terjadi.

Soeharto berusaha mengendalikan Golkar lebih kuat lagi dan berusaha melemahkan potensi dari lawan-lawan nonmiliter. Soeharto menunjuk orang sipil yang setia kepadanya, Harmoko (lahir 1939), sebagai Ketua Umum Golkar pada tahun 1993

dengan putri Soeharto, Tutut, sebagai wakil ketua dan putra Soeharto, Bambang, sebagai bendahara. Hal ini kembali merupakan kejutan bagi ABRI. Soeharto juga melakukan intervensi dalam pemilihan Ketua PDI, dengan pertama menghalangi Soerjadi dan kemudian menghalangi putri Sukarno, Megawati Sukarnoputri, yang kelak menjadi Presiden RI kelima. Megawati sebelumnya tidak pernah bermain politik dan tampaknya tidak memiliki ambisi, kharisma, kepintaran, atau kelicikan yang menjadi syarat untuk berhasil. Namun, Mega segera menjadi simbol dari penindasan kuat Soeharto terhadap lawan-lawannya. Pada bulan Desember 1993, Megawati akhirnya terpilih menjadi Ketua PDI oleh para utusan yang mengeluh terang-terangan tentang tekanan rezim terhadap mereka. Pemerintah memutuskan bahwa lebih baik menerima hasil ini.

Sudah mulai ada tanda-tanda munculnya konflik sosial pada saat ini, termasuk konflik agama. Pertikaian besar pecah antara kaum muslim dan nonmuslim di Jakarta pada tahun 1992 dan beberapa gereja diserang. ABRI terlibat dalam beberapa insiden, terutama dua insiden pada tahun 1993 di mana para pemimpin Islam dan pengikut mereka ditembaki. Kerusuhan buruh juga muncul dan menarik perhatian serikat buruh internasional terhadap masalah-masalah Indonesia. Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan upah minimum, namun para pekerja tetap menuntut kondisi dan bayaran yang lebih baik. ABRI cenderung melihat bahwa komunis ada di belakang kegiatan-terorganisir buruh ini.

Di Surabaya, pada bulan Mei 1993, seorang aktivis buruh wanita bernama Marsinah diculik, diperkosa secara brutal dan disiksa, untuk kemudian dibunuh. Amarah internasional memaksakan Indonesia menyelidiki kasus ini, tetapi kapten ABRI yang dihukum kemudian dibebaskan pada tingkat banding. Ada kecurigaan bahwa perwira-perwira berpangkat tinggi terlibat dalam kasus ini. Setelah satu periode kerusuhan buruh, di Medan pada bulan April 1994, suatu demonstrasi yang digerakkan oleh serikat buruh tak resmi SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) berubah menjadi kerusuhan anti-Cina yang menewaskan seorang usahawan Cina. Panglima ABRI Feisal Tanjung menganggap ini sebagai subversi PKI. Pemimpin SBSI, Dr. Muchtar Pakpahan (lahir 1953), dipenjara dan serikatnya dilarang, namun ia kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung pada tahun 1995.

Bill Clinton menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1993. Serikat perdagangan, aktivis HAM, dan anggota Kongres Amerika merasa Clinton yang berasal dari partai Demokratik ini lebih responsif terhadap kepedulian mereka tentang Indonesia dibandingkan presiden sebelumnya, George Bush, yang berasal dari partai Republikan. Dan Amerika Serikat bukanlah Belanda: Soeharto tidak bisa mengabaikan opini Amerika. Di bawah sorotan internasional yang besar, pada bulan September 1993, Jakarta menaikkan upah harian minimum hingga mencapai senilai US$ 2, hanya sayangnya tidak ada kehendak atau kemampuan institusional untuk menegakkannya. Pada bulan yang sama, tiga anggota staf Kongres AS mengunjungi Timor Timur. Banyak rakyat Timor Timur yang bertemu dengan para tamu itu kemudian diculik dan dipukuli oleh ABRI. Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika yang sangat berpengaruh mengesahkan amandemen penjualan senjata pada bulan September 1993, yang menuntut pemerintah AS untuk menilai kinerja HAM Jakarta sebelum melakukan penjualan senjata. Sebelum itu, juga di tahun yang sama, AS telah memveto rencana Jordania untuk menjual beberapa pesawat tempur Amerika F5 kepada Indonesia.

Penduduk Indonesia gelisah, konflik sosial menyebar, perasaan anti-Soeharto mulai menguat dalam diri militer, apalagi dalam kelas menengah dan partai politik, sorotan kritis luar negeri semakin keras, dan kini perekonomian pun mulai menunjukkan bahaya. Meskipun pertumbuhan ekonomi tahunan tetap berada di atas 5% ketika melewati pertengahan 1990-an, tingkat suku bunga juga masih tinggi. Banyak perusahaan swasta meminta pinjaman luar negeri, dan meminta utang dalam bentuk dolar Amerika atau yen, sementara mata uang rupiah untuk membayar utang itu menurun nilainya. Utang luar negeri pemerintah Indonesia juga besar. Pada tahun 1992, diperkirakan total utang luar negeri (publik dan swasta) berada di atas US$ 84 milyar. Ini merupakan 67,4% dari PDB, dan 32,1% rasio pembayaran utang (utang sebagai persentase ekspor). Tetapi angka ini termasuk utang swasta, yang sebenarnya lebih besar lagi. Beberapa kalangan memperkirakan total utang yang sesungguhnya bisa melebihi US$ 100 milyar. Ketika para investor asing mulai melihat ada kesempatan untuk berinvestasi di tempat lain selain Indonesia, dan ketika beberapa perusahaan mulai kesal dengan korupsi dalam dunia bisnis Indonesia, investasi asing

merosot selama empat tahun berturut-turut, dari US$ 33 milyar pada tahun 1990 menjadi sekitar US$ 6–7 milyar di tahun 1993.

Pada tahun 1993–4, pemerintah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi asing, yang kemudian pulih pada tahun 1994. Sejak itu, mulailah masa pertumbuhan pesat: 8,1% pada tahun 1995, kemudian 7,5% pada tahun 1996, dan hampir 8% pada tahun 1997. Tetapi, inflasi tidak berada jauh di bawah angka pertumbuhan dan investasi asing kembali turun. Para usahawan serakah Jakarta membuat perjanjian utang luar negeri yang besar, yang tak lama kemudian membuat negara ini terpuruk. Anak-anak Soeharto menjadi kaya luar biasa dari usaha mereka. Banyak dari usaha mereka itu bertumpu pada uang yang dengan sigap bersedia dipinjamkan oleh kepentingan-kepentingan luar negeri, karena perusahaan keluarga Soeharto dijamin pasti mendatangkan untung. Kabar burung mengatakan bahwa keluarga Soeharto jarang berinvestasi memakai uang mereka sendiri.

Rezim menjadi lebih represif dengan harapan mampu membungkam ancaman-ancaman politik dan mengeruk kekayaan secepat mungkin. BUMN merupakan bagian besar perekonomian karena mewakili kira-kira 30% dari PDB pada awal 1990-an. BUMN merupakan ciri utama, sebagian karena banyak orang Indonesia yang masih tidak memercayai kapitalisme swasta—yang sedemikian lama didominasi oleh kepentingan dagang Cina dan Barat—dan sebagian lagi karena dalam Indonesia masa Soeharto, BUMN merupakan sumber penting patronase elite. Sebagai perusahaan komersial, kinerja BUMN secara umum bervariasi dari buruk hingga buruk luar biasa. BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis, didirikan tahun 1989) pimpinan Habibie mengendalikan sederetan industri berteknologi tinggi yang menghabiskan milyaran dolar anggaran negara. Pada tahun 1992, Habibie memutuskan untuk membeli 39 kapal angkatan laut bekas Jerman Timur yang diperkirakan memakan biaya sebesar US$ 482 juta untuk membeli dan memperbaikinya, yang direncanakan kebanyakan akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BPIS.

Komentar kritis dan satir di media massa mengenai proyek kapal perang tua Jerman Habibie menimbulkan reaksi cepat dari pemerintah. Pada tahun 1994, pemerintah menutup majalah berita *Editor* dan *Detik* yang satir. Namun, kejutan terbesar adalah di-

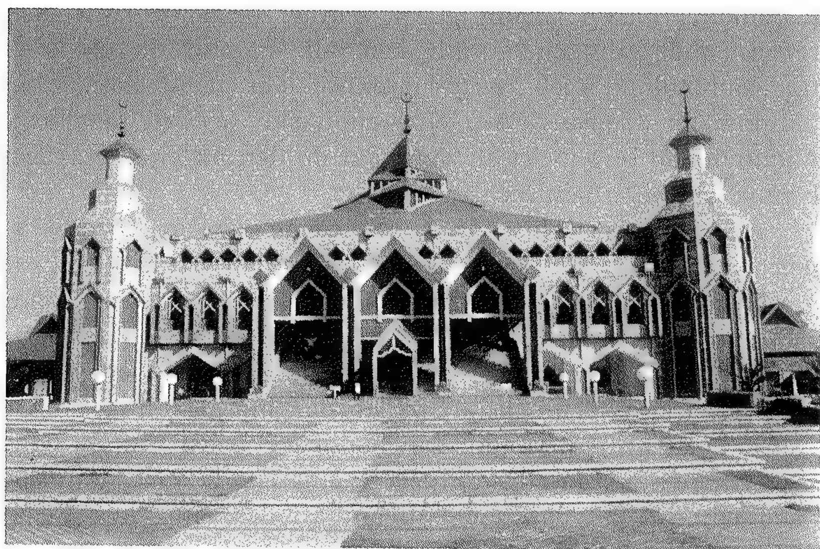
tutupnya *Tempo*, majalah berita mingguan Indonesia paling terkenal yang merupakan penggerak kehidupan intelektual bangsa, yang sudah berusia 23 tahun saat itu. Goenawan Mohamad melawan penarikan SIUPP *Tempo* melalui pengadilan, suatu langkah tak lazim, yang tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan kelemahan sistem pengadilan Indonesia. Pada tahun 1995, pengadilan negeri dan pengadilan banding membatalkan keputusan ilegal pemerintah—satu keputusan yang mengejutkan—namun tetap tidak ada perubahan. *Tempo* tetap tidak beredar di jalan-jalan. Tetapi, pemerintah kemudian menyadari bahwa revolusi komunikasi telah membatasi kekuasaannya, karena *Tempo* kembali dengan versi elektronik di internet.

Soeharto, Habibie, dan aparat keamanan menganggap Abdurrahman Wahid sebagai ancaman potensial. Gus Dur terus mengkritik ICMI. Ketika Soeharto mulai mengakomodasi tuntutan Islam terhadap isu-isu seperti pemakaian jilbab di sekolah-sekolah, pada tahun 1992, Abdurrahman memperingatkan adanya bahaya pergerakan menuju negara Islam. Pada tahun 1994, pemerintah dan/atau ICMI tampaknya membeking satu usaha untuk menggoyang kepemimpinan Abdurrahman di NU. Pada kongres NU Desember 1994, ada usaha untuk mencalonkan saingan bagi posisi Abdurrahman, di mana usaha itu dibekingi oleh mantan pendukung Idham Chalid, ICMI, dan di belakang layar oleh rezim. Abdurrahman terpilih kembali, namun diikuti oleh tindakan hukum oleh lawan-lawannya, dan pada tahun 1996 diumumkan adanya dewan NU tandingan. Kendati demikian, Abdurrahman bisa melewati rintangan ini dan melewati berbagai bentuk gangguan lainnya.

Percampuran agama dan politik mulai menguap pada pertengahan 1990-an. Jumlah mesjid di Indonesia sudah berlipat ganda pada dasawarsa sebelumnya dan devosionalisme Islam sudah menjadi elemen umum dalam gaya hidup kelas menengah urban. Di perkampungan-perkampungan juga terjadi peningkatan identitas Islam. Peningkatan religiusitas ini juga bisa dilihat dalam umat Kristen, Hindu, dan Buddha. Sebagai contoh, Parisada Dharma Hindu (Dewan bagi Agama Hindu yang didirikan pada tahun 1959 dan sudah berafiliasi dengan Golkar sejak 1968) dipimpin oleh orang Hindu Bali muda, terutama para pemimpin yang terkait dengan kraton Ubud. Parisada mensponsori peringatan-peringatan besar dan mendirikan kuil-kuil

baru tidak hanya di Bali, namun juga di Jawa Timur (1992), Sulawesi Utara (1993) dan Kalimantan Tengah (1994).

"Penghijauan" ABRI (yaitu Islamisasi lebih besar) merupakan topik umum diskusi. Pada bulan Februari 1995, Wismoyo pensiun sebagai kepala staf ABRI karena alasan yang tidak jelas—mungkin karena saudara iparnya Soeharto sudah tidak memercayainya—dan digantikan oleh seorang muslim yang saleh, Jenderal Hartono (lahir 1941). Dia dan panglima ABRI Feisal Tanjung merupakan orang-orang yang sangat setia kepada Soeharto dan keluarganya. Di bawah kepemimpinan mereka, ABRI tampaknya berusaha menggabungkan kepentingan rezim dengan meningkatnya religiusitas Islam menjadi satu gelombang konservatif yang mendukung kewaspadaan keamanan dan melawan keterbukaan politik yang lebih besar. Gagasan-gagasan prodemokrasi, sama halnya dengan Internet, LSM, dan globalisasi, terus digambarkan sebagai bagian dari ancaman Barat terhadap Islam. Kepentingan bisnis Cina yang selalu menjadi mitra rezim yang menguntungkan juga dikritik karena tidak membagi kekayaan mereka dengan orang-orang muslim yang miskin. Pada bulan Desember 1996, Program Kemitraan diumumkan, di mana individu dan perusahaan berpendapatan lebih dari US$ 45.000 per tahun



Mesjid modern di Makasar, Sulawesi Selatan, dibangun pada 1990-an dengan atap "gaya Pancasila" berujung lima

harus membayar 2% pajak kepada sebuah yayasan yang dikepalai Soeharto untuk kemudian didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan. Tetapi, pada saat itu sudah terlambat bagi rezim untuk menyelamatkan diri dengan rencana-rencana kosmetis.

Meskipun ada unsur konservatif dalam Islam yang merespons positif mobilisasi ide-ide rezim yang antidemokrasi dan antiasing, ada juga gelombang keagamaan yang mendukung ide-ide keadilan, keterbukaan, dan demokrasi. ICMI telah tumbuh menjadi kelompok paling berpengaruh dalam birokrasi dan merupakan satu unsur berpengaruh dalam kehidupan intelektual Indonesia. ICMI di bawah patronase Habibie tetap dekat hubungannya dengan rezim. Menantu Soeharto, Brigadir Jenderal Prabowo sudah luas dianggap sebagai sekutu Habibie dan ICMI. Pada bulan Desember 1995, Prabowo diangkat menjadi Komandan Kopassus. Tetapi, terlepas dari kedekatannya kepada rezim, banyak pemikiran ICMI yang mendukung reformasi, keterbukaan yang lebih besar, pemberantasan korupsi, dan evolusi demokratis. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua NU—yang pada pertengahan 1990-an mengaku memiliki 30–40 juta pengikut—terus memperjuangkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta pluralisme etnis dan agama.

Namun, di luar lingkaran intelektual, terus ada tanda-tanda terancamnya perdamaian antaragama dan antaretnis. Pada bulan September-Oktober 1995, terjadi kerusuhan di Timor Timur yang dipicu oleh laporan bahwa seorang sipir muslim di sebuah penjara di sana telah terang-terangan melecehkan Katolik. Kaum Katolik menyerang umat Islam non-Timor di Timor Timur. Hal ini memicu demonstrasi promuslim di Jakarta. Dr Amien Rais (lahir 1944), Ketua Umum Muhammadiyah (yang saat itu menyatakan memiliki 25 juta anggota), berbicara mengenai perlunya membela kaum muslim di Timor Timur. Hubungan Kristen-Islam diperburuk dengan fakta bahwa banyak orang Cina itu beragama Kristen, sehingga terjadilah perpaduan perasaan anti-Cina dengan anti-Kristen. Pada bulan Oktober 1996, lima orang tewas ketika umat Islam di Situbondo, Jawa Timur, membakar sembilan gereja Kristen. Kejadian serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada bulan Desember, yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan harta benda milik orang Cina dihancurkan. Di Ujung Pandang, Irian Jaya, dan provinsi lain, terjadi demonstrasi-demonstrasi, kerusuhan sosial, dan penculikan. Pada awal 1997,

muncul laporan-laporan dari Kalimantan Barat bahwa suku Dayak dan Melayu setempat sedang membunuhi kaum pendatang Madura. Lebih dari seribu kematian dilaporkan oleh beberapa sumber, dan suku Dayak kembali melakukan praktik memenggal kepala korban mereka.

Sepanjang 1996, perpecahan rezim mulai tampak. Segi-seginya yang terburuk membuat banyak orang Indonesia berpikir bahwa bangsa mereka tidak lagi bisa mentolerir rezim ini karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Namun, tidak ada yang bisa memperkirakan bagaimana kekuasaan 30 tahun Soeharto itu bisa secara damai diakhiri. Kekuatan-kekuatan yang menentang rezim sudah bisa dikenali. Abdurrahman Wahid merupakan figur oposisi Islam yang memiliki pengaruh besar. PDI di bawah Megawati juga berkembang sebagai partai politik yang memiliki dukungan luas msayarakat, termasuk kelompok intelektual, kelas menengah perkotaan dan pedesaan, dan kaum miskin-kota Jakarta. Pemimpin buruh Muchtar Pakpahan juga potensial sebagai figur nasional utama. Goenawan Mohamad memimpin Komite Independen Pemantau Pemilu (didirikan tahun 1995) untuk membongkar manipulasi-manipulasi dalam proses pemilu yang diadakan rezim. Empat tokoh ini menyimbolkan penindasan sewenang-wenang dan perlakuan kasar rezim terhadap lawan-lawannya.

Bahkan dalam struktur kekuasaan pun ada nuansa ketidakpuasan. Nepotisme Soeharto dan favoritismenya dalam penunjukan perwira militer telah menimbulkan perpecahan dalam diri militer dan memicu kemarahan banyak perwira ABRI, yang mulai merasa sudah tiba saatnya bagi Soeharto untuk tidak berkuasa lagi. Kritik publik terhadap ABRI semakin gencar, termasuk dari perwira purnawirawan. Militer menganggap kritik semacam itu sebagai tanda adanya kekuatan subversif yang sedang berjalan, sehingga ABRI meningkatkan pengintaiannya terhadap para aktivis, LSM maupun mahasiswa. ICMI tetap dekat dengan Habibie; para pengritik rezim yang berada dalam organisasi itu berharap Habibie akan memimpin reformasi dan modernisasi. Tapi, dalam tubuh ABRI ada ketidaksukaan terhadap pengaruh ICMI dan kebencian terhadap Habibie, imperium industrinya, dan ambisinya.

Sementara itu, enam anak Soeharto memerah dengan rakus segala kesempatan yang ada buat mereka. Mungkin ibu merekalah, Ibu Tien, yang juga telah banyak dituduh melakukan korupsi,

yang bertindak sebagai filter antara Suharto dengan anak-anaknya, sehingga mampu membatasi dampak keserakahan anak-anak tersebut. Jika memang demikian halnya, kematian Ibu Tien pada bulan April 1996 menyingkirkan unsur pengekang itu. Selama bertahun-tahun beredar rumor bahwa Ibu Tien secara tidak sengaja tertembak ketika dua putranya terlibat baku tembak satu sama lain karena memperebutkan uang. Cerita ini, entah benar atau tidak, mencerminkan kebusukan dalam jantung rezim, karena rakyat Indonesia bisa membayangkan bahwa cerita itu memang terjadi.

Salah satu skandal bisnis keluarga yang paling mencolok mencuat pada awal 1996. Dikabarkan Indonesia akan merakit mobil nasionalnya sendiri di dalam negeri, yang mensyaratkan adanya pembebasan pajak. Dengan Keputusan Presiden, kontrak perakitan itu jatuh ke tangan Tommy Soeharto dan ke tangan perusahaan manufaktur mobil dari Korea, Kia, yang dibebaskan dari pajak dan bea masuk. Namun, segera ketahuan bahwa usaha bersama ini sama sekali tidak akan membuat mobil nasional di Indonesia. Malah, mobil itu jadinya buatan Kia sepenuhnya yang diberi label mobil nasional, sehingga mampu terhindar dari segala pajak dan bea masuk dan mendatangkan keuntungan besar bagi kedua belah pihak. Tommy mengatakan bahwa dia akan mengirimkan orang Indonesia untuk bekerja di pabrik Kia di Korea, sehingga akan tepatlah mengatakan mobil itu sebagai mobil nasional. Yang semakin absurd adalah mobil baru itu dinamakan Timor. Soeharto menyetujui pengimporan 45.000 mobil Timor pada tahun pertama. Jepang dan Amerika Serikat protes keras terhadap Indonesia dalam World Trade Organization (WTO), karena ini melanggar peraturan perdagangan internasional. Pada suatu pertemuan kelompok Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC/Asia-Pacific Economic Cooperation) di Bogor pada tahun 1994, Soeharto menggambarkan dirinya sebagai penjunjung tinggi perdagangan bebas, namun nampak jelas bahwa keluarga lebih berarti bagi dirinya.

Untuk mencegah PDI Megawati menjadi tantangan serius, rezim melakukan intervensi dengan kekerasan, dan akhirnya malah meningkatkan popularitas partai tersebut. Pada bulan Juni 1996, ABRI berhasil memanipulasi kongres luar biasa PDI, sehingga mampu menurunkan Megawati dari posisi ketua dan memilih kembali Soerjadi, yang baru sebelumnya tidak dipercaya

Soeharto tapi sekarang tidak begitu mengancam dibanding Megawati. Tetapi, Megawati dan para pendukungnya menolak mengakui hasil kongres ini dan melancarkan tuntutan hukum terhadap campur tangan pemerintah. Megawati juga tetap berkedudukan di kantor pusat PDI di Jakarta. Di kantor pusat ini, penolakan terhadap rezim menarik banyak perhatian, dan ada banyak pidato-pidato umum di sana. Para aktivis prodemokrasi, LSM, dan kaum miskin urban yang marah berdemonstrasi mendukung perjuangan Megawati.

Pada tanggal 27 Juli 1996, kantor pusat PDI Megawati di Jakarta diserang oleh segerombolan orang yang mengaku dari fraksi Soerjadi, sedangkan di antara gerombolan itu terdapat prajurit berpakaian preman dan anggota-anggota kelompok urban yang dekat dengan ABRI. Tidak ada kesangsian lagi bahwa serangan ini dirancang oleh rezim. Para penyerang itu berhasil mengatasi para penjaga gedung dengan menimbulkan banyak kerusakan, korban tewas, dan korban luka-luka. Peristiwa ini kemudian disusul oleh kerusuhan selama dua hari di Jakarta. Penyelidikan oleh Komisi Nasional HAM (dibentuk tahun 1993) melaporkan lima orang meninggal dan 149 orang luka-luka, dan 74 orang masih hilang. Orang-orang hilang ini terutama berasal dari dua ratusan orang atau lebih yang ditahan ABRI pada hari pertama kerusuhan. ABRI jelas mengadopsi gaya militer Amerika Selatan yang 'menghilangkan' musuh-musuh. Pemerintah melempar kesalahan kepada sebuah organisasi mahasiswa kecil yang aktif di tengah kalangan buruh dan telah memaklumatkan diri sebagai partai politik bernama Partai Rakyat Demokratik (PRD). Para pemimpin PRD dan Muchtar Pakpahan ditangkap. ABRI menuduh PRD sebagai suatu usaha untuk membangkitkan kembali komunisme ateistis, dan beberapa organisasi Islam meresponsnya dengan memberi dukungan kepada tindakan ABRI. Dari organisasi-organisasi itu terutama kelompok pemuda Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia yang memang merupakan instansi pemerintah, dan Himpunan Mahasiswa Islam. Ketua PPP juga mendukung tindakan ABRI menghancurkan PRD yang dikatakan sebagai komunis.

Iklim internasional Indonesia menjadi semakin antirezim, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Soeharto memang disambut baik oleh Clinton dalam suatu kunjungan kenegaraannya ke Washington tahun 1995, namun hal ini tidak meredam

kemarahan Amerika terhadap kasus mobil nasional Tommy Soeharto setahun kemudian. Yang semakin memperburuk kedudukan internasional Indonesia adalah ketika hadiah Nobel Perdamaian 1996 diberikan secara bersama kepada dua pemimpin perjuangan Timor Timur, Uskup Belo dan Jose Ramos-Horta. Meskipun banyak orang Indonesia yang memikirkan persoalan Timor Timur itu menghormati Belo, hampir semua orang Indonesia menganggap Ramos-Horta sebagai penghasut busuk. Fakta bahwa kedudukan Ramos-Horta di mata dunia berbeda jauh dari anggapan itu jelas mengejutkan para pemimpin Indonesia. Ini sama menyakitkannya ketika salah seorang tokoh internasional yang paling disegani, Presiden Nelson Mandela dari Afrika Selatan, mengunjungi Jakarta pada bulan Juli 1997, dia meluangkan waktu dua jam untuk berbincang-bincang dengan Xanana Gusmão yang masih menjadi tahanan.

Secara ekonomi, Indonesia kini memiliki jumlah utang jangka pendek yang besar, karena banyak utang masuk ke dalam Indonesia yang biasanya dalam bentuk dolar Amerika, sehingga membengkak karena mengikuti pergerakan mata uang rupiah yang tidak bagus. Utang jangka pendek ini berkisar US$ 30–40 milyar pada tahun 1997. Sistem perbankan yang menangani semua uang ini sama sekali tidak tertata dengan baik. Jepang, mesin ekonomi kawasan Asia, masih mengalami resesi yang berkepanjangan sepanjang tahun 1990-an. Jadi, Indonesia tidak dalam kondisi bagus untuk menghadapi kejutan ekonomi. Keadaan cuaca pun tampaknya tidak bersahabat bagi Indonesia karena badai kekeringan El Niño yang parah telah mengurangi produksi beras hingga 10% pada tahun 1997–8, dan memperparah kebakaran hutan, terutama di Sumatra dan Kalimantan. Namun Bank Dunia, tampaknya terkesan oleh kemilau Jakarta, pada bulan Mei 1997 masih mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik.

Kampanye Pemilu Mei 1997 merupakan fokus ketidakpuasan sosial politik. Kampanye ini merupakan kampanye terbrutal dalam sejarah pemerintahan Soeharto. Iring-iringan pawai politik menggunakan motor menyebabkan banyak kematian, diperkirakan mencapai 250 orang. Di Banjarmasin, segerombolan penjarah terperangkap di dalam pusat perbelanjaan yang terbakar dan sekitar 130 orang tewas. Di Timor Timur, kaum gerilyawan

melakukan serangan sabotase terhadap kotak-kotak pemungutan suara dan membunuh 18 personel ABRI.

Soeharto bertekad mengubah penurunan jumlah suara Golkar pada pemilu 1992, dan dia berhasil. Dia dibantu oleh keputusan Abdurrahman Wahid yang mencampakkan aliansi informal dengan Megawati Sukarnoputri. Abdurrahman melakukan kampanye keiling mendampingi Tutut dan, dengan demikian, memindahkan suara NU ke Golkar. PDI kalah telak dalam pemilu, yaitu turun 11,9% dari 14,9% di tahun 1992 menjadi 3% di tahun 1997. Suara yang pindah dari PDI tersebar merata antara PPP, yang mendapat 5,5% menjadi 22,5%, dan Golkar yang mendapat 6,4% menjadi 74,5%. Ini merupakan persentase jumlah suara tertinggi yang pernah dicapai Golkar, dan ironisnya ini terjadi di masa-masa terjadinya keruntuhan rezim. Di Madura, pendukung PPP yang tidak puas membakar gedung-gedung pemerintahan dan Golkar serta menghancurkan banyak kotak pemungutan suara, sehingga pemungutan suara pun harus diulang di sana.

Kemudian, krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Rupiah selama ini berada dalam kisaran Rp 2.500/US$, namun nilai ini segera merosot pada bulan Juli 1997. Pada bulan Agustus, nilai mata uang rupiah sudah menurun 9%. Bank Indonesia mengakui bahwa ia tidak bisa membendung rupiah terus merosot. Pada akhir Oktober, nilai tukar rupiah menjadi Rp 4.000/US$. Dari sini, rupiah semakin terpuruk. Pada bulan Januari 1998, rupiah tenggelam hingga level sekitar Rp 17.000/US$, atau kehilangan 85% nilainya. Bursa saham Jakarta hancur. Hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut, tabungan kelas menengah lenyap, dan jutaan pekerja diberhentikan dari pekerjaan mereka.

Respons pertama pemerintah terhadap krisis mencerminkan kesombongan dan kurangnya kesadaran terhadap realitas. Reformasi diumumkan, namun proyek para kroni dan keluarga—seperti mobil nasional Tommy—terus dilindungi. Perjanjian dengan IMF pada bulan Oktober 1997 mengakibatkan ditutupnya 16 bank, tetapi dua bank yang dimiliki keluarga Soeharto dibuka kembali. Lalu, dimulailah tarik urat (*stand-off*) antara IMF dan Soeharto yang menjadi konsumsi publik dan semakin meneguhkan anggapan para pengamat dalam dan luar negeri bahwa rezim ini sudah begitu dalam terbelit nepotisme, korupsi, dan

inkompetensi. Ada seruan-seruan menuntut reformasi dari banyak pihak, tapi tetap tidak mendatangkan hasil. Pilar utama rezim, Soeharto itu sendiri, tampak tidak sekuat dulu. Pada tahun 1996, dia memang pergi ke Jerman untuk memeriksa kondisi ginjal dan jantungnya, dan dinyatakan sehat. Tetapi, pada bulan Desember 1997, waktu itu usianya sudah 76 tahun, Soeharto tampaknya mengalami stroke ringan.

Pada bulan Januari 1998, Soeharto mengumumkan rancangan anggaran negara yang absurd karena memasukkan asumsi nilai tukar rupiah yang berlaku enam bulan sebelumnya. Dia mendapatkan telepon dari Bill Clinton di Washington, Helmut Kohl di Bonn, dan Hashimoto Ryutaro di Tokyo, serta mendapatkan kunjungan Goh Chok Tong dari Singapura, yang semuanya mendesak Soeharto untuk menerima proposal reformasi IMF. Pada tanggal 15 Januari, Soeharto tampaknya akan menuruti nasihat itu, namun konflik kemudian terjadi, yang membuat IMF mengancam untuk menunda bantuan kalau Soeharto tidak mengambil langkah reformasi yang realistis. Kemudian, pada akhir Januari, Soeharto mengatakan bahwa dia akan mencalonkan diri untuk masa kepresidenannya yang ketujuh dan mengisyaratkan bahwa dia menginginkan Habibie sebagai wakil presiden. Rupiah kemudian mencapai kurs yang paling jelek.

Soeharto mengangkat orang-orang kepercayaannya ke dalam posisi penting. Mantan ajudannya dan kepala staf Jenderal Wiranto (lahir 1947) ditunjuk sebagai Panglima ABRI pada bulan Februari 1998. Menantu Soeharto, Letnan Jenderal Prabowo, diserahi jabatan pimpinan Kostrad pada bulan Maret. Dalam menyongsong sidang MPR bulan Maret, sekitar 20 aktivis mahasiswa diculik oleh aparat keamanan dan sembilan di antaranya kemungkinan dibunuh. Prabowolah yang umum diyakini sebagai dalang dari kematian para mahasiswa ini. MPR bersidang pada bulan Maret, dan dengan patuh memilih kembali Soeharto sebagai presiden dan Habibie sebagai wakil presiden sesuai dengan keinginan Soeharto. Terpilihnya Habibie menghancurkan harapan terakhir komunitas internasional terhadap rezim tersebut. Reputasi Habibie terletak pada sejarah BUMN yang merugi besar-besaran, kedekatan kepada Soeharto dan kroni-kroninya, memolitikkan Islam dan gaya pribadi ala "ilmuwan gila" yang beberapa kalangan menganggap lebih kental nuansa kegilaannya

dibanding nuansa keilmuannya. Hanya sedikit yang bisa membayangkan reformasi macam apa yang akan Habibie lakukan ketika, hanya dalam hitungan minggu, dia menjadi Presiden Indonesia ketiga. Kabinet baru Soeharto merupakan kumpulan kroni-kroni yang dipilih Tutut. Ia sendiri menjadi Menteri Sosial. Bob Hasan ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan, yang nantinya terbukti tidak memiliki kemampuan untuk menduduki posisi itu. Hanya sedikit tokoh ICMI yang masuk dalam kabinet. ICMI kini berpindah ke kubu reformasi.

Tuntutan akan reformasi terus meningkat seiring semakin memburuknya krisis ekonomi dan semakin jelas bahwa rezim tidak mampu mereformasikan diri. Amien Rais dari Muhammadiyah merupakan salah satu pengecam paling menonjol pada tahap ini. Demonstrasi mahasiswa semakin marak. ABRI membiarkannya selama demonstrasi itu dilakukan dalam kampus. Tapi, pada awal Mei, mahasiswa sudah turun ke jalan-jalan di kota besar. Kerusuhan besar terjadi di Medan. Pada tanggal 12 Mei, penembak jitu ABRI menembak mati empat mahasiswa demonstran di Universitas Trisakti Jakarta.

Pembunuhan mahasiswa Trisakti merupakan titik balik. Kematian mereka, bersama dengan keruntuhan ekonomi, kebrutalan ABRI, korupsi rezim, dan kemustahilan akan adanya reformasi, telah memorak-porandakan benteng terakhir keabsahan rezim dan ketertiban sosial. Kerusuhan massal terjadi di berbagai tempat, dengan Jakarta dan Surakarta sebagai yang terparah. Perusahaan para cukong dan keluarga Soeharto merupakan sasaran utama pembakaran dan penjarahan. Bank Central Asia milik Liem Sioe Liong merupakan obyek serangan utama. Rumah Liem di Jakarta dijarah dan dibakar. Lebih dari seribu orang tewas di Jakarta karena kerusuhan 13–15 Mei. Ratusan orang terpanggang tewas ketika mereka berusaha menjarah pusat-pusat perbelanjaan. Dilaporkan terjadi rangkaian peristiwa pemerkosaan massal yang mengerikan. Para pemilik toko berusaha mempertahankan harta benda mereka dengan memiloks slogan-slogan yang mengatakan bahwa toko-toko itu milik pribumi atau muslim, atau cukup menuliskan kata *Allahu Akbar* dalam kerai-kerai penutup toko. Ini merupakan kerusuhan perkotaan terburuk dalam sejarah Indonesia, dengan 40 pusat perbelanjaan, ribuan toko, rumah, dan tempat usaha serta kendaraan dihancurkan. Perusahaan asing dan kedutaan-kedutaan besar mengevakuasi



Kerusuhan 1998: pertokoan yang rusak di daerah Mangga Dua, Jakarta

para staf mereka beserta keluarga sebisa mungkin di tengah-tengah kondisi Jakarta yang terbakar api, kondisi jalanan yang tidak aman, dan jadwal penerbangan yang penuh sesak. Keluarga Cina kaya pun juga melarikan diri sambil membawa kekayaan mereka.

Soeharto pergi ke Kairo untuk menghadiri konferensi puncak pada tanggal 7 Mei 1998, namun segera kembali tanggal 15 Mei. Seiring dengan Jakarta yang semakin kacau, bahkan para anggota MPR dari ABRI siap mendukung diadakannya sidang istimewa untuk memilih presiden baru. Tak lama, Golkar mengungkapkan pandangan yang sama. Mahasiswa menduduki gedung MPR dan tidak ada satu pun yang berusaha mengusir mereka. Amien Rais memainkan peranan menonjol dalam menuntut berakhirnya kekuasaan Soeharto. Pada tanggal 18 Mei, Harmoko, ketua MPR, terang-terangan meminta Soeharto mengundurkan diri demi kepentingan nasional. Pada tanggal 19 Mei, Soeharto bertemu dengan sembilan pemimpin Islam terkemuka, termasuk Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid, namun tidak mengikutsertakan Amien Rais. Soeharto meminta pendapat mereka apakah dia memang seharusnya turun jabatan.

Soeharto kemudian mengumumkan bahwa dia akan mengawasi masa reformasi dan mengundurkan diri setelah pemilu baru diadakan. Namun, segala tawaran yang masih menjadikan dia presiden tidak diterima, baik di dalam maupun di luar negeri. Usahanya untuk membentuk kabinet reformasi gagal pada tanggal 20 Mei, ketika 14 menteri yang mengemban tanggung jawab dalam bidang ekonomi dan keuangan menolak untuk masuk dalam kabinet tersebut. Maka, pada pagi hari tanggal 21 Mei 1998, awak televisi dipanggil ke istana negara untuk mengabadikan momen pengunduran diri Soeharto. Wakil Presidennya, Habibie, segera disumpah sebagai Presiden Indonesia ketiga (1998–9). Wiranto kemudian mengumumkan bahwa ABRI tetap satu dan akan mendukung presiden baru, dan ABRI juga akan tetap melindungi keluarga Soeharto serta—secara implisit—melindungi kekayaannya. Masa-masa kekuasaan Soeharto berakhir dengan bencana dan aib.

Transisi ini belum usai. Ada gerakan-gerakan militer yang belum dijelaskan secara tuntas yang mengindikasikan Prabowo hampir melakukan upaya kudeta dengan pasukan Kostradnya. Tapi ini tidak terjadi. Wiranto berhasil mencegahnya dan mencopot Prabowo dari komando Kostrad. Prabowo kemudian menjalani hidup pengasingan takresmi di Jordania untuk beberapa lama.

Langkah pertama dan esensial dalam reformasi dan pemulihan telah diambil. Soeharto telah pergi. ABRI meminta para mahasiswa yang menduduki MPR untuk pulang dan, pada tanggal 23 Mei, para mahasiswa pun menuruti permintaan itu. Mereka umumnya dianggap sebagai pahlawan-pahlawan nasional. Telah terjadi pertumpahan darah yang mengerikan, kekerasan etnis dan agama, serta kekacauan politik. Perekonomian masih merupakan malapetaka. Tidak satu pun dari isu ini yang berhasil ditangani dengan cepat atau dengan mudah. Orang Indonesia pada bulan Mei 1998 juga tidak terlalu berharap Habibie akan menjungkirkan struktur politik dari Orde Baru Soeharto. Namun, dia mulai melakukan itu. Indonesia memerlukan langkah-langkah reformasi drastis, dan terjadi kejutan ketika Habibie tampil sebagai pemrakarsa.[]

Bab 24 . . . .

Indonesia Setelah Soeharto

PADA SAAT menulis bab ini, ketika Indonesia masih bergolak secara sosial-politik-ekonomi, masih terlalu dini untuk secara pasti menunjukkan perkembangan-perkembangan yang paling signifikan. Selama 17 bulan masa pemerintahannya sebagai Presiden Indonesia ketiga, Habibie memperkenalkan reformasi yang menjanjikan suatu masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan terbuka. Namun, krisis ekonomi yang tak kunjung berakhir, kekerasan sosial, krisis politik yang berkepanjangan, dan keraguan yang luas tentang kejujuran dan keabsahan pemerintah telah memudarkan harapan akan reformasi. Pada bulan November 1999, Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid yang terpilih menjadi presiden keempat. Gus Dur, seperti biasa, menampilkan intelegensia, kekocakan, keterbukaan, dan komitmen terhadap pluralisme serta kebencian terhadap dogmatisme. Namun, sikap-sikap positif ini juga diiringi dengan kecenderungan untuk bertindak seenaknya, kegigihan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara apa pun, keterbatasan karena buta, masalah kesehatan secara umum, kurangnya pengalaman dalam masalah pemerintahan, dan kesulitan menemukan orang-orang yang jujur dan kompeten untuk berada dalam pemerintahannya. Pada bulan Juli 2001, Gus Dur dipecat sebagai presiden oleh MPR dan Megawati Sukarnoputri menjadi Presiden Indonesia yang kelima. Sementara itu, masalah bangsa terus menghadang.

Ketika Habibie menggantikan mentornya Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya. Isu-isu itu adalah (1) masa depan reformasi, (2) masa depan ABRI, (3) masa depan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, (4) masa depan Soeharto,



Presiden B.J. Habibie, 1999. Direproduksi atas izin Rex Features Ltd

keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya, dan (5) masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Tujuh belas bulan kemudian, isu pertama menunjukkan perkembangan positif, isu kedua mengarah kepada pengurangan peranan militer dalam bidang politik, isu ketiga telah terselesaikan dalam konteks Timor Timur dan tidak dalam konteks daerah lain, isu keempat belum terselesaikan, dan isu kelima tetap tak terpecahkan. Habibie memulai masa jabatannya dengan suatu reputasi yang membuatnya tidak dipercayai oleh aktivis mahasiswa, militer, sayap politik utama, pemerintahan asing, investor luar negeri dan perusahaan internasional. Namun, mengingat krisis parah Indonesia dan posisi pribadinya, capaian Habibie tergolong luar biasa.

Pada pertengahan 1998, perekonomian masih terpuruk. Inflasi ditargetkan mencapai angka 80% untuk tahun berjalan, meskipun pada akhirnya tidak sampai pada angka itu. Karena badai El NiH´o, terjadi kekurangan panen beras dan terungkap bahwa laporan-laporan mengenai surplus produksi beras pada periode 1996–7 ternyata palsu. Beberapa perusahaan nasional utama—seperti Sempati Air yang dijalankan Tommy Soeharto dan Bob Hasan, serta penjual otomotif terbesar, PT Astra International—tidak lagi beroperasi. Nilai tukar rupiah berada di bawah Rp 10.000 per dolar, bahkan hingga mencapai level Rp 15–17.000.

Diperkirakan 113 juta orang Indonesia (56% dari jumlah penduduk) berada di bawah garis kemiskinan. Ada yang mengatakan bahwa 40 juta orang Indonesia tidak mampu membeli makanan dan dalam kondisi rawan pangan. Pada akhir Juni 1998, anggaran negara harus direvisi untuk ketiga kalinya karena asumsi-asumsinya tidak lagi relevan. IMF meramalkan bahwa perekonomian akan menurun sebanyak 10%. Di tengah-tengah krisis ekonomi, berkembang banyak teori persekongkolan. Salah satunya yang paling gila mengatakan bahwa IMF sebenarnya merupakan konspirasi Yahudi berskala global.

Proses untuk mengadili Soeharto berjalan sangat lambat, dan hal ini memarahkan pendukung reformasi. Soeharto mengatakan bahwa dia hanya memiliki sedikit simpanan dan tidak memiliki tabungan di luar negeri—sebuah klaim yang sulit diterima mengingat gaya hidup mewah keluarganya. Pada bulan Juni 1995, empat dari sejumlah yayasan yang ia kendalikan dilaporkan memegang uang Rp 2,5 trilyun, yang bahkan pada nilai tukar rupiah terendah pun masih bernilai milyaran dolar Amerika. Pada bulan Desember 1998, tujuh yayasan yang dikendalikan Soeharto dikatakan memegang dana sebesar bilyun (*quintillion*) rupiah. Sebuah artikel di majalah *Time* pada bulan Mei 1999 menyatakan bahwa keluarga Soeharto memegang kekayaan sejumlah US$ 15 milyar, termasuk tanah-tanah yang luas di Indonesia. Tidak semua orang menyetujui laporan ini dan Soeharto menyangkalnya. Pada bulan Januari 2000, surat kabar *The Australian* memperkirakan kekayaan keluarga Soeharto mencapai US$ 2 milyar, sedangkan kekayaan Liem Sioe Liong diperkirakan US$ 1,8 milyar dan Bob Hasan US$ 1 milyar.

Habibie menunjuk Jaksa Agung baru, Mayor Jenderal H. Andi Muhammad Ghalib dari angkatan darat, pada bulan Juni 1998. Para praktisi hukum dan aktivis politik tidak menyukai ditempatkannya militer di jantung sistem hukum. Keraguan mereka mengenai apakah Ghalib akan memburu Soeharto dan kroni-kroninya semakin besar ketika setahun kemudian LSM Indonesian Corruption Watch menerbitkan dokumen yang menunjukkan bahwa cukong kakap Prajogo Pangestu dan The Nin King (lahir 1931) telah mentransfer sejumlah besar uang kepada rekening Andi Ghalib dan istrinya. Kedua cukong itu mengaku telah melakukan hal tersebut, namun mereka menyatakan bahwa

transfer itu merupakan sumbangan bagi Persatuan Gulat Seluruh Indonesia yang diketuai Ghalib—sebuah organisasi yang sebetulnya sebelum itu tidak pernah diberikan bantuan sebesar itu.

Keengganan pemerintah untuk mengadili Soeharto, kelambatan investigasi kasus menghilangnya aktivis-aktivis politik, kasus Trisakti, kerusuhan Mei 1998, dan kegagalan Habibie mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat—harapan yang sebetulnya tidak realistis—menimbulkan tuntutan diadakannya Sidang Istimewa MPR untuk memberhentikan Habibie dan untuk memilih kepemimpinan nasional yang baru. Pada akhir Juni 1998, DPR setuju akan perlunya Sidang Istimewa MPR, namun tanggalnya belum dipastikan. Dari 100 anggota MPR pilihan pemerintah dari utusan golongan, Habibie memberhentikan dengan hormat 41 anggota. Anggota-anggota yang diberhentikan itu termasuk tokoh-tokoh yang dekat dengan Soeharto, seperti Hartono, mantan menteri keuangan Fuad Bawazier, Bob Hasan, dan Anthony Salim (lahir 1950). Mereka kemudian digantikan dengan orang-orang yang dekat dengan Habibie.

Kerusuhan antarkelompok yang sudah bermunculan sejak pertengahan 1990-an semakin meluas dan semakin brutal karena tidak adanya struktur represif Soeharto untuk meredamnya. Beberapa kerusuhan ini terkait dengan persaingan partai politik, seperti demonstrasi NU di Jawa Timur yang menghalangi Amien Rais, Ketua Umum Muhammadiyah, untuk pergi ke sana pada bulan Juni 1998. Beberapa kerusuhan lain muncul akibat keputusasaan yang disebabkan krisis ekonomi, dan beberapa kerusuhan lain lagi adalah murni tindakan kejahatan. Kebanyakan kerusuhan itu merupakan kerusuhan antaretnis dan/atau antaragama. Amien Rais membahas masalah konflik antaretnis dengan mengusulkan bahwa etnis Cina dan etnis lainnya harus terintegrasi penuh menjadi bangsa Indonesia, supaya mereka tidak selalu menjadi kambing hitam. Istilah pribumi dan nonpribumi harus dihapuskan. Asimilasi ini bersebrangan dengan pandangan pluralistis yang diusung Abdurrahman Wahid yang meyakini bahwa toleransi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang untuk menjadi apa pun yang mereka kehendaki.

Kerusuhan sosial memiliki berbagai bentuk. Di Purworejo, Jawa Tengah, pada bulan Juni 1998, kaum muslim menyerang lima gereja dan sebuah resor pantai di mana dibentangkan

poster-poster film bioskop yang dianggap imoral oleh kelompok penyerang. Di Jepara, para pendukung dan lawan dari seorang kyai setempat bentrok pada bulan Juli, yang kemudian berlanjut dengan pembakaran bangunan-bangunan umum dan penjarahan toko-toko. Di Jember, pertokoan Cina, rumah-rumah dan sebuah penggilingan padi dibakar dan dijarah. Beberapa ribu nelayan ikut dalam kerusuhan anti-Cina di Cilacap bulan Agustus. Kerusuhan serupa terjadi pula di kampung dan kota-kota di seantero nusantara. Serangkaian peristiwa tragis terjadi di Jawa Timur dari Malang sampai Banyuwangi pada tahun 1998. Tersebar rumor mengenai adanya gerombolan berbahaya berpakaian hitam ala ninja yang memiliki kekuatan supranatural. Para tersangka ninja, yang dibunuh keroyokan itu, kemudian ternyata hanya orang-orang yang cacat mental. Sekitar 100–200 orang meninggal dalam rangkaian histeria massa ini. NU memperingatkan para pengikutnya akan ancaman sihir hitam (santet), dan menyarankan mereka untuk berlindung dengan cara mengaji Alquran secara rutin dan melantunkan asma Tuhan. Pada awal 1999, sekitar 100–150 tersangka tukang santet tercatat dibunuh di Ciamis, Jawa Barat. Banyak di antaranya yang dieksekusi secara publik oleh para pembunuh yang mengklaim punya beking politik. Kekerasan terhadap kaum pendatang Madura di Kalimantan Barat terus berlanjut dan memakan lusinan nyawa. Terkadang, kekerasan menjadi ciri dari konflik antarkampung. Di sepanjang Jawa dan di tempat-tempat lain, banyak kepala desa digulingkan oleh massa, yang mengingatkan akan penggulingan para pejabat oleh 'kedaulatan rakyat' di masa awal revolusi. Polisi dan militer lokal tidak melakukan apa pun untuk menghentikan sebagian besar revolusi massa ini. Beberapa kerusuhan terburuk terjadi pada konflik Kristen-Islam di Ambon. Episode-episode berdarah ini, yang mengancam toleransi antaragama di seluruh negeri, dibahas di bawah ini.

Di tiga daerah, kerusuhan sosial, kesengsaraan, dan rangkaian penindasan oleh Soeharto telah meningkatkan rasa identitas lokal dalam kadar yang mampu membahayakan keutuhan bangsa. Daerah-daerah itu adalah Irian Jaya, Timor Timur, dan Aceh. Daerah pertama menjadi wilayah Indonesia sebagai hasil perjanjian antara AS dan PBB tahun 1962–63 dan ditegaskan lagi dengan 'pemilihan bebas' yang curang tahun 1969. Irian

merupakan daerah yang kaya akan sumber daya yang vital bagi bangsa, dan militer memiliki urusan-urusan yang menguntungkan di sana. Aktivis pro-kemerdekaan atau otonomi daerah tidak memiliki kepemimpinan, organisasi, dukungan internasional, dan senjata yang baik sebagaimana dimiliki oleh Timor Timur dan Aceh. Prospek keberhasilan para aktivis itu tampaknya kecil. Pengalaman historis Timor Timur yang berbeda membuat pemisahan provinsi ini tidak mesti merupakan preseden bagi provinsi lain, walaupun pemisahan itu memang melukai nasionalisme dan harga diri orang Indonesia. Aceh merupakan kasus yang paling menentukan bagi masa depan Indonesia. Aceh telah menjadi pemimpin perlawanan terhadap Belanda, kekuatan utama Republik pada masa Revolusi, dan pusat dari perlawanan yang konsisten terhadap sentralisasi rezim Soeharto. Jika Aceh lepas dari Indonesia, daerah-daerah lain yang tidak puas mungkin akan mengikuti jejaknya.

Pada bulan Juli 1998, demonstran Irian mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Biak, yang segera dihadapi ABRI dengan kekerasan. Tiga orang dikabarkan terbunuh. Di Jakarta, pada bulan Mei 1999, para demonstran muda dari Masyarakat Papua Barat menuntut kemerdekaan bagi tanah kelahiran mereka. Namun, usaha mereka tidak berhasil dan tidak mendapatkan dukungan dari kekuatan-kekuatan lain. Mungkin, kerusuhan terburuk di Irian terjadi pada bulan September 1999, ketika penduduk setempat membakar gedung DPRD beserta gedung-gedung lain dan kendaraan bermotor. Tetapi, peristiwa ini bukan dalam rangka demo menuntut kemerdekaan, melainkan merupakan demonstrasi lokal menentang kedatangan pengungsi dari Timor Timur dan Ambon.

Baru sebulan menjabat sebagai presiden, Habibie membebaskan beberapa tahanan politik Timor Timur dan menjanjikan status istimewa yang belum ditentukan bagi daerah itu. Ramos-Horta dan yang lainnya menolak tawaran tersebut, karena menerima tawaran itu sama dengan menerima keabsahan pendudukan Indonesia. Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan bahwa perjanjian yang diperuntukkan bagi Timor Timur itu akan berbeda dengan perjanjian yang berlaku bagi Daerah Istimewa Aceh dan Yogyakarta, hanya saja statusnya masih berada dalam konteks negara kesatuan—bukan federal—Republik Indonesia. Uskup Belo

melakukan pertemuan ramah-tamah dengan Habibie di Jakarta pada bulan Juni 1998. Setelah pertemuan itu, Uskup Belo memuji Presiden Habibie sebagai seorang yang humanis, ramah, penuh simpati, dan terbuka. Jelas, konteks politik di Jakarta telah berubah banyak bagi kaum Timor Timur.

Para duta besar dari Uni Eropa mengunjungi Timor Timur pada bulan Juni 1998. Di luar hotel mereka, ribuan demonstran berunjuk rasa menuntut referendum yang menawarkan opsi merdeka. Kekuatan politik setempat, jadinya, mempertegas sejak awal bahwa Timor Timur tampaknya tidak puas dengan status khusus dalam Indonesia. Memang ada orang Timor Timur yang mendukung dipertahankannya integrasi dengan Indonesia, namun peristiwa-peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa mereka hanyalah minoritas kecil yang terkadang brutal. Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB bagi Timor Timur menyaksikan demonstrasi para aktivis yang membawa bendera Fretilin ketika dia mengunjungi Dili, Desember 1998.

Pada bulan Januari 1999, Ali Alatas mengumumkan bahwa, jika tawaran otonomi bagi Timor Timur tidak bisa diterima, provinsi itu akan diberikan kemerdekaan. Habibie sendiri mengatakan bahwa sebelum tanggal 1 Januari 2000, dia tidak ingin lagi diganggu oleh isu Timor Timur, "Saran saya adalah, baiklah, kita beri saja mereka kemerdekaan." Kini resmi bahwa masa depan Timor Timur akan ditentukan di daerah bersangkutan, bukan di Jakarta. Xanana Gusmão segera dipindahkan dari penjara ke sebuah rumah tahanan khusus di Jakarta. Pemerintah menyatakan bahwa dia akan dibebaskan jika permasalahan Timor Timur sudah terselesaikan. Namun, beberapa kalangan Timor Timur khawatir Jakarta akan mencampakkan Timor Timur begitu saja tanpa memberikan persiapan memadai untuk memerintah diri sendiri, sama seperti yang dilakukan Portugal.

Kebijakan Habibie terhadap Timor Timur tidak begitu mendapatkan dukungan beberapa kalangan politik tingkat nasional. Pada bulan Februari 1999, Megawati Soekarnoputri—sudah mulai muncul sebagai calon pemenang pemilu yang dijanjikan akan diadakan—berpidato di depan kerumunan 150.000 orang bahwa Timor Timur merupakan bagian Indonesia dan dia tidak bisa menerima pelepasan diri provinsi tersebut. Pandangan serupa juga diungkapkan Abdurrahman Wahid.

ABRI tampaknya punya pemikiran lain. Meskipun bukti yang ada masih berupa potongan-potongan, tampaknya para perwira ABRI memutuskan bahwa jika hasil referendum adalah pemisahan diri, maka mereka akan menghancurkan Timor Timur. Ini mungkin dimaksudkan sebagian sebagai balas dendam, dan sebagian lagi sebagai peringatan bagi daerah-daerah lain yang ingin menuntut otonomi lebih besar.

Sebuah referendum yang menawarkan kepada penduduk Timor Timur pilihan antara otonomi dalam Indonesia atau kemerdekaan dipastikan dengan suatu perjanjian antara Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, dan Menteri Luar Negeri Portugal, di New York, Mei 1999. Referendum dijadwalkan pada bulan Agustus 1999. ABRI memfasilitasi serangan-serangan kelompok milisi Timor Timur pro-Indonesia terhadap aktivis pro-kemerdekaan seiring dengan meningkatnya suhu politik. Meskipun laporan-laporan yang ada tentang serangan ini bersifat kontradiktif, tampaknya puluhan aktivis prokemerdekaan dibunuh pada bulan-bulan awal tahun 1999. Dari Jakarta, Xanana Gusmão mengatakan bahwa mungkin perlu untuk memulai lagi perjuangan bersenjata. Pendaftaran partisipan referendum Timor Timur dimulai pada bulan Juli 1999 dalam suasana kekerasan milisi. ABRI mendatangkan pasukan bantuan dan meramalkan akan ada perang saudara terlepas dari pihak mana yang menang dalam referendum. Militer mungkin sudah memiliki rencana supaya perang saudara itu memang terjadi.

Referendum Timor Timur terjadi pada tanggal 30 Agustus 1999 secara hampir penuh damai dan tenang. Fakta bahwa milisi pro-Indonesia tidak mengganggu proses pemungutan suara menandakan bahwa mereka dan mentor ABRI mereka mengharapkan, kalaupun bukan kemenangan, setidaknya hasil referendum itu begitu ketat sehingga MPR tidak bisa menjadikannya dasar pemberian kemerdekaan. Kalau benar demikian harapan mereka, hal itu terbukti salah. Jumlah suara terhitung ada 446.953, yang merupakan 98,6% dari total calon pemilih terdaftar. Dari 438.968 suara yang sah, 78,5% mendukung kemerdekaan, dan 21,5% mendukung otonomi.

Sebelum hasil referendum diumumkan, aksi teror dilancarkan oleh kaum milisi pro-Indonesia dengan, menurut beberapa laporan, bantuan prajurit ABRI berpakaian preman. Orang-orang

Timor Timur yang pro-kemerdekaan dibunuh, dengan target utama adalah pendeta dan biarawati. Rumah pribadi, perusahaan swasta, bangunan umum, gereja, dan banyak lainnya dihancurkan. Kebanyakan dari 800.000 penduduk Timor Timur menjadi pengungsi, dan sekitar seperempat dari jumlah itu pergi atau dibawa menyeberangi perbatasan Timor Barat. Pada tanggal 7 September, Xanana Gusmão diberikan amnesti dan dibebaskan di Jakarta, setelah sebelumnya diumumkan bahwa dia akan diterbangkan ke Dili dan diserahkan kepada misi PBB di sana—hampir pasti supaya bisa dibunuh oleh milisi. Xanana segera pergi ke Kedutaan Inggris di Jakarta. Pada hari yang sama, Uskup Belo, yang rumahnya yang penuh dengan pengungsi telah diserang oleh milisi, dibawa oleh pesawat Australia untuk diamankan di Darwin. Habibie memberlakukan hukum darurat perang di Timor Timur, namun jelas bahwa dia tidak memiliki kendali atas peristiwa yang terjadi di sana.

Pada tanggal 12 September 1999, Habibie tunduk kepada amarah internasional yang memuncak dan setuju untuk memberi izin masuk bagi pasukan perdamaian PBB ke Timor Timur. Tahap pertama adalah kedatangan 2.500 pasukan dari Australia, Selandia Baru, Inggris (Gurkha), Thailand, Singapura, dan Filipina. Pasukan-pasukan lain menyusul kemudian. Tidak ada perlawanan sama sekali. ABRI dan kaum milisi sudah mundur. Kemudian, dimulailah masa transisi di bawah PBB menuju kemerdekaan Timor Timur. Rakyat Timor Timur telah trauma akibat 24 tahun masa eksploitasi dan kekuasaan yang keras, ditandai dengan ekses-ekses berulang kali dari ABRI. Kini, rakyat Timor Timur harus menghadapi peninggalan buruk berupa bumi tandus yang ditinggalkan oleh kelompok milisi dan militer yang telah memorak-porandakan prasarana dari negeri yang baru muncul ini. Pengalaman mereka akan pemerintah PBB dan perhatian dari badan bantuan dan LSM internasional nanti tidak sepenuhnya positif. Tapi setidaknya Uskup Belo, Jose Ramos-Horta, dan Xanana Gusmão kembali dan, bersama-sama dengan pihak lain, memulai proses perdamaian dan pembangunan kembali negara mereka yang hancur. Pada tahun 2002, Xanana dipilih oleh rakyat Timor Timur sebagai presiden pertama negara baru itu, dan Republik Demokratik Timor Leste/Lorosae mencapai kemerdekaan penuh. Indonesia ditinggalkan dengan rasa nasionalisnya

yang terluka. Rakyat Indonesia, dari kelas elite hingga kelas bawah, terutama menganggap PBB dan Australia bersikap anti-Indonesia ketika menangani isu Timor Timur.

Aceh di bawah Habibie tidaklah mengalami resolusi semacam Timor Timur, namun sama-sama mengalami kekerasan. Dengan penduduk lebih dari empat juta dan kekayaan sumber daya alam, Aceh merupakan bagian penting bangsa. Masa pemberlakuan hukum darurat perang dari 1990 hingga 1998 yang dinamakan masa DOM (Daerah Operasi Militer) semakin memperdalam kebencian orang Aceh terhadap Jakarta dan terutama terhadap ABRI, yang telah melakukan kekejaman terbrutalnya di sana. Pada bulan Agustus 1998, Wiranto mengunjungi Aceh dan memohon maaf atas segala penderitaan yang disebabkan ABRI serta mengatakan bahwa kekuatan bersenjata akan ditarik dalam waktu sebulan. Dalam beberapa minggu, pasukan-pasukan mulai angkat sauh, tetapi sebenarnya penarikan itu palsu belaka. ABRI semakin memperkuat diri di sana dan kekerasan semakin meningkat.

Kerusuhan rutin terjadi di Aceh dan juga di berbagai daerah di Indonesia, meskipun di Aceh rangkaian kerusuhan itu biasanya memiliki fokus politik berupa separatisme. Pada bulan Mei 1999, terjadi bentrokan antara ABRI dan penduduk setempat di Lhokseumawe, yang menyebabkan 30 orang tewas dan 100 orang luka-luka. Kaum separatis menanggapi bentrokan ini dengan serangan kepada ABRI yang menewaskan dan melukai personel militer. Pada bulan Juli 1999, ABRI menyerang pesantren Teungku Bantaqiah, yang baru saja keluar dari penjara setelah menjalani hukuman karena terlibat dengan GAM. Bantaqiah, istrinya, dan lebih dari 50 santri dan pengikutnya dibunuh. Hingga saat ini, sekitar 240.000 orang menjadi pengungsi internal Aceh. Pemerintahan Habibie tidak bisa merumuskan satu resolusi bagi masalah Aceh dan, sebagaimana nampak jelas dalam Timor Timur, ABRI jugalah, dan bukan pemerintah sipil di Jakarta, yang menentukan langkah-langkah yang diambil di Aceh.

Ketika krisis-krisis di daerah perbatasan ini mengancam kesatuan nasional—dan dalam konteks Timor Timur berakhir dengan pemisahan diri dari Indonesia—Indonesia secara keseluruhan sedang bergerak menuju demokrasi yang lebih besar. Ini merupakan prestasi luar biasa, terutama disebabkan komitmen Habibie kepada reformasi politik dan disebabkan kehadiran

aktivis prodemokrasi di kota-kota besar yang menghalangi kebrutalan ABRI. ABRI bisa berhasil melakukan tindakan-tindakan brutal di Irian, Timor Timur, atau Aceh, akan tetapi seandainya ABRI mencoba melakukan perbuatan yang sama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, hal itu akan memicu perang sipil di jalanan kota-kota tersebut.

Habibie mulai membebaskan tahanan-tahanan politik hanya dalam hitungan minggu ia menjabat presiden, yang merupakan langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. Di antara yang dibebaskan adalah kaum separatis dan tokoh-tokoh tua eks-PKI, yang telah ditahan selama lebih dari 30 tahun. Amnesti diberikan kepada Mohamad Sanusi dan orang-orang lain yang ditahan setelah insiden Tanjung Priok 1984, termasuk (secara anumerta) Hartono Dharsono. Pada bulan November 1998, Habibie mengumumkan almarhum Mohammad Natsir sebagai pemimpin bangsa, menyiratkan bahwa bahkan pemberontakan PRRI pun kini dimaafkan. ABRI membebaskan beberapa aktivis mahasiswa yang telah menghilang sejak kampanye Pemilu 1997, namun masih banyak yang hilang dan diduga telah dibunuh. Wiranto mengumumkan bahwa militer bisa menyelidiki orang-orang, termasuk Prabowo, yang diduga telah menculik para aktivis tersebut. Sementara peradilan Soeharto tidak menunjukkan kemajuan, Bob Hasan dituduh melakukan korupsi dan mulai diinterogasi pada bulan Juli 1998. Pada bulan Maret 2000, Bob Hasan dipenjara.

Faksi-faksi politik bergabung menjadi partai-partai politik baru seiring dengan langkah para pemimpin yang mulai mempersiapkan diri untuk sidang istimewa MPR dan pemilu yang menyusul sesudah itu. Suasana begitu cair dan tidak pasti. Karena peran para pemimpin Islam dalam kejatuhan rezim Soeharto, Islamisasi masyarakat Indonesia yang terus-menerus dan perasaan tercerabut parah yang membuat banyak orang Indonesia berlindung dalam agama, maka tersebar anggapan luas bahwa organisasi-organisasi Islam akan memainkan peranan penting. Namun, banyak orang juga prihatin akan bahaya sektarianisme dan, jadinya, mereka berharap akan kemenangan partai politik nonagama.

Akhirnya, muncul lima partai politik utama. Amien Rais mendirikan PAN (Partai Amanat Nasional) dengan dukungan anggota Muhammadiyah, namun mengusung ideologi sekularisme

demokratik kapitalis. Dari basis NU-nya, Abdurrahman Wahid mendirikan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang mengusung pandangan Abdurrahman sedari dulu tentang toleransi, pluralisme, dan gaya demokrasi nonreligius. Abdurrahman bersekutu erat dengan Megawati Sukarnoputri, yang PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan)-nya mendapatkan dukungan luas karena kepemimpinannya, meskipun ideologinya tidak terlalu koheren. Megawati juga tampak lebih bersedia, dibandingkan partai-partai lain, untuk bekerja sama dengan Wiranto dan ABRI. Beberapa pemimpin Islam, namun tidak termasuk Abdurrahman Wahid, bereaksi terhadap popularitas Megawati dengan mengatakan bahwa Islam tidak membolehkan seorang wanita menjadi pemimpin umat. Golkar terus maju, berusaha untuk memupus warisan zaman Soeharto dengan secara publik meminta maaf atas perbuatannya yang keterlaluan di masa lampau, dan menampilkan dirinya sebagai 'Golkar baru'. Faksi dominan dalam Golkar mendukung Habibie hampir sampai saat terakhir. PPP juga terus bertahan sebagai partai politik.

Demonstrasi-demonstrasi politik sudah umum di Jakarta, dan sering terjadi di kota-kota besar lainnya. Para aktivis mahasiswa berusaha menuntut pengadilan Soeharto, diakhirinya peranan ABRI dalam politik, pemulihan ekonomi, dan turunnya Habibie. Kerusuhan besar terkadang terjadi. Sering kali, konflik antara demonstran dan aparat keamanan (atau gerombolan sipil antimahasiswa) menimbulkan korban luka dan tewas di kedua belah pihak. Pada bulan November 1998, MPR setuju untuk mengadakan pemilu pada bulan Mei atau Juni 1999, untuk mengurangi jumlah wakil ABRI dalam DPR, untuk menyelidiki Soeharto atas tuduhan korupsi, dan untuk membolehkan dibentuknya partai-partai politik berideologi selain Pancasila.

Konflik sosial politik terkadang memiliki nuansa religius, dan berubah menjadi kekerasan antaragama di Indonesia bagian timur. Kerusuhan di Jakarta pada bulan November 1998 menyebabkan pengrusakan sebuah mesjid, 11 gereja, dua sekolah Kristen, kendaraan bermotor dan properti lain, serta pembakaran dan pembunuhan lebih dari selusin orang Kristen (terutama orang Ambon). Sejak awal 1999, terjadi konflik besar Kristen-Muslim di Ambon dan di lingkungan sekitarnya. Rumah, toko, bangunan agama, dan kantor pemerintahan dibakar dan ribuan orang dibunuh dalam kerusuhan yang terjadi bulan-bulan

berikutnya. Para pemuka agama dari kedua belah pihak tidak mampu meredakan emosi di sana, dan aparat keamanan pemerintah hanya bisa mengendalikan kekerasan sedikit saja.

Pada bulan Maret 1999, terjadi demonstrasi berskala besar di Jakarta yang menyerukan jihad untuk membela umat Islam di Ambon dari serangan umat Kristen. Pada bulan April, sebuah bom meledak di mesjid Istiqlal Jakarta pada waktu salat. Beberapa orang terluka, namun tidak ada yang tewas. Kemudian, muncul ancaman melalui telepon bahwa akan ada pengeboman gereja katedral yang berada dekat Istiqlal, yang kemudian membuat pemerintah menerapkan penjagaan ketat. Salah satu organisasi radikal Islam, KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), menyatakan pada bulan Agustus 1999 bahwa konflik di Ambon sudah menjadi jihad sesungguhnya bagi umat Islam, namun hal ini tidak mendapatkan dukungan fatwa. Kerusuhan antaragama terus berlangsung, dan menimbulkan korban nyawa, luka-luka, dan kerusakan fisik, serta membuat ribuan rakyat Indonesia timur menjadi pengungsi.

Dalam kondisi seperti itulah, rakyat Indonesia bersiap menyongsong pemilu bebas pertama dalam kurun waktu 44 tahun. Pada bulan April 1999, sejumlah 48 partai terdaftar.



Spanduk mahasiswa di Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, 1999, menuntut reformasi, demokrasi, penegakan hukum, dan pengadilan atas Soeharto

Sekitar 20 partai diyakini secara umum sebagai bentukan dari keluarga dan kroni Soeharto yang dimaksudkan untuk mengacaubalaukan suara pemilu. Ada dua Partai Demokrasi Indonesia, yang salah satunya adalah PDI-P pimpinan Megawati. Ada tiga PNI, yang salah satunya dipimpin oleh saudara Soeharto, Probosutedjo (yang, kemudian, hanya meraih sedikit suara sehingga tidak mampu mendapatkan kursi di parlemen). Beberapa partai secara terang-terangan mendasarkan diri pada ideologi dan identitas Islam, dan secara umum menolak gagasan bahwa wanita bisa menjadi Presiden. Hubungan pusat-daerah, seperti sudah bisa diduga, menjadi isu utama dalam kampanye, dengan konsensus jelas untuk mendukung desentralisasi.

Rakyat Indonesia sudah bertekad untuk memanfaatkan secara penuh kesempatan pertama dalam satu generasi ini untuk memilih pemerintahan mereka sendiri. Kampanye secara resmi dimulai pada tanggal 19 Mei 1999. Kegiatan pemilu didukung oleh bantuan luar negeri. Iklan-iklan dan debat-debat televisi berskala profesional bertaburan dan ada pawai-pawai yang liar namun meriah. Golkar ketahuan mencoba membeli suara di beberapa tempat. Beberapa bentrokan keras terjadi, dan Golkar menjadi sasaran utama kebencian. Terjadi pula bentrokan antara pengikut PKB dan PPP karena keduanya sama-sama mencari dukungan kaum muslim tradisional. Banyak orang tewas dan luka-luka (terutama karena kecelakaan lalu-lintas), bom-bom molotov dilemparkan, dan harta benda dihancurkan. Baik pengikut PKB maupun PPP menggunakan jimat demi mendapatkan perlindungan supranatural. Kendati demikian, kampanye tersebut merupakan pendidikan yang sangat berhasil dalam pesta demokrasi yang riuh. Dengan puluhan ribu orang berpawai mendukung PDI-P, Megawati menjadi calon pemenang. Ada kampanye hujatan bahwa dia terlalu memihak kalangan nonmuslim, bersifat diktator, korup dan nepotis, kemungkinan besar prokomunis, dan bahkan bersuami dua. Tetapi, para pendukungnya tetap setia.

Pemilu dilaksanakan dengan hanya sedikit penyimpangan, pada bulan Juni 1999. Ada 462 kursi DPR yang diperebutkan. Selain itu, ada jatah 38 kursi buat militer, sehingga total anggota DPR akan menjadi 500 orang. Kursi DPRD juga diperebutkan. Lima ratus kursi di DPR akan digabungkan dengan 65 utusan golongan (yang akan dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum) dan

135 utusan daerah (dipilih oleh DPRD, sehingga pada kadar tertentu juga tergantung pada hasil pemilu) sehingga menghasilkan total anggota MPR sejumlah 700 orang. (Angka-angka ini termasuk perwakilan Timor Timur yang, setelah hasil referendum Timor Timur, tidak lagi duduk dalam lembaga-lembaga negara Indonesia. MPR inilah yang akan memilih Presiden. Hasil dari DPR pusat ditunjukkan pada tabel di hal. 669.

Undang-undang pemilu menyatakan bahwa setiap partai harus mendapatkan 2% atau lebih suara (sama dengan 10 kursi) untuk bisa ikut lagi dalam pemilu 2004; dan hanya enam partai yang memenuhi persyaratan ini. Dengan keberhasilan penerapan demokrasi ini, rupiah menguat hingga di bawah Rp 7.000/US$.

Dua pola suara tampak signifikan, meskipun mengingat kondisi luar biasa tahun 1999, pola itu belum tentu akan bertahan. Pertama, masih ada perbedaan antara pulau luar Jawa dan Jawa, sebagaimana terjadi pada pemilu 1955. Namun, kini Golkar lebih kuat di luar Jawa. Golkar memperoleh 80 dari 120 kursinya (66,7%) di daerah luar Jawa, sedangkan PDI-P mendapatkan 68 dari 153 kursinya (44,4%) di luar Jawa. Kedua, dalam masyarakat yang semakin Islami, mayoritas pemilih telah memilih partai dan pemimpin yang berplatform sekular. Usaha untuk mengeksploitasi sentimen agama untuk memenangkan pemilu ternyata gagal.

Partai	*Suara masuk*	*% suara masuk*	*Kursi di DPR*	*% kursi di DPR*
PDI-P	35.706.618	33,7	153	33,1
Golkar	23.742.112	22,4	120	26,0
PPP	11.330.387	10,7	58	12,6
PKB	13.336.963	12,6	51	11,0
PAN	7.528.936	7,1	34	7.4
Lainnya	14.200.921	13,4	46	10,0
Total	105.845.93	99,9	462	100,1

Meskipun PDI-P Megawati memimpin, Mega belum tentu terpilih menjadi presiden dalam sidang MPR Oktober 1999. Dalam minggu-minggu sela, ketika manuver-manuver politik berkembang di sekitarnya, Megawati tidak melakukan apa pun untuk membangun koalisi mendukung pencalonannya sebagai presiden. Habibie ternoda oleh peristiwa Timor Timur, namun dia masih menjadi pesaing serius hingga terkuak bahwa orang-orang di sekelilingnya terlibat dalam skandal perbankan. Ketika pada bulan Oktober 1999, MPR secara resmi menolak laporan pertanggungjawaban kebijakannya, Habibie mengundurkan diri dari bursa pencalonan presiden. Sementara itu, Abdurrahman Wahid telah mengakali Megawati dan terpilih menjadi presiden keempat oleh MPR. Para pendukung PDI-P bereaksi marah dengan melakukan demonstrasi-demonstrasi emosional di beberapa kota, namun kemudian mereda setelah Megawati terpilih menjadi wakil presiden. Amien Rais sudah terpilih menjadi Ketua MPR.

Bulan-bulan pertama pemerintahan Abdurrahman Wahid menunjukkan gabungan dari harapan, janji, visi, kebingungan, dan kekecewaan. Mengingat kondisi kesehatannya yang buruk dan kekuatan-kekuatan politik yang bersatu menentangnya, orang selalu dilanda kebimbangan dari minggu ke minggu mengenai apakah Gus Dur bisa bertahan, baik secara kesehatan fisik maupun sebagai kepala negara terpilih. Namun, Gus Dur menampilkan energi yang luar biasa, tekad untuk menggulingkan unsur-unsur sentralistis dan hirarkis yang opresif semasa pemerintahan Soeharto, dan kesediaan untuk berpikir kreatif sehingga banyak pihak mengaguminya. Jadwal ketat kunjungan ke luar negeri menghasilkan banyak mitra luar negeri, serta berhasil mengurangi dukungan bagi kaum separatis GAM di Aceh, meskipun kunjungan yang sama juga menuai kritik bahwa Abdurrahman mengabaikan isu-isu dalam negeri.

Abdurrahman memberikan suasana segar, tetapi juga menimbulkan pernyataan-pernyataan kebijakan publik yang gegabah. Di antara sekian kritik yang ditujukan kepadanya adalah bahwa dia membingungkan rakyatnya. Ada satu lelucon yang mengatakan bahwa presiden pertama (Sukarno) tergila-gila kepada wanita, presiden kedua (Soeharto) tergila-gila kepada harta, presiden ketiga (Habibie) memang sudah gila dari aslinya, dan presiden keempat membikin semua orang gila. Pemerintahan tidak berjalan



Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri bersama Presiden Abdurrahman Wahid. Direproduksi atas izin Rex Features Ltd

baik, dan khususnya tidak begitu berbuat banyak dalam menangani masalah ekonomi bangsa yang semakin berlarut-larut.

Abdurrahman mendorong pluralisme dan keterbukaan. Dia membolehkan umat Cina Konfusius untuk melakukan perayaan secara terbuka. Dia mengatakan bahwa rakyat Aceh harus diberikan referendum seperti Timor Timur, namun kemudian menegaskan bahwa pilihan yang disediakan tidak termasuk pemisahan diri dari Indonesia. Dia memutuskan Irian Jaya dinamakan kembali sebagai Papua, namun tidak berpikiran untuk membiarkan daerah itu merdeka. Tetapi, ketika dia mengusulkan untuk membatalkan Ketetapan MPRS Tahun 1966 mengenai pelarangan ajaran marxisme dan komunisme, dia mengundang reaksi luas yang menuntutnya turun sebagai presiden, dan juga mengundang ancaman pengunduran diri dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Profesor Yusril Ihza Mahendra.

Kondisi sosial bangsa tetap bergejolak. Kesulitan ekonomi semakin meluas. Kerusuhan antaretnis terus berlanjut. Kerusuhan yang terutama berbahaya adalah pembunuhan antara umat Islam dan Kristen di Maluku. Lebih dari seribu orang tewas di sana sepanjang tahun 1999. Di Jakarta, sekitar 300.000 orang demonstran menanggapi peristiwa ini dengan menuntut adanya jihad



Spanduk-spanduk di jalanan Jakarta, Juni 1999. Spanduk atas menuntut agar pengusutan terhadap mantan Presiden Suharto dihentikan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Spanduk di bawah menuntut masyarakat untuk menyumbangkan darah mereka ke Palang Merah Indonesia

terhadap umat Kristen. Sebuah organisasi bernama Laskar Jihad muncul pada tahun 2000 untuk melakukan perang itu. Di Lombok, umat Kristen diserang dan harus dievakuasi. Bahkan di Yogyakarta, yang terkenal aman tenteram, terjadi kerusuhan anti-Kristen secara kecil-kecilan. Megawati mengunjungi Maluku dan menyadari bahwa kata-kata saja tidak akan bermanfaat. Pengungsi dalam negeri kini menjadi masalah sosial signifikan di beberapa daerah. Di Aceh, kekerasan antara kaum separatis dan aparat keamanan terus terjadi. Penandatanganan perjanjian gencatan senjata antara GAM dan pemerintah pada bulan Mei 2000 menandakan bahwa akhirnya ada kemungkinan dialog, namun kompromi tetap tidak melibatkan soal kemerdekaan Aceh, dan konflik bersenjata pun berkobar lagi.

Pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi pada masa Soeharto dikejar dengan semangat yang lebih tinggi di bawah Presiden Abdurrahman. Soeharto berusaha menghindari interogasi dengan alasan sakit, namun bukti-bukti yang mendukung klaim sakitnya tidak jelas. Para penyelidik mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang dana milyaran yang dipegang oleh yayasan yang diketuai Soeharto. Abdurrahman mengatakan

bahwa, jika Soeharto divonis bersalah, dia akan memaafkannya. Dia juga mengatakan hal yang sama tentang Wiranto. Wiranto sebelumnya merupakan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam kabinet Abdurrahman. Setelah para penyelidik menuduh Wiranto sebagai salah seorang yang bertanggung jawab atas kerusuhan pascareferendum Timor Timur, Presiden memberhentikannya pada bulan Februari 2000.

Polisi dipisahkan dari militer, sehingga ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Kekuatan militer secara internal terpecah-belah dan beberapa perwira diselidiki atas tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi, sehingga peranan ABRI sebelumnya tampaknya tidak bisa dipulihkan lagi—setidaknya untuk sementara. Pada bulan Mei 2000, satu warga sipil dan 21 tentara divonis dan dihukum hingga sepuluh tahun karena telah membunuh Teungku Bantaqiah setahun sebelumnya. Tetapi, letnan kolonel yang memerintahkan serangan itu telah menghilang, sehingga tidak bisa ditelusuri lagi ke atas melalui rantai komandonya. Lembaga parlemen demokrasi baru, sementara itu, berusaha mencari peranan mereka yang sesungguhnya dalam suatu negara di mana presiden maupun militer tidak lagi memiliki kontrol penuh.

Mungkin tantangan paling mendasar bagi bangsa ini adalah untuk memulihkan kembali negara hukum. Institusi hukum dan polisi sudah begitu korupnya pada masa Soekarno dan Soeharto, dan tidak banyak perbaikan pada masa Habibie, sehingga hampir seluruh sistem hukum perlu dirombak. Korupsi, ekses militer, kekerasan massa, hukum jalanan, konflik antarkelompok, ketidakamanan diri dan harta benda—tidak ada satu pun dari masalah-masalah ini yang akan bisa diselesaikan tanpa reformasi menyeluruh terhadap penegakan hukum. Namun, banyak hambatan untuk melakukan hal ini, termasuk polisi dan hakim korup, dan besarnya jumlah uang para koruptor. Sejak bulan Januari 2001, dimulailah proses desentralisasi, yang termasuk di dalamnya penyerahan sumber daya ekonomi dan politik kepada tingkat pemerintahan di mana lembaga dari pemerintahan yang baik pun bahkan kurang maju dibandingkan dengan tingkat pusat. Peluang korupsi dan berbagai penyimpangan pun meluas.

Kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan begitu berlimpah. Koruptor-koruptor kaya merubung rezim Abdurrahman bagaikan sekawanan ikan hiu yang mencium daging segar. Kemudian, timbul tuduhan adanya perjanjian-perjanjian kotor

yang melibatkan pejabat-pejabat utama bangsa, termasuk Presiden. Pada pertengahan 2001, tampak jelas bahwa pola perilaku warisan masa lalu tidak akan mudah diubah. Tidak ada yang bisa mengatakan secara yakin apakah Presiden dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab publik besar dalam Indonesia baru—negara demokratis terbesar ketiga di dunia—akan mampu mengendalikan, menyelidiki, menghapuskan, dan bahkan menolak kesempatan-kesempatan korupsi yang ada di sekeliling mereka. Tetapi, lebih dari 200 juta rakyat Indonesia mengharapkan mereka mampu melaksanakan amanat itu.

Masa kepresidenan Abdurrahman yang kacau itu berakhir pada bulan Juli 2001. Dia berusaha dengan dekrit membekukan lembaga perwakilan untuk menghindar dari turun jabatan, namun tidak ada yang menghiraukannya. MPR mengadakan sidang istimewa, memberhentikan Abdurrahman dan melantik Megawati sebagai Presiden Indonesia kelima hingga pemilu yang dijadwalkan pada tahun 2004.[]

Bab 25 ....

Indonesia Sejak Tahun 2001

WAKTU BAB ini ditulis (akhir 2004), kita masih terlalu dekat dengan perkembangan-perkembangan yang paling mutakhir untuk mengetahui apa yang paling penting, apa yang akan menentukan jalannya sejarah Indonesia. Jadi, dalam bab terakhir ini, kita hanya bisa menyinyalir beberapa gejala yang menonjol pada saat ini.

Pada periode Juli 2001 sampai pemilihan presiden tahun 2004, Presiden Indonesia adalah Megawati Sukarnoputri. Pemerintahnya harus menghadapi tantangan-tantangan yang berat sekali, seperti yang akan diuraikan di bawah ini. Dalam keadaan ekonomi dan politik Indonesia yang nyata, siapa saja yang menjadi presiden pasti menghadapi kesulitan yang besar. Seperti dibuktikan dalam kampanye pemilu pada tahun 2004, ada banyak pendukung dan pengamat yang menghargai peranan Megawati, namun ada cukup banyak juga yang menilai kinerja pemerintahnya kurang memuaskan. Secara umum, Presiden Megawati bukan seorang yang mengilhami rakyat, seperti ayahnya Bung Karno. Dia juga tidak memperlihatkan keterampilan dalam urusan-urusan pemerintahan seperti perekonomian, keamanan, politik luar negeri, administrasi umum, dan sebagainya.

Di antara persoalan-persoalan yang belum diatasi di masa pemerintahan Megawati adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang lazim disebut KKN. Banyak orang menilai bahwa KKN malah lebih buruk dibandingkan dengan di era Soeharto. KKN merupakan semacam 'pajak' tidak resmi, atau pungutan liar (pungli), yang menghambat pemulihan ekonomi Indonesia.

Ekonomi Indonesia mengalami kesulitan sejak 1997 dan pemerintahan Megawati belum bisa memulihkannya seperti

sebelum krisis itu. Namun demikian, ada kemajuan dalam beberapa hal. Meski tetap lambat, investasi toh mulai mengalir, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Akan tetapi, pembangunan yang lebih pesat sangat dibutuhkan. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang berjalan terus, pembangunan diperlukan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Sensus Indonesia tahun 2000 menghasilkan data yang pantas diragukan. Ada beberapa daerah di mana kemampuan administrasinya tidak memadai dan ada beberapa lagi yang rawan sehingga sensus tidak bisa diselenggarakan sama sekali di situ. Jumlah penduduk yang dilaporkan adalah 203,5 juta orang, namun banyak ahli menilai jumlah yang betul barangkali sekitar 230 juta orang. Walaupun di kota-kota Indonesia standar kehidupan kelas menengah sudah membaik lagi, masih banyak orang menderita akibat kesulitan ekonomi yang berkesinambungan. Persentase penduduk yang dianggap berada di bawah garis kemiskinan mungkin turun sedikit. Informasi terakhir menunjukkan bahwa selama 1999–2002, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan turun dari 23% menjadi 18%. Akan tetapi, masih banyak sekali penduduk Indonesia—malah mungkin sampai separuh—yang baru sedikit sekali di atas garis kemiskinan dan selalu terancam kalau ada syok ekonomi lagi.

Desentralisasi telah membatasi kemampuan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan-persoalan. Sering pemerintah daerah yang harus memprakarsai solusi-solusi. Kinerja pemerintahan-pemerintahan daerah sangat berbeda. Ada yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berbakat, namun ada juga yang kurang berketrampilan dan korup, malah kriminal. Selama tahun 2004, cukup banyak anggota DPRD di seluruh Indonesia dituduh melakukan korupsi, ditangkap polisi, dan diadili. Kasus-kasus seperti itu membuktikan bahwa Indonesia masih mengalami kesulitan besar sekali dengan KKN, namun juga mengindikasikan bahwa dasar hukum negara mulai menguat, sesuatu yang memberikan harapan kepada banyak orang.

Suatu perkembangan yang sangat mengganggu harapan banyak orang Indonesia adalah terorisme. Baru beberapa bulan sesudah Megawati menjadi Presiden, pada tanggal 11 September 2001, serangan bom pesawat al-Qaedah di New York dan Washington mengorbankan hampir 3.000 orang. Di Indonesia, kelompok-kelompok yang bersimpati dengan al-Qaedah turun

ke jalan, dipimpin oleh bekas mujahidin yang berpengalaman di Afghanistan. Mereka mencela Amerika dan mengecam rencana negara adikuasa ini dan sekutu-sekutunya untuk menyerang Afghanistan, yang pada waktu itu masih diperintah oleh kaum Taliban.

Indonesia sendiri sudah mengalami banyak kasus pengeboman sejak tahun 1970-an. Sejak 1998, serangan-serangan seperti itu meningkat. Misalnya, 11 Desember 1998 ada bom di Plaza Atrium Senen, Jakarta; 2 Januari 1999 di Toserba Ramayana, Jakarta; 9 Februari 1999 di Plaza Hayam Wuruk, Jakarta; 19 April 1999 di Masjid Istiqlal, Jakarta; 28-9 Mei 2000 di Gereja Kristen Protestan Indonesia dan di Gereja Katolik, Medan; Agustus 2000 di Kedutaan Besar Filipina, Jakarta; 13 September 2000 di Bursa Efek Jakarta yang mengorbankan 10 orang; pada malam Natal Desember 2000, 38 bom ditempatkan di 11 kota di seluruh Indonesia, yang menewaskan 19 orang; Januari 2001 ada bom di Pasar Minggu, Jakarta; Maret 2001 di Rumah Sakit Saint Carolus, Jakarta; 10 Mei 2001 di Yayasan Kesejahteraan Mahasiswa Iskandar Muda, Jakarta, yang menewaskan 3 orang; Juli 2001 di Gereja Santa Anna, Jakarta; Agustus dan September 2001 di Plaza Atrium Senen, Jakarta, lagi; Juni 2002 di Hotel Jayakarta, Jakarta; 1 Juli 2002 di Mal Graha Cijantung, Jakarta; Oktober 2002 di Bandung Super Mal dan Istana Plaza, Bandung. Ini baru sampai awal bulan Oktober 2002 dan bukan daftar yang lengkap.

Pada tanggal 12 Oktober 2002, pengeboman yang paling dahsyat terjadi di Kuta, Bali. Serangan di Sari Club dan Paddy's Bar itu menewaskan 202 orang dari 22 negara, kebanyakan turis muda. Di antara yang tewas, 88 adalah warga negara Australia dan 38 adalah warga negara Indonesia. Lebih dari 200 orang terluka. Ini merupakan serangan teroris terbesar di Indonesia sampai saat itu. Dampaknya sangat luas. Turisme di Bali hampir mati selama lebih dari satu tahun dan orang Bali banyak kehilangan nafkah. Ketegangan antara Australia dan Indonesia yang berlangsung sejak peristiwa Timor Timur segera menjadi kerja sama untuk melacak dan menangkap pelaku-pelaku kebiadaban itu. Dan rupanya di kalangan kelas menengah Indonesia, banyak orang yang dulu cenderung bersimpati kepada gerakan-gerakan radikal menjadi kehilangan simpatinya dan mengakui bahwa terorisme merupakan sesuatu yang mengancam mereka sendiri dan masa depan keluarganya dan negaranya.

Investigasi yang kemudian dilakukan di Indonesia cepat berhasil dalam dua segi. Pertama, mengidentifikasi pelaku-pelaku yang bertanggung jawab atas pembantaian di Kuta, menangkapnya dan mengadilinya. Dalam waktu yang cukup cepat, beberapa orang dihukum penjara beberapa tahun, seumur hidup, atau malah dihukum mati. Kedua, mengungkapkan suatu jaringan radikal/terorisme yang berani menamakan diri Jemaah Islamiyah. Tujuan gerakan itu adalah untuk mendirikan suatu negara Islam di Asia Tenggara. Dijelaskan bahwa jaringan itu juga bertanggung jawab untuk bom-bom pada malam Natal 2000 dan beberapa kasus lain, yang pada saat terjadi tidak berhasil diungkapkan oleh polisi.

Sejak itu, kasus-kasus pengeboman yang masih terjadi membuktikan bahwa terorisme tetap mengancam Indonesia. Sering sasarannya adalah simbol-simbol pengaruh Barat, modernisasi atau globalisasi di Indonesia, seperti mal-mal dan hotel-hotel. Misalnya, bom pada 5 Desember 2002 di Mal Ratu Indah Makasar yang mengorbankan 3 orang dan 27 April 2003 di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Satu ledakan besar terjadi di Hotel Marriott, Jakarta, pada tanggal 5 Agustus 2003, yang menewaskan 13 orang (12 di antaranya orang Indonesia) dan melukai 74 orang. Menurut informasi yang kelak keluar, bahan-bahan untuk bom Mariott terdiri atas sisa dari bom-bom yang dibikin untuk pengeboman pada Hari Natal 2000. Jadi, sekali lagi dikerjakan oleh Jemaah Islamiyah.

Pada tanggal 9 September 2004, suatu bom raksasa diledakkan di depan kedutaan Australia di Jakarta. Australia merupakan sasaran utama dari Jemaah Islamiyah dan kelompok-kelompok sejenis atas dua alasan: (1) dukungan mutlak pemerintah Australia dalam serangan Amerika terhadap Iraq dalam rangka 'perang terhadap teror' dan (2) peranan kepolisian Australia bersama dengan polisi Indonesia dalam melacak dan menangkap tokoh-tokoh teror dari kalangan Jemaah Islamiyah. Bom 9 September 2004 ini menewaskan 9 orang (termasuk pelakunya) dan melukai kira-kira 180 orang. Kedutaan Australia tetap berdiri dan tak satu pun orang Australia terbunuh. Semua korban adalah orang Indonesia. Warga negeri ini semakin marah terhadap kaum teroris.

Aksi pengeboman oleh Jemaah Islamiyah dan kelompok-kelompok kecil yang sejenis diakui oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai ancaman yang harus diatasi. Akan tetapi, tetap

ada dugaan bahwa oknum-oknum tertentu dalam militer memainkan kelompok-kelompok itu untuk kepentingan sendiri, terutama untuk membuktikan bahwa pengaruh militer atas urusan negara seharusnya dikuatkan lagi. Oleh karena itu, ada orang yang takut bahwa prioritas-prioritas dan kepentingan-kepentingan militer atau kepolisian bisa bertentangan dengan proses demokratisasi negara dan masyarakat Indonesia. Risiko semacam itu tidak hanya terdapat di Indonesia. Di seluruh dunia, keperluan untuk mengamankan masyarakat dan negara dari ancaman terorisme mengandung risiko bahwa norma-norma hak asasi manusia dan demokrasi akan diabaikan oleh pemerintah.

Di beberapa daerah masih ada gerakan yang ingin menambah otonomi mereka atau malah melepaskan diri dari Indonesia, terutama di Aceh dan Papua. Di Papua, seorang pemimpin gerakan kemerdekaan, Theys Eluay, dibunuh pada bulan Nopember 2001. Belakangan, 7 anggota TNI dihukum penjara atas pembunuhan itu. Di Aceh, perundingan untuk gencatan senjata meraih sedikit sukses. Akan tetapi, pada dasarnya pihak Gerakan Aceh Merdeka dan pihak pemerintah Indonesia tidak mungkin berdamai mengenai isu yang paling mendasar, yaitu apakah Aceh akan tetap menjadi sebagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menjadi suatu negara merdeka sendiri. Oleh karena itu, akhirnya gencatan senjata tidak berhasil dan pendekatan keamanan diambil oleh pemerintah dengan meluncurkan aksi militer untuk menghantam GAM. Dalam konflik berdarah ini, kedua belah pihak sering dituduh melanggar hak asasi manusia.

Sewaktu Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan seperti yang dibicarakan di atas, demokrasi mengakar dengan cara yang mengesankan. Tahun 2004 adalah tahun pemilihan: pemilihan umum pada bulan April untuk Dewan Perwakilan Rakyat pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat propinsi dan pada tingkat kota atau kabupaten, dan instansi baru Dewan Perwakilan Daerah di pusat. Jumlah pemilih terdaftar adalah 147 juta, jumlah calon anggota legislatif hampir 450 ribu, jumlah tempat pungutan suara kira-kira 585 ribu, dan jumlah surat suara lebih dari 600 juta. Dari sudut administrasi pun pemilu bulan April 2004 merupakan tantangan yang besar sekali. Ada beberapa kesulitan, penyelewengan, dan kesalahan yang terjadi. Akan tetapi pada umumnya, pemilu dilaksanakan dengan tertib dan secara seharusnya.

Hasil pemilu April 2004 adalah seperti berikut:

Partai	*% suara yang sah*	*% kursi di DPR pusat*
Golkar	21,6	23,3
PDIP	18,5	19,8
PKB	10,6	9,5
PPP	8,2	10,5
Demokrat	10,4	10,4
PKS	7,3	8,2
PAN	6,4	9,5
PDS	2,1	2,2
Lain-lain	14,9	6,6

Perkembangan yang paling mononjol adalah :

- Dukungan untuk PDIP turun drastis dari 33,7% pada pemilu 1999 menjadi 18,5% pada 2004.
- Dukungan untuk Golkar relatif stabil: 22,4% pada 1999, 21,6% pada 2004.
- PKB turun dari 12,6% (1999) menjadi 10,6% (2004), tapi masih merupakan kekuatan politik yang berarti.
- Munculnya partai-partai baru, terutama Partai Demokrat yang dipimpin oleh Jen (purn) Susilo Bambang Yudhoyono (l. 1949) dan meraih 10,4%, dan Partai Keadilan Sejahtera, sebuah partai berasaskan Islam yang fundamentalis (tapi dalam kampanyenya mengutamakan pemberantasan KKN dsb.), yang meraih 7,3%. Di Jakarta, PKS meraih dukungan yang paling besar dengan merebut hampir seperempat dari semua suara. Juga ada partai baru Partai Damai Sejahtera, yang berasaskan agama Kristen dan dipimpin oleh seorang yang 'lahir baru', yang meraih 2,1%.
- Walaupun ada lumayan banyak calon perempuan dalam pemilu, namun akhirnya hanya 11,8% dari kursi di DPRD diisi oleh perempuan (1999: 9%). Persentase anggota DPR perempuan di antara partai-partai besar, paling tinggi di Golkar (14,3%), Demokrat (14,0%), PAN (13,2%) dan PKB (13,2%).



Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (sumber http://suaramerdeka.com/harian/0405/08/nas03.htm)

Pemilihan presiden (pilpres) putaran pertama diselenggarakan pada bulan Juli 2004, sekali lagi dengan tertib dan aman Ada lima pasangan calon presiden-wakil presiden: Jen (purn) Wiranto dari Golkar dengan Salahuddin Wahid dari NU, Megawati Sukarnoputri dari PDIP dengan Hasyim Muzadi dari NU, Amien Rais dari PAN dengan Siswono Yudo Husodo yang dulu dari Golkar, Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat dengan Jusuf Kalla dari Golkar dan NU, dan Hamzah Haz dari PPP dengan Agum Gumelar dari TNI. Jumlah pemilih naik sampai lebih dari 155 juta.

Hasil pilpres putaran pertama adalah seperti berikut:

Capres	*% suara yang sah*
Susilo Bambang Yudhoyono	33,6
Megawati Sukarnoputri	26,6
Wiranto	22,2
Amien Rais	14,7
Hamzah Haz	3,0

Sesuatu yang mengesankan adalah bahwa banyak sekali pemilih pindah dari partai yang mereka dukung pada bulan April dengan memilih capres-cawapres yang didukung oleh partai lain. Menurut hitungan Koran *Kompas* (29 Juli 2004), polanya seperti berikut:

A	*B*	
Capres: jumlah suara bulan juli	*Partai-partai yang resmi mendukung pasangan itu: jumlah suara bulan April*	*A/B*
Wiranto: 26,286,788	Golkar, PKB, dsb.: 42,152,014	62,36%
Megawati: 31,569,104	PDIP, PDS: 23,440,883	134,68%
Amien Rais: 17,392,931	PAN, PKS, dsb.: 23,561,001	73,82%
Susilo BY: 39,838,184	Dem, dsb.: 12,849,952	310,03%
Hamzah Haz: 3,569,86	PPP: 9,248,764	38,60%
JUMLAH: 118,656,868	111,252,614	106,66%

Pola itu membuktikan bahwa politik aliran, loyalitas tradisional, dan pengaruh tokoh-tokoh tradisional sudah melemah, dan pemilih Indonesia bertekad untuk memilih menurut pikiran mereka sendiri. Ini berarti, demokrasi sudah mempunyai akar yang semakin mendalam di Indonesia. Juga ada sebagian pemilih dalam jumlah yang cukup berarti yang tidak ikut dalam pemilihan. Artinya, mereka mengambil keputusan untuk tidak ikut serta dalam demokrasi. Pada pemilu bulan April 2004, 16% dari pemilih tidak ikut memilih. Pada pilpres putaran pertama bulan Juli, hampir 20% tidak ikut.

Pilpres putaran kedua diselenggarakan pada bulan September 2004. Kali ini jumlah pemilih terdaftar adalah 153,3 juta. Pasangan yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanding dengan yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri. SBY menang, bersama dengan calon wakil presiden Jusuf Kalla. Mereka meraih 60,9% dari suara yang sah, sedangkan Megawati dan cawapresnya Hasyim Muzadi meraih 39,1%. Megawati menang di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku saja. Di semua propinsi lain, SBY yang menang.

Dengan dipilihnya SBY oleh rakyat Indonesia secara langsung dan dengan dukungan yang sekuat itu, maka pada tanggal 20 Oktober 2004 SBY dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-6 dengan amanat rakyat yang paling kuat sepanjang sejarah Indonesia merdeka.[]

Catatan dan Acuan

UNTUK RINCIAN seluruh terbitan, silakan lihat Daftar Pustaka di mana karya-karya diurut secara alfabetis berdasarkan nama pengarang/editor.

Bab 1: Kedatangan Agama Islam

Tentang peranan kaum muslim di Asia Tenggara di awal masa Islam, lihat Nakahara, 'Muslim merchants in Nan-Hai'. Nisan kuburan Sultan Sulaiman dibahas dalam Montana, 'Nouvelle donées'. Bukti sezaman lainnya tentang islamisasi dibahas dalam Damais, 'L'épigraphie musulmane dans le Sud-Est Asiatique', dengan mengacu pada bahan bacaan sebelumnya; lihat juga Damais, 'Études javanaises, I: Les tombes musulmanes datées de Trålåjå; Chen, 'Une pierre tombale ... retrouvée à Brunei'; dan de Casparis, 'Ahmat Majanu's tombstone'. Catatan-catatan berbahasa Cina diterjemahkan dalam Rockhill, 'Notes on the relations and trade of China with the eastern archipelago'; Groeneveldt, *Notes on the Malay archipelago and Malacca;* dan Ma Huan, *Ying-yai sheng-lan.* Mengenai berita Marco Polo, lihat Jack-Hinton, 'Marco Polo in South-East Asia'. Cortesão, *Suma Oriental,* memuat naskah penting Tomé Pires dalam bahasa Portugis dan terjemahan Inggris.

Kronik-kronik Indonesia yang dibicarakan di atas ditemukan dalam: Hill, 'Hikayat Raja-Raja Pasai'; Brown, *Sejarah Melayu;* Olthof, *Babad Tanah Djawi;* Djajadiningrat, *Sadjarah Banten.* Legenda-legenda lainnya dilukiskan dalam R. Jones, 'Ten conversion myths'. Dua buku Islam berbahasa Jawa dari abad XVI telah disunting dan diterjemahkan oleh Drewes: *Javaanse primbon* dan *Admonitions of Seh Bari.* Lihat juga Drewes, *Early Javanese code.* Tentang teks Melayu pra-1620, lihat Johns, 'Quranic Exegesis'; Riddell, 'Earliest Quranic exegetical activity'.

Penelitian tentang beberapa perselisihan pendapat sekitar Islamisasi, dengan perhatian khusus pada sumber-sumber Islam Indonesia, terdapat dalam Drewes, 'New Light'. Van Bruinessen, 'Bukankah orang

Kurdi yang mengislamkan Indonesia?' menunjukkan dengan menarik pengaruh tidak langsung orang Kurdi. Mengenai sufi, lihat Johns, 'Sufism as a category' dan bahasan John yang lebih belakangan dalam 'Islamization of Southeast Asia'. Lihat juga Ricklefs, 'Six centuries of Islamisation'; Reid, 'Islamization of Southeast Asia'; Reid, "Islamization and Christianization'; dan van Bruinessen, 'Origins and development of Skf+ orders'.

Beberapa bahan mengenai Islam di daerah-daerah di luar Indonesia yang disebutkan dalam bab ini dapat ditemukan dalam Hardy, 'Modern European and Muslim explanations of conversion to Islam in South Asia'; dan dalam Majul, *Muslims in the Philippines.*

Bab 2: Aspek-aspek Umum dari Negara-negera Prakolonial dan Kerajaan-kerajaan Besar, ± 1300–1500

Prinsip-prinsip umum yang mendasari negara-negara Indonesia telah diteliti dalam Moertono, *State and statecraft in old Java;* Schrieke, *Indonesian sociological studies* (khususnya lihat jilid II, hlm. 102 dan seterusnya); serta Reid dan Castles, *Pre-colonial state systems;* lihat juga Guilick, *Indigenous political systems of western Malaya.* Fisher, *South-East Asia;* dan Peltzer, 'Physical and human resource patterns', melukiskan geografi Nusantara. Kajian-kajian yang khususnya bernilai dalam soal ekonomi (dan soal lainnya) terdapat dalam Reid, 'Pre-colonial economy of Indonesia' dan *Southeast Asia in the age of commerce.*

Gambaran historis yang baku mengenai Majapahit, yang kini agak ketinggalan zaman, adalah Krom, *Hindoe-Javaansche geschiedenis.* Buku ini merupakan sumber utama bagi pembahasan dalam Coedès, *Les états hindouisés,* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *Indianised states of Southeast Asia.* Slametmuljana, *Story of Majapahit,* memuat banyak bahan yang bermanfaat, tetapi beberapa pandangan tampaknya tidak cukup terdokumentasikan. Mengenai abad XV, semua karya tersebut telah digeser oleh Noorduyn, 'Majapahit in the fifteenth century'. Sumber utama tentang Majapahit abad XIV terdapat dalam bahasa Inggris dalam Prapañca, *De[awarnama (Ngarakartgama)* (terj. Stuart Robson). Sebuah terjemahan yang lebih awal, dengan kualitas terjemahan yang kurang lancar tapi dengan memuat banyak informasi lainnya yang berguna, diberikan dalam Pigeaud, *Java in the 14th century. Pararaton* terdapat dalam Brandes, *Pararaton (Ken Arok);* ada suatu terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam Padmapuspita, *Pararaton.*

C.C. Berg telah menerbitkan pembahasan-pembahasannya dalam beberapa buku dan artikel; khususnya lihat karyanya yang berjudul *Rijk van de vijfvoudige Buddha.*

Mengenai Malaka, lihat Wang, 'First three rulers of Malacca'; Wake, 'Malacca's early kings and the reception of Islam'; dan bab-bab permulaan dalam Meilink-Roelofsz, *Asian trade and European influence.* Upaya untuk menyusun kembali asal-usul Malaka terdapat dalam Wolters, *Fall of Zr+vijaya.* Sumber utama tentang perdagangannya terdapat dalam Cortesão, *Suma Oriental.*

Bab 3: Kedatangan Orang-orang Eropa di Indonesia, ± 1509–1620

Latar belakang dan perkembangan perluasan bangsa Portugis ke seberang lautan dilukiskan dalam Boxer, *Portuguese seaborne empire;* Subrahmanyam, *Portuguese empire in Asia;* dan dalam Diffie dan Winius, *Foundations of the Portuguese empire* (namun, karya ini memunyai beberapa kesalahan rincian mengenai wilayah Malaya-Indonesia). Analisa yang sangat baik mengenai kegiatan-kegiatan bangsa Belanda di negeri rantau terdapat dalam Boxer, *Dutch seaborne empire.* Brujin *et al.*, *Dutch-Asiatic shipping,* merupakan karya yang sangat baik; lihat terutama jilid I. Lihat pula Parry, *Europe and a wider world,* yang dicetak ulang sebagai *Establishment of the European hegemony;* dan Masselman, *Cradle of colonialism.*

Penelitian tentang kegiatan-kegiatan bangsa Portugis serta kegiatan-kegiatan pertama bangsa Inggris dan Belanda di Indonesia dapat ditemukan dalam Meilink-Roelofsz, *Asian trade and European influence.* Banyak bahan juga tercakup dalam Tiele, 'Europeërs in den Maleischen archipel'. Pandangan seorang penulis kronik Melayu tentang penaklukan Malaka diberikan dalam Brown, *Sejarah Melayu.*

L. Andaya, *World of Maluku,* melaporkan kegiatan timbal balik bangsa Eropa dan orang Maluku dari abad XVI sampai abad XVIII. Lihat juga de Graaf, *Ambon en de Zuid-Molukken.* Tentang Maluku abad XVI, lihat pula Abdurachman, 'Moluccan responses to the first intrusions of the West'. Abdurachman *et al., Bunga Rampai Sejarah Maluku (I),* meliputi abad XVI dan XVII. Juga terdapat bahan yang menarik dalam da França, *Portuguese influence in Indonesia.* Tentang Solor, lihat Abdurachman, 'Atakiwan, casados and tupassi'; dan Barnes, 'Avarice and inquity at the Solor fort'; tentang Banda, lihat Villiers, 'Trade and society in the Banda islands'.

Dokumen-dokumen mengenai masa Coen terdapat dalam Colenbrander dan Coolhaas, *Jan Pietersz. Coen*. Peristiwa-peristiwa sekitar penaklukan Batavia dilukiskan dalam Ricklefs, 'Banten and the Dutch in 1619'; dan Abeyasekere, *Jakarta*. Sebuah analisis yang baik tentang catatan keuangan VOC terdapat dalam de Korte, *Financiäle verantwoording*. Untuk sejarah sosial Batavia di bawah VOC, lihat Blussé, *Strange company;* dan Jean Taylor, *Social world*.

Bab 4: Munculnya Negara-negara Baru, ± 1500 –1650

Bermacam-macam bahan tentang negara-negara yang dibahas di atas terdapat dalam Meilink-Roelofsz, *Asian trade and European influence*. Analisis penting dan memikat tentang kondisi ekonomi dari negara-negara baru ini dimuat dalam artikel-artikel Reid, 'Age of commerce' dan 'Seventeenth-century crisis'.

Mengenai Aceh dan negara-negara di Nusantara bagian barat, lihat Djajadiningrat, 'Geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh'; dan Lombard, *Iskandar Muda;* lihat pula bagian-bagian awal dari Andaya, *Kingdom of Johor*.

Mengenai Jawa, lihat de Graaf dan Pigeaud, *Eerste Moslimse vorstendommen op Java;* de Graaf, *Sénapati Ingalaga;* dan de Graaf, *Sultan Agung*. Buku yang pertama tidak memiliki indeks, yang akan ditemukan bersama dengan ringkasan-ringkasan berbahasa Inggris dari buku-buku lain yang didaftar di sini dan tulisan-tulisan de Graaf lainnya dalam Pigeaud dan de Graaf, *Islamic states*. Mengenai ziarah Sultan Agung ke Tembayat, lihat Ricklefs, 'Islamising Java'. Mengenai tahun-tahun akhir Majapahit, lihat Noorduyn, 'Majapahit in the fifteenth century'. Banten sebelum penaklukan Islam dianalisis dalam Guillot, Nurhakim, dan Wibisono, *Banten avant l'Islam* (dalam bahasa Indonesia, *Banten sebelum zaman Islam*). Tentang sejarah Sulawesi awal dan banyak informasi berharga lainnya tentang daerah itu, periksa Pelras, *Bugis*. Guillot, 'L'accord lusosoundanais de 1522', membahas peranan Portugis.

Kronik berbahasa Jawa paling awal yang ditemukan sejauh ini diterbitkan dalam Ricklefs, *Modern Javanese historical tradition*. Beberapa pandangan kronik berbahasa Jawa mengenai jatuhnya Majapahit juga diterbitkan dalam Ricklefs, 'Consideration of three versions of the *Babad Tanah Djawi*'. Naskah Cirebon diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam Atja, *Carita Purwaka Caruban Nagari;* keasliannya diragukan: paleografi naskah asli dan penggunaan tahun Barat dan bukannya tahun Jawa di dalamnya menimbulkan

dugaan bahwa naskah tersebut berasal dari abad XX. Lihat juga terjemahan bahasa Indonesia dalam Sulendraningrat, *Purwaka Tjaruban Nagari.*

Mengenai Jawa abad XVI, tentu saja Cortesão, *Suma Oriental,* merupakan sumber utama. Laporan-laporan Van Goens terdapat dalam de Graaf, *Vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens.*

Pembahasan-pembahasan C.C. Berg mengenai Senapati ditemukan dalam beberapa publikasinya, di antaranya yang paling penting adalah 'Twee nieuwe publicaties betreffende de geschiedenis en de geschiedschrijving van Mataram'. Jawabannya ditemukan dalam de Graaf, 'Historische betrouwbaarheid der Javaanse overlevering'.

Mengenai Makasar, lihat Pelras, 'Religion, tradition and the dynamics of Islamization' dan 'Les premières données occidentales concernant Célèbes-Sud'; Noorduyn, 'Islamisering van Makasar'; Reid, 'Rise of Makassar'; Noorduyn, *Kroniek van Wadjo';* dan Stapel, *Bonggaais verdrag.* Mesjid-mesjid pertama di Lombok dibahasa dalam Widjil Pangarsa, 'Les mosquées de Lombok'. Mengenai orang-orang Makasar dan Bali di wilayah Lombok-Sumbawa, lihat de Graaf, 'Lombok in de 17e eeuw'. Bali di zaman keemasan Gelgel dibahas dalam Vickers, *Bali;* dan Creese, 'Balinese *babad*'.

Kesulitan menggunakan sumber-sumber sejarah yang tersedia tentang Gelgel diungkap dalam debat antara Hägerdal ('Bali in the sixteenth and seventeenth centuries') dan Creese ('Chronologies and chronograms').

Bab 5: Warisan-warisan Kesastraan, Keagamaan, dan Kebudayaan

Ada banyak bahan bacaan mengenai pokok-pokok permasalahan yang tercakup di dalam bab ini. Pengantar-pengantar ilmu pengetahuan tentang bahasa-bahasa Melayu dan Jawa yang sangat bagus namun sudah agak ketinggalan zaman terdapat dalam Teeuw dan Emanuels, *Studies on Malay and Bahasa Indonesia;* dan Uhlenbeck, *Studies on the languages of Java and Madura.* Masalah-masalah keagamaan dibahas dalam Stöhr and Zoetmulder, *Religionen Indonesiens* (juga terdapat dalam edisi bahasa Prancis).

Pengenalan terbaik terhadap bahan bacaan berbahasa Melayu klasik adalah Winstedt, *History of classical Malay literature.* Mengenai orang-orang Aceh penganut ilmu-ilmu tasawuf dari abad XVII dan doktrin-doktrin mereka banyak yang telah ditulis; lihat Guillot dan Kalus, 'Stèle funéraire'; Lombard, *Iskandar Muda;* Johns, 'Malay Sufism', 'Islam in Southeast Asia', dan 'Quranic exegesis'; Riddell, 'Earliest

Quranic exegetical activity; van Nieuwenhuijze, *Šamsu'l-D+n van Pasai;* al-Attas, *Mysticism of Hamzah Fansuri* dan *Raniri and the Wujkdiyyah of 17th century Aceh;* Drewes, 'Nkr al-D+n al-Rn+r+'s charge of heresy'; Drewes dan Brakel, *Poems of Hamzah Fansuri;* Kraus, 'Transformations'; Azra, *Transmission*; dan Ito, 'Why did Nuruddin ar-Raniri leave Aceh?' Analisis yang lebih luas ditemukan dalam Azra, 'Opposition to Sufism'. Sebuah kajian penting tentang syair secara umum dan tentang pusat utama penulisan syair di abad XIX adalah Matheson, 'Questions arising from a nineteenth century Riau syair'. Literatur berbahasa Melayu yang tersedia dalam terjemahan didaftar dalam Chambert-Loir, 'Bibliographie de la littérature malaise en traduction'.

Penelitian yang paling luas tentang kesusastraan berbahasa Jawa terdapat dalam Pigeaud, *Literature of Java,* jilid I. Zoetmulder, *Pantheisme en monisme,* masih tetap merupakan analisa terbaik tentang tasawuf Islam Jawa, dan sekarang tersedia juga dalam bahasa Inggris (*Pantheism and monism*) dan dalam bahasa Indonesia (*Manunggaling kawula gusti*). Banyak informasi yang berguna mengenai Islam Jawa dan mengenai Yasadipura I, dan juga sebagai suatu teks yang berharga, dimuat dalam Soebardi, *Book of Cabolek.* Lihat juga Ricklefs, 'Yasadipura problem'. Tentang Carik Bajra/Tirtawiguna dan Ratu Pakubuwana, lihat Ricklefs, *Seen and unseen worlds.* Ekadjati, *Ceritera Dipati Ukur,* merupakan kajian penting tentang satu tradisi babad, seperti halnya Djajadiningrat, *Sadjarah Banten.* Tentang bertahannya kesastraan Jawa Kuno di Jawa yang sudah terislamkan, lihat McDonald, *Old Javanese literature;* dan Ricklefs, *Seen and unseen worlds.* Terjemahan bahasa Inggris dari tiga permainan wayang Jawa dapat ditemukan dalam Brandon, *On thrones of gold.*

Mengenai bahan bacaan berbahasa Jawa Kuno dan Tengahan, lihat Zoetmulder, *Kalangwan.* Tentang bahasa Jawa Tengahan, lihat juga Robson, *Wangbang Wideya.* Babad-babad berbahasa Bali dianalisa dalam Worsley, *Babad Buleleng;* Hinzler, 'Balinese babad'; Creese, 'Balinese *babad*'; dan Schulte Nordholt, *Een Balische dynastie* (dalam bahasa Inggris: *Spell of power*).

Tentang sumber-sumber Bugis dan Makasar, khususnya lihat Noorduyn, *Kroniek van Wadjo',* Noorduyn, 'Origins of South Celebes historical writing'; dan Cense, 'Old Buginese and Macassarese diaries'.

Suatu pengantar kesenian Indonesia terdapat dalam Holt, *Art in Indonesia.* Pengantar yang baik tentang musik Indonesia terdapat dalam Hood dan Maceda, *Music;* pembahasan-pembahasan yang lebih luas dimuat dalam Sadie, *New Grove dictionary.* Kunst, *Music in Java;* dan Kartomi, 'Music in nineteenth century Java' merupakan

kajian-kajian penting. Tentang drama tari, lihat Soedarsono, *Wayang wong.*

Bab 6: Indonesia Bagian Timur, ± 1630 -1800

Untuk pembahasan yang baik tentang Maluku pada periode ini, lihat L. Andaya, *World of Maluku.* Kejadian-kejadian di Maluku Selatan dilukiskan secara rinci dalam de Graaf, *Ambon en de Zuid-Molukken.* Knaap, *Kruidnagelen en Christenen,* merupakan kajian yang baik tentang Ambon pada akhir abad XVII. Mengenai kejadian-kejadian di Sulawesi Selatan, lihat L. Andaya, *Arung Palakka* dan 'Kingship in Bone'; Jacobs, *Jesuit Makasar documents;* Noorduyn, *Kroniek van Wildjo';* Skinner, *Sya'ir perang Mengkasar;* Stapel, *Bonggaais verdrag;* dan Noorduyn, 'Arung Singkang'. Lihat juga Wigboldus, 'Minahasa ± 1615–1680'; dan Godée Molsbergen, *Geschiedenis van de Minahassa.* Juga terdapat banyak informasi mengenai orang-orang Makasar dan Bugis serta kegiatan-kegiatan mereka di Nusantara bagian barat dalam Andaya, *Kingdom of Johor.*

Wilayah Nusa Tenggara menjadi sasaran analisa historis dan antropologis yang tajam dalam Fox, *Harvest of the palm.* Mengenai bahan-bahan lain yang bermanfaat terdapat dalam Noorduyn, *Bima en Sumbawa.* Tentang Bali, lihat Worsley, *Babad Buleleng;* Vickers, *Bali;* dan terutama kajian sejarah yang penting tentang Mengwi yang dimuat dalam Schulte Nordholt, *Een Balische dynastie* (juga dalam versi bahasa Inggrisnya, *Spell of power*). Tentang sejarah ekonomi VOC, lihat Glamann, *Dutch–Asiatic trade.*

Bab 7: Indonesia Barat, ± 1640–1800

B. Andaya, *To live as brothers,* adalah sebuah analisis luar biasa tentang Palembang dan Jambi pada abad-abad XVII dan XVIII. Untuk catatan tentang dunia Malaya yang lebih umum pada periode 1740–1800, yang dilihat secara luas dari sudut pandang urusan VOC, lihat Vos, *Gentle Janus.* Lewis, *Jan Compagnie,* mengamati VOC di Selat Malaka dari tahun 1641 sampai 1795. Gambaran yang bernilai tentang salah satu dari negara-negara di Sumatera yang lebih kecil setelah tahun 1700 terdapat dalam Kathirithamby-Wells, 'Siak'. Untuk analisis tentang dinamika ulu–ilir di negara pantai barat Barus, lihat Drakard, *Malay frontier.* Buku Drakard *Kingdom of words* berbicara tentang karya-karya berbahasa Melayu yang ada hubungannya dengan Minangkabau abad XVII dan XVIII.

Bab 8: Jawa, ± 1640–1682

Pembahasan yang mendalam tentang masa pemerintahan Amangkurat I terdapat dalam de Graaf, *Mangku-Rat I*; karya ini diringkas dalam bahasa Inggris dalam Pigeaud dan de Graaf, *Islamic states*. Juga terdapat banyak bahan dalam Schrieke, *Indonesian sociological studies*. Sumber utama dan penting terdapat dalam de Graaf, *Vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens*. Pandangan Jawa yang kritis yang mungkin sezaman terdapat dalam Ricklefs, *Modern Javanese historical tradition*.

Mengenai masa pemberontakan Trunajaya, lihat pula de Graaf, 'Gevangenneming en dood van Raden Truna-Djaja'; dan de Graaf, *Expeditie van Anthonio Hurdt*. Keduanya juga diringkas dalam Pigeaud dan de Graaf, *Islamic states*.

Tentang Banten, lihat Djajadiningrat, *Sadjarah Banten;* Talens, *Feodale samenleving;* dan de Haan, *Priangan*. Guillot, 'Politique vivrière', adalah sebuah kajian penting tentang kebijakan-kebijakan Sultan Ageng. Tentang Syekh Yusuf, lihat Azra, *Transmission;* van Bruinessen, *Naqsyabandiyah;* dan Hamid, *Syekh Yusuf*.

Bab 9: Jawa, Madura, dan VOC, ± 1680–1745

Sejarah masa ini terdapat dalam Ricklefs, *War, culture and economy;* dan dalam Ricklefs, *Seen and unseen worlds*. Lihat juga Nagtegaal, *Rijden op een Hollandse tijger*, yang juga terdapat dalam bahasa Inggris. Sebuah tinjauan tentang perjalanan VOC dan sebuah ringkasan satu kronik Jawa pada masa 1726–43 terdapat dalam Remmelink, *Chinese War*. Beberapa isu menyangkut sejarah ide-ide diungkap dalam Ricklefs, 'Unity and disunity', sementara topik-topik demografi, ekonomi, dan sosial tertentu dibahas dalam Ricklefs, 'Statistical evidence'. Untuk biografi Speelman, lihat Stapel, *Cornelis Janszoon Speelman*. Masa Surapati menjadi pokok bahasan de Graaf, *Moord op Kapitein François Tack* (buku ini diringkas dalam Pigeaud dan de Graaf, *Islamic states*); dan Kumar, *Surapati*. Mengenai Raja Sakti, lihat Kathirithamby-Wells, 'Ahmad Shah ibn Iskandar'.

Tentang kehidupan sosial dan kondisi kesehatan di Batavia, lihat van der Brug, *Malaria en malaise;* Jean Taylor, *Social world;* dan Schoute, *Geneeskunde*. Vermeulen, *Chineezen te Batavia*, berbicara tentang pembantaian atas orang Cina secara besar-besaran dan pertikaian yang berkaitan dengan itu antara Valckenier dan van Imholf. Hoadley, 'Javanese, *peranakan* and Chinese elites in Cirebon' merupakan tulisan penting tentang akhir abad XVII dan XVIII.

Bab 10: Jawa dan VOC, ± 1745–92

Mengenai Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam periode ini, lihat Ricklefs, *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi*. Periode ini juga dibahas secara lebih singkat dalam Soekanto, *Sekitar Jogjakarta*. Lihat pula Louw, *Derde Javaansche successie-oorlog*. Mengenai versi *Yusuf* dan *Iskandar* 1791, lihat Ricklefs, *Seen and unseen worlds*. Kumar, 'Javanese court society', merupakan sebuah sumber yang berharga tentang Mangkunegara I. Suatu analisis yang sangat penting tentang kondisi ekonomi dan sosial pedesaan terdapat dalam Carey, 'Waiting for the "just king"'. Pembahasan baru tentang Seh Ibrahim dipersembahkan dalam van der Meiden, 'A Turkish mediator'. Tentang keuangan VOC dalam masa ini, lihat de Korte, *Financiële verantwoording*.

Bab 11: Jawa, 1792–1830

Karya yang paling penting mengenai periode ini disertasi doktor Carey yang tidak diterbitkan, *Pangeran Dipanagara*. Karya penting lainnya dari Carey adalah 'Origins of the Java War', 'Satria and santri', 'Waiting for the "just king"', dan 'Changing Javanese perceptions of the Chinese'. Lihat juga Ricklefs, 'Dipanagara's early inspirational experience'. Tentang persepsi-persepsi orang Jawa mengenai hubungannya dengan Batavia, lihat Ricklefs, *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi;* dan mengenai pemberontakan Sepoy, lihat Carey, 'Sepoy conspiracy of 1815 in Java'. Sejarah baku tentang Perang Jawa sendiri terdapat dalam Louw dan de Klerck, *Java-oorlog;* lihat pula Sagimun, *Pahlawan Dipanagara berdjuang*. Ada suatu gambaran yang lebih singkat dalam Soekanto, *Sekitar Jogjakarta*. Tentang Sentot di Sumatera, lihat Dobbin, *Islamic revivalism*. Mengenai Mangkunegaran, lihat Pringgodigdo, *Ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk*. Juga ada banyak informasi berharga yang dimuat dalam Rouffaer, 'Vorstenlanden'.

Mengenai masalah-masalah kolonial, lihat Bastin, *Native policies of Sir Stamford Raffles* dan 'Raffles' ideas on the land rent system in Java'; Wright, 'East-Indian economic problems'; dan Levyssohn Norman, *Britsche heerschappij over Java en onderhoorigheden*. Sebuah analisis umum tentang keadaan ekonomi dan sosial di Jawa pada abad XIX diberikan oleh Boomgard, *Children of the colonial state,* tetapi kesimpulan-kesimpulan Boomgard terkadang didasarkan pada bukti-bukti yang kurang kuat.

Bab 12: Jawa, 1830–1900

Kajian-kajian yang paling penting tentang masa *cultuurstelsel* adalah Elson, *Village Java;* dan Fasseur, *Kultuurstelsel en koloniale baten* (juga

terdapat dalam terjemahan Inggris, *Politics of colonial exploitation*). Lihat juga Elson, *End of Peasantry;* Boomgaard, *Children of the colonial state;* dan Elson, *Javanese peasants and the colonial sugar industry.* Karya-karya penting lainnya tentang abad XIX adalah Booth, *Agricultural development* dan 'Living standards and distribution of income'; Hüsken, *Dorp op Java;* Djoko Suryo, 'Economic crisis' dan *Sejarah sosial;* Elson, 'Famine in Demak and Grobogan' dan 'Impact of government sugar cultivation'; Fasseur, 'Organisatie en sociaal-economische betekenis'; 'Cultivation system and its impact' dan 'Purse or principle'; Houben, *Kraton and kumpeni;* Hugenholtz, 'Famine and food supply'; Knight, 'People's own cultivation'; Rush, *Opium to Java;* dan Van Niel, 'Function of landrent under the cultivation system in Java' dan 'Measurement of change under the cultivation system in Java, 1837–1851'. Karya-karya penting yang mencerminkan pengetahuan dan perdebatan saat ini tentang sejarah ekonomi Jawa abad XIX (dan juga memberikan kontribusi dalam persoalan-persoalan lain) termuat dalam Booth *et al.*, *Indonesia economic history.* Karya-karya yang lebih lama tapi tetap bermanfaat adalah Burger, *Sociologisch-economische geschiedenis;* dan terutama Furnivall, *Netherlands India.* Menyangkut sejarah kolonial Belanda, lihat Fasseur, *Indologen;* van den Doel, *Stille macht;* dan Fasseur, *Indischgasten.*

Suatu tinjauan berharga tentang politik pada tahun-tahun 1839–48 dimuat dalam Arsip Nasional, *Ikhtisar keadaan politik Hindia-Belanda, tahun 1839–1848,* dengan naskah asli berbahasa Belanda dan ringkasan-ringkasan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Gambaran mengenai Jawa pada tahun 1870-an terdapat dalam Veth, *Java.* Tentang peristiwa Suryengalaga dan komplotan-komplotan lainnya pada akhir abad XIX, lihat Kumar, 'Suryengalaga affair'. Lihat juga Ruiter, 'Tegal revolt in 1864'. Van Deventer, *Overzicht van den economischen toestand der inlandsche bevolking van Java en Madoera,* merupakan suatu laporan resmi kepada Menteri Jajahan dan suatu pembeberan informasi yang mengherankan tentang dampak periode 'liberal' terhadap masyarakat pribumi.

Mengenai kegiatan-kegiatan budaya Jawa, lihat Pigeaud, *Literature of Java;* Soebardi, 'Santri-religious elements as reflected in the Book of Tjentini'; Kartomi, 'Music in nineteenth century Java'; Sears, *Shadows of empire;* Florida, *Writing the past;* dan Dewantara, *Beoefening van letteren en kunst in het Pakoe-Alamsche geslacht.* Terjemahan bahasa Inggris dari *Wedhatama* terdapat dalam Robson, *Wedhatama.* Drewes, 'Struggle between Javanism and Islam', berbicara tentang tulisan-tulisan anti-Islam akhir abad XIX. Tentang para seniman abad XIX,

lihat Holt, *Art in Indonesia;* Maronier, *Pictures of the tropics;* Carey, 'Raden Saleh'; dan Bachtiar, 'Raden Saleh'. Mengenai latar belakang keluarga Raden Saleh, lihat de Graaf, 'Semarangse geslacht Bustam'. Adam, *Vernacular press,* membicarakan terbitan-terbitan awal yang didasarkan pada bahasa Jawa. Kegiatan-kegiatan ekonomi Mangkunegaran dianalisis dalam Pringgodigdo, *Ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk.*

Tentang para bupati Jawa dalam periode ini, lihat Soeria Nata Atmadja, *Regenten-positie;* dan Sutherland, 'Notes on Java's regent families'. Tentang pendidikan priyayi baru, lihat Brugmans, *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië.* Protes petani dibahas dalam dua karya Kartodirdjo: *The peasants' revolt of Banten in 1888* dan *Protest movements in rural Java.* Karya yang pertama memuat banyak informasi mengenai Islam dalam periode ini; karya yang kedua mengklasifikasikan gerakan-gerakan yang, bagaimanapun juga, dapat dikecam. Lihat pula Drewes, *Drie Javaansche goeroe's;* dan Wiselius, 'Djåjå Båjå'.

Karya penting yang berkaitan dengan Islam Jawa pada abad XIX dapat ditemukan dalam van Bruinessen, 'Origins and development of the Naqshbandi order' dan *Naqsyabandiyah;* Johns, 'Quranic exegesis' dan 'On Qur'anic exegetes'; Snouck Hurgronje, *Mekka;* dan Steenbrink, *Beberapa aspek tentang Islam.* Lihat juga Dhofier, *Tradisi pesantren.* Tentang Sadrach dan orang-orang Kristen pribumi secara lebih umum, lihat Guillot, *L'affaire Sadrach;* Sutarman, *Sadrach's community;* dan van Akkeren, *Sri and Christ.*

Bab 13: Daerah-daerah Luar Jawa, ± 1800–1910

Belum ada kajian yang lengkap tentang daerah-daerah luar Jawa pada periode ini yang menganalisa ekspansi Belanda di seluruh kawasan tersebut, dan hanya ada sedikit kajian lokal yang mengungkapkan kejadian-kejadian dari pihak Indonesia. Akan tetapi, suatu penelitian tentang aspek-aspek imperium Belanda ditemukan dalam Fasseur, 'Een koloniale paradox', yang meliputi tahun 1830–70. Sejumlah karangan penting dimuat dalam Lapian dan Day, *Papers of the Dutch-Indonesian historical conference 1976.* Banyak informasi diberikan dalam artikel-artikel regional dalam Paulus *et al., Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie;* dan dalam bentuk yang lebih singkat dalam Bezemer, *Beknopte encyclopaedie.* Sumber-sumber kolonial yang berharga mengenai seluruh wilayah Indonesia dimuat dalam Arsip Nasional, *Laporan politik tahun 1837;* dan Arsip Nasional, *Ikhtisar keadaan politik Hindia-Belanda, tahun*

1839–1848; kedua buku ini memuat naskah-naskah asli berbahasa Belanda serta ringkasan-ringkasannya dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Mengenai kegiatan misionaris Belanda pada abad XIX, lihat Swellengrebel, *In Leijdeckers voetspoor,* jilid I; dan Coolsma, *Zendingseeuw.*

Mengenai Madura, lihat juga Sutherland, 'Notes on Java's regent families'; Mansurnoor, *Islam in an Indonesia world.* H. De Jonge, 'State formation by contract', juga merupakan tulisan yang berguna tentang abad XIX. Tentang Bali dan Lombok, lihat Utrecht, *Sedjarah hukum internasional di Bali dan Lombok.* Karya yang sangat berharga tentang Bali adalah Schulte Nordholt, *Een Balische dynastie* (dalam bahasa Inggris *Spell of power*). Lihat juga Schulte Nordholt, 'Making of traditional Bali'; dan Wiener, *Visible and invisible realms.* Anak Agung Gde Agung, *Bali pada abad XIX,* merupakan sumber bahan-bahan yang berharga dari perspektif seorang nasionalis. Lihat juga Vickers, *Bali;* dan Boers, 'Mount Tambora'. Van der Kraan, *Lombok,* merupakan karya penting, tapi pendapatnya tentang sebab-sebab ekonomi kurang meyakinkan. Sebuah analisis lokal yang menarik terdapat dalam Heersink, *Green gold of Selayar.* Tentang peran Mads Lange yang luar biasa, lihat Schulte Nordholt, 'Mads Lange connection'. Kejadian-kejadian di Ambon dilukiskan dengan baik dalam Chauvel, *Natonalists, soldiers and separatists;* lihat juga de Graaf, *Ambon en de Zuid-Molukken.* Fox, *Harvest of the palm,* berbicara tentang Nusa Tenggara.

Persaingan kolonial di Kalimantan dilukiskan dalam Irwin, *Nineteenth-century Borneo.* Lihat pula Soeri Soeroto, 'Beratib-Beamaal movement in the Banjar War'. Tentang pembangunan ekonomi di Kalimantan Selatan pada akhir abad XIX, lihat Lindblad, *Between Dayak and Dutch.* Pemerintahan Brooke di Sarawak dianalisis dalam Runciman, *White rajahs;* dan Pringle, *Rajahs and rebels.*

Mengenai Palembang, lihat Woelders, *Sultanaat Palembang, 1811–1825.* Kemajuan imperialisme Belanda di Sumatera dilukiskan dalam Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's oostkust.* Locher-Scholten, *Sumatraans Sultanaat,* berbicara tentang Jambi.

Tiga artikel Dobbin yang penting telah banyak menjelaskan gerakan Padri: 'Economic change in Minangkabau as a factor in the rise of the Padri movement'; 'Islamic revivalism in Minangkabau'; dan 'Tuanku Imam Bondjol'. Karyanya telah dikembangkan dan diperluas dalam Dobbin, *Islamic revivalism.* Analisa berharga lainnya terdapat dalam Kraus, *Zwischen Reform und Rebellion;* van Bruinessen, *Naqsyabandiyah;* dan Dobbin, 'Islamic fervour'. Lihat juga Abdullah, 'Adat and Islam: an examination of conflict in Minangkabau'; dan

Mansoer *et al., Sedjarah Minangkabau.* Tentang informasi mengenai kaum Wahhabi di Arabia, lihat Hourani, *Arabic thought in the liberal age.*

Tentang isu-isu Islam secara umum, lihat van Bruinessen, 'Origins and development of the Naqshbandi order'; dan Steenbrink, *Beberapa aspek tentang Islam.*

Reid, *Contest for North Sumatera,* merupakan suatu analisa tentang awal-mula dan jalannya Perang Aceh, dengan perhatian khusus pada aspek-aspek diplomatiknya. Tentang keseimbangan antara motivasi ekonomi dan imperialis dalam perang itu, lihat H. Bakker, 'Economisch belang van Noord-Sumatra'. Mengenai gambaran tentang perang itu sendiri, lihat van't Veer, *Atjeh-oorlog;* dan Alfian, *Perang di jalan Allah.* Lihat juga Alfian, 'Acheh Sultanate under Sultan Mohammad Daudsyah'. Kajian Snouck Hurgronje yang penting tentang Aceh adalah karyanya *Atjèhers,* yang versi Inggrisnya berjudul *Achehnese.* Suatu analisa yang bermanfaat mengenai gagasan-gagasan Snouck Hurgronje diberikan dalam Benda, *Crescent and the rising sun.* Mengenai daerah Batak, lihat Castles, 'Statelessness and stateforming tendencies among the Bataks'. Lihat juga Bowen, *Sumatran politics.*

Bab 14: Zaman Penjajahan Baru

Artikel van Deventer tahun 1899 dicetak ulang (bersama-sama banyak bahan berharga lainnya) dalam Fasseur, *Geld en geweten.* Karya Furnivall *Netherlands India* masih merupakan sumber yang berharga untuk pokok-pokok permasalahan yang dicakup dalam bab ini dan untuk banyak aspek lain dari penjajahan Belanda pada abad XX yang tidak dibahas di atas; karyanya *Colonial policy and practice* juga sangat berharga. À Campo, *Koninklijke Paketvaart Maatschappij,* adalah sebuah karya penting. Tentang aspek-aspek ekonomi, lihat buku-buku Booth *Indonesian economy* dan *Agricultural development;* Lindblad, *Historical foundations;* Maddison dan Prince, *Economic growth;* Elson, *Javanese peasants and the colonial sugar industry;* dan Allen dan Donnithorne, *Western enterprise in Indonesia and Malaya.* Breman, *Control of land and labour,* menggambarkan percobaan-percobaan perbaikan pertanian di Cirebon dan memberikan sebuah gambaran yang rinci tentang kehidupan desa di masa ini. Kepentingan-kepentingan ekonomi Amerika dianalisis dalam Gould, *Americans in Sumatra.* Mengenai Sumatera, lihat Stoler, *Capitalism and confrontation;* dan Pelzer, *Planter and peasant.* Burger, *Sociologisch-economische geschiedenis,* juga memuat suatu analisa yang merangsang mengenai periode ini. Awal-mula industri minyak dilukiskan dalam Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's*

oostkust; lihat juga Paulus *et al., Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië* (atau Bezemer, *Beknopte encyclopaedie);* dan H. Bakker, 'Economisch belang van Noord-Sumatra'. Untuk penelitian yang jauh lebih terinci, lihat Gerretson, *Geschiedenis der 'Koninklijke',* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *History of the Royal Dutch.*

Suatu penelitian umum terdapat dalam Van Niel, *Emergence of the modern Indonesian elite.* Lihat juga Cribb, *Late colonial state.* Karya-karya penting tentang konteks kolonial adalah van den Doel, *Stille macht;* dan Fasseur, *Indologen.* Mason berperan dalam periode ini: lihat Stevens, *Vrijmetselarij.* Gambaran statistik yang paling lengkap tentang periode tersebut dimuat dalam Departement van Landbouw, *Volkstelling 1930/Census 1930.* Mengenai pembaruan-pembaruan pendidikan, lihat Brugmans, *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië.* Groeneboer, *Weg tot het westen,* menganalisis kebijakan bahasa dari pemerintah Belanda. Tentang masalah-masalah kependudukan, lihat Widjojo, *Population trends in Indonesia.* Boomgaard, 'Welfare services', merupakan tulisan berharga. Perkembangan korps administratif Indonesia pada zaman baru ini dianalisis dalam Sutherland, *Making of a bureaucratic elite.* Untuk biografi Kartini, lihat Sitisoemandari, *Kartini.*

Karya-karya yang disebutkan di bab 15 dan 16, yang terpusat pada peristiwa-peristiwa asli Indonesia, juga berisi banyak bahan mengenai kebijakan dan praktik kolonial.

Bab 15: Langkah-langkah Pertama Menuju Kebangkitan Nasional, ± 1900–27

Kejadian-kejadian pada periode ini telah menarik banyak perhatian ilmiah. Van Niel, *Emergence of the modern Indonesian elite,* masih tetap merupakan penelitian yang berharga; seperti halnya Pringodigdo, *Sedjarah pergerakan rakyat Indonesia.*

Menyangkut Abdul Rivai dan *Bintang Hindia,* lihat Poeze, 'Early Indonesian emancipation'. Mengenai Budi Utomo, lihat Nagazumi, *Dawn of Indonesian nationalism.* Gerakan Samin dibahas dalam Benda dan Castles, 'Samin movement'; Bijleveld, 'Saminbeweging'; dan Shiraishi, 'Dangir's tertimony'.

McVey, *Rise of Indonesian Communism,* merupakan kajian yang paling mendalam mengenai PKI hingga tahun 1926–7, dan memuat banyak bahan tentang gerakan-gerakan politik lainnya pada periode itu, khususnya SI. Tentang Banten, lihat Williams, *Communism, religion and revolt.* Shiraishi, *Age in motion,* menganalisis radikalisme di Jawa antara tahun 1912 dan 1926. Tentang ISDV, lihat pengantar dalam

Tichelman, *Socialisme in Indonesië*. Biografi Sneevliet terdapat dalam Perthus, *Sneevliet*. Mengenai SI, lihat lebih lanjut Korver, *Sarekat Islam;* Kartodirdjo, *Protest movements in rural Java;* Oates, 'Afdeeling B'; Ensering, 'Afdeeling B'; Kuntowijoyo, 'Islam and politics'; Chusnul Hajati, 'Tragedy of Cimareme'; dan Williams, *Sickle and crescent*. Sejarah serikat buruh dianalisis dalam Ingeson, *In search of justice*. Analisa terbaik mengenai komunisme di Minangkabau terdapat dalam Schrieke, *Indonesian sociological studies,* jilid I. Analisa yang lebih terakhir terdapat dalam A. Kahin, '1927 Communist uprising in Sumatra'. Biografi Tan Malaka hingga tahun 1945 terdapat dalam Poeze, *Tan Malaka*. Fox, *Harvest of the palm,* melukiskan perkembangan-perkembangan di Timor; Chauvel, *Nationalists, soldiers and separatists,* menganalisis Ambon; Bowen, *Sumatran politics,* berbicara tentang Sumatera Utara.

Tentang kerajaan-kerajaan Jawa pada masa ini, lihat Larson, *Prelude to revolution;* dan van den Haspel, *Overwicht in overleg*. Gerakan-gerakan pemuda dan nasionalis Jawa yang lebih konservatif dikaji dalam van Miert, *Koel hoofd*. Dolk, *Twee zielen,* merupakan rujukan berharga tentang majalah-majalah dan para intelektual Jawa antara tahun 1900 hingga 1957. Tentang teosofi, lihat Tollenaere, *Politics of divine wisdom*.

Noer, *Modernist Muslim movement in Indonesia, 1900–1942,* adalah suatu penelitian mengenai pembaruan Islam. Tentang gerakan di Minangkabau, lihat Abdullah, *Schools and politics*. Peran Singapura dalam hal ini dilukiskan dalam Roff, *Origins of Malay nationalism*. Mengenai gerakan-gerakan pembaruan Islam yang penting di Jawa, lihat pula publikasi-publikasi Federspiel, 'Muhammadijah' dan *Persatuan Islam*. Dobbin, 'Accounting for the failure of the Muslim Javanese business class', merupakan sebuah analisa penting yang mencakup 1880–1940. Analisa penting lainnya tentang isu-isu Islam terdapat dalam terbitan van Bruinessen 'Origins and development of Naqshbandi order'; *Naqsyabandiyah;* 'Muslims ... and the Caliphate'; 'Controversies and polemics'; dan *NU*. Erni Haryanti Kahfi, 'Islam and Indonesian nationalism', merupakan sumber yang berharga tentang Haji Agus Salim. Bahan-bahan berharga juga terdapat dalam Steenbrink, *Beberapa aspek tentang Islam,* yang memuat antara lain bahan tentang Ahmad Khatib dari Minangkabau; Johns, 'Quranic exegesis'; dan Baroroh Baried, 'Islam and the modernization of Indonesian women'. Murni Djamal, 'Origin of the Islamic reform movement' merupakan sebuah sumber yang berharga tentang masa-masa awal. Perkembangan-perkembangan pendidikan Islam dianalisis

dalam Steenbrink, *Pesantren, madrasah, sekolah.* Karangan-karangan yang berharga mengenai gerakan pembaruan di Jawa dan mengenai hierarki-hierarki Islam yang diakui pemerintah terdapat dalam Pijper, *Studiën over de geschiedenis van de Islam in Indonesia, 1900–1950.* Tentang gerakan-gerakan orang Arab di Indonesia, lihat Mobini-Kesheh, *Hadrami awakening.* Hourani, *Arabic thought in the liberal age,* melukiskan latar belakang Timur Tengah dari pembaruan Islam.

Surjomihardjo, 'National education', melukiskan usaha-usaha pendidikan Indonesia, termasuk gerakan-gerakan wanita. Asal-usul Taman Siswa dilukiskan dalam Surjomihardjo, *Ki Hadjar Dewantara;* dan McVey, 'Taman Siswa and the Indonesian national awakening'. Lihat juga Surjomihardjo, 'Suwardi Surjaningrat's ideals and national-revolutionary actions'. Mengenai elite priyayi Jawa pada periode ini, lihat Sutherland, *Making of a bureaucratic elite.* Suryadinata, *Peranakan Chinese politics,* mencakup aspek-aspek Cina di masa ini.

Bab 16: Represi dan Krisis Ekonomi, 1927–42

Suatu penelitian umum mengenai kejadian-kejadian pada periode ini terdapat dalam Pluvier, *Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 to 1942.* Pringgodigdo, *Sedjarah pergerakan rakyat Indonesia,* juga meliputi periode ini. Untuk analisa terinci yang terpusatkan pada gerakan-gerakan 'sekuler' perkotaan pada tahun 1927–34, lihat Ingleson, *Road to exile.* Untuk periode 1936–42, lihat publikasi-publikasi Abeyasekere 'Partai Indonesia Raja'; 'Soetardjo petition'; dan *One hand clapping.* Lihat pula O'Malley, 'Pakempalan Kawulo Ngajogjakarta'.

Ada beberapa kajian tentang Sukarno; yang terbaik ialah Legge, *Sukarno: a political biography.* Banyak pula bahan yang berharga mengenai pemikiran Sukarno dalam Dahm, *Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhängigkeit* (dalam bahasa Inggris dengan judul *Sukarno and the struggle for Indonesian independence),* tetapi tafsiran-tafsiran Dahm tentang bahan ini dan usahanya mengaitkannya secara erat dengan budaya tradisional Jawa telah dikecam. Empat surat Sukarno pada tahun 1933, pertama dianalisis dalam Ingleson, *Road to exile,* dibahas lebih lanjut dalam Kwantes 'Soekarno's vier brieven'; dan Hering, 'Nogmaals de vier brieven'. Lihat juga Giebels, *Soekarno, Nederlandsch onderdaan.* Noer, *Mohammad Hatta;* dan Rose, *Indonesia free,* memberikan biografi politik Hatta. Tentang PNI-Baru, lihat Legge, *'Daulat Ra'jat'.*

Mengenai masalah-masalah Islam, lihat Noer, *Modernist Muslim movement in Indonesia, 1900–1942;* dan van Bruinessen, 'Controversies

and polemics'. Kejadian-kejadian di Minangkabau dibahas secara rinci dalam Abdullah, *Schools and politics;* lihat juga A. Kahin, 'Repression and regroupment'. Federspiel, *Persatuan Islam,* harus juga dirujuk. Gerakan-gerakan orang Arab dibahas dalam Mobini-Kesheh, *Hadrami awakening.*

Sumber umum terbaik tentang dampak Depresi di Indonesia adalah disertasi doktoral O'Malley yang tidak diterbitkan, 'Indonesia in the Great Depression'. Furnivall, *Netherlands India;* dan van Gelderen, *Recent development of economic foreign policy,* masih merupakan karya-karya berharga meskipun keduanya sudah terbit sejak tahun 1939. Kontribusi yang lebih mutakhir yang harus dirujuk adalah terbitan-terbitan Booth, 'Living standards and distribution of income'; *Economic development;* dan *Indonesian economy.* Catatan umum yang berguna yang melibatkan perbandingan dengan India adalah Goswami, 'Depression'. Untuk analisa lokal yang lebih terinci, lihat Ingleson, 'Urban Java during the Depression'; Stoler, *Capitalism and confrontation;* Hüsken, *Dorp op Java;* dan Elson, *Javanese peasants and the colonial sugar industry.* Penelitian pokok terhadap ekonomi di tahun-tahun terakhir pemerintahan Belanda terdapat dalam Sutter, *Indonesianisasi,* jilid I.

Kelas birokrat Jawa dibahas dalam Sutherland, *Making of a bureaucratic elite.* Latar belakang Perang Dunia II di Indonesia dicakup dalam Aziz, *Japan's colonialism and Indonesia.*

Tentang perkembangan kesastraan Indonesia modern, lihat Teeuw, *Modern Indonesian literature,* yang menganalisis secara singkat karya-karya utama dan mencantumkan kepustakaan yang luas. Lihat juga Jedamski, 'Balai Pustaka'; Teeuw, 'Impact of Balai Pustaka on modem Indonesian literature'; Sutherland, 'Pudjangga Baru'; Foulcher, *'Pujangga Baru';* Jassin, *Pudjangga Baru;* dan Jassin, *Amir Hamzah.* Tentang literatur praperang dan Islam, lihat Kratz, 'Islamic attitudes'. Perkembangan kesenian Bali digambarkan dalam Hinzler, 'Moderne schilderkunst'; untuk masa sesudah Perang Dunia II, lihat Hinzler, 'Moderne Balinese schilderkunst'. Karya rujukan mendalam tentang seni-seni asing di Indonesia dapat ditemukan dalam Haks dan Maris, *Lexicon.*

Isu-isu orang Eropa diungkap dalam van den Doel, *Stille macht;* Fasseur, 'Nederland en het Indonesische nationalism'; dan Drooglever, *Vaderlandse Club.* Tentang kaitan antara kejadian-kejadian di Philipina dan Indonesia, lihat Bootsma, *Buren in de koloniale tijd.*

Bab 17: Perang Dunia II dan Pendudukan Jepang, 1942–5

Tidak satu pun karya yang benar-benar memuaskan yang mencakup seluruh Indonesia selama masa Perang Dunia II yang telah diterbitkan. Penelitian terbaik yang ada ialah Aziz, *Japan's colonialism and Indonesia*. Sekumpulan bahan yang lengkap namun agak belum dicernakan terdapat dalam Waseda University, *Japanese military administration in Indonesia*. Penelitian yang lebih singkat terdapat dalam Reid, 'Indonesia: from briefcase to samurai sword'. Kumpulan tulisan yang berharga terdapat dalam Post dan Touwen-Bouwsma, *Japan, Indonesia and the war*. Benda, *Crescent and the rising sun*, merupakan suatu karya yang berharga, tetapi sikapnya mengisolasi Islam sebagai topik utama cenderung mengaburkan aspek-aspek lainnya. Suatu analisa penting yang menekankan pada masalah-masalah ekonomi terdapat dalam Sutter, *Indonesianisasi*, jilid I.

Sato, *War, nationalism and peasants*, merupakan kajian penting tentang Jawa. Lihat juga Kurasawa, *Mobilisasi*. Hüsken, 'Islam and collective action', menganalisis kekerasan pada awal pendudukan. B. Anderson telah banyak menjelaskan tahap-tahap terakhir masa pendudukan di Jawa; lihat karyanya 'Japan: "The light of Asia"'; *Some aspects of Indonesian politics under the Japanese occupation;* dan *Java in a time of revolution*. Lihat juga Kobayashi, 'Kyai and Japanese military'. Legge, *Sukarno: a political biography;* Noer, *Mohammad Hatta;* dan Rose, *Indonesia free* (tentang Hatta) adalah karya-karya berharga. Legge, *Intellectuals and nationalism*, merupakan kajian terhadap lingkaran Sjahrir. Mrázek, *Sjahrir*, menyajikan sebuah biografi. Beberapa masalah penafsiran yang penting tentang Jawa di masa Jepang dibahas dalam Sluimers, '"Nieuwe orde" op Java'. Lihat juga Kurasawa, 'Propaganda media on Java'.

Sedemikian jauh hanya ada segelintir kajian yang serius mengenai wilayah-wilayah yang diduduki oleh angkatan laut, kecuali Chauvel, *Nationalists, soldiers and separatists*, tentang Ambon; dan G. Robinson, *Dark side of paradise*, tentang Bali. Tentang Sumatera, lihat Piekaar, *Atjèh en de oorlog met Japan;* Reid, 'Japanese occupation and rival Indonesian elites'; Reid, *Blood of the people;* dan van Langenberg, 'North Sumatra 1942–1945'; Friend, *Blue-eyed enemy*, merupakan analisa perbandingan tentang Jawa dan Luzon di bawah Jepang.

Suatu penelitian yang baik tentang latar belakang di Jepang dapat ditemukan dalam Beasley, *Rise of Modern Japan*. Lihat juga F. Jones, *Japan's new order in East Asia;* dan Elsbree, *Japan's role in Southeast Asian nationalist movements*. Shimer dan Hobbs, *Kenpeitai in Java and Sumatra*, mempersembahkan pandangan Kenpeitai sendiri tentang peranannya.

Bab 18: Revolusi, 1945–50

Revolusi telah menghasilkan banyak tulisan ilmiah yang bermutu tinggi. Reid, *Indonesian national revolution,* merupakan panduan terbaik tentang revolusi di seluruh Indonesia. Suatu kajian yang lebih awal dan lebih terinci yang terpusatkan pada Jawa, dan yang tergolong sebagai salah satu karya klasik mengenai sejarah Indonesia, adalah G. Kahin, *Nationalism and revolution.* Legge, *Sukarno: A political biography,* juga berharga. Mengenai kajian yang luas yang dibuat oleh seorang pelaku utama, lihat Nasution, *Sekitar perang kemerdekaan Indonesia.* Sutter, *Indonesianisasi,* jilid II, mencakup Revolusi dengan penekanan pada aspek-aspek ekonomi.

Tahun 1945–6 di Jawa dianalisa dalam B. Anderson, *Java in a time of revolution.* Mengenai Jawa Barat pada periode yang sama, lihat Smail, *Bandung in the early revolution.* Lucas, 'Social revolution in Pemalang', dan *One soul, one struggle* (versi bahasa Indonesianya, *Peristiwa tiga daerah*), mencakup peristiwa tiga daerah. Kejadian-kejadian di Surakarta dilukiskan dalam Soejatno (Sujatno), 'Revolution and social tensions in Surakarta' dan 'Perubahan-perubahan sosial politik di Surakarta'. Mengenai Yogyakarta, lihat Selosoemardjan, *Social changes in Jogjakarta.* Revolusi di Surabaya dianalisis dalam Frederick, *Visions and heat.* Cribb, *Gangsters and revolutionaries,* membahas dengan menarik tentang Revolusi di Jakarta. Pemberontakan Madiun dibahas dalam Swift, *Road to Madiun;* dan dalam D. Anderson, 'Military aspects of the Madiun affair'. Bouman, *Van driekleur tot rood-wit,* mengkaji tentang orang-orang Indonesia yang bekerja di tentara kolonial. Untuk kajian tentang tokoh-tokoh utama militer, lihat Nugroho, 'Soedirman: Panglima yang menepati janjinya'; dan Penders dan Sundhaussen, *Abdul Haris Nasution.* Lihat juga Sundhaussen, *Road to power.* Noer, *Mohammad Hatta;* dan Rose, *Indonesia free,* menganalisis peran Hatta. Lihat juga Mrázek, *Sjahrir.*

Revolusi di luar Jawa sejauh ini kurang mendapat perhatian. Untuk tulisan-tulisan tentang Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Ambon, juga bagian-bagian Jawa, lihat A. Kahin, *Regional dynamics.* Tentang Bali, lihat G. Robinson, *Dark side of paradise;* and Vickers, *Bali.* Madura dibahas dalam Touwen-Bouwsma, 'Dutch, Indonesian Republicans and Negara Madura'. Tentang tahap-tahap awal di Sulawesi Selatan, lihat Reid, 'Australia's hundred days'. Chauvel, *Nationalists, soldiers and separatists,* memberikan catatan yang mendalam tentang Ambon. Reid, *Blood of the people* (terjemahan Indonesianya, *Perjuangan rakyat*), mencakup tahun-tahun awal Revolusi di Aceh dan Sumatera Timur. Mengenai tahap-tahap pertama

di Aceh, lihat pula Piekaar, *Atjèh en de oorlog met Japan.* Lihat juga Reid, 'Birth of the Republic in Sumatera'.

Tahap-tahap terakhir Revolusi dibahas dalam Feith, *Decline of constitutional democracy.* Mengenai aspek-aspek diplomatik internasional, lihat A. Taylor, *Indonesian independence and the United Nations;* dan McMahon, *Colonialism and Cold War;* konteks diplomatik yang lebih umum digambarkan dalam Colbert, *Southeast Asia in international politics.*

Aspek-aspek Islam dibahas dalam Boland, *Struggle of Islam.* Lihat van Dijk, *Rebellion under the banner of Islam;* Soebardi, 'Kartosuwiryo'; Chaidar, *Pemikiran politik;* dan Horikoshi, 'Dar ul-Islam movement', mengenai Kartosuwirjo dan Darul Islam. Tentang kesastraan, lihat Teeuw, *Modern Indonesian literature;* mengenai kesenian, lihat Holt, *Art in Indonesia.* Peran van Mook digambarkan dalam Yong, *Van Mook.*

Bab 19: Percobaan Demokrasi, 1950–7

Feith, *Decline of constitutional democracy,* merupakan suatu kajian yang sangat mendalam mengenai periode ini. Kajian-kajian mengenai berbagai unsur percaturan politik dapat ditemukan dalam Hindley, *Communist Party of Indonesia;* Mortimer, *Indonesian Communism under Sukarno;* McVey, 'Post-revolutionary transformation of the Indonesian army'; Legge, *Sukarno: a political biography;* Boland, *Struggle of Islam;* Noer, *Mohammad Hatta;* Rose, *Indonesia free* (tentang Hatta); Yusril Ihza, 'Combining activism and intellectualism' (tentang Natsir); dan Penders dan Sundhaussen, *Abdul Haris Nasution.* Tentang Lekra, lihat Foulcher, *Social commitment.*

Buku-buku Booth, *Indonesian economy* dan *Agricultural development* merupakan karya-karya penting tentang periode ini. Untuk persoalan-persoalan pertanian di Sumatera Timur, lihat Stoler, *Capitalism and confrontation;* dan Pelzer, *Planters against peasants.* Tentang pertambahan jumlah penduduk, lihat Widjojo, *Population trends in Indonesia.* Sekumpulan ringkas angka-angka statistik yang bermanfaat diberikan dalam Brand, 'Some statistical data'. Perkembangan-perkembangan ekonomi sampai tahun 1955 dianalisis dalam Sutter, *Indonesianisasi,* jilid III dan IV.

Kajian-kajian lokal tentang masyarakat Jawa ditemukan dalam Selosoemardjan, *Social changes in Jogjakarta;* Castles, *Religion, politics and economic behaviour in Java;* Jay, *Religion and politics in rural Central Java;* dan Kuntowidjojo, 'Sikap ekonomi dan keagamaan pengusaha didesa industri' (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai

'Economic and religious attitudes of entrepreneurs in a village industry'). Geertz, *Religion of Java,* memuat banyak informasi, tetapi telah disalahkan karena menyamakan identitas komunal (santri dan abangan) dengan kategori kelas sosial (priyayi). Tentang Bali, lihat G. Robinson, *Dark side of paradise.*

Suatu analisa tentang pemilihan umum tahun 1955 (dan 1971) terdapat dalam van Marle, 'Indonesian electoral geography'. Mengenai kebijakan luar negeri, lihat Fifield, *Diplomacy of Southeast Asia;* Bone, *Dynamics of the Western New Guinea (Irian Barat) problem;* dan Mozingo, *Chinese policy toward Indonesia.*

Krisis-krisis daerah di Indonesia telah dianalisis dalam beberapa karya penting. Tentang Aceh, lihat Sjamsuddin, *Republican revolt.* Tentang Sulawesi, lihat karya-karya Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar* dan *Permesta.* Van Dijk, *Rebellion under the banner of Islam,* menggambarkan Darul Islam di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Aceh. Lihat lebih jauh Chaidar, *Pemikiran politik.* Suatu studi kasus tentang kehidupan Darul Islam terdapat dalam K. Robinson, 'Living in the hutan'. Leirissa, *PRRI Permesta,* menggunakan banyak bukti lisan dari orang-orang yang terlibat. Lihat juga Smail, 'Military politics of North Sumatra'.

Bab 20: Demokrasi Terpimpin, 1957–65

Tak satu pun penelitian umum tentang periode demokrasi terpimpin telah diterbitkan. Tahun-tahun 1957–9 dibahas secara rinci dalam Lev, *Transition to guided democracy.* Analisa-analisa yang merentang sampai tahun 1962 ditemukan dalam 'Dynamics of guided democracy' dan 'Indonesia' yang keduanya ditulis Feith. Hindley, *Communist Party of Indonesia,* merentang sampai tahun 1963. Lihat juga Reeve, 'Sukarnoism and Indonesia's "functional group" state'.

Leirissa, *PRRI Permesta,* merupakan sebuah kajian penting tentang pemberontakan itu, dengan menggunakan baik sumber-sumber tertulis maupun bukti lisan dari mereka yang terlibat; Mossman, *Rebels in paradise,* merupakan suatu kajian jurnalistik yang lebih tua. Mengenai pemberontakan Sulawesi, lihat juga Harvey, *Permesta.*

Kajian-kajian yang meliputi seluruh periode itu dengan penekanan pada aspek-aspek tertentu ditemukan dalam Crouch, *Army and politics;* Mortimer, *Indonesian Communism under Sukarno;* Legge, *Sukarno: a political biograpny;* Boland, *Struggle of Islam;* van Bruinessen, 'Controversies and polemics'; dan McVey, 'Post-revolutionary transformation of the Indonesian army'; kesemuanya, kecuali dua yang terakhir, mencakup analisa terhadap upaya kudeta tahun 1965 dan

berbagai tafsirannya. Kesulitan-kesulitan ekonomi pada periode itu dilukiskan dalam Booth, *Indonesian economy;* dan Mackie, *Problems of the Indonesian inflation.* Tentang aspek-aspek militer, lihat lebih lanjut Sundhaussen, *Road to power,* dan Penders dan Sundhaussen, *Abdul Haris Nasution.* Coppel, *Indonesia Chinese,* meliputi periode tersebut. Kajian-kajian berharga lainnya terdapat dalam Foulcher, 'Survey of events surrounding "Manikebu"'; Lee, 'Taman Siswa in postwar Indonesia'; dan Rocamora, 'Partai Nasional Indonesia, 1963–1965'. Teeuw, *Modern Indonesian Literature,* mencakup para penulis dari periode ini. Masalah-masalah kesastraan juga diliput dalam Foulcher, *Social commitment;* Liu, 'Pramoedya ... and China'; dan Kratz, 'Islamic attitudes'. Mengenai pembunuhan para jenderal di tahun 1965, lihat B. Anderson, 'How did the Generals die?'.

Feith dan Castles, *Indonesian political thinking,* berisi sumber-sumber primer yang berharga mengenai periode ini (dan sebelumnya). Karya Sukarno sendiri *Autobiography as told to Cindy Adams* memberi banyak wawasan mengenai pikirannya pada periode ini. Kecenderungan umum para ilmuwan untuk menganggap Sukarno sebagai seorang konservatif sosial walaupun retorikanya yang bersifat revolusioner ditantang dalam Hauswedell, 'Sukarno: radical or conservative?'.

Kebijakan luar negeri pada periode ini telah mendapat perhatian yang besar. Lihat Bunnell, 'Guided democracy foreign policy'; dan Mackie, *Konfrontasi: The Indonesia–Malaysia dispute.* Weinstein, *Indonesian foreign policy,* terpusat pada tahun-tahun pasca-Sukarno, tetapi mencakup bahan-bahan mengenai periode ini. Mengenai peranan Cina, lihat Mozingo, *Chinese policy toward Indonesia;* dan Jay Taylor, *China and Southeast Asia;* keduanya mencakup analisa-analisa tentang usaha kudeta tahun 1965. Keterlibatan Amerika dibahas dalam A. Kahin dan G. Kahin, *Subversion as foreign policy;* Bunnell, 'Central Intelligence Agency – Deputy Directorate for Plans 1961 secret memorandum'; dan Fifield, *Southeast Asia in United States policy,* yang meluas sampai sekitar tahun 1962. Mengenai dokumen Gilchrist, lihat bab pertama Mody, *Indonesia under Suharto.*

Bab 21: Menciptakan Orde Baru, 1965–75

Paparan tentang era Soeharto hingga tahun 1985 terdapat dalam Mody, *Indonesia under Suharto.* Polomka, *Indonesia since Sukarno,* merupakan analisa berharga hingga sekitar tahun 1970; H. McDonald, *Suharto's Indonesia,* merupakan suatu catatan yang merentang lebar, mencakup peristiwa-peristiwa hingga sekitar tahun 1979. Crouch, *Army and*

politics, merupakan analisa penting hingga sekitar tahun 1976, dengan terpusat pada aspek-aspek militer. Lihat juga Sundhaussen, *Road to power.* Roeder, *Smiling general,* merupakan sebuah biografi Soeharto yang diizinkan oleh Soeharto yang bahasannya meluas hingga tahun 1968. Untuk pandangan-pandangan Soeharto sendiri, lihat autobiografiny, *Pikiran, ucapan dan tindakan saya.* Tulisan-tulisan berharga ditemukan dalam H. Hill, *Indonesia's new order.* Oey, *Indonesia after the 1971 elections,* memuat beberapa artikel yang bermanfaat. Periode transisi dari Orde Lama ke Orde Baru digambarkan dalam karya-karya di atas. Untuk analisa-analisa yang lebih spesifik, lihat Paget, 'Military in Indonesian politics'; Hindley, 'Alirans and the fall of the old order'; Cribb, *Indonesian killings of 1965–1966;* G. Robinson, *Dark side of paradise;* Webb, 'Sickle and the cross'; dan Samson, 'Islam in Indonesian politics'. Kajian-kajian tentang beragam aspek dari politik domestik terdapat dalam McVey, 'Post-revolutionary transformation of the Indonesia army', yang meluas hingga tahun 1969; McIntyre, 'Divisions and power in the Indonesian National Party, 1965–1966'; Nishihara, *Golkar and the Indonesian elections of 1971;* dan Ward, *Foundation of the Partai Muslimin Indonesia.* Boland, *Struggle of Islam,* meluas hingga tahun 1969. Feillard, *Islam et armée,* menyorot khusus tentang NU dan tentara. Tentang pemilu 1971, lihat Ward, *1971 election;* dan van Marle, 'Indonesian electoral geography'. Jassin, *Angkatan '66,* memuat karya-karya sastra awal dari "angkatan '66". Tentang aspek-aspek Cina, lihat Coppel, *Indonesian Chinese.*

Tahanan politik hingga pertengahan tahun 1977 dianalisis dalam *Indonesia: an Amnesty International report;* edisi Indonesianya (*Indonesia: Sebuah laporan Amnesti Internasional*) diberi pengantar yang mencakup pertengahan tahun 1977 hingga Oktober 1978. Lihat juga Fealy, *Release of Indonesi's political prisoners.* Beberapa kajian telah diterbitkan tentang Timor Timur; yang terbaik adalah Jolliffe, *East Timor;* Dunn, *Timor: a people betrayed;* dan Carey dan Bentley, *East Timor at the crossroads.* Osborne, *Indonesia's secret war,* merupakan sebuah catatan jurnalistik yang serius tentang perlawanan rakyat Irian Jaya.

Masalah-masalah agama telah menarik perhatian banyak sarjana, dan telah dibahas dalam beberapa karya yang dirujuk di atas. Menyangkut Islam, karya-karya penting lainnya adalah McVey, 'Faith as the outsider'; Nakamura, *Crescent arises over the banyan tree,* yang mencakup periode hingga tahun 1970; dan Hefner, 'Islamizing Java?' Lihat juga Dhakidae, 'Manusia dan agama'. Untuk statistik-statistik dasar yang didasarkan pada sensus tahun 1971 dan 1980, lihat Biro

Pusat Statistik, *Beberapa ciri pemeluk agama.* G. Jones, 'Religion and education', menganalisis kristenisasi. Hadiwijono, *Man in the present Javanese mysticism,* memuat kajian penting tentang Kebatinan. Lihat juga Mulder, *Mysticism and everyday life;* Stange, '"Legitimate" mysticism'; dan Subagya, *Kepercayaan,* yang ditulis dari sudut pandang Katolik yang kritis. Karya tentang pendidikan Islam dan masalah-masalah yang berkaitan dibahas dalam Steenbrink, *Pesantren, madrasah, sekolah* (yang terdapat dalam edisi bahasa Belanda maupun Indonesia); dan Sudjoko Prasodjo *et al., Profil pesantren.*

Tentang berakhirnya konfrontasi, lihat Weinstein, *Indonesia abandons confrontation;* dan Mackie, *Konfrontasi: the Indonesia–Malaysia dispute.* Untuk hubungan luar negeri secara umum, lihat Weinstein, *Indonesian foreign policy,* yang mencakup hingga sekitar tahun 1974; dan Heinzlmeir, *Indonesians Aussenpolitik nach Sukarno, 1965–1970.* Tentang ASEAN, lihat Anwar, *Indonesia in ASEAN;* dan Jorgensen-Dahl, *Regional organisation and order in South-East Asia.* Mozingo, *Chinese policy toward Indonesia,* mencakup hingga tahun 1967; Jay Taylor, *China and Southeast Asia,* mencakup hingga tahun 1972.

Masalah-masalah ekonomi dibahas dalam H. Hill, *Indonesian economy;* Booth, *Indonesian economy;* Booth dan McCawley, *Indonesian economy during the Soeharto era;* dan dalam Booth, *Agricultural development.* Sebuah analisa penting tentang hubungan antara kebijakan politik dan ekonomi diberikan oleh Liddle, 'Relative autonomy'. Sebuah analisa dari sudut yang lebih kritis terdapat dalam Palmer, *Indonesia economy since 1965.* Kritik yang radikal juga ditemukan dalam Payer, 'International Monetary Fund and Indonesia debt slavery'. Repelita I dianalisis dalam Rudner, 'Indonesia military and economic policy'. Robison, *Indonesia: the rise of capital,* menganalisis bisnis elite Orde Baru di dalam konteks umum masyarakat dan ekonomi Orde Baru hingga pertengahan tahun 1980-an. Tentang minyak, lihat khususnya Carlson, *Indonesia's oil,* yang ditulis sebelum konsekuensi dari krisis Pertamina tahun 1975 menjadi nyata. Drake, *National integration,* merupakan kajian berharga yang didasarkan pada data-data statistik, yang khusus menyorot periode Orde Baru hingga tahun 1980-an. Masyarakat dan ekonomi Indonesia dilihat dalam konteks ASEAN yang lebih luas dalam Kühne, *Bevölkerungs und Beschäftigungsentwicklung,* yang melebar hingga sekitar tahun 1971; dan Wong, *ASEAN economies in perspective,* yang meluas hingga sekitar tahun 1976. Kajian lokal yang hebat tentang transformasi pertanian di Jawa Timur adalah Hefner, *Political economy of mountain Java.*

Tulisan-tulisan berharga tentang perkembangan budaya dapat ditemukan dalam Hooker, *Culture and society.* Statistik-statistik sosial

terdapat dalam Biro Pusat Statistik, *Sensus penduduk 1971/1971 population census;* panduan yang berguna terhadap data sensus ini adalah P. McDonald, *Pedoman.* Soetjipto Wirosardjono *et al., Gita Jaya,* adalah sebuah analisa resmi tentang pembangunan Jakarta tahun 1966–77; tentang ini, lihat juga Abeyasekere, *Jakarta.*

Bab 22: Masa Keemasan Orde Baru, 1976–88

Beberapa karya yang dirujuk pada bab 21 meluas hingga ke akhir tahun 1970-an dan 1980-an, termasuk Mody, *Indonesia under Suharto;* Robison, *Indonesia: the rise of capital;* H. Hill, *Indonesian economy;* H. Hill, *Indonesia's new order;* Hooker, *Culture and Society;* Booth dan McCawley, *Indonesian economy during the Soeharto era;* Booth, *Agricultural development;* Booth, *Indonesian economy;* Drake, *National integration;* Anwar, *Indonesia in ASEAN;* Carey dan Bentley, *East Timor at the crossroads;* Liddle, 'Relative Autonomy'; Hefner, 'Islamizing Java'; dan Feillard, *Islam et armée.*

Penilaian umum tentang periode yang dibahas bab ini bisa ditemukan dalam Schwarz, *Nation in waiting.* Survei tahunan yang berharga terhadap peristiwa-peristiwa tahun sebelumnya bisa ditemukan dalam jurnal *Asian Survey,* biasanya pada terbitan pertama setiap tahun. Karya Jenkins, *Suharto and his generals,* merupakan sejarah politik penting dari 1975 hingga 1983. Tinjauan mengenai hubungan Suharto-ABRI ada dalam Said, 'Suharto's armed forces.' Untuk satu analisis otoritatif mengenai masalah politis-militer, lihat Lowry, *Armed forces.*

Mengenai Pancasila dan P4, lihat Morfit, 'Pancasila.' Satu aspek signifikan hubungan luar negeri Indonesia hingga 1990 dibahas dalam Suryadinata, 'Indonesia-China relations.'

Aspek-aspek ekonomis dianalisa lebih jauh dalam Booth, 'State and economic development'; dan Hadi Soesastro, 'Political economy of deregulation,' yang ditulis dalam konteks 1980-an secara umum. Penilaian pesimis ada dalam Young, 'Transformation or temporary respite?' Arndt, 'Transmigration,' merupakan analisis umum penting mengenai peranan dan prestasi transmigrasi. Analisis mengenai kehidupan orang-orang yang mencari penghidupan dalam sektor informal perkotaan bisa dilihat dalam Jellinek, *Wheel of fortune;* dan Bijlmer, *Ambulante straatberoepen.* Untuk pembahasan mengenai isu-isu kelas sosial, lihat Tanter dan Young, *The politics of middle class Indonesia.*

Selain karya-karya yang disebutkan untuk bab 21, studi-studi penting mengenai aspek-aspek Islam dari masa ini juga bisa ditemu-

kan dalam van Bruinessen, 'Indonesia's ulama and politics'; van Bruinessen, *NU*; Munhanif, 'Khittah of 1926'; Aswab Mahasin, 'Islam in Indonesia'; Bambang Pranowo, 'Islam and party politics'; Barton, 'Neo-Modernism'; Feillard, 'Traditionalist Islam and the state'; Din Syamsuddin, 'Muhammadiyah da'wah'; dan Hefner, 'Islamization and democratization.' Ada beberapa biografi Abdurrahman Wahid; pemaparan yang berguna ada dalam Ahmad Bahar, *Biografi kiai politik*.

Bab 23: Tantangan, Krisis, dan Keruntuhan Orde Baru, 1989–98

Beberapa karya yang disebutkan untuk bab 21 dan 22 juga membahas tahun 1990-an, termasuk H. Hill, *Indonesian economy*; H. Hill, *Indonesia's new order*; Booth, *Indonesian economy*; Hooker, *Culture and Society*; Schwarz, *Nation in waiting*; Lowry, *Armed forces*; Carey dan Bentley, *East Timor at the crossroads*; Said, 'Suharto's armed forces'; Ahmad Bahar, *Biografi kiai politik*; Feillard, *Islam et armee*; van Bruinessen, *NU*; Bambang Pranowo, 'Islam and party politics'; Barton, 'Neo-Modernism'; Feillard, 'Tradionalist Islam and the state'; Din Syamsuddin, 'Muhammadiyah da'wah'; dan Hefner, 'Islamization and democratization.'

Satu penelitian penting tentang pemikiran dan praktik militer di akhir masa Soeharto adalah Honna, 'Military ideology.' Esai-esai penting mengenai keruntuhan rezim ada dalam Forrester dan May, *Fall of Soeharto*. Satu telaah mendalam mengenai latar belakang dan perkembangan kerusuhan di Surakarta pada bulan Mei 1998 ada dalam Mulyadi, Soedarmono dkk., *Runtuhnya kekuasaan 'Kraton Alit.'* Di antara biografi Habibie, salah satunya adalah karya Makmur Makka, *BJH*.

Mengenai Aceh, lihat Kell, *Roots of Acehnese Rebellion*; dan G. Robinson, 'Rawan.' Mengenai Timor, selain karya Carey dan Bentley, *East Timor at the crossroads*, lihat pula Carey, 'Catholic Church'; dan Sherlock, 'Political Economy.'

Selain karya-karya di atas, isu-isu keagamaan juga dibahas dalam Feillard, 'Indonesia's emerging Muslim feminism'; dan Hefner, 'Islam, state and civil society.' Mengenai masalah-masalah Hindu, lihat F.L Bakker, 'Balinese Hinduism.'

Masalah-masalah sosial ekonomi dibahas dalam karya-karya di atas. Mengenai kerusakan dalam hutan Indonesia, lihat Poffenberger, 'Rethinking Indonesian forest policy.' Penilaian terhadap masalah sumber daya dan kependudukan bisa ditemukan dalam G. Jones dan Hull, *Indonesia assessment*. Satu telaah berharga tentang data dasar

dari sensus 1990 ada dalam Chambert-Loir, 'Demographie.' Sebuah usaha menarik untuk menilai dampak pertumbuhan ekonomi dalam pedesaan ada dalam Edmunson, 'Do the rich get richer?'

Bab 24: Indonesia Setelah Soeharto

Pada saat menulis bab ini, belum ada analisis otoritatif mengenai masa pemerintahan Habibie atau Abdurrahman Wahid. Pembahasan di bab ini didasarkan terutama pada laporan-laporan kontemporer dan pengamatan pribadi. Kebanyakan terbitan yang ada sejauh ini baru bermanfaat untuk sementara saja, sebagaimana sudah bisa diduga; dalam hal terbitan Indonesia, mungkin sulit bahkan untuk mendapatkan eksemplarnya.

Survei tahunan tentang masalah-masalah Indonesia dalam *Asian Survey* akan sangat berharga. Lihat juga pembahasan mengenai masa pemerintahan Habibie dan pemilu 1999 dalam Emmerson, *Indonesia beyond Suharto.* Mengenai isu-isu regional, lihat Haris dkk. *Indonesia di ambang perpecahan?*, yang meliputi Aceh, Riau, Irian Jaya, dan Timor Timur. Untuk biografi Habibie, lihat Makmur Makka, *BJH.* Lihat juga Ali, *Esai politik tentang Habibie.* Biografi Abdurrahman Wahid oleh Ahmad Bahar, *Biografi kiai politik,* juga berguna. Azra, *Konteks berteologi,* memberikan satu pandangan otoritatif mengenai perkembangan kontemporer dalam Islam Indonesia.

Bab 25: Indonesia Sejak Tahun 2001

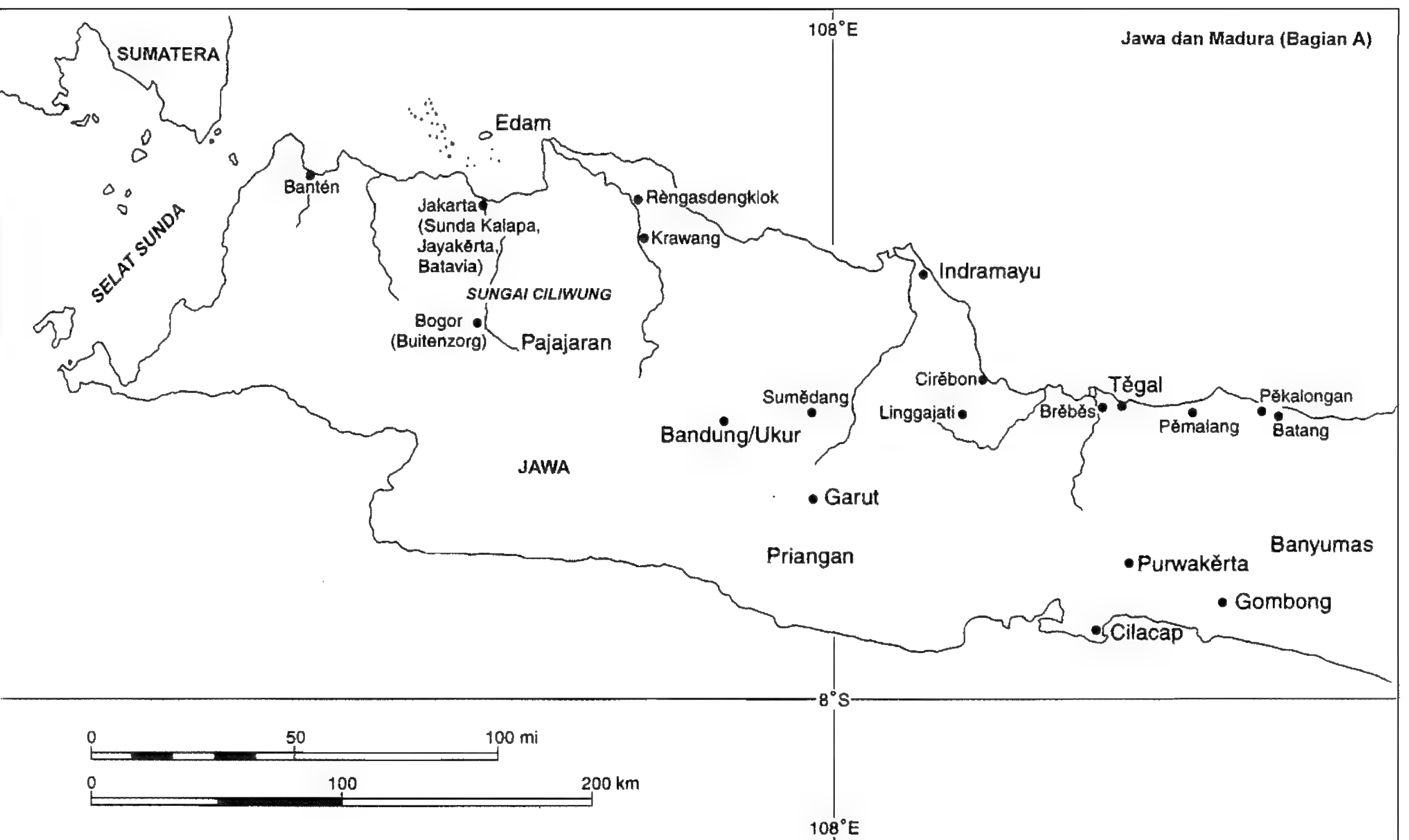
Seperti halnya dengan bab 24, belum ada analisis yang mendalam mengenai periode ini. Survei-survei tahunan dalam *Asian Survey* cukup berharga. Selain itu, kita masih menunggu penelitian yang memuaskan.

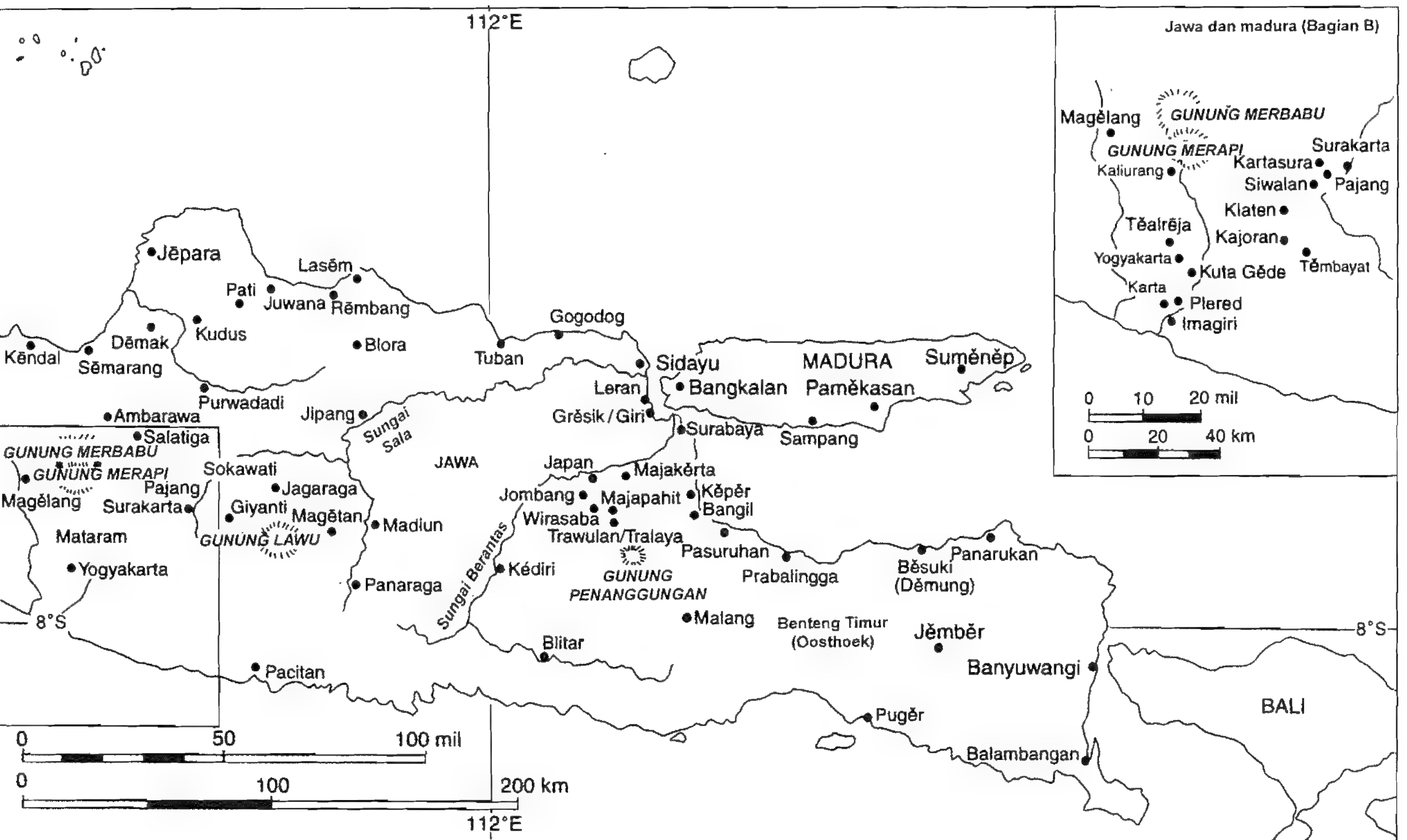
Peta

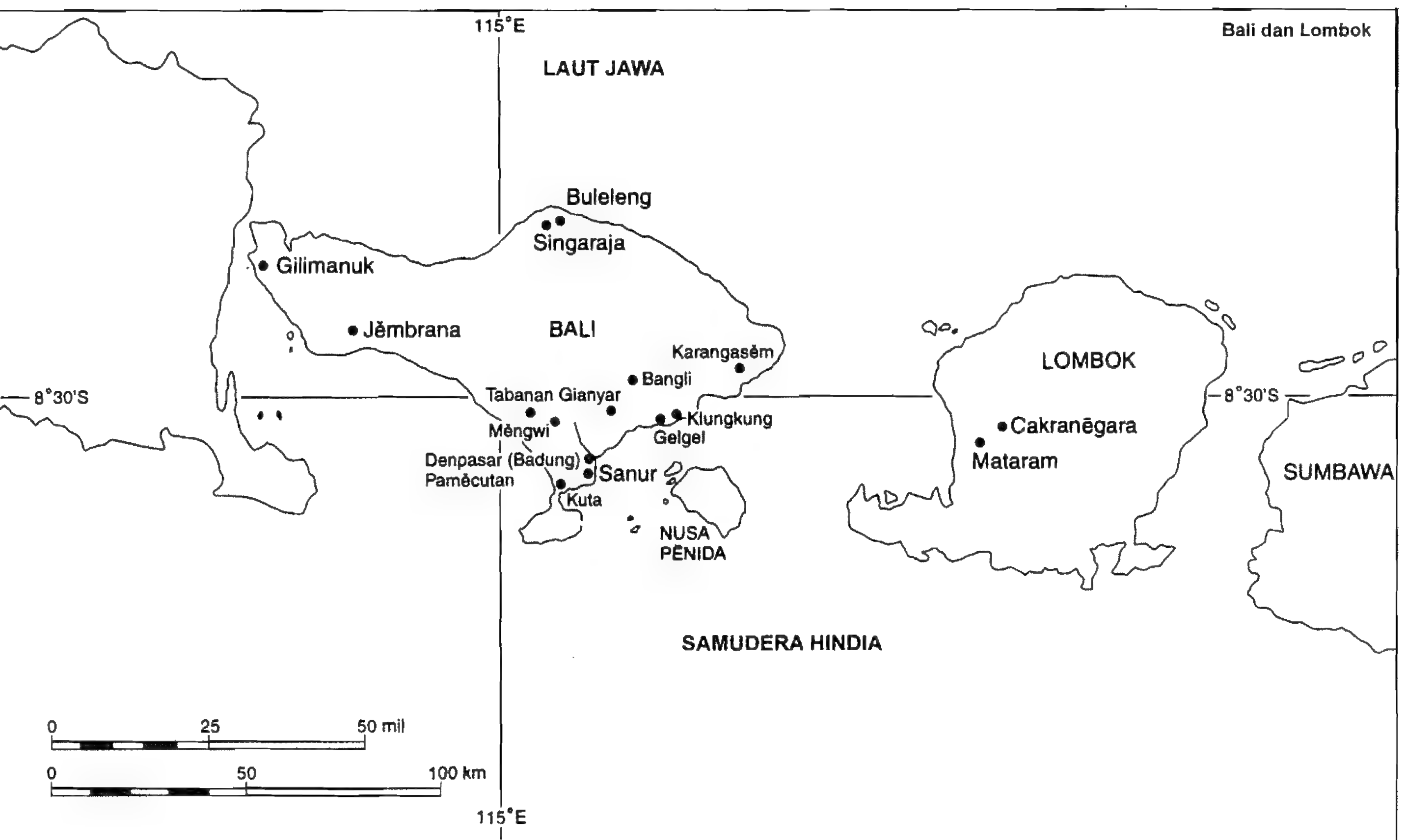
Catatan: peta-peta ini memuat seperlunya nama-nama tempat yang tidak sezaman satu sama lain.


Kepulauan Indonesia
SAMUDERA PASIFIK
LAUT CINA SELATAN
MALAYSIA
SEMENANJUNG MALAYA
SINGAPURA
BRUNAI
Sabang
NIAS
0°
MENTAWAI
SUMATRA
INDONESIA
SAMUDERA HINDIA
BANGKA
BELITUNG
KALIMANTAN
LAUT JAWA
JAWA
MADURA
BALI
LOMBOK
SUMBAWA
SUMBA
SAVU
FLORES
SOLOR
ALOR
ROTI
TIMUR BARAT
TIMOR TIMUR
TANIMBAR
ARU
BANDA
AMBON
SERAM
BURU
SULA
BACAN
TIDORE
TERNATE
HALMAHERA
MOROTAI
Minahasa
SULAWESI
BUTUNG
MINDANAO
KEPULAUAN SULU
120°E
IRIAN JAYA
0°
0 500 mil
0 500 1000 km
BATAS NEGARA


Sumatera
dan Semenanjung Malaya
100°E
Kĕdah
PENANG
Trĕngganu
Sabang
Lamreh
Aceh (Kutaraja)
Banda Aceh
Pĕdir (Pidie)
Aceh Daya
Minye Tujoh
Samudra/ Pasai
Pĕrlak
SELAT MALAKA
Perak
Aru
Alas
Langkat
Pahang
Medan
Dĕli
Kuala Lumpur
Sĕrdang
SIMEULUË
Pĕmatangsiantar
Pĕngkalan
Kĕmpas
Singkil
DANAU TOBA
Malaka
Barus
Bangkara
RUPAT
Johor
Sibolga
BĔNGKALIS
SINGAPURA
Gunungsitoli
Tapanuli
BINTAN
Daludalu
Siak
NIAS
Pakanbaru
Kampar
KEPULAUAN RIAU
0°
Indĕragiri
Minangkabau
KEPULAUAN LINGGA
Padang
Muarakumpe
KEPULAUAN MENTAWAI
Jambi
BANGKA
Palembang
Bĕngkulu
Lampung
Tulangbawang
Tĕlukbĕtung
Bonjol
Limapuluh Kota
Agam
Lintau
Tiku
DANAU MANINJAU
Bukittingi
Padangpanjang
Tanah Datar
LAKE SINGKARAK
Pariaman
Padang
0 100 200 mil
0 100 200 400 km
0 25 50 mil
0 50 100 km
batas negara

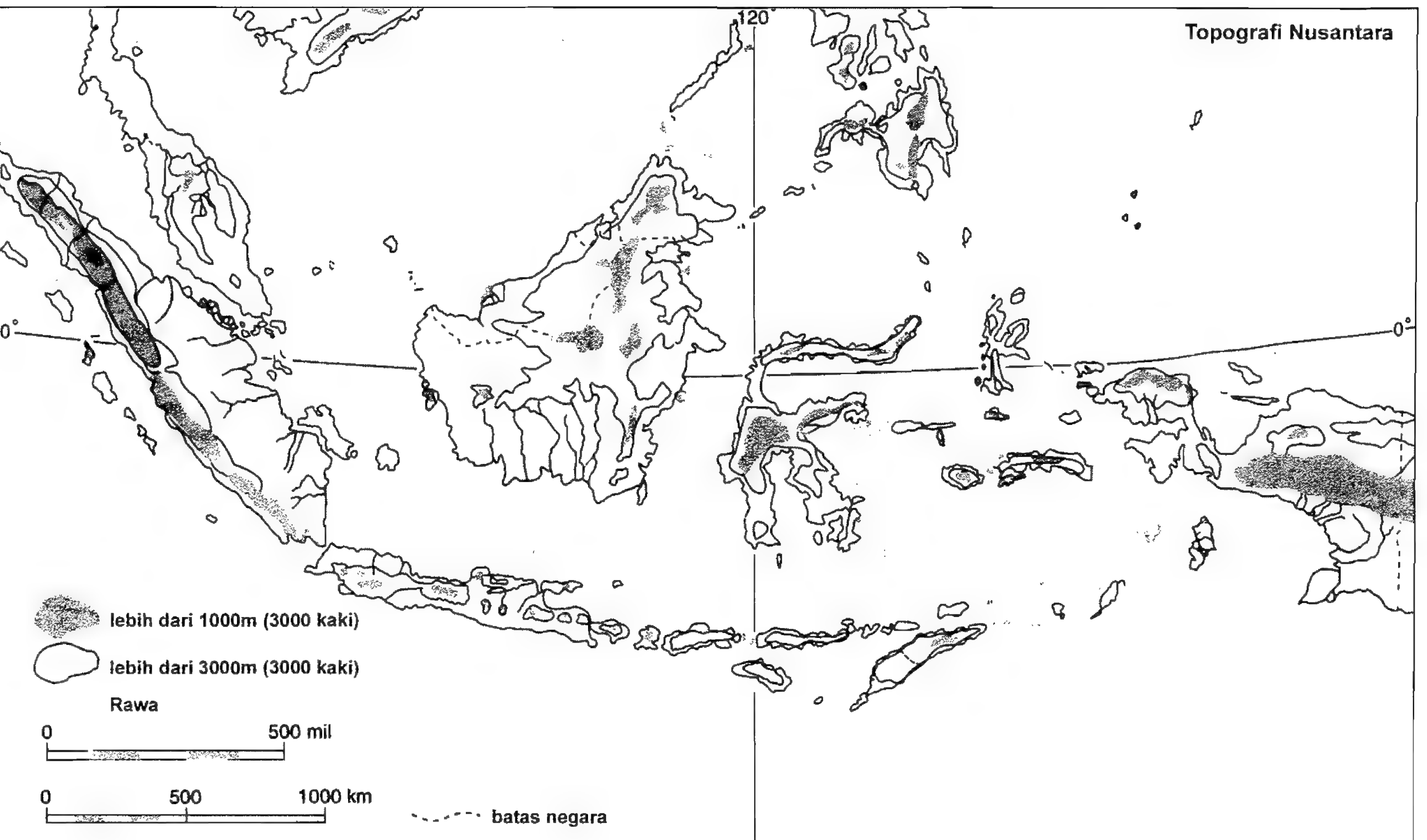

Jawa dan Madura (Bagian A)
108°E
SUMATERA
SELAT SUNDA
Edam
Bantén
Jakarta (Sunda Kalapa, Jayakěrta, Batavia)
SUNGAI CILIWUNG
Bogor (Buitenzorg)
Pajajaran
Rèngasdengklok
Krawang
Indramayu
Cirěbon
Sumědang
Linggajati
Bandung/Ukur
Brěběs
Těgal
Pěmalang
Pěkalongan
Batang
JAWA
Garut
Priangan
Banyumas
Purwakěrta
Gombong
Cilacap
8°S
0 50 100 mi
0 100 200 km
108°E

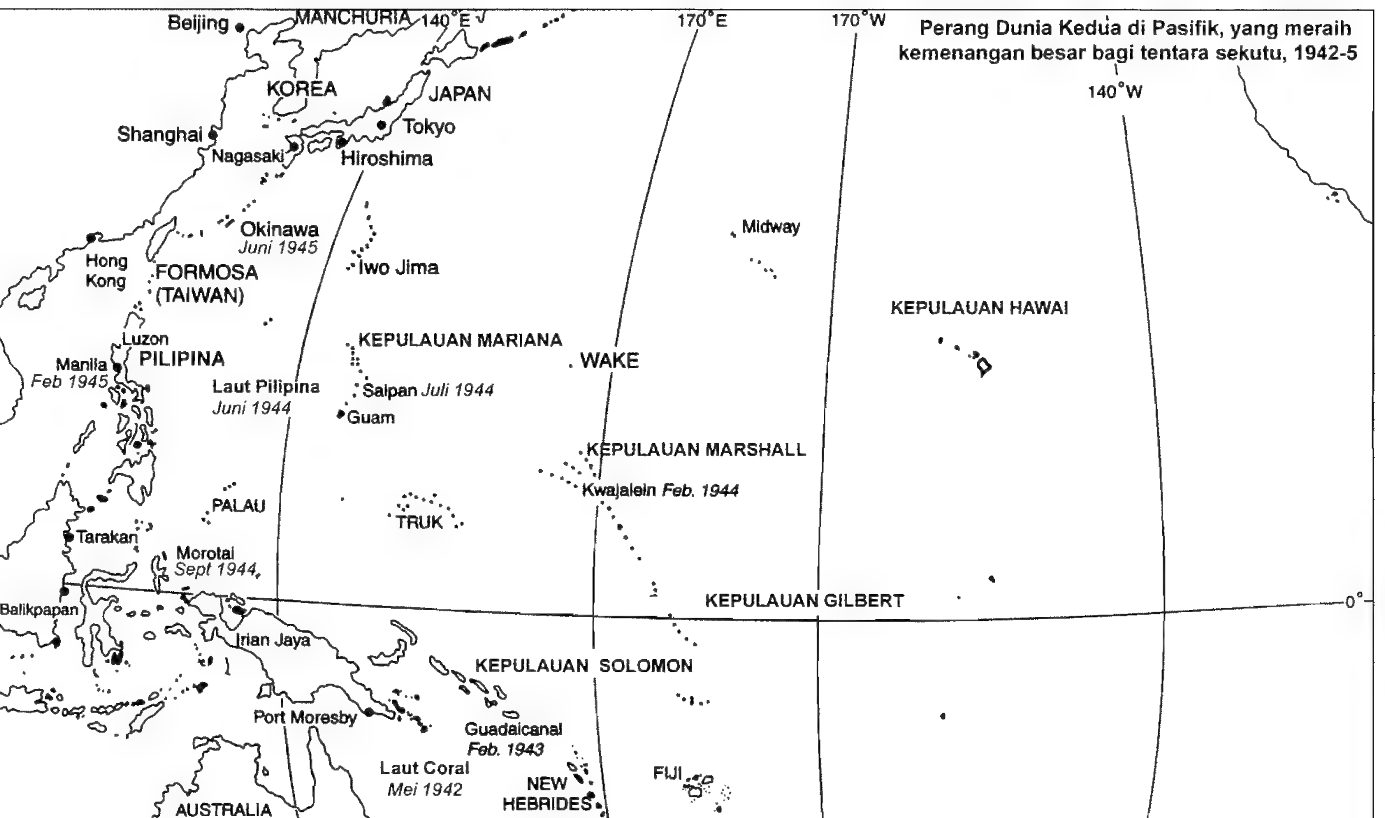

112°E
Jawa dan madura (Bagian B)
Magĕlang
GUNUNG MERBABU
GUNUNG MERAPI
Kaliurang
Surakarta
Kartasura
Siwalan
Pajang
Klaten
Tĕalrĕja
Kajoran
Yogyakarta
Kuta Gĕde
Tĕmbayat
Karta
Plered
Imagiri
0 10 20 mil
0 20 40 km
Jĕpara
Lasĕm
Pati
Juwana
Rĕmbang
Kudus
Dĕmak
Kĕndal
Sĕmarang
Blora
Tuban
Gogodog
Sidayu
MADURA
Sumĕnĕp
Leran
Bangkalan
Pamĕkasan
Purwadadi
Jipang
Grĕsik / Giri
Ambarawa
Salatiga
Surabaya
Sampang
Sungai Sala
GUNUNG MERBABU
JAWA
Japan
Majakĕrta
GUNUNG MERAPI
Sokawati
Jagaraga
Jombang
Majapahit
Kĕpĕr
Magĕlang
Pajang
Surakarta
Giyanti
Magĕtan
Madiun
Wirasaba
Bangil
Trawulan/Tralaya
Mataram
GUNUNG LAWU
Pasuruhan
Panarukan
Yogyakarta
Kĕdiri
Prabalingga
Bĕsuki
(Dĕmung)
GUNUNG PENANGGUNGAN
Panaraga
Sungai Berantas
Malang
Benteng Timur
(Oosthoek)
Jĕmbĕr
8°S
8°S
Blitar
Banyuwangi
Pacitan
BALI
Pugĕr
0 50 100 mil
Balambangan
0 100 200 km
112°E


Bali dan Lombok
115°E
LAUT JAWA
Buleleng
Singaraja
Gilimanuk
Jĕmbrana
BALI
Karangasĕm
Bangli
Tabanan Gianyar
Klungkung
Gelgel
Mĕngwi
Denpasar (Badung)
Pamĕcutan
Sanur
Kuta
NUSA PĔNIDA
8°30'S
LOMBOK
Cakranĕgara
Mataram
SUMBAWA
SAMUDERA HINDIA
0
25
50 mil
0
50
100 km
115°E


Kalimantan
114°E
0
50
100 mil
0
100
200 km
batas negara
Sabah
Brunei
Brunei
MALAYSIA
Tarakan
Sarawak
Kucing
Sambas
Mĕmpawah
Pontianak
0°
Kutai
0°
KALIMANTAN
Samarinda
Sukadana
Balikpapan
Pasir
Kĕtapang
SULAWESI
Amuntai
Kotawaringin
Banjarmasin
Martapura
JAWA
114°E

Indonesia Timur
SERAM
SAPARUA
BANDA
Kapaha
Ambon
HOAMOAL
MANIPA
HITU
AMBON
Namlea
BURU
0 50 100 mil
0 100 200 km
MALAYSIA
Brunai
Sarawak
Sabah
PILIPINA
Jolo
KEPULAUAN SULU
MINDANAO
125°E
TALAUD
SANGIHE
MOROTAI
HALMAHERA
Jailolo
TĚRNATE
TIDORE
BACAN
Mĕnado
Minahasa
Limboto
Gorontalo
Tolitoli
KALIMANTAN
Kutai
Samarinda
Balikpapan
Pasir
Banjarmasin
0°
SULAWESI
Luwu
Sidenreng
Wajo
Supa
Singkang
Bone
Soppeng
Tallo
Malino
Makasar
BANGGAI
SULA
MALUKU
BUTUNG
BURU
SERAM
AMBON
BANDA
Kepulauan Raja Ampat
Kepala Burung
Dampier / Pitt Straits
BIAK
YAPĔN
Lobo
ARU
TANIMBAR
IRIAN JAYA / PAPUA
Digul
Mĕrauke
PAPUA-NEW GUINEA
0°
NUSA TĚNGGARA
MADURA
JAWA
BALI
LOMBOK
SUMBAWA
SUMBA
FLORES
Endeh
SOLOR
ALOR
WETAR
Dili
TIMOR Timur
TIMOR Barat
Kupang
ROTI
SAVU
0 500 mil
0 500 1000 km
batas negara


Topografi Nusantara
120°
0°
0°
lebih dari 1000m (3000 kaki)
lebih dari 3000m (3000 kaki)
Rawa
0
500 mil
0
500
1000 km
batas negara


Perang Dunia Kedua di Pasifik, yang meraih
kemenangan besar bagi tentara sekutu, 1942-5
Beijing
MANCHURIA
140°E
170°E
170°W
140°W
KOREA
JAPAN
Tokyo
Shanghai
Nagasaki
Hiroshima
Okinawa
Juni 1945
Iwo Jima
Midway
Hong
Kong
FORMOSA
(TAIWAN)
KEPULAUAN HAWAI
Luzon
Manila
Feb 1945
PILIPINA
KEPULAUAN MARIANA
WAKE
Laut Pilipina
Juni 1944
Saipan Juli 1944
Guam
KEPULAUAN MARSHALL
Kwajalein Feb. 1944
PALAU
TRUK
Tarakan
Morotai
Sept 1944
KEPULAUAN GILBERT
0°
Balikpapan
Irian Jaya
KEPULAUAN SOLOMON
Port Moresby
Guadalcanal
Feb. 1943
Laut Coral
Mei 1942
NEW
HEBRIDES
FIJI
AUSTRALIA

Bibliografi

Catatan: Karya-karya berikut didaftar secara alfabetis menurut nama penulis/penyuntingnya.

Singkatan-singkatan Jurnal

AS	Asian Survey
BEFEO	Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient
BIES	Bulletin of Indonesian Economic Studies
BKI	Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
BSOAS	Bulletin of the School of Oriental and African Studies
JAS	Journal of Asian Studies
JMBRAS	Journal of the Malaysian Branch, Royal Asiatic Society
JSEAH	Journal of Southeast Asian History
JSEAS	Journal of Southeast Asian Studies
MAS	Modern Asian Studies
MIISI	Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia
RIMA	*Review of Indonesian and Malayan Affairs*
SI	Studia Islamika
TBG	Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde uitgegeven door het (Koninklijk) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
VBG	Verhandelingen van het (Koninklijk) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
VKI	Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

Abdullah, Taufik. "Adat and Islam: an examination of conflict in Minangkabau". *Indonesia*, no. 2 (Okt. 1966), hal. 1–24.

——— *Schools and politics: the Kaum Muda movement in West Sumatra (1927–1933)*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1971.

——— dan Sharon Siddique (ed.). *Islam and society in Southteast Asia.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1986.

Abdurachman, Paramita R. "Atakiwan, casados and tupassi: Portuguese settlements and Christian communities dalam Solor and Flores (1536–1630)". *Masyarakat Indonesia*, vol. 10, no. 1 (1983), hal. 83–117.

——— "Moluccan responses to the first intrusions of the West", hal. 161–88 dalam Soebadio dan Sarvaas (ed.), *Dynamics of Indonesian history* (lihat di bawah).

——— *et al.* (ed.). *Bunga rampai sejarah Maluku (I)*. Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku, 1973.

Abeyasekere, Susan. *Jakarta: a history*. Singapore, dll.: Oxford University Press, 1987.

——— *One hand clapping: Indonesian nationalists and the Dutch, 1939–1942* [Clayton, Victoria:] Monash Papers on Southeast Asia no. 5, 1976.

——— "Partai Indonesia Raja, 1936–42: a study in cooperative nationalism". *JSEAS*, vol. 3, no. 2 (Sept. 1972), hal. 262–76.

——— "The Soetardjo petition". *Indonesia*, no. 15 (Apr. 1973), hal. 81–107.

Adam, Ahmat B. *The vernacular press and the emergence of modern Indonesian consciousness (1855–1913)*. Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1995.

Ahmad Bahar, *Biografi kiai politik: Abdurrahman Wahid.* Jakarta: Penerbit Bane Utama, 1999.

Akkeren, Philip van. *Sri and Christ: a study of the indigenous church in East Java.* London: Lutterworth, 1970.

Alfian, Teuku Ibrahim. "Acheh Sultanate under Sultan Mohammad Daudsyah and the Dutch war", hal. 147–66 dalam Kartodirdjo, *Profiles* (lihat di bawah).

——— *Perang di jalan Allah: Perang Aceh 1873–1912*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Ali, Fachry. *Esai politik tentang Habibie: iptek dan transformasi kekuasaan.* Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Allen, G. C., dan Audrey G. Donnithorne. *Western enterprise in Indonesia and Malaya: a study in economic development.* London: Allen & Unwin, 1957.

Anak Agung Gde Agung, Ide. *Bali pada abad XIX. Perjuangan rakyat dan raja-raja menentang kolonialisme Belanda 1808–1908.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

Andaya, Barbara Watson. *To live as brothers: southeast Sumatra in the seventeenth and eighteenth centuries.* Honolulu: University of Hawai'i Press, 1993.

Andaya, Leonard Y. *The heritage of Arung Palakka: a history of South Sulawesi (Celebes) in the seventeenth century. VKI,* vol. 91. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1981.

——— *The kingdom of Johor, 1641–1728.* Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1975.

——— "The nature of kingship in Bone", hal. 115–25 dalam Reid dan Castles (ed.), *Precolonial state systems* (lihat di bawah).

——— *The world of Maluku: Eastern Indonesia in the early modern period.* Honolulu: University of Hawai'i Press, 1993.

Anderson, B. R. O'G. "How did the Generals die?" *Indonesia* no. 43 (Apr. 1987), hal. 109–34.

——— "Japan: 'The light of Asia'", hal. 13–50 dalam Josef Silverstein (ed.). *Southeast Asia in World War II: four essays.* [New Haven: Yale University Southeast Asian Studies Monograph Series no. 7, 1966.

——— *Java in a* time *of revolution: occupation and resistance, 1944–1946.* Ithaca: Cornell University Press, 1972.

——— *Some aspects of Indonesian politics under the Japanese occupation, 1944–1945.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Interim Reports Series, 1961.

Anderson, David Charles. "The military aspects of the Madiun affair". *Indonesia* no. 21 (Apr. 1976), hal. 1–63.

Anwar, Dewi Fortuna. *Indonesia in ASEAN: foreign policy and regionalism.* Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan; Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1994.

Arndt, H.W. "Transmigration: achievements, problems, prospects". *BIES* vol. 19, no. 3 (Des. 1983), hal. 50–73.

Arsip Nasional Republik Indonesia. *Ikhtisar keadaan politik Hindia-Belanda, tahun 1839–1848.* Jakarta: Arsip Nasional RI, 1973.

——— *Laporan politik tahun 1837 (Staatkundig overzicht van Nederlandsch Indië 1837).* Djakarta: Arsip Nasional RI, 1971.

Aswab Mahasin (ed.). "Islam in Indonesia: in search of a new image". *Prisma: the Indonesian Indicator* no. 35 (Mar. 1985).

Atja (ed. & penj.). *Carita Purwaka Caruban Nagari: karya sastra sebagai sumber pengetahuan sejarah.* Edisi ke-2 yang direvisi. [Bandung:] Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1986.

Attas, Muhammad Naguib al-. *The mysticism of Hamzah Fansuri.* Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1970.

——— *Raniri and the Wujudiyyah of 17th century Acheh.* Singapore: Monographs of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 3,1966.

Aziz, M.A. *Japan's colonialism and Indonesia.* Den Haag: Martinus Nijhoff, 1955.

Azra, Azyumardi. *Konteks berteologi di Indonesia: pengalaman Islam.* Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.

——— "Opposition to Sufism in the East Indies in the seventeenth and eighteenth centuries", hal. 665–86 dalam Frederik de Jong dan Bernd Radtke (ed.). *Islamic mysticism contested: thirteen centuries of controversies and polemics.* Leiden, dll.: Brill, 1999.

——— *The transmission of Islamic reformism to Indonesia: networks of Middle Eastern and Malay-Indonesian 'ulama' in the seventeenth and eighteenth centuries.* Segera terbit.

Bachtiar, Harsja W. "Raden Saleh: aristocrat, painter, and scientist". *MIISI* vol. 6, no. 3 (Aug. 1976), hal. 31–79.

Bakker, Freek L. "Balinese Hinduism and the Indonesian state: recent developments". *BKI* vol. 153, no. 1 (1997), hal. 15–41.

Bakker, H. "Het economisch belang van Noord-Sumatra tijdens de Atjehoorlog, 1873–1910", hal. 41–65 dalam A. H. P. Clemens dan J. Th. Lindblad (ed.). *Het belang van de buitengewesten: economische expansie en koloniale staatsvorming in de buitengewesten van Nederlands-Indie, 1870–1942.* Amsterdam: NEHA, 1989.

Bambang Pranowo. "Islam and party politics in rural Java". *SI* vol. 1, no. 2 (1994), hal. 1–19.

Barnes, R.H. "Avarice and iniquity at the Solor fort". *BKI* vol. 143, no. 2–3 (1987), hal. 208–36.

Baroroh Baried. "Islam and the modernization of Indonesian women", hal. 139–54 dalam Abdullah dan Siddique (ed.). *Islam and society in Southeast Asia* (lihat di atas).

Barton, Greg. "Neo-Modernism: a vital synthesis of traditionalist and Modernist Islamic thought in Indonesia". *SI* vol. 2, no. 3 (1995), hal. 1–75.

Bastin John. *The native policies of Sir Stamford Raffles in Java and Sumatra: an economic interpretation.* Oxford: Clarendon, 1957.

——— *Ralfles' ideas on the land rent system in Java and the Mackenzie land tenure commission.* VKI vol. 14. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1954.

Bayly, C.A., dan D.H.A. Kolff (ed.). *Two colonial empires: comparative essays on the history of India and Indonesia in the nineteenth century.* Dordrecht & Boston: M. Nijhoff, 1986.

Beasley, W.G. *The rise of modern japan.* New York: St Martin's Press (sekarang Palgrave); London: Weidenfeld & Nicolson, 2000.

Behrend, T.E. "The writings of K.P.H. Suryanagara: shifting paradigms in nineteenthcentury Javanese thought and letters". *BKI* vol. 155, no. 3 (1999), hal. 390–415.

Benda, Harry J. *The crescent and the rising sun: Indonesian Islam under the Japanese occupation, 1942–1945.* Den Haag dan Bandung: W. van Hoeve, 1958.

——— dan Lance Castles. "The Samin movement". *BKI* vol. 125, no. 2 (1969), hal. 207–40.

Berg, C.C. *Het rijk van de vijfvoudige Buddha.* (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, vol. 69, no. 1) Amsterdam: NV Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1962.

——— "Twee nieuwe publicaties betreffende de geschiedenis en de geschiedschrijving van Mataram". *Indonesië* vol. 8 (1955), hal. 97–128.

Bezemer, T.J. (ed). *Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië naar den tweeden druk der encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.* 's-Gravenhage dan Leiden: Martinus Nijhoff & E.J. Brill, 192 1.

Bijleveld, J. "De Saminbeweging". *Koloniaal Tijdschrift* vol. 12 (1923), hal. 10–24.

Bijlmer, Joseph Johannes Maria. *Ambulante straatberoepen in Surabaya: een studie naar kleinschalige economische activiteiten.* Vrije Universiteit te Amsterdam doctoral thesis. Amsterdam: VU Uitgeverij, 1987.

Biro Pusat Statistik. *Beberapa ciri pemeluk agama di Indonesia 1980.* Jakarta: Biro Pusat Statistik, Bagian Statistik Kesejahteraan Rakyat, [1984].

——— *Sensus Penduduk 1971.* 33 jld. Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1971–5.

——— *Statistik Indonesia 1986.* Jakarta, 1987.

Blussé, Leonard. *Strange company: Chinese settlers, mestizo women and the Dutch in VOC Batavia. VKI* vol. 122. Dordrecht & Riverton: Foris, 1986.

Boers, Bernice de Jong "Mount Tambora in 1815: a volcanic eruption in Indonesia and its aftermath". *Indonesia* no. 60 (Feb. 1996), hal. 36–60.

Boland, B. J. *The struggle of Islam in modern Indonesia. VKI* vol. 59. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1971.

Bone, Robert C., Jr. *The dynamics of the Western New Guinea (Irian Barat) problem.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Interim Reports Series, 1958.

Boomgaard, Peter. *Children of the colonial state: population growth and economic development in Java, 1795–1880.* Amsterdam: Free University Press, 1989.

——— "The welfare services in Indonesia, 1900–1942". *Itinerario* vol. 10, no. 1 (1986), hal. 57–8 1.

Booth, Anne. *Agricultural development in Indonesia.* Sydney, dll.: Allen & Unwin, 1988.

——— *The economic development of Southeast Asia, 1870–1985.* Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies Working Paper 63, 1990.

——— *The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries: a history of missed opportunities.* Basingstoke dan London: Macmillan (now Palgrave) in association with the Australian National University, Canberra, 1998.

——— "Living standards and the distribution of income in colonial Indonesia: a review of the evidence". *JSEAS* vol. 19, no. 2 (Sept. 1988), hal. 310–34.

——— "The state and economic development in Indonesia: the ethical and new order eras compared", hal. 111–26 dalam R. J. May dan William J. O'Malley (ed.). *Observing change in Asia: essays in honour of J. A. C. Mackie.* Bathurst: Crawford House, 1989.

——— dan Peter McCawley (ed.). *The Indonesian economy during the Soeharto era.* Kuala Lumpur, dll.: Oxford University Press, 1981.

Booth, Anne *et al.* (ed.). *Indonesian economic history in the Dutch colonial era.* New Haven: Yale University South-East Asia Studies Monograph Series 35, 1990.

Bootsma, N. A. *Buren in de koloniale tijd: de Philippijnen order Amerikaans bewind en de Nederlandse, Indische en Indonesische reacties daarop, 1898–1942. VKI vol.* 119. Dordrecht and Riverton: Foris, 1986.

Bougas, Wayne A. "Bantayan: an early Makasarese kingdom, 1200–1600 A.D." *Archipel* no.55 (1998), hal. 83–123.

Bouman, B. *Van driekleur tot rood-wit: de Indonesische officieren uit het KNIL,* 1900–1950. tesis doktor pada Leiden University, 1995.

Bowen, John R. *Sumatran politics and poetics: Gayo history, 1900–1989.* New Haven dan London: Yale University Press, 1991.

Boxer, C.R. *The Dutch seaborne empire, 1600–1800.* London: Hutchinson, 1965; Harmondsworth: Penguin, 1973.

——— *The Portuguese seaborne empire, 1415–1825.* New York: Alfred A. Knopf, 1969.

Brand, W. "Some statistical data on Indonesia". *BKI,* vol. 125, no. 3 (1969), hal. 305–27.

Brandes, J. L. A. (ed. & penj.). *Pararalon (Ken Arok) of het boek der koningen van Tumapel, en van Majapahit.* Edisi ke-2, ed. N.J. Krom. *VBG* vol. 62 (1920).

Brandon, James R. (ed.). *On thrones of gold: three Javanese shadow plays.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970.

Breman, Jan. *Control of land and labour in colonial Java: a case study of agrarian crisis and reform in the region of Cirebon during the first decades of the 20th centuiy. VKI* vol. 101. Dordrecht and Cinnaminson, NJ: Foris, 1983.

Brown, C. C. (penj.). *Sejarah Melayu or Many annals.* Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1970. Pertama diterbitkan dalam *JMBRAS* vol. 25, pts. 2–3 (Okt. 1952).

Brug, P. H. van der. *Malaria en malaise: de VOC in Batavia in de achtiende eeuw.* Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1994.

Brugmans, I. J. *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indie.* Groningen dan Batavia: J. B. Wolters" Uitgevers-Maatschappij NV, 1938.

Bruijn, J. R., *et al.* (ed.). *Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries* (1595–1795). 3 jld. Den Haag, dll.: Martinus Nijhoff, 1979–87.

Bruinessen, Martin van. "Bukankah orang Kurdi yang mengislamkan Indonesia?" *Pesantren* vol. 4, no. 4 (1987), hal. 43–53.

——— "Controversies and polemics involving the Sufi orders in twentieth-century Indonesia", hal. 705–28 dalam Frederik de Jong dan Bernd Radtke (ed.). *Islamic mysticism contested: thirteen centuries of controversies and polemics.* Leiden, dll.: Brill, 1999.

——— "Indonesia's ulama and politics: caught between legitimising the status quo and searching for alternatives". *Prisma* no. 49 June 1990), hal. 52–69.

——— "Muslims of the Dutch East Indies and the Caliphate question". *SI* vol. 2, no. 3 (1995), p p. 115–40.

——— *NU: tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru.* Yogyakarta: LKIS & Pustaka Pelajar, 1994.

——— "The origins and development of the Naqshbandi order in Indonesia". *Der Islam* vol. 67, bag. 1 (1990), hal. 150–79.

——— "The origins and development of Sufi orders *(tarekat)* in Southeast Asia". *SI* vol. 1, no. 1 (Apr.–June 1994), hal. 1–23.

——— *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: survei historis, geografis don sosiologis.* Peng. Hamid Algar. Bandung: Penerbit Mizan, 1992.

Bunnell, Frederick P. "The Central Intelligence Agency – Deputy Directorate for Plans 1961 secret memorandum on Indonesia: a study in the politics of policy formulation in the Kennedy administration". *Indonesia* no. 22 (Okt. 1976), hal. 131–69.

Bunnell, Frederick P. "Guided democracy foreign policy: 1960–1965". *Indonesia* no. 2 (Okt. 1966), hal. 37–76.

Burger, D. H. *Sociologisch-economische geschiedenis van Indonesia*. Peng. J.S. Wigboldus. 2 jld. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen; Wageningen: Landbouwhogeschool; Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkunkunde, 1975.

Campo, J.N.F.M.à. *Koninklijk Paketvaart Maatschappij: stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel, 1888–1914.* Hilversum: Verloren, 1992.

Carey, P. B. R. "The Catholic Church, religious revival and the nationalist movement in East Timor, 1975–98". *Indonesia and the Malay world* vol. 27, no. 78 (1999), hal. 77–95.

——— "Changing Javanese perceptions of the Chinese communities in Central Java, 1755–1825". *Indonesia* no. 37 (Apr. 1984), hal. 1–47.

——— "The origins of the Java War (1825–30)". *English Historical Review* vol. 91, no. 358 (Jan. 1976), hal. 52–78.

——— "Pangeran Dipanagara and the making of the Java War". Disertasi doktor yang tidak diterbitkan, Oxford University, 1975.

——— "Raden Saleh, Dipanagara and the painting of the capture of Dipanagara at Magelang". *JMBRAS* vol. 55, bag. 1 (1982), hal. 1–25.

——— "Satria and santri: sonic notes on the relationship between Dipanagara's kraton and religious supporters during the Java War (1825–30)", hal. 271–318 dalam lbrahim Alfian et al. (ed.). *Dari babad don hikayat sampai sejarah kritis: kumpulan karangan dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.

——— "The sepoy conspiracy of 1815 in Java". *BKI* vol. 133, no. 2–3 (1977), hal. 294–322.

——— "Waiting for the 'Just king': the agrarian world of South-Central Java from Giyanti (1755) to the Java War (1825–30)". *MAS* vol. 20, bag. 1 (Feb. 1986), hal. 59–137.

——— dan G. Carter Bentley (ed.). *East Timor at the crossroads: the forging of a nation*. London: Cassell, SSRC, 1995.

Carlson, Sevinc. *Indonesia's oil*. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, Georgetown University, 1976. Reprinted Boulder, Colo.: Westview, 1977.

Casparis, J.G. de. "Ahmat Majanu's tombstone at Pengkalan Kempas and its Kawi inscription". *JMBRAS* vol. 53, bag. 1 (1980), hal. 1–22.

Castles, Lance. *Religion, politics and economic behavior in Java: the Kudus cigarette industry*. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies Cultural Report Series no. 15, 1967.

——— "Statelessness and stateforming tendencies among the Bataks before colonial rule", hal. 67–76 dalam Reid dan Castles, *Pre-colonial state systems* (lihat di bawah).

Cense, A. A. "Old Buginese and Macassarese diaries". *BKI* vol. 122, no. 4 (1966), hal. 416–28.

Chaidar, Al-. *Pemikiran politik proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosoewirjo: fakta dan data sejarah DaruI Islam* [Jakarta:] Penerbit Buku Islam Kaffah, 1420/1999.

Chambert-Loir, Henri. "Bibliographic de la litterature malaise en traduction". *BEFEO* vol. 62 (1975), hal. 395–439.

——— "La demographie indonesienne". *Archipel* no. 51 (1996), hal. 29–34.

Chauvel, Richard. *Nationalists, soldiers and separatists: the Ambonese islands from colonialism to revolt, 1880–1950. VKI* vol. 143. Leiden: KITLV, 1990.

Chen Dasheng. "Une pierre tombale du debut du XIVe siecle retrouvee A Brunei". *Archipel* no. 42 (1991), hal. 47–52.

Chusnul Hajati. "The tragedy of Cimareme: the resistance of Haji Hasan to the colonial power in 1919". *SI* vol. 3, no. 2 (1996), hal. 59–84.

Goedès, George. *Les états hindouisés d'Indochine et d'Indonésie*. New edn. Paris: Editions E. de Boccard, 1964.

——— *The Indianized states of Southeast Asia*. Penj. Susan Brown Cowing, ed. Waiter F. Vella. Honolulu: East-West Center Press, 1968.

Colbert, Evelyn. *Southeast Asia in international politics, 1941–1956.* Ithaca dan London: Cornell University Press, 1977.

Colenbrander, H.T., dan W.Ph. Coolhaas (ed.). *Jan Pietersz. Coen: bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië.* 7 jld. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919–53.

Coolsma, S. *De zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië.* Utrecht: G. H. E. Breijer, 1901.

Coppel, Charles A. *Indonesian Chinese in crisis.* Kuala Lumpur, dll.: Oxford University Press, 1983.

Cortesao, Armando (ed. & penj.). *The Suma Oriental of Tome Pires and the book of Francisco Rodrigues.* 2 jld. London: Hakluyt Society, 1944.

Creese, Helen. "Balinese *babad* as historical sources: a reinterpretation of the fall of Gelgel". *BKI* vol. 147 (1991), no. 2–3, hal. 236–60.

——— "Chronologies and chronograms: an interim response to Hägerdal". *BKI* vol. 151, no. 1 (1995), hal. 125–31.

Cribb, Robert. *Gangsters and revolutionaries: the Jakarla people's militia and the Indonesian Revolution, 1945–1949.* North Sydney: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin, 1991.

——— (ed.). *The Indonesian killings of 1965–1966: studies from Java and Bali.* Monash Papers on Southeast Asia no. 21. Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, 1990.

——— *The late colonial state in Indonesia: political and economic foundations of the Netherlands Indies, 1880–1942.* Leiden: KITLV, 1994.

Crouch, Harold. *The army and politics in Indonesia.* Ithaca dan London: Cornell University Press, 1978.

Dahm, Bernard. *Sukarno and the struggle for Indonesian independence.* Penj. Mary F. Somers Heidhues. Ithaca dan London: Cornell University Press, 1969.

——— *Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhängigkeit: Werdegang und Ideen eines asiatischen Nationalisten.* Berlin dan Frankfurt am Main: Alfred Metzner Verlag, 1966.

Damais, Louis-Charles. "L'epigraphie musulmane dans le Sud-Est Asiatique". *BEFEO* vol. 54 (1968), hal. 567–604.

——— "Études javanaises, I: Les tombes musulmanes datées de Trålåjå". *BEFEO* vol. 48, bag. 2 (1957), hal. 353–415.

Departmente van Landbouw, Nijverheid en Handel and Departement van Economische Zaken. *Volkstelling 1930/Census of 1930 in the Netherlands Indies.* 8 jld. Batavia: Landsdrukkerij, 1933–6.

Deventer, C.Th. van. *Overzicht van den economischen toestand der inlandsche bevolking van Java en Madoera.* Den Haag: Martinus Nijhoff, 1904.

Dewantara, Ki Hadjar. *Beoefening van letteren en kunst in het Pakoe-Alamsche geslacht.* Djokjakarta: H. Buning, 1931.

Dhakidae, Daniel (ed.). "Manusia dan agama: mencari ufuk baru". *Prisma* vol. 7, no. 5 (June 1978).

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi pesantren: studi tentang pandangan hidup kyai.* Jakarta: LP3ES, 1982.

Diffie, Bailey W., dan George D. Winius. *Foundations of the Portuguese empire, 1415–1580.* Minneapolis: University of Minnesota Press dan Oxford University Press, 1977.

Dijk, C. van. *Rebellion under the banner of Islam: the Darul Islam in Indonesia. VKI* vol. 94. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1981.

Din Syamsuddin, M. "The Muhammadiyah da'wah and allocative politics in the New Order Indonesia". *SI* vol. 2, no.2 (1995), hal. 35–71.

Djajadiningrat, Hoesein. "Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh". *BKI* vol. 65 (1911), hal.135–265.

——— *Critische beschouwing van de Sadjarah Bantn bijdrage ter kenschetsing van de Javaansche geschiedschrijving* Haarlem: job. Enschedé en Zones, 1913.

Djoko Suryo. "Economic crisis and its impact on rural Java: a case study of the Semarang residency in the latter half of the 19th century", hal. 115–30 dalam Taufik Abdullah dan Sartono Kartodirdjo (ed.). *Papers of the fourth Indonesian-Dutch history conference, 24–29 July 1983.* 2 jld. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.

——— *Sejarah sosial pedesaan Karesidenan Semarang 1830–1900.* Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Stuck Sosial, Universitas Gadjah Mada, 1989.

Dobbin, Christine. "Accounting for the failure of the Muslim Javanese business class: examples from Ponorogo and Tulungagung (1880–1940)". *Archipel* no. 48 (1994), hal. 87–101.

——— "Economic change in Minangkabau as a factor in the rise of the Padri movement, 1784–1830". *Indonesia* no. 23 (Apr. 1977), hal. 1–38.

——— "Islamic fervour as a manifestation of regional personality in colonial Indonesia: the Kamang area, West Sumatra, 1803–1908". *Archipel* no. 56 (1998), hal. 295–317.

——— *Islamic revivalism in a changing peasant economy: central Sumatra, 1784–1847.* London dan Malmo: Curzon, 1983.

——— "Islamic revivalism in Minangkabau at the turn of the nineteenth century". *MAS* vol. 8, no. 3 (1974), hal. 319–45.

——— "Tuanku Imam Bondjol (1772–1864)". *Indonesia* no. 13 (Apr. 1972), hal. 5–35.

Doel, H.W. van den. *De stille macht: het Europese binnenlandse bestuur op Java en Madoera, 1808–1942*. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1994.

Dolk, Liesbeth. *Twee zielen, twee gedachten: tijdschriften en intellectuellen op Java (1900/1957)*. *VKI* vol. 159. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1993.

Drakard, Jane. *A kingdom of words: language and power in Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1999.

——— *A Malay frontier: unity and duality in a Sumatran kingdom*. Ithaca: Studies on Southeast Asia, Southeast Asia Program, Cornell University, 1990.

Drake, Christine. *National integration in Indonesia: patterns and policies*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1989.

Drewes, G.W.J. (ed. & penj.). *The admonitions of Seh Bari*. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1969.

——— (ed. dan penj.). *An early Javanese code of Muslim ethics*. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1978.

——— *Drie Javaansche goeroe's: bun leven, onderricht en messiasprediking*. Leiden: Drukkerij A. Vros, 1925.

——— (ed. & penj.). *Een Javaanse primbon uit de zestiende eeuw*. Leiden: E.J. Brill, 1954.

——— "New light on the coming of Islam to Indonesia?" *BKI* vol. 124, no. 4 (1968), hal. 433–59.

——— "Nur al-Din al-Raniri's charge of heresy against Hamzah and Shamsuddin from an international point of view", hal. 54–9 dalam Grijns dan Robson (ed.), *Cultural contact* (lihat di bawah).

——— "The struggle between Javanism and Islam as illustrated by the Serat Dermagandul". *BKI* vol. 122, no. 3 (1966), hal. 309–65.

——— dan L.F. Brakel (ed. dan penj.) *The Poems of Hamzah Fansuri*. Dordrecht and Cinnaminson: Foris, 1986.

Drooglever, P.J. *De Vaderlandse Club 1929–1942: totoks en de Indische politiek*. Franeker: Uitgeveriji T. Wever BV, 1980.

Dunn, James. *Timor: a people betrayed*. Milton, Qld.: Jacaranda, 1983.

Edmundson, Wade C. "Do the rich get richer, the poor get poorer? East Java, two decades, three villages, 46 people". *BIES* vol. 30, no. 2 (Aug. 1994), hal. 133–48.

Ekadjati, E. Suhardi. *Ceritera Dipati Ukur: karya sastra sejarah Sunda*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1982.

Elsbree, Willard H. *Japan's role in Southeast Asian nationalist movements, 1940 to 1945*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1953.

Elson, Robert. *The end of the peasantry in Southeast Asia: a social and economic history of peasant livelihood, 1800–1990s*. Basingstoke, dll.: Macmillan (now Palgrave) in association with the Australian National University, Canberra, 1997.

——— "The famine in Demak and Grobogan in 1849–50: its causes and circumstances". *RIMA* vol. 19, no. 1 (Winter 1985), hal. 39–85.

——— "The impact of government sugar cultivation in the Pasuruan area, East Java, during the cultivation system period". *RIMA* vol. 12, no. 1 (June 1978), hal. 26–55.

——— *Javanese peasants and the colonial sugar industry: impact and change in an East Java residency, 1830–1940*. Singapore, dll.: Oxford University Press, 1984.

——— *Village Java under the cultivation system 1830–1870*. Sydney: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin, 1994.

Emmerson, Donald K. (ed.). *Indonesia beyond Suharto: polity, economy, society, transition*. Armonk, NY, dan London: M. E. Sharpe, 1999.

Ensering, Else. "Afdeeling B of Sarekat Islam: a rebellious Islamic movement", hal. 99–122 dalam Kooiman dan van der Veer (ed.), *Conversion, competition and conflict* (lihat di bawah).

Erni Haryanti Kahfi. "Islam and Indonesian nationalism: the political thought of Haji Agus Salim". *SI* vol. 4, no. 3 (1997), hal. 1–63.

Fasseur, C. "The cultivation system and its impact on the Dutch colonial economy and the indigenous society in nineteenth-century Java", hal. 137–54 dalam Bayly dan Kolff (ed.), *Two colonial empires* (lihat di atas).

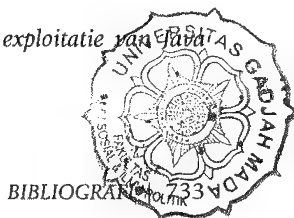
——— "Een koloniale paradox: de Nederlandse expansie in de Indonesische archipel in het midden van de negentiende eeuw (1830–1870)". *Tijdschrift voor Geschiedenis* vol. 92 (1979), hal. 162–86.

—— (ed.). *Geld en geweten: een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands besluur in de Indonesische archipel*. 2 jld. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1980.

——— *Indischgasten*. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1997.

——— *De Indologen: Ambtenaren voor de oost, 1825–1950*. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1993.

——— *Kultuurstelsel en koloniale baten: de Nederlandse exploitatie van Java 1840–1860*. Leiden: Universitaire Pers, 1975.



——— "Nederland en het Indonesische nationalisme: de balans nog eens opgemaakt". *Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden* vol. 99, no. 1 (1984), hal. 21–44.

—— "Organisatie en sociaal-economische betekenis van de gouvernements-suikerkultuur in enkele residenties op Java omstreeks 1850". *BKI* vol. 133, no. 2–3 (1977), hal. 261–93.

——— *The politics of colonial exploitation: Java, the Dutch and the cultivation system*. Penj. R.E. Elson dan Ary Kraal. Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1992.

——— "Purse or principle: Dutch colonial policy in the 1860s and the decline of the cultivation system". *MAS* vol. 25 no. 1 (1991), hal. 33–52.

Fealy, Greg. *The release of Indonesia's political prisoners: domestic versus foreign policy, 1975–1979*. Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies Working Paper 94, 1995.

Federspiel, Howard M. "The Muhammadijah: a study of an orthodox Islamic movement in Indonesia". *Indonesia* no. 10 (Okt. 1970), hal. 57–79.

——— *Persatuan Islam: Islamic reform in twentieth century Indonesia*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1970.

Feillard, Andree. "Indonesia's emerging Muslim feminism: women leaders on equality, inheritance and other gender issues". *SI* vol. 4, no. 1 (1997), hal. 83–111.

——— *Islam et armee dans l'Indonesie contemporaine: les pionniers de la tradition*. Cahier d'Archipel 28. Paris: Editions l'Harmattan, Association Archipel, 1995.

——— "Traditionalist Islam and the state in Indonesia: the road to legitimacy and renewal", hal. 129–53 dalam Robert W. Hefner dan Patricia Horvatich (ed.). *Islam in an era of nation-states: politics and religious renewal in Muslim Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1997.

Feith, Herbert. *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1962.

——— "Dynamics of guided democracy", hal. 309–409 dalam McVey (ed.), *Indonesia* (lihat di bawah).

——— "Indonesia", hal. 183–278 dalam George McTurnan Kahin (ed.). *Governments and politics of Southeast Asia*. Edisi ke-2. Ithaca: Cornell University Press, 1964.

——— dan Lance Castles (ed.). *Indonesian political thinking, 1945–1965*. Ithaca dan London: Cornell University Press, 1970.

Fifield, Russell H. *The diplomacy of Southeast Asia, 1945–1958*. New York: Harper & Row, 1958. Reprinted [Hamden, Conn.:] Archon, 1968.

——— *Southeast Asia in United States policy*. New York: Praeger, 1963.

Fisher, Charles A. *South-East Asia: a social, economic and political geography.* London: Methuen; New York: E. P. Dutton, 1964.

Florida, Nancy. *Writing the past, inscribing the future: history asprophecy in colonial Java*. Durham [NC] dan London: Duke University Press, 1995.

Forrester, Geoff, dan R. J. May (ed.). *The fall of Soeharto*. Singapore: Select 1999.

Foulcher, Keith R. *"Pujangga Baru": literature and nationalism in Indonesia 1933–1942* [Adelaide:] Flinders University Asian Studies Monograph no. 2, 1980.

——— *Social commitment in literature and the arts: the Indonesian 'Institute of People's Culture' 1950–1965*. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1986.

——— "A survey of events surrounding 'Manikebu': the struggle for cultural and intellectual freedom in Indonesian literature". *BKI* vol. 125, no. 4 (1969), hal. 429–65.

Fox, James J. *Harvest of the palm: ecological change in eastern Indonesia*. Cambridge, Mass. dan London: Harvard University Press, 1977.

Franca, Antonio Pinto da. *Portuguese influence in Indonesia*. Djakarta: Gunung Agung, 1970.

Frederick, William H. *Visions and heal: the making of thė Indonesian Revolution*. Athens: Ohio University Press, 1989.

Friend, Theodore. *The blue-eyed enemy: Japan against the West in Java and Luzon, 1942–1945*. Princeton: Princeton University Press, 1988.

Furnivall, J. S. *Colonial policy and practice: a comparative study of Burma and Netherlands India*. Cambridge University Press, 1948.

——— *Netherlands India: a study of plural economy.* Peng. oleh A.C.D. de Graeff. Cambridge University Press, 1939. Reprinted 1967.

Geertz, Clifford. *The religion of Java*. Glencoe: Free Press, 1960.

Gelderen, J. van. *The recent development of economic foreign policy in the Netherlands East Indies.* London, dll.: Longmans, Green, 1939.

Gerretson, [F.] C. *Geschiedenis der 'Koninklijke'.* 3 jld dalam 4. Haarlem: J. Enschede, 1932– 41.

——— *History of the Royal Dutch*. 4 jld. Leiden: E.J. Brill, 1958.

Giebels, Lambert. *Soekarno, Nederlandsch onderdaan: biografie 1901–1950.* Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1999.

Glamann, Kristof. *Dutch-Asiatic trade 1620–1740.* Copenhagen: Danish Science Press; Den Haag: Martinus Nijhoff, 1958.

Godée Molsbergen, E.C. *Geschiedenis van de Minahassa tot 1829.* Weltevreden: Landsdrukkerij, 1928.

Goswami, O. "The Depression, 1930–1935: its effects on India and Indonesia". *Itinerario* vol. 10, no. 1 (1986), hal. 163–76.

Gould, James W. *Americans in Sumatra.* Den Haag: Martinus Nijhoff, 1961.

Graaf, H.J. de (ed). *De expeditie van Anthonio Hurdt Road van Indië, als Admiraal en Superintendent naar de binnenlanden van Java, Sept–Dec. 1678, volgens het journaal van Johan Jurgen Briel, Secretaris.* 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1971.

——— *De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken.* Franeker: T. Wever BV, 1977.

——— "Gevangenneming en dood van Raden Truna-Djaja, 26 Dec. 1679–2 Jan. 1680". *TBG* vol. 85, bag. 2 (1952), hal. 273–309.

——— "De historische betrouwbaarheid der Javaanse overlevering". *BKI vol.* 112, no. 1 (1956), hal. 55–73.

——— "Lombok in de 17e eeuw". *Djåwå* vol. 21, no. 6 (Nov. 1941), hal. 355–73.

——— *De moord op Kapitein Francois Tack, 8 Febr. 1686.* Amsterdam: H.J. Paris, 1935.

——— *De regering van Panembahan Senapati Ingalaga. VKI* vol. 13. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1954.

——— *De regering van Sultan Agung, vorst van Mataram 1613–1645, en die van zijn voorganger Panembahan Seda-ing-Krapjak 1601–1613. VKI vol.* 23. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1958.

——— *De regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, vorst van Mataram 1646–1677.* 2 jld. *VKI* vol. 33, 39. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1961, 1962.

——— "Het Semarangse geslacht Bustam in de 18e en 19e eeuw: afkomst en jeugd van Raden Saleh". *BKI* vol. 135, no. 2–3 (1979), hal. 252–81.

——— (ed). *De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het hof van Mataram, 1648–1654.* 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1956.

——— dan Th. G. Th. Pigeaud. *De eerste Moslimse vorstendommen op Java: studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw. VKI vol.* 69. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1974.

Grijns, C.D., dan S.O. Robson (ed.). *Cultural contact and textual interpretation: papers from the fourth European colloquium on Malay and*

Indonesian studies, held in Leiden in 1983. VKI vol. 115. Dordrecht and Cinnaminson: Foris, 1986.

Groeneboer, Kees. *Weg tot het Westen: het Nederlands voor Indië* 1600–1950; *een taalpolitieke geschiedenis. VKI* vol. 158. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1993.

Groeneveldt, W.P. *Notes on the Malay archipelago and Malacca compiled from Chinese sources. VBG* vol. 39, bag. 1 (1877).

Guillot, C. *L'affaire Sadrach: un essai de christianisation à Java an XIXe siècle.* Paris: Editions de la Maison des Sciences de l"Homme, 1981.

——— "La nécessaire relecture de l'accord luso-soundanais de 1522". *Archipel* no. 42 (1991), hal. 53–76.

——— "La politique vivrière de Sultan Ageng (1651–1682)". *Archipel* no. 50 (1995), hal. 83–118.

——— dan Ludvig Kalus. "La stèle funéraire de Hamzah Fansuri". *L'horizon nousantarien: mélange en hommage à Denys Lombard,* vol. 4. *Archipel* no. 60 (2000), hal. 3–24.

———, Lukman Nurhakim dan Sonny Wibisono. *Banten avant l'Islam: étude archaéologique de Banten Girang (Java–Indonésie)* 932?-1526. Monographies no. 173. Paris: Publications de l'École Française d'Extrême-Orient, 1994.

———, ——— dan ——— *Banten sebelum zaman Islam: Kajian arkeologi di Banten Girang* (932?-1526). Penj. Winarsih Partaningrat Arifin dan Henri Chambert-Loir. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, École Française d'Extrême-Orient, 1996.

Gullick, J.M. *Indigenous political systems of western Malaya.* London: Athlone, 1958.

Haan, F. de. *Priangan: de Preanger-Regentschappen onder het Nederlansch bestuur tot* 1811. 4 jld. [Batavia:] Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1910–1912.

Hadi Soesastro, M. "The political economy of deregulation in Indonesia". *AS* vol. 29, no. 9 (Sept. 1989), hal. 853–69.

Hadiwijono, Harun. *Man in the present Javanese mysticism.* Baarn: Bosch & Keuning 1967.

Hägerdal, Hans. "Bali in the sixteenth and seventeenth centuries: suggestions for a chronology of the Gelgel period." *BKI* vol. 15 1, no. 1 (1995), hal. 10 1–24.

Haks, Leo, dan Guus Maris (ed.). *Lexicon of foreign artists who visualized Indonesia (1600–1950).* Utrecht: Gert Jan Bestebreurtje, 1995.

Hamid, Abu. *Syekh Yusuf Makassar.. seorang ulama, Sufi dan pejuang.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Hardy, P. "Modern European and Muslim explanations of conversion to Islam in South Asia: a preliminary survey of the literature". *Journal of the Royal Asiatic Society* 1977, no. 2, hal. 177–206. Cetak-ulang hal. 68–99 dalam Levtzion (ed.), *Conversion to Islam* (lihat di bawah).

Haris, Syamsuddin, *et al. Indonesa di ambang perpecahan? Kasus Aceh, Riau, Irian Jaya, dan Timor Timur.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

Harvey, Barbara S. *Pemberontakan Kahar Muzakkar. Dari tradisi ke DI/TII* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

——- *Permesta: half a rebellion.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1977.

Haspel, C.Ch. van den. *Overwicht in overleg: hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de vorstenlanden op Java, 1880–1930. VKI vol.* 111. Dordrecht and Cinnaminson: Foris, 1985.

Hauswedell, Peter Christian, "Sukarno: radical or conservative? Indonesian politics 1964–5". *Indonesia* no. 15 (Apr. 1973), hal. 109–43.

Heersink, Christiaan Gerard. *The green gold of Selayar: a socio-economic history of an Indonesian coconut island c.1600–1950; perspectives from a periphery.* Disertasi doktor pada Vrije Universiteit te Amsterdam, 1995.

Hefner, Robert W. "Islam, state and civil society: ICMI and the struggle for the Indonesian middle class". *Indonesia* no. 56 (Okt. 1993), hal. 1–35.

—— "Islamization and democratization in Indonesia", hal. 75–127 dalam Robert W. Hefner dan Patricia Horvatich (ed.). *Islam in an era of nation-states: politics and religious renewal in Muslim Southeast Asia.* Honolulu: University of Hawai'i Press, 1997.

——— "Islamizing Java? Religion and politics in rural east Java". *JAS* vol. 46, no. 3 (Aug. 1987), hal. 533–54.

——— *The political economy of mountain Java: an interpretive history.* Berkeley, dll.: University of California Press, 1990.

Heinzlmeir, Helmut. *Indonesiens Aussenpolitik nach Sukarno, 1965–1970: Möglichkeiten und Grenzen eines bündnisfreien Entwicklungslandes.* Hamburg: Mitteilungen des Instituts für Asienkunde, 1976.

Hering, B.B. "Nogmaals de vier brieven van Ir. Soekarno". *BKI* vol. 145, no. 2–3 (1989) hal. 281–94.

Hill, A.H. (ed. & penj.). "Hikayat Raja-raja Pasai: a revised romanised version of Raffles MS 67, together with an English translation". *JMBRAS* vol. 33, no. 2 (1960), hal.1–215

Hill, Hal. *The Indonesian economy since 1966: Southeast Asia's emerging giant*. Cambridge, dll.: Cambridge University Press, 1996.

——-- (ed.). *Indonesia's new order: the dynamics of socio-economic transformation*. St Leonards, NSW: Allen & Unwin, *1994*.

Hindley, Donald. "Alirans and the fall of the old order". *Indonesia* no. 9 (Apr. 1970), hal.23–66.

——— *The Communist Party of Indonesia, 1951–1963*. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1966.

Hinzler, H.I.R. "The Balinese babad", hal. 39–52 dalam Kartodirdjo (ed.), *Profiles* (lihat di bawah).

——-- "Moderne Balinese schilderkunst na 1945". *Aziatische Kunst* vol. 27, no. 4 (Sept. 1997), hal. 2–17.

——-- "Moderne schilderkunst van Bali, 1930–1940". *Aziatische Kunst* vol. 24, no. 4 (Des. 1994), hal. 2–20.

Hoadley, Mason C. "Javanese, *peranakan* and Chinese elites in Cirebon: changing ethnic boundaries". *JAS* vol. 47, no. 3 (Aug. 1988), hal. 503–17.

Holt, Claire. *Art in Indonesia: continuities and change*. Ithaca: Cornell University Press, 1967.

Honna, Jun. "Military ideology in response to democratic pressure during the late Suharto era: political and institutional contexts". *Indonesia* no. 67 (Apr. 1999), hal.77–126.

Hood, Mantle, dan José Maceda. *Music*. Handbuch der Orientalistik, dritte Abteilung: Indonesien, Malaysia und die Philippinen unter Einschluss der Kap-Malaien in Südafrika, sechster Band. Leiden dan Koln: E.J. Brill, 1972.

Hooker, Virginia Matheson (ed.). *Culture and society in new order Indonesia*. Kuala Lumpur, dll.: Oxford University Press, *1993*.

Horikoshi, Hiroko. "The Dar ul-Islam movement in West Java *(1948–62)*: an experience in the historical process". *Indonesia* no. 20 (Okt. 1975), hal. 59–86

Houben, Vincent J.H. *Kraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarla 1830–1870*. *VKI* vol. 164. Leiden: KITLV, 1994.

———, *J. Thomas* Lindblad *et al. Coolie labour in colonial Indonesia: a study of labour relations in the outer islands, c. 1900–1940*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1999.

Hourani, Albert. *Arabic thought in the liberal age, 1798–1939*. London: Oxford University Press, 1970.

Hugenholtz, W.R. "Famine and food supply in Java, 1830–1914", hal. 155–88 dalam Bayly dan Kolff (ed.), *Two colonial empires* (lihat di atas).

Hüsken, Frans. *Een dorp op Java: sociale differentiatie in een boerengemeenschap, 1850–1980.* Overveen: ACASEA, 1988.

——— "Islam and collective action: rural violence in North Central Java in 1942", hal. 123–54 dalam Kooiman (ed.), *Conversion, competition and conflict* (lihat di bawah).

Ihza, Yusril. "Combining activism and intellectualism: the biography of Mohammad Natsir (1908–1993)". *SI* vol. 2, no. 1 (1995), hal. 111–47.

Indonesia: an Amnesty International report. London: Amnesty International, 1977.

Indonesia: sebuah laporan Amnesti Internasional. London: Amnesti International, 1979.

Ingleson, *John. In search of justice: workers and unions in colonial Java, 1908–1926.* Singapore, dll.: Oxford University Press, 1986.

——— *Road to exile: the Indonesian nationalist movement 1927–1934.* Singapore, dll.: Heinemann Educational (Asia), 1979.

——— "Urban Java during the Depression". *JSEAS* vol. 19, no. 2 (Sept. 1988), hal. 292–309.

Irwin, Graham. *Nineteenth-century Borneo: a study in diplomatic rivalry.* Singapore: Donald Moore, 1967. Pertama kali diterbitkan sebagai *VKI* vol. 15 (1955).

Ito, Takeshi. "Why did Nuruddin ar-Raniri leave Aceh in 1054 A.H?" *BKI* vol. 134, no. 4 (1978), hal. 489–91.

Jack-Hinton, Colin. "Marco Polo in South-East Asia". *JSEAH* vol. 5, no. 2 (Sept. 1964), hal. 43–103.

Jacobs, Hubert (ed.). *The Jesuit Makasar documents (1615–1682).* Rome: Jesuit Historical Institute, 1988.

Jassin, H.B. (ed.). *Amir Hamzah: Radja penjair Pudjangga Baru.* Djakarta: Gunung Agung, 1962.

——— *(ed.). Angkatan '66. Prosa dan puisi.* Djakarta: Gunung Agung, 1968.

——— *(ed.). Pudjangga Baru: Prosa dan puisi.* Djakarta: Gunung Agung, 1963.

Jay, Robert R. *Religion and politics in rural Central Java.* New Haven: Yale University Southeast Asia Studies Cultural Report Series no. 12, 1963.

Jedamski, Doris. "Balai Pustaka: a colonial wolf in sheep's clothing". *Archipel* no. 44 (1992), hal. 23–46.

Jellinek, Lea. *The wheel of fortune: the history of a poor community in Jakarta.* Sydney, dll.: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin, 1991

Jenkins, David. *Suharto and his generals: Indonesian military politics, 1975–1983.* Ithaca: Cornell Modern Indonesian Project Monograph Series, publication no. 64, 1984.

Johns, A.H. "Islam in Southeast Asia: reflections and new directions". *Indonesia* no. 19 (Apr. 1975), hal. 33–55.

——-- "Islamization in Southeast Asia: reflections and reconsiderations with special reference to the role of Sufism". *Tonan Ajia Kenkyu* (Southeast Asian Studies) vol. 31, no. 1 (June 1993), hal. 43–61.

——— "Malay Sufism, as illustrated in an anonymous collection of 17th century tracts". *JMBRAS* vol. 30, bag. 2 (no. 178) (Aug. 1957).

——-- On Qur'anic exegetes and exegesis: a case study in the transmission of Islamic learning", hal. 3–49 dalam Peter G. Riddell dan Tony Street (ed.). *Islam: essays on scripture, thought and society: a Festschrift in honour of Anthony H. Johns.* Leiden, dll.: Brill, 1997.

Johns, A.H. "Quranic exegesis in the Malay world: in search of a profile", hal. 257–87 dalam A. Rippin (ed.). *Approaches to the history of the interpretation of the Qur'an.* Oxford: Oxford University Press, 1988.

——— "Sufism as a category in Indonesian literature and history". *JSEAH* vol. 2, no. 2 (July 196 1), hal. 10–23.

Jolliffe, Jill. *East Timor: nationalism and colonialism.* St Lucia: University of Queensland Press, 1978.

Jones, F.C. *Japan's new order in East Asia: its rise and fall, 1937–45.* London: Oxford University Press, 1954.

Jones, Gavin W. "Religion and education in Indonesia". *Indonesia* no. 22 (Okt. 1976), hal. 19–56.

——— dan Terence H. Hull (ed.). *Indonesia assessment: population and human resources.* Canberra: Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University; Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997.

Jones, Russell. "Ten conversion myths from Indonesia", hal. 129–58 dalam Levtzion (ed.), *Conversion to Islam* (lihat di bawah).

Jonge, Huub de. "State formation by contract: the Madurese regency of Sumenep, the VOC, and the Netherlands East Indies, 1680–1883". *RIMA* vol. 16, no. 2 (1982), hal. 37–58.

Jorgensen-Dahl, Arnfinn. *Regional organization and order in South-East Asia.* London dan Basingstoke: Macmillan (sekarang Palgrave), 1982.

Kahin, Audrey R. "The 1927 Communist uprising in Sumatra: a reappraisal". *Indonesia* no. 62 (Okt. 1996), hal. 19–36.

——— (ed.). *Regional dynamics of the Indonesian Revolution: unity from diversity.* Honolulu: University of Hawai'i Press, 1985.

——- "Repression and regroupment: religious and nationalist organizations in West Sumatra in the 1930s". *Indonesia* no. 38 (Okt. 1984), hal. 39–54.

——— dan George McT. Kahin. *Subversion as foreign policy: the secret Eisenhower and Dulles debacle in Indonesia.* New York: New Press, 1995.

Kahin, George McTurnan. *Nationalism and revolution in Indonesia.* Ithaca: Cornell University Press, 1952.

Kartodirdjo, Sartono. *The peasant's revolt of Banten in 1888, its conditions, course and seque:. a case study of social movements in Indonesia. VKI* vol. 50. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966.

——— *(ed.). Profiles of Malay culture: historiography, religion and politics.* [Jakarta]: Directorate General of Culture, Ministry of Education and Culture, 1976.

——— *Protest movements in rural Java: a study of agrarian unrest in the nineteenth and early twentieth centuries.* Singapore, dll.: Oxford University Press, 1973.

Kartomi, Margaret J. "Music in nineteenth century Java: a precursor to the twentieth century". *JSEAS* vol. 21, no. 1 (Mar. 1990), hal. 1–34.

Kathirithamby-Wells, J. "Ahmal Shah ibn Iskandar and the late 17th century 'holy war' in Indonesia". *JMBRAS* vol. 43, bag. 1 (1970), hal. 48–63.

——— "Siak and its changing strategies for survival, c. 1700–1870", hal. 217–43 dalam Anthony Reid (ed.). *The last stand of Asian autonomies: responses to modernity in the diverse states of Southeast Asia and Korea, 1750–1900.* Basingstoke: Macmillan (sekarang Palgrave), 1997.

Kell, Tim. *The roots of Acehnese rebellion 1989–1992.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project publication no. 74, 1995.

Knaap, G.J. *Kruidnagelen en Christenen: de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656–1696. VKI* vol. 125. Dordrecht and Providence: Foris, 1987.

Knight, G.R. ""The people's own cultivation": rice and second crops in Pekalongan residency, north Java, in the mid-nineteenth century". *RIMA* vol. 19, no. 1 (Winter 1985), hal. 1–38.

Kobayashi Yasuko. "Kyai and Japanese military". *SI* vol. 4, no. 3 (1997), hal. 65–98.

Kooiman, Dick, Otto van den Muijzenberg dan Peter van der Veer (ed.). *Conversion, competition and conflict: essays on the role of religion in Asia*. Amsterdam: Free University Press, 1984.

Korte, J.P. de. *De jaarlijkse financiële verantwoording in de Verenigde Oostindische Compagnie.* Leiden: Martinus Nijhoff, 1984.

Korver, A.P.E. *Sarekat Islam* 1912–1916: *opkomst, bloei en structuur van Indonesië's eerste massabeweging.* Amsterdam: Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, 1982.

Kraan, Alfons van der. *Bali at war: a history of the Dutch-Balinese conflict of 1846–49.* Monash Paper no. 34. [Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, 1995.]

——— *Lombok: conquest, colonization and underdevelopment, 1870–1940.* Singapore, dll.: Heinemann Educational (Asia), 1980.

Kratz, E.U. "Islamic attitudes toward modern Indonesian literature", hal. 60–93 dalam Grijns dan Robson (ed.), *Cultural contact* (lihat di atas).

Kraus, Werner. "Transformations of a religious community: the Shattariyya Sufi brotherhood in Aceh", hal. 169–89 dalam Sri Kuhnt-Saptodewo, Volker Grabowsky dan Martin Grossheim (ed.). *Nationalism and cultural revival in Southeast Asia: perspectives from the centre and the region.* Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1997.

——— *Zwisschen Reform und Rebellion: Über die Entwicklung des Islams in Minangkabau (Westsumatra) zwischen den beiden Reformsbewegungen der Padri* (183 7) *and der Modernisten* (1908): *ein Beitrag zur Geschichle der Islamisierung Indonesiens.* Beiträge zur Südasienforschung Südasien-Institut Universtät Heidelberg, Band 89. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1984.

Krom, N. *J. Gouverneur Generaal Gustaaf Willem van Imhoff.* Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, 1941.

——— *Hindoe-Javaansche geschiedenis.* Edisi ke-2. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931.

Kühne Dietrich. *Bevölkerungs- und Beschäftigungsentwicklung in den ASEAN-Ländern seit 1960.* Hamburg: Mitteilungen des Instituts fur Asienkunde, 1975.

Kumar, Arm. "Javanese court society and politics in the late eighteenth century: the record of a lady soldier. Part I: The religious, social, and economic life of the court". *Indonesia* no. 29 (April 1980), hal. 1–46.

——-- "Javanese court society and politics in the late eighteenth century: the record of a lady soldier. Part II: Political developments: the courts and the Company, 1784–1791". *Indonesia* no. 30 (Okt. 1980), hal. 67–111.

——-- (ed. & penj.) *Surapati, man and legend: a study of three babad traditions.* Leiden: E.J. Brill, 1976.

——-- "The 'Suryengalagan affair' of 1883 and its successors: born leaders in changed times". *BKI* vol. 138, no. 2–3 (1982), hal. 251–84.

Kunst, J. *Music in Java: its history, its theory and its technique.* Edisi ke-3 yang diperluas, ed. E.L. Heins. 2 jld. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1973.

Kuntowijoyo (Kuntowidjojo). "Economic and religious attitudes of entrepreneurs in a village industry: notes on the community of Batur". Penj. Mitsuo Nakamura. *Indonesia* no. 12 (Okt. 1971), hal. 47–55.

——— "Islam and politics: the local Sarekat Islam movements in Madura, 1913–20", hal. 108–38 dalam Abdullah dan Siddique (ed.), *Islam and society in Southeast Asia* (lihat di atas).

——— "Sikap ekonomi dan keagamaan pengusaha di desa industri: Komentar tentang masjarakat Batur". *Buletin Fakultas Sastra dan Kebudajaan* no. 4 (197 1), hal. 163–72.

Kurasawa, Aiko. *Mobilisasi dan kontrol: studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942–1945.* Jakarta: Yayasan Karti Sarana & Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.

——-- "Propaganda media on Java under the Japanese 1942–1945". *Indonesia* no. 44 (Okt. 1987), hal. 59–116.

Kwantes, R.C. "Ir. Soekarno's vier brieven". *BKI* vol. 143, no. 2–3 (1987), hal. 293–311.

Langenberg, Michael van. "North Sumatra 1942–1945: the onset of a national revolution", hal. 33–64 dalam McCoy (ed.), *Southeast Asia under Japanese occupation* (lihat di bawah).

Lapian, A.B., dan Anthony Day (ed.). *Papers of the Dutch-Indonesian historical conference held at Noordwijkerhout, the Netherlands, 19 to 22 May 1976.* Leiden dan Jakarta: Bureau of Indonesian Studies, 1978.

Larson, George D. *Prelude to revolution: palaces and politics in Surakarta, 1912–1942. VKI* vol. 124. Dordrecht and Providence: Foris, 1987.

Lee Kam Hing. "The Taman Siswa in postwar Indonesia". *Indonesia* no. 25 (Apr. 1978), hal. 41–59.

Legge, John D. "*Daulat Ra'jat* and the ideas of Pendidikan Nasional Indonesia". *Indonesia* no. 32 (Okt. 1981), hal. 151–68.

——— *Intellectuals and nationalism in Indonesia: a study of the following recruited by Sutan Sjahrir in occupation Jakarta.* [Ithaca:] Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1988.

——— *Sukarno: a political biography.* Edisi ke-2. Sydney, dll.: Allen & Unwin, 1985.

Leirissa, R. Z. *PRRI Permesta: strategi membangun Indonesia tanpa komunis* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.

Lev, Daniel S. *The transition to guided democracy: Indonesian politics 1957–1959.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1966.

Levtzion, Nehemia (ed.). *Conversion to Islam.* New York dan London: Holmes & Meier 1979.

Levyssohn Norman, H.D. *De Britsche heerschappij over Java en onderhoorigheden (1811–1816).* 's-Gravenhage: Gebroeders Belinfante, 1857.

Lewis, *Dianne. Jan Compagnie in the Straits* of *Malacca, 1641–1795.* Athens, Ohio: Ohio University Center for International Studies, 1995.

Liddle, R. William. "The relative autonomy of the third world politician: Soeharto and Indonesian economic development in comparative perspective". *International Studies Quarterly* vol. 35 (1991), hal. 403–27.

Lindblad, J. Thomas. *Between Dayak and Dutch: the economic. history of Southeast Kalimantan, 1880–1942. VKI* vol. 134. Dordrecht and Providence: Foris, 1988.

——-- (ed.). *Historical foundations of a national economy in Indonesia, 1890s-1990s.* Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, Afd. Letterkunde, nieuwe reeks 167. Amsterdam, dll.: North-Holland, 1996.

Liu, Hong. "Pramoedya Ananta Toer and China: the transformation of a cultural intellectual". *Indonesia* no. 61 (Apr. 1996), hal. 119–43.

Locher-Scholten, Elsbeth. *Sumatraans Sultanaat en koloniale staat: de relatie DjambiBatavia (1830–1907) en het Nederlandse imperialisme. VKI* vol. 161. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1994.

Lombard, Denys. *Le carrefour javanais: essai d'histoire globale.* 3 jld. Paris: Editions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1990.

——— *Le Sultanat d'Atjéh au temps d'Iskandar Muda, 1607–1636.* Paris: École Française d'Extrême-Orient, 1967.

Louw, P.J.F. *De derde Javaansche successie-oorlog (1746–1755).* Batavia: Albrecht & Rusche; 's Hage: M. Nijhoff, 1889.

——-- dan E.S. de Klerck. *De Java-oorlog van 1825–30.* 6 jld. 's Hage: M. Nijhoff, Batavia: Landsdrukkerij 1894–1909.

Lowry, Robert. *The armed forces of Indonesia.* St Leonards, NSW: Allen & Unwin, 1996.

Lucas, Anton. *One soul, one struggle: region and revolution in Indonesia.* Sydney: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin 1991.

——— *Peristiwa tiga daerah: revolusi dalam revolusi.* Peng. oleh Sartono Kartodirdjo. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

——-- "Social revolution in Pemalang, Central Java, 1945". *Indonesia* no. 24 (Okt. 1977), hal. 87–122.

Ma Huan. *Ying-yai sheng-lan: "The overall survey of the ocean's shores" (1433).* Ed. dan penj. J.V.G. Mills. Cambridge University Press, 1970.

McCoy, Alfred W. (ed.). *Southeast Asia under Japanese occupation.* [New Haven:] Yale University Southeast Asia Studies Monograph Series no. 22, 1980.

McDonald, Barbara. *Old Javanese literature in eighteenth-century Java: a consideration of the processes of transmission.* Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies Working Paper no. 41 [1986].

McDonald, Hamish. *Suharto's Indonesia.* Sydney: Fontana/Collins, 1980.

McDonald, Peter F. (ed.). *Pedoman analisa data sensus Indonesia 1971–1980* [Yogyakarta:] Australian Vice-Chancellor's Committee, Australian Universities International Development Program, 1983.

McIntyre, Angus. "Divisions and power in the Indonesian National Party, 1965–1966". *Indonesia* no. 13 (Apr. 1972), hal. 183–210.

Mackie, J.A.C. *Konfrontasi: the Indonesia-Malaysia dispute, 1963–1966.* Kuala Lumpur, dll.: Oxford University Press, 1974.

——— *Problems of the Indonesian inflation.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1967.

McMahon, Robert J. *Colonialism and Cold War: the United States and the struggle for Indonesian independence, 1945–1949.* Ithaca: Cornell University Press, 1981.

McVey, Ruth T. "Faith as the outsider: Islam in Indonesian politics", hal. 199–225 dalam James P. Piscatori (ed.) *Islam in the political process.* Cambridge, dll.: Cambridge University Press in association with the Royal Institute of International Affairs, 1983.

——-- (ed.). *Indonesia.* New Haven: HRAF, 1963.

———- "The post-revolutionary transformation of the Indonesian army". *Indonesia,* no. 11 (Apr. 1971), hal. 131–76; no. 13 (Apr. 1972), hal. 147–81.

———- *The rise of Indonesian Communism.* Ithaca: Cornell University Press, 1965.

———- "Taman Siswa and the Indonesian national awakening". *Indonesia* no. 4 (Okt. 1967), hal. 128–49.

Maddison, Angus, dan Ge Prince (ed.). *Economic growth in Indonesia 1820–1940. VKI* vol. 137. Dordrecht and Providence: Foris, 1989.

Majul, Cesar Adib. *Muslims in the Philippines.* Edisi ke-2. Quezon City: University of the Philippines Press, 1973.

Makmur Makka, A. *BJH: Bacharuddin Jusuf Habibie, his life and career.* Edisi ke-3. [Jakarta:] PT Pustaka CIDESINDO, 1996.

Mansoer, M.D., *et al. Sedjarah Minangkabau.* Djakarta: Bhratara, 1970.

Mansurnoor, Iik Arifin. *Islam in an Indonesian world: ulama of Madura.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Marle, A. van. "Indonesian electoral geography under Orla and Orba", hal. 37–59 dalam Oey (ed.), *Indonesia after the 1971 elections* (lihat di bawah).

Maronier J.H. *Pictures of the tropics: a catalogue of drawings, water-colours, paintings and sculptures in the collection of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden.* 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1967.

Masselman, George. *The cradle of colonialism.* New Haven dan London: Yale University Press, 1963.

Matheson, Virginia. "Questions arising from a nineteenth century Riau syair". *RIMA* vol. 17 (1983), hal. 1–61.

Meiden, G.W. van der. "A Turkish mediator between Mangkubumi and the Dutch East India Company (1753–1754)". *RIMA* vol. 15, no. 2 (198 1), hal. 92–107.

Meilink-Roelofsz, M.A.P. *Asian trade and European influence in the Indonesian archipelago between 1500 and about 1630.* Den Haag: Martinus Nijhoff, 1962.

Miert, Hans van. *Een koel hoofd en een warm hart: nationalisme Javanisme en jeugdbeweging in Nederlands-Indië, 1918–1930.* Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1995.

Mobini-Kesheh, Natalie. *The Hadrami awakening: community and identity in the Netherlands East Indies, 1900–1942.* Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1999.

Mody, Nawaz B. *Indonesia under Suharto.* New York: Apt, 1987.

Moertono, Soemarsaid. *State and statecraft in old Java: a study of the later Mataram period, 16th to 19th century.* Edisi revisi. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1981.

Montana, Suwedi. "Nouvelles donées sur les royaumes de Lamuri et Barat". *Archipel* no. 53 (1997), hal. 85–95.

Morfit, Michael. "Pancasila: the Indonesian state ideology according to the new order government". *AS* vol. 21, no. 8 (Aug. 198 1), hal. 838–51.

Mortimer, Rex. *Indonesian Communism under Sukarno: ideology and politics, 1959–1965.* Ithaca dan London: Cornell University Press, 1974.

Mossman, James. *Rebels in paradise: Indonesia's civil war.* London: Jonathan Cape, 1961.

Mozingo, D. *Chinese policy toward Indonesia, 1949–1967.* Ithaca dan London: Cornell University Press, 1976.

Mrázek, Rudolf. *Sjahrir: politics and exile in Indonesia.* Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1994.

Mulder, Niels. *Mysticism and everyday life in contemporary Java: cultural persistence and change.* Singapore: Singapore University Press, 1978.

Mulyadi, M. Hari, Soedarmono *et al. Runtuhnya kekuasaan "Kraton Alit": studi radikalisasi sosial "wong Saka" dan kerusuhan Mei 1998 di Surakarta. Solo:* Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan, 1999.

Munhanif, Ali. "The khittah of 1926 reexamined: views of the NU in post-Cipasung congress". *SI* vol. 3, no. 2 (1996), hal. 85–119.

Murni Djamal. "The origin of the Islamic reform movement in Minangkabau: life and thought of Abdul Karim Amrullah". *SI* vol. 5, no. 3 (1998), hal. 1–45.

Naerssen, F.H. van, dan R.C. de Iough. *The economic and administrative history of early Indonesia.* Handbuch der Orientalistik, dritte Abteilung; Indonesien, Malaysia und die Philippinen unter Einschluss der Kap-Malaien in Südafrika, siebenter Band. Leiden dan Köln: E.J. Brill, 1977.

Nagazumi Akira. *The dawn of Indonesian nationalism: the early years of the Budi Utomo, 1908–1918.* Tokyo: Institute of Developing Economies, 1972.

Nagtegaal, Luc. *Riding the Dutch tiger: the Dutch East Indies Company and the northeast coast of Java,* 1680–1743. *VKI* vol. 171, Leiden: KITLV, 1996.

——— *Rijden op een Hollandse tijger: de noordkust van Java en de V.O.C. 1680–1743.* Tesis doktor pada Rijksuniversiteit te Utrecht, 1988.

Nakahara, M. "Muslim merchants in Nan-Hai", hal. 1–10 dalam Raphael Israeli dan Anthony H. Johns (ed.). *Islam in Asia,* vol. II: *Southeast and East Asia.* Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1984.

Nakamura, Mitsuo *The crescent arises over the banyan tree: a study of the Muhammadiyah movement in a central Javanese town.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.

Nasution, A.H. *Sekitar perang kemerdekaan Indonesia.* 11 jld. Bandung: Penerbit Angkasa, 1977–9.

Niettwenhuijze, C.A.O. van. *Samsul-D+n van Pasai: bijdrage tot de kennis der Sumatraansche mystiek.* Leiden: E.J. Brill, 1945.

Nishihara, Masashi. *Golkar and the Indonesian elections of 1971.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1972.

Noer, Deliar. *The Modernist Muslim movement in Indonesia,* 1900–1942. Singapore, dll.: Oxford University Press, 1973.

——— *Mohammad Hatta: biographi politik.* Jakarta: LP3ES, 1990.

Noorduyn, J. *Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo' : Buginese historiografie.* 's-Gravenhage: H.L. Smits, 1955.

——— "Arung Singkang (1700–1765): how the victory of Wadjo' began". Indonesia no. 13 (Apr. 1972), hal. 61–8.

——— (ed.). *Bima en Sumbawa: bijdragen tot de geschiedenis van de Sultanaten Bima en Sumbawa door A. Ligtvoet en G. P. Rouffaer. VKI* vol. 129. Dordrecht and Providence: Foris, 1987.

—— "De Islamisering van Makasar". *BKI* vol. 112, no. 3 (1956), hal. 247–66.

—— "Majapahit in the fifteenth century". *BKI* vol. 134, no. 2–3 (1978), hal. 207–74.

——- "Origins of South Celebes historical writing", hal. 137–55 dalam Soedjatmoke, *et al.* (ed.). *An introduction to Indonesian historiography.* Ithaca: Cornell University Press, 1965.

Nugroho Notosusanto. "Soedirman: panglima yang menepati janjinya", hal. 47–62 dalam Taufik Abdullah *et al.* (ed.). *Manusia dalam kemelut sejarah.* Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1978.

Oates, William A. "The afdeeling B: an Indonesian case study". *JSEAH* vol. 9, no. 1 (Mar. 1968), hal. 107–16.

Oey Hong Lee (ed.). *Indonesia after the 1971 elections.* London dan Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974.

Olthof, W.L. (ed. & penj.). *Babad Tanah Djawi in proza: Javaansche geschiedenis.* 2 jld. 's-Gravenhage: M. Nijhoff, 1941.

O'Malley, William J. "Indonesia in the Great Depression: a study of East Sumatra and Jogjakarta in the 1930's". Tesis PhD pada Cornell University, Ann Arbor: University Microfilms, 1977.

——- "The Pakempalan Kawulo Ngajogjakarta: an official report on the Jogjakarta People's Party of the 1930's". *Indonesia* no. 26 (Okt. 1978), hal. 111–58.

Osborne, Robin. *Indonesia's secret war: the guerilla struggle in Irian Jaya.* Sydney, dll.: Allen & Unwin, 1 985.

Padmapuspita, J. (ed. & penj.). *Pararaton.* Jogjakarta: Taman Siswa, 1966.

Paget, Roger K. "The military in Indonesian politics: the burden of power". *Pacific Affairs* vol. 40, no. 3–4 (Fall and Winter 1968), hal. 294–314.

Palmer, Ingrid. *The Indonesian economy since 1965: a case study of political economy.* London: Frank Cass, 1978.

Parry, J.H. *Europe and a wider world.* London: Hutchinson, 1949. Dicetak ulang dengan judul *The establishment of the European hegemony, 1415–1715.* New York dan Evanston: Harper & Row, 1961.

Paulus, J., *et al.* (ed.). *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.* 8 jld. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff., Leiden: E.J. Brill, 1917–40.

Payer, Cheryl. "The International Monetary Fund and Indonesian debt slavery", hal. 50–70 dalam Mark Selden (ed.). *Remaking Asia: essays on the American uses of power.* New York: Pantheon, 1974.

Pelras, Christian. *The Bugis.* Oxford: Blackwell, 1996.

——— "Les premières donnees occidentales concernant Célèbes-Sud". *BKI* vol. 133, no. 2–3 (1977), hal. 227–60.

——— "Religion, tradition and the dynamics of Islamization in South Sulawesi". *Archipel* no. 29 (1985), hal. 107–35.

Pelzer, Karl J. "Physical and human resource patterns", hal. 1–23 dalam McVey (ed.), *Indonesia* (lihat di atas).

——- *Planter against peasants: the agrarian struggle in East Sumatra 1947–1958. VKI* vol. 97. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1982.

——- *Planter and peasant: colonial policy and the agrarian struggle in East Sumatra, 1863–194 7. VKI* vol. 84. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1978.

Penders, C.L.M., dan Ulf Sundhaussen. *Abdul Haris Nasution: a political biography.* St Lucia, dll.: University of Queensland Press, 1985.

Perthus, Max. *Henk Sneevliet: revolutionair-socialist in Europa en Azië.* Nijmegen: Socialistiese Uitgeverij Nijmegen, 1976.

Piekaar, A.J. *Atjèh en de oorlog met Japan.* 's-Gravenhage dan Bandung: Hoeve, 1949.

Pigeaud, Theodore G. Th. *Java in the 14th century: a study in cultural history.* 5 jld. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1960–3.

——-- *Literature of Java: catalogue raisonne* of *Javanese manuscripts in the library of the University of Leiden and other public collections in the Netherlands.* 4 jld. Den Haag: Martinus Nijhoff., Leiden: Bibliotheca Universitatis Lugduni Batavorum; Leiden University Press, 1967–80.

——— dan H.J. de Graaf. *Islamic states in Java, 1500–1700: eight Dutch books and articles by Dr H.J. de Graaf, as summarised by Theodore G. Th. Pigeaud, with a comprehensive list Of sources and a general index of names composed by H.J. de Graaf. VKI* vol. 70. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976.

Pijper, G.F. *Studiën over de geschiedenis van de Islam in Indonesia, 1900–1950.* Leiden: E.J. Brill, 1977.

Pluvier, J.M. *Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesia in de jaren 1930 tot 1942.* 's-Gravenhage dan Bandung: W. van Hoeve, 1953.

Poeze, Harry A. "Early Indonesian emancipation: Abdul Rivai, van Heutz and the *Bintang Hindia*". *BKI* vol. 145, no. 1 (1989), hal. 87–106.

——-- *Tan Malaka. Strijder voor Indonesie's vrijheid: levensloop van 1897 tot 1945. VKI* vol. 78. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1976.

Poffenberger, Mark. "Rethinking Indonesian forest policy". *AS* vol. 37, no. 5 (May 1997), hal. 453–69.

Polomka, Peter. *Indonesia since Sukarno.* Harmondsworth: Penguin, 1971.

Post, Peter, dan Elly Touwen-Bouwsma (ed.). *Japan, Indonesia and the war: myths and realities. BKI* vol. 152, no. 4 (1996).

Prapañca. *De[awarnana (Nagarakrtagama)* Penj. Stuart Robson. *VKI* vol. 169. Leiden: KITLV 1995.

Pringgodigdo, A.K. *Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk.* 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, *1950.*

——— *Sedjarah pergerakan rakjat Indonesia.* Djakarta: Pustaka Rakjat, 1949.

Pringle, Robert. *Rajahs and rebels.. the Ibans of Sarawak under Brooke rule, 1841–1941.* Ithaca: Cornell University Press, 1970.

Reeve, David. "Sukarnoism and Indonesia's 'functional group' state". Part one: "Developing Indonesian democracy", *RIMA* vol. 12, no. 2 (1978), hal. 43–94. Part two: "Implementing 'Indonesian democracy'", *RIMA* vol. 13, no. 1 (1979), hal. 53–115.

Reid, Anthony. "An 'age of commerce' in Southeast Asian history". *MAS* vol. 24, no. 1 (1990), hal. 1–30.

——-- "Australia's hundred days in South Sulawesi", hal. 201–24 dalam David P. Chandler dan M.C. Ricklefs (ed.). *Nineteenth and twentieth century Indonesia: essays in honour of Professor J.D. Legge.* Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1986.

——-- "The birth of the Republic in Sumatra". *Indonesia* no. 12 (Okt. 1971), hal. 21–46.

——— *The blood of the people: revolution and the end of traditional rule in northern Sumatra.* Kuala Lumpur, dll.: Oxford University Press, 1979.

——— *The contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858–1898.* London, dll.: Oxford University Press, *1969.*

——-- "Indonesia: from briefcase to samurai sword", hal. 16–32 dalam McCoy (ed.), *Southeast Asia under Japanese occupation* (lihat di atas).

——— *The Indonesian national revolution, 1945–1950.* Hawthorn, Vic.: Longman, 1974.

——-- "Islamization and Christianization in Southeast Asia: the critical phase, 1550–1650", hal. 151–79 dalam Anthony Reid (ed.). *Southeast Asia in the early modern era.* Ithaca: Cornell University Press, 1993.

——-- "The Islamization of Southeast Asia", hal. 13–33 dalam Muhammad Abu Bakar *et al.* (ed.). *Historia: essays in commemoration of the 25th anniversary of the Department of History, University of Malaya.* Kuala Lumpur: Malaysian Historical Society, 1984.

——-- "The Japanese occupation and rival Indonesian elites: Northern Sumatra in 1942". *JAS* vol. 35, no. 1 (Nov. 1975), hal. 49–6 1.

——— *Perjuangan rakyat: revolusi dan hancurnya kerajaan di Sumatra.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

——-- "The pre-colonial economy of Indonesia". *BIES* vol. 20, no. 2 (Aug. 1984), hal. 151–67.

——-- "The rise of Makassar". *RIMA* vol. 17 (Winter/Summer 1983), hal. 117–60.

——-- "The seventeenth-century crisis in Southeast Asia". *MAS* vol. 24, no. 4 (1990), hal. 639–59.

——— *Southeast Asia in the age of commerce 1450–1680.* 2 jld. New Haven dan London: Yale University Press, 1988–93.

——-- dan Lance Castles (ed.). *Pre-colonial state systems in Southeast Asia: the Malay Peninsula, Sumatra, Bali-Lombok, South Celebes.* Kuala Lumpur: Monographs of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society no. 6, 1975.

Remmelink, Willem. *The Chinese War and the collapse of the Javanese state, 1725–1743. VKI* vol. 162. Leiden: KITLV, 1994.

Ricklefs, M.C. "Banten and the Dutch in 1619: six early *'pasar* Malay' letters". *BSOAS* vol. 39, bag. 1 (1976), hal. 128–36.

——— "A consideration of three versions of the *Babad Tanah Djawi,* with excerpts on the fall of Madjapahit". *BSOAS* vol. 35, bag. 2 (1972), hal. 285–315.

——— "Dipanagara's early inspirational experience". *BKI* vol. 130, no. 2–3 (1974), hal. 227–58.

——— "Islamising Java: the long shadow of Sultan Agung. *Archipel* no. 56 hal. 469–82.

——- *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749–1792: a history of the division of Java.* London, dll.: Oxford University Press, 1974.

——- *Modern Javanese historical tradition: a study of an original Kartasura chronicle and related materials.* London: School of Oriental and African Studies, 1978.

——- *The seen and unseen worlds in Java, 1726–49: history, literature and Islam in the court Of Pakubuwana II.* St Leonards, NSW: Asian Studies Association of Australia in association with Alien & Unwin, 1998.

——— "Six centuries of Islamization in Java", hal. 100–28 dalam Levtzion (ed.), *Conversion to Islam* (lihat di atas).

——— "Some statistical evidence on Javanese social, economic and demographic history in the later seventeenth and eighteenth centuries". *MAS* vol. 20, no. 1 (1986), hal. 1–32.

——— "Unity and disunity in Javanese political and religious thought of the eighteenth century". *MAS* vol. 26, no.4 (1992), hal. 663–78.

——- *War, culture and economy in Java, 1677–1726: Asian and European imperialism in the early Kartasura period.* Sydney: Asian Studies Association of Australia in association with Alien & Unwin, 1993.

——— "The Yasadipura problem". *BKI* vol. 153, no.2 (1997), hal. 173–83.

Riddell, Peter. "Earliest Quranic exegetical activity in the Malay-speaking states". *Archipel* no. 38 (1989), hal. 107–24.

Robinson, Geoffrey. *The dark side of paradise: political violence in Bali.* Ithaca dan London: Cornell University Press, 1995.

——- *"Rawan* is as *rawan* does: the origins of disorder in new order Aceh". *Indonesia* no. 66 (Okt. 1998), hal. 127–56.

Robinson, Kathy. "Living in the hutan: jungle village life under the Darul Islam". *RIMA* vol. 17 (Winter/Summer 1983), hal. 208–29.

Robison, Richard. *Indonesia: the rise of capital.* North Sydney: Alien & Unwin, 1986.

Robson, S.O. (ed. & penj.). *Wangbang Wideya: a Javanese Panji romance.* Den Haag: Martinus Nijhoff, 1971.

——— (ed. dan penj.). *The Wedhatama: an English translation.* KITLV Working Paper no. 4. Leiden: KITLV, 1990.

Rocamora, J. Eliseo. "The Partai Nasional Indonesia, 1963–1965". *Indonesia* no. 10 (Okt. 1970), hal. 143–81.

Rockhill, W.W. "Notes on the relations and trade of China with tile eastern archipelago and the coast of the Indian Ocean during the fourteenth century". *T'oung Pao,* vol. 14 (1913), hal. 473–6; vol. 15 (1914), hal. 419–47; vol. 16 (1915), hal. 61–159, 236–71, 374–92, 435–67, 604–26.

Roeder, O.C. *The smiling general: President Soeharto of Indonesia.* Djakarta: Gunung Agung, 1969.

Roff, William R. *The origins of Malay nationalism.* London dan New Haven: Yale University Press, 1967.

Rouffaer, G.P. "Vorstenlanden". *Adatrechtbundels* vol. 34, hal. 233–378.

Rose, Mavis. *Indonesia free: a political biography of Mohammad Hatta.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series no. 67, 1987.

Rudner, Martin. "The Indonesian military and economic policy: the goals and performance of the first Five-Year Development Plan, 1969–74". *MAS* vol. 10, no. 2 (1976), hal. 249–84.

Ruiter, Tine. "The Tegal revolt in 1864", hal. 81–98 dalam Kooiman (ed.), *Conversion, competition and conflict* (lihat di atas).

Runciman, Steven. *The white rajahs: a history of Sarawak from 1841 to 1946*. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.

Rush, James R. *Opium to Java: revenue farming and Chinese enterprise in colonial Indonesia,* 1860–1910. Ithaca dan London: Cornell University Press, 1990.

Sadie, Stanley (ed.). *The new Grove dictionary of music and musicians.* 20 jld. London: Macmillan, 1980.

Sagimun. *Pahlawan Dipanagara berdjuang (Bara api kemerdekaan nan tak kundjung padam).* Djakarta: Gunung Agung, 1965.

Said, Salim. "Suharto's armed forces: building a power base in new order Indonesia, 1966–98". *AS* vol. 38, no. 6 June 1998), hal. 535–52.

Samson, Allan A. "Islam in Indonesian politics". *AS* vol. 8, no. 12 (Des. 1968), hal.1001–17.

Sato, Shigeru. *War, nationalism and peasants: Java under the Japanese occupation,* 1942–1945. St Leonards, NSW: Asian Studies Association of Australia in association with Alien & Unwin, 1994.

Schadee, W.H.M. *Geschiedenis van Sumatra's oostkust.* 2 jld. Amsterdam: Oostkust van Sumatra-Instittuut, 1918–19.

Schoute, D. *De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch Indië* Amsterdam: J. H. de Bussy, 1929.

Schrieke, Bertram. *Indonesian sociological studies: selected writings of B. Schrieke.* 2 jld. Den Haag dan Bandung: W. van Hoeve, 1955–7.

Schulte Nordholt, Henk. *Een Balische dynastie: hierarchie en conflict in de negara Mengwi* 1700–1940. Vrije Universiteit te Amsterdam doctoral thesis, 1988.

——— "The Mads Lange connection. A Danish trader on Bali in the middle of the nineteenth century: broker and buffer". *Indonesia* no. 32 (Okt. 198 1), hal. 16–47.

——— "The making of traditional Bali: colonial ethnography and bureaucratic reproduction". *History and Anthropology* vol. 8, no. 1–4 (1994), hal. 89–127.

——- *The spell of power: a history of Balinese Politics,* 1650–1940. *VKI* vol. 170. Leiden: KITLV, 1996.

Schwarz, Adam. *A nation in waiting: Indonesia in the 1990s.* St Leonards, NSW: Alien & Unwin, 1994.

Scars, Laurie J. *Shadows of empire: colonial discourse and Javanese tales.* Durham [NC] dan London: Duke University Press, 1996.

Selosoemardjan. *Social changes in Jogjakarta.* Ithaca: Cornell University Press, 1962.

Sherlock, Stephen. "Political economy of the East Timor conflict". *AS* vol. 36, no. 9 (Sept. 1996), hal. 835–51.

Shimer, Barbara Gifford, dan Guy Hobbs (penj.). *The Kenpeitai in Java and Sumatra (Selections from Nihon Kenpei Seishi).* Peng. oleh Theodore Friend. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project translation series publication no. 65, 1986.

Shiraishi, Takashi. *An age in motion: popular radicalism 1912–1926.* Ithaca dan London: Cornell University Press, 1990.

——- "Dangir's testimony: Saminism reconsidered". *Indonesia* no. 50 (Okt. 1990), hal. 95–120.

Sitisoemandari Soeroto. *Kartini: sebuah biografi.* Jakarta: Gunung Agung, 1986.

Sjamsuddin, Nazaruddin. *The republican revolt: a study of the Acehnese rebellion* [Singapore:] Institute of Southeast Asian Studies, 1985.

Skinner, C. (ed. & penj.). *Sja'ir perang Mengkasar (The rhymed chronicle of the Macassar war) by Entji' Amin. VKI* vol. 40. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1963.

Slametmuljana. *A story of Majapahit.* Singapore: Singapore University Press, 1976.

Sluimers, L. "'Nieuwe orde' op Java: de Japanse bezettingspolitiek en de Indonesische elites, 1942–1943". *BKI* vol. 124, no. 3 (1968), hal. 336–67.

Smail, John R. W. *Bandung in the early revolution, 1945–1946: a study in the social history of the Indonesian revolution.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1964.

——— "The military politics of North Sumatra: December 1956–October 1957. *Indonesia* no. 6 (Okt. 1968), hal. 128–87.

Snouck Hurgronje, C. *The Achehnese.* Penj. A.W.S. O'Sullivan. 2 jld. Leyden: E.J. Brill, 1906.

——- *De Atjèhers.* 2 jld. Batavia: Landsdrukkerij; Leiden: E.J. Brill, 1893–4.

——- *Mekka in the latter part of the nineteenth century: daily life, customs and learning,. the Moslims of the East-Indian-Archipelago.* Penj. J.H. Monahan. Leyden: E.J. Brill; London: Luzac, 1931.

Soebadio, Haryati, dan Carine A. du Marchie Sarvaas (ed.). *Dynamics of Indonesian history.* Amsterdam, dll.: North-Holland, 1978.

Soebardi, S. (ed. & penj.). *The book of Cabolèk: a critical edition with introduction, translation and notes, a contribution to the study of the Javanese mystical tradition.* Den Haag: Martinus Nijhoff, 1975.

——— "Kartosuwiryo and the Darul Islam rebellion in Indonesia". *JSEAS* vol. 14, no. 1 (March 1983), hal. 109–33.

——— "Santri-religious elements as reflected in the book of Tjentini". *BKI* vol. 127, no. 3 (1971), hal. 331–49.

Soedarsono. *Wayang wong: the state ritual dance drama in the court of Yogyakarta.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.

Soeharto. *Pikiran, ucapan dan tindakan saya: otobiografi.* Seperti dijelaskan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. [Jakarta:] Pt. Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.

Soejatno. "Perubahan-perubahan sosial politik di Surakarta sesudah 1945". *Buletin Fakultas Sastra dan Kebudajaan* no. 4 (1971), hal. 186–94.

——— "Revolution and social tensions in Surakarta, 1945–1950". Penj. Benedict Anderson. *Indonesia* no. 17 (Apr. 1974), hal. 99–111.

Soekanto. *Sekitar Jogjakarta, 1755–1825 (Perdjandjian Gianti-perang Dipanagara)*. Djakarta dan Amsterdam: Mahabarata [1952].

Soeri Soeroto. "The Beratib Beamaal movement in the Banjar War", hal. 167–77 dalam Kartodirdjo (ed.), *Profiles* (lihat di atas).

Soeria Nata Atmadja. *De regenten-positie.* Bandoeng: A. C. Nix [1940].

Soetjipto Wirosardjono *et al.* (ed.). *Gita Jaya: Calatan H. A Ii Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966–1977.* Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota [1977].

Stange, Paul. "'Legitimate' mysticism in Indonesia". *RIMA* vol. 20 (Summer 1986), hal. 76–117.

Stapel, F.W. *Het Bonggaais verdrag.* ['s-Gravenhage: no publ.,] 1922.

——— *Cornelis Janszoon Speelman.* 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1936. Oertama kali diterbitkan dalam *BKI* vol. 94 (1936), hal. 1–222.

Steenbrink, Karel A. *Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19.* Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

——— *Pesantren, madrasah, sekolah: pendidikan Islam dalam kurun moderen.* Jakarta: LP3ES, 1986.

——— *Pesantren, madrasah, sekolah: recente ontwikkelingen in Indonesisch Islamonderricht.* Meppel: Krips Repro, 1974.

Stevens, Th. *Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indië en Indonesië, 1764–1962.* Hilversum: Verloren, 1994.

Stöhr, Waldemar, dan Piet Zoetmulder. *Die Religionen Indonesiens.* Stuttgart, dll.: W. Kohlhammer Verlag, 1965.

——- dan ——- *Les religions d'Indonésie.* Penj. L. Jospin. Paris: Payot, 1968.

Stoler, Ann Laura. *Capitalism and confrontation in Sumatra's plantation belt, 1870–1979.* New Haven dan London: Yale University Press, 1985.

Subagya, Rahmat [nama pena dari Jan Bakker]. *Kepercayaan, kebatinan, kerohanian, kejiwaan dan agama.* [Yogyakarta:] Kanisius [1976].

Subrahmanyam, Sanjay. *The Portuguese empire in Asia, 1500–1700: apolitical and economic history.* London dan New York: Longman, 1993.

Sudjoko Prasodjo *et al. Profil pesantren: laporan hasil penelitian pesantren al-Falak dan delapan pesantren lain di Bogor.* [Jakarta:] Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial [1975].

Su karno. *Sukarno: an autobiography as told to Cindy Adams.* Hong Kong: Gunung Agung, 1966.

[Sulendraningrat, P.S.] *Purwaka Tjaruban Nagari.* Djakarta: Bhratara 1972.

Sundhaussen, Ulf. *The road to power: Indonesian military politics 1945–1967.* Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982.

Surjomihardjo, Abdurrachman. "An analysis of Suwardi Surjaningrat's ideals and national-revolutionary actions (1913–1922)". *MIISI* vol. 2, no. 3 (1964), hal. 371–406.

——— *Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam sejarah Indonesia modern.* Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1986.

——-- "National education in a colonial society", hal. 277–306 dalam Soebadio dan Sarvaas (ed.), *Dynamics of Indonesian history* (lihat di atas).

Suryadinata, Leo. "Indonesia–China relations: a recent breakthrough". *AS* vol. 30, no. 7 (July 1990), hal. 682–96.

——— *Peranakan Chinese politics in Java, 1917–1942.* Edisi revisi. Singapore: Singapore University Press, 1981.

Sutarman Soediman Partonadi. *Sadrach's community and its contextual roots: a nineteenth century Javanese expression of Christianity.* Amsterdam dan Atlanta: Rodopi, 1990.

Sutherland, Heather. *The making of a bureaucratic elite: the colonial transformation of the Javanese priyayi.* Singapore, dll.: Heinemann Educational (Asia), 1979.

——-- "Notes on Java's regent families". *Indonesia* no. 16 (Okt. 1973), hal. 113–47; no. 17 (Apr. 1974), hal. 1–42.

——-- "Pudjangga Baru: aspects of Indonesian intellectual life in the 1930s". *Indonesia* no. 6 (Okt. 1968), hal. 106–27.

Sutter, John O. *Indonesianisasi: politics in a changing economy, 1940–1955.* 4 jld. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Data Paper no. 36, 1959.

Swellengrebel, J.L. *In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw Bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen.* 2 jld. *VKI* vol. 68, 82. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1974,1978.

Swift, Ann. *The road to Madiun: the Indonesian Communist uprising of 1948.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1989.

Talens, Johan. *Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater: staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600–1750).* Hilversum: Verloren, 1999.

Tanter, Richard, dan Kenneth Young (ed.). *The politics of middle class Indonesia.* Monash Papers on Southeast Asia no. 19. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990.

Taylor, Alastair M. *Indonesian independence and the United Nations.* Ithaca: Cornell University Press, 1960.

Taylor, Jay. *China and Southeast Asia: Peking's relations with revolutionary movements.* Edisi revisi. New York: Praeger, 1976.

Taylor, Jean Gelman. *The social world of Batavia: European and Eurasian in Dutch Asia.* Madison: University of Wisconsin Press, 1983.

Teeuw, A. "The impact of Balai Pustaka on modern Indonesian literature". *BSOAS* vol. 35, bag. 1 (1972), hal. 111–27.

——— *Modern Indonesian literature.* Edisi ke-2. 2 jld. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979.

——-- dibantu oleh H.W. Emanuels. *A critical survey of studies on Malay and Bahasa Indonesia.* 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1961.

Tichelman, F. (ed.). *Socialisme in Indonesië: de Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, 1897–1917,* vol. I. Dordrecht and Cinnaminson: Foris, 1985.

Tiele, P.A. "De Europeërs in den Maleischen archipel". *BKI* vol. 25 (1877), hal. 321420; vol. 27 (1879), hal. 1–69; vol. 28 (1880), hal. 260–340, 395–482; vol. 29 (1881), hal. 153–214, 332; vol. 30 (1882), hal. 141–242; vol. 32 (1884), hal. 49–118; vol. 35 (1886), hal. 257–355; vol. 36 (1887), hal. 199–307.

Tollenaere, H.A.O. de. *The politics of divine wisdom: Theosophy and labour, national and women's movements in Indonesia and South Asia, 1875–1947.* Nijmegen: Uitgeverij Katholieke Universiteit Nijmegen, 1996.

Touwen-Bouwsma, Elly. "The Dutch, the Indonesian republicans and the Negara Madura, 1945–1950", hal. 71–90 dalam Kees van Dijk, Huub de Jonge dan Elly Touwen-Bouwsma (ed.). *Across Madura Strait: the dynamics of an insular society.* Leiden: KITLV, 1995.

Uhlenbeck, E.M. *A critical survey of studies on the languages of Java and Madura.* 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1964.

Utrecht, E. *Sedjarah hukum internasional di Bali dan Lombok (Pertjobaan sebuah studi hukum internasional regional di Indonesia).* [Bandung:] Sumur Bandung, 1962.

Van Niel, Robert. *The emergence of the modern Indonesian elite.* Den Haag dan Bandung: W. van Hoeve, 1960.

——-- "The function of landrent under the cultivation system in Java". *JAS* vol. 23, no. 3 (May 1964), hal. 357–75.

——-- "Measurement of change under the cultivation system in Java, 1837–1851". *Indonesia* no. 14 (Okt. 1972), hal. 89–109.

Veer, Paul van't. *De Atjeh-oorlog.* Amsterdam: Uitgeverij de Arbeiderspers, 1969.

Vermeulen, J.Th. *De Chineezen te Batavia en de troebelen van 1740.* Leiden: N.V. Boeken Steendrukkerij Eduard Ijdo 1938.

Veth, P.J. *Java: geographisch, ethnologisch, historisch.* 3 jld. Haarlem: Erven F. Bohn, 1875–82.

Vickers, Adrian. *Bali: a paradise created.* Ringwood, Vic. dll.: Penguin, 1989.

Villiers, John. "Trade and society in the Banda islands in the sixteenth century". *MAS* vol. 15, no. 4 (1981), hal. 723–50.

Vos, Reinout. *Gentle Janus, merchant prince: the VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world, 1740–1800.* Penj. Beverley Jackson. *VKI* vol. 157. Leiden: KITLV, 1993.

Wake, Christopher. "Malacca's early kings and the reception of Islam". *JSEAH* vol. 5, no. 2 (Sept. 1964), hal. 104–28.

Wang Gungwu. "The first three rulers of Malacca", hal. *97–107* dalam Wang Gungwu, *Community and nation: essays on Southeast Asia and the Chinese.* Singapore dan North Sydney: Heinemann Educational (Asia) dan George Allen & Unwin Australia, 1981. Pertama kali diterbitkan dalam *JMBRAS* vol. 41, bag. 1 (1968), hal. 11–22.

Ward, K. E. *The foundation of the Partai Muslimin Indonesia.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Interim Report Series, 1970.

——— *The 1971 election in Indonesia: an East Java case study* [Clayton, Vic:] Monash University Centre of Southeast Asian Studies Papers on Southeast Asia no. 2, 1974.

Waseda University, Okuma Memorial Social Sciences Research Institute. *Japanese military administration in Indonesia.* Washington, DC: US Department of Commerce, Office of Technical Services, joint Publications Research Service, 1963. Terjemahan dari *Indonesia ni Okeru Nihon Gunsei no Kenkyu.* Tokyo: Kinokuniya Shoten, 1959.

Webb, R.A.F. Paul. "The sickle and the cross: Christians and Communists in Bali, Flores, Sumba and Timor, 1965–67". *JSEAS* vol. 17, no. 1 (Mar. 1986), hal. 94–112.

Weinstein, Franklin B. *Indonesia abandons confrontation: an inquiry into the functions of Indonesian foreign policy.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Interim Reports Series, 1969.

——— *Indonesian foreign policy and the dilemma of dependence: from Sukarno to Soeharto.* Ithaca dan London: Cornell University Press, 1976.

Widjil Pangarsa, Galih. "Les mosquées de Lombok, évolution architecturale et diffusion de l'Islam". *Archipel* no. 44 (1992), hal. 75–93.

Widjojo Nitisastro. *Population trends in Indonesia.* Ithaca dan London: Cornell University Press, 1970.

Wiener, Margaret J. *Visible and invisible realms: power, magic and colonial conquest in Bali.* Chicago dan London: University of Chicago Press, 1995.

Wigboldus, Jouke S. "A history of the Minahasa c. 1615–1680". *Archipel* no. 34 (1987), hal. 63–101.

Williams, Michael Charles. *Communism religion and revolt in Banten.* Athens, Ohio: Ohio University Centre for International Studies Monographs in International Studies, Southeast Asia Series no. 86, 1990.

——— *Sickle and crescent: the Communist revolt of 1926 in Banten.* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series no. 61, 1982.

Winstedt, Richard. *A history of classical Malay literature.* Kuala Lumpur, dll.: Oxford University Press, 1969. Cetak ulang dari edisi revisi yang diterbitkan pertama kali dalam *JMBRAS* vol. 31, bag. 3 (1958; tapi diterbitkan pada 1961).

Wiselius, J.A.B. "Djåjå Båjå, zijn leven en profetieën". *BKI* vol. 19 (1872), hal. 172–217.

Woelders, M.O. *Het Sultanaat Palembang, 1811–1825. VKI* vol. 72. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1975.

Wolters, O.W. *Early Indonesian commerce: a study of the origins of Srivijaya.* Ithaca: Cornell University Press, 1967.

——— *The fall of Srivijaya in Malay history.* Ithaca: Cornell University Press, 1970.

Wong, John. *ASEAN economies in perspective: a comparative study of Indonesia, Malaya, the Philippines, Singapore, and Thailand.* London dan Basingstoke: Macmillan (sekarang Palgrave), 1979.

Worsley, Peter John (ed. & penj.). *Babad Buleleng: a Balinese dynastic genealogy.* 's-Gravenhage: H.L. Smits; Den Haag: Martinus Nijhoff, 1972.

Wright, H.R.C. *East-Indian economic problems of the age of Cornwallis and Raffles.* London: Luzac, 1961.

Yong Mun Cheong. *H. J. van Mook and Indonesian independence: a study of his role in Dutch–Indonesian Relations, 1945–48.* Den Haag: Martinus Nijhoff 1982.

Young, Kenneth R. "Transformation or temporary respite? Agricultural growth, industrialisation and the modernisation of Java". *RIMA* vol. 22, no. 2 (Summer, 1988), hal. 114–32.

Zoetmulder, P.J. *Kalangwan: a survey of Old Javanese literature.* Den Haag: Martinus Nijhoff, 1974.

——— *Manunggaling kawula gusti. Pantheïsme dan monisme dalam sastra suluk Jawa: suatu studi filsafat.* Penj. Dick Hartoko. Jakarta: Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Penerbit PT Gramedia, 1990.

——— *Pantheism and monism in Javanese suluk literature: Islamic and Indian mysticism in an Indonesian setting.* Ed. & penj. M.C. Ricklefs. KITLV Translation Series 24. Leiden: KITLV, 1995.

——— *Pantheisme en monisme in de Javaansche soeloek-litteratuur.* Nijmegen: J.J. Berkhout, 1935.

Indeks

Resume paling lama saat ujian

(3) Soal esay

1
2
3
4
5
6